PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR .1. TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, dan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);

e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp3.712.434.360.163,46
b.	Belanja	Rp3.715.604.258.925,54
c.	Surplus/(defisit)	Rp (3.169.898.762,08)
	-Penerimaan	Rp 27.291.476.128,01
	-Pengeluaran	Rp 5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp 22.291.476.128,01
d.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	
	Surplus/(defisit)	Rp (3.169.898.762,08)
	Pembiayaan Netto	Rp 22.291.476.128,01
		Rp 19.121.577.365,93

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah Rp(197.780.586.298,97) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi	Rp3.712.434.360.163,46
b.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.910.214.946.462,43
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (197.780.586.298,97)

(2) Selisih realisasi dengan anggaran belanja sejumlah Rp(216.896.891.974,90) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi	Rp3.715.604.258.925,54
b.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp3.932.501.110.900,44
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (216.896.851.974,90)

(3) Selisih realisasi dengan anggaran surplus/(defisit) sejumlah Rp19.116.265.675,93 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi	Rp (3.169.898.762,08)
b.	Anggaran Surplus/ (defisit)	
	Setelah perubahan	Rp (22.286.164.438,01)
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 19.116.265.675,93

(4) Selisih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5.311.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi	Rp 27.291.476.128,01
b.	Anggaran penerimaan pembiayaan	
	Setelah perubahan	Rp 27.286.164.438,01
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 5.311.690,00

(5) Selisih realisasi dengan anggaran pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi	Rp 5.000.000.000,00
b.	Anggaran pengeluaran pembiayaan	
	Setelah perubahan	Rp 5.000.000.000,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00

(6) Selisih realisasi dengan anggaran pembiayaan netto sejumlah Rp5.311.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi	Rp 22.291.476.128,01

b.	Anggaran pengeluaran pembiayaan		
	Setelah perubahan	Rp	22.286.164.438,01
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	5.311.690,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2025 adalah:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	27.286.164.438,01
	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	27.208.640.128,01
	Sub Total	Rp	77.524.310,00
b.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	19.121.577.365,93
c.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(77.524.310,00)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	19.121.577.365,93

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2025 adalah:

a.	Jumlah aset	Rp6.815.191.552.141,75
b.	Jumlah kewajiban	Rp 409.238.846.679,17
c.	Jumlah ekuitas	Rp6.405.952.705.462,58

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp	3.821.021.620.282,91
b.	Beban	Rp	3.875.181.517.994,60
c.	Surplus/defisit Kegiatan Operasional	Rp	(54.159.897.711,69)
d.	Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional	Rp	(18.275.061.807,00)
e.	Surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(72.434.959.518,69)
f.	Surplus/defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp	(0,00)
g.	Surplus/defisit–LO	Rp	(72.434.959.518,69)

Pasal 7

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo awal kas per 1 Januari 2025	Rp	27.810.220.201,59
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	175.830.014.060,91
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(184.603.529.192,16)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	82.836.000,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(255.516.356,62)
f.	Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp	0,00
g.	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp	311.609.541,00
h.	Saldo akhir kas di BLUD	Rp	2.499.584.868,03
i.	Saldo akhir kas di Bendahara BOS	Rp	1.986.989.519,00
j.	Saldo akhir kas lainnya	Rp	201.711.431,00
k.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2025	Rp	19.356.640.775,93

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp6.454.280.263.239,55
Surplus/Defisit-LO	Rp (72.434.959.518,69)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp 136.050.877,00
- Lain-lain	Rp 23.971.350.864,72
Ekuitas Akhir	Rp6.405.952.705.462,58

Pasal 9

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
	Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
Lampiran XX.1 : Iktisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 : Iktisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 September 2026
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 September 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto.

MISNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026 NOMOR 1..
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 1-148/2026

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.910.214.946.462,43**	**3.712.434.360.163,46**	**94,94**	**3.958.295.361.262,68**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.904.763.732.160,43**	**1.736.336.133.204,89**	**91,15**	**1.980.461.763.464,68**
4.1.01	Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
4.1.02	Retribusi Daerah	168.940.551.756,24	171.517.367.082,00	101,52	148.286.242.017,30
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40	1.904.909.335,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.484.556.088,19	115.258.171.423,39	99,80	52.566.226.972,38
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.904.763.732.160,43**	**1.736.336.133.204,89**	**91,15**	**1.980.461.763.464,68**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**	**1.976.533.066.207,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**	**1.976.533.066.207,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**	**1.300.531.591,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85	1.300.531.591,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**	**1.300.531.591,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.910.214.946.462,43**	**3.712.434.360.163,46**	**94,94**	**3.958.295.361.262,68**
5	**BELANJA DAERAH**	**3.932.501.110.900,44**	**3.715.604.258.925,54**	**94,48**	**4.071.747.457.825,29**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.944.090.151.988,51**	**2.779.255.950.571,38**	**94,40**	**2.987.193.758.080,43**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.468.712.653.029,50	1.448.897.643.513,04	98,65	1.309.833.869.704,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.294.788.524.618,62	1.161.921.240.159,38	89,73	1.311.138.772.714,16
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00
5.1.05	Belanja Hibah	174.868.035.279,01	165.767.273.907,96	94,79	357.581.329.209,27
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,23	4.002.925.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.944.090.151.988,51**	**2.779.255.950.571,38**	**94,40**	**2.987.193.758.080,43**
5.2	**BELANJA MODAL**	**269.313.511.475,33**	**232.159.877.710,16**	**86,20**	**307.344.075.589,86**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.735.653.121,33	81.499.424.632,00	91,84	115.508.155.838,84
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.492.416.281,00	80.799.961.394,06	85,50	129.103.961.833,55
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.989.061.381,00	46.310.371.998,10	74,70	36.791.762.576,47
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.970.627.692,00	21.957.775.186,00	99,94	19.630.419.447,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.125.753.000,00	600.244.500,00	53,31	5.389.675.894,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**269.313.511.475,33**	**232.159.877.710,16**	**86,20**	**307.344.075.589,86**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.281.396.903,60**	**0,00**	**0,00**	**2.065.423.140,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.281.396.903,60**	**0,00**	**0,00**	**2.065.423.140,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**	**98,23**	**775.144.201.015,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89	748.291.201.015,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00	73,08	26.853.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**	**98,23**	**775.144.201.015,00**
	JUMLAH BELANJA	**3.932.501.110.900,44**	**3.715.604.258.925,54**	**94,48**	**4.071.747.457.825,29**
	SURPLUS/DEFISIT	**(22.286.164.438,01)**	**(3.169.898.762,08)**	**14,22**	**(113.452.096.562,61)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**22.286.164.438,01**	**22.291.476.128,01**	**100,02**	**140.738.261.000,62**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**27.286.164.438,01**	**27.291.476.128,01**	**100,01**	**232.684.048.633,62**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.286.164.438,01	27.208.640.128,01	99,71	232.583.164.925,62
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	82.836.000,00	0,00	100.883.708,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**27.286.164.438,01**	**27.291.476.128,01**	**100,01**	**232.684.048.633,62**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**	**91.945.787.633,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	91.945.787.633,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**	**91.945.787.633,00**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	PEMBIAYAAN NETTO	**22.286.164.438,01**	**22.291.476.128,01**	**100,02**	**140.738.261.000,62**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**19.121.577.365,93**	**0,00**	**27.286.164.438,01**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN I.1

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	3.910.214.946.462,43	3.712.434.360.163,46	(197.780.586.298,97)	94,94
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	169.667.392.499,00	170.204.845.951,57	537.453.452,57	100,32
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	120.000.000,00	4.150.000,00	(115.850.000,00)	3,46
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.670.864.500,00	4.112.914.995,00	(1.557.949.505,00)	72,53
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.501.527.999,00	165.557.111.956,57	2.055.583.957,57	101,26
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	140.001.527.999,00	144.774.215.484,57	4.772.687.485,57	103,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	140.001.527.999,00	144.774.215.484,57	4.772.687.485,57	103,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.001.527.999,00	144.774.215.484,57	4.772.687.485,57	103,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	139.172.026.866,00	143.676.589.791,00	4.504.562.925,00	103,24
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	829.501.133,00	1.097.625.693,57	268.124.560,57	132,32
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	23.500.000.000,00	20.782.896.472,00	(2.717.103.528,00)	88,44
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	23.500.000.000,00	20.782.896.472,00	(2.717.103.528,00)	88,44
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.500.000.000,00	20.782.896.472,00	(2.717.103.528,00)	88,44
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	23.500.000.000,00	20.664.995.452,00	(2.835.004.548,00)	87,94
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	117.901.020,00	117.901.020,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.516.431.893,24	4.414.762.602,00	898.330.708,76	125,55
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,26
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,26
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,26
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,26
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	131.350.000,00	245.715.440,00	114.365.440,00	187,07
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	250.393,00	250.393,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.883.983.725,24	2.237.394.264,00	353.410.538,76	118,76
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.098.168,00	35.269.505,00	34.171.337,00	3.211,67
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.021.079.565,00	878.508.535,00	(142.571.030,00)	86,04
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	836.000.000,00	778.060.135,00	(57.939.865,00)	93,07
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.448.400,00	100.448.400,00	0,00	100,00
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.736.010.042.505,19	3.536.936.243.074,89	(199.073.799.430,30)	94,67
5.02			KEUANGAN	3.736.010.042.505,19	3.536.936.243.074,89	(199.073.799.430,30)	94,67
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.087.653.025.476,98	2.062.440.913.752,11	(25.212.111.724,87)	98,79
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.087.653.025.476,98	2.062.440.913.752,11	(25.212.111.724,87)	98,79
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.525.913.674,98	87.637.390.793,54	4.111.477.118,56	104,92
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.284.580.000,00	1.430.680.000,00	146.100.000,00	111,37

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**3.100.000.000,00**	**2.275.536.541,00**	**(824.463.459,00)**	**73,40**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**79.141.333.674,98**	**83.931.174.252,54**	**4.789.840.577,56**	**106,05**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**(29.827.728.778,00)**	**98,51**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**(29.827.728.778,00)**	**98,51**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**504.139.934,57**	**504.139.934,57**	**0,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**0,00**	**504.139.934,57**	**504.139.934,57**	**0,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		**Badan Pendapatan Daerah**	**1.648.357.017.028,21**	**1.474.491.221.665,62**	**(173.865.795.362,59)**	**89,45**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.648.357.017.028,21**	**1.474.491.221.665,62**	**(173.865.795.362,59)**	**89,45**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.647.032.914.528,21**	**1.473.196.517.665,62**	**(173.836.396.862,59)**	**89,45**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1.01	**Pajak Daerah**	**1.617.238.624.316,00**	**1.447.285.058.158,50**	**(169.953.566.157,50)**	**89,49**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1.02	**Retribusi Daerah**	**52.980.000,00**	**52.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**29.741.310.212,21**	**25.858.479.507,12**	**(3.882.830.705,09)**	**86,94**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.324.102.500,00**	**1.294.704.000,00**	**(29.398.500,00)**	**97,78**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**1.324.102.500,00**	**1.294.704.000,00**	**(29.398.500,00)**	**97,78**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001		**UPT Dana Bergulir**	**0,00**	**4.107.657,16**	**4.107.657,16**	**0,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**0,00**	**4.107.657,16**	**4.107.657,16**	**0,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**0,00**	**4.107.657,16**	**4.107.657,16**	**0,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**0,00**	**4.107.657,16**	**4.107.657,16**	**0,00**
		5	**Belanja**	**3.932.501.110.900,44**	**3.715.604.258.925,54**	**(216.896.851.974,90)**	**94,48**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.952.262.618.421,84**	**1.830.871.466.367,52**	**(121.391.152.054,32)**	**93,78**
1.01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.031.118.270.120,30**	**997.834.211.343,38**	**(33.284.058.776,92)**	**96,77**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		**Dinas Pendidikan**	**1.029.314.069.493,50**	**996.378.647.544,52**	**(32.935.421.948,98)**	**96,80**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**1.029.314.069.493,50**	**996.378.647.544,52**	**(32.935.421.948,98)**	**96,80**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**942.643.690.564,17**	**919.338.372.032,51**	**(23.305.318.531,66)**	**97,53**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**635.471.965.377,78**	**626.966.334.306,00**	**(8.505.631.071,78)**	**98,66**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**258.215.985.186,39**	**243.914.994.371,51**	**(14.300.990.814,88)**	**94,46**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**48.955.740.000,00**	**48.457.043.355,00**	**(498.696.645,00)**	**98,98**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**86.670.378.929,33**	**77.040.275.512,01**	**(9.630.103.417,32)**	**88,89**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**35.383.510.643,33**	**33.117.961.683,00**	**(2.265.548.960,33)**	**93,60**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**29.711.790.594,00**	**22.250.466.178,01**	**(7.461.324.415,99)**	**74,89**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**21.575.077.692,00**	**21.671.847.651,00**	**96.769.959,00**	**100,45**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001		**BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN**	**1.486.232.818,80**	**1.300.289.250,86**	**(185.943.567,94)**	**87,49**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5	**BELANJA DAERAH**	**1.486.232.818,80**	**1.300.289.250,86**	**(185.943.567,94)**	**87,49**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.363.766.618,80**	**1.223.213.450,86**	**(140.553.167,94)**	**89,69**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.363.766.618,80**	**1.223.213.450,86**	**(140.553.167,94)**	**89,69**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.2	**BELANJA MODAL**	**122.466.200,00**	**77.075.800,00**	**(45.390.400,00)**	**62,94**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**122.466.200,00**	**77.075.800,00**	**(45.390.400,00)**	**62,94**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002		**CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**	**70.658.108,00**	**63.868.551,00**	**(6.789.557,00)**	**90,39**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	5	**BELANJA DAERAH**	**70.658.108,00**	**63.868.551,00**	**(6.789.557,00)**	**90,39**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	**BELANJA OPERASI**	**70.658.108,00**	**63.868.551,00**	**(6.789.557,00)**	**90,39**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**70.658.108,00**	**63.868.551,00**	**(6.789.557,00)**	**90,39**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003		**CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN**	**66.177.200,00**	**27.599.000,00**	**(38.578.200,00)**	**41,70**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	5	**BELANJA DAERAH**	**66.177.200,00**	**27.599.000,00**	**(38.578.200,00)**	**41,70**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	5.1	**BELANJA OPERASI**	**66.177.200,00**	**27.599.000,00**	**(38.578.200,00)**	**41,70**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**66.177.200,00**	**27.599.000,00**	**(38.578.200,00)**	**41,70**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004		**CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA**	**61.460.000,00**	**32.131.000,00**	**(29.329.000,00)**	**52,28**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	5	**BELANJA DAERAH**	**61.460.000,00**	**32.131.000,00**	**(29.329.000,00)**	**52,28**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	5.1	**BELANJA OPERASI**	**60.807.900,00**	**32.131.000,00**	**(28.676.900,00)**	**52,84**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**60.807.900,00**	**32.131.000,00**	**(28.676.900,00)**	**52,84**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	5.2	**BELANJA MODAL**	**652.100,00**	**0,00**	**(652.100,00)**	**0,00**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**652.100,00**	**0,00**	**(652.100,00)**	**0,00**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005		**CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA**	**61.798.500,00**	**21.797.597,00**	**(40.000.903,00)**	**35,27**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	5	**BELANJA DAERAH**	**61.798.500,00**	**21.797.597,00**	**(40.000.903,00)**	**35,27**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	5.1	**BELANJA OPERASI**	**61.136.100,00**	**21.797.597,00**	**(39.338.503,00)**	**35,65**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**61.136.100,00**	**21.797.597,00**	**(39.338.503,00)**	**35,65**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	5.2	**BELANJA MODAL**	**662.400,00**	**0,00**	**(662.400,00)**	**0,00**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**662.400,00**	**0,00**	**(662.400,00)**	**0,00**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006		**CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS**	**57.874.000,00**	**9.878.400,00**	**(47.995.600,00)**	**17,07**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	5	**BELANJA DAERAH**	**57.874.000,00**	**9.878.400,00**	**(47.995.600,00)**	**17,07**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	5.1	**BELANJA OPERASI**	**57.874.000,00**	**9.878.400,00**	**(47.995.600,00)**	**17,07**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**57.874.000,00**	**9.878.400,00**	**(47.995.600,00)**	**17,07**
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**510.494.769.886,54**	**493.176.277.553,18**	**(17.318.492.333,36)**	**96,61**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		**Dinas Kesehatan**	**90.194.025.364,54**	**83.968.182.079,00**	**(6.225.843.285,54)**	**93,10**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**90.194.025.364,54**	**83.968.182.079,00**	**(6.225.843.285,54)**	**93,10**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**71.203.468.664,54**	**65.396.284.640,00**	**(5.807.184.024,54)**	**91,84**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**22.368.648.340,00**	**22.202.635.160,00**	**(166.013.180,00)**	**99,26**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**46.550.398.764,54**	**40.919.557.460,00**	**(5.630.841.304,54)**	**87,90**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**2.284.421.560,00**	**2.274.092.020,00**	**(10.329.540,00)**	**99,55**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**18.990.556.700,00**	**18.571.897.439,00**	**(418.659.261,00)**	**97,80**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**295.247.300,00**	**244.821.199,00**	**(50.426.101,00)**	**82,92**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**18.025.309.400,00**	**17.658.576.240,00**	**(366.733.160,00)**	**97,97**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**670.000.000,00**	**668.500.000,00**	**(1.500.000,00)**	**99,78**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		**Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib**	**266.643.813.304,00**	**262.650.041.010,93**	**(3.993.772.293,07)**	**98,50**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5	**BELANJA DAERAH**	**266.643.813.304,00**	**262.650.041.010,93**	**(3.993.772.293,07)**	**98,50**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1	**BELANJA OPERASI**	**257.387.351.565,00**	**253.868.136.957,93**	**(3.519.214.607,07)**	**98,63**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**119.993.527.681,15**	**127.306.623.672,00**	**7.313.095.990,85**	**106,09**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**137.393.823.883,85**	**126.561.513.285,93**	**(10.832.310.597,92)**	**92,12**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2	**BELANJA MODAL**	**9.256.461.739,00**	**8.781.904.053,00**	**(474.557.686,00)**	**94,87**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**9.054.441.739,00**	**8.781.904.053,00**	**(272.537.686,00)**	**96,99**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**202.020.000,00**	**0,00**	**(202.020.000,00)**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		**Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud**	**146.827.835.328,00**	**140.443.480.779,00**	**(6.384.354.549,00)**	**95,65**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5	**BELANJA DAERAH**	**146.827.835.328,00**	**140.443.480.779,00**	**(6.384.354.549,00)**	**95,65**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1	**BELANJA OPERASI**	**89.356.447.778,00**	**85.610.362.979,00**	**(3.746.084.799,00)**	**95,81**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**57.190.195.189,00**	**55.672.115.260,00**	**(1.518.079.929,00)**	**97,35**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**32.166.252.589,00**	**29.938.247.719,00**	**(2.228.004.870,00)**	**93,07**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2	**BELANJA MODAL**	**57.471.387.550,00**	**54.833.117.800,00**	**(2.638.269.750,00)**	**95,41**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**15.807.087.550,00**	**15.248.853.800,00**	**(558.233.750,00)**	**96,47**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**34.495.700.000,00**	**32.941.640.000,00**	**(1.554.060.000,00)**	**95,49**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**6.168.600.000,00**	**6.163.040.000,00**	**(5.560.000,00)**	**99,91**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**1.000.000.000,00**	**479.584.000,00**	**(520.416.000,00)**	**47,96**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004		**UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)**	**6.829.095.890,00**	**6.114.573.684,25**	**(714.522.205,75)**	**89,54**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5	**BELANJA DAERAH**	**6.829.095.890,00**	**6.114.573.684,25**	**(714.522.205,75)**	**89,54**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.1	**BELANJA OPERASI**	**6.508.657.400,00**	**5.794.135.194,25**	**(714.522.205,75)**	**89,02**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.508.657.400,00**	**5.794.135.194,25**	**(714.522.205,75)**	**89,02**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.2	**BELANJA MODAL**	**320.438.490,00**	**320.438.490,00**	**0,00**	**100,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**77.799.500,00**	**77.799.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**242.638.990,00**	**242.638.990,00**	**0,00**	**100,00**
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**137.030.002.320,00**	**101.674.366.826,14**	**(35.355.635.493,86)**	**74,20**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**	**131.962.568.111,00**	**97.169.623.145,14**	**(34.792.944.965,86)**	**73,63**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**131.962.568.111,00**	**97.169.623.145,14**	**(34.792.944.965,86)**	**73,63**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**103.244.227.441,00**	**76.751.740.698,25**	**(26.492.486.742,75)**	**74,34**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**22.384.556.199,66**	**21.329.695.335,00**	**(1.054.860.864,66)**	**95,29**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**68.887.161.358,34**	**46.605.727.713,29**	**(22.281.433.645,05)**	**67,66**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**11.972.509.883,00**	**8.816.317.649,96**	**(3.156.192.233,04)**	**73,64**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**28.718.340.670,00**	**20.417.882.446,89**	**(8.300.458.223,11)**	**71,10**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**446.217.900,00**	**352.880.351,00**	**(93.337.549,00)**	**79,08**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**499.866.000,00**	**498.394.000,00**	**(1.472.000,00)**	**99,71**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**27.772.256.770,00**	**19.566.608.095,89**	**(8.205.648.674,11)**	**70,45**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002		**UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR**	**4.179.166.841,00**	**3.704.030.412,00**	**(475.136.429,00)**	**88,63**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5	**BELANJA DAERAH**	**4.179.166.841,00**	**3.704.030.412,00**	**(475.136.429,00)**	**88,63**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.467.014.341,00**	**2.016.798.538,00**	**(450.215.803,00)**	**81,75**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.467.014.341,00**	**2.016.798.538,00**	**(450.215.803,00)**	**81,75**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5.2	**BELANJA MODAL**	**1.712.152.500,00**	**1.687.231.874,00**	**(24.920.626,00)**	**98,54**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**1.712.152.500,00**	**1.687.231.874,00**	**(24.920.626,00)**	**98,54**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001		**UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN**	**888.267.368,00**	**800.713.269,00**	**(87.554.099,00)**	**90,14**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5	**BELANJA DAERAH**	**888.267.368,00**	**800.713.269,00**	**(87.554.099,00)**	**90,14**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5.1	**BELANJA OPERASI**	**880.794.668,00**	**793.278.269,00**	**(87.516.399,00)**	**90,06**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**880.794.668,00**	**793.278.269,00**	**(87.516.399,00)**	**90,06**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5.2	**BELANJA MODAL**	**7.472.700,00**	**7.435.000,00**	**(37.700,00)**	**99,50**
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**7.472.700,00**	**7.435.000,00**	**(37.700,00)**	**99,50**
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**216.020.164.204,00**	**183.780.153.764,82**	**(32.240.010.439,18)**	**85,08**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000		**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**216.020.164.204,00**	**183.780.153.764,82**	**(32.240.010.439,18)**	**85,08**
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**216.020.164.204,00**	**183.780.153.764,82**	**(32.240.010.439,18)**	**85,08**
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**212.723.271.104,00**	**181.560.380.352,82**	**(31.162.890.751,18)**	**85,35**
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**8.922.586.924,30**	**8.744.445.455,00**	**(178.141.469,30)**	**98,00**
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**203.800.684.179,70**	**172.815.934.897,82**	**(30.984.749.281,88)**	**84,80**
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**3.296.893.100,00**	**2.219.773.412,00**	**(1.077.119.688,00)**	**67,33**
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**1.947.612.360,00**	**1.800.833.712,00**	**(146.778.648,00)**	**92,46**
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**1.349.280.740,00**	**418.939.700,00**	**(930.341.040,00)**	**31,05**
1.05			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**34.886.351.384,00**	**33.794.409.980,00**	**(1.091.941.404,00)**	**96,87**
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		**Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran**	**25.677.685.026,00**	**24.832.206.577,00**	**(845.478.449,00)**	**96,71**
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**25.677.685.026,00**	**24.832.206.577,00**	**(845.478.449,00)**	**96,71**
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**25.282.039.326,00**	**24.462.373.577,00**	**(819.665.749,00)**	**96,76**
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**16.767.601.135,00**	**16.545.804.796,00**	**(221.796.339,00)**	**98,68**
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.514.438.191,00**	**7.916.568.781,00**	**(597.869.410,00)**	**92,98**
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**395.645.700,00**	**369.833.000,00**	**(25.812.700,00)**	**93,48**
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**395.645.700,00**	**369.833.000,00**	**(25.812.700,00)**	**93,48**
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**9.208.666.358,00**	**8.962.203.403,00**	**(246.462.955,00)**	**97,32**
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**9.208.666.358,00**	**8.962.203.403,00**	**(246.462.955,00)**	**97,32**
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.160.501.253,40**	**8.914.539.904,00**	**(245.961.349,40)**	**97,31**
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**6.645.037.966,00**	**6.570.064.080,00**	**(74.973.886,00)**	**98,87**
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.515.463.287,40**	**2.344.475.824,00**	**(170.987.463,40)**	**93,20**
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**48.165.104,60**	**47.663.499,00**	**(501.605,60)**	**98,96**
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**48.165.104,60**	**47.663.499,00**	**(501.605,60)**	**98,96**
1.06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**22.713.060.507,00**	**20.612.046.900,00**	**(2.101.013.607,00)**	**90,75**
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000		**Dinas Sosial**	**22.713.060.507,00**	**20.612.046.900,00**	**(2.101.013.607,00)**	**90,75**
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**22.713.060.507,00**	**20.612.046.900,00**	**(2.101.013.607,00)**	**90,75**
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**22.375.289.665,00**	**20.291.157.330,00**	**(2.084.132.335,00)**	**90,69**
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**10.377.665.432,00**	**9.893.796.469,00**	**(483.868.963,00)**	**95,34**
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.686.179.233,00**	**8.107.420.861,00**	**(578.758.372,00)**	**93,34**
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**455.000.000,00**	**455.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	**2.856.445.000,00**	**1.834.940.000,00**	**(1.021.505.000,00)**	**64,24**
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**337.770.842,00**	**320.889.570,00**	**(16.881.272,00)**	**95,00**
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**337.770.842,00**	**320.889.570,00**	**(16.881.272,00)**	**95,00**
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**331.518.291.825,79**	**302.656.927.957,92**	**(28.861.363.867,87)**	**91,29**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**37.958.769.556,00**	**36.165.860.057,26**	**(1.792.909.498,74)**	**95,28**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**	**32.012.474.766,00**	**30.696.103.105,26**	**(1.316.371.660,74)**	**95,89**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**32.012.474.766,00**	**30.696.103.105,26**	**(1.316.371.660,74)**	**95,89**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**31.676.204.366,00**	**30.478.585.654,26**	**(1.197.618.711,74)**	**96,22**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**25.696.580.342,00**	**25.019.956.534,00**	**(676.623.808,00)**	**97,37**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.979.624.024,00**	**5.458.629.120,26**	**(520.994.903,74)**	**91,29**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**336.270.400,00**	**217.517.451,00**	**(118.752.949,00)**	**64,69**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**336.270.400,00**	**217.517.451,00**	**(118.752.949,00)**	**64,69**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002		**UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau**	**5.371.959.410,00**	**4.984.411.831,00**	**(387.547.579,00)**	**92,79**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5	**BELANJA DAERAH**	**5.371.959.410,00**	**4.984.411.831,00**	**(387.547.579,00)**	**92,79**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.359.176.157,00**	**4.035.005.382,00**	**(324.170.775,00)**	**92,56**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.359.176.157,00**	**4.035.005.382,00**	**(324.170.775,00)**	**92,56**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5.2	**BELANJA MODAL**	**1.012.783.253,00**	**949.406.449,00**	**(63.376.804,00)**	**93,74**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**1.012.783.253,00**	**949.406.449,00**	**(63.376.804,00)**	**93,74**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003		**UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun**	**40.331.230,00**	**36.760.966,00**	**(3.570.264,00)**	**91,15**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	5	**BELANJA DAERAH**	**40.331.230,00**	**36.760.966,00**	**(3.570.264,00)**	**91,15**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	5.1	**BELANJA OPERASI**	**40.331.230,00**	**36.760.966,00**	**(3.570.264,00)**	**91,15**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**40.331.230,00**	**36.760.966,00**	**(3.570.264,00)**	**91,15**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001		**UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam**	**534.004.150,00**	**448.584.155,00**	**(85.419.995,00)**	**84,00**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5	**BELANJA DAERAH**	**534.004.150,00**	**448.584.155,00**	**(85.419.995,00)**	**84,00**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5.1	**BELANJA OPERASI**	**367.795.950,00**	**333.379.155,00**	**(34.416.795,00)**	**90,64**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**367.795.950,00**	**333.379.155,00**	**(34.416.795,00)**	**90,64**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5.2	**BELANJA MODAL**	**166.208.200,00**	**115.205.000,00**	**(51.003.200,00)**	**69,31**
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**166.208.200,00**	**115.205.000,00**	**(51.003.200,00)**	**69,31**
2.08			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**21.900.477.218,00**	**20.199.282.663,00**	**(1.701.194.555,00)**	**92,23**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**16.853.149.770,00**	**15.822.657.174,00**	**(1.030.492.596,00)**	**93,89**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**16.853.149.770,00**	**15.822.657.174,00**	**(1.030.492.596,00)**	**93,89**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**16.731.892.970,00**	**15.702.259.974,00**	**(1.029.632.996,00)**	**93,85**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**9.655.029.885,00**	**9.394.909.840,00**	**(260.120.045,00)**	**97,31**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.076.863.085,00**	**6.307.350.134,00**	**(769.512.951,00)**	**89,13**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**121.256.800,00**	**120.397.200,00**	**(859.600,00)**	**99,29**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**121.256.800,00**	**120.397.200,00**	**(859.600,00)**	**99,29**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001		**UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**	**5.047.327.448,00**	**4.376.625.489,00**	**(670.701.959,00)**	**86,71**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5	**BELANJA DAERAH**	**5.047.327.448,00**	**4.376.625.489,00**	**(670.701.959,00)**	**86,71**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5.1	**BELANJA OPERASI**	**926.697.366,00**	**839.156.399,00**	**(87.540.967,00)**	**90,55**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**926.697.366,00**	**839.156.399,00**	**(87.540.967,00)**	**90,55**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5.2	**BELANJA MODAL**	**4.120.630.082,00**	**3.537.469.090,00**	**(583.160.992,00)**	**85,85**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**226.826.975,00**	**202.315.090,00**	**(24.511.885,00)**	**89,19**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**3.888.253.107,00**	**3.330.159.000,00**	**(558.094.107,00)**	**85,65**
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**5.550.000,00**	**4.995.000,00**	**(555.000,00)**	**90,00**
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**26.263.998.288,02**	**24.752.290.564,00**	**(1.511.707.724,02)**	**94,24**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**	**25.596.672.767,98**	**24.111.486.206,00**	**(1.485.186.561,98)**	**94,20**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**25.596.672.767,98**	**24.111.486.206,00**	**(1.485.186.561,98)**	**94,20**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**24.763.288.797,98**	**23.439.789.445,00**	**(1.323.499.352,98)**	**94,66**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**19.161.593.111,74**	**18.727.684.450,00**	**(433.908.661,74)**	**97,74**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.601.695.686,24**	**4.712.104.995,00**	**(889.590.691,24)**	**84,12**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**833.383.970,00**	**671.696.761,00**	**(161.687.209,00)**	**80,60**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**833.383.970,00**	**671.696.761,00**	**(161.687.209,00)**	**80,60**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002		**UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan**	**316.666.078,00**	**306.974.039,00**	**(9.692.039,00)**	**96,94**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	5	**BELANJA DAERAH**	**316.666.078,00**	**306.974.039,00**	**(9.692.039,00)**	**96,94**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	5.1	**BELANJA OPERASI**	**316.666.078,00**	**306.974.039,00**	**(9.692.039,00)**	**96,94**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**316.666.078,00**	**306.974.039,00**	**(9.692.039,00)**	**96,94**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001		**UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)**	**350.659.442,04**	**333.830.319,00**	**(16.829.123,04)**	**95,20**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	5	**BELANJA DAERAH**	**350.659.442,04**	**333.830.319,00**	**(16.829.123,04)**	**95,20**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.1	**BELANJA OPERASI**	**350.659.442,04**	**333.830.319,00**	**(16.829.123,04)**	**95,20**
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**350.659.442,04**	**333.830.319,00**	**(16.829.123,04)**	**95,20**
2.10			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**1.145.804.044,00**	**1.112.605.938,00**	**(33.198.106,00)**	**97,10**
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000		**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**	**1.145.804.044,00**	**1.112.605.938,00**	**(33.198.106,00)**	**97,10**
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**1.145.804.044,00**	**1.112.605.938,00**	**(33.198.106,00)**	**97,10**
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**145.804.044,00**	**120.505.938,00**	**(25.298.106,00)**	**82,65**
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**145.804.044,00**	**120.505.938,00**	**(25.298.106,00)**	**82,65**
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**1.000.000.000,00**	**992.100.000,00**	**(7.900.000,00)**	**99,21**
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	**1.000.000.000,00**	**992.100.000,00**	**(7.900.000,00)**	**99,21**
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**35.294.444.739,00**	**33.388.547.528,00**	**(1.905.897.211,00)**	**94,60**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**34.409.483.798,00**	**32.816.455.454,00**	**(1.593.028.344,00)**	**95,37**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**34.409.483.798,00**	**32.816.455.454,00**	**(1.593.028.344,00)**	**95,37**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**33.483.995.918,00**	**32.476.617.054,00**	**(1.007.378.864,00)**	**96,99**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**29.161.296.735,00**	**28.352.080.555,00**	**(809.216.180,00)**	**97,23**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.322.699.183,00**	**4.124.536.499,00**	**(198.162.684,00)**	**95,42**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**925.487.880,00**	**339.838.400,00**	**(585.649.480,00)**	**36,72**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**925.487.880,00**	**339.838.400,00**	**(585.649.480,00)**	**36,72**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002		**UPTD KPHP Unit I Karimun**	**34.566.300,00**	**29.176.820,00**	**(5.389.480,00)**	**84,41**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	5	**BELANJA DAERAH**	**34.566.300,00**	**29.176.820,00**	**(5.389.480,00)**	**84,41**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	5.1	**BELANJA OPERASI**	**34.566.300,00**	**29.176.820,00**	**(5.389.480,00)**	**84,41**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**34.566.300,00**	**29.176.820,00**	**(5.389.480,00)**	**84,41**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004		**UPTD KPHP Unit III Lingga**	**22.793.624,00**	**21.482.629,00**	**(1.310.995,00)**	**94,25**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	5	**BELANJA DAERAH**	**22.793.624,00**	**21.482.629,00**	**(1.310.995,00)**	**94,25**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	5.1	**BELANJA OPERASI**	**22.793.624,00**	**21.482.629,00**	**(1.310.995,00)**	**94,25**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**22.793.624,00**	**21.482.629,00**	**(1.310.995,00)**	**94,25**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005		**UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang**	**42.167.480,00**	**40.914.300,00**	**(1.253.180,00)**	**97,03**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	5	**BELANJA DAERAH**	**42.167.480,00**	**40.914.300,00**	**(1.253.180,00)**	**97,03**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.1	**BELANJA OPERASI**	**42.167.480,00**	**40.914.300,00**	**(1.253.180,00)**	**97,03**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**42.167.480,00**	**40.914.300,00**	**(1.253.180,00)**	**97,03**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006		**UPTD KPHP Unit V Natuna**	**48.072.000,00**	**45.272.230,00**	**(2.799.770,00)**	**94,18**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	5	**BELANJA DAERAH**	**48.072.000,00**	**45.272.230,00**	**(2.799.770,00)**	**94,18**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	5.1	**BELANJA OPERASI**	**48.072.000,00**	**45.272.230,00**	**(2.799.770,00)**	**94,18**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**48.072.000,00**	**45.272.230,00**	**(2.799.770,00)**	**94,18**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007		**UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas**	**99.685.100,00**	**98.583.380,00**	**(1.101.720,00)**	**98,89**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	5	**BELANJA DAERAH**	**99.685.100,00**	**98.583.380,00**	**(1.101.720,00)**	**98,89**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	5.1	**BELANJA OPERASI**	**99.685.100,00**	**98.583.380,00**	**(1.101.720,00)**	**98,89**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**99.685.100,00**	**98.583.380,00**	**(1.101.720,00)**	**98,89**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003		**UPTD KPHP Unit II Batam**	**25.596.000,00**	**23.020.320,00**	**(2.575.680,00)**	**89,94**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	5	**BELANJA DAERAH**	**25.596.000,00**	**23.020.320,00**	**(2.575.680,00)**	**89,94**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	5.1	**BELANJA OPERASI**	**25.596.000,00**	**23.020.320,00**	**(2.575.680,00)**	**89,94**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**25.596.000,00**	**23.020.320,00**	**(2.575.680,00)**	**89,94**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001		**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	**612.080.437,00**	**313.642.395,00**	**(298.438.042,00)**	**51,24**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5	**BELANJA DAERAH**	**612.080.437,00**	**313.642.395,00**	**(298.438.042,00)**	**51,24**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5.1	**BELANJA OPERASI**	**347.733.850,00**	**184.786.935,00**	**(162.946.915,00)**	**53,14**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**347.733.850,00**	**184.786.935,00**	**(162.946.915,00)**	**53,14**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5.2	**BELANJA MODAL**	**264.346.587,00**	**128.855.460,00**	**(135.491.127,00)**	**48,74**
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**264.346.587,00**	**128.855.460,00**	**(135.491.127,00)**	**48,74**
2.12			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**11.989.281.374,00**	**11.792.071.314,00**	**(197.210.060,00)**	**98,36**
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**11.989.281.374,00**	**11.792.071.314,00**	**(197.210.060,00)**	**98,36**
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**11.989.281.374,00**	**11.792.071.314,00**	**(197.210.060,00)**	**98,36**
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**11.989.281.374,00**	**11.792.071.314,00**	**(197.210.060,00)**	**98,36**
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**10.104.809.736,00**	**9.982.142.287,00**	**(122.667.449,00)**	**98,79**
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.884.471.638,00**	**1.809.929.027,00**	**(74.542.611,00)**	**96,04**
2.13			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**2.780.225.896,00**	**2.421.831.959,00**	**(358.393.937,00)**	**87,11**
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**2.780.225.896,00**	**2.421.831.959,00**	**(358.393.937,00)**	**87,11**
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**2.780.225.896,00**	**2.421.831.959,00**	**(358.393.937,00)**	**87,11**
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.765.649.896,00**	**2.407.255.959,00**	**(358.393.937,00)**	**87,04**
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.570.649.896,00**	**2.327.255.959,00**	**(243.393.937,00)**	**90,53**
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**195.000.000,00**	**80.000.000,00**	**(115.000.000,00)**	**41,03**
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**14.576.000,00**	**14.576.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**14.576.000,00**	**14.576.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**5.585.490.080,00**	**5.492.225.716,00**	**(93.264.364,00)**	**98,33**
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**5.585.490.080,00**	**5.492.225.716,00**	**(93.264.364,00)**	**98,33**
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**5.585.490.080,00**	**5.492.225.716,00**	**(93.264.364,00)**	**98,33**
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.585.490.080,00**	**5.492.225.716,00**	**(93.264.364,00)**	**98,33**
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.585.490.080,00**	**5.492.225.716,00**	**(93.264.364,00)**	**98,33**
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**29.737.235.569,00**	**24.107.258.007,91**	**(5.629.977.561,09)**	**81,07**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		**Dinas Perhubungan**	**28.329.047.664,69**	**22.936.502.634,91**	**(5.392.545.029,78)**	**80,96**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**28.329.047.664,69**	**22.936.502.634,91**	**(5.392.545.029,78)**	**80,96**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**21.714.827.054,69**	**19.652.203.492,14**	**(2.062.623.562,55)**	**90,50**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**14.010.005.286,22**	**13.842.208.922,00**	**(167.796.364,22)**	**98,80**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.780.021.768,47**	**4.885.194.570,14**	**(1.894.827.198,33)**	**72,05**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**924.800.000,00**	**924.800.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**6.614.220.610,00**	**3.284.299.142,77**	**(3.329.921.467,23)**	**49,66**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**556.788.304,00**	**43.277.000,00**	**(513.511.304,00)**	**7,77**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**5.859.432.306,00**	**3.241.022.142,77**	**(2.618.410.163,23)**	**55,31**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**198.000.000,00**	**0,00**	**(198.000.000,00)**	**0,00**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		**UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam**	**114.399.328,19**	**99.221.706,00**	**(15.177.622,19)**	**86,73**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5	**BELANJA DAERAH**	**114.399.328,19**	**99.221.706,00**	**(15.177.622,19)**	**86,73**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.1	**BELANJA OPERASI**	**109.996.428,19**	**99.221.706,00**	**(10.774.722,19)**	**90,20**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**109.996.428,19**	**99.221.706,00**	**(10.774.722,19)**	**90,20**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.2	**BELANJA MODAL**	**4.402.900,00**	**0,00**	**(4.402.900,00)**	**0,00**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**4.402.900,00**	**0,00**	**(4.402.900,00)**	**0,00**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		**UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun**	**246.839.950,00**	**214.199.484,00**	**(32.640.466,00)**	**86,78**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5	**BELANJA DAERAH**	**246.839.950,00**	**214.199.484,00**	**(32.640.466,00)**	**86,78**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.1	**BELANJA OPERASI**	**224.669.844,00**	**199.571.684,00**	**(25.098.160,00)**	**88,83**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**224.669.844,00**	**199.571.684,00**	**(25.098.160,00)**	**88,83**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.2	**BELANJA MODAL**	**22.170.106,00**	**14.627.800,00**	**(7.542.306,00)**	**65,98**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**22.170.106,00**	**14.627.800,00**	**(7.542.306,00)**	**65,98**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003		**UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan**	**489.378.780,00**	**436.370.051,00**	**(53.008.729,00)**	**89,17**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5	**BELANJA DAERAH**	**489.378.780,00**	**436.370.051,00**	**(53.008.729,00)**	**89,17**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5.1	**BELANJA OPERASI**	**489.378.780,00**	**436.370.051,00**	**(53.008.729,00)**	**89,17**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**489.378.780,00**	**436.370.051,00**	**(53.008.729,00)**	**89,17**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004		**UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepualauan Anambas**	**373.159.177,12**	**267.638.877,00**	**(105.520.300,12)**	**71,72**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5	**BELANJA DAERAH**	**373.159.177,12**	**267.638.877,00**	**(105.520.300,12)**	**71,72**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.1	**BELANJA OPERASI**	**357.239.777,12**	**252.485.157,00**	**(104.754.620,12)**	**70,68**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**357.239.777,12**	**252.485.157,00**	**(104.754.620,12)**	**70,68**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.2	**BELANJA MODAL**	**15.919.400,00**	**15.153.720,00**	**(765.680,00)**	**95,19**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**15.919.400,00**	**15.153.720,00**	**(765.680,00)**	**95,19**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005		**UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga**	**184.410.669,00**	**153.325.255,00**	**(31.085.414,00)**	**83,14**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5	**BELANJA DAERAH**	**184.410.669,00**	**153.325.255,00**	**(31.085.414,00)**	**83,14**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5.1	**BELANJA OPERASI**	**184.410.669,00**	**153.325.255,00**	**(31.085.414,00)**	**83,14**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**184.410.669,00**	**153.325.255,00**	**(31.085.414,00)**	**83,14**
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**34.881.878.468,00**	**30.096.474.805,00**	**(4.785.403.663,00)**	**86,28**
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**34.881.878.468,00**	**30.096.474.805,00**	**(4.785.403.663,00)**	**86,28**
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**34.881.878.468,00**	**30.096.474.805,00**	**(4.785.403.663,00)**	**86,28**
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**34.640.775.718,00**	**29.861.076.806,00**	**(4.779.698.912,00)**	**86,20**
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**11.944.795.078,00**	**11.552.448.992,00**	**(392.346.086,00)**	**96,72**
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**22.135.980.640,00**	**17.748.627.814,00**	**(4.387.352.826,00)**	**80,18**
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**560.000.000,00**	**560.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**241.102.750,00**	**235.397.999,00**	**(5.704.751,00)**	**97,63**
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**241.102.750,00**	**235.397.999,00**	**(5.704.751,00)**	**97,63**
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**38.427.480.191,00**	**32.953.071.736,00**	**(5.474.408.455,00)**	**85,75**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**38.427.480.191,00**	**32.953.071.736,00**	**(5.474.408.455,00)**	**85,75**
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**38.427.480.191,00**	**32.953.071.736,00**	**(5.474.408.455,00)**	**85,75**
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**38.349.762.491,00**	**32.882.770.633,00**	**(5.466.991.858,00)**	**85,74**
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**9.499.963.136,08**	**9.406.028.642,00**	**(93.934.494,08)**	**99,01**
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**23.225.305.293,54**	**19.881.889.000,00**	**(3.343.416.293,54)**	**85,60**
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.1.04	**Belanja Subsidi**	**2.864.494.061,38**	**834.852.991,00**	**(2.029.641.070,38)**	**29,14**
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**2.760.000.000,00**	**2.760.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**77.717.700,00**	**70.301.103,00**	**(7.416.597,00)**	**90,46**
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**77.717.700,00**	**70.301.103,00**	**(7.416.597,00)**	**90,46**
2.18			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**15.071.210.290,00**	**14.805.451.792,00**	**(265.758.498,00)**	**98,24**
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000		**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	**15.071.210.290,00**	**14.805.451.792,00**	**(265.758.498,00)**	**98,24**
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**15.071.210.290,00**	**14.805.451.792,00**	**(265.758.498,00)**	**98,24**
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**15.059.581.359,00**	**14.793.891.142,00**	**(265.690.217,00)**	**98,24**
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**12.015.389.365,00**	**11.835.017.567,00**	**(180.371.798,00)**	**98,50**
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.044.191.994,00**	**2.958.873.575,00**	**(85.318.419,00)**	**97,20**
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**11.628.931,00**	**11.560.650,00**	**(68.281,00)**	**99,41**
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**3.038.500,00**	**3.030.300,00**	**(8.200,00)**	**99,73**
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**8.590.431,00**	**8.530.350,00**	**(60.081,00)**	**99,30**
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**34.233.552.898,77**	**30.825.231.377,04**	**(3.408.321.521,73)**	**90,04**
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000		**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**34.233.552.898,77**	**30.825.231.377,04**	**(3.408.321.521,73)**	**90,04**
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**34.233.552.898,77**	**30.825.231.377,04**	**(3.408.321.521,73)**	**90,04**
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**33.919.033.698,77**	**30.669.251.377,04**	**(3.249.782.321,73)**	**90,42**
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**9.617.856.546,55**	**8.635.603.158,04**	**(982.253.388,51)**	**89,79**
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**13.381.625.132,21**	**11.280.323.534,00**	**(2.101.301.598,21)**	**84,30**
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**10.919.552.020,01**	**10.753.324.685,00**	**(166.227.335,01)**	**98,48**
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**314.519.200,00**	**155.980.000,00**	**(158.539.200,00)**	**49,59**
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**314.519.200,00**	**155.980.000,00**	**(158.539.200,00)**	**49,59**
2.20			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**48.595.643,00**	**38.441.840,00**	**(10.153.803,00)**	**79,11**
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**48.595.643,00**	**38.441.840,00**	**(10.153.803,00)**	**79,11**
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**48.595.643,00**	**38.441.840,00**	**(10.153.803,00)**	**79,11**
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**48.595.643,00**	**38.441.840,00**	**(10.153.803,00)**	**79,11**
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**48.595.643,00**	**38.441.840,00**	**(10.153.803,00)**	**79,11**
2.21			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**36.231.702,00**	**23.247.051,00**	**(12.984.651,00)**	**64,16**
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**36.231.702,00**	**23.247.051,00**	**(12.984.651,00)**	**64,16**
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**36.231.702,00**	**23.247.051,00**	**(12.984.651,00)**	**64,16**
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**36.231.702,00**	**23.247.051,00**	**(12.984.651,00)**	**64,16**
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**36.231.702,00**	**23.247.051,00**	**(12.984.651,00)**	**64,16**
2.22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**14.725.421.971,00**	**14.057.867.362,31**	**(667.554.608,69)**	**95,47**
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000		**Dinas Kebudayaan**	**14.725.421.971,00**	**14.057.867.362,31**	**(667.554.608,69)**	**95,47**
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**14.725.421.971,00**	**14.057.867.362,31**	**(667.554.608,69)**	**95,47**
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**14.600.421.971,00**	**13.932.881.362,31**	**(667.540.608,69)**	**95,43**
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**8.489.443.380,64**	**8.184.419.188,00**	**(305.024.192,64)**	**96,41**
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.610.978.590,36**	**4.248.462.174,31**	**(362.516.416,05)**	**92,14**
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**	**100,00**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	124.986.000,00	(14.000,00)	99,99
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125.000.000,00	124.986.000,00	(14.000,00)	99,99
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	21.308.335.398,00	20.310.524.816,40	(997.810.581,60)	95,32
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	21.135.767.072,00	20.148.974.850,40	(986.792.221,60)	95,33
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	21.135.767.072,00	20.148.974.850,40	(986.792.221,60)	95,33
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.774.283.722,00	19.948.806.115,40	(825.477.606,60)	96,03
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	14.600.995.842,00	14.304.233.670,00	(296.762.172,00)	97,97
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.173.287.880,00	5.644.572.445,40	(528.715.434,60)	91,44
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	361.483.350,00	200.168.735,00	(161.314.615,00)	55,37
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.483.350,00	44.222.200,00	(52.261.150,00)	45,83
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	265.000.000,00	155.946.535,00	(109.053.465,00)	58,85
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001		UPT Perpustakaan Muhammad Sani	172.568.326,00	161.549.966,00	(11.018.360,00)	93,62
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5	BELANJA DAERAH	172.568.326,00	161.549.966,00	(11.018.360,00)	93,62
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5.1	BELANJA OPERASI	172.568.326,00	161.549.966,00	(11.018.360,00)	93,62
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.568.326,00	161.549.966,00	(11.018.360,00)	93,62
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	170.633.523.694,98	151.795.716.778,35	(18.837.806.916,63)	88,96
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	54.164.879.734,00	52.349.880.797,92	(1.814.998.936,08)	96,65
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	49.191.754.015,02	47.509.662.635,12	(1.682.091.379,90)	96,58
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5	BELANJA DAERAH	49.191.754.015,02	47.509.662.635,12	(1.682.091.379,90)	96,58
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.1	BELANJA OPERASI	48.992.565.575,02	47.312.392.579,12	(1.680.172.995,90)	96,57
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	29.879.634.853,00	28.979.693.270,00	(899.941.583,00)	96,99
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.026.815.706,02	11.616.286.174,12	(410.529.531,90)	96,59
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.1.05	Belanja Hibah	7.086.115.016,00	6.716.413.135,00	(369.701.881,00)	94,78
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.2	BELANJA MODAL	199.188.440,00	197.270.056,00	(1.918.384,00)	99,04
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.188.440,00	197.270.056,00	(1.918.384,00)	99,04
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	183.961.787,00	183.820.287,00	(141.500,00)	99,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5	BELANJA DAERAH	183.961.787,00	183.820.287,00	(141.500,00)	99,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5.1	BELANJA OPERASI	183.961.787,00	183.820.287,00	(141.500,00)	99,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.961.787,00	183.820.287,00	(141.500,00)	99,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	352.718.091,00	337.298.144,00	(15.419.947,00)	95,63
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5	BELANJA DAERAH	352.718.091,00	337.298.144,00	(15.419.947,00)	95,63
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5.1	BELANJA OPERASI	340.968.091,00	325.548.144,00	(15.419.947,00)	95,48
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.968.091,00	325.548.144,00	(15.419.947,00)	95,48
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5.2	BELANJA MODAL	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	277.966.003,00	262.572.999,00	(15.393.004,00)	94,46
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5	BELANJA DAERAH	277.966.003,00	262.572.999,00	(15.393.004,00)	94,46
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5.1	BELANJA OPERASI	277.966.003,00	262.572.999,00	(15.393.004,00)	94,46

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**277.966.003,00**	**262.572.999,00**	**(15.393.004,00)**	**94,46**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004		**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun**	**715.032.898,00**	**707.765.755,00**	**(7.267.143,00)**	**98,98**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	5	**BELANJA DAERAH**	**715.032.898,00**	**707.765.755,00**	**(7.267.143,00)**	**98,98**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	5.1	**BELANJA OPERASI**	**715.032.898,00**	**707.765.755,00**	**(7.267.143,00)**	**98,98**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**715.032.898,00**	**707.765.755,00**	**(7.267.143,00)**	**98,98**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005		**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam**	**614.694.905,00**	**597.523.451,00**	**(17.171.454,00)**	**97,21**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5	**BELANJA DAERAH**	**614.694.905,00**	**597.523.451,00**	**(17.171.454,00)**	**97,21**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5.1	**BELANJA OPERASI**	**614.694.905,00**	**597.523.451,00**	**(17.171.454,00)**	**97,21**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**614.694.905,00**	**597.523.451,00**	**(17.171.454,00)**	**97,21**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008		**UPTD Balai Benih Ikan**	**1.568.568.659,00**	**1.556.452.354,80**	**(12.116.304,20)**	**99,23**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5	**BELANJA DAERAH**	**1.568.568.659,00**	**1.556.452.354,80**	**(12.116.304,20)**	**99,23**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.451.447.959,00**	**1.440.475.939,80**	**(10.972.019,20)**	**99,24**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.451.447.959,00**	**1.440.475.939,80**	**(10.972.019,20)**	**99,24**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5.2	**BELANJA MODAL**	**117.120.700,00**	**115.976.415,00**	**(1.144.285,00)**	**99,02**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**117.120.700,00**	**115.976.415,00**	**(1.144.285,00)**	**99,02**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007		**UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)**	**531.807.178,98**	**517.952.898,00**	**(13.854.280,98)**	**97,39**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5	**BELANJA DAERAH**	**531.807.178,98**	**517.952.898,00**	**(13.854.280,98)**	**97,39**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5.1	**BELANJA OPERASI**	**502.057.678,98**	**490.804.518,00**	**(11.253.160,98)**	**97,76**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**502.057.678,98**	**490.804.518,00**	**(11.253.160,98)**	**97,76**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5.2	**BELANJA MODAL**	**29.749.500,00**	**27.148.380,00**	**(2.601.120,00)**	**91,26**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**29.749.500,00**	**27.148.380,00**	**(2.601.120,00)**	**91,26**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006		**UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai**	**728.376.197,00**	**676.832.274,00**	**(51.543.923,00)**	**92,92**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5	**BELANJA DAERAH**	**728.376.197,00**	**676.832.274,00**	**(51.543.923,00)**	**92,92**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5.1	**BELANJA OPERASI**	**725.570.197,00**	**676.832.274,00**	**(48.737.923,00)**	**93,28**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**725.570.197,00**	**676.832.274,00**	**(48.737.923,00)**	**93,28**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5.2	**BELANJA MODAL**	**2.806.000,00**	**0,00**	**(2.806.000,00)**	**0,00**
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**2.806.000,00**	**0,00**	**(2.806.000,00)**	**0,00**
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**23.086.667.902,00**	**20.400.695.006,00**	**(2.685.972.896,00)**	**88,37**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		**Dinas Pariwisata**	**23.086.667.902,00**	**20.400.695.006,00**	**(2.685.972.896,00)**	**88,37**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**23.086.667.902,00**	**20.400.695.006,00**	**(2.685.972.896,00)**	**88,37**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**23.086.667.902,00**	**20.400.695.006,00**	**(2.685.972.896,00)**	**88,37**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**10.547.438.404,00**	**10.235.310.166,00**	**(312.128.238,00)**	**97,04**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**12.539.229.498,00**	**10.165.384.840,00**	**(2.373.844.658,00)**	**81,07**
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**15.925.730.686,98**	**11.576.100.771,50**	**(4.349.629.915,48)**	**72,69**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000		**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**	**14.656.023.713,00**	**10.515.509.884,50**	**(4.140.513.828,50)**	**71,75**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**14.656.023.713,00**	**10.515.509.884,50**	**(4.140.513.828,50)**	**71,75**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**14.639.198.713,00**	**10.498.684.884,50**	**(4.140.513.828,50)**	**71,72**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**14.639.198.713,00**	**10.498.684.884,50**	**(4.140.513.828,50)**	**71,72**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**16.825.000,00**	**16.825.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**16.825.000,00**	**16.825.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002		**UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan**	**299.694.799,00**	**142.680.631,00**	**(157.014.168,00)**	**47,61**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	5	**BELANJA DAERAH**	**299.694.799,00**	**142.680.631,00**	**(157.014.168,00)**	**47,61**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	5.1	**BELANJA OPERASI**	**299.694.799,00**	**142.680.631,00**	**(157.014.168,00)**	**47,61**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**299.694.799,00**	**142.680.631,00**	**(157.014.168,00)**	**47,61**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001		**UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)**	**970.012.174,98**	**917.910.256,00**	**(52.101.918,98)**	**94,63**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5	**BELANJA DAERAH**	**970.012.174,98**	**917.910.256,00**	**(52.101.918,98)**	**94,63**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.1	**BELANJA OPERASI**	**966.117.628,98**	**914.016.376,00**	**(52.101.252,98)**	**94,61**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**966.117.628,98**	**914.016.376,00**	**(52.101.252,98)**	**94,61**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.2	**BELANJA MODAL**	**3.894.546,00**	**3.893.880,00**	**(666,00)**	**99,98**
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**3.894.546,00**	**3.893.880,00**	**(666,00)**	**99,98**
3.28			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**2.592.141.510,00**	**2.259.437.825,00**	**(332.703.685,00)**	**87,16**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000		**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**1.409.501.550,00**	**1.279.501.967,00**	**(129.999.583,00)**	**90,78**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**1.409.501.550,00**	**1.279.501.967,00**	**(129.999.583,00)**	**90,78**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.409.501.550,00**	**1.279.501.967,00**	**(129.999.583,00)**	**90,78**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.319.501.550,00**	**1.189.501.967,00**	**(129.999.583,00)**	**90,15**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002		**UPTD KPHP Unit I Karimun**	**162.557.297,00**	**131.195.000,00**	**(31.362.297,00)**	**80,71**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	5	**BELANJA DAERAH**	**162.557.297,00**	**131.195.000,00**	**(31.362.297,00)**	**80,71**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	5.1	**BELANJA OPERASI**	**162.557.297,00**	**131.195.000,00**	**(31.362.297,00)**	**80,71**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**162.557.297,00**	**131.195.000,00**	**(31.362.297,00)**	**80,71**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004		**UPTD KPHP Unit III Lingga**	**166.409.999,00**	**162.477.918,00**	**(3.932.081,00)**	**97,64**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	5	**BELANJA DAERAH**	**166.409.999,00**	**162.477.918,00**	**(3.932.081,00)**	**97,64**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	5.1	**BELANJA OPERASI**	**166.409.999,00**	**162.477.918,00**	**(3.932.081,00)**	**97,64**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**166.409.999,00**	**162.477.918,00**	**(3.932.081,00)**	**97,64**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005		**UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang**	**207.155.503,00**	**203.457.055,00**	**(3.698.448,00)**	**98,21**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5	**BELANJA DAERAH**	**207.155.503,00**	**203.457.055,00**	**(3.698.448,00)**	**98,21**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.1	**BELANJA OPERASI**	**207.155.503,00**	**203.457.055,00**	**(3.698.448,00)**	**98,21**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**207.155.503,00**	**203.457.055,00**	**(3.698.448,00)**	**98,21**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006		**UPTD KPHP Unit V Natuna**	**264.794.131,00**	**157.323.835,00**	**(107.470.296,00)**	**59,41**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	5	**BELANJA DAERAH**	**264.794.131,00**	**157.323.835,00**	**(107.470.296,00)**	**59,41**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	5.1	**BELANJA OPERASI**	**264.794.131,00**	**157.323.835,00**	**(107.470.296,00)**	**59,41**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**264.794.131,00**	**157.323.835,00**	**(107.470.296,00)**	**59,41**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007		**UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas**	**182.509.245,00**	**127.220.750,00**	**(55.288.495,00)**	**69,71**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	5	**BELANJA DAERAH**	**182.509.245,00**	**127.220.750,00**	**(55.288.495,00)**	**69,71**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	5.1	**BELANJA OPERASI**	**182.509.245,00**	**127.220.750,00**	**(55.288.495,00)**	**69,71**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**182.509.245,00**	**127.220.750,00**	**(55.288.495,00)**	**69,71**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003		**UPTD KPHP Unit II Batam**	**199.213.785,00**	**198.261.300,00**	**(952.485,00)**	**99,52**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	5	**BELANJA DAERAH**	**199.213.785,00**	**198.261.300,00**	**(952.485,00)**	**99,52**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	5.1	**BELANJA OPERASI**	**199.213.785,00**	**198.261.300,00**	**(952.485,00)**	**99,52**
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**199.213.785,00**	**198.261.300,00**	**(952.485,00)**	**99,52**
3.29			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**46.006.620.418,00**	**37.517.314.104,93**	**(8.489.306.313,07)**	**81,55**
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**46.006.620.418,00**	**37.517.314.104,93**	**(8.489.306.313,07)**	**81,55**
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**46.006.620.418,00**	**37.517.314.104,93**	**(8.489.306.313,07)**	**81,55**
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**20.213.031.936,00**	**19.019.092.983,44**	**(1.193.938.952,56)**	**94,09**
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**10.324.028.859,76**	**9.922.255.246,00**	**(401.773.613,76)**	**96,11**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.889.003.076,24	9.096.837.737,44	(792.165.338,80)	91,99
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.793.588.482,00	18.498.221.121,49	(7.295.367.360,51)	71,72
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.901.658,00	83.534.300,00	(52.367.358,00)	61,47
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.225.144,00	198.225.143,28	(0,72)	100,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.459.461.680,00	18.216.461.678,21	(7.243.000.001,79)	71,55
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	21.295.837.371,00	20.402.503.487,00	(893.333.884,00)	95,81
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.295.837.371,00	20.402.503.487,00	(893.333.884,00)	95,81
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	21.295.837.371,00	20.402.503.487,00	(893.333.884,00)	95,81
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.082.666.421,00	19.270.128.037,00	(812.538.384,00)	95,95
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.141.306.875,00	11.860.089.020,00	(281.217.855,00)	97,68
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.941.359.546,00	7.410.039.017,00	(531.320.529,00)	93,31
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.213.170.950,00	1.132.375.450,00	(80.795.500,00)	93,34
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.213.170.950,00	1.132.375.450,00	(80.795.500,00)	93,34
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.511.099.193,00	7.239.486.646,00	(271.612.547,00)	96,38
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.511.099.193,00	7.239.486.646,00	(271.612.547,00)	96,38
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	7.511.099.193,00	7.239.486.646,00	(271.612.547,00)	96,38
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.364.554.793,00	7.100.815.667,00	(263.739.126,00)	96,42
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.364.554.793,00	7.100.815.667,00	(263.739.126,00)	96,42
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	146.544.400,00	138.670.979,00	(7.873.421,00)	94,63
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.544.400,00	138.670.979,00	(7.873.421,00)	94,63
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	412.405.594.967,79	395.881.904.255,05	(16.523.690.712,74)	95,99
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	274.937.981.388,79	262.935.337.874,05	(12.002.643.514,74)	95,63
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.674.150.158,93	2.596.935.967,00	(77.214.191,93)	97,11
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5	BELANJA DAERAH	2.674.150.158,93	2.596.935.967,00	(77.214.191,93)	97,11
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.668.861.542,93	2.592.545.967,00	(76.315.575,93)	97,14
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.668.861.542,93	2.592.545.967,00	(76.315.575,93)	97,14
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.288.616,00	4.390.000,00	(898.616,00)	83,01
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.288.616,00	4.390.000,00	(898.616,00)	83,01
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004		Biro Kesejahteraan Rakyat	76.117.790.635,58	72.088.974.425,00	(4.028.816.210,58)	94,71
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5	BELANJA DAERAH	76.117.790.635,58	72.088.974.425,00	(4.028.816.210,58)	94,71
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.1	BELANJA OPERASI	76.056.131.911,58	72.028.923.425,00	(4.027.208.486,58)	94,70
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.120.492.611,58	27.468.767.150,00	(1.651.725.461,58)	94,33
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.1.05	Belanja Hibah	46.935.639.300,00	44.560.156.275,00	(2.375.483.025,00)	94,94
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.2	BELANJA MODAL	61.658.724,00	60.051.000,00	(1.607.724,00)	97,39
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.658.724,00	60.051.000,00	(1.607.724,00)	97,39
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001		Biro Hukum	1.907.268.509,00	1.766.563.869,00	(140.704.640,00)	92,62
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5	BELANJA DAERAH	1.907.268.509,00	1.766.563.869,00	(140.704.640,00)	92,62
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.814.497.209,00	1.704.091.319,00	(110.405.890,00)	93,92
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.814.497.209,00	1.704.091.319,00	(110.405.890,00)	93,92

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5.2	**BELANJA MODAL**	**92.771.300,00**	**62.472.550,00**	**(30.298.750,00)**	**67,34**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**92.771.300,00**	**62.472.550,00**	**(30.298.750,00)**	**67,34**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005		**Biro Perekonomian dan Pembangunan**	**1.696.019.757,25**	**1.578.967.948,00**	**(117.051.809,25)**	**93,10**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5	**BELANJA DAERAH**	**1.696.019.757,25**	**1.578.967.948,00**	**(117.051.809,25)**	**93,10**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.691.569.257,25**	**1.574.583.448,00**	**(116.985.809,25)**	**93,08**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.691.569.257,25**	**1.574.583.448,00**	**(116.985.809,25)**	**93,08**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5.2	**BELANJA MODAL**	**4.450.500,00**	**4.384.500,00**	**(66.000,00)**	**98,52**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**4.450.500,00**	**4.384.500,00**	**(66.000,00)**	**98,52**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008		**Biro Pengadaan Barang/Jasa**	**1.402.420.130,00**	**1.357.399.816,00**	**(45.020.314,00)**	**96,79**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5	**BELANJA DAERAH**	**1.402.420.130,00**	**1.357.399.816,00**	**(45.020.314,00)**	**96,79**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.372.722.384,00**	**1.335.416.266,00**	**(37.306.118,00)**	**97,28**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.372.722.384,00**	**1.335.416.266,00**	**(37.306.118,00)**	**97,28**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5.2	**BELANJA MODAL**	**29.697.746,00**	**21.983.550,00**	**(7.714.196,00)**	**74,02**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**29.697.746,00**	**21.983.550,00**	**(7.714.196,00)**	**74,02**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006		**Biro Umum**	**184.113.876.278,00**	**176.665.178.765,05**	**(7.448.697.512,95)**	**95,95**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5	**BELANJA DAERAH**	**184.113.876.278,00**	**176.665.178.765,05**	**(7.448.697.512,95)**	**95,95**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.1	**BELANJA OPERASI**	**177.436.020.478,00**	**170.414.252.621,05**	**(7.021.767.856,95)**	**96,04**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**89.110.509.127,95**	**85.974.425.022,00**	**(3.136.084.105,95)**	**96,48**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**69.867.483.850,05**	**66.190.630.811,05**	**(3.676.853.039,00)**	**94,74**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.1.05	**Belanja Hibah**	**18.458.027.500,00**	**18.249.196.788,00**	**(208.830.712,00)**	**98,87**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.2	**BELANJA MODAL**	**6.677.855.800,00**	**6.250.926.144,00**	**(426.929.656,00)**	**93,61**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**6.677.855.800,00**	**6.250.926.144,00**	**(426.929.656,00)**	**93,61**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007		**Biro Administrasi Pimpinan**	**6.098.561.124,40**	**6.000.053.714,00**	**(98.507.410,40)**	**98,38**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5	**BELANJA DAERAH**	**6.098.561.124,40**	**6.000.053.714,00**	**(98.507.410,40)**	**98,38**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5.1	**BELANJA OPERASI**	**6.078.118.124,40**	**5.979.611.120,00**	**(98.507.004,40)**	**98,38**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.078.118.124,40**	**5.979.611.120,00**	**(98.507.004,40)**	**98,38**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5.2	**BELANJA MODAL**	**20.443.000,00**	**20.442.594,00**	**(406,00)**	**100,00**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**20.443.000,00**	**20.442.594,00**	**(406,00)**	**100,00**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003		**Biro Organisasi**	**927.894.795,63**	**881.263.370,00**	**(46.631.425,63)**	**94,97**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5	**BELANJA DAERAH**	**927.894.795,63**	**881.263.370,00**	**(46.631.425,63)**	**94,97**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5.1	**BELANJA OPERASI**	**927.894.795,63**	**881.263.370,00**	**(46.631.425,63)**	**94,97**
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**927.894.795,63**	**881.263.370,00**	**(46.631.425,63)**	**94,97**
4.02			**SEKRETARIAT DPRD**	**137.467.613.579,00**	**132.946.566.381,00**	**(4.521.047.198,00)**	**96,71**
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000		**Sekretariat DPRD**	**137.467.613.579,00**	**132.946.566.381,00**	**(4.521.047.198,00)**	**96,71**
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**137.467.613.579,00**	**132.946.566.381,00**	**(4.521.047.198,00)**	**96,71**
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**134.197.908.089,00**	**129.978.583.381,00**	**(4.219.324.708,00)**	**96,86**
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**48.988.400.011,12**	**47.721.865.140,00**	**(1.266.534.871,12)**	**97,41**
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**85.209.508.077,88**	**82.256.718.241,00**	**(2.952.789.836,88)**	**96,53**
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**3.269.705.490,00**	**2.967.983.000,00**	**(301.722.490,00)**	**90,77**
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**3.269.705.490,00**	**2.967.983.000,00**	**(301.722.490,00)**	**90,77**
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**969.596.669.126,04**	**942.943.656.831,70**	**(26.653.012.294,34)**	**97,25**
5.01			**PERENCANAAN**	**27.709.605.534,93**	**27.430.596.487,00**	**(279.009.047,93)**	**98,99**
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000		**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**27.709.605.534,93**	**27.430.596.487,00**	**(279.009.047,93)**	**98,99**
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**27.709.605.534,93**	**27.430.596.487,00**	**(279.009.047,93)**	**98,99**
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**27.645.500.534,93**	**27.366.771.487,00**	**(278.729.047,93)**	**98,99**
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**21.019.501.259,00**	**20.866.488.787,00**	**(153.012.472,00)**	**99,27**
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.625.999.275,93**	**6.500.282.700,00**	**(125.716.575,93)**	**98,10**
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**64.105.000,00**	**63.825.000,00**	**(280.000,00)**	**99,56**
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**64.105.000,00**	**63.825.000,00**	**(280.000,00)**	**99,56**
5.02			**KEUANGAN**	**884.879.271.210,04**	**861.510.480.806,70**	**(23.368.790.403,34)**	**97,36**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**772.452.832.184,04**	**753.247.553.315,00**	**(19.205.278.869,04)**	**97,51**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**772.452.832.184,04**	**753.247.553.315,00**	**(19.205.278.869,04)**	**97,51**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**52.231.664.290,94**	**47.971.647.101,00**	**(4.260.017.189,94)**	**91,84**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**24.890.857.472,94**	**23.819.298.523,00**	**(1.071.558.949,94)**	**95,69**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**27.340.806.818,00**	**24.152.348.578,00**	**(3.188.458.240,00)**	**88,34**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**1.123.720.456,50**	**1.087.475.570,00**	**(36.244.886,50)**	**96,77**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**1.033.720.456,50**	**998.620.070,00**	**(35.100.386,50)**	**96,60**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**90.000.000,00**	**88.855.500,00**	**(1.144.500,00)**	**98,73**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.281.396.903,60**	**0,00**	**(2.281.396.903,60)**	**0,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	**2.281.396.903,60**	**0,00**	**(2.281.396.903,60)**	**0,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.4	**BELANJA TRANSFER**	**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**	**(12.627.619.889,00)**	**98,24**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	**698.706.050.533,00**	**690.951.951.944,00**	**(7.754.098.589,00)**	**98,89**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	**18.110.000.000,00**	**13.236.478.700,00**	**(4.873.521.300,00)**	**73,09**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		**Badan Pendapatan Daerah**	**100.192.336.260,94**	**97.094.280.481,00**	**(3.098.055.779,94)**	**96,91**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**100.192.336.260,94**	**97.094.280.481,00**	**(3.098.055.779,94)**	**96,91**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**98.405.658.444,94**	**95.895.839.981,00**	**(2.509.818.463,94)**	**97,45**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**70.897.568.462,47**	**70.191.130.509,00**	**(706.437.953,47)**	**99,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**27.508.089.982,47**	**25.704.709.472,00**	**(1.803.380.510,47)**	**93,44**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**1.786.677.816,00**	**1.198.440.500,00**	**(588.237.316,00)**	**67,08**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**1.750.924.816,00**	**1.166.635.500,00**	**(584.289.316,00)**	**66,63**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**35.753.000,00**	**31.805.000,00**	**(3.948.000,00)**	**88,96**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001		**UPT PPD Batam Centre**	**3.232.910.743,27**	**2.887.305.915,75**	**(345.604.827,52)**	**89,31**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5	**BELANJA DAERAH**	**3.232.910.743,27**	**2.887.305.915,75**	**(345.604.827,52)**	**89,31**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.006.894.043,27**	**2.753.205.915,75**	**(253.688.127,52)**	**91,56**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.006.894.043,27**	**2.753.205.915,75**	**(253.688.127,52)**	**91,56**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.2	**BELANJA MODAL**	**226.016.700,00**	**134.100.000,00**	**(91.916.700,00)**	**59,33**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**226.016.700,00**	**134.100.000,00**	**(91.916.700,00)**	**59,33**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003		**UPT PPD Bintan**	**1.062.746.989,23**	**990.790.181,00**	**(71.956.808,23)**	**93,23**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5	**BELANJA DAERAH**	**1.062.746.989,23**	**990.790.181,00**	**(71.956.808,23)**	**93,23**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.062.746.989,23**	**990.790.181,00**	**(71.956.808,23)**	**93,23**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.062.746.989,23**	**990.790.181,00**	**(71.956.808,23)**	**93,23**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004		**UPT PPD Karimun**	**997.838.243,25**	**845.090.497,00**	**(152.747.746,25)**	**84,69**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5	**BELANJA DAERAH**	**997.838.243,25**	**845.090.497,00**	**(152.747.746,25)**	**84,69**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.1	**BELANJA OPERASI**	**969.720.514,25**	**821.272.377,00**	**(148.448.137,25)**	**84,69**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**969.720.514,25**	**821.272.377,00**	**(148.448.137,25)**	**84,69**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.2	**BELANJA MODAL**	**28.117.729,00**	**23.818.120,00**	**(4.299.609,00)**	**84,71**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**28.117.729,00**	**23.818.120,00**	**(4.299.609,00)**	**84,71**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005		**UPT PPD Lingga**	**511.736.913,83**	**487.586.373,00**	**(24.150.540,83)**	**95,28**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5	**BELANJA DAERAH**	**511.736.913,83**	**487.586.373,00**	**(24.150.540,83)**	**95,28**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.1	**BELANJA OPERASI**	**511.736.913,83**	**487.586.373,00**	**(24.150.540,83)**	**95,28**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**511.736.913,83**	**487.586.373,00**	**(24.150.540,83)**	**95,28**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002		**UPT PPD Tanjungpinang**	**1.951.590.732,17**	**1.794.076.038,00**	**(157.514.694,17)**	**91,93**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5	**BELANJA DAERAH**	**1.951.590.732,17**	**1.794.076.038,00**	**(157.514.694,17)**	**91,93**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.913.328.616,17**	**1.760.338.039,00**	**(152.990.577,17)**	**92,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.913.328.616,17**	**1.760.338.039,00**	**(152.990.577,17)**	**92,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.2	**BELANJA MODAL**	**38.262.116,00**	**33.737.999,00**	**(4.524.117,00)**	**88,18**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**38.262.116,00**	**33.737.999,00**	**(4.524.117,00)**	**88,18**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006		**UPT PPD Natuna**	**633.537.771,03**	**495.808.039,00**	**(137.729.732,03)**	**78,26**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5	**BELANJA DAERAH**	**633.537.771,03**	**495.808.039,00**	**(137.729.732,03)**	**78,26**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.1	**BELANJA OPERASI**	**633.537.771,03**	**495.808.039,00**	**(137.729.732,03)**	**78,26**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**633.537.771,03**	**495.808.039,00**	**(137.729.732,03)**	**78,26**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007		**UPT PPD Anambas**	**415.953.985,15**	**398.295.368,00**	**(17.658.617,15)**	**95,75**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5	**BELANJA DAERAH**	**415.953.985,15**	**398.295.368,00**	**(17.658.617,15)**	**95,75**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.1	**BELANJA OPERASI**	**415.953.985,15**	**398.295.368,00**	**(17.658.617,15)**	**95,75**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**415.953.985,15**	**398.295.368,00**	**(17.658.617,15)**	**95,75**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008		**UPT PPD Batu Aji**	**896.905.519,09**	**850.311.659,00**	**(46.593.860,09)**	**94,81**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5	**BELANJA DAERAH**	**896.905.519,09**	**850.311.659,00**	**(46.593.860,09)**	**94,81**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.1	**BELANJA OPERASI**	**870.848.319,09**	**827.211.659,00**	**(43.636.660,09)**	**94,99**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**870.848.319,09**	**827.211.659,00**	**(43.636.660,09)**	**94,99**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.2	**BELANJA MODAL**	**26.057.200,00**	**23.100.000,00**	**(2.957.200,00)**	**88,65**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**26.057.200,00**	**23.100.000,00**	**(2.957.200,00)**	**88,65**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009		**UPT PPD Kijang**	**555.180.161,29**	**519.597.770,00**	**(35.582.391,29)**	**93,59**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5	**BELANJA DAERAH**	**555.180.161,29**	**519.597.770,00**	**(35.582.391,29)**	**93,59**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.1	**BELANJA OPERASI**	**528.325.461,29**	**499.118.270,00**	**(29.207.191,29)**	**94,47**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**528.325.461,29**	**499.118.270,00**	**(29.207.191,29)**	**94,47**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.2	**BELANJA MODAL**	**26.854.700,00**	**20.479.500,00**	**(6.375.200,00)**	**76,26**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**26.854.700,00**	**20.479.500,00**	**(6.375.200,00)**	**76,26**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010		**UPT PPD Tanjung Batu**	**382.831.253,75**	**370.126.014,00**	**(12.705.239,75)**	**96,68**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5	**BELANJA DAERAH**	**382.831.253,75**	**370.126.014,00**	**(12.705.239,75)**	**96,68**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.1	**BELANJA OPERASI**	**382.831.253,75**	**370.126.014,00**	**(12.705.239,75)**	**96,68**
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**382.831.253,75**	**370.126.014,00**	**(12.705.239,75)**	**96,68**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002		**UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset**	**1.308.859.740,00**	**1.270.911.177,95**	**(37.948.562,05)**	**97,10**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5	**BELANJA DAERAH**	**1.308.859.740,00**	**1.270.911.177,95**	**(37.948.562,05)**	**97,10**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.308.859.740,00**	**1.270.911.177,95**	**(37.948.562,05)**	**97,10**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.308.859.740,00**	**1.270.911.177,95**	**(37.948.562,05)**	**97,10**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001		**UPT Dana Bergulir**	**284.010.713,00**	**258.747.978,00**	**(25.262.735,00)**	**91,11**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5	**BELANJA DAERAH**	**284.010.713,00**	**258.747.978,00**	**(25.262.735,00)**	**91,11**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.1	**BELANJA OPERASI**	**284.010.713,00**	**258.747.978,00**	**(25.262.735,00)**	**91,11**
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**284.010.713,00**	**258.747.978,00**	**(25.262.735,00)**	**91,11**
5.03			**KEPEGAWAIAN**	**19.793.963.183,00**	**19.316.741.138,00**	**(477.222.045,00)**	**97,59**
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000		**Badan Kepegawaian dan KORPRI**	**19.793.963.183,00**	**19.316.741.138,00**	**(477.222.045,00)**	**97,59**
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**19.793.963.183,00**	**19.316.741.138,00**	**(477.222.045,00)**	**97,59**
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**19.446.905.592,00**	**18.972.664.141,00**	**(474.241.451,00)**	**97,56**
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**16.476.042.863,00**	**16.272.866.469,00**	**(203.176.394,00)**	**98,77**
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.970.862.729,00**	**2.699.797.672,00**	**(271.065.057,00)**	**90,88**
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**347.057.591,00**	**344.076.997,00**	**(2.980.594,00)**	**99,14**
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**347.057.591,00**	**344.076.997,00**	**(2.980.594,00)**	**99,14**
5.04			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**16.498.935.759,00**	**15.325.213.721,00**	**(1.173.722.038,00)**	**92,89**
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000		**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**16.498.935.759,00**	**15.325.213.721,00**	**(1.173.722.038,00)**	**92,89**
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**16.498.935.759,00**	**15.325.213.721,00**	**(1.173.722.038,00)**	**92,89**
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**15.336.938.964,10**	**14.196.835.871,00**	**(1.140.103.093,10)**	**92,57**
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**9.883.650.008,00**	**9.692.655.828,00**	**(190.994.180,00)**	**98,07**
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.453.288.956,10**	**4.504.180.043,00**	**(949.108.913,10)**	**82,60**
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**1.161.996.794,90**	**1.128.377.850,00**	**(33.618.944,90)**	**97,11**
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**1.161.996.794,90**	**1.128.377.850,00**	**(33.618.944,90)**	**97,11**
5.05			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**140.053.042,07**	**129.083.433,00**	**(10.969.609,07)**	**92,17**
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000		**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**140.053.042,07**	**129.083.433,00**	**(10.969.609,07)**	**92,17**
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**140.053.042,07**	**129.083.433,00**	**(10.969.609,07)**	**92,17**
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**140.053.042,07**	**129.083.433,00**	**(10.969.609,07)**	**92,17**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**140.053.042,07**	**129.083.433,00**	**(10.969.609,07)**	**92,17**
5.06			**PENGELOLAAN PERBATASAN**	**6.712.957.924,00**	**6.129.768.952,00**	**(583.188.972,00)**	**91,31**
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000		**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**6.712.957.924,00**	**6.129.768.952,00**	**(583.188.972,00)**	**91,31**
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**6.712.957.924,00**	**6.129.768.952,00**	**(583.188.972,00)**	**91,31**
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**6.712.957.924,00**	**6.129.768.952,00**	**(583.188.972,00)**	**91,31**
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**5.651.131.020,94**	**5.139.971.973,00**	**(511.159.047,94)**	**90,95**
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.061.826.903,06**	**989.796.979,00**	**(72.029.924,06)**	**93,22**
5.07			**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**13.861.882.473,00**	**13.101.772.294,00**	**(760.110.179,00)**	**94,52**
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		**Badan Penghubung Daerah**	**13.861.882.473,00**	**13.101.772.294,00**	**(760.110.179,00)**	**94,52**
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**13.861.882.473,00**	**13.101.772.294,00**	**(760.110.179,00)**	**94,52**
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**13.358.791.073,00**	**12.600.354.354,00**	**(758.436.719,00)**	**94,32**
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**4.242.117.162,00**	**4.136.024.023,00**	**(106.093.139,00)**	**97,50**
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**9.116.673.911,00**	**8.464.330.331,00**	**(652.343.580,00)**	**92,84**
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**503.091.400,00**	**501.417.940,00**	**(1.673.460,00)**	**99,67**
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**503.091.400,00**	**501.417.940,00**	**(1.673.460,00)**	**99,67**
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**51.206.443.087,00**	**49.818.552.697,00**	**(1.387.890.390,00)**	**97,29**
6.01			**INSPEKTORAT DAERAH**	**51.206.443.087,00**	**49.818.552.697,00**	**(1.387.890.390,00)**	**97,29**
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		**Inspektorat**	**51.206.443.087,00**	**49.818.552.697,00**	**(1.387.890.390,00)**	**97,29**
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**51.206.443.087,00**	**49.818.552.697,00**	**(1.387.890.390,00)**	**97,29**
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**50.281.677.187,00**	**48.987.589.640,00**	**(1.294.087.547,00)**	**97,43**
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**32.154.062.673,00**	**31.443.209.193,00**	**(710.853.480,00)**	**97,79**
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**18.127.614.514,00**	**17.544.380.447,00**	**(583.234.067,00)**	**96,78**
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**924.765.900,00**	**830.963.057,00**	**(93.802.843,00)**	**89,86**
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**924.765.900,00**	**830.963.057,00**	**(93.802.843,00)**	**89,86**
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**44.877.969.777,00**	**41.636.034.038,00**	**(3.241.935.739,00)**	**92,78**
8.01			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**44.877.969.777,00**	**41.636.034.038,00**	**(3.241.935.739,00)**	**92,78**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**44.877.969.777,00**	**41.636.034.038,00**	**(3.241.935.739,00)**	**92,78**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**44.877.969.777,00**	**41.636.034.038,00**	**(3.241.935.739,00)**	**92,78**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**43.450.243.743,00**	**40.295.688.337,00**	**(3.154.555.406,00)**	**92,74**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**8.426.861.288,20**	**8.174.112.006,00**	**(252.749.282,20)**	**97,00**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**13.252.152.454,80**	**12.550.646.331,00**	**(701.506.123,80)**	**94,71**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**21.771.230.000,00**	**19.570.930.000,00**	**(2.200.300.000,00)**	**89,89**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**1.427.726.034,00**	**1.340.345.701,00**	**(87.380.333,00)**	**93,88**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**1.407.826.034,00**	**1.320.445.701,00**	**(87.380.333,00)**	**93,79**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**19.900.000,00**	**19.900.000,00**	**0,00**	**100,00**
			Jumlah	**(22.286.164.438,01)**	**(3.169.898.762,08)**	**19.116.265.675,93**	**14,22**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN I.2

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.910.214.946.462,43**	**3.712.434.360.163,46**	**94,94**	**3.958.295.361.262,68**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.904.763.732.160,43**	**1.736.336.133.204,89**	**91,15**	**1.980.461.763.464,68**
4.1.01	Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	444.109.779.594,00	405.307.682.591,00	91,26	596.081.883.938,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	13.628.420.459,00	9.139.165.550,00	67,05	14.600.867.857,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	13.437.883.339,00	8.990.055.846,00	66,90	14.312.861.463,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	82.625.024,00	50.305.594,00	60,88	119.311.461,00
4.1.01.01.01.0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	27.179.835,00	24.523.392,00	90,22	50.812.925,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	80.732.261,00	74.280.718,00	92,00	117.882.008,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	60.098.158.236,00	54.929.599.391,00	91,39	83.223.828.443,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	59.844.173.820,00	54.698.375.997,00	91,40	82.841.464.510,00
4.1.01.01.02.0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	92.782.458,00	72.701.028,00	78,35	141.134.300,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	161.201.958,00	158.522.366,00	98,33	241.229.633,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	255.241.949.229,00	224.538.883.977,00	87,97	331.714.934.959,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	254.210.987.612,00	223.355.743.744,00	87,86	330.170.949.178,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	135.811.561,00	116.059.559,00	85,45	194.320.419,00
4.1.01.01.03.0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	317.808.557,00	321.503.217,00	101,16	467.427.600,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	577.341.499,00	745.577.457,00	129,13	882.237.762,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	295.571.190,00	262.625.008,00	88,85	418.264.750,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	148.351.442,00	138.792.073,00	93,55	205.321.325,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	128.997.805,00	106.653.823,00	82,67	177.792.925,00
4.1.01.01.04.0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	2.299.486,00	3.976.206,00	172,91	3.976.500,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	15.922.457,00	13.202.906,00	82,92	31.174.000,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	2.191.996.115,00	2.842.714.059,00	129,68	3.286.105.834,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.956.433.552,00	2.655.323.642,00	135,72	2.946.660.101,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	105.838.670,00	83.035.601,00	78,45	156.236.525,00
4.1.01.01.05.0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	43.779.334,00	36.893.991,00	84,27	64.110.900,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	85.944.559,00	67.460.825,00	78,49	119.098.308,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	12.802.045.999,00	12.908.463.294,00	100,83	18.472.453.052,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	12.456.651.903,00	12.569.799.541,00	100,90	17.951.831.556,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	45.600.043,00	28.605.679,00	62,73	65.533.725,00
4.1.01.01.06.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	107.993.098,00	106.942.188,00	99,02	164.662.917,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	191.800.955,00	203.115.886,00	105,89	290.424.854,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	9.992.265.696,00	9.160.009.032,00	91,67	14.290.426.591,00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	9.465.204.509,00	8.850.228.720,00	93,50	13.505.715.891,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	443.162.338,00	262.394.035,00	59,20	669.550.200,00
4.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	42.869.489,00	22.650.608,00	52,83	57.096.000,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	41.029.360,00	24.735.669,00	60,28	58.064.500,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	11.909.285.005,00	11.572.695.951,00	97,17	17.226.016.705,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	9.169.543.426,00	9.278.893.427,00	101,19	13.309.594.755,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	2.595.174.012,00	2.162.389.321,00	83,32	3.710.846.450,00
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	56.618.967,00	46.421.298,00	81,98	81.607.500,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	87.948.600,00	84.991.905,00	96,63	123.968.000,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	865.146.629,00	884.247.652,00	102,20	1.237.085.451,00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	849.295.428,00	873.612.240,00	102,86	1.214.230.659,00
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	823.526,00	0,00	0,00	1.067.600,00
4.1.01.01.09.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	9.475.507,00	3.195.734,00	33,72	14.589.492,00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	5.552.168,00	7.439.678,00	133,99	7.197.700,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	76.989.415.721,00	78.977.952.537,00	102,58	111.475.255.121,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	76.823.119.621,00	78.818.323.271,00	102,59	111.232.415.762,00
4.1.01.01.10.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	47.875.951,00	49.285.900,00	102,94	69.785.259,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	118.420.149,00	110.343.366,00	93,17	173.054.100,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	95.525.315,00	91.326.140,00	95,60	136.645.175,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	83.430.295,00	80.653.072,00	96,67	118.170.475,00
4.1.01.01.11.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	2.669.132,00	2.172.594,00	81,39	4.773.200,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	9.425.888,00	8.500.474,00	90,18	13.701.500,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	399.572.412.018,00	273.480.737.600,00	68,44	522.716.638.500,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.011.372.531,00	3.971.040.400,00	98,99	5.386.600.000,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.011.372.531,00	3.971.040.400,00	98,99	5.386.600.000,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	49.163.641.161,00	30.316.626.800,00	61,66	64.727.747.500,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	49.163.641.161,00	30.316.626.800,00	61,66	64.727.747.500,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	216.024.538.321,00	137.745.131.100,00	63,76	283.363.435.000,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	216.024.538.321,00	137.745.131.100,00	63,76	283.363.435.000,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	261.210.867,00	122.397.700,00	46,85	378.975.000,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	261.210.867,00	122.397.700,00	46,85	378.975.000,00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.788.168.053,00	4.276.193.700,00	239,13	2.602.425.000,00
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.788.168.053,00	4.276.193.700,00	239,13	2.602.425.000,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.983.236.208,00	8.080.919.200,00	89,95	11.545.050.000,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.983.236.208,00	8.080.919.200,00	89,95	11.545.050.000,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.366.461.912,00	2.487.726.400,00	73,89	4.335.870.000,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.366.461.912,00	2.487.726.400,00	73,89	4.335.870.000,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.597.758.761,00	7.591.358.000,00	135,61	7.391.990.000,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.597.758.761,00	7.591.358.000,00	135,61	7.391.990.000,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	359.563.296,00	610.246.200,00	169,71	505.800.000,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	359.563.296,00	610.246.200,00	169,71	505.800.000,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	109.737.561.110,00	78.084.468.000,00	71,15	142.115.939.000,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	109.737.561.110,00	78.084.468.000,00	71,15	142.115.939.000,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	278.899.798,00	194.630.100,00	69,78	362.807.000,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	278.899.798,00	194.630.100,00	69,78	362.807.000,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	478.452.376.124,00	489.750.163.677,00	102,36	490.605.194.542,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	240.882.197.402,00	282.523.757.628,00	117,28	255.059.527.531,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	240.882.197.402,00	282.523.757.628,00	117,28	255.059.527.531,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	237.570.178.722,00	207.226.406.049,00	87,22	235.545.667.011,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	237.570.178.722,00	207.226.406.049,00	87,22	235.545.667.011,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,29	1.192.208.723,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,29	1.192.208.723,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,29	1.192.208.723,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,47	167.108.459.437,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,47	167.108.459.437,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,47	167.108.459.437,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
4.1.01.17.01	Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
4.1.01.17.01.0001	Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,96	0,00
4.1.01.18.01	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,96	0,00
4.1.01.18.01.0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan [(],MBLB],	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,96	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	168.940.551.756,24	171.517.367.082,00	101,52	148.286.242.017,30
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	162.484.348.266,00	164.145.264.443,00	101,02	137.516.081.176,30
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	162.484.348.266,00	164.145.264.443,00	101,02	137.516.081.176,30
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	162.484.348.266,00	164.145.264.443,00	101,02	137.516.081.176,30
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.171.572.325,24	5.950.969.639,00	115,07	5.742.143.841,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.819.463.600,00	2.145.830.800,00	117,93	1.927.137.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.519.463.600,00	1.545.830.800,00	101,73	1.609.917.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000,00	475.000.000,00	158,33	317.220.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	125.775.000,00	13.300.000,00	10,57	8.250.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	125.775.000,00	13.300.000,00	10,57	8.250.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000,00	617.849.585,00	88,26	2.510.628.596,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000,00	617.849.585,00	88,26	2.510.628.596,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	136.000.000,00	141.614.550,00	104,12	160.520.545,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	0,00	0,00	88.735.700,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	136.000.000,00	141.614.550,00	104,12	71.784.845,00
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.883.983.725,24	2.237.394.264,00	118,75	0,00
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.883.983.725,24	2.237.394.264,00	118,75	0,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	506.350.000,00	794.980.440,00	157,00	1.135.607.700,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	506.350.000,00	794.980.440,00	157,00	1.135.607.700,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.284.631.165,00	1.421.133.000,00	110,62	5.028.017.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,42	5.009.217.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,42	5.009.217.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.02.03.09	Retribusi Pertambangan Rakyat	84.631.165,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.09.0001	Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat	84.631.165,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40	1.904.909.335,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40	1.904.909.335,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.500.000.000,00	2.275.536.541,00	91,02	1.904.909.335,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.500.000.000,00	2.275.536.541,00	91,02	1.904.909.335,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.484.556.088,19	115.258.171.423,39	99,80	52.566.226.972,38
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	512.084.414,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	69.710.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	69.710.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	442.374.414,00	0,00	0,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	442.374.414,00	0,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	957.027.354,47	0,00	1.336.203.722,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	957.027.354,47	0,00	1.336.203.722,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	957.027.354,47	0,00	1.336.203.722,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.500.000.000,00	3.616.972.805,65	80,37	6.290.193.867,90
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.500.000.000,00	2.632.574.009,25	58,50	4.478.565.314,51
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.500.000.000,00	2.632.574.009,25	58,50	4.478.565.314,51
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	732.404.374,11	0,00	1.617.505.366,33
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	732.404.374,11	0,00	1.617.505.366,33
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	194.123.187,06
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	194.123.187,06
4.1.04.05.06	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	251.994.422,29	0,00	0,00
4.1.04.05.06.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	251.994.422,29	0,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.245.873.063,98	1.889.238.643,57	151,63	339.106.060,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.245.873.063,98	1.889.238.643,57	151,63	339.106.060,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.245.873.063,98	1.889.238.643,57	151,63	339.106.060,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	163.611,88	0,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	163.611,88	0,00	0,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	163.611,88	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	80.794.464,06	0,00	2.713.160.286,90
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	80.794.464,06	0,00	2.713.160.286,90
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	80.794.464,06	0,00	2.713.160.286,90
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	86,94	14.570.561.041,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.955.066.122,21	9.948.896.000,00	71,29	14.542.181.200,00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	293.421.299,00	191.734.700,00	65,34	364.564.700,00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	1.477.024.239,00	998.666.700,00	67,61	1.775.942.100,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	7.340.221.407,21	5.031.246.400,00	68,54	7.228.404.700,00
4.1.04.12.01.0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	4.187.720.274,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	0,00	2.770.900,00	0,00	7.833.700,00
4.1.04.12.01.0028	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	7.535.147,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	649.143.756,00	38.527.200,00	5,93	55.134.300,00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	0,00	348.611.700,00	0,00	504.236.700,00
4.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	0,00	134.098.300,00	0,00	258.806.800,00
4.1.04.12.01.0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	0,00	241.980.100,00	0,00	236.019.900,00
4.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	0,00	23.421.200,00	0,00	38.360.700,00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	0,00	2.936.643.200,00	0,00	4.070.233.900,00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	0,00	1.195.600,00	0,00	2.643.700,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.787.600,00	2.837.900,00	101,80	0,00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	2.787.600,00	1.506.000,00	54,02	0,00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0,00	496.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	484.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	351.900,00	0,00	0,00
4.1.04.12.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	91.312.431,00	0,00	27.713.748,00
4.1.04.12.03.0002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	0,00	91.312.431,00	0,00	27.713.748,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	15.783.456.490,00	15.782.762.058,12	99,99	666.093,00
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	15.783.456.490,00	15.782.762.058,12	99,99	666.093,00
4.1.04.12.18	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	32.671.118,00	0,00	0,00
4.1.04.12.18.0001	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	32.671.118,00	0,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.098.168,00	35.861.416,00	3.265,56	6.501.215,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	341.518,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01.0018	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	341.518,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.098.168,00	35.519.898,00	3.234,46	6.501.215,00
4.1.04.13.02.0016	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.1.04.13.02.0029	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan	1.098.168,00	35.269.505,00	3.211,66	6.291.215,00
4.1.04.13.02.0045	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	250.393,00	0,00	0,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	904.694.700,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	904.694.700,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	904.694.700,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	73.423.349.811,00	76.974.438.969,96	104,83	3.951.467.681,76
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	268.279.192,00	0,00	145.420.254,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	268.279.192,00	0,00	145.420.254,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	253.574.420,00	0,00	257.212.278,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	202.119.438,00	0,00	148.281.798,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	36.879.430,00	0,00	97.866.080,00
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	6.212,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	12.874.000,00	0,00	9.399.400,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	1.670.000,00	0,00	1.665.000,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	25.340,00	0,00	0,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	0,00	2.542.168,00
4.1.04.15.09.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	2.542.168,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	646.000,00
4.1.04.15.10.0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	646.000,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	364.132.357,64	0,00	395.034.137,88
4.1.04.15.15.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku	0,00	3.710.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	3.468.500,00	0,00	998.700,00
4.1.04.15.15.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	8.002.000,00
4.1.04.15.15.0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	235.644.700,00	0,00	370.517.937,88
4.1.04.15.15.0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	47.590.600,00	0,00	15.339.500,00
4.1.04.15.15.0045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	71.118.557,64	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	175.000,00
4.1.04.15.15.0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	320.811.213,00	0,00	851.420.119,88
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	11.600.000,00	0,00	36.786.100,00
4.1.04.15.16.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	13,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	242.571.035,74
4.1.04.15.16.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	39.730.000,00
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	103.600,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0476	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum	0,00	634.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0904	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	105.817.400,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0905	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	55.966.200,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04.15.16.0921	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	143.000.000,00	0,00	134.527.433,33
4.1.04.15.16.0922	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	66.798.555,56
4.1.04.15.16.0923	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	311.911.995,25
4.1.04.15.16.0988	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	19.095.000,00
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	73.405.485,28	0,00	404.212.131,71
4.1.04.15.17.0057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	519,33
4.1.04.15.17.0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	226.893.886,52
4.1.04.15.17.0554	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	185,28	0,00	52.866.948,86
4.1.04.15.17.0562	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	64.093.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0583	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	124.450.777,00
4.1.04.15.17.0610	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	0,00	6.478.300,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0708	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	2.834.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	100.712.924,00	0,00	23.545.000,00
4.1.04.15.18.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	100.712.924,00	0,00	23.545.000,00
4.1.04.15.27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	9.360.000,00
4.1.04.15.27.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	9.360.000,00
4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	73.381.516.011,00	73.454.915.493,72	100,10	482.479.824,02
4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	73.381.516.011,00	73.381.516.011,00	100,00	0,00
4.1.04.15.30.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	73.399.482,72	0,00	482.479.824,02
4.1.04.15.31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	99.105,00	0,00	0,00
4.1.04.15.31.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	99.105,00	0,00	0,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	210.593.714,15	0,00	173.232.852,00
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	194.826.255,00	0,00	7.335.096,00
4.1.04.15.34.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	8.913.559,15	0,00	51.763.447,00
4.1.04.15.34.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	6.853.900,00	0,00	113.964.157,00
4.1.04.15.34.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	170.152,00
4.1.04.15.41	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	0,00	23.580.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.41.0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Jalan	0,00	23.580.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	27.694.500,00	0,00	31.481.500,33
4.1.04.15.46.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	31.481.500,33
4.1.04.15.46.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	15.074.500,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	12.620.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.49	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	0,00	47.696.309,00	0,00	0,00
4.1.04.15.49.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	0,00	2.608.470,00	0,00	0,00
4.1.04.15.49.0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	0,00	45.087.839,00	0,00	0,00
4.1.04.15.51	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	0,00	0,00	23.773.750,00
4.1.04.15.51.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	23.773.750,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	449.997.751,22	0,00	249.173.291,33
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	995.000,00	0,00	170.285.426,31
4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	224.486.451,22	0,00	68.965.865,02
4.1.04.15.61.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	155.301.200,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	9.922.000,00
4.1.04.15.61.0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	69.215.100,00	0,00	0,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	692.508.800,00	0,00	264.644.630,46

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04.15.65.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	0,00	692.508.800,00	0,00	264.644.630,46
4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	291.280.951,00
4.1.04.15.66.0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	0,00	0,00	291.280.951,00
4.1.04.15.68	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0,00	4.913.580,40	0,00	133.117.433,15
4.1.04.15.68.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	0,00	2.420.880,00	0,00	0,00
4.1.04.15.68.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	112.556.500,55
4.1.04.15.68.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	20.560.932,60
4.1.04.15.68.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	2.492.700,40	0,00	0,00
4.1.04.15.73	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman	0,00	0,00	0,00	20.805.000,00
4.1.04.15.73.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanaman-Tanaman	0,00	0,00	0,00	20.805.000,00
4.1.04.15.77	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	113.766.600,00	0,00	12.500.000,00
4.1.04.15.77.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	113.766.600,00	0,00	12.500.000,00
4.1.04.15.82	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	33.344.503,00	0,00	0,00
4.1.04.15.82.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	33.344.503,00	0,00	0,00
4.1.04.15.84	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	40.365.600,00	0,00	143.993.760,00
4.1.04.15.84.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	0,00	40.365.600,00	0,00	143.993.760,00
4.1.04.15.89	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	395.502.469,50	0,00	0,00
4.1.04.15.89.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	373.777.469,50	0,00	0,00
4.1.04.15.89.0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0,00	21.725.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.99	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	41.833.800,00	98.544.952,05	235,56	35.592.600,00
4.1.04.15.99.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.833.800,00	98.544.952,05	235,56	35.592.600,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	6.472.476.433,00	5.227.554.179,52	80,76	22.421.878.770,68
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	3.511.985.000,00	3.066.021.531,00	87,30	3.701.250.776,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	3.511.985.000,00	3.066.021.531,00	87,30	3.701.250.776,00
4.1.04.16.03	Pendapatan BLUD dari Hibah	524.400.000,00	0,00	0,00	16.693.324.096,29
4.1.04.16.03.0001	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	0,00	0,00	0,00	3.912.900.000,00
4.1.04.16.03.0002	Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat	524.400.000,00	0,00	0,00	12.780.424.096,29
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.808.636.982,00	1.965.913.295,00	108,69	1.248.815.078,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.808.636.982,00	1.965.913.295,00	108,69	1.248.815.078,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	627.454.451,00	195.619.353,52	31,17	778.488.820,39
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	88.843.155,00	139.586.765,52	157,11	79.055.935,69
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.06.0006	Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	535.511.296,00	56.032.588,00	10,46	699.432.884,70
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.107.657,16	0,00	4.925.402,14
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.107.657,16	0,00	4.925.402,14
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.107.657,16	0,00	4.925.402,14
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00	26.034.225,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00	26.034.225,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00	26.034.225,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.904.763.732.160,43**	**1.736.336.133.204,89**	**91,15**	**1.980.461.763.464,68**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**	**1.976.533.066.207,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.965.217.978.207,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	318.182.556.980,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	24.469.915.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	150.453.257.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	9.435.749.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	52.283.980,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	13.984.366.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	108.952.867.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	1.314.397.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	4.857.165.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	85.688.000,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	2.761.237.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	1.815.632.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	1.177.916.590.123,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	1.177.916.590.123,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	157.564.483.366,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	0,00	0,00	0,00	48.956.011.194,00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	0,00	0,00	0,00	2.818.515.575,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	0,00	0,00	0,00	38.425.722.123,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	3.074.134.186,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	11.741.796.103,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	27.437.144.515,00
4.2.01.01.03.0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	0,00	0,00	0,00	22.172.209.670,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.938.950.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	311.554.347.738,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	189.107.070.439,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	4.712.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	104.615.759.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.977.250.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	1.042.018.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	3.411.365.644,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	1.559.088.702,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	3.725.918.697,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	403.377.256,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	322.734.238.997,00	297.708.095.000,00	92,24	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	259.185.835.999,00	235.113.496.000,00	90,71	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	40.492.623.000,00	37.347.858.500,00	92,23	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	203.673.170.214,00	187.837.117.100,00	92,22	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	14.636.390.785,00	9.866.006.600,00	67,40	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	383.652.000,00	62.513.800,00	16,29	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	62.391.968.998,00	61.438.165.000,00	98,47	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	8.269.408.565,00	5.643.432.000,00	68,24	0,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	44.486.670.434,00	47.112.647.000,00	105,90	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	1.462.060.420,00	1.353.155.000,00	92,55	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	5.174.137.579,00	5.283.043.000,00	102,10	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	172.804.000,00	172.804.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.055.000,00	1.055.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.02.0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	2.825.833.000,00	1.872.029.000,00	66,24	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.156.434.000,00	1.156.434.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.156.434.000,00	1.156.434.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.199.157.170.680,00	1.199.371.400.647,00	100,01	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.027.586.951.680,00	1.027.801.318.066,00	100,02	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	1.027.586.951.680,00	1.027.801.318.066,00	100,02	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	171.570.219.000,00	171.570.082.581,00	99,99	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	83.540.028.000,00	83.539.891.581,00	99,99	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	74.094.740.000,00	74.094.740.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.935.451.000,00	13.935.451.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	458.999.545.125,00	453.983.730.377,00	98,90	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	92.350.324.000,00	88.988.492.951,00	96,35	0,00
4.2.01.09.01.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	445.976.000,00	441.556.000,00	99,00	0,00
4.2.01.09.01.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	10.500.000.000,00	10.283.984.489,00	97,94	0,00
4.2.01.09.01.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	4.341.516.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	77.062.832.000,00	74.535.250.272,00	96,72	0,00
4.2.01.09.01.0117	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	3.727.702.190,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	366.649.221.125,00	364.995.237.426,00	99,54	0,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	199.623.598.000,00	197.849.635.997,00	99,11	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.825.750.000,00	4.825.750.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	135.372.807.000,00	135.956.861.200,00	100,43	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.002.500.000,00	1.848.250.000,00	92,29	0,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.430.251.000,00	1.343.507.500,00	93,93	0,00
4.2.01.09.02.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	999.000.000,00	999.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	13.200.522.495,00	13.200.522.495,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.881.478.000,00	3.658.395.604,00	94,25	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	445.954.630,00	445.954.630,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	27.360.000,00	27.360.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.640.000.000,00	4.640.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**1.980.890.954.802,00**	**1.951.063.226.024,00**	**98,49**	**1.965.217.978.207,00**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.06	Insentif Fiskal	23.236.157.000,00	23.236.157.000,00	100,00	11.315.088.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	11.315.088.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	11.315.088.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	23.236.157.000,00	23.236.157.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	23.236.157.000,00	23.236.157.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**23.236.157.000,00**	**23.236.157.000,00**	**100,00**	**11.315.088.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**	**1.976.533.066.207,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**	**1.300.531.591,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85	1.300.531.591,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,77	1.292.700.000,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,77	1.292.700.000,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,77	1.292.700.000,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	504.139.934,57	0,00	7.831.591,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	504.139.934,57	0,00	7.831.591,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	504.139.934,57	0,00	7.831.591,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**	**1.300.531.591,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.910.214.946.462,43**	**3.712.434.360.163,46**	**94,94**	**3.958.295.361.262,68**
5	**BELANJA DAERAH**	**3.932.501.110.900,44**	**3.715.604.258.925,54**	**94,48**	**4.071.747.457.825,29**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.944.090.151.988,51**	**2.779.255.950.571,38**	**94,40**	**2.987.193.758.080,43**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.468.712.653.029,50	1.448.897.643.513,04	98,65	1.309.833.869.704,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	600.193.813.071,18	586.350.321.322,04	97,69	477.549.846.508,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	442.751.060.874,89	435.076.249.629,00	98,26	347.456.590.539,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	266.419.426.814,17	262.871.998.669,00	98,66	262.185.101.679,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	176.331.634.060,72	172.204.250.960,00	97,65	85.271.488.860,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.002.902.494,73	38.377.680.246,00	95,93	32.159.667.412,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.003.522.752,87	25.549.897.312,00	98,25	25.661.636.316,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.999.379.741,86	12.827.782.934,00	91,63	6.498.031.096,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.426.769.866,11	7.242.260.000,00	97,51	7.454.500.540,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.426.769.866,11	7.242.260.000,00	97,51	7.454.500.540,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	33.912.886.509,62	32.731.834.664,00	96,51	31.716.949.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.398.497.709,41	22.361.026.000,00	95,56	23.017.341.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10.514.388.800,21	10.370.808.664,00	98,63	8.699.608.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.510.863.393,99	7.305.948.000,00	97,27	3.119.158.575,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.949.043.534,55	2.854.048.000,00	96,77	3.119.158.575,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.561.819.859,44	4.451.900.000,00	97,59	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	24.736.981.810,36	24.093.228.750,00	97,39	19.155.886.620,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.463.125.776,12	14.230.819.680,00	98,39	14.462.056.740,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.273.856.034,24	9.862.409.070,00	95,99	4.693.829.880,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	706.535.280,67	582.098.638,00	82,38	731.608.684,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	704.535.280,67	582.098.638,00	82,62	731.608.684,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.986.161,71	6.795.021,04	85,08	5.104.961,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.059.774,75	3.391.141,00	83,53	3.792.904,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.926.386,96	3.403.880,04	86,69	1.312.057,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	38.861.392.025,63	37.246.323.224,00	95,84	32.885.612.268,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.352.259.536,41	24.911.083.101,00	94,53	25.427.096.918,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.509.132.489,22	12.335.240.123,00	98,60	7.458.515.350,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	957.554.960,92	921.986.776,00	96,28	716.293.080,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	565.246.136,40	540.556.715,00	95,63	539.228.613,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	392.308.824,52	381.430.061,00	97,22	177.064.467,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.823.755.425,61	2.765.916.374,00	97,95	2.148.474.829,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.658.753.392,77	1.621.673.662,00	97,76	1.617.303.623,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.165.002.032,84	1.144.242.712,00	98,21	531.171.206,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	495.124.266,94	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	475.978.058,94	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	19.146.208,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	804.172.071.553,69	791.519.964.438,00	98,42	608.621.438.978,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	406.065.743.134,37	399.289.809.644,00	98,33	383.939.228.872,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	314.106.854.381,00	307.767.304.098,00	97,98	302.169.551.682,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	91.958.888.753,37	91.522.505.546,00	99,52	81.769.677.190,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.132.056.882,28	1.091.725.590,00	96,43	1.093.645.059,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.065.778.050,08	1.025.539.188,00	96,22	1.027.468.927,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	66.278.832,20	66.186.402,00	99,86	66.176.132,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	36.290.686.728,98	35.417.223.095,00	97,59	35.683.949.932,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	35.816.651.486,96	34.971.761.906,00	97,64	35.287.140.917,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	474.035.242,02	445.461.189,00	93,97	396.809.015,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.981.758.365,96	9.618.291.967,00	96,35	9.610.563.036,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	9.412.758.366,00	9.145.969.114,00	97,16	9.018.367.451,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	568.999.999,96	472.322.853,00	83,00	592.195.585,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	185.423.502.111,55	181.686.068.322,00	97,98	178.294.052.079,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	180.823.345.622,39	177.139.703.442,00	97,96	174.137.293.232,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.600.156.489,16	4.546.364.880,00	98,83	4.156.758.847,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	165.278.324.330,55	164.416.845.820,00	99,47	0,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	8.864.802.989,28	8.835.118.721,00	99,66	0,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.168.387.756,00	5.165.704.270,00	99,94	0,00
5.1.01.02.06.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.203.407.147,00	10.161.640.029,00	99,59	0,00
5.1.01.02.06.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	727.513.130,27	720.552.100,00	99,04	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	136.745.346.208,00	136.231.823.200,00	99,62	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.456.117.100,00	1.343.507.500,00	92,26	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.112.750.000,00	1.958.500.000,00	92,69	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	169.973.975.468,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	34.609.488.780,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	13.315.589.697,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	11.354.921.446,00
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	9.938.977.637,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	103.322.822.388,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	103.322.822.388,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	1.189.209.900,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	1.189.209.900,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.977.250.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.977.250.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	27.846.404.400,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	27.457.284.400,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	389.120.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.638.611.361,63	29.023.911.364,00	97,92	28.329.573.243,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.420.800.000,00	1.420.800.000,00	100,00	1.297.950.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.420.800.000,00	1.420.800.000,00	100,00	1.297.950.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	174.141.000,00	174.141.000,00	100,00	163.521.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	174.141.000,00	174.141.000,00	100,00	163.521.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	131.949.240,00	131.949.240,00	100,00	131.080.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	131.949.240,00	131.949.240,00	100,00	131.080.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	122.040.000,00	122.040.000,00	100,00	119.775.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	122.040.000,00	122.040.000,00	100,00	119.775.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.060.160.000,00	2.060.160.000,00	100,00	1.882.027.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.060.160.000,00	2.060.160.000,00	100,00	1.882.027.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.875.000,00	97.875.000,00	100,00	80.866.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.875.000,00	97.875.000,00	100,00	80.866.500,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	100,00	7.920.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	100,00	7.920.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	100,00	1.320.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	100,00	1.320.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.947.161,62	17.847.164,00	99,44	21.514.303,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.947.161,62	17.847.164,00	99,44	21.514.303,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.297.298.960,00	8.297.298.960,00	100,00	8.123.138.740,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	125.583.120,00	125.583.120,00	100,00	91.618.740,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.928.960,00	2.928.960,00	100,00	2.880.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.786.880,00	8.786.880,00	100,00	8.640.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.160.000.000,00	8.160.000.000,00	100,00	8.020.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.636.800.000,00	6.636.800.000,00	100,00	6.664.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.636.800.000,00	6.636.800.000,00	100,00	6.664.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	614.600.000,01	0,00	0,00	605.700.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	614.600.000,01	0,00	0,00	605.700.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.636.639.187,00	1.186.363.100,00	72,48	1.321.600.258,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00	75.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00	75.600.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.696.000,00	3.696.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.696.000,00	3.696.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	131.760.000,00	131.760.000,00	100,00	136.080.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	131.760.000,00	131.760.000,00	100,00	136.080.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00	3.910.680,00	100,00	1.738.080,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00	3.910.680,00	100,00	1.738.080,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.264.204,00	2.794.718,00	85,61	3.860.241,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.264.204,00	2.794.718,00	85,61	3.860.241,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.720,00	1.720,00	100,00	1.920,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.720,00	1.720,00	100,00	1.920,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.628.480,00	7.392.000,00	85,66	7.257.600,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.628.480,00	7.392.000,00	85,66	7.257.600,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	100,00	155.520,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	100,00	155.520,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	100,00	466.560,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	100,00	466.560,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.346.756.023,00	898.185.902,00	66,69	1.096.440.337,00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	400.894.426,00	296.322.106,00	73,91	404.038.707,00
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	390.075.361,00	191.053.029,00	48,97	336.719.737,00
5.1.01.05.10.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	518.978.338,00	383.604.119,00	73,91	355.681.893,00
5.1.01.05.10.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	36.807.898,00	27.206.648,00	73,91	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.000.017.856,00	3.000.017.856,00	100,00	2.808.613.442,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	300.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	300.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.640.017.856,00	2.640.017.856,00	100,00	2.508.613.442,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.640.017.856,00	2.640.017.856,00	100,00	2.508.613.442,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	30.071.500.000,00	37.817.065.433,00	125,75	21.228.821.807,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	30.071.500.000,00	37.817.065.433,00	125,75	21.228.821.807,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	30.071.500.000,00	37.817.065.433,00	125,75	21.228.821.807,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.294.788.524.618,62	1.161.921.240.159,38	89,73	1.311.138.772.714,16
5.1.02.01	Belanja Barang	367.769.476.420,29	314.317.487.277,45	85,46	293.215.797.830,25
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	363.035.593.254,29	311.125.390.664,45	85,70	293.189.475.830,25
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.814.378.927,91	2.063.229.212,26	73,31	3.392.570.000,44
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	698.491.470,00	625.539.461,00	89,55	140.667.650,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.552.708.360,43	21.375.961.177,00	99,17	23.860.809.937,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	591.550.335,00	534.126.169,00	90,29	1.036.749.870,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	455.570.598,00	448.880.598,00	98,53	197.617.400,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	41.753.805,00	41.273.458,00	98,84	58.325.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	39.707.106,00	35.436.900,00	89,24	23.060.400,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	176.292.000,00	173.761.300,00	98,56	70.083.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.859.857.605,00	1.761.782.609,00	36,25	1.360.837.750,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.463.395.749,00	2.366.970.664,00	96,08	3.480.796.200,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.592.594.180,00	1.591.369.258,00	99,92	508.839.694,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	32.402.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	704.700,00	682.650,00	96,87	8.891.830,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	49.964.720,00	48.963.397,00	97,99	60.885.892,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	132.640.230,00	130.895.085,00	98,68	71.607.540,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	138.861.000,00	137.500.000,00	99,01	136.180.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.881.100.527,29	4.464.962.218,00	91,47	4.590.617.811,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.450.095.047,42	4.107.915.326,00	92,31	4.356.185.789,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.378.585.770,73	13.780.092.602,00	89,60	11.917.286.335,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	760.794.337,47	617.061.095,00	81,10	861.015.500,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.956.583.685,57	1.757.902.285,00	89,84	1.187.045.509,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.294.125.305,53	3.914.865.593,00	91,16	5.050.087.960,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.249.389.412,00	2.084.083.726,00	92,65	2.395.812.193,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.176.342.262,38	909.697.324,00	77,33	1.366.250.697,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	46.052.480,00	45.411.100,00	98,60	30.378.400,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	211.305.250,00	187.325.905,00	88,65	481.819.200,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.175.460.051,00	2.981.531.887,00	93,89	2.465.411.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.507.487.267,00	2.336.678.826,00	93,18	4.326.815.654,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.895.297.449,87	3.157.835.511,00	64,50	69.906.799,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.541.413.580,50	1.872.918.673,25	73,69	4.134.276.337,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	211.314.911.457,50	175.182.869.189,94	82,90	154.789.780.745,81
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	10.357.659.163,00	9.335.314.701,00	90,12	2.603.844.025,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	907.200,00	816.000,00	89,94	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.008.655.725,63	2.891.656.764,00	96,11	1.157.134.653,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	191.448.240,00	189.755.150,00	99,11	47.626.605,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.425.325.585,69	1.408.820.658,00	98,84	3.350.629.472,00
5.1.02.01.01.0047	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.967.300,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.022.325.042,37	19.199.832.819,00	91,33	19.906.755.082,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.367.405.870,00	10.017.931.683,00	96,62	11.875.253.948,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30.672.000,00	24.864.000,00	81,06	20.925.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	797.557.000,00	666.417.000,00	83,55	171.006.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	88.413.600,00	56.828.000,00	64,27	95.951.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.078.657.804,00	13.874.781.259,00	92,01	14.757.583.540,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	287.500.000,00	287.105.000,00	99,86	275.250.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	715.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.379.649.500,00	1.227.862.525,00	88,99	1.767.779.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	507.260.196,00	488.477.125,00	96,29	1.170.716.012,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	4.400.000,00	4.398.000,00	99,95	2.400.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	696.000,00	690.000,00	99,13	598.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	16.897.000,00	15.717.600,00	93,02	26.040.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	425.100.000,00	420.536.470,00	98,92	1.023.895.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	313.758.102,00	305.208.430,00	97,27	228.843.300,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.825.108.055,00	1.538.481.630,00	84,29	1.105.052.700,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	236.407.500,00	235.447.650,00	99,59	235.420.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	219.375.000,00	193.925.001,00	88,39	132.340.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.575.000,00	4.420.000,00	96,61	5.123.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	4.575.000,00	4.420.000,00	96,61	2.028.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	515.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.729.308.166,00	3.187.676.613,00	67,40	21.199.000,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	360.000,00	88.800,00	24,66	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.929.600,00	23.176.800,00	89,38	0,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.057.940,00	990.990,00	48,15	0,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	78.925.005,00	51.154.000,00	64,81	0,00
5.1.02.01.04.0136	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	24.120.000,00	21.950.000,00	91,00	0,00
5.1.02.01.04.0138	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	7.997.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0371	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	11.940.000,00	11.940.000,00	100,00	3.800.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	12.199.000,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	17.800.000,00	17.500.000,00	98,31	5.200.000,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.240.080,00	13.199.999,00	99,69	0,00
5.1.02.01.04.0545	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	4.432.856.341,00	2.964.199.980,00	66,86	0,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	50.958.000,00	50.590.469,00	99,27	0,00
5.1.02.01.04.0713	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	20.988.000,00	20.851.681,00	99,35	0,00
5.1.02.01.04.0715	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	2.664.000,00	2.645.405,00	99,30	0,00
5.1.02.01.04.0718	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	9.472.000,00	9.388.489,00	99,11	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	488.652.796.542,19	446.336.500.472,61	91,34	518.729.152.485,59
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	337.286.197.636,39	310.444.272.893,34	92,04	376.907.284.456,71
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.310.049.054,00	5.497.059.500,00	87,11	6.937.009.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.239.420.000,00	8.067.892.000,00	97,91	9.779.920.999,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.242.190.000,00	2.034.450.225,00	90,73	1.184.198.514,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	402.180.000,00	399.180.000,00	99,25	685.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	57.326.000,00	42.560.000,00	74,24	20.239.500,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.030.570.000,00	8.440.970.000,00	93,47	1.778.520.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	390.000.000,00	386.000.000,00	98,97	383.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	76.441.161.184,33	76.021.181.266,48	99,45	85.362.384.937,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.007.330.486,00	9.299.473.121,00	92,92	17.100.722.366,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	43.306.680,00	38.188.400,00	88,18	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.027.364.193,00	837.832.597,00	81,55	1.877.924.942,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	742.370.000,00	718.130.000,00	96,73	1.309.315.952,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	207.133.470,00	188.093.787,00	90,80	363.657.394,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	309.410.000,00	254.473.010,00	82,24	1.114.065.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	59.558.409.760,08	57.953.705.364,00	97,30	126.845.491.824,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.175.575.552,00	4.157.541.962,00	99,56	12.744.400.349,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.609.394.367,68	8.257.056.358,00	95,90	8.833.310.669,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.505.702.314,00	15.096.394.859,00	91,46	14.805.415.085,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.762.848.754,04	3.610.623.736,00	95,95	3.082.744.623,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.763.968.227,62	2.214.822.545,00	80,13	989.499.477,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	450.000.000,00	350.000.000,00	77,77	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.053.000.000,00	1.037.850.000,00	98,56	1.472.800.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	694.455.000,00	693.255.000,00	99,82	565.478.220,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	632.863.450,00	435.433.046,86	68,80	1.022.744.832,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.522.300,00	1.595.300,00	28,88	2.864.500,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.460.000.000,00	10.430.859.109,00	83,71	7.567.619.270,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	565.200.000,00	535.700.000,00	94,78	163.200.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	505.684.984,00	478.876.270,00	94,69	382.906.050,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	252.305.856,00	252.268.756,00	99,98	58.778.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	461.414.400,00	411.263.359,00	89,13	275.311.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	22.070.173.391,00	16.394.241.868,00	74,28	34.551.919.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	337.812.070,00	324.458.738,00	96,04	870.657.026,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	723.680.224,00	476.041.555,00	65,78	1.194.953.928,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	697.365.547,96	525.205.702,00	75,31	447.988.912,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23.999.047.282,68	21.703.519.469,00	90,43	21.878.886.562,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	594.336.600,00	570.216.590,00	95,94	1.201.710.454,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.474.231.759,40	7.223.499.079,00	85,24	8.263.193.554,71
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	922.644.444,00	900.844.244,00	97,63	688.858.372,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	23.452.482,00	23.452.482,00	100,00	93.656.100,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	0,00	0,00	1.795.789,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.830.887.803,00	2.257.081.969,00	79,73	972.212.756,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	3.421.634.042,00	15.624.000,00	0,45	24.429.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.518.126.030,06	33.361.729.350,00	91,35	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	174.536.000,00	119.352.000,00	68,38	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	4.495.000.000,00	4.451.708.711,00	99,03	0,00
5.1.02.02.01.0085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	237.173.183,54	217.159.102,00	91,56	0,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	115.024.160,00	81.231.993,00	70,62	0,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	2.872.455.488,00	2.826.919.870,00	98,41	0,00
5.1.02.02.01.0089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	93.957.492,00	72.357.492,00	77,01	0,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	653.603.604,00	631.999.108,00	96,69	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.956.897.643,40	40.903.232.169,75	95,21	43.336.152.424,40
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	11.779.054.403,00	11.764.784.000,00	99,87	10.681.242.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.589.420.000,00	8.509.010.000,00	99,06	8.040.235.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	687.055.200,00	680.512.000,00	99,04	643.218.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.551.622.238,17	6.992.742.395,00	92,59	10.950.525.234,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	438.174.618,97	386.709.681,00	88,25	7.017.759.062,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	537.840.783,46	508.195.765,00	94,48	822.225.081,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	941.824.235,80	922.087.983,75	97,90	425.540.847,40
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	4.236.059.764,00	2.983.983.145,00	70,44	4.755.406.400,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	8.195.846.400,00	8.155.207.200,00	99,50	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	165.150.000,00	127.150.000,00	76,99	12.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	120.000.000,00	115.000.000,00	95,83	0,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	45.150.000,00	12.150.000,00	26,91	12.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	34.647.250.584,30	33.725.341.655,00	97,33	45.081.309.757,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	50.585.000,00	50.585.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	5.000.000,00	4.773.000,00	95,46	9.500.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.351.378.500,00	9.183.239.243,00	98,20	12.529.575.311,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	52.500.000,00	36.838.500,00	70,16	42.520.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	24.200.000,00	21.700.000,00	89,66	7.100.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.529.293.887,00	4.211.225.400,00	92,97	2.816.403.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.675.876.000,00	2.667.050.000,00	99,67	6.474.612.000,00
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	3.108.891.000,00	3.103.505.963,00	99,82	6.283.195.587,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.642.828.500,00	1.610.005.130,00	98,00	2.896.409.320,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	29.760.000,00	29.760.000,00	100,00	495.255.000,00
5.1.02.02.04.0120	Belanja Sewa Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	29.948.724,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.430.000,00	14.430.000,00	100,00	14.430.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	36.500.000,00	34.126.700,00	93,49	101.200.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	13.070.007.697,30	12.720.868.619,00	97,32	13.320.692.815,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	54.000.000,00	37.234.100,00	68,95	56.898.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.912.789.571,20	13.252.413.054,00	95,25	13.598.627.647,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.101.521.650,00	2.974.757.900,00	95,91	2.153.848.333,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	150.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	130.925.200,00	129.788.400,00	99,13	8.700.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	361.500.000,00	339.200.000,00	93,83	212.500.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.291.042.000,00	2.280.578.000,00	99,54	1.860.844.000,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00	8.880.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	15.000.000,00	14.824.600,00	98,83	16.867.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	303.341.761,20	290.350.000,00	95,71	460.244.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	987.406.920,00	982.629.720,00	99,51	912.353.400,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	6.206.815.040,00	5.751.851.434,00	92,66	768.503.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	259.757.000,00	254.553.000,00	97,99	7.045.887.914,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	41.300.223.233,03	30.746.441.227,52	74,44	28.037.664.231,48
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	5.643.728.500,00	3.579.866.789,47	63,43	2.448.704.990,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	6.770.702.800,00	5.790.511.647,00	85,52	11.313.827.514,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.317.738.839,00	1.857.924.538,62	80,16	2.955.631.795,50
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	94.682.512,00	94.682.511,60	99,99	475.252.605,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	80.000.000,00	79.493.750,00	99,36	0,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.763.092.320,00	1.458.704.747,00	82,73	858.708.820,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.488.040.914,00	2.334.178.624,00	66,91	1.257.359.160,00
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	0,00	0,00	9.768.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	1.412.433.985,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	15.254.272.786,03	11.940.993.480,17	78,27	2.703.384.829,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.718.727.378,00	1.789.356.714,66	65,81	2.931.717.622,98
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.120.863.524,00	1.119.515.081,00	52,78	1.499.215.630,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	630.432.660,00	384.921.150,00	61,05	171.659.280,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	417.941.000,00	316.292.194,00	75,67	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.587.602.500,00	4.287.122.350,00	93,45	2.128.728.322,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	599.999.700,00	598.384.350,00	99,73	0,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00	0,00	0,00	153.600.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.987.602.800,00	3.688.738.000,00	92,50	1.962.128.322,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00	19.256.835,00
5.1.02.02.10.0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	0,00	0,00	0,00	19.256.835,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	240.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	140.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.407.448.818,83	10.470.251.480,00	91,78	6.375.200.551,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	11.321.744.458,83	10.397.816.480,00	91,83	6.149.629.551,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	9.500.000,00	3.600.000,00	37,89	0,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	76.204.360,00	68.835.000,00	90,32	225.571.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.314.236.555,04	2.305.275.643,00	99,61	2.985.928.261,00
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	708.505.538,00	706.100.282,00	99,66	1.085.682.815,00
5.1.02.02.13.0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	620.680.919,00	620.262.230,00	99,93	937.864.536,00
5.1.02.02.13.0003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	920.002.219,00	914.082.928,00	99,35	962.380.910,00
5.1.02.02.13.0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	65.047.879,04	64.830.203,00	99,66	0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	56.389.648.454,20	41.750.101.777,92	74,03	68.400.450.864,92
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.325.695.999,00	2.080.412.050,00	89,45	773.550.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	2.325.695.999,00	2.080.412.050,00	89,45	773.550.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.543.959.321,00	12.807.801.498,00	88,06	12.596.986.085,33
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	47.763.600,00	38.223.600,00	80,02	20.932.500,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	191.880.000,00	177.000.000,00	92,24	88.200.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	290.000.350,00	183.808.670,00	63,38	1.155.295.079,33

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	26.110.000,00	23.707.000,00	90,79	39.636.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	769.741.250,00	708.284.532,00	92,01	709.680.514,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.823.085.028,00	5.348.914.828,00	91,85	4.478.654.362,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	129.285.000,00	104.848.664,00	81,09	188.390.262,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.357.598.250,00	1.350.133.200,00	99,45	1.271.207.550,00
5.1.02.03.02.0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	0,00	0,00	0,00	719.500.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	145.870.000,00	126.051.600,00	86,41	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	242.220.000,00	227.983.500,00	94,12	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	619.761.090,00	604.757.200,00	97,57	231.809.200,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	148.967.500,00	147.777.750,00	99,20	323.524.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.064.847.423,00	2.226.987.909,00	72,66	1.975.784.872,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	294.583.330,00	264.497.000,00	89,78	53.880.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	137.000.000,00	136.854.000,00	99,89	0,00
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	10.578.000,00
5.1.02.03.02.0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	96.241.000,00	95.715.300,00	99,45	109.725.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	22.444.800,00	22.200.000,00	98,90	54.450.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.136.560.700,00	1.020.056.745,00	89,74	1.165.738.746,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.274.976.137,20	12.189.625.013,00	60,12	48.582.810.058,59
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.642.206.905,70	9.337.335.384,55	56,10	27.099.841.896,06
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	47.065.983,99
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	99.345.259,00	99.289.631,95	99,94	0,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.472.828.282,50	1.430.744.750,28	97,14	168.791.820,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.012.000.000,00	487.005.586,22	48,12	21.137.510.358,54
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	272.794.680,00	235.800.000,00	86,43	129.600.000,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	597.949.010,00	578.159.860,00	96,69	0,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	177.852.000,00	21.289.800,00	11,97	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.245.016.997,00	14.672.263.216,92	76,23	6.447.104.721,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	11.350.573.923,00	9.042.462.663,00	79,66	4.016.214.400,00
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	80.000.000,00	79.690.200,00	99,61	1.836.309.990,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.540.000.000,00	369.187.200,00	14,53	0,00
5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.406.123.300,00	3.406.123.300,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.311.028.774,00	1.219.120.773,44	92,98	522.480.331,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	513.446.000,00	512.167.080,48	99,75	72.100.000,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	43.845.000,00	43.512.000,00	99,24	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	96.421.983.923,55	87.845.288.867,00	91,10	125.068.460.538,50
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	95.989.497.280,57	87.675.272.598,00	91,33	124.695.811.106,50
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.747.261.095,27	83.007.114.864,00	91,47	118.247.877.151,50
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.752.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.976.692.888,30	3.676.654.000,00	92,45	4.227.318.300,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	426.172.495,00	295.211.874,00	69,27	761.818.723,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	834.618.802,00	696.291.860,00	83,42	1.458.796.932,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	432.486.642,98	170.016.269,00	39,31	372.649.432,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar Negeri	432.486.642,98	170.016.269,00	39,31	372.649.432,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.999.883.800,00	28.419.098.677,00	97,99	54.371.556.702,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.042.698.800,00	4.987.278.977,00	98,90	6.662.560.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.225.348.800,00	1.177.928.977,00	96,13	775.560.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	815.850.000,00	815.850.000,00	100,00	1.399.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	2.998.500.000,00	2.993.500.000,00	99,83	4.488.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.957.185.000,00	23.431.819.700,00	97,80	47.708.996.702,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	23.957.185.000,00	23.431.819.700,00	97,80	47.692.746.702,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	106.842.994.373,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	106.842.994.373,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	106.842.994.373,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	116.987.962.046,00	113.061.921.817,84	96,64	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	116.987.962.046,00	113.061.921.817,84	96,64	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	116.108.212.046,00	113.061.921.817,84	97,37	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	879.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	139.566.773.432,39	130.190.841.269,56	93,28	144.510.359.919,90
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	139.566.773.432,39	130.190.841.269,56	93,28	144.510.359.919,90
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	139.566.773.432,39	130.190.841.269,56	93,28	144.510.359.919,90
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00
5.1.05	Belanja Hibah	174.868.035.279,01	165.767.273.907,96	94,79	357.581.329.209,27
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	24.891.916.495,00	19.752.937.062,67	79,35	158.511.792.275,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	147.213.011.075,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	147.213.011.075,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	20.891.916.495,00	15.752.937.062,67	75,40	11.298.781.200,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	20.891.916.495,00	15.752.937.062,67	75,40	11.298.781.200,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	105.921.148.784,01	102.242.047.979,29	96,52	157.544.331.693,27
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.549.435.800,00	27.146.607.739,00	98,53	23.132.519.267,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.090.000.000,00	16.903.187.450,00	98,90	22.923.400.067,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.459.435.800,00	10.243.420.289,00	97,93	209.119.200,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.409.393.800,00	47.939.194.434,00	95,09	105.107.423.869,09
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	44.809.939.300,00	42.340.019.950,00	94,48	99.743.800.012,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.599.454.500,00	5.599.174.484,00	99,99	5.363.623.857,09
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.012.319.184,01	26.206.245.806,29	97,01	29.134.388.557,18
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.498.300.000,00	2.278.300.000,00	91,19	7.836.500.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.514.019.184,01	23.927.945.806,29	97,60	21.297.888.557,18
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00	170.000.000,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00	170.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	38.935.740.000,00	38.653.058.866,00	99,27	36.870.020.909,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.995.640.000,00	33.716.349.341,00	99,17	32.930.722.526,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.995.640.000,00	33.716.349.341,00	99,17	32.930.722.526,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.940.100.000,00	4.936.709.525,00	99,93	3.939.298.383,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.940.100.000,00	4.936.709.525,00	99,93	3.939.298.383,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.119.230.000,00	5.119.230.000,00	100,00	4.655.184.332,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.119.230.000,00	5.119.230.000,00	100,00	4.655.184.332,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.119.230.000,00	5.119.230.000,00	100,00	4.655.184.332,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,23	4.002.925.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	2.972.600.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	2.972.600.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	2.972.600.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,23	910.325.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,23	776.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,23	776.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	134.325.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	134.325.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.944.090.151.988,51**	**2.779.255.950.571,38**	**94,40**	**2.987.193.758.080,43**
5.2	**BELANJA MODAL**	**269.313.511.475,33**	**232.159.877.710,16**	**86,20**	**307.344.075.589,86**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.735.653.121,33	81.499.424.632,00	91,84	115.508.155.838,84
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	60.473.770,00	53.759.700,00	88,89	605.244.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	60.473.770,00	53.759.700,00	88,89	605.244.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	598.500.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	60.473.770,00	53.759.700,00	88,89	6.744.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.755.836.100,00	8.834.340.156,00	90,55	15.316.607.100,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.928.766.100,00	5.027.770.156,00	84,80	15.316.607.100,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.615.100.000,00	1.615.100.000,00	100,00	4.192.800.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.128.875.900,00	2.982.106.756,00	95,30	9.851.257.100,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.002.443.200,00	335.614.000,00	33,47	1.159.450.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	182.347.000,00	94.949.400,00	52,07	113.100.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	3.827.070.000,00	3.806.570.000,00	99,46	0,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1.230.000.000,00	1.209.500.000,00	98,33	0,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.597.070.000,00	2.597.070.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	357.114.700,00	349.880.500,00	97,97	184.490.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	347.461.300,00	340.728.500,00	98,06	0,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	3.570.800,00	2.553.000,00	71,49	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	343.890.500,00	338.175.500,00	98,33	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.873.400,00	1.650.000,00	88,07	16.800.000,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.873.400,00	1.650.000,00	88,07	0,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	7.780.000,00	7.502.000,00	96,42	167.690.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	7.780.000,00	7.502.000,00	96,42	156.590.000,00
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	105.482.100,00	104.523.717,00	99,09	1.284.714.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	105.482.100,00	104.523.717,00	99,09	1.284.714.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	55.030.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.240.900,00	8.218.700,00	99,73	29.290.000,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.049.572.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	97.241.200,00	96.305.017,00	99,03	150.822.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.906.361.166,40	14.562.747.870,00	86,13	21.725.083.804,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.567.331.495,00	1.084.099.845,00	69,16	1.888.000.694,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	440.100.090,00	319.047.345,00	72,49	598.220.695,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.127.231.405,00	765.052.500,00	67,87	1.289.779.999,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.216.443.497,40	12.409.373.114,00	87,28	17.289.622.022,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.919.174.108,00	5.110.722.878,00	86,34	14.946.007.224,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	45.545.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5.900.845.439,90	5.307.111.441,00	89,93	788.585.200,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	117.350.083,00	10.864.300,00	9,25	21.285.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.232.998.966,50	1.936.075.496,00	86,70	1.477.873.998,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	46.074.900,00	44.598.999,00	96,79	10.325.600,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.122.586.174,00	1.069.274.911,00	95,25	2.547.461.088,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	100.467.444,00	97.738.760,00	97,28	167.482.059,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	198.882.009,00	167.468.900,00	84,20	54.202.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	240.091.609,00	237.835.450,00	99,06	126.693.159,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	19.680.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	583.145.112,00	566.231.801,00	97,09	2.179.403.870,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.553.827.517,00	2.462.508.590,00	96,42	1.048.602.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.510.963.446,00	2.423.531.150,00	96,51	842.013.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.624.015.996,00	1.611.712.200,00	99,24	492.338.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	581.552.450,00	506.524.550,00	87,09	349.675.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	34.000.000,00	33.966.000,00	99,90	0,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	271.395.000,00	271.328.400,00	99,97	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	38.206.571,00	34.703.940,00	90,83	42.399.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	38.206.571,00	34.703.940,00	90,83	42.399.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	56.690.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	56.690.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	4.657.500,00	4.273.500,00	91,75	107.500.000,00
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	4.657.500,00	4.273.500,00	91,75	107.500.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.136.583.850,00	16.467.952.700,00	96,09	8.387.907.829,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	17.068.085.850,00	16.399.454.700,00	96,08	4.009.508.582,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	13.561.863.700,00	12.919.154.700,00	95,26	1.593.398.000,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	3.200.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	26.094.082,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	126.816.500,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	769.750.000,00
5.2.02.07.01.0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	0,00	0,00	0,00	1.490.250.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.296.222.150,00	3.270.300.000,00	99,21	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	68.498.000,00	68.498.000,00	100,00	4.378.399.247,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	68.498.000,00	68.498.000,00	100,00	4.378.399.247,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.934.156.247,00	609.709.210,00	31,52	14.828.330.827,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	568.586.450,00	497.335.500,00	87,46	1.539.107.500,00
5.2.02.08.01.0009	Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam	0,00	0,00	0,00	838.630.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	70.000.000,00	69.652.500,00	99,50	0,00
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	424.000.000,00	419.580.000,00	98,95	700.477.500,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	74.586.450,00	8.103.000,00	10,86	0,00
5.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	167.850.737,00	105.073.710,00	62,59	0,00
5.2.02.08.02.0001	Belanja Modal Analytical Instrument	98.860.600,00	92.940.300,00	94,01	0,00
5.2.02.08.02.0002	Belanja Modal Instrument Probe/Sensor	55.890.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.02.0004	Belanja Modal Glassware Plastic/Utensils	9.956.537,00	9.552.660,00	95,94	0,00
5.2.02.08.02.0005	Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	3.143.600,00	2.580.750,00	82,09	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.190.070.050,00	0,00	0,00	13.202.373.327,00
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	731.250,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	340.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	1.186.148.800,00	0,00	0,00	13.202.373.327,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	7.649.010,00	7.300.000,00	95,43	86.850.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	7.649.010,00	7.300.000,00	95,43	86.850.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.927.147.821,72	6.485.404.736,00	81,81	11.261.084.800,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.295.245.682,00	5.131.128.340,00	81,50	8.245.543.400,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	169.128.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	5.930.575.232,00	4.807.337.340,00	81,06	7.617.308.400,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	364.670.450,00	323.791.000,00	88,79	459.107.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.631.902.139,72	1.354.276.396,00	82,98	3.015.541.400,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	202.869.176,00	196.101.798,00	96,66	151.724.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.023.785.840,00	797.550.948,00	77,90	1.503.823.400,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	200.230.556,72	176.647.400,00	88,22	155.534.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	205.016.567,00	183.976.250,00	89,73	1.204.460.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	3.774.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	3.774.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	3.774.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.585.000.000,00	1.565.000.000,00	98,73	0,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	1.585.000.000,00	1.565.000.000,00	98,73	0,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	1.585.000.000,00	1.565.000.000,00	98,73	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	51.106.200,00	51.012.000,00	99,81	17.433.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	51.106.200,00	51.012.000,00	99,81	17.433.000,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	51.106.200,00	51.012.000,00	99,81	12.675.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	488.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	492.318.004,00	3.885.000,00	0,78	1.783.806.844,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	492.318.004,00	3.885.000,00	0,78	1.783.806.844,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	492.318.004,00	3.885.000,00	0,78	1.783.806.844,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	109.928.200,60	12.093.000,00	11,00	23.680.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	109.928.200,60	12.093.000,00	11,00	23.680.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	104.828.200,60	6.993.000,00	6,67	23.680.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	31.371.598.359,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	31.371.598.359,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	31.371.598.359,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	28.803.403.745,00	29.066.128.626,00	100,91	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	28.803.403.745,00	29.066.128.626,00	100,91	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	28.803.403.745,00	29.066.128.626,00	100,91	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	953.139.699,61	870.478.827,00	91,32	7.640.473.275,84
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	953.139.699,61	870.478.827,00	91,32	7.640.473.275,84
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	953.139.699,61	870.478.827,00	91,32	7.640.473.275,84
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.492.416.281,00	80.799.961.394,06	85,50	129.103.961.833,55
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	93.855.273.265,00	80.350.990.378,67	85,61	121.174.100.425,55
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.855.273.265,00	80.350.990.378,67	85,61	121.174.100.425,55
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	66.670.256.265,00	61.482.475.167,96	92,21	15.684.793.716,97
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	198.225.144,00	198.225.143,28	99,99	436.463.094,60
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	599.183.122,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	173.300.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	219.280.700,00	219.280.700,00	100,00	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	199.866.000,00	199.866.000,00	100,00	10.239.897.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.408.212.850,00	14.711.593.224,66	72,08	70.519.118.631,22
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	437.431.805,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	2.952.107.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	300.000.000,00	298.528.000,00	99,50	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.859.432.306,00	3.241.022.142,77	55,31	8.933.287.246,76
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.659.809,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.998.859.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	637.143.016,00	448.971.015,39	70,46	7.929.861.408,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	637.143.016,00	448.971.015,39	70,46	7.929.861.408,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	637.143.016,00	448.971.015,39	70,46	7.805.061.408,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.989.061.381,00	46.310.371.998,10	74,70	36.791.762.576,47
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	25.363.855.040,00	19.166.853.257,69	75,56	32.288.532.170,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	9.901.975.300,00	6.934.882.414,00	70,03	32.007.864.420,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	9.901.975.300,00	6.934.882.414,00	70,03	31.860.375.400,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	147.489.020,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	15.461.879.740,00	12.231.970.843,69	79,11	280.667.750,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	15.461.879.740,00	12.231.970.843,69	79,11	280.667.750,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.738.054.230,00	1.658.836.030,00	60,58	1.149.877.370,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.738.054.230,00	1.658.836.030,00	60,58	1.149.877.370,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	2.738.054.230,00	1.658.836.030,00	60,58	1.149.877.370,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	28.000.487.131,00	20.552.263.179,00	73,39	483.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	8.590.431,00	8.530.350,00	99,30	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	8.590.431,00	8.530.350,00	99,30	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	21.128.296.700,00	13.687.296.700,00	64,78	483.000.000,00
5.2.04.03.05.0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1.164.286.300,00	1.164.286.300,00	100,00	0,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	19.964.010.400,00	12.523.010.400,00	62,72	483.000.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	6.863.600.000,00	6.856.436.129,00	99,89	0,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	6.863.600.000,00	6.856.436.129,00	99,89	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5.886.664.980,00	4.932.419.531,41	83,78	2.870.353.036,47
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.357.500.000,00	403.254.553,20	29,70	359.957.529,37
5.2.04.04.01.0003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	1.357.500.000,00	403.254.553,20	29,70	359.957.529,37
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	4.529.164.980,00	4.529.164.978,21	99,99	2.510.395.507,10
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	4.529.164.980,00	4.529.164.978,21	99,99	1.966.500.854,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	543.894.653,10
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.970.627.692,00	21.957.775.186,00	99,94	19.630.419.447,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	270.550.000,00	160.941.535,00	59,48	358.800.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	270.550.000,00	160.941.535,00	59,48	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	270.550.000,00	160.941.535,00	59,48	0,00
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	358.800.000,00
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	0,00	0,00	0,00	358.800.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	278.775.000,00	168.761.000,00	60,53	1.299.940.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	153.775.000,00	43.775.000,00	28,46	1.299.940.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	153.775.000,00	43.775.000,00	28,46	1.299.940.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	125.000.000,00	124.986.000,00	99,98	0,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	125.000.000,00	124.986.000,00	99,98	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	17.971.679.447,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	17.971.679.447,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	17.971.679.447,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	21.421.302.692,00	21.628.072.651,00	100,96	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	21.421.302.692,00	21.628.072.651,00	100,96	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	21.421.302.692,00	21.628.072.651,00	100,96	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.125.753.000,00	600.244.500,00	53,31	5.389.675.894,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	125.753.000,00	120.660.500,00	95,95	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	125.753.000,00	120.660.500,00	95,95	0,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	2.601.000,00	2.575.000,00	99,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	123.152.000,00	118.085.500,00	95,88	0,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000,00	479.584.000,00	47,95	5.389.675.894,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000,00	479.584.000,00	47,95	5.389.675.894,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000,00	479.584.000,00	47,95	5.389.675.894,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**269.313.511.475,33**	**232.159.877.710,16**	**86,20**	**307.344.075.589,86**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.281.396.903,60**	**0,00**	**0,00**	**2.065.423.140,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.281.396.903,60**	**0,00**	**0,00**	**2.065.423.140,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**	**98,23**	**775.144.201.015,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89	748.291.201.015,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89	748.291.201.015,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	297.113.512.718,00	293.134.575.850,00	98,66	330.924.905.661,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	297.113.512.718,00	293.134.575.850,00	98,66	330.924.905.661,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	401.592.537.815,00	397.817.376.094,00	99,05	417.366.295.354,00
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	401.592.537.815,00	397.817.376.094,00	99,05	417.366.295.354,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00	73,08	26.853.000.000,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	8.697.000.000,00	4.027.313.100,00	46,30	14.130.500.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	8.697.000.000,00	4.027.313.100,00	46,30	14.130.500.000,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	8.697.000.000,00	4.027.313.100,00	46,30	14.130.500.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.913.000.000,00	7.709.165.600,00	97,42	12.222.500.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.913.000.000,00	7.709.165.600,00	97,42	12.222.500.000,00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	7.913.000.000,00	7.709.165.600,00	97,42	12.222.500.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**	**98,23**	**775.144.201.015,00**
	JUMLAH BELANJA	**3.932.501.110.900,44**	**3.715.604.258.925,54**	**94,48**	**4.071.747.457.825,29**
	SURPLUS/DEFISIT	**(22.286.164.438,01)**	**(3.169.898.762,08)**	**14,22**	**(113.452.096.562,61)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**22.286.164.438,01**	**22.291.476.128,01**	**100,02**	**140.738.261.000,62**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**27.286.164.438,01**	**27.291.476.128,01**	**100,01**	**232.684.048.633,62**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.286.164.438,01	27.208.640.128,01	99,71	232.583.164.925,62
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	27.286.164.438,01	27.208.640.128,01	99,71	232.583.164.925,62
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	27.286.164.438,01	27.208.640.128,01	99,71	232.583.164.925,62
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	27.286.164.438,01	27.208.640.128,01	99,71	232.583.164.925,62
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	82.836.000,00	0,00	100.883.708,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	82.836.000,00	0,00	100.883.708,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	82.836.000,00	0,00	100.883.708,00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	82.836.000,00	0,00	100.883.708,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**27.286.164.438,01**	**27.291.476.128,01**	**100,01**	**232.684.048.633,62**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**	**91.945.787.633,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	91.945.787.633,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	91.945.787.633,00
6.2.03.01.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	91.945.787.633,00
6.2.03.01.01.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	91.945.787.633,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**	**91.945.787.633,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**22.286.164.438,01**	**22.291.476.128,01**	**100,02**	**140.738.261.000,62**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**19.121.577.365,93**	**0,00**	**27.286.164.438,01**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan

LAMPIRAN I.3

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,09	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,09	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	120.000.000,00	4.150.000,00	(115.850.000,00)	3,45	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.670.864.500,00	4.112.914.995,00	(1.557.949.505,00)	72,52	
				JUMLAH PENDAPATAN	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.031.118.270.120,30	997.834.211.343,38	(33.284.058.776,92)	96,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	665.266.971.853,51	650.386.939.066,49	(14.880.032.787,02)	97,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	443.715.770,00	381.167.874,00	(62.547.896,00)	85,90	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	338.684.000,00	321.589.829,00	(17.094.171,00)	94,95	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	338.684.000,00	321.589.829,00	(17.094.171,00)	94,95	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.684.000,00	321.589.829,00	(17.094.171,00)	94,95	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	27.116.770,00	5.921.245,00	(21.195.525,00)	21,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.116.770,00	5.921.245,00	(21.195.525,00)	21,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.116.770,00	5.921.245,00	(21.195.525,00)	21,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	72.915.000,00	53.656.800,00	(19.258.200,00)	73,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	72.915.000,00	53.656.800,00	(19.258.200,00)	73,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.915.000,00	8.656.800,00	(19.258.200,00)	31,01	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	639.352.586.087,78	630.364.320.206,00	(8.988.265.881,78)	98,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	635.400.465.377,78	626.966.334.306,00	(8.434.131.071,78)	98,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	635.400.465.377,78	626.966.334.306,00	(8.434.131.071,78)	98,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	635.400.465.377,78	626.966.334.306,00	(8.434.131.071,78)	98,67	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	3.849.566.710,00	3.322.446.000,00	(527.120.710,00)	86,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.849.566.710,00	3.322.446.000,00	(527.120.710,00)	86,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.849.566.710,00	3.322.446.000,00	(527.120.710,00)	86,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	89.054.000,00	75.539.900,00	(13.514.100,00)	84,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	89.054.000,00	75.539.900,00	(13.514.100,00)	84,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.054.000,00	75.539.900,00	(13.514.100,00)	84,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	50.764.000,00	42.417.711,00	(8.346.289,00)	83,55	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	25.315.000,00	18.277.433,00	(7.037.567,00)	72,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.315.000,00	18.277.433,00	(7.037.567,00)	72,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.315.000,00	18.277.433,00	(7.037.567,00)	72,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	25.449.000,00	24.140.278,00	(1.308.722,00)	94,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.449.000,00	24.140.278,00	(1.308.722,00)	94,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.449.000,00	24.140.278,00	(1.308.722,00)	94,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	812.060.799,91	698.479.538,00	(113.581.261,91)	86,01	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	515.301.099,91	439.305.538,00	(75.995.561,91)	85,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	515.301.099,91	439.305.538,00	(75.995.561,91)	85,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.301.099,91	439.305.538,00	(75.995.561,91)	85,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	296.759.700,00	259.174.000,00	(37.585.700,00)	87,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	296.759.700,00	259.174.000,00	(37.585.700,00)	87,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.759.700,00	259.174.000,00	(37.585.700,00)	87,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.784.525.660,52	2.142.647.511,00	(641.878.149,52)	76,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	60.233.700,00	56.377.058,00	(3.856.642,00)	93,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.233.700,00	56.377.058,00	(3.856.642,00)	93,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.233.700,00	56.377.058,00	(3.856.642,00)	93,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	421.216.850,72	334.994.133,00	(86.222.717,72)	79,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	244.844.300,00	236.633.133,00	(8.211.167,00)	96,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.844.300,00	236.633.133,00	(8.211.167,00)	96,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	176.372.550,72	98.361.000,00	(78.011.550,72)	55,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.372.550,72	98.361.000,00	(78.011.550,72)	55,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	47.938.300,00	38.876.516,00	(9.061.784,00)	81,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.623.800,00	38.876.516,00	(7.747.284,00)	83,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.623.800,00	38.876.516,00	(7.747.284,00)	83,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.314.500,00	0,00	(1.314.500,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.314.500,00	0,00	(1.314.500,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	427.758.403,00	373.247.743,00	(54.510.660,00)	87,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	427.758.403,00	373.247.743,00	(54.510.660,00)	87,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.758.403,00	373.247.743,00	(54.510.660,00)	87,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	80.253.805,00	68.375.505,00	(11.878.300,00)	85,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	80.253.805,00	68.375.505,00	(11.878.300,00)	85,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.253.805,00	68.375.505,00	(11.878.300,00)	85,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	60.520.000,00	52.436.000,00	(8.084.000,00)	86,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	60.520.000,00	52.436.000,00	(8.084.000,00)	86,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.520.000,00	52.436.000,00	(8.084.000,00)	86,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	110.505.700,00	85.714.850,00	(24.790.850,00)	77,56	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	110.505.700,00	85.714.850,00	(24.790.850,00)	77,56	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.505.700,00	85.714.850,00	(24.790.850,00)	77,56	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.494.693.801,80	1.067.892.046,00	(426.801.755,80)	71,44	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.494.693.801,80	1.067.892.046,00	(426.801.755,80)	71,44	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.494.693.801,80	1.067.892.046,00	(426.801.755,80)	71,44	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	81.405.100,00	64.733.660,00	(16.671.440,00)	79,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	77.757.800,00	61.133.660,00	(16.624.140,00)	78,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.757.800,00	61.133.660,00	(16.624.140,00)	78,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0010	5.2	BELANJA MODAL	3.647.300,00	3.600.000,00	(47.300,00)	98,70	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.647.300,00	3.600.000,00	(47.300,00)	98,70	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.636.377.896,00	1.140.441.156,00	(495.936.740,00)	69,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	124.887.867,00	85.692.000,00	(39.195.867,00)	68,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.745.977,00	12.432.000,00	(313.977,00)	97,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.745.977,00	12.432.000,00	(313.977,00)	97,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	112.141.890,00	73.260.000,00	(38.881.890,00)	65,32	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.141.890,00	73.260.000,00	(38.881.890,00)	65,32	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.006.821.779,00	597.867.230,00	(408.954.549,00)	59,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	44.854.621,00	9.198.000,00	(35.656.621,00)	20,50	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.854.621,00	9.198.000,00	(35.656.621,00)	20,50	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	961.967.158,00	588.669.230,00	(373.297.928,00)	61,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	961.967.158,00	588.669.230,00	(373.297.928,00)	61,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0007		PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0007	5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	471.668.250,00	456.881.926,00	(14.786.324,00)	96,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	391.668.250,00	377.351.510,00	(14.316.740,00)	96,34	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.668.250,00	377.351.510,00	(14.316.740,00)	96,34	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0009	5.2	BELANJA MODAL	80.000.000,00	79.530.416,00	(469.584,00)	99,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	79.530.416,00	(469.584,00)	99,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.249.922.283,30	9.527.237.030,00	(722.685.253,30)	92,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.456.000,00	3.400.000,00	(3.056.000,00)	52,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.456.000,00	3.400.000,00	(3.056.000,00)	52,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.456.000,00	3.400.000,00	(3.056.000,00)	52,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.200.142.600,00	1.659.400.812,00	(540.741.788,00)	75,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.200.142.600,00	1.659.400.812,00	(540.741.788,00)	75,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.142.600,00	1.659.400.812,00	(540.741.788,00)	75,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	309.627.000,00	267.553.380,00	(42.073.620,00)	86,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	309.627.000,00	267.553.380,00	(42.073.620,00)	86,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.627.000,00	267.553.380,00	(42.073.620,00)	86,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.733.696.683,30	7.596.882.838,00	(136.813.845,30)	98,23	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.733.696.683,30	7.596.882.838,00	(136.813.845,30)	98,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.733.696.683,30	7.596.882.838,00	(136.813.845,30)	98,23	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.664.143.250,00	2.280.091.460,86	(384.051.789,14)	85,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	735.910.530,00	598.480.816,00	(137.429.714,00)	81,32	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	735.910.530,00	598.480.816,00	(137.429.714,00)	81,32	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.910.530,00	598.480.816,00	(137.429.714,00)	81,32	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	602.269.850,00	599.271.806,86	(2.998.043,14)	99,50	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	527.269.850,00	525.912.299,86	(1.357.550,14)	99,74	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.269.850,00	525.912.299,86	(1.357.550,14)	99,74	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	73.359.507,00	(1.640.493,00)	97,81	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	73.359.507,00	(1.640.493,00)	97,81	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.325.962.870,00	1.082.338.838,00	(243.624.032,00)	81,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	97.213.100,00	97.089.068,00	(124.032,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.213.100,00	97.089.068,00	(124.032,00)	99,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.228.749.770,00	985.249.770,00	(243.500.000,00)	80,18	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.228.749.770,00	985.249.770,00	(243.500.000,00)	80,18	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	7.272.876.106,00	3.810.136.579,63	(3.462.739.526,37)	52,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	7.272.876.106,00	3.810.136.579,63	(3.462.739.526,37)	52,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.894.736.406,39	3.565.785.482,63	(3.328.950.923,76)	51,71	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	71.500.000,00	0,00	(71.500.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.823.236.406,39	3.565.785.482,63	(3.257.450.923,76)	52,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	378.139.699,61	244.351.097,00	(133.788.602,61)	64,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	378.139.699,61	244.351.097,00	(133.788.602,61)	64,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	365.506.727.766,79	347.197.048.002,89	(18.309.679.763,90)	94,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	197.376.302.377,51	188.902.984.632,48	(8.473.317.745,03)	95,70	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0001		PEMBANGUNAN USB (UNIT SEKOLAH BARU)	3.100.000.000,00	2.662.002.340,00	(437.997.660,00)	85,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	165.363.000,00	122.998.786,00	(42.364.214,00)	74,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.363.000,00	122.998.786,00	(42.364.214,00)	74,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.934.637.000,00	2.539.003.554,00	(395.633.446,00)	86,51	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.934.637.000,00	2.539.003.554,00	(395.633.446,00)	86,51	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	3.285.673.380,00	2.633.469.700,00	(652.203.680,00)	80,15	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	462.109.152,00	342.993.430,00	(119.115.722,00)	74,22	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.109.152,00	342.993.430,00	(119.115.722,00)	74,22	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	2.823.564.228,00	2.290.476.270,00	(533.087.958,00)	81,12	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	379.021.500,00	378.891.750,00	(129.750,00)	99,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.444.542.728,00	1.911.584.520,00	(532.958.208,00)	78,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	1.503.048.000,00	1.224.740.000,00	(278.308.000,00)	81,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	5.1	BELANJA OPERASI	58.890.000,00	44.490.000,00	(14.400.000,00)	75,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.890.000,00	44.490.000,00	(14.400.000,00)	75,54	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	5.2	BELANJA MODAL	1.444.158.000,00	1.180.250.000,00	(263.908.000,00)	81,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.444.158.000,00	1.180.250.000,00	(263.908.000,00)	81,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	116.112.001,00	5.850.000,00	(110.262.001,00)	5,03	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	6.112.001,00	5.850.000,00	(262.001,00)	95,71	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.112.001,00	5.850.000,00	(262.001,00)	95,71	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038	5.2	BELANJA MODAL	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0039		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	5.935.494.986,20	5.021.283.883,00	(914.211.103,20)	84,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	5.935.494.986,20	5.021.283.883,00	(914.211.103,20)	84,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.935.494.986,20	5.021.283.883,00	(914.211.103,20)	84,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041		PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	445.976.000,00	439.530.000,00	(6.446.000,00)	98,55	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	21.976.000,00	19.950.000,00	(2.026.000,00)	90,78	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.976.000,00	19.950.000,00	(2.026.000,00)	90,78	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	5.2	BELANJA MODAL	424.000.000,00	419.580.000,00	(4.420.000,00)	98,95	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	424.000.000,00	419.580.000,00	(4.420.000,00)	98,95	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS	7.007.451.100,00	6.812.574.085,00	(194.877.015,00)	97,21	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	5.1	BELANJA OPERASI	7.007.451.100,00	6.812.574.085,00	(194.877.015,00)	97,21	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.007.451.100,00	6.812.574.085,00	(194.877.015,00)	97,21	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	189.130.000,01	143.366.900,00	(45.763.100,01)	75,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	5.1	BELANJA OPERASI	189.130.000,01	143.366.900,00	(45.763.100,01)	75,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.130.000,01	143.366.900,00	(45.763.100,01)	75,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	50.078.859.872,30	49.652.091.437,48	(426.768.434,82)	99,14	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	50.078.859.872,30	49.652.091.437,48	(426.768.434,82)	99,14	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.078.859.872,30	49.652.091.437,48	(426.768.434,82)	99,14	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	382.771.000,00	367.602.791,00	(15.168.209,00)	96,03	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	382.771.000,00	367.602.791,00	(15.168.209,00)	96,03	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.771.000,00	367.602.791,00	(15.168.209,00)	96,03	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH ATAS	199.424.300,00	126.612.400,00	(72.811.900,00)	63,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	5.1	BELANJA OPERASI	199.424.300,00	126.612.400,00	(72.811.900,00)	63,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.424.300,00	126.612.400,00	(72.811.900,00)	63,48	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH ATAS	115.202.195.150,00	111.987.569.154,00	(3.214.625.996,00)	97,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.1	BELANJA OPERASI	87.227.214.837,00	83.582.476.256,00	(3.644.738.581,00)	95,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.486.624.837,00	67.966.010.868,00	(3.520.613.969,00)	95,07	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.1.05	Belanja Hibah	15.740.590.000,00	15.616.465.388,00	(124.124.612,00)	99,21	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.2	BELANJA MODAL	27.974.980.313,00	28.405.092.898,00	430.112.585,00	101,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.292.780.901,00	14.569.468.147,00	276.687.246,00	101,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.682.199.412,00	13.835.624.751,00	153.425.339,00	101,12	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0058		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	58.608.100,00	44.719.310,00	(13.888.790,00)	76,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0058	5.1	BELANJA OPERASI	50.425.300,00	38.858.510,00	(11.566.790,00)	77,06	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.425.300,00	38.858.510,00	(11.566.790,00)	77,06	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0058	5.2	BELANJA MODAL	8.182.800,00	5.860.800,00	(2.322.000,00)	71,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0058	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.182.800,00	5.860.800,00	(2.322.000,00)	71,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0059		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	125.432.000,00	109.961.950,00	(15.470.050,00)	87,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0059	5.1	BELANJA OPERASI	125.432.000,00	109.961.950,00	(15.470.050,00)	87,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.432.000,00	109.961.950,00	(15.470.050,00)	87,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	81.836.000,00	8.062.000,00	(73.774.000,00)	9,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060	5.1	BELANJA OPERASI	81.836.000,00	8.062.000,00	(73.774.000,00)	9,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.836.000,00	8.062.000,00	(73.774.000,00)	9,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0061		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	123.892.000,00	121.046.333,00	(2.845.667,00)	97,70	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0061	5.1	BELANJA OPERASI	123.892.000,00	121.046.333,00	(2.845.667,00)	97,70	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0061	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.892.000,00	121.046.333,00	(2.845.667,00)	97,70	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	300.000.000,00	120.915.960,00	(179.084.040,00)	40,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	5.1	BELANJA OPERASI	49.068.000,00	40.443.960,00	(8.624.040,00)	82,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.068.000,00	40.443.960,00	(8.624.040,00)	82,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	5.2	BELANJA MODAL	250.932.000,00	80.472.000,00	(170.460.000,00)	32,06	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.932.000,00	80.472.000,00	(170.460.000,00)	32,06	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	8.954.742.588,00	7.152.482.449,00	(1.802.260.139,00)	79,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	5.1	BELANJA OPERASI	634.039.300,00	430.896.482,00	(203.142.818,00)	67,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	634.039.300,00	430.896.482,00	(203.142.818,00)	67,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	5.2	BELANJA MODAL	8.320.703.288,00	6.721.585.967,00	(1.599.117.321,00)	80,78	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.320.703.288,00	6.721.585.967,00	(1.599.117.321,00)	80,78	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	285.655.900,00	269.103.940,00	(16.551.960,00)	94,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078	5.1	BELANJA OPERASI	285.655.900,00	269.103.940,00	(16.551.960,00)	94,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.655.900,00	269.103.940,00	(16.551.960,00)	94,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	147.715.209.122,28	139.880.776.957,51	(7.834.432.164,77)	94,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0003		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	335.585.000,00	116.036.126,60	(219.548.873,40)	34,57	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.415.000,00	23.187.400,00	(2.227.600,00)	91,23	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.415.000,00	23.187.400,00	(2.227.600,00)	91,23	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	310.170.000,00	92.848.726,60	(217.321.273,40)	29,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	310.170.000,00	92.848.726,60	(217.321.273,40)	29,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004		PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA	751.648.867,00	741.590.869,77	(10.057.997,23)	98,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	154.860.392,00	147.241.792,00	(7.618.600,00)	95,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.860.392,00	147.241.792,00	(7.618.600,00)	95,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	596.788.475,00	594.349.077,77	(2.439.397,23)	99,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	596.788.475,00	594.349.077,77	(2.439.397,23)	99,59	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005		PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM	549.214.106,25	540.493.504,98	(8.720.601,27)	98,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	141.188.357,25	134.961.700,00	(6.226.657,25)	95,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.188.357,25	134.961.700,00	(6.226.657,25)	95,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	5.2	BELANJA MODAL	408.025.749,00	405.531.804,98	(2.493.944,02)	99,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	408.025.749,00	405.531.804,98	(2.493.944,02)	99,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006		PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	23.163.426,00	22.696.354,54	(467.071,46)	97,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.641.460,00	(358.540,00)	96,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.641.460,00	(358.540,00)	96,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	13.163.426,00	13.054.894,54	(108.531,46)	99,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.163.426,00	13.054.894,54	(108.531,46)	99,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	3.935.399.009,00	3.340.656.470,31	(594.742.538,69)	84,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	409.173.368,00	310.817.986,66	(98.355.381,34)	75,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.173.368,00	310.817.986,66	(98.355.381,34)	75,96	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.2	BELANJA MODAL	3.526.225.641,00	3.029.838.483,65	(496.387.157,35)	85,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.526.225.641,00	3.029.838.483,65	(496.387.157,35)	85,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016		REHABILITASI RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	195.585.000,00	191.865.417,72	(3.719.582,28)	98,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	14.915.000,00	11.862.900,00	(3.052.100,00)	79,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.915.000,00	11.862.900,00	(3.052.100,00)	79,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016	5.2	BELANJA MODAL	180.670.000,00	180.002.517,72	(667.482,28)	99,63	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.670.000,00	180.002.517,72	(667.482,28)	99,63	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	883.585.000,00	607.719.980,00	(275.865.020,00)	68,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	19.735.000,00	1.905.000,00	(17.830.000,00)	9,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.735.000,00	1.905.000,00	(17.830.000,00)	9,65	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	5.2	BELANJA MODAL	863.850.000,00	605.814.980,00	(258.035.020,00)	70,12	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	863.850.000,00	605.814.980,00	(258.035.020,00)	70,12	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0031		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	4.915.787.000,00	4.601.402.659,00	(314.384.341,00)	93,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0031	5.1	BELANJA OPERASI	4.915.787.000,00	4.601.402.659,00	(314.384.341,00)	93,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.915.787.000,00	4.601.402.659,00	(314.384.341,00)	93,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033		PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	12.303.466.000,00	10.779.788.286,00	(1.523.677.714,00)	87,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	10.543.272.200,00	10.205.743.286,00	(337.528.914,00)	96,79	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.272.200,00	446.758.797,00	(121.513.403,00)	78,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.1.05	Belanja Hibah	9.975.000.000,00	9.758.984.489,00	(216.015.511,00)	97,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	1.760.193.800,00	574.045.000,00	(1.186.148.800,00)	32,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.716.418.800,00	530.270.000,00	(1.186.148.800,00)	30,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.775.000,00	43.775.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	2.555.015.500,00	2.228.175.500,00	(326.840.000,00)	87,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	5.1	BELANJA OPERASI	2.555.015.500,00	2.228.175.500,00	(326.840.000,00)	87,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.555.015.500,00	2.228.175.500,00	(326.840.000,00)	87,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	155.175.970,00	114.930.600,00	(40.245.370,00)	74,06	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	155.175.970,00	114.930.600,00	(40.245.370,00)	74,06	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.175.970,00	114.930.600,00	(40.245.370,00)	74,06	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	31.764.237.052,03	31.508.094.258,00	(256.142.794,03)	99,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	31.764.237.052,03	31.508.094.258,00	(256.142.794,03)	99,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.764.237.052,03	31.508.094.258,00	(256.142.794,03)	99,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	401.195.000,00	378.712.028,00	(22.482.972,00)	94,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	401.195.000,00	378.712.028,00	(22.482.972,00)	94,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.195.000,00	378.712.028,00	(22.482.972,00)	94,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	37.740.600,00	36.993.398,00	(747.202,00)	98,02	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045	5.1	BELANJA OPERASI	37.740.600,00	36.993.398,00	(747.202,00)	98,02	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.740.600,00	36.993.398,00	(747.202,00)	98,02	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	80.601.468.910,00	80.091.960.644,84	(509.508.265,16)	99,36	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	59.966.089.609,00	59.455.419.888,84	(510.669.720,16)	99,14	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.711.039.609,00	41.355.535.935,84	(355.503.673,16)	99,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.1.05	Belanja Hibah	18.255.050.000,00	18.099.883.953,00	(155.166.047,00)	99,15	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.2	BELANJA MODAL	20.635.379.301,00	20.636.540.756,00	1.161.455,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.538.395.821,00	13.513.183.456,00	(25.212.365,00)	99,81	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.096.983.480,00	7.123.357.300,00	26.373.820,00	100,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	56.290.000,00	9.265.000,00	(47.025.000,00)	16,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053	5.1	BELANJA OPERASI	56.290.000,00	9.265.000,00	(47.025.000,00)	16,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.290.000,00	9.265.000,00	(47.025.000,00)	16,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	8.080.020.682,00	4.411.854.659,75	(3.668.166.022,25)	54,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064	5.1	BELANJA OPERASI	612.952.380,00	463.490.492,00	(149.461.888,00)	75,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.952.380,00	463.490.492,00	(149.461.888,00)	75,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064	5.2	BELANJA MODAL	7.467.068.302,00	3.948.364.167,75	(3.518.704.134,25)	52,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.467.068.302,00	3.948.364.167,75	(3.518.704.134,25)	52,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072		PENYELENGARAAN PROSES BELAJAR PESERTA DIDIK	170.632.000,00	158.541.200,00	(12.090.800,00)	92,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072	5.1	BELANJA OPERASI	170.632.000,00	158.541.200,00	(12.090.800,00)	92,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.632.000,00	158.541.200,00	(12.090.800,00)	92,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	20.415.216.267,00	18.413.286.412,90	(2.001.929.854,10)	90,19	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0001		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	1.400.000.000,00	1.193.765.493,00	(206.234.507,00)	85,26	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	195.134.600,00	109.695.493,00	(85.439.107,00)	56,21	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.134.600,00	109.695.493,00	(85.439.107,00)	56,21	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.204.865.400,00	1.084.070.000,00	(120.795.400,00)	89,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.204.865.400,00	1.084.070.000,00	(120.795.400,00)	89,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	799.688.340,00	582.451.715,90	(217.236.624,10)	72,83	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	129.439.525,00	70.830.944,90	(58.608.580,10)	54,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.439.525,00	70.830.944,90	(58.608.580,10)	54,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	5.2	BELANJA MODAL	670.248.815,00	511.620.771,00	(158.628.044,00)	76,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	670.248.815,00	511.620.771,00	(158.628.044,00)	76,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0035		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0035	5.1	BELANJA OPERASI	692.600,00	0,00	(692.600,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.600,00	0,00	(692.600,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0035	5.2	BELANJA MODAL	199.307.400,00	0,00	(199.307.400,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.307.400,00	0,00	(199.307.400,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0037		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	40.196.671,00	0,00	(40.196.671,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0037	5.1	BELANJA OPERASI	4.830.671,00	0,00	(4.830.671,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.830.671,00	0,00	(4.830.671,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0037	5.2	BELANJA MODAL	35.366.000,00	0,00	(35.366.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0037	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.366.000,00	0,00	(35.366.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0038		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	1.043.485.000,00	934.966.754,00	(108.518.246,00)	89,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0038	5.1	BELANJA OPERASI	1.043.485.000,00	934.966.754,00	(108.518.246,00)	89,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.043.485.000,00	934.966.754,00	(108.518.246,00)	89,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	474.557.320,00	338.993.353,00	(135.563.967,00)	71,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	5.1	BELANJA OPERASI	474.557.320,00	338.993.353,00	(135.563.967,00)	71,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.557.320,00	338.993.353,00	(135.563.967,00)	71,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	4.639.444.223,00	4.513.273.732,00	(126.170.491,00)	97,28	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	5.1	BELANJA OPERASI	4.639.444.223,00	4.513.273.732,00	(126.170.491,00)	97,28	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.639.444.223,00	4.513.273.732,00	(126.170.491,00)	97,28	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0050		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	104.704.000,00	99.615.989,00	(5.088.011,00)	95,14	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0050	5.1	BELANJA OPERASI	104.704.000,00	99.615.989,00	(5.088.011,00)	95,14	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.704.000,00	99.615.989,00	(5.088.011,00)	95,14	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	291.651.750,00	94.581.191,00	(197.070.559,00)	32,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	5.1	BELANJA OPERASI	291.651.750,00	94.581.191,00	(197.070.559,00)	32,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.651.750,00	94.581.191,00	(197.070.559,00)	32,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	10.344.744.423,00	10.329.652.162,00	(15.092.261,00)	99,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.1	BELANJA OPERASI	8.730.397.600,00	8.677.084.539,00	(53.313.061,00)	99,38	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.790.297.600,00	3.740.375.014,00	(49.922.586,00)	98,68	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.1.05	Belanja Hibah	4.940.100.000,00	4.936.709.525,00	(3.390.475,00)	99,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.2	BELANJA MODAL	1.614.346.823,00	1.652.567.623,00	38.220.800,00	102,36	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	972.227.023,00	983.477.023,00	11.250.000,00	101,15	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	642.119.800,00	669.090.600,00	26.970.800,00	104,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	16.376.000,00	2.402.000,00	(13.974.000,00)	14,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059	5.1	BELANJA OPERASI	16.376.000,00	2.402.000,00	(13.974.000,00)	14,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.376.000,00	2.402.000,00	(13.974.000,00)	14,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0066		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	68.519.000,00	59.811.228,00	(8.707.772,00)	87,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0066	5.1	BELANJA OPERASI	68.519.000,00	59.811.228,00	(8.707.772,00)	87,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0066	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.519.000,00	59.811.228,00	(8.707.772,00)	87,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0069		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	950.000.000,00	228.953.909,00	(721.046.091,00)	24,10	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0069	5.1	BELANJA OPERASI	950.000.000,00	228.953.909,00	(721.046.091,00)	24,10	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0069	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.000.000,00	228.953.909,00	(721.046.091,00)	24,10	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	41.849.540,00	34.818.886,00	(7.030.654,00)	83,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071	5.1	BELANJA OPERASI	41.849.540,00	34.818.886,00	(7.030.654,00)	83,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.849.540,00	34.818.886,00	(7.030.654,00)	83,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	114.475.500,00	70.519.443,00	(43.956.057,00)	61,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	52.734.500,00	11.250.000,00	(41.484.500,00)	21,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004		PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	52.734.500,00	11.250.000,00	(41.484.500,00)	21,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.734.500,00	11.250.000,00	(41.484.500,00)	21,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.734.500,00	11.250.000,00	(41.484.500,00)	21,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.02		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	61.741.000,00	59.269.443,00	(2.471.557,00)	95,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.02.0004		PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS	61.741.000,00	59.269.443,00	(2.471.557,00)	95,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.741.000,00	59.269.443,00	(2.471.557,00)	95,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.741.000,00	59.269.443,00	(2.471.557,00)	95,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	187.656.000,00	153.676.514,00	(33.979.486,00)	81,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01		PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI	187.656.000,00	153.676.514,00	(33.979.486,00)	81,89	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001		PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	91.218.000,00	89.034.905,00	(2.183.095,00)	97,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	91.218.000,00	89.034.905,00	(2.183.095,00)	97,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.218.000,00	89.034.905,00	(2.183.095,00)	97,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002		PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	96.438.000,00	64.641.609,00	(31.796.391,00)	67,02	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	96.438.000,00	64.641.609,00	(31.796.391,00)	67,02	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.438.000,00	64.641.609,00	(31.796.391,00)	67,02	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	42.439.000,00	26.028.317,00	(16.410.683,00)	61,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01		PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	27.055.000,00	14.970.000,00	(12.085.000,00)	55,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01.0001		PENILAIAN KELAYAKAN USUL PERIZINAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	27.055.000,00	14.970.000,00	(12.085.000,00)	55,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.055.000,00	14.970.000,00	(12.085.000,00)	55,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.055.000,00	14.970.000,00	(12.085.000,00)	55,33	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02		PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	15.384.000,00	11.058.317,00	(4.325.683,00)	71,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02.0001		PENILAIAN KELAYAKAN USUL PERIZINAN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	15.384.000,00	11.058.317,00	(4.325.683,00)	71,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.384.000,00	11.058.317,00	(4.325.683,00)	71,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.384.000,00	11.058.317,00	(4.325.683,00)	71,88	
				JUMLAH BELANJA	1.031.118.270.120,30	997.834.211.343,38	(33.284.058.776,92)	96,77	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.025.327.405.620,30)	(993.717.146.348,38)	31.610.259.271,92	96,91	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.025.327.405.620,30)	(993.717.146.348,38)	31.610.259.271,92	96,91	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	90.194.025.364,54	83.968.182.079,00	(6.225.843.285,54)	93,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.727.853.316,10	25.371.965.378,00	(355.887.938,10)	98,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	117.195.385,00	104.511.325,00	(12.684.060,00)	89,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.328.000,00	6.366.260,00	(8.961.740,00)	41,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.328.000,00	6.366.260,00	(8.961.740,00)	41,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.328.000,00	6.366.260,00	(8.961.740,00)	41,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	69.535.570,00	66.113.915,00	(3.421.655,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	69.535.570,00	66.113.915,00	(3.421.655,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.535.570,00	66.113.915,00	(3.421.655,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	32.331.815,00	32.031.150,00	(300.665,00)	99,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	32.331.815,00	32.031.150,00	(300.665,00)	99,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.331.815,00	32.031.150,00	(300.665,00)	99,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	23.119.448.415,00	22.928.595.760,00	(190.852.655,00)	99,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	22.368.648.340,00	22.202.635.160,00	(166.013.180,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.368.648.340,00	22.202.635.160,00	(166.013.180,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	22.368.648.340,00	22.202.635.160,00	(166.013.180,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	741.620.000,00	717.288.000,00	(24.332.000,00)	96,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	741.620.000,00	717.288.000,00	(24.332.000,00)	96,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.620.000,00	717.288.000,00	(24.332.000,00)	96,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0006		PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	9.180.075,00	8.672.600,00	(507.475,00)	94,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.180.075,00	8.672.600,00	(507.475,00)	94,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.180.075,00	8.672.600,00	(507.475,00)	94,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	14.765.550,00	13.960.000,00	(805.550,00)	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	14.765.550,00	13.960.000,00	(805.550,00)	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.765.550,00	13.960.000,00	(805.550,00)	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.765.550,00	13.960.000,00	(805.550,00)	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	20.650.000,00	8.101.000,00	(12.549.000,00)	39,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	20.650.000,00	8.101.000,00	(12.549.000,00)	39,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.650.000,00	8.101.000,00	(12.549.000,00)	39,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.650.000,00	8.101.000,00	(12.549.000,00)	39,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	582.458.250,56	556.877.205,00	(25.581.045,56)	95,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25.000.000,00	23.777.310,00	(1.222.690,00)	95,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.777.310,00	(1.222.690,00)	95,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.777.310,00	(1.222.690,00)	95,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	81.372.000,00	74.423.866,00	(6.948.134,00)	91,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.372.000,00	74.423.866,00	(6.948.134,00)	91,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.372.000,00	74.423.866,00	(6.948.134,00)	91,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.736.500,00	0,00	(2.736.500,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.736.500,00	0,00	(2.736.500,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.736.500,00	0,00	(2.736.500,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	60.000.000,00	55.019.620,00	(4.980.380,00)	91,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	55.019.620,00	(4.980.380,00)	91,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	55.019.620,00	(4.980.380,00)	91,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.000.000,00	15.351.500,00	(2.648.500,00)	85,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	15.351.500,00	(2.648.500,00)	85,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	15.351.500,00	(2.648.500,00)	85,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11.619.000,00	11.140.910,00	(478.090,00)	95,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.619.000,00	11.140.910,00	(478.090,00)	95,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.619.000,00	11.140.910,00	(478.090,00)	95,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	27.264.000,00	26.209.850,00	(1.054.150,00)	96,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	27.264.000,00	26.209.850,00	(1.054.150,00)	96,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.264.000,00	26.209.850,00	(1.054.150,00)	96,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	356.466.750,56	350.954.149,00	(5.512.601,56)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	356.466.750,56	350.954.149,00	(5.512.601,56)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.466.750,56	350.954.149,00	(5.512.601,56)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	77.123.600,00	26.697.499,00	(50.426.101,00)	34,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	77.123.600,00	26.697.499,00	(50.426.101,00)	34,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	77.123.600,00	26.697.499,00	(50.426.101,00)	34,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.123.600,00	26.697.499,00	(50.426.101,00)	34,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.393.712.115,54	1.332.358.965,00	(61.353.150,54)	95,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	35.178.700,00	23.337.340,00	(11.841.360,00)	66,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.178.700,00	23.337.340,00	(11.841.360,00)	66,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.178.700,00	23.337.340,00	(11.841.360,00)	66,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	68.350.000,00	65.399.480,00	(2.950.520,00)	95,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	68.350.000,00	65.399.480,00	(2.950.520,00)	95,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.350.000,00	65.399.480,00	(2.950.520,00)	95,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.290.183.415,54	1.243.622.145,00	(46.561.270,54)	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.290.183.415,54	1.243.622.145,00	(46.561.270,54)	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.183.415,54	1.243.622.145,00	(46.561.270,54)	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	402.500.000,00	400.863.624,00	(1.636.376,00)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	387.500.000,00	386.803.624,00	(696.376,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	387.500.000,00	386.803.624,00	(696.376,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.500.000,00	386.803.624,00	(696.376,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.000.000,00	14.060.000,00	(940.000,00)	93,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.060.000,00	(940.000,00)	93,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.060.000,00	(940.000,00)	93,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.597.319.147,00	52.052.827.220,00	(5.544.491.927,00)	90,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	23.919.225.569,00	23.403.845.545,00	(515.380.024,00)	97,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0002		PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	19.913.140.414,00	19.434.043.211,00	(479.097.203,00)	97,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.217.831.014,00	1.106.966.971,00	(110.864.043,00)	90,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.217.831.014,00	1.106.966.971,00	(110.864.043,00)	90,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	18.695.309.400,00	18.327.076.240,00	(368.233.160,00)	98,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.025.309.400,00	17.658.576.240,00	(366.733.160,00)	97,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	670.000.000,00	668.500.000,00	(1.500.000,00)	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0004		PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	31.120.000,00	23.006.196,00	(8.113.804,00)	73,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.120.000,00	23.006.196,00	(8.113.804,00)	73,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.120.000,00	23.006.196,00	(8.113.804,00)	73,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0006		PENGEMBANGAN PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK (PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK, GUGUS PULAU, PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDICINE, DLL)	94.921.400,00	78.529.170,00	(16.392.230,00)	82,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	94.921.400,00	78.529.170,00	(16.392.230,00)	82,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.921.400,00	78.529.170,00	(16.392.230,00)	82,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	3.880.043.755,00	3.868.266.968,00	(11.776.787,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.670.043.755,00	3.658.266.968,00	(11.776.787,00)	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.185.622.195,00	2.183.945.408,00	(1.676.787,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	5.1.05	Belanja Hibah	1.484.421.560,00	1.474.321.560,00	(10.100.000,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	33.387.033.070,00	28.376.572.819,00	(5.010.460.251,00)	84,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	33.773.000,00	11.768.694,00	(22.004.306,00)	34,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.773.000,00	11.768.694,00	(22.004.306,00)	34,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.773.000,00	11.768.694,00	(22.004.306,00)	34,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	39.664.720,00	31.668.630,00	(7.996.090,00)	79,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.664.720,00	31.668.630,00	(7.996.090,00)	79,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.664.720,00	31.668.630,00	(7.996.090,00)	79,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	360.265.470,00	337.725.650,00	(22.539.820,00)	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	360.265.470,00	337.725.650,00	(22.539.820,00)	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.265.470,00	337.725.650,00	(22.539.820,00)	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF	54.872.600,00	54.770.240,00	(102.360,00)	99,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	46.748.900,00	46.646.540,00	(102.360,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.748.900,00	46.646.540,00	(102.360,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	8.123.700,00	8.123.700,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.123.700,00	8.123.700,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	557.722.000,00	555.250.170,00	(2.471.830,00)	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	557.722.000,00	555.250.170,00	(2.471.830,00)	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.722.000,00	555.250.170,00	(2.471.830,00)	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	81.838.232,00	81.538.975,00	(299.257,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	81.838.232,00	81.538.975,00	(299.257,00)	99,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.838.232,00	81.538.975,00	(299.257,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	392.462.350,00	379.245.850,00	(13.216.500,00)	96,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	392.462.350,00	379.245.850,00	(13.216.500,00)	96,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.462.350,00	379.245.850,00	(13.216.500,00)	96,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI DAN TRADISIONAL LAINNYA	62.211.925,00	55.979.872,00	(6.232.053,00)	89,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	62.211.925,00	55.979.872,00	(6.232.053,00)	89,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.211.925,00	55.979.872,00	(6.232.053,00)	89,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	4.383.094.785,00	949.501.662,00	(3.433.593.123,00)	21,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.383.094.785,00	949.501.662,00	(3.433.593.123,00)	21,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.283.094.785,00	849.731.202,00	(3.433.363.583,00)	19,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0011	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	99.770.460,00	(229.540,00)	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI	17.897.220,00	17.728.584,00	(168.636,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	17.897.220,00	17.728.584,00	(168.636,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.897.220,00	17.728.584,00	(168.636,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0013		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	76.737.000,00	75.268.540,00	(1.468.460,00)	98,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	76.737.000,00	75.268.540,00	(1.468.460,00)	98,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.737.000,00	75.268.540,00	(1.468.460,00)	98,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0016		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	26.251.486.888,00	24.771.833.525,00	(1.479.653.363,00)	94,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	26.251.486.888,00	24.771.833.525,00	(1.479.653.363,00)	94,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.251.486.888,00	24.771.833.525,00	(1.479.653.363,00)	94,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0017		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	156.684.000,00	155.734.698,00	(949.302,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	156.684.000,00	155.734.698,00	(949.302,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.684.000,00	155.734.698,00	(949.302,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0019		PEMBINAAN PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	878.896.230,00	868.221.897,00	(10.674.333,00)	98,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	878.896.230,00	868.221.897,00	(10.674.333,00)	98,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.896.230,00	168.221.897,00	(10.674.333,00)	94,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0019	5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0020		VERIFIKASI DAN PENILAIAN KELAYAKAN PUSKESMAS UNTUK REGISTRASI PUSKESMAS	27.634.650,00	19.060.840,00	(8.573.810,00)	68,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	27.634.650,00	19.060.840,00	(8.573.810,00)	68,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.634.650,00	19.060.840,00	(8.573.810,00)	68,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0021		INVESTIGASI LANJUTAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL OLEH KABUPATEN/KOTA	11.792.000,00	11.274.992,00	(517.008,00)	95,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	11.792.000,00	11.274.992,00	(517.008,00)	95,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.792.000,00	11.274.992,00	(517.008,00)	95,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	255.977.258,00	241.677.056,00	(14.300.202,00)	94,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	255.977.258,00	241.677.056,00	(14.300.202,00)	94,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	255.977.258,00	241.677.056,00	(14.300.202,00)	94,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.977.258,00	241.677.056,00	(14.300.202,00)	94,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	35.083.250,00	30.731.800,00	(4.351.450,00)	87,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	13.910.000,00	12.633.800,00	(1.276.200,00)	90,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.910.000,00	12.633.800,00	(1.276.200,00)	90,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.910.000,00	12.633.800,00	(1.276.200,00)	90,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0003		PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	21.173.250,00	18.098.000,00	(3.075.250,00)	85,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.173.250,00	18.098.000,00	(3.075.250,00)	85,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.173.250,00	18.098.000,00	(3.075.250,00)	85,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.823.901.401,44	5.525.552.090,00	(298.349.311,44)	94,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01		PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI	5.744.225.204,44	5.451.966.270,00	(292.258.934,44)	94,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0001		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.713.168.904,44	5.421.376.970,00	(291.791.934,44)	94,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.713.168.904,44	5.421.376.970,00	(291.791.934,44)	94,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.713.168.904,44	5.421.376.970,00	(291.791.934,44)	94,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0002		DISTRIBUSI DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.056.300,00	30.589.300,00	(467.000,00)	98,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.056.300,00	30.589.300,00	(467.000,00)	98,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.056.300,00	30.589.300,00	(467.000,00)	98,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	79.676.197,00	73.585.820,00	(6.090.377,00)	92,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0001		PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	55.190.247,00	49.434.070,00	(5.756.177,00)	89,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.190.247,00	49.434.070,00	(5.756.177,00)	89,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.190.247,00	49.434.070,00	(5.756.177,00)	89,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0002		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	24.485.950,00	24.151.750,00	(334.200,00)	98,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.485.950,00	24.151.750,00	(334.200,00)	98,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.485.950,00	24.151.750,00	(334.200,00)	98,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	59.063.500,00	58.833.365,00	(230.135,00)	99,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.01		PENERBITAN PENGAKUAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG DAN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)	45.347.500,00	45.183.665,00	(163.835,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN PENGAKUAN PBF CABANG DAN CABANG PAK	45.347.500,00	45.183.665,00	(163.835,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.347.500,00	45.183.665,00	(163.835,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.347.500,00	45.183.665,00	(163.835,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.02		PENERBITAN IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (UKOT)	13.716.000,00	13.649.700,00	(66.300,00)	99,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.02.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL	13.716.000,00	13.649.700,00	(66.300,00)	99,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.716.000,00	13.649.700,00	(66.300,00)	99,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.716.000,00	13.649.700,00	(66.300,00)	99,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	985.888.000,00	959.004.026,00	(26.883.974,00)	97,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI	255.730.800,00	247.987.718,00	(7.743.082,00)	96,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01.0001		PENINGKATAN UPAYA ADVOKASI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN, PENGGALANGAN KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI	255.730.800,00	247.987.718,00	(7.743.082,00)	96,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	255.730.800,00	247.987.718,00	(7.743.082,00)	96,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.730.800,00	247.987.718,00	(7.743.082,00)	96,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.02		PELAKSANAAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH PROVINSI	730.157.200,00	711.016.308,00	(19.140.892,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.02.0001		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	730.157.200,00	711.016.308,00	(19.140.892,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	730.157.200,00	711.016.308,00	(19.140.892,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.157.200,00	711.016.308,00	(19.140.892,00)	97,37	
				JUMLAH BELANJA	90.194.025.364,54	83.968.182.079,00	(6.225.843.285,54)	93,09	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(90.194.025.364,54)	(83.968.182.079,00)	6.225.843.285,54	93,09	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(90.194.025.364,54)	(83.968.182.079,00)	6.225.843.285,54	93,09	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.02.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	140.001.527.999,00	144.774.215.484,57	4.772.687.485,57	103,40	
	1.02.0.00.0.00.02.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.001.527.999,00	144.774.215.484,57	4.772.687.485,57	103,40	
	1.02.0.00.0.00.02.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	139.172.026.866,00	143.676.589.791,00	4.504.562.925,00	103,23	
	1.02.0.00.0.00.02.0001		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	829.501.133,00	1.097.625.693,57	268.124.560,57	132,32	
				JUMLAH PENDAPATAN	140.001.527.999,00	144.774.215.484,57	4.772.687.485,57	103,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		5	BELANJA DAERAH	266.643.813.304,00	262.650.041.010,93	(3.993.772.293,07)	98,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	252.266.183.815,47	253.880.112.376,93	1.613.928.561,46	100,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.357.410,00	20.360.508,00	(2.996.902,00)	87,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	23.357.410,00	20.360.508,00	(2.996.902,00)	87,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.357.410,00	20.360.508,00	(2.996.902,00)	87,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.357.410,00	20.360.508,00	(2.996.902,00)	87,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	95.740.318.943,15	94.606.016.604,00	(1.134.302.339,15)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	94.993.527.681,15	93.862.968.604,00	(1.130.559.077,15)	98,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	94.993.527.681,15	93.862.968.604,00	(1.130.559.077,15)	98,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	94.993.527.681,15	93.862.968.604,00	(1.130.559.077,15)	98,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	746.791.262,00	743.048.000,00	(3.743.262,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	746.791.262,00	743.048.000,00	(3.743.262,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	746.791.262,00	743.048.000,00	(3.743.262,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	163.568.520,00	127.933.578,00	(35.634.942,00)	78,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	100.739.920,00	95.207.000,00	(5.532.920,00)	94,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.739.920,00	95.207.000,00	(5.532.920,00)	94,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.739.920,00	95.207.000,00	(5.532.920,00)	94,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	62.828.600,00	32.726.578,00	(30.102.022,00)	52,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	62.828.600,00	32.726.578,00	(30.102.022,00)	52,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.828.600,00	32.726.578,00	(30.102.022,00)	52,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.262.006.249,00	4.190.398.963,00	(71.607.286,00)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	201.019.685,00	197.080.500,00	(3.939.185,00)	98,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	794.000,00	0,00	(794.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.000,00	0,00	(794.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	200.225.685,00	197.080.500,00	(3.145.185,00)	98,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.225.685,00	197.080.500,00	(3.145.185,00)	98,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.060.986.564,00	3.993.318.463,00	(67.668.101,00)	98,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.551.552,00	4.773.000,00	(2.778.552,00)	63,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.551.552,00	4.773.000,00	(2.778.552,00)	63,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.053.435.012,00	3.988.545.463,00	(64.889.549,00)	98,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.053.435.012,00	3.988.545.463,00	(64.889.549,00)	98,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.691.968.238,50	9.992.242.249,00	(699.725.989,50)	93,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.004.150,00	7.081.750,00	(922.400,00)	88,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.004.150,00	7.081.750,00	(922.400,00)	88,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.004.150,00	7.081.750,00	(922.400,00)	88,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.647.729.568,91	5.998.972.808,00	(648.756.760,91)	90,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.647.729.568,91	5.998.972.808,00	(648.756.760,91)	90,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.647.729.568,91	5.998.972.808,00	(648.756.760,91)	90,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	4.036.234.519,59	3.986.187.691,00	(50.046.828,59)	98,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.036.234.519,59	3.986.187.691,00	(50.046.828,59)	98,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.036.234.519,59	3.986.187.691,00	(50.046.828,59)	98,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.160.980.680,82	612.481.000,00	(548.499.680,82)	52,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	83.650.000,00	83.025.000,00	(625.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	83.650.000,00	83.025.000,00	(625.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.650.000,00	83.025.000,00	(625.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	176.000.000,00	175.500.000,00	(500.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	176.000.000,00	175.500.000,00	(500.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.000.000,00	175.500.000,00	(500.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	901.330.680,82	353.956.000,00	(547.374.680,82)	39,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	699.310.680,82	353.956.000,00	(345.354.680,82)	50,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.310.680,82	353.956.000,00	(345.354.680,82)	50,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	202.020.000,00	0,00	(202.020.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202.020.000,00	0,00	(202.020.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	140.223.983.774,00	144.330.679.474,93	4.106.695.700,93	102,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	140.223.983.774,00	144.330.679.474,93	4.106.695.700,93	102,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	139.648.983.774,00	143.704.551.744,93	4.055.567.970,93	102,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	25.000.000.000,00	33.443.655.068,00	8.443.655.068,00	133,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.648.983.774,00	110.260.896.676,93	(4.388.087.097,07)	96,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	575.000.000,00	626.127.730,00	51.127.730,00	108,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	575.000.000,00	626.127.730,00	51.127.730,00	108,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.438.038.540,87	5.839.250.538,00	(5.598.788.002,87)	51,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	11.204.079.664,87	5.663.009.038,00	(5.541.070.626,87)	50,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	3.080.582.190,00	2.308.529.182,00	(772.053.008,00)	74,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.264.914.852,00	1.557.918.322,00	(706.996.530,00)	68,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.264.914.852,00	1.557.918.322,00	(706.996.530,00)	68,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	815.667.338,00	750.610.860,00	(65.056.478,00)	92,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	815.667.338,00	750.610.860,00	(65.056.478,00)	92,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	3.177.048.000,00	3.043.898.000,00	(133.150.000,00)	95,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	3.176.298.000,00	3.043.298.000,00	(133.000.000,00)	95,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.176.298.000,00	3.043.298.000,00	(133.000.000,00)	95,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017		PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	3.139.874.851,00	244.758.856,00	(2.895.115.995,00)	7,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	3.139.874.851,00	244.758.856,00	(2.895.115.995,00)	7,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.139.874.851,00	244.758.856,00	(2.895.115.995,00)	7,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0027		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	1.806.574.623,87	65.823.000,00	(1.740.751.623,87)	3,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	1.806.574.623,87	65.823.000,00	(1.740.751.623,87)	3,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.806.574.623,87	65.823.000,00	(1.740.751.623,87)	3,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	233.958.876,00	176.241.500,00	(57.717.376,00)	75,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	233.958.876,00	176.241.500,00	(57.717.376,00)	75,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	143.172,00	0,00	(143.172,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.172,00	0,00	(143.172,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	233.815.704,00	176.241.500,00	(57.574.204,00)	75,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.815.704,00	176.241.500,00	(57.574.204,00)	75,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.939.590.947,66	2.930.678.096,00	(8.912.851,66)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01		PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI	2.939.590.947,66	2.930.678.096,00	(8.912.851,66)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.939.590.947,66	2.930.678.096,00	(8.912.851,66)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.939.590.947,66	2.930.678.096,00	(8.912.851,66)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.939.590.947,66	2.930.678.096,00	(8.912.851,66)	99,69	
				JUMLAH BELANJA	266.643.813.304,00	262.650.041.010,93	(3.993.772.293,07)	98,50	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(126.642.285.305,00)	(117.875.825.526,36)	8.766.459.778,64	93,07	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(126.642.285.305,00)	(117.875.825.526,36)	8.766.459.778,64	93,07	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.02.0002		4	PENDAPATAN DAERAH	23.500.000.000,00	20.782.896.472,00	(2.717.103.528,00)	88,43	
	1.02.0.00.0.00.02.0002		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.500.000.000,00	20.782.896.472,00	(2.717.103.528,00)	88,43	
	1.02.0.00.0.00.02.0002		4.1.02	Retribusi Daerah	23.500.000.000,00	20.664.995.452,00	(2.835.004.548,00)	87,93	
	1.02.0.00.0.00.02.0002		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	117.901.020,00	117.901.020,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	23.500.000.000,00	20.782.896.472,00	(2.717.103.528,00)	88,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		5	BELANJA DAERAH	146.827.835.328,00	140.443.480.779,00	(6.384.354.549,00)	95,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	82.250.349.467,95	78.072.518.187,00	(4.177.831.280,95)	94,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	141.856.946,00	137.232.000,00	(4.624.946,00)	96,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	118.032.946,00	114.424.000,00	(3.608.946,00)	96,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	118.032.946,00	114.424.000,00	(3.608.946,00)	96,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.032.946,00	114.424.000,00	(3.608.946,00)	96,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	23.824.000,00	22.808.000,00	(1.016.000,00)	95,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.824.000,00	22.808.000,00	(1.016.000,00)	95,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.824.000,00	22.808.000,00	(1.016.000,00)	95,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	52.947.853.189,00	52.049.252.895,00	(898.600.294,00)	98,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	52.190.195.189,00	51.298.704.895,00	(891.490.294,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.190.195.189,00	51.298.704.895,00	(891.490.294,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	52.190.195.189,00	51.298.704.895,00	(891.490.294,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	739.658.000,00	733.388.000,00	(6.270.000,00)	99,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	739.658.000,00	733.388.000,00	(6.270.000,00)	99,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.658.000,00	733.388.000,00	(6.270.000,00)	99,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	18.000.000,00	17.160.000,00	(840.000,00)	95,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.160.000,00	(840.000,00)	95,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.160.000,00	(840.000,00)	95,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	13.000.000,00	12.920.000,00	(80.000,00)	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	13.000.000,00	12.920.000,00	(80.000,00)	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.920.000,00	(80.000,00)	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.920.000,00	(80.000,00)	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	653.760.119,00	621.383.807,00	(32.376.312,00)	95,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	43.371.001,00	42.529.000,00	(842.001,00)	98,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.371.001,00	42.529.000,00	(842.001,00)	98,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.371.001,00	42.529.000,00	(842.001,00)	98,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	260.685.280,00	255.667.600,00	(5.017.680,00)	98,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.074.380,00	41.855.600,00	(3.218.780,00)	92,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.074.380,00	41.855.600,00	(3.218.780,00)	92,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	215.610.900,00	213.812.000,00	(1.798.900,00)	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.610.900,00	213.812.000,00	(1.798.900,00)	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	58.806.200,00	58.262.508,00	(543.692,00)	99,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	58.806.200,00	58.262.508,00	(543.692,00)	99,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.806.200,00	58.262.508,00	(543.692,00)	99,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	191.473.638,00	185.795.699,00	(5.677.939,00)	97,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	191.473.638,00	185.795.699,00	(5.677.939,00)	97,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.473.638,00	185.795.699,00	(5.677.939,00)	97,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	81.660.000,00	64.219.000,00	(17.441.000,00)	78,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	81.660.000,00	64.219.000,00	(17.441.000,00)	78,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.660.000,00	64.219.000,00	(17.441.000,00)	78,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	17.764.000,00	14.910.000,00	(2.854.000,00)	83,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.764.000,00	14.910.000,00	(2.854.000,00)	83,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.764.000,00	14.910.000,00	(2.854.000,00)	83,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.872.112.599,95	1.594.824.765,00	(277.287.834,95)	85,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.872.112.599,95	1.594.824.765,00	(277.287.834,95)	85,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.872.112.599,95	1.594.824.765,00	(277.287.834,95)	85,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.872.112.599,95	1.594.824.765,00	(277.287.834,95)	85,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.484.212.362,00	2.427.703.240,00	(56.509.122,00)	97,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	96.367.320,00	79.983.910,00	(16.383.410,00)	82,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.367.320,00	79.983.910,00	(16.383.410,00)	82,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.367.320,00	79.983.910,00	(16.383.410,00)	82,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	100.000.000,00	99.870.000,00	(130.000,00)	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.870.000,00	(130.000,00)	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.870.000,00	(130.000,00)	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	85.766.200,00	81.235.000,00	(4.531.200,00)	94,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	85.766.200,00	81.235.000,00	(4.531.200,00)	94,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.766.200,00	81.235.000,00	(4.531.200,00)	94,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	50.000.000,00	17.380.000,00	(32.620.000,00)	34,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	17.380.000,00	(32.620.000,00)	34,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	17.380.000,00	(32.620.000,00)	34,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0008		PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD	48.994.500,00	46.150.000,00	(2.844.500,00)	94,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0008	5.1	BELANJA OPERASI	22.188.000,00	20.100.000,00	(2.088.000,00)	90,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.188.000,00	20.100.000,00	(2.088.000,00)	90,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0008	5.2	BELANJA MODAL	26.806.500,00	26.050.000,00	(756.500,00)	97,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.806.500,00	26.050.000,00	(756.500,00)	97,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.103.084.342,00	2.103.084.330,00	(12,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.103.084.342,00	2.103.084.330,00	(12,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.103.084.342,00	2.103.084.330,00	(12,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	24.137.554.252,00	21.229.201.480,00	(2.908.352.772,00)	87,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	24.137.554.252,00	21.229.201.480,00	(2.908.352.772,00)	87,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.137.554.252,00	20.749.617.480,00	(2.387.936.772,00)	89,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.000.000.000,00	4.373.410.365,00	(626.589.635,00)	87,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.137.554.252,00	16.376.207.115,00	(1.761.347.137,00)	90,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	479.584.000,00	(520.416.000,00)	47,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	479.584.000,00	(520.416.000,00)	47,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	62.257.639.859,05	60.080.293.151,00	(2.177.346.708,05)	96,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	60.912.095.799,05	58.751.851.277,00	(2.160.244.522,05)	96,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004		PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	35.495.700.000,00	33.911.619.272,00	(1.584.080.728,00)	95,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	969.979.272,00	(30.020.728,00)	96,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	969.979.272,00	(30.020.728,00)	96,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	34.495.700.000,00	32.941.640.000,00	(1.554.060.000,00)	95,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.495.700.000,00	32.941.640.000,00	(1.554.060.000,00)	95,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	21.492.822.150,00	20.931.631.000,00	(561.191.150,00)	97,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	21.492.822.150,00	20.931.631.000,00	(561.191.150,00)	97,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.324.222.150,00	14.768.591.000,00	(555.631.150,00)	96,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.168.600.000,00	6.163.040.000,00	(5.560.000,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016		PENGADAAN BARANG PENUNJANG OPERASIONAL RUMAH SAKIT	206.060.000,00	205.874.800,00	(185.200,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	6.102.000,00	5.964.000,00	(138.000,00)	97,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.102.000,00	5.964.000,00	(138.000,00)	97,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	199.958.000,00	199.910.800,00	(47.200,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.958.000,00	199.910.800,00	(47.200,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	3.717.513.649,05	3.702.726.205,00	(14.787.444,05)	99,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	3.677.023.649,05	3.662.236.205,00	(14.787.444,05)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.677.023.649,05	3.662.236.205,00	(14.787.444,05)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.2	BELANJA MODAL	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	1.279.837.600,00	1.265.487.874,00	(14.349.726,00)	98,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	1.015.237.600,00	1.004.137.874,00	(11.099.726,00)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.015.237.600,00	1.004.137.874,00	(11.099.726,00)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.015.237.600,00	1.004.137.874,00	(11.099.726,00)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0031		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	264.600.000,00	261.350.000,00	(3.250.000,00)	98,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0031	5.1	BELANJA OPERASI	264.600.000,00	261.350.000,00	(3.250.000,00)	98,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.600.000,00	261.350.000,00	(3.250.000,00)	98,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	43.143.460,00	42.297.000,00	(846.460,00)	98,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	43.143.460,00	42.297.000,00	(846.460,00)	98,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.143.460,00	42.297.000,00	(846.460,00)	98,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.143.460,00	42.297.000,00	(846.460,00)	98,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	22.563.000,00	20.657.000,00	(1.906.000,00)	91,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002		PENINGKATAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT	22.563.000,00	20.657.000,00	(1.906.000,00)	91,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.563.000,00	20.657.000,00	(1.906.000,00)	91,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.563.000,00	20.657.000,00	(1.906.000,00)	91,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.319.846.001,00	2.290.669.441,00	(29.176.560,00)	98,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01		PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI	2.241.063.936,00	2.229.718.334,00	(11.345.602,00)	99,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.241.063.936,00	2.229.718.334,00	(11.345.602,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.241.063.936,00	2.229.718.334,00	(11.345.602,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.241.063.936,00	2.229.718.334,00	(11.345.602,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	78.782.065,00	60.951.107,00	(17.830.958,00)	77,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001		PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	78.782.065,00	60.951.107,00	(17.830.958,00)	77,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.782.065,00	60.951.107,00	(17.830.958,00)	77,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.782.065,00	60.951.107,00	(17.830.958,00)	77,36	
				JUMLAH BELANJA	146.827.835.328,00	140.443.480.779,00	(6.384.354.549,00)	95,65	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(123.327.835.328,00)	(119.660.584.307,00)	3.667.251.021,00	97,02	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(123.327.835.328,00)	(119.660.584.307,00)	3.667.251.021,00	97,02	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004		5	BELANJA DAERAH	6.829.095.890,00	6.114.573.684,25	(714.522.205,75)	89,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.203.147.571,00	1.124.511.606,00	(78.635.965,00)	93,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.454.000,00	10.924.170,00	(529.830,00)	95,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	11.454.000,00	10.924.170,00	(529.830,00)	95,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.454.000,00	10.924.170,00	(529.830,00)	95,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.454.000,00	10.924.170,00	(529.830,00)	95,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	128.712.000,00	119.680.500,00	(9.031.500,00)	92,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	128.712.000,00	119.680.500,00	(9.031.500,00)	92,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	128.712.000,00	119.680.500,00	(9.031.500,00)	92,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.712.000,00	119.680.500,00	(9.031.500,00)	92,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	58.428.600,00	55.108.880,00	(3.319.720,00)	94,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.567.000,00	9.045.000,00	(522.000,00)	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.567.000,00	9.045.000,00	(522.000,00)	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.567.000,00	9.045.000,00	(522.000,00)	94,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	9.000.000,00	8.818.880,00	(181.120,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.818.880,00	(181.120,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.818.880,00	(181.120,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.500.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	35.361.600,00	33.495.000,00	(1.866.600,00)	94,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.361.600,00	33.495.000,00	(1.866.600,00)	94,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.361.600,00	33.495.000,00	(1.866.600,00)	94,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	51.268.000,00	49.282.924,00	(1.985.076,00)	96,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	51.268.000,00	49.282.924,00	(1.985.076,00)	96,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	51.268.000,00	49.282.924,00	(1.985.076,00)	96,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.268.000,00	49.282.924,00	(1.985.076,00)	96,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	899.316.471,00	876.092.932,00	(23.223.539,00)	97,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	385.177.240,00	378.807.897,00	(6.369.343,00)	98,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	385.177.240,00	378.807.897,00	(6.369.343,00)	98,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.177.240,00	378.807.897,00	(6.369.343,00)	98,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	514.139.231,00	497.285.035,00	(16.854.196,00)	96,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	514.139.231,00	497.285.035,00	(16.854.196,00)	96,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.139.231,00	497.285.035,00	(16.854.196,00)	96,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.968.500,00	13.422.200,00	(40.546.300,00)	24,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	43.560.000,00	9.672.200,00	(33.887.800,00)	22,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.560.000,00	9.672.200,00	(33.887.800,00)	22,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.560.000,00	9.672.200,00	(33.887.800,00)	22,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	10.408.500,00	3.750.000,00	(6.658.500,00)	36,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.408.500,00	3.750.000,00	(6.658.500,00)	36,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.408.500,00	3.750.000,00	(6.658.500,00)	36,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.589.777.819,00	4.954.342.078,25	(635.435.740,75)	88,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	5.349.987.859,00	4.714.744.692,25	(635.243.166,75)	88,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0004		PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	619.337.416,00	618.280.416,00	(1.057.000,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	298.898.926,00	297.841.926,00	(1.057.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.898.926,00	297.841.926,00	(1.057.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	320.438.490,00	320.438.490,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.799.500,00	77.799.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	242.638.990,00	242.638.990,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0013		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI	43.020.600,00	42.568.300,00	(452.300,00)	98,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	43.020.600,00	42.568.300,00	(452.300,00)	98,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.020.600,00	42.568.300,00	(452.300,00)	98,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0025		DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	707.180.809,00	701.154.338,00	(6.026.471,00)	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	707.180.809,00	701.154.338,00	(6.026.471,00)	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	707.180.809,00	701.154.338,00	(6.026.471,00)	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0027		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	3.980.449.034,00	3.352.741.638,25	(627.707.395,75)	84,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	3.980.449.034,00	3.352.741.638,25	(627.707.395,75)	84,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.980.449.034,00	3.352.741.638,25	(627.707.395,75)	84,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	239.789.960,00	239.597.386,00	(192.574,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	239.789.960,00	239.597.386,00	(192.574,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	239.789.960,00	239.597.386,00	(192.574,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.789.960,00	239.597.386,00	(192.574,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.170.500,00	35.720.000,00	(450.500,00)	98,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05.1.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI	36.170.500,00	35.720.000,00	(450.500,00)	98,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05.1.01.0001		PENINGKATAN UPAYA ADVOKASI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN, PENGGALANGAN KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI	36.170.500,00	35.720.000,00	(450.500,00)	98,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.170.500,00	35.720.000,00	(450.500,00)	98,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.170.500,00	35.720.000,00	(450.500,00)	98,75	
				JUMLAH BELANJA	6.829.095.890,00	6.114.573.684,25	(714.522.205,75)	89,53	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.829.095.890,00)	(6.114.573.684,25)	714.522.205,75	89,53	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.829.095.890,00)	(6.114.573.684,25)	714.522.205,75	89,53	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.10.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51	
	1.03.2.10.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51	
	1.03.2.10.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51	
				JUMLAH PENDAPATAN	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	137.030.002.320,00	101.674.366.826,14	(35.355.635.493,86)	74,19	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.050.814.067,47	29.950.306.691,00	(2.100.507.376,47)	93,44	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	446.883.168,77	432.908.785,00	(13.974.383,77)	96,87	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	150.695.008,00	138.669.778,00	(12.025.230,00)	92,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.695.008,00	138.669.778,00	(12.025.230,00)	92,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.695.008,00	138.669.778,00	(12.025.230,00)	92,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	227.773.020,77	225.823.867,00	(1.949.153,77)	99,14	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	227.773.020,77	225.823.867,00	(1.949.153,77)	99,14	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.773.020,77	225.823.867,00	(1.949.153,77)	99,14	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	68.415.140,00	68.415.140,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	68.415.140,00	68.415.140,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.415.140,00	68.415.140,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	23.900.774.139,66	22.845.713.275,00	(1.055.060.864,66)	95,58	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	22.384.556.199,66	21.329.695.335,00	(1.054.860.864,66)	95,28	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.384.556.199,66	21.329.695.335,00	(1.054.860.864,66)	95,28	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	22.384.556.199,66	21.329.695.335,00	(1.054.860.864,66)	95,28	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1.450.080.000,00	1.449.880.000,00	(200.000,00)	99,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.450.080.000,00	1.449.880.000,00	(200.000,00)	99,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.080.000,00	1.449.880.000,00	(200.000,00)	99,98	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	66.137.940,00	66.137.940,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	66.137.940,00	66.137.940,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.137.940,00	66.137.940,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	36.776.000,00	36.671.600,00	(104.400,00)	99,71	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.03.0003		KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	36.776.000,00	36.671.600,00	(104.400,00)	99,71	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.776.000,00	36.671.600,00	(104.400,00)	99,71	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.776.000,00	36.671.600,00	(104.400,00)	99,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	265.768.038,00	209.680.045,00	(56.087.993,00)	78,89	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	157.723.038,00	151.980.045,00	(5.742.993,00)	96,35	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	157.723.038,00	151.980.045,00	(5.742.993,00)	96,35	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.723.038,00	151.980.045,00	(5.742.993,00)	96,35	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	108.045.000,00	57.700.000,00	(50.345.000,00)	53,40	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	108.045.000,00	57.700.000,00	(50.345.000,00)	53,40	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.045.000,00	57.700.000,00	(50.345.000,00)	53,40	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.387.161.523,37	2.194.589.474,00	(192.572.049,37)	91,93	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	54.459.016,00	51.938.729,00	(2.520.287,00)	95,37	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.459.016,00	51.938.729,00	(2.520.287,00)	95,37	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.459.016,00	51.938.729,00	(2.520.287,00)	95,37	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	429.244.900,00	331.995.980,00	(97.248.920,00)	77,34	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.027.000,00	106.872.000,00	(4.155.000,00)	96,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.027.000,00	106.872.000,00	(4.155.000,00)	96,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	318.217.900,00	225.123.980,00	(93.093.920,00)	70,74	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.217.900,00	200.227.851,00	(92.990.049,00)	68,28	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.000.000,00	24.896.129,00	(103.871,00)	99,58	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	66.390.600,00	63.254.056,00	(3.136.544,00)	95,27	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	66.390.600,00	63.254.056,00	(3.136.544,00)	95,27	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.390.600,00	63.254.056,00	(3.136.544,00)	95,27	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	336.560.100,00	316.417.398,00	(20.142.702,00)	94,01	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	336.560.100,00	316.417.398,00	(20.142.702,00)	94,01	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.560.100,00	316.417.398,00	(20.142.702,00)	94,01	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	74.362.000,00	40.122.000,00	(34.240.000,00)	53,95	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	74.362.000,00	40.122.000,00	(34.240.000,00)	53,95	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.362.000,00	40.122.000,00	(34.240.000,00)	53,95	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	153.278.750,00	140.970.000,00	(12.308.750,00)	91,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	153.278.750,00	140.970.000,00	(12.308.750,00)	91,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.278.750,00	140.970.000,00	(12.308.750,00)	91,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	59.691.500,00	58.781.715,00	(909.785,00)	98,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	59.691.500,00	58.781.715,00	(909.785,00)	98,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.691.500,00	58.781.715,00	(909.785,00)	98,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	157.198.571,37	149.508.500,00	(7.690.071,37)	95,10	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	157.198.571,37	149.508.500,00	(7.690.071,37)	95,10	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.198.571,37	149.508.500,00	(7.690.071,37)	95,10	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.055.976.086,00	1.041.601.096,00	(14.374.990,00)	98,63	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.055.976.086,00	1.041.601.096,00	(14.374.990,00)	98,63	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.055.976.086,00	1.041.601.096,00	(14.374.990,00)	98,63	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	125.000.000,00	124.398.900,00	(601.100,00)	99,51	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	70.000.000,00	69.652.500,00	(347.500,00)	99,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	69.652.500,00	(347.500,00)	99,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	69.652.500,00	(347.500,00)	99,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	55.000.000,00	54.746.400,00	(253.600,00)	99,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.746.400,00	(253.600,00)	99,53	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.746.400,00	(253.600,00)	99,53	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.436.424.460,67	3.028.479.069,00	(407.945.391,67)	88,12	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	24.249.851,31	14.994.000,00	(9.255.851,31)	61,83	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.249.851,31	14.994.000,00	(9.255.851,31)	61,83	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.249.851,31	14.994.000,00	(9.255.851,31)	61,83	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	975.956.971,36	866.647.579,00	(109.309.392,36)	88,79	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	975.956.971,36	866.647.579,00	(109.309.392,36)	88,79	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	975.956.971,36	866.647.579,00	(109.309.392,36)	88,79	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	54.862.700,00	48.722.588,00	(6.140.112,00)	88,80	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.390.000,00	41.287.588,00	(6.102.412,00)	87,12	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.390.000,00	41.287.588,00	(6.102.412,00)	87,12	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0003	5.2	BELANJA MODAL	7.472.700,00	7.435.000,00	(37.700,00)	99,49	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.472.700,00	7.435.000,00	(37.700,00)	99,49	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.381.354.938,00	2.098.114.902,00	(283.240.036,00)	88,10	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.381.354.938,00	2.098.114.902,00	(283.240.036,00)	88,10	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.381.354.938,00	2.098.114.902,00	(283.240.036,00)	88,10	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.452.026.737,00	1.077.865.543,00	(374.161.194,00)	74,23	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	432.661.602,00	424.831.958,00	(7.829.644,00)	98,19	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	432.661.602,00	424.831.958,00	(7.829.644,00)	98,19	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.661.602,00	424.831.958,00	(7.829.644,00)	98,19	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	201.901.000,00	169.785.300,00	(32.115.700,00)	84,09	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	201.901.000,00	169.785.300,00	(32.115.700,00)	84,09	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.901.000,00	169.785.300,00	(32.115.700,00)	84,09	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	90.559.500,00	90.555.000,00	(4.500,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	90.559.500,00	90.555.000,00	(4.500,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.559.500,00	90.555.000,00	(4.500,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	726.904.635,00	392.693.285,00	(334.211.350,00)	54,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	726.904.635,00	392.693.285,00	(334.211.350,00)	54,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.904.635,00	392.693.285,00	(334.211.350,00)	54,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.922.127.560,00	6.194.807.295,00	(3.727.320.265,00)	62,43	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.922.127.560,00	6.194.807.295,00	(3.727.320.265,00)	62,43	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0009		PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI	68.465.900,00	68.465.900,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	68.465.900,00	68.465.900,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.465.900,00	68.465.900,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0075		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KEWENANGAN PROVINSI	231.550.180,00	192.941.113,00	(38.609.067,00)	83,32	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0075	5.1	BELANJA OPERASI	231.550.180,00	192.941.113,00	(38.609.067,00)	83,32	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0075	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.550.180,00	192.941.113,00	(38.609.067,00)	83,32	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0079		NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	6.657.490.700,00	4.294.670.940,00	(2.362.819.760,00)	64,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0079	5.1	BELANJA OPERASI	6.657.490.700,00	4.294.670.940,00	(2.362.819.760,00)	64,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0079	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.657.490.700,00	4.294.670.940,00	(2.362.819.760,00)	64,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096		PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA	1.389.340.880,00	891.684.603,00	(497.656.277,00)	64,18	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096	5.1	BELANJA OPERASI	206.736.950,00	135.820.673,00	(70.916.277,00)	65,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.736.950,00	135.820.673,00	(70.916.277,00)	65,69	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096	5.2	BELANJA MODAL	1.182.603.930,00	755.863.930,00	(426.740.000,00)	63,91	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.182.603.930,00	755.863.930,00	(426.740.000,00)	63,91	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0118		PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	1.185.209.900,00	449.234.339,00	(735.975.561,00)	37,90	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0118	5.1	BELANJA OPERASI	184.936.800,00	84.082.239,00	(100.854.561,00)	45,46	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0118	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.936.800,00	84.082.239,00	(100.854.561,00)	45,46	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0118	5.2	BELANJA MODAL	1.000.273.100,00	365.152.100,00	(635.121.000,00)	36,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0118	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.273.100,00	365.152.100,00	(635.121.000,00)	36,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0121		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	390.070.000,00	297.810.400,00	(92.259.600,00)	76,34	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0121	5.1	BELANJA OPERASI	390.070.000,00	297.810.400,00	(92.259.600,00)	76,34	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0121	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.070.000,00	297.810.400,00	(92.259.600,00)	76,34	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.481.419.725,00	1.410.577.574,20	(1.070.842.150,80)	56,84	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	2.481.419.725,00	1.410.577.574,20	(1.070.842.150,80)	56,84	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0015		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	977.065.815,00	941.011.363,00	(36.054.452,00)	96,30	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	894.065.815,00	858.011.363,00	(36.054.452,00)	95,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	894.065.815,00	858.011.363,00	(36.054.452,00)	95,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018		PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	1.504.353.910,00	469.566.211,20	(1.034.787.698,80)	31,21	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	146.853.910,00	66.311.658,00	(80.542.252,00)	45,15	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.853.910,00	66.311.658,00	(80.542.252,00)	45,15	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	1.357.500.000,00	403.254.553,20	(954.245.446,80)	29,70	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.357.500.000,00	403.254.553,20	(954.245.446,80)	29,70	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	105.381.749,00	62.139.665,00	(43.242.084,00)	58,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	105.381.749,00	62.139.665,00	(43.242.084,00)	58,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0010		PEMBINAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) KABUPATEN/KOTA	105.381.749,00	62.139.665,00	(43.242.084,00)	58,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	105.381.749,00	62.139.665,00	(43.242.084,00)	58,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.381.749,00	62.139.665,00	(43.242.084,00)	58,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	23.298.513.417,53	13.403.899.707,88	(9.894.613.709,65)	57,53	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01		PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI	23.298.513.417,53	13.403.899.707,88	(9.894.613.709,65)	57,53	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013		PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA	1.673.424.700,00	1.673.424.700,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.473.558.700,00	1.473.558.700,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.693.900,00	1.220.693.900,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	5.1.05	Belanja Hibah	252.864.800,00	252.864.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	199.866.000,00	199.866.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.866.000,00	199.866.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0016		PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI	13.925.800,00	13.925.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	13.925.800,00	13.925.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.925.800,00	13.925.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0019		PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI	13.938.663.235,03	7.709.447.213,67	(6.229.216.021,36)	55,30	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	13.638.663.235,03	7.410.919.213,67	(6.227.744.021,36)	54,33	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.618.062.100,03	3.546.497.511,00	(3.071.564.589,03)	53,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0019	5.1.05	Belanja Hibah	7.020.601.135,00	3.864.421.702,67	(3.156.179.432,33)	55,04	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0019	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	298.528.000,00	(1.472.000,00)	99,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0019	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	298.528.000,00	(1.472.000,00)	99,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0020		PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI	7.672.499.682,50	4.007.101.994,21	(3.665.397.688,29)	52,22	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	7.672.499.682,50	4.007.101.994,21	(3.665.397.688,29)	52,22	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.672.499.682,50	4.007.101.994,21	(3.665.397.688,29)	52,22	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13.709.997.262,00	10.749.462.796,37	(2.960.534.465,63)	78,40	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.709.997.262,00	10.749.462.796,37	(2.960.534.465,63)	78,40	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008		PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA	13.709.997.262,00	10.749.462.796,37	(2.960.534.465,63)	78,40	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.834.820.062,00	10.211.642.796,37	(2.623.177.265,63)	79,56	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.620.211.914,00	5.997.047.449,08	(2.623.164.464,92)	69,56	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008	5.1.05	Belanja Hibah	4.214.608.148,00	4.214.595.347,29	(12.800,71)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	875.177.200,00	537.820.000,00	(337.357.200,00)	61,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	875.177.200,00	537.820.000,00	(337.357.200,00)	61,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	54.045.251.091,00	38.501.040.878,69	(15.544.210.212,31)	71,23	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01		PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	54.045.251.091,00	38.501.040.878,69	(15.544.210.212,31)	71,23	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0024		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN PROVINSI	1.284.702.180,00	729.708.161,00	(554.994.019,00)	56,79	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	1.284.702.180,00	729.708.161,00	(554.994.019,00)	56,79	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.702.180,00	729.708.161,00	(554.994.019,00)	56,79	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0025		REHABILITASI JEMBATAN	3.507.879.740,00	3.498.774.800,00	(9.104.940,00)	99,74	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	91.840.200,00	(8.159.800,00)	91,84	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	91.840.200,00	(8.159.800,00)	91,84	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0025	5.2	BELANJA MODAL	3.407.879.740,00	3.406.934.600,00	(945.140,00)	99,97	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0025	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.407.879.740,00	3.406.934.600,00	(945.140,00)	99,97	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0026		PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	99.088.800,00	99.088.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	99.088.800,00	99.088.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.088.800,00	99.088.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031		REKONSTRUKSI JALAN	8.128.239.887,00	5.491.858.049,00	(2.636.381.838,00)	67,56	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	744.239.887,00	726.603.909,00	(17.635.978,00)	97,63	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	744.239.887,00	726.603.909,00	(17.635.978,00)	97,63	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	7.384.000.000,00	4.765.254.140,00	(2.618.745.860,00)	64,53	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.384.000.000,00	4.765.254.140,00	(2.618.745.860,00)	64,53	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0032		PEMBANGUNAN JEMBATAN	12.154.000.000,00	8.906.948.443,69	(3.247.051.556,31)	73,28	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	81.912.200,00	(18.087.800,00)	81,91	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	81.912.200,00	(18.087.800,00)	81,91	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	12.054.000.000,00	8.825.036.243,69	(3.228.963.756,31)	73,21	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.054.000.000,00	8.825.036.243,69	(3.228.963.756,31)	73,21	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0033		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	10.269.721.360,00	7.648.437.040,00	(2.621.284.320,00)	74,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	10.269.721.360,00	7.648.437.040,00	(2.621.284.320,00)	74,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.269.721.360,00	7.648.437.040,00	(2.621.284.320,00)	74,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0038		PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	7.175.434.000,00	6.262.529.638,00	(912.904.362,00)	87,27	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	6.134.434.000,00	5.242.313.238,00	(892.120.762,00)	85,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.134.434.000,00	5.242.313.238,00	(892.120.762,00)	85,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0038	5.2	BELANJA MODAL	1.041.000.000,00	1.020.216.400,00	(20.783.600,00)	98,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0038	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.041.000.000,00	1.020.216.400,00	(20.783.600,00)	98,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0041		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	2.158.458.934,00	973.510.876,00	(1.184.948.058,00)	45,10	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	2.158.458.934,00	973.510.876,00	(1.184.948.058,00)	45,10	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.158.458.934,00	973.510.876,00	(1.184.948.058,00)	45,10	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042		PEMBANGUNAN JALAN	8.069.693.100,00	3.692.251.981,00	(4.377.441.119,00)	45,75	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042	5.1	BELANJA OPERASI	6.912.717.800,00	2.542.840.107,00	(4.369.877.693,00)	36,78	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.428.282.000,00	2.058.404.307,00	(4.369.877.693,00)	32,02	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042	5.1.05	Belanja Hibah	484.435.800,00	484.435.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042	5.2	BELANJA MODAL	1.156.975.300,00	1.149.411.874,00	(7.563.426,00)	99,34	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.156.975.300,00	1.149.411.874,00	(7.563.426,00)	99,34	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0043		SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	1.198.033.090,00	1.197.933.090,00	(100.000,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	1.198.033.090,00	1.197.933.090,00	(100.000,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.033.090,00	1.197.933.090,00	(100.000,00)	99,99	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	495.825.345,00	482.288.515,00	(13.536.830,00)	97,26	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	426.648.275,00	421.220.244,00	(5.428.031,00)	98,72	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0011		PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI AHLI	179.439.875,00	177.987.101,00	(1.452.774,00)	99,19	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	179.439.875,00	177.987.101,00	(1.452.774,00)	99,19	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.439.875,00	177.987.101,00	(1.452.774,00)	99,19	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0012		PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KONSTRUKSI	86.408.400,00	82.733.143,00	(3.675.257,00)	95,74	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	86.408.400,00	82.733.143,00	(3.675.257,00)	95,74	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.408.400,00	82.733.143,00	(3.675.257,00)	95,74	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0014		FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI AHLI	160.800.000,00	160.500.000,00	(300.000,00)	99,81	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	160.800.000,00	160.500.000,00	(300.000,00)	99,81	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.800.000,00	160.500.000,00	(300.000,00)	99,81	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) CAKUPAN DAERAH PROVINSI	34.750.000,00	27.532.256,00	(7.217.744,00)	79,22	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02.0006		OPERASIONALISASI LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	34.750.000,00	27.532.256,00	(7.217.744,00)	79,22	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	34.750.000,00	27.532.256,00	(7.217.744,00)	79,22	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.750.000,00	27.532.256,00	(7.217.744,00)	79,22	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03		KEBIJAKAN KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	34.427.070,00	33.536.015,00	(891.055,00)	97,41	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0004		PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI DAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	24.427.070,00	23.611.494,00	(815.576,00)	96,66	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.427.070,00	23.611.494,00	(815.576,00)	96,66	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.427.070,00	23.611.494,00	(815.576,00)	96,66	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0008		PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI	10.000.000,00	9.924.521,00	(75.479,00)	99,24	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.924.521,00	(75.479,00)	99,24	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.924.521,00	(75.479,00)	99,24	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	920.672.103,00	919.843.703,00	(828.400,00)	99,91	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	192.248.703,00	191.762.545,00	(486.158,00)	99,74	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.01.0006		PENETAPAN RTRW PROVINSI	192.248.703,00	191.762.545,00	(486.158,00)	99,74	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	192.248.703,00	191.762.545,00	(486.158,00)	99,74	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.248.703,00	191.762.545,00	(486.158,00)	99,74	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.02		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG	203.316.400,00	203.265.364,00	(51.036,00)	99,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.02.0006		MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RTRW DAN RDTR KABUPATEN/KOTA	203.316.400,00	203.265.364,00	(51.036,00)	99,97	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	203.316.400,00	203.265.364,00	(51.036,00)	99,97	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.316.400,00	203.265.364,00	(51.036,00)	99,97	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.03		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFATAAN RUANG DAERAH PROVINSI	372.899.000,00	372.770.138,00	(128.862,00)	99,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.03.0007		PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	372.899.000,00	372.770.138,00	(128.862,00)	99,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	372.899.000,00	372.770.138,00	(128.862,00)	99,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.899.000,00	372.770.138,00	(128.862,00)	99,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG DAERAH PROVINSI	152.208.000,00	152.045.656,00	(162.344,00)	99,89	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	152.208.000,00	152.045.656,00	(162.344,00)	99,89	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	152.208.000,00	152.045.656,00	(162.344,00)	99,89	
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.208.000,00	152.045.656,00	(162.344,00)	99,89	
				JUMLAH BELANJA	137.030.002.320,00	101.674.366.826,14	(35.355.635.493,86)	74,19	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(136.655.002.320,00)	(101.143.697.826,14)	35.511.304.493,86	74,01	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(136.655.002.320,00)	(101.143.697.826,14)	35.511.304.493,86	74,01	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.10.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51	
	1.03.2.10.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51	
	1.03.2.10.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51	
				JUMLAH PENDAPATAN	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	(33.198.106,00)	97,10	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	(33.198.106,00)	97,10	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01		PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	(33.198.106,00)	97,10	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01.0003		KOORDINASI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	(33.198.106,00)	97,10	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	145.804.044,00	120.505.938,00	(25.298.106,00)	82,64	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.804.044,00	120.505.938,00	(25.298.106,00)	82,64	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	992.100.000,00	(7.900.000,00)	99,21	
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01.0003	5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	992.100.000,00	(7.900.000,00)	99,21	
				JUMLAH BELANJA	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	(33.198.106,00)	97,10	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(770.804.044,00)	(581.936.938,00)	188.867.106,00	75,49	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(770.804.044,00)	(581.936.938,00)	188.867.106,00	75,49	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	216.020.164.204,00	183.780.153.764,82	(32.240.010.439,18)	85,07	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.271.159.676,95	16.731.914.008,00	(1.539.245.668,95)	91,57	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	528.172.659,47	522.492.863,00	(5.679.796,47)	98,92	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	248.032.800,00	244.834.531,00	(3.198.269,00)	98,71	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	248.032.800,00	244.834.531,00	(3.198.269,00)	98,71	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.032.800,00	244.834.531,00	(3.198.269,00)	98,71	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	14.939.859,47	14.274.045,00	(665.814,47)	95,54	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.939.859,47	14.274.045,00	(665.814,47)	95,54	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.939.859,47	14.274.045,00	(665.814,47)	95,54	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	265.200.000,00	263.384.287,00	(1.815.713,00)	99,31	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	265.200.000,00	263.384.287,00	(1.815.713,00)	99,31	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.200.000,00	263.384.287,00	(1.815.713,00)	99,31	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.652.655.496,30	9.458.739.305,00	(193.916.191,30)	97,99	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.922.586.924,30	8.744.445.455,00	(178.141.469,30)	98,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.922.586.924,30	8.744.445.455,00	(178.141.469,30)	98,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.922.586.924,30	8.744.445.455,00	(178.141.469,30)	98,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	730.068.572,00	714.293.850,00	(15.774.722,00)	97,83	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	730.068.572,00	714.293.850,00	(15.774.722,00)	97,83	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.068.572,00	714.293.850,00	(15.774.722,00)	97,83	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	151.459.291,00	151.234.413,00	(224.878,00)	99,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	31.591.291,00	31.591.291,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.591.291,00	31.591.291,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.591.291,00	31.591.291,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	119.868.000,00	119.643.122,00	(224.878,00)	99,81	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	119.868.000,00	119.643.122,00	(224.878,00)	99,81	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.868.000,00	119.643.122,00	(224.878,00)	99,81	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	227.651.256,00	210.368.488,00	(17.282.768,00)	92,40	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	206.651.256,00	189.368.488,00	(17.282.768,00)	91,63	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	206.651.256,00	189.368.488,00	(17.282.768,00)	91,63	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.651.256,00	189.368.488,00	(17.282.768,00)	91,63	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.360.599.022,18	1.325.038.676,00	(35.560.346,18)	97,38	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.000.000,00	11.788.200,00	(211.800,00)	98,23	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.788.200,00	(211.800,00)	98,23	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.788.200,00	(211.800,00)	98,23	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	36.143.000,00	30.840.400,00	(5.302.600,00)	85,32	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.143.000,00	30.840.400,00	(5.302.600,00)	85,32	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.143.000,00	30.840.400,00	(5.302.600,00)	85,32	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	332.666.851,18	325.577.825,00	(7.089.026,18)	97,86	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	332.666.851,18	325.577.825,00	(7.089.026,18)	97,86	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.666.851,18	325.577.825,00	(7.089.026,18)	97,86	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	72.686.400,00	68.633.370,00	(4.053.030,00)	94,42	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	72.686.400,00	68.633.370,00	(4.053.030,00)	94,42	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.686.400,00	68.633.370,00	(4.053.030,00)	94,42	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	113.968.000,00	113.480.000,00	(488.000,00)	99,57	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	113.968.000,00	113.480.000,00	(488.000,00)	99,57	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.968.000,00	113.480.000,00	(488.000,00)	99,57	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.500.000,00	3.151.000,00	(2.349.000,00)	57,29	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	3.151.000,00	(2.349.000,00)	57,29	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	3.151.000,00	(2.349.000,00)	57,29	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	555.762.000,00	546.064.298,00	(9.697.702,00)	98,25	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	555.762.000,00	546.064.298,00	(9.697.702,00)	98,25	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.762.000,00	546.064.298,00	(9.697.702,00)	98,25	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	157.392.118,00	151.022.930,00	(6.369.188,00)	95,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	157.392.118,00	151.022.930,00	(6.369.188,00)	95,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.392.118,00	151.022.930,00	(6.369.188,00)	95,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	74.480.653,00	74.480.653,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	74.480.653,00	74.480.653,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.480.653,00	74.480.653,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.279.081.860,00	2.132.303.212,00	(146.778.648,00)	93,55	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	916.075.900,00	770.006.756,00	(146.069.144,00)	84,05	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	916.075.900,00	770.006.756,00	(146.069.144,00)	84,05	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	916.075.900,00	770.006.756,00	(146.069.144,00)	84,05	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0007		PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	382.910.000,00	382.910.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0007	5.2	BELANJA MODAL	382.910.000,00	382.910.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	382.910.000,00	382.910.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	980.095.960,00	979.386.456,00	(709.504,00)	99,92	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	112.188.800,00	112.188.800,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.188.800,00	112.188.800,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	867.907.160,00	867.197.656,00	(709.504,00)	99,91	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	648.626.460,00	647.916.956,00	(709.504,00)	99,89	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.280.700,00	219.280.700,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	829.187.432,00	765.707.069,00	(63.480.363,00)	92,34	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	315.940.000,00	252.539.637,00	(63.400.363,00)	79,93	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	315.940.000,00	252.539.637,00	(63.400.363,00)	79,93	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.940.000,00	252.539.637,00	(63.400.363,00)	79,93	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	96.000.000,00	95.920.000,00	(80.000,00)	99,91	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	95.920.000,00	(80.000,00)	99,91	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	95.920.000,00	(80.000,00)	99,91	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	407.247.432,00	407.247.432,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	407.247.432,00	407.247.432,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.247.432,00	407.247.432,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.242.352.660,00	2.166.029.982,00	(1.076.322.678,00)	66,80	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	21.877.800,00	21.430.900,00	(446.900,00)	97,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.877.800,00	21.430.900,00	(446.900,00)	97,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.877.800,00	21.430.900,00	(446.900,00)	97,95	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	79.175.600,00	70.256.690,00	(8.918.910,00)	88,73	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.175.600,00	70.256.690,00	(8.918.910,00)	88,73	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.175.600,00	70.256.690,00	(8.918.910,00)	88,73	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	46.700.000,00	46.041.930,00	(658.070,00)	98,59	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	46.700.000,00	46.041.930,00	(658.070,00)	98,59	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.700.000,00	46.041.930,00	(658.070,00)	98,59	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	3.094.599.260,00	2.028.300.462,00	(1.066.298.798,00)	65,54	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.964.599.220,00	1.828.641.462,00	(135.957.758,00)	93,07	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.964.599.220,00	1.828.641.462,00	(135.957.758,00)	93,07	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	1.130.000.040,00	199.659.000,00	(930.341.040,00)	17,66	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.130.000.040,00	199.659.000,00	(930.341.040,00)	17,66	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	865.593.600,00	808.757.305,00	(56.836.295,00)	93,43	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	865.593.600,00	808.757.305,00	(56.836.295,00)	93,43	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.03.0012		PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS BESERTA PSU BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI	865.593.600,00	808.757.305,00	(56.836.295,00)	93,43	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	865.593.600,00	808.757.305,00	(56.836.295,00)	93,43	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.593.600,00	808.757.305,00	(56.836.295,00)	93,43	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.356.429.499,05	8.142.372.014,00	(214.057.485,05)	97,43	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01		PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	29.043.000,00	29.043.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0017		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0018		PENYADARAN PUBLIK PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH	16.023.000,00	16.023.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	16.023.000,00	16.023.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.023.000,00	16.023.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	8.327.386.499,05	8.113.329.014,00	(214.057.485,05)	97,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0003		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	7.417.386.499,05	7.248.330.934,00	(169.055.565,05)	97,72	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.417.386.499,05	7.248.330.934,00	(169.055.565,05)	97,72	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.417.386.499,05	7.248.330.934,00	(169.055.565,05)	97,72	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0014		PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	910.000.000,00	864.998.080,00	(45.001.920,00)	95,05	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	910.000.000,00	864.998.080,00	(45.001.920,00)	95,05	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.000.000,00	864.998.080,00	(45.001.920,00)	95,05	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	188.526.981.428,00	158.097.110.437,82	(30.429.870.990,18)	83,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	188.526.981.428,00	158.097.110.437,82	(30.429.870.990,18)	83,85	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0001		PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN	894.786.000,00	394.786.000,00	(500.000.000,00)	44,12	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	894.786.000,00	394.786.000,00	(500.000.000,00)	44,12	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	894.786.000,00	394.786.000,00	(500.000.000,00)	44,12	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN	187.105.636.428,00	157.178.261.938,82	(29.927.374.489,18)	84,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	187.105.636.428,00	157.178.261.938,82	(29.927.374.489,18)	84,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.105.636.428,00	157.178.261.938,82	(29.927.374.489,18)	84,00	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERMUKIMAN	526.559.000,00	524.062.499,00	(2.496.501,00)	99,52	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	526.559.000,00	524.062.499,00	(2.496.501,00)	99,52	
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.559.000,00	524.062.499,00	(2.496.501,00)	99,52	
				JUMLAH BELANJA	216.020.164.204,00	183.780.153.764,82	(32.240.010.439,18)	85,07	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(216.020.164.204,00)	(183.780.153.764,82)	32.240.010.439,18	85,07	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(216.020.164.204,00)	(183.780.153.764,82)	32.240.010.439,18	85,07	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	9.208.666.358,00	8.962.203.403,00	(246.462.955,00)	97,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.172.857.514,00	8.060.629.273,00	(112.228.241,00)	98,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	79.227.733,00	71.636.471,00	(7.591.262,00)	90,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	47.383.381,00	43.551.045,00	(3.832.336,00)	91,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.383.381,00	43.551.045,00	(3.832.336,00)	91,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.383.381,00	43.551.045,00	(3.832.336,00)	91,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.565.900,00	9.535.900,00	(30.000,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.565.900,00	9.535.900,00	(30.000,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.565.900,00	9.535.900,00	(30.000,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.278.452,00	18.549.526,00	(3.728.926,00)	83,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.278.452,00	18.549.526,00	(3.728.926,00)	83,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.278.452,00	18.549.526,00	(3.728.926,00)	83,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.912.409.566,00	6.831.558.080,00	(80.851.486,00)	98,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.645.037.966,00	6.570.064.080,00	(74.973.886,00)	98,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.645.037.966,00	6.570.064.080,00	(74.973.886,00)	98,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.645.037.966,00	6.570.064.080,00	(74.973.886,00)	98,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	267.371.600,00	261.494.000,00	(5.877.600,00)	97,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	267.371.600,00	261.494.000,00	(5.877.600,00)	97,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.371.600,00	261.494.000,00	(5.877.600,00)	97,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	220.818.504,00	212.760.555,00	(8.057.949,00)	96,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.735.500,00	5.217.000,00	(518.500,00)	90,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.449.900,00	2.275.500,00	(174.400,00)	92,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.449.900,00	2.275.500,00	(174.400,00)	92,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	3.285.600,00	2.941.500,00	(344.100,00)	89,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.285.600,00	2.941.500,00	(344.100,00)	89,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	20.427.680,00	18.108.542,00	(2.319.138,00)	88,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.427.680,00	18.108.542,00	(2.319.138,00)	88,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.427.680,00	18.108.542,00	(2.319.138,00)	88,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.366.800,00	8.179.190,00	(187.610,00)	97,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.366.800,00	8.179.190,00	(187.610,00)	97,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.366.800,00	8.179.190,00	(187.610,00)	97,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	12.043.800,00	11.945.070,00	(98.730,00)	99,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.043.800,00	11.945.070,00	(98.730,00)	99,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.043.800,00	11.945.070,00	(98.730,00)	99,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.000.000,00	4.740.000,00	(260.000,00)	94,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.740.000,00	(260.000,00)	94,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.740.000,00	(260.000,00)	94,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	169.244.724,00	164.570.753,00	(4.673.971,00)	97,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	169.244.724,00	164.570.753,00	(4.673.971,00)	97,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.244.724,00	164.570.753,00	(4.673.971,00)	97,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	150.258.400,00	150.000.000,00	(258.400,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	150.258.400,00	150.000.000,00	(258.400,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.258.400,00	150.000.000,00	(258.400,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.258.400,00	150.000.000,00	(258.400,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	605.332.292,00	591.524.488,00	(13.807.804,00)	97,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	128.037.600,00	115.129.796,00	(12.907.804,00)	89,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	128.037.600,00	115.129.796,00	(12.907.804,00)	89,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.037.600,00	115.129.796,00	(12.907.804,00)	89,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	477.294.692,00	476.394.692,00	(900.000,00)	99,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	477.294.692,00	476.394.692,00	(900.000,00)	99,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.294.692,00	476.394.692,00	(900.000,00)	99,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	204.811.019,00	203.149.679,00	(1.661.340,00)	99,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	155.503.619,00	154.439.890,00	(1.063.729,00)	99,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	155.503.619,00	154.439.890,00	(1.063.729,00)	99,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.503.619,00	154.439.890,00	(1.063.729,00)	99,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.401.800,00	12.834.301,00	(567.499,00)	95,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.401.800,00	12.834.301,00	(567.499,00)	95,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.401.800,00	12.834.301,00	(567.499,00)	95,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	35.905.600,00	35.875.488,00	(30.112,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.905.600,00	35.875.488,00	(30.112,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.905.600,00	35.875.488,00	(30.112,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.035.808.844,00	901.574.130,00	(134.234.714,00)	87,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	225.936.989,40	133.640.793,00	(92.296.196,40)	59,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0026		PENGELOLAAN RISIKO BENCANA	79.037.538,00	33.492.267,00	(45.545.271,00)	42,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	79.037.538,00	33.492.267,00	(45.545.271,00)	42,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.037.538,00	33.492.267,00	(45.545.271,00)	42,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0028		PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	20.580.000,00	20.580.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0028	5.2	BELANJA MODAL	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0029		PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	54.726.049,40	54.141.126,00	(584.923,40)	98,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	28.600.645,40	28.112.127,00	(488.518,40)	98,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.600.645,40	28.112.127,00	(488.518,40)	98,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0029	5.2	BELANJA MODAL	26.125.404,00	26.028.999,00	(96.405,00)	99,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.125.404,00	26.028.999,00	(96.405,00)	99,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0030		PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	71.593.402,00	25.427.400,00	(46.166.002,00)	35,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0030	5.1	BELANJA OPERASI	71.593.402,00	25.427.400,00	(46.166.002,00)	35,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.593.402,00	25.427.400,00	(46.166.002,00)	35,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	574.815.068,60	562.374.739,00	(12.440.329,60)	97,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0025		PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	14.662.000,00	14.563.680,00	(98.320,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0025	5.1	BELANJA OPERASI	14.662.000,00	14.563.680,00	(98.320,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.662.000,00	14.563.680,00	(98.320,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0028		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	321.222.786,00	309.665.374,00	(11.557.412,00)	96,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0028	5.1	BELANJA OPERASI	321.222.786,00	309.665.374,00	(11.557.412,00)	96,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.222.786,00	309.665.374,00	(11.557.412,00)	96,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0030		RESPON CEPAT PENANGANAN DARURAT BENCANA	225.454.182,00	224.745.702,00	(708.480,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0030	5.1	BELANJA OPERASI	225.454.182,00	224.745.702,00	(708.480,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.454.182,00	224.745.702,00	(708.480,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0031		AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	13.476.100,60	13.399.983,00	(76.117,60)	99,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0031	5.1	BELANJA OPERASI	6.422.000,00	6.406.983,00	(15.017,00)	99,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.422.000,00	6.406.983,00	(15.017,00)	99,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0031	5.2	BELANJA MODAL	7.054.100,60	6.993.000,00	(61.100,60)	99,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0031	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.054.100,60	6.993.000,00	(61.100,60)	99,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	235.056.786,00	205.558.598,00	(29.498.188,00)	87,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007		PENANGANAN PASCA BENCANA PROVINSI	211.015.742,00	191.743.298,00	(19.272.444,00)	90,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	211.015.742,00	191.743.298,00	(19.272.444,00)	90,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.015.742,00	191.743.298,00	(19.272.444,00)	90,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0009		KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA PROVINSI	24.041.044,00	13.815.300,00	(10.225.744,00)	57,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.041.044,00	13.815.300,00	(10.225.744,00)	57,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.041.044,00	13.815.300,00	(10.225.744,00)	57,46	
				JUMLAH BELANJA	9.208.666.358,00	8.962.203.403,00	(246.462.955,00)	97,32	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.208.666.358,00)	(8.962.203.403,00)	246.462.955,00	97,32	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.208.666.358,00)	(8.962.203.403,00)	246.462.955,00	97,32	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	25.677.685.026,00	24.832.206.577,00	(845.478.449,00)	96,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.053.041.332,00	22.600.977.851,00	(452.063.481,00)	98,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	123.009.443,00	111.564.540,00	(11.444.903,00)	90,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	84.234.600,00	81.837.112,00	(2.397.488,00)	97,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.234.600,00	81.837.112,00	(2.397.488,00)	97,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.234.600,00	81.837.112,00	(2.397.488,00)	97,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	38.774.843,00	29.727.428,00	(9.047.415,00)	76,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	38.774.843,00	29.727.428,00	(9.047.415,00)	76,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.774.843,00	29.727.428,00	(9.047.415,00)	76,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	17.203.638.135,00	16.970.751.596,00	(232.886.539,00)	98,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	16.767.601.135,00	16.545.804.796,00	(221.796.339,00)	98,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.767.601.135,00	16.545.804.796,00	(221.796.339,00)	98,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	16.767.601.135,00	16.545.804.796,00	(221.796.339,00)	98,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	409.752.000,00	399.148.000,00	(10.604.000,00)	97,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	409.752.000,00	399.148.000,00	(10.604.000,00)	97,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.752.000,00	399.148.000,00	(10.604.000,00)	97,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	12.884.500,00	12.572.200,00	(312.300,00)	97,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.884.500,00	12.572.200,00	(312.300,00)	97,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.884.500,00	12.572.200,00	(312.300,00)	97,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	13.400.500,00	13.226.600,00	(173.900,00)	98,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.400.500,00	13.226.600,00	(173.900,00)	98,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.400.500,00	13.226.600,00	(173.900,00)	98,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	9.464.000,00	7.864.518,00	(1.599.482,00)	83,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	9.464.000,00	7.864.518,00	(1.599.482,00)	83,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.464.000,00	7.864.518,00	(1.599.482,00)	83,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.464.000,00	7.864.518,00	(1.599.482,00)	83,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	580.844.000,00	580.844.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	580.844.000,00	580.844.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	580.844.000,00	580.844.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.844.000,00	580.844.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	447.437.475,00	409.098.713,00	(38.338.762,00)	91,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.962.700,00	8.858.910,00	(103.790,00)	98,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.962.700,00	8.858.910,00	(103.790,00)	98,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.962.700,00	8.858.910,00	(103.790,00)	98,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	32.677.000,00	6.551.000,00	(26.126.000,00)	20,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.056.600,00	6.551.000,00	(505.600,00)	92,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.056.600,00	6.551.000,00	(505.600,00)	92,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	25.620.400,00	0,00	(25.620.400,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.620.400,00	0,00	(25.620.400,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.118.100,00	4.118.100,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	4.118.100,00	4.118.100,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.118.100,00	4.118.100,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	23.565.935,00	21.524.565,00	(2.041.370,00)	91,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	23.565.935,00	21.524.565,00	(2.041.370,00)	91,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.565.935,00	21.524.565,00	(2.041.370,00)	91,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.056.261,00	21.303.261,00	(753.000,00)	96,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.056.261,00	21.303.261,00	(753.000,00)	96,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.056.261,00	21.303.261,00	(753.000,00)	96,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	349.852.579,00	340.537.977,00	(9.314.602,00)	97,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	349.852.579,00	340.537.977,00	(9.314.602,00)	97,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.852.579,00	340.537.977,00	(9.314.602,00)	97,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	6.204.900,00	6.204.900,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.204.900,00	6.204.900,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.204.900,00	6.204.900,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	386.225.000,00	386.225.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	241.025.000,00	241.025.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	103.125.000,00	103.125.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.125.000,00	103.125.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	137.900.000,00	137.900.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.900.000,00	137.900.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.228.244.091,00	3.174.290.342,00	(53.953.749,00)	98,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	160.000.000,00	146.950.000,00	(13.050.000,00)	91,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	146.950.000,00	(13.050.000,00)	91,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	146.950.000,00	(13.050.000,00)	91,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	32.593.000,00	30.140.500,00	(2.452.500,00)	92,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.593.000,00	30.140.500,00	(2.452.500,00)	92,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.593.000,00	30.140.500,00	(2.452.500,00)	92,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.035.651.091,00	2.997.199.842,00	(38.451.249,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.035.651.091,00	2.997.199.842,00	(38.451.249,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.035.651.091,00	2.997.199.842,00	(38.451.249,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.074.179.188,00	960.339.142,00	(113.840.046,00)	89,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	63.325.000,00	61.918.050,00	(1.406.950,00)	97,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.325.000,00	61.918.050,00	(1.406.950,00)	97,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.325.000,00	61.918.050,00	(1.406.950,00)	97,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	302.489.093,00	298.119.767,00	(4.369.326,00)	98,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	302.489.093,00	298.119.767,00	(4.369.326,00)	98,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.489.093,00	298.119.767,00	(4.369.326,00)	98,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	31.914.395,00	30.136.035,00	(1.778.360,00)	94,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.914.395,00	30.136.035,00	(1.778.360,00)	94,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.914.395,00	30.136.035,00	(1.778.360,00)	94,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	676.450.700,00	570.165.290,00	(106.285.410,00)	84,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	676.450.700,00	570.165.290,00	(106.285.410,00)	84,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.450.700,00	570.165.290,00	(106.285.410,00)	84,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.525.214.394,00	2.132.456.256,00	(392.758.138,00)	84,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.335.954.394,00	1.981.028.056,00	(354.926.338,00)	84,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0006		KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN	42.807.000,00	30.809.120,00	(11.997.880,00)	71,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	42.807.000,00	30.809.120,00	(11.997.880,00)	71,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.807.000,00	30.809.120,00	(11.997.880,00)	71,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0008		PENYUSUNAN SOP KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	139.737.104,00	117.028.180,00	(22.708.924,00)	83,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	139.737.104,00	117.028.180,00	(22.708.924,00)	83,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.737.104,00	117.028.180,00	(22.708.924,00)	83,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0010		PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	158.409.115,00	155.060.784,00	(3.348.331,00)	97,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	158.409.115,00	155.060.784,00	(3.348.331,00)	97,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.409.115,00	155.060.784,00	(3.348.331,00)	97,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0014		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI	1.253.808.075,00	1.000.268.537,00	(253.539.538,00)	79,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.253.808.075,00	1.000.268.537,00	(253.539.538,00)	79,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.253.808.075,00	1.000.268.537,00	(253.539.538,00)	79,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0015		PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0017		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN ,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	683.025.500,00	636.806.440,00	(46.219.060,00)	93,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	683.025.500,00	636.806.440,00	(46.219.060,00)	93,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	683.025.500,00	636.806.440,00	(46.219.060,00)	93,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0018		PENINGKATAN KAPASITA SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA MELALUI PELATIHAN TEKNIS TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA	54.667.600,00	41.054.995,00	(13.612.605,00)	75,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	54.667.600,00	41.054.995,00	(13.612.605,00)	75,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.667.600,00	41.054.995,00	(13.612.605,00)	75,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	189.260.000,00	151.428.200,00	(37.831.800,00)	80,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0001		SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	109.150.230,00	105.706.300,00	(3.443.930,00)	96,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	109.150.230,00	105.706.300,00	(3.443.930,00)	96,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.150.230,00	105.706.300,00	(3.443.930,00)	96,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0002		PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	80.109.770,00	45.721.900,00	(34.387.870,00)	57,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.109.770,00	45.721.900,00	(34.387.870,00)	57,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.109.770,00	45.721.900,00	(34.387.870,00)	57,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	99.429.300,00	98.772.470,00	(656.830,00)	99,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01		PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	99.429.300,00	98.772.470,00	(656.830,00)	99,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0023		PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	99.429.300,00	98.772.470,00	(656.830,00)	99,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	16.622.100,00	16.157.570,00	(464.530,00)	97,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.622.100,00	16.157.570,00	(464.530,00)	97,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	82.807.200,00	82.614.900,00	(192.300,00)	99,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.807.200,00	82.614.900,00	(192.300,00)	99,76	
				JUMLAH BELANJA	25.677.685.026,00	24.832.206.577,00	(845.478.449,00)	96,70	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(25.677.685.026,00)	(24.832.206.577,00)	845.478.449,00	96,70	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.677.685.026,00)	(24.832.206.577,00)	845.478.449,00	96,70	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	22.713.060.507,00	20.612.046.900,00	(2.101.013.607,00)	90,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.239.229.566,00	12.668.221.788,00	(571.007.778,00)	95,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	337.047.521,79	327.456.637,00	(9.590.884,79)	97,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.559.318,00	9.906.728,00	(1.652.590,00)	85,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.559.318,00	9.906.728,00	(1.652.590,00)	85,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.559.318,00	9.906.728,00	(1.652.590,00)	85,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	42.880.976,00	40.439.276,00	(2.441.700,00)	94,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.880.976,00	40.439.276,00	(2.441.700,00)	94,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.880.976,00	40.439.276,00	(2.441.700,00)	94,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	77.793.014,00	75.061.179,00	(2.731.835,00)	96,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	77.793.014,00	75.061.179,00	(2.731.835,00)	96,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.793.014,00	75.061.179,00	(2.731.835,00)	96,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	204.814.213,79	202.049.454,00	(2.764.759,79)	98,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	204.814.213,79	202.049.454,00	(2.764.759,79)	98,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.814.213,79	202.049.454,00	(2.764.759,79)	98,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.868.509.432,00	10.376.451.029,00	(492.058.403,00)	95,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.378.841.432,00	9.894.737.749,00	(484.103.683,00)	95,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.378.841.432,00	9.894.737.749,00	(484.103.683,00)	95,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.377.665.432,00	9.893.796.469,00	(483.868.963,00)	95,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.176.000,00	941.280,00	(234.720,00)	80,04	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	489.668.000,00	481.713.280,00	(7.954.720,00)	98,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	489.668.000,00	481.713.280,00	(7.954.720,00)	98,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.668.000,00	481.713.280,00	(7.954.720,00)	98,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	33.187.451,00	32.756.607,00	(430.844,00)	98,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	33.187.451,00	32.756.607,00	(430.844,00)	98,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.187.451,00	32.756.607,00	(430.844,00)	98,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.187.451,00	32.756.607,00	(430.844,00)	98,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.588.000,00	22.945.000,00	(1.643.000,00)	93,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	24.588.000,00	22.945.000,00	(1.643.000,00)	93,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.588.000,00	22.945.000,00	(1.643.000,00)	93,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.588.000,00	22.945.000,00	(1.643.000,00)	93,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	732.135.859,00	717.039.495,00	(15.096.364,00)	97,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.559.226,00	14.800.851,00	(758.375,00)	95,12	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.559.226,00	14.800.851,00	(758.375,00)	95,12	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.559.226,00	14.800.851,00	(758.375,00)	95,12	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	34.939.743,00	34.110.300,00	(829.443,00)	97,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.939.743,00	34.110.300,00	(829.443,00)	97,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.939.743,00	34.110.300,00	(829.443,00)	97,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	59.476.492,00	51.643.547,00	(7.832.945,00)	86,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	59.476.492,00	51.643.547,00	(7.832.945,00)	86,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.476.492,00	51.643.547,00	(7.832.945,00)	86,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	47.058.098,00	44.959.498,00	(2.098.600,00)	95,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.058.098,00	44.959.498,00	(2.098.600,00)	95,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.058.098,00	44.959.498,00	(2.098.600,00)	95,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	7.822.500,00	4.830.000,00	(2.992.500,00)	61,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.822.500,00	4.830.000,00	(2.992.500,00)	61,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.822.500,00	4.830.000,00	(2.992.500,00)	61,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	567.279.800,00	566.695.299,00	(584.501,00)	99,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	567.279.800,00	566.695.299,00	(584.501,00)	99,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.279.800,00	566.695.299,00	(584.501,00)	99,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	417.153.607,21	399.489.570,00	(17.664.037,21)	95,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	329.112.915,00	316.140.000,00	(12.972.915,00)	96,05	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	79.112.915,00	78.600.000,00	(512.915,00)	99,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.112.915,00	78.600.000,00	(512.915,00)	99,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	250.000.000,00	237.540.000,00	(12.460.000,00)	95,01	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000.000,00	237.540.000,00	(12.460.000,00)	95,01	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	8.919.522,21	8.624.370,00	(295.152,21)	96,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	117.000,21	0,00	(117.000,21)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.000,21	0,00	(117.000,21)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	8.802.522,00	8.624.370,00	(178.152,00)	97,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.802.522,00	8.624.370,00	(178.152,00)	97,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	79.121.170,00	74.725.200,00	(4.395.970,00)	94,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	152.850,00	0,00	(152.850,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.850,00	0,00	(152.850,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	78.968.320,00	74.725.200,00	(4.243.120,00)	94,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.968.320,00	74.725.200,00	(4.243.120,00)	94,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	559.981.769,00	546.880.781,00	(13.100.988,00)	97,66	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	53.141.170,00	52.830.000,00	(311.170,00)	99,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.141.170,00	52.830.000,00	(311.170,00)	99,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.141.170,00	52.830.000,00	(311.170,00)	99,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	85.588.360,00	79.389.430,00	(6.198.930,00)	92,75	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.588.360,00	79.389.430,00	(6.198.930,00)	92,75	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.588.360,00	79.389.430,00	(6.198.930,00)	92,75	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	421.252.239,00	414.661.351,00	(6.590.888,00)	98,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	421.252.239,00	414.661.351,00	(6.590.888,00)	98,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.252.239,00	414.661.351,00	(6.590.888,00)	98,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	266.625.926,00	245.202.669,00	(21.423.257,00)	91,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	188.152.346,00	173.933.454,00	(14.218.892,00)	92,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	188.152.346,00	173.933.454,00	(14.218.892,00)	92,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.152.346,00	173.933.454,00	(14.218.892,00)	92,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	37.801.280,00	32.098.980,00	(5.702.300,00)	84,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.801.280,00	32.098.980,00	(5.702.300,00)	84,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.801.280,00	32.098.980,00	(5.702.300,00)	84,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	40.672.300,00	39.170.235,00	(1.502.065,00)	96,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.672.300,00	39.170.235,00	(1.502.065,00)	96,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.672.300,00	39.170.235,00	(1.502.065,00)	96,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	600.895.841,00	596.713.086,00	(4.182.755,00)	99,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.01		PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	8.527.300,00	8.000.892,00	(526.408,00)	93,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	8.527.300,00	8.000.892,00	(526.408,00)	93,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.527.300,00	8.000.892,00	(526.408,00)	93,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.527.300,00	8.000.892,00	(526.408,00)	93,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02		PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI	592.368.541,00	588.712.194,00	(3.656.347,00)	99,38	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN PROVINSI	81.730.881,00	78.926.082,00	(2.804.799,00)	96,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.730.881,00	78.926.082,00	(2.804.799,00)	96,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.730.881,00	78.926.082,00	(2.804.799,00)	96,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI	510.637.660,00	509.786.112,00	(851.548,00)	99,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	510.637.660,00	509.786.112,00	(851.548,00)	99,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.637.660,00	54.786.112,00	(851.548,00)	98,46	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.374.083.895,00	2.110.879.453,00	(263.204.442,00)	88,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	700.969.508,00	641.204.128,00	(59.765.380,00)	91,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	294.483.373,00	266.383.640,00	(28.099.733,00)	90,45	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	294.483.373,00	266.383.640,00	(28.099.733,00)	90,45	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.483.373,00	266.383.640,00	(28.099.733,00)	90,45	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	21.957.909,00	18.096.028,00	(3.861.881,00)	82,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.957.909,00	18.096.028,00	(3.861.881,00)	82,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.957.909,00	18.096.028,00	(3.861.881,00)	82,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0003		PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES	31.481.451,00	26.979.156,00	(4.502.295,00)	85,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.481.451,00	26.979.156,00	(4.502.295,00)	85,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.481.451,00	26.979.156,00	(4.502.295,00)	85,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0004		PENYEDIAAN ALAT BANTU	155.366.000,00	139.700.004,00	(15.665.996,00)	89,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	155.366.000,00	139.700.004,00	(15.665.996,00)	89,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.366.000,00	139.700.004,00	(15.665.996,00)	89,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0005		PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI	7.807.962,00	5.408.000,00	(2.399.962,00)	69,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.807.962,00	5.408.000,00	(2.399.962,00)	69,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.807.962,00	5.408.000,00	(2.399.962,00)	69,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	177.721.380,00	175.028.200,00	(2.693.180,00)	98,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	177.721.380,00	175.028.200,00	(2.693.180,00)	98,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.721.380,00	175.028.200,00	(2.693.180,00)	98,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0012		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR	12.151.433,00	9.609.100,00	(2.542.333,00)	79,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	12.151.433,00	9.609.100,00	(2.542.333,00)	79,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.151.433,00	9.609.100,00	(2.542.333,00)	79,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02		REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	858.193.670,00	825.719.512,00	(32.474.158,00)	96,21	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0001		PENGASUHAN	4.001.645,00	3.672.675,00	(328.970,00)	91,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.001.645,00	3.672.675,00	(328.970,00)	91,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.001.645,00	3.672.675,00	(328.970,00)	91,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0002		PENYEDIAAN MAKANAN	131.210.287,00	124.838.260,00	(6.372.027,00)	95,14	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.210.287,00	124.838.260,00	(6.372.027,00)	95,14	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.210.287,00	124.838.260,00	(6.372.027,00)	95,14	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0003		PENYEDIAAN SANDANG	283.534.000,00	277.008.014,00	(6.525.986,00)	97,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	283.534.000,00	277.008.014,00	(6.525.986,00)	97,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.534.000,00	277.008.014,00	(6.525.986,00)	97,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0004		PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES	287.431.045,00	279.468.546,00	(7.962.499,00)	97,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	287.431.045,00	279.468.546,00	(7.962.499,00)	97,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.431.045,00	279.468.546,00	(7.962.499,00)	97,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0005		PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI	26.580.597,00	23.165.700,00	(3.414.897,00)	87,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.580.597,00	23.165.700,00	(3.414.897,00)	87,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.580.597,00	23.165.700,00	(3.414.897,00)	87,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	110.999.111,00	103.695.517,00	(7.303.594,00)	93,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	110.999.111,00	103.695.517,00	(7.303.594,00)	93,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.999.111,00	103.695.517,00	(7.303.594,00)	93,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0013		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	14.436.985,00	13.870.800,00	(566.185,00)	96,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	14.436.985,00	13.870.800,00	(566.185,00)	96,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.436.985,00	13.870.800,00	(566.185,00)	96,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03		REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI	220.338.884,00	214.770.233,00	(5.568.651,00)	97,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	47.956.100,00	46.229.115,00	(1.726.985,00)	96,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.956.100,00	46.229.115,00	(1.726.985,00)	96,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.956.100,00	46.229.115,00	(1.726.985,00)	96,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0002		PENYEDIAAN SANDANG	34.653.000,00	33.873.331,00	(779.669,00)	97,75	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.653.000,00	33.873.331,00	(779.669,00)	97,75	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.653.000,00	33.873.331,00	(779.669,00)	97,75	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0004		PENYEDIAAN ALAT BANTU	31.000.000,00	30.736.248,00	(263.752,00)	99,14	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	30.736.248,00	(263.752,00)	99,14	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	30.736.248,00	(263.752,00)	99,14	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0005		PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI SOSIAL	26.834.796,00	25.483.412,00	(1.351.384,00)	94,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.834.796,00	25.483.412,00	(1.351.384,00)	94,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.834.796,00	25.483.412,00	(1.351.384,00)	94,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPRITUAL DAN SOSIAL	52.696.399,00	51.450.842,00	(1.245.557,00)	97,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	52.696.399,00	51.450.842,00	(1.245.557,00)	97,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.696.399,00	51.450.842,00	(1.245.557,00)	97,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0012		PEMULASARAAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0013		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERLANTAR DI DALAM PANTI	17.198.589,00	16.997.285,00	(201.304,00)	98,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	17.198.589,00	16.997.285,00	(201.304,00)	98,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.198.589,00	16.997.285,00	(201.304,00)	98,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04		REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	47.012.132,00	40.785.896,00	(6.226.236,00)	86,75	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	4.983.768,00	4.014.606,00	(969.162,00)	80,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.983.768,00	4.014.606,00	(969.162,00)	80,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.983.768,00	4.014.606,00	(969.162,00)	80,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0002		PENYEDIAAN SANDANG	4.591.883,00	3.077.364,00	(1.514.519,00)	67,01	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.591.883,00	3.077.364,00	(1.514.519,00)	67,01	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.591.883,00	3.077.364,00	(1.514.519,00)	67,01	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0004		PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI	963.036,00	887.112,00	(75.924,00)	92,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	963.036,00	887.112,00	(75.924,00)	92,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	963.036,00	887.112,00	(75.924,00)	92,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPRITUAL DAN SOSIAL	5.323.000,00	5.026.972,00	(296.028,00)	94,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.323.000,00	5.026.972,00	(296.028,00)	94,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.323.000,00	5.026.972,00	(296.028,00)	94,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0010		PEMULANGAN KE DAERAH ASAL	16.706.841,00	15.522.206,00	(1.184.635,00)	92,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	16.706.841,00	15.522.206,00	(1.184.635,00)	92,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.706.841,00	15.522.206,00	(1.184.635,00)	92,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0011		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERLANTAR DI DALAM PANTI	14.443.604,00	12.257.636,00	(2.185.968,00)	84,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0011	5.1	BELANJA OPERASI	14.443.604,00	12.257.636,00	(2.185.968,00)	84,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.443.604,00	12.257.636,00	(2.185.968,00)	84,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05		REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA DI LUAR HIV/AIDS DAN NAPZA DI DALAM PANTI	547.569.701,00	388.399.684,00	(159.170.017,00)	70,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPRITUAL DAN SOSIAL	531.807.259,00	374.262.800,00	(157.544.459,00)	70,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	531.807.259,00	374.262.800,00	(157.544.459,00)	70,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.807.259,00	374.262.800,00	(157.544.459,00)	70,37	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0011		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA DI LUAR HIV/AIDS DAN NAPZA	15.762.442,00	14.136.884,00	(1.625.558,00)	89,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	15.762.442,00	14.136.884,00	(1.625.558,00)	89,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.762.442,00	14.136.884,00	(1.625.558,00)	89,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.757.605.625,00	3.529.964.795,00	(227.640.830,00)	93,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI	3.757.605.625,00	3.529.964.795,00	(227.640.830,00)	93,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0001		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.902.342.830,00	1.748.337.215,00	(154.005.615,00)	91,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.902.342.830,00	1.748.337.215,00	(154.005.615,00)	91,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.902.342.830,00	1.748.337.215,00	(154.005.615,00)	91,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002		PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	620.554.490,00	564.563.126,00	(55.991.364,00)	90,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	620.554.490,00	564.563.126,00	(55.991.364,00)	90,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.554.490,00	564.563.126,00	(55.991.364,00)	90,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0003		FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	1.234.708.305,00	1.217.064.454,00	(17.643.851,00)	98,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.234.708.305,00	1.217.064.454,00	(17.643.851,00)	98,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.708.305,00	219.564.454,00	(12.143.851,00)	94,75	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.003.000.000,00	997.500.000,00	(5.500.000,00)	99,45	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.191.863.580,00	1.168.939.253,00	(1.022.924.327,00)	53,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI	2.191.863.580,00	1.168.939.253,00	(1.022.924.327,00)	53,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	2.015.518.059,00	994.184.535,00	(1.021.333.524,00)	49,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.015.518.059,00	994.184.535,00	(1.021.333.524,00)	49,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.073.059,00	156.744.535,00	(5.328.524,00)	96,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.853.445.000,00	837.440.000,00	(1.016.005.000,00)	45,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	39.754.427,00	38.605.850,00	(1.148.577,00)	97,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.754.427,00	38.605.850,00	(1.148.577,00)	97,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.754.427,00	38.605.850,00	(1.148.577,00)	97,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0004		PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	24.002.119,00	23.569.168,00	(432.951,00)	98,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.002.119,00	23.569.168,00	(432.951,00)	98,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.002.119,00	23.569.168,00	(432.951,00)	98,19	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0005		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	112.588.975,00	112.579.700,00	(9.275,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	112.588.975,00	112.579.700,00	(9.275,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.588.975,00	112.579.700,00	(9.275,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	549.382.000,00	537.328.525,00	(12.053.475,00)	97,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07.1.01		PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI	549.382.000,00	537.328.525,00	(12.053.475,00)	97,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07.1.01.0002		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI	549.382.000,00	537.328.525,00	(12.053.475,00)	97,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	549.382.000,00	537.328.525,00	(12.053.475,00)	97,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.382.000,00	537.328.525,00	(12.053.475,00)	97,80	
				JUMLAH BELANJA	22.713.060.507,00	20.612.046.900,00	(2.101.013.607,00)	90,74	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(22.713.060.507,00)	(20.612.046.900,00)	2.101.013.607,00	90,74	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(22.713.060.507,00)	(20.612.046.900,00)	2.101.013.607,00	90,74	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.07.3.32.0.00.07.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,42	
	2.07.3.32.0.00.07.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,42	
	2.07.3.32.0.00.07.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,42	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,42	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	37.958.769.556,00	36.165.860.057,26	(1.792.909.498,74)	95,27	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.461.805.774,00	28.211.432.436,26	(1.250.373.337,74)	95,75	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	41.907.510,00	24.872.335,00	(17.035.175,00)	59,35	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.162.000,00	2.288.455,00	(4.873.545,00)	31,95	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.162.000,00	2.288.455,00	(4.873.545,00)	31,95	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.162.000,00	2.288.455,00	(4.873.545,00)	31,95	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	13.941.200,00	4.156.839,00	(9.784.361,00)	29,81	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.941.200,00	4.156.839,00	(9.784.361,00)	29,81	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.941.200,00	4.156.839,00	(9.784.361,00)	29,81	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.804.310,00	18.427.041,00	(2.377.269,00)	88,57	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.804.310,00	18.427.041,00	(2.377.269,00)	88,57	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.804.310,00	18.427.041,00	(2.377.269,00)	88,57	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	26.251.820.342,00	25.551.271.534,00	(700.548.808,00)	97,33	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	25.696.580.342,00	25.019.956.534,00	(676.623.808,00)	97,36	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.696.580.342,00	25.019.956.534,00	(676.623.808,00)	97,36	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	25.696.580.342,00	25.019.956.534,00	(676.623.808,00)	97,36	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	555.240.000,00	531.315.000,00	(23.925.000,00)	95,69	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	555.240.000,00	531.315.000,00	(23.925.000,00)	95,69	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.240.000,00	531.315.000,00	(23.925.000,00)	95,69	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	46.740.000,00	45.940.000,00	(800.000,00)	98,28	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	44.240.000,00	44.240.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.240.000,00	44.240.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.240.000,00	44.240.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	2.500.000,00	1.700.000,00	(800.000,00)	68,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.700.000,00	(800.000,00)	68,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.700.000,00	(800.000,00)	68,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	605.948.590,00	497.396.947,00	(108.551.643,00)	82,08	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.431.000,00	9.718.510,00	(712.490,00)	93,16	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.431.000,00	9.718.510,00	(712.490,00)	93,16	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.431.000,00	9.718.510,00	(712.490,00)	93,16	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	140.122.200,00	123.989.000,00	(16.133.200,00)	88,48	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.426.200,00	14.944.000,00	(482.200,00)	96,87	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.426.200,00	14.944.000,00	(482.200,00)	96,87	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	124.696.000,00	109.045.000,00	(15.651.000,00)	87,44	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.696.000,00	109.045.000,00	(15.651.000,00)	87,44	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	54.743.000,00	17.798.755,00	(36.944.245,00)	32,51	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.255.200,00	8.763.855,00	(1.491.345,00)	85,45	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.255.200,00	8.763.855,00	(1.491.345,00)	85,45	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	44.487.800,00	9.034.900,00	(35.452.900,00)	20,30	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.487.800,00	9.034.900,00	(35.452.900,00)	20,30	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	114.253.994,00	111.304.521,00	(2.949.473,00)	97,41	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	114.253.994,00	111.304.521,00	(2.949.473,00)	97,41	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.253.994,00	111.304.521,00	(2.949.473,00)	97,41	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	29.845.600,00	28.808.622,00	(1.036.978,00)	96,52	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.845.600,00	28.808.622,00	(1.036.978,00)	96,52	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.845.600,00	28.808.622,00	(1.036.978,00)	96,52	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.120.000,00	5.760.000,00	(360.000,00)	94,11	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.120.000,00	5.760.000,00	(360.000,00)	94,11	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	5.760.000,00	(360.000,00)	94,11	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	250.432.796,00	200.017.539,00	(50.415.257,00)	79,86	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	250.432.796,00	200.017.539,00	(50.415.257,00)	79,86	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.432.796,00	200.017.539,00	(50.415.257,00)	79,86	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	662.908.800,00	544.256.551,00	(118.652.249,00)	82,10	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	87.635.000,00	87.635.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	87.635.000,00	87.635.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.635.000,00	87.635.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	494.094.800,00	375.442.551,00	(118.652.249,00)	75,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	494.094.800,00	375.442.551,00	(118.652.249,00)	75,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.094.800,00	375.442.551,00	(118.652.249,00)	75,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	81.179.000,00	81.179.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	81.179.000,00	81.179.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.179.000,00	81.179.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.129.899.031,00	1.036.833.294,00	(93.065.737,00)	91,76	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	428.554.657,00	370.805.271,00	(57.749.386,00)	86,52	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	428.554.657,00	370.805.271,00	(57.749.386,00)	86,52	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.554.657,00	370.805.271,00	(57.749.386,00)	86,52	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	39.520.000,00	37.335.000,00	(2.185.000,00)	94,47	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.520.000,00	37.335.000,00	(2.185.000,00)	94,47	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.520.000,00	37.335.000,00	(2.185.000,00)	94,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	661.824.374,00	628.693.023,00	(33.131.351,00)	94,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	661.824.374,00	628.693.023,00	(33.131.351,00)	94,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	661.824.374,00	628.693.023,00	(33.131.351,00)	94,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	722.581.501,00	510.861.775,26	(211.719.725,74)	70,69	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	156.573.501,00	147.776.094,00	(8.797.407,00)	94,38	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	156.573.501,00	147.776.094,00	(8.797.407,00)	94,38	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.573.501,00	147.776.094,00	(8.797.407,00)	94,38	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.160.000,00	16.006.200,00	(1.153.800,00)	93,27	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.160.000,00	16.006.200,00	(1.153.800,00)	93,27	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.160.000,00	16.006.200,00	(1.153.800,00)	93,27	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	548.848.000,00	347.079.481,26	(201.768.518,74)	63,23	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	548.848.000,00	347.079.481,26	(201.768.518,74)	63,23	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.848.000,00	347.079.481,26	(201.768.518,74)	63,23	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	8.252.000,00	1.419.005,00	(6.832.995,00)	17,19	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02.1.01		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	8.252.000,00	1.419.005,00	(6.832.995,00)	17,19	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02.1.01.0003		FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO	8.252.000,00	1.419.005,00	(6.832.995,00)	17,19	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.252.000,00	1.419.005,00	(6.832.995,00)	17,19	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.252.000,00	1.419.005,00	(6.832.995,00)	17,19	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.386.480.453,00	6.997.858.597,00	(388.621.856,00)	94,73	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01		PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	7.364.430.453,00	6.977.600.197,00	(386.830.256,00)	94,74	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	(156.418.118,00)	97,40	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	(156.418.118,00)	97,40	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	(156.418.118,00)	97,40	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0002		KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA	20.000.000,00	19.688.000,00	(312.000,00)	98,44	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.688.000,00	(312.000,00)	98,44	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.688.000,00	(312.000,00)	98,44	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0003		PENGADAAN SARANA PELATIHAN KERJA	1.320.563.753,00	1.090.463.615,00	(230.100.138,00)	82,57	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	556.215.500,00	389.492.166,00	(166.723.334,00)	70,02	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.215.500,00	389.492.166,00	(166.723.334,00)	70,02	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	764.348.253,00	700.971.449,00	(63.376.804,00)	91,70	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	764.348.253,00	700.971.449,00	(63.376.804,00)	91,70	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.04		PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH PROVINSI	22.050.000,00	20.258.400,00	(1.791.600,00)	91,87	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.04.0001		PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	22.050.000,00	20.258.400,00	(1.791.600,00)	91,87	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.050.000,00	20.258.400,00	(1.791.600,00)	91,87	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	20.258.400,00	(1.791.600,00)	91,87	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	392.760.000,00	375.039.998,00	(17.720.002,00)	95,48	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	159.091.600,00	156.617.600,00	(2.474.000,00)	98,44	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02.0004		PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH PROVINSI	159.091.600,00	156.617.600,00	(2.474.000,00)	98,44	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	159.091.600,00	156.617.600,00	(2.474.000,00)	98,44	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.091.600,00	156.617.600,00	(2.474.000,00)	98,44	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03		PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP), UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK), DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA (UMSK)	233.668.400,00	218.422.398,00	(15.246.002,00)	93,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0001		PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)	85.622.400,00	77.627.000,00	(7.995.400,00)	90,66	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.622.400,00	77.627.000,00	(7.995.400,00)	90,66	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.622.400,00	77.627.000,00	(7.995.400,00)	90,66	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0003		PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)	148.046.000,00	140.795.398,00	(7.250.602,00)	95,10	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	148.046.000,00	140.795.398,00	(7.250.602,00)	95,10	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.046.000,00	140.795.398,00	(7.250.602,00)	95,10	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	709.471.329,00	580.110.021,00	(129.361.308,00)	81,76	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	709.471.329,00	580.110.021,00	(129.361.308,00)	81,76	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0001		PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA KERJA DI PERUSAHAAN	259.805.720,00	249.903.591,00	(9.902.129,00)	96,18	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	259.805.720,00	249.903.591,00	(9.902.129,00)	96,18	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.805.720,00	249.903.591,00	(9.902.129,00)	96,18	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0002		PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN	349.554.000,00	240.936.520,00	(108.617.480,00)	68,92	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	349.554.000,00	240.936.520,00	(108.617.480,00)	68,92	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.554.000,00	240.936.520,00	(108.617.480,00)	68,92	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0003		PELAYANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PERUSAHAAN	100.111.609,00	89.269.910,00	(10.841.699,00)	89,17	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.111.609,00	89.269.910,00	(10.841.699,00)	89,17	
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.111.609,00	89.269.910,00	(10.841.699,00)	89,17	
				JUMLAH BELANJA	37.958.769.556,00	36.165.860.057,26	(1.792.909.498,74)	95,27	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(36.758.769.556,00)	(34.744.727.057,26)	2.014.042.498,74	94,52	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(36.758.769.556,00)	(34.744.727.057,26)	2.014.042.498,74	94,52	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.07.3.32.0.00.07.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,42	
	2.07.3.32.0.00.07.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,42	
	2.07.3.32.0.00.07.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,42	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,42	
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,50	
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,50	
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.03.1.01		PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,50	
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.03.1.01.0018		MONITORING DAN EVALUASI KE LOKASI TRANSMIGRASI	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,50	
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.03.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,50	
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.03.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,50	
				JUMLAH BELANJA	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,50	
				SURPLUS / (DEFISIT)	1.149.453.120,00	1.370.834.860,00	221.381.740,00	119,25	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.149.453.120,00	1.370.834.860,00	221.381.740,00	119,25	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	21.900.477.218,00	20.199.282.663,00	(1.701.194.555,00)	92,23	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.811.114.981,00	12.396.265.517,00	(414.849.464,00)	96,76	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	198.892.900,00	152.398.626,00	(46.494.274,00)	76,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	133.199.200,00	104.420.525,00	(28.778.675,00)	78,39	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	133.199.200,00	104.420.525,00	(28.778.675,00)	78,39	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.199.200,00	104.420.525,00	(28.778.675,00)	78,39	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	29.426.100,00	28.865.101,00	(560.999,00)	98,09	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.426.100,00	28.865.101,00	(560.999,00)	98,09	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.426.100,00	28.865.101,00	(560.999,00)	98,09	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	36.267.600,00	19.113.000,00	(17.154.600,00)	52,69	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	36.267.600,00	19.113.000,00	(17.154.600,00)	52,69	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.267.600,00	19.113.000,00	(17.154.600,00)	52,69	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.066.736.185,00	9.799.613.340,00	(267.122.845,00)	97,34	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.655.029.885,00	9.394.909.840,00	(260.120.045,00)	97,30	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.655.029.885,00	9.394.909.840,00	(260.120.045,00)	97,30	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.655.029.885,00	9.394.909.840,00	(260.120.045,00)	97,30	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	408.302.000,00	401.396.500,00	(6.905.500,00)	98,30	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	408.302.000,00	401.396.500,00	(6.905.500,00)	98,30	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.302.000,00	401.396.500,00	(6.905.500,00)	98,30	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.404.300,00	3.307.000,00	(97.300,00)	97,14	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.404.300,00	3.307.000,00	(97.300,00)	97,14	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.404.300,00	3.307.000,00	(97.300,00)	97,14	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	753.777.882,00	708.131.396,00	(45.646.486,00)	93,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.766.200,00	10.296.595,00	(469.605,00)	95,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.766.200,00	10.296.595,00	(469.605,00)	95,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.766.200,00	10.296.595,00	(469.605,00)	95,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	111.337.000,00	102.627.600,00	(8.709.400,00)	92,17	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.768.200,00	5.540.400,00	(8.227.800,00)	40,24	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.768.200,00	5.540.400,00	(8.227.800,00)	40,24	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	97.568.800,00	97.087.200,00	(481.600,00)	99,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.568.800,00	97.087.200,00	(481.600,00)	99,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	42.821.892,00	41.908.467,00	(913.425,00)	97,86	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.133.892,00	18.598.467,00	(535.425,00)	97,20	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.133.892,00	18.598.467,00	(535.425,00)	97,20	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	23.688.000,00	23.310.000,00	(378.000,00)	98,40	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.688.000,00	23.310.000,00	(378.000,00)	98,40	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	39.924.900,00	39.635.099,00	(289.801,00)	99,27	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.924.900,00	39.635.099,00	(289.801,00)	99,27	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.924.900,00	39.635.099,00	(289.801,00)	99,27	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	334.495.600,00	332.798.019,00	(1.697.581,00)	99,49	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	334.495.600,00	332.798.019,00	(1.697.581,00)	99,49	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.495.600,00	332.798.019,00	(1.697.581,00)	99,49	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.770.000,00	14.664.000,00	(106.000,00)	99,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.770.000,00	14.664.000,00	(106.000,00)	99,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.770.000,00	14.664.000,00	(106.000,00)	99,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	199.662.290,00	166.201.616,00	(33.460.674,00)	83,24	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	199.662.290,00	166.201.616,00	(33.460.674,00)	83,24	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.662.290,00	166.201.616,00	(33.460.674,00)	83,24	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.395.526.215,00	1.360.304.563,00	(35.221.652,00)	97,47	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	207.567.635,00	199.288.483,00	(8.279.152,00)	96,01	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	207.567.635,00	199.288.483,00	(8.279.152,00)	96,01	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.567.635,00	199.288.483,00	(8.279.152,00)	96,01	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	42.000.000,00	38.479.000,00	(3.521.000,00)	91,61	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	38.479.000,00	(3.521.000,00)	91,61	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	38.479.000,00	(3.521.000,00)	91,61	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.145.958.580,00	1.122.537.080,00	(23.421.500,00)	97,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.145.958.580,00	1.122.537.080,00	(23.421.500,00)	97,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.145.958.580,00	1.122.537.080,00	(23.421.500,00)	97,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	396.181.799,00	375.817.592,00	(20.364.207,00)	94,85	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	209.681.200,00	199.436.372,00	(10.244.828,00)	95,11	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	209.681.200,00	199.436.372,00	(10.244.828,00)	95,11	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.681.200,00	199.436.372,00	(10.244.828,00)	95,11	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	126.490.599,00	116.723.160,00	(9.767.439,00)	92,27	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	126.490.599,00	116.723.160,00	(9.767.439,00)	92,27	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.490.599,00	116.723.160,00	(9.767.439,00)	92,27	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	60.010.000,00	59.658.060,00	(351.940,00)	99,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	60.010.000,00	59.658.060,00	(351.940,00)	99,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.010.000,00	59.658.060,00	(351.940,00)	99,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	865.726.115,00	719.459.695,00	(146.266.420,00)	83,10	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI	50.000.000,00	16.986.450,00	(33.013.550,00)	33,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0006		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN PROVINSI	50.000.000,00	16.986.450,00	(33.013.550,00)	33,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	16.986.450,00	(33.013.550,00)	33,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	16.986.450,00	(33.013.550,00)	33,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI	815.726.115,00	702.473.245,00	(113.252.870,00)	86,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0003		SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI KEWENANGAN PROVINSI	29.636.200,00	10.879.500,00	(18.756.700,00)	36,71	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.636.200,00	10.879.500,00	(18.756.700,00)	36,71	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.636.200,00	10.879.500,00	(18.756.700,00)	36,71	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0004		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI KEWENANGAN PROVINSI	786.089.915,00	691.593.745,00	(94.496.170,00)	87,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	786.089.915,00	691.593.745,00	(94.496.170,00)	87,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	786.089.915,00	691.593.745,00	(94.496.170,00)	87,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3.720.363.867,00	3.197.789.501,00	(522.574.366,00)	85,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	242.328.850,00	123.868.280,00	(118.460.570,00)	51,11	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	50.808.000,00	50.777.580,00	(30.420,00)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.808.000,00	50.777.580,00	(30.420,00)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.808.000,00	50.777.580,00	(30.420,00)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0002		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	191.520.850,00	73.090.700,00	(118.430.150,00)	38,16	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	191.520.850,00	73.090.700,00	(118.430.150,00)	38,16	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.520.850,00	73.090.700,00	(118.430.150,00)	38,16	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.939.320.638,00	2.554.529.261,00	(384.791.377,00)	86,90	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	140.361.200,00	138.776.600,00	(1.584.600,00)	98,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	140.361.200,00	138.776.600,00	(1.584.600,00)	98,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.361.200,00	138.776.600,00	(1.584.600,00)	98,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN PROVINSI	2.798.959.438,00	2.415.752.661,00	(383.206.777,00)	86,30	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	366.020.189,00	292.492.061,00	(73.528.128,00)	79,91	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.020.189,00	292.492.061,00	(73.528.128,00)	79,91	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.432.939.249,00	2.123.260.600,00	(309.678.649,00)	87,27	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.026.975,00	108.503.600,00	(523.375,00)	99,51	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.318.362.274,00	2.009.762.000,00	(308.600.274,00)	86,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.02.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.550.000,00	4.995.000,00	(555.000,00)	90,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	538.714.379,00	519.391.960,00	(19.322.419,00)	96,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN PROVINSI	469.694.379,00	452.413.560,00	(17.280.819,00)	96,32	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	469.694.379,00	452.413.560,00	(17.280.819,00)	96,32	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.694.379,00	452.413.560,00	(17.280.819,00)	96,32	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN PROVINSI	69.020.000,00	66.978.400,00	(2.041.600,00)	97,04	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.020.000,00	66.978.400,00	(2.041.600,00)	97,04	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	66.978.400,00	(2.041.600,00)	97,04	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.814.930.080,00	1.774.742.851,00	(40.187.229,00)	97,78	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.01		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	(19.843.338,00)	98,77	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.01.0003		PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN PROVINSI	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	(19.843.338,00)	98,77	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	(19.843.338,00)	98,77	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	(19.843.338,00)	98,77	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	200.000.000,00	179.656.109,00	(20.343.891,00)	89,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN PROVINSI	200.000.000,00	179.656.109,00	(20.343.891,00)	89,82	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	179.656.109,00	(20.343.891,00)	89,82	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	179.656.109,00	(20.343.891,00)	89,82	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	572.151.400,00	276.246.067,00	(295.905.333,00)	48,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI	50.000.000,00	18.416.449,00	(31.583.551,00)	36,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0003		ADVOKASI, SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI	50.000.000,00	18.416.449,00	(31.583.551,00)	36,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	18.416.449,00	(31.583.551,00)	36,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	18.416.449,00	(31.583.551,00)	36,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	522.151.400,00	257.829.618,00	(264.321.782,00)	49,37	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	247.118.800,00	171.340.040,00	(75.778.760,00)	69,33	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	247.118.800,00	171.340.040,00	(75.778.760,00)	69,33	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.118.800,00	171.340.040,00	(75.778.760,00)	69,33	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.02.0006		PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK	275.032.600,00	86.489.578,00	(188.543.022,00)	31,44	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	275.032.600,00	86.489.578,00	(188.543.022,00)	31,44	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.032.600,00	86.489.578,00	(188.543.022,00)	31,44	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.116.190.775,00	1.834.779.032,00	(281.411.743,00)	86,70	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.692.000,00	49.688.942,00	(1.003.058,00)	98,02	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	50.692.000,00	49.688.942,00	(1.003.058,00)	98,02	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.692.000,00	49.688.942,00	(1.003.058,00)	98,02	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.692.000,00	49.688.942,00	(1.003.058,00)	98,02	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.02		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	1.925.278.775,00	1.646.218.890,00	(279.059.885,00)	85,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.02.0007		KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK KEWENANGAN PROVINSI	1.925.278.775,00	1.646.218.890,00	(279.059.885,00)	85,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	237.587.942,00	232.010.400,00	(5.577.542,00)	97,65	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.587.942,00	232.010.400,00	(5.577.542,00)	97,65	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	1.687.690.833,00	1.414.208.490,00	(273.482.343,00)	83,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.800.000,00	93.811.490,00	(23.988.510,00)	79,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.02.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.569.890.833,00	1.320.397.000,00	(249.493.833,00)	84,10	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	140.220.000,00	138.871.200,00	(1.348.800,00)	99,03	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.03.0006		PENGEMBANGAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI) PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KEWENANGAN PROVINSI	140.220.000,00	138.871.200,00	(1.348.800,00)	99,03	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	140.220.000,00	138.871.200,00	(1.348.800,00)	99,03	
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.220.000,00	138.871.200,00	(1.348.800,00)	99,03	
				JUMLAH BELANJA	21.900.477.218,00	20.199.282.663,00	(1.701.194.555,00)	92,23	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(21.900.477.218,00)	(20.199.282.663,00)	1.701.194.555,00	92,23	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(21.900.477.218,00)	(20.199.282.663,00)	1.701.194.555,00	92,23	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	(93.264.364,00)	98,33	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.303.733.750,00	5.234.501.266,00	(69.232.484,00)	98,69	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.01		PENGEMBANGAN DESAIN PROGRAM, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB) SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	1.295.723.750,00	1.227.101.266,00	(68.622.484,00)	94,70	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.01.0001		PENGEMBANGAN STRATEGI OPERASIONAL ADVOKASI, PROMOSI SESUAI KEARIFAN LOKAL	1.295.723.750,00	1.227.101.266,00	(68.622.484,00)	94,70	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.295.723.750,00	1.227.101.266,00	(68.622.484,00)	94,70	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.295.723.750,00	1.227.101.266,00	(68.622.484,00)	94,70	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.02		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	(610.000,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.02.0004		PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN JEJARING KEMITRAAN DALAM PROGRAM BANGGA KENCANA	4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	(610.000,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	(610.000,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	(610.000,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	281.756.330,00	257.724.450,00	(24.031.880,00)	91,47	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01		PENGELOLAAN PELAKSANAAN DESAIN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	281.756.330,00	257.724.450,00	(24.031.880,00)	91,47	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0003		PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	200.000.000,00	182.382.860,00	(17.617.140,00)	91,19	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	182.382.860,00	(17.617.140,00)	91,19	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	182.382.860,00	(17.617.140,00)	91,19	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0017		PELAKSANAAN FASILITASI, PEMBIMBINGAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGUATAN PENYIAPAN PENGASUHAN 1000 HPK	81.756.330,00	75.341.590,00	(6.414.740,00)	92,15	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	81.756.330,00	75.341.590,00	(6.414.740,00)	92,15	
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.756.330,00	75.341.590,00	(6.414.740,00)	92,15	
				JUMLAH BELANJA	5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	(93.264.364,00)	98,33	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.585.490.080,00)	(5.492.225.716,00)	93.264.364,00	98,33	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.585.490.080,00)	(5.492.225.716,00)	93.264.364,00	98,33	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,25	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,25	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	131.350.000,00	245.715.440,00	114.365.440,00	187,06	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	250.393,00	250.393,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,25	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	26.263.998.288,02	24.752.290.564,00	(1.511.707.724,02)	94,24	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.058.753.882,29	23.029.783.635,00	(1.028.970.247,29)	95,72	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	208.308.698,29	181.557.577,00	(26.751.121,29)	87,15	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	118.085.400,29	115.668.337,00	(2.417.063,29)	97,95	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	118.085.400,29	115.668.337,00	(2.417.063,29)	97,95	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.085.400,29	115.668.337,00	(2.417.063,29)	97,95	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	90.223.298,00	65.889.240,00	(24.334.058,00)	73,02	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	90.223.298,00	65.889.240,00	(24.334.058,00)	73,02	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.223.298,00	65.889.240,00	(24.334.058,00)	73,02	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	19.835.015.111,74	19.386.070.450,00	(448.944.661,74)	97,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	19.161.593.111,74	18.727.684.450,00	(433.908.661,74)	97,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.161.593.111,74	18.727.684.450,00	(433.908.661,74)	97,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	19.161.593.111,74	18.727.684.450,00	(433.908.661,74)	97,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	673.422.000,00	658.386.000,00	(15.036.000,00)	97,76	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	673.422.000,00	658.386.000,00	(15.036.000,00)	97,76	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.422.000,00	658.386.000,00	(15.036.000,00)	97,76	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	851.137.522,00	768.048.671,00	(83.088.851,00)	90,23	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.829.800,00	8.678.580,00	(3.151.220,00)	73,36	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.829.800,00	8.678.580,00	(3.151.220,00)	73,36	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.829.800,00	8.678.580,00	(3.151.220,00)	73,36	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	84.300.000,00	84.300.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	84.300.000,00	84.300.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.300.000,00	84.300.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.335.776,00	5.191.800,00	(143.976,00)	97,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.335.776,00	5.191.800,00	(143.976,00)	97,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.335.776,00	5.191.800,00	(143.976,00)	97,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	100.185.890,00	87.329.010,00	(12.856.880,00)	87,16	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.185.890,00	87.329.010,00	(12.856.880,00)	87,16	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.185.890,00	87.329.010,00	(12.856.880,00)	87,16	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.121.100,00	7.981.150,00	(139.950,00)	98,27	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.121.100,00	7.981.150,00	(139.950,00)	98,27	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.121.100,00	7.981.150,00	(139.950,00)	98,27	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	57.398.340,00	57.369.100,00	(29.240,00)	99,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	57.398.340,00	57.369.100,00	(29.240,00)	99,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.398.340,00	57.369.100,00	(29.240,00)	99,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	52.505.736,00	17.782.000,00	(34.723.736,00)	33,86	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	52.505.736,00	17.782.000,00	(34.723.736,00)	33,86	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.505.736,00	17.782.000,00	(34.723.736,00)	33,86	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	529.500.880,00	497.457.031,00	(32.043.849,00)	93,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	529.500.880,00	497.457.031,00	(32.043.849,00)	93,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.500.880,00	497.457.031,00	(32.043.849,00)	93,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	745.349.103,65	545.174.581,00	(200.174.522,65)	73,14	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	511.900.000,00	511.900.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	511.900.000,00	511.900.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	511.900.000,00	511.900.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	69.231.270,65	12.167.820,00	(57.063.450,65)	17,57	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.488.840,65	2.843.820,00	(16.645.020,65)	14,59	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.488.840,65	2.843.820,00	(16.645.020,65)	14,59	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	49.742.430,00	9.324.000,00	(40.418.430,00)	18,74	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.742.430,00	9.324.000,00	(40.418.430,00)	18,74	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	164.217.833,00	21.106.761,00	(143.111.072,00)	12,85	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.676.293,00	0,00	(23.676.293,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.676.293,00	0,00	(23.676.293,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	140.541.540,00	21.106.761,00	(119.434.779,00)	15,01	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.541.540,00	21.106.761,00	(119.434.779,00)	15,01	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.359.175.828,61	1.304.383.016,00	(54.792.812,61)	95,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.805.500,00	8.000.000,00	(805.500,00)	90,85	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.805.500,00	8.000.000,00	(805.500,00)	90,85	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.805.500,00	8.000.000,00	(805.500,00)	90,85	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	311.257.820,00	289.515.201,00	(21.742.619,00)	93,01	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	311.257.820,00	289.515.201,00	(21.742.619,00)	93,01	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.257.820,00	289.515.201,00	(21.742.619,00)	93,01	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	66.117.400,00	54.390.000,00	(11.727.400,00)	82,26	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	66.117.400,00	54.390.000,00	(11.727.400,00)	82,26	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.117.400,00	54.390.000,00	(11.727.400,00)	82,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	972.995.108,61	952.477.815,00	(20.517.293,61)	97,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	972.995.108,61	952.477.815,00	(20.517.293,61)	97,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	972.995.108,61	952.477.815,00	(20.517.293,61)	97,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.059.767.618,00	844.549.340,00	(215.218.278,00)	79,69	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	561.797.250,00	460.151.429,00	(101.645.821,00)	81,90	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	561.797.250,00	460.151.429,00	(101.645.821,00)	81,90	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.797.250,00	460.151.429,00	(101.645.821,00)	81,90	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	104.533.000,00	91.086.374,00	(13.446.626,00)	87,13	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	104.533.000,00	91.086.374,00	(13.446.626,00)	87,13	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.533.000,00	91.086.374,00	(13.446.626,00)	87,13	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	393.437.368,00	293.311.537,00	(100.125.831,00)	74,55	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	393.437.368,00	293.311.537,00	(100.125.831,00)	74,55	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.437.368,00	293.311.537,00	(100.125.831,00)	74,55	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.309.110.070,73	1.185.245.185,00	(123.864.885,73)	90,53	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	872.711.800,73	753.278.556,00	(119.433.244,73)	86,31	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0002		PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	479.411.260,73	429.088.592,00	(50.322.668,73)	89,50	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	479.411.260,73	429.088.592,00	(50.322.668,73)	89,50	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.411.260,73	429.088.592,00	(50.322.668,73)	89,50	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0008		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS	588.600,00	588.600,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	588.600,00	588.600,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.600,00	588.600,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0009		STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN DI PROVINSI	370.829.282,00	305.135.984,00	(65.693.298,00)	82,28	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	323.929.282,00	260.069.984,00	(63.859.298,00)	80,28	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.929.282,00	260.069.984,00	(63.859.298,00)	80,28	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	46.900.000,00	45.066.000,00	(1.834.000,00)	96,08	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.900.000,00	45.066.000,00	(1.834.000,00)	96,08	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0013		PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)	21.882.658,00	18.465.380,00	(3.417.278,00)	84,38	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	21.882.658,00	18.465.380,00	(3.417.278,00)	84,38	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.882.658,00	18.465.380,00	(3.417.278,00)	84,38	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN PROVINSI	316.302.000,00	316.302.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0004		PEMELIHARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	26.124.000,00	26.124.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.124.000,00	26.124.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.124.000,00	26.124.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0007		PENGADAAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	290.178.000,00	290.178.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	290.178.000,00	290.178.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.178.000,00	290.178.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.04		PROMOSI PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI MELALUI MEDIA PROVINSI	120.096.270,00	115.664.629,00	(4.431.641,00)	96,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.04.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN ADVOKASI, EDUKASI, DAN SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)	120.096.270,00	115.664.629,00	(4.431.641,00)	96,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.096.270,00	115.664.629,00	(4.431.641,00)	96,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.096.270,00	115.664.629,00	(4.431.641,00)	96,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	409.553.435,00	123.415.685,00	(286.137.750,00)	30,13	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KEWENANGAN PROVINSI	17.312.665,00	8.053.925,00	(9.258.740,00)	46,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	17.312.665,00	8.053.925,00	(9.258.740,00)	46,52	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.312.665,00	8.053.925,00	(9.258.740,00)	46,52	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.312.665,00	8.053.925,00	(9.258.740,00)	46,52	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02		PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN PROVINSI	392.240.770,00	115.361.760,00	(276.879.010,00)	29,41	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02.0002		PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	392.240.770,00	115.361.760,00	(276.879.010,00)	29,41	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	392.240.770,00	115.361.760,00	(276.879.010,00)	29,41	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.240.770,00	115.361.760,00	(276.879.010,00)	29,41	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	486.580.900,00	413.846.059,00	(72.734.841,00)	85,05	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DISTRIBUSI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	486.580.900,00	413.846.059,00	(72.734.841,00)	85,05	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0006		SERTIFIKASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	76.580.900,00	61.491.410,00	(15.089.490,00)	80,29	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	76.580.900,00	61.491.410,00	(15.089.490,00)	80,29	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.580.900,00	61.491.410,00	(15.089.490,00)	80,29	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0009		PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	410.000.000,00	352.354.649,00	(57.645.351,00)	85,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	410.000.000,00	352.354.649,00	(57.645.351,00)	85,94	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.000.000,00	352.354.649,00	(57.645.351,00)	85,94	
				JUMLAH BELANJA	26.263.998.288,02	24.752.290.564,00	(1.511.707.724,02)	94,24	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(26.132.648.288,02)	(24.506.324.731,00)	1.626.323.557,02	93,77	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(26.132.648.288,02)	(24.506.324.731,00)	1.626.323.557,02	93,77	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,25	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,25	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	131.350.000,00	245.715.440,00	114.365.440,00	187,06	
	2.09.3.27.0.00.09.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	250.393,00	250.393,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,25	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	15.925.730.686,98	11.576.100.771,50	(4.349.629.915,48)	72,68	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.267.932.343,98	4.823.211.896,00	(444.720.447,98)	91,55	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.01		PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN	3.705.218.980,00	3.702.717.280,00	(2.501.700,00)	99,93	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.01.0001		PENGAWASAN SEBARAN PUPUK, PESTISIDA, ALSINTAN, DAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	3.705.218.980,00	3.702.717.280,00	(2.501.700,00)	99,93	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.705.218.980,00	3.702.717.280,00	(2.501.700,00)	99,93	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.705.218.980,00	3.702.717.280,00	(2.501.700,00)	99,93	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02		PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN	960.012.174,98	909.405.256,00	(50.606.918,98)	94,72	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0001		PENGELOLAAN PENERBITAN SERTIFIKAT BENIH	100.762.000,00	89.506.336,00	(11.255.664,00)	88,82	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.762.000,00	89.506.336,00	(11.255.664,00)	88,82	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.762.000,00	89.506.336,00	(11.255.664,00)	88,82	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0007		PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT HORTIKULTURA BERBENTUK BATANG	859.250.174,98	819.898.920,00	(39.351.254,98)	95,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	855.355.628,98	816.005.040,00	(39.350.588,98)	95,39	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	855.355.628,98	816.005.040,00	(39.350.588,98)	95,39	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	3.894.546,00	3.893.880,00	(666,00)	99,98	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.894.546,00	3.893.880,00	(666,00)	99,98	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.05		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	194.530.150,00	194.153.780,00	(376.370,00)	99,80	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.05.0005		PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HPT, BAHAN PAKAN, PAKAN	194.530.150,00	194.153.780,00	(376.370,00)	99,80	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	194.530.150,00	194.153.780,00	(376.370,00)	99,80	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.530.150,00	194.153.780,00	(376.370,00)	99,80	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.07		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH PROVINSI LAIN	408.171.039,00	16.935.580,00	(391.235.459,00)	4,14	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.07.0004		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH PROVINSI LAIN	408.171.039,00	16.935.580,00	(391.235.459,00)	4,14	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.07.0004	5.1	BELANJA OPERASI	408.171.039,00	16.935.580,00	(391.235.459,00)	4,14	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.07.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.171.039,00	16.935.580,00	(391.235.459,00)	4,14	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.961.668.173,00	4.369.268.152,50	(3.592.400.020,50)	54,87	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01		PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	7.961.668.173,00	4.369.268.152,50	(3.592.400.020,50)	54,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0001		PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN	61.312.000,00	0,00	(61.312.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.312.000,00	0,00	(61.312.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.312.000,00	0,00	(61.312.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0009		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENATAAN PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	411.518.825,00	411.518.824,50	(0,50)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	394.693.825,00	394.693.824,50	(0,50)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.693.825,00	394.693.824,50	(0,50)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0013		PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN PERTANIAN	7.488.837.348,00	3.957.749.328,00	(3.531.088.020,00)	52,84	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	7.488.837.348,00	3.957.749.328,00	(3.531.088.020,00)	52,84	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.488.837.348,00	3.957.749.328,00	(3.531.088.020,00)	52,84	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	418.871.943,00	192.269.775,00	(226.602.168,00)	45,90	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	4.919.200,00	4.919.200,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.01.0006		PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO ZOONOSIS	4.919.200,00	4.919.200,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.919.200,00	4.919.200,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.919.200,00	4.919.200,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.03		PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI ZONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN	299.694.799,00	142.680.631,00	(157.014.168,00)	47,60	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.03.0003		PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	299.694.799,00	142.680.631,00	(157.014.168,00)	47,60	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	299.694.799,00	142.680.631,00	(157.014.168,00)	47,60	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.694.799,00	142.680.631,00	(157.014.168,00)	47,60	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.05		KESEJAHTERAAN HEWAN	114.257.944,00	44.669.944,00	(69.588.000,00)	39,09	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.05.0003		PENGELOLAAN PENERBITAN SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)	114.257.944,00	44.669.944,00	(69.588.000,00)	39,09	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	114.257.944,00	44.669.944,00	(69.588.000,00)	39,09	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.257.944,00	44.669.944,00	(69.588.000,00)	39,09	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10.000.000,00	8.505.000,00	(1.495.000,00)	85,05	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.1.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI	10.000.000,00	8.505.000,00	(1.495.000,00)	85,05	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.1.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	10.000.000,00	8.505.000,00	(1.495.000,00)	85,05	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.505.000,00	(1.495.000,00)	85,05	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.505.000,00	(1.495.000,00)	85,05	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	(84.412.279,00)	96,27	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02		PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	(84.412.279,00)	96,27	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02.0002		PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	(84.412.279,00)	96,27	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	(84.412.279,00)	96,27	
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	(84.412.279,00)	96,27	
				JUMLAH BELANJA	15.925.730.686,98	11.576.100.771,50	(4.349.629.915,48)	72,68	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(15.794.380.686,98)	(11.330.134.938,50)	4.464.245.748,48	71,73	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.794.380.686,98)	(11.330.134.938,50)	4.464.245.748,48	71,73	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.3.28.0.00.10.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33	
	2.11.3.28.0.00.10.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33	
	2.11.3.28.0.00.10.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33	
				JUMLAH PENDAPATAN	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	35.294.444.739,00	33.388.547.528,00	(1.905.897.211,00)	94,60	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.424.708.056,00	31.764.763.051,00	(1.659.945.005,00)	95,03	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	244.514.054,00	224.726.086,00	(19.787.968,00)	91,90	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	102.480.854,00	87.679.630,00	(14.801.224,00)	85,55	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	102.480.854,00	87.679.630,00	(14.801.224,00)	85,55	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.480.854,00	87.679.630,00	(14.801.224,00)	85,55	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	142.033.200,00	137.046.456,00	(4.986.744,00)	96,48	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	142.033.200,00	137.046.456,00	(4.986.744,00)	96,48	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.033.200,00	137.046.456,00	(4.986.744,00)	96,48	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	29.684.648.735,00	28.868.708.555,00	(815.940.180,00)	97,25	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	29.161.296.735,00	28.352.080.555,00	(809.216.180,00)	97,22	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.161.296.735,00	28.352.080.555,00	(809.216.180,00)	97,22	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	29.161.296.735,00	28.352.080.555,00	(809.216.180,00)	97,22	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	523.352.000,00	516.628.000,00	(6.724.000,00)	98,71	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	523.352.000,00	516.628.000,00	(6.724.000,00)	98,71	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.352.000,00	516.628.000,00	(6.724.000,00)	98,71	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	563.166.255,00	526.260.758,00	(36.905.497,00)	93,44	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.337.200,00	5.583.650,00	(753.550,00)	88,10	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.337.200,00	5.583.650,00	(753.550,00)	88,10	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.337.200,00	5.583.650,00	(753.550,00)	88,10	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.924.000,00	1.970.600,00	(5.953.400,00)	24,86	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.924.000,00	1.970.600,00	(5.953.400,00)	24,86	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.924.000,00	1.970.600,00	(5.953.400,00)	24,86	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	143.658.600,00	132.232.760,00	(11.425.840,00)	92,04	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	143.658.600,00	132.232.760,00	(11.425.840,00)	92,04	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.658.600,00	132.232.760,00	(11.425.840,00)	92,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	61.935.441,00	59.530.169,00	(2.405.272,00)	96,11	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	61.935.441,00	59.530.169,00	(2.405.272,00)	96,11	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.935.441,00	59.530.169,00	(2.405.272,00)	96,11	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	106.573.600,00	106.236.000,00	(337.600,00)	99,68	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	106.573.600,00	106.236.000,00	(337.600,00)	99,68	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.573.600,00	106.236.000,00	(337.600,00)	99,68	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	23.689.400,00	20.426.620,00	(3.262.780,00)	86,22	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	23.689.400,00	20.426.620,00	(3.262.780,00)	86,22	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.689.400,00	20.426.620,00	(3.262.780,00)	86,22	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	197.048.014,00	184.296.959,00	(12.751.055,00)	93,52	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	197.048.014,00	184.296.959,00	(12.751.055,00)	93,52	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.048.014,00	184.296.959,00	(12.751.055,00)	93,52	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	16.000.000,00	15.984.000,00	(16.000,00)	99,90	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.984.000,00	(16.000,00)	99,90	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.984.000,00	(16.000,00)	99,90	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	973.609.980,00	347.595.112,00	(626.014.868,00)	35,70	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	621.432.900,00	0,00	(621.432.900,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.253.700,00	0,00	(40.253.700,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.253.700,00	0,00	(40.253.700,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	581.179.200,00	0,00	(581.179.200,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	581.179.200,00	0,00	(581.179.200,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	352.177.080,00	347.595.112,00	(4.581.968,00)	98,69	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.868.400,00	7.756.712,00	(111.688,00)	98,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.868.400,00	7.756.712,00	(111.688,00)	98,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	344.308.680,00	339.838.400,00	(4.470.280,00)	98,70	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344.308.680,00	339.838.400,00	(4.470.280,00)	98,70	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.327.279.032,00	1.221.754.465,00	(105.524.567,00)	92,04	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	149.156.454,00	126.669.217,00	(22.487.237,00)	84,92	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	149.156.454,00	126.669.217,00	(22.487.237,00)	84,92	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.156.454,00	126.669.217,00	(22.487.237,00)	84,92	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.076.122.578,00	993.085.248,00	(83.037.330,00)	92,28	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.076.122.578,00	993.085.248,00	(83.037.330,00)	92,28	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.076.122.578,00	993.085.248,00	(83.037.330,00)	92,28	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	631.490.000,00	575.718.075,00	(55.771.925,00)	91,16	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	278.337.000,00	277.644.418,00	(692.582,00)	99,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	278.337.000,00	277.644.418,00	(692.582,00)	99,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.337.000,00	277.644.418,00	(692.582,00)	99,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.080.000,00	18.695.000,00	(385.000,00)	97,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.080.000,00	18.695.000,00	(385.000,00)	97,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.080.000,00	18.695.000,00	(385.000,00)	97,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	334.073.000,00	279.378.657,00	(54.694.343,00)	83,62	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	334.073.000,00	279.378.657,00	(54.694.343,00)	83,62	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.073.000,00	279.378.657,00	(54.694.343,00)	83,62	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	212.761.498,00	202.033.517,00	(10.727.981,00)	94,95	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02.1.02		PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PROVINSI	212.761.498,00	202.033.517,00	(10.727.981,00)	94,95	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02.1.02.0002		PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD	212.761.498,00	202.033.517,00	(10.727.981,00)	94,95	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	212.761.498,00	202.033.517,00	(10.727.981,00)	94,95	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.761.498,00	202.033.517,00	(10.727.981,00)	94,95	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	376.608.737,00	152.492.320,00	(224.116.417,00)	40,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.03.1.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUGAN HIDUP	376.608.737,00	152.492.320,00	(224.116.417,00)	40,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.03.1.01.0015		PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	376.608.737,00	152.492.320,00	(224.116.417,00)	40,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.03.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	112.262.150,00	23.636.860,00	(88.625.290,00)	21,05	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.03.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.262.150,00	23.636.860,00	(88.625.290,00)	21,05	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.03.1.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	264.346.587,00	128.855.460,00	(135.491.127,00)	48,74	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.03.1.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.346.587,00	128.855.460,00	(135.491.127,00)	48,74	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	72.117.000,00	71.758.000,00	(359.000,00)	99,50	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05.1.01		PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	72.117.000,00	71.758.000,00	(359.000,00)	99,50	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05.1.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENIMBUNAN	72.117.000,00	71.758.000,00	(359.000,00)	99,50	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.117.000,00	71.758.000,00	(359.000,00)	99,50	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.117.000,00	71.758.000,00	(359.000,00)	99,50	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.428.400,00	9.568.650,00	(859.750,00)	91,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10.1.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROVINSI	10.428.400,00	9.568.650,00	(859.750,00)	91,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10.1.01.0007		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT PROVINSI	10.428.400,00	9.568.650,00	(859.750,00)	91,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.428.400,00	9.568.650,00	(859.750,00)	91,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.428.400,00	9.568.650,00	(859.750,00)	91,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.197.821.048,00	1.187.931.990,00	(9.889.058,00)	99,17	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01		PENANGANAN SAMPAH DI TPA/TPST REGIONAL	1.197.821.048,00	1.187.931.990,00	(9.889.058,00)	99,17	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01.0007		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN SAMPAH DI TPA/TPST REGIONAL	1.187.700.000,00	1.187.700.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.187.700.000,00	1.187.700.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.187.700.000,00	1.187.700.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01.0014		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN/KOTA	10.121.048,00	231.990,00	(9.889.058,00)	2,29	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	10.121.048,00	231.990,00	(9.889.058,00)	2,29	
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.121.048,00	231.990,00	(9.889.058,00)	2,29	
				JUMLAH BELANJA	35.294.444.739,00	33.388.547.528,00	(1.905.897.211,00)	94,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(34.994.444.739,00)	(32.913.547.528,00)	2.080.897.211,00	94,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(34.994.444.739,00)	(32.913.547.528,00)	2.080.897.211,00	94,05	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.3.28.0.00.10.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33	
	2.11.3.28.0.00.10.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33	
	2.11.3.28.0.00.10.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33	
				JUMLAH PENDAPATAN	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	2.592.141.510,00	2.259.437.825,00	(332.703.685,00)	87,16	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.288.386.160,00	1.966.812.325,00	(321.573.835,00)	85,94	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.01		PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI	111.814.400,00	100.605.775,00	(11.208.625,00)	89,97	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.01.0006		PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA OPERASIONALISASI KPH	111.814.400,00	100.605.775,00	(11.208.625,00)	89,97	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	111.814.400,00	100.605.775,00	(11.208.625,00)	89,97	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.814.400,00	100.605.775,00	(11.208.625,00)	89,97	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03		PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	142.702.200,00	127.977.219,00	(14.724.981,00)	89,68	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03.0013		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI	131.740.400,00	117.729.219,00	(14.011.181,00)	89,36	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	131.740.400,00	117.729.219,00	(14.011.181,00)	89,36	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.740.400,00	117.729.219,00	(14.011.181,00)	89,36	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03.0015		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG	10.961.800,00	10.248.000,00	(713.800,00)	93,48	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03.0015	5.1	BELANJA OPERASI	10.961.800,00	10.248.000,00	(713.800,00)	93,48	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.961.800,00	10.248.000,00	(713.800,00)	93,48	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04		PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA	838.258.300,00	738.659.244,00	(99.599.056,00)	88,11	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0001		PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI LAHAN (RTNRL)	118.000.000,00	88.093.490,00	(29.906.510,00)	74,65	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	118.000.000,00	88.093.490,00	(29.906.510,00)	74,65	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	88.093.490,00	(29.906.510,00)	74,65	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0004		PEMBANGUNAN PENGHIJAUAN LINGKUNGAN DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA	640.610.300,00	572.915.752,00	(67.694.548,00)	89,43	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	640.610.300,00	572.915.752,00	(67.694.548,00)	89,43	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.610.300,00	572.915.752,00	(67.694.548,00)	89,43	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0008		PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN REHABILITASI LAHAN	79.648.000,00	77.650.002,00	(1.997.998,00)	97,49	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	79.648.000,00	77.650.002,00	(1.997.998,00)	97,49	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.648.000,00	77.650.002,00	(1.997.998,00)	97,49	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05		PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI	1.128.825.560,00	934.295.547,00	(194.530.013,00)	82,76	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN	177.000.000,00	161.984.508,00	(15.015.492,00)	91,51	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	177.000.000,00	161.984.508,00	(15.015.492,00)	91,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.000.000,00	161.984.508,00	(15.015.492,00)	91,51	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	58.000.000,00	54.965.464,00	(3.034.536,00)	94,76	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	58.000.000,00	54.965.464,00	(3.034.536,00)	94,76	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	54.965.464,00	(3.034.536,00)	94,76	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0007		PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN KAWASAN HUTAN	893.825.560,00	717.345.575,00	(176.479.985,00)	80,25	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	893.825.560,00	717.345.575,00	(176.479.985,00)	80,25	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	893.825.560,00	717.345.575,00	(176.479.985,00)	80,25	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07		PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI <6000 M3/TAHUN	66.785.700,00	65.274.540,00	(1.511.160,00)	97,73	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07.0004		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PBPHH (KAYU DAN/ATAU HHBK) SKALA KECIL DAN MENENGAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	66.785.700,00	65.274.540,00	(1.511.160,00)	97,73	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07.0004	5.1	BELANJA OPERASI	66.785.700,00	65.274.540,00	(1.511.160,00)	97,73	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.785.700,00	65.274.540,00	(1.511.160,00)	97,73	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	303.755.350,00	292.625.500,00	(11.129.850,00)	96,33	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	303.755.350,00	292.625.500,00	(11.129.850,00)	96,33	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0002		PENGUATAN DAN PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN	303.755.350,00	292.625.500,00	(11.129.850,00)	96,33	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	303.755.350,00	292.625.500,00	(11.129.850,00)	96,33	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.755.350,00	202.625.500,00	(11.129.850,00)	94,79	
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.592.141.510,00	2.259.437.825,00	(332.703.685,00)	87,16	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.292.141.510,00)	(1.784.437.825,00)	507.703.685,00	77,85	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.292.141.510,00)	(1.784.437.825,00)	507.703.685,00	77,85	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	11.989.281.374,00	11.792.071.314,00	(197.210.060,00)	98,35	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.843.894.744,00	11.694.663.564,00	(149.231.180,00)	98,74	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	89.059.600,00	73.492.300,00	(15.567.300,00)	82,52	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	18.821.900,00	10.827.400,00	(7.994.500,00)	57,52	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.821.900,00	10.827.400,00	(7.994.500,00)	57,52	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.821.900,00	10.827.400,00	(7.994.500,00)	57,52	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	33.477.400,00	31.523.600,00	(1.953.800,00)	94,16	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	33.477.400,00	31.523.600,00	(1.953.800,00)	94,16	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.477.400,00	31.523.600,00	(1.953.800,00)	94,16	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	36.760.300,00	31.141.300,00	(5.619.000,00)	84,71	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.760.300,00	31.141.300,00	(5.619.000,00)	84,71	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.760.300,00	31.141.300,00	(5.619.000,00)	84,71	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.575.154.736,00	10.451.944.088,00	(123.210.648,00)	98,83	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.104.809.736,00	9.982.142.287,00	(122.667.449,00)	98,78	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.104.809.736,00	9.982.142.287,00	(122.667.449,00)	98,78	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.104.809.736,00	9.982.142.287,00	(122.667.449,00)	98,78	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	465.760.000,00	465.760.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	465.760.000,00	465.760.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.760.000,00	465.760.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.585.000,00	4.041.801,00	(543.199,00)	88,15	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.585.000,00	4.041.801,00	(543.199,00)	88,15	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.585.000,00	4.041.801,00	(543.199,00)	88,15	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	3.557.400,00	3.438.700,00	(118.700,00)	96,66	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.557.400,00	3.438.700,00	(118.700,00)	96,66	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.557.400,00	3.438.700,00	(118.700,00)	96,66	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.557.400,00	3.438.700,00	(118.700,00)	96,66	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	461.718.660,00	459.692.893,00	(2.025.767,00)	99,56	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	74.334.800,00	73.773.562,00	(561.238,00)	99,24	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	74.334.800,00	73.773.562,00	(561.238,00)	99,24	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.334.800,00	73.773.562,00	(561.238,00)	99,24	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.217.500,00	15.343.250,00	(874.250,00)	94,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.217.500,00	15.343.250,00	(874.250,00)	94,60	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.217.500,00	15.343.250,00	(874.250,00)	94,60	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	182.319.900,00	182.254.621,00	(65.279,00)	99,96	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	182.319.900,00	182.254.621,00	(65.279,00)	99,96	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.319.900,00	182.254.621,00	(65.279,00)	99,96	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	188.846.460,00	188.321.460,00	(525.000,00)	99,72	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	188.846.460,00	188.321.460,00	(525.000,00)	99,72	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.846.460,00	188.321.460,00	(525.000,00)	99,72	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	581.712.848,00	574.657.648,00	(7.055.200,00)	98,78	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.058.000,00	6.058.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.058.000,00	6.058.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.058.000,00	6.058.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	559.334.848,00	552.279.648,00	(7.055.200,00)	98,73	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	559.334.848,00	552.279.648,00	(7.055.200,00)	98,73	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.334.848,00	552.279.648,00	(7.055.200,00)	98,73	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	132.691.500,00	131.437.935,00	(1.253.565,00)	99,05	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	112.231.500,00	111.379.735,00	(851.765,00)	99,24	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	112.231.500,00	111.379.735,00	(851.765,00)	99,24	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.231.500,00	111.379.735,00	(851.765,00)	99,24	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.460.000,00	20.058.200,00	(401.800,00)	98,03	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.460.000,00	20.058.200,00	(401.800,00)	98,03	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.460.000,00	20.058.200,00	(401.800,00)	98,03	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	39.395.400,00	36.870.500,00	(2.524.900,00)	93,59	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02.1.02		PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN	39.395.400,00	36.870.500,00	(2.524.900,00)	93,59	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02.1.02.0004		KOORDINASI BERKALA ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	39.395.400,00	36.870.500,00	(2.524.900,00)	93,59	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.395.400,00	36.870.500,00	(2.524.900,00)	93,59	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.395.400,00	36.870.500,00	(2.524.900,00)	93,59	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	7.447.290,00	0,00	(7.447.290,00)	0,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.03.1.03		PEMBERIAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	7.447.290,00	0,00	(7.447.290,00)	0,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.03.1.03.0001		PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN TERKAIT PENCATATAN SIPIL	7.447.290,00	0,00	(7.447.290,00)	0,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.447.290,00	0,00	(7.447.290,00)	0,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.447.290,00	0,00	(7.447.290,00)	0,00	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	98.543.940,00	60.537.250,00	(38.006.690,00)	61,43	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04.1.02		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROVINSI	98.543.940,00	60.537.250,00	(38.006.690,00)	61,43	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04.1.02.0001		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	98.543.940,00	60.537.250,00	(38.006.690,00)	61,43	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.543.940,00	60.537.250,00	(38.006.690,00)	61,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.543.940,00	60.537.250,00	(38.006.690,00)	61,43	
				JUMLAH BELANJA	11.989.281.374,00	11.792.071.314,00	(197.210.060,00)	98,35	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(11.989.281.374,00)	(11.792.071.314,00)	197.210.060,00	98,35	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.989.281.374,00)	(11.792.071.314,00)	197.210.060,00	98,35	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	2.780.225.896,00	2.421.831.959,00	(358.393.937,00)	87,10	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA	24.771.500,00	15.361.200,00	(9.410.300,00)	62,01	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01		PENATAUSAHAAN PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN DESA ADAT	24.771.500,00	15.361.200,00	(9.410.300,00)	62,01	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01.0003		FASILITASI KABUPATEN/KOTA DAN DESA DALAM RANGKA PENATAAN DESA	24.771.500,00	15.361.200,00	(9.410.300,00)	62,01	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.771.500,00	15.361.200,00	(9.410.300,00)	62,01	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.771.500,00	15.361.200,00	(9.410.300,00)	62,01	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	37.054.400,00	29.018.720,00	(8.035.680,00)	78,31	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	37.054.400,00	29.018.720,00	(8.035.680,00)	78,31	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0002		FASILITASI KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA	19.172.400,00	15.144.020,00	(4.028.380,00)	78,98	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.172.400,00	15.144.020,00	(4.028.380,00)	78,98	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.172.400,00	15.144.020,00	(4.028.380,00)	78,98	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0003		FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	17.882.000,00	13.874.700,00	(4.007.300,00)	77,59	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.882.000,00	13.874.700,00	(4.007.300,00)	77,59	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.882.000,00	13.874.700,00	(4.007.300,00)	77,59	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	156.997.400,00	106.338.685,00	(50.658.715,00)	67,73	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	156.997.400,00	106.338.685,00	(50.658.715,00)	67,73	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0008		FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	122.180.700,00	88.427.125,00	(33.753.575,00)	72,37	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	122.180.700,00	88.427.125,00	(33.753.575,00)	72,37	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.180.700,00	88.427.125,00	(33.753.575,00)	72,37	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0016		FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	18.296.200,00	17.316.660,00	(979.540,00)	94,64	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	18.296.200,00	17.316.660,00	(979.540,00)	94,64	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.296.200,00	17.316.660,00	(979.540,00)	94,64	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0019		FASILITASI PERAN BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	16.520.500,00	594.900,00	(15.925.600,00)	3,60	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	16.520.500,00	594.900,00	(15.925.600,00)	3,60	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.520.500,00	594.900,00	(15.925.600,00)	3,60	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.561.402.596,00	2.271.113.354,00	(290.289.242,00)	88,66	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.561.402.596,00	2.271.113.354,00	(290.289.242,00)	88,66	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0002		FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	336.494.600,00	223.391.301,00	(113.103.299,00)	66,38	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	336.494.600,00	223.391.301,00	(113.103.299,00)	66,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.494.600,00	223.391.301,00	(113.103.299,00)	66,38	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	25.760.000,00	25.760.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.760.000,00	25.760.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.760.000,00	25.760.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0004		FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	305.000.000,00	184.830.710,00	(120.169.290,00)	60,60	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	305.000.000,00	184.830.710,00	(120.169.290,00)	60,60	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	104.830.710,00	(5.169.290,00)	95,30	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	195.000.000,00	80.000.000,00	(115.000.000,00)	41,02	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0005		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	108.979.800,00	104.658.962,00	(4.320.838,00)	96,03	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	108.979.800,00	104.658.962,00	(4.320.838,00)	96,03	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.979.800,00	104.658.962,00	(4.320.838,00)	96,03	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0006		FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	102.409.350,00	101.522.824,00	(886.526,00)	99,13	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	102.409.350,00	101.522.824,00	(886.526,00)	99,13	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.409.350,00	101.522.824,00	(886.526,00)	99,13	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0009		FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.682.758.846,00	1.630.949.557,00	(51.809.289,00)	96,92	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.668.182.846,00	1.616.373.557,00	(51.809.289,00)	96,89	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.668.182.846,00	1.616.373.557,00	(51.809.289,00)	96,89	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	14.576.000,00	14.576.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.576.000,00	14.576.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.780.225.896,00	2.421.831.959,00	(358.393.937,00)	87,10	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.780.225.896,00)	(2.421.831.959,00)	358.393.937,00	87,10	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.780.225.896,00)	(2.421.831.959,00)	358.393.937,00	87,10	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.883.983.725,24	2.237.394.264,00	353.410.538,76	118,75	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.098.168,00	35.269.505,00	34.171.337,00	3.211,66	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	29.737.235.569,00	24.107.258.007,91	(5.629.977.561,09)	81,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.739.207.951,53	17.961.025.658,00	(778.182.293,53)	95,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	114.677.959,00	98.683.094,00	(15.994.865,00)	86,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	34.425.380,00	32.115.330,00	(2.310.050,00)	93,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.425.380,00	32.115.330,00	(2.310.050,00)	93,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.425.380,00	32.115.330,00	(2.310.050,00)	93,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	80.252.579,00	66.567.764,00	(13.684.815,00)	82,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	80.252.579,00	66.567.764,00	(13.684.815,00)	82,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.252.579,00	66.567.764,00	(13.684.815,00)	82,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.814.790.286,22	14.593.716.922,00	(221.073.364,22)	98,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14.010.005.286,22	13.842.208.922,00	(167.796.364,22)	98,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.010.005.286,22	13.842.208.922,00	(167.796.364,22)	98,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	14.010.005.286,22	13.842.208.922,00	(167.796.364,22)	98,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	772.494.000,00	720.032.000,00	(52.462.000,00)	93,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	772.494.000,00	720.032.000,00	(52.462.000,00)	93,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.494.000,00	720.032.000,00	(52.462.000,00)	93,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	32.291.000,00	31.476.000,00	(815.000,00)	97,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	32.291.000,00	31.476.000,00	(815.000,00)	97,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.291.000,00	31.476.000,00	(815.000,00)	97,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	21.971.300,00	21.885.900,00	(85.400,00)	99,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	21.971.300,00	21.885.900,00	(85.400,00)	99,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.971.300,00	21.885.900,00	(85.400,00)	99,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.971.300,00	21.885.900,00	(85.400,00)	99,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.04		ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	58.520.475,00	57.469.610,00	(1.050.865,00)	98,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.04.0007		PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	58.520.475,00	57.469.610,00	(1.050.865,00)	98,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	58.520.475,00	57.469.610,00	(1.050.865,00)	98,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.520.475,00	57.469.610,00	(1.050.865,00)	98,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	22.679.300,00	22.314.600,00	(364.700,00)	98,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	22.679.300,00	22.314.600,00	(364.700,00)	98,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.679.300,00	22.314.600,00	(364.700,00)	98,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.679.300,00	22.314.600,00	(364.700,00)	98,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	587.885.800,00	558.555.366,00	(29.330.434,00)	95,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	9.834.045,00	(165.955,00)	98,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.834.045,00	(165.955,00)	98,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.834.045,00	(165.955,00)	98,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.894.400,00	22.443.645,00	(3.450.755,00)	86,67	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.894.400,00	14.451.645,00	(442.755,00)	97,02	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.894.400,00	14.451.645,00	(442.755,00)	97,02	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	7.992.000,00	(3.008.000,00)	72,65	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	7.992.000,00	(3.008.000,00)	72,65	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	200.000.000,00	189.850.130,00	(10.149.870,00)	94,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	189.850.130,00	(10.149.870,00)	94,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	189.850.130,00	(10.149.870,00)	94,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	60.000.000,00	57.442.500,00	(2.557.500,00)	95,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	57.442.500,00	(2.557.500,00)	95,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	57.442.500,00	(2.557.500,00)	95,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	89.875.000,00	79.972.111,00	(9.902.889,00)	88,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	89.875.000,00	79.972.111,00	(9.902.889,00)	88,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.875.000,00	79.972.111,00	(9.902.889,00)	88,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	202.116.400,00	199.012.935,00	(3.103.465,00)	98,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	202.116.400,00	199.012.935,00	(3.103.465,00)	98,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.116.400,00	199.012.935,00	(3.103.465,00)	98,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	130.814.000,00	106.400.000,00	(24.414.000,00)	81,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	55.803.600,00	31.400.000,00	(24.403.600,00)	56,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.333.300,00	0,00	(2.333.300,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.333.300,00	0,00	(2.333.300,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	53.470.300,00	31.400.000,00	(22.070.300,00)	58,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.470.300,00	31.400.000,00	(22.070.300,00)	58,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	75.010.400,00	75.000.000,00	(10.400,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	75.010.400,00	75.000.000,00	(10.400,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.010.400,00	75.000.000,00	(10.400,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.493.101.831,31	2.080.442.573,00	(412.659.258,31)	83,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	252.000.000,00	170.039.131,00	(81.960.869,00)	67,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	252.000.000,00	170.039.131,00	(81.960.869,00)	67,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	170.039.131,00	(81.960.869,00)	67,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	96.000.000,00	95.760.000,00	(240.000,00)	99,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	95.760.000,00	(240.000,00)	99,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	95.760.000,00	(240.000,00)	99,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.135.101.831,31	1.808.643.442,00	(326.458.389,31)	84,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.135.101.831,31	1.808.643.442,00	(326.458.389,31)	84,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.135.101.831,31	1.808.643.442,00	(326.458.389,31)	84,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	494.767.000,00	421.557.593,00	(73.209.407,00)	85,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	413.167.000,00	351.162.503,00	(62.004.497,00)	84,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	413.167.000,00	351.162.503,00	(62.004.497,00)	84,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.167.000,00	351.162.503,00	(62.004.497,00)	84,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	81.600.000,00	70.395.090,00	(11.204.910,00)	86,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	81.600.000,00	70.395.090,00	(11.204.910,00)	86,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.600.000,00	70.395.090,00	(11.204.910,00)	86,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.399.399.626,47	1.505.883.128,36	(893.516.498,11)	62,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	1.391.308.807,47	504.296.061,36	(887.012.746,11)	36,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	1.391.308.807,47	504.296.061,36	(887.012.746,11)	36,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	898.990.803,47	500.411.061,36	(398.579.742,11)	55,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.990.803,47	500.411.061,36	(398.579.742,11)	55,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	492.318.004,00	3.885.000,00	(488.433.004,00)	0,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.318.004,00	3.885.000,00	(488.433.004,00)	0,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI	18.146.800,00	14.588.478,00	(3.558.322,00)	80,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0004		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN PROVINSI	18.146.800,00	14.588.478,00	(3.558.322,00)	80,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.146.800,00	14.588.478,00	(3.558.322,00)	80,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.146.800,00	14.588.478,00	(3.558.322,00)	80,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06		PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN PROVINSI	17.520.000,00	15.881.240,00	(1.638.760,00)	90,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004		PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI ANDALALIN	17.520.000,00	15.881.240,00	(1.638.760,00)	90,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.520.000,00	15.881.240,00	(1.638.760,00)	90,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.520.000,00	15.881.240,00	(1.638.760,00)	90,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	953.373.676,00	953.373.676,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0002		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI	953.373.676,00	953.373.676,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	953.373.676,00	953.373.676,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.573.676,00	28.573.676,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0002	5.1.05	Belanja Hibah	924.800.000,00	924.800.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	19.050.343,00	17.743.673,00	(1.306.670,00)	93,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK KEWENANGAN PROVINSI	19.050.343,00	17.743.673,00	(1.306.670,00)	93,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.050.343,00	17.743.673,00	(1.306.670,00)	93,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.050.343,00	17.743.673,00	(1.306.670,00)	93,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	8.598.627.991,00	4.640.349.221,55	(3.958.278.769,45)	53,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.01		PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH DAERAH PROVINSI	18.091.400,00	11.063.900,00	(7.027.500,00)	61,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT KEWENANGAN PROVINSI	18.091.400,00	11.063.900,00	(7.027.500,00)	61,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.091.400,00	11.063.900,00	(7.027.500,00)	61,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.091.400,00	11.063.900,00	(7.027.500,00)	61,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.02		PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI, PELABUHAN ANTAR DAERAH PROVINSI, DAN PELABUHAN INTERNASIONAL	14.101.600,00	8.613.600,00	(5.488.000,00)	61,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT KEWENANGAN PROVINSI	14.101.600,00	8.613.600,00	(5.488.000,00)	61,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.101.600,00	8.613.600,00	(5.488.000,00)	61,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.101.600,00	8.613.600,00	(5.488.000,00)	61,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.03		PENERBITAN IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK KAPAL YANG MELAYANI TRAYEK ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	17.416.000,00	17.297.500,00	(118.500,00)	99,31	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.03.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK KAPAL YANG MELAYANI TRAYEK KEWENANGAN PROVINSI	17.416.000,00	17.297.500,00	(118.500,00)	99,31	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.416.000,00	17.297.500,00	(118.500,00)	99,31	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.416.000,00	17.297.500,00	(118.500,00)	99,31	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.06		PENERBITAN IZIN USAHA JASA TERKAIT BERUPA BONGKAR MUAT BARANG, JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI, ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN, PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT ATAU PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT, TALLY MANDIRI, DAN DEPO PETI KEMAS	18.673.600,00	14.081.000,00	(4.592.600,00)	75,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.06.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA TERKAIT BERUPA BONGKAR MUAT BARANG, JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI, ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN, PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT ATAU PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT, TALLY MANDIRI, DAN DEPO PETI KEMAS	18.673.600,00	14.081.000,00	(4.592.600,00)	75,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.673.600,00	14.081.000,00	(4.592.600,00)	75,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.673.600,00	14.081.000,00	(4.592.600,00)	75,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09		PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL	8.530.345.391,00	4.589.293.221,55	(3.941.052.169,45)	53,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0001		FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL	50.589.000,00	48.837.794,00	(1.751.206,00)	96,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.589.000,00	48.837.794,00	(1.751.206,00)	96,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.589.000,00	48.837.794,00	(1.751.206,00)	96,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002		PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL	6.795.627.773,00	3.670.810.561,01	(3.124.817.211,99)	54,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	738.195.467,00	429.788.418,24	(308.407.048,76)	58,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	738.195.467,00	429.788.418,24	(308.407.048,76)	58,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002	5.2	BELANJA MODAL	6.057.432.306,00	3.241.022.142,77	(2.816.410.163,23)	53,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.859.432.306,00	3.241.022.142,77	(2.618.410.163,23)	55,31	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0003		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL	1.684.128.618,00	869.644.866,54	(814.483.751,46)	51,63	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.641.636.212,00	839.863.346,54	(801.772.865,46)	51,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.641.636.212,00	839.863.346,54	(801.772.865,46)	51,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0003	5.2	BELANJA MODAL	42.492.406,00	29.781.520,00	(12.710.886,00)	70,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.492.406,00	29.781.520,00	(12.710.886,00)	70,08	
				JUMLAH BELANJA	29.737.235.569,00	24.107.258.007,91	(5.629.977.561,09)	81,06	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(27.852.153.675,76)	(21.834.594.238,91)	6.017.559.436,85	78,39	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(27.852.153.675,76)	(21.834.594.238,91)	6.017.559.436,85	78,39	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000		5	BELANJA DAERAH	34.881.878.468,00	30.096.474.805,00	(4.785.403.663,00)	86,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.317.877.304,28	13.867.717.934,00	(450.159.370,28)	96,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	141.822.299,23	140.758.403,00	(1.063.896,23)	99,24	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	98.818.399,26	98.591.145,00	(227.254,26)	99,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.818.399,26	98.591.145,00	(227.254,26)	99,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.818.399,26	98.591.145,00	(227.254,26)	99,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	43.003.899,97	42.167.258,00	(836.641,97)	98,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	43.003.899,97	42.167.258,00	(836.641,97)	98,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.003.899,97	42.167.258,00	(836.641,97)	98,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.384.047.078,00	11.962.639.992,00	(421.407.086,00)	96,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.944.795.078,00	11.552.448.992,00	(392.346.086,00)	96,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.944.795.078,00	11.552.448.992,00	(392.346.086,00)	96,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.944.795.078,00	11.552.448.992,00	(392.346.086,00)	96,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	439.252.000,00	410.191.000,00	(29.061.000,00)	93,38	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	439.252.000,00	410.191.000,00	(29.061.000,00)	93,38	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.252.000,00	410.191.000,00	(29.061.000,00)	93,38	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	362.874.162,05	354.206.088,00	(8.668.074,05)	97,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.157.500,00	6.696.520,00	(460.980,00)	93,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.157.500,00	6.696.520,00	(460.980,00)	93,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.157.500,00	6.696.520,00	(460.980,00)	93,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.684.000,00	2.294.998,00	(389.002,00)	85,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.684.000,00	2.294.998,00	(389.002,00)	85,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.684.000,00	2.294.998,00	(389.002,00)	85,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.053.500,00	13.278.459,00	(1.775.041,00)	88,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.053.500,00	13.278.459,00	(1.775.041,00)	88,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.053.500,00	13.278.459,00	(1.775.041,00)	88,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	73.229.160,00	72.296.666,00	(932.494,00)	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	73.229.160,00	72.296.666,00	(932.494,00)	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.229.160,00	72.296.666,00	(932.494,00)	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.072.900,00	40.748.126,00	(3.324.774,00)	92,45	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	44.072.900,00	40.748.126,00	(3.324.774,00)	92,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.072.900,00	40.748.126,00	(3.324.774,00)	92,45	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	24.696.500,00	24.250.000,00	(446.500,00)	98,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	24.696.500,00	24.250.000,00	(446.500,00)	98,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.696.500,00	24.250.000,00	(446.500,00)	98,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	195.980.602,05	194.641.319,00	(1.339.283,05)	99,31	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	195.980.602,05	194.641.319,00	(1.339.283,05)	99,31	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.980.602,05	194.641.319,00	(1.339.283,05)	99,31	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	121.600.000,00	121.424.999,00	(175.001,00)	99,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	121.600.000,00	121.424.999,00	(175.001,00)	99,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	121.600.000,00	121.424.999,00	(175.001,00)	99,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.600.000,00	121.424.999,00	(175.001,00)	99,85	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.156.583.765,00	1.139.605.210,00	(16.978.555,00)	98,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	38.730.800,00	36.480.772,00	(2.250.028,00)	94,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.730.800,00	36.480.772,00	(2.250.028,00)	94,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.730.800,00	36.480.772,00	(2.250.028,00)	94,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	52.707.900,00	52.206.400,00	(501.500,00)	99,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	52.707.900,00	52.206.400,00	(501.500,00)	99,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.707.900,00	52.206.400,00	(501.500,00)	99,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.065.145.065,00	1.050.918.038,00	(14.227.027,00)	98,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.065.145.065,00	1.050.918.038,00	(14.227.027,00)	98,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.065.145.065,00	1.050.918.038,00	(14.227.027,00)	98,66	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	150.950.000,00	149.083.242,00	(1.866.758,00)	98,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	142.900.000,00	141.250.390,00	(1.649.610,00)	98,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	142.900.000,00	141.250.390,00	(1.649.610,00)	98,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.900.000,00	141.250.390,00	(1.649.610,00)	98,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.050.000,00	7.832.852,00	(217.148,00)	97,30	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.050.000,00	7.832.852,00	(217.148,00)	97,30	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	7.832.852,00	(217.148,00)	97,30	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.024.306.519,00	12.387.079.556,00	(3.637.226.963,00)	77,30	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	16.024.306.519,00	12.387.079.556,00	(3.637.226.963,00)	77,30	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0015		PENYUSUNAN KONTEN	449.927.249,00	430.987.738,00	(18.939.511,00)	95,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	449.927.249,00	430.987.738,00	(18.939.511,00)	95,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.927.249,00	430.987.738,00	(18.939.511,00)	95,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0018		DISEMINASI INFORMASI	3.635.930.960,00	3.054.795.691,00	(581.135.269,00)	84,01	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	3.635.930.960,00	3.054.795.691,00	(581.135.269,00)	84,01	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.635.930.960,00	3.054.795.691,00	(581.135.269,00)	84,01	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0020		DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	749.287.378,00	745.070.378,00	(4.217.000,00)	99,43	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	749.287.378,00	745.070.378,00	(4.217.000,00)	99,43	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.287.378,00	745.070.378,00	(4.217.000,00)	99,43	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0022		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	633.401.753,00	631.208.465,00	(2.193.288,00)	99,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	633.401.753,00	631.208.465,00	(2.193.288,00)	99,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.401.753,00	71.208.465,00	(2.193.288,00)	97,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0022	5.1.05	Belanja Hibah	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0023		MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK	24.967.000,00	24.411.721,00	(555.279,00)	97,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	24.967.000,00	24.411.721,00	(555.279,00)	97,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.967.000,00	24.411.721,00	(555.279,00)	97,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0024		PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	10.530.792.179,00	7.500.605.563,00	(3.030.186.616,00)	71,22	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	10.530.792.179,00	7.500.605.563,00	(3.030.186.616,00)	71,22	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.530.792.179,00	7.500.605.563,00	(3.030.186.616,00)	71,22	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.539.694.644,72	3.841.677.315,00	(698.017.329,72)	84,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.01		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	20.400.751,00	19.911.692,00	(489.059,00)	97,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.01.0004		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	20.400.751,00	19.911.692,00	(489.059,00)	97,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.400.751,00	19.911.692,00	(489.059,00)	97,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.751,00	19.911.692,00	(489.059,00)	97,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	4.519.293.893,72	3.821.765.623,00	(697.528.270,72)	84,56	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0013		KOORDINASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	37.498.603,00	33.134.991,00	(4.363.612,00)	88,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	37.498.603,00	33.134.991,00	(4.363.612,00)	88,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.498.603,00	33.134.991,00	(4.363.612,00)	88,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0014		PENYELENGGARAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	16.212.320,26	8.062.279,00	(8.150.041,26)	49,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	16.212.320,26	8.062.279,00	(8.150.041,26)	49,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.212.320,26	8.062.279,00	(8.150.041,26)	49,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0017		PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS YANG SESUAI DENGAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	850.720.162,00	834.968.386,00	(15.751.776,00)	98,14	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	850.720.162,00	834.968.386,00	(15.751.776,00)	98,14	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.720.162,00	834.968.386,00	(15.751.776,00)	98,14	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0026		PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	3.018.235.220,00	2.527.180.283,00	(491.054.937,00)	83,73	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	2.985.724.120,00	2.495.795.283,00	(489.928.837,00)	83,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.985.724.120,00	2.495.795.283,00	(489.928.837,00)	83,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	32.511.100,00	31.385.000,00	(1.126.100,00)	96,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.511.100,00	31.385.000,00	(1.126.100,00)	96,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0030		PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	596.627.588,46	418.419.684,00	(178.207.904,46)	70,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0030	5.1	BELANJA OPERASI	509.635.938,46	335.831.684,00	(173.804.254,46)	65,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.635.938,46	335.831.684,00	(173.804.254,46)	65,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0030	5.2	BELANJA MODAL	86.991.650,00	82.588.000,00	(4.403.650,00)	94,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0030	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.991.650,00	82.588.000,00	(4.403.650,00)	94,93	
				JUMLAH BELANJA	34.881.878.468,00	30.096.474.805,00	(4.785.403.663,00)	86,28	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(34.881.878.468,00)	(30.096.474.805,00)	4.785.403.663,00	86,28	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(34.881.878.468,00)	(30.096.474.805,00)	4.785.403.663,00	86,28	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000		5	BELANJA DAERAH	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,10	
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,10	
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.20.02.1.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,10	
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.20.02.1.01.0011		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,10	
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.20.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,10	
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.20.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,10	
				JUMLAH BELANJA	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,10	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(48.595.643,00)	(38.441.840,00)	10.153.803,00	79,10	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(48.595.643,00)	(38.441.840,00)	10.153.803,00	79,10	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000		5	BELANJA DAERAH	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16	
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16	
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.21.02.1.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16	
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.21.02.1.01.0004		PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16	
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.21.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16	
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.21.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16	
				JUMLAH BELANJA	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(36.231.702,00)	(23.247.051,00)	12.984.651,00	64,16	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(36.231.702,00)	(23.247.051,00)	12.984.651,00	64,16	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	38.427.480.191,00	32.953.071.736,00	(5.474.408.455,00)	85,75	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.333.035.559,62	12.030.010.936,00	(303.024.623,62)	97,54	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	86.322.207,00	78.979.700,00	(7.342.507,00)	91,49	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	86.322.207,00	78.979.700,00	(7.342.507,00)	91,49	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	86.322.207,00	78.979.700,00	(7.342.507,00)	91,49	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.322.207,00	78.979.700,00	(7.342.507,00)	91,49	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.936.268.236,08	9.824.362.142,00	(111.906.094,08)	98,87	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.499.963.136,08	9.406.028.642,00	(93.934.494,08)	99,01	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.499.963.136,08	9.406.028.642,00	(93.934.494,08)	99,01	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.499.963.136,08	9.406.028.642,00	(93.934.494,08)	99,01	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	436.305.100,00	418.333.500,00	(17.971.600,00)	95,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	436.305.100,00	418.333.500,00	(17.971.600,00)	95,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.305.100,00	418.333.500,00	(17.971.600,00)	95,88	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.582.000,00	24.291.000,00	(291.000,00)	98,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	24.582.000,00	24.291.000,00	(291.000,00)	98,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.582.000,00	24.291.000,00	(291.000,00)	98,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.582.000,00	24.291.000,00	(291.000,00)	98,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.154.298.540,00	995.193.939,00	(159.104.601,00)	86,21	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.250.200,00	3.063.600,00	(186.600,00)	94,25	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.250.200,00	3.063.600,00	(186.600,00)	94,25	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.200,00	3.063.600,00	(186.600,00)	94,25	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45.167.400,00	44.992.001,00	(175.399,00)	99,61	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	93.200,00	54.000,00	(39.200,00)	57,93	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.200,00	54.000,00	(39.200,00)	57,93	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	45.074.200,00	44.938.001,00	(136.199,00)	99,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.074.200,00	44.938.001,00	(136.199,00)	99,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.155.800,00	2.724.000,00	(431.800,00)	86,31	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.155.800,00	2.724.000,00	(431.800,00)	86,31	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.155.800,00	2.724.000,00	(431.800,00)	86,31	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	19.754.600,00	19.071.842,00	(682.758,00)	96,54	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.754.600,00	19.071.842,00	(682.758,00)	96,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.754.600,00	19.071.842,00	(682.758,00)	96,54	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.074.300,00	1.640.000,00	(434.300,00)	79,06	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.074.300,00	1.640.000,00	(434.300,00)	79,06	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.074.300,00	1.640.000,00	(434.300,00)	79,06	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	185.758.340,00	181.266.196,00	(4.492.144,00)	97,58	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	185.758.340,00	181.266.196,00	(4.492.144,00)	97,58	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.758.340,00	181.266.196,00	(4.492.144,00)	97,58	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	2.120.000,00	1.800.000,00	(320.000,00)	84,90	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.120.000,00	1.800.000,00	(320.000,00)	84,90	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	1.800.000,00	(320.000,00)	84,90	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	893.017.900,00	740.636.300,00	(152.381.600,00)	82,93	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	893.017.900,00	740.636.300,00	(152.381.600,00)	82,93	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	893.017.900,00	740.636.300,00	(152.381.600,00)	82,93	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	122.800.000,00	120.000.000,00	(2.800.000,00)	97,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	122.800.000,00	120.000.000,00	(2.800.000,00)	97,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	122.800.000,00	120.000.000,00	(2.800.000,00)	97,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.800.000,00	120.000.000,00	(2.800.000,00)	97,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	866.328.176,54	846.684.437,00	(19.643.739,54)	97,73	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.490.000,00	24.037.238,00	(452.762,00)	98,15	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.490.000,00	24.037.238,00	(452.762,00)	98,15	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.490.000,00	24.037.238,00	(452.762,00)	98,15	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	48.906.600,00	48.854.000,00	(52.600,00)	99,89	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.906.600,00	48.854.000,00	(52.600,00)	99,89	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.906.600,00	48.854.000,00	(52.600,00)	99,89	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	792.931.576,54	773.793.199,00	(19.138.377,54)	97,58	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	792.931.576,54	773.793.199,00	(19.138.377,54)	97,58	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	792.931.576,54	773.793.199,00	(19.138.377,54)	97,58	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	142.436.400,00	140.499.718,00	(1.936.682,00)	98,64	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	117.520.500,00	115.730.818,00	(1.789.682,00)	98,47	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	117.520.500,00	115.730.818,00	(1.789.682,00)	98,47	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.520.500,00	115.730.818,00	(1.789.682,00)	98,47	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	24.915.900,00	24.768.900,00	(147.000,00)	99,41	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.915.900,00	24.768.900,00	(147.000,00)	99,41	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.915.900,00	24.768.900,00	(147.000,00)	99,41	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02.1.01		PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02.1.01.0002		FASILITASI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.990.000,00	1.281.000,00	(1.709.000,00)	42,84	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.990.000,00	1.281.000,00	(1.709.000,00)	42,84	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.01.0003		PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI	2.990.000,00	1.281.000,00	(1.709.000,00)	42,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.990.000,00	1.281.000,00	(1.709.000,00)	42,84	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	1.281.000,00	(1.709.000,00)	42,84	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.990.000,00	2.160.000,00	(830.000,00)	72,24	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04.1.01		PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.990.000,00	2.160.000,00	(830.000,00)	72,24	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04.1.01.0003		PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI MELIPUTI TATA KELOLA, PROFIL RISIKO, KINERJA KEUANGAN, DAN PERMODALAN	2.990.000,00	2.160.000,00	(830.000,00)	72,24	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.990.000,00	2.160.000,00	(830.000,00)	72,24	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	2.160.000,00	(830.000,00)	72,24	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100.063.100,00	99.200.000,00	(863.100,00)	99,13	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05.1.01		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	100.063.100,00	99.200.000,00	(863.100,00)	99,13	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05.1.01.0001		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	100.063.100,00	99.200.000,00	(863.100,00)	99,13	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.063.100,00	99.200.000,00	(863.100,00)	99,13	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.063.100,00	99.200.000,00	(863.100,00)	99,13	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.606.117.098,00	2.279.207.603,00	(326.909.495,00)	87,45	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.606.117.098,00	2.279.207.603,00	(326.909.495,00)	87,45	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0002		PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA	2.603.127.098,00	2.276.227.603,00	(326.899.495,00)	87,44	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.603.127.098,00	2.276.227.603,00	(326.899.495,00)	87,44	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.653.127.098,00	1.326.227.603,00	(326.899.495,00)	80,22	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0003		PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP KELUARGA MELALUI KEHIDUPAN BERKOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LAINNYA	2.990.000,00	2.980.000,00	(10.000,00)	99,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.990.000,00	2.980.000,00	(10.000,00)	99,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	2.980.000,00	(10.000,00)	99,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	17.068.663.172,00	14.576.871.921,00	(2.491.791.251,00)	85,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01		PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	17.068.663.172,00	14.576.871.921,00	(2.491.791.251,00)	85,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0001		MENUMBUHKEMBANGKAN UMKM UNTUK MENJADI USAHA YANG TANGGUH DAN MANDIRI SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, PEMERATAAN PENDAPATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	5.092.891.972,00	4.918.454.819,00	(174.437.153,00)	96,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.092.891.972,00	4.918.454.819,00	(174.437.153,00)	96,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.282.891.972,00	3.108.454.819,00	(174.437.153,00)	94,68	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.810.000.000,00	1.810.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0002		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN	10.606.245.000,00	9.182.799.059,00	(1.423.445.941,00)	86,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.606.245.000,00	9.182.799.059,00	(1.423.445.941,00)	86,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.606.245.000,00	9.182.799.059,00	(1.423.445.941,00)	86,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0005		PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA KECIL	325.200.000,00	307.260.000,00	(17.940.000,00)	94,48	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	325.200.000,00	307.260.000,00	(17.940.000,00)	94,48	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.200.000,00	307.260.000,00	(17.940.000,00)	94,48	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0009		PENYEDIAAN TEMPAT PROMOSI DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL PADA INFRASTRUKTUR PUBLIK	450.126.200,00	27.749.902,00	(422.376.298,00)	6,16	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	417.482.700,00	2.386.800,00	(415.095.900,00)	0,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.482.700,00	2.386.800,00	(415.095.900,00)	0,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	32.643.500,00	25.363.102,00	(7.280.398,00)	77,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.643.500,00	25.363.102,00	(7.280.398,00)	77,69	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0011		FASILITASI SERTIFIKASI DAN STANDARDISASI USAHA	594.200.000,00	140.608.141,00	(453.591.859,00)	23,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	594.200.000,00	140.608.141,00	(453.591.859,00)	23,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.200.000,00	140.608.141,00	(453.591.859,00)	23,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.300.621.261,38	3.951.340.276,00	(2.349.280.985,38)	62,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01		PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH	6.300.621.261,38	3.951.340.276,00	(2.349.280.985,38)	62,71	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0001		PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	3.602.141.261,38	1.547.260.896,00	(2.054.880.365,38)	42,95	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.602.141.261,38	1.547.260.896,00	(2.054.880.365,38)	42,95	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	737.647.200,00	712.407.905,00	(25.239.295,00)	96,57	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0001	5.1.04	Belanja Subsidi	2.864.494.061,38	834.852.991,00	(2.029.641.070,38)	29,14	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0003		PENGEMBANGAN USAHA KECIL	1.698.480.000,00	1.511.458.000,00	(187.022.000,00)	88,98	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.698.480.000,00	1.511.458.000,00	(187.022.000,00)	88,98	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.698.480.000,00	1.511.458.000,00	(187.022.000,00)	88,98	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0004		FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBASI SECARA TERPADU DAN BERJENJANG	1.000.000.000,00	892.621.380,00	(107.378.620,00)	89,26	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	892.621.380,00	(107.378.620,00)	89,26	
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	892.621.380,00	(107.378.620,00)	89,26	
				JUMLAH BELANJA	38.427.480.191,00	32.953.071.736,00	(5.474.408.455,00)	85,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(38.427.480.191,00)	(32.953.071.736,00)	5.474.408.455,00	85,75	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(38.427.480.191,00)	(32.953.071.736,00)	5.474.408.455,00	85,75	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000		5	BELANJA DAERAH	15.071.210.290,00	14.805.451.792,00	(265.758.498,00)	98,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.226.638.966,00	13.998.637.104,00	(228.001.862,00)	98,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	185.564.264,00	184.429.211,00	(1.135.053,00)	99,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	150.951.707,00	150.596.291,00	(355.416,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.951.707,00	150.596.291,00	(355.416,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.951.707,00	150.596.291,00	(355.416,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.315.912,00	6.201.180,00	(114.732,00)	98,18	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.315.912,00	6.201.180,00	(114.732,00)	98,18	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.315.912,00	6.201.180,00	(114.732,00)	98,18	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.296.645,00	27.631.740,00	(664.905,00)	97,65	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	28.296.645,00	27.631.740,00	(664.905,00)	97,65	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.296.645,00	27.631.740,00	(664.905,00)	97,65	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.495.970.503,00	12.304.096.808,00	(191.873.695,00)	98,46	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.015.389.365,00	11.835.017.567,00	(180.371.798,00)	98,49	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.015.389.365,00	11.835.017.567,00	(180.371.798,00)	98,49	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.015.389.365,00	11.835.017.567,00	(180.371.798,00)	98,49	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	439.680.000,00	428.332.000,00	(11.348.000,00)	97,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	439.680.000,00	428.332.000,00	(11.348.000,00)	97,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.680.000,00	428.332.000,00	(11.348.000,00)	97,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	40.901.138,00	40.747.241,00	(153.897,00)	99,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.901.138,00	40.747.241,00	(153.897,00)	99,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.901.138,00	40.747.241,00	(153.897,00)	99,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	553.854.151,00	529.975.753,00	(23.878.398,00)	95,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.294.800,00	5.179.815,00	(114.985,00)	97,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.294.800,00	5.179.815,00	(114.985,00)	97,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.294.800,00	5.179.815,00	(114.985,00)	97,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.038.500,00	3.030.300,00	(8.200,00)	99,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	3.038.500,00	3.030.300,00	(8.200,00)	99,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.038.500,00	3.030.300,00	(8.200,00)	99,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	30.283.795,00	29.649.212,00	(634.583,00)	97,90	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.283.795,00	29.649.212,00	(634.583,00)	97,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.283.795,00	29.649.212,00	(634.583,00)	97,90	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	252.648.353,00	229.579.720,00	(23.068.633,00)	90,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	252.648.353,00	229.579.720,00	(23.068.633,00)	90,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.648.353,00	229.579.720,00	(23.068.633,00)	90,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	111.660.000,00	111.648.800,00	(11.200,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	111.660.000,00	111.648.800,00	(11.200,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.660.000,00	111.648.800,00	(11.200,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	17.400.000,00	17.359.275,00	(40.725,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.400.000,00	17.359.275,00	(40.725,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	17.359.275,00	(40.725,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	133.528.703,00	133.528.631,00	(72,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	133.528.703,00	133.528.631,00	(72,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.528.703,00	133.528.631,00	(72,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	42.278.431,00	42.217.850,00	(60.581,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	42.278.431,00	42.217.850,00	(60.581,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	33.688.000,00	33.687.500,00	(500,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.688.000,00	33.687.500,00	(500,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	8.590.431,00	8.530.350,00	(60.081,00)	99,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07.0011	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.590.431,00	8.530.350,00	(60.081,00)	99,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	855.199.369,00	848.379.930,00	(6.819.439,00)	99,20	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	180.857.264,00	174.124.825,00	(6.732.439,00)	96,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	180.857.264,00	174.124.825,00	(6.732.439,00)	96,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.857.264,00	174.124.825,00	(6.732.439,00)	96,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	631.142.105,00	631.055.105,00	(87.000,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	631.142.105,00	631.055.105,00	(87.000,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	631.142.105,00	631.055.105,00	(87.000,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	93.772.248,00	89.537.552,00	(4.234.696,00)	95,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	85.110.448,00	80.887.552,00	(4.222.896,00)	95,03	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.110.448,00	80.887.552,00	(4.222.896,00)	95,03	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.110.448,00	80.887.552,00	(4.222.896,00)	95,03	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.661.800,00	8.650.000,00	(11.800,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.661.800,00	8.650.000,00	(11.800,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.661.800,00	8.650.000,00	(11.800,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	219.614.350,00	202.641.291,00	(16.973.059,00)	92,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.01		PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	202.179.800,00	185.598.117,00	(16.581.683,00)	91,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	202.179.800,00	185.598.117,00	(16.581.683,00)	91,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	202.179.800,00	185.598.117,00	(16.581.683,00)	91,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.179.800,00	185.598.117,00	(16.581.683,00)	91,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02		PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI	17.434.550,00	17.043.174,00	(391.376,00)	97,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02.0003		PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI INVESTASI DAERAH PADA SISTEM PIR (POTENSI INVESTASI REGIONAL)	17.434.550,00	17.043.174,00	(391.376,00)	97,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.434.550,00	17.043.174,00	(391.376,00)	97,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.434.550,00	17.043.174,00	(391.376,00)	97,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	348.266.180,00	343.536.124,00	(4.730.056,00)	98,64	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	348.266.180,00	343.536.124,00	(4.730.056,00)	98,64	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0002		PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	336.212.480,00	331.499.824,00	(4.712.656,00)	98,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	336.212.480,00	331.499.824,00	(4.712.656,00)	98,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.212.480,00	331.499.824,00	(4.712.656,00)	98,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0003		PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	12.053.700,00	12.036.300,00	(17.400,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.053.700,00	12.036.300,00	(17.400,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.053.700,00	12.036.300,00	(17.400,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	211.876.799,00	198.918.230,00	(12.958.569,00)	93,88	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01		PENANAMAN MODAL YANG RUANG LINGKUPNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.954.695,00	58.873.095,00	(2.081.600,00)	96,58	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	10.693.700,00	9.771.600,00	(922.100,00)	91,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.693.700,00	9.771.600,00	(922.100,00)	91,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.693.700,00	9.771.600,00	(922.100,00)	91,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0007		PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	50.260.995,00	49.101.495,00	(1.159.500,00)	97,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	50.260.995,00	49.101.495,00	(1.159.500,00)	97,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.260.995,00	49.101.495,00	(1.159.500,00)	97,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02		PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	150.922.104,00	140.045.135,00	(10.876.969,00)	92,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH	18.401.390,00	14.427.700,00	(3.973.690,00)	78,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.401.390,00	14.427.700,00	(3.973.690,00)	78,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.401.390,00	14.427.700,00	(3.973.690,00)	78,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0006		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	36.611.348,00	36.585.860,00	(25.488,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	36.611.348,00	36.585.860,00	(25.488,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.611.348,00	36.585.860,00	(25.488,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0007		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	78.258.666,00	74.654.115,00	(3.604.551,00)	95,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	78.258.666,00	74.654.115,00	(3.604.551,00)	95,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.258.666,00	74.654.115,00	(3.604.551,00)	95,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0008		PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	17.650.700,00	14.377.460,00	(3.273.240,00)	81,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.650.700,00	14.377.460,00	(3.273.240,00)	81,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.650.700,00	14.377.460,00	(3.273.240,00)	81,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	51.106.895,00	48.201.398,00	(2.905.497,00)	94,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	51.106.895,00	48.201.398,00	(2.905.497,00)	94,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0004		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	18.040.540,00	17.892.100,00	(148.440,00)	99,17	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.040.540,00	17.892.100,00	(148.440,00)	99,17	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.040.540,00	17.892.100,00	(148.440,00)	99,17	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0005		PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	12.019.105,00	9.414.200,00	(2.604.905,00)	78,32	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.019.105,00	9.414.200,00	(2.604.905,00)	78,32	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.019.105,00	9.414.200,00	(2.604.905,00)	78,32	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0006		BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	21.047.250,00	20.895.098,00	(152.152,00)	99,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.047.250,00	20.895.098,00	(152.152,00)	99,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.047.250,00	20.895.098,00	(152.152,00)	99,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	13.707.100,00	13.517.645,00	(189.455,00)	98,61	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06.1.01		URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI	13.707.100,00	13.517.645,00	(189.455,00)	98,61	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06.1.01.0002		PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	13.707.100,00	13.517.645,00	(189.455,00)	98,61	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.707.100,00	13.517.645,00	(189.455,00)	98,61	
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.707.100,00	13.517.645,00	(189.455,00)	98,61	
				JUMLAH BELANJA	15.071.210.290,00	14.805.451.792,00	(265.758.498,00)	98,23	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(15.071.210.290,00)	(14.805.451.792,00)	265.758.498,00	98,23	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.071.210.290,00)	(14.805.451.792,00)	265.758.498,00	98,23	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000		5	BELANJA DAERAH	34.233.552.898,77	30.825.231.377,04	(3.408.321.521,73)	90,04	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.930.416.799,27	12.348.271.252,04	(1.582.145.547,23)	88,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	685.529.904,27	596.925.617,00	(88.604.287,27)	87,07	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	318.679.504,27	268.421.955,00	(50.257.549,27)	84,22	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	318.679.504,27	268.421.955,00	(50.257.549,27)	84,22	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.679.504,27	268.421.955,00	(50.257.549,27)	84,22	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	87.122.000,00	74.370.600,00	(12.751.400,00)	85,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	87.122.000,00	74.370.600,00	(12.751.400,00)	85,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.122.000,00	74.370.600,00	(12.751.400,00)	85,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	279.728.400,00	254.133.062,00	(25.595.338,00)	90,84	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	279.728.400,00	254.133.062,00	(25.595.338,00)	90,84	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.728.400,00	254.133.062,00	(25.595.338,00)	90,84	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.242.773.946,55	9.059.661.798,04	(1.183.112.148,51)	88,44	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.617.856.546,55	8.635.603.158,04	(982.253.388,51)	89,78	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.617.856.546,55	8.635.603.158,04	(982.253.388,51)	89,78	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.617.856.546,55	8.635.603.158,04	(982.253.388,51)	89,78	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	570.298.000,00	382.907.540,00	(187.390.460,00)	67,14	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	570.298.000,00	382.907.540,00	(187.390.460,00)	67,14	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.298.000,00	382.907.540,00	(187.390.460,00)	67,14	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	54.619.400,00	41.151.100,00	(13.468.300,00)	75,34	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	54.619.400,00	41.151.100,00	(13.468.300,00)	75,34	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.619.400,00	41.151.100,00	(13.468.300,00)	75,34	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	148.276.301,10	127.793.076,00	(20.483.225,10)	86,18	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	148.276.301,10	127.793.076,00	(20.483.225,10)	86,18	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	148.276.301,10	127.793.076,00	(20.483.225,10)	86,18	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.276.301,10	127.793.076,00	(20.483.225,10)	86,18	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	847.347.104,19	730.410.854,00	(116.936.250,19)	86,19	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	219.881.300,00	158.920.000,00	(60.961.300,00)	72,27	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.136.200,00	2.940.000,00	(196.200,00)	93,74	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.136.200,00	2.940.000,00	(196.200,00)	93,74	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	216.745.100,00	155.980.000,00	(60.765.100,00)	71,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.745.100,00	155.980.000,00	(60.765.100,00)	71,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	45.000.000,00	43.045.800,00	(1.954.200,00)	95,65	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	43.045.800,00	(1.954.200,00)	95,65	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	43.045.800,00	(1.954.200,00)	95,65	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	67.383.500,00	65.596.965,00	(1.786.535,00)	97,34	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	67.383.500,00	65.596.965,00	(1.786.535,00)	97,34	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.383.500,00	65.596.965,00	(1.786.535,00)	97,34	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.161.800,00	31.421.880,00	(3.739.920,00)	89,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.161.800,00	31.421.880,00	(3.739.920,00)	89,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.161.800,00	31.421.880,00	(3.739.920,00)	89,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	10.000.000,00	1.380.000,00	(8.620.000,00)	13,80	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	1.380.000,00	(8.620.000,00)	13,80	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	1.380.000,00	(8.620.000,00)	13,80	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	417.312.055,00	389.780.809,00	(27.531.246,00)	93,40	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	417.312.055,00	389.780.809,00	(27.531.246,00)	93,40	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.312.055,00	389.780.809,00	(27.531.246,00)	93,40	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	52.608.449,19	40.265.400,00	(12.343.049,19)	76,53	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	52.608.449,19	40.265.400,00	(12.343.049,19)	76,53	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.608.449,19	40.265.400,00	(12.343.049,19)	76,53	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.611.005.943,16	1.441.711.959,00	(169.293.984,16)	89,49	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	249.146.950,00	218.115.491,00	(31.031.459,00)	87,54	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	249.146.950,00	218.115.491,00	(31.031.459,00)	87,54	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.146.950,00	218.115.491,00	(31.031.459,00)	87,54	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	47.455.000,00	44.726.000,00	(2.729.000,00)	94,24	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.455.000,00	44.726.000,00	(2.729.000,00)	94,24	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.455.000,00	44.726.000,00	(2.729.000,00)	94,24	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.314.403.993,16	1.178.870.468,00	(135.533.525,16)	89,68	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.314.403.993,16	1.178.870.468,00	(135.533.525,16)	89,68	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.314.403.993,16	1.178.870.468,00	(135.533.525,16)	89,68	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	395.483.600,00	391.767.948,00	(3.715.652,00)	99,06	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	291.830.000,00	288.127.948,00	(3.702.052,00)	98,73	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	291.830.000,00	288.127.948,00	(3.702.052,00)	98,73	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.830.000,00	288.127.948,00	(3.702.052,00)	98,73	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	103.653.600,00	103.640.000,00	(13.600,00)	99,98	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	103.653.600,00	103.640.000,00	(13.600,00)	99,98	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.653.600,00	103.640.000,00	(13.600,00)	99,98	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	838.857.400,00	564.859.622,00	(273.997.778,00)	67,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI	738.857.400,00	464.859.622,00	(273.997.778,00)	62,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0013		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI	638.857.400,00	370.499.289,00	(268.358.111,00)	57,99	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	638.857.400,00	370.499.289,00	(268.358.111,00)	57,99	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.857.400,00	370.499.289,00	(268.358.111,00)	57,99	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0015		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BAGI WIRAUSAHA MUDA TINGKAT PROVINSI	100.000.000,00	94.360.333,00	(5.639.667,00)	94,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	94.360.333,00	(5.639.667,00)	94,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	94.360.333,00	(5.639.667,00)	94,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.02		PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.02.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN BERBASIS PENEGUHAN KEMANDIRIAN EKONOMI PEMUDA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	18.564.278.699,50	17.088.972.013,00	(1.475.306.686,50)	92,05	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	4.529.906.000,00	4.239.100.167,00	(290.805.833,00)	93,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA SERTA SEKOLAH OLAHRAGA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	2.210.656.000,00	2.037.089.600,00	(173.566.400,00)	92,14	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.210.656.000,00	2.037.089.600,00	(173.566.400,00)	92,14	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.210.656.000,00	2.037.089.600,00	(173.566.400,00)	92,14	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLEH SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS	70.000.000,00	67.933.000,00	(2.067.000,00)	97,04	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	67.933.000,00	(2.067.000,00)	97,04	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	67.933.000,00	(2.067.000,00)	97,04	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT PROVINSI	2.249.250.000,00	2.134.077.567,00	(115.172.433,00)	94,87	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.151.475.900,00	2.134.077.567,00	(17.398.333,00)	99,19	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.923.879,99	517.333.547,00	(9.590.332,99)	98,17	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	1.624.552.020,01	1.616.744.020,00	(7.808.000,01)	99,51	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	97.774.100,00	0,00	(97.774.100,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.774.100,00	0,00	(97.774.100,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA	5.224.372.699,50	4.366.573.729,00	(857.798.970,50)	83,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0004		KEIKUTSERTAAN ANGGOTA KONTINGEN PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	953.441.000,00	895.001.490,00	(58.439.510,00)	93,87	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	953.441.000,00	895.001.490,00	(58.439.510,00)	93,87	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	953.441.000,00	895.001.490,00	(58.439.510,00)	93,87	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0006		PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI	4.270.931.699,50	3.471.572.239,00	(799.359.460,50)	81,28	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.270.931.699,50	3.471.572.239,00	(799.359.460,50)	81,28	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.270.931.699,50	3.471.572.239,00	(799.359.460,50)	81,28	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL	100.000.000,00	89.406.300,00	(10.593.700,00)	89,40	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.03.0006		PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI YANG BERPRESTASI DAN/ATAU BERJASA DALAM MEMAJUKAN OLAHRAGA	100.000.000,00	89.406.300,00	(10.593.700,00)	89,40	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	89.406.300,00	(10.593.700,00)	89,40	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	89.406.300,00	(10.593.700,00)	89,40	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	8.710.000.000,00	8.393.891.817,00	(316.108.183,00)	96,37	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0003		PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PROVINSI DENGAN LEMBAGA TERKAIT	8.310.000.000,00	8.223.614.975,00	(86.385.025,00)	98,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.310.000.000,00	8.223.614.975,00	(86.385.025,00)	98,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0003	5.1.05	Belanja Hibah	8.310.000.000,00	8.223.614.975,00	(86.385.025,00)	98,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0005		PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL PENGELOLAAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN DI PROVINSI	400.000.000,00	170.276.842,00	(229.723.158,00)	42,56	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	170.276.842,00	(229.723.158,00)	42,56	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	170.276.842,00	(229.723.158,00)	42,56	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	900.000.000,00	823.128.490,00	(76.871.510,00)	91,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	900.000.000,00	823.128.490,00	(76.871.510,00)	91,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN PROVINSI	900.000.000,00	823.128.490,00	(76.871.510,00)	91,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	900.000.000,00	823.128.490,00	(76.871.510,00)	91,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.162.800,00	(4.837.200,00)	67,75	
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	885.000.000,00	812.965.690,00	(72.034.310,00)	91,86	
				JUMLAH BELANJA	34.233.552.898,77	30.825.231.377,04	(3.408.321.521,73)	90,04	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(34.233.552.898,77)	(30.825.231.377,04)	3.408.321.521,73	90,04	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(34.233.552.898,77)	(30.825.231.377,04)	3.408.321.521,73	90,04	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000		5	BELANJA DAERAH	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	(667.554.608,69)	95,46	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.669.551.179,51	11.157.859.636,00	(511.691.543,51)	95,61	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	171.947.808,65	145.380.540,00	(26.567.268,65)	84,54	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	73.072.000,00	64.058.131,00	(9.013.869,00)	87,66	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.072.000,00	64.058.131,00	(9.013.869,00)	87,66	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.072.000,00	64.058.131,00	(9.013.869,00)	87,66	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	83.862.208,65	72.341.649,00	(11.520.559,65)	86,26	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	83.862.208,65	72.341.649,00	(11.520.559,65)	86,26	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.862.208,65	72.341.649,00	(11.520.559,65)	86,26	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.013.600,00	8.980.760,00	(6.032.840,00)	59,81	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.013.600,00	8.980.760,00	(6.032.840,00)	59,81	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.013.600,00	8.980.760,00	(6.032.840,00)	59,81	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.890.362.380,64	8.557.153.188,00	(333.209.192,64)	96,25	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.489.443.380,64	8.184.419.188,00	(305.024.192,64)	96,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.489.443.380,64	8.184.419.188,00	(305.024.192,64)	96,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.489.443.380,64	8.184.419.188,00	(305.024.192,64)	96,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	400.919.000,00	372.734.000,00	(28.185.000,00)	92,96	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	400.919.000,00	372.734.000,00	(28.185.000,00)	92,96	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.919.000,00	372.734.000,00	(28.185.000,00)	92,96	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	512.412.260,00	484.566.745,00	(27.845.515,00)	94,56	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	280.315.700,00	270.388.395,00	(9.927.305,00)	96,45	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	280.315.700,00	270.388.395,00	(9.927.305,00)	96,45	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.315.700,00	270.388.395,00	(9.927.305,00)	96,45	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	219.096.560,00	201.192.460,00	(17.904.100,00)	91,82	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	219.096.560,00	201.192.460,00	(17.904.100,00)	91,82	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.096.560,00	201.192.460,00	(17.904.100,00)	91,82	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	13.000.000,00	12.985.890,00	(14.110,00)	99,89	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.985.890,00	(14.110,00)	99,89	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.985.890,00	(14.110,00)	99,89	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.013.655.360,22	1.893.737.592,00	(119.917.768,22)	94,04	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	63.707.836,00	63.707.836,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.707.836,00	63.707.836,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.707.836,00	63.707.836,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	570.398.240,22	543.327.707,00	(27.070.533,22)	95,25	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	570.398.240,22	543.327.707,00	(27.070.533,22)	95,25	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.398.240,22	543.327.707,00	(27.070.533,22)	95,25	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	44.000.000,00	43.450.000,00	(550.000,00)	98,75	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.000.000,00	43.450.000,00	(550.000,00)	98,75	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	43.450.000,00	(550.000,00)	98,75	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.335.549.284,00	1.243.252.049,00	(92.297.235,00)	93,08	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.335.549.284,00	1.243.252.049,00	(92.297.235,00)	93,08	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.549.284,00	1.243.252.049,00	(92.297.235,00)	93,08	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	81.173.370,00	77.021.571,00	(4.151.799,00)	94,88	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	62.833.370,00	58.888.988,00	(3.944.382,00)	93,72	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.833.370,00	58.888.988,00	(3.944.382,00)	93,72	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.833.370,00	58.888.988,00	(3.944.382,00)	93,72	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	18.340.000,00	18.132.583,00	(207.417,00)	98,86	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.340.000,00	18.132.583,00	(207.417,00)	98,86	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.340.000,00	18.132.583,00	(207.417,00)	98,86	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.948.428.405,00	1.932.034.295,00	(16.394.110,00)	99,15	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	304.907.385,00	291.696.276,00	(13.211.109,00)	95,66	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	213.890.000,00	213.750.000,00	(140.000,00)	99,93	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	213.890.000,00	213.750.000,00	(140.000,00)	99,93	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.890.000,00	213.750.000,00	(140.000,00)	99,93	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	91.017.385,00	77.946.276,00	(13.071.109,00)	85,63	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	91.017.385,00	77.946.276,00	(13.071.109,00)	85,63	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.017.385,00	77.946.276,00	(13.071.109,00)	85,63	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02		PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI	298.607.520,00	297.273.686,00	(1.333.834,00)	99,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	298.607.520,00	297.273.686,00	(1.333.834,00)	99,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	298.607.520,00	297.273.686,00	(1.333.834,00)	99,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.607.520,00	297.273.686,00	(1.333.834,00)	99,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03		PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	1.344.913.500,00	1.343.064.333,00	(1.849.167,00)	99,86	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN LEMBAGA ADAT	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT	244.913.500,00	243.064.333,00	(1.849.167,00)	99,24	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	244.913.500,00	243.064.333,00	(1.849.167,00)	99,24	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.913.500,00	243.064.333,00	(1.849.167,00)	99,24	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0003		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0003	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	717.890.436,83	587.479.841,00	(130.410.595,83)	81,83	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01		PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	717.890.436,83	587.479.841,00	(130.410.595,83)	81,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0002		STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN	20.699.258,83	19.400.000,00	(1.299.258,83)	93,72	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.699.258,83	19.400.000,00	(1.299.258,83)	93,72	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.699.258,83	19.400.000,00	(1.299.258,83)	93,72	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	697.191.178,00	568.079.841,00	(129.111.337,00)	81,48	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	697.191.178,00	568.079.841,00	(129.111.337,00)	81,48	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.191.178,00	168.079.841,00	(129.111.337,00)	56,55	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	198.972.165,66	196.442.806,31	(2.529.359,35)	98,72	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.01		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI	4.588.910,00	3.600.000,00	(988.910,00)	78,45	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.01.0002		PENETAPAN CAGAR BUDAYA	4.588.910,00	3.600.000,00	(988.910,00)	78,45	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.588.910,00	3.600.000,00	(988.910,00)	78,45	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.588.910,00	3.600.000,00	(988.910,00)	78,45	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI	194.383.255,66	192.842.806,31	(1.540.449,35)	99,20	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0001		PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	137.801.567,00	136.367.760,31	(1.433.806,69)	98,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	137.801.567,00	136.367.760,31	(1.433.806,69)	98,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.801.567,00	136.367.760,31	(1.433.806,69)	98,95	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0004		PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PELESTARI CAGAR BUDAYA	56.581.688,66	56.475.046,00	(106.642,66)	99,81	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	56.581.688,66	56.475.046,00	(106.642,66)	99,81	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.581.688,66	56.475.046,00	(106.642,66)	99,81	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	190.579.784,00	184.050.784,00	(6.529.000,00)	96,57	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01		PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI	190.579.784,00	184.050.784,00	(6.529.000,00)	96,57	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01.0004		PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	190.579.784,00	184.050.784,00	(6.529.000,00)	96,57	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	65.579.784,00	59.064.784,00	(6.515.000,00)	90,06	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.579.784,00	59.064.784,00	(6.515.000,00)	90,06	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	124.986.000,00	(14.000,00)	99,98	
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01.0004	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125.000.000,00	124.986.000,00	(14.000,00)	99,98	
				JUMLAH BELANJA	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	(667.554.608,69)	95,46	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(14.725.421.971,00)	(14.057.867.362,31)	667.554.608,69	95,46	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.725.421.971,00)	(14.057.867.362,31)	667.554.608,69	95,46	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000		5	BELANJA DAERAH	21.308.335.398,00	20.310.524.816,40	(997.810.581,60)	95,31	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.089.942.761,00	18.585.433.829,40	(504.508.931,60)	97,35	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	173.123.329,00	166.244.612,00	(6.878.717,00)	96,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	105.777.189,00	100.986.712,00	(4.790.477,00)	95,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	105.777.189,00	100.986.712,00	(4.790.477,00)	95,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.777.189,00	100.986.712,00	(4.790.477,00)	95,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	67.346.140,00	65.257.900,00	(2.088.240,00)	96,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	67.346.140,00	65.257.900,00	(2.088.240,00)	96,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.346.140,00	65.257.900,00	(2.088.240,00)	96,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.026.871.066,00	14.705.311.670,00	(321.559.396,00)	97,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14.600.995.842,00	14.304.233.670,00	(296.762.172,00)	97,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.600.995.842,00	14.304.233.670,00	(296.762.172,00)	97,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	14.600.995.842,00	14.304.233.670,00	(296.762.172,00)	97,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	425.875.224,00	401.078.000,00	(24.797.224,00)	94,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	425.875.224,00	401.078.000,00	(24.797.224,00)	94,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.875.224,00	401.078.000,00	(24.797.224,00)	94,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	469.830.577,00	408.491.725,00	(61.338.852,00)	86,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	27.533.600,00	27.028.500,00	(505.100,00)	98,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.533.600,00	27.028.500,00	(505.100,00)	98,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.533.600,00	27.028.500,00	(505.100,00)	98,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	92.562.100,00	44.222.200,00	(48.339.900,00)	47,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	92.562.100,00	44.222.200,00	(48.339.900,00)	47,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.562.100,00	44.222.200,00	(48.339.900,00)	47,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	111.484.396,00	103.741.161,00	(7.743.235,00)	93,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	111.484.396,00	103.741.161,00	(7.743.235,00)	93,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.484.396,00	103.741.161,00	(7.743.235,00)	93,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.971.600,00	21.800.700,00	(1.170.900,00)	94,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.971.600,00	21.800.700,00	(1.170.900,00)	94,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.971.600,00	21.800.700,00	(1.170.900,00)	94,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.960.000,00	9.930.000,00	(30.000,00)	99,69	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.960.000,00	9.930.000,00	(30.000,00)	99,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.960.000,00	9.930.000,00	(30.000,00)	99,69	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	178.682.581,00	175.650.064,00	(3.032.517,00)	98,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	178.682.581,00	175.650.064,00	(3.032.517,00)	98,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.682.581,00	175.650.064,00	(3.032.517,00)	98,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	26.636.300,00	26.119.100,00	(517.200,00)	98,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	26.636.300,00	26.119.100,00	(517.200,00)	98,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.636.300,00	26.119.100,00	(517.200,00)	98,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.107.987.812,00	2.999.423.312,00	(108.564.500,00)	96,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.744.100,00	3.740.000,00	(4.100,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.744.100,00	3.740.000,00	(4.100,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.744.100,00	3.740.000,00	(4.100,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	960.184.280,00	905.250.737,00	(54.933.543,00)	94,27	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	960.184.280,00	905.250.737,00	(54.933.543,00)	94,27	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.184.280,00	905.250.737,00	(54.933.543,00)	94,27	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.144.059.432,00	2.090.432.575,00	(53.626.857,00)	97,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.144.059.432,00	2.090.432.575,00	(53.626.857,00)	97,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.144.059.432,00	2.090.432.575,00	(53.626.857,00)	97,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	312.129.977,00	305.962.510,40	(6.167.466,60)	98,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	195.610.586,00	194.441.420,00	(1.169.166,00)	99,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	195.610.586,00	194.441.420,00	(1.169.166,00)	99,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.610.586,00	194.441.420,00	(1.169.166,00)	99,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	43.155.291,00	43.155.290,40	(0,60)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	43.155.291,00	43.155.290,40	(0,60)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.155.291,00	43.155.290,40	(0,60)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	73.364.100,00	68.365.800,00	(4.998.300,00)	93,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	73.364.100,00	68.365.800,00	(4.998.300,00)	93,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.364.100,00	68.365.800,00	(4.998.300,00)	93,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.177.602.637,00	1.688.357.812,00	(489.244.825,00)	77,53	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	1.582.945.037,00	1.143.014.428,00	(439.930.609,00)	72,20	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0003		PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT PROVINSI	602.248.000,00	575.630.935,00	(26.617.065,00)	95,58	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	602.248.000,00	575.630.935,00	(26.617.065,00)	95,58	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.248.000,00	575.630.935,00	(26.617.065,00)	95,58	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0006		PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	165.135.800,00	153.894.100,00	(11.241.700,00)	93,19	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	165.135.800,00	153.894.100,00	(11.241.700,00)	93,19	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.135.800,00	153.894.100,00	(11.241.700,00)	93,19	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007		PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	702.785.237,00	305.553.235,00	(397.232.002,00)	43,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	433.863.987,00	149.606.700,00	(284.257.287,00)	34,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.863.987,00	149.606.700,00	(284.257.287,00)	34,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	268.921.250,00	155.946.535,00	(112.974.715,00)	57,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.921.250,00	0,00	(3.921.250,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	265.000.000,00	155.946.535,00	(109.053.465,00)	58,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0009		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	20.000.000,00	17.467.908,00	(2.532.092,00)	87,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.467.908,00	(2.532.092,00)	87,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.467.908,00	(2.532.092,00)	87,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0015		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	92.776.000,00	90.468.250,00	(2.307.750,00)	97,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	92.776.000,00	90.468.250,00	(2.307.750,00)	97,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.776.000,00	90.468.250,00	(2.307.750,00)	97,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI	594.657.600,00	545.343.384,00	(49.314.216,00)	91,70	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0001		SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	59.000.000,00	56.611.053,00	(2.388.947,00)	95,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.000.000,00	56.611.053,00	(2.388.947,00)	95,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	56.611.053,00	(2.388.947,00)	95,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0002		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	49.400.000,00	47.377.500,00	(2.022.500,00)	95,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.400.000,00	47.377.500,00	(2.022.500,00)	95,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.400.000,00	47.377.500,00	(2.022.500,00)	95,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0003		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	433.600.000,00	391.317.831,00	(42.282.169,00)	90,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	433.600.000,00	391.317.831,00	(42.282.169,00)	90,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.600.000,00	391.317.831,00	(42.282.169,00)	90,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0004		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	52.657.600,00	50.037.000,00	(2.620.600,00)	95,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.657.600,00	50.037.000,00	(2.620.600,00)	95,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.657.600,00	50.037.000,00	(2.620.600,00)	95,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	40.790.000,00	36.733.175,00	(4.056.825,00)	90,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03		PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH PROVINSI	40.790.000,00	36.733.175,00	(4.056.825,00)	90,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0003		PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN DAN PENGALIHMEDIAAN NASKAH KUNO YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT UNTUK DILESTARIKAN DAN DIDAYAGUNAKAN	30.790.000,00	27.123.800,00	(3.666.200,00)	88,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.790.000,00	27.123.800,00	(3.666.200,00)	88,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.790.000,00	27.123.800,00	(3.666.200,00)	88,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0004		PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN, DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO	10.000.000,00	9.609.375,00	(390.625,00)	96,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.609.375,00	(390.625,00)	96,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.609.375,00	(390.625,00)	96,09	
				JUMLAH BELANJA	21.308.335.398,00	20.310.524.816,40	(997.810.581,60)	95,31	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(21.308.335.398,00)	(20.310.524.816,40)	997.810.581,60	95,31	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(21.308.335.398,00)	(20.310.524.816,40)	997.810.581,60	95,31	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000		5	BELANJA DAERAH	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI	122.275.400,00	107.764.021,00	(14.511.379,00)	88,13	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01.0012		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEARSIPAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	122.275.400,00	107.764.021,00	(14.511.379,00)	88,13	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	122.275.400,00	107.764.021,00	(14.511.379,00)	88,13	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.275.400,00	107.764.021,00	(14.511.379,00)	88,13	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.03		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN DALAM SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI	7.583.100,00	6.879.410,00	(703.690,00)	90,72	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.03.0001		PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH PROVINSI MELALUI JIKN	7.583.100,00	6.879.410,00	(703.690,00)	90,72	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.583.100,00	6.879.410,00	(703.690,00)	90,72	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.583.100,00	6.879.410,00	(703.690,00)	90,72	
				JUMLAH BELANJA	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(129.858.500,00)	(114.643.431,00)	15.215.069,00	88,28	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(129.858.500,00)	(114.643.431,00)	15.215.069,00	88,28	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.0.00.0.00.19.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81	
	3.25.0.00.0.00.19.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81	
	3.25.0.00.0.00.19.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	836.000.000,00	778.060.135,00	(57.939.865,00)	93,06	
	3.25.0.00.0.00.19.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.448.400,00	100.448.400,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		5	BELANJA DAERAH	54.164.879.734,00	52.349.880.797,92	(1.814.998.936,08)	96,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.708.156.347,75	35.613.298.611,00	(1.094.857.736,75)	97,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	185.528.146,76	181.692.315,00	(3.835.831,76)	97,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	151.325.300,02	149.821.015,00	(1.504.285,02)	99,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	151.325.300,02	149.821.015,00	(1.504.285,02)	99,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.325.300,02	149.821.015,00	(1.504.285,02)	99,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.443.974,04	9.146.600,00	(2.297.374,04)	79,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.443.974,04	9.146.600,00	(2.297.374,04)	79,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.443.974,04	9.146.600,00	(2.297.374,04)	79,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.758.872,70	22.724.700,00	(34.172,70)	99,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.758.872,70	22.724.700,00	(34.172,70)	99,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.758.872,70	22.724.700,00	(34.172,70)	99,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	30.989.403.553,00	30.057.999.270,00	(931.404.283,00)	96,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	29.879.634.853,00	28.979.693.270,00	(899.941.583,00)	96,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.879.634.853,00	28.979.693.270,00	(899.941.583,00)	96,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	29.879.634.853,00	28.979.693.270,00	(899.941.583,00)	96,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1.109.768.700,00	1.078.306.000,00	(31.462.700,00)	97,16	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.109.768.700,00	1.078.306.000,00	(31.462.700,00)	97,16	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.109.768.700,00	1.078.306.000,00	(31.462.700,00)	97,16	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	37.624.000,00	32.918.800,00	(4.705.200,00)	87,49	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	37.624.000,00	32.918.800,00	(4.705.200,00)	87,49	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.624.000,00	32.918.800,00	(4.705.200,00)	87,49	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.624.000,00	32.918.800,00	(4.705.200,00)	87,49	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	764.902.875,98	749.594.090,00	(15.308.785,98)	97,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	27.205.900,00	27.172.956,00	(32.944,00)	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.122.000,00	7.120.000,00	(2.000,00)	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.122.000,00	7.120.000,00	(2.000,00)	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	20.083.900,00	20.052.956,00	(30.944,00)	99,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.083.900,00	20.052.956,00	(30.944,00)	99,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	211.950.880,98	202.891.481,00	(9.059.399,98)	95,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	200.200.880,98	191.141.481,00	(9.059.399,98)	95,47	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.200.880,98	191.141.481,00	(9.059.399,98)	95,47	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	17.000.000,00	16.575.000,00	(425.000,00)	97,50	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.575.000,00	(425.000,00)	97,50	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.575.000,00	(425.000,00)	97,50	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	508.746.095,00	502.954.653,00	(5.791.442,00)	98,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	508.746.095,00	502.954.653,00	(5.791.442,00)	98,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.746.095,00	502.954.653,00	(5.791.442,00)	98,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	147.724.040,00	143.235.480,00	(4.488.560,00)	96,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	147.724.040,00	143.235.480,00	(4.488.560,00)	96,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	147.724.040,00	143.235.480,00	(4.488.560,00)	96,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.724.040,00	143.235.480,00	(4.488.560,00)	96,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.910.873.920,01	3.808.918.661,00	(101.955.259,01)	97,39	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	909.778.912,00	859.994.942,00	(49.783.970,00)	94,52	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	909.778.912,00	859.994.942,00	(49.783.970,00)	94,52	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.778.912,00	859.994.942,00	(49.783.970,00)	94,52	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.001.095.008,01	2.948.923.719,00	(52.171.289,01)	98,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.001.095.008,01	2.948.923.719,00	(52.171.289,01)	98,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.001.095.008,01	2.948.923.719,00	(52.171.289,01)	98,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	672.099.812,00	638.939.995,00	(33.159.817,00)	95,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	189.797.462,00	179.057.459,00	(10.740.003,00)	94,34	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	189.797.462,00	179.057.459,00	(10.740.003,00)	94,34	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.797.462,00	179.057.459,00	(10.740.003,00)	94,34	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	361.512.500,00	346.722.502,00	(14.789.998,00)	95,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	361.512.500,00	346.722.502,00	(14.789.998,00)	95,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.512.500,00	346.722.502,00	(14.789.998,00)	95,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	120.789.850,00	113.160.034,00	(7.629.816,00)	93,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	120.789.850,00	113.160.034,00	(7.629.816,00)	93,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.789.850,00	113.160.034,00	(7.629.816,00)	93,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	257.192.505,46	250.764.855,00	(6.427.650,46)	97,50	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.01		PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI	26.722.605,46	21.794.955,00	(4.927.650,46)	81,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.01.0002		PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BERDASARKAN PENETAPAN DARI PEMERINTAH PUSAT	26.722.605,46	21.794.955,00	(4.927.650,46)	81,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.722.605,46	21.794.955,00	(4.927.650,46)	81,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.722.605,46	21.794.955,00	(4.927.650,46)	81,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02		PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02.0007		PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.03		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	205.209.900,00	203.709.900,00	(1.500.000,00)	99,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.03.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	205.209.900,00	203.709.900,00	(1.500.000,00)	99,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	205.209.900,00	203.709.900,00	(1.500.000,00)	99,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.209.900,00	203.709.900,00	(1.500.000,00)	99,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.496.177.809,12	12.947.287.223,12	(548.890.586,00)	95,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01		PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL	12.814.608.014,12	12.291.810.712,00	(522.797.302,12)	95,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	6.768.192.500,00	6.558.772.384,00	(209.420.116,00)	96,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.768.192.500,00	6.558.772.384,00	(209.420.116,00)	96,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.768.192.500,00	6.558.772.384,00	(209.420.116,00)	96,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0010		PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	6.046.415.514,12	5.733.038.328,00	(313.377.186,12)	94,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.046.415.514,12	5.733.038.328,00	(313.377.186,12)	94,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.541.894,12	470.002.448,00	(24.539.446,12)	95,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0010	5.1.05	Belanja Hibah	5.551.873.620,00	5.263.035.880,00	(288.837.740,00)	94,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03		PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT	33.350.800,00	32.710.560,00	(640.240,00)	98,08	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03.0004		REKOMENDASI PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN UNTUK KAPAL UKURAN DIATAS 5 GT - 30 GT DAN BEROPERASI SAMPAI DENGAN 12 MIL	33.350.800,00	32.710.560,00	(640.240,00)	98,08	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.350.800,00	32.710.560,00	(640.240,00)	98,08	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.350.800,00	32.710.560,00	(640.240,00)	98,08	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06		PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI	648.218.995,00	622.765.951,12	(25.453.043,88)	96,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0002		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN	546.524.595,00	541.593.951,12	(4.930.643,88)	99,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	546.524.595,00	541.593.951,12	(4.930.643,88)	99,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.524.595,00	541.593.951,12	(4.930.643,88)	99,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0003		PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN	101.694.400,00	81.172.000,00	(20.522.400,00)	79,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	98.888.400,00	81.172.000,00	(17.716.400,00)	82,08	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.888.400,00	81.172.000,00	(17.716.400,00)	82,08	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.806.000,00	0,00	(2.806.000,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.806.000,00	0,00	(2.806.000,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.887.067.836,00	2.746.081.044,80	(140.986.791,20)	95,11	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.04		PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DI LAUT DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	33.395.733,00	33.395.733,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.04.0002		PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DI LAUT DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	33.395.733,00	33.395.733,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.395.733,00	33.395.733,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.395.733,00	33.395.733,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT	2.853.672.103,00	2.712.685.311,80	(140.986.791,20)	95,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0001		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.724.500,00	16.480.700,00	(1.243.800,00)	92,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.724.500,00	16.480.700,00	(1.243.800,00)	92,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.724.500,00	16.480.700,00	(1.243.800,00)	92,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002		PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT	1.088.973.034,00	1.055.660.525,80	(33.312.508,20)	96,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	971.852.334,00	939.684.110,80	(32.168.223,20)	96,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	971.852.334,00	939.684.110,80	(32.168.223,20)	96,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002	5.2	BELANJA MODAL	117.120.700,00	115.976.415,00	(1.144.285,00)	99,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.120.700,00	115.976.415,00	(1.144.285,00)	99,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT	1.111.987.230,00	1.062.046.100,00	(49.941.130,00)	95,50	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.104.987.230,00	1.055.046.100,00	(49.941.130,00)	95,48	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.047.230,00	95.275.100,00	(9.772.130,00)	90,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004	5.1.05	Belanja Hibah	999.940.000,00	959.771.000,00	(40.169.000,00)	95,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0012		PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	626.419.539,00	571.110.486,00	(55.309.053,00)	91,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0012	5.1	BELANJA OPERASI	626.419.539,00	571.110.486,00	(55.309.053,00)	91,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.118.143,00	77.504.231,00	(14.613.912,00)	84,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0012	5.1.05	Belanja Hibah	534.301.396,00	493.606.255,00	(40.695.141,00)	92,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0013		MONITORING KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DI LAUT DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.567.800,00	7.387.500,00	(1.180.300,00)	86,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0013	5.1	BELANJA OPERASI	8.567.800,00	7.387.500,00	(1.180.300,00)	86,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.567.800,00	7.387.500,00	(1.180.300,00)	86,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	689.204.554,99	669.728.925,00	(19.475.629,99)	97,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01		PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL	689.204.554,99	669.728.925,00	(19.475.629,99)	97,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0010		OPERASI KAPAL PENGAWAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	331.812.064,99	325.024.308,00	(6.787.756,99)	97,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	302.942.064,99	296.154.308,00	(6.787.756,99)	97,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.942.064,99	296.154.308,00	(6.787.756,99)	97,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	28.870.000,00	28.870.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.870.000,00	28.870.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0014		PENGAWASAN USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU USAHA PENGANGKUTAN IKAN SAMPAI DENGAN 12 MIL SESUAI KEWENANGAN PROVINSI	219.390.022,00	219.294.652,00	(95.370,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	219.390.022,00	219.294.652,00	(95.370,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.390.022,00	219.294.652,00	(95.370,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0016		PENGAWASAN USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN KEWENANGAN PROVINSI	135.452.468,00	122.859.965,00	(12.592.503,00)	90,70	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	135.452.468,00	122.859.965,00	(12.592.503,00)	90,70	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.452.468,00	122.859.965,00	(12.592.503,00)	90,70	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0017		PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	127.080.680,68	122.720.139,00	(4.360.541,68)	96,56	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.01		PENERBITAN IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	57.083.886,00	55.092.632,00	(1.991.254,00)	96,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.01.0007		PENERBITAN REKOMENDASI PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUBSEKTOR PENGOLAHAN IKAN DAN SUBSEKTOR PEMASARAN IKAN SKALA USAHA MENENGAH DAN BESAR	57.083.886,00	55.092.632,00	(1.991.254,00)	96,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	57.083.886,00	55.092.632,00	(1.991.254,00)	96,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.083.886,00	55.092.632,00	(1.991.254,00)	96,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02		PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR	69.996.794,68	67.627.507,00	(2.369.287,68)	96,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0003		PELAKSANAAN PEMBINAAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI TERHADAP MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, DAN DAYA SAING SERTA PEMBERDAYAAN USAHA DALAM RANGKA MENGHASILKAN PRODUK YANG AMAN DAN BERMUTU UNTUK DIKONSUMSI ATAU DIGUNAKAN, DAN BERDAYA SAING	69.996.794,68	67.627.507,00	(2.369.287,68)	96,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	69.996.794,68	67.627.507,00	(2.369.287,68)	96,61	
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.996.794,68	67.627.507,00	(2.369.287,68)	96,61	
				JUMLAH BELANJA	54.164.879.734,00	52.349.880.797,92	(1.814.998.936,08)	96,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.228.431.334,00)	(51.471.372.262,92)	1.757.059.071,08	96,69	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(53.228.431.334,00)	(51.471.372.262,92)	1.757.059.071,08	96,69	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Pariwisata

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	(2.685.972.896,00)	88,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.439.744.552,00	12.952.160.365,00	(487.584.187,00)	96,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	132.265.002,00	123.643.131,00	(8.621.871,00)	93,48	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	119.816.872,00	112.430.883,00	(7.385.989,00)	93,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	119.816.872,00	112.430.883,00	(7.385.989,00)	93,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.816.872,00	112.430.883,00	(7.385.989,00)	93,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	12.448.130,00	11.212.248,00	(1.235.882,00)	90,07	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.448.130,00	11.212.248,00	(1.235.882,00)	90,07	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.448.130,00	11.212.248,00	(1.235.882,00)	90,07	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.058.176.404,00	10.722.773.204,00	(335.403.200,00)	96,96	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.547.538.404,00	10.235.310.166,00	(312.228.238,00)	97,03	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.547.538.404,00	10.235.310.166,00	(312.228.238,00)	97,03	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.547.438.404,00	10.235.310.166,00	(312.128.238,00)	97,04	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	500.638.000,00	479.826.000,00	(20.812.000,00)	95,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	500.638.000,00	479.826.000,00	(20.812.000,00)	95,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.638.000,00	479.826.000,00	(20.812.000,00)	95,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	10.000.000,00	7.637.038,00	(2.362.962,00)	76,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.637.038,00	(2.362.962,00)	76,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.637.038,00	(2.362.962,00)	76,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.036.981.737,00	947.570.902,00	(89.410.835,00)	91,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	261.667.700,00	215.418.113,00	(46.249.587,00)	82,32	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	261.667.700,00	215.418.113,00	(46.249.587,00)	82,32	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.667.700,00	215.418.113,00	(46.249.587,00)	82,32	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	349.344.332,00	316.345.506,00	(32.998.826,00)	90,55	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	349.344.332,00	316.345.506,00	(32.998.826,00)	90,55	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.344.332,00	316.345.506,00	(32.998.826,00)	90,55	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	425.969.705,00	415.807.283,00	(10.162.422,00)	97,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	425.969.705,00	415.807.283,00	(10.162.422,00)	97,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.969.705,00	415.807.283,00	(10.162.422,00)	97,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.008.121.409,00	967.762.396,00	(40.359.013,00)	95,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	38.440.000,00	22.521.237,00	(15.918.763,00)	58,58	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.440.000,00	22.521.237,00	(15.918.763,00)	58,58	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.440.000,00	22.521.237,00	(15.918.763,00)	58,58	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	956.681.409,00	932.241.159,00	(24.440.250,00)	97,44	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	956.681.409,00	932.241.159,00	(24.440.250,00)	97,44	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	956.681.409,00	932.241.159,00	(24.440.250,00)	97,44	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	204.200.000,00	190.410.732,00	(13.789.268,00)	93,24	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	50.400.000,00	50.074.184,00	(325.816,00)	99,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.400.000,00	50.074.184,00	(325.816,00)	99,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	50.074.184,00	(325.816,00)	99,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	129.780.000,00	121.776.546,00	(8.003.454,00)	93,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	129.780.000,00	121.776.546,00	(8.003.454,00)	93,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.780.000,00	121.776.546,00	(8.003.454,00)	93,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	24.020.000,00	18.560.002,00	(5.459.998,00)	77,26	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.020.000,00	18.560.002,00	(5.459.998,00)	77,26	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.020.000,00	18.560.002,00	(5.459.998,00)	77,26	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	220.725.000,00	220.725.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI	220.725.000,00	220.725.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0009		PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI	220.725.000,00	220.725.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	220.725.000,00	220.725.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.725.000,00	220.725.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	7.758.633.839,00	5.647.330.979,00	(2.111.302.860,00)	72,78	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI	7.758.633.839,00	5.647.330.979,00	(2.111.302.860,00)	72,78	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001		PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	1.791.599.129,00	926.608.040,00	(864.991.089,00)	51,71	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.791.599.129,00	926.608.040,00	(864.991.089,00)	51,71	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.791.599.129,00	926.608.040,00	(864.991.089,00)	51,71	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	5.967.034.710,00	4.720.722.939,00	(1.246.311.771,00)	79,11	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.967.034.710,00	4.720.722.939,00	(1.246.311.771,00)	79,11	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.967.034.710,00	4.720.722.939,00	(1.246.311.771,00)	79,11	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.307.813.811,00	1.253.032.729,00	(54.781.082,00)	95,81	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02		PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFÂ	1.307.813.811,00	1.253.032.729,00	(54.781.082,00)	95,81	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0008		PERLINDUNGAN HASIL KREATIVITAS	20.402.000,00	20.271.600,00	(130.400,00)	99,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	20.402.000,00	20.271.600,00	(130.400,00)	99,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.402.000,00	20.271.600,00	(130.400,00)	99,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0014		PENDUKUNGAN PEMASARAN EKONOMI KREATIF	1.227.778.351,00	1.173.127.779,00	(54.650.572,00)	95,54	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.227.778.351,00	1.173.127.779,00	(54.650.572,00)	95,54	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.227.778.351,00	1.173.127.779,00	(54.650.572,00)	95,54	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0018		FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	59.633.460,00	59.633.350,00	(110,00)	99,99	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	59.633.460,00	59.633.350,00	(110,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.633.460,00	59.633.350,00	(110,00)	99,99	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	359.750.700,00	327.445.933,00	(32.304.767,00)	91,02	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT LANJUTAN	359.750.700,00	327.445.933,00	(32.304.767,00)	91,02	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0004		FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA	91.362.000,00	83.676.963,00	(7.685.037,00)	91,58	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	91.362.000,00	83.676.963,00	(7.685.037,00)	91,58	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.362.000,00	83.676.963,00	(7.685.037,00)	91,58	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0008		FASILITASI PROSES KREASI, PRODUKSI, DISTRIBUSI KONSUMSI, DAN KONSERVASI EKONOMI KREATIF	72.257.400,00	62.953.000,00	(9.304.400,00)	87,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	72.257.400,00	62.953.000,00	(9.304.400,00)	87,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.257.400,00	62.953.000,00	(9.304.400,00)	87,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0014		PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA	82.674.000,00	76.251.770,00	(6.422.230,00)	92,23	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	82.674.000,00	76.251.770,00	(6.422.230,00)	92,23	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.674.000,00	76.251.770,00	(6.422.230,00)	92,23	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0017		PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	89.944.000,00	83.069.200,00	(6.874.800,00)	92,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	89.944.000,00	83.069.200,00	(6.874.800,00)	92,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.944.000,00	83.069.200,00	(6.874.800,00)	92,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0018		MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	23.513.300,00	21.495.000,00	(2.018.300,00)	91,41	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	23.513.300,00	21.495.000,00	(2.018.300,00)	91,41	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.513.300,00	21.495.000,00	(2.018.300,00)	91,41	
				JUMLAH BELANJA	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	(2.685.972.896,00)	88,36	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(23.086.667.902,00)	(20.400.695.006,00)	2.685.972.896,00	88,36	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(23.086.667.902,00)	(20.400.695.006,00)	2.685.972.896,00	88,36	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Organisasi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.29.0.00.0.00.20.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00	
	3.29.0.00.0.00.20.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00	
	3.29.0.00.0.00.20.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		5	BELANJA DAERAH	46.006.620.418,00	37.517.314.104,93	(8.489.306.313,07)	81,54	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.344.547.775,00	11.764.117.895,00	(580.429.880,00)	95,29	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	143.494.210,44	142.333.400,00	(1.160.810,44)	99,19	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	61.751.380,44	61.360.400,00	(390.980,44)	99,36	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.751.380,44	61.360.400,00	(390.980,44)	99,36	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.751.380,44	61.360.400,00	(390.980,44)	99,36	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	31.780.030,00	31.538.200,00	(241.830,00)	99,23	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.780.030,00	31.538.200,00	(241.830,00)	99,23	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.780.030,00	31.538.200,00	(241.830,00)	99,23	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	49.962.800,00	49.434.800,00	(528.000,00)	98,94	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	49.962.800,00	49.434.800,00	(528.000,00)	98,94	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.962.800,00	49.434.800,00	(528.000,00)	98,94	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.766.016.221,92	10.341.064.764,00	(424.951.457,92)	96,05	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.324.028.859,76	9.922.255.246,00	(401.773.613,76)	96,10	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.324.028.859,76	9.922.255.246,00	(401.773.613,76)	96,10	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.324.028.859,76	9.922.255.246,00	(401.773.613,76)	96,10	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	378.369.920,00	355.644.000,00	(22.725.920,00)	93,99	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	378.369.920,00	355.644.000,00	(22.725.920,00)	93,99	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.369.920,00	355.644.000,00	(22.725.920,00)	93,99	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	63.617.442,16	63.165.518,00	(451.924,16)	99,28	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	63.617.442,16	63.165.518,00	(451.924,16)	99,28	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.617.442,16	63.165.518,00	(451.924,16)	99,28	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	4.016.000,00	3.496.500,00	(519.500,00)	87,06	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	4.016.000,00	3.496.500,00	(519.500,00)	87,06	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.016.000,00	3.496.500,00	(519.500,00)	87,06	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.016.000,00	3.496.500,00	(519.500,00)	87,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	507.548.590,64	422.858.958,00	(84.689.632,64)	83,31	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	136.582.196,00	83.534.300,00	(53.047.896,00)	61,16	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.538,00	0,00	(680.538,00)	0,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.538,00	0,00	(680.538,00)	0,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	135.901.658,00	83.534.300,00	(52.367.358,00)	61,46	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.901.658,00	83.534.300,00	(52.367.358,00)	61,46	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.707.800,00	9.525.909,00	(181.891,00)	98,12	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.707.800,00	9.525.909,00	(181.891,00)	98,12	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.707.800,00	9.525.909,00	(181.891,00)	98,12	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	33.344.795,00	31.401.051,00	(1.943.744,00)	94,17	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.344.795,00	31.401.051,00	(1.943.744,00)	94,17	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.344.795,00	31.401.051,00	(1.943.744,00)	94,17	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	48.975.000,00	48.893.098,00	(81.902,00)	99,83	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	48.975.000,00	48.893.098,00	(81.902,00)	99,83	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.975.000,00	48.893.098,00	(81.902,00)	99,83	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	278.938.799,64	249.504.600,00	(29.434.199,64)	89,44	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	278.938.799,64	249.504.600,00	(29.434.199,64)	89,44	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.938.799,64	249.504.600,00	(29.434.199,64)	89,44	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	651.888.648,00	641.625.073,00	(10.263.575,00)	98,42	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	34.004.100,00	31.028.765,00	(2.975.335,00)	91,25	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.004.100,00	31.028.765,00	(2.975.335,00)	91,25	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.004.100,00	31.028.765,00	(2.975.335,00)	91,25	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	617.884.548,00	610.596.308,00	(7.288.240,00)	98,82	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	617.884.548,00	610.596.308,00	(7.288.240,00)	98,82	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	617.884.548,00	610.596.308,00	(7.288.240,00)	98,82	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	271.584.104,00	212.739.200,00	(58.844.904,00)	78,33	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	177.162.504,00	165.189.200,00	(11.973.304,00)	93,24	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	177.162.504,00	165.189.200,00	(11.973.304,00)	93,24	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.162.504,00	165.189.200,00	(11.973.304,00)	93,24	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	31.340.000,00	22.550.000,00	(8.790.000,00)	71,95	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.340.000,00	22.550.000,00	(8.790.000,00)	71,95	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.340.000,00	22.550.000,00	(8.790.000,00)	71,95	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	38.081.600,00	0,00	(38.081.600,00)	0,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	38.081.600,00	0,00	(38.081.600,00)	0,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.081.600,00	0,00	(38.081.600,00)	0,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	97.995.300,00	96.282.900,00	(1.712.400,00)	98,25	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.01		PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI	29.594.000,00	28.917.900,00	(676.100,00)	97,71	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.01.0001		PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH	29.594.000,00	28.917.900,00	(676.100,00)	97,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.594.000,00	28.917.900,00	(676.100,00)	97,71	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.594.000,00	28.917.900,00	(676.100,00)	97,71	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03		PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI	68.401.300,00	67.365.000,00	(1.036.300,00)	98,48	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0001		PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI NILAI PEROLEHAN AIR TANAH	42.880.000,00	41.843.700,00	(1.036.300,00)	97,58	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.880.000,00	41.843.700,00	(1.036.300,00)	97,58	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.880.000,00	41.843.700,00	(1.036.300,00)	97,58	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0003		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN AIR TANAH	25.521.300,00	25.521.300,00	0,00	100,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.521.300,00	25.521.300,00	0,00	100,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.521.300,00	25.521.300,00	0,00	100,00	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	620.047.000,00	606.354.000,00	(13.693.000,00)	97,79	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.16		PENETAPAN HARGA PATOKAN BATUAN	21.309.600,00	19.012.100,00	(2.297.500,00)	89,21	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.16.0002		PENENTUAN DAN PENETAPAN HARGA PATOKAN BATUAN	21.309.600,00	19.012.100,00	(2.297.500,00)	89,21	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.16.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.309.600,00	19.012.100,00	(2.297.500,00)	89,21	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.16.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.309.600,00	19.012.100,00	(2.297.500,00)	89,21	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.24		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN	598.737.400,00	587.341.900,00	(11.395.500,00)	98,09	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.24.0001		PEMBINAAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN	538.343.800,00	533.894.200,00	(4.449.600,00)	99,17	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.24.0001	5.1	BELANJA OPERASI	538.343.800,00	533.894.200,00	(4.449.600,00)	99,17	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.24.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.343.800,00	533.894.200,00	(4.449.600,00)	99,17	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.24.0007		PELAKSANAAN PENGAWASAN ATAS KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN TATA KELOLA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN	60.393.600,00	53.447.700,00	(6.945.900,00)	88,49	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.24.0007	5.1	BELANJA OPERASI	60.393.600,00	53.447.700,00	(6.945.900,00)	88,49	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.24.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.393.600,00	53.447.700,00	(6.945.900,00)	88,49	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	25.899.052.024,00	18.229.179.493,44	(7.669.872.530,56)	70,38	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07		PENGELOLAAN ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN BERUPA SINAR MATAHARI, ANGIN, ALIRAN DAN TERJUNAN AIR, GERAKAN DAN PERBEDAAN SUHU LAPISAN LAUT DALAM WILAYAH PROVINSI	25.589.819.624,00	18.123.254.493,44	(7.466.565.130,56)	70,82	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0007		PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN ANEKA EBT	24.234.413.050,00	16.859.755.920,00	(7.374.657.130,00)	69,56	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.468.402.650,00	4.336.745.520,00	(131.657.130,00)	97,05	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.468.402.650,00	4.336.745.520,00	(131.657.130,00)	97,05	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0007	5.2	BELANJA MODAL	19.766.010.400,00	12.523.010.400,00	(7.243.000.000,00)	63,35	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.766.010.400,00	12.523.010.400,00	(7.243.000.000,00)	63,35	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0009		PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR ANEKA EBT	1.355.406.574,00	1.263.498.573,44	(91.908.000,56)	93,21	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.355.406.574,00	1.263.498.573,44	(91.908.000,56)	93,21	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.355.406.574,00	1.263.498.573,44	(91.908.000,56)	93,21	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.10		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI YANG DILAKUKAN OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN DI TINGKAT DAERAH PROVINSI	309.232.400,00	105.925.000,00	(203.307.400,00)	34,25	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.10.0005		SOSIALISASI KONSERVASI ENERGI KEPADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	309.232.400,00	105.925.000,00	(203.307.400,00)	34,25	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.10.0005	5.1	BELANJA OPERASI	309.232.400,00	105.925.000,00	(203.307.400,00)	34,25	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.10.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.232.400,00	105.925.000,00	(203.307.400,00)	34,25	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	7.044.978.319,00	6.821.379.816,49	(223.598.502,51)	96,82	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01		PENATAUSAHAAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SERTA PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI	19.921.000,00	14.591.100,00	(5.329.900,00)	73,24	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0002		PENYUSUNAN REKOMENDASI PERIZINAN DAN INFORMASI IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SERTA PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI	7.761.000,00	5.415.800,00	(2.345.200,00)	69,78	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.761.000,00	5.415.800,00	(2.345.200,00)	69,78	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.761.000,00	5.415.800,00	(2.345.200,00)	69,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0003		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SERTA PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI	12.160.000,00	9.175.300,00	(2.984.700,00)	75,45	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.160.000,00	9.175.300,00	(2.984.700,00)	75,45	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.160.000,00	9.175.300,00	(2.984.700,00)	75,45	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02		PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI	19.426.000,00	16.348.600,00	(3.077.400,00)	84,15	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02.0001		PENETAPAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI	7.261.000,00	7.150.000,00	(111.000,00)	98,47	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.261.000,00	7.150.000,00	(111.000,00)	98,47	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.261.000,00	7.150.000,00	(111.000,00)	98,47	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02.0003		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI	12.165.000,00	9.198.600,00	(2.966.400,00)	75,61	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.165.000,00	9.198.600,00	(2.966.400,00)	75,61	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.165.000,00	9.198.600,00	(2.966.400,00)	75,61	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05		PENATAUSAHAAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BAGI BADAN USAHA DALAM NEGERI/MAYORITAS SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PENANAM MODAL DALAM NEGERI	14.434.000,00	11.364.200,00	(3.069.800,00)	78,73	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0002		PENYUSUNAN REKOMENDASI PERIZINAN DAN INFORMASI IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BAGI BADAN USAHA DALAM NEGERI/MAYORITAS SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PENANAM MODAL DALAM NEGERI	6.221.000,00	3.889.300,00	(2.331.700,00)	62,51	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.221.000,00	3.889.300,00	(2.331.700,00)	62,51	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.221.000,00	3.889.300,00	(2.331.700,00)	62,51	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0003		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BAGI BADAN USAHA DALAM NEGERI/MAYORITAS SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PENANAM MODAL DALAM NEGERI	8.213.000,00	7.474.900,00	(738.100,00)	91,01	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.213.000,00	7.474.900,00	(738.100,00)	91,01	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.213.000,00	7.474.900,00	(738.100,00)	91,01	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06		PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN	6.991.197.319,00	6.779.075.916,49	(212.121.402,51)	96,96	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0002		PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DARI KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU	313.944.400,00	225.570.200,00	(88.374.200,00)	71,85	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	313.944.400,00	225.570.200,00	(88.374.200,00)	71,85	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.944.400,00	225.570.200,00	(88.374.200,00)	71,85	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0004		PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI SASARAN PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN	9.809.000,00	6.708.900,00	(3.100.100,00)	68,39	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.809.000,00	6.708.900,00	(3.100.100,00)	68,39	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.809.000,00	6.708.900,00	(3.100.100,00)	68,39	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006		PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN	6.632.649.719,00	6.515.805.416,49	(116.844.302,51)	98,23	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	740.973.295,00	624.128.995,00	(116.844.300,00)	84,23	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.973.295,00	624.128.995,00	(116.844.300,00)	84,23	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006	5.2	BELANJA MODAL	5.891.676.424,00	5.891.676.421,49	(2,51)	99,99	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.225.144,00	198.225.143,28	(0,72)	99,99	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.693.451.280,00	5.693.451.278,21	(1,79)	99,99	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0007		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN	34.794.200,00	30.991.400,00	(3.802.800,00)	89,07	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	34.794.200,00	30.991.400,00	(3.802.800,00)	89,07	
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.794.200,00	30.991.400,00	(3.802.800,00)	89,07	
				JUMLAH BELANJA	46.006.620.418,00	37.517.314.104,93	(8.489.306.313,07)	81,54	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(45.921.989.253,00)	(37.517.314.104,93)	8.404.675.148,07	81,69	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(45.921.989.253,00)	(37.517.314.104,93)	8.404.675.148,07	81,69	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000		5	BELANJA DAERAH	21.295.837.371,00	20.402.503.487,00	(893.333.884,00)	95,80	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.149.005.036,00	15.532.590.474,00	(616.414.562,00)	96,18	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	153.255.428,00	134.025.300,00	(19.230.128,00)	87,45	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	68.552.950,00	58.142.650,00	(10.410.300,00)	84,81	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.552.950,00	58.142.650,00	(10.410.300,00)	84,81	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.552.950,00	58.142.650,00	(10.410.300,00)	84,81	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	13.093.011,00	10.832.450,00	(2.260.561,00)	82,73	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.093.011,00	10.832.450,00	(2.260.561,00)	82,73	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.093.011,00	10.832.450,00	(2.260.561,00)	82,73	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	71.609.467,00	65.050.200,00	(6.559.267,00)	90,84	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	71.609.467,00	65.050.200,00	(6.559.267,00)	90,84	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.609.467,00	65.050.200,00	(6.559.267,00)	90,84	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.593.572.875,00	12.301.731.020,00	(291.841.855,00)	97,68	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.141.306.875,00	11.860.089.020,00	(281.217.855,00)	97,68	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.141.306.875,00	11.860.089.020,00	(281.217.855,00)	97,68	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.141.306.875,00	11.860.089.020,00	(281.217.855,00)	97,68	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	452.266.000,00	441.642.000,00	(10.624.000,00)	97,65	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	452.266.000,00	441.642.000,00	(10.624.000,00)	97,65	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.266.000,00	441.642.000,00	(10.624.000,00)	97,65	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.793.377.558,00	1.525.407.639,00	(267.969.919,00)	85,05	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	269.010.400,00	263.464.900,00	(5.545.500,00)	97,93	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	169.500.000,00	169.500.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.500.000,00	169.500.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	99.510.400,00	93.964.900,00	(5.545.500,00)	94,42	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.510.400,00	93.964.900,00	(5.545.500,00)	94,42	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	115.212.600,00	112.837.570,00	(2.375.030,00)	97,93	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	115.212.600,00	112.837.570,00	(2.375.030,00)	97,93	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.212.600,00	112.837.570,00	(2.375.030,00)	97,93	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	208.300.000,00	203.946.000,00	(4.354.000,00)	97,90	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	208.300.000,00	203.946.000,00	(4.354.000,00)	97,90	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.300.000,00	203.946.000,00	(4.354.000,00)	97,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	806.553.072,00	743.800.669,00	(62.752.403,00)	92,21	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	806.553.072,00	743.800.669,00	(62.752.403,00)	92,21	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.553.072,00	743.800.669,00	(62.752.403,00)	92,21	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	195.870.600,00	195.870.600,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0010	5.2	BELANJA MODAL	195.870.600,00	195.870.600,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.870.600,00	195.870.600,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	198.430.886,00	5.487.900,00	(192.942.986,00)	2,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	198.430.886,00	5.487.900,00	(192.942.986,00)	2,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.430.886,00	5.487.900,00	(192.942.986,00)	2,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.437.194.175,00	1.406.674.815,00	(30.519.360,00)	97,87	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	196.910.000,00	196.910.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	196.910.000,00	196.910.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.910.000,00	196.910.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.240.284.175,00	1.209.764.815,00	(30.519.360,00)	97,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.240.284.175,00	1.209.764.815,00	(30.519.360,00)	97,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.240.284.175,00	1.209.764.815,00	(30.519.360,00)	97,53	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	171.605.000,00	164.751.700,00	(6.853.300,00)	96,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	154.695.000,00	151.986.700,00	(2.708.300,00)	98,24	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	154.695.000,00	151.986.700,00	(2.708.300,00)	98,24	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.695.000,00	151.986.700,00	(2.708.300,00)	98,24	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.910.000,00	12.765.000,00	(4.145.000,00)	75,48	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.910.000,00	12.765.000,00	(4.145.000,00)	75,48	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.910.000,00	12.765.000,00	(4.145.000,00)	75,48	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	895.148.980,00	852.569.168,00	(42.579.812,00)	95,24	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03.1.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI SERTA PASAR LELANG KOMODITAS	895.148.980,00	852.569.168,00	(42.579.812,00)	95,24	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03.1.01.0002		PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI	895.148.980,00	852.569.168,00	(42.579.812,00)	95,24	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	895.148.980,00	852.569.168,00	(42.579.812,00)	95,24	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.148.980,00	852.569.168,00	(42.579.812,00)	95,24	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	875.197.376,00	805.842.764,00	(69.354.612,00)	92,07	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02		PENGENDALIAN HARGA, INFORMASI KETERSEDIAAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	875.197.376,00	805.842.764,00	(69.354.612,00)	92,07	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0001		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA	253.672.739,00	250.427.000,00	(3.245.739,00)	98,72	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	247.331.339,00	244.322.000,00	(3.009.339,00)	98,78	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.331.339,00	244.322.000,00	(3.009.339,00)	98,78	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	6.341.400,00	6.105.000,00	(236.400,00)	96,27	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.341.400,00	6.105.000,00	(236.400,00)	96,27	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0002		OPERASI PASAR DALAM RANGKA STABILISASI HARGA PANGAN POKOK YANG DAMPAKNYA BEBERAPA DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	621.524.637,00	555.415.764,00	(66.108.873,00)	89,36	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	557.068.637,00	491.035.764,00	(66.032.873,00)	88,14	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.068.637,00	491.035.764,00	(66.032.873,00)	88,14	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	64.456.000,00	64.380.000,00	(76.000,00)	99,88	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.456.000,00	64.380.000,00	(76.000,00)	99,88	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	48.984.746,00	47.549.026,00	(1.435.720,00)	97,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI	48.984.746,00	47.549.026,00	(1.435.720,00)	97,06	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0003		MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN	26.270.485,00	26.108.509,00	(161.976,00)	99,38	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.270.485,00	26.108.509,00	(161.976,00)	99,38	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.270.485,00	26.108.509,00	(161.976,00)	99,38	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0004		PENINGKATAN CITRA PRODUK EKSPOR	22.714.261,00	21.440.517,00	(1.273.744,00)	94,39	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.714.261,00	21.440.517,00	(1.273.744,00)	94,39	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.714.261,00	21.440.517,00	(1.273.744,00)	94,39	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.386.447.742,00	1.263.116.640,00	(123.331.102,00)	91,10	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01		PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.374.886.714,00	1.251.679.840,00	(123.206.874,00)	91,03	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01.0001		PEMBERDAYAAN KONSUMEN DAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.374.886.714,00	1.251.679.840,00	(123.206.874,00)	91,03	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	527.894.164,00	479.624.890,00	(48.269.274,00)	90,85	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.894.164,00	479.624.890,00	(48.269.274,00)	90,85	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	846.992.550,00	772.054.950,00	(74.937.600,00)	91,15	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	846.992.550,00	772.054.950,00	(74.937.600,00)	91,15	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.03		PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.561.028,00	11.436.800,00	(124.228,00)	98,92	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.03.0003		PENINGKATAN KAPASITAS DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA SERTA KEGIATAN PERDAGANGAN SESUAI PARAMETER KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	11.561.028,00	11.436.800,00	(124.228,00)	98,92	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.561.028,00	11.436.800,00	(124.228,00)	98,92	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.561.028,00	11.436.800,00	(124.228,00)	98,92	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.941.053.491,00	1.900.835.415,00	(40.218.076,00)	97,92	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07.1.03		PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	1.941.053.491,00	1.900.835.415,00	(40.218.076,00)	97,92	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07.1.03.0002		SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	1.941.053.491,00	1.900.835.415,00	(40.218.076,00)	97,92	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.941.053.491,00	1.900.835.415,00	(40.218.076,00)	97,92	
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.941.053.491,00	1.900.835.415,00	(40.218.076,00)	97,92	
				JUMLAH BELANJA	21.295.837.371,00	20.402.503.487,00	(893.333.884,00)	95,80	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(21.295.837.371,00)	(20.402.503.487,00)	893.333.884,00	95,80	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(21.295.837.371,00)	(20.402.503.487,00)	893.333.884,00	95,80	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000		5	BELANJA DAERAH	7.511.099.193,00	7.239.486.646,00	(271.612.547,00)	96,38	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.284.662.863,00	7.016.299.700,00	(268.363.163,00)	96,31	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01		PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI	7.284.662.863,00	7.016.299.700,00	(268.363.163,00)	96,31	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	1.200.000.000,00	1.172.862.164,00	(27.137.836,00)	97,73	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000,00	1.172.862.164,00	(27.137.836,00)	97,73	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	1.172.862.164,00	(27.137.836,00)	97,73	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	1.000.000.000,00	888.305.467,00	(111.694.533,00)	88,83	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	888.305.467,00	(111.694.533,00)	88,83	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	888.305.467,00	(111.694.533,00)	88,83	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	3.098.350.137,00	2.975.918.069,00	(122.432.068,00)	96,04	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.951.805.737,00	2.837.247.090,00	(114.558.647,00)	96,11	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.951.805.737,00	2.837.247.090,00	(114.558.647,00)	96,11	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	146.544.400,00	138.670.979,00	(7.873.421,00)	94,62	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.544.400,00	138.670.979,00	(7.873.421,00)	94,62	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	1.978.000.000,00	1.971.214.000,00	(6.786.000,00)	99,65	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.978.000.000,00	1.971.214.000,00	(6.786.000,00)	99,65	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.978.000.000,00	1.971.214.000,00	(6.786.000,00)	99,65	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0006		EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI	8.312.726,00	8.000.000,00	(312.726,00)	96,23	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.312.726,00	8.000.000,00	(312.726,00)	96,23	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.312.726,00	8.000.000,00	(312.726,00)	96,23	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	26.436.330,00	24.458.051,00	(1.978.279,00)	92,51	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03.1.01		PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI), DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN PROVINSI	26.436.330,00	24.458.051,00	(1.978.279,00)	92,51	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03.1.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	26.436.330,00	24.458.051,00	(1.978.279,00)	92,51	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.436.330,00	24.458.051,00	(1.978.279,00)	92,51	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.436.330,00	24.458.051,00	(1.978.279,00)	92,51	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	200.000.000,00	198.728.895,00	(1.271.105,00)	99,36	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.04.1.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI, DAN IPKI KEWENANGAN PROVINSI BERBASIS SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	200.000.000,00	198.728.895,00	(1.271.105,00)	99,36	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.04.1.01.0001		FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP PROVINSI MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	200.000.000,00	198.728.895,00	(1.271.105,00)	99,36	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	198.728.895,00	(1.271.105,00)	99,36	
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.728.895,00	(1.271.105,00)	99,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	7.511.099.193,00	7.239.486.646,00	(271.612.547,00)	96,38	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.511.099.193,00)	(7.239.486.646,00)	271.612.547,00	96,38	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.511.099.193,00)	(7.239.486.646,00)	271.612.547,00	96,38	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Hukum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001		5	BELANJA DAERAH	1.907.268.509,00	1.766.563.869,00	(140.704.640,00)	92,62	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	595.439.876,00	536.301.731,00	(59.138.145,00)	90,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	43.500.314,00	41.046.400,00	(2.453.914,00)	94,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	43.500.314,00	41.046.400,00	(2.453.914,00)	94,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	43.500.314,00	41.046.400,00	(2.453.914,00)	94,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.500.314,00	41.046.400,00	(2.453.914,00)	94,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	255.943.254,00	206.442.293,00	(49.500.961,00)	80,65	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	126.371.300,00	93.522.550,00	(32.848.750,00)	74,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.600.000,00	31.050.000,00	(2.550.000,00)	92,41	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	31.050.000,00	(2.550.000,00)	92,41	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	92.771.300,00	62.472.550,00	(30.298.750,00)	67,34	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.771.300,00	62.472.550,00	(30.298.750,00)	67,34	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	8.000.000,00	7.027.000,00	(973.000,00)	87,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.027.000,00	(973.000,00)	87,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.027.000,00	(973.000,00)	87,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	10.118.893,00	5.164.000,00	(4.954.893,00)	51,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.118.893,00	5.164.000,00	(4.954.893,00)	51,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.118.893,00	5.164.000,00	(4.954.893,00)	51,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	111.453.061,00	100.728.743,00	(10.724.318,00)	90,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	111.453.061,00	100.728.743,00	(10.724.318,00)	90,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.453.061,00	100.728.743,00	(10.724.318,00)	90,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	183.637.364,00	183.553.828,00	(83.536,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	183.637.364,00	183.553.828,00	(83.536,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	183.637.364,00	183.553.828,00	(83.536,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.637.364,00	183.553.828,00	(83.536,00)	99,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	112.358.944,00	105.259.210,00	(7.099.734,00)	93,68	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	105.372.984,00	98.552.210,00	(6.820.774,00)	93,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	105.372.984,00	98.552.210,00	(6.820.774,00)	93,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.372.984,00	98.552.210,00	(6.820.774,00)	93,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.985.960,00	6.707.000,00	(278.960,00)	96,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.985.960,00	6.707.000,00	(278.960,00)	96,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.985.960,00	6.707.000,00	(278.960,00)	96,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.311.828.633,00	1.230.262.138,00	(81.566.495,00)	93,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01		FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN	741.757.634,00	676.454.214,00	(65.303.420,00)	91,19	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN	249.606.829,00	223.503.372,00	(26.103.457,00)	89,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	249.606.829,00	223.503.372,00	(26.103.457,00)	89,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.606.829,00	223.503.372,00	(26.103.457,00)	89,54	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0002		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN	256.484.180,00	244.791.814,00	(11.692.366,00)	95,44	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	256.484.180,00	244.791.814,00	(11.692.366,00)	95,44	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.484.180,00	244.791.814,00	(11.692.366,00)	95,44	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA	55.797.732,00	45.239.690,00	(10.558.042,00)	81,07	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.797.732,00	45.239.690,00	(10.558.042,00)	81,07	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.797.732,00	45.239.690,00	(10.558.042,00)	81,07	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0004		FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA	179.868.893,00	162.919.338,00	(16.949.555,00)	90,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	179.868.893,00	162.919.338,00	(16.949.555,00)	90,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.868.893,00	162.919.338,00	(16.949.555,00)	90,57	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02		FASILITASI BANTUAN HUKUM	570.070.999,00	553.807.924,00	(16.263.075,00)	97,14	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0001		FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM	342.274.549,00	336.334.397,00	(5.940.152,00)	98,26	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	342.274.549,00	336.334.397,00	(5.940.152,00)	98,26	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.274.549,00	336.334.397,00	(5.940.152,00)	98,26	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0002		FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM	227.796.450,00	217.473.527,00	(10.322.923,00)	95,46	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	227.796.450,00	217.473.527,00	(10.322.923,00)	95,46	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.796.450,00	217.473.527,00	(10.322.923,00)	95,46	
				JUMLAH BELANJA	1.907.268.509,00	1.766.563.869,00	(140.704.640,00)	92,62	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.907.268.509,00)	(1.766.563.869,00)	140.704.640,00	92,62	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.907.268.509,00)	(1.766.563.869,00)	140.704.640,00	92,62	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002		5	BELANJA DAERAH	2.674.150.158,93	2.596.935.967,00	(77.214.191,93)	97,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.234.201.346,93	1.184.470.718,00	(49.730.628,93)	95,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	50.527.700,00	49.964.796,00	(562.904,00)	98,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	50.527.700,00	49.964.796,00	(562.904,00)	98,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	50.527.700,00	49.964.796,00	(562.904,00)	98,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.527.700,00	49.964.796,00	(562.904,00)	98,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	95.744.400,00	92.784.700,00	(2.959.700,00)	96,90	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	56.650.000,00	54.933.900,00	(1.716.100,00)	96,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.650.000,00	54.933.900,00	(1.716.100,00)	96,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.650.000,00	54.933.900,00	(1.716.100,00)	96,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	39.094.400,00	37.850.800,00	(1.243.600,00)	96,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	39.094.400,00	37.850.800,00	(1.243.600,00)	96,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.094.400,00	37.850.800,00	(1.243.600,00)	96,81	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	181.510.893,93	176.982.541,00	(4.528.352,93)	97,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.880.000,00	6.808.503,00	(1.071.497,00)	86,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.880.000,00	6.808.503,00	(1.071.497,00)	86,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.880.000,00	6.808.503,00	(1.071.497,00)	86,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	9.500.000,00	7.964.538,00	(1.535.462,00)	83,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	7.964.538,00	(1.535.462,00)	83,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	7.964.538,00	(1.535.462,00)	83,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.000.000,00	2.519.877,00	(1.480.123,00)	62,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	2.519.877,00	(1.480.123,00)	62,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.519.877,00	(1.480.123,00)	62,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	158.210.893,93	157.769.623,00	(441.270,93)	99,72	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	158.210.893,93	157.769.623,00	(441.270,93)	99,72	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.210.893,93	157.769.623,00	(441.270,93)	99,72	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	462.660.553,00	434.462.134,00	(28.198.419,00)	93,90	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.300.000,00	1.544.810,00	(755.190,00)	67,16	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.300.000,00	1.544.810,00	(755.190,00)	67,16	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	1.544.810,00	(755.190,00)	67,16	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	421.160.553,00	393.717.324,00	(27.443.229,00)	93,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	421.160.553,00	393.717.324,00	(27.443.229,00)	93,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.160.553,00	393.717.324,00	(27.443.229,00)	93,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	218.300.000,00	208.710.068,00	(9.589.932,00)	95,60	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	175.300.000,00	166.603.928,00	(8.696.072,00)	95,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	175.300.000,00	166.603.928,00	(8.696.072,00)	95,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.300.000,00	166.603.928,00	(8.696.072,00)	95,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.000.000,00	2.760.000,00	(240.000,00)	92,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.760.000,00	(240.000,00)	92,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.760.000,00	(240.000,00)	92,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	40.000.000,00	39.346.140,00	(653.860,00)	98,36	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	36.205.000,00	36.046.140,00	(158.860,00)	99,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.205.000,00	36.046.140,00	(158.860,00)	99,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	3.795.000,00	3.300.000,00	(495.000,00)	86,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.795.000,00	3.300.000,00	(495.000,00)	86,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.13		FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	225.457.800,00	221.566.479,00	(3.891.321,00)	98,27	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.13.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	225.457.800,00	221.566.479,00	(3.891.321,00)	98,27	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	225.457.800,00	221.566.479,00	(3.891.321,00)	98,27	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.457.800,00	221.566.479,00	(3.891.321,00)	98,27	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.439.948.812,00	1.412.465.249,00	(27.483.563,00)	98,09	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01		PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN	354.394.000,00	351.237.488,00	(3.156.512,00)	99,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0001		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	1.378.500,00	1.012.600,00	(365.900,00)	73,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.378.500,00	1.012.600,00	(365.900,00)	73,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.378.500,00	1.012.600,00	(365.900,00)	73,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0002		FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM	317.666.020,00	315.371.421,00	(2.294.599,00)	99,27	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	317.666.020,00	315.371.421,00	(2.294.599,00)	99,27	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.666.020,00	315.371.421,00	(2.294.599,00)	99,27	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0003		FASILITASI PENATAAN WILAYAH	35.349.480,00	34.853.467,00	(496.013,00)	98,59	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.349.480,00	34.853.467,00	(496.013,00)	98,59	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.349.480,00	34.853.467,00	(496.013,00)	98,59	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02		PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	299.558.352,00	289.645.891,00	(9.912.461,00)	96,69	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0001		FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD	14.080.800,00	13.191.516,00	(889.284,00)	93,68	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.080.800,00	13.191.516,00	(889.284,00)	93,68	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.080.800,00	13.191.516,00	(889.284,00)	93,68	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0002		PENGEMBANGAN OTONOMI DAN PENATAAN URUSAN	168.617.052,00	162.278.612,00	(6.338.440,00)	96,24	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	168.617.052,00	162.278.612,00	(6.338.440,00)	96,24	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.617.052,00	162.278.612,00	(6.338.440,00)	96,24	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0003		EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	116.860.500,00	114.175.763,00	(2.684.737,00)	97,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	116.860.500,00	114.175.763,00	(2.684.737,00)	97,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.860.500,00	114.175.763,00	(2.684.737,00)	97,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	785.996.460,00	771.581.870,00	(14.414.590,00)	98,16	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0001		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH	703.114.038,00	692.259.706,00	(10.854.332,00)	98,45	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	701.620.422,00	691.169.706,00	(10.450.716,00)	98,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.620.422,00	691.169.706,00	(10.450.716,00)	98,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.493.616,00	1.090.000,00	(403.616,00)	72,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.493.616,00	1.090.000,00	(403.616,00)	72,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0002		FASILITASI KERJA SAMA BADAN USAHA/SWASTA	37.136.756,00	35.868.776,00	(1.267.980,00)	96,58	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.136.756,00	35.868.776,00	(1.267.980,00)	96,58	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.136.756,00	35.868.776,00	(1.267.980,00)	96,58	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0003		EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	45.745.666,00	43.453.388,00	(2.292.278,00)	94,98	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.745.666,00	43.453.388,00	(2.292.278,00)	94,98	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.745.666,00	43.453.388,00	(2.292.278,00)	94,98	
				JUMLAH BELANJA	2.674.150.158,93	2.596.935.967,00	(77.214.191,93)	97,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.674.150.158,93)	(2.596.935.967,00)	77.214.191,93	97,11	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.674.150.158,93)	(2.596.935.967,00)	77.214.191,93	97,11	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Organisasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003		5	BELANJA DAERAH	927.894.795,63	881.263.370,00	(46.631.425,63)	94,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	683.423.729,63	667.750.184,00	(15.673.545,63)	97,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100.934.382,00	98.521.346,00	(2.413.036,00)	97,60	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	100.934.382,00	98.521.346,00	(2.413.036,00)	97,60	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	100.934.382,00	98.521.346,00	(2.413.036,00)	97,60	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.934.382,00	98.521.346,00	(2.413.036,00)	97,60	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	19.800.000,00	17.400.000,00	(2.400.000,00)	87,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	19.800.000,00	17.400.000,00	(2.400.000,00)	87,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.800.000,00	17.400.000,00	(2.400.000,00)	87,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	17.400.000,00	(2.400.000,00)	87,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	170.238.345,63	169.391.527,00	(846.818,63)	99,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	45.451.358,63	44.868.820,00	(582.538,63)	98,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	45.451.358,63	44.868.820,00	(582.538,63)	98,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.451.358,63	44.868.820,00	(582.538,63)	98,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.242.200,00	2.242.200,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.242.200,00	2.242.200,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.242.200,00	2.242.200,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.920.000,00	4.903.590,00	(16.410,00)	99,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.920.000,00	4.903.590,00	(16.410,00)	99,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.903.590,00	(16.410,00)	99,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	117.624.787,00	117.376.917,00	(247.870,00)	99,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	117.624.787,00	117.376.917,00	(247.870,00)	99,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.624.787,00	117.376.917,00	(247.870,00)	99,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	268.083.902,00	259.981.911,00	(8.101.991,00)	96,97	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.950.270,00	4.682.777,00	(3.267.493,00)	58,90	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.950.270,00	4.682.777,00	(3.267.493,00)	58,90	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.950.270,00	4.682.777,00	(3.267.493,00)	58,90	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	213.513.632,00	208.679.134,00	(4.834.498,00)	97,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	213.513.632,00	208.679.134,00	(4.834.498,00)	97,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.513.632,00	208.679.134,00	(4.834.498,00)	97,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	124.367.100,00	122.455.400,00	(1.911.700,00)	98,46	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	116.486.100,00	114.931.300,00	(1.554.800,00)	98,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	116.486.100,00	114.931.300,00	(1.554.800,00)	98,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.486.100,00	114.931.300,00	(1.554.800,00)	98,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.881.000,00	7.524.100,00	(356.900,00)	95,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.881.000,00	7.524.100,00	(356.900,00)	95,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.881.000,00	7.524.100,00	(356.900,00)	95,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	244.471.066,00	213.513.186,00	(30.957.880,00)	87,33	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01		FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	72.838.062,00	64.057.071,00	(8.780.991,00)	87,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0001		FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	18.260.352,00	15.510.955,00	(2.749.397,00)	84,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.260.352,00	15.510.955,00	(2.749.397,00)	84,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.260.352,00	15.510.955,00	(2.749.397,00)	84,94	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0002		FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA	17.322.677,00	16.670.600,00	(652.077,00)	96,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.322.677,00	16.670.600,00	(652.077,00)	96,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.322.677,00	16.670.600,00	(652.077,00)	96,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0003		PENATAAN ANALISIS JABATAN	37.255.033,00	31.875.516,00	(5.379.517,00)	85,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.255.033,00	31.875.516,00	(5.379.517,00)	85,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.255.033,00	31.875.516,00	(5.379.517,00)	85,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02		FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	171.633.004,00	149.456.115,00	(22.176.889,00)	87,07	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0001		PEMBINAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	54.424.314,00	40.882.838,00	(13.541.476,00)	75,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.424.314,00	40.882.838,00	(13.541.476,00)	75,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.424.314,00	40.882.838,00	(13.541.476,00)	75,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0002		MONITORING DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	23.324.068,00	23.102.724,00	(221.344,00)	99,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.324.068,00	23.102.724,00	(221.344,00)	99,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.324.068,00	23.102.724,00	(221.344,00)	99,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0003		EVALUASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA	20.395.130,00	17.506.748,00	(2.888.382,00)	85,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.395.130,00	17.506.748,00	(2.888.382,00)	85,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.395.130,00	17.506.748,00	(2.888.382,00)	85,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0004		PENGELOLAAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN	38.913.351,00	35.044.531,00	(3.868.820,00)	90,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	38.913.351,00	35.044.531,00	(3.868.820,00)	90,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.913.351,00	35.044.531,00	(3.868.820,00)	90,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0005		FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	34.576.141,00	32.919.274,00	(1.656.867,00)	95,20	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.576.141,00	32.919.274,00	(1.656.867,00)	95,20	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.576.141,00	32.919.274,00	(1.656.867,00)	95,20	
				JUMLAH BELANJA	927.894.795,63	881.263.370,00	(46.631.425,63)	94,97	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(927.894.795,63)	(881.263.370,00)	46.631.425,63	94,97	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(927.894.795,63)	(881.263.370,00)	46.631.425,63	94,97	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Kesejahteraan Rakyat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004		5	BELANJA DAERAH	76.117.790.635,58	72.088.974.425,00	(4.028.816.210,58)	94,70	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	998.195.204,00	820.526.784,00	(177.668.420,00)	82,20	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	80.036.100,00	39.026.100,00	(41.010.000,00)	48,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	21.425.500,00	18.394.700,00	(3.030.800,00)	85,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.425.500,00	18.394.700,00	(3.030.800,00)	85,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.425.500,00	18.394.700,00	(3.030.800,00)	85,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	26.038.600,00	3.666.600,00	(22.372.000,00)	14,08	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.038.600,00	3.666.600,00	(22.372.000,00)	14,08	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.038.600,00	3.666.600,00	(22.372.000,00)	14,08	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	32.572.000,00	16.964.800,00	(15.607.200,00)	52,08	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.572.000,00	16.964.800,00	(15.607.200,00)	52,08	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.572.000,00	16.964.800,00	(15.607.200,00)	52,08	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.500.000,00	2.280.000,00	(8.220.000,00)	21,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	10.500.000,00	2.280.000,00	(8.220.000,00)	21,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	2.280.000,00	(8.220.000,00)	21,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	2.280.000,00	(8.220.000,00)	21,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	427.978.751,00	331.780.192,00	(96.198.559,00)	77,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	59.471.751,00	44.092.915,00	(15.378.836,00)	74,14	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	59.471.751,00	44.092.915,00	(15.378.836,00)	74,14	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.471.751,00	44.092.915,00	(15.378.836,00)	74,14	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	368.507.000,00	287.687.277,00	(80.819.723,00)	78,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	368.507.000,00	287.687.277,00	(80.819.723,00)	78,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.507.000,00	287.687.277,00	(80.819.723,00)	78,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	34.410.000,00	34.410.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	34.410.000,00	34.410.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	34.410.000,00	34.410.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.410.000,00	34.410.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	245.258.441,00	235.523.262,00	(9.735.179,00)	96,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	103.740.000,00	96.745.390,00	(6.994.610,00)	93,25	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	103.740.000,00	96.745.390,00	(6.994.610,00)	93,25	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.740.000,00	96.745.390,00	(6.994.610,00)	93,25	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	141.518.441,00	138.777.872,00	(2.740.569,00)	98,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	141.518.441,00	138.777.872,00	(2.740.569,00)	98,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.518.441,00	138.777.872,00	(2.740.569,00)	98,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	200.011.912,00	177.507.230,00	(22.504.682,00)	88,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	200.011.912,00	177.507.230,00	(22.504.682,00)	88,74	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.011.912,00	177.507.230,00	(22.504.682,00)	88,74	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.011.912,00	177.507.230,00	(22.504.682,00)	88,74	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	75.119.595.431,58	71.268.447.641,00	(3.851.147.790,58)	94,87	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01		FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL	66.255.989.176,58	62.784.174.619,00	(3.471.814.557,58)	94,75	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0001		PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SPIRITUAL	48.946.560.216,00	46.285.645.267,00	(2.660.914.949,00)	94,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.919.311.492,00	46.260.004.267,00	(2.659.307.225,00)	94,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.983.672.192,00	1.699.847.992,00	(283.824.200,00)	85,69	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	46.935.639.300,00	44.560.156.275,00	(2.375.483.025,00)	94,93	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	27.248.724,00	25.641.000,00	(1.607.724,00)	94,09	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.248.724,00	25.641.000,00	(1.607.724,00)	94,09	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0002		FASILITASI KELEMBAGAAN BINA SPIRITUAL	17.309.428.960,58	16.498.529.352,00	(810.899.608,58)	95,31	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.309.428.960,58	16.498.529.352,00	(810.899.608,58)	95,31	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.309.428.960,58	16.498.529.352,00	(810.899.608,58)	95,31	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02		FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR	8.758.500.655,00	8.405.375.022,00	(353.125.633,00)	95,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0001		FASILITASI, KOORDINASI, SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG PENDIDIKAN	8.690.413.855,00	8.358.805.822,00	(331.608.033,00)	96,18	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.690.413.855,00	8.358.805.822,00	(331.608.033,00)	96,18	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.690.413.855,00	8.358.805.822,00	(331.608.033,00)	96,18	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0002		FASILITASI, KOORDINASI DAN SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KESEHATAN	30.567.600,00	20.490.400,00	(10.077.200,00)	67,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.567.600,00	20.490.400,00	(10.077.200,00)	67,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.567.600,00	20.490.400,00	(10.077.200,00)	67,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0003		FASILITASI, KOORDINASI DAN SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG SOSIAL	37.519.200,00	26.078.800,00	(11.440.400,00)	69,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.519.200,00	26.078.800,00	(11.440.400,00)	69,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.519.200,00	26.078.800,00	(11.440.400,00)	69,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03		FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR	105.105.600,00	78.898.000,00	(26.207.600,00)	75,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA	40.797.200,00	33.828.800,00	(6.968.400,00)	82,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.797.200,00	33.828.800,00	(6.968.400,00)	82,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.797.200,00	33.828.800,00	(6.968.400,00)	82,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	32.271.200,00	23.565.000,00	(8.706.200,00)	73,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.271.200,00	23.565.000,00	(8.706.200,00)	73,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.271.200,00	23.565.000,00	(8.706.200,00)	73,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN, DAN PERHUBUNGAN	32.037.200,00	21.504.200,00	(10.533.000,00)	67,12	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.037.200,00	21.504.200,00	(10.533.000,00)	67,12	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.037.200,00	21.504.200,00	(10.533.000,00)	67,12	
				JUMLAH BELANJA	76.117.790.635,58	72.088.974.425,00	(4.028.816.210,58)	94,70	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(76.117.790.635,58)	(72.088.974.425,00)	4.028.816.210,58	94,70	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(76.117.790.635,58)	(72.088.974.425,00)	4.028.816.210,58	94,70	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Perekonomian dan Pembangunan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005		5	BELANJA DAERAH	1.696.019.757,25	1.578.967.948,00	(117.051.809,25)	93,09	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.201.436.712,25	1.106.911.301,00	(94.525.411,25)	92,13	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	131.930.833,00	123.112.686,00	(8.818.147,00)	93,31	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	99.621.833,00	91.644.426,00	(7.977.407,00)	91,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	99.621.833,00	91.644.426,00	(7.977.407,00)	91,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.621.833,00	91.644.426,00	(7.977.407,00)	91,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	32.309.000,00	31.468.260,00	(840.740,00)	97,39	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.309.000,00	31.468.260,00	(840.740,00)	97,39	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.309.000,00	31.468.260,00	(840.740,00)	97,39	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	224.740.109,00	217.390.273,00	(7.349.836,00)	96,72	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	67.703.609,00	65.689.803,00	(2.013.806,00)	97,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	67.703.609,00	65.689.803,00	(2.013.806,00)	97,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.703.609,00	65.689.803,00	(2.013.806,00)	97,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.847.500,00	16.600.280,00	(247.220,00)	98,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.847.500,00	16.600.280,00	(247.220,00)	98,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.847.500,00	16.600.280,00	(247.220,00)	98,53	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	140.189.000,00	135.100.190,00	(5.088.810,00)	96,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	140.189.000,00	135.100.190,00	(5.088.810,00)	96,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.189.000,00	135.100.190,00	(5.088.810,00)	96,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	442.353.658,00	424.047.498,00	(18.306.160,00)	95,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.008.048,00	9.901.908,00	(12.106.140,00)	44,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.557.548,00	5.517.408,00	(12.040.140,00)	31,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.557.548,00	5.517.408,00	(12.040.140,00)	31,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.450.500,00	4.384.500,00	(66.000,00)	98,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.450.500,00	4.384.500,00	(66.000,00)	98,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	96.706.200,00	96.636.000,00	(70.200,00)	99,92	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	96.706.200,00	96.636.000,00	(70.200,00)	99,92	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.706.200,00	96.636.000,00	(70.200,00)	99,92	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	323.639.410,00	317.509.590,00	(6.129.820,00)	98,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	323.639.410,00	317.509.590,00	(6.129.820,00)	98,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.639.410,00	317.509.590,00	(6.129.820,00)	98,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	125.557.500,00	124.133.826,00	(1.423.674,00)	98,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	113.337.500,00	112.682.376,00	(655.124,00)	99,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	113.337.500,00	112.682.376,00	(655.124,00)	99,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.337.500,00	112.682.376,00	(655.124,00)	99,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.220.000,00	11.451.450,00	(768.550,00)	93,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.220.000,00	11.451.450,00	(768.550,00)	93,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.220.000,00	11.451.450,00	(768.550,00)	93,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.13		FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	276.854.612,25	218.227.018,00	(58.627.594,25)	78,82	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.13.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	276.854.612,25	218.227.018,00	(58.627.594,25)	78,82	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	276.854.612,25	218.227.018,00	(58.627.594,25)	78,82	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.854.612,25	218.227.018,00	(58.627.594,25)	78,82	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	351.320.920,00	337.295.059,00	(14.025.861,00)	96,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01		PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PEREKONOMIAN	98.168.837,00	94.077.770,00	(4.091.067,00)	95,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0001		FASILITASI PENGELOLAAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO	44.608.657,00	42.535.980,00	(2.072.677,00)	95,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.608.657,00	42.535.980,00	(2.072.677,00)	95,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.608.657,00	42.535.980,00	(2.072.677,00)	95,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0002		FASILITASI PENGELOLAAN KEBIJAKAN EKONOMI MIKRO	53.560.180,00	51.541.790,00	(2.018.390,00)	96,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.560.180,00	51.541.790,00	(2.018.390,00)	96,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.560.180,00	51.541.790,00	(2.018.390,00)	96,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02		PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM	44.514.417,00	43.947.185,00	(567.232,00)	98,72	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	44.514.417,00	43.947.185,00	(567.232,00)	98,72	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.514.417,00	43.947.185,00	(567.232,00)	98,72	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.514.417,00	43.947.185,00	(567.232,00)	98,72	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03		PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI BUMD DAN BLUD	208.637.666,00	199.270.104,00	(9.367.562,00)	95,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH JASA KEUANGAN DAN ANEKA USAHA	41.820.117,00	40.150.280,00	(1.669.837,00)	96,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.820.117,00	40.150.280,00	(1.669.837,00)	96,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.820.117,00	40.150.280,00	(1.669.837,00)	96,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM, LIMBAH DAN SANITASI	67.119.928,00	65.997.552,00	(1.122.376,00)	98,32	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.119.928,00	65.997.552,00	(1.122.376,00)	98,32	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.119.928,00	65.997.552,00	(1.122.376,00)	98,32	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMD	81.309.687,00	78.406.722,00	(2.902.965,00)	96,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	81.309.687,00	78.406.722,00	(2.902.965,00)	96,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.309.687,00	78.406.722,00	(2.902.965,00)	96,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	18.387.934,00	14.715.550,00	(3.672.384,00)	80,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.387.934,00	14.715.550,00	(3.672.384,00)	80,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.387.934,00	14.715.550,00	(3.672.384,00)	80,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	143.262.125,00	134.761.588,00	(8.500.537,00)	94,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01		PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	110.920.207,00	106.031.022,00	(4.889.185,00)	95,59	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01.0001		PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBD	76.346.749,00	72.500.070,00	(3.846.679,00)	94,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.346.749,00	72.500.070,00	(3.846.679,00)	94,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.346.749,00	72.500.070,00	(3.846.679,00)	94,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01.0003		PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	34.573.458,00	33.530.952,00	(1.042.506,00)	96,98	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.573.458,00	33.530.952,00	(1.042.506,00)	96,98	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.573.458,00	33.530.952,00	(1.042.506,00)	96,98	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.02		PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	32.341.918,00	28.730.566,00	(3.611.352,00)	88,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.02.0003		FASILITASI PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PEMBANGUNAN DAERAH	32.341.918,00	28.730.566,00	(3.611.352,00)	88,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.341.918,00	28.730.566,00	(3.611.352,00)	88,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.341.918,00	28.730.566,00	(3.611.352,00)	88,83	
				JUMLAH BELANJA	1.696.019.757,25	1.578.967.948,00	(117.051.809,25)	93,09	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.696.019.757,25)	(1.578.967.948,00)	117.051.809,25	93,09	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.696.019.757,25)	(1.578.967.948,00)	117.051.809,25	93,09	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Umum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006		5	BELANJA DAERAH	184.113.876.278,00	176.665.178.765,05	(7.448.697.512,95)	95,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	184.113.876.278,00	176.665.178.765,05	(7.448.697.512,95)	95,95	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	119.396.005,00	116.421.281,00	(2.974.724,00)	97,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	119.396.005,00	116.421.281,00	(2.974.724,00)	97,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	119.396.005,00	116.421.281,00	(2.974.724,00)	97,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.396.005,00	116.421.281,00	(2.974.724,00)	97,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	88.131.664.384,95	84.985.620.887,00	(3.146.043.497,95)	96,43	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	84.879.138.084,95	82.193.330.030,00	(2.685.808.054,95)	96,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.879.138.084,95	82.193.330.030,00	(2.685.808.054,95)	96,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	84.833.852.084,95	82.148.044.066,00	(2.685.808.018,95)	96,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.286.000,00	45.285.964,00	(36,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	3.108.299.300,00	2.649.206.965,00	(459.092.335,00)	85,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.108.299.300,00	2.649.206.965,00	(459.092.335,00)	85,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.108.299.300,00	2.649.206.965,00	(459.092.335,00)	85,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	64.594.000,00	63.572.439,00	(1.021.561,00)	98,41	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	64.594.000,00	63.572.439,00	(1.021.561,00)	98,41	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.594.000,00	63.572.439,00	(1.021.561,00)	98,41	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	79.633.000,00	79.511.453,00	(121.547,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	79.633.000,00	79.511.453,00	(121.547,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.633.000,00	79.511.453,00	(121.547,00)	99,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	653.226.230,80	644.627.817,00	(8.598.413,80)	98,68	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	514.881.730,80	506.676.317,00	(8.205.413,80)	98,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	514.881.730,80	506.676.317,00	(8.205.413,80)	98,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.881.730,80	506.676.317,00	(8.205.413,80)	98,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	138.344.500,00	137.951.500,00	(393.000,00)	99,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	138.344.500,00	137.951.500,00	(393.000,00)	99,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.344.500,00	137.951.500,00	(393.000,00)	99,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	253.498.030,00	251.826.115,00	(1.671.915,00)	99,34	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	253.498.030,00	251.826.115,00	(1.671.915,00)	99,34	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	253.498.030,00	251.826.115,00	(1.671.915,00)	99,34	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.498.030,00	153.036.115,00	(461.915,00)	99,69	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0002	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	98.790.000,00	(1.210.000,00)	98,79	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	17.942.335.082,03	17.460.329.036,00	(482.006.046,03)	97,31	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.869.558.035,00	1.693.944.984,00	(175.613.051,00)	90,60	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.240.152.235,00	1.217.190.484,00	(22.961.751,00)	98,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.654.635,00	147.185.085,00	(14.469.550,00)	91,04	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.078.497.600,00	1.070.005.399,00	(8.492.201,00)	99,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	629.405.800,00	476.754.500,00	(152.651.300,00)	75,74	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	629.405.800,00	476.754.500,00	(152.651.300,00)	75,74	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	239.318.200,00	73.503.070,00	(165.815.130,00)	30,71	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.188.200,00	50.603.770,00	(584.430,00)	98,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.188.200,00	50.603.770,00	(584.430,00)	98,85	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	188.130.000,00	22.899.300,00	(165.230.700,00)	12,17	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.130.000,00	22.899.300,00	(165.230.700,00)	12,17	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	9.891.542.745,00	9.858.429.824,00	(33.112.921,00)	99,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.891.542.745,00	9.858.429.824,00	(33.112.921,00)	99,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.891.542.745,00	9.858.429.824,00	(33.112.921,00)	99,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	314.321.505,00	299.773.934,00	(14.547.571,00)	95,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	314.321.505,00	299.773.934,00	(14.547.571,00)	95,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.321.505,00	299.773.934,00	(14.547.571,00)	95,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	53.565.315,00	51.606.822,00	(1.958.493,00)	96,34	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	53.565.315,00	51.606.822,00	(1.958.493,00)	96,34	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.565.315,00	51.606.822,00	(1.958.493,00)	96,34	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.635.953.031,03	4.554.708.248,00	(81.244.783,03)	98,24	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.635.953.031,03	4.554.708.248,00	(81.244.783,03)	98,24	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.635.953.031,03	4.554.708.248,00	(81.244.783,03)	98,24	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	826.702.901,00	817.532.032,00	(9.170.869,00)	98,89	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	826.702.901,00	817.532.032,00	(9.170.869,00)	98,89	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	826.702.901,00	817.532.032,00	(9.170.869,00)	98,89	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	111.373.350,00	110.830.122,00	(543.228,00)	99,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	111.373.350,00	110.830.122,00	(543.228,00)	99,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.373.350,00	110.830.122,00	(543.228,00)	99,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	23.526.666.724,00	23.208.161.251,00	(318.505.473,00)	98,64	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	22.593.102.404,00	22.281.815.253,00	(311.287.151,00)	98,62	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.567.932.404,00	17.362.145.253,00	(205.787.151,00)	98,82	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.402.504,00	281.743.864,00	(6.658.640,00)	97,69	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002	5.1.05	Belanja Hibah	17.279.529.900,00	17.080.401.389,00	(199.128.511,00)	98,84	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.025.170.000,00	4.919.670.000,00	(105.500.000,00)	97,90	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.025.170.000,00	4.919.670.000,00	(105.500.000,00)	97,90	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	933.564.320,00	926.345.998,00	(7.218.322,00)	99,22	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	118.194.520,00	113.743.654,00	(4.450.866,00)	96,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.194.520,00	113.743.654,00	(4.450.866,00)	96,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	815.369.800,00	812.602.344,00	(2.767.456,00)	99,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	815.369.800,00	812.602.344,00	(2.767.456,00)	99,66	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.363.784.091,91	29.637.141.179,00	(1.726.642.912,91)	94,49	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	169.011.435,00	164.692.366,00	(4.319.069,00)	97,44	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	169.011.435,00	164.692.366,00	(4.319.069,00)	97,44	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.011.435,00	164.692.366,00	(4.319.069,00)	97,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.122.266.020,00	6.466.890.226,00	(655.375.794,00)	90,79	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.122.266.020,00	6.466.890.226,00	(655.375.794,00)	90,79	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.122.266.020,00	6.466.890.226,00	(655.375.794,00)	90,79	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.882.781.337,30	6.829.210.494,00	(53.570.843,30)	99,22	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.882.781.337,30	6.829.210.494,00	(53.570.843,30)	99,22	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.882.781.337,30	6.829.210.494,00	(53.570.843,30)	99,22	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	17.189.725.299,61	16.176.348.093,00	(1.013.377.206,61)	94,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.189.725.299,61	16.176.348.093,00	(1.013.377.206,61)	94,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.189.725.299,61	16.176.348.093,00	(1.013.377.206,61)	94,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.598.339.451,82	9.630.465.061,05	(967.874.390,77)	90,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	598.061.004,00	593.496.722,00	(4.564.282,00)	99,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	598.061.004,00	593.496.722,00	(4.564.282,00)	99,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.061.004,00	593.496.722,00	(4.564.282,00)	99,23	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	4.203.315.111,00	4.101.038.407,00	(102.276.704,00)	97,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.203.315.111,00	4.101.038.407,00	(102.276.704,00)	97,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.203.315.111,00	4.101.038.407,00	(102.276.704,00)	97,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.165.328.827,00	1.100.893.145,00	(64.435.682,00)	94,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.165.328.827,00	1.100.893.145,00	(64.435.682,00)	94,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.165.328.827,00	1.100.893.145,00	(64.435.682,00)	94,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	772.049.030,00	765.777.633,00	(6.271.397,00)	99,18	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	772.049.030,00	765.777.633,00	(6.271.397,00)	99,18	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.049.030,00	765.777.633,00	(6.271.397,00)	99,18	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	3.859.585.479,82	3.069.259.154,05	(790.326.325,77)	79,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.839.805.279,82	3.050.259.154,05	(789.546.125,77)	79,43	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.839.805.279,82	3.050.259.154,05	(789.546.125,77)	79,43	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	19.780.200,00	19.000.000,00	(780.200,00)	96,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.780.200,00	19.000.000,00	(780.200,00)	96,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	4.691.326.335,00	4.204.146.122,00	(487.180.213,00)	89,61	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.636.639.187,00	1.186.363.100,00	(450.276.087,00)	72,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.636.639.187,00	1.186.363.100,00	(450.276.087,00)	72,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.636.639.187,00	1.186.363.100,00	(450.276.087,00)	72,48	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	350.869.000,00	347.236.836,00	(3.632.164,00)	98,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	350.869.000,00	347.236.836,00	(3.632.164,00)	98,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.869.000,00	347.236.836,00	(3.632.164,00)	98,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	33.089.792,00	0,00	(33.089.792,00)	0,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.089.792,00	0,00	(33.089.792,00)	0,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.089.792,00	0,00	(33.089.792,00)	0,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.670.728.356,00	2.670.546.186,00	(182.170,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.670.728.356,00	2.670.546.186,00	(182.170,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	2.640.017.856,00	2.640.017.856,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.710.500,00	30.528.330,00	(182.170,00)	99,40	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	6.317.243.702,00	6.128.801.183,00	(188.442.519,00)	97,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	2.576.628.313,00	2.515.912.420,00	(60.715.893,00)	97,64	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.576.628.313,00	2.515.912.420,00	(60.715.893,00)	97,64	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.576.628.313,00	2.515.912.420,00	(60.715.893,00)	97,64	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	2.526.746.144,00	2.485.616.361,00	(41.129.783,00)	98,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.526.746.144,00	2.485.616.361,00	(41.129.783,00)	98,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.526.746.144,00	2.485.616.361,00	(41.129.783,00)	98,37	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	1.213.869.245,00	1.127.272.402,00	(86.596.843,00)	92,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.213.869.245,00	1.127.272.402,00	(86.596.843,00)	92,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.869.245,00	1.127.272.402,00	(86.596.843,00)	92,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.13		FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	516.396.240,49	397.638.833,00	(118.757.407,49)	77,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.13.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	516.396.240,49	397.638.833,00	(118.757.407,49)	77,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	516.396.240,49	397.638.833,00	(118.757.407,49)	77,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.396.240,49	397.638.833,00	(118.757.407,49)	77,00	
				JUMLAH BELANJA	184.113.876.278,00	176.665.178.765,05	(7.448.697.512,95)	95,95	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(184.113.876.278,00)	(176.665.178.765,05)	7.448.697.512,95	95,95	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(184.113.876.278,00)	(176.665.178.765,05)	7.448.697.512,95	95,95	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Administrasi Pimpinan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007		5	BELANJA DAERAH	6.098.561.124,40	6.000.053.714,00	(98.507.410,40)	98,38	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.098.561.124,40	6.000.053.714,00	(98.507.410,40)	98,38	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	74.419.650,00	74.290.479,00	(129.171,00)	99,82	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	74.419.650,00	74.290.479,00	(129.171,00)	99,82	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.419.650,00	74.290.479,00	(129.171,00)	99,82	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.419.650,00	74.290.479,00	(129.171,00)	99,82	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	63.272.800,00	55.820.347,00	(7.452.453,00)	88,22	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	63.272.800,00	55.820.347,00	(7.452.453,00)	88,22	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	63.272.800,00	55.820.347,00	(7.452.453,00)	88,22	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.272.800,00	55.820.347,00	(7.452.453,00)	88,22	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	386.148.290,40	386.121.109,00	(27.181,40)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	16.302.900,00	16.302.900,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.302.900,00	16.302.900,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.302.900,00	16.302.900,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	9.608.000,00	9.608.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.608.000,00	9.608.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.608.000,00	9.608.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	360.237.390,40	360.210.209,00	(27.181,40)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	360.237.390,40	360.210.209,00	(27.181,40)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.237.390,40	360.210.209,00	(27.181,40)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8.398.000,00	8.397.594,00	(406,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.398.000,00	8.397.594,00	(406,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	8.398.000,00	8.397.594,00	(406,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.398.000,00	8.397.594,00	(406,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.886.430.218,00	1.839.348.578,00	(47.081.640,00)	97,50	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	123.173.558,00	122.374.000,00	(799.558,00)	99,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	123.173.558,00	122.374.000,00	(799.558,00)	99,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.173.558,00	122.374.000,00	(799.558,00)	99,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	171.600.000,00	171.400.000,00	(200.000,00)	99,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	171.600.000,00	171.400.000,00	(200.000,00)	99,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.600.000,00	171.400.000,00	(200.000,00)	99,88	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.591.656.660,00	1.545.574.578,00	(46.082.082,00)	97,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.591.656.660,00	1.545.574.578,00	(46.082.082,00)	97,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.591.656.660,00	1.545.574.578,00	(46.082.082,00)	97,10	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	193.408.000,00	193.200.558,00	(207.442,00)	99,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	151.238.000,00	151.032.558,00	(205.442,00)	99,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	151.238.000,00	151.032.558,00	(205.442,00)	99,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.238.000,00	151.032.558,00	(205.442,00)	99,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	42.170.000,00	42.168.000,00	(2.000,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	42.170.000,00	42.168.000,00	(2.000,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.170.000,00	42.168.000,00	(2.000,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13		FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.150.744.107,00	1.129.323.045,00	(21.421.062,00)	98,13	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0001		PENYIAPAN MATERI PIMPINAN	51.688.300,00	51.688.300,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.688.300,00	51.688.300,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.688.300,00	51.688.300,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	534.916.344,00	513.685.015,00	(21.231.329,00)	96,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	534.916.344,00	513.685.015,00	(21.231.329,00)	96,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.916.344,00	513.685.015,00	(21.231.329,00)	96,03	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0003		PENGELOLAAN DOKUMENTASI PIMPINAN	564.139.463,00	563.949.730,00	(189.733,00)	99,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	552.094.463,00	551.904.730,00	(189.733,00)	99,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.094.463,00	551.904.730,00	(189.733,00)	99,96	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0003	5.2	BELANJA MODAL	12.045.000,00	12.045.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.045.000,00	12.045.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14		FASILITASI KEPROTOKOLAN	2.335.740.059,00	2.313.552.004,00	(22.188.055,00)	99,05	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0001		FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN ACARA	1.376.008.161,82	1.355.772.495,00	(20.235.666,82)	98,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.376.008.161,82	1.355.772.495,00	(20.235.666,82)	98,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.376.008.161,82	1.355.772.495,00	(20.235.666,82)	98,52	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0002		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	586.156.100,00	584.809.240,00	(1.346.860,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	586.156.100,00	584.809.240,00	(1.346.860,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.156.100,00	584.809.240,00	(1.346.860,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0003		PENGELOLAAN HUBUNGAN KEPROTOKOLAN	373.575.797,18	372.970.269,00	(605.528,18)	99,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	373.575.797,18	372.970.269,00	(605.528,18)	99,83	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.575.797,18	372.970.269,00	(605.528,18)	99,83	
				JUMLAH BELANJA	6.098.561.124,40	6.000.053.714,00	(98.507.410,40)	98,38	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.098.561.124,40)	(6.000.053.714,00)	98.507.410,40	98,38	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.098.561.124,40)	(6.000.053.714,00)	98.507.410,40	98,38	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Biro Pengadaan Barang/Jasa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008		5	BELANJA DAERAH	1.402.420.130,00	1.357.399.816,00	(45.020.314,00)	96,78	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.248.562.998,00	1.203.743.816,00	(44.819.182,00)	96,41	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	215.772.410,00	204.482.654,00	(11.289.756,00)	94,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	215.772.410,00	204.482.654,00	(11.289.756,00)	94,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	215.772.410,00	204.482.654,00	(11.289.756,00)	94,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.772.410,00	204.482.654,00	(11.289.756,00)	94,76	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	394.662.266,00	367.100.444,00	(27.561.822,00)	93,01	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.072.600,00	5.024.970,00	(47.630,00)	99,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.072.600,00	5.024.970,00	(47.630,00)	99,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.072.600,00	5.024.970,00	(47.630,00)	99,06	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.697.746,00	21.983.550,00	(7.714.196,00)	74,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	29.697.746,00	21.983.550,00	(7.714.196,00)	74,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.697.746,00	21.983.550,00	(7.714.196,00)	74,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	124.171.600,00	120.973.120,00	(3.198.480,00)	97,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	124.171.600,00	120.973.120,00	(3.198.480,00)	97,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.171.600,00	120.973.120,00	(3.198.480,00)	97,42	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.004.400,00	11.328.240,00	(1.676.160,00)	87,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.004.400,00	11.328.240,00	(1.676.160,00)	87,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.004.400,00	11.328.240,00	(1.676.160,00)	87,11	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11.520.000,00	11.280.000,00	(240.000,00)	97,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.520.000,00	11.280.000,00	(240.000,00)	97,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	11.280.000,00	(240.000,00)	97,91	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.950.000,00	1.050.000,00	(3.900.000,00)	21,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.950.000,00	1.050.000,00	(3.900.000,00)	21,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	1.050.000,00	(3.900.000,00)	21,21	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	206.245.920,00	195.460.564,00	(10.785.356,00)	94,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	206.245.920,00	195.460.564,00	(10.785.356,00)	94,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.245.920,00	195.460.564,00	(10.785.356,00)	94,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	443.549.560,00	438.518.660,00	(5.030.900,00)	98,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.666.000,00	2.660.000,00	(6.000,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.666.000,00	2.660.000,00	(6.000,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.666.000,00	2.660.000,00	(6.000,00)	99,77	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.592.000,00	6.959.129,00	(1.632.871,00)	80,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.592.000,00	6.959.129,00	(1.632.871,00)	80,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.592.000,00	6.959.129,00	(1.632.871,00)	80,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	348.291.560,00	344.899.531,00	(3.392.029,00)	99,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	348.291.560,00	344.899.531,00	(3.392.029,00)	99,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.291.560,00	344.899.531,00	(3.392.029,00)	99,02	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	194.578.762,00	193.642.058,00	(936.704,00)	99,51	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	184.638.762,00	184.151.558,00	(487.204,00)	99,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	184.638.762,00	184.151.558,00	(487.204,00)	99,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.638.762,00	184.151.558,00	(487.204,00)	99,73	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.940.000,00	9.490.500,00	(449.500,00)	95,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.940.000,00	9.490.500,00	(449.500,00)	95,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	9.490.500,00	(449.500,00)	95,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	153.857.132,00	153.656.000,00	(201.132,00)	99,86	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	19.891.800,00	19.787.000,00	(104.800,00)	99,47	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0001		PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA	10.570.900,00	10.525.000,00	(45.900,00)	99,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.570.900,00	10.525.000,00	(45.900,00)	99,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.570.900,00	10.525.000,00	(45.900,00)	99,56	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0003		PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	9.320.900,00	9.262.000,00	(58.900,00)	99,36	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.320.900,00	9.262.000,00	(58.900,00)	99,36	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.320.900,00	9.262.000,00	(58.900,00)	99,36	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	133.965.332,00	133.869.000,00	(96.332,00)	99,92	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0001		PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	3.620.900,00	3.525.000,00	(95.900,00)	97,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.620.900,00	3.525.000,00	(95.900,00)	97,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.620.900,00	3.525.000,00	(95.900,00)	97,35	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0002		PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	130.344.432,00	130.344.000,00	(432,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	130.344.432,00	130.344.000,00	(432,00)	99,99	
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.344.432,00	130.344.000,00	(432,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	1.402.420.130,00	1.357.399.816,00	(45.020.314,00)	96,78	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.402.420.130,00)	(1.357.399.816,00)	45.020.314,00	96,78	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.402.420.130,00)	(1.357.399.816,00)	45.020.314,00	96,78	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000		5	BELANJA DAERAH	137.467.613.579,00	132.946.566.381,00	(4.521.047.198,00)	96,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	82.165.695.368,82	78.593.673.315,00	(3.572.022.053,82)	95,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	583.138.236,81	459.551.417,00	(123.586.819,81)	78,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	165.442.058,81	162.799.254,00	(2.642.804,81)	98,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	165.442.058,81	162.799.254,00	(2.642.804,81)	98,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.442.058,81	162.799.254,00	(2.642.804,81)	98,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	97.528.404,00	96.928.627,00	(599.777,00)	99,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	97.528.404,00	96.928.627,00	(599.777,00)	99,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.528.404,00	96.928.627,00	(599.777,00)	99,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	92.742.834,00	91.865.641,00	(877.193,00)	99,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	92.742.834,00	91.865.641,00	(877.193,00)	99,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.742.834,00	91.865.641,00	(877.193,00)	99,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	20.000.000,00	19.609.620,00	(390.380,00)	98,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.609.620,00	(390.380,00)	98,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.609.620,00	(390.380,00)	98,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	207.424.940,00	88.348.275,00	(119.076.665,00)	42,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	207.424.940,00	88.348.275,00	(119.076.665,00)	42,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.424.940,00	88.348.275,00	(119.076.665,00)	42,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	20.007.165.827,49	19.226.116.644,00	(781.049.183,49)	96,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	18.989.788.649,49	18.337.953.776,00	(651.834.873,49)	96,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.989.788.649,49	18.337.953.776,00	(651.834.873,49)	96,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	18.989.788.649,49	18.337.953.776,00	(651.834.873,49)	96,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	804.936.000,00	701.919.390,00	(103.016.610,00)	87,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	804.936.000,00	701.919.390,00	(103.016.610,00)	87,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	804.936.000,00	701.919.390,00	(103.016.610,00)	87,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	73.016.178,00	64.082.278,00	(8.933.900,00)	87,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	73.016.178,00	64.082.278,00	(8.933.900,00)	87,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.016.178,00	64.082.278,00	(8.933.900,00)	87,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	93.519.900,00	81.185.000,00	(12.334.900,00)	86,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	93.519.900,00	81.185.000,00	(12.334.900,00)	86,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.519.900,00	81.185.000,00	(12.334.900,00)	86,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	45.905.100,00	40.976.200,00	(4.928.900,00)	89,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	45.905.100,00	40.976.200,00	(4.928.900,00)	89,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.905.100,00	40.976.200,00	(4.928.900,00)	89,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	88.949.300,00	85.431.000,00	(3.518.300,00)	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34.949.300,00	31.431.000,00	(3.518.300,00)	89,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.949.300,00	31.431.000,00	(3.518.300,00)	89,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.949.300,00	31.431.000,00	(3.518.300,00)	89,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	17.545.790.741,89	17.394.982.927,00	(150.807.814,89)	99,14	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	622.350.000,00	620.997.670,00	(1.352.330,00)	99,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	272.750.000,00	271.397.670,00	(1.352.330,00)	99,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.750.000,00	271.397.670,00	(1.352.330,00)	99,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	349.600.000,00	349.600.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	349.600.000,00	349.600.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	11.766.168.578,89	11.684.853.139,00	(81.315.439,89)	99,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.448.168.578,89	11.366.853.139,00	(81.315.439,89)	99,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.448.168.578,89	11.366.853.139,00	(81.315.439,89)	99,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.996.520.063,00	4.962.355.218,00	(34.164.845,00)	99,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.996.520.063,00	4.962.355.218,00	(34.164.845,00)	99,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.520.063,00	4.962.355.218,00	(34.164.845,00)	99,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	160.752.100,00	126.776.900,00	(33.975.200,00)	78,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	160.752.100,00	126.776.900,00	(33.975.200,00)	78,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.752.100,00	126.776.900,00	(33.975.200,00)	78,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.665.900.000,00	2.363.914.675,00	(301.985.325,00)	88,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007		PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	2.305.650.000,00	2.303.704.675,00	(1.945.325,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.543.710,00	3.321.675,00	(222.035,00)	93,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.543.710,00	3.321.675,00	(222.035,00)	93,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007	5.2	BELANJA MODAL	2.302.106.290,00	2.300.383.000,00	(1.723.290,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.302.106.290,00	2.300.383.000,00	(1.723.290,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	360.250.000,00	60.210.000,00	(300.040.000,00)	16,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	60.250.800,00	60.210.000,00	(40.800,00)	99,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.250.800,00	60.210.000,00	(40.800,00)	99,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	299.999.200,00	0,00	(299.999.200,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.999.200,00	0,00	(299.999.200,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.158.305.605,00	3.864.866.353,00	(293.439.252,00)	92,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.024.333.165,00	1.747.095.491,00	(277.237.674,00)	86,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.024.333.165,00	1.747.095.491,00	(277.237.674,00)	86,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.024.333.165,00	1.747.095.491,00	(277.237.674,00)	86,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.133.972.440,00	2.117.770.862,00	(16.201.578,00)	99,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.133.972.440,00	2.117.770.862,00	(16.201.578,00)	99,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.133.972.440,00	2.117.770.862,00	(16.201.578,00)	99,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.555.566.504,00	5.634.403.352,00	(921.163.152,00)	85,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3.023.064.460,00	3.016.536.222,00	(6.528.238,00)	99,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.023.064.460,00	3.016.536.222,00	(6.528.238,00)	99,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.023.064.460,00	3.016.536.222,00	(6.528.238,00)	99,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	249.445.000,00	247.270.200,00	(2.174.800,00)	99,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	249.445.000,00	247.270.200,00	(2.174.800,00)	99,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.445.000,00	247.270.200,00	(2.174.800,00)	99,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	292.280.000,00	283.026.890,00	(9.253.110,00)	96,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	292.280.000,00	283.026.890,00	(9.253.110,00)	96,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.280.000,00	283.026.890,00	(9.253.110,00)	96,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	437.440.000,00	91.193.160,00	(346.246.840,00)	20,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	437.440.000,00	91.193.160,00	(346.246.840,00)	20,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.440.000,00	91.193.160,00	(346.246.840,00)	20,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	167.226.888,00	167.226.888,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	167.226.888,00	167.226.888,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.226.888,00	167.226.888,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2.386.110.156,00	1.829.149.992,00	(556.960.164,00)	76,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.386.110.156,00	1.829.149.992,00	(556.960.164,00)	76,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.386.110.156,00	1.829.149.992,00	(556.960.164,00)	76,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	30.419.238.361,63	29.444.319.474,00	(974.918.887,63)	96,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	29.998.611.361,63	29.383.911.364,00	(614.699.997,63)	97,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.998.611.361,63	29.383.911.364,00	(614.699.997,63)	97,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	29.998.611.361,63	29.383.911.364,00	(614.699.997,63)	97,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	420.627.000,00	60.408.110,00	(360.218.890,00)	14,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	420.627.000,00	60.408.110,00	(360.218.890,00)	14,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.627.000,00	60.408.110,00	(360.218.890,00)	14,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	141.640.792,00	120.087.473,00	(21.553.319,00)	84,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.16.0002		FASILITASI FRAKSI DPRD	141.640.792,00	120.087.473,00	(21.553.319,00)	84,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.16.0002	5.1	BELANJA OPERASI	141.640.792,00	120.087.473,00	(21.553.319,00)	84,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.16.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.640.792,00	120.087.473,00	(21.553.319,00)	84,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	55.301.918.210,18	54.352.893.066,00	(949.025.144,18)	98,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01		PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD	610.000.000,00	521.800.973,00	(88.199.027,00)	85,54	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	120.000.000,00	114.057.760,00	(5.942.240,00)	95,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	114.057.760,00	(5.942.240,00)	95,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	114.057.760,00	(5.942.240,00)	95,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA	330.000.000,00	322.764.560,00	(7.235.440,00)	97,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000,00	322.764.560,00	(7.235.440,00)	97,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	322.764.560,00	(7.235.440,00)	97,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0003		PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	80.000.000,00	46.127.163,00	(33.872.837,00)	57,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	46.127.163,00	(33.872.837,00)	57,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	46.127.163,00	(33.872.837,00)	57,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0004		FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	80.000.000,00	38.851.490,00	(41.148.510,00)	48,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	38.851.490,00	(41.148.510,00)	48,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	38.851.490,00	(41.148.510,00)	48,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	347.937.000,00	341.643.722,00	(6.293.278,00)	98,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.02.0003		PEMBAHASAN APBD	347.937.000,00	341.643.722,00	(6.293.278,00)	98,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	347.937.000,00	341.643.722,00	(6.293.278,00)	98,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.937.000,00	341.643.722,00	(6.293.278,00)	98,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	5.950.866.768,00	5.732.686.156,00	(218.180.612,00)	96,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	1.007.560.000,00	798.848.363,00	(208.711.637,00)	79,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.007.560.000,00	798.848.363,00	(208.711.637,00)	79,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.007.560.000,00	798.848.363,00	(208.711.637,00)	79,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0004		PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	2.119.000.000,00	2.118.000.000,00	(1.000.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.119.000.000,00	2.118.000.000,00	(1.000.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.119.000.000,00	2.118.000.000,00	(1.000.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	506.695.000,00	505.695.000,00	(1.000.000,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	506.695.000,00	505.695.000,00	(1.000.000,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.695.000,00	505.695.000,00	(1.000.000,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0006		PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	1.118.903.624,00	1.117.611.008,00	(1.292.616,00)	99,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.118.903.624,00	1.117.611.008,00	(1.292.616,00)	99,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.118.903.624,00	1.117.611.008,00	(1.292.616,00)	99,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	1.198.708.144,00	1.192.531.785,00	(6.176.359,00)	99,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.198.708.144,00	1.192.531.785,00	(6.176.359,00)	99,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.708.144,00	1.192.531.785,00	(6.176.359,00)	99,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	24.625.230.072,00	24.340.653.069,00	(284.577.003,00)	98,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05.0003		PELAKSANAAN RESES	24.625.230.072,00	24.340.653.069,00	(284.577.003,00)	98,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.625.230.072,00	24.340.653.069,00	(284.577.003,00)	98,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.625.230.072,00	24.340.653.069,00	(284.577.003,00)	98,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08		FASILITASI TUGAS DPRD	23.767.884.370,18	23.416.109.146,00	(351.775.224,18)	98,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	20.545.756.330,18	20.296.172.750,00	(249.583.580,18)	98,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.545.756.330,18	20.296.172.750,00	(249.583.580,18)	98,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.545.756.330,18	20.296.172.750,00	(249.583.580,18)	98,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0002		PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	100.000.000,00	44.302.150,00	(55.697.850,00)	44,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	44.302.150,00	(55.697.850,00)	44,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	44.302.150,00	(55.697.850,00)	44,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0003		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	254.562.540,00	217.454.394,00	(37.108.146,00)	85,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	254.562.540,00	217.454.394,00	(37.108.146,00)	85,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.562.540,00	217.454.394,00	(37.108.146,00)	85,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0004		FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	2.867.565.500,00	2.858.179.852,00	(9.385.648,00)	99,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.867.565.500,00	2.858.179.852,00	(9.385.648,00)	99,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.867.565.500,00	2.858.179.852,00	(9.385.648,00)	99,67	
				JUMLAH BELANJA	137.467.613.579,00	132.946.566.381,00	(4.521.047.198,00)	96,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(137.467.613.579,00)	(132.946.566.381,00)	4.521.047.198,00	96,71	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(137.467.613.579,00)	(132.946.566.381,00)	4.521.047.198,00	96,71	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000		5	BELANJA DAERAH	27.709.605.534,93	27.430.596.487,00	(279.009.047,93)	98,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.589.827.003,93	24.378.274.522,00	(211.552.481,93)	99,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	154.751.300,00	153.689.109,00	(1.062.191,00)	99,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	154.751.300,00	153.689.109,00	(1.062.191,00)	99,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	154.751.300,00	153.689.109,00	(1.062.191,00)	99,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.751.300,00	153.689.109,00	(1.062.191,00)	99,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	21.572.701.259,00	21.409.292.787,00	(163.408.472,00)	99,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	21.019.501.259,00	20.866.488.787,00	(153.012.472,00)	99,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.019.501.259,00	20.866.488.787,00	(153.012.472,00)	99,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	21.019.501.259,00	20.866.488.787,00	(153.012.472,00)	99,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	553.200.000,00	542.804.000,00	(10.396.000,00)	98,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	553.200.000,00	542.804.000,00	(10.396.000,00)	98,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.200.000,00	542.804.000,00	(10.396.000,00)	98,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	27.100.000,00	26.600.000,00	(500.000,00)	98,15	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27.100.000,00	26.600.000,00	(500.000,00)	98,15	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.100.000,00	26.600.000,00	(500.000,00)	98,15	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.100.000,00	26.600.000,00	(500.000,00)	98,15	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	812.598.922,00	794.497.176,00	(18.101.746,00)	97,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.278.711,00	10.036.953,00	(241.758,00)	97,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.278.711,00	10.036.953,00	(241.758,00)	97,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.278.711,00	10.036.953,00	(241.758,00)	97,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.499.596,00	15.162.600,00	(336.996,00)	97,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.499.596,00	15.162.600,00	(336.996,00)	97,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.499.596,00	15.162.600,00	(336.996,00)	97,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	124.171.273,00	122.435.012,00	(1.736.261,00)	98,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	124.171.273,00	122.435.012,00	(1.736.261,00)	98,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.171.273,00	122.435.012,00	(1.736.261,00)	98,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	124.197.502,00	123.952.040,00	(245.462,00)	99,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	124.197.502,00	123.952.040,00	(245.462,00)	99,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.197.502,00	123.952.040,00	(245.462,00)	99,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	44.950.000,00	39.980.000,00	(4.970.000,00)	88,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	44.950.000,00	39.980.000,00	(4.970.000,00)	88,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.950.000,00	39.980.000,00	(4.970.000,00)	88,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	59.237.840,00	50.746.673,00	(8.491.167,00)	85,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	59.237.840,00	50.746.673,00	(8.491.167,00)	85,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.237.840,00	50.746.673,00	(8.491.167,00)	85,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	434.264.000,00	432.183.898,00	(2.080.102,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	434.264.000,00	432.183.898,00	(2.080.102,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.264.000,00	432.183.898,00	(2.080.102,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	64.582.771,83	63.825.000,00	(757.771,83)	98,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	64.582.771,83	63.825.000,00	(757.771,83)	98,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	477.771,83	0,00	(477.771,83)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.771,83	0,00	(477.771,83)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	64.105.000,00	63.825.000,00	(280.000,00)	99,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.105.000,00	63.825.000,00	(280.000,00)	99,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.337.515.029,10	1.320.479.494,00	(17.035.535,10)	98,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	70.000.000,00	64.980.680,00	(5.019.320,00)	92,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	64.980.680,00	(5.019.320,00)	92,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	64.980.680,00	(5.019.320,00)	92,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	194.000.000,00	189.800.000,00	(4.200.000,00)	97,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	194.000.000,00	189.800.000,00	(4.200.000,00)	97,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.000.000,00	189.800.000,00	(4.200.000,00)	97,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.061.515.029,10	1.053.698.814,00	(7.816.215,10)	99,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.061.515.029,10	1.053.698.814,00	(7.816.215,10)	99,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.515.029,10	1.053.698.814,00	(7.816.215,10)	99,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	620.577.722,00	609.890.956,00	(10.686.766,00)	98,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.757.900,00	94.444.866,00	(1.313.034,00)	98,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.757.900,00	94.444.866,00	(1.313.034,00)	98,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.757.900,00	94.444.866,00	(1.313.034,00)	98,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	325.975.822,00	317.615.230,00	(8.360.592,00)	97,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	325.975.822,00	317.615.230,00	(8.360.592,00)	97,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.975.822,00	317.615.230,00	(8.360.592,00)	97,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	32.550.000,00	31.984.650,00	(565.350,00)	98,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.550.000,00	31.984.650,00	(565.350,00)	98,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.550.000,00	31.984.650,00	(565.350,00)	98,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	166.294.000,00	165.846.210,00	(447.790,00)	99,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	166.294.000,00	165.846.210,00	(447.790,00)	99,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.294.000,00	165.846.210,00	(447.790,00)	99,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.176.054.010,00	2.133.795.679,00	(42.258.331,00)	98,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1.772.456.950,00	1.735.405.725,00	(37.051.225,00)	97,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0002		KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA	114.172.500,00	112.650.533,00	(1.521.967,00)	98,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	114.172.500,00	112.650.533,00	(1.521.967,00)	98,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.172.500,00	112.650.533,00	(1.521.967,00)	98,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0003		PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	54.793.900,00	53.558.000,00	(1.235.900,00)	97,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.793.900,00	53.558.000,00	(1.235.900,00)	97,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.793.900,00	53.558.000,00	(1.235.900,00)	97,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	123.712.900,00	122.202.500,00	(1.510.400,00)	98,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	123.712.900,00	122.202.500,00	(1.510.400,00)	98,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.712.900,00	122.202.500,00	(1.510.400,00)	98,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI	327.946.000,00	318.802.983,00	(9.143.017,00)	97,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	327.946.000,00	318.802.983,00	(9.143.017,00)	97,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.946.000,00	318.802.983,00	(9.143.017,00)	97,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0006		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI	1.151.831.650,00	1.128.191.709,00	(23.639.941,00)	97,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.151.831.650,00	1.128.191.709,00	(23.639.941,00)	97,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.151.831.650,00	1.128.191.709,00	(23.639.941,00)	97,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000,00	12.176.325,00	(323.675,00)	97,41	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.02.0001		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.500.000,00	12.176.325,00	(323.675,00)	97,41	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.176.325,00	(323.675,00)	97,41	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.176.325,00	(323.675,00)	97,41	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	391.097.060,00	386.213.629,00	(4.883.431,00)	98,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0001		KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI	226.767.460,00	223.217.009,00	(3.550.451,00)	98,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	226.767.460,00	223.217.009,00	(3.550.451,00)	98,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.767.460,00	223.217.009,00	(3.550.451,00)	98,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0004		FASILITASI/EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	164.329.600,00	162.996.620,00	(1.332.980,00)	99,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	164.329.600,00	162.996.620,00	(1.332.980,00)	99,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.329.600,00	162.996.620,00	(1.332.980,00)	99,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	943.724.521,00	918.526.286,00	(25.198.235,00)	97,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	359.596.731,00	339.555.577,00	(20.041.154,00)	94,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	57.727.400,00	56.607.800,00	(1.119.600,00)	98,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.727.400,00	56.607.800,00	(1.119.600,00)	98,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.727.400,00	56.607.800,00	(1.119.600,00)	98,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	15.279.400,00	14.018.500,00	(1.260.900,00)	91,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.279.400,00	14.018.500,00	(1.260.900,00)	91,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.279.400,00	14.018.500,00	(1.260.900,00)	91,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	286.589.931,00	268.929.277,00	(17.660.654,00)	93,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	286.589.931,00	268.929.277,00	(17.660.654,00)	93,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.589.931,00	268.929.277,00	(17.660.654,00)	93,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	302.781.190,00	300.957.484,00	(1.823.706,00)	99,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	208.564.030,00	208.370.193,00	(193.837,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	208.564.030,00	208.370.193,00	(193.837,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.564.030,00	208.370.193,00	(193.837,00)	99,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	55.937.100,00	55.314.504,00	(622.596,00)	98,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.937.100,00	55.314.504,00	(622.596,00)	98,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.937.100,00	55.314.504,00	(622.596,00)	98,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	38.280.060,00	37.272.787,00	(1.007.273,00)	97,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	38.280.060,00	37.272.787,00	(1.007.273,00)	97,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.280.060,00	37.272.787,00	(1.007.273,00)	97,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	281.346.600,00	278.013.225,00	(3.333.375,00)	98,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	80.733.200,00	79.666.550,00	(1.066.650,00)	98,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.733.200,00	79.666.550,00	(1.066.650,00)	98,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.733.200,00	79.666.550,00	(1.066.650,00)	98,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	41.298.600,00	40.593.150,00	(705.450,00)	98,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.298.600,00	40.593.150,00	(705.450,00)	98,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.298.600,00	40.593.150,00	(705.450,00)	98,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	51.837.500,00	51.116.250,00	(721.250,00)	98,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.837.500,00	51.116.250,00	(721.250,00)	98,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.837.500,00	51.116.250,00	(721.250,00)	98,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	107.477.300,00	106.637.275,00	(840.025,00)	99,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	107.477.300,00	106.637.275,00	(840.025,00)	99,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.477.300,00	106.637.275,00	(840.025,00)	99,21	
				JUMLAH BELANJA	27.709.605.534,93	27.430.596.487,00	(279.009.047,93)	98,99	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(27.709.605.534,93)	(27.430.596.487,00)	279.009.047,93	98,99	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(27.709.605.534,93)	(27.430.596.487,00)	279.009.047,93	98,99	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000		5	BELANJA DAERAH	140.053.042,07	129.083.433,00	(10.969.609,07)	92,16	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	140.053.042,07	129.083.433,00	(10.969.609,07)	92,16	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	79.187.682,07	76.407.998,00	(2.779.684,07)	96,48	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0004		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI	32.515.230,00	31.433.500,00	(1.081.730,00)	96,67	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.515.230,00	31.433.500,00	(1.081.730,00)	96,67	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.515.230,00	31.433.500,00	(1.081.730,00)	96,67	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0005		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI	46.672.452,07	44.974.498,00	(1.697.954,07)	96,36	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.672.452,07	44.974.498,00	(1.697.954,07)	96,36	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.672.452,07	44.974.498,00	(1.697.954,07)	96,36	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.02		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	27.195.730,00	20.264.725,00	(6.931.005,00)	74,51	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.02.0001		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK- ASPEK SOSIAL	27.195.730,00	20.264.725,00	(6.931.005,00)	74,51	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.195.730,00	20.264.725,00	(6.931.005,00)	74,51	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.195.730,00	20.264.725,00	(6.931.005,00)	74,51	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	33.669.630,00	32.410.710,00	(1.258.920,00)	96,26	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.04.0003		DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	33.669.630,00	32.410.710,00	(1.258.920,00)	96,26	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.669.630,00	32.410.710,00	(1.258.920,00)	96,26	
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.669.630,00	32.410.710,00	(1.258.920,00)	96,26	
				JUMLAH BELANJA	140.053.042,07	129.083.433,00	(10.969.609,07)	92,16	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(140.053.042,07)	(129.083.433,00)	10.969.609,07	92,16	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(140.053.042,07)	(129.083.433,00)	10.969.609,07	92,16	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.087.653.025.476,98	2.062.445.021.409,27	(25.208.004.067,71)	98,79	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.525.913.674,98	87.641.498.450,70	4.115.584.775,72	104,92	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.284.580.000,00	1.430.680.000,00	146.100.000,00	111,37	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	(824.463.459,00)	73,40	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	79.141.333.674,98	83.935.281.909,70	4.793.948.234,72	106,05	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	(29.827.728.778,00)	98,51	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	(29.827.728.778,00)	98,51	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	504.139.934,57	504.139.934,57	0,00	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	504.139.934,57	504.139.934,57	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.087.653.025.476,98	2.062.445.021.409,27	(25.208.004.067,71)	98,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		5	BELANJA DAERAH	774.045.702.637,04	754.777.212.470,95	(19.268.490.166,09)	97,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.251.689.423,44	41.109.331.525,95	(3.142.357.897,49)	92,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	480.844.850,00	458.841.044,00	(22.003.806,00)	95,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	278.489.459,00	269.677.068,00	(8.812.391,00)	96,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	278.489.459,00	269.677.068,00	(8.812.391,00)	96,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.489.459,00	269.677.068,00	(8.812.391,00)	96,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	79.454.634,00	72.417.036,00	(7.037.598,00)	91,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.454.634,00	72.417.036,00	(7.037.598,00)	91,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.454.634,00	72.417.036,00	(7.037.598,00)	91,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	70.972.064,00	67.095.923,00	(3.876.141,00)	94,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	70.972.064,00	67.095.923,00	(3.876.141,00)	94,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.972.064,00	67.095.923,00	(3.876.141,00)	94,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	51.928.693,00	49.651.017,00	(2.277.676,00)	95,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	51.928.693,00	49.651.017,00	(2.277.676,00)	95,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.928.693,00	49.651.017,00	(2.277.676,00)	95,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	35.777.531.585,94	33.356.856.724,00	(2.420.674.861,94)	93,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	24.890.857.472,94	23.819.298.523,00	(1.071.558.949,94)	95,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.890.857.472,94	23.819.298.523,00	(1.071.558.949,94)	95,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	24.890.857.472,94	23.819.298.523,00	(1.071.558.949,94)	95,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	10.821.871.500,00	9.481.671.850,00	(1.340.199.650,00)	87,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.821.871.500,00	9.481.671.850,00	(1.340.199.650,00)	87,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.821.871.500,00	9.481.671.850,00	(1.340.199.650,00)	87,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	11.946.814,00	11.714.470,00	(232.344,00)	98,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.946.814,00	11.714.470,00	(232.344,00)	98,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.946.814,00	11.714.470,00	(232.344,00)	98,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	52.855.799,00	44.171.881,00	(8.683.918,00)	83,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	52.855.799,00	44.171.881,00	(8.683.918,00)	83,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.855.799,00	44.171.881,00	(8.683.918,00)	83,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	816.899.810,00	639.468.027,00	(177.431.783,00)	78,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	711.327.810,00	580.144.117,00	(131.183.693,00)	81,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	711.327.810,00	580.144.117,00	(131.183.693,00)	81,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	711.327.810,00	580.144.117,00	(131.183.693,00)	81,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	105.572.000,00	59.323.910,00	(46.248.090,00)	56,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	105.572.000,00	59.323.910,00	(46.248.090,00)	56,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.572.000,00	59.323.910,00	(46.248.090,00)	56,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.497.573.742,00	2.196.533.920,00	(301.039.822,00)	87,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	60.152.157,00	59.672.566,00	(479.591,00)	99,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.152.157,00	59.672.566,00	(479.591,00)	99,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.152.157,00	59.672.566,00	(479.591,00)	99,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	155.225.719,00	152.559.434,00	(2.666.285,00)	98,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	155.225.719,00	152.559.434,00	(2.666.285,00)	98,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.225.719,00	152.559.434,00	(2.666.285,00)	98,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	165.363.534,00	152.732.277,00	(12.631.257,00)	92,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	165.363.534,00	152.732.277,00	(12.631.257,00)	92,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.363.534,00	152.732.277,00	(12.631.257,00)	92,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	195.503.800,00	189.176.785,00	(6.327.015,00)	96,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	195.503.800,00	189.176.785,00	(6.327.015,00)	96,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.503.800,00	189.176.785,00	(6.327.015,00)	96,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	92.750.285,00	91.939.474,00	(810.811,00)	99,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	92.750.285,00	91.939.474,00	(810.811,00)	99,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.750.285,00	91.939.474,00	(810.811,00)	99,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	50.880.000,00	42.455.660,00	(8.424.340,00)	83,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.880.000,00	42.455.660,00	(8.424.340,00)	83,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.880.000,00	42.455.660,00	(8.424.340,00)	83,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.427.033.111,00	1.172.090.528,00	(254.942.583,00)	82,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.427.033.111,00	1.172.090.528,00	(254.942.583,00)	82,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.427.033.111,00	1.172.090.528,00	(254.942.583,00)	82,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	350.665.136,00	335.907.196,00	(14.757.940,00)	95,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	350.665.136,00	335.907.196,00	(14.757.940,00)	95,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.665.136,00	335.907.196,00	(14.757.940,00)	95,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.151.204.763,00	1.103.704.648,00	(47.500.115,00)	95,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	99.434.072,00	96.591.900,00	(2.842.172,00)	97,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.087.072,00	1.642.500,00	(444.572,00)	78,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.087.072,00	1.642.500,00	(444.572,00)	78,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	97.347.000,00	94.949.400,00	(2.397.600,00)	97,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.347.000,00	94.949.400,00	(2.397.600,00)	97,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	909.631.059,00	871.662.490,00	(37.968.569,00)	95,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.550.760,00	17.050.490,00	(5.500.270,00)	75,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.550.760,00	17.050.490,00	(5.500.270,00)	75,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	887.080.299,00	854.612.000,00	(32.468.299,00)	96,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	887.080.299,00	854.612.000,00	(32.468.299,00)	96,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0008		PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD	122.513.722,00	118.612.458,00	(3.901.264,00)	96,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0008	5.1	BELANJA OPERASI	32.513.722,00	29.756.958,00	(2.756.764,00)	91,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.513.722,00	29.756.958,00	(2.756.764,00)	91,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0008	5.2	BELANJA MODAL	90.000.000,00	88.855.500,00	(1.144.500,00)	98,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0008	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	90.000.000,00	88.855.500,00	(1.144.500,00)	98,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	19.625.910,00	16.837.800,00	(2.788.110,00)	85,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	19.625.910,00	16.837.800,00	(2.788.110,00)	85,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.625.910,00	16.837.800,00	(2.788.110,00)	85,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.266.158.440,00	2.183.905.069,00	(82.253.371,00)	96,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	597.740.743,00	569.927.906,00	(27.812.837,00)	95,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	597.740.743,00	569.927.906,00	(27.812.837,00)	95,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.740.743,00	569.927.906,00	(27.812.837,00)	95,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	158.465.145,00	158.171.000,00	(294.145,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	158.465.145,00	158.171.000,00	(294.145,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.465.145,00	158.171.000,00	(294.145,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.509.952.552,00	1.455.806.163,00	(54.146.389,00)	96,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.509.952.552,00	1.455.806.163,00	(54.146.389,00)	96,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.509.952.552,00	1.455.806.163,00	(54.146.389,00)	96,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.261.476.232,50	1.170.022.093,95	(91.454.138,55)	92,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	82.403.378,00	61.666.456,00	(20.736.922,00)	74,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	82.403.378,00	61.666.456,00	(20.736.922,00)	74,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.403.378,00	61.666.456,00	(20.736.922,00)	74,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	608.520.145,00	560.654.976,00	(47.865.169,00)	92,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	608.520.145,00	560.654.976,00	(47.865.169,00)	92,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.520.145,00	560.654.976,00	(47.865.169,00)	92,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	117.722.833,00	111.544.975,00	(6.177.858,00)	94,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	117.722.833,00	111.544.975,00	(6.177.858,00)	94,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.722.833,00	111.544.975,00	(6.177.858,00)	94,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	372.594.876,50	356.020.686,95	(16.574.189,55)	95,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	323.301.719,00	306.962.016,95	(16.339.702,05)	94,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.301.719,00	306.962.016,95	(16.339.702,05)	94,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	49.293.157,50	49.058.670,00	(234.487,50)	99,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.293.157,50	49.058.670,00	(234.487,50)	99,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	80.235.000,00	80.135.000,00	(100.000,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	80.235.000,00	80.135.000,00	(100.000,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.235.000,00	80.135.000,00	(100.000,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	727.026.712.073,60	711.247.379.828,00	(15.779.332.245,60)	97,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	2.516.931.409,00	2.319.604.848,00	(197.326.561,00)	92,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	171.599.800,00	167.755.421,00	(3.844.379,00)	97,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	171.599.800,00	167.755.421,00	(3.844.379,00)	97,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.599.800,00	167.755.421,00	(3.844.379,00)	97,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	116.163.873,00	106.522.697,00	(9.641.176,00)	91,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.163.873,00	106.522.697,00	(9.641.176,00)	91,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.163.873,00	106.522.697,00	(9.641.176,00)	91,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0003		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA- SKPD	77.505.926,00	73.225.108,00	(4.280.818,00)	94,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	77.505.926,00	73.225.108,00	(4.280.818,00)	94,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.505.926,00	73.225.108,00	(4.280.818,00)	94,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0004		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	81.501.898,00	70.269.978,00	(11.231.920,00)	86,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	81.501.898,00	70.269.978,00	(11.231.920,00)	86,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.501.898,00	70.269.978,00	(11.231.920,00)	86,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	302.529.028,00	293.411.061,00	(9.117.967,00)	96,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	302.529.028,00	293.411.061,00	(9.117.967,00)	96,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.529.028,00	293.411.061,00	(9.117.967,00)	96,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	276.811.549,00	272.002.919,00	(4.808.630,00)	98,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	276.811.549,00	272.002.919,00	(4.808.630,00)	98,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.811.549,00	272.002.919,00	(4.808.630,00)	98,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0009		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	285.523.424,00	252.970.246,00	(32.553.178,00)	88,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	285.523.424,00	252.970.246,00	(32.553.178,00)	88,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.523.424,00	252.970.246,00	(32.553.178,00)	88,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0010		KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	227.450.670,00	222.216.782,00	(5.233.888,00)	97,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	227.450.670,00	222.216.782,00	(5.233.888,00)	97,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.450.670,00	222.216.782,00	(5.233.888,00)	97,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0011		KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	708.966.256,00	616.113.251,00	(92.853.005,00)	86,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	708.966.256,00	616.113.251,00	(92.853.005,00)	86,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	708.966.256,00	616.113.251,00	(92.853.005,00)	86,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0012		KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN	97.323.357,00	86.888.398,00	(10.434.959,00)	89,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	97.323.357,00	86.888.398,00	(10.434.959,00)	89,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.323.357,00	86.888.398,00	(10.434.959,00)	89,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0013		PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI	171.555.628,00	158.228.987,00	(13.326.641,00)	92,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	171.555.628,00	158.228.987,00	(13.326.641,00)	92,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.555.628,00	158.228.987,00	(13.326.641,00)	92,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02		PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.198.649.525,00	1.122.966.156,00	(75.683.369,00)	93,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0002		EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN/KOTA	171.298.056,00	163.111.684,00	(8.186.372,00)	95,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	171.298.056,00	163.111.684,00	(8.186.372,00)	95,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.298.056,00	163.111.684,00	(8.186.372,00)	95,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0003		EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA	183.597.810,00	175.401.307,00	(8.196.503,00)	95,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	183.597.810,00	175.401.307,00	(8.196.503,00)	95,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.597.810,00	175.401.307,00	(8.196.503,00)	95,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0004		EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	91.885.735,00	84.151.528,00	(7.734.207,00)	91,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	91.885.735,00	84.151.528,00	(7.734.207,00)	91,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.885.735,00	84.151.528,00	(7.734.207,00)	91,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0005		ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	165.856.400,00	153.086.490,00	(12.769.910,00)	92,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	165.856.400,00	153.086.490,00	(12.769.910,00)	92,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.856.400,00	153.086.490,00	(12.769.910,00)	92,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0006		SOSIALISASI REGULASI BIDANG KEUANGAN DAERAH	263.638.374,00	247.522.172,00	(16.116.202,00)	93,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	263.638.374,00	247.522.172,00	(16.116.202,00)	93,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.638.374,00	247.522.172,00	(16.116.202,00)	93,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0011		PEMBINAAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.630.980,00	146.227.398,00	(10.403.582,00)	93,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	156.630.980,00	146.227.398,00	(10.403.582,00)	93,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.630.980,00	146.227.398,00	(10.403.582,00)	93,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0012		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH	165.742.170,00	153.465.577,00	(12.276.593,00)	92,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	165.742.170,00	153.465.577,00	(12.276.593,00)	92,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.742.170,00	153.465.577,00	(12.276.593,00)	92,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	1.383.446.889,00	1.234.062.575,00	(149.384.314,00)	89,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0001		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	520.372.516,00	487.145.785,00	(33.226.731,00)	93,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	520.372.516,00	487.145.785,00	(33.226.731,00)	93,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.372.516,00	487.145.785,00	(33.226.731,00)	93,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0004		PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH	114.663.472,00	87.259.104,00	(27.404.368,00)	76,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	114.663.472,00	87.259.104,00	(27.404.368,00)	76,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.663.472,00	87.259.104,00	(27.404.368,00)	76,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	215.597.628,00	181.023.434,00	(34.574.194,00)	83,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	215.597.628,00	181.023.434,00	(34.574.194,00)	83,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.597.628,00	181.023.434,00	(34.574.194,00)	83,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0006		KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	113.382.779,00	107.536.869,00	(5.845.910,00)	94,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	113.382.779,00	107.536.869,00	(5.845.910,00)	94,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.382.779,00	107.536.869,00	(5.845.910,00)	94,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0009		REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	72.111.287,00	65.357.759,00	(6.753.528,00)	90,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	72.111.287,00	65.357.759,00	(6.753.528,00)	90,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.111.287,00	65.357.759,00	(6.753.528,00)	90,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0010		PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN	82.389.729,00	66.802.876,00	(15.586.853,00)	81,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	82.389.729,00	66.802.876,00	(15.586.853,00)	81,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.389.729,00	66.802.876,00	(15.586.853,00)	81,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0011		PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	264.929.478,00	238.936.748,00	(25.992.730,00)	90,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	264.929.478,00	238.936.748,00	(25.992.730,00)	90,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.929.478,00	238.936.748,00	(25.992.730,00)	90,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.714.405.489,00	1.422.409.505,00	(291.995.984,00)	82,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0001		KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	176.944.245,00	136.959.764,00	(39.984.481,00)	77,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	176.944.245,00	136.959.764,00	(39.984.481,00)	77,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.944.245,00	136.959.764,00	(39.984.481,00)	77,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0002		REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO, DAN BEBAN	173.420.176,00	139.683.679,00	(33.736.497,00)	80,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	173.420.176,00	139.683.679,00	(33.736.497,00)	80,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.420.176,00	139.683.679,00	(33.736.497,00)	80,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	475.365.910,00	432.797.169,00	(42.568.741,00)	91,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	475.365.910,00	432.797.169,00	(42.568.741,00)	91,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.365.910,00	432.797.169,00	(42.568.741,00)	91,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI	306.581.982,00	263.020.461,00	(43.561.521,00)	85,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	306.581.982,00	263.020.461,00	(43.561.521,00)	85,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.581.982,00	263.020.461,00	(43.561.521,00)	85,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0006		PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	54.215.095,00	51.497.665,00	(2.717.430,00)	94,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	54.215.095,00	51.497.665,00	(2.717.430,00)	94,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.215.095,00	51.497.665,00	(2.717.430,00)	94,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0010		PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	165.569.673,00	116.897.588,00	(48.672.085,00)	70,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	165.569.673,00	116.897.588,00	(48.672.085,00)	70,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.569.673,00	116.897.588,00	(48.672.085,00)	70,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0011		PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH PROVINSI	162.836.854,00	145.688.940,00	(17.147.914,00)	89,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0011	5.1	BELANJA OPERASI	162.836.854,00	145.688.940,00	(17.147.914,00)	89,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.836.854,00	145.688.940,00	(17.147.914,00)	89,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0012		PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PROVINSI	199.471.554,00	135.864.239,00	(63.607.315,00)	68,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0012	5.1	BELANJA OPERASI	199.471.554,00	135.864.239,00	(63.607.315,00)	68,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.471.554,00	135.864.239,00	(63.607.315,00)	68,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	719.465.078.273,60	704.536.068.281,00	(14.929.009.992,60)	97,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0006		ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH	162.296.984,00	150.893.861,00	(11.403.123,00)	92,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	162.296.984,00	150.893.861,00	(11.403.123,00)	92,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.296.984,00	150.893.861,00	(11.403.123,00)	92,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	18.315.333.853,00	13.433.222.476,00	(4.882.111.377,00)	73,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0008	5.1	BELANJA OPERASI	205.333.853,00	196.743.776,00	(8.590.077,00)	95,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.333.853,00	196.743.776,00	(8.590.077,00)	95,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00	(4.873.521.300,00)	73,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00	(4.873.521.300,00)	73,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	2.281.396.903,60	0,00	(2.281.396.903,60)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.281.396.903,60	0,00	(2.281.396.903,60)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.281.396.903,60	0,00	(2.281.396.903,60)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0010		PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PROVINSI	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	(7.754.098.589,00)	98,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	(7.754.098.589,00)	98,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	(7.754.098.589,00)	98,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06		PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	748.200.488,00	612.268.463,00	(135.932.025,00)	81,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0002		IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	332.051.925,00	307.564.079,00	(24.487.846,00)	92,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	332.051.925,00	307.564.079,00	(24.487.846,00)	92,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.051.925,00	307.564.079,00	(24.487.846,00)	92,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0003		PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI	416.148.563,00	304.704.384,00	(111.444.179,00)	73,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	416.148.563,00	304.704.384,00	(111.444.179,00)	73,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.148.563,00	304.704.384,00	(111.444.179,00)	73,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.767.301.140,00	2.420.501.117,00	(346.800.023,00)	87,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.767.301.140,00	2.420.501.117,00	(346.800.023,00)	87,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	497.754.565,00	496.138.355,00	(1.616.210,00)	99,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	497.754.565,00	496.138.355,00	(1.616.210,00)	99,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.754.565,00	496.138.355,00	(1.616.210,00)	99,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0003		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	90.069.184,00	59.905.332,00	(30.163.852,00)	66,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	90.069.184,00	59.905.332,00	(30.163.852,00)	66,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.069.184,00	59.905.332,00	(30.163.852,00)	66,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0004		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	36.298.458,00	27.860.552,00	(8.437.906,00)	76,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.298.458,00	27.860.552,00	(8.437.906,00)	76,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.298.458,00	27.860.552,00	(8.437.906,00)	76,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0005		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	194.994.301,00	190.864.211,00	(4.130.090,00)	97,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	194.994.301,00	190.864.211,00	(4.130.090,00)	97,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.994.301,00	190.864.211,00	(4.130.090,00)	97,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0006		INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	241.614.344,00	207.083.410,00	(34.530.934,00)	85,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	241.614.344,00	207.083.410,00	(34.530.934,00)	85,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.614.344,00	207.083.410,00	(34.530.934,00)	85,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	847.061.476,00	725.800.237,00	(121.261.239,00)	85,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	847.061.476,00	725.800.237,00	(121.261.239,00)	85,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.061.476,00	725.800.237,00	(121.261.239,00)	85,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0008		PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	351.649.803,00	344.621.856,00	(7.027.947,00)	98,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	351.649.803,00	344.621.856,00	(7.027.947,00)	98,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.649.803,00	344.621.856,00	(7.027.947,00)	98,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0010		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	271.085.336,00	187.653.448,00	(83.431.888,00)	69,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	271.085.336,00	187.653.448,00	(83.431.888,00)	69,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.085.336,00	187.653.448,00	(83.431.888,00)	69,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0011		REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	77.419.299,00	49.292.328,00	(28.126.971,00)	63,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	77.419.299,00	49.292.328,00	(28.126.971,00)	63,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.419.299,00	49.292.328,00	(28.126.971,00)	63,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0012		PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	159.354.374,00	131.281.388,00	(28.072.986,00)	82,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	159.354.374,00	131.281.388,00	(28.072.986,00)	82,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.354.374,00	131.281.388,00	(28.072.986,00)	82,38	
				JUMLAH BELANJA	774.045.702.637,04	754.777.212.470,95	(19.268.490.166,09)	97,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
				SURPLUS / (DEFISIT)	1.313.607.322.839,94	1.307.667.808.938,32	(5.939.513.901,62)	99,54	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	22.286.164.438,01	22.291.476.128,01	5.311.690,00	100,02	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.286.164.438,01	27.291.476.128,01	5.311.690,00	100,01	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.286.164.438,01	27.208.640.128,01	(77.524.310,00)	99,71	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	82.836.000,00	82.836.000,00	0,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.286.164.438,01	27.291.476.128,01	5.311.690,00	100,01	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.25.0000		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	22.286.164.438,01	22.291.476.128,01	5.311.690,00	100,02	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.335.893.487.277,95	1.329.959.285.066,33	(5.934.202.211,62)	99,55	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.648.357.017.028,21	1.474.491.221.665,62	(173.865.795.362,59)	89,45	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.647.032.914.528,21	1.473.196.517.665,62	(173.836.396.862,59)	89,44	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1.01	Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	(169.953.566.157,50)	89,49	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	52.980.000,00	52.980.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	(3.882.830.705,09)	86,94	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	(29.398.500,00)	97,77	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	(29.398.500,00)	97,77	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.648.357.017.028,21	1.474.491.221.665,62	(173.865.795.362,59)	89,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		5	BELANJA DAERAH	110.833.568.573,00	106.733.268.335,75	(4.100.300.237,25)	96,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	101.347.595.778,62	98.464.280.914,75	(2.883.314.863,87)	97,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	240.861.530,93	222.752.980,00	(18.108.550,93)	92,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	159.867.266,50	150.462.050,00	(9.405.216,50)	94,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	159.867.266,50	150.462.050,00	(9.405.216,50)	94,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.867.266,50	150.462.050,00	(9.405.216,50)	94,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.171.500,00	5.219.000,00	(1.952.500,00)	72,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.171.500,00	5.219.000,00	(1.952.500,00)	72,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.171.500,00	5.219.000,00	(1.952.500,00)	72,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	73.822.764,43	67.071.930,00	(6.750.834,43)	90,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	73.822.764,43	67.071.930,00	(6.750.834,43)	90,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.822.764,43	67.071.930,00	(6.750.834,43)	90,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	74.824.374.617,51	74.028.460.654,00	(795.913.963,51)	98,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	73.211.805.017,51	72.496.406.152,00	(715.398.865,51)	99,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.211.805.017,51	72.496.406.152,00	(715.398.865,51)	99,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	70.897.568.462,47	70.191.130.509,00	(706.437.953,47)	99,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.314.236.555,04	2.305.275.643,00	(8.960.912,04)	99,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1.601.088.000,00	1.522.416.000,00	(78.672.000,00)	95,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.601.088.000,00	1.522.416.000,00	(78.672.000,00)	95,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.601.088.000,00	1.522.416.000,00	(78.672.000,00)	95,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	11.481.600,00	9.638.502,00	(1.843.098,00)	83,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.481.600,00	9.638.502,00	(1.843.098,00)	83,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.481.600,00	9.638.502,00	(1.843.098,00)	83,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	94.100.565,49	87.727.363,00	(6.373.202,49)	93,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	94.100.565,49	87.727.363,00	(6.373.202,49)	93,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	94.100.565,49	87.727.363,00	(6.373.202,49)	93,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.100.565,49	87.727.363,00	(6.373.202,49)	93,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04		ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	326.821.982,88	237.503.540,00	(89.318.442,88)	72,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0001		PERENCANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	123.924.582,88	104.094.075,00	(19.830.507,88)	83,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	123.924.582,88	104.094.075,00	(19.830.507,88)	83,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.924.582,88	104.094.075,00	(19.830.507,88)	83,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0002		ANALISA DAN PENGEMBANGAN RETRIBUSI DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH	113.032.600,00	88.567.065,00	(24.465.535,00)	78,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.032.600,00	88.567.065,00	(24.465.535,00)	78,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.032.600,00	88.567.065,00	(24.465.535,00)	78,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH	53.157.400,00	15.183.000,00	(37.974.400,00)	28,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.157.400,00	15.183.000,00	(37.974.400,00)	28,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.157.400,00	15.183.000,00	(37.974.400,00)	28,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0007		PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	36.707.400,00	29.659.400,00	(7.048.000,00)	80,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.707.400,00	29.659.400,00	(7.048.000,00)	80,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.707.400,00	29.659.400,00	(7.048.000,00)	80,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	175.812.440,00	167.974.660,00	(7.837.780,00)	95,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	175.812.440,00	167.974.660,00	(7.837.780,00)	95,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	175.812.440,00	167.974.660,00	(7.837.780,00)	95,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.812.440,00	167.974.660,00	(7.837.780,00)	95,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	9.947.880.918,55	8.910.819.666,00	(1.037.061.252,55)	89,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	140.140.343,00	123.239.684,00	(16.900.659,00)	87,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	136.569.543,00	120.686.684,00	(15.882.859,00)	88,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.569.543,00	120.686.684,00	(15.882.859,00)	88,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.570.800,00	2.553.000,00	(1.017.800,00)	71,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.570.800,00	2.553.000,00	(1.017.800,00)	71,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	757.996.545,00	443.249.699,00	(314.746.846,00)	58,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.881.100,00	4.835.000,00	(46.100,00)	99,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.881.100,00	4.835.000,00	(46.100,00)	99,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	753.115.445,00	438.414.699,00	(314.700.746,00)	58,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	753.115.445,00	438.414.699,00	(314.700.746,00)	58,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	470.718.796,00	462.589.500,00	(8.129.296,00)	98,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	470.718.796,00	462.589.500,00	(8.129.296,00)	98,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	470.718.796,00	462.589.500,00	(8.129.296,00)	98,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.509.249.408,00	1.322.653.889,00	(186.595.519,00)	87,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.509.249.408,00	1.322.653.889,00	(186.595.519,00)	87,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.509.249.408,00	1.322.653.889,00	(186.595.519,00)	87,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.993.262.507,00	4.753.954.687,00	(239.307.820,00)	95,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.993.262.507,00	4.753.954.687,00	(239.307.820,00)	95,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.993.262.507,00	4.753.954.687,00	(239.307.820,00)	95,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	64.838.900,00	62.081.760,00	(2.757.140,00)	95,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	63.754.400,00	61.002.840,00	(2.751.560,00)	95,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.754.400,00	61.002.840,00	(2.751.560,00)	95,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.084.500,00	1.078.920,00	(5.580,00)	99,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.084.500,00	1.078.920,00	(5.580,00)	99,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	108.257.100,00	95.720.220,00	(12.536.880,00)	88,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	108.257.100,00	95.720.220,00	(12.536.880,00)	88,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.257.100,00	95.720.220,00	(12.536.880,00)	88,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.781.451.054,63	1.531.029.393,00	(250.421.661,63)	85,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.781.451.054,63	1.531.029.393,00	(250.421.661,63)	85,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.781.451.054,63	1.531.029.393,00	(250.421.661,63)	85,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	121.966.264,92	116.300.834,00	(5.665.430,92)	95,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	121.966.264,92	116.300.834,00	(5.665.430,92)	95,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.966.264,92	116.300.834,00	(5.665.430,92)	95,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.337.890.050,00	2.181.468.916,00	(156.421.134,00)	93,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	464.860.000,00	355.969.000,00	(108.891.000,00)	76,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	254.059.000,00	254.059.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.059.000,00	254.059.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	210.801.000,00	101.910.000,00	(108.891.000,00)	48,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.801.000,00	101.910.000,00	(108.891.000,00)	48,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.873.030.050,00	1.825.499.916,00	(47.530.134,00)	97,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.873.030.050,00	1.825.499.916,00	(47.530.134,00)	97,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.873.030.050,00	1.825.499.916,00	(47.530.134,00)	97,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.493.879.159,91	5.242.783.763,00	(251.095.396,91)	95,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	59.711.100,00	56.038.780,00	(3.672.320,00)	93,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.271.100,00	54.928.780,00	(3.342.320,00)	94,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.271.100,00	54.928.780,00	(3.342.320,00)	94,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.440.000,00	1.110.000,00	(330.000,00)	77,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.440.000,00	1.110.000,00	(330.000,00)	77,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.041.746.448,00	2.804.302.540,00	(237.443.908,00)	92,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.041.746.448,00	2.804.302.540,00	(237.443.908,00)	92,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.041.746.448,00	2.804.302.540,00	(237.443.908,00)	92,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	334.607.000,00	330.632.000,00	(3.975.000,00)	98,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	334.607.000,00	330.632.000,00	(3.975.000,00)	98,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.607.000,00	330.632.000,00	(3.975.000,00)	98,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.057.814.611,91	2.051.810.443,00	(6.004.168,91)	99,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.057.814.611,91	2.051.810.443,00	(6.004.168,91)	99,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.057.814.611,91	2.051.810.443,00	(6.004.168,91)	99,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.905.974.513,35	7.384.789.372,75	(521.185.140,60)	93,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	2.639.751.481,00	2.446.305.080,75	(193.446.400,25)	92,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.639.751.481,00	2.446.305.080,75	(193.446.400,25)	92,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.639.751.481,00	2.446.305.080,75	(193.446.400,25)	92,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	481.773.338,00	446.166.768,00	(35.606.570,00)	92,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	481.773.338,00	446.166.768,00	(35.606.570,00)	92,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.773.338,00	446.166.768,00	(35.606.570,00)	92,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	4.784.449.694,35	4.492.317.524,00	(292.132.170,35)	93,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.784.449.694,35	4.492.317.524,00	(292.132.170,35)	93,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.784.449.694,35	4.492.317.524,00	(292.132.170,35)	93,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	376.904.800,00	331.610.731,00	(45.294.069,00)	87,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	164.903.000,00	155.782.419,00	(9.120.581,00)	94,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.01.0011		KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	164.903.000,00	155.782.419,00	(9.120.581,00)	94,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	164.903.000,00	155.782.419,00	(9.120.581,00)	94,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.903.000,00	155.782.419,00	(9.120.581,00)	94,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.03		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	151.798.400,00	135.841.312,00	(15.957.088,00)	89,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.03.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	151.798.400,00	135.841.312,00	(15.957.088,00)	89,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	151.798.400,00	135.841.312,00	(15.957.088,00)	89,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.798.400,00	135.841.312,00	(15.957.088,00)	89,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.04		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	60.203.400,00	39.987.000,00	(20.216.400,00)	66,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.04.0006		PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	60.203.400,00	39.987.000,00	(20.216.400,00)	66,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	60.203.400,00	39.987.000,00	(20.216.400,00)	66,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.203.400,00	39.987.000,00	(20.216.400,00)	66,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.109.067.994,38	7.937.376.690,00	(1.171.691.304,38)	87,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.109.067.994,38	7.937.376.690,00	(1.171.691.304,38)	87,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0001		PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	258.462.894,00	224.899.618,00	(33.563.276,00)	87,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	258.462.894,00	224.899.618,00	(33.563.276,00)	87,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.462.894,00	224.899.618,00	(33.563.276,00)	87,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0002		ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	244.767.000,00	215.708.468,00	(29.058.532,00)	88,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	244.767.000,00	215.708.468,00	(29.058.532,00)	88,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.767.000,00	215.708.468,00	(29.058.532,00)	88,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	1.725.768.600,00	1.529.329.500,00	(196.439.100,00)	88,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.725.768.600,00	1.529.329.500,00	(196.439.100,00)	88,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.725.768.600,00	1.529.329.500,00	(196.439.100,00)	88,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	1.652.594.608,52	1.330.011.156,00	(322.583.452,52)	80,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	961.338.888,52	903.991.156,00	(57.347.732,52)	94,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	961.338.888,52	903.991.156,00	(57.347.732,52)	94,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	691.255.720,00	426.020.000,00	(265.235.720,00)	61,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	655.502.720,00	394.215.000,00	(261.287.720,00)	60,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.753.000,00	31.805.000,00	(3.948.000,00)	88,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	259.721.681,18	250.065.879,00	(9.655.802,18)	96,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	259.721.681,18	250.065.879,00	(9.655.802,18)	96,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.721.681,18	250.065.879,00	(9.655.802,18)	96,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0006		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	1.469.527.413,54	1.234.722.832,00	(234.804.581,54)	84,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.469.527.413,54	1.234.722.832,00	(234.804.581,54)	84,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.469.527.413,54	1.234.722.832,00	(234.804.581,54)	84,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0007		PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	12.600.000,00	450.000,00	(12.150.000,00)	3,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	450.000,00	(12.150.000,00)	3,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	450.000,00	(12.150.000,00)	3,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0008		PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	95.803.400,00	90.977.120,00	(4.826.280,00)	94,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	95.803.400,00	90.977.120,00	(4.826.280,00)	94,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.803.400,00	90.977.120,00	(4.826.280,00)	94,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0009		PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	40.893.000,00	33.029.116,00	(7.863.884,00)	80,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.893.000,00	33.029.116,00	(7.863.884,00)	80,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.893.000,00	33.029.116,00	(7.863.884,00)	80,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0010		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	2.011.347.026,20	1.879.331.252,00	(132.015.774,20)	93,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.011.347.026,20	1.879.331.252,00	(132.015.774,20)	93,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.011.347.026,20	1.879.331.252,00	(132.015.774,20)	93,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0011		PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	116.642.032,15	110.518.180,00	(6.123.852,15)	94,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	116.642.032,15	110.518.180,00	(6.123.852,15)	94,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.642.032,15	110.518.180,00	(6.123.852,15)	94,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0012		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	1.075.546.838,79	903.903.223,00	(171.643.615,79)	84,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.075.546.838,79	903.903.223,00	(171.643.615,79)	84,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.546.838,79	903.903.223,00	(171.643.615,79)	84,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0013		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	94.704.700,00	89.527.246,00	(5.177.454,00)	94,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	94.704.700,00	89.527.246,00	(5.177.454,00)	94,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.704.700,00	89.527.246,00	(5.177.454,00)	94,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0014		ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	50.688.800,00	44.903.100,00	(5.785.700,00)	88,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	50.688.800,00	44.903.100,00	(5.785.700,00)	88,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.688.800,00	44.903.100,00	(5.785.700,00)	88,58	
				JUMLAH BELANJA	110.833.568.573,00	106.733.268.335,75	(4.100.300.237,25)	96,30	
				SURPLUS / (DEFISIT)	1.537.523.448.455,21	1.367.757.953.329,87	(169.765.495.125,34)	88,95	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.537.523.448.455,21	1.367.757.953.329,87	(169.765.495.125,34)	88,95	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan KORPRI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000		5	BELANJA DAERAH	19.793.963.183,00	19.316.741.138,00	(477.222.045,00)	97,58	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.090.194.334,00	17.843.327.162,00	(246.867.172,00)	98,63	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	135.824.466,00	129.406.369,00	(6.418.097,00)	95,27	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	78.555.214,00	76.497.509,00	(2.057.705,00)	97,38	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.555.214,00	76.497.509,00	(2.057.705,00)	97,38	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.555.214,00	76.497.509,00	(2.057.705,00)	97,38	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	57.269.252,00	52.908.860,00	(4.360.392,00)	92,38	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	57.269.252,00	52.908.860,00	(4.360.392,00)	92,38	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.269.252,00	52.908.860,00	(4.360.392,00)	92,38	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	16.900.242.863,00	16.686.609.469,00	(213.633.394,00)	98,73	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	16.476.042.863,00	16.272.866.469,00	(203.176.394,00)	98,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.476.042.863,00	16.272.866.469,00	(203.176.394,00)	98,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	16.476.042.863,00	16.272.866.469,00	(203.176.394,00)	98,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	424.200.000,00	413.743.000,00	(10.457.000,00)	97,53	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	424.200.000,00	413.743.000,00	(10.457.000,00)	97,53	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.200.000,00	413.743.000,00	(10.457.000,00)	97,53	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	61.988.000,00	61.249.800,00	(738.200,00)	98,80	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	61.988.000,00	61.249.800,00	(738.200,00)	98,80	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.988.000,00	61.249.800,00	(738.200,00)	98,80	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.988.000,00	61.249.800,00	(738.200,00)	98,80	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	336.870.237,00	324.209.684,00	(12.660.553,00)	96,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	9.694.602,00	(305.398,00)	96,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.694.602,00	(305.398,00)	96,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.694.602,00	(305.398,00)	96,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	51.522.069,00	48.696.996,00	(2.825.073,00)	94,51	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.559.478,00	13.199.999,00	(359.479,00)	97,34	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.559.478,00	13.199.999,00	(359.479,00)	97,34	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	37.962.591,00	35.496.997,00	(2.465.594,00)	93,50	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.962.591,00	35.496.997,00	(2.465.594,00)	93,50	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.748.800,00	7.458.771,00	(290.029,00)	96,25	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.748.800,00	7.458.771,00	(290.029,00)	96,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.748.800,00	7.458.771,00	(290.029,00)	96,25	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	50.000.000,00	43.484.200,00	(6.515.800,00)	86,96	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	43.484.200,00	(6.515.800,00)	86,96	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	43.484.200,00	(6.515.800,00)	86,96	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.015.600,00	8.627.678,00	(1.387.922,00)	86,14	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.015.600,00	8.627.678,00	(1.387.922,00)	86,14	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.015.600,00	8.627.678,00	(1.387.922,00)	86,14	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	34.892.900,00	34.238.900,00	(654.000,00)	98,12	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	34.892.900,00	34.238.900,00	(654.000,00)	98,12	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.892.900,00	34.238.900,00	(654.000,00)	98,12	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	15.365.000,00	15.175.000,00	(190.000,00)	98,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	15.365.000,00	15.175.000,00	(190.000,00)	98,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.365.000,00	15.175.000,00	(190.000,00)	98,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	157.325.868,00	156.833.537,00	(492.331,00)	99,68	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	157.325.868,00	156.833.537,00	(492.331,00)	99,68	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.325.868,00	156.833.537,00	(492.331,00)	99,68	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	531.597.768,00	525.044.700,00	(6.553.068,00)	98,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	2.990.000,00	(10.000,00)	99,66	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.990.000,00	(10.000,00)	99,66	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.990.000,00	(10.000,00)	99,66	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	25.565.000,00	22.266.000,00	(3.299.000,00)	87,09	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.565.000,00	22.266.000,00	(3.299.000,00)	87,09	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.565.000,00	22.266.000,00	(3.299.000,00)	87,09	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	88.000.000,00	87.880.000,00	(120.000,00)	99,86	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	88.000.000,00	87.880.000,00	(120.000,00)	99,86	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	87.880.000,00	(120.000,00)	99,86	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	415.032.768,00	411.908.700,00	(3.124.068,00)	99,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	415.032.768,00	411.908.700,00	(3.124.068,00)	99,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.032.768,00	411.908.700,00	(3.124.068,00)	99,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	123.671.000,00	116.807.140,00	(6.863.860,00)	94,44	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	110.000.000,00	103.491.640,00	(6.508.360,00)	94,08	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	103.491.640,00	(6.508.360,00)	94,08	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	103.491.640,00	(6.508.360,00)	94,08	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.671.000,00	13.315.500,00	(355.500,00)	97,39	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.671.000,00	13.315.500,00	(355.500,00)	97,39	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.671.000,00	13.315.500,00	(355.500,00)	97,39	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.703.768.849,00	1.473.413.976,00	(230.354.873,00)	86,47	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	276.448.507,00	262.610.687,00	(13.837.820,00)	94,99	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	188.092.588,00	182.990.811,00	(5.101.777,00)	97,28	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	188.092.588,00	182.990.811,00	(5.101.777,00)	97,28	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.092.588,00	182.990.811,00	(5.101.777,00)	97,28	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	7.061.819,00	6.838.700,00	(223.119,00)	96,84	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.061.819,00	6.838.700,00	(223.119,00)	96,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.061.819,00	6.838.700,00	(223.119,00)	96,84	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0008		FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	54.847.100,00	47.989.893,00	(6.857.207,00)	87,49	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	54.847.100,00	47.989.893,00	(6.857.207,00)	87,49	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.847.100,00	47.989.893,00	(6.857.207,00)	87,49	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	26.447.000,00	24.791.283,00	(1.655.717,00)	93,73	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	26.447.000,00	24.791.283,00	(1.655.717,00)	93,73	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.447.000,00	24.791.283,00	(1.655.717,00)	93,73	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	642.825.472,00	458.850.211,00	(183.975.261,00)	71,38	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	108.546.310,00	97.130.496,00	(11.415.814,00)	89,48	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.546.310,00	97.130.496,00	(11.415.814,00)	89,48	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.546.310,00	97.130.496,00	(11.415.814,00)	89,48	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	19.432.000,00	18.394.398,00	(1.037.602,00)	94,66	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.432.000,00	18.394.398,00	(1.037.602,00)	94,66	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.432.000,00	18.394.398,00	(1.037.602,00)	94,66	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	514.847.162,00	343.325.317,00	(171.521.845,00)	66,68	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	514.847.162,00	343.325.317,00	(171.521.845,00)	66,68	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.847.162,00	343.325.317,00	(171.521.845,00)	66,68	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	696.994.870,00	673.524.622,00	(23.470.248,00)	96,63	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	76.500.000,00	71.029.804,00	(5.470.196,00)	92,84	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.500.000,00	71.029.804,00	(5.470.196,00)	92,84	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.500.000,00	71.029.804,00	(5.470.196,00)	92,84	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0002		PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER	492.593.510,00	476.066.838,00	(16.526.672,00)	96,64	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	183.498.510,00	167.486.838,00	(16.011.672,00)	91,27	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.498.510,00	167.486.838,00	(16.011.672,00)	91,27	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	309.095.000,00	308.580.000,00	(515.000,00)	99,83	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	309.095.000,00	308.580.000,00	(515.000,00)	99,83	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	87.181.360,00	86.750.537,00	(430.823,00)	99,50	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.181.360,00	86.750.537,00	(430.823,00)	99,50	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.181.360,00	86.750.537,00	(430.823,00)	99,50	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0013		PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ASN	40.720.000,00	39.677.443,00	(1.042.557,00)	97,43	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	40.720.000,00	39.677.443,00	(1.042.557,00)	97,43	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.720.000,00	39.677.443,00	(1.042.557,00)	97,43	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	87.500.000,00	78.428.456,00	(9.071.544,00)	89,63	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	25.820.000,00	23.929.500,00	(1.890.500,00)	92,67	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.820.000,00	23.929.500,00	(1.890.500,00)	92,67	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.820.000,00	23.929.500,00	(1.890.500,00)	92,67	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0004		PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	17.468.340,00	15.101.228,00	(2.367.112,00)	86,44	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.468.340,00	15.101.228,00	(2.367.112,00)	86,44	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.468.340,00	15.101.228,00	(2.367.112,00)	86,44	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0007		PEMBINAAN DISIPLIN ASN	39.774.890,00	36.100.128,00	(3.674.762,00)	90,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	39.774.890,00	36.100.128,00	(3.674.762,00)	90,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.774.890,00	36.100.128,00	(3.674.762,00)	90,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0008		PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	4.436.770,00	3.297.600,00	(1.139.170,00)	74,32	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.436.770,00	3.297.600,00	(1.139.170,00)	74,32	
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.436.770,00	3.297.600,00	(1.139.170,00)	74,32	
				JUMLAH BELANJA	19.793.963.183,00	19.316.741.138,00	(477.222.045,00)	97,58	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(19.793.963.183,00)	(19.316.741.138,00)	477.222.045,00	97,58	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(19.793.963.183,00)	(19.316.741.138,00)	477.222.045,00	97,58	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000		5	BELANJA DAERAH	16.498.935.759,00	15.325.213.721,00	(1.173.722.038,00)	92,88	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.516.667.158,00	14.006.332.324,00	(510.334.834,00)	96,48	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	435.876.674,10	401.191.532,00	(34.685.142,10)	92,04	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	308.876.702,10	279.908.993,00	(28.967.709,10)	90,62	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	308.876.702,10	279.908.993,00	(28.967.709,10)	90,62	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.876.702,10	279.908.993,00	(28.967.709,10)	90,62	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	60.448.884,00	55.597.567,00	(4.851.317,00)	91,97	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	60.448.884,00	55.597.567,00	(4.851.317,00)	91,97	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.448.884,00	55.597.567,00	(4.851.317,00)	91,97	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	66.551.088,00	65.684.972,00	(866.116,00)	98,69	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	66.551.088,00	65.684.972,00	(866.116,00)	98,69	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.551.088,00	65.684.972,00	(866.116,00)	98,69	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.131.108.008,00	9.936.721.828,00	(194.386.180,00)	98,08	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.883.650.008,00	9.692.655.828,00	(190.994.180,00)	98,06	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.883.650.008,00	9.692.655.828,00	(190.994.180,00)	98,06	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.883.650.008,00	9.692.655.828,00	(190.994.180,00)	98,06	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	247.458.000,00	244.066.000,00	(3.392.000,00)	98,62	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	247.458.000,00	244.066.000,00	(3.392.000,00)	98,62	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.458.000,00	244.066.000,00	(3.392.000,00)	98,62	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	475.205.000,00	450.834.957,00	(24.370.043,00)	94,87	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	98.475.000,00	95.475.000,00	(3.000.000,00)	96,95	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	98.475.000,00	95.475.000,00	(3.000.000,00)	96,95	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.475.000,00	95.475.000,00	(3.000.000,00)	96,95	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	376.730.000,00	355.359.957,00	(21.370.043,00)	94,32	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	376.730.000,00	355.359.957,00	(21.370.043,00)	94,32	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.730.000,00	355.359.957,00	(21.370.043,00)	94,32	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	564.245.450,00	485.993.879,00	(78.251.571,00)	86,13	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.736.590,00	4.420.000,00	(2.316.590,00)	65,61	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.736.590,00	4.420.000,00	(2.316.590,00)	65,61	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.736.590,00	4.420.000,00	(2.316.590,00)	65,61	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.382.000,00	5.328.000,00	(54.000,00)	98,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.382.000,00	5.328.000,00	(54.000,00)	98,99	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.382.000,00	5.328.000,00	(54.000,00)	98,99	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	145.731.344,00	108.688.800,00	(37.042.544,00)	74,58	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	145.731.344,00	108.688.800,00	(37.042.544,00)	74,58	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.731.344,00	108.688.800,00	(37.042.544,00)	74,58	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	128.727.536,00	96.140.100,00	(32.587.436,00)	74,68	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	128.727.536,00	96.140.100,00	(32.587.436,00)	74,68	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.727.536,00	96.140.100,00	(32.587.436,00)	74,68	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.391.400,00	4.299.200,00	(3.092.200,00)	58,16	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.391.400,00	4.299.200,00	(3.092.200,00)	58,16	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.391.400,00	4.299.200,00	(3.092.200,00)	58,16	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	267.276.580,00	267.117.779,00	(158.801,00)	99,94	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	267.276.580,00	267.117.779,00	(158.801,00)	99,94	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.276.580,00	267.117.779,00	(158.801,00)	99,94	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.161.996.794,90	1.128.377.850,00	(33.618.944,90)	97,10	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	881.087.526,00	852.546.100,00	(28.541.426,00)	96,76	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	881.087.526,00	852.546.100,00	(28.541.426,00)	96,76	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	881.087.526,00	852.546.100,00	(28.541.426,00)	96,76	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	280.909.268,90	275.831.750,00	(5.077.518,90)	98,19	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	280.909.268,90	275.831.750,00	(5.077.518,90)	98,19	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.909.268,90	275.831.750,00	(5.077.518,90)	98,19	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	978.674.526,00	868.066.667,00	(110.607.859,00)	88,69	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	105.044.000,00	31.907.969,00	(73.136.031,00)	30,37	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.044.000,00	31.907.969,00	(73.136.031,00)	30,37	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.044.000,00	31.907.969,00	(73.136.031,00)	30,37	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	330.480.000,00	306.000.000,00	(24.480.000,00)	92,59	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	330.480.000,00	306.000.000,00	(24.480.000,00)	92,59	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.480.000,00	306.000.000,00	(24.480.000,00)	92,59	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	543.150.526,00	530.158.698,00	(12.991.828,00)	97,60	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	543.150.526,00	530.158.698,00	(12.991.828,00)	97,60	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.150.526,00	530.158.698,00	(12.991.828,00)	97,60	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	769.560.705,00	735.145.611,00	(34.415.094,00)	95,52	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	183.248.560,00	164.282.601,00	(18.965.959,00)	89,65	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	183.248.560,00	164.282.601,00	(18.965.959,00)	89,65	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.248.560,00	164.282.601,00	(18.965.959,00)	89,65	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	24.488.100,00	20.956.800,00	(3.531.300,00)	85,57	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.488.100,00	20.956.800,00	(3.531.300,00)	85,57	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.488.100,00	20.956.800,00	(3.531.300,00)	85,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	561.824.045,00	549.906.210,00	(11.917.835,00)	97,87	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	561.824.045,00	549.906.210,00	(11.917.835,00)	97,87	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.824.045,00	549.906.210,00	(11.917.835,00)	97,87	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.982.268.601,00	1.318.881.397,00	(663.387.204,00)	66,53	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01		PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	1.209.069.827,00	631.155.989,00	(577.913.838,00)	52,20	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01.0003		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	815.598.386,00	631.155.989,00	(184.442.397,00)	77,38	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	815.598.386,00	631.155.989,00	(184.442.397,00)	77,38	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	815.598.386,00	631.155.989,00	(184.442.397,00)	77,38	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01.0004		PEMBINAAN, PENGOORDINASIAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNISUMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	393.471.441,00	0,00	(393.471.441,00)	0,00	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	393.471.441,00	0,00	(393.471.441,00)	0,00	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.471.441,00	0,00	(393.471.441,00)	0,00	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	773.198.774,00	687.725.408,00	(85.473.366,00)	88,94	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0003		PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0004		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN, TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI, DAN SUMBER BELAJAR	186.267.641,00	153.203.712,00	(33.063.929,00)	82,24	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	186.267.641,00	153.203.712,00	(33.063.929,00)	82,24	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.267.641,00	153.203.712,00	(33.063.929,00)	82,24	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0007		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	559.931.133,00	507.521.696,00	(52.409.437,00)	90,64	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	559.931.133,00	507.521.696,00	(52.409.437,00)	90,64	
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.931.133,00	507.521.696,00	(52.409.437,00)	90,64	
				JUMLAH BELANJA	16.498.935.759,00	15.325.213.721,00	(1.173.722.038,00)	92,88	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(16.498.935.759,00)	(15.325.213.721,00)	1.173.722.038,00	92,88	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.498.935.759,00)	(15.325.213.721,00)	1.173.722.038,00	92,88	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENGELOLAAN PERBATASAN
Organisasi : Badan Pengelola Perbatasan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000		5	BELANJA DAERAH	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	(583.188.972,00)	91,31	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.506.598.126,00	5.949.291.408,00	(557.306.718,00)	91,43	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	147.050.823,00	143.350.379,00	(3.700.444,00)	97,48	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	95.977.355,00	94.837.700,00	(1.139.655,00)	98,81	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.977.355,00	94.837.700,00	(1.139.655,00)	98,81	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.977.355,00	94.837.700,00	(1.139.655,00)	98,81	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	51.073.468,00	48.512.679,00	(2.560.789,00)	94,98	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	51.073.468,00	48.512.679,00	(2.560.789,00)	94,98	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.073.468,00	48.512.679,00	(2.560.789,00)	94,98	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.859.119.021,00	5.319.905.973,00	(539.213.048,00)	90,79	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.651.131.020,94	5.139.971.973,00	(511.159.047,94)	90,95	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.651.131.020,94	5.139.971.973,00	(511.159.047,94)	90,95	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.651.131.020,94	5.139.971.973,00	(511.159.047,94)	90,95	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	207.988.000,06	179.934.000,00	(28.054.000,06)	86,51	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	207.988.000,06	179.934.000,00	(28.054.000,06)	86,51	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.988.000,06	179.934.000,00	(28.054.000,06)	86,51	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	200.508.142,00	194.018.991,00	(6.489.151,00)	96,76	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.788.309,00	13.233.280,00	(555.029,00)	95,97	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.788.309,00	13.233.280,00	(555.029,00)	95,97	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.788.309,00	13.233.280,00	(555.029,00)	95,97	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	28.190.781,00	25.793.736,00	(2.397.045,00)	91,49	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.190.781,00	25.793.736,00	(2.397.045,00)	91,49	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.190.781,00	25.793.736,00	(2.397.045,00)	91,49	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.014.052,00	10.244.587,00	(1.769.465,00)	85,27	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.014.052,00	10.244.587,00	(1.769.465,00)	85,27	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.014.052,00	10.244.587,00	(1.769.465,00)	85,27	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	91,66	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	91,66	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	91,66	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	8.515.000,00	8.255.000,00	(260.000,00)	96,94	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.515.000,00	8.255.000,00	(260.000,00)	96,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.515.000,00	8.255.000,00	(260.000,00)	96,94	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	120.000.000,00	119.992.388,00	(7.612,00)	99,99	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.992.388,00	(7.612,00)	99,99	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.992.388,00	(7.612,00)	99,99	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.221.551,00	0,00	(5.221.551,00)	0,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.221.551,00	0,00	(5.221.551,00)	0,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.221.551,00	0,00	(5.221.551,00)	0,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.221.551,00	0,00	(5.221.551,00)	0,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	224.669.935,00	223.987.531,00	(682.404,00)	99,69	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.182.404,00	1.500.000,00	(682.404,00)	68,73	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.182.404,00	1.500.000,00	(682.404,00)	68,73	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.182.404,00	1.500.000,00	(682.404,00)	68,73	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	180.487.531,00	180.487.531,00	0,00	100,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	180.487.531,00	180.487.531,00	0,00	100,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.487.531,00	180.487.531,00	0,00	100,00	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	70.028.654,00	68.028.534,00	(2.000.120,00)	97,14	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	67.148.654,00	66.794.300,00	(354.354,00)	99,47	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.148.654,00	66.794.300,00	(354.354,00)	99,47	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.148.654,00	66.794.300,00	(354.354,00)	99,47	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.880.000,00	1.234.234,00	(1.645.766,00)	42,85	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.880.000,00	1.234.234,00	(1.645.766,00)	42,85	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	1.234.234,00	(1.645.766,00)	42,85	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	206.359.798,00	180.477.544,00	(25.882.254,00)	87,45	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01		PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA	50.346.056,00	41.110.664,00	(9.235.392,00)	81,65	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0001		KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH	24.623.208,00	23.264.140,00	(1.359.068,00)	94,48	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.623.208,00	23.264.140,00	(1.359.068,00)	94,48	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.623.208,00	23.264.140,00	(1.359.068,00)	94,48	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0002		PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN	25.722.848,00	17.846.524,00	(7.876.324,00)	69,38	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.722.848,00	17.846.524,00	(7.876.324,00)	69,38	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.722.848,00	17.846.524,00	(7.876.324,00)	69,38	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02		PELAKSANAAN KEWILAYAHAN PERBATASAN	88.686.559,00	79.913.090,00	(8.773.469,00)	90,10	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0001		KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN	20.498.752,00	19.477.177,00	(1.021.575,00)	95,01	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.498.752,00	19.477.177,00	(1.021.575,00)	95,01	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.498.752,00	19.477.177,00	(1.021.575,00)	95,01	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0002		KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN KAWASAN PERBATASAN	21.098.257,00	20.496.166,00	(602.091,00)	97,14	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.098.257,00	20.496.166,00	(602.091,00)	97,14	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.098.257,00	20.496.166,00	(602.091,00)	97,14	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0003		FASILITASI PENEGASAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAMANAN BATAS WILAYAH NEGARA	23.285.370,00	20.222.861,00	(3.062.509,00)	86,84	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.285.370,00	20.222.861,00	(3.062.509,00)	86,84	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.285.370,00	20.222.861,00	(3.062.509,00)	86,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0004		INVENTARISASI POTENSI SUMBER DAYA UNTUK PENGUSULAN PENETAPAN ZONA PENGEMBANGAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, LINGKUNGAN HIDUP, DAN ZONA LAINNYA DI KAWASAN PERBATASAN	23.804.180,00	19.716.886,00	(4.087.294,00)	82,82	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	23.804.180,00	19.716.886,00	(4.087.294,00)	82,82	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.804.180,00	19.716.886,00	(4.087.294,00)	82,82	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03		MONITORING DAN EVALUASI	67.327.183,00	59.453.790,00	(7.873.393,00)	88,30	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN	17.233.465,00	16.299.860,00	(933.605,00)	94,58	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.233.465,00	16.299.860,00	(933.605,00)	94,58	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.233.465,00	16.299.860,00	(933.605,00)	94,58	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0002		PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN	16.896.569,00	12.573.350,00	(4.323.219,00)	74,41	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.896.569,00	12.573.350,00	(4.323.219,00)	74,41	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.896.569,00	12.573.350,00	(4.323.219,00)	74,41	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0003		PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.197.149,00	30.580.580,00	(2.616.569,00)	92,11	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.197.149,00	30.580.580,00	(2.616.569,00)	92,11	
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.197.149,00	30.580.580,00	(2.616.569,00)	92,11	
				JUMLAH BELANJA	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	(583.188.972,00)	91,31	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.712.957.924,00)	(6.129.768.952,00)	583.188.972,00	91,31	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.712.957.924,00)	(6.129.768.952,00)	583.188.972,00	91,31	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Organisasi : Badan Penghubung Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	13.861.882.473,00	13.101.772.294,00	(760.110.179,00)	94,51	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.523.291.664,00	10.030.023.780,00	(493.267.884,00)	95,31	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	229.645.105,00	209.024.580,00	(20.620.525,00)	91,02	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	80.881.925,00	75.705.451,00	(5.176.474,00)	93,59	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.881.925,00	75.705.451,00	(5.176.474,00)	93,59	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.881.925,00	75.705.451,00	(5.176.474,00)	93,59	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	89.938.130,00	83.151.116,00	(6.787.014,00)	92,45	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.938.130,00	83.151.116,00	(6.787.014,00)	92,45	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.938.130,00	83.151.116,00	(6.787.014,00)	92,45	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	28.776.960,00	23.572.323,00	(5.204.637,00)	81,91	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	28.776.960,00	23.572.323,00	(5.204.637,00)	81,91	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.776.960,00	23.572.323,00	(5.204.637,00)	81,91	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.048.090,00	26.595.690,00	(3.452.400,00)	88,51	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.048.090,00	26.595.690,00	(3.452.400,00)	88,51	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.048.090,00	26.595.690,00	(3.452.400,00)	88,51	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.493.191.482,00	4.377.644.889,00	(115.546.593,00)	97,42	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.242.117.162,00	4.136.024.023,00	(106.093.139,00)	97,49	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.242.117.162,00	4.136.024.023,00	(106.093.139,00)	97,49	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.242.117.162,00	4.136.024.023,00	(106.093.139,00)	97,49	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	208.868.000,00	200.198.000,00	(8.670.000,00)	95,84	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	208.868.000,00	200.198.000,00	(8.670.000,00)	95,84	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.868.000,00	200.198.000,00	(8.670.000,00)	95,84	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	42.206.320,00	41.422.866,00	(783.454,00)	98,14	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.206.320,00	41.422.866,00	(783.454,00)	98,14	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.206.320,00	41.422.866,00	(783.454,00)	98,14	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	51.442.381,00	13.643.500,00	(37.798.881,00)	26,52	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	46.962.381,00	12.043.500,00	(34.918.881,00)	25,64	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.962.381,00	12.043.500,00	(34.918.881,00)	25,64	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.962.381,00	12.043.500,00	(34.918.881,00)	25,64	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	4.480.000,00	1.600.000,00	(2.880.000,00)	35,71	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.480.000,00	1.600.000,00	(2.880.000,00)	35,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	1.600.000,00	(2.880.000,00)	35,71	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	422.724.117,35	410.451.648,00	(12.272.469,35)	97,09	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	27.101.400,00	26.144.940,00	(956.460,00)	96,47	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	27.101.400,00	26.144.940,00	(956.460,00)	96,47	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.101.400,00	26.144.940,00	(956.460,00)	96,47	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	31.616.600,00	31.598.000,00	(18.600,00)	99,94	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.326.600,00	13.325.000,00	(1.600,00)	99,98	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.326.600,00	13.325.000,00	(1.600,00)	99,98	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	18.290.000,00	18.273.000,00	(17.000,00)	99,90	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.290.000,00	18.273.000,00	(17.000,00)	99,90	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	54.744.500,00	54.744.500,00	0,00	100,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	54.744.500,00	54.744.500,00	0,00	100,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.744.500,00	54.744.500,00	0,00	100,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	45.589.000,00	45.585.000,00	(4.000,00)	99,99	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	45.589.000,00	45.585.000,00	(4.000,00)	99,99	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.589.000,00	45.585.000,00	(4.000,00)	99,99	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	263.672.617,35	252.379.208,00	(11.293.409,35)	95,71	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	263.672.617,35	252.379.208,00	(11.293.409,35)	95,71	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.672.617,35	252.379.208,00	(11.293.409,35)	95,71	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	458.092.900,65	457.000.000,00	(1.092.900,65)	99,76	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	458.092.900,65	457.000.000,00	(1.092.900,65)	99,76	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	392.900,65	0,00	(392.900,65)	0,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.900,65	0,00	(392.900,65)	0,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	457.700.000,00	457.000.000,00	(700.000,00)	99,84	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.700.000,00	457.000.000,00	(700.000,00)	99,84	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.681.886.673,00	2.588.544.068,00	(93.342.605,00)	96,51	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	754.324.664,00	689.910.089,00	(64.414.575,00)	91,46	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	754.324.664,00	689.910.089,00	(64.414.575,00)	91,46	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	754.324.664,00	689.910.089,00	(64.414.575,00)	91,46	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	150.000.000,00	129.941.090,00	(20.058.910,00)	86,62	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	129.941.090,00	(20.058.910,00)	86,62	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	129.941.090,00	(20.058.910,00)	86,62	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.777.562.009,00	1.768.692.889,00	(8.869.120,00)	99,50	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.777.562.009,00	1.768.692.889,00	(8.869.120,00)	99,50	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.777.562.009,00	1.768.692.889,00	(8.869.120,00)	99,50	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.186.309.005,00	1.973.715.095,00	(212.593.910,00)	90,27	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.573.935.649,00	1.491.128.486,00	(82.807.163,00)	94,73	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.573.935.649,00	1.491.128.486,00	(82.807.163,00)	94,73	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.573.935.649,00	1.491.128.486,00	(82.807.163,00)	94,73	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	315.749.900,00	219.938.728,00	(95.811.172,00)	69,65	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	315.749.900,00	219.938.728,00	(95.811.172,00)	69,65	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.749.900,00	219.938.728,00	(95.811.172,00)	69,65	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	296.623.456,00	262.647.881,00	(33.975.575,00)	88,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	296.623.456,00	262.647.881,00	(33.975.575,00)	88,54	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.623.456,00	262.647.881,00	(33.975.575,00)	88,54	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.338.590.809,00	3.071.748.514,00	(266.842.295,00)	92,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01		PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG	3.338.590.809,00	3.071.748.514,00	(266.842.295,00)	92,00	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI APARATUR DAN MASYARAKAT	2.075.373.812,00	1.872.038.252,00	(203.335.560,00)	90,20	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.075.373.812,00	1.872.038.252,00	(203.335.560,00)	90,20	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.075.373.812,00	1.872.038.252,00	(203.335.560,00)	90,20	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0002		PELAYANAN KELEMBAGAAN APARATUR DAN MASYARAKAT	315.682.000,00	313.851.936,00	(1.830.064,00)	99,42	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	315.682.000,00	313.851.936,00	(1.830.064,00)	99,42	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.682.000,00	313.851.936,00	(1.830.064,00)	99,42	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0003		PENINGKATAN FASILITASI PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAN PELESTARIAN SENI BUDAYA	289.464.598,00	270.770.493,00	(18.694.105,00)	93,54	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	289.464.598,00	270.770.493,00	(18.694.105,00)	93,54	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.464.598,00	270.770.493,00	(18.694.105,00)	93,54	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG	658.070.399,00	615.087.833,00	(42.982.566,00)	93,46	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	658.070.399,00	615.087.833,00	(42.982.566,00)	93,46	
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	658.070.399,00	615.087.833,00	(42.982.566,00)	93,46	
				JUMLAH BELANJA	13.861.882.473,00	13.101.772.294,00	(760.110.179,00)	94,51	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(13.861.882.473,00)	(13.101.772.294,00)	760.110.179,00	94,51	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.861.882.473,00)	(13.101.772.294,00)	760.110.179,00	94,51	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		5	BELANJA DAERAH	51.206.443.087,00	49.818.552.697,00	(1.387.890.390,00)	97,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.487.351.009,00	41.276.970.657,00	(1.210.380.352,00)	97,15	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	341.457.700,00	337.722.970,00	(3.734.730,00)	98,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	309.745.000,00	307.347.320,00	(2.397.680,00)	99,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	309.745.000,00	307.347.320,00	(2.397.680,00)	99,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.745.000,00	307.347.320,00	(2.397.680,00)	99,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	31.712.700,00	30.375.650,00	(1.337.050,00)	95,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	31.712.700,00	30.375.650,00	(1.337.050,00)	95,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.712.700,00	30.375.650,00	(1.337.050,00)	95,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	32.806.226.673,00	32.056.883.393,00	(749.343.280,00)	97,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	32.154.062.673,00	31.443.209.193,00	(710.853.480,00)	97,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.154.062.673,00	31.443.209.193,00	(710.853.480,00)	97,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	32.154.062.673,00	31.443.209.193,00	(710.853.480,00)	97,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	529.686.000,00	492.560.000,00	(37.126.000,00)	92,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	529.686.000,00	492.560.000,00	(37.126.000,00)	92,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.686.000,00	492.560.000,00	(37.126.000,00)	92,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	122.478.000,00	121.114.200,00	(1.363.800,00)	98,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	122.478.000,00	121.114.200,00	(1.363.800,00)	98,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.478.000,00	121.114.200,00	(1.363.800,00)	98,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	90.680.100,00	88.290.815,00	(2.389.285,00)	97,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	53.102.200,00	51.507.200,00	(1.595.000,00)	96,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.102.200,00	51.507.200,00	(1.595.000,00)	96,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.102.200,00	51.507.200,00	(1.595.000,00)	96,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	37.577.900,00	36.783.615,00	(794.285,00)	97,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.577.900,00	36.783.615,00	(794.285,00)	97,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.577.900,00	36.783.615,00	(794.285,00)	97,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.482.802.790,00	2.441.859.779,00	(40.943.011,00)	98,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	193.400.500,00	189.457.000,00	(3.943.500,00)	97,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	193.400.500,00	189.457.000,00	(3.943.500,00)	97,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.400.500,00	189.457.000,00	(3.943.500,00)	97,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	125.785.300,00	116.177.200,00	(9.608.100,00)	92,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	125.785.300,00	116.177.200,00	(9.608.100,00)	92,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.785.300,00	116.177.200,00	(9.608.100,00)	92,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	2.072.246.190,00	2.062.423.650,00	(9.822.540,00)	99,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.072.246.190,00	2.062.423.650,00	(9.822.540,00)	99,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.072.246.190,00	2.062.423.650,00	(9.822.540,00)	99,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	91.370.800,00	73.801.929,00	(17.568.871,00)	80,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	91.370.800,00	73.801.929,00	(17.568.871,00)	80,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.370.800,00	73.801.929,00	(17.568.871,00)	80,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.452.914.225,00	4.098.287.890,00	(354.626.335,00)	92,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	99.977.000,00	99.669.120,00	(307.880,00)	99,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.977.000,00	99.669.120,00	(307.880,00)	99,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.977.000,00	99.669.120,00	(307.880,00)	99,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	802.086.600,00	710.650.555,00	(91.436.045,00)	88,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	802.086.600,00	710.650.555,00	(91.436.045,00)	88,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	802.086.600,00	710.650.555,00	(91.436.045,00)	88,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	50.000.000,00	46.963.545,00	(3.036.455,00)	93,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	46.963.545,00	(3.036.455,00)	93,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.963.545,00	(3.036.455,00)	93,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	638.279.300,00	631.648.615,00	(6.630.685,00)	98,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	638.279.300,00	631.648.615,00	(6.630.685,00)	98,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.279.300,00	631.648.615,00	(6.630.685,00)	98,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	360.362.625,00	354.497.565,00	(5.865.060,00)	98,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	360.362.625,00	354.497.565,00	(5.865.060,00)	98,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.362.625,00	354.497.565,00	(5.865.060,00)	98,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	28.975.800,00	26.497.980,00	(2.477.820,00)	91,44	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	28.975.800,00	26.497.980,00	(2.477.820,00)	91,44	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.975.800,00	26.497.980,00	(2.477.820,00)	91,44	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	2.359.437.000,00	2.160.323.830,00	(199.113.170,00)	91,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.359.437.000,00	2.160.323.830,00	(199.113.170,00)	91,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.359.437.000,00	2.160.323.830,00	(199.113.170,00)	91,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	39.038.000,00	38.236.680,00	(801.320,00)	97,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	18.134.100,00	17.486.680,00	(647.420,00)	96,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.134.100,00	17.486.680,00	(647.420,00)	96,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0010	5.2	BELANJA MODAL	20.903.900,00	20.750.000,00	(153.900,00)	99,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.903.900,00	20.750.000,00	(153.900,00)	99,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	74.757.900,00	29.800.000,00	(44.957.900,00)	39,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	74.757.900,00	29.800.000,00	(44.957.900,00)	39,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.757.900,00	29.800.000,00	(44.957.900,00)	39,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	101.875.400,00	99.562.502,00	(2.312.898,00)	97,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0005		PENGADAAN MEBEL	101.775.400,00	99.562.502,00	(2.212.898,00)	97,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	101.775.400,00	99.562.502,00	(2.212.898,00)	97,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.775.400,00	99.562.502,00	(2.212.898,00)	97,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	875.781.981,00	826.747.397,00	(49.034.584,00)	94,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12.000.000,00	8.347.300,00	(3.652.700,00)	69,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	8.347.300,00	(3.652.700,00)	69,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	8.347.300,00	(3.652.700,00)	69,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	110.022.000,00	73.075.000,00	(36.947.000,00)	66,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	110.022.000,00	73.075.000,00	(36.947.000,00)	66,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.022.000,00	73.075.000,00	(36.947.000,00)	66,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	753.759.981,00	745.325.097,00	(8.434.884,00)	98,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	753.759.981,00	745.325.097,00	(8.434.884,00)	98,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753.759.981,00	745.325.097,00	(8.434.884,00)	98,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.335.612.140,00	1.327.615.911,00	(7.996.229,00)	99,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	275.175.000,00	274.334.448,00	(840.552,00)	99,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	275.175.000,00	274.334.448,00	(840.552,00)	99,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.175.000,00	274.334.448,00	(840.552,00)	99,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	519.890.000,00	514.343.326,00	(5.546.674,00)	98,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	519.890.000,00	514.343.326,00	(5.546.674,00)	98,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.890.000,00	514.343.326,00	(5.546.674,00)	98,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	98.040.000,00	96.975.000,00	(1.065.000,00)	98,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	98.040.000,00	96.975.000,00	(1.065.000,00)	98,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.040.000,00	96.975.000,00	(1.065.000,00)	98,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	442.507.140,00	441.963.137,00	(544.003,00)	99,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	442.507.140,00	441.963.137,00	(544.003,00)	99,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.507.140,00	441.963.137,00	(544.003,00)	99,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.001.100.780,00	5.875.047.790,00	(126.052.990,00)	97,89	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	4.727.361.680,00	4.641.262.530,00	(86.099.150,00)	98,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	859.689.000,00	791.951.636,00	(67.737.364,00)	92,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	859.689.000,00	791.951.636,00	(67.737.364,00)	92,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	859.689.000,00	791.951.636,00	(67.737.364,00)	92,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1.475.689.000,00	1.474.324.774,00	(1.364.226,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.475.689.000,00	1.474.324.774,00	(1.364.226,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.475.689.000,00	1.474.324.774,00	(1.364.226,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	14.547.580,00	7.200.000,00	(7.347.580,00)	49,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.547.580,00	7.200.000,00	(7.347.580,00)	49,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.547.580,00	7.200.000,00	(7.347.580,00)	49,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	145.694.000,00	145.349.200,00	(344.800,00)	99,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	145.694.000,00	145.349.200,00	(344.800,00)	99,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.694.000,00	145.349.200,00	(344.800,00)	99,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0005		PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS KABUPATEN/KOTA	603.121.600,00	603.109.402,00	(12.198,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	603.121.600,00	603.109.402,00	(12.198,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.121.600,00	603.109.402,00	(12.198,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0006		KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL	1.087.300.000,00	1.084.827.934,00	(2.472.066,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.087.300.000,00	1.084.827.934,00	(2.472.066,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.300.000,00	1.084.827.934,00	(2.472.066,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	541.320.500,00	534.499.584,00	(6.820.916,00)	98,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	541.320.500,00	534.499.584,00	(6.820.916,00)	98,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.320.500,00	534.499.584,00	(6.820.916,00)	98,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	1.273.739.100,00	1.233.785.260,00	(39.953.840,00)	96,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	152.379.900,00	118.406.200,00	(33.973.700,00)	77,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	152.379.900,00	118.406.200,00	(33.973.700,00)	77,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.379.900,00	118.406.200,00	(33.973.700,00)	77,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	1.121.359.200,00	1.115.379.060,00	(5.980.140,00)	99,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.121.359.200,00	1.115.379.060,00	(5.980.140,00)	99,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.121.359.200,00	1.115.379.060,00	(5.980.140,00)	99,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.717.991.298,00	2.666.534.250,00	(51.457.048,00)	98,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	648.001.362,00	645.440.000,00	(2.561.362,00)	99,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0001		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	332.178.000,00	331.578.000,00	(600.000,00)	99,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	332.178.000,00	331.578.000,00	(600.000,00)	99,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.178.000,00	331.578.000,00	(600.000,00)	99,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0002		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	315.823.362,00	313.862.000,00	(1.961.362,00)	99,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	315.823.362,00	313.862.000,00	(1.961.362,00)	99,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.823.362,00	313.862.000,00	(1.961.362,00)	99,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.069.989.936,00	2.021.094.250,00	(48.895.686,00)	97,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	802.436.880,00	801.906.240,00	(530.640,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	802.436.880,00	801.906.240,00	(530.640,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	802.436.880,00	801.906.240,00	(530.640,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	130.794.100,00	124.023.560,00	(6.770.540,00)	94,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	130.794.100,00	124.023.560,00	(6.770.540,00)	94,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.794.100,00	124.023.560,00	(6.770.540,00)	94,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	785.910.856,00	750.731.230,00	(35.179.626,00)	95,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	785.910.856,00	750.731.230,00	(35.179.626,00)	95,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	785.910.856,00	750.731.230,00	(35.179.626,00)	95,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0004		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	350.848.100,00	344.433.220,00	(6.414.880,00)	98,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	350.848.100,00	344.433.220,00	(6.414.880,00)	98,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.848.100,00	344.433.220,00	(6.414.880,00)	98,17	
				JUMLAH BELANJA	51.206.443.087,00	49.818.552.697,00	(1.387.890.390,00)	97,28	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(51.206.443.087,00)	(49.818.552.697,00)	1.387.890.390,00	97,28	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(51.206.443.087,00)	(49.818.552.697,00)	1.387.890.390,00	97,28	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	(3.241.935.739,00)	92,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.454.254.766,00	19.622.752.271,00	(2.831.502.495,00)	87,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	335.631.221,80	329.850.084,00	(5.781.137,80)	98,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	268.525.509,82	264.545.065,00	(3.980.444,82)	98,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	268.525.509,82	264.545.065,00	(3.980.444,82)	98,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.525.509,82	264.545.065,00	(3.980.444,82)	98,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	67.105.711,98	65.305.019,00	(1.800.692,98)	97,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	67.105.711,98	65.305.019,00	(1.800.692,98)	97,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.105.711,98	65.305.019,00	(1.800.692,98)	97,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.994.932.376,20	8.690.420.766,00	(304.511.610,20)	96,61	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.426.861.288,20	8.174.112.006,00	(252.749.282,20)	97,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.426.861.288,20	8.174.112.006,00	(252.749.282,20)	97,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.426.861.288,20	8.174.112.006,00	(252.749.282,20)	97,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	543.902.000,00	493.948.500,00	(49.953.500,00)	90,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	543.902.000,00	493.948.500,00	(49.953.500,00)	90,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.902.000,00	493.948.500,00	(49.953.500,00)	90,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	24.169.088,00	22.360.260,00	(1.808.828,00)	92,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.169.088,00	22.360.260,00	(1.808.828,00)	92,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.169.088,00	22.360.260,00	(1.808.828,00)	92,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	171.611.500,00	161.599.000,00	(10.012.500,00)	94,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	123.224.000,00	123.224.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	123.224.000,00	123.224.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.224.000,00	123.224.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	48.387.500,00	38.375.000,00	(10.012.500,00)	79,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.387.500,00	38.375.000,00	(10.012.500,00)	79,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.387.500,00	38.375.000,00	(10.012.500,00)	79,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.523.099.569,00	1.436.575.149,00	(86.524.420,00)	94,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	64.217.452,00	63.629.860,00	(587.592,00)	99,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	64.217.452,00	63.629.860,00	(587.592,00)	99,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.217.452,00	63.629.860,00	(587.592,00)	99,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	87.247.800,00	85.550.986,00	(1.696.814,00)	98,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	87.247.800,00	85.550.986,00	(1.696.814,00)	98,05	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.247.800,00	85.550.986,00	(1.696.814,00)	98,05	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	170.355.000,00	144.985.000,00	(25.370.000,00)	85,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	170.355.000,00	144.985.000,00	(25.370.000,00)	85,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.355.000,00	144.985.000,00	(25.370.000,00)	85,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.062.134.621,00	1.006.134.201,00	(56.000.420,00)	94,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.062.134.621,00	1.006.134.201,00	(56.000.420,00)	94,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.134.621,00	1.006.134.201,00	(56.000.420,00)	94,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	22.610.427,00	21.430.107,00	(1.180.320,00)	94,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	22.610.427,00	21.430.107,00	(1.180.320,00)	94,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.610.427,00	21.430.107,00	(1.180.320,00)	94,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	116.534.269,00	114.844.995,00	(1.689.274,00)	98,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	116.534.269,00	114.844.995,00	(1.689.274,00)	98,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.534.269,00	114.844.995,00	(1.689.274,00)	98,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8.962.668.698,00	6.898.686.175,00	(2.063.982.523,00)	76,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	8.962.668.698,00	6.898.686.175,00	(2.063.982.523,00)	76,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.534.942.664,00	5.558.340.474,00	(1.976.602.190,00)	73,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.242.664,00	84.340.474,00	(3.902.190,00)	95,57	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011	5.1.05	Belanja Hibah	7.446.700.000,00	5.474.000.000,00	(1.972.700.000,00)	73,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	(87.380.333,00)	93,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.407.826.034,00	1.320.445.701,00	(87.380.333,00)	93,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.149.120.006,00	1.796.399.962,00	(352.720.044,00)	83,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.460.956.502,00	1.108.532.739,00	(352.423.763,00)	75,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.460.956.502,00	1.108.532.739,00	(352.423.763,00)	75,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.460.956.502,00	1.108.532.739,00	(352.423.763,00)	75,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	95.002.000,00	94.771.720,00	(230.280,00)	99,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	95.002.000,00	94.771.720,00	(230.280,00)	99,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.002.000,00	94.771.720,00	(230.280,00)	99,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	593.161.504,00	593.095.503,00	(66.001,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	593.161.504,00	593.095.503,00	(66.001,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.161.504,00	593.095.503,00	(66.001,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	317.191.395,00	309.221.135,00	(7.970.260,00)	97,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	296.903.395,00	289.482.935,00	(7.420.460,00)	97,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	296.903.395,00	289.482.935,00	(7.420.460,00)	97,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.903.395,00	289.482.935,00	(7.420.460,00)	97,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.288.000,00	19.738.200,00	(549.800,00)	97,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.288.000,00	19.738.200,00	(549.800,00)	97,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.288.000,00	19.738.200,00	(549.800,00)	97,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.959.964.051,00	1.850.151.111,00	(109.812.940,00)	94,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.959.964.051,00	1.850.151.111,00	(109.812.940,00)	94,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	46.828.310,00	9.195.630,00	(37.632.680,00)	19,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.828.310,00	9.195.630,00	(37.632.680,00)	19,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.828.310,00	9.195.630,00	(37.632.680,00)	19,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	281.575.392,00	267.548.184,00	(14.027.208,00)	95,01	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	281.575.392,00	267.548.184,00	(14.027.208,00)	95,01	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.575.392,00	67.548.184,00	(14.027.208,00)	82,80	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	50.609.662,00	42.042.853,00	(8.566.809,00)	83,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.609.662,00	42.042.853,00	(8.566.809,00)	83,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.609.662,00	42.042.853,00	(8.566.809,00)	83,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0010		PELAKSANAAN TUGAS PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA	169.836.439,00	154.090.034,00	(15.746.405,00)	90,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	169.836.439,00	154.090.034,00	(15.746.405,00)	90,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.836.439,00	154.090.034,00	(15.746.405,00)	90,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012		PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	1.411.114.248,00	1.377.274.410,00	(33.839.838,00)	97,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.411.114.248,00	1.377.274.410,00	(33.839.838,00)	97,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.411.114.248,00	1.377.274.410,00	(33.839.838,00)	97,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.273.723.200,00	5.270.644.854,00	(3.078.346,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	5.273.723.200,00	5.270.644.854,00	(3.078.346,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	56.061.200,00	54.048.659,00	(2.012.541,00)	96,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	56.061.200,00	54.048.659,00	(2.012.541,00)	96,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.061.200,00	54.048.659,00	(2.012.541,00)	96,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	5.171.643.200,00	5.170.723.582,00	(919.618,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.171.643.200,00	5.170.723.582,00	(919.618,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.413.200,00	51.493.582,00	(919.618,00)	98,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	5.119.230.000,00	5.119.230.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	46.018.800,00	45.872.613,00	(146.187,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.018.800,00	45.872.613,00	(146.187,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.018.800,00	45.872.613,00	(146.187,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.079.165.000,00	1.825.239.562,00	(253.925.438,00)	87,78	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.079.165.000,00	1.825.239.562,00	(253.925.438,00)	87,78	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	177.500.000,00	158.332.182,00	(19.167.818,00)	89,20	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	177.500.000,00	158.332.182,00	(19.167.818,00)	89,20	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.500.000,00	158.332.182,00	(19.167.818,00)	89,20	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	1.855.015.000,00	1.620.932.380,00	(234.082.620,00)	87,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.855.015.000,00	1.620.932.380,00	(234.082.620,00)	87,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.415.000,00	235.932.380,00	(6.482.620,00)	97,32	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	1.612.600.000,00	1.385.000.000,00	(227.600.000,00)	85,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	46.650.000,00	45.975.000,00	(675.000,00)	98,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.650.000,00	45.975.000,00	(675.000,00)	98,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.650.000,00	45.975.000,00	(675.000,00)	98,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.120.329.600,00	1.112.879.482,00	(7.450.118,00)	99,33	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	1.120.329.600,00	1.112.879.482,00	(7.450.118,00)	99,33	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	73.290.500,00	66.711.500,00	(6.579.000,00)	91,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	73.290.500,00	66.711.500,00	(6.579.000,00)	91,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.290.500,00	66.711.500,00	(6.579.000,00)	91,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	47.039.100,00	46.167.982,00	(871.118,00)	98,14	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.039.100,00	46.167.982,00	(871.118,00)	98,14	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.039.100,00	46.167.982,00	(871.118,00)	98,14	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	11.990.533.160,00	11.954.366.758,00	(36.166.402,00)	99,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	11.990.533.160,00	11.954.366.758,00	(36.166.402,00)	99,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	147.934.500,00	137.988.300,00	(9.946.200,00)	93,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	147.934.500,00	137.988.300,00	(9.946.200,00)	93,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.934.500,00	137.988.300,00	(9.946.200,00)	93,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	4.524.922.180,00	4.510.842.238,00	(14.079.942,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.524.922.180,00	4.510.842.238,00	(14.079.942,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.124.922.180,00	3.110.842.238,00	(14.079.942,00)	99,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
				KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	4.524.922.180,00	4.510.842.238,00	(14.079.942,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.524.922.180,00	4.510.842.238,00	(14.079.942,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.124.922.180,00	3.110.842.238,00	(14.079.942,00)	99,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	54.781.900,00	54.364.000,00	(417.900,00)	99,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	54.781.900,00	54.364.000,00	(417.900,00)	99,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.781.900,00	54.364.000,00	(417.900,00)	99,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI	7.262.894.580,00	7.251.172.220,00	(11.722.360,00)	99,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.262.894.580,00	7.251.172.220,00	(11.722.360,00)	99,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.270.194.580,00	2.258.472.220,00	(11.722.360,00)	99,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	4.992.700.000,00	4.992.700.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	(3.241.935.739,00)	92,77	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(44.877.969.777,00)	(41.636.034.038,00)	3.241.935.739,00	92,77	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(44.877.969.777,00)	(41.636.034.038,00)	3.241.935.739,00	92,77	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN I.4

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.744.913.173.696,91	1.646.176.048.471,62	207.349.444.724,93	184.695.417.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	944.324.110.490,97	920.716.860.031,37	86.794.159.629,33	77.117.351.312,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	942.643.690.564,17	919.338.372.032,51	86.670.378.929,33	77.040.275.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	660.745.076.358,38	647.010.890.507,63	2.901.734.968,33	2.075.166.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	443.715.770,00	381.167.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	338.684.000,00	321.589.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	27.116.770,00	5.921.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	72.915.000,00	53.656.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	639.352.586.087,78	630.364.320.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	635.400.465.377,78	626.966.334.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.849.566.710,00	3.322.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.054.000,00	75.539.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.764.000,00	42.417.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.315.000,00	18.277.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.449.000,00	24.140.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	762.430.399,91	679.685.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	465.670.699,91	420.511.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	296.759.700,00	259.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.129.887.273,00	1.686.331.637,00	65.736.450,72	30.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.475.600,00	50.090.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.159.400,00	166.580.640,00	62.089.150,72	27.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.999.000,00	29.386.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	279.366.900,00	252.982.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.886.500,00	42.520.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60.520.000,00	52.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	92.499.400,00	78.850.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.323.222.673,00	952.351.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	77.757.800,00	61.133.660,00	3.647.300,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	482.268.848,00	398.981.510,00	1.154.109.048,00	741.459.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	12.745.977,00	12.432.000,00	112.141.890,00	73.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.854.621,00	9.198.000,00	961.967.158,00	588.669.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	391.668.250,00	377.351.510,00	80.000.000,00	79.530.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.332.313.943,30	8.734.738.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.021.499.300,00	1.553.369.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.617.000,00	217.336.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.060.197.643,30	6.962.032.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.296.373.630,00	1.157.462.334,00	1.303.749.770,00	1.058.609.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	735.910.530,00	598.480.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	463.250.000,00	461.892.450,00	75.000.000,00	73.359.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.213.100,00	97.089.068,00	1.228.749.770,00	985.249.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	6.894.736.406,39	3.565.785.482,63	378.139.699,61	244.351.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.894.736.406,39	3.565.785.482,63	378.139.699,61	244.351.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	281.554.043.705,79	272.077.257.250,88	83.768.643.961,00	74.965.109.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	152.909.287.448,51	147.111.842.683,48	44.282.974.829,00	41.636.460.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	165.363.000,00	122.998.786,00	2.934.637.000,00	2.539.003.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	462.109.152,00	342.993.430,00	2.823.564.228,00	2.290.476.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	58.890.000,00	44.490.000,00	1.444.158.000,00	1.180.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.112.001,00	5.850.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.935.494.986,20	5.021.283.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	21.976.000,00	19.950.000,00	424.000.000,00	419.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	7.007.451.100,00	6.812.574.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	189.130.000,01	143.366.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	50.078.859.872,30	49.652.091.437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	382.771.000,00	367.602.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	199.424.300,00	126.612.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	87.227.214.837,00	83.582.476.256,00	27.974.980.313,00	28.405.092.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	81.836.000,00	8.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	123.892.000,00	121.046.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	49.068.000,00	40.443.960,00	250.932.000,00	80.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	634.039.300,00	430.896.482,00	8.320.703.288,00	6.721.585.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	285.655.900,00	269.103.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	111.953.674.428,28	109.800.386.548,50	35.761.534.694,00	30.080.390.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	25.415.000,00	23.187.400,00	310.170.000,00	92.848.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	154.860.392,00	147.241.792,00	596.788.475,00	594.349.077,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	141.188.357,25	134.961.700,00	408.025.749,00	405.531.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	10.000.000,00	9.641.460,00	13.163.426,00	13.054.894,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	409.173.368,00	310.817.986,66	3.526.225.641,00	3.029.838.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	14.915.000,00	11.862.900,00	180.670.000,00	180.002.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	19.735.000,00	1.905.000,00	863.850.000,00	605.814.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.915.787.000,00	4.601.402.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	10.543.272.200,00	10.205.743.286,00	1.760.193.800,00	574.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.555.015.500,00	2.228.175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	155.175.970,00	114.930.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	31.764.237.052,03	31.508.094.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	401.195.000,00	378.712.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	37.740.600,00	36.993.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	59.966.089.609,00	59.455.419.888,84	20.635.379.301,00	20.636.540.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	56.290.000,00	9.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	612.952.380,00	463.490.492,00	7.467.068.302,00	3.948.364.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	170.632.000,00	158.541.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	16.691.081.829,00	15.165.028.018,90	3.724.134.438,00	3.248.258.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	195.134.600,00	109.695.493,00	1.204.865.400,00	1.084.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	129.439.525,00	70.830.944,90	670.248.815,00	511.620.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	692.600,00	0,00	199.307.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.830.671,00	0,00	35.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.043.485.000,00	934.966.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	474.557.320,00	338.993.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.639.444.223,00	4.513.273.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	104.704.000,00	99.615.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	291.651.750,00	94.581.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.730.397.600,00	8.677.084.539,00	1.614.346.823,00	1.652.567.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	16.376.000,00	2.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	68.519.000,00	59.811.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	950.000.000,00	228.953.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	41.849.540,00	34.818.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	114.475.500,00	70.519.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	52.734.500,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	52.734.500,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	61.741.000,00	59.269.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	61.741.000,00	59.269.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	187.656.000,00	153.676.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	187.656.000,00	153.676.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	91.218.000,00	89.034.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	96.438.000,00	64.641.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	42.439.000,00	26.028.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	27.055.000,00	14.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	27.055.000,00	14.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.384.000,00	11.058.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.384.000,00	11.058.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001		BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	1.363.766.618,80	1.223.213.450,86	122.466.200,00	77.075.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.187.909.318,80	1.074.392.990,86	114.283.400,00	71.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.814.428,80	246.741.614,00	114.283.400,00	71.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.271.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.684.900,00	70.052.493,00	114.283.400,00	71.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	6.062.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.062.100,00	101.985.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.193.000,00	19.052.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.457.928,80	45.318.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.075.040,00	763.631.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.456.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.120.000,00	82.404.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	44.977.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.499.040,00	634.850.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.019.850,00	64.019.849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.019.850,00	64.019.849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	175.857.300,00	148.820.460,00	8.182.800,00	5.860.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	175.857.300,00	148.820.460,00	8.182.800,00	5.860.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.425.300,00	38.858.510,00	8.182.800,00	5.860.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	125.432.000,00	109.961.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002		CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM	70.658.108,00	63.868.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.658.108,00	63.868.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.300.608,00	41.169.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.501.200,00	1.439.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.008.100,00	2.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.815.608,00	11.625.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.206.900,00	6.802.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.658.800,00	4.576.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.110.000,00	13.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.857.500,00	18.198.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.607.500,00	12.958.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.250.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN	66.177.200,00	27.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.177.200,00	27.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.610.400,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.610.400,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.976.800,00	19.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	588.900,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	501.100,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.994.795,00	6.654.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.497.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.286.200,00	11.882.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.590.000,00	7.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000,00	7.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA	60.807.900,00	32.131.000,00	652.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.807.900,00	32.131.000,00	652.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.120.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.120.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.507.900,00	26.521.400,00	652.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	949.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.263.900,00	0,00	652.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.673.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.779.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.822.400,00	2.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.020.000,00	24.233.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.180.000,00	299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.990.000,00	299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA	61.136.100,00	21.797.597,00	662.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	61.136.100,00	21.797.597,00	662.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.400.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.400.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.260.300,00	10.467.500,00	662.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	633.400,00	0,00	662.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.008.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.438.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.314.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.821.000,00	10.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.475.800,00	2.610.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.285.800,00	2.610.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006		CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS	57.874.000,00	9.878.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.874.000,00	9.878.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.444.000,00	9.878.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	673.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.837.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.252.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.776.000,00	9.878.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	424.455.925.407,54	410.668.919.771,18	86.038.844.479,00	82.507.357.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Dinas Kesehatan	71.203.468.664,54	65.396.284.640,00	18.990.556.700,00	18.571.897.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.650.729.716,10	25.345.267.879,00	77.123.600,00	26.697.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.195.385,00	104.511.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.328.000,00	6.366.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	69.535.570,00	66.113.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.331.815,00	32.031.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.119.448.415,00	22.928.595.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.368.648.340,00	22.202.635.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	741.620.000,00	717.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.180.075,00	8.672.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.765.550,00	13.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14.765.550,00	13.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.650.000,00	8.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.650.000,00	8.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.458.250,56	556.877.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	23.777.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.372.000,00	74.423.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.736.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	55.019.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.000.000,00	15.351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.619.000,00	11.140.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.264.000,00	26.209.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356.466.750,56	350.954.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	77.123.600,00	26.697.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	77.123.600,00	26.697.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.393.712.115,54	1.332.358.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.178.700,00	23.337.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.350.000,00	65.399.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.290.183.415,54	1.243.622.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.500.000,00	400.863.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	387.500.000,00	386.803.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	14.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	38.683.886.047,00	33.507.627.280,00	18.913.433.100,00	18.545.199.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.013.916.169,00	4.866.769.305,00	18.905.309.400,00	18.537.076.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.217.831.014,00	1.106.966.971,00	18.695.309.400,00	18.327.076.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	31.120.000,00	23.006.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	94.921.400,00	78.529.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.670.043.755,00	3.658.266.968,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	33.378.909.370,00	28.368.449.119,00	8.123.700,00	8.123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	33.773.000,00	11.768.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	39.664.720,00	31.668.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	360.265.470,00	337.725.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	46.748.900,00	46.646.540,00	8.123.700,00	8.123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	557.722.000,00	555.250.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	81.838.232,00	81.538.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	392.462.350,00	379.245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	62.211.925,00	55.979.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.383.094.785,00	949.501.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	17.897.220,00	17.728.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	76.737.000,00	75.268.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.251.486.888,00	24.771.833.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	156.684.000,00	155.734.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	878.896.230,00	868.221.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	27.634.650,00	19.060.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	11.792.000,00	11.274.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	255.977.258,00	241.677.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	255.977.258,00	241.677.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	35.083.250,00	30.731.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.910.000,00	12.633.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	21.173.250,00	18.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.823.901.401,44	5.525.552.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.744.225.204,44	5.451.966.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.713.168.904,44	5.421.376.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.056.300,00	30.589.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	79.676.197,00	73.585.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	55.190.247,00	49.434.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.485.950,00	24.151.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	59.063.500,00	58.833.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	45.347.500,00	45.183.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	45.347.500,00	45.183.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	13.716.000,00	13.649.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	13.716.000,00	13.649.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	985.888.000,00	959.004.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	255.730.800,00	247.987.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	255.730.800,00	247.987.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	730.157.200,00	711.016.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	730.157.200,00	711.016.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	257.387.351.565,00	253.868.136.957,93	9.256.461.739,00	8.781.904.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	247.235.503.118,47	249.068.358.683,93	5.030.680.697,00	4.811.753.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.357.410,00	20.360.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.357.410,00	20.360.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.740.318.943,15	94.606.016.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94.993.527.681,15	93.862.968.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	746.791.262,00	743.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.568.520,00	127.933.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.739.920,00	95.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.828.600,00	32.726.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.345.552,00	4.773.000,00	4.253.660.697,00	4.185.625.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	794.000,00	0,00	200.225.685,00	197.080.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.551.552,00	4.773.000,00	4.053.435.012,00	3.988.545.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.691.968.238,50	9.992.242.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.004.150,00	7.081.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.647.729.568,91	5.998.972.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.036.234.519,59	3.986.187.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	958.960.680,82	612.481.000,00	202.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.650.000,00	83.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.000.000,00	175.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	699.310.680,82	353.956.000,00	202.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	139.648.983.774,00	143.704.551.744,93	575.000.000,00	626.127.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	139.648.983.774,00	143.704.551.744,93	575.000.000,00	626.127.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.212.257.498,87	1.869.100.178,00	4.225.781.042,00	3.970.150.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	7.212.114.326,87	1.869.100.178,00	3.991.965.338,00	3.793.908.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.264.914.852,00	1.557.918.322,00	815.667.338,00	750.610.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	750.000,00	600.000,00	3.176.298.000,00	3.043.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.139.874.851,00	244.758.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.806.574.623,87	65.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	143.172,00	0,00	233.815.704,00	176.241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	143.172,00	0,00	233.815.704,00	176.241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.939.590.947,66	2.930.678.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	2.939.590.947,66	2.930.678.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.939.590.947,66	2.930.678.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	89.356.447.778,00	85.610.362.979,00	57.471.387.550,00	54.833.117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.007.932.067,95	77.353.072.187,00	1.242.417.400,00	719.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.856.946,00	137.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.032.946,00	114.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.824.000,00	22.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.947.853.189,00	52.049.252.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.190.195.189,00	51.298.704.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	739.658.000,00	733.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.000.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.000.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	13.000.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.149.219,00	407.571.807,00	215.610.900,00	213.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.371.001,00	42.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.074.380,00	41.855.600,00	215.610.900,00	213.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.806.200,00	58.262.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	191.473.638,00	185.795.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	81.660.000,00	64.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.764.000,00	14.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.872.112.599,95	1.594.824.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.872.112.599,95	1.594.824.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.457.405.862,00	2.401.653.240,00	26.806.500,00	26.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.367.320,00	79.983.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	100.000.000,00	99.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.766.200,00	81.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	17.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	22.188.000,00	20.100.000,00	26.806.500,00	26.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.103.084.342,00	2.103.084.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	23.137.554.252,00	20.749.617.480,00	1.000.000.000,00	479.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	23.137.554.252,00	20.749.617.480,00	1.000.000.000,00	479.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.028.669.709,05	5.966.621.351,00	56.228.970.150,00	54.113.671.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4.683.125.649,05	4.638.179.477,00	56.228.970.150,00	54.113.671.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000,00	969.979.272,00	34.495.700.000,00	32.941.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0,00	0,00	21.492.822.150,00	20.931.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	6.102.000,00	5.964.000,00	199.958.000,00	199.910.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.677.023.649,05	3.662.236.205,00	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.279.837.600,00	1.265.487.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.015.237.600,00	1.004.137.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0031	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	264.600.000,00	261.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	43.143.460,00	42.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	43.143.460,00	42.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	22.563.000,00	20.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	22.563.000,00	20.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.319.846.001,00	2.290.669.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	2.241.063.936,00	2.229.718.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.241.063.936,00	2.229.718.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	78.782.065,00	60.951.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	78.782.065,00	60.951.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004		UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)	6.508.657.400,00	5.794.135.194,25	320.438.490,00	320.438.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.203.147.571,00	1.124.511.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.454.000,00	10.924.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.454.000,00	10.924.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	128.712.000,00	119.680.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	128.712.000,00	119.680.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.428.600,00	55.108.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.567.000,00	9.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,00	8.818.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.361.600,00	33.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.268.000,00	49.282.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.268.000,00	49.282.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899.316.471,00	876.092.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385.177.240,00	378.807.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.139.231,00	497.285.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.968.500,00	13.422.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.560.000,00	9.672.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.408.500,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.269.339.329,00	4.633.903.588,25	320.438.490,00	320.438.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.029.549.369,00	4.394.306.202,25	320.438.490,00	320.438.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	298.898.926,00	297.841.926,00	320.438.490,00	320.438.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	43.020.600,00	42.568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	707.180.809,00	701.154.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.980.449.034,00	3.352.741.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	239.789.960,00	239.597.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	239.789.960,00	239.597.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.170.500,00	35.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	36.170.500,00	35.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	36.170.500,00	35.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	106.592.036.450,00	79.561.817.505,25	30.437.965.870,00	22.112.549.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	103.244.227.441,00	76.751.740.698,25	28.718.340.670,00	20.417.882.446,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.388.127.097,47	28.478.079.994,00	388.217.900,00	294.776.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	446.883.168,77	432.908.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.695.008,00	138.669.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	227.773.020,77	225.823.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.415.140,00	68.415.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.900.774.139,66	22.845.713.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.384.556.199,66	21.329.695.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.450.080.000,00	1.449.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66.137.940,00	66.137.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.776.000,00	36.671.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	36.776.000,00	36.671.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	265.768.038,00	209.680.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	157.723.038,00	151.980.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.045.000,00	57.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.483.771.413,37	1.404.107.294,00	318.217.900,00	225.123.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.852.626,00	31.675.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.027.000,00	106.872.000,00	318.217.900,00	225.123.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.390.600,00	63.254.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.849.100,00	133.331.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.362.000,00	40.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	153.278.750,00	140.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	157.198.571,37	149.508.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	744.812.766,00	738.373.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.000.000,00	54.746.400,00	70.000.000,00	69.652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	70.000.000,00	69.652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000,00	54.746.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.963.928.100,67	2.602.657.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.249.851,31	14.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	975.956.971,36	866.647.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.963.721.278,00	1.721.015.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.235.226.237,00	891.595.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	432.661.602,00	424.831.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.660.000,00	74.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	726.904.635,00	392.693.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.739.250.530,00	5.073.791.265,00	2.182.877.030,00	1.121.016.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.739.250.530,00	5.073.791.265,00	2.182.877.030,00	1.121.016.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	68.465.900,00	68.465.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	231.550.180,00	192.941.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	6.657.490.700,00	4.294.670.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	206.736.950,00	135.820.673,00	1.182.603.930,00	755.863.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	184.936.800,00	84.082.239,00	1.000.273.100,00	365.152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	390.070.000,00	297.810.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.040.919.725,00	924.323.021,00	1.440.500.000,00	486.254.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.040.919.725,00	924.323.021,00	1.440.500.000,00	486.254.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	894.065.815,00	858.011.363,00	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	146.853.910,00	66.311.658,00	1.357.500.000,00	403.254.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	105.381.749,00	62.139.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	105.381.749,00	62.139.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	105.381.749,00	62.139.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	22.798.647.417,53	12.905.505.707,88	499.866.000,00	498.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	22.798.647.417,53	12.905.505.707,88	499.866.000,00	498.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	1.473.558.700,00	1.473.558.700,00	199.866.000,00	199.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	13.925.800,00	13.925.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	13.638.663.235,03	7.410.919.213,67	300.000.000,00	298.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7.672.499.682,50	4.007.101.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	12.589.985.662,00	10.068.063.546,37	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12.589.985.662,00	10.068.063.546,37	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12.589.985.662,00	10.068.063.546,37	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	27.165.417.812,00	17.837.705.281,00	23.886.879.740,00	18.017.441.383,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	27.165.417.812,00	17.837.705.281,00	23.886.879.740,00	18.017.441.383,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	1.284.702.180,00	729.708.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan	100.000.000,00	91.840.200,00	3.407.879.740,00	3.406.934.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	744.239.887,00	726.603.909,00	7.384.000.000,00	4.765.254.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	100.000.000,00	81.912.200,00	12.054.000.000,00	8.825.036.243,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	8.709.331.921,00	6.426.603.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	6.134.434.000,00	5.242.313.238,00	1.041.000.000,00	1.020.216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.158.458.934,00	973.510.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	6.736.217.800,00	2.367.280.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.198.033.090,00	1.197.933.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	495.825.345,00	482.288.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	426.648.275,00	421.220.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	179.439.875,00	177.987.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	86.408.400,00	82.733.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	160.800.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	34.750.000,00	27.532.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	34.750.000,00	27.532.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	34.427.070,00	33.536.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	24.427.070,00	23.611.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	10.000.000,00	9.924.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	920.672.103,00	919.843.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	192.248.703,00	191.762.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	192.248.703,00	191.762.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	203.316.400,00	203.265.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	203.316.400,00	203.265.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	372.899.000,00	372.770.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	372.899.000,00	372.770.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	152.208.000,00	152.045.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	152.208.000,00	152.045.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN	880.794.668,00	793.278.269,00	7.472.700,00	7.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	880.794.668,00	793.278.269,00	7.472.700,00	7.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.083.880,00	342.846.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.606.390,00	20.263.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.997.300,00	45.688.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	59.691.500,00	58.781.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.788.690,00	218.113.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.910.288,00	264.161.023,00	7.472.700,00	7.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.390.000,00	41.287.588,00	7.472.700,00	7.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.520.288,00	222.873.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.800.500,00	186.270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.241.000,00	95.715.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	90.559.500,00	90.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002		UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	2.467.014.341,00	2.016.798.538,00	1.712.152.500,00	1.687.231.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	386.201.702,00	376.736.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.088.330,00	222.511.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.713.700,00	137.396.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.374.630,00	85.114.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.113.372,00	154.225.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.113.372,00	154.225.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	244.834.400,00	143.579.250,00	555.177.200,00	537.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	244.834.400,00	143.579.250,00	555.177.200,00	537.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	244.834.400,00	143.579.250,00	555.177.200,00	537.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.835.978.239,00	1.496.482.340,00	1.156.975.300,00	1.149.411.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.835.978.239,00	1.496.482.340,00	1.156.975.300,00	1.149.411.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	99.088.800,00	99.088.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.560.389.439,00	1.221.833.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	176.500.000,00	175.559.670,00	1.156.975.300,00	1.149.411.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	212.723.271.104,00	181.560.380.352,82	3.296.893.100,00	2.219.773.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	212.723.271.104,00	181.560.380.352,82	3.296.893.100,00	2.219.773.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.974.266.576,95	14.512.140.596,00	3.296.893.100,00	2.219.773.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	528.172.659,47	522.492.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	248.032.800,00	244.834.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.939.859,47	14.274.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.200.000,00	263.384.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.652.655.496,30	9.458.739.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.922.586.924,30	8.744.445.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	730.068.572,00	714.293.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	151.459.291,00	151.234.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.591.291,00	31.591.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	119.868.000,00	119.643.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	227.651.256,00	210.368.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	206.651.256,00	189.368.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.360.599.022,18	1.325.038.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	11.788.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.143.000,00	30.840.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	332.666.851,18	325.577.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.686.400,00	68.633.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	113.968.000,00	113.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000,00	3.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.762.000,00	546.064.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	157.392.118,00	151.022.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.480.653,00	74.480.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.188.800,00	112.188.800,00	2.166.893.060,00	2.020.114.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	916.075.900,00	770.006.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	382.910.000,00	382.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.188.800,00	112.188.800,00	867.907.160,00	867.197.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	829.187.432,00	765.707.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.940.000,00	252.539.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000,00	95.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.247.432,00	407.247.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.112.352.620,00	1.966.370.982,00	1.130.000.040,00	199.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.877.800,00	21.430.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.175.600,00	70.256.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.700.000,00	46.041.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.964.599.220,00	1.828.641.462,00	1.130.000.040,00	199.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	865.593.600,00	808.757.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	865.593.600,00	808.757.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	865.593.600,00	808.757.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.356.429.499,05	8.142.372.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	29.043.000,00	29.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	16.023.000,00	16.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	8.327.386.499,05	8.113.329.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7.417.386.499,05	7.248.330.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	910.000.000,00	864.998.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	188.526.981.428,00	158.097.110.437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	188.526.981.428,00	158.097.110.437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	894.786.000,00	394.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	187.105.636.428,00	157.178.261.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	526.559.000,00	524.062.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	34.442.540.579,40	33.376.913.481,00	443.810.804,60	417.496.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.160.501.253,40	8.914.539.904,00	48.165.104,60	47.663.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.169.571.914,00	8.057.687.773,00	3.285.600,00	2.941.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.227.733,00	71.636.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.383.381,00	43.551.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.565.900,00	9.535.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.278.452,00	18.549.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.912.409.566,00	6.831.558.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.645.037.966,00	6.570.064.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	267.371.600,00	261.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.532.904,00	209.819.055,00	3.285.600,00	2.941.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.449.900,00	2.275.500,00	3.285.600,00	2.941.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.427.680,00	18.108.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.366.800,00	8.179.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.043.800,00	11.945.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.244.724,00	164.570.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.258.400,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.258.400,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.332.292,00	591.524.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.037.600,00	115.129.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.294.692,00	476.394.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.811.019,00	203.149.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.503.619,00	154.439.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.401.800,00	12.834.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.905.600,00	35.875.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	990.929.339,40	856.852.131,00	44.879.504,60	44.721.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	188.111.585,40	95.911.794,00	37.825.404,00	37.728.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	79.037.538,00	33.492.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	8.880.000,00	8.880.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	28.600.645,40	28.112.127,00	26.125.404,00	26.028.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	71.593.402,00	25.427.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	567.760.968,00	555.381.739,00	7.054.100,60	6.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	14.662.000,00	14.563.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	321.222.786,00	309.665.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	225.454.182,00	224.745.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	6.422.000,00	6.406.983,00	7.054.100,60	6.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	235.056.786,00	205.558.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	211.015.742,00	191.743.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	24.041.044,00	13.815.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	25.282.039.326,00	24.462.373.577,00	395.645.700,00	369.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.740.202.832,00	22.313.759.751,00	312.838.500,00	287.218.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.009.443,00	111.564.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.234.600,00	81.837.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.774.843,00	29.727.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.203.638.135,00	16.970.751.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.767.601.135,00	16.545.804.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	409.752.000,00	399.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.884.500,00	12.572.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.400.500,00	13.226.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.464.000,00	7.864.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.464.000,00	7.864.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	580.844.000,00	580.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	580.844.000,00	580.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.698.975,00	404.980.613,00	29.738.500,00	4.118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.962.700,00	8.858.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.056.600,00	6.551.000,00	25.620.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	4.118.100,00	4.118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.565.935,00	21.524.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.056.261,00	21.303.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.852.579,00	340.537.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.204.900,00	6.204.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.125.000,00	103.125.000,00	283.100.000,00	283.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	103.125.000,00	103.125.000,00	137.900.000,00	137.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.228.244.091,00	3.174.290.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	146.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.593.000,00	30.140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.035.651.091,00	2.997.199.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.074.179.188,00	960.339.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.325.000,00	61.918.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.489.093,00	298.119.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.914.395,00	30.136.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	676.450.700,00	570.165.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.525.214.394,00	2.132.456.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.335.954.394,00	1.981.028.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	42.807.000,00	30.809.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	139.737.104,00	117.028.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	158.409.115,00	155.060.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1.253.808.075,00	1.000.268.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	683.025.500,00	636.806.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	54.667.600,00	41.054.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	189.260.000,00	151.428.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	109.150.230,00	105.706.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	80.109.770,00	45.721.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	16.622.100,00	16.157.570,00	82.807.200,00	82.614.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	16.622.100,00	16.157.570,00	82.807.200,00	82.614.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	16.622.100,00	16.157.570,00	82.807.200,00	82.614.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	22.375.289.665,00	20.291.157.330,00	337.770.842,00	320.889.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000		Dinas Sosial	22.375.289.665,00	20.291.157.330,00	337.770.842,00	320.889.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.901.458.724,00	12.347.332.218,00	337.770.842,00	320.889.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.047.521,79	327.456.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.559.318,00	9.906.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	42.880.976,00	40.439.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.793.014,00	75.061.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.814.213,79	202.049.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.868.509.432,00	10.376.451.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.378.841.432,00	9.894.737.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	489.668.000,00	481.713.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.187.451,00	32.756.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	33.187.451,00	32.756.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.588.000,00	22.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.588.000,00	22.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	732.135.859,00	717.039.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.559.226,00	14.800.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.939.743,00	34.110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.476.492,00	51.643.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.058.098,00	44.959.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.822.500,00	4.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	567.279.800,00	566.695.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.382.765,21	78.600.000,00	337.770.842,00	320.889.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.112.915,00	78.600.000,00	250.000.000,00	237.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	117.000,21	0,00	8.802.522,00	8.624.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.850,00	0,00	78.968.320,00	74.725.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.981.769,00	546.880.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.141.170,00	52.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.588.360,00	79.389.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.252.239,00	414.661.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.625.926,00	245.202.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.152.346,00	173.933.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.801.280,00	32.098.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.672.300,00	39.170.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	600.895.841,00	596.713.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	8.527.300,00	8.000.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	8.527.300,00	8.000.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	592.368.541,00	588.712.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	81.730.881,00	78.926.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	510.637.660,00	509.786.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.374.083.895,00	2.110.879.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	700.969.508,00	641.204.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	294.483.373,00	266.383.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	21.957.909,00	18.096.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	31.481.451,00	26.979.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	155.366.000,00	139.700.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	7.807.962,00	5.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	177.721.380,00	175.028.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	12.151.433,00	9.609.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	858.193.670,00	825.719.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	4.001.645,00	3.672.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	131.210.287,00	124.838.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	283.534.000,00	277.008.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	287.431.045,00	279.468.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	26.580.597,00	23.165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	110.999.111,00	103.695.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	14.436.985,00	13.870.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	220.338.884,00	214.770.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	47.956.100,00	46.229.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	34.653.000,00	33.873.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	31.000.000,00	30.736.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	26.834.796,00	25.483.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	52.696.399,00	51.450.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	17.198.589,00	16.997.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	47.012.132,00	40.785.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	4.983.768,00	4.014.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	4.591.883,00	3.077.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	963.036,00	887.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	5.323.000,00	5.026.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	16.706.841,00	15.522.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	14.443.604,00	12.257.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	547.569.701,00	388.399.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	531.807.259,00	374.262.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	15.762.442,00	14.136.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.757.605.625,00	3.529.964.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.757.605.625,00	3.529.964.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.902.342.830,00	1.748.337.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	620.554.490,00	564.563.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.234.708.305,00	1.217.064.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.191.863.580,00	1.168.939.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.191.863.580,00	1.168.939.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	2.015.518.059,00	994.184.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	39.754.427,00	38.605.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	24.002.119,00	23.569.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	112.588.975,00	112.579.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	549.382.000,00	537.328.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	549.382.000,00	537.328.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	549.382.000,00	537.328.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	314.935.183.706,79	291.457.390.997,15	16.583.108.119,00	11.199.536.960,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	36.443.507.703,00	34.883.731.157,26	1.515.261.853,00	1.282.128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	31.676.204.366,00	30.478.585.654,26	336.270.400,00	217.517.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.180.843.437,00	27.171.937.130,26	336.270.400,00	217.517.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.907.510,00	24.872.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.162.000,00	2.288.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.941.200,00	4.156.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.804.310,00	18.427.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.251.820.342,00	25.551.271.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.696.580.342,00	25.019.956.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	555.240.000,00	531.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.740.000,00	45.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.240.000,00	44.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.500.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.362.090,00	328.158.047,00	2.975.600,00	2.874.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	7.328.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.839.200,00	8.763.855,00	2.975.600,00	2.874.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.339.394,00	95.374.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.630.700,00	10.913.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.120.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.432.796,00	200.017.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	333.294.800,00	214.642.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	333.294.800,00	214.642.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735.431.994,00	710.833.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.150.000,00	196.166.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.070.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.211.994,00	484.667.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.581.501,00	510.861.775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.573.501,00	147.776.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.160.000,00	16.006.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	548.848.000,00	347.079.481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	8.252.000,00	1.419.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	8.252.000,00	1.419.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	8.252.000,00	1.419.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.570.964.700,00	2.532.989.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.548.914.700,00	2.512.731.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.528.914.700,00	2.493.043.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	20.000.000,00	19.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	22.050.000,00	20.258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	22.050.000,00	20.258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	392.760.000,00	375.039.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	159.091.600,00	156.617.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	159.091.600,00	156.617.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	233.668.400,00	218.422.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	85.622.400,00	77.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	148.046.000,00	140.795.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	523.384.229,00	397.199.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	523.384.229,00	397.199.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	123.578.620,00	116.250.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	327.354.000,00	219.083.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	72.451.609,00	61.865.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam	367.795.950,00	333.379.155,00	166.208.200,00	115.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	201.208.850,00	167.719.155,00	166.208.200,00	115.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.402.700,00	51.159.000,00	166.208.200,00	115.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.431.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.426.200,00	14.944.000,00	124.696.000,00	109.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.416.000,00	0,00	41.512.200,00	6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.914.600,00	15.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.214.900,00	17.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.806.150,00	116.560.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.200.000,00	39.855.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.450.000,00	7.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.156.150,00	69.369.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	166.587.100,00	165.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	166.587.100,00	165.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	128.227.100,00	127.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	16.350.000,00	16.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	22.010.000,00	21.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002		UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau	4.359.176.157,00	4.035.005.382,00	1.012.783.253,00	949.406.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	308.008.657,00	271.108.034,00	248.435.000,00	248.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.179.000,00	81.179.000,00	248.435.000,00	248.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	87.635.000,00	87.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.179.000,00	81.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.829.657,00	189.929.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.404.657,00	131.131.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.425.000,00	58.797.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.051.167.500,00	3.763.897.348,00	764.348.253,00	700.971.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	4.051.167.500,00	3.763.897.348,00	764.348.253,00	700.971.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	3.494.952.000,00	3.374.405.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	556.215.500,00	389.492.166,00	764.348.253,00	700.971.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun	40.331.230,00	36.760.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.831.230,00	19.510.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.831.230,00	19.510.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	3.652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.031.230,00	15.858.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	19.500.000,00	17.250.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	19.500.000,00	17.250.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	8.000.000,00	5.853.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	5.850.000,00	5.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	5.650.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.658.590.336,00	16.541.416.373,00	4.241.886.882,00	3.657.866.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	16.731.892.970,00	15.702.259.974,00	121.256.800,00	120.397.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.507.130.146,00	12.099.990.979,00	121.256.800,00	120.397.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.892.900,00	152.398.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.199.200,00	104.420.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	29.426.100,00	28.865.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.267.600,00	19.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.066.736.185,00	9.799.613.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.655.029.885,00	9.394.909.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	408.302.000,00	401.396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.404.300,00	3.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.660.282,00	578.968.196,00	121.256.800,00	120.397.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.015.400,00	9.556.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.768.200,00	5.540.400,00	97.568.800,00	97.087.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.133.892,00	18.598.467,00	23.688.000,00	23.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.924.900,00	39.635.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	334.495.600,00	332.798.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.770.000,00	14.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.552.290,00	158.175.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.278.168.580,00	1.248.091.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.210.000,00	87.075.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	38.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.145.958.580,00	1.122.537.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.672.199,00	320.919.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.581.200,00	155.923.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.080.999,00	105.337.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.010.000,00	59.658.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	865.726.115,00	719.459.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	16.986.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	16.986.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	815.726.115,00	702.473.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	29.636.200,00	10.879.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	786.089.915,00	691.593.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	781.043.229,00	643.260.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	242.328.850,00	123.868.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	50.808.000,00	50.777.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	191.520.850,00	73.090.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	538.714.379,00	519.391.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	469.694.379,00	452.413.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	69.020.000,00	66.978.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.814.930.080,00	1.774.742.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	200.000.000,00	179.656.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	200.000.000,00	179.656.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	572.151.400,00	276.246.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	18.416.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	18.416.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	522.151.400,00	257.829.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	247.118.800,00	171.340.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	275.032.600,00	86.489.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	190.912.000,00	188.560.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.692.000,00	49.688.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	50.692.000,00	49.688.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140.220.000,00	138.871.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	140.220.000,00	138.871.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001		UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	926.697.366,00	839.156.399,00	4.120.630.082,00	3.537.469.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	182.728.035,00	175.877.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.860.800,00	8.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750.800,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.110.000,00	8.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.357.635,00	112.212.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.357.635,00	112.212.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.509.600,00	54.898.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.100.000,00	43.512.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.409.600,00	11.385.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	506.381.389,00	431.268.661,00	2.432.939.249,00	2.123.260.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	506.381.389,00	431.268.661,00	2.432.939.249,00	2.123.260.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140.361.200,00	138.776.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	366.020.189,00	292.492.061,00	2.432.939.249,00	2.123.260.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	237.587.942,00	232.010.400,00	1.687.690.833,00	1.414.208.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	237.587.942,00	232.010.400,00	1.687.690.833,00	1.414.208.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	237.587.942,00	232.010.400,00	1.687.690.833,00	1.414.208.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	25.430.614.318,02	24.080.593.803,00	833.383.970,00	671.696.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	24.763.288.797,98	23.439.789.445,00	833.383.970,00	671.696.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.604.944.392,25	21.762.348.516,00	786.483.970,00	626.630.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.308.698,29	181.557.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.085.400,29	115.668.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.223.298,00	65.889.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.835.015.111,74	19.386.070.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.161.593.111,74	18.727.684.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	673.422.000,00	658.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	645.148.406,00	564.437.981,00	84.300.000,00	84.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.843.300,00	2.768.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	84.300.000,00	84.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.410.390,00	75.991.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.121.100,00	5.006.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.685.736,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	494.127.880,00	463.612.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.165.133,65	2.843.820,00	702.183.970,00	542.330.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	511.900.000,00	511.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	19.488.840,65	2.843.820,00	49.742.430,00	9.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.676.293,00	0,00	140.541.540,00	21.106.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.030.978.424,57	993.198.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.805.500,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.998.940,00	94.454.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.117.400,00	54.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	846.056.584,57	836.353.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.328.618,00	634.240.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	429.187.250,00	332.499.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.548.000,00	27.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	374.593.368,00	274.712.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.262.210.070,73	1.140.179.185,00	46.900.000,00	45.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	825.811.800,73	708.212.556,00	46.900.000,00	45.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	479.411.260,73	429.088.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	588.600,00	588.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	323.929.282,00	260.069.984,00	46.900.000,00	45.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	21.882.658,00	18.465.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	316.302.000,00	316.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	26.124.000,00	26.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	290.178.000,00	290.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	120.096.270,00	115.664.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	120.096.270,00	115.664.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	409.553.435,00	123.415.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	17.312.665,00	8.053.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	17.312.665,00	8.053.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	392.240.770,00	115.361.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	392.240.770,00	115.361.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	486.580.900,00	413.846.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	486.580.900,00	413.846.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	76.580.900,00	61.491.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	410.000.000,00	352.354.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001		UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)	350.659.442,04	333.830.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	350.659.442,04	333.830.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.230.176,00	43.441.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.158.000,00	4.089.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.335.776,00	5.191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.219.400,00	9.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000,00	1.478.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.820.000,00	2.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.197.000,00	20.144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.699.266,04	199.362.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.198.880,00	98.676.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.500.386,04	100.685.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.730.000,00	91.026.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.485.000,00	51.858.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.240.000,00	27.408.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.005.000,00	11.759.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002		UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	316.666.078,00	306.974.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	316.666.078,00	306.974.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.458.940,00	75.868.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.828.500,00	1.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.556.100,00	1.481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000,00	1.496.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	57.398.340,00	57.369.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.176.000,00	13.700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.498.138,00	111.822.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.060.000,00	96.384.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.438.138,00	15.438.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.709.000,00	119.282.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.125.000,00	75.793.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.745.000,00	36.649.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.839.000,00	6.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	145.804.044,00	120.505.938,00	1.000.000.000,00	992.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	145.804.044,00	120.505.938,00	1.000.000.000,00	992.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	145.804.044,00	120.505.938,00	1.000.000.000,00	992.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	145.804.044,00	120.505.938,00	1.000.000.000,00	992.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	145.804.044,00	120.505.938,00	1.000.000.000,00	992.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	34.104.610.272,00	32.919.853.668,00	1.189.834.467,00	468.693.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	33.483.995.918,00	32.476.617.054,00	925.487.880,00	339.838.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.990.867.972,00	31.005.324.897,00	925.487.880,00	339.838.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.514.054,00	224.726.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.480.854,00	87.679.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.033.200,00	137.046.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.684.648.735,00	28.868.708.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.161.296.735,00	28.352.080.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	523.352.000,00	516.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.660.505,00	419.715.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.924.000,00	1.970.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.005.200,00	46.838.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.935.441,00	59.530.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	106.573.600,00	106.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.942.800,00	18.713.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.279.464,00	170.442.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.000.000,00	15.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.122.100,00	7.756.712,00	925.487.880,00	339.838.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.253.700,00	0,00	581.179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.868.400,00	7.756.712,00	344.308.680,00	339.838.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.087.432.578,00	1.004.005.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.310.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.076.122.578,00	993.085.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.490.000,00	480.412.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.337.000,00	277.644.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.080.000,00	18.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	184.073.000,00	184.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	212.761.498,00	202.033.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	212.761.498,00	202.033.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	212.761.498,00	202.033.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	72.117.000,00	71.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	72.117.000,00	71.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	72.117.000,00	71.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.428.400,00	9.568.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	10.428.400,00	9.568.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	10.428.400,00	9.568.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.197.821.048,00	1.187.931.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.197.821.048,00	1.187.931.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.187.700.000,00	1.187.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	10.121.048,00	231.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	347.733.850,00	184.786.935,00	264.346.587,00	128.855.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	235.471.700,00	161.150.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.246.700,00	14.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.296.700,00	9.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.225.000,00	51.255.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.225.000,00	51.255.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	95.305.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	95.305.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	112.262.150,00	23.636.860,00	264.346.587,00	128.855.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	112.262.150,00	23.636.860,00	264.346.587,00	128.855.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	112.262.150,00	23.636.860,00	264.346.587,00	128.855.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002		UPTD KPHP Unit I Karimun	34.566.300,00	29.176.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.566.300,00	29.176.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.523.800,00	15.242.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.476.800,00	14.132.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.047.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.042.500,00	13.934.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.042.500,00	13.934.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003		UPTD KPHP Unit II Batam	25.596.000,00	23.020.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.596.000,00	23.020.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.065.600,00	16.672.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	639.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.457.500,00	13.423.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.968.500,00	3.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.530.400,00	6.348.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.530.400,00	6.348.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004		UPTD KPHP Unit III Lingga	22.793.624,00	21.482.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.793.624,00	21.482.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.293.500,00	18.016.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.562.800,00	2.510.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.730.700,00	11.730.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	3.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.500.124,00	3.465.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.124,00	3.465.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang	42.167.480,00	40.914.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.167.480,00	40.914.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.053.050,00	21.015.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.250.000,00	20.246.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	803.050,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.114.430,00	19.898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.114.430,00	19.898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006		UPTD KPHP Unit V Natuna	48.072.000,00	45.272.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.072.000,00	45.272.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.203.000,00	13.673.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.134.800,00	3.073.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.321.600,00	8.887.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.746.600,00	1.712.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.869.000,00	31.598.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.869.000,00	9.598.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas	99.685.100,00	98.583.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	99.685.100,00	98.583.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.120.100,00	7.334.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.120.100,00	7.334.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.565.000,00	91.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.565.000,00	11.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.989.281.374,00	11.792.071.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.989.281.374,00	11.792.071.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.843.894.744,00	11.694.663.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.059.600,00	73.492.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.821.900,00	10.827.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.477.400,00	31.523.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.760.300,00	31.141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.575.154.736,00	10.451.944.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.104.809.736,00	9.982.142.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	465.760.000,00	465.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.585.000,00	4.041.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.557.400,00	3.438.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.557.400,00	3.438.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	461.718.660,00	459.692.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.334.800,00	73.773.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.217.500,00	15.343.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	182.319.900,00	182.254.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.846.460,00	188.321.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.712.848,00	574.657.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.058.000,00	6.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559.334.848,00	552.279.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.691.500,00	131.437.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.231.500,00	111.379.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.460.000,00	20.058.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	39.395.400,00	36.870.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	39.395.400,00	36.870.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	39.395.400,00	36.870.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	7.447.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	7.447.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	7.447.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	98.543.940,00	60.537.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	98.543.940,00	60.537.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98.543.940,00	60.537.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.765.649.896,00	2.407.255.959,00	14.576.000,00	14.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.765.649.896,00	2.407.255.959,00	14.576.000,00	14.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	24.771.500,00	15.361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	24.771.500,00	15.361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	24.771.500,00	15.361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	37.054.400,00	29.018.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	37.054.400,00	29.018.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	19.172.400,00	15.144.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	17.882.000,00	13.874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	156.997.400,00	106.338.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	156.997.400,00	106.338.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	122.180.700,00	88.427.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18.296.200,00	17.316.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.04.1.01.0019	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16.520.500,00	594.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.546.826.596,00	2.256.537.354,00	14.576.000,00	14.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.546.826.596,00	2.256.537.354,00	14.576.000,00	14.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	336.494.600,00	223.391.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25.760.000,00	25.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	305.000.000,00	184.830.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	108.979.800,00	104.658.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	102.409.350,00	101.522.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.668.182.846,00	1.616.373.557,00	14.576.000,00	14.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.303.733.750,00	5.234.501.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.295.723.750,00	1.227.101.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.01.0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	1.295.723.750,00	1.227.101.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	281.756.330,00	257.724.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	281.756.330,00	257.724.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000,00	182.382.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	81.756.330,00	75.341.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	23.080.522.553,00	20.793.177.345,14	6.656.713.016,00	3.314.080.662,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	21.714.827.054,69	19.652.203.492,14	6.614.220.610,00	3.284.299.142,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.588.392.865,22	16.968.737.435,00	64.470.300,00	39.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.677.959,00	98.683.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.425.380,00	32.115.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.252.579,00	66.567.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.814.790.286,22	14.593.716.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.010.005.286,22	13.842.208.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	772.494.000,00	720.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	32.291.000,00	31.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.971.300,00	21.885.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	21.971.300,00	21.885.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	58.520.475,00	57.469.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	58.520.475,00	57.469.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.679.300,00	22.314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	22.679.300,00	22.314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	576.885.800,00	550.563.366,00	11.000.000,00	7.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.834.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.894.400,00	14.451.645,00	11.000.000,00	7.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	189.850.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000,00	57.442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89.875.000,00	79.972.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.116.400,00	199.012.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.343.700,00	75.000.000,00	53.470.300,00	31.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.333.300,00	0,00	53.470.300,00	31.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.010.400,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.406.757.045,00	1.127.546.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.000.000,00	170.039.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000,00	95.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.048.757.045,00	855.747.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.767.000,00	421.557.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	413.167.000,00	351.162.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.600.000,00	70.395.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.907.081.622,47	1.501.998.128,36	492.318.004,00	3.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	898.990.803,47	500.411.061,36	492.318.004,00	3.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	898.990.803,47	500.411.061,36	492.318.004,00	3.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	18.146.800,00	14.588.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	18.146.800,00	14.588.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	17.520.000,00	15.881.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	17.520.000,00	15.881.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	953.373.676,00	953.373.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	953.373.676,00	953.373.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19.050.343,00	17.743.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	19.050.343,00	17.743.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.219.352.567,00	1.181.467.928,78	6.057.432.306,00	3.241.022.142,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	18.091.400,00	11.063.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	18.091.400,00	11.063.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	14.101.600,00	8.613.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	14.101.600,00	8.613.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	17.416.000,00	17.297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	17.416.000,00	17.297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	18.673.600,00	14.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	18.673.600,00	14.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.151.069.967,00	1.130.411.928,78	6.057.432.306,00	3.241.022.142,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	50.589.000,00	48.837.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	738.195.467,00	429.788.418,24	6.057.432.306,00	3.241.022.142,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	1.362.285.500,00	651.785.716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	109.996.428,19	99.221.706,00	4.402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	79.683.628,19	79.683.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.683.628,19	79.683.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.683.628,19	79.683.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	30.312.800,00	19.538.100,00	4.402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	30.312.800,00	19.538.100,00	4.402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	30.312.800,00	19.538.100,00	4.402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	224.669.844,00	199.571.684,00	22.170.106,00	14.627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	204.487.007,00	181.189.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.487.007,00	181.189.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.487.007,00	181.189.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	20.182.837,00	18.381.745,00	22.170.106,00	14.627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	20.182.837,00	18.381.745,00	22.170.106,00	14.627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	20.182.837,00	18.381.745,00	22.170.106,00	14.627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	489.378.780,00	436.370.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	448.091.180,00	404.378.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448.091.180,00	404.378.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448.091.180,00	404.378.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	41.287.600,00	31.991.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	41.287.600,00	31.991.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	41.287.600,00	31.991.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepualauan Anambas	357.239.777,12	252.485.157,00	15.919.400,00	15.153.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	251.251.477,12	201.816.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.251.477,12	201.816.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.251.477,12	201.816.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	105.988.300,00	50.668.507,00	15.919.400,00	15.153.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	105.988.300,00	50.668.507,00	15.919.400,00	15.153.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	105.988.300,00	50.668.507,00	15.919.400,00	15.153.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	184.410.669,00	153.325.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	102.831.494,00	85.827.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.831.494,00	85.827.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.831.494,00	85.827.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	81.579.175,00	67.498.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	81.579.175,00	67.498.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	81.579.175,00	67.498.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	34.640.775.718,00	29.861.076.806,00	241.102.750,00	235.397.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	34.640.775.718,00	29.861.076.806,00	241.102.750,00	235.397.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.196.277.304,28	13.746.292.935,00	121.600.000,00	121.424.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.822.299,23	140.758.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.818.399,26	98.591.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.003.899,97	42.167.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.384.047.078,00	11.962.639.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.944.795.078,00	11.552.448.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	439.252.000,00	410.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.874.162,05	354.206.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.157.500,00	6.696.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.684.000,00	2.294.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.053.500,00	13.278.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.229.160,00	72.296.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.072.900,00	40.748.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.696.500,00	24.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.980.602,05	194.641.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	121.600.000,00	121.424.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	121.600.000,00	121.424.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.156.583.765,00	1.139.605.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.730.800,00	36.480.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.707.900,00	52.206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.065.145.065,00	1.050.918.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.950.000,00	149.083.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.900.000,00	141.250.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.050.000,00	7.832.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.024.306.519,00	12.387.079.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	16.024.306.519,00	12.387.079.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	449.927.249,00	430.987.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	3.635.930.960,00	3.054.795.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	749.287.378,00	745.070.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	633.401.753,00	631.208.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	24.967.000,00	24.411.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	10.530.792.179,00	7.500.605.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.420.191.894,72	3.727.704.315,00	119.502.750,00	113.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	20.400.751,00	19.911.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	20.400.751,00	19.911.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4.399.791.143,72	3.707.792.623,00	119.502.750,00	113.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	37.498.603,00	33.134.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	16.212.320,26	8.062.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	850.720.162,00	834.968.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	2.985.724.120,00	2.495.795.283,00	32.511.100,00	31.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	509.635.938,46	335.831.684,00	86.991.650,00	82.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	38.349.762.491,00	32.882.770.633,00	77.717.700,00	70.301.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	38.349.762.491,00	32.882.770.633,00	77.717.700,00	70.301.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.287.961.359,62	11.985.072.935,00	45.074.200,00	44.938.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.322.207,00	78.979.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.322.207,00	78.979.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.936.268.236,08	9.824.362.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.499.963.136,08	9.406.028.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	436.305.100,00	418.333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.582.000,00	24.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.582.000,00	24.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.109.224.340,00	950.255.938,00	45.074.200,00	44.938.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.250.200,00	3.063.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.200,00	54.000,00	45.074.200,00	44.938.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.155.800,00	2.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.754.600,00	19.071.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.074.300,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.758.340,00	181.266.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.120.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	893.017.900,00	740.636.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.800.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.800.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	866.328.176,54	846.684.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.490.000,00	24.037.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.906.600,00	48.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	792.931.576,54	773.793.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.436.400,00	140.499.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.520.500,00	115.730.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.915.900,00	24.768.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.990.000,00	1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.990.000,00	1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2.990.000,00	1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.990.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.990.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	2.990.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100.063.100,00	99.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.063.100,00	99.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100.063.100,00	99.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.606.117.098,00	2.279.207.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.606.117.098,00	2.279.207.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.603.127.098,00	2.276.227.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.990.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	17.036.019.672,00	14.551.508.819,00	32.643.500,00	25.363.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	17.036.019.672,00	14.551.508.819,00	32.643.500,00	25.363.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5.092.891.972,00	4.918.454.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	10.606.245.000,00	9.182.799.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	325.200.000,00	307.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	417.482.700,00	2.386.800,00	32.643.500,00	25.363.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	594.200.000,00	140.608.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.300.621.261,38	3.951.340.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	6.300.621.261,38	3.951.340.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.602.141.261,38	1.547.260.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	1.698.480.000,00	1.511.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	2.17.08.1.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	1.000.000.000,00	892.621.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.059.581.359,00	14.793.891.142,00	11.628.931,00	11.560.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15.059.581.359,00	14.793.891.142,00	11.628.931,00	11.560.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.215.010.035,00	13.987.076.454,00	11.628.931,00	11.560.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.564.264,00	184.429.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.951.707,00	150.596.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.315.912,00	6.201.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.296.645,00	27.631.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.495.970.503,00	12.304.096.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.015.389.365,00	11.835.017.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	439.680.000,00	428.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.901.138,00	40.747.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	550.815.651,00	526.945.453,00	3.038.500,00	3.030.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.294.800,00	5.179.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	3.038.500,00	3.030.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.283.795,00	29.649.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	252.648.353,00	229.579.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	111.660.000,00	111.648.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.400.000,00	17.359.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.528.703,00	133.528.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.688.000,00	33.687.500,00	8.590.431,00	8.530.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.688.000,00	33.687.500,00	8.590.431,00	8.530.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.199.369,00	848.379.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.857.264,00	174.124.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	631.142.105,00	631.055.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.772.248,00	89.537.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.110.448,00	80.887.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.661.800,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	219.614.350,00	202.641.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	202.179.800,00	185.598.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	202.179.800,00	185.598.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	17.434.550,00	17.043.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	17.434.550,00	17.043.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	348.266.180,00	343.536.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	348.266.180,00	343.536.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	336.212.480,00	331.499.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	12.053.700,00	12.036.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	211.876.799,00	198.918.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60.954.695,00	58.873.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.693.700,00	9.771.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50.260.995,00	49.101.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	150.922.104,00	140.045.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	18.401.390,00	14.427.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	36.611.348,00	36.585.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	78.258.666,00	74.654.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	17.650.700,00	14.377.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	51.106.895,00	48.201.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	51.106.895,00	48.201.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	18.040.540,00	17.892.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12.019.105,00	9.414.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	21.047.250,00	20.895.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	13.707.100,00	13.517.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	13.707.100,00	13.517.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	13.707.100,00	13.517.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33.919.033.698,77	30.669.251.377,04	314.519.200,00	155.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	33.919.033.698,77	30.669.251.377,04	314.519.200,00	155.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.713.671.699,27	12.192.291.252,04	216.745.100,00	155.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	685.529.904,27	596.925.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	318.679.504,27	268.421.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.122.000,00	74.370.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.728.400,00	254.133.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.242.773.946,55	9.059.661.798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.617.856.546,55	8.635.603.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	570.298.000,00	382.907.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.619.400,00	41.151.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	148.276.301,10	127.793.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	148.276.301,10	127.793.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	630.602.004,19	574.430.854,00	216.745.100,00	155.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.136.200,00	2.940.000,00	216.745.100,00	155.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000,00	43.045.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.383.500,00	65.596.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.161.800,00	31.421.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.312.055,00	389.780.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52.608.449,19	40.265.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.611.005.943,16	1.441.711.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.146.950,00	218.115.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.455.000,00	44.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.314.403.993,16	1.178.870.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.483.600,00	391.767.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	291.830.000,00	288.127.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	103.653.600,00	103.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	838.857.400,00	564.859.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	738.857.400,00	464.859.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	638.857.400,00	370.499.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	100.000.000,00	94.360.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	18.466.504.599,50	17.088.972.013,00	97.774.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4.432.131.900,00	4.239.100.167,00	97.774.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	2.210.656.000,00	2.037.089.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	70.000.000,00	67.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	2.151.475.900,00	2.134.077.567,00	97.774.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	5.224.372.699,50	4.366.573.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	953.441.000,00	895.001.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	4.270.931.699,50	3.471.572.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	100.000.000,00	89.406.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	100.000.000,00	89.406.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.710.000.000,00	8.393.891.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	8.310.000.000,00	8.223.614.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	400.000.000,00	170.276.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	900.000.000,00	823.128.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	900.000.000,00	823.128.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	900.000.000,00	823.128.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	48.595.643,00	38.441.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	48.595.643,00	38.441.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	48.595.643,00	38.441.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	48.595.643,00	38.441.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	48.595.643,00	38.441.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	36.231.702,00	23.247.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	36.231.702,00	23.247.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	36.231.702,00	23.247.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	36.231.702,00	23.247.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	36.231.702,00	23.247.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	14.600.421.971,00	13.932.881.362,31	125.000.000,00	124.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000		Dinas Kebudayaan	14.600.421.971,00	13.932.881.362,31	125.000.000,00	124.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.669.551.179,51	11.157.859.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.947.808,65	145.380.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.072.000,00	64.058.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.862.208,65	72.341.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.013.600,00	8.980.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.890.362.380,64	8.557.153.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.489.443.380,64	8.184.419.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400.919.000,00	372.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.412.260,00	484.566.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	280.315.700,00	270.388.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.096.560,00	201.192.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.000.000,00	12.985.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.013.655.360,22	1.893.737.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.707.836,00	63.707.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570.398.240,22	543.327.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.000.000,00	43.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.335.549.284,00	1.243.252.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.173.370,00	77.021.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.833.370,00	58.888.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.340.000,00	18.132.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.948.428.405,00	1.932.034.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	304.907.385,00	291.696.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	213.890.000,00	213.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	91.017.385,00	77.946.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	298.607.520,00	297.273.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	298.607.520,00	297.273.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.344.913.500,00	1.343.064.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	244.913.500,00	243.064.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	717.890.436,83	587.479.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	717.890.436,83	587.479.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	20.699.258,83	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	697.191.178,00	568.079.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	198.972.165,66	196.442.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	4.588.910,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	4.588.910,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	194.383.255,66	192.842.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	137.801.567,00	136.367.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	56.581.688,66	56.475.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	65.579.784,00	59.064.784,00	125.000.000,00	124.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	65.579.784,00	59.064.784,00	125.000.000,00	124.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	65.579.784,00	59.064.784,00	125.000.000,00	124.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	20.946.852.048,00	20.110.356.081,40	361.483.350,00	200.168.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	20.774.283.722,00	19.948.806.115,40	361.483.350,00	200.168.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.824.812.335,00	18.379.661.663,40	92.562.100,00	44.222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.123.329,00	166.244.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.777.189,00	100.986.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.346.140,00	65.257.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.026.871.066,00	14.705.311.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.600.995.842,00	14.304.233.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	425.875.224,00	401.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.572.751,00	305.023.707,00	92.562.100,00	44.222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.533.600,00	27.028.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	92.562.100,00	44.222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.505.870,00	85.348.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.971.600,00	21.800.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.960.000,00	9.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.965.381,00	134.797.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.636.300,00	26.119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.040.935.912,00	2.938.229.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	893.886.480,00	844.806.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.144.059.432,00	2.090.432.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.309.277,00	264.852.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.453.986,00	156.841.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.155.291,00	43.155.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.700.000,00	64.855.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.908.681.387,00	1.532.411.277,00	268.921.250,00	155.946.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1.314.023.787,00	987.067.893,00	268.921.250,00	155.946.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	602.248.000,00	575.630.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	165.135.800,00	153.894.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	433.863.987,00	149.606.700,00	268.921.250,00	155.946.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	20.000.000,00	17.467.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	92.776.000,00	90.468.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	594.657.600,00	545.343.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	59.000.000,00	56.611.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	49.400.000,00	47.377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	433.600.000,00	391.317.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	52.657.600,00	50.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	40.790.000,00	36.733.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	40.790.000,00	36.733.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	30.790.000,00	27.123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.000.000,00	9.609.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001		UPT Perpustakaan Muhammad Sani	172.568.326,00	161.549.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	172.568.326,00	161.549.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.695.726,00	59.245.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.978.526,00	18.393.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.717.200,00	40.852.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.051.900,00	61.194.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	754.100,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.297.800,00	60.444.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.820.700,00	41.110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.156.600,00	37.600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.664.100,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	129.858.500,00	114.643.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	129.858.500,00	114.643.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	129.858.500,00	114.643.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	122.275.400,00	107.764.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	122.275.400,00	107.764.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	7.583.100,00	6.879.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	7.583.100,00	6.879.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	143.098.885.676,98	131.653.585.496,86	27.534.638.018,00	20.142.131.281,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.804.265.094,00	51.997.735.946,92	360.614.640,00	352.144.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	48.992.565.575,02	47.312.392.579,12	199.188.440,00	197.270.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.226.070.563,77	32.223.459.417,00	138.058.440,00	136.140.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.528.146,76	181.692.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	151.325.300,02	149.821.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.443.974,04	9.146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.758.872,70	22.724.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.989.403.553,00	30.057.999.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.879.634.853,00	28.979.693.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.109.768.700,00	1.078.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.624.000,00	32.918.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.624.000,00	32.918.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	587.932.995,00	578.365.274,00	20.083.900,00	20.052.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.122.000,00	7.120.000,00	20.083.900,00	20.052.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.344.900,00	55.355.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.000.000,00	16.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	501.466.095,00	499.314.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	117.974.540,00	116.087.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	117.974.540,00	116.087.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	956.615.857,01	928.838.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.239.800,00	131.556.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	818.376.057,01	797.282.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.966.012,00	443.645.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.238.512,00	158.090.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.587.500,00	254.797.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.140.000,00	30.757.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	26.722.605,46	21.794.955,00	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	26.722.605,46	21.794.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	26.722.605,46	21.794.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.394.483.409,12	12.866.115.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	12.814.608.014,12	12.291.810.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	6.768.192.500,00	6.558.772.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	6.046.415.514,12	5.733.038.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	33.350.800,00	32.710.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	33.350.800,00	32.710.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	546.524.595,00	541.593.951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	546.524.595,00	541.593.951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.915.266.251,00	1.782.148.537,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.915.266.251,00	1.782.148.537,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.724.500,00	16.480.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	157.567.182,00	132.123.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.104.987.230,00	1.055.046.100,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	626.419.539,00	571.110.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.567.800,00	7.387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	302.942.064,99	296.154.308,00	28.870.000,00	28.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	302.942.064,99	296.154.308,00	28.870.000,00	28.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	302.942.064,99	296.154.308,00	28.870.000,00	28.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	127.080.680,68	122.720.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	57.083.886,00	55.092.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	57.083.886,00	55.092.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	69.996.794,68	67.627.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	69.996.794,68	67.627.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	183.961.787,00	183.820.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	183.961.787,00	183.820.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.036.787,00	91.895.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.480.000,00	12.338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.556.787,00	79.556.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.925.000,00	91.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.925.000,00	91.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	340.968.091,00	325.548.144,00	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	323.289.591,00	308.548.144,00	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.489.400,00	825.510,00	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.489.400,00	825.510,00	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.800.191,00	296.722.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.969.160,00	20.246.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.831.031,00	276.475.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.678.500,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	17.678.500,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	17.678.500,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	277.966.003,00	262.572.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	263.406.003,00	248.072.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.406.003,00	248.072.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.178.000,00	31.114.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.228.003,00	216.958.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.560.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	14.560.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	14.560.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	715.032.898,00	707.765.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	510.202.876,00	502.971.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.947.480,00	7.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.947.480,00	7.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.255.396,00	495.339.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.063.936,00	47.147.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448.191.460,00	448.191.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	204.830.022,00	204.794.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	204.830.022,00	204.794.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	204.830.022,00	204.794.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	614.694.905,00	597.523.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	255.765.304,00	252.007.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.189.320,00	5.851.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.189.320,00	5.851.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.575.984,00	246.156.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.135.000,00	61.720.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.440.984,00	184.436.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	205.209.900,00	203.709.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	205.209.900,00	203.709.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	205.209.900,00	203.709.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	33.395.733,00	33.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	33.395.733,00	33.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	33.395.733,00	33.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	120.323.968,00	108.409.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	120.323.968,00	108.409.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	117.773.968,00	105.859.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006		UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai	725.570.197,00	676.832.274,00	2.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	626.681.797,00	595.660.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.280.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.280.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.634.097,00	588.255.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.000.000,00	323.394.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267.634.097,00	264.861.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.767.700,00	3.764.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.767.700,00	3.764.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	98.888.400,00	81.172.000,00	2.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	98.888.400,00	81.172.000,00	2.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	98.888.400,00	81.172.000,00	2.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007		UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)	502.057.678,98	490.804.518,00	29.749.500,00	27.148.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	502.057.678,98	490.804.518,00	29.749.500,00	27.148.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.229.780,98	121.476.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.229.780,98	121.476.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	29.749.500,00	27.148.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	29.749.500,00	27.148.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.178.048,00	297.924.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.393.016,00	57.029.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.785.032,00	240.894.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.649.850,00	71.402.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.649.850,00	71.402.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008		UPTD Balai Benih Ikan	1.451.447.959,00	1.440.475.939,80	117.120.700,00	115.976.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	637.162.807,00	632.915.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.371.557,00	615.713.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.320.000,00	175.446.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.051.557,00	440.267.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.791.250,00	17.201.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.791.250,00	17.201.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	814.285.152,00	807.560.359,80	117.120.700,00	115.976.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	814.285.152,00	807.560.359,80	117.120.700,00	115.976.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	814.285.152,00	807.560.359,80	117.120.700,00	115.976.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.439.744.552,00	12.952.160.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.265.002,00	123.643.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.816.872,00	112.430.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.448.130,00	11.212.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.058.176.404,00	10.722.773.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.547.538.404,00	10.235.310.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.638.000,00	479.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	7.637.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.036.981.737,00	947.570.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.667.700,00	215.418.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	349.344.332,00	316.345.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.969.705,00	415.807.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.121.409,00	967.762.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.440.000,00	22.521.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.681.409,00	932.241.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.200.000,00	190.410.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.400.000,00	50.074.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.780.000,00	121.776.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.020.000,00	18.560.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	220.725.000,00	220.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	220.725.000,00	220.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	220.725.000,00	220.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	7.758.633.839,00	5.647.330.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	7.758.633.839,00	5.647.330.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.791.599.129,00	926.608.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.967.034.710,00	4.720.722.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.307.813.811,00	1.253.032.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	1.307.813.811,00	1.253.032.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas	20.402.000,00	20.271.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0014	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	1.227.778.351,00	1.173.127.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	59.633.460,00	59.633.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	359.750.700,00	327.445.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	359.750.700,00	327.445.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	91.362.000,00	83.676.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	72.257.400,00	62.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	82.674.000,00	76.251.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	89.944.000,00	83.069.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.513.300,00	21.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15.905.011.140,98	11.555.381.891,50	20.719.546,00	20.718.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	14.639.198.713,00	10.498.684.884,50	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.307.920.169,00	3.913.806.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.705.218.980,00	3.702.717.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.705.218.980,00	3.702.717.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	194.530.150,00	194.153.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	194.530.150,00	194.153.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	408.171.039,00	16.935.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	408.171.039,00	16.935.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.944.843.173,00	4.352.443.152,50	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	7.944.843.173,00	4.352.443.152,50	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	61.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	394.693.825,00	394.693.824,50	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	7.488.837.348,00	3.957.749.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	119.177.144,00	49.589.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.919.200,00	4.919.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.01.0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	4.919.200,00	4.919.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	114.257.944,00	44.669.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	114.257.944,00	44.669.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001		UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)	966.117.628,98	914.016.376,00	3.894.546,00	3.893.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	956.117.628,98	905.511.376,00	3.894.546,00	3.893.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	956.117.628,98	905.511.376,00	3.894.546,00	3.893.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	100.762.000,00	89.506.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	855.355.628,98	816.005.040,00	3.894.546,00	3.893.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10.000.000,00	8.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	10.000.000,00	8.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10.000.000,00	8.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002		UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	299.694.799,00	142.680.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	299.694.799,00	142.680.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	299.694.799,00	142.680.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	299.694.799,00	142.680.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	2.592.141.510,00	2.259.437.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.409.501.550,00	1.279.501.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.105.746.200,00	986.876.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	142.702.200,00	127.977.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	131.740.400,00	117.729.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	10.961.800,00	10.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	838.258.300,00	738.659.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	118.000.000,00	88.093.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	640.610.300,00	572.915.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	79.648.000,00	77.650.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	58.000.000,00	54.965.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	58.000.000,00	54.965.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	66.785.700,00	65.274.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	66.785.700,00	65.274.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	303.755.350,00	292.625.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	303.755.350,00	292.625.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	303.755.350,00	292.625.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002		UPTD KPHP Unit I Karimun	162.557.297,00	131.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	162.557.297,00	131.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	6.249.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6.249.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	156.308.297,00	126.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	29.500.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	126.808.297,00	99.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003		UPTD KPHP Unit II Batam	199.213.785,00	198.261.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	199.213.785,00	198.261.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	24.152.785,00	24.051.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	24.152.785,00	24.051.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	175.061.000,00	174.209.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	29.500.000,00	29.281.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	145.561.000,00	144.928.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004		UPTD KPHP Unit III Lingga	166.409.999,00	162.477.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	166.409.999,00	162.477.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	7.663.597,00	7.637.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	7.663.597,00	7.637.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	158.746.402,00	154.840.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	29.500.000,00	29.187.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	129.246.402,00	125.652.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang	207.155.503,00	203.457.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	207.155.503,00	203.457.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	16.139.942,00	13.568.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	16.139.942,00	13.568.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	191.015.561,00	189.888.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	29.500.000,00	29.253.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	161.515.561,00	160.635.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006		UPTD KPHP Unit V Natuna	264.794.131,00	157.323.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	264.794.131,00	157.323.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	23.004.212,00	19.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	23.004.212,00	19.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	241.789.919,00	137.405.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	29.500.000,00	29.346.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	212.289.919,00	108.059.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas	182.509.245,00	127.220.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	182.509.245,00	127.220.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	34.604.864,00	31.050.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	34.604.864,00	31.050.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	147.904.381,00	96.170.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	29.500.000,00	17.465.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	118.404.381,00	78.704.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.213.031.936,00	19.019.092.983,44	25.793.588.482,00	18.498.221.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20.213.031.936,00	19.019.092.983,44	25.793.588.482,00	18.498.221.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.208.646.117,00	11.680.583.595,00	135.901.658,00	83.534.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.494.210,44	142.333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.751.380,44	61.360.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.780.030,00	31.538.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.962.800,00	49.434.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.766.016.221,92	10.341.064.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.324.028.859,76	9.922.255.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.369.920,00	355.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	63.617.442,16	63.165.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.016.000,00	3.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.016.000,00	3.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	371.646.932,64	339.324.658,00	135.901.658,00	83.534.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.538,00	0,00	135.901.658,00	83.534.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.707.800,00	9.525.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.344.795,00	31.401.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.975.000,00	48.893.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.938.799,64	249.504.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.888.648,00	641.625.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.004.100,00	31.028.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	617.884.548,00	610.596.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.584.104,00	212.739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.162.504,00	165.189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.340.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	97.995.300,00	96.282.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	29.594.000,00	28.917.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	29.594.000,00	28.917.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	68.401.300,00	67.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	42.880.000,00	41.843.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	25.521.300,00	25.521.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	620.047.000,00	606.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.16	Penetapan Harga Patokan Batuan	21.309.600,00	19.012.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.16.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	21.309.600,00	19.012.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	598.737.400,00	587.341.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.24.0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	538.343.800,00	533.894.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.03.1.24.0007	Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan	60.393.600,00	53.447.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	6.133.041.624,00	5.706.169.093,44	19.766.010.400,00	12.523.010.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	5.823.809.224,00	5.600.244.093,44	19.766.010.400,00	12.523.010.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	4.468.402.650,00	4.336.745.520,00	19.766.010.400,00	12.523.010.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	1.355.406.574,00	1.263.498.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	309.232.400,00	105.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	309.232.400,00	105.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.153.301.895,00	929.703.395,00	5.891.676.424,00	5.891.676.421,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	19.921.000,00	14.591.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	7.761.000,00	5.415.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	12.160.000,00	9.175.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	19.426.000,00	16.348.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	7.261.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	12.165.000,00	9.198.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	14.434.000,00	11.364.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	6.221.000,00	3.889.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	8.213.000,00	7.474.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.099.520.895,00	887.399.495,00	5.891.676.424,00	5.891.676.421,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	313.944.400,00	225.570.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	9.809.000,00	6.708.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	740.973.295,00	624.128.995,00	5.891.676.424,00	5.891.676.421,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	34.794.200,00	30.991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.082.666.421,00	19.270.128.037,00	1.213.170.950,00	1.132.375.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.082.666.421,00	19.270.128.037,00	1.213.170.950,00	1.132.375.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.853.624.036,00	15.242.754.974,00	295.381.000,00	289.835.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.255.428,00	134.025.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.552.950,00	58.142.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.093.011,00	10.832.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.609.467,00	65.050.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.593.572.875,00	12.301.731.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.141.306.875,00	11.860.089.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	452.266.000,00	441.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.497.996.558,00	1.235.572.139,00	295.381.000,00	289.835.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.500.000,00	169.500.000,00	99.510.400,00	93.964.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.212.600,00	112.837.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	208.300.000,00	203.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	806.553.072,00	743.800.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	195.870.600,00	195.870.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	198.430.886,00	5.487.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.437.194.175,00	1.406.674.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.910.000,00	196.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.240.284.175,00	1.209.764.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.605.000,00	164.751.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.695.000,00	151.986.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.910.000,00	12.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	895.148.980,00	852.569.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	895.148.980,00	852.569.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	895.148.980,00	852.569.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	804.399.976,00	735.357.764,00	70.797.400,00	70.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	804.399.976,00	735.357.764,00	70.797.400,00	70.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	247.331.339,00	244.322.000,00	6.341.400,00	6.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	557.068.637,00	491.035.764,00	64.456.000,00	64.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	48.984.746,00	47.549.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	48.984.746,00	47.549.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	26.270.485,00	26.108.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	22.714.261,00	21.440.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	539.455.192,00	491.061.690,00	846.992.550,00	772.054.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	527.894.164,00	479.624.890,00	846.992.550,00	772.054.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	527.894.164,00	479.624.890,00	846.992.550,00	772.054.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	11.561.028,00	11.436.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	11.561.028,00	11.436.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.941.053.491,00	1.900.835.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.941.053.491,00	1.900.835.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.941.053.491,00	1.900.835.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.364.554.793,00	7.100.815.667,00	146.544.400,00	138.670.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.364.554.793,00	7.100.815.667,00	146.544.400,00	138.670.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.138.118.463,00	6.877.628.721,00	146.544.400,00	138.670.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	7.138.118.463,00	6.877.628.721,00	146.544.400,00	138.670.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.200.000.000,00	1.172.862.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.000.000.000,00	888.305.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2.951.805.737,00	2.837.247.090,00	146.544.400,00	138.670.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.978.000.000,00	1.971.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	8.312.726,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	26.436.330,00	24.458.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	26.436.330,00	24.458.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	26.436.330,00	24.458.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	200.000.000,00	198.728.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	200.000.000,00	198.728.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	200.000.000,00	198.728.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	50.546.880,00	50.298.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.546.880,00	50.298.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	50.546.880,00	50.298.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.546.880,00	50.298.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	50.546.880,00	50.298.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	402.243.723.791,79	386.489.270.917,05	10.161.871.176,00	9.392.633.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	268.045.815.702,79	256.510.687.536,05	6.892.165.686,00	6.424.650.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001		Biro Hukum	1.814.497.209,00	1.704.091.319,00	92.771.300,00	62.472.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	502.668.576,00	473.829.181,00	92.771.300,00	62.472.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.500.314,00	41.046.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.500.314,00	41.046.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.171.954,00	143.969.743,00	92.771.300,00	62.472.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.600.000,00	31.050.000,00	92.771.300,00	62.472.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000,00	7.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.118.893,00	5.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.453.061,00	100.728.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.637.364,00	183.553.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.637.364,00	183.553.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.358.944,00	105.259.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.372.984,00	98.552.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.985.960,00	6.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.311.828.633,00	1.230.262.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	741.757.634,00	676.454.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	249.606.829,00	223.503.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	256.484.180,00	244.791.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	55.797.732,00	45.239.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	179.868.893,00	162.919.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	570.070.999,00	553.807.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	342.274.549,00	336.334.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	227.796.450,00	217.473.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.668.861.542,93	2.592.545.967,00	5.288.616,00	4.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.230.406.346,93	1.181.170.718,00	3.795.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.527.700,00	49.964.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.527.700,00	49.964.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.744.400,00	92.784.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.650.000,00	54.933.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.094.400,00	37.850.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.510.893,93	176.982.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.880.000,00	6.808.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.500.000,00	7.964.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000,00	2.519.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.210.893,93	157.769.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.660.553,00	434.462.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.300.000,00	1.544.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.160.553,00	393.717.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.505.000,00	205.410.068,00	3.795.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.300.000,00	166.603.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.205.000,00	36.046.140,00	3.795.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	225.457.800,00	221.566.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	225.457.800,00	221.566.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.438.455.196,00	1.411.375.249,00	1.493.616,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	354.394.000,00	351.237.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1.378.500,00	1.012.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	317.666.020,00	315.371.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	35.349.480,00	34.853.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	299.558.352,00	289.645.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	14.080.800,00	13.191.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	168.617.052,00	162.278.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	116.860.500,00	114.175.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	784.502.844,00	770.491.870,00	1.493.616,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	701.620.422,00	691.169.706,00	1.493.616,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	37.136.756,00	35.868.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	45.745.666,00	43.453.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003		Biro Organisasi	927.894.795,63	881.263.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	683.423.729,63	667.750.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.934.382,00	98.521.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.934.382,00	98.521.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.800.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.800.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.238.345,63	169.391.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.451.358,63	44.868.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.242.200,00	2.242.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.920.000,00	4.903.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.624.787,00	117.376.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.083.902,00	259.981.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.950.270,00	4.682.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.513.632,00	208.679.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.367.100,00	122.455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.486.100,00	114.931.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.881.000,00	7.524.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	244.471.066,00	213.513.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	72.838.062,00	64.057.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	18.260.352,00	15.510.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	17.322.677,00	16.670.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	37.255.033,00	31.875.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	171.633.004,00	149.456.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	54.424.314,00	40.882.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	23.324.068,00	23.102.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	20.395.130,00	17.506.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	38.913.351,00	35.044.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	34.576.141,00	32.919.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004		Biro Kesejahteraan Rakyat	76.056.131.911,58	72.028.923.425,00	61.658.724,00	60.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	963.785.204,00	786.116.784,00	34.410.000,00	34.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.036.100,00	39.026.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.425.500,00	18.394.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	26.038.600,00	3.666.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.572.000,00	16.964.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.500.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	427.978.751,00	331.780.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.471.751,00	44.092.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.507.000,00	287.687.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	34.410.000,00	34.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	34.410.000,00	34.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.258.441,00	235.523.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.740.000,00	96.745.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.518.441,00	138.777.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.011.912,00	177.507.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.011.912,00	177.507.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	75.092.346.707,58	71.242.806.641,00	27.248.724,00	25.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	66.228.740.452,58	62.758.533.619,00	27.248.724,00	25.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	48.919.311.492,00	46.260.004.267,00	27.248.724,00	25.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	17.309.428.960,58	16.498.529.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	8.758.500.655,00	8.405.375.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	8.690.413.855,00	8.358.805.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	30.567.600,00	20.490.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	37.519.200,00	26.078.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	105.105.600,00	78.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	40.797.200,00	33.828.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	32.271.200,00	23.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	32.037.200,00	21.504.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005		Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.691.569.257,25	1.574.583.448,00	4.450.500,00	4.384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.196.986.212,25	1.102.526.801,00	4.450.500,00	4.384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.930.833,00	123.112.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	99.621.833,00	91.644.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.309.000,00	31.468.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.740.109,00	217.390.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.703.609,00	65.689.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.847.500,00	16.600.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.189.000,00	135.100.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.903.158,00	419.662.998,00	4.450.500,00	4.384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.557.548,00	5.517.408,00	4.450.500,00	4.384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.706.200,00	96.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.639.410,00	317.509.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.557.500,00	124.133.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.337.500,00	112.682.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.220.000,00	11.451.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	276.854.612,25	218.227.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	276.854.612,25	218.227.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	351.320.920,00	337.295.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	98.168.837,00	94.077.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	44.608.657,00	42.535.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	53.560.180,00	51.541.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	44.514.417,00	43.947.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	44.514.417,00	43.947.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	208.637.666,00	199.270.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	41.820.117,00	40.150.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	67.119.928,00	65.997.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	81.309.687,00	78.406.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	18.387.934,00	14.715.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	143.262.125,00	134.761.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	110.920.207,00	106.031.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	76.346.749,00	72.500.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	34.573.458,00	33.530.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	32.341.918,00	28.730.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	32.341.918,00	28.730.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006		Biro Umum	177.436.020.478,00	170.414.252.621,05	6.677.855.800,00	6.250.926.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	177.436.020.478,00	170.414.252.621,05	6.677.855.800,00	6.250.926.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.396.005,00	116.421.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	119.396.005,00	116.421.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.131.664.384,95	84.985.620.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84.879.138.084,95	82.193.330.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.108.299.300,00	2.649.206.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.594.000,00	63.572.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	79.633.000,00	79.511.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	653.226.230,80	644.627.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	514.881.730,80	506.676.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	138.344.500,00	137.951.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	253.498.030,00	251.826.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	253.498.030,00	251.826.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.124.799.282,03	16.960.675.236,00	817.535.800,00	499.653.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.240.152.235,00	1.217.190.484,00	629.405.800,00	476.754.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.188.200,00	50.603.770,00	188.130.000,00	22.899.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.891.542.745,00	9.858.429.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	314.321.505,00	299.773.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	53.565.315,00	51.606.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.635.953.031,03	4.554.708.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	826.702.901,00	817.532.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	111.373.350,00	110.830.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.686.126.924,00	17.475.888.907,00	5.840.539.800,00	5.732.272.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.567.932.404,00	17.362.145.253,00	5.025.170.000,00	4.919.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	118.194.520,00	113.743.654,00	815.369.800,00	812.602.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.363.784.091,91	29.637.141.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	169.011.435,00	164.692.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.122.266.020,00	6.466.890.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.882.781.337,30	6.829.210.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.189.725.299,61	16.176.348.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.578.559.251,82	9.611.465.061,05	19.780.200,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	598.061.004,00	593.496.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.203.315.111,00	4.101.038.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.165.328.827,00	1.100.893.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	772.049.030,00	765.777.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.839.805.279,82	3.050.259.154,05	19.780.200,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.691.326.335,00	4.204.146.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.636.639.187,00	1.186.363.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350.869.000,00	347.236.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33.089.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.670.728.356,00	2.670.546.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6.317.243.702,00	6.128.801.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.576.628.313,00	2.515.912.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.526.746.144,00	2.485.616.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.213.869.245,00	1.127.272.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	516.396.240,49	397.638.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	516.396.240,49	397.638.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007		Biro Administrasi Pimpinan	6.078.118.124,40	5.979.611.120,00	20.443.000,00	20.442.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.078.118.124,40	5.979.611.120,00	20.443.000,00	20.442.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.419.650,00	74.290.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.419.650,00	74.290.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.272.800,00	55.820.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.272.800,00	55.820.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.148.290,40	386.121.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.302.900,00	16.302.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.608.000,00	9.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.237.390,40	360.210.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	8.398.000,00	8.397.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	8.398.000,00	8.397.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.886.430.218,00	1.839.348.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.173.558,00	122.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.600.000,00	171.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.591.656.660,00	1.545.574.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.408.000,00	193.200.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.238.000,00	151.032.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.170.000,00	42.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.138.699.107,00	1.117.278.045,00	12.045.000,00	12.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	51.688.300,00	51.688.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	534.916.344,00	513.685.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	552.094.463,00	551.904.730,00	12.045.000,00	12.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	2.335.740.059,00	2.313.552.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.376.008.161,82	1.355.772.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	586.156.100,00	584.809.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	373.575.797,18	372.970.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008		Biro Pengadaan Barang/Jasa	1.372.722.384,00	1.335.416.266,00	29.697.746,00	21.983.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.218.865.252,00	1.181.760.266,00	29.697.746,00	21.983.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215.772.410,00	204.482.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	215.772.410,00	204.482.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.964.520,00	345.116.894,00	29.697.746,00	21.983.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.072.600,00	5.024.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	29.697.746,00	21.983.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.171.600,00	120.973.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.004.400,00	11.328.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.520.000,00	11.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.950.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.245.920,00	195.460.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.549.560,00	438.518.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.666.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.592.000,00	6.959.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.291.560,00	344.899.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.578.762,00	193.642.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.638.762,00	184.151.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.940.000,00	9.490.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	153.857.132,00	153.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	19.891.800,00	19.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	10.570.900,00	10.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	9.320.900,00	9.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	133.965.332,00	133.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	3.620.900,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	130.344.432,00	130.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	134.197.908.089,00	129.978.583.381,00	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000		Sekretariat DPRD	134.197.908.089,00	129.978.583.381,00	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	78.895.989.878,82	75.625.690.315,00	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	583.138.236,81	459.551.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.442.058,81	162.799.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	97.528.404,00	96.928.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	92.742.834,00	91.865.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	19.609.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.424.940,00	88.348.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.007.165.827,49	19.226.116.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.989.788.649,49	18.337.953.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	804.936.000,00	701.919.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.016.178,00	64.082.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	93.519.900,00	81.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.905.100,00	40.976.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.949.300,00	85.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34.949.300,00	31.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.878.190.741,89	16.727.382.927,00	667.600.000,00	667.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272.750.000,00	271.397.670,00	349.600.000,00	349.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.448.168.578,89	11.366.853.139,00	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.996.520.063,00	4.962.355.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.752.100,00	126.776.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.794.510,00	63.531.675,00	2.602.105.490,00	2.300.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.543.710,00	3.321.675,00	2.302.106.290,00	2.300.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.250.800,00	60.210.000,00	299.999.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.158.305.605,00	3.864.866.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.024.333.165,00	1.747.095.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.133.972.440,00	2.117.770.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.555.566.504,00	5.634.403.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.023.064.460,00	3.016.536.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.445.000,00	247.270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	292.280.000,00	283.026.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	437.440.000,00	91.193.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.226.888,00	167.226.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.386.110.156,00	1.829.149.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	30.419.238.361,63	29.444.319.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	29.998.611.361,63	29.383.911.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	420.627.000,00	60.408.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	141.640.792,00	120.087.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	141.640.792,00	120.087.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	55.301.918.210,18	54.352.893.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	610.000.000,00	521.800.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	120.000.000,00	114.057.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	330.000.000,00	322.764.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	80.000.000,00	46.127.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	80.000.000,00	38.851.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	347.937.000,00	341.643.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	347.937.000,00	341.643.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.950.866.768,00	5.732.686.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.007.560.000,00	798.848.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.119.000.000,00	2.118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	506.695.000,00	505.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.118.903.624,00	1.117.611.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.198.708.144,00	1.192.531.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	24.625.230.072,00	24.340.653.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	24.625.230.072,00	24.340.653.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	23.767.884.370,18	23.416.109.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20.545.756.330,18	20.296.172.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	100.000.000,00	44.302.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	254.562.540,00	217.454.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.867.565.500,00	2.858.179.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	245.167.264.186,04	234.196.376.711,70	5.331.957.503,40	4.558.849.476,00	2.281.396.903,60	0,00	716.816.050.533,00	704.188.430.644,00
5.01			PERENCANAAN	27.645.500.534,93	27.366.771.487,00	64.105.000,00	63.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	27.645.500.534,93	27.366.771.487,00	64.105.000,00	63.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.525.722.003,93	24.314.449.522,00	64.105.000,00	63.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.751.300,00	153.689.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154.751.300,00	153.689.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.572.701.259,00	21.409.292.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.019.501.259,00	20.866.488.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	553.200.000,00	542.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.100.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.100.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	812.598.922,00	794.497.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.278.711,00	10.036.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.499.596,00	15.162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.171.273,00	122.435.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	124.197.502,00	123.952.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.950.000,00	39.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.237.840,00	50.746.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434.264.000,00	432.183.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	477.771,83	0,00	64.105.000,00	63.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	477.771,83	0,00	64.105.000,00	63.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.337.515.029,10	1.320.479.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	64.980.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.000.000,00	189.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.061.515.029,10	1.053.698.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.577.722,00	609.890.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.757.900,00	94.444.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.975.822,00	317.615.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.550.000,00	31.984.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.294.000,00	165.846.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.176.054.010,00	2.133.795.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.772.456.950,00	1.735.405.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	114.172.500,00	112.650.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	54.793.900,00	53.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	123.712.900,00	122.202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	327.946.000,00	318.802.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.151.831.650,00	1.128.191.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	12.500.000,00	12.176.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12.500.000,00	12.176.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	391.097.060,00	386.213.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	226.767.460,00	223.217.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	164.329.600,00	162.996.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	943.724.521,00	918.526.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	359.596.731,00	339.555.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.727.400,00	56.607.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.279.400,00	14.018.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	286.589.931,00	268.929.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	302.781.190,00	300.957.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	208.564.030,00	208.370.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	55.937.100,00	55.314.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	38.280.060,00	37.272.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	281.346.600,00	278.013.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.733.200,00	79.666.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	41.298.600,00	40.593.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51.837.500,00	51.116.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	107.477.300,00	106.637.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	162.526.117.055,94	154.800.898.473,70	3.255.706.717,50	2.521.151.689,00	2.281.396.903,60	0,00	716.816.050.533,00	704.188.430.644,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	52.231.664.290,94	47.971.647.101,00	1.123.720.456,50	1.087.475.570,00	2.281.396.903,60	0,00	716.816.050.533,00	704.188.430.644,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.711.770.295,94	38.657.175.911,00	1.123.720.456,50	1.087.475.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	480.844.850,00	458.841.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	278.489.459,00	269.677.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	79.454.634,00	72.417.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.972.064,00	67.095.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.928.693,00	49.651.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.777.531.585,94	33.356.856.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.890.857.472,94	23.819.298.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.821.871.500,00	9.481.671.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.946.814,00	11.714.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	52.855.799,00	44.171.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	816.899.810,00	639.468.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	711.327.810,00	580.144.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.572.000,00	59.323.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.060.126.242,00	1.787.864.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.155.155,00	23.115.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.925.134,00	40.482.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.900.472,00	121.153.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	176.448.800,00	170.519.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	92.750.285,00	91.939.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.880.000,00	42.455.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.195.401.260,00	962.290.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	350.665.136,00	335.907.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.777.464,00	65.287.748,00	1.074.427.299,00	1.038.416.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.087.072,00	1.642.500,00	97.347.000,00	94.949.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.550.760,00	17.050.490,00	887.080.299,00	854.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	32.513.722,00	29.756.958,00	90.000.000,00	88.855.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.625.910,00	16.837.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.586.394.138,00	1.526.350.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.787.615,00	191.020.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.465.145,00	158.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.228.141.378,00	1.177.158.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	913.196.206,00	822.507.976,00	49.293.157,50	49.058.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.403.378,00	61.666.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	608.520.145,00	560.654.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.477.833,00	69.574.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.794.850,00	130.612.189,00	49.293.157,50	49.058.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.752.592.855,00	6.893.970.073,00	0,00	0,00	2.281.396.903,60	0,00	716.816.050.533,00	704.188.430.644,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.516.931.409,00	2.319.604.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	171.599.800,00	167.755.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	116.163.873,00	106.522.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	77.505.926,00	73.225.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	81.501.898,00	70.269.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	302.529.028,00	293.411.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	276.811.549,00	272.002.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	285.523.424,00	252.970.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	227.450.670,00	222.216.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	708.966.256,00	616.113.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	97.323.357,00	86.888.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	171.555.628,00	158.228.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.198.649.525,00	1.122.966.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	171.298.056,00	163.111.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	183.597.810,00	175.401.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	91.885.735,00	84.151.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	165.856.400,00	153.086.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	263.638.374,00	247.522.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	156.630.980,00	146.227.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	165.742.170,00	153.465.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.383.446.889,00	1.234.062.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	520.372.516,00	487.145.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	114.663.472,00	87.259.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	215.597.628,00	181.023.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	113.382.779,00	107.536.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	72.111.287,00	65.357.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	82.389.729,00	66.802.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	264.929.478,00	238.936.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.700.030.691,00	1.408.324.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	176.944.245,00	136.959.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	159.045.378,00	125.598.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	475.365.910,00	432.797.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	306.581.982,00	263.020.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	54.215.095,00	51.497.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	165.569.673,00	116.897.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	162.836.854,00	145.688.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	199.471.554,00	135.864.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	205.333.853,00	196.743.776,00	0,00	0,00	2.281.396.903,60	0,00	716.816.050.533,00	704.188.430.644,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	205.333.853,00	196.743.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.396.903,60	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	748.200.488,00	612.268.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	332.051.925,00	307.564.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	416.148.563,00	304.704.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.767.301.140,00	2.420.501.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.767.301.140,00	2.420.501.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	497.754.565,00	496.138.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	90.069.184,00	59.905.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	36.298.458,00	27.860.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	194.994.301,00	190.864.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	241.614.344,00	207.083.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	847.061.476,00	725.800.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	351.649.803,00	344.621.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	271.085.336,00	187.653.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	77.419.299,00	49.292.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	159.354.374,00	131.281.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001		UPT Dana Bergulir	284.010.713,00	258.747.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	107.338.931,00	93.768.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.338.931,00	93.768.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.338.931,00	93.768.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	176.671.782,00	164.979.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	14.374.798,00	14.085.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	14.374.798,00	14.085.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	162.296.984,00	150.893.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.02.02.1.05.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	162.296.984,00	150.893.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002		UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	1.308.859.740,00	1.270.911.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.308.859.740,00	1.270.911.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.108.569,00	314.900.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.997.002,00	36.556.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.300.585,00	112.076.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.463.062,00	31.578.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.055.000,00	18.657.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.292.920,00	116.031.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.764.302,00	657.554.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	397.953.128,00	378.907.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	281.811.174,00	278.647.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.986.869,00	298.455.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.245.000,00	41.970.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.506.869,00	176.349.827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.235.000,00	80.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		Badan Pendapatan Daerah	98.405.658.444,94	95.895.839.981,00	1.786.677.816,00	1.198.440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	93.349.228.990,88	91.467.361.008,00	1.095.422.096,00	772.420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.861.530,93	222.752.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.867.266,50	150.462.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.171.500,00	5.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.822.764,43	67.071.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.824.374.617,51	74.028.460.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.211.805.017,51	72.496.406.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.601.088.000,00	1.522.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.481.600,00	9.638.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	94.100.565,49	87.727.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	94.100.565,49	87.727.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	326.821.982,88	237.503.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	123.924.582,88	104.094.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	113.032.600,00	88.567.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	53.157.400,00	15.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36.707.400,00	29.659.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.500.000,00	92.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.500.000,00	92.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.121.661.053,46	5.698.197.296,00	884.621.096,00	670.510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00	72.186.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	471.386.200,00	260.047.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	413.234.896,00	410.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	602.419.400,00	561.090.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.228.712.300,00	4.051.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	49.980.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	89.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	938.583.088,54	759.783.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	121.966.264,92	116.300.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.127.089.050,00	2.079.558.916,00	210.801.000,00	101.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	254.059.000,00	254.059.000,00	210.801.000,00	101.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.873.030.050,00	1.825.499.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.057.838.089,91	4.000.761.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.290.000,00	17.279.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.770.733.478,00	1.722.571.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.000.000,00	209.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.057.814.611,91	2.051.810.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.458.982.100,70	5.019.689.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	943.575.016,00	794.536.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.698.668,00	236.394.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.252.708.416,70	3.988.758.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	376.904.800,00	331.610.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	164.903.000,00	155.782.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	164.903.000,00	155.782.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	151.798.400,00	135.841.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	151.798.400,00	135.841.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	60.203.400,00	39.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	60.203.400,00	39.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.679.524.654,06	4.096.868.242,00	691.255.720,00	426.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.679.524.654,06	4.096.868.242,00	691.255.720,00	426.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	258.462.894,00	224.899.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	244.767.000,00	215.708.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.725.768.600,00	1.529.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	217.117.633,89	196.102.730,00	691.255.720,00	426.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.469.527.413,54	1.234.722.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	12.600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	95.803.400,00	90.977.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40.893.000,00	33.029.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	284.998.870,54	273.086.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	116.642.032,15	110.518.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	67.550.309,94	53.613.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	94.704.700,00	89.527.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50.688.800,00	44.903.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001		UPT PPD Batam Centre	3.006.894.043,27	2.753.205.915,75	226.016.700,00	134.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.907.281.669,48	1.833.278.154,75	226.016.700,00	134.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.381.304,48	707.726.270,00	226.016.700,00	134.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.531.400,00	10.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.120.600,00	3.120.000,00	191.816.700,00	99.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	243.040.800,00	203.485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	405.608.783,00	389.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.079.721,48	101.158.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.426.400,00	192.320.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.661.400,00	3.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.765.000,00	126.667.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938.473.965,00	933.231.592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	878.423.965,00	873.266.592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.050.000,00	59.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.099.612.373,79	919.927.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.099.612.373,79	919.927.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	185.880.000,00	185.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	25.563.500,00	25.507.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	450.293.564,72	379.715.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	437.875.309,07	328.825.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002		UPT PPD Tanjungpinang	1.913.328.616,17	1.760.338.039,00	38.262.116,00	33.737.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.066.891.195,19	951.081.993,00	38.262.116,00	33.737.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.762.440,00	24.681.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.762.440,00	24.681.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.574.319,00	324.510.445,00	38.262.116,00	33.737.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.038.470,00	14.439.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	38.262.116,00	33.737.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.009.711,00	107.851.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.363.798,00	49.277.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.990.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.831.500,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.340.840,00	144.962.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.596.746,00	247.735.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.892.400,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.199.346,00	244.205.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.957.690,19	354.154.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.030.500,00	199.155.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.540.000,00	56.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.387.190,19	98.488.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	846.437.420,98	809.256.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	846.437.420,98	809.256.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	210.657.734,99	198.562.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	38.671.000,00	36.093.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	504.370.926,92	484.704.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	92.737.759,07	89.894.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003		UPT PPD Bintan	1.062.746.989,23	990.790.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	741.162.834,57	709.007.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.550.000,00	50.582.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53.550.000,00	50.582.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.129.492,35	184.872.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.256.500,00	7.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.081.600,00	69.734.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.115.800,00	48.882.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.675.592,35	59.151.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.726.144,00	121.686.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.226.144,00	112.186.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.757.198,22	351.865.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.117.000,00	211.125.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.050.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.590.198,22	110.990.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	321.584.154,66	281.782.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	321.584.154,66	281.782.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	110.178.169,77	103.135.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	18.996.000,00	18.340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	47.897.984,89	47.122.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	144.512.000,00	113.184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004		UPT PPD Karimun	969.720.514,25	821.272.377,00	28.117.729,00	23.818.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	652.467.775,95	521.691.503,00	28.117.729,00	23.818.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.998.506,03	190.538.733,00	26.677.729,00	22.708.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.116.748,00	3.014.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	25.593.229,00	21.629.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.573.880,00	30.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.190.000,00	17.038.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	1.084.500,00	1.078.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.517.878,03	136.609.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.689.900,00	193.507.787,00	1.440.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.236.100,00	5.192.980,00	1.440.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.453.800,00	188.314.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.779.369,92	137.644.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.165.000,00	57.151.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.600.500,00	21.283.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.013.869,92	59.209.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	317.252.738,30	299.580.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	317.252.738,30	299.580.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	105.503.151,60	97.129.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3.750.000,00	3.661.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	141.609.386,70	136.189.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	66.390.200,00	62.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005		UPT PPD Lingga	511.736.913,83	487.586.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	256.786.361,00	241.663.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.316.271,00	96.841.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.014.025,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.998.630,00	23.497.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.127.616,00	6.713.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.980.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.196.000,00	63.780.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.072.000,00	59.651.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.480.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.592.000,00	57.251.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.398.090,00	85.169.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.200.000,00	47.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.344.170,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.853.920,00	31.853.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	254.950.552,83	245.922.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	254.950.552,83	245.922.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	49.086.573,27	45.173.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	58.087.426,70	57.535.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	73.222.552,86	70.107.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	74.554.000,00	73.105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006		UPT PPD Natuna	633.537.771,03	495.808.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	462.097.866,06	340.361.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.557.658,25	189.718.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.120.900,00	34.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.723.000,00	18.673.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.713.758,25	136.302.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.173.600,00	59.617.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.673.600,00	55.617.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.366.607,81	91.024.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.410.000,00	53.168.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.856.607,81	31.855.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	171.439.904,97	155.446.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	171.439.904,97	155.446.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	96.639.904,97	86.586.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	49.000.000,00	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007		UPT PPD Anambas	415.953.985,15	398.295.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	203.632.047,00	191.806.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.981.347,00	119.487.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.635.587,00	39.555.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.190.760,00	21.690.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.155.000,00	58.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.610.700,00	58.392.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.460.700,00	56.242.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.040.000,00	13.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.710.000,00	10.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	212.321.938,15	206.489.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	212.321.938,15	206.489.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	134.408.477,44	131.532.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	77.913.460,71	74.957.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008		UPT PPD Batu Aji	870.848.319,09	827.211.659,00	26.057.200,00	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	617.017.684,71	581.928.030,00	26.057.200,00	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.429.875,98	274.872.930,00	26.057.200,00	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.781.400,00	7.191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.760.500,00	1.715.000,00	26.057.200,00	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.207.200,00	183.066.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.063.600,00	60.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.617.175,98	22.550.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.139.680,00	159.164.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.081.200,00	2.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.058.480,00	109.120.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.448.128,73	147.890.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.800.000,00	59.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.460.000,00	11.833.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.188.128,73	76.337.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	253.830.634,38	245.283.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	253.830.634,38	245.283.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	111.875.754,48	106.177.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	141.954.879,90	139.106.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009		UPT PPD Kijang	528.325.461,29	499.118.270,00	26.854.700,00	20.479.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	373.548.733,65	352.321.738,00	26.854.700,00	20.479.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.491.400,00	118.630.830,00	26.854.700,00	20.479.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.266.000,00	1.238.760,00	3.570.800,00	2.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	23.283.900,00	17.926.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.177.200,00	46.310.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.438.200,00	53.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.184.400,00	3.642.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.445.600,00	2.232.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.980.000,00	11.697.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.797.000,00	98.878.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.480.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.215.000,00	85.166.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.102.000,00	11.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.260.333,65	134.812.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.260.000,00	95.918.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.880.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.120.333,65	32.119.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	154.776.727,64	146.796.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	154.776.727,64	146.796.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	40.804.625,00	36.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.778.000,00	2.749.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	46.180.302,64	43.366.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	65.013.800,00	64.662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010		UPT PPD Tanjung Batu	382.831.253,75	370.126.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	276.750.079,13	266.123.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.870.150,00	100.786.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.565.000,00	4.468.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.984.500,00	23.041.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.728.650,00	36.483.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.592.000,00	36.791.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.368.900,00	49.957.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.368.900,00	46.957.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.511.029,13	115.380.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.060.000,00	44.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.720.000,00	8.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.731.029,13	62.705.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	106.081.174,62	104.002.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	106.081.174,62	104.002.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	16.311.000,00	16.189.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	89.770.174,62	87.813.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	19.446.905.592,00	18.972.664.141,00	347.057.591,00	344.076.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000		Badan Kepegawaian dan KORPRI	19.446.905.592,00	18.972.664.141,00	347.057.591,00	344.076.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.052.231.743,00	17.807.830.165,00	37.962.591,00	35.496.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.824.466,00	129.406.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.555.214,00	76.497.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.269.252,00	52.908.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.900.242.863,00	16.686.609.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.476.042.863,00	16.272.866.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	424.200.000,00	413.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.988.000,00	61.249.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61.988.000,00	61.249.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.907.646,00	288.712.687,00	37.962.591,00	35.496.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.694.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.559.478,00	13.199.999,00	37.962.591,00	35.496.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.748.800,00	7.458.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	43.484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.015.600,00	8.627.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	34.892.900,00	34.238.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.365.000,00	15.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.325.868,00	156.833.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.597.768,00	525.044.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.565.000,00	22.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.000.000,00	87.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415.032.768,00	411.908.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.671.000,00	116.807.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.000.000,00	103.491.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.671.000,00	13.315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.394.673.849,00	1.164.833.976,00	309.095.000,00	308.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	276.448.507,00	262.610.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	188.092.588,00	182.990.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	7.061.819,00	6.838.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	54.847.100,00	47.989.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	26.447.000,00	24.791.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	642.825.472,00	458.850.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	108.546.310,00	97.130.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	19.432.000,00	18.394.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	514.847.162,00	343.325.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	387.899.870,00	364.944.622,00	309.095.000,00	308.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	76.500.000,00	71.029.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	183.498.510,00	167.486.838,00	309.095.000,00	308.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	87.181.360,00	86.750.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	40.720.000,00	39.677.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	87.500.000,00	78.428.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	25.820.000,00	23.929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	17.468.340,00	15.101.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	39.774.890,00	36.100.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4.436.770,00	3.297.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	15.336.938.964,10	14.196.835.871,00	1.161.996.794,90	1.128.377.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.336.938.964,10	14.196.835.871,00	1.161.996.794,90	1.128.377.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.354.670.363,10	12.877.954.474,00	1.161.996.794,90	1.128.377.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	435.876.674,10	401.191.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	308.876.702,10	279.908.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.448.884,00	55.597.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.551.088,00	65.684.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.131.108.008,00	9.936.721.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.883.650.008,00	9.692.655.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	247.458.000,00	244.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	475.205.000,00	450.834.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	98.475.000,00	95.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	376.730.000,00	355.359.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	564.245.450,00	485.993.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.736.590,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.382.000,00	5.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	145.731.344,00	108.688.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.727.536,00	96.140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.391.400,00	4.299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.276.580,00	267.117.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.161.996.794,90	1.128.377.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	881.087.526,00	852.546.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	280.909.268,90	275.831.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	978.674.526,00	868.066.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.044.000,00	31.907.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	330.480.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.150.526,00	530.158.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769.560.705,00	735.145.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.248.560,00	164.282.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.488.100,00	20.956.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.824.045,00	549.906.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.982.268.601,00	1.318.881.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.209.069.827,00	631.155.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	815.598.386,00	631.155.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	393.471.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	773.198.774,00	687.725.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	186.267.641,00	153.203.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	559.931.133,00	507.521.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	140.053.042,07	129.083.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	140.053.042,07	129.083.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	140.053.042,07	129.083.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	79.187.682,07	76.407.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	32.515.230,00	31.433.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	46.672.452,07	44.974.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	27.195.730,00	20.264.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	27.195.730,00	20.264.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	33.669.630,00	32.410.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	33.669.630,00	32.410.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06			PENGELOLAAN PERBATASAN	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.506.598.126,00	5.949.291.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.050.823,00	143.350.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.977.355,00	94.837.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.073.468,00	48.512.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.859.119.021,00	5.319.905.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.651.131.020,94	5.139.971.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	207.988.000,06	179.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.508.142,00	194.018.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.788.309,00	13.233.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.190.781,00	25.793.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.014.052,00	10.244.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.515.000,00	8.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	119.992.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.221.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.221.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.669.935,00	223.987.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.182.404,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.487.531,00	180.487.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.028.654,00	68.028.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.148.654,00	66.794.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.880.000,00	1.234.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	206.359.798,00	180.477.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	50.346.056,00	41.110.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	24.623.208,00	23.264.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	25.722.848,00	17.846.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	88.686.559,00	79.913.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	20.498.752,00	19.477.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	21.098.257,00	20.496.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	23.285.370,00	20.222.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	23.804.180,00	19.716.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	67.327.183,00	59.453.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	17.233.465,00	16.299.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	16.896.569,00	12.573.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.197.149,00	30.580.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	13.358.791.073,00	12.600.354.354,00	503.091.400,00	501.417.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		Badan Penghubung Daerah	13.358.791.073,00	12.600.354.354,00	503.091.400,00	501.417.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.020.200.264,00	9.528.605.840,00	503.091.400,00	501.417.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.645.105,00	209.024.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.881.925,00	75.705.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	89.938.130,00	83.151.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.776.960,00	23.572.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.048.090,00	26.595.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.493.191.482,00	4.377.644.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.242.117.162,00	4.136.024.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	208.868.000,00	200.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.206.320,00	41.422.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.442.381,00	13.643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.962.381,00	12.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.480.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.332.717,35	366.033.708,00	45.391.400,00	44.417.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	27.101.400,00	26.144.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.326.600,00	13.325.000,00	18.290.000,00	18.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.744.500,00	54.744.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.589.000,00	45.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.672.617,35	252.379.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	392.900,65	0,00	457.700.000,00	457.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	392.900,65	0,00	457.700.000,00	457.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.681.886.673,00	2.588.544.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	754.324.664,00	689.910.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	129.941.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.777.562.009,00	1.768.692.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.186.309.005,00	1.973.715.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.573.935.649,00	1.491.128.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	315.749.900,00	219.938.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	296.623.456,00	262.647.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.338.590.809,00	3.071.748.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.338.590.809,00	3.071.748.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	2.075.373.812,00	1.872.038.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	315.682.000,00	313.851.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	289.464.598,00	270.770.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	658.070.399,00	615.087.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	50.281.677.187,00	48.987.589.640,00	924.765.900,00	830.963.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	50.281.677.187,00	48.987.589.640,00	924.765.900,00	830.963.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		Inspektorat	50.281.677.187,00	48.987.589.640,00	924.765.900,00	830.963.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.562.585.109,00	40.446.007.600,00	924.765.900,00	830.963.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	341.457.700,00	337.722.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	309.745.000,00	307.347.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.712.700,00	30.375.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.806.226.673,00	32.056.883.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.154.062.673,00	31.443.209.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	529.686.000,00	492.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	122.478.000,00	121.114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90.680.100,00	88.290.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	53.102.200,00	51.507.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.577.900,00	36.783.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.482.802.790,00	2.441.859.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	193.400.500,00	189.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	125.785.300,00	116.177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.072.246.190,00	2.062.423.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	91.370.800,00	73.801.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.629.923.725,00	3.366.887.335,00	822.990.500,00	731.400.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.977.000,00	99.669.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	802.086.600,00	710.650.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	46.963.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	638.279.300,00	631.648.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	360.362.625,00	354.497.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.975.800,00	26.497.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.359.437.000,00	2.160.323.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.134.100,00	17.486.680,00	20.903.900,00	20.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.757.900,00	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000,00	0,00	101.775.400,00	99.562.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	101.775.400,00	99.562.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.781.981,00	826.747.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	8.347.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.022.000,00	73.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	753.759.981,00	745.325.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.335.612.140,00	1.327.615.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.175.000,00	274.334.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	519.890.000,00	514.343.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.040.000,00	96.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	442.507.140,00	441.963.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.001.100.780,00	5.875.047.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.727.361.680,00	4.641.262.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	859.689.000,00	791.951.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.475.689.000,00	1.474.324.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	14.547.580,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	145.694.000,00	145.349.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	603.121.600,00	603.109.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	1.087.300.000,00	1.084.827.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	541.320.500,00	534.499.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.273.739.100,00	1.233.785.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	152.379.900,00	118.406.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.121.359.200,00	1.115.379.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.717.991.298,00	2.666.534.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	648.001.362,00	645.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	332.178.000,00	331.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	315.823.362,00	313.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	2.069.989.936,00	2.021.094.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	802.436.880,00	801.906.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	130.794.100,00	124.023.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	785.910.856,00	750.731.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	350.848.100,00	344.433.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	43.450.243.743,00	40.295.688.337,00	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	43.450.243.743,00	40.295.688.337,00	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.450.243.743,00	40.295.688.337,00	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.026.528.732,00	18.282.406.570,00	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	335.631.221,80	329.850.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	268.525.509,82	264.545.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.105.711,98	65.305.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.994.932.376,20	8.690.420.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.426.861.288,20	8.174.112.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	543.902.000,00	493.948.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.169.088,00	22.360.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.611.500,00	161.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	123.224.000,00	123.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.387.500,00	38.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.523.099.569,00	1.436.575.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.217.452,00	63.629.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.247.800,00	85.550.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	170.355.000,00	144.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.062.134.621,00	1.006.134.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.610.427,00	21.430.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	116.534.269,00	114.844.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.534.942.664,00	5.558.340.474,00	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.534.942.664,00	5.558.340.474,00	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.149.120.006,00	1.796.399.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.460.956.502,00	1.108.532.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.002.000,00	94.771.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.161.504,00	593.095.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.191.395,00	309.221.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.903.395,00	289.482.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.288.000,00	19.738.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.959.964.051,00	1.850.151.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.959.964.051,00	1.850.151.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	46.828.310,00	9.195.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	281.575.392,00	267.548.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.609.662,00	42.042.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	169.836.439,00	154.090.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	1.411.114.248,00	1.377.274.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.273.723.200,00	5.270.644.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.273.723.200,00	5.270.644.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	56.061.200,00	54.048.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.171.643.200,00	5.170.723.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	46.018.800,00	45.872.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.079.165.000,00	1.825.239.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.079.165.000,00	1.825.239.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	177.500.000,00	158.332.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.855.015.000,00	1.620.932.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	46.650.000,00	45.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.120.329.600,00	1.112.879.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.120.329.600,00	1.112.879.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	73.290.500,00	66.711.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	47.039.100,00	46.167.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	11.990.533.160,00	11.954.366.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	11.990.533.160,00	11.954.366.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	147.934.500,00	137.988.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4.524.922.180,00	4.510.842.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	54.781.900,00	54.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	7.262.894.580,00	7.251.172.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	**2.944.090.151.988,51**	**2.779.255.950.571,38**	**269.313.511.475,33**	**232.159.877.710,16**	**2.281.396.903,60**	**0,00**	**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	27.286.164.438,01	231.214.715.013,24
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	27.208.640.128,01	232.583.164.925,62
Subtotal	**77.524.310,00**	**(1.368.449.912,38)**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	19.121.577.365,93	27.286.164.438,01
Subtotal	**19.199.101.675,93**	**25.917.714.525,63**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(77.524.310,00)	1.368.449.912,38
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**19.121.577.365,93**	**27.286.164.438,01**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Pajak Daerah-LO	1.362.886.776.941,50	1.787.142.204.747,00	(424.255.427.805,50)	(23,74)
Retribusi Daerah-LO	163.297.061.511,33	155.726.470.273,30	7.570.591.238,03	4,86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	2.275.536.541,00	1.904.909.335,00	370.627.206,00	19,46
Lain-lain PAD yang Sah-LO	97.344.328.869,85	49.872.933.967,50	47.471.394.902,35	95,18
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	**1.625.803.703.863,68**	**1.994.646.518.322,80**	**(368.842.814.459,12)**	**(18,49)**
PENDAPATAN TRANSFER-LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	**1.947.924.336.024,00**	**1.938.339.898.207,00**	**9.584.437.817,00**	**0,49**
Dana Perimbangan-LO	0,00	1.938.339.898.207,00	(1.938.339.898.207,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	294.569.205.000,00	0,00	294.569.205.000,00	100,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.199.371.400.647,00	0,00	1.199.371.400.647,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	453.983.730.377,00	0,00	453.983.730.377,00	100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LO	**23.236.157.000,00**	**11.315.088.000,00**	**11.921.069.000,00**	**105,36**
Insentif Fiskal-LO	23.236.157.000,00	11.315.088.000,00	11.921.069.000,00	105,36
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	**1.971.160.493.024,00**	**1.949.654.986.207,00**	**21.505.506.817,00**	**1,10**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
Pendapatan Hibah - LO	224.057.423.395,23	170.967.444.887,66	53.089.978.507,57	31,05
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	**224.057.423.395,23**	**170.967.444.887,66**	**53.089.978.507,57**	**31,05**
JUMLAH PENDAPATAN-LO	**3.821.021.620.282,91**	**4.115.268.949.417,46**	**(294.247.329.134,55)**	**(7,15)**
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	1.450.879.240.714,54	1.309.490.093.784,00	141.389.146.930,54	10,80
Beban Barang dan Jasa	1.321.670.657.789,70	1.466.829.936.561,96	(145.159.278.772,26)	(9,90)
Beban Bunga	0,00	3.078.651.404,00	(3.078.651.404,00)	(100,00)
Beban Subsidi	834.852.991,00	944.301.180,00	(109.448.189,00)	(11,59)
Beban Hibah	182.120.444.655,37	353.850.454.704,03	(171.730.010.048,66)	(48,53)
Beban Bantuan Sosial	1.834.940.000,00	4.002.925.000,00	(2.167.985.000,00)	(54,16)
Beban Penyisihan Piutang	1.150.870.424,67	24.667.815.407,50	(23.516.944.982,83)	(95,33)
Jumlah Beban Operasi	**2.958.491.006.575,28**	**3.162.864.178.041,49**	**(204.373.171.466,21)**	**(6,46)**
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**378.279.897.533,32**	**391.610.349.705,48**	**(13.330.452.172,16)**	**(3,40)**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	151.431.365.210,45	151.251.629.108,23	179.736.102,22	0,12
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	59.890.476.149,22	57.469.109.860,07	2.421.366.289,15	4,21
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	164.997.274.151,40	182.751.029.507,78	(17.753.755.356,38)	-9,71
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.960.782.022,25	138.581.229,40	1.822.200.792,85	1.314,90
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**378.279.897.533,32**	**391.610.349.705,48**	**(13.330.452.172,16)**	**(3,40)**
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil	525.174.135.186,00	796.635.218.878,00	(271.461.083.692,00)	(34,08)
Beban Bantuan Keuangan	13.236.478.700,00	26.853.000.000,00	(13.616.521.300,00)	(50,71)
Jumlah Beban Transfer	**538.410.613.886,00**	**823.488.218.878,00**	**(285.077.604.992,00)**	**(34,62)**
JUMLAH BEBAN	**3.875.181.517.994,60**	**4.377.962.746.624,97**	**(502.781.228.630,37)**	**(11,48)**
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	**(54.159.897.711,69)**	**(262.693.797.207,51)**	**208.533.899.495,83**	**(79,38)**

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Jumlah Surplus Non Operasional-LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	18.275.061.807,00	39.000.172.538,89	(20.725.110.731,89)	(53,14)
Jumlah Defisit Non Operasional-LO	**18.275.061.807,00**	**39.000.172.538,89**	**(20.725.110.731,89)**	**(53,14)**
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(18.275.061.807,00)**	**(39.000.172.538,89)**	**20.725.110.731,89**	**(53,14)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA-LO	**(72.434.959.518,69)**	**(301.693.969.746,40)**	**229.259.010.227,72**	**(75,99)**
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa - LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0,00	2.065.423.140,00	(2.065.423.140,00)	(100,00)
Jumlah Beban Luar Biasa	**0,00**	**2.065.423.140,00**	**(2.065.423.140,00)**	**(100,00)**
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**0,00**	**(2.065.423.140,00)**	**2.065.423.140,00**	**(100,00)**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(72.434.959.518,69)**	**(303.759.392.886,40)**	**231.324.433.367,72**	**(76,15)**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	6.454.280.263.239,55	6.764.055.547.180,37
SURPLUS/DEFISIT-LO	(72.434.959.518,69)	(303.759.392.886,40)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	136.050.877,00	10.026.024.201,81
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-lain	23.971.350.864,72	(16.041.915.256,23)
EKUITAS AKHIR	**6.405.952.705.462,58**	**6.454.280.263.239,55**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	14.356.745.416,90	23.302.940.904,77
Kas di Bendahara Pengeluaran	311.609.541,00	19.041.006,00
Kas di BLUD	2.499.584.868,03	2.264.885.131,34
Kas Lainnya	201.711.431,00	524.292.676,64
Kas Dana BOSP	1.986.989.519,00	1.699.060.482,84
Piutang Pajak Daerah	15.748.913.159,68	99.618.122.631,00
Piutang Retribusi Daerah	4.490.691.222,00	11.437.716.976,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.348.296.838,03	18.180.173.021,32
Piutang Lainnya	96.250.000,00	96.250.000,00
Penyisihan Piutang	(19.701.173.291,11)	(66.851.818.877,95)
Beban Dibayar Dimuka	1.984.982.256,93	1.809.609.683,07
Persediaan	116.695.901.122,37	294.022.966.235,40
Jumlah Aset Lancar	**143.020.502.083,83**	**386.123.239.870,43**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN		
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**0,00**	**0,00**
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN		
Investasi Permanen	135.977.916.508,00	138.205.300.338,00
Penyertaan Modal	135.977.916.508,00	138.205.300.338,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	**135.977.916.508,00**	**138.205.300.338,00**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**135.977.916.508,00**	**138.205.300.338,00**
ASET TETAP		
Tanah	1.187.619.664.254,11	1.279.193.541.736,32
Peralatan dan Mesin	2.213.822.502.843,21	2.115.169.411.496,30
Gedung dan Bangunan	2.997.282.508.161,98	2.878.738.414.770,81
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.112.540.134.981,23	4.011.564.533.138,15
Aset Tetap Lainnya	301.651.608.245,70	279.218.737.302,70
Konstruksi dalam Pengerjaan	29.005.424.963,95	25.295.808.664,94
Akumulasi Penyusutan	(4.943.566.093.920,46)	(4.549.816.476.728,71)
Jumlah Aset Tetap	**5.898.355.749.529,72**	**6.039.363.970.380,51**
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	992.008.950,00	993.008.950,00
Aset Tidak Berwujud	26.469.264.427,06	26.348.603.927,06
Aset Lain-lain	356.329.356.721,02	361.847.876.562,91
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.413.781.320,00)	(2.413.781.320,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(44.396.614.613,55)	(41.286.530.988,55)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	198.211.642.151,46	196.353.186.257,62
Jumlah Aset Lainnya	**535.191.876.315,99**	**541.842.363.389,04**

URAIAN	2025	2024
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi Tanah	102.645.507.704,21	0,00
Jumlah Properti Investasi	**102.645.507.704,21**	**0,00**
JUMLAH ASET	**6.815.191.552.141,75**	**7.105.534.873.977,98**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	144.172.310,00	14.391.867,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.270.103.058,34	0,00
Utang Belanja	205.173.955.504,00	451.420.582.417,31
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.438.973.655,37	3.466.450.196,50
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**211.027.204.527,71**	**454.901.424.480,81**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	198.211.642.151,46	196.353.186.257,62
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**198.211.642.151,46**	**196.353.186.257,62**
JUMLAH KEWAJIBAN	**409.238.846.679,17**	**651.254.610.738,43**
EKUITAS		
Ekuitas	6.405.952.705.462,58	6.454.280.263.239,55
JUMLAH EKUITAS	**6.405.952.705.462,58**	**6.454.280.263.239,55**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**6.815.191.552.141,75**	**7.105.534.873.977,98**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	1.447.285.058.158,50	1.777.704.385.140,00
Penerimaan Retribusi Daerah	7.171.631.839,00	10.634.618.841,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.275.536.541,00	1.904.909.335,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	109.396.440.389,82	30.108.755.601,70
Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.632.475.378.327,00	1.782.713.495.768,00
Penerimaan Hibah	1.798.843.934,57	1.300.531.591,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**3.200.402.889.189,89**	**3.604.366.696.276,70**
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	1.271.931.959.380,04	1.288.605.047.897,00
Pembayaran Barang dan Jasa	918.668.477.071,98	1.059.785.418.421,26
Pembayaran Bunga	0,00	3.692.560.273,00
Pembayaran Subsidi	834.852.991,00	944.301.180,00
Pembayaran Hibah	127.114.215.041,96	320.711.308.300,27
Pembayaran Bantuan Sosial	1.834.940.000,00	4.002.925.000,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	2.065.423.140,00
Pembayaran Bagi Hasil	690.951.951.944,00	748.291.201.015,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	13.236.478.700,00	26.853.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**3.024.572.875.128,98**	**3.454.951.185.226,53**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**175.830.014.060,91**	**149.415.511.050,17**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	69.710.000,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lain-lain	442.374.414,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**512.084.414,00**	**0,00**
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	992.100.000,00	920.100.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	51.562.817.179,00	76.496.084.204,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	80.799.961.394,06	129.103.961.833,55
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.310.371.998,10	36.791.762.576,47
Perolehan Aset Tetap Lainnya	329.702.535,00	1.658.740.000,00
Perolehan Aset Lainnya	120.660.500,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**185.115.613.606,16**	**244.970.648.614,02**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(184.603.529.192,16)**	**(244.970.648.614,02)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	82.836.000,00	100.883.708,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**82.836.000,00**	**100.883.708,00**
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	0,00	91.945.787.633,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**0,00**	**91.945.787.633,00**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**82.836.000,00**	**(91.844.903.925,00)**

URAIAN	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	216.670.872.859,00	212.522.600.526,00
UYHD Tahun 2024	19.041.006,00	3.738.300,00
Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya Tahun 2024	236.913,06	2.941.227,25
Pengembalian Kas dari Bendahara Penerimaan	0,00	1.732.000,00
Pengembalian Dana SPP dari Kas BLUD	3.463.286,32	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**216.693.614.064,38**	**212.531.012.053,25**
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	216.637.000.791,00	212.522.600.526,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jasa Giro Kas Lainnya	520.089,00	236.913,06
UYHD Tahun 2025	311.609.541,00	19.041.006,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**216.949.130.421,00**	**212.541.878.445,06**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**(255.516.356,62)**	**(10.866.391,81)**
Kenaikan/ (Penurunan) Kas	**(8.946.195.487,87)**	**(187.410.907.880,66)**
Saldo Awal Kas di BUD	**23.302.940.904,77**	**210.713.848.785,43**
Saldo Akhir Kas di BUD	**14.356.745.416,90**	**23.302.940.904,77**
Kas di Bendahara Pengeluaran	**311.609.541,00**	**19.041.006,00**
Kas di BLUD	**2.499.584.868,03**	**2.264.885.131,34**
Kas Lainnya	**201.711.431,00**	**524.292.676,64**
Kas Dana BOSP	**1.986.989.519,00**	**1.699.060.482,84**
Saldo Akhir Kas	**19.356.640.775,93**	**27.810.220.201,59**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

BAB I		**Pendahuluan**
	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
BAB II		**Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
	2.1	Ekonomi Makro
	2.2	Kebijakan Keuangan
	2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III		**Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah**
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.2	Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
BAB IV		**Kebijakan Akuntansi**
	4.1	Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4.3	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah
BAB V		**Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**
	5.1	Rincian Dari Penjelasan Dari Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	5.1.1	Pendapatan – LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Pembiayaan
	5.1.4	Pendapatan
	5.1.5	Beban
	5.1.6	Aset
	5.1.7	Kewajiban
	5.1.8	Ekuitas dana
	5.2	Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual Pada Pemerintah Daerah
BAB VI		**Penjelasan atas informasi-Informasi Nonkeuangan Pemerintah Daerah**
BAB VII		**Penutup**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara umum, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, dengan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2025 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 893) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1081);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2025 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1072);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1068);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yaitu dengan format sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II Perkembangan Makro Ekonomi Daerah, Perkembangan Keuangan Daerah, Perkembangan Inflasi, Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah, Ketenagakerjaan Masyrakat dan Kesejahteraan, Prospek Perekonomian Daerah

2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah

2.2. Perkembangan Keuangan Daerah

2.3. Perkembangan Inflasi

2.4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

2.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

2.6. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

2.7. Prospek Perekonomian Daerah

2.8. Kebijakan Keuangan Daerah

2.9. Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala Yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

3.3 Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

3.5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.6 Pencapaian Pemenuhan Mandatory Spending dalam APBD

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Komponen Utama Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah yang terdiri dari:

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2 Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.4 Laporan Operasional (LO)

5.5 Laporan Arus Kas (LAK)

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup

LAMPIRAN

BAB II

PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH, PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH, PERKEMBANGAN INFLASI, PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM, PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH, KETENAGAKERJAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN, PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

2.1 Perkembangan Makro Ekonomi Daerah



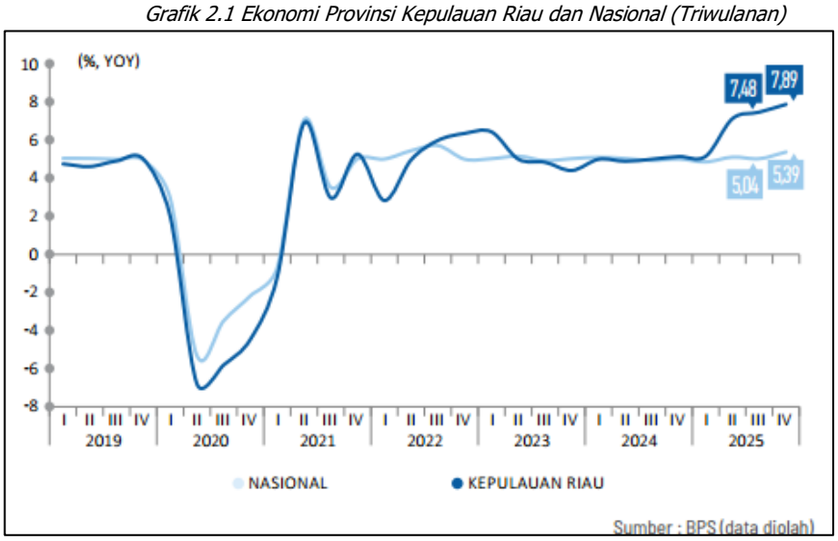
Dalam Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2025 tumbuh tinggi sebesar 7,89% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,48% (yoy). Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di regional Sumatera yang secara keseluruhan tumbuh sebesar 4,54% (yoy) dan tertinggi keempat secara nasional. Secara kumulatif, sepanjang tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat sebesar 6,94% (ctc).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan triwulan IV 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh kinerja LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi.

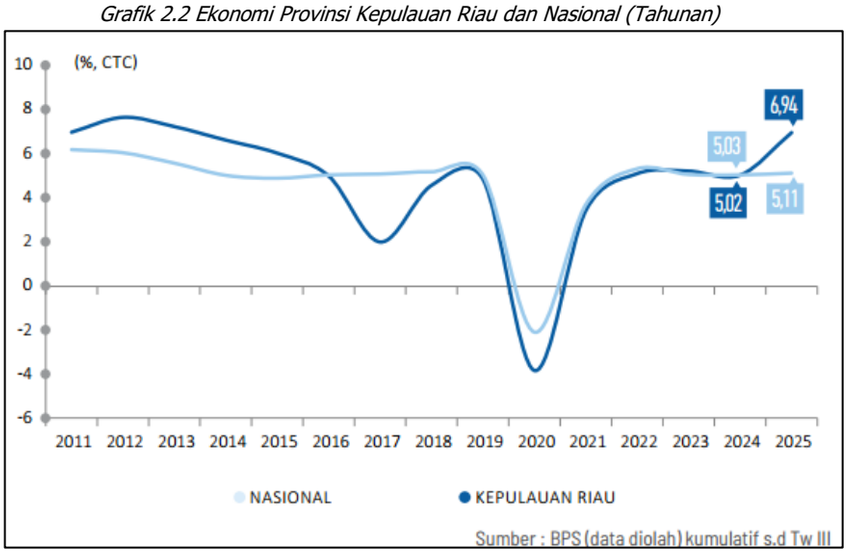
Sejalan dengan itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp59.767,12 miliar atau tumbuh 7,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,48% (yoy). Kinerja tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU utama yakni Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Konstruksi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh kuatnya komponen Net Ekspor, PMTB, dan Konsumsi Rumah Tangga.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2025 lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tumbuh 4,54% (yoy) maupun capaian nasional yang tumbuh sebesar 5,39% (yoy). Pertumbuhan tertinggi di regional Sumatera dicapai oleh Kepri, Sumatera Selatan, dan Lampung masing-masing sebesar 7,89% (yoy), 5,54% (yoy), dan 5,54% (yoy). Adapun pangsa PDRB Kepri triwulan IV 2025 terhadap regional Sumatera tercatat sebesar 7,57%, atau terbesar kelima setelah Sumatera Utara (23,52%), Riau (22,79%), Sumatera Selatan (13,61%) dan Lampung (9,78%).

Grafik 2.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)



Grafik 2.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)



Tabel 2.3 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (%, yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025 (%, yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (%, qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025 (%, qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (%, ctc)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025 (%, ctc)	Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
1	Aceh	4,46	▽ -1,61	1,71	▽ -0,05	4,62	▽ 2,97	4,92
2	Sumatera Utara	4,55	▽ 4,23	2,11	▽ 0,13	4,63	▽ 4,53	23,52
3	Sumatera Barat	3,36	▽ 1,69	-0,10	▽ 0,39	3,94	△ 3,37	6,62
4	Riau	4,98	▽ 4,94	3,54	▽ 0,12	4,74	▽ 4,79	22,79
5	Jambi	4,77	△ 5,24	2,17	▽ 1,30	4,78	△ 4,93	6,73
6	Sumatera Selatan	5,20	△ 5,54	2,25	▽ -1,53	5,28	△ 5,35	13,61
7	Bengkulu	4,56	△ 4,79	-2,97	▽ 3,34	4,80	△ 4,80	2,16
8	Lampung	5,04	△ 5,54	0,69	▽ -3,05	5,19	△ 5,28	9,78
9	Kep. Bangka Belitung	3,21	△ 4,54	-1,70	△ 4,87	3,95	△ 4,09	2,30
10	**Kepulauan Riau**	**7,48**	△ **7,89**	**0,85**	△ **7,35**	**6,60**	▽ **6,94**	**7,57**
	SUMATERA	**4,90**	▽ **4,54**	**1,81**	▽ **0,36**	**4,90**	▽ **4,81**	**100,00**

△ Menguat dibandingkan triwulan sebelumnya
▽ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)

PDRB Sisi Pengeluaran	2023					2024					2025				Total	ARAH TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
1. Konsumsi RT	5,52	3,46	2,77	4,98	4,17	4,85	5,16	5,10	3,06	4,53	3,15	3,90	4,12	4,17	3,84	Δ
2. Konsumsi LNPRT	0,65	5,40	5,48	15,82	6,77	17,76	7,02	10,20	2,03	9,02	-0,99	7,49	3,51	9,46	4,82	Δ
3. Konsumsi Pemerintah	5,29	10,35	3,91	8,58	7,46	34,37	18,49	7,51	-6,16	8,36	4,30	-22,07	-2,34	3,72	-4,28	Δ
4. PMTB (Investasi)	7,03	7,72	10,84	9,15	8,72	8,45	8,04	3,22	5,63	6,26	3,27	8,70	9,05	6,24	6,81	∇
5. Perubahan Inventori	212,70	718,19	42,78	61,52	0,12	-213,45	-198,09	-273,92	-46,36	-37,43	-5,87	-6,09	55,46	-11,15	-36,93	∇
6. Total Net Ekspor	4,81	8,80	-3,49	-19,01	-1,82	1,23	-23,18	16,84	29,58	3,42	14,53	25,35	16,74	27,02	20,52	Δ
a. Total Ekspor	3,15	-6,72	-2,88	-3,35	-2,53	-0,44	4,92	2,17	18,48	6,22	18,79	20,62	11,47	8,42	14,52	∇
b. Total Impor	2,96	-8,33	-2,82	-1,85	-2,61	-0,64	8,36	0,89	17,60	6,50	19,30	20,21	10,94	6,80	13,94	∇
PERTUMBUHAN PDRB	**6,44**	**5,01**	**4,84**	**4,41**	**5,16**	**5,00**	**4,90**	**5,01**	**5,14**	**5,02**	**5,16**	**7,14**	**7,48**	**7,89**	**6,94**	Δ

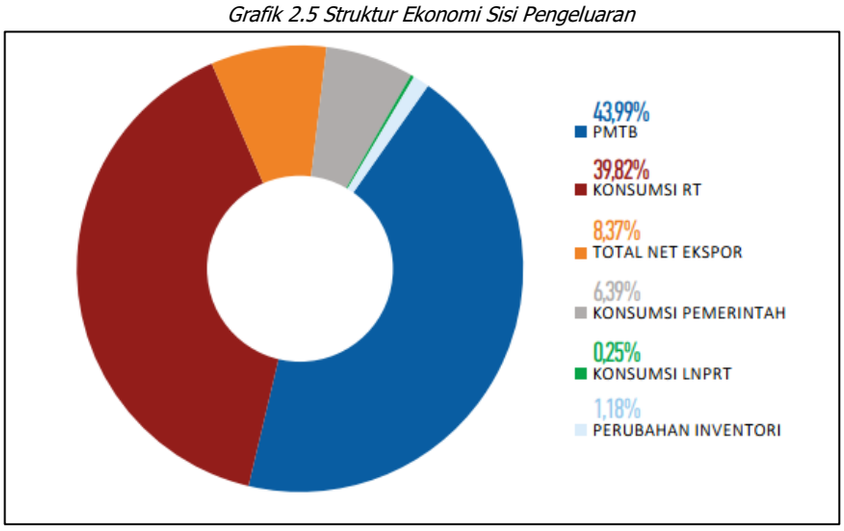
Δ Menguat
∇ Melambat
Sumber: BPS (data diolah)

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Distribusi perekonomian Kepri pada triwulan IV 2025 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 43,99%, diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 39,82% dari total PDRB. Tingginya pangsa komponen investasi dipengaruhi oleh masih berlanjutnya upaya pelaku usaha khususnya pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan barang modal serta investasi aset bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga relatif besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan tetap tumbuh positif sejalan dengan aktivitas pariwisata pada periode HBKN Nataru di triwulan IV.

Sementara itu, komponen net ekspor memiliki pangsa terbesar ketiga sebesar 8,37%, sejalan dengan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Adapun konsumsi pemerintah menempati pangsa terbesar keempat yaitu sebesar 6,39%, didukung oleh berlanjutnya realisasi belanja pemerintah untuk program-program strategis.

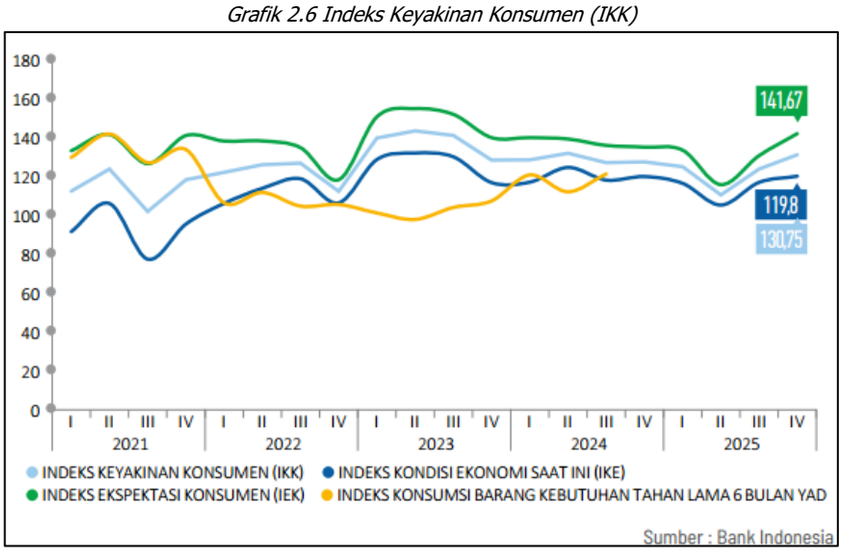
Grafik 2.5 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran



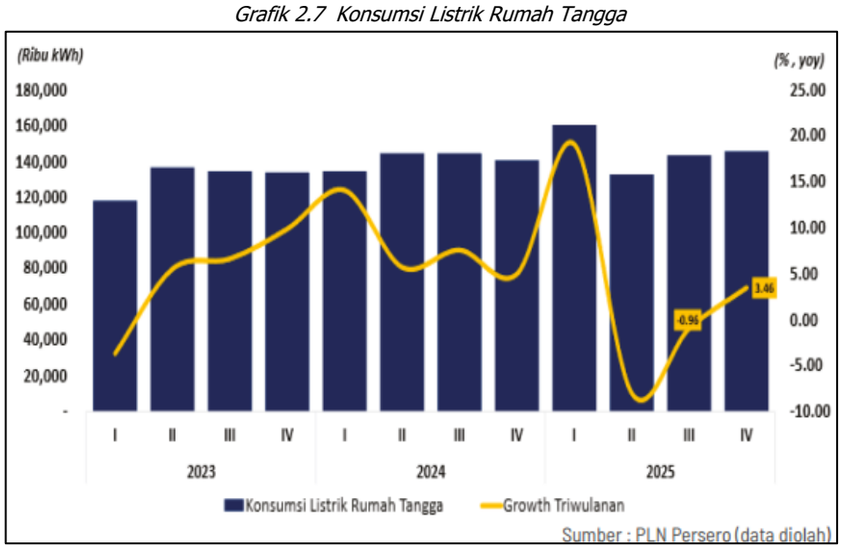
2.1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,12% (yoy). Akselerasi konsumsi rumah tangga tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dari 123,50 pada triwulan III 2025 menjadi 130,75 pada triwulan IV 2025. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat yang semakin kuat terhadap kondisi perekonomian saat ini. Selain itu, peningkatan konsumsi RT juga terindikasi dari membaiknya konsumsi listrik RT, dari sebelumnya terkontraksi 0,96% (yoy) menjadi tumbuh sebesar 3,46% (yoy). Lebih lanjut, akselerasi konsumsi RT pada triwulan IV 2025 juga didukung oleh momen libur HBKN Nataru dan aktivitas pariwisata yang mendorong belanja masyarakat.

Grafik 2.6 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)



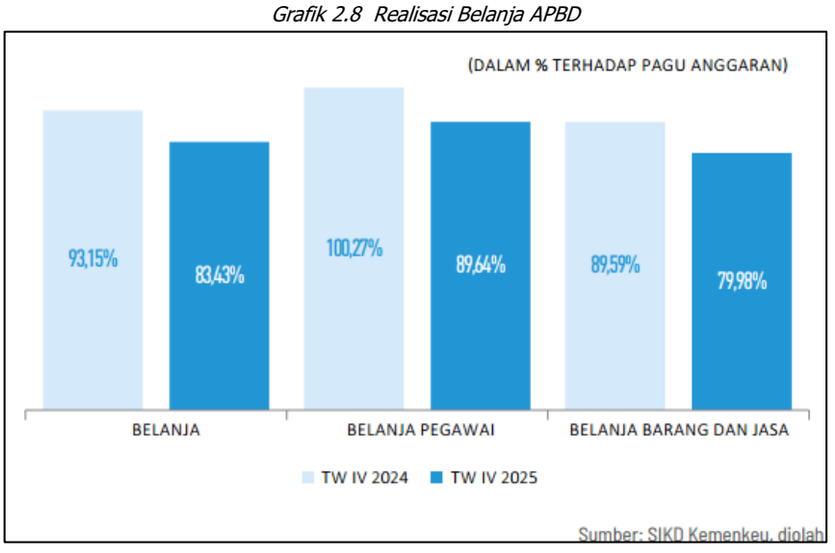
Grafik 2.7 Konsumsi Listrik Rumah Tangga



2.1.1.2 Konsumsi Pemerintah

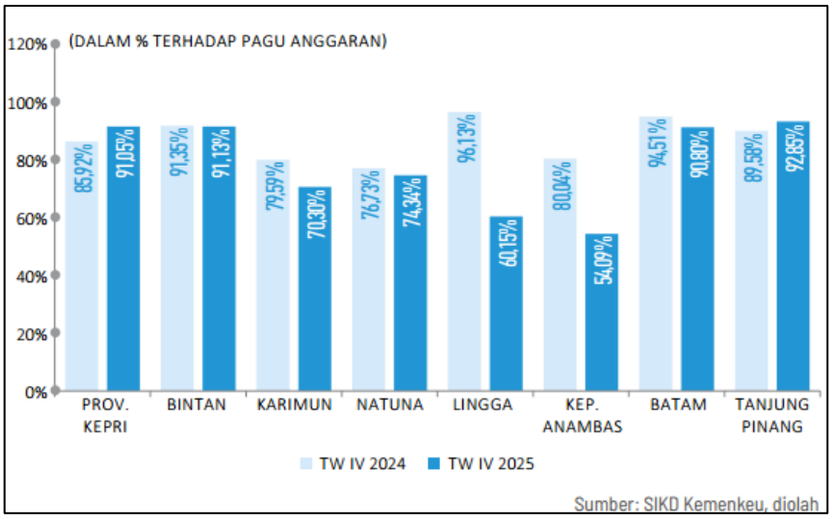
Konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 3,72% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,34% (yoy). Perbaikan tersebut sejalan dengan realisasi belanja modal di akhir tahun sebelum periode tutup tahun anggaran. Peningkatan realisasi belanja terjadi pada APBD Provinsi Kepri dan APBD Kota Tanjungpinang, yang masing-masing mencatatkan realisasi APBD hingga Desember 2025 sebesar 91,05% dan 92,85% dari pagu belanja.

Grafik 2.8 Realisasi Belanja APBD



Di sisi lain, realisasi belanja seluruh Pemda di Kepri pada tahun 2025 menurun secara agregat menjadi sebesar sebesar 83,43% dari tahun 2024 yang realisasi belanja sebesar 93,15% dari pagu anggaran. Secara spasial, sebagian Pemda Kepri mencatat penurunan realisasi belanja pada triwulan IV 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya, diantaranya terjadi di Kabupaten Bintan yang menurun dari 91,35% menjadi 91,13%, Kabupaten Karimun yang menurun dari 79,59% menjadi 70,30%, Kabupaten Natuna dari 76,73% menjadi 74,34%, Kabupaten Lingga dari 96,13% menjadi 60,15%, Kabupaten Kepulauan Anambas dari 80,04% menjadi 54,09%, serta Kota Batam dari 94,51% menjadi 90,80%.

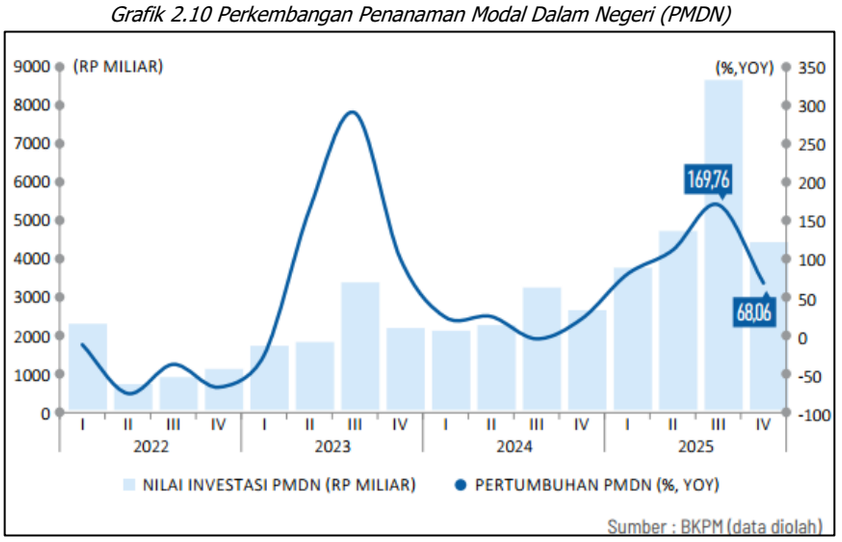
Grafik 2.9 Perkembangan Realisasi APBD Wilayah Kepri



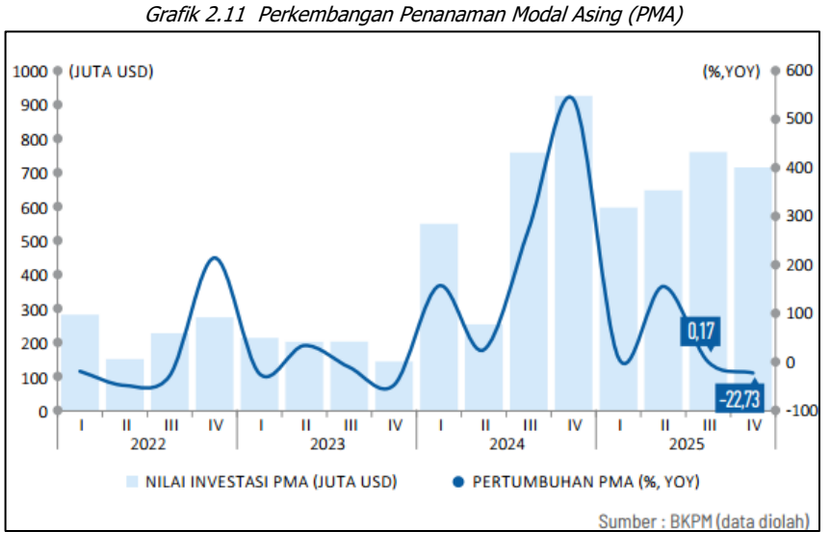
2.1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

PMTB atau investasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 6,24% (yoy), terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,05% (yoy). Deselerasi tersebut sejalan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh sebesar 68,06% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 169,76% (yoy). Penanaman Modal Asing (PMA) juga melambat dari yang sebelumnya tumbuh sebesar 0,17% (yoy), menjadi terkontraksi sebesar 22,73% (yoy). Meskipun terjadi pelambatan, keberlanjutan perkembangan PMDN dan PMA menunjukkan bahwa Kepri tetap menjadi salah satu tujuan investasi strategis di Indonesia.

Grafik 2.10 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



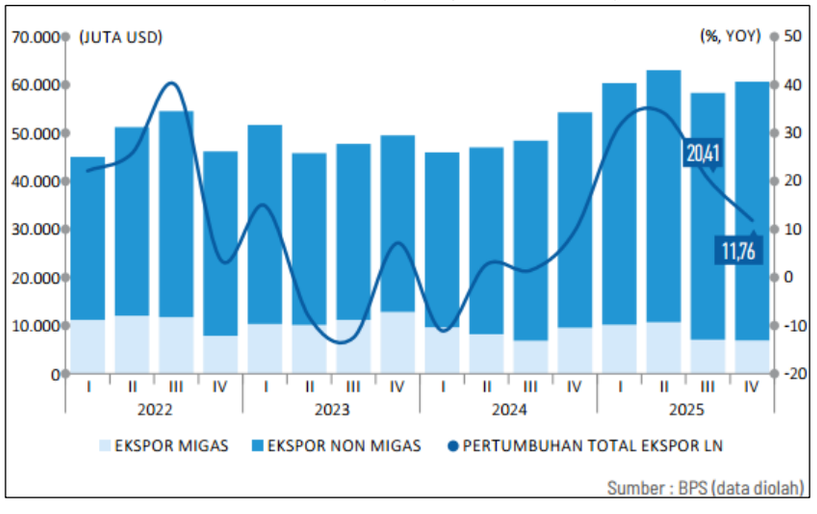
Grafik 2.11 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)



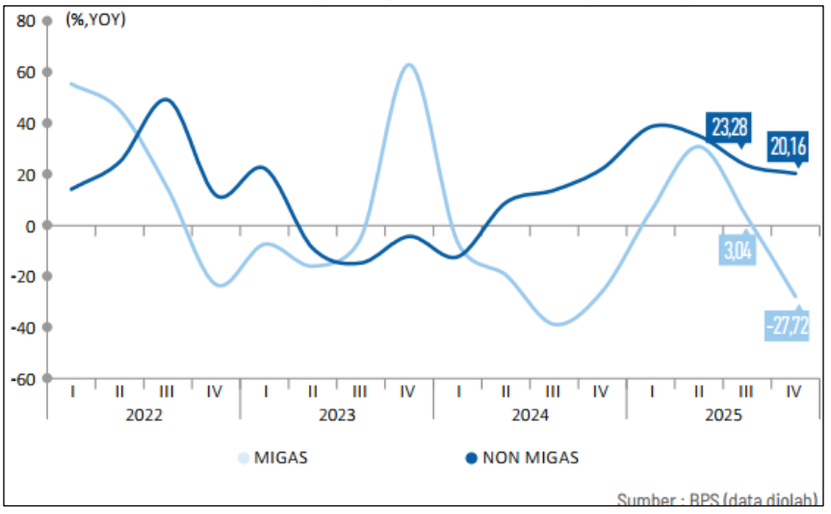
2.1.1.4 Kegiatan Ekspor-Impor

Komponen net ekspor Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 27,02% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,74% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Ekspor tumbuh sebesar 8,42% (yoy), atau terdeselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,47% (yoy). Sementara itu, impor juga tumbuh sebesar 6,80% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 10,94% (yoy). Ekspor yang terdeselerasi sejalan dengan nilai total ekspor (migas dan nonmigas) pada triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 11,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,41% (yoy).

Grafik 2.12 Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri

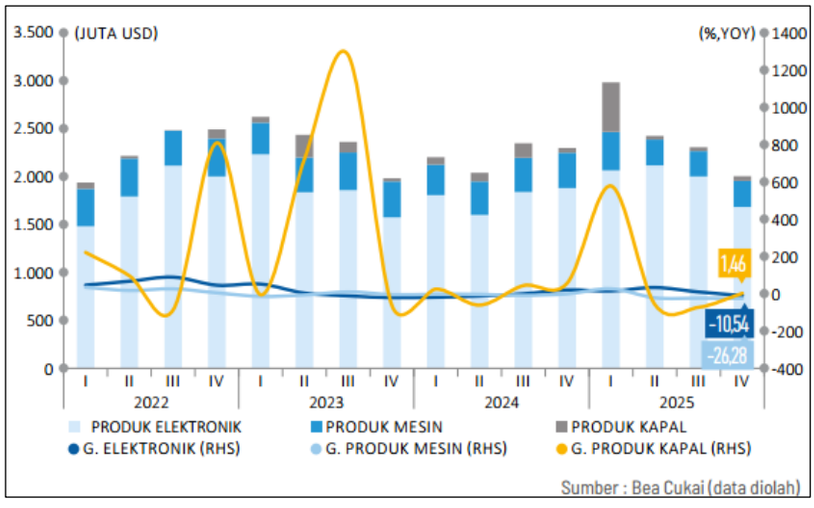


Grafik 2.13 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas

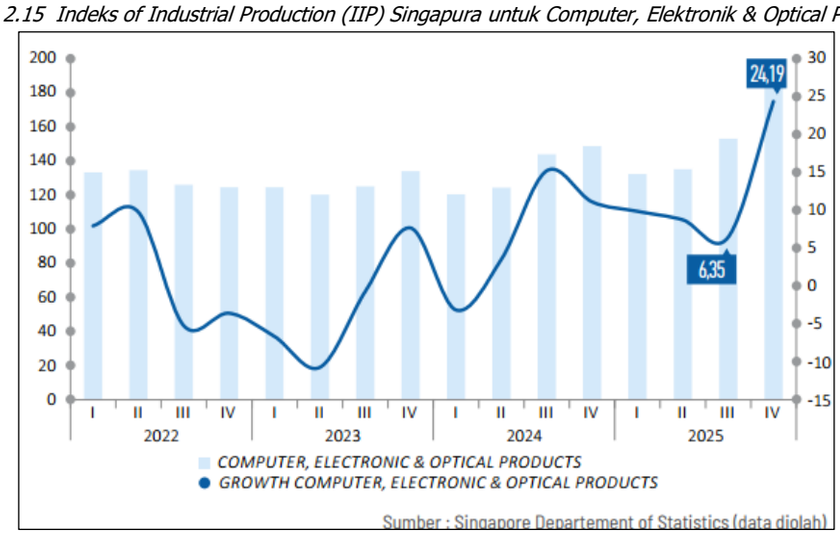


Kinerja ekspor Provinsi Kepri yang terdeselerasi sejalan dengan melambatnya ekspor migas dan normalisasi ekspor produk elektronik. Secara nominal, ekspor migas pada triwulan IV 2025 terkontraksi 27,72% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,04% (yoy). Nominal ekspor produk elektronik juga menurun, dari 8,72% (yoy) menjadi terkontraksi 10,54% (yoy), sejalan dengan normalisasi pasca fenomena *frontloading* di triwulan sebelumnya akibat dinamika tarif resiprokal. Lebih lanjut, kinerja ekspor produk mesin turut mengalami perlambatan. Nominal ekspor produk mesin pada triwulan IV 2025 terkontraksi sebesar 26,28% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 25,25% (yoy). Namun demikian, nominal ekspor produk kapal mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 1,46% (yoy) lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 73,59% (yoy). *Index of Industrial Production* (IIP) Singapura untuk *Computer, Electronic, & Optical Products* mengalami perbaikan pada triwulan IV, dari yang sebelumnya tumbuh 6,35% (yoy) menjadi 24,19% (yoy). Hal ini mengkonfirmasi kinerja net ekspor Kepri yang membaik didukung oleh permintaan yang tetap terjaga dari negara importir utama, yaitu Singapura.

Grafik 2.14 Perkembangan Ekspor Produk Elektronik, Produk Mesin dan Produk Kapal

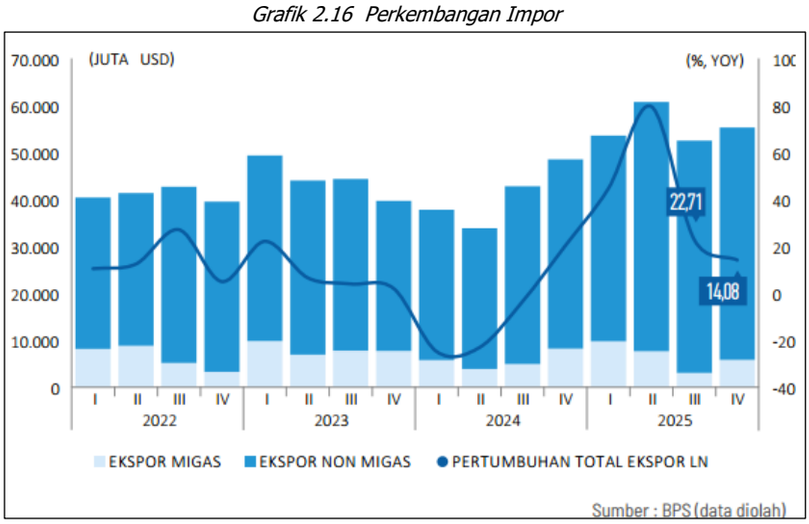


Grafik 2.15 Indeks of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Computer, Elektronik & Optical Products

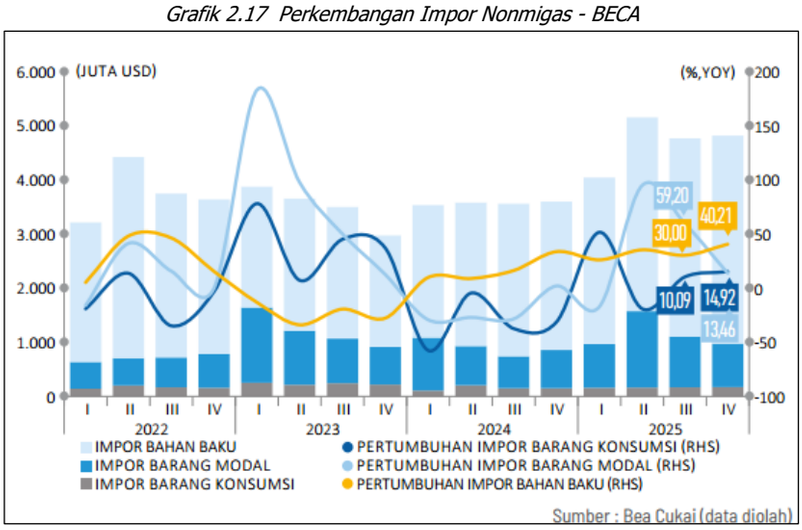


Sejalan dengan arah pertumbuhan ekspor yang melambat, PDRB impor turut mengalami deselerasi. Total impor Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 14,08% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,71% (yoy). Melambatnya impor terutama disebabkan oleh penurunan impor barang modal. Nilai impor barang modal pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 13,46% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi sebesar 59,20% (yoy). Di sisi lain, impor bahan baku tumbuh sebesar 40,21% (yoy), mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 30,00% (yoy). Lebih lanjut, Impor barang konsumsi turut tumbuh sebesar 14,92% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,09% (yoy).

Grafik 2.16 Perkembangan Impor



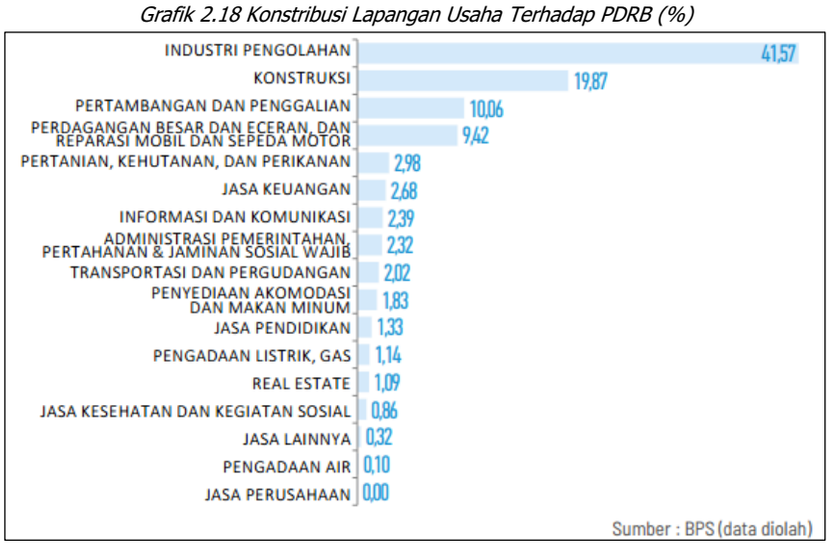
Grafik 2.17 Perkembangan Impor Nonmigas - BECA



2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 41,57%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 19,87%, diikuti LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing sebesar 10,06% dan 9,42%. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan tetap baik sejalan dengan masih tingginya permintaan global terhadap produk elektronik. LU Konstruksi juga masih tumbuh sejalan dengan masih berlanjutnya sejumlah pembangunan infrastruktur. Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian juga tumbuh positif sejalan dengan beroperasinya sejumlah proyek migas baru di Kepri. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata serta belanja masyarakat.

Grafik 2.18 Konstribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)



Tabel 2.19 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha

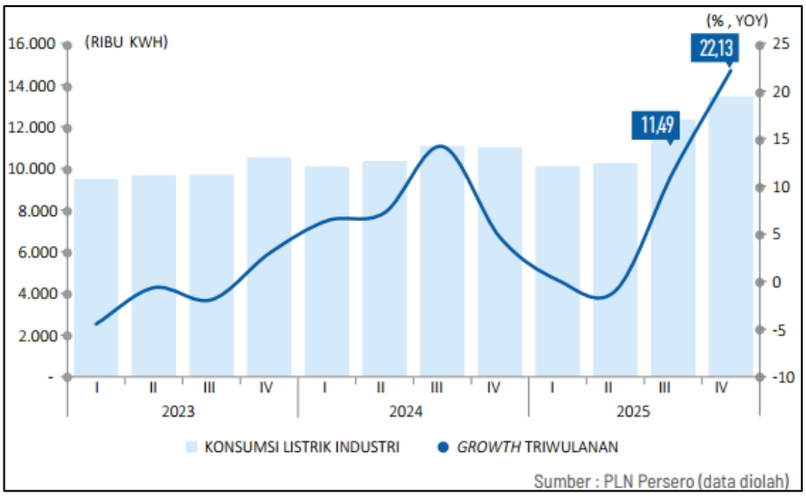
PDRB Sisi Lapangan Usaha	2023					2024					2025				Total	ARAH TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,79	-2,32	-5,92	6,96	1,53	5,05	3,31	-3,76	-2,08	0,57	-2,75	13,40	19,80	-13,42	3,49	▽
Pertambangan dan Penggalian	-15,04	-0,51	3,69	2,61	-2,65	-4,69	-25,84	-5,01	7,43	-7,83	0,99	24,21	19,83	18,67	16,01	▽
Industri Pengolahan	7,71	-0,27	0,62	1,83	2,46	3,86	13,35	7,76	6,64	7,77	7,30	6,96	6,82	8,89	7,52	△
Pengadaan Listrik, Gas	12,08	11,03	7,05	2,67	8,03	5,13	7,74	6,85	9,01	7,20	2,70	9,71	15,63	12,99	10,37	▽
Pengadaan Air	11,53	-3,28	0,07	10,42	4,45	8,55	7,89	-5,50	-1,65	1,98	7,33	16,89	14,56	8,51	11,70	▽
Konstruksi	6,74	10,31	13,74	10,94	10,49	13,89	7,58	2,06	1,02	5,75	3,84	7,75	5,71	4,11	5,30	▽
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,49	2,28	10,03	6,03	5,87	4,79	2,24	4,84	10,66	5,59	10,29	6,96	5,54	7,57	7,55	△
Transportasi dan Pergudangan	33,07	21,77	9,94	-0,22	14,92	0,86	2,49	0,79	5,94	2,51	3,57	6,27	12,94	6,04	7,18	▽
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,70	44,71	13,28	-4,58	27,31	-5,98	2,74	13,16	8,31	4,21	2,47	-0,63	5,35	4,41	2,87	▽
Informasi dan Komunikasi	24,53	51,60	13,91	0,43	19,96	2,30	4,18	1,68	-8,54	-0,06	-5,98	-8,96	-4,52	10,59	-2,65	△
Jasa Keuangan	4,94	12,83	7,99	9,10	8,65	8,24	10,22	9,83	1,70	7,41	5,05	0,15	-0,65	12,16	4,11	△
Real Estate	11,35	7,51	2,63	0,12	5,25	2,85	4,50	8,53	6,58	5,59	-0,13	11,38	6,23	5,28	5,71	▽
Jasa Perusahaan	35,59	28,90	11,80	2,81	18,32	-4,29	-1,39	6,90	18,80	5,05	26,89	25,03	12,58	5,34	16,70	▽
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,03	3,39	-3,21	12,20	5,13	25,50	15,75	32,83	3,93	17,86	8,10	-15,16	-0,15	6,15	-1,46	△
Jasa Pendidikan	8,82	7,44	-0,54	0,15	3,87	-1,74	-3,46	2,98	18,16	3,94	9,01	6,07	6,68	1,03	5,48	▽
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,21	-7,37	-23,87	7,06	-4,82	7,07	30,72	31,53	13,87	19,60	9,04	-0,07	4,74	-2,12	2,67	▽
Jasa lainnya	37,38	8,79	27,56	21,09	21,51	9,99	1,80	26,93	26,89	15,95	16,41	-3,27	-5,98	4,28	1,96	△
PERTUMBUHAN PDRB	**6,44**	**5,01**	**4,84**	**4,41**	**5,16**	**5,00**	**4,90**	**5,01**	**5,14**	**5,02**	**5,16**	**7,14**	**7,48**	**7,89**	**6,94**	**△**

△ Menguat
▽ Melambat
Sumber: BPS (data diolah)

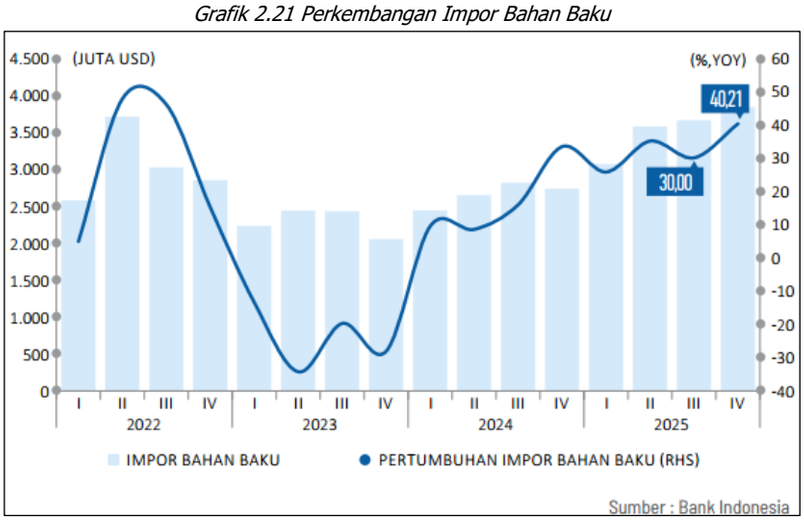
2.1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 8,89% (yoy), mengalami akselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,82% (yoy) dan memberikan andil 3,71% terhadap pertumbuhan Provinsi Kepri atau yang terbesar dibandingkan LU lainnya. Kinerja LU Industri Pengolahan yang meningkat tercermin dari peningkatan impor bahan baku yang tumbuh sebesar 40,21% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 30,00% (yoy). Selanjutnya, kuatnya kinerja industri pengolahan tercermin dari tingginya konsumsi listrik industri yang tumbuh 22,13% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,49% (yoy).

Grafik 2.20 Konsumsi Listrik Industri



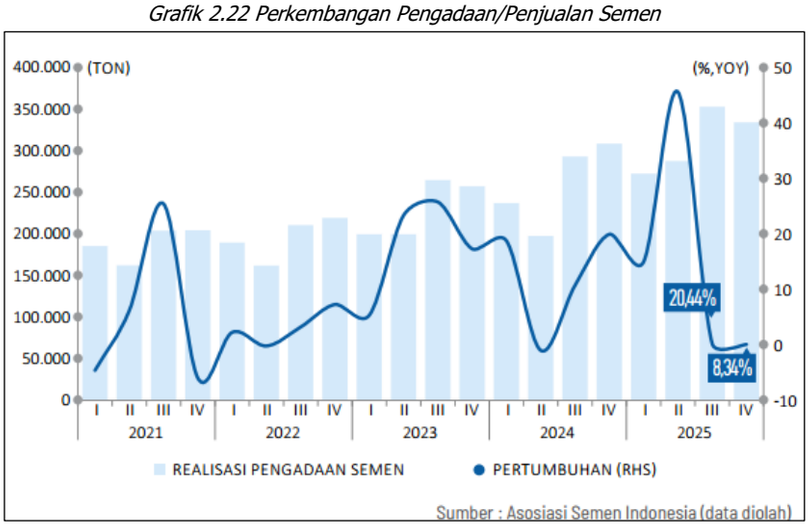
Grafik 2.21 Perkembangan Impor Bahan Baku



2.1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,11% (yoy), terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,71% (yoy). Melambatnya kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari melambatnya penjualan semen di triwulan IV yang tercatat tumbuh 8,34% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,44%. Meskipun demikian, kinerja LU Konstruksi yang tetap positif didukung oleh pembangunan sejumlah ruas jalan serta Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang masih terus berlanjut.

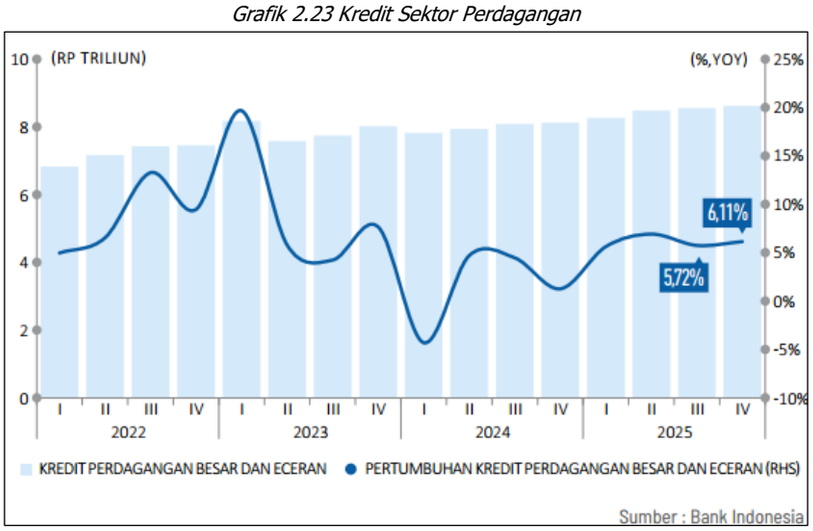
Grafik 2.22 Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen



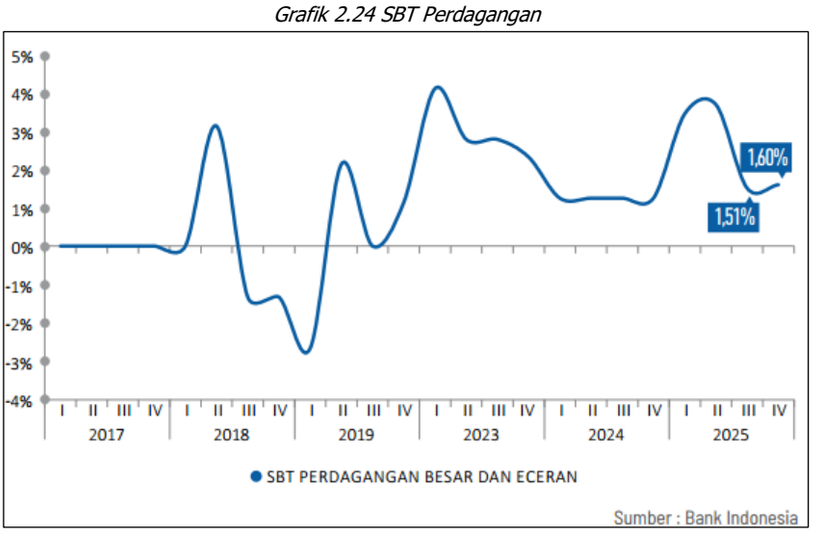
2.1.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 7,57% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,54% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit sektor perdagangan yang meningkat dari 5,72% (yoy) menjadi 6,11% (yoy). Lebih lanjut, peningkatan pada LU perdagangan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang menghasilkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sektor perdagangan sebesar 1,60%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,51%. Penguatan kinerja lapangan usaha perdagangan utamanya didorong oleh masifnya aktivitas dan mobilisasi masyarakat pada periode HBKN Nataru.

Grafik 2.23 Kredit Sektor Perdagangan



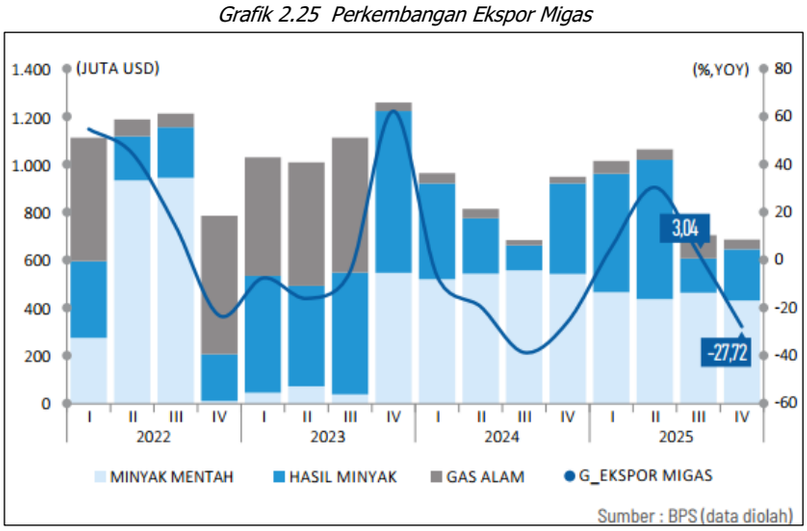
Grafik 2.24 SBT Perdagangan



2.1.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Pada triwulan IV 2025 kinerja LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 18,67% (yoy), atau mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 19,83% (yoy). LU Pertambangan yang tumbuh melambat ditunjukkan oleh ekspor migas yang juga tumbuh melambat dan terkontraksi sebesar 27,72% (yoy), terutama akibat ekspor hasil minyak yang turun dari sebelumnya tumbuh 37,23% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar 43,36% (yoy). Ekspor minyak mentah dan ekspor gas alam juga mengalami perlambatan dari yang sebelumnya tumbuh masing-masing sebesar -16,69% (yoy) dan 333,22% (yoy) menjadi -20,51% (yoy) dan 45,49% (yoy) pada triwulan IV 2025.

Grafik 2.25 Perkembangan Ekspor Migas



2.1.5 Perkembangan Keuangan Daerah



Realisasi total pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat sebesar 85,19%,sementara realisasi belanja mencapai 83,43% dari pagu anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 94,66%, sedangkan realisasi juga belanja lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 93,15%. Penurunan realisasi pendapatan terutama terjadi pada pos PAD dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sementara itu, realisasi pos Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mengalami kenaikan dibandingkan triwulan IV tahun 2024. Di sisi lain, penurunan realisasi belanja utamanya disebabkan oleh penurunan pada pos Belanja Modal dan Belanja Transfer, namun penurunan lebih dalam tertahan oleh kenaikan realisasi Belanja Tidak Terduga yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

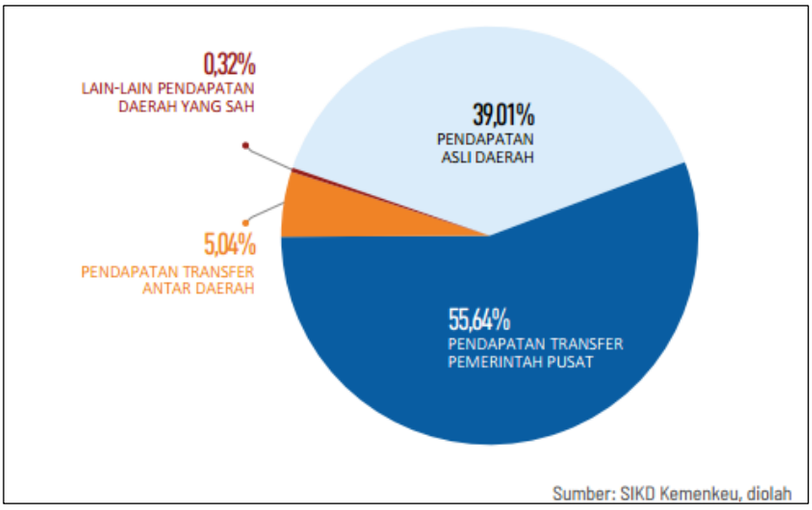
2.1.5.1 Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan seluruh Pemda di Kepri pada triwulan IV 2025 mencapai 85,19% dari pagu anggaran atau sebesar Rp12,65 triliun.Persentase realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar 94,66% dari pagu anggaran atau sebesar Rp14,01 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari melemahnya realisasi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan PAD. Meskipun demikian, penurunan yang lebih dalam tertahan dengan meningkatnya persentase pada pos Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada triwulan IV 2025 mencapai Rp7,01 triliun atau sebesar 81,89% dari pagu anggaran. Komponen ini memiliki pangsa anggaran pendapatan dengan porsi terbesar yakni sebesar 56,09% dari pagu anggaran dengan capaian realisasi terbesar yaitu mencapai 55,45% dari total realisasi. Secara

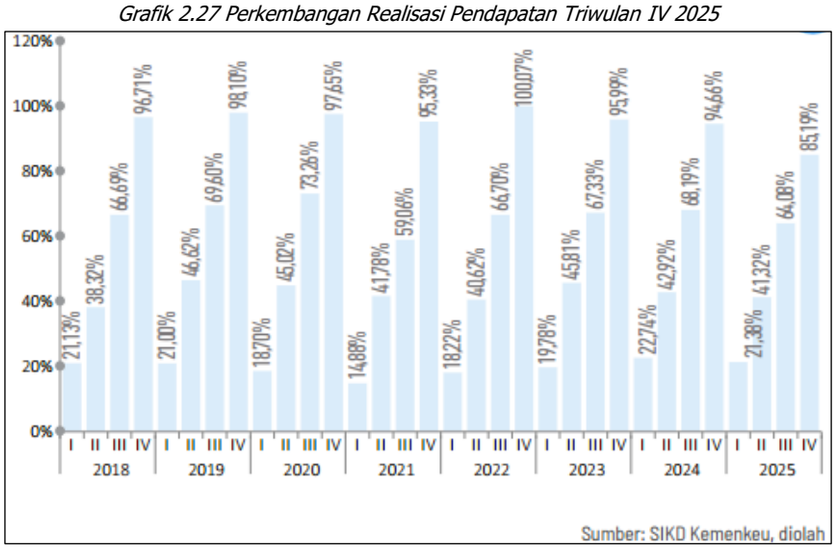
persentase, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 93,98% dari pagu. Penurunan terjadi pada semua pos sub anggaran pendapatan yaitu pos Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Dari sisi nominal, realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan mengalami penurunan dari Rp8,39 triliun pada triwulan IV 2024 menjadi Rp7,01 triliun pada triwulan IV 2025.

Grafik 2.26 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2025



Realisasi PAD pada seluruh Pemda di Kepri hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar 87,47%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tercatat 96,51% dari pagu anggaran. Secara nominal, realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,85 triliun menjadi sebesar Rp4,94 triliun pada triwulan IV 2025. Peningkatan nominal realisasi terutama disebabkan oleh peningkatan pos anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan pos Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi pos Hasil Pengelolan Kekayaan yang Dipisahkan naik dari Rp29,89 miliar dari pagu sebesar Rp76,29 miliar pada triwulan IV 2024 menjadi Rp34,52 miliar dari pagu sebesar Rp37,94 miliar pada triwulan IV 2025. Lebih lanjut, realisasi pada pos Lain-Lain PAD yang Sah meningkat menjadi Rp396,94 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp342,27 miliar pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang terealisasi 57,07% atau Rp329,64 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp577,59 miliar.

Grafik 2.27 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2025



Peningkatan capaian PAD yang lebih tinggi tertahan akibat penurunan realisasi pos Pajak Daerah yang tercatat 86,42%, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 101,46% dan pos Retribusi Daerah yang tercatat 83,87%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 112,67%. Meskipun demikian, secara nominal realisasi pada pos Pajak Daerah di triwulan IV 2025 meningkat menjadi sebesar Rp3,98 triliun dari pagu angaran Rp4,60 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang

terealisasi sebesar Rp3,93 triliun dari pagu anggaran Rp3,87 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan ekspektasi pendapatan daerah, bukan penurunan kinerja di tengah kebijakan realokasi anggaran.

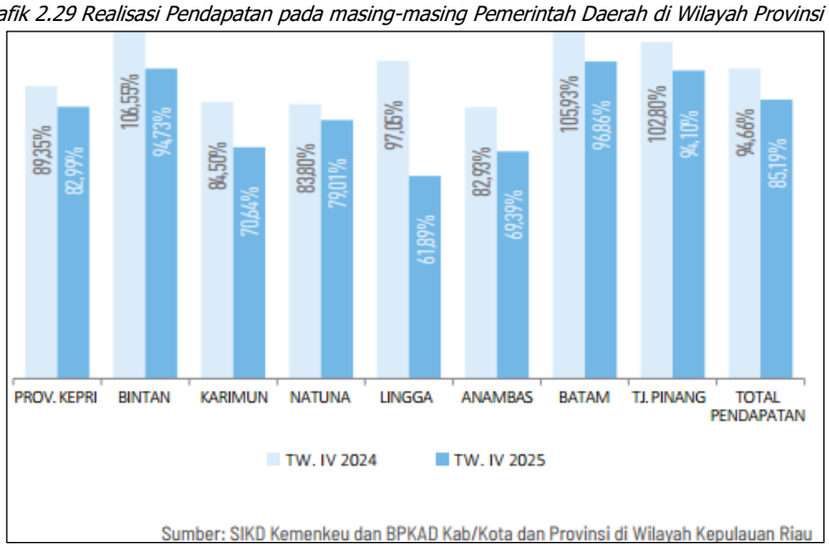
Tabel 2.28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2025

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	Porsi (%)
Pendapatan Asli Daerah	**5.642,30**	**37,99%**	**4.935,45**	**87,47%**	**39,01%**
Pajak Daerah	4.606,58	31,02%	3.981,21	86,42%	
Retribusi Daerah	655,51	4,41%	549,78	83,87%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	37,94	0,26%	34,52	90,99%	
Lain-lain PAD yang Sah	342,27	2,30%	369,94	108,08%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**8.565,89**	**56,09%**	**7.014,42**	**81,89%**	**55,45%**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**599,54**	**4,40%**	**663,87**	**110,73%**	**5,25%**
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**42,43**	**0,29%**	**36,82**	**86,77%**	**0,29%**
Hibah	1,32	0,01%	1,69	127,63%	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	41,11	0,28%	35,13	85,45%	
TOTAL PENDAPATAN	**14.850,16**	**100,00%**	**12.650,56**	**85,19%**	

sumber: SIKD Kemenkeu dan BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau
* Pada tahun 2023, merupakan Dana Insentif Daerah yang pada tahun 2024 berganti menjadi Dana Insentif Fiskal
**Bantuan Keuangan pada tahun 2024 tidak dianggarkan

Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan IV 2025 dicapai Pemerintah Kota Batam dengan jumlah pendapatan sebesar Rp4,14 triliun atau 96,86% dari pagu anggaran. Realisasi pendapatan Kota Batam memiliki pangsa sebesar 32,76% dari total realisasi pendapatan pemerintah daerah se-Provinsi Kepri sehingga persentase realisasi Kota Batam mempengaruhi persentase realisasi pendapatan untuk seluruh wilayah Kepulauan Riau. Capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kabupaten Bintan yang mencapai Rp1,24 triliun atau 94,73% dari pagu anggaran. Selanjutnya, capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kota Tanjungpinang sebesar Rp961 miliar atau 94,10% dari pagu anggaran tahun ini. Total Realisasi pendapatan pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Riau mencapai 85,19% dari pagu anggaran.

Grafik 2.29 Realisasi Pendapatan pada masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri



2.1.5.2 Realisasi Belanja

Realisasi belanja Pemda Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja Pemda hingga triwulan IV 2025 mencapai 83,43% dari pagu anggaran atau sebesar Rp12,81 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat 93,15% dari pagu anggaran atau sebesar Rp14,36 triliun. Pencapaian realisasi belanja yang menurun secara persentase terutama terjadi pada pos Belanja Operasi, pos Belanja Modal, dan pos Belanja Transfer. Sementara itu, realisasi pada pos Belanja Tidak Terduga tercatat mengalami peningkatan dari 7,76% pada triwulan IV 2024 menjadi 9,22% triwulan IV 2025. Realisasi belanja Pemda berdasarkan pos pengeluaran didominasi oleh Belanja Transfer dengan porsi 87,30%, diikuti Belanja Operasi sebesar 85,34%, Belanja Modal sebesar 72,63%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 9,22%. Secara nominal, total

keseluruhan pagu anggaran belanja pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp15,36 triliun, lebih rendah dibandingkan total keseluruhan pagu anggaran belanja pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp15,42 triliun. Hal ini sejalan dengan semangat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2025.

Realisasi Belanja Operasi tercatat 85,34% dari pagu anggaran atau sebesar Rp10,12 triliun. Pencapaian realisasi tersebut lebih rendah baik secara nominal maupun persentase dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai 94,65% atau Rp11,16 triliun. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Operasi didominasi pos Belanja Pegawai yang merupakan penyumbang terbesar dengan porsi 45,62% dari pagu anggaran, mencapai realisasi 89,64% atau sebesar Rp5,84 triliun. Realisasi pada pos Belanja Pegawai secara nominal meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp5,67triliun namun secara persentase menurun yang tercatat mencapai 100,27% pada triwulan IV 2024. Penurunan realisasi pos Belanja Operasi juga didorong oleh penurunan realisasi pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Bunga, pos Belanja Subsidi, pos Belanja Hibah, dan pos Belanja Bantuan Sosial. Hal ini mengindikasikan penggunaan biaya untuk belanja barang dan jasa lebih efisien, sejalan dengan arahan presiden untuk realokasi belanja daerah.

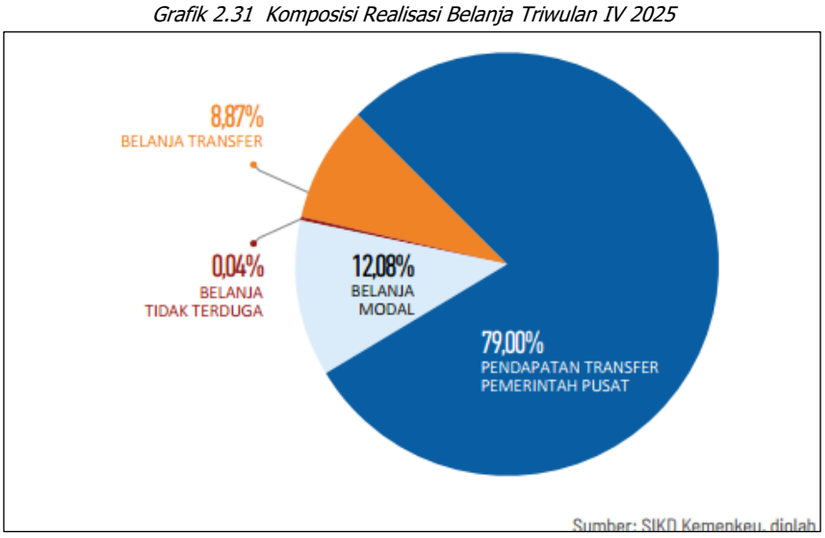
Persentase realisasi Belanja Modal pada triwulan IV 2025 tercatat 72,63% dari pagu anggaran, tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 86,61%. Secara nominal pagu pada pos Belanja Modal mengalami sedikit penurunan menjadi Rp2,13 triliun pada tahun 2025, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang tercatat Rp2,14 triliun. Pangsa Pos Belanja Modal sebesar 12,08% terhadap seluruh pos anggaran belanja, atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 12,92%. Realisasi pos Belanja Modal pada triwulan IV 2025 secara nominal tercatat melandai yakni sebesar Rp1,54 triliun, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat Rp1,85 triliun. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Tabel 2.30 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2025

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Belanja Operasi	**11.867,14**	**77,24%**	**10.127,36**	**85,34%**	**79,00%**
Belanja Pegawai	6.523,23	42,46%	5.847,48	89,64%	
Belanja Barang dan Jasa	4.743,50	30,87%	3.793,90	79,98%	
Belanja Bunga	0,00	0,00%	0,33	0,00%	
Belanja Subsidi	13,16	0,09%	6,97	52,96%	
Belanja Hibah	553,25	3,60%	458,68	82,91%	
Belanja Bantuan Sosial	34,00	0,22%	20,00	58,82%	
Belanja Modal	**2.132,94**	**13,88%**	**1.549,16**	**72,63%**	**12,08%**
Belanja Tidak Terduga	**61,92**	**0,40%**	**5,71**	**9,22%**	**0,04%**
Belanja Transfer	**1.302,30**	**8,48%**	**1.136,95**	**87,30%**	**8,87%**
Belanja Bagi Hasil	758,44	4,94%	677,93	89,38%	
Belanja Bantuan Keuangan	543,86	3,54%	459,02	84,40%	
TOTAL BELANJA	**15.364,30**	**100,00%**	**12.819,18**	**83,43%**	
SURPLUS/DEFISIT	**-514,14**		**-168,62**		
Pembiayaan Neto	**513,64**		**351,34**	**68,40%**	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	521,14		358,09	68,71%	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7,50		6,75	90,00%	
SILPA TAHUN BERKENAAN	**-0,50**		**182,72**		

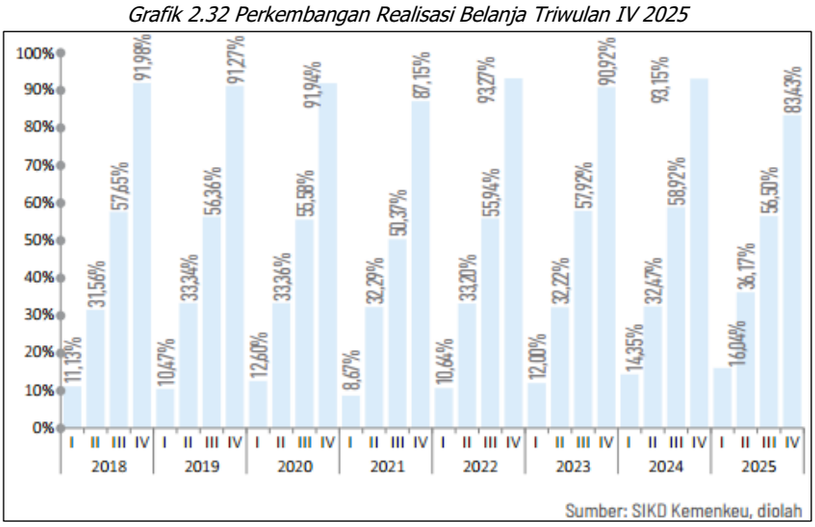
Sumber: SIKD Kemenkeu, diolah

Grafik 2.31 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan IV 2025



Pagu pos Belanja Transfer pada triwulan IV 2025 tercatat Rp1,30 triliun, lebih rendah dibandingkan pagu pada triwulan IV 2024 yang tercatat Rp1,41 triliun. Realisasi Belanja Transfer pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp1,13 triliun atau 87,30% dari pagu anggaran, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,33 triliun atau 94,23% dari pagu anggaran. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan dengan realisasi pada pos Belanja Bagi Hasil yang tercatat 89,38% atau sebesar Rp677,93 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 92,45% atau Rp790,51 miliar, serta penurunan realisasi pada pos Belanja Bantuan Keuangan yang tercatat 84,40% atau sebesar Rp459,02 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 96,92% atau Rp546,76 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melakukan pengetatan atau efisiensi anggaran pada pos yang sifatnya transfer ke pihak lain sebagai respon dari kebijakan pemerintah pusat dalam realokasi anggaran sehingga terjadi pergeseran prioritas belanja untuk lebih fokus ke program strategis.

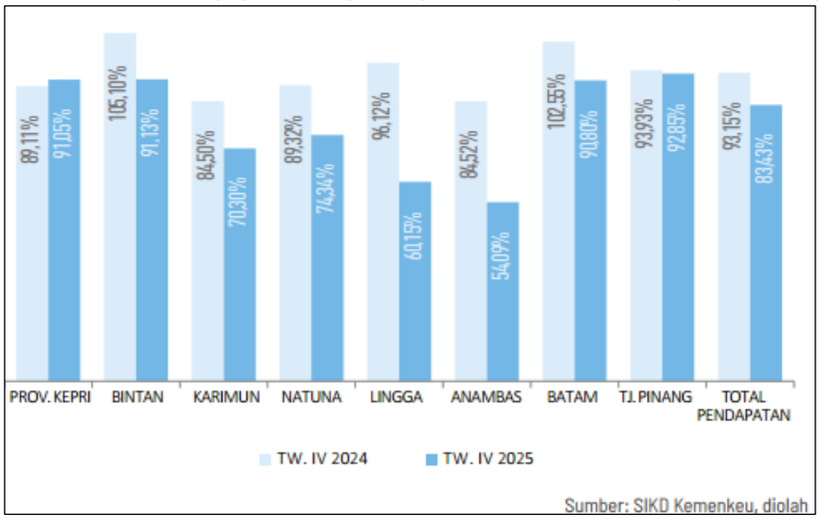
Grafik 2.32 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan IV 2025



Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi belanja pada triwulan IV 2025 pemerintah daerah se-Provinsi Kepri mencapai 83,43% dari pagu anggaran. Secara persentase, pencapaian realisasi Belanja pemerintah daerah se-Provinsi Kepri tertinggi dicapai oleh Kota Tanjungpinang, diikuti persentase realisasi belanja Kabupaten Bintan dan persentase realisasi belanja Provinsi Kepri. Capaian realisasi Kota Tanjungpinang tercatat 92,85% dari pagu anggaran atau sebesar Rp961,97 miliar. Lebih lanjut, capaian realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bintan tercatat sebesar Rp1,24 triliun atau 91,13% dari pagu anggaran dan capaian realisasi belanja Provinsi Kepri tercatat sebesar Rp3,58

triliun atau sebesar 91,05% dari pagu anggaran. Meski demikian, Kota Batam memiliki pangsa realisasi belanja terbesar untuk seluruh pemerintah daerah di Kepri dengan pangsa sebesar 31,26%.

Grafik 2.33 Realisasi Belanja pada masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri



2.1.6 Anggaran dan Realisasi APBN di Wilayah Kepri

Secara keseluruhan pada 2025, target pendapatan APBN di Kepri meningkat, namun target belanja APBN tercatat menurun dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan kebijakan realokasi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat. Pada tahun 2025, target Pendapatan APBN mengalami peningkatan tercatat sebesar Rp18,05 triliun dari Rp14,92 triliun pada tahun 2024. Sementara, target Belanja APBN mengalami penurunan menjadi sebesar Rp16,40 triliun dari Rp18,64 triliun pada tahun 2024. Peningkatan target anggaran Pendapatan terutama terjadi pada pos Penerimaan Perpajakan dengan target menjadi Rp15,38 triliun. Sementara itu, penurunan anggaran Belanja terutama terjadi pada pos anggaran Belanja Pemerintah Pusat menjadi Rp8,35 triliun pada triwulan IV 2025 dari Rp10,45 triliun pada triwulan IV 2024.

Realisasi pendapatan APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat 78,92%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 93,26% dari pagu anggaran. Persentase realisasi yang menurun ini terjadi pada pos Penerimaan Perpajakan dan pos PNBP sejalan dengan target pendapatan yang meningkat. Persentase realisasi pada pos Penerimaan Perpajakan tercatat 73,37% dari pagu, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 86,96% dari pagu. Selanjutnya, pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan persentase realisasi 110,84% pada triwulan IV 2025, lebih rendah dari 121,73% pada triwulan IV 2024. Meskipun demikian, secara nominal realisasi pendapatan APBN tercatat sebesar 14,25 triliun pada triwulan IV 2025, meningkat dari triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar Rp13,91 triliun sejalan dengan peningkatan target pendapatan APBN. Hal ini menunjukkan optimisme pemerintah daerah terhadap ekspansi ekonomi yang diharapkan terdapat peningkatan realisasi pendapatan.

Dengan target penerimaan pajak yang meningkat pada tahun 2025, secara umum pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh 6,24% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan realisasi pada pos Pajak Dalam Negeri yang tercatat Rp10,37 triliun, pos Pajak Penghasilan yang tercatat Rp9,01 triliun, pos Pajak Pertambahan Nilai yang tercatat sebesar Rp1 triliun, pos Pajak Perdagangan Internasional yang tercatat sebesar Rp908,87 miliar, tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Di sisi lain, persentase realisasi pendapatan APBN pada pos PNBP triwulan IV 2025 tercatat mengalami kontraksi 10% (yoy) atau sebesar Rp2,96 triliun. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan IV tahun 2024 yang tercatat 121,73% dari target atau sebesar Rp3,29 triliun. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Pendapatan BLU yang

terkontraksi, tercatat Rp2,15 triliun pada triwulan IV 2025, lebih rendah dari triwulan IV 2024 yang tercatat Rp2,48 triliun, sejalan dengan penurunan target dari pos Pendapatan BLU. Sementara itu, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh realisasi pada PNBP Lainnya yang secara nominal tercatat Rp811,44 miliar atau 155,28% dari target, tumbuh 0,47% (yoy).

Tabel 2.34 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Wilayah Provinsi Kepri

Uraian	2024 (Miliar Rp)			2025 (Miliar Rp)			Pertumbuhan %
	Pagu	Realisasi Triwulan IV 2024	% Realisasi	Target	Realisasi Triwulan IV 2025	% Realisasi	
A. Pendapatan Negara	**14.923,24**	**13.918,04**	**93,26%**	**18.057,64**	**14.250,80**	**78,92%**	**2,39%**
I Penerimaan Perpajakan	**12.216,15**	**10.622,62**	**86,96%**	**15.381,79**	**11.285,00**	**73,37%**	**6,24%**
1 Pajak Dalam Negeri	11.656,95	10.002,41	85,81%	14.945,52	10.376,13	69,43%	3,74%
a. Pajak Penghasilan	10.301,22	8.791,77	85,35%	10.927,67	9.019,49	82,54%	2,59%
b. Pajak Pertambahan Nilai	1.205,55	1.050,51	87,14%	3.960,47	1.002,76	25,32%	-4,54%
c. Pajak Bumi dan Bangunan	29,39	32,48	110,49%	13,41	12,11	90,29%	-62,72%
d. Cukai	37,40	39,53	105,71%	33,30	74,72	224,36%	89,00%
e. Pajak Lainnya	83,39	88,12	105,67%	10,66	267,06	2504,73%	203,06%
2 Pajak Perdagangan Internasional	559,20	620,21	110,91%	436,28	908,87	208,32%	46,54%
II PNBP	**2.707,09**	**3.295,42**	**121,73%**	**2.675,85**	**2.965,80**	**110,84%**	**-10,00%**
1 Pendapatan Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Pendapatan BLU	2.311,07	2.487,77	107,65%	2.153,28	2.154,36	100,05%	-13,40%
4 PNBP Lainnya	396,02	807,65	203,94%	522,57	811,44	155,28%	0,47%
III Hibah	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
B. Belanja Negara	**18.635,93**	**17.920,22**	**96,16%**	**16.403,89**	**15.212,57**	**92,74%**	**-15,11%**
I. Belanja Pemerintah Pusat	**10.454,64**	**9.883,69**	**94,54%**	**8.352,73**	**7.337,37**	**87,84%**	**-25,76%**
1 Belanja Pegawai	2.263,90	2.281,13	100,76%	2.442,23	2.406,84	98,55%	5,51%
2 Belanja Barang	4.780,26	4.381,02	91,65%	4.252,55	3.714,99	87,36%	-15,20%
3 Belanja Modal	3.147,76	2.974,98	94,51%	1.399,95	971,46	69,39%	-67,35%
4 Belanja Bansos	7,82	7,70	98,43%	11,15	11,02	98,88%	43,23%
5 Belanja Lainnya	254,91	238,86	93,70%	246,86	233,04	94,40%	-2,44%
II. Transfer ke Daerah (TKD)	**8.181,29**	**8.036,53**	**98,23%**	**8.051,16**	**7.875,20**	**97,81%**	**-2,01%**
1 DAU	1.149,18	1.149,09	99,99%	1.172,77	1.097,83	93,61%	-4,46%
2 Dana Bagi Hasil	4.817,40	4.748,06	98,56%	4.840,15	4.783,13	98,82%	0,74%
3 DAK Fisik	648,36	602,83	92,98%	274,91	264,01	96,03%	-56,21%
4 DAK Non Fisik	1.245,31	1.219,10	97,89%	1.427,80	1.403,51	98,30%	15,13%
5 Dana Insentif Fiskal	227,05	226,46	99,74%	218,00	209,20	95,96%	-7,62%
6 Dana Desa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7 Transfer Hibah	93,99	90,98	96,80%	117,53	117,53	100,00%	29,18%
C. SURPLUS/(DEFISIT)	**-3.712,69**	**-4.002,18**	**107,80%**	**1.653,75**	**-961,76**	**-58,16%**	**-75,97%**

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 mencapai 92,74% dari pagu atau sebesar Rp15,21 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 96,16% dari pagu atau sebesar Rp17,92 triliun. Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 terkontraksi 15,11% (yoy) yang disebabkan oleh efisiensi belanja pada satuan kerja. Penurunan realisasi terjadi pada pos Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) yang masing-masing hanya mencapai 87,84% dan 97,81% dari target, lebih rendah dari triwulan IV 2024 yang masing-masing tercapai 94,54% dan 98,23% dari target. Penurunan komponen Belanja Pemerintah Pusat terutama terjadi pada Belanja Modal yang terkontraksi 67,35% (yoy), disusul Belanja Barang yang terkontraksi 15,20% (yoy) dan Belanja Lainnya yang terkontraksi 2,44% (yoy). Di samping itu, komponen Transfer ke Daerah (TKD) pada triwulan IV 2025 terkontraksi sebesar 2,01% (yoy) terutama disebabkan oleh penurunan pada DAK Fisik yang terkontraksi 56,21% (yoy), Dana Desa yang terkontraksi 7,62% (yoy), dan Dana Bagi Hasil yang terkontraksi sebesar 4,46% (yoy). Meski demikian, terjadi peningkatan realisasi Dana Insentif Fiskal, DAK Non Fisik, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berturut-turut sebesar 29,18% (yoy), 15,13% (yoy), dan 0,74% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh relaksasi kebijakan efisiensi TKD dan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan anggaran mendukung program strategis daerah dan nasional.

Realisasi anggaran belanja infrastruktur APBN di Kepri telah terserap 75,28% atau Rp823,19 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 96,28% atau sebesar Rp1,76 triliun. Postur APBN pendukung proyek infrastruktur Kepri utamanya ditopang oleh realisasi proyek program konektivitas laut yang tercatat mencapai 98,29% dari pagu anggaran atau sebesar Rp200,54 miliar. Pengembangan konektivitas laut tersebut meningkat sejalan dengan lanjutan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan pelabuhan, pengembangan pelabuhan bongkar muat Batu Ampar, pembangunan pelabuhan kapal ikan, dan peningkatan Jalan Pelabuhan Parit I di Kab. Karimun. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercapai 86,57%. Realisasi terbesar kedua adalah realisasi proyek Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan realisasi sebesar 98,28%, proyek Konektivitas Udara sebesar 83,97%, dan proyek Konektivitas Darat sebesar 61,00%.

Tabel 2.35 Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Proyek	Triwulan IV 2024			Triwulan IV 2025		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Konektivitas Udara	64,06	58,54	91,38%	20,19	16,96	83,97%
2	Konektivitas Laut	412,68	344,04	86,57%	204,03	200,54	98,29%
3	Konektivitas Darat	1.149,88	1.141,70	99,29%	667,14	406,96	61,00%
4	Program Ketahanan Sumber Daya Air	221,08	219,92	99,48%	202,21	198,74	98,28%
	Total	**1.847,70**	**1.764,22**	**96,28%**	**1.093,57**	**823,19**	**75,28%**

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

2.1.7 Perkembangan Inflasi



Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,70% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi utamanya didorong oleh peningkatan andil inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada Triwulan IV 2025 masih berada dalam target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).

Inflasi Kepri Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,70% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi

terutama didorong oleh andil Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,49% (yoy), Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memberikan andil 1,06% (yoy), Kelompok Transportasi yang memberikan andil 0,29% (yoy), Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang memberikan andil 0,26% (yoy), serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan andil 0,16% (yoy). Secara spasial, inflasi meningkat pada dua kota cakupan IHK sedangkan 1 kabupaten IHK di Kepri mengalami penurunan inflasi. Di Kota Batam inflasi tercatat lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni dari 2,82% (yoy) menjadi 3,67% (yoy). Di Kota Tanjungpinang inflasi tercatat 2,75% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,82% (yoy). Sementara itu, inflasi di Kabupaten Karimun tercatat sebesar 2,72% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi 2,91% (yoy). Pada periode yang sama, inflasi Nasional meningkat dari 2,65% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi sebesar 2,92% (yoy) pada Triwulan IV 2025.

Secara bulanan, IHK Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,14% (mtm), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,64% (mtm). Inflasi bulanan pada triwulan IV 2025 terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi 2,91% (mtm) dengan andil 0,85% (mtm). Kenaikan pada kelompok ini didorong oleh meningkatnya harga cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bayam, kangkung, buncis, bawang merah, dan telur ayam ras. Peningkatan harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan akibat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah sentra produksi. Sementara itu, kenaikan harga sayuran seperti kangkung, bayam, dan sawi hijau didorong oleh pasokan yang terbatas seiring mulai memasuki musim hujan yang meningkatkan kelembapan dan mengakibatkan sayuran lebih cepat rusak. Selain itu, kenaikan harga daging ayam ras sejalan dengan naiknya konsumsi menjelang HBKN Nataru, serta adanya kenaikan biaya produksi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan.

Penyebab inflasi juga berasal dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat inflasi sebesar 1,63% (mtm) dengan andil 0,12% (mtm), sejalan dengan kenaikan harga emas perhiasan yang mengikuti tren harga emas global di tengah dinamika ketidakpastian global, termasuk ketegangan geopolitik dan kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Kelompok Transportasi turut mencatatkan inflasi sebesar 1,13% (mtm) dengan andil 0,16% (mtm), terutama dipengaruhi oleh peningkatan tarif angkutan udara seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata pada periode libur Nataru.

Tabel 2.36 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kab. Karimun (%, yoy)

Kelompok	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Inflasi Nasional	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	1,57	1,03	1,87	2,65	2,92
Inflasi Kepri	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09	2,01	1,32	2,70	3,47
Inflasi Tanjungpinang	4,28	1,78	1,53	2,14	2,68	2,97	1,36	1,53	0,07	0,07	1,82	2,75
Inflasi Batam	4,83	2,75	2,12	2,85	3,56	3,71	2,76	2,24	2,53	1,68	2,82	3,67
Inflasi Karimun					2,57	2,79	2,04	1,57	0,15	-0,15	2,91	2,72

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 2.37 Penyumbang Inflansi Bulanan Provinsi Kepri Desember 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Inflasi (%, mtm)
1	Cabai Rawit	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,21
2	Angkutan Udara	Transportasi	0,16
3	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,13
4	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,13
5	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,07
6	Bayam	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,06
7	Kangkung	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,05
8	Buncis	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,04
9	Bawang Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,04
10	Telur Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,03

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 2.38 Penyumbang Deflasi Bulanan Provinsi Kepri Desember 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (%, mtm)
1	Angkutan Laut	Transportasi	-0,02
2	Ikan Selar/ Ikan Tude	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
3	Sabun Mandi Cair	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	-0,01
4	Kentang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,005
5	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,004
6	Jeruk	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,003
7	Mie Kering Instant	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,003
8	Susu Bubuk Untuk Balita	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,003
9	Santan Segar	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,003
10	Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	-0,003

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 2.39 Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi Kepri Desember 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (%, yoy)
1	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	1,01
2	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,48
3	Angkutan Udara	Transportasi	0,23
4	Cabai Rawit	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,21
5	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,20
6	Sewa Rumah	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,14
7	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,11
8	Akademi/Perguruan Tinggi	Pendidikan	0,08
9	Nasi Dengan Lauk	Penyediaan Makanan Dan Minuman/ Restoran	0,06
10	Daging Sapi	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,06

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 2.40 Penyumbang Deflasi Tahunan Provinsi Kepri Desember 2025

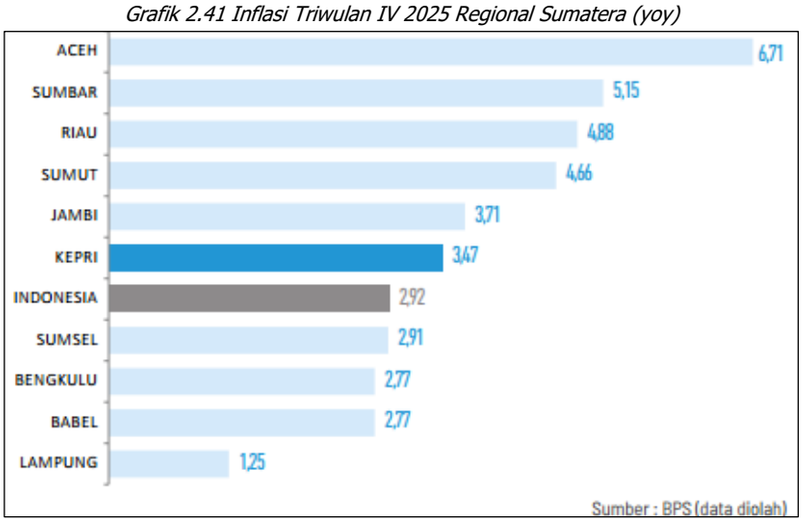
No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (%, mtm)
1	Bawang Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,14
2	Tomat	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,06
3	Bawang Putih	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,04
4	Angkutan Laut	Transportasi	-0,02
5	Sabun Mandi Cair	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	-0,02
6	Kacang Panjang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
7	Sawi Hijau	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
8	Susu Bubuk Untuk Balita	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
9	Ikan Kembung/Ikan Gembung/ Ikan Banyar/Ikan Gembolo/ Ikan Aso-Aso	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
10	Ayam Hidup	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01

Sumber: BPS (data diolah)

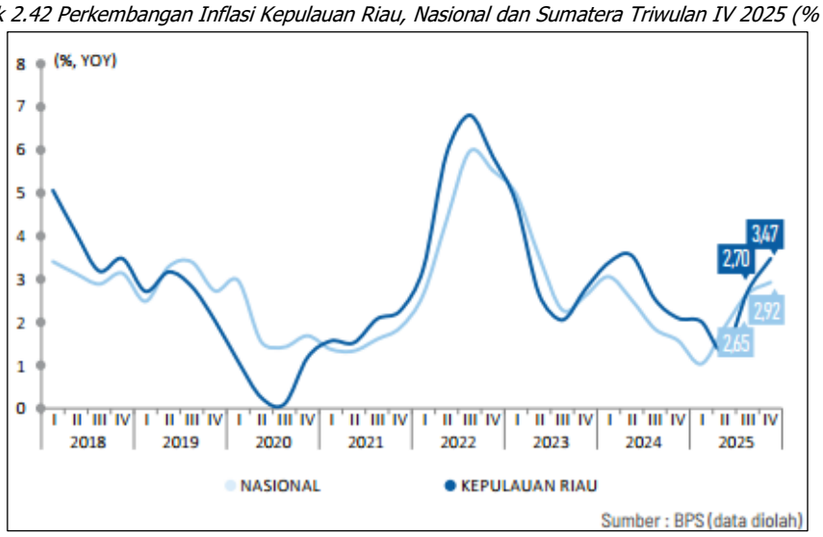
2.1.8 Perkembangan Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Berdasarkan perkembangan inflasi kelompok barang dan jasa, peningkatan tekanan inflasi Kepri pada Triwulan IV 2025 terutama didorong oleh Kelompok kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat inflasi 5,07% (yoy) dengan andil 1,49% (yoy). Kelompok Perawatan dan Jasa Pribadi Lainnya turut mengalami inflasi sebesar 16,68% (yoy) dengan andil 1,06% (yoy). Selain itu, Kelompok Transportasi juga mengalami inflasi 2,11% (yoy) dengan andil 0,29% (yoy).

Grafik 2.41 Inflasi Triwulan IV 2025 Regional Sumatera (yoy)



Grafik 2.42 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan IV 2025 (% yoy)



Tekanan inflasi pada Kelompok Makanan minuman dan tembakau memberikan andil sebesar 1,49% (yoy) disebabkan oleh kenaikan harga cabai merah sebesar 0,48% (yoy), cabai rawit 0,21% (yoy), daging ayam ras 0,20% (yoy), sigaret kretek mesin (SKM) 0,11% (yoy), dan daging sapi 0,06% (yoy). Inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh kenaikan harga perhiasan sejalan dengan tren meningkatnya harga emas global yang ditengah ketidakpastian global yang dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik serta ketidakpastian kebijakan perdagangan, termasuk penetapan tarif resiprokal. Sementara itu, inflasi pada kelompok transportasi disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara dengan andil 0,23% (yoy) sejalan dengan meningkatnya permintaan dan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Nataru

Tabel 2.43 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% yoy)

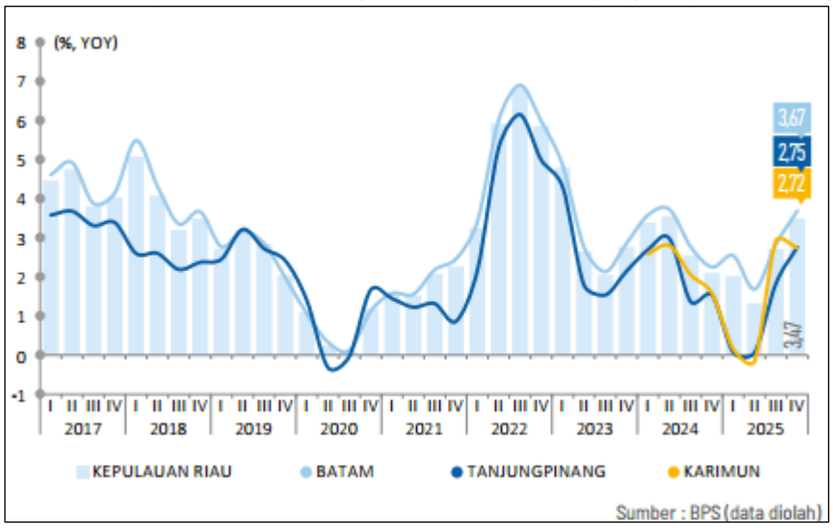
No	Kelompok	2024								2025							
		I		II		III		IV		I		II		III		IV	
		Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,87	6,38	1,87	6,48	1,00	3,46	0,72	2,46	0,69	2,31	-0,14	-0,48	1,42	4,86	1,49	5,07
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,16	3,35	0,15	3,26	0,12	2,51	0,10	2,11	0,06	1,19	0,02	0,41	0,05	1,12	0,06	1,21
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,16	0,98	0,14	0,90	0,39	2,42	0,42	2,65	0,25	1,61	0,45	2,84	0,17	1,04	0,16	0,99
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,01	0,23	-0,02	-0,41	0,00	0,10	-0,01	-0,22	-0,01	-0,25	0,00	-0,03	-0,01	-0,18	0,01	0,21
5	Kesehatan	0,09	3,53	0,09	3,45	0,09	3,62	0,10	4,24	0,01	0,52	0,03	1,07	0,04	1,66	0,04	1,79
6	Transportasi	0,60	4,33	0,56	4,04	0,47	3,39	0,30	2,13	0,24	1,71	0,17	1,25	-0,09	-0,66	0,29	2,11
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,04	-0,01	-0,10	-0,01	-0,10	-0,01	-0,12	-0,01	-0,09	0,00	-0,01
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,01	-0,35	0,00	-0,09	0,00	-0,14	0,01	0,38	0,01	0,73	0,01	0,54	0,01	0,53	0,01	0,33
9	Pendidikan	0,17	2,49	0,17	2,49	-0,13	-1,92	-0,13	-1,84	-0,13	-1,87	-0,13	-1,84	0,09	1,40	0,09	1,37
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,10	1,03	0,18	1,86	0,14	1,51	0,13	1,42	0,29	3,07	0,23	2,45	0,25	2,57	0,26	2,79
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,26	4,34	0,40	6,66	0,45	7,50	0,46	7,53	0,61	10,03	0,69	11,06	0,78	12,40	1,06	16,68
	Umum	3,37		3,54		2,53		2,09		2,01		1,32		2,70		3,47	

Sumber: BPS (data diolah)

2.1.9 Perkembangan Inflasi Menurut Kota/Kabupaten

Secara spasial, ketiga Kota/Kabupaten IHK di Kepri yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun pada Triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi. Inflasi Kota Batam tercatat sebesar 3,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,82% (yoy). Tekanan inflasi juga terjadi di Kota Tanjungpinang dengan inflasi sebesar 2,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,82% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Karimun mencatatkan inflasi sebesar 2,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,91% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, inflasi Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,70% (yoy).

Grafik 2.44 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang dan Karimun (% yoy)



2.1.9.1 Inflasi Kota Batam

Secara tahunan, Kota Batam pada Triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 3,68% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,82% (yoy). Tekanan Inflasi tersebut disebabkan oleh meningkatnya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 5,17% (yoy) dengan andil 1,49% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 4,94% (yoy) dengan andil 1,41% (yoy). Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya tercatat sebesar 18,03% (yoy) dengan andil 1,13% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang mencatatkan inflasi 13,62% (yoy) dengan andil 0,84% (yoy). Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran juga mengalami inflasi sebesar 3,38% (yoy) dengan andil 0,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,96%(yoy) dengan andil 0,27% (yoy).

Secara bulanan, Kota Batam pada Desember 2025 tercatat inflasi sebesar 1,14% (mtm), lebih tinggi dibandingkan September 2025 sebesar 0,62% (mtm) terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Transportasi, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat mengalami inflasi 2,88% (mtm) dengan andil 0,83% (mtm), didorong oleh kenaikan harga cabai rawit yang memberikan andil 0,19% (mtm), daging ayam ras sebesar 0,15% (mtm); cabai merah sebesar 0,08% (mtm), bayam sebesar 0,06% (mtm), dan kangkung sebesar 0,06% (mtm). Tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi sebesar 1,41% (mtm) dengan andil 0,19% (mtm) sejalan dengan kenaikan tarif angkutan udara akibat tingginya permintaan masyarakat pada periode HBKN Nataru. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut mengalami inflasi sebesar 1,63% (mtm) dengan andil 0,12% (mtm) sejalan dengan kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil 0,13% (mtm) di tengah berlanjutnya ketidakpastian global. Sementara itu, peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan dengan penurunan harga pada Kelompok Kesehatan serta Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang masing - masing tercatat mengalami deflasi sebesar 0,03% (mtm) dan 0,06% (mtm).

2.1.9.2 Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada Triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 2,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,82% (yoy). Tekanan inflasi tersebut didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat inflasi 4,97% (yoy) dengan andil 1,42% (yoy) sejalan dengan kenaikan harga komoditas pokok seperti cabai merah, cabai rawit, ikan selar/tude, dan daging ayam ras. Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya tercatat inflasi sebesar 15,82% (yoy) dengan andil 0,99% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 10,53% (yoy) dengan andil 0,66% (yoy). Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga emas perhiasan

sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian global, terutama dinamika geopolitik. Kelompok Transportasi turut menjadi pendorong inflasi dengan nilai sebesar 3,36% (yoy) dan andil 0,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,50% (yoy) dengan andil 0,22% (yoy). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara pada periode HBKN Nataru.

Secara bulanan, inflasi Kota Tanjungpinang pada Desember 2025 meningkat menjadi 1,28% (mtm), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,54% (mtm). Kenaikan ini didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,78% (mtm) dengan andil 1,07% (mtm), Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 2,10% (mtm) dengan andil 0,15% (mtm), serta Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,69% (mtm) dengan andil 0,03% (mtm). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas seperti cabai rawit dengan andil 0,20% (mtm), bawang merah dengan andil 0,14% (mtm), emas perhiasan dengan andil 0,13% (mtm), daging ayam ras dengan andil 0,12% (mtm), wortel dengan andil 0,07% (mtm), dan gula pasir dengan andil 0,06% (mtm). Sementara itu, tekanan inflasi lebih tinggi tertahan dengan penurunan beberapa komoditas antara lain santan segar, angkutan laut, udang basah, ikan tamban, susu cair kemasan, dan ikan tongkol.

2.1.9.3 Inflasi Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun pada Triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 2,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,91% (yoy). Kondisi tersebut terutama didorong oleh inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat sebesar 4,42% (yoy) dengan andil 1,69% (yoy) sejalan dengan kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah dengan andil 0,74% (yoy), cabai rawit dengan andil 0,35% (yoy), ikan mata besar dengan andil 0,12% (yoy), sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil 0,10% (yoy), dan telur ayam ras dengan andil 0,09% (yoy). Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga mengalami peningkatan inflasi menjadi 7,87% (yoy) dengan andil 0,62% (yoy) dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas global di tengah dinamika geopolitik yang masih berlanjut. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tercatat inflasi sebesar 2,58% (yoy) dengan andil 0,18% (yoy), terutama disebabkan oleh kenaikan harga nasi dengan lauk dengan andil inflasi 0,08% (yoy). Lebih lanjut, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki juga tercatat inflasi 2,79% (yoy) dengan andil 0,17% (yoy).

Tekanan inflasi pada Kabupaten Karimun secara bulanan tercatat sebesar 0,92% (mtm) terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat inflasi sebesar 2,13% (mtm) dengan andil 0,81% (mtm). Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai rawit dengan andil 0,36% (mtm), bawang merah dengan andil 0,18% (mtm), telur ayam ras dengan andil 0,07% (mtm), daging ayam ras dengan andil 0,05% (mtm), dan sawi hijau dengan andil 0,04% (mtm). Lebih lanjut, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut mengalami inflasi sebesar 1,01% (mtm) dengan andil 0,08% (mtm) utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga emas. Sementara itu, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan dengan penurunan harga pada Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya, Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga, Kelompok Kesehatan, Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya, serta Kelompok Transportasi.

Tabel 2.45 Andil Inflasi menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% -yoy)

Periode	III-2024			IV-2024			I-2025			II-2025			III-2025			IV-2025		
Kelompok Komoditas	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,97	0,77	1,59	0,64	1,01	1,09	0,77	0,47	0,31	-0,04	-0,33	-0,53	1,40	1,17	1,88	1,48	1,42	1,68
Pakaian dan Alas Kaki	0,16	-0,16	0,12	0,15	-0,25	0,10	0,12	-0,39	0,07	0,09	-0,49	0,07	0,12	-0,47	0,15	0,11	-0,38	0,17
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan bakar	0,51	-0,01	-0,14	0,55	0,01	-0,12	0,55	-0,90	-0,73	0,56	0,09	-0,11	0,19	0,09	0,03	0,18	0,10	0,02
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,00	0,04	-0,02	0,00	0,04	-0,12	-0,01	0,00	-0,05	0,01	-0,03	-0,08	0,00	-0,03	-0,07	0,01	-0,01	0,00
Kesehatan	0,07	0,15	0,19	0,09	0,16	0,18	0,01	0,04	0,02	0,02	0,05	0,01	0,05	0,05	0,01	0,05	0,03	0,00
Transportasi	0,57	0,16	0,04	0,33	0,15	0,19	0,22	0,38	0,21	0,16	0,26	-0,11	-0,17	0,22	0,17	0,29	0,49	0,04
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,03
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,03
Pendidikan	-0,11	-0,14	-0,34	-0,11	-0,09	-0,34	-0,11	-0,11	-0,34	-0,11	-0,09	-0,34	0,09	0,13	0,06	0,10	0,08	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,11	0,16	0,41	0,11	0,12	0,42	0,31	0,12	0,33	0,24	0,04	0,42	0,27	0,02	0,28	0,31	0,02	0,18
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,49	0,37	0,19	0,50	0,38	0,19	0,66	0,46	0,35	0,74	0,56	0,34	0,84	0,66	0,47	1,12	0,99	0,62
Umum	**2,76**	**1,36**	**2,04**	**2,24**	**1,53**	**1,57**	**2,53**	**0,07**	**0,15**	**1,68**	**0,07**	**-0,15**	**2,82**	**1,82**	**2,91**	**3,67**	**2,75**	**2,72**

Sumber: BPS (data diolah)

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tercatat inflasi sebesar 3,99% (yoy) dengan andil 0,28% (yoy), terutama disebabkan oleh kenaikan harga nasi dengan lauk dengan andil inflasi 0,18% (yoy), dan sate, ayam goreng, ketupat/lontong sayur, dan bakso siap santap yang masing-masing tercatat inflasi dengan andil 0,02% (yoy). Lebih lanjut, Kelompok Transportasi juga tercatat inflasi 1,41% (yoy) dengan andil 0,17% (yoy), lebih tinggi dan berbeda arah dari triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,93% (yoy) dengan andil 0,11% (yoy). Tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi meningkat terutama disebabkan oleh kenaikan harga jasa angkutan penumpang yang dominan berasal dari komoditas tarif angkutan laut yang tercatat andil 0,12% (yoy).

2.1.10 Arah Perkembangan Inflasi

Inflasi Provinsi Kepri pada Triwulan I 2026 diprakirakan masih berada pada rentang kisaran sasaran inflasi 2025 yakni 2,5±1%, mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga. Tekanan inflasi pada Triwulan I 2026 diprakirakan berada di titik tengah sasaran inflasi nasional dipengaruhi oleh normalisasi pasokan pangan pasca bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah sentra produksi serta diskon tarif angkutan udara dan laut pada periode HBKN. Di sisi lain, perlu diwaspadai risiko tekanan inflasi pada peningkatan harga emas perhiasan seiring peningkatan harga emas global di tengah tensi perang dagang yang masih berlanjut.

Berdasarkan realisasi inflasi hingga bulan Januari 2026, Kepri mengalami deflasi sebesar 0,09% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 1,14% (mtm).Sementara itu, inflasi secara tahunan tercatat sebesar 2,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,47% (yoy). Deflasi pada Januari 2026 terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami deflasi 1,31% (mtm) dengan andil sebesar -0,40% (mtm) sejalan dengan pulihnya pasokan komoditas pangan pasca bencana di sejumlah wilayah sentra produksi serta normalisasi permintaan pasca HBKN Nataru. Lebih lanjut, Kelompok Transportasi turut mengalami deflasi 0,43% (mtm) dengan andil 0,06% (mtm) dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan udara seiring berakhirnya lonjakan permintaan dan masih berlakunya diskon tarif periode Nataru hingga Januari 2026. Di sisi lain, deflasi bulanan yang lebih dalam tertahan oleh Inflasi pada komoditas emas perhiasan, beras, sewa rumah, daging ayam ras, dan ketimun. Peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas global di tengah eskalasi ketegangan geopolitik. Sementara itu harga beras mengalami kenaikan didorong oleh kenaikan harga dari sentra produksi. Harga sewa rumah mengalami kenaikan seiring dengan penyesuaian tarif awal tahun dan peningkatan biaya termasuk penyesuaian upah. Sementara itu, harga daging ayam ras meningkat didorong oleh kenaikan biaya pakan ternak ditengah permintaan yang tetap terjaga. Adapun kenaikan harga ketimun didorong oleh terbatasnya pasokan.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh *base effect* realisasi inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2025. Sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun 2026 yang dapat meningkatkan tekanan inflasi antara lain: (i) Potensi kenaikan harga beberapa komoditas pangan sebagai dampak berlanjutnya ketegangan geopolitik seperti kenaikan harga beras dan pupuk; (ii) Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan pasokan domestik agar tidak menimbulkan tekanan harga; (iii) Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan ketidakpastian global; (iv) Risiko cuaca ekstrem atau anomali iklim yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan sehingga meningkatkan volatilitas harga komoditas pangan; (v) Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat namun berpotensi memberikan tekanan dari sisi permintaan (demand pull) apabila ketersediaan pasokan tidak seimbang. Di sisi lain, faktor yang dapat menahan peningkatan inflasi antara lain: (i) Tekanan inflasi kelompok *administered price* yang diprakirakan terkendali sejalan dengan diskon tarif tiket angkutan udara pada periode-periode HBKN serta normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan jumlah armada, rute, dan frekuensi penerbangan; (ii) Ekspektasi inflasi tetap terkendali didukung oleh konsistensi bauran kebijakan; (iii) Berlanjutnya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

2.1.11 Upaya Pengendalian Inflasi

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik. Dengan mengacu pada peta jalan (*roadmap*) pengendalian inflasi daerah tahun 2025, berbagai upaya dilakukan termasuk mealui strategi implementasi kerangka 4K yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV 2025 antara lain:

a. Keterjangkauan Harga

1) Sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar di berbagai wilayah Provinsi Kepri hingga Desember 2025.
2) Pengendalian ekspektasi melalui sidak pasar rutin untuk stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
3) Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan dalam rangka HBKN Nataru.
4) Koordinasi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Sembako Bersubsidi.

b. Ketersediaan Pasokan

1) Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) eksisting baik antar maupun intra provinsi. Terdapat penambahaan 9 (sembilan) KAD baru dengan skema *Business-to-Business* untuk komoditas bawang merah, beras, dan cabai
2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan *Capacity Building* KAD dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara.
3) Penguatan peran Asosiasi Distributor TPID Batam dalam penyediaan pasokan.
4) Penyaluran bantuan sarana dan prasarana pendukung produktivitas pangan untuk ketahanan pangan di daerah.

c. Kelancaran Distribusi

1) Penyaluran SPHP secara rutin di berbagai Kabupaten/Kota oleh BULOG.
2) Bazar Murah Rutin Kedai Pangan TPID Kab. Karimun.
3) Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan dalam rangka Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kepulauan Anambas, Tanjungpinang, dan Bintan.

d. Komunikasi Efektif

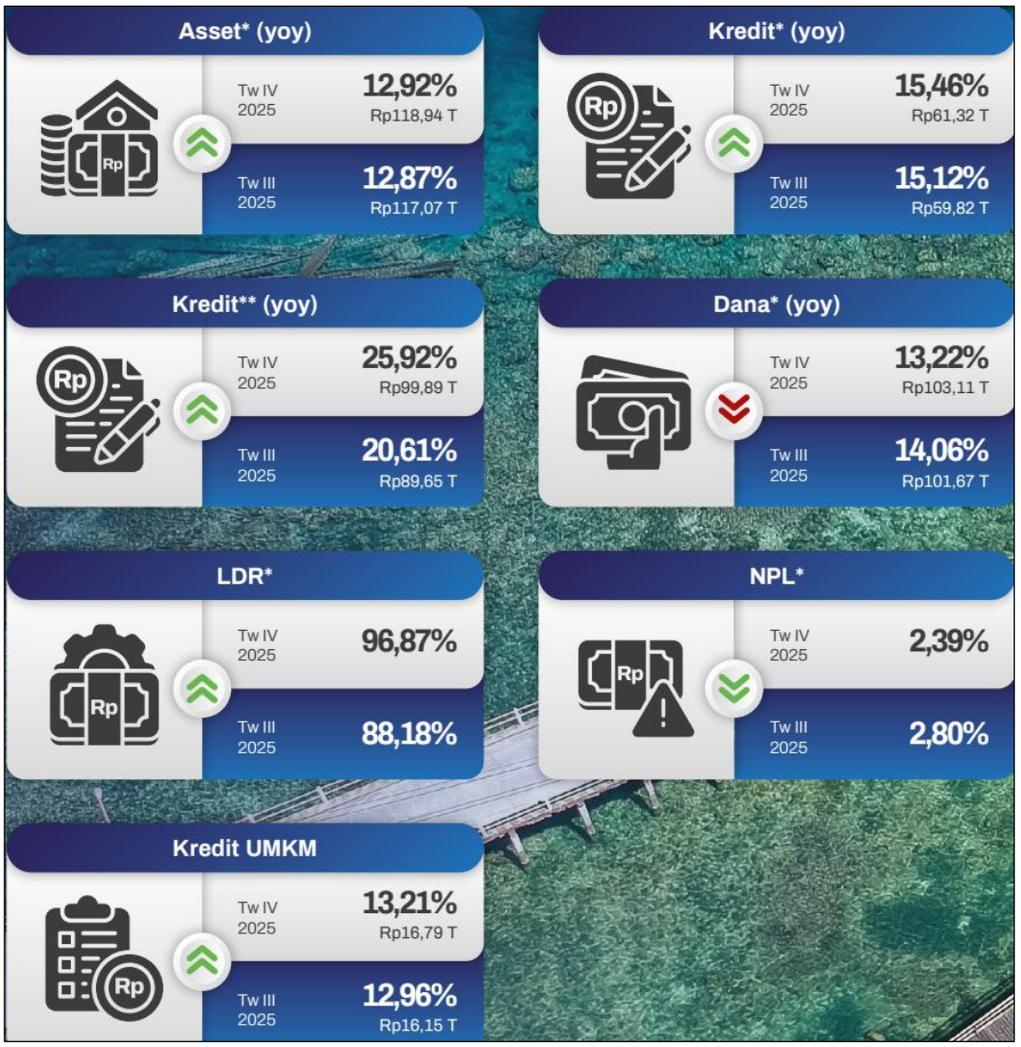
1) *High Level Meeting* TPID dan TP2DD, serta *High Level Meeting* Forkopimda Se-Provinsi Kepri.
2) Rapat Koordinasi *Dashboard* Pengendalian Inflasi Kabupaten Karimun.
3) Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
4) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulftiri 2025.
5) *Launching* Kedai Pangan TPID Kabupaten Karimun.
6) *Capacity Building* TPID Se-Provinsi Kepri, termasuk *Capacity Building* dengan TPID Jawa Tengah.
7) Bincang Media dalam rangka pengendalian ekspektasi inflasi di masyarakat.
8) Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulftiri 2025 Kota Batam.
9) Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Idul Adha 2025.
10) Koordinasi pelaksanaan *Capacity Building* TPID dan KAD dengan daerah penghasil.
11) Penyediaan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
12) Telah dilaksanakan program komunikasi rutin dan insidentil. Berbagai program tersebut diantaranya siaran pers inflasi, talkshow radio, sidak, iklan layanan masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat.
13) Pelatihan hilirisasi olahan cabai kepada Klaster/UMKM Binaan Bank Indonesia.
14) *High Level Meeting* dan Rapat Koordinasi Triwulan IV 2025.
15) Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Nataru 2025.
16) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasar Murah HBKN Nataru 2025.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah merancang dan melaksanakan sejumlah strategi untuk menghadapi tantangan inflasi ke depan, khususnya pada sektor pangan. Upaya pengendalian inflasi pangan tersebut ditempuh melalui implementasi 7 (tujuh) program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mencakup peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan komoditas pangan, optimalisasi kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar murah, digitalisasi data dan informasi, serta penguatan koordinasi dan komunikasi . Upaya ini diarahkan diantaranya melalui penguatan inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas petani. Program tersebut mencakup pemanfaatan *Internet of Things (IoT)* dalam budidaya hidroponik, integrasi data pertanian untuk mendukung akurasi informasi produksi dan distribusi, serta penyelenggaraan kelas digital atau *smart agriculture* guna memperluas akses edukasi bagi petani terkait praktik budidaya pangan yang lebih produktif dan efisien.

Di sisi lain, penguatan pasokan dilakukan melalui pembentukan *command center* Kerja Sama Antar Daerah (KAD). *Command center* KAD berperan sebagai pusat informasi dan koordinasi kebijakan dalam menjembatani kebutuhan antara daerah surplus dan defisit pangan. Melalui penguatan *command center* tersebut, integrasi data stok dan neraca pangan antarwilayah akan dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih terukur, responsif, dan tepat sasaran.

Selain itu, strategi ini juga didukung dengan penguatan infrastruktur dan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang dan jasa dapat berlangsung lebih lancar dan merata. Dengan kombinasi Langkah-langkah tersebut, diharapkan ketahanan pangan dan stabilitas harga di tingkat regional maupun nasional dapat terjaga, sekaligus memperkuat daya saing perekonomian di tengah dinamika global dan domestik yang penuh tantangan.

2.1.12 Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



Intermediasi perbankan pada triwulan IV 2025 menunjukan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari akselerasi pertumbuhan kredit dan aset yang disertai dengan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang lebih rendah. Adapun perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengindikasikan pergeseran penempatan dana di perbankan dari simpanan ke konsumsi.

Kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2025 membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan rasio NPL yang lebih rendah. Penyaluran kredit perbankan berdasarkan bank yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 15,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 15,12% (yoy). Sementara itu, jumlah kredit yang disalurkan kepada proyek yang berlokasi di Kepri tumbuh sebesar 25,92% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,61% (yoy). Total aset perbankan di Kepri tercatat tumbuh sebesar 12,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,87% (yoy). Di sisi penghimpunan dana, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 13,22% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,06% (yoy).

Kinerja intermediasi perbankan di Kepri tetap terjaga dan menunjukkan perbaikan. Berdasarkan proyek yang berlokasi di Kepri, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Kepri tercatat sebesar 96,87%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 88,18%. Penyaluran kredit yang tumbuh positif turut didukung oleh membaiknya kualitas kredit, tercermin dari NPL gross yang tercatat sebesar 2,39%, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,80%.

Kinerja penyaluran kredit UMKM juga meningkat dengan risiko kredit yang menurun. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 13,21% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,96% (yoy). Akselerasi ini didorong oleh meningkatnya pertumbuhan kredit yang disalurkan ke LU Perantara Keuangan, yang pada triwulan sebelumnya tumbuh negatif sebesar 2,72% (yoy), menjadi tumbuh 55,00% (yoy) pada triwulan IV 2025. Selain itu, peningkatan juga didorong oleh sektor Konstruksi yang tercatat tumbuh sebesar 21,44% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,11% (yoy).

2.1.13 Perkembangan Kondisi Perbankan Provinsi Kepri

Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 25,92% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 20,61% (yoy). Akselerasi ini terutama disebabkan oleh penyaluran kredit pada LU Konstruksi serta LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi yang meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan laju penyaluran kredit sejalan dengan akselerasi kredit modal kerja dan kredit investasi.

Selanjutnya, aset perbankan tumbuh positif sebesar 12,92% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,87% (yoy). Di sisi lain, DPK tumbuh sebesar 13,22% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,06% (yoy). Perlambatan terutama terjadi pada tabungan dan deposito, sementara giro tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kemampuan pelaku usaha dalam membayar angsuran kredit tetap terjaga, tercermin dari tingkat kredit bermasalah (rasio NPL gross) yang tercatat sebesar 2,39%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,80% serta tetap di bawah ambang batas 5%.

Tabel 2.46 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri

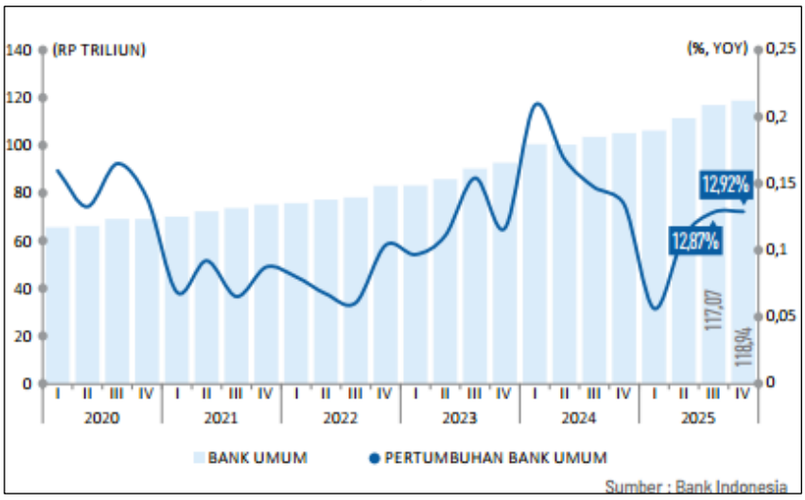
	2024 (Rp Triliun)				2025 (Rp Triliun)				Pertumbuhan (%, YoY)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025
Total Aset*	100,68	100,45	103,72	105,34	106,38	111,55	117,07	118,94	5,66%	11,06%	12,87%	12,92%
Total Dana*	82,20	86,84	89,14	91,07	91,15	95,75	101,67	103,11	10,89%	10,25%	14,06%	13,22%
Total Kredit*	48,61	51,19	51,96	53,11	55,38	57,30	59,82	61,32	13,94%	11,95%	15,12%	15,46%
Total Kredit**	71,72	73,69	74,34	79,32	84,56	85,91	89,65	99,89	17,91%	16,59%	20,61%	25,92%
NPL*	3,73%	3,28%	3,29%	2,90%	2,80%	2,90%	2,80%	2,39%	-	-	-	-
LDR*	87,25%	84,85%	83,39%	87,10%	92,78%	89,72%	88,18%	96,87%	-	-	-	-

Sumber: Bank Indonesia
*) dari bank yang berlokasi di Kepri,
**) kepada proyek yang berlokasi di Kepri

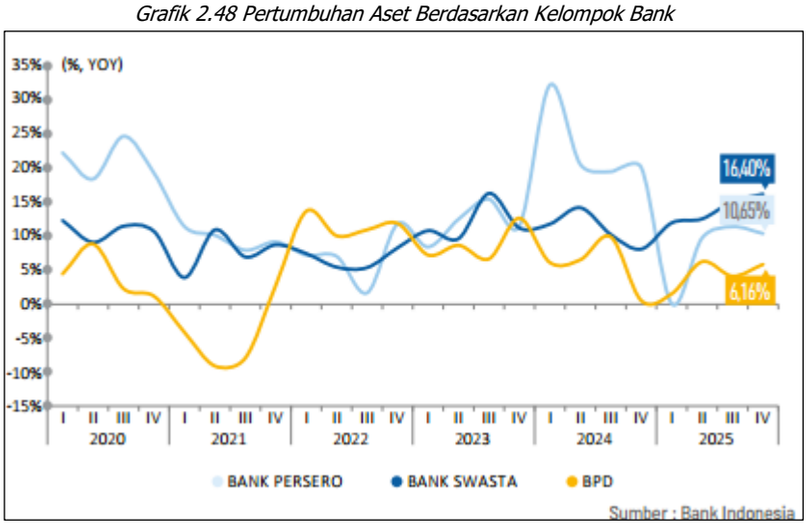
2.1.13.1 Perkembangan Aset Perbankan

Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 berjumlah Rp118,94 triliun atau tumbuh 12,92% (yoy), mengalami akselerasi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 12,87% (yoy). Pertumbuhan aset bersumber dari kelompok Bank Swasta dan BPD yang tumbuh masing-masing sebesar 16,40% (yoy) dan 6,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,32% (yoy) dan 4,44% (yoy). Di sisi lain, aset kelompok Bank Persero mengalami deselerasi dengan tumbuh sebesar 10,65% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,64% (yoy). Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 didominasi oleh kelompok Bank Persero yakni sebesar 48,85%, diikuti oleh Bank Swasta Nasional (45,53%), dan BPD (5,62%).

Grafik 2.47 Perkembangan Aset Perbankan



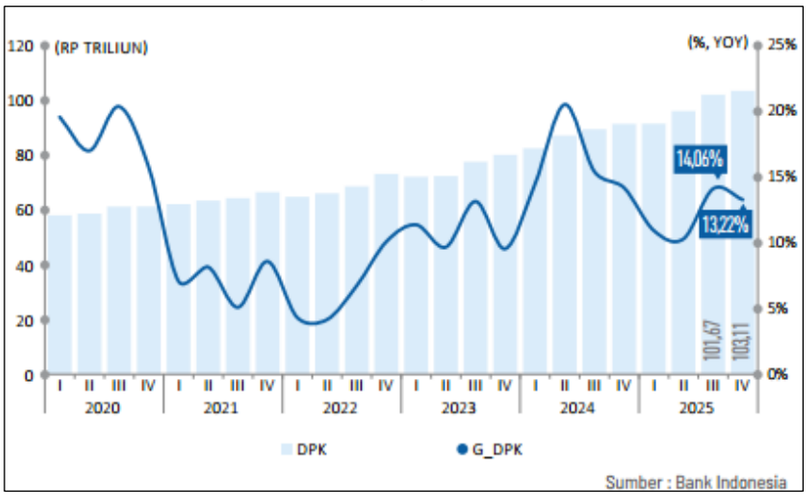
Grafik 2.48 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank



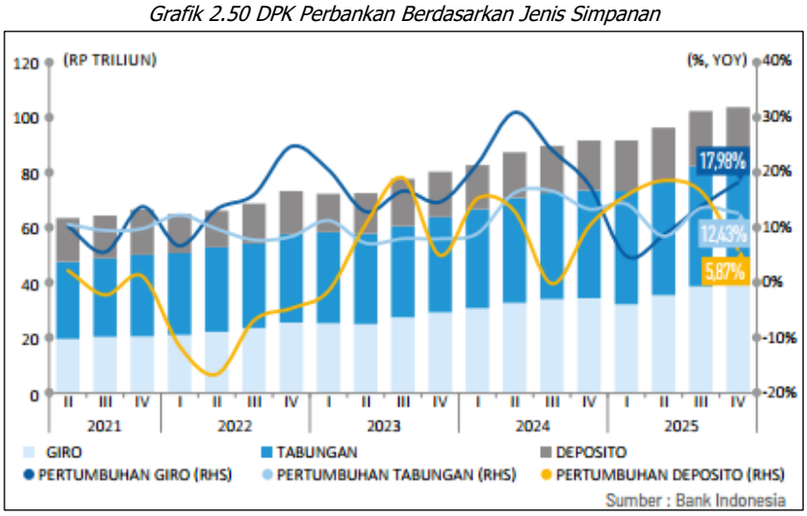
2.1.13.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

Pada triwulan IV 2025, total DPK di Kepri tercatat sebesar Rp103,11 triliun atau tumbuh 13,22% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,06% (yoy). Perlambatan tersebut bersumber dari tabungan dan deposito yang masing-masing tumbuh sebesar 12,43% (yoy) dan 5,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 13,36% (yoy) dan 16,40% (yoy). Sementara itu, giro terakselerasi dengan tumbuh sebesar 17,98% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 13,66% (yoy). Struktur DPK pada triwulan IV 2025 masih didominasi tabungan dengan pangsa 42,37%, diikuti giro 39,20% dan deposito 18,43%. Pangsa instrumen giro yang relatif tinggi mengindikasikan preferensi masyarakat atau pelaku usaha untuk menjaga likuiditas yang optimal guna mendukung kelancaran transaksi operasional harian.

Grafik 2.49 Perkembangan DPK Perbankan



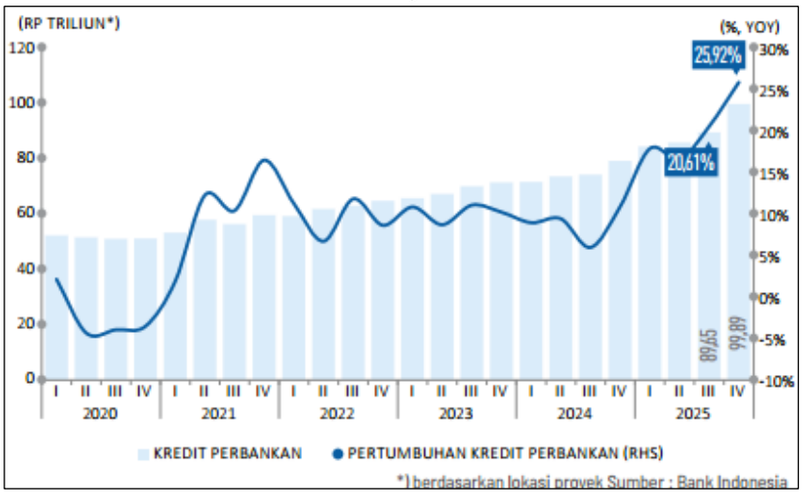
Grafik 2.50 DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan



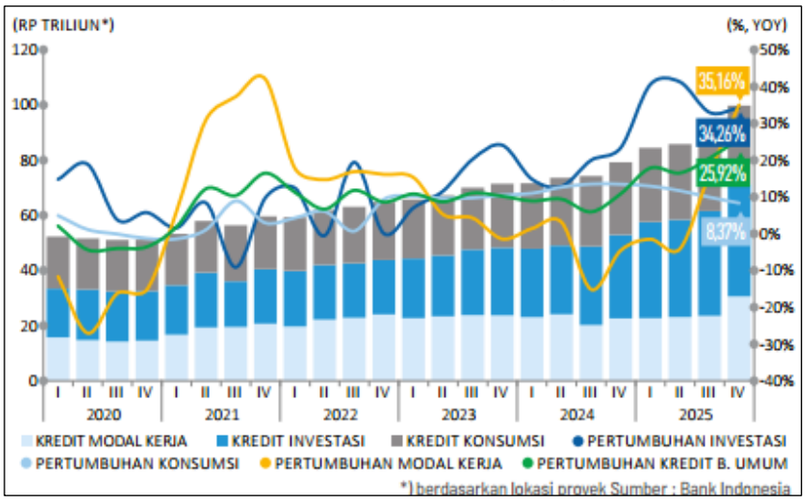
2.1.13.3 Perkembangan Kredit Perbankan

Jumlah penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di wilayah Kepri pada triwulan IV 2025 sebesar Rp99,89 triliun atau tumbuh 25,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 20,61% (yoy). Peningkatan terutama didorong oleh akselerasi kredit modal kerja dan kredit investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 35,16% (yoy) dan 34,26% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,47% (yoy) dan 33,04% (yoy). Di sisi lain, kredit konsumsi mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 8,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,96% (yoy). Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan IV 2025 didominasi oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 40,73%, diikuti oleh kredit modal kerja 30,70% dan kredit konsumsi sebesar 28,57%.

Grafik 2.51 Perkembangan Kredit Perbankan

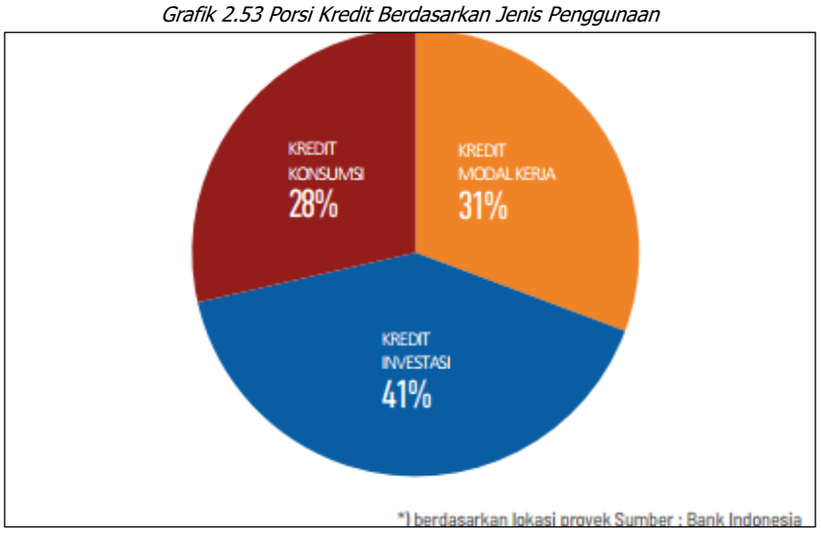


Grafik 2.52 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

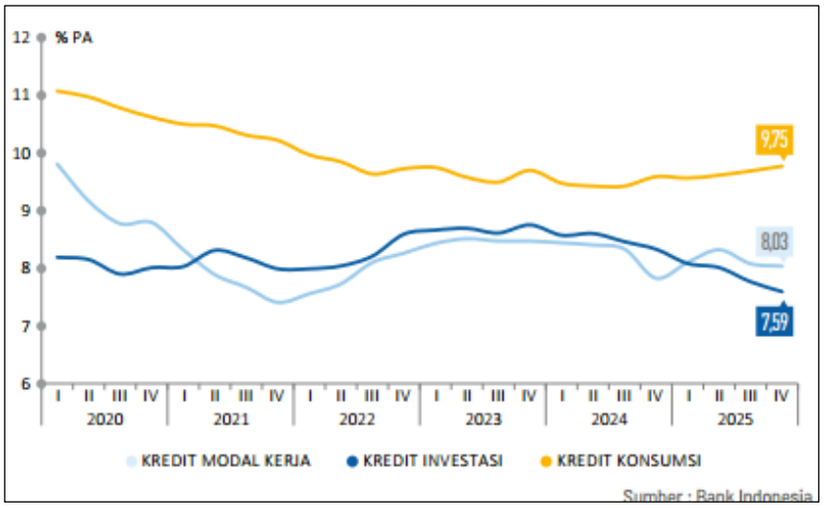


Pada triwulan IV 2025, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,34%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,44%. Penurunan suku bunga terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi yang masing-masing tercatat sebesar 8,03% dan 7,59%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,07% dan 7,76%. Di sisi lain, suku bunga kredit konsumsi mengalami peningkatan menjadi 9,75%, setelah sebelumnya tercatat sebesar 9,67% pada triwulan III 2025. Di samping itu, suku bunga simpanan (DPK) juga cenderung menurun. Suku bunga giro pada triwulan laporan sebesar 1,87%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,92%, sejalan dengan suku bunga deposito yang turun menjadi 3,90% dari triwulan sebelumnya yang tercatat 4,24%. Adapun suku bunga tabungan turut mengalami penurunan menjadi 0,60%, setelah sebelumnya tercatat sebesar 0,71% pada triwulan III 2025.

Grafik 2.53 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

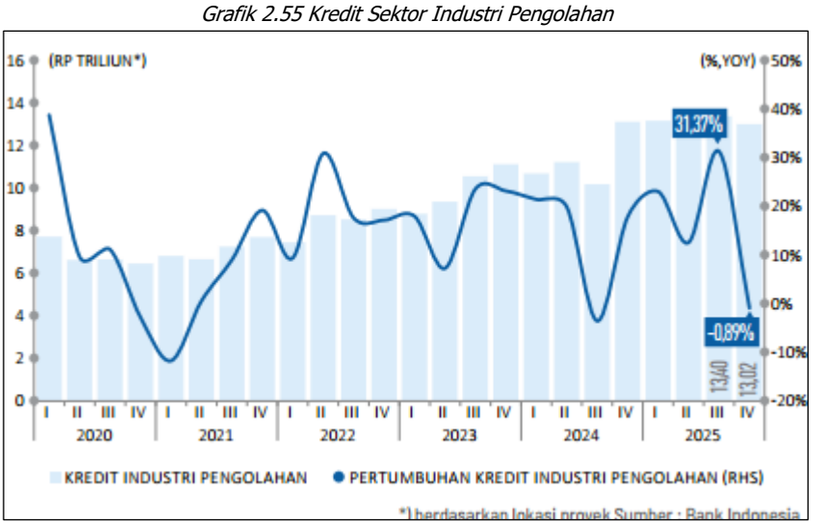


Grafik 2.54 Perkembangan Suku Bunga Kredit

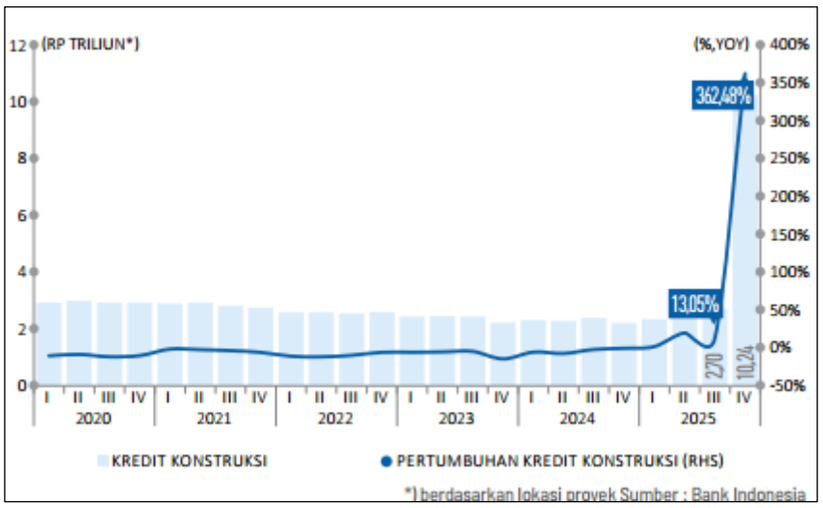


Secara sektoral, peningkatan penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek terutama didorong oleh kredit LU Konstruksi yang tumbuh 349,43% (yoy), mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,05% (yoy). LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi juga mengalami akselerasi dari 31,55% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 43,84% (yoy) pada triwulan IV 2025. LU Pertambangan dan Penggalian juga menujukkan perbaikan, meskipun masih mengalami kontraksi sebesar 18,51% (yoy), membaik dibandingkan triwulan III 2025 yang terkontraksi 26,95% (yoy). Lebih lanjut, LU *Real Estate*, Sewa dan Jasa PT serta LU Perdagangan Besar dan Eceran juga mengalami akselerasi dengan masing-masing tumbuh 58,77% (yoy) dan 6,11% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 55,84% (yoy) dan 5,72% (yoy).

Grafik 2.55 Kredit Sektor Industri Pengolahan



Grafik 2.56 Kredit Konstruksi



Peningkatan yang lebih tinggi pada triwulan IV 2025 tertahan oleh perlambatan kredit di beberapa sektor di antaranya LU Industri Pengolahan yang terkontraksi sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 31,37% (yoy). Selain itu, LU Listrik, Gas, dan Air juga mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 57,19% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 62,03% (yoy).

Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Kepri masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan IV 2025 sebesar Rp79,63 triliun atau setara dengan pangsa 79,72% dari total kredit diKepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Provinsi Kepri yang memiliki pangsa > 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 7,84% dari total kredit atau sebesar Rp7,83 triliun, diikuti Kabupaten Karimun dengan pangsa 4,71% dari total kredit atau sebesar Rp4,70 triliun dan Kabupaten Bintan dengan pangsa 4,67% dari total kredit atau sebesar Rp4,67 triliun.

Tabel 2.57 Penyaluran Kredit (Spasial)

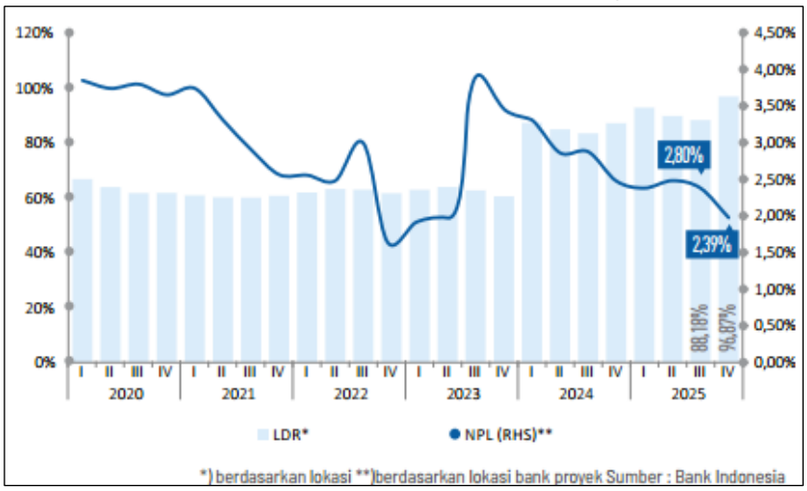
Kabupaten/Kota	Triwulan IV 2025	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Kota Batam	79,63	79,72%
Kota Tanjungpinang	7,83	7,84%
Kab. Karimun	4,70	4,71%
Kab. Lingga	0,84	0,84%
Kab. Natuna	1,84	1,84%
Kab. Bintan	4,67	4,67%
Kab. Kep. Anambas	0,38	0,38%
Total	**99,89**	**100,00%**

Sumber: Bank Indonesia
*)Berdasarkan lokasi proyek

2.1.13.4 Intermediasi dan Resiko Kredit Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR berdasarkan lokasi proyek pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan menjadi 96,87%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 88,18%. Peningkatan LDR tersebut diikuti dengan perbaikan kualitas kredit atau NPL yang mencatatkan angka 2,39%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,80%. Tingkat NPL tersebut masih berada dalam batas risiko yang relatif aman dan masih berada di bawah ambang batas (*threshold*) 5%.

Grafik 2.58 Intermediasi dan Risiko Perbankan Kepri



2.1.14 Asesmen Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

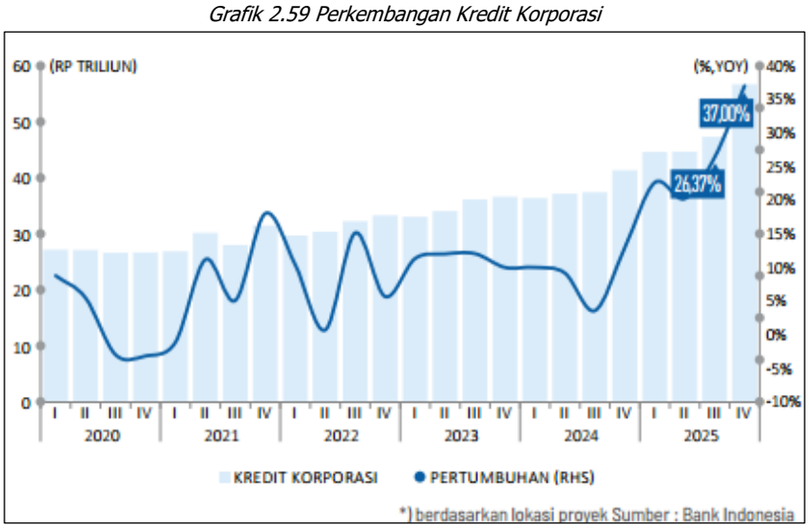
Pembiayaan pada sektor korporasi, rumah tangga, dan UMKM mengalami akselerasi pada triwulan IV 2025. Pekembangan ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan yang tetap terjaga seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.

2.1.14.1 Ketahanan Sektor Korporasi

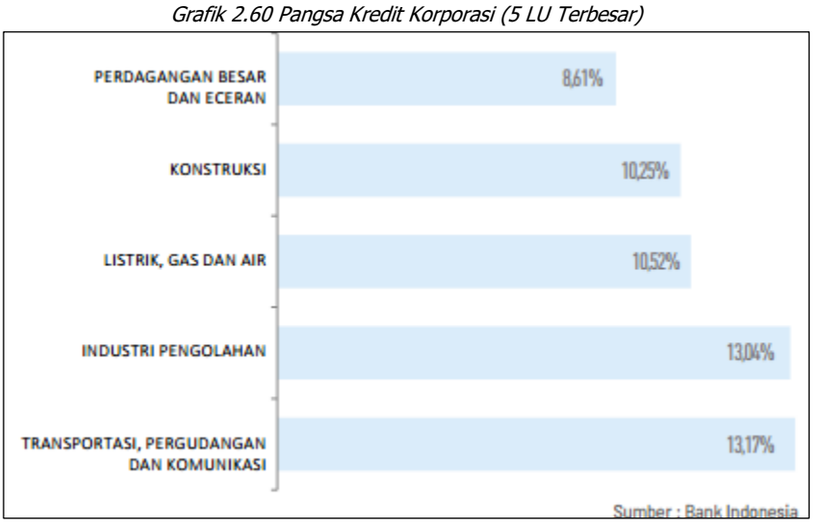
Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami akselerasi pada triwulan IV 2025. Penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp56,64 triliun atau tumbuh 37,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,37% (yoy). Sejalan dengan penguatan kredit, risiko kredit korporasi juga mengalami perbaikan ditandai dengan NPL kredit korporasi yang menurun menjadi 3,01%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat 3,70%.

Pangsa penyaluran kredit ke sektor korporasi didominasi oleh LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dengan pangsa sebesar 13,17% dari total kredit. Pangsa penyaluran kredit selanjutnya diikuti oleh LU Industri Pengolahan (13,04%), LU Listrik, Gas, dan Air (10,52%) LU Konstruksi (10,25%), serta LU Perdagangan Besar dan Eceran (8,61%). Sementara, pangsa LU lainnya pada triwulan IV 2025 masih < 8%.

Grafik 2.59 Perkembangan Kredit Korporasi



Grafik 2.60 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)

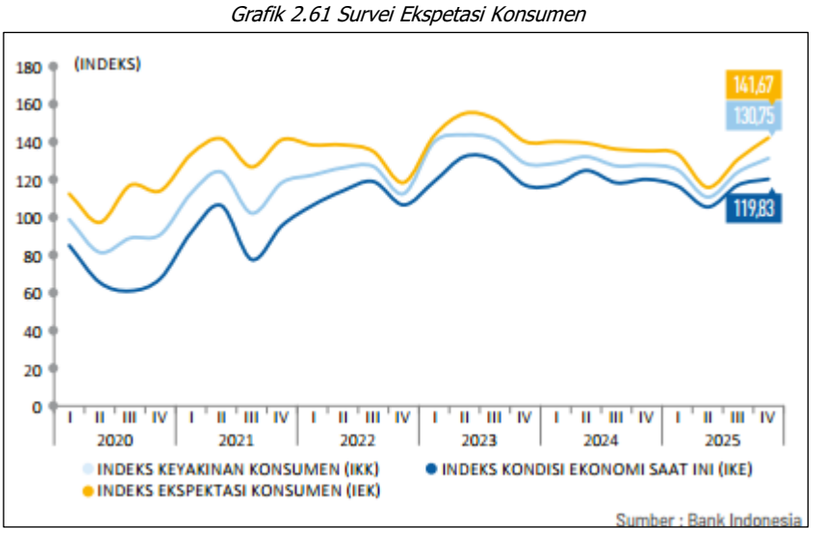


2.1.14.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

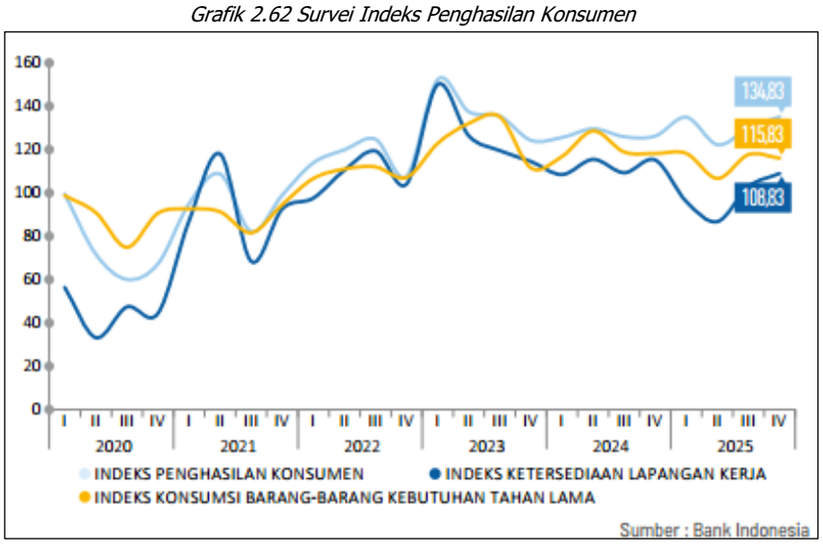
Ketahanan sektor rumah tangga mengalami peningkatan sejalan dengan terakselerasinya penyaluran kredit rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan hasil survei triwulanan menunjukkan peningkatan pada rata-rata indeks pada triwulan IV 2025. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) menunjukkan peningkatan dari yang sebelumnya tercatat sebesar 123,50; 116,67; dan 130,33 menjadi 130,75; 119,83; dan 141,67 pada triwulan IV 2025.

Lebih lanjut, Indeks Penghasilan Konsumen tercatat mengalami peningkatan pada triwulan IV 2025 menjadi sebesar 134,83 dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 129,67. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikankeyakinan konsumen terjaga pada level optimis (>100), yang mencerminkan persepsi kondisi ekonomi yang membaik sekaligus ekspektasi yang lebih kuat kedepan.

Grafik 2.61 Survei Ekspetasi Konsumen



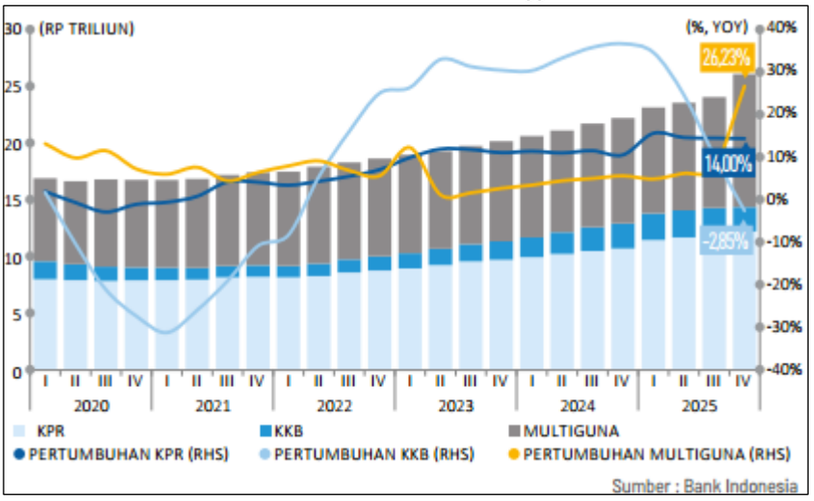
Grafik 2.62 Survei Indeks Penghasilan Konsumen



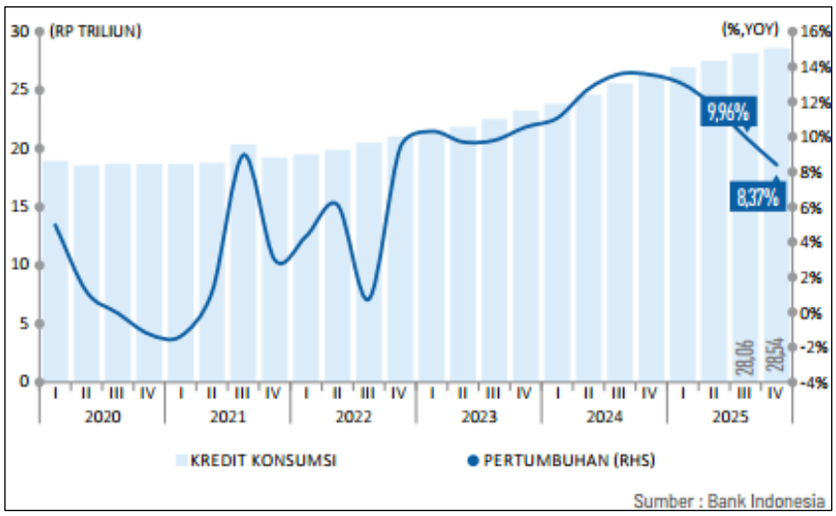
Di tengah penguatan keyakinan konsumen, penyaluran kredit rumah tangga juga meningkat. Kredit Rumah Tangga tumbuh sebesar 14,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,00% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh kredit multiguna yang pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 26,23% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 6,99% (yoy). Sementara itu, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) mengalami deselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,12% (yoy) dan 10,04% (yoy) menjadi 14,00% (yoy) dan terkontraksi 2,85% (yoy) pada triwulan IV 2025.

Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,35% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,14% (yoy). Akselerasi tersebut didorong oleh membaiknya kinerja giro dan deposito yang masing-masing terkontraksi sebesar 10,90% (yoy) dan 0,97% (yoy), lebih dangkal dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi masing-masing 28,57% (yoy), dan 7,70% (yoy) pada triwulan III 2025.

Grafik 2.63 Kredit Rumah Tangga



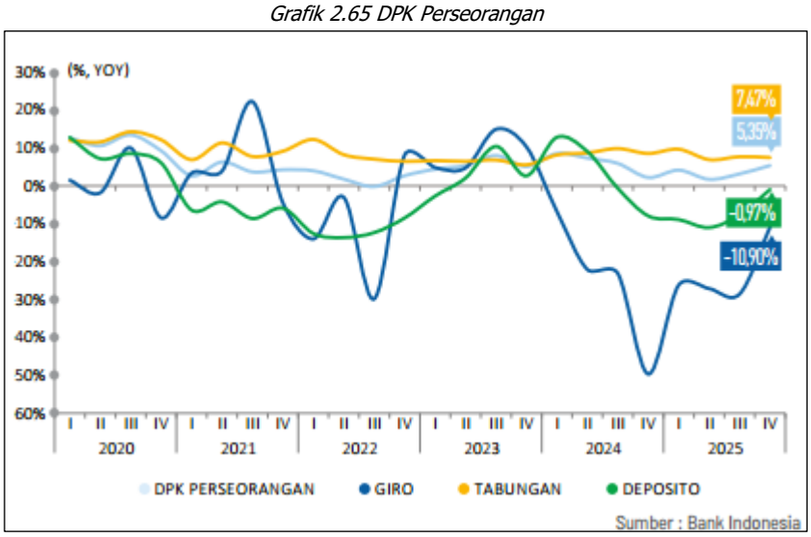
Grafik 2.64 Kredit Konsumsi



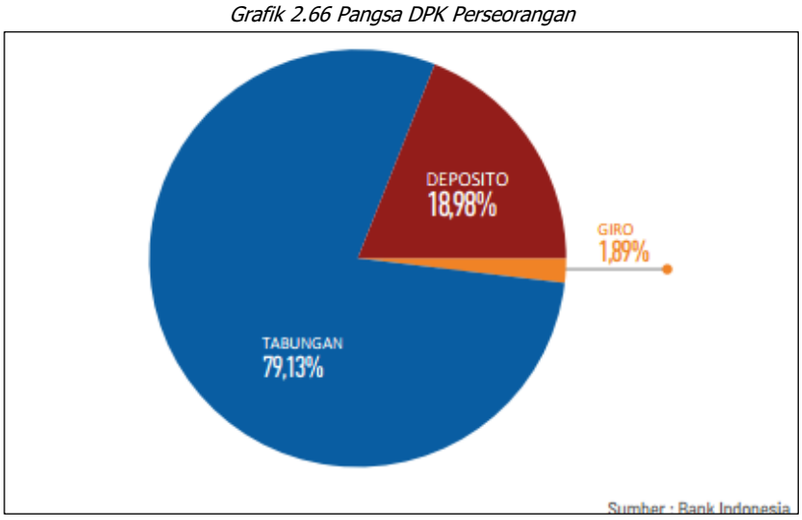
Secara umum, pertumbuhan DPK yang meningkat turut ditopang oleh tabungan yang tetap tumbuh 7,47% (yoy) dimana struktur tabungan masih mendominasi pangsa DPK perseorangan dengan pangsa 79,13%, diikuti deposito 18,98% dan giro 1,89%. Tingginya pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.

Dari sisi risiko kredit, NPL kredit rumah tangga pada triwulan IV 2025 tercatat menurun dan masih berada di bawah *threshold* 5%. NPL kredit rumah tangga tersebut menurun menjadi 1,80% dari sebelumnya sebesar 2,00% pada triwulan III 2025. Penurunan NPL terjadi pada kategori KPR dari 2,32% menjadi 2,03%, kredit multiguna dari 1,63% menjadi 1,38%, serta kredit lainnya dari 1,55% menjadi 1,53%. Sementara NPL KKB dan kredit peralatan rumah tangga tercatat mengalami peningkatan dengan nilai 1,14% dan 3,43%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 1,10% dan 3,35%.

Grafik 2.65 DPK Perseorangan



Grafik 2.66 Pangsa DPK Perseorangan



Tabel 2.67 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

Kategori	2022				2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kredit Rumah Tangga	**2,10%**	**1,98%**	**1,87%**	**1,61%**	**1,78%**	**2,00%**	**1,95%**	**1,69%**	**1,78%**	**1,66%**	**1,60%**	**1,67%**	**1,84%**	**1,97%**	**2,00%**	**1,80%**
Kredit Pemilikan Rumah	2,85%	2,83%	2,57%	2,28%	2,43%	2,71%	2,52%	2,32%	2,33%	2,11%	2,08%	2,11%	2,38%	2,41%	2,32%	2,03%
Kredit Kendaraan Bermotor	0,88%	0,61%	0,55%	0,45%	0,42%	0,48%	0,63%	0,51%	0,58%	0,63%	0,75%	0,89%	0,90%	1,14%	1,10%	1,14%
Kredit Peralatan Rumah Tangga	2,89%	1,93%	1,12%	0,79%	0,90%	0,80%	0,88%	1,13%	1,22%	1,15%	1,34%	1,77%	2,20%	2,83%	3,35%	3,43%
Kredit Multiguna	1,39%	1,40%	1,42%	1,26%	1,40%	1,66%	1,61%	1,39%	1,43%	1,42%	1,37%	1,41%	1,46%	1,56%	1,63%	1,38%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,39%	1,60%	1,67%	1,22%	1,73%	1,70%	2,69%	1,24%	1,72%	1,20%	1,28%	1,40%	1,20%	1,37%	1,55%	1,53%

Sumber: Bank Indonesia
*) berdasarkan lokasi proyek

2.1.14.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan IV 2025 terakselerasi disertai penurunan risiko kredit. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 13,21% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,96% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit mengalami penurunan, tecermin dari rasio NPL kredit UMKM yang pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 3,37% menjadi 3,04%.

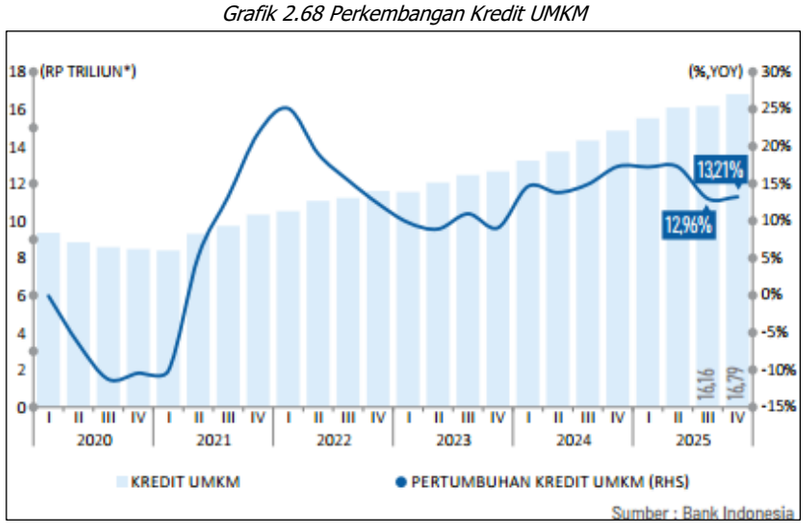
Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 16,81%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 18,02%. Meski demikian, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Kepri tersebut masih mendekati 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit UMKM masih ditopang oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, serta LU Industri Pengolahan dengan pangsa masing-masing sebesar 35,80%, 20,66%, dan 7,93%.

Penyaluran kredit UMKM yang terakselerasi didorong oleh meningkatnya kredit pada LU Perantara Keuangan, LU Konstruksi, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran yang masing-masing tumbuh 55,00% (yoy), 21,44% (yoy), dan 4,91% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh -2,72% (yoy), -2,11% (yoy), dan 4,24% (yoy).

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pembiayaan inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau

Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam Rupiah dan valuta asing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri juga terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital antara lain melalui dukungan dalam penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, dan business matching terhadap para pelaku usaha UMKM yang dilakukan secara berkelanjutan.

Grafik 2.68 Perkembangan Kredit UMKM



2.1.15 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Sejalan dengan perningkatan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif dan mengalami akselerasi pada triwulan IV 2025. Selain itu, transaksi pembayaran non-tunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.

Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2025 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp3,03 Triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yangsebesar Rp2,21 Triliun. Lebih lanjut, transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) juga meningkat. Kondisi ini mencerminkan preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap transaksi nontunai yang semakin menguat, didukung kemudahan akses layanan pembayaran nontunai. Peningkatan aktivitas sistem pembayaran tersebut sejalan dengan pertumbuhan positif pada

kinerja ekonomi Kepri yang tumbuh 7,89% (yoy) pada triwulan IV 2025, terakselerasi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 7,48% (yoy).

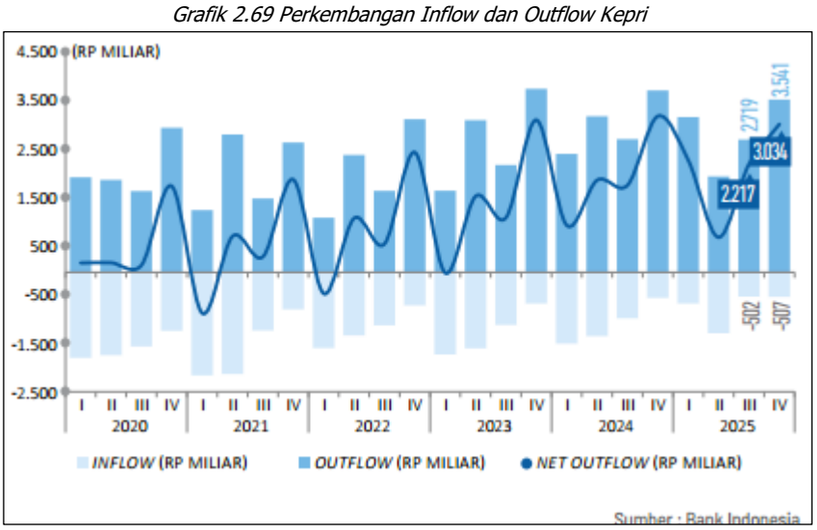
2.1.16 Transaksi Pembayaran Tunai

2.1.16.1 Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*inflow*[1]/*outflow*[2])

Pada triwulan IV 2025, pergerakan aliran uang kartal di Kepri tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp3,03 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat *net outflow* sebesar Rp2,21 triliun. Secara rinci, jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan IV 2025 mencapai Rp3,54 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 sebesar Rp2,71 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp507 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp502 miliar. Peningkatan *net outflow* mengindikasikan kebutuhan uang tunai masyarakat yang meningkat sejalan dengan kinerja perekonomian Kepri yang tetap tumbuh positif dan mendukung perputaran aktivitas ekenomi. Adapun kondisi tersebut turut mencerminkan perekonomian daerah yang masih kuat di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Faktor pendorong tetap kuatnya perekonomian di Kepri antara lain kinerja lapangan usaha utama di Kepri yaitu industri pengolahan yang tumbuh 8,89% (yoy), pertambangan dan penggalian yang tumbuh 18,67% (yoy), konstruksi yang tumbuh 4,11% (yoy), serta perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 7,57% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan juga didukung oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), konsumsi rumah tangga, serta konsumsi pemerintah yang tetap terjaga.

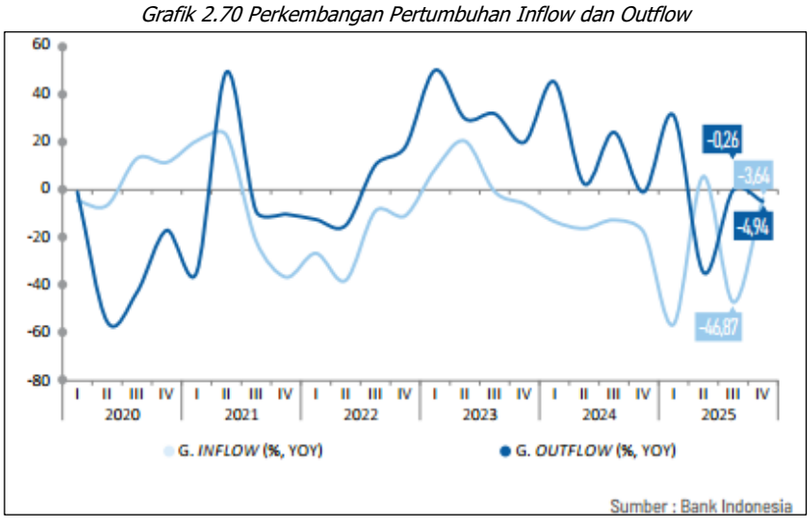
Untuk memastikan ketersediaan uang tunai di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat mengoperasikan kas titipan di tiga lokasi, yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun. Selain itu, layanan kas keliling dilakukan di wilayah perkotaan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) guna menjamin distribusi Rupiah yang layak edar. Pada 2025, Bank Indonesia juga mengadakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) ke beberapa pulau antara lain Pulau Singkep, Pulau Tambelan, Pulau Subi Besar, Pulau Midai, dan Pulau Tarempa.

Grafik 2.69 Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri



[1]*Inflow:* aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran Bank
[2]*Outflow:* aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan Bank

Grafik 2.70 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow

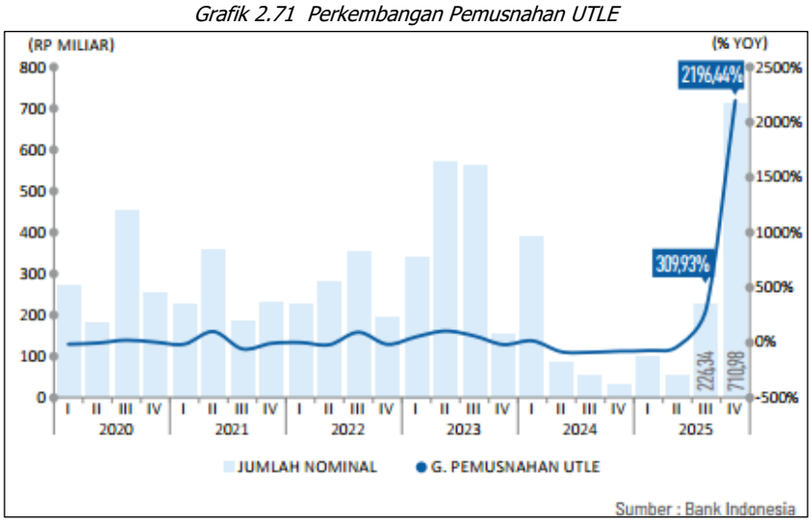


2.1.16.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia berperan menyediakan uang kartal layak edar dalam rangka menjaga kualitas uang dalam peredaran. Proses penyediaannya mencakup penerbitan uang yang berkualitas, pengelolaan jumlah uang beredar, edukasi masyarakat melalui program Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, layanan kas keliling, serta pemeliharaan kualitas uang layak edar. Dalam rangka memelihara kualitas uang di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan *Clean Money Policy* melalui pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang berasal dari penukaran oleh masyarakat maupun setoran perbankan.

Jumlah UTLE yang dimusnahkan pada triwulan IV 2025 tercatat sebanyak Rp710 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp226 miliar. Pemusnahan mencakup uang yang rusak atau tidak memenuhi standar kelayakan edar. Peningkatan pemusnahan UTLE terutama didorong oleh meningkatnya *outflow* atau kebutuhan uang tunai pada periode HBKN Nataru yang jatuh pada triwulan IV 2025. Bank Indonesia terus berupaya untuk menjaga kualitas peredaran uang sejalan dengan masifnya kampanye nasional CBP Rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat uang Rupiah di Kepri. Selain itu, edukasi tentang uang Rupiah kini telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak tahun 2024.

Grafik 2.71 Perkembangan Pemusnahan UTLE



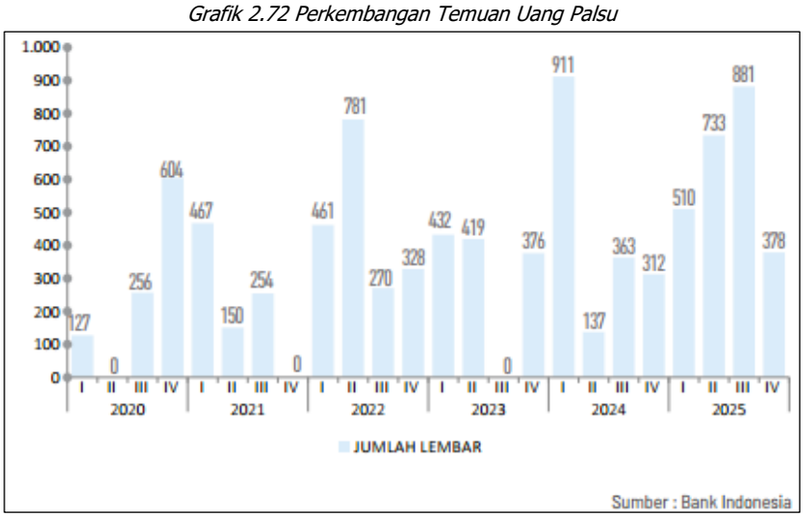
2.1.16.3 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap Rupiah, berbagai kegiatan edukasi CBP Rupiah terus dilakukan kepada masyarakat melalui sosialisasi di beragam kanal. Kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan ciri keaslian uang

Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Melalui edukasi CBP Rupiah, pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah diharapkan semakin meningkat sehingga dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan IV 2025 terdapat 378 lembar temuan uang palsu (UPAL) di wilayah Kepri, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 881 lembar. Bank Indonesia secara konsisten mendorong edukasi CBP Rupiah termasuk diseminasi mengenai risiko dan konsekuensi hukum bagi pelaku peredaran uang palsu. Apabila masyarakat menemukan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat dapat meminta klarifikasi ke kantor Bank Indonesia terdekat dan dihimbau untuk melaporkan temuan tersebut dengan menyertakan fisik uang melalui bank atau kepada kepolisian. Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, baik secara langsung atau melalui perbankan, akan diteliti lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia uang tersebut dinyatakan tidak asli, masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Grafik 2.72 Perkembangan Temuan Uang Palsu

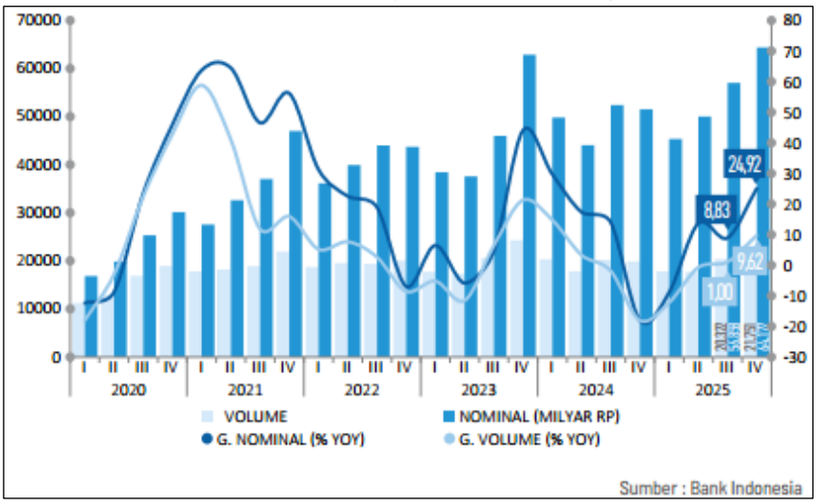


2.1.17 Transaksi Pembayaran Non Tunai

2.1.17.1 Transaksi Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

Nominal transaksi sistem Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (RTGS) tumbuh meningkat pada triwulan IV 2025. Nominal transaksi BI-RTGS di Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat mencapai Rp64,17 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp56,85 triliun. Secara tahunan, nominal transaksi RTGS pada triwulan IV tumbuh sebesar 24,92% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,83% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 9,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 1,00% (yoy). Tren peningkatan transaksi RTGS mengindikasikan menguatnya aktivitas ekonomi dan transaksi bernilai besar pada triwulan berjalan.

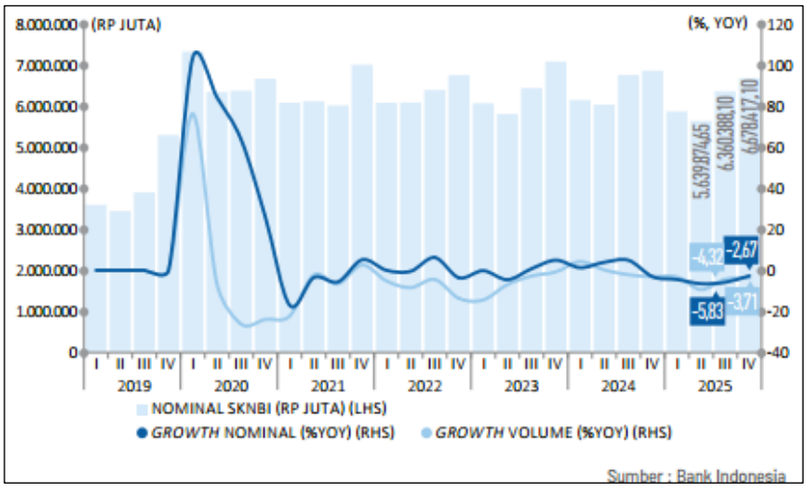
Grafik 2.73 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri



2.1.17.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, nominal transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) selama triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp6,67 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp6,36 triliun. Namun secara tahunan, pertumbuhan nominal transaksi SKNBI pada triwulan IV 2025 masih terkontraksi sebesar 2,67% (yoy), membaik dibandingkan triwulan III 2025 yang terkontraksi 5,83% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan volume transaksi terkontraksi 3,71% (yoy) pada triwulan IV 2025, juga lebih baik dibandingkan triwulan III 2025 yang terkontraksi sebesar 4,32% (yoy). Kontraksi ini mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat memilih menggunakan layanan SKNBI untuk transaksi cenderung menurun di tengah semakin beragamnya pilihan layanan jasa transfer untuk bertransaksi. Saat ini, selain BI RTGS dan SKNBI, tersedia BI-FAST yang menyediakan layanan transfer 24/7 dan QRIS dengan lebih banyak kemudahan akses untuk berbagai transaksi.

Grafik 2.74 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri



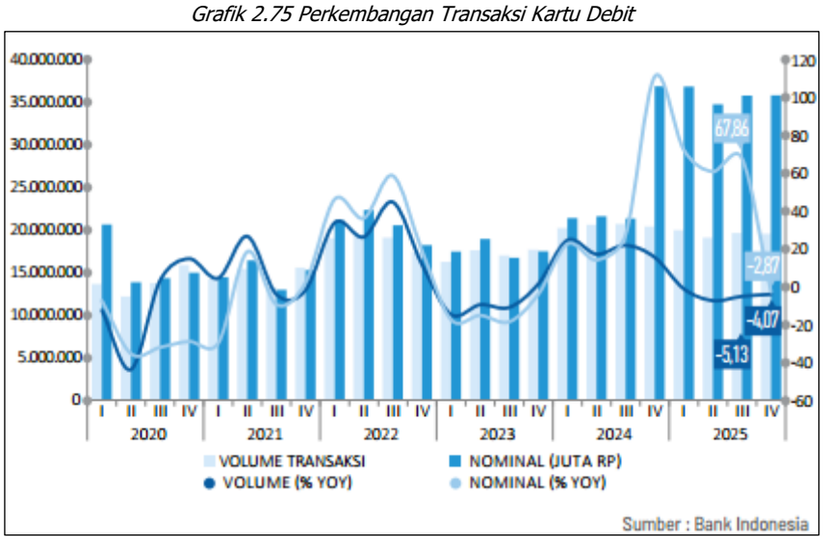
2.1.17.3 Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

Transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan IV 2025 menunjukan perbaikan dari sisi volume. Volume transaksi terkontraksi sebesar 4,07% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,13% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi mengalami perlambatan dengan terkontraksi sebesar 2,87% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 67,86% (yoy).

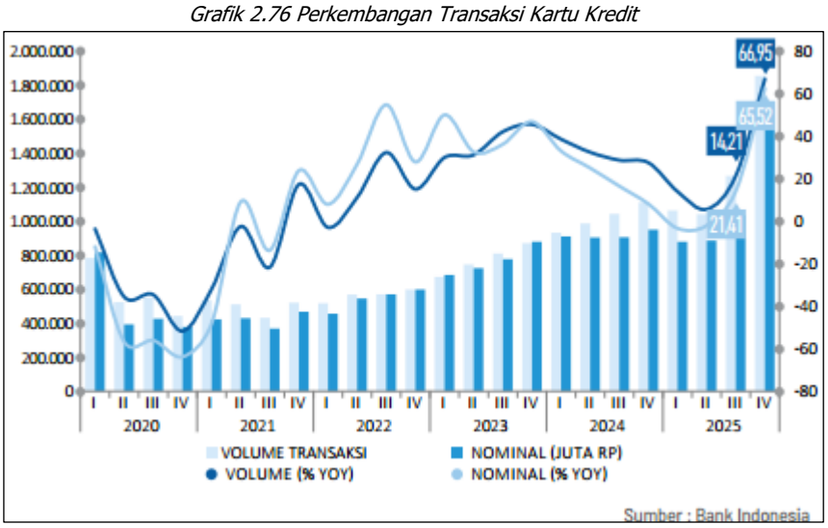
Di sisi lain, transaksi menggunakan kartu kredit pada triwulan IV 2025 mengalami akselerasi. Volume transaksi tumbuh 66,95% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 21,41% (yoy). Nominal transaksi juga menguat dari 14,21% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 62,52% (yoy) pada triwulan IV 2025. Pertumbuhan

volume dan nominal kartu kredit yang tinggi masih mengindikasikan bahwa konsumsi tetap tumbuh didukung oleh kredit/pembiayaan perbankan.

Grafik 2.75 Perkembangan Transaksi Kartu Debit

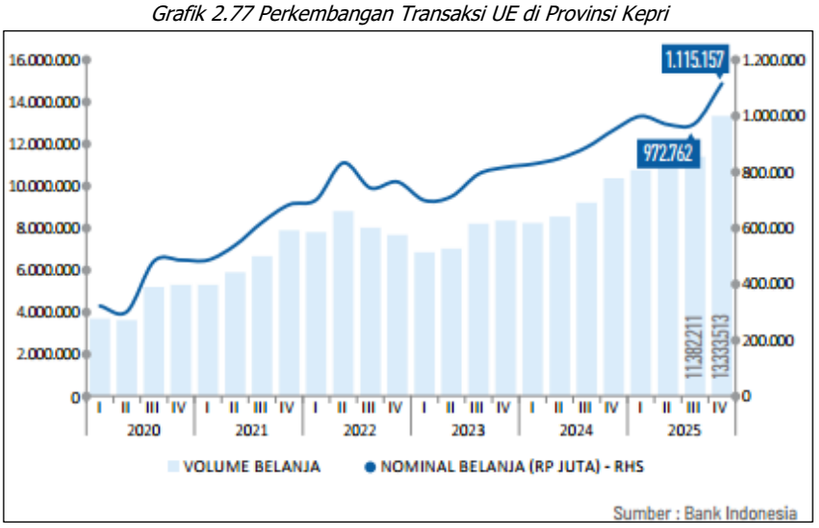


Grafik 2.76 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Nilai transaksi UE di Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat Rp1,11 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 sebesar Rp972,76 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan volume belanja yang mengalami peningkatan dari 11,38 juta transaksi menjadi 13,33 juta transaksi pada triwulan IV 2025. Kinerja ini mencerminkan meningkatnya aktivitas pembayaran digital seiring dengan kinerja perekonomian Kepri yang tumbuh positif. Untuk terus mendorong transaksi nontunai, Bank Indonesia memperkuat perluasan akseptasi pembayaran digital, khususnya melalui QRIS.

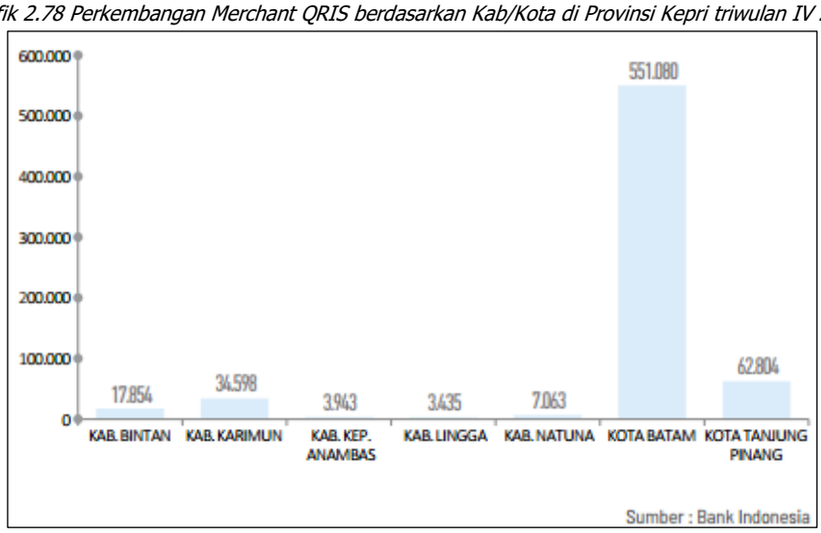
Grafik 2.77 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri



2.1.17.4 Perkembangan QRIS

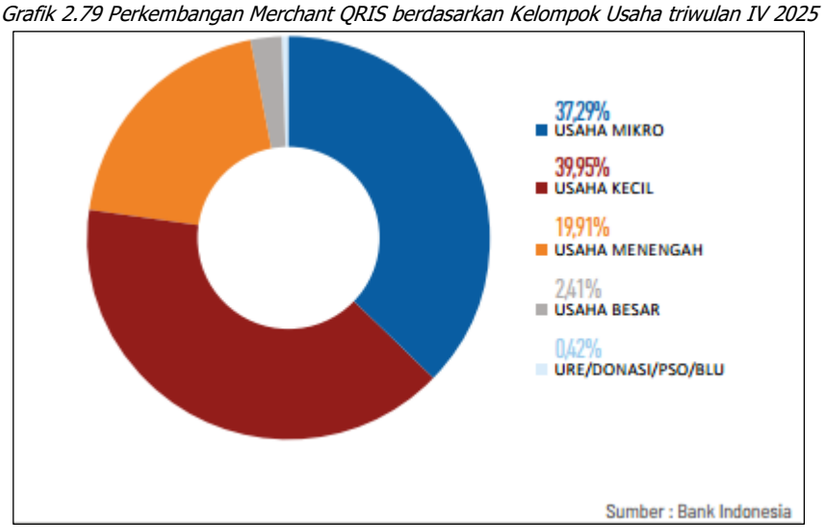
Implementasi QRIS di Kepri tumbuh secara signifikan dan diharapkan dapat mendukung sistem pembayaran yang aman, lancar dan handal serta turut mendorong inklusi keuangan khususnya pada UMKM. Dari sisi user/pengguna, pada triwulan IV 2025 tercatat penambahan sebanyak 11.308 pengguna baru atau tumbuh sebesar 2,05% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh 1,51% (qtq). Dengan demikian, total pengguna QRIS di Kepri hingga triwulan IV 2025 telah mencapai 564.088 pengguna. Dari sisi transaksi, pada triwulan IV 2025 tercatat34.506.027 transaksi, atau terkontraksi sebesar 3,20% (qtq), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 118,97% (qtq). Nominal transaksi QRIS di Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp3,83 triliun atau tumbuh sebesar 6,49% (qtq).

Grafik 2.78 Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri triwulan IV 2025

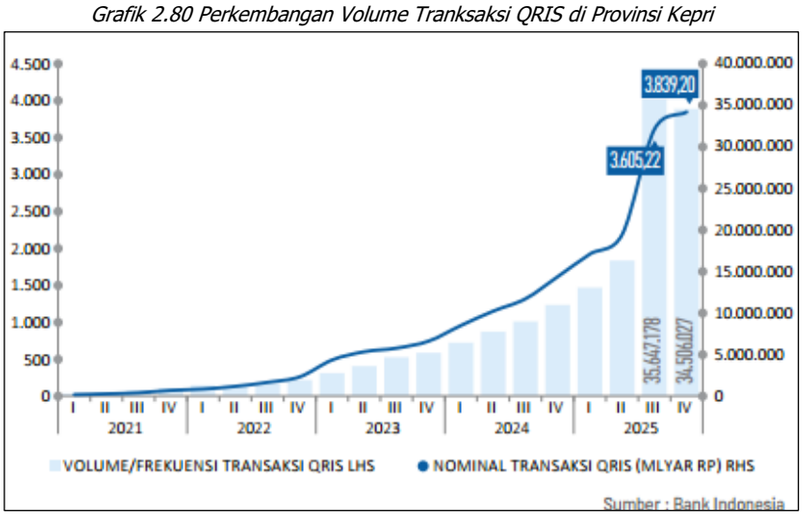


Hingga triwulan IV 2025, jumlah merchant QRIS tercatat sebesar 680.777 *merchant*, atau tumbuh 17,53% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,14% (yoy). Mayoritas merchant berlokasi di Kota Batam (80,95%), diikuti oleh Kota Tanjungpinang (9,23%) dan Kab. Karimun (5,08%). *Merchant* QRIS di Kepri didominasi oleh kategori Usaha Kecil dengan pangsa sebesar 39,95%, kategori Usaha Mikro dengan pangsa sebesar 37,29%, dan Usaha Menengah sebesar 19,91%. Berdasarkan hal tersebut, sebanyak 97,16% *merchant* QRIS di Kepri termasuk dalam kategori UMKM.

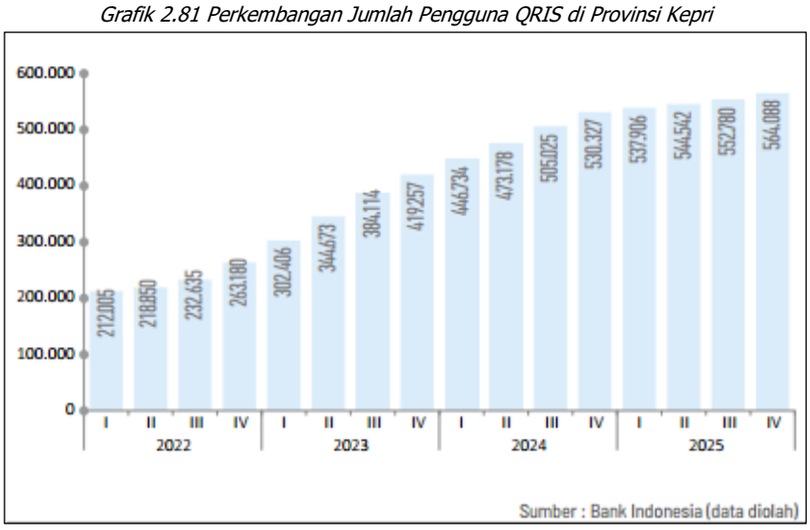
Grafik 2.79 Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha triwulan IV 2025



Grafik 2.80 Perkembangan Volume Tranksaksi QRIS di Provinsi Kepri



Grafik 2.81 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri



2.1.17.5 Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Mempertimbangkan karakteristik Kepri yang menjadi tempat transit bagi wisatawan dan pusat akulturasi dari berbagai penduduk Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mendorong penggunaan QRIS, Bank Indonesia Kepri memperkuat strategi dalam peningkatan pengguna QRIS melalui sinergi dan kolaborasi, sosialisasi, *showcasing*, dan *onboarding* QRIS. Strategi perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan hingga triwulan IV 2025 antara lain:

a. Sinergi dan Kolaborasi bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), Pemda, Komunitas, Asosiasi Media, Pelaku Usaha dan Instansi Terkait.

b. Perluasan komunikasi QRIS *Cross Border* khususnya pada kawasan wisata dan transportasi internasional seperti Kapal Ferry.

c. Perluasan QRIS pada sektor prioritas, seperti kawasan wisata, pasar, kuliner, pelabuhan, layanan Kesehatan, rumah ibadah dan pembayaran pajak/retribusi.

d. Pemberian *Reward* bagi *merchant* dan *user* bekerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya.

e. Edukasi/sosialisasi/*onboarding*/hiburan/perlombaan kerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya:

    1) QRIS *Goes to School/Campus*;

    2) Kolaborasi pada kegiatan/event strategis di Kepri;

    3) Sinergi event strategis antar Unit/Fungsi Bank Indonesia.

f. Sinergi QRIS dengan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk pembayaran pajak dan retribusi, serta belanja melalui fitur QRIS - Kartu Kredit Indonesia (KKI).

g. *On boarding* pada sektor pariwisata seperti hotel, travel agent, dan objek wisata.

h. *Showcase* dan QRIS *Experience* dalam memperluas transaksi QRIS pada event strategis.

Bank Indonesia Kepri konsisten mendorong pelaku usaha di sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk mengimplementasikan QRIS sekaligus mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi. Sepanjang periode laporan, Bank Indonesia Kepri telah melakukan beberapa kegiatan dan sinergi event yaitu sosialisasi, FGD, dan rapat koordinasi bersama para *stakeholder* sterkait untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat. Adapun salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Bersama Rayakan Festival Digital Masyarakat Kepulauan Riau (BERLAYAR) 2025 yang merupakan gerakan inklusi digital di wilayah perbatasan melalui festival kreatif yang mengintegrasikan budaya lokal dengan teknologi pembayaran digital.

Ke depan, Bank Indonesia Kepri akan memperkuat perluasan QRIS, khususnya QRIS *Cross-Border* sejalan dengan letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia serta sebagian besar kunjungan wisman didominasi oleh kedua negara tersebut. Selain itu, Bank Indonesia Kepri juga akan memperluas publikasi QRIS Antarnegara pada kawasan pelabuhan lainnya yang merupakan pintu keluar masuk turis mancanegara.

2.1.17.6 Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Pengembangan ETPD terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan kanal pembiayaan nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan Pemerintah. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Bank Indonesia Kepri mendorong dari aspek implementasi, realisasi, maupun lingkungan strategis, antara lain melalui perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi Pemerintah Daerah, peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dan *Teller* untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penguatan aspek lingkungan strategis, khususnya pelaksanaan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan hingga triwulan IV 2025 antara lain:

a. Rapat koordinasi & *capacity building* dengan Tim Teknis Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk membahas evaluasi dan tindak lanjut peta jalan masing-masing daerah.

b. Memfasilitasi antar bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) & Pemda untuk mendorong implementasi kanal digital & Integrasi *Cash Management System* (CMS).

c. Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerimaan untuk mendorong perluasan ekosistem nontunai.

d. *Coaching clinic* dan pendampingan pengisian Indeks ETPD.

e. Penyampaian *strategic advisory* kepada kepala daerah terkait kondisi, tantangan/isu & strategi TP2DD.

f. *High Level Meeting* (HLM) TP2DD untuk ekskalasi isu strategis & mendorong political will kepala daerah.

g. *Benchmarking* dan Studi Banding dengan daerah lain.

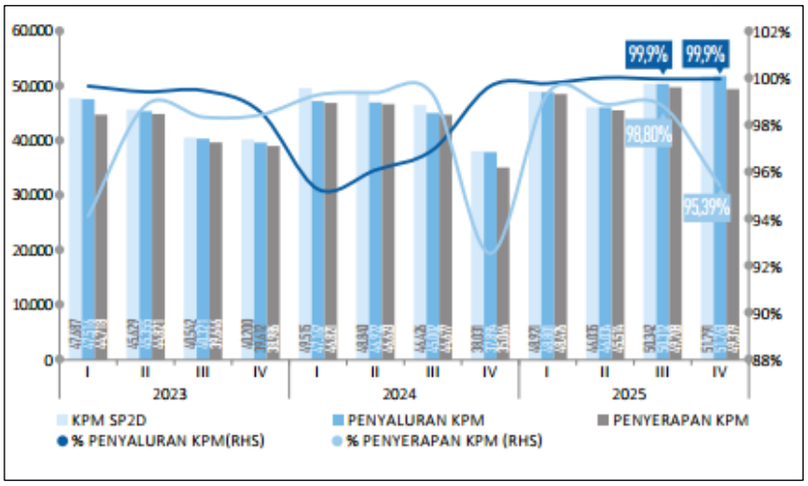
2.1.17.7 Bantuan Sosial Non Tunai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepri mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui

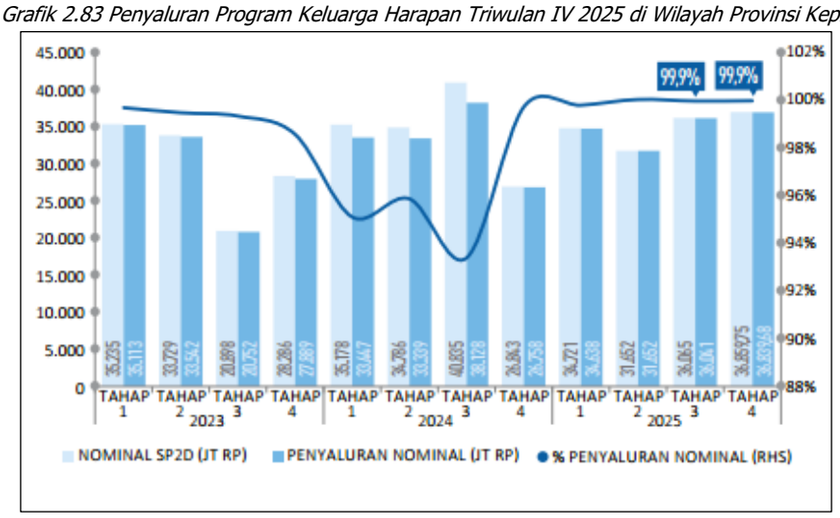
program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai. Program Bansos yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Pra Kerja. Program Sembako dan PKH disalurkan melalui dua mekanisme yakni secara nontunai melalui Himbara dan tunai melalui PT Pos.

Realisasi penyaluran bantuan PKH pada tahap 4 yang mencakup periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 secara nominal telah mencapai sebesar Rp36,83 miliar, atau 99,95% dari pagu sebesar Rp36,85 miliar dengan target penyaluran sebanyak 51.791 KPM. Penyerapan bantuan PKH telah diserap oleh 51.763 KPM atau sebesar 99,95% dari target. Sementara itu, penyaluran program sembako berdasarkan jumlah KPM pada triwulan IV 2025 adalah sebesar 49.707 penerima dengan tingkat penyerapan 77,54% dari target penyaluran.

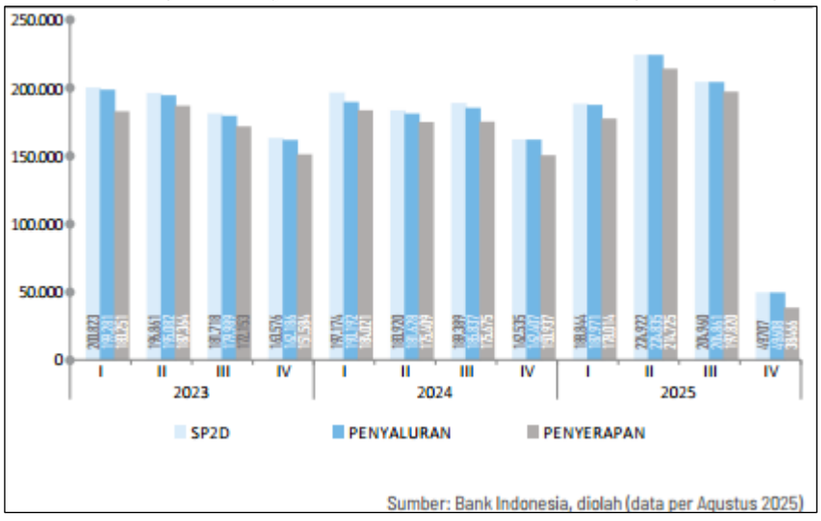
Grafik 2.82 Penyaluran Program Keluarga Penerima Manfaat Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri



Grafik 2.83 Penyaluran Program Keluarga Harapan Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri



Grafik 2.84 Penyaluran Program Sembako Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri



2.1.18 Transaksi KUPVA BB dan PJP LR

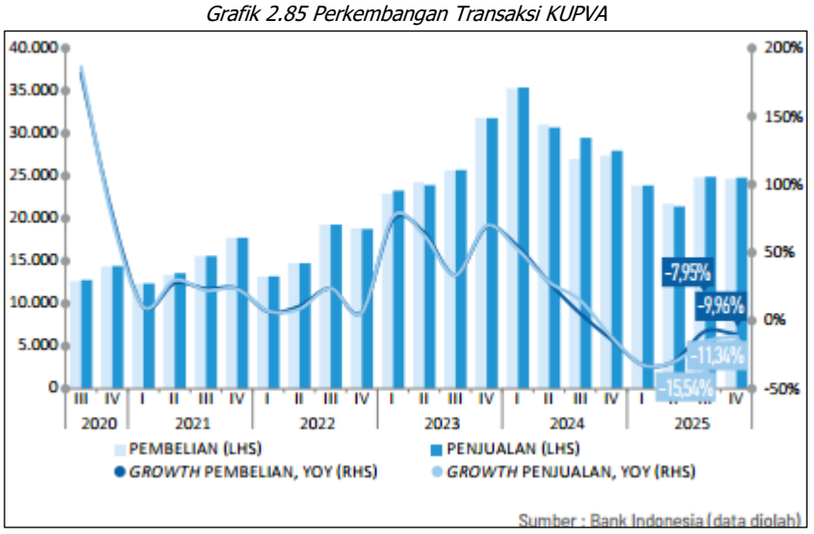
Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri terus melakukan monitoring perizinan dan pengawasan terhadap operasional 120 KUPVA BB dan 70 PJP LR yang berada di Provinsi Kepri hingga triwulan IV 2025.

2.1.18.1 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

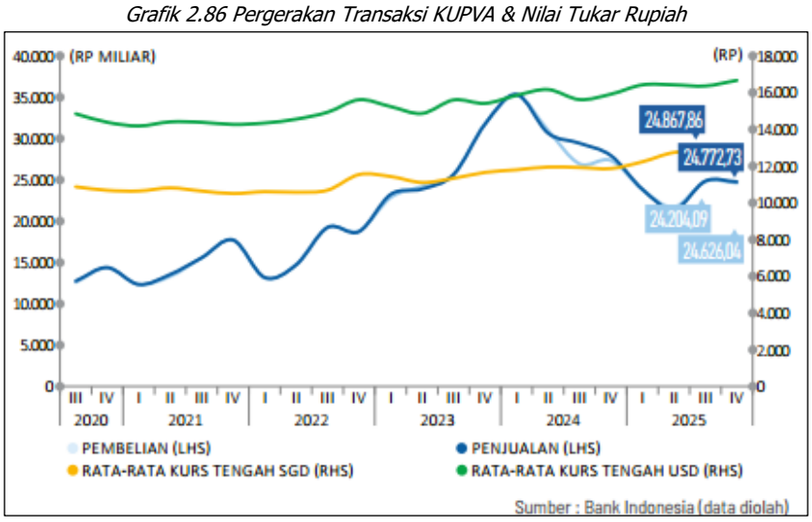
Perkembangan KUPVA BB di Kepri pada Triwulan IV 2025 menunjukan perubahan jumlah jaringan kantor jika dibandingkan dengan triwulan III 2025. Jumlah Kantor Pusat (KP) KUPVA BB meningkat dari 118 menjadi 120 kantor di triwulan IV 2025. Sementara itu, jumlah Kantor Cabang (KC) tidak berubah yakni tetap sebanyak 72 kantor.

Pada triwulan IV 2025, transaksi Uang Kertas Asing (UKA) didominasi oleh Dolar Singapura (SGD) sebesar 69,77% atau sejumlah Rp34,46 triliun, diikuti oleh Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 20,68% atau sejumlah Rp10,21 triliun, Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 4,96% atau sejumlah Rp2,45 triliun, Renminbi Tiongkok (CNY) sebesar 1,94% atau sejumlah Rp956,81 miliar, dan mata uang lainnya sebesar 2,65% atau sejumlah Rp1,30 triliun. Secara keseluruhan, total transaksi UKA pada Triwulan IV 2025 setara dengan Rp49,39 triliun, mengalami penurunan sebesar 0,55% (qtq) atau turun setara dengan Rp273,64 miliar dibandingkan triwulan III 2025.

Grafik 2.85 Perkembangan Transaksi KUPVA



Grafik 2.86 Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah

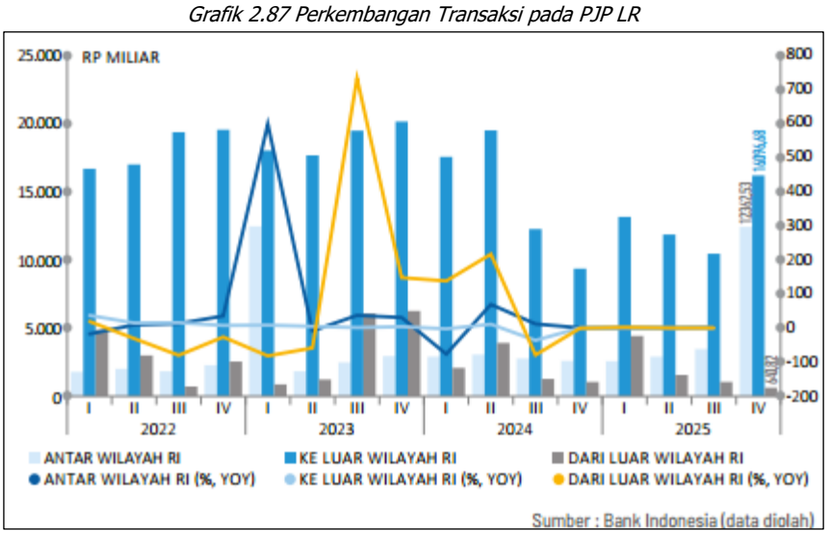


2.1.18.2 Perkembangan Transaksi PJP LR

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PJP LR di Kepri didominasi oleh jenis transaksi ke luar wilayah Indonesia atau transaksi outgoing sebesar 55,31%, diikuti transaksi antar wilayah Indonesia atau transaksi domestik dengan pangsa sebesar 42,48% dan transaksi dari luar wilayah Indonesia atau transaksi *incoming* sebesar 2,20%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pada triwulan IV 2025, PJP LR di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana dari wilayah Indonesia ke luar negeri antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang impor maupun transaksi lainnya.

Jumlah PJP LR di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 meningkat dibanding triwulan sebelumnya, yaitu dari 68 menjadi 70 PJP LR. Dari nominal transaksi, transaksi domestik dan *outgoing* mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal transaksi domestik tumbuh 380,17% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 24,62% (yoy). Transaksi outgoing juga tumbuh pada triwulan IV sebesar 72,94% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 14,66% (yoy). Adapun transaksi incoming mengalami kontraksi sebesar 39,07% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 16,13% (yoy). Secara umum, pada triwulan IV 2025 total pengiriman dana oleh PJP LR di Provinsi Kepri meningkat dari yang sebelumnya terkontraksi sebesar 8,08% (yoy) menjadi tumbuh 124,99% (yoy) atau dari sebesar Rp14,91 triliun pada triwulan III 2025 menjadi sebesar Rp29,10 triliun pada triwulan IV 2025.

Grafik 2.87 Perkembangan Transaksi pada PJP LR

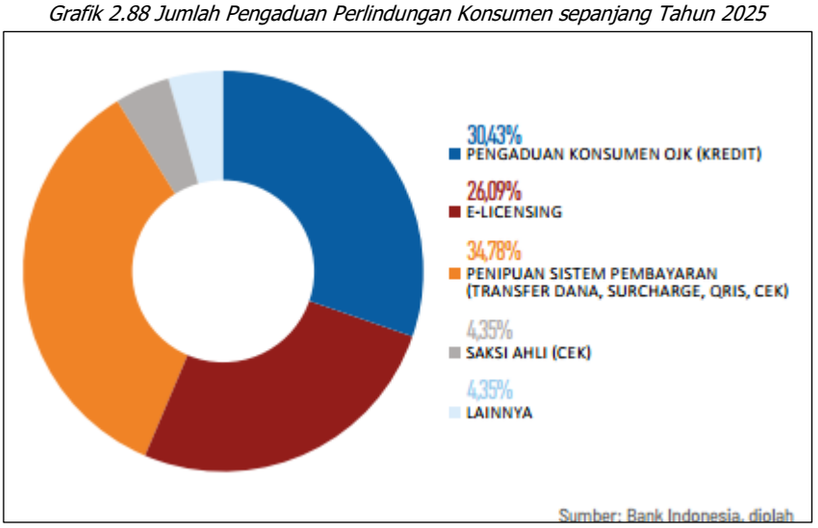


2.1.18.3 Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau

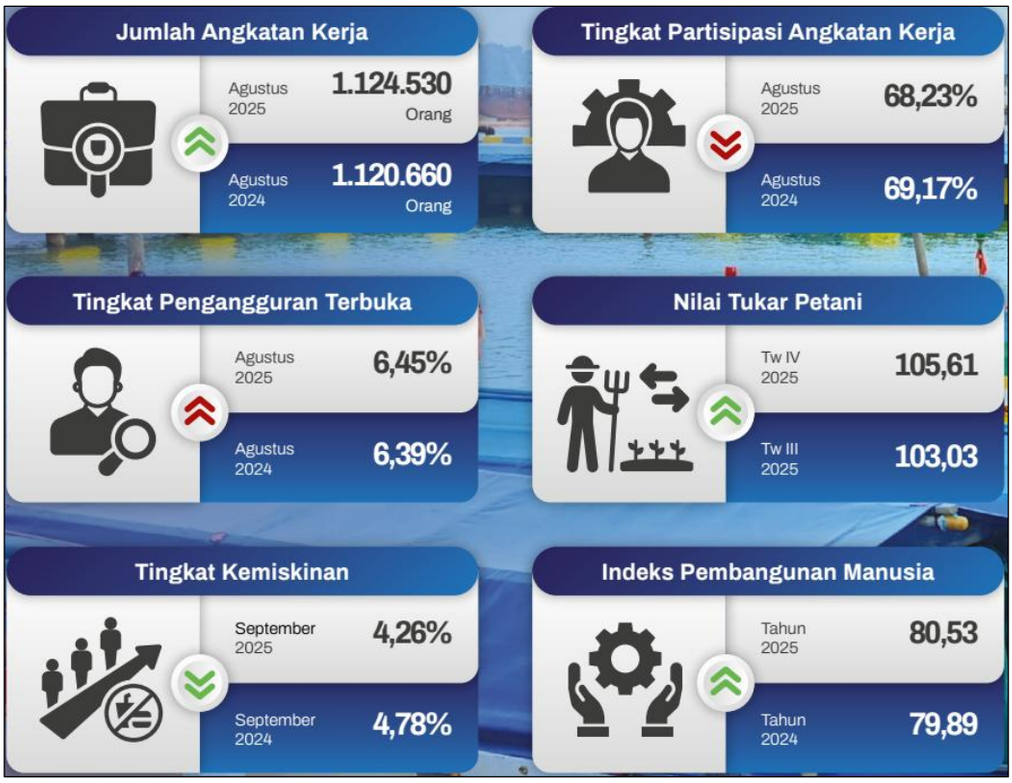
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara aktif melakukan fungsi edukasi pelindungan konsumen melalui sosialisasi daring dan luring serta pembuatan konten infografis dan video di media sosial. Hingga triwulan IV 2025 telah dilaksanakan berbagai edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan di dunia digital. Kegiatan ini meliputi seminar, sosialisasi, dan kuis yang berfokus pada edukasi hak dan kewajiban konsumen antara lain pelindungan data pribadi, tips dan trik aman bertransaksi, serta langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai modus penipuan digital. Pemanfaatan media sosial juga dioptimalkan untuk mensosialisasikan informasi penting terkait pelindungan konsumen. Edukasi pelindungan konsumen turut dilakukan melalui kunjungan sekolah serta sosialisasi pada event Gebyar Melayu Pesisir dan Bersama Rayakan Festival Digital Masyarakat Kepulauan Riau (BERLAYAR). Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi luring dan bazaar,serta diperkuat melalui edukasi di stasiun radio berupa siaran langsung dan himbauan kepada masyarakat di Kota Batam

Sepanjang tahun 2025, KPwBI Kepri telah menerima 23 (dua puluh tiga) pengaduan konsumen dan seluruhnya telah diselesaikan, meliputi pengaduan konsumen pembiayaan, *e-licensing*, penipuan sistem pembayaran, saksi ahli, serta lainnya.

Grafik 2.88 Jumlah Pengaduan Perlindungan Konsumen sepanjang Tahun 2025



2.1.19 Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan



Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami perbaikan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat secara umum dan tetap terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.

2.1.20 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kepri yang tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)[3] relatif stabil dengan kecendrungan meningkat tipis secara tahunan. TPT pada Agustus 2025 berada pada level 6,45%, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat 6,39%. Secara spasial, perubahan TPT tersebut terjadi karena perbedaan kondisi antar wilayah. TPT perdesaan meningkat dari 2,50% pada Agustus 2024 menjadi 3,56% pada Agustus 2025, sementara TPT perkotaan mengalami perbaikan dari 6,74% pada Agustus 2024 menjadi 6,70% pada Agustus 2025.

Pada Sakernas 2025, terdapat penyesuaian pola rilis sehingga publikasi data dilakukan secara triwulanan. Pada November 2025, TPT Kepri tercatat 6,35%, turun 0,10 persen poin dibanding Agustus 2025. Pada periode yang sama, TPT perdesaan tercatat sebesar 3,89%, naik 0,33 persen poin, sedangkan TPT perkotaan sebesar 6,55%, menurun 0,15 persen poin dibanding periode sebelumnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, TPT secara tahunan menurun pada kelompok pendidikan SMP ke bawah dan Perguruan Tinggi (Diploma dan Universitas) masing-masing dari rata-rata sebesar 5,87% dan 4,84% pada Agustus 2024 menjadi 3,17% dan 4,69% pada Agustus 2025. Perkembangan ini mengindikasikan perbaikan serapan tenaga kerja pada kedua kelompok pendidikan tersebut. Sementara itu, pada kelompok SMA/SMK TPT meningkat dari rata-rata sebesar 7,32% pada Agustus 2024 menjadi 8,95% pada Agustus 2025.

[3] *Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja*

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepri masih didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebanyak 25,14% dari jumlah tenaga kerja pada November 2025. Hal ini mencerminkan bahwa LU Industri Pengolahan memiliki peran yang strategis sebagai penyumbang PDRB terbesar dan menyediakan lapangan kerja terbanyak di Provinsi Kepri. LU berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja secara berurutan yakni LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (17,56%), LU Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan (13,77%), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,57%), dan LU Konstruksi (8,18%).

Tabel 2.89 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

Indikator	2023		2024		2025			Perubahan Ags - Nov2025	
	Feb'23	Ags'23	Feb'24	Ags'24	Feb'25	Ags'25	Nov '25	Orang	% Perubahan*
Angkatan Kerja (orang)	1.107.353	1.093.686	1.078.170	1.120.660	1.097.750	1.124.530	1.131.690	7.160	0,64%
Bekerja	1.023.125	1.019.356	1.003.390	1.049.090	1.016.540	1.051.980	1.059.850	7.870	0,75%
Pengangguran	84.228	74.330	74.780	71.570	75.210	72.560	71.840	(720)	-0,99%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,61%	6,80%	6,94%	6,39%	6,89%	6,45%	6,35%		-0,10%
- Perdesaan	4,71%	7,00%	5,73%	2,50%	5,89%	3,56%	3,89%		0,33%
- Perkotaan	7,90%	6,77%	7,06%	6,74%	6,99%	6,70%	6,55%		-0,15%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,29%	68,68%	67,14%	69,17%	66,84%	68,23%	68,39%		0,16%

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 2.90 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran										
		Feb'21	Agt'21	Feb'22	Aug'22	Feb'23	Agt'23	Feb'24	Aug'24	Feb'25**	Agt'25	Nov'25
1	≤SD	5,37%	7,76%	4,05%	3,31%	4,78%	5,44%	3,97%	5,48%	5,76%	3,17%	3,35%
2	SMP	8,61%	11,72%	8,69%	10,38%	6,45%	5,87%	10,47%	6,26%			
3	SMA	11,18%	11,75%	10,83%	11,03%	10,33%	7,85%	6,14%	7,80%	7,85%	8,95%	6,58%
4	SMK	13,39%	9,96%	8,24%	11,34%	9,41%	9,99%	10,17%	6,83%			
5	Diploma I/II/III	15,23%	8,82%	10,00%	3,51%	8,16%	2,93%	7,86%*	5,32%	6,33%	4,69%	10,80%
6	Universitas	9,59%	7,09%	5,30%	2,50%	5,12%	3,53%		4,36%			

Sumber: BPS (diolah)

Secara tahunan, pangsa kelompok berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, dan pekerja bebas mengalami penurunan masing-masing 0,92 persen poin, 0,41 persen poin, 2,29 persen poin dan 0,47 persen poin pada bulan Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara peningkatan pangsa jumlah pekerja terjadi pada kelompok berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga yang masing-masing meningkat sebesar 2,06 persen poin dan 2,01 persen poin pada bulan Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 2.91 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Feb'21	Agt'21	Feb'22	Aug'22	Feb'23	Agt'23	Feb'24	Agt'24	Feb'25	Aug'25	Nov'25
1	Industri Pengolahan	26,14%	25,01%	24,54%	25,77%	27,42%	25,23%	21,73%	23,65%	20,81%	24,16%	25,14%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Spd Motor	20,16%	17,67%	20,09%	17,41%	17,24%	16,45%	15,94%	16,59%	14,96%	16,58%	17,56%
3	Administrasi Pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan	13,94%	6,02%	12,95%	5,15%	13,92%	5,55%	17,78%	5,76%	17,17%	14,38%	13,77%
4	Konstruksi	8,49%	6,64%	9,46%	7,14%	8,02%	7,74%	8,32%	8,03%	6,85%	7,37%	8,18%
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,98%	9,00%	7,17%	7,80%	5,59%	8,36%	7,77%	7,08%	8,77%	7,49%	8,16%
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,82%	7,54%	6,16%	10,19%	9,63%	9,01%	11,16%	10,82%	11,58%	10,87%	11,57%
7	Transportasi dan Pergudangan (pengangkutan)	5,79%	6,05%	6,15%	6,34%	5,39%	6,22%	5,98%	6,46%	5,96%	6,34%	5,51%
8	Informasi, Komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat dan perusahaan	4,78%	1,48%	6,06%	2,07%	5,87%	1,72%	4,86%	1,36%	6,19%	5,74%	3,97%
9	Jasa Lainnya	4,63%	5,08%	5,80%	6,43%	5,62%	6,24%	4,99%	5,26%	5,58%	5,15%	5,36%
10	Tambang, Listrik, Air, dan Gas	1,27%	1,83%	1,62%	1,32%	1,30%	2,11%	1,46%	2,15%	2,13%	1,92%	0,78%

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 2.92 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2021		2022		2023		2024		2025		
		Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Nov
1	Berusaha Sendiri	19,06	20,90	15,46	19,80	15,75	20,17	16,86	17,42	16,82	16,50	16,38
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	6,34	6,10	7,55	5,77	6,59	5,63	7,05	6,06	6,02	8,12	5,20
3	Berusaha dibantu buruh tetap	3,60	3,15	3,93	3,23	3,86	3,77	3,42	4,29	3,60	3,87	4,06
4	Buruh/karyawan	61,04	64,79	62,57	60,45	67,78	62,56	63,38	64,16	63,98	61,87	63,32
5	Pekerja Bebas	4,22	4,02	3,41	4,12	1,06	1,71	3,61	2,30	4,26	1,83	3,18
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	5,74	5,90	7,08	6,63	4,96	6,17	5,68	5,77	5,36	7,78	5,86
	TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS (diolah)

Pada November 2025, Buruh/karyawan merupakan status pekerjaan yang paling dominan di Provinsi Kepri dengan porsi sebesar 65,32%, diikuti kelompok berusaha

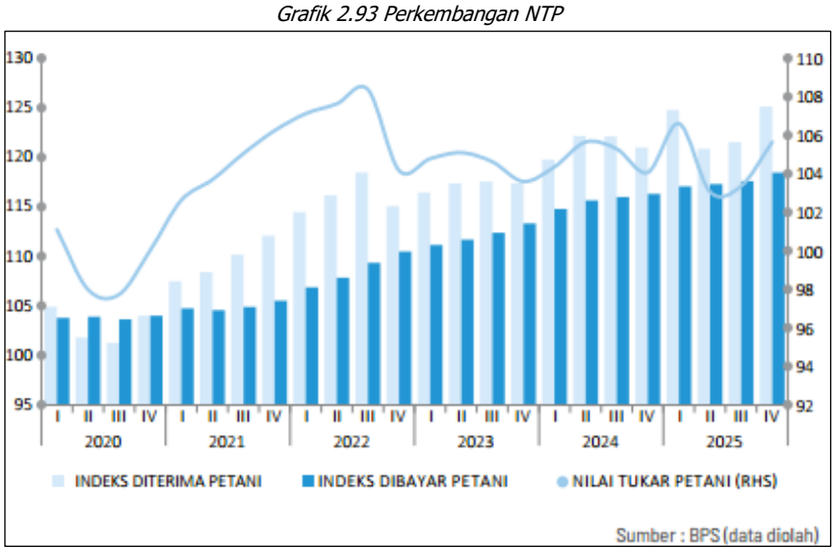
sendiri (wiraswasta mandiri) sebesar 16,38%, dan pekerja keluarga / tak dibayar dengan porsi sebesar 5,86%.

2.1.21 Kesejahteraan Masyarakat

2.1.21.1 Nilai Tukar Petani ((NTP)

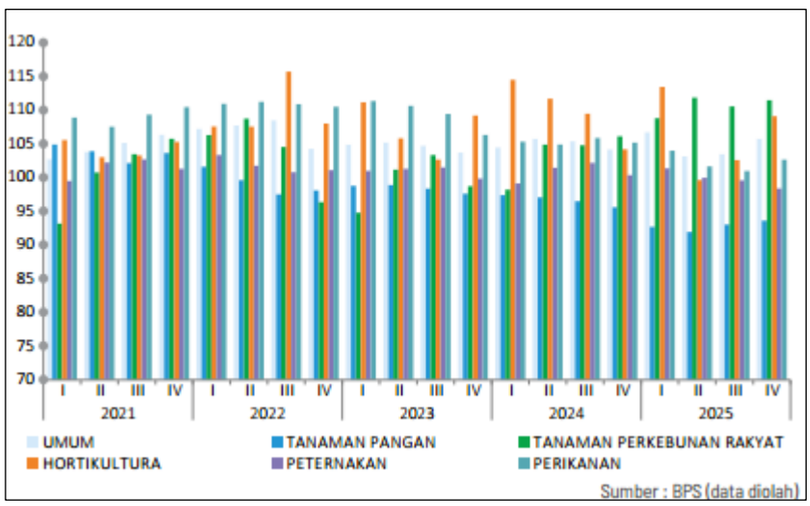
NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan analisis triwulanan, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan IV 2025 yang merupakan rata-rata bulan Oktober - Desember 2025 mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya (rata – rata bulan Juli - September 2025). Ratarata NTP pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 105,61, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 103,33. Peningkatan tersebut tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya NTP pada subkelompok Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Rakyat, dan Perikanan.

Grafik 2.93 Perkembangan NTP



Berdasarkan subsektor, NTP triwulan tertinggi tercatat pada sub kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 111,31, sementara NTP terendah tercatat pada sub-kelompok Peternakan sebesar 98,28. Sub kelompok Hortikultura mencatatkan kenaikan dari 102,48 pada triwulan III 2025 menjadi 108,96 pada triwulan IV 2025. Di sisi lain, penurunan turut terjadi pada sub-kelompok Peternakan yang tercatat 99,47 pada triwulan III 2025 menjadi 98,28 pada triwulan IV 2025.

Grafik 2.94 NTP Berdasarkan Subsektor



Tabel 2.95 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri

Sub Kelompok / Kelompok	2022				2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Tanaman Pangan																
a. Indeks yang Diterima (It)	109,13	108,23	107,59	109,04	110,36	110,94	111,08	111,16	112,62	113,22	112,92	112,18	109,48	108,71	110,36	111,94
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	107,53	108,77	110,46	111,28	111,84	112,29	113,05	113,99	115,74	116,75	117,14	117,46	118,21	118,35	118,72	119,69
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	101,49	99,50	97,41	97,99	98,67	98,80	98,26	97,52	97,31	96,97	96,40	95,51	92,62	91,86	92,96	93,53
2. Hortikultura																
a. Indeks yang Diterima (It)	115,06	116,38	127,04	119,47	123,41	117,88	115,10	123,46	131,29	129,21	126,97	121,16	132,47	116,58	120,35	129,11
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	107,09	108,34	109,95	110,74	111,16	111,52	112,25	113,18	115,12	115,82	116,13	116,42	116,94	117,13	117,43	118,44
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	107,44	107,42	115,55	107,89	111,02	105,70	102,55	109,07	114,34	111,56	109,34	104,07	113,29	99,53	102,48	108,96
3. Tanaman Perkebunan Rakyat																
a. Indeks yang Diterima (It)	114,13	117,98	115,11	107,04	105,85	113,62	116,99	112,52	113,59	122,35	123,23	124,58	128,65	132,43	131,27	133,52
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	107,49	108,64	110,27	111,19	111,78	112,43	113,08	114,08	115,77	116,78	117,24	117,53	118,39	118,57	118,90	119,96
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	106,17	108,59	104,41	96,27	94,69	101,06	103,22	98,63	98,12	104,77	104,67	106,00	108,66	111,69	110,40	111,31
4. Peternakan																
a. Indeks yang Diterima (It)	106,85	108,89	109,45	110,35	111,02	112,16	112,97	111,37	111,82	115,15	115,10	114,56	116,77	115,48	115,38	114,75
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	106,53	107,40	108,70	109,28	110,04	110,85	111,41	112,03	112,93	113,62	80,59	114,27	115,34	115,63	116,00	116,76
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	103,22	101,64	100,69	100,98	100,89	101,19	101,40	99,73	99,02	101,35	102,06	100,26	101,25	99,87	99,47	98,28
5. Perikanan																
a. Indeks yang Diterima (It)	117,51	117,96	119,58	121,19	123,07	122,87	122,33	119,86	120,08	120,26	121,10	121,23	120,67	117,72	117,68	120,24
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	106,06	106,66	107,98	109,81	110,68	111,21	111,92	112,88	114,16	114,77	115,05	115,39	116,17	116,46	116,67	117,25
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	110,79	111,08	110,75	110,36	111,20	110,49	109,30	106,20	105,19	104,78	105,74	105,06	103,88	101,54	100,86	102,55
Umum																
a. Indeks yang Diterima (It)	**114,41**	**116,10**	**118,41**	**115,02**	**116,38**	**117,30**	**117,49**	**117,31**	**119,70**	**122,08**	**122,03**	**120,94**	**124,69**	**120,79**	**121,45**	**125,05**
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	**106,84**	**107,82**	**109,31**	**110,45**	**111,11**	**111,65**	**112,34**	**113,27**	**114,73**	**115,59**	**115,94**	**116,25**	**117,01**	**117,24**	**117,53**	**118,39**
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	**107,08**	**107,59**	**108,33**	**104,14**	**104,75**	**105,06**	**104,59**	**103,57**	**104,33**	**105,61**	**105,25**	**104,04**	**106,57**	**103,03**	**103,33**	**105,61**

Sumber: BPS (data diolah)

2.1.21.2 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada September 2025 tercatat sebanyak 114.550 orang, menurun dibanding Maret 2025 sebesar 117.280 orang. Sejalan dengan itu, garis kemiskinan pada September 2025 meningkat dari Rp832.410/kapita/bulan pada Maret 2025 menjadi Rp870.738/kapita/bulan pada September 2025. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode September 2025 tercatat sebesar 0,601%, lebih rendah dibandingkan dengan periode Maret 2025 yang sebesar 0,688%. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2025 turut mengalami penurunan dari 0,179% pada Maret 2025 menjadi sebesar 0,145% pada September 2025.

Tabel 2.96 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

	2021		2022		2023	2024		2025	
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Mar	Sept	Mar	Sept
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	144.462	137.750	151.680	148.890	142.500	138.300	124.960	117.280	114.550
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69	5,37	4,78	4,44	4,26
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526	787.211	807.602	832.410	870.738
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)	1,070	0,953	1,047	0,886	0,823	0,704	0,635	0,688	0,601
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2 (%)	0,280	0,218	0,252	0,186	0,181	0,146	0,143	0,179	0,145
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	9,47%	-3,41%	5,00%	8,09%	-6,05%	-7,11%	-12,31%	-15,20%	-8,33%
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	4,51%	5,88%	6,48%	11,72%	8,55%	7,77%	8,76%	5,74%	7,82%

Sumber: BPS (data diolah)

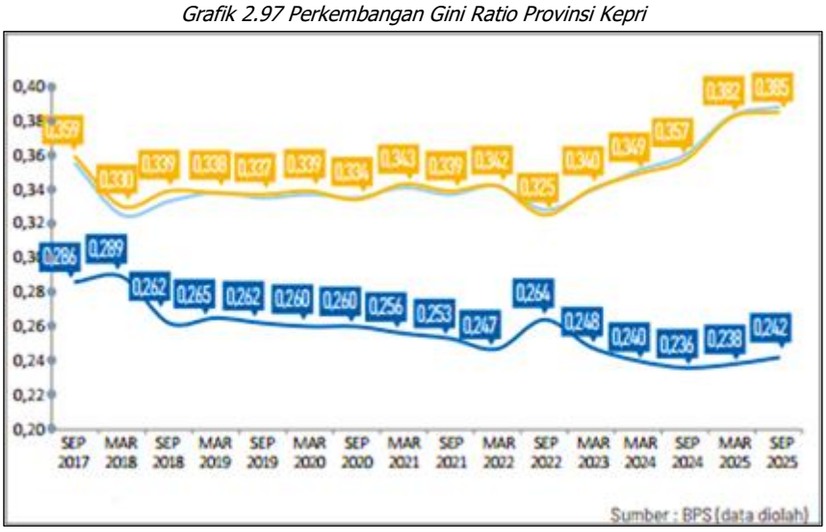
2.1.21.3 Gini Ratio (GR)

Gini Ratio[4] Provinsi Kepri pada September 2025 tercatat sebesar 0,385, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,382. Kenaikan Gini Ratio mengindikasikan bahwa adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri pada periode Maret – September 2025. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Gini Ratio perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,388, meningkat dari Maret 2025 sebesar 0,383. Sementara itu, Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,242, meningkat dari Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,238. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Jika

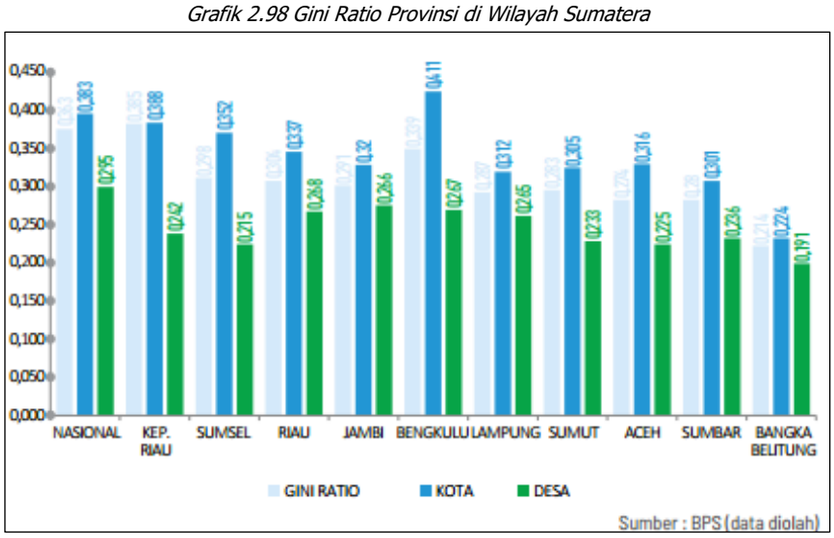
[4] Gini Ratio merupakan ratio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini Ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri adalah yang

Grafik 2.97 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri



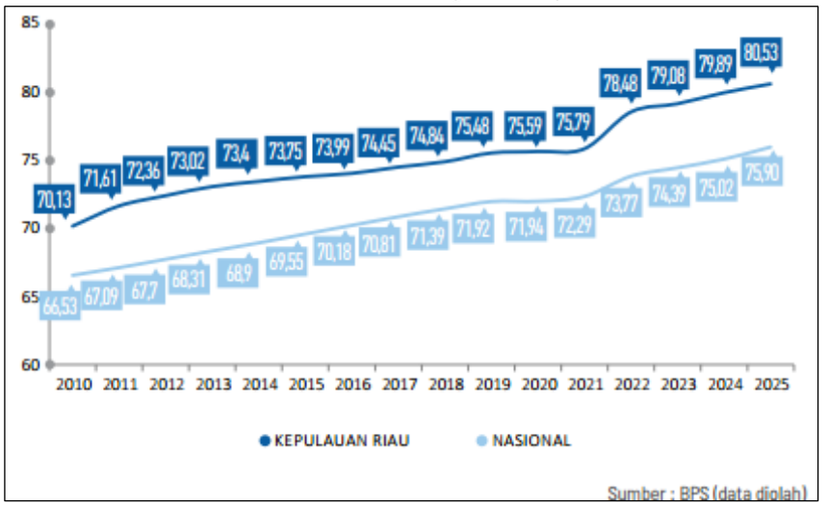
Grafik 2.98 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera



2.1.21.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Kepri pada tahun 2025 tercatat sebesar 80,53, meningkat 0,64 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 79,89. Peningkatan IPM Kepri pada 2025 didukung oleh perbaikan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka UHH saat Lahir di Kepri tercatat sebesar 75,46, artinya bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,46 tahun, lebih lama 0,34 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2024. Angka UHH ini turut menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.

Grafik 2.99 Perkembangan IPM Kepri



Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 13,28 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,72 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp15.881.000,00, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.573.000,00.

Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM. IPM Kota Batam dan Tanjungpinang termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan angka IPM masingmasing 83,80 dan 82,02. Sementara itu 5 (lima) kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan, semua Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.100 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	74,25	74,36	74,62	74,90	75,12	75,46
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05	13,27	13,28
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41	10,50	10,72
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp 0000	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998	15.573	15.881
IPM		71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08	79,89	80,53

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 2.101 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri berdasarkan wilayah kabupaten/kota

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karimun	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65	74,70	75,49	76,08
Bintan	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99	77,50	77,96	78,65
Natuna	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47	78,23	78,60	78,94
Lingga	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57	72,23	73,05	73,82
Kepulauan Anambas	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61	72,80	73,47	74,07
Batam	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67	82,64	83,32	83,80
Tanjungpinang	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64	81,14	81,58	82,02
Kepulauan Riau	**73,75**	**73,99**	**74,45**	**74,84**	**75,48**	**75,59**	**75,79**	**78,48**	**79,08**	**79,89**	**80,53**

Sumber: BPS (data diolah)

2.1.22 Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian global diprakirakan cenderung stagnan dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Kondisi ini diprakirakan didorong oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta berlanjutnya tensi geopolitik. Sementara itu, perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, serta membaiknya ekspektasi masyarakat. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun

2026 diprakirakan tumbuh melambat didorong oleh normalisasi pasca realisasi yang tinggi pada 2025 (*base effect*).

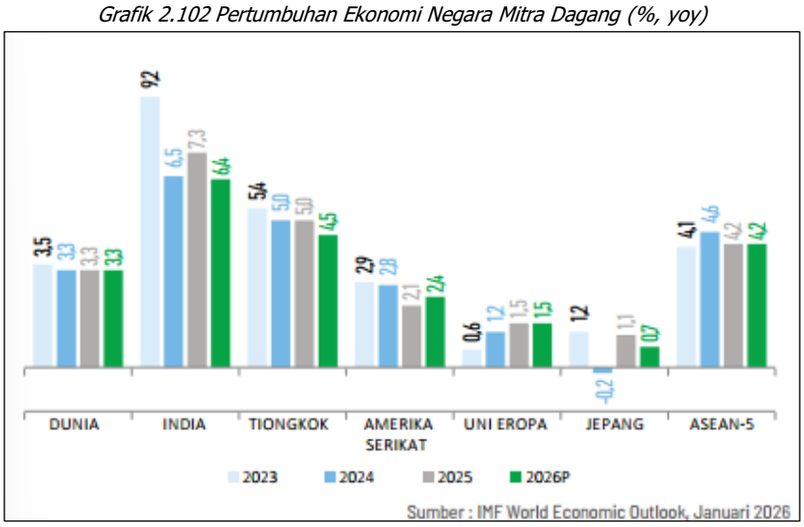
Inflasi Kepri pada tahun 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran target 2,5±1% (yoy). Stabilitas inflasi tersebut didukung oleh normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi di daerah melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.23 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 2025 dan 2026

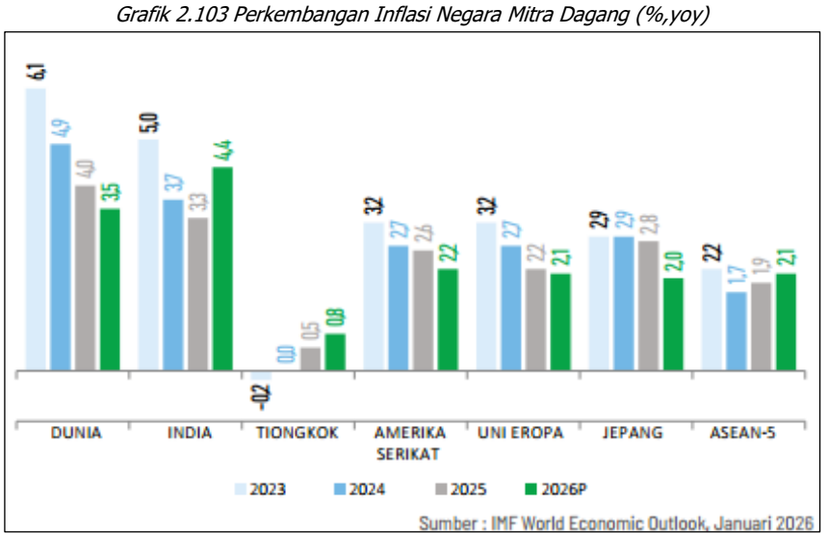
Perekonomian global 2026 diprakirakan cenderung stagnan dibanding estimasi tahun 2025. Berdasarkan proyeksi dari *International Monetary Fund* (IMF) pada Januari 2026, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diprakirakan sebesar 3,3% (yoy), atau meningkat 0,2 persen poin dibandingkan prakiraan pada bulan Oktober 2025, serta sama dengan estimasi pertumbuhan tahun 2025 yang sebesar 3,3% (yoy). Perbaikan proyeksi tersebut didukung oleh revisi ke atas pada pertumbuhan negara maju (*advanced economies*) khususnya AS dan pada negara *emerging market and developing economies* khususnya di wilayah Asia. Pertumbuhan ekonomi AS mengalami revisi atas menjadi 2,4% (yoy) seiring meningkatnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI). Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) di tahun 2026 diproyeksikan sebesar 4,2% (yoy), stagnan dibandingkan estimasi pertumbuhan pada 2025 yang juga sebesar 4,2% namun mengalami revisi atas dari proyeksi sebelumnya.

Tekanan inflasi global diprakirakan terus menurun, dari estimasi 4,1% (yoy) pada tahun 2025 menjadi 3,8% (yoy) pada tahun 2026. Penurunan ini terutama didorong oleh berlanjutnya penurunan harga komoditas energi dunia. Meski demikian, potensi berlanjutnya konflik geopolitik global tetap menjadi risiko yang dapat mendorong kembali tekanan inflasi. Tren disinflasi yang masih berlangsung diprakirakan akan membuka ruang bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif.

Grafik 2.102 Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (%, yoy)

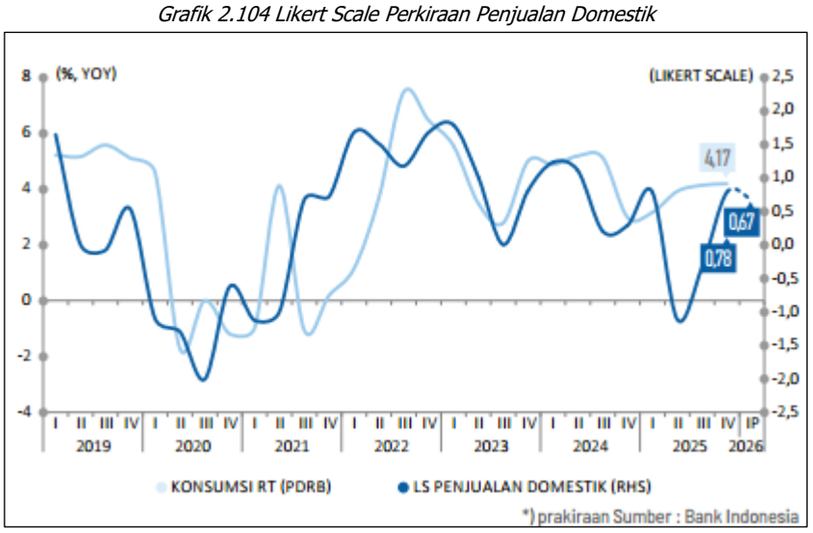


Grafik 2.103 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (%,yoy)

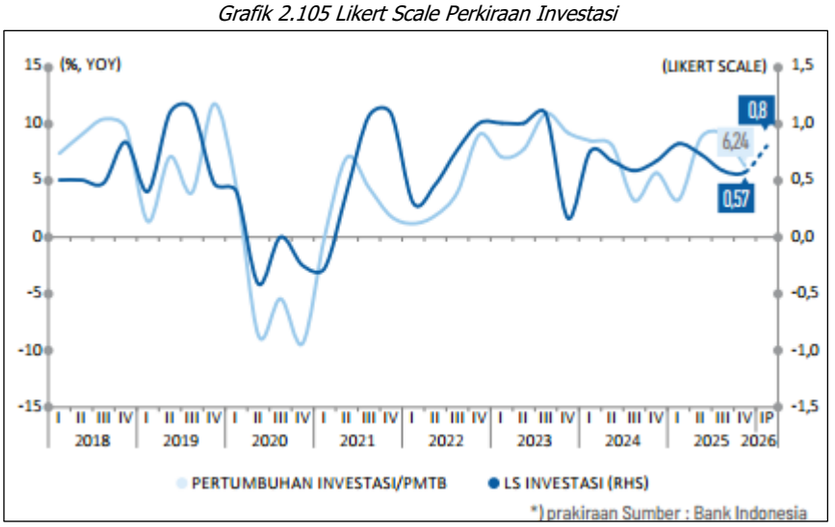


Ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berdaya tahan di tengah tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 berada pada kisaran 4,9% - 5,7% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik didukung oleh berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, ekspektasi konsumen yang terus membaik dan peningkatan investasi pemerintah utamanya terkait hilirisasi SDA. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2026 juga didorong oleh berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2.104 Likert Scale Perkiraan Penjualan Domestik



Grafik 2.105 Likert Scale Perkiraan Investasi



Tabel 2.106 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2025

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Kebijakan Moneter Akomodatif	Kebijakan moneter yang lebih akomodatif seiring dengan tren inflasi yang melandai diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat.	Δ
Kunjungan Wisatawan	Implementasi kebijakan *short term visa* serta kebijakan pendorong pariwisata lainnya dapat mendukung kunjungan wisman. Kunjungan wisman mancanegara yang mencapai 2.027.037 kunjungan pada 2025, tumbuh 21,59% dari 2024 dan mencatatkan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah wisatawan ini diprakirakan akan berlanjut hingga 2026.	Δ
Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Berlanjutnya pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri.	Δ
Investasi	Pengenaan tarif dumping oleh AS untuk produk solar panel Indonesia dan *refocusing* anggaran subsidi *green energy* oleh AS sebagai importir utama solar panel di Kepri sehingga investor cenderung wait and see	∇
Pertambangan	*Natural declining* sumur tua di Kepri, kesepakatan OPEC+ menghentikan sementara kenaikan produksi minyak untuk kuartal pertama tahun 2026 sehingga dapat menahan kinerja ekspor migas Kepri dan potensi dampak tidak langsung pembatasan impor BBM oleh Kementerian ESDM.	∇
Persaingan Daerah Industri	Peresmian kerja sama *Johor-Singapore Special Economic Zone* (JS-SEZ) dan *Eastern Economic Corridor* (EEC) Thailand yang meningkatkan persaingan investasi dengan KEK yang ada di Kepri	∇
Risiko Geopolitik	Ketidakpastian global meningkat sejalan dengan ketegangan geopolitik yang melibatkan banyak negara besar dalam dinamika perdagangan internasional seperti AS, China, Rusia, Iran, Ukraina.	∇

Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2026 diprakirakan tetap tumbuh, namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kepri didukung oleh konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang terakselerasi dibanding 2025. Hal ini sejalan dengan kenaikan UMR dan multiplier effect peningkatan jumlah wisatawan di 2025 yang kembali ke level pra-pandemi dan diprakirakan terus meningkat pada 2026. Hal ini didukung oleh hasil Survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukan *likert scale* (LS) penjualan domestik yang mengalami peningkatan. Sementara itu, net ekspor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap tumbuh positif namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat normalisasi pasca kenaikan yang masif di 2025. Adapun dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Kepri terutama LU Konstruksi dan LU Perdagangan Besar dan Eceran.Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, LU Industri pengolahan juga diprakirakan tumbuh namun sedikit mengalami perlambatan dibanding 2025. Pertumbuhan yang tetap positif ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) secara global diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap industri semikonduktor dan elektronik. Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2026 di prakirakan tumbuh pada kisaran 6,38% - 7,18% (yoy).

2.1.24 Prospek Inflasi 2025 dan 2026

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2026 diprakirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2026 diprakirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diprakirakan akan tetap stabil sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, sinergi TPID melalui program GPIPS diprakirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat terjaga dalam kisaran sasaran. Selanjutnya, moderasi tarif angkutan udara sejalan dengan penambahan jumlah armada/rute penerbangan diprakirakan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut turut didukung oleh konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID

Tabel 2.107 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2025

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
Upside Risk	• Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk. • Potensi kenaikan harga pangan karena peningkatan permintaan. • Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik. • Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut. • Risiko cuaca ekstrim atau anomali iklim • Kenaikan UMR yang berpotemsi mendorong *m* apabila tidak didukung ketersediaan pasokan yang memadai • Normalisasi tarif listrik setelah mengalami diskon 50% pada 2025 dan kenaikan tarif PDAM di Kota Tanjungpinang
Downside Risk	• Berlanjutnya normalisasi harga minyak dunia diperkirakan dapat menurunkan tingkat harga komoditas energi. • Normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan dan perluasan frekuensi penerbangan dan kebijakan diskon tarif angkutan udara. • Inflasi inti tetap terjaga sejalan dengan terkendalinya ekspektasi inflasi. • Upaya GPIPS yang terus digencarkan melalui program GERNAS PANGAN yang dimulai pada Februari 2026.

Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Potensi kenaikan harga beberapa komoditas pangan sebagai dampak berlanjutnya ketegangan geopolitik, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.

2. Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan pasokan domestik agar tidak menimbulkan tekanan harga.
3. Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih tinggi.
4. Risiko cuaca ekstrim atau anomali iklim yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan sehingga meningkatkan volatilitas dan harga komoditas pangan.
5. Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat namun berpotensi memberikan tekanan dari sisi permintaan (*demand pull*) apabila ketersediaan pasokan tidak seimbang.
6. Normalisasi tarif listrik serta potensi dampak kenaikan tarif PDAM di Kota Tanjungpinang

2.1.25 Rekomendasi

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain:

1. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui:
    a) Penyediaan insentif dan penguatan regulasi, termasuk perluasan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA).
    b) Meningkatkan promosi investasi dengan menjadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai daya tarik utama, didukung oleh lokasi strategis serta kepastian iklim investasi.
    c) Mendukung peningkatan keunggulan komparatif daya saing investasi di Kepri di tengah persaingan regional yang semakin ketat (termasuk dengan berdirinya *Johor-Singapore Special Economic Zone* dan *Eastern Economic Corridor*) melalui penguatan insentif bagi investor dan perbaikan infrastruktur.
2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui:
    a) Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain melalui penambahan event, peningkatan promosi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) serta pengembangan *quality tourism*.
    b) Mendukung penerapan kebijakan *short term* visa guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri.
    c) Mendorong normalisasi frekuensi penerbangan dan pembukaan rute baru di wilayah Kepri untuk memperkuat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus menjaga stabilitas harga pada komoditas angkutan udara.
    d) Mengoptimalkan realisasi belanja pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN, untuk menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian.
    e) Mendorong proses hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam Kepri untuk memperkuat *local value chain* (LVC).
    f) Memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal, termasuk peningkatan akseptansi QRIS oleh *merchant dan user*, serta promosi QRIS *cross-border* untuk mendukung konsumsi masyarakat.

g) Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sehingga dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja daerah.

h) Memperkuat program pemberdayaan UMKM melalui dukungan pembiayaan, *capacity building*, perluasan akses pasar, dan pendampingan agar mampu menghasilkan produk unggulan berorientasi ekspor.

i) Mendorong capaian target dalam sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED)

Selanjutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat, antara lain:

1. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GPIPS dengan fokus pada 3 (tiga) periode waktu, yaitu:
   a) jangka pendek: prioritas Penguatan Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN
   b) jangka menengah-panjang: Antisipasi terhadap potensi risiko hidrometeorologi untuk memperkuat ketahanan pangan
   c) Jangka Menengah-Panjang: Penguatan sinergi Satgas untuk percepatan pemulihan bencana pada lahan pertanian terdampak sebagai salah satu pemasok utama komoditas pangan di Kepri
2. Mendorong peningkatan produksi pangan di tengah keterbatasan lahan subur, antara lain melalui budidaya cabai merah oleh koperasi dan kelompok tani serta pembangunan greenhouse untuk mengatasi kendala cuaca. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat dioptimalkan dalam pengembangan komoditas pangan strategis.
3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar anggota TPID melalui rapat koordinasi, rapat teknis, dan *High Level Meeting* (HLM) untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi masyarakat perlu dilakukan dengan penyebaran informasi terkait pasokan, kewajaran harga, serta kampanye belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan *flyer*.
4. Meningkatkan sinergi antar instansi dalam TPID melalui penyelarasan program pendukung GPIPS.
5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan, khususnya yang berasal dari luar daerah dengan dukungan dan kerja sama bersama asosiasi distributor.
6. Memperkuat koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam pelaksanaan program stabilisasi harga pangan strategis.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada regulasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu merujuk pada ketentuan dalam arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berpedoman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Kebijakan pendapatan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas, dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini. Secara umum kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada Upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dititik beratkan untuk meningkatkan PAD melalui kontribusi peningkatan Pajak Kendaraan bermotor. Sedangkan kebijakan belanja Daerah diprioritaskan untuk beberapa jenis belanja. Prioritas pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan (*mandatory spending*), meliputi : (1) Belanja Fungsi Pendidikan; (2) Belanja infrastruktur pelayanan publik; (3) Belanja untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan; (4) Belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah; dan (5) Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu prioritas pertama juga untuk membiayai Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk: (1) Belanja Pegawai termasuk Gaji PPPK; (2) Belanja DAU, DAK, dan Dana Insentif Fiskal; (3) Belanja Operasional Kantor.

Selain itu, arah kebijakan belanja digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 – 2029, selanjutnya untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Kebijakan pembiayaan, untuk penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2024 yang telah diaudit oleh BPK RI menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025.

Implementasi kebijakan ekonomi yang ditetapkan membutuhkan anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mewujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.937.501.110.900,44 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebesar Rp3.910.214.946.462,43 dan Belanja Daerah sebesar Rp3.932.501.110.900,44 dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp27.286.164.438,01 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyusunan Pendapatan Daerah berkaitan dengan penyesuaian penetapan proyeksi target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah sampai dengan bulan Juni 2025 dan adanya penyesuaian terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Transfer Umum dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi makro dan fiskal nasional terkait dengan dana transfer ke daerah, kebijakan harga bahan bakar minyak, perkembangan pemasaran industri otomotif, kondisi perekonomian daerah yang terkorelasi dengan daya beli masyarakat, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Target Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.918.402.282.363,00 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2.108 Perbandingan Target Pendapatan pada APBD dan Perubahan Pergeseran APBD TA 2025

URAIAN	APBD	PERUBAHAN PERGESERAN APBD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4 = (3-2)	5 = (4/2*100)
Pendapatan Daerah				
Pendapatan Asli Daerah	1.760.011.907.866,00	1.904.763.732.160,43	144.751.824.294,43	8,22
Pendapatan Transfer	2.157.066.271.997,00	2.004.127.111.802,00	(152.939.160.195,00)	(7,09)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah	**3.918.402.282.363,00**	**3.910.214.946.462,43**	**(8.187.335.900,57)**	**(0,21)**

Dalam mengupayakan pencapaian target Pendapatan Daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya melakukan optimalisasi Pendapatan Daerah. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan daerah dalam Tahun 2025, berbagai upaya peningkatan kinerja pendapatan akan terus ditempuh baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat serta memegang teguh prinsip prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk mendorong peningkatan Pendapatan Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

2.2.1.1 Penyempurnaan regulasi pelaksanaan perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada UU HKPD dan Peraturan pelaksanaannya;

2.2.1.2 Percepatan Pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat melalui koordinasi dengan OPD terkait;

2.2.1.3 Optimalisasi pemungutan PBBKB melalui monitoring berkala dan Pemeriksaan kepatuhan pelaporan Wajib Pungut PBBKB;

2.2.1.4 Inventarisasi dan identifikasi potensi pajak, baik yang sudah dipungut maupun potensi pajak yang belum dan akan dipungut, Seperti optimalisasi penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak, penggalian potensi baru dari Pajak Alat Berat, dan berkoordinasi dengan Kemendagri secara periodik terkait peraturan yang mengatur Nilai jual Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;

2.2.1.5 Melakukan sosialisasi dan penyeberluasan informasi ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru melalui berbagai media komunikasi dan publikasi;

2.2.1.6 Optimalisasi pelaksanaan Sinergi dan kerjasama pemungutan Opsen Pajak dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

2.2.1.7 Meningkatkan sinergi dan kerjasama optimalisasi pemungtan pajak daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2.2.1.8 Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;

2.2.1.9 Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi;

2.2.1.10 Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;

2.2.1.11 Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai Upaya meningkatkan retribusi daerah;

2.2.1.12 Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan OPD Penghasil dan instansi terkait dalam penggalian potensi retribusi sebagai upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah;

2.2.1.13 Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi berupa deviden secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

2.2.1.14 Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;

2.2.1.15 Revitalisasi dan pendayagunaan kekayaan daerah agar untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;

2.2.1.16 Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;

2.2.1.17 Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; dan

2.2.1.18 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, instansi terkait, dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka penyelesaiaan kinerja sebagai sarat salur serta peningkatan pendapatan Dana Transfer ke Daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum Kebijakan Belanja Daerah adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar belanja daerah dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, dan Pemerintah Daerah tidak akan memperoleh pembayarannya Kembali. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Menetapkan Belanja Daerah sebesar Rp3.932.501.110.900,44 untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2.109 Perbandingan Target Belanja pada APBD dan Perubahan Pergeseran APBD TA 2025

URAIAN	APBD	PERUBAHAN PERGESERAN APBD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4 = (3-2)	5 = (4/2*100)
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	2.883.865.776.275,89	2.944.090.151.988,51	60.224.375.712,62	2,09
BELANJA MODAL	278.074.825.826,11	269.313.511.475,33	(8.761.314.350,78)	(3,15)
BELANJA TIDAK TERDUGA	109.748.000.000,00	2.281.396.903,60	(107.466.603.096,40)	(97,92)
BELANJA TRANSFER	646.953.680.261,00	716.816.050.533,00	69.862.370.272,00	10,8
JUMLAH BELANJA	**3.918.642.282.363,00**	**3.932.501.110.900,44**	**13.858.828.537,44**	**0,35**

Kebijakan belanja daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum difokuskan untuk:

2.2.2.1 Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

2.2.2.2 Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

2.2.2.3 Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2.2.2.4 Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024;

2.2.2.5 Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025;

2.2.2.6 Penyesuaian belanja daerah terhadap perubahan proyeksi pendapatan asli daerah hingga akhir tahun 2025, seperti perubahan estimasi pada Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Rokok, dan Pajak Alat Berat (PAB);

2.2.2.7 Penganggaran kembali atas penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil audit BPK Provinsi Kepulauan Riau;

2.2.2.8 Penyesuaian belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan pemerintah pusat;

2.2.2.9 Pelaksanaan Program Asta Cita sesuai Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2.2.2.10 Penyesuaian belanja Gaji ASN akibat dari pengangkatan CPNS dan PPPK baru sebagaimana hasil perhitungan dan rekonsiliasi gaji yang telah dilakukan pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

2.2.2.11 Penyesuaian penganggaran dan pelaksanaan kegiatan mendesak yang telah dianggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;dan

2.2.2.12 Pembayaran atas Kewajiban Pihak Ketiga (Tunda Bayar) untuk Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam rangka upaya optimalisasi pencapaian belanja daerah pada tahun 2025, maka beberapa tindakan Strategi Belanja yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pelaksanaan belanja program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025.
2. Efektivitas dan transparansi Belanja Daerah, yaitu dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan langsung dengan prioritas pembangunan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Daerah, pendanaan arah kebijakan yang bersifat *mandatory*, pencapian standar pelayanan minimal, pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan mempertimbangkan aspek efesiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, yaitu dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

    2.8.2.3.1 Belanja daerah dioptimalkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;

2.8.2.3.2 Belanja daerah yang bersifat pembangunan fisik segera diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan

2.8.2.3.3 Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Secara umum Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, dengan maksud untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Berikut Rincian Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.110 Perbandingan Pembiayaan Daerah pada APBD dan Perubahan Pergeseran APBD TA 2025

URAIAN	APBD	PERUBAHAN PERGESERAN APBD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4 = (3-2)	5 = (4/2*100)
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	2.883.865.776.275,89	2.944.090.151.988,51	60.224.375.712,62	2,09
BELANJA MODAL	278.074.825.826,11	269.313.511.475,33	(8.761.314.350,78)	(3,15)
BELANJA TIDAK TERDUGA	109.748.000.000,00	2.281.396.903,60	(107.466.603.096,40)	(97,92)
BELANJA TRANSFER	646.953.680.261,00	716.816.050.533,00	69.862.370.272,00	10,8
JUMLAH BELANJA	**3.918.642.282.363,00**	**3.932.501.110.900,44**	**13.858.828.537,44**	**0,35**

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada perubahan APBD tahun Anggaran 2025 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yakni dari sebelumnya sebesar 5.240.000.000,00 menjadi sebesar Rp27.286.164.438,01 atau mengalami kenaikan sebesar Rp22.046.164.438,01. Kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal (Investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kepada BUMD PT. Energi Kepri sebesar Rp5.000.000.000,00.

2.3 Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dapat terlihat pada indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan membandingkan antara untuk melihat perbandingan target (anggaran) yang hendak dicapai dengan realisasinya sampai dengan periode 31 Desember 2025. Pada tahun anggaran 2025 Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp3.712.434.360.163,46 atau 94,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp3.715.604.258.925,54 atau 94,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.932.501.110.900,44 sedangkan Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp27.291.476.128,01 atau 100,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.286.164.438,01 dan Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.

2.3.1 Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.712.434.360.163,46 atau 94,94% dari target yang ditetapkan dalam

APBD sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Capaian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 turun sebesar Rp245.861.001.099,22 atau sebesar 6,62% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.958.295.361.262,68. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar Rp1.736.336.133.204,89 atau sebesar 91,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.904.763.732.160,43. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.974.299.383.024,00 atau 98,51% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.004.127.111.802,00, dan penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp1.798.843.934,57 atau 135,85% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.324.102.500,00. Secara ringkas realisasi pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.11 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Periode 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	2025%	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (3/2)*100	5
Pendapatan daerah				
Pendapatan asli daerah (pad)	1.904.763.732.160,43	1.736.336.133.204,89	91,15	1.980.461.763.464,68
Pendapatan transfer	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85	1.300.531.591,00
Jumlah pendapatan	**3.910.214.946.462,43**	**3.712.434.360.163,46**	**94,94**	**3.958.295.361.262,68**

2.3.2 Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah

Indikator pencapaian target kinerja Belanja APBD dapat dicermati melalui optimalisasi capaian kinerja program. Berdasarkan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp3.715.604.258.925,54 atau 94,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.932.501.110.900,44. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berasal dari belanja operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.779.255.950.571,38 dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp2.944.090.151.988,51 atau 94,40%. Belanja Modal yang terealisasi adalah sebesar Rp232.159.877.710,16 atau 86,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp269.313.511.475,33, Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp2.281.396.903,60 dikarenakan tidak ada peristiwa yang mengakibatkan adanya pengeluaran dari belanja tidak terduga. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp704.188.430.644,00 atau sebesar 98,24% dari yang dianggarkan di APBD sebesar Rp716.816.050.533,00. Rincian realisasi Belanja per Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Realisasi Belanja per Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	19.316.741.138,00	18.762.730.608,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.636.034.038,00	180.159.124.503,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	754.777.212.470,95	838.836.392.279,31
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.962.203.403,00	10.566.225.571,36
5	Badan Pendapatan Daerah	106.733.268.335,75	115.930.186.890,20
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.129.768.952,00	6.876.027.694,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.325.213.721,00	15.453.682.273,00
8	Badan Penghubung Daerah	13.101.772.294,00	17.501.504.858,00
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	27.559.679.920,00	33.330.453.821,00

No	Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
10	Biro Administrasi Pimpinan	6.000.053.714,00	11.743.835.725,00
11	Biro Hukum	1.766.563.869,00	2.889.204.096,00
12	Biro Kesejahteraan Rakyat	72.088.974.425,00	151.890.719.111,00
13	Biro Organisasi	881.263.370,00	1.887.569.891,00
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.596.935.967,00	4.212.198.024,00
15	Biro Pengadaan Barang/Jasa	1.357.399.816,00	2.285.150.268,00
16	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.578.967.948,00	3.050.883.564,00
17	Biro Umum	176.665.178.765,05	190.718.403.762,23
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	37.517.314.104,93	21.134.203.211,41
19	Dinas Kebudayaan	14.057.867.362,31	17.608.163.887,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	52.349.880.797,92	67.666.654.729,83
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	30.825.231.377,04	38.551.923.977,00
22	Dinas Kesehatan	90.082.755.763,25	77.808.391.081,00
23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	36.328.391.335,50	29.519.809.569,00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.158.163.696,00	34.703.873.840,00
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32.953.071.736,00	19.253.917.261,00
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.647.985.353,00	34.572.466.130,00
27	Dinas Pariwisata	20.400.695.006,00	26.240.716.090,00
28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	102.786.972.764,14	144.785.962.994,61
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.213.903.273,00	16.101.580.906,00
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	25.691.508.379,00	22.140.867.693,91
31	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.805.451.792,00	14.748.383.021,00
32	Dinas Pendidikan	997.834.211.343,38	1.049.194.472.692,20
33	Dinas Perhubungan	24.107.258.007,91	43.942.136.119,49
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.641.990.133,00	21.743.998.917,00
35	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	20.425.168.247,40	19.569.485.147,02
36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	183.780.153.764,82	155.084.552.494,00
37	Dinas Sosial	20.612.046.900,00	26.868.097.639,40
38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	36.216.158.197,26	30.504.829.908,00
39	Inspektorat	49.818.552.697,00	45.517.169.676,00
40	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	140.443.480.779,00	91.682.849.607,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	262.650.041.010,93	251.836.588.613,32
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	24.832.206.577,00	23.604.127.694,00
43	Sekretariat DPRD	132.946.566.381,00	141.267.941.987,00
	Total	**3.715.604.258.925,54**	**4.071.747.457.825,29**

2.3.3 Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selama Tahun Anggaran 2025 realisasi pembiayaan Netto Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terealisasi sebesar Rp22.291.476.128,01 atau 100,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.286.164.438,01. Untuk Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali. Pada tahun 2025 Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp27.291.476.128,01 atau 100,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.286.164.438,01. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan yang terdiri dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp27.208.640.128,01 atau 99,72% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp27.286.164.438,01 dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

(Penarikan Dana Bergulir) sebesar Rp82.836.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

2.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberiaan pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pada Tahun 2025 Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) yang baru didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Terhadap penyertaan modal kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Rincian realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.213 Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	2025%	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (3/2)*100	6
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.286.164.438,01	27.291.476.128,01	100,01	232.684.048.633,62
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	91.945.787.633,00
PEMBIAYAAN NETTO	**22.286.164.438,01**	**22.291.476.128,01**	**100,02**	**140.738.261.000,62**

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.918.642.282.363,00 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebesar Rp3.918.402.282.363,00.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan perubahan APBD yang semula sebesar Rp3.918.642.282.363,00 menjadi sebesar Rp3.933.376.601.900,44 atau bertambah sebesar Rp14.734.319.537,44 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 menjadi sebesar Rp3.911.090.437.462,43 atau berkurang sebesar Rp7.311.844.900,57.

Selanjutnya dilakukan Pergeseran Penjabaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 menjadi Rp3.910.214.946.462,43 atau berkurang sebesar Rp875.491.000,00.

Secara keseluruhan jumlah realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp3.712.434.360.163,46 atau sebesar 94,94% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp245.861.001.099,22 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar Rp3.958.295.361.262,68 atau sebesar 6,21%. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Alokasi Belanja Daerah Pergeseran Penjabaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.932.501.110.900,44 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Alokasi Belanja Operasi tahun 2025 sebesar Rp2.944.090.151.988,51 yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp269.313.511.475,33 dan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.281.396.903,60 serta Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp716.816.050.533,00. Belanja Daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3.715.604.258.925,54 atau sebesar 94,48% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Daerah. Untuk Belanja Operasi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.779.255.950.571,38 atau 94,40% dari nilai yang dianggarkan terhadap belanja operasi. Sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp232.159.877.710,16 atau 86,20% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Modal. Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi sebesar dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Tidak Terduga. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp704.188.430.644,00 atau sebesar 98,24% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Transfer.

Adapun Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp27.291.476.128,01 atau sebesar 100,02% dari dialokasikan sebesar Rp27.286.164.438,01. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan yang terdiri dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp27.208.640.128,01 atau sebesar 99,72% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp27.286.164.438,01 dan Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar

Rp82.836.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) yang baru didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Terhadap penyertaan modal kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun 2025:

Tabel 3.1 Realisasi APBD Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.910.214.946.462,43	3.712.434.360.163,46	94,94	3.958.295.361.262,68
	JUMLAH PENDAPATAN	3.910.214.946.462,43	3.712.434.360.163,46	94,94	3.958.295.361.262,68
5	BELANJA DAERAH	3.932.501.110.900,44	3.715.604.258.925,54	94,48	4.071.747.457.825,29
	JUMLAH BELANJA	3.932.501.110.900,44	3.715.604.258.925,54	94,48	4.071.747.457.825,29
	SURPLUS/DEFISIT	(22.286.164.438,01)	(3.169.898.762,08)	14,22	(113.452.096.562,61)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	22.286.164.438,01	22.291.476.128,01	100,02	140.738.261.000,62
	PEMBIAYAAN NETTO	22.286.164.438,01	22.291.476.128,01	100,02	140.738.261.000,62
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	19.121.577.365,93	0,00	27.286.164.438,01

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	3.910.214.946.462,43	3.712.434.360.163,46	(197.780.586.298,97)	94,94
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	169.667.392.499,00	170.204.845.951,57	537.453.452,57	100,32
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,10
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.501.527.999,00	165.557.111.956,57	2.055.583.957,57	101,26
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	140.001.527.999,00	144.774.215.484,57	4.772.687.485,57	103,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	140.001.527.999,00	144.774.215.484,57	4.772.687.485,57	103,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.001.527.999,00	144.774.215.484,57	4.772.687.485,57	103,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	23.500.000.000,00	20.782.896.472,00	(2.717.103.528,00)	88,44
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	23.500.000.000,00	20.782.896.472,00	(2.717.103.528,00)	88,44
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.500.000.000,00	20.782.896.472,00	(2.717.103.528,00)	88,44
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.516.431.893,24	4.414.762.602,00	898.330.708,76	125,55
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,26
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,26
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,26
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,26
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.021.079.565,00	878.508.535,00	(142.571.030,00)	86,04
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.736.010.042.505,19	3.536.936.243.074,89	(199.073.799.430,30)	94,67
5.02			KEUANGAN	3.736.010.042.505,19	3.536.936.243.074,89	(199.073.799.430,30)	94,67
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.087.653.025.476,98	2.062.440.913.752,11	(25.212.111.724,87)	98,79
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.087.653.025.476,98	2.062.440.913.752,11	(25.212.111.724,87)	98,79
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.525.913.674,98	87.637.390.793,54	4.111.477.118,56	104,92
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	(29.827.728.778,00)	98,51
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	504.139.934,57	504.139.934,57	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		Badan Pendapatan Daerah	1.648.357.017.028,21	1.474.491.221.665,62	(173.865.795.362,59)	89,45
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.648.357.017.028,21	1.474.491.221.665,62	(173.865.795.362,59)	89,45
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.647.032.914.528,21	1.473.196.517.665,62	(173.836.396.862,59)	89,45
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	(29.398.500,00)	97,78
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001		UPT Dana Bergulir	0,00	4.107.657,16	4.107.657,16	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	4.107.657,16	4.107.657,16	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	4.107.657,16	4.107.657,16	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		5	Belanja	3.932.501.110.900,44	3.715.604.258.925,54	(216.896.851.974,90)	94,48
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.952.262.618.421,84	1.830.871.466.367,52	(121.391.152.054,32)	93,78
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.031.118.270.120,30	997.834.211.343,38	(33.284.058.776,92)	96,77
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	1.029.314.069.493,50	996.378.647.544,52	(32.935.421.948,98)	96,80
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.029.314.069.493,50	996.378.647.544,52	(32.935.421.948,98)	96,80
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	942.643.690.564,17	919.338.372.032,51	(23.305.318.531,66)	97,53
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	86.670.378.929,33	77.040.275.512,01	(9.630.103.417,32)	88,89
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001		BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	1.486.232.818,80	1.300.289.250,86	(185.943.567,94)	87,49
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	1.486.232.818,80	1.300.289.250,86	(185.943.567,94)	87,49
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.363.766.618,80	1.223.213.450,86	(140.553.167,94)	89,69
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	122.466.200,00	77.075.800,00	(45.390.400,00)	62,94
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002		CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM	70.658.108,00	63.868.551,00	(6.789.557,00)	90,39
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	70.658.108,00	63.868.551,00	(6.789.557,00)	90,39
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.658.108,00	63.868.551,00	(6.789.557,00)	90,39
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN	66.177.200,00	27.599.000,00	(38.578.200,00)	41,70
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	66.177.200,00	27.599.000,00	(38.578.200,00)	41,70
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	66.177.200,00	27.599.000,00	(38.578.200,00)	41,70
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA	61.460.000,00	32.131.000,00	(29.329.000,00)	52,28
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	61.460.000,00	32.131.000,00	(29.329.000,00)	52,28
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.807.900,00	32.131.000,00	(28.676.900,00)	52,84
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	652.100,00	0,00	(652.100,00)	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA	61.798.500,00	21.797.597,00	(40.000.903,00)	35,27
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	61.798.500,00	21.797.597,00	(40.000.903,00)	35,27
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	61.136.100,00	21.797.597,00	(39.338.503,00)	35,65
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	662.400,00	0,00	(662.400,00)	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006		CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS	57.874.000,00	9.878.400,00	(47.995.600,00)	17,07
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	57.874.000,00	9.878.400,00	(47.995.600,00)	17,07
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	57.874.000,00	9.878.400,00	(47.995.600,00)	17,07
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	510.494.769.886,54	493.176.277.553,18	(17.318.492.333,36)	96,61
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Dinas Kesehatan	90.194.025.364,54	83.968.182.079,00	(6.225.843.285,54)	93,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	90.194.025.364,54	83.968.182.079,00	(6.225.843.285,54)	93,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	71.203.468.664,54	65.396.284.640,00	(5.807.184.024,54)	91,84
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	18.990.556.700,00	18.571.897.439,00	(418.659.261,00)	97,80
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	266.643.813.304,00	262.650.041.010,93	(3.993.772.293,07)	98,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	266.643.813.304,00	262.650.041.010,93	(3.993.772.293,07)	98,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	257.387.351.565,00	253.868.136.957,93	(3.519.214.607,07)	98,63
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	9.256.461.739,00	8.781.904.053,00	(474.557.686,00)	94,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	146.827.835.328,00	140.443.480.779,00	(6.384.354.549,00)	95,65
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5	BELANJA DAERAH	146.827.835.328,00	140.443.480.779,00	(6.384.354.549,00)	95,65
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.356.447.778,00	85.610.362.979,00	(3.746.084.799,00)	95,81
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	57.471.387.550,00	54.833.117.800,00	(2.638.269.750,00)	95,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004		UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)	6.829.095.890,00	6.114.573.684,25	(714.522.205,75)	89,54

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5	BELANJA DAERAH	6.829.095.890,00	6.114.573.684,25	(714.522.205,75)	89,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.508.657.400,00	5.794.135.194,25	(714.522.205,75)	89,02
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	320.438.490,00	320.438.490,00	0,00	100,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	137.030.002.320,00	101.674.366.826,14	(35.355.635.493,86)	74,20
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	131.962.568.111,00	97.169.623.145,14	(34.792.944.965,86)	73,63
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	131.962.568.111,00	97.169.623.145,14	(34.792.944.965,86)	73,63
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	103.244.227.441,00	76.751.740.698,25	(26.492.486.742,75)	74,34
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	28.718.340.670,00	20.417.882.446,89	(8.300.458.223,11)	71,10
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002		UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	4.179.166.841,00	3.704.030.412,00	(475.136.429,00)	88,63
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5	BELANJA DAERAH	4.179.166.841,00	3.704.030.412,00	(475.136.429,00)	88,63
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.467.014.341,00	2.016.798.538,00	(450.215.803,00)	81,75
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.712.152.500,00	1.687.231.874,00	(24.920.626,00)	98,54
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN	888.267.368,00	800.713.269,00	(87.554.099,00)	90,14
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5	BELANJA DAERAH	888.267.368,00	800.713.269,00	(87.554.099,00)	90,14
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	880.794.668,00	793.278.269,00	(87.516.399,00)	90,06
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	7.472.700,00	7.435.000,00	(37.700,00)	99,50
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	216.020.164.204,00	183.780.153.764,82	(32.240.010.439,18)	85,08
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	216.020.164.204,00	183.780.153.764,82	(32.240.010.439,18)	85,08
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	216.020.164.204,00	183.780.153.764,82	(32.240.010.439,18)	85,08
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	212.723.271.104,00	181.560.380.352,82	(31.162.890.751,18)	85,35
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.296.893.100,00	2.219.773.412,00	(1.077.119.688,00)	67,33
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	34.886.351.384,00	33.794.409.980,00	(1.091.941.404,00)	96,87
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	25.677.685.026,00	24.832.206.577,00	(845.478.449,00)	96,71
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	25.677.685.026,00	24.832.206.577,00	(845.478.449,00)	96,71
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	25.282.039.326,00	24.462.373.577,00	(819.665.749,00)	96,76
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	395.645.700,00	369.833.000,00	(25.812.700,00)	93,48
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.208.666.358,00	8.962.203.403,00	(246.462.955,00)	97,32
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	9.208.666.358,00	8.962.203.403,00	(246.462.955,00)	97,32
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.160.501.253,40	8.914.539.904,00	(245.961.349,40)	97,31
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	48.165.104,60	47.663.499,00	(501.605,60)	98,96
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	22.713.060.507,00	20.612.046.900,00	(2.101.013.607,00)	90,75
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000		Dinas Sosial	22.713.060.507,00	20.612.046.900,00	(2.101.013.607,00)	90,75
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	22.713.060.507,00	20.612.046.900,00	(2.101.013.607,00)	90,75
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	22.375.289.665,00	20.291.157.330,00	(2.084.132.335,00)	90,69
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	337.770.842,00	320.889.570,00	(16.881.272,00)	95,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	331.518.291.825,79	302.656.927.957,92	(28.861.363.867,87)	91,29
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	37.958.769.556,00	36.165.860.057,26	(1.792.909.498,74)	95,28
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	32.012.474.766,00	30.696.103.105,26	(1.316.371.660,74)	95,89
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	32.012.474.766,00	30.696.103.105,26	(1.316.371.660,74)	95,89
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	31.676.204.366,00	30.478.585.654,26	(1.197.618.711,74)	96,22

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	336.270.400,00	217.517.451,00	(118.752.949,00)	64,69
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002		UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau	5.371.959.410,00	4.984.411.831,00	(387.547.579,00)	92,79
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5	BELANJA DAERAH	5.371.959.410,00	4.984.411.831,00	(387.547.579,00)	92,79
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.359.176.157,00	4.035.005.382,00	(324.170.775,00)	92,56
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.012.783.253,00	949.406.449,00	(63.376.804,00)	93,74
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun	40.331.230,00	36.760.966,00	(3.570.264,00)	91,15
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	5	BELANJA DAERAH	40.331.230,00	36.760.966,00	(3.570.264,00)	91,15
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.331.230,00	36.760.966,00	(3.570.264,00)	91,15
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam	534.004.150,00	448.584.155,00	(85.419.995,00)	84,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5	BELANJA DAERAH	534.004.150,00	448.584.155,00	(85.419.995,00)	84,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	367.795.950,00	333.379.155,00	(34.416.795,00)	90,64
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	166.208.200,00	115.205.000,00	(51.003.200,00)	69,31
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21.900.477.218,00	20.199.282.663,00	(1.701.194.555,00)	92,23
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	16.853.149.770,00	15.822.657.174,00	(1.030.492.596,00)	93,89
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	16.853.149.770,00	15.822.657.174,00	(1.030.492.596,00)	93,89
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.731.892.970,00	15.702.259.974,00	(1.029.632.996,00)	93,85
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	121.256.800,00	120.397.200,00	(859.600,00)	99,29
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001		UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	5.047.327.448,00	4.376.625.489,00	(670.701.959,00)	86,71
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5	BELANJA DAERAH	5.047.327.448,00	4.376.625.489,00	(670.701.959,00)	86,71
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	926.697.366,00	839.156.399,00	(87.540.967,00)	90,55
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.120.630.082,00	3.537.469.090,00	(583.160.992,00)	85,85
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	26.263.998.288,02	24.752.290.564,00	(1.511.707.724,02)	94,24
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	25.596.672.767,98	24.111.486.206,00	(1.485.186.561,98)	94,20
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	25.596.672.767,98	24.111.486.206,00	(1.485.186.561,98)	94,20
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	24.763.288.797,98	23.439.789.445,00	(1.323.499.352,98)	94,66
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	833.383.970,00	671.696.761,00	(161.687.209,00)	80,60
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002		UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	316.666.078,00	306.974.039,00	(9.692.039,00)	96,94
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	5	BELANJA DAERAH	316.666.078,00	306.974.039,00	(9.692.039,00)	96,94
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	316.666.078,00	306.974.039,00	(9.692.039,00)	96,94
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001		UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)	350.659.442,04	333.830.319,00	(16.829.123,04)	95,20
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	5	BELANJA DAERAH	350.659.442,04	333.830.319,00	(16.829.123,04)	95,20
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	350.659.442,04	333.830.319,00	(16.829.123,04)	95,20
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	(33.198.106,00)	97,10
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	(33.198.106,00)	97,10
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	(33.198.106,00)	97,10
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	145.804.044,00	120.505.938,00	(25.298.106,00)	82,65
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	992.100.000,00	(7.900.000,00)	99,21
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	35.294.444.739,00	33.388.547.528,00	(1.905.897.211,00)	94,60
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34.409.483.798,00	32.816.455.454,00	(1.593.028.344,00)	95,37

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	34.409.483.798,00	32.816.455.454,00	(1.593.028.344,00)	95,37
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	33.483.995.918,00	32.476.617.054,00	(1.007.378.864,00)	96,99
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	925.487.880,00	339.838.400,00	(585.649.480,00)	36,72
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002		UPTD KPHP Unit I Karimun	34.566.300,00	29.176.820,00	(5.389.480,00)	84,41
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	5	BELANJA DAERAH	34.566.300,00	29.176.820,00	(5.389.480,00)	84,41
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.566.300,00	29.176.820,00	(5.389.480,00)	84,41
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004		UPTD KPHP Unit III Lingga	22.793.624,00	21.482.629,00	(1.310.995,00)	94,25
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	5	BELANJA DAERAH	22.793.624,00	21.482.629,00	(1.310.995,00)	94,25
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.793.624,00	21.482.629,00	(1.310.995,00)	94,25
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang	42.167.480,00	40.914.300,00	(1.253.180,00)	97,03
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	5	BELANJA DAERAH	42.167.480,00	40.914.300,00	(1.253.180,00)	97,03
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.167.480,00	40.914.300,00	(1.253.180,00)	97,03
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006		UPTD KPHP Unit V Natuna	48.072.000,00	45.272.230,00	(2.799.770,00)	94,18
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	5	BELANJA DAERAH	48.072.000,00	45.272.230,00	(2.799.770,00)	94,18
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	5.1	BELANJA OPERASI	48.072.000,00	45.272.230,00	(2.799.770,00)	94,18
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas	99.685.100,00	98.583.380,00	(1.101.720,00)	98,89
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	5	BELANJA DAERAH	99.685.100,00	98.583.380,00	(1.101.720,00)	98,89
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	5.1	BELANJA OPERASI	99.685.100,00	98.583.380,00	(1.101.720,00)	98,89
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003		UPTD KPHP Unit II Batam	25.596.000,00	23.020.320,00	(2.575.680,00)	89,94
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	5	BELANJA DAERAH	25.596.000,00	23.020.320,00	(2.575.680,00)	89,94
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.596.000,00	23.020.320,00	(2.575.680,00)	89,94
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	612.080.437,00	313.642.395,00	(298.438.042,00)	51,24
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5	BELANJA DAERAH	612.080.437,00	313.642.395,00	(298.438.042,00)	51,24
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	347.733.850,00	184.786.935,00	(162.946.915,00)	53,14
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	264.346.587,00	128.855.460,00	(135.491.127,00)	48,74
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.989.281.374,00	11.792.071.314,00	(197.210.060,00)	98,36
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.989.281.374,00	11.792.071.314,00	(197.210.060,00)	98,36
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	11.989.281.374,00	11.792.071.314,00	(197.210.060,00)	98,36
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.989.281.374,00	11.792.071.314,00	(197.210.060,00)	98,36
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.780.225.896,00	2.421.831.959,00	(358.393.937,00)	87,11
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.780.225.896,00	2.421.831.959,00	(358.393.937,00)	87,11
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	2.780.225.896,00	2.421.831.959,00	(358.393.937,00)	87,11
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.765.649.896,00	2.407.255.959,00	(358.393.937,00)	87,04
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	14.576.000,00	14.576.000,00	0,00	100,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	(93.264.364,00)	98,33
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	(93.264.364,00)	98,33
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	(93.264.364,00)	98,33
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	(93.264.364,00)	98,33
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	29.737.235.569,00	24.107.258.007,91	(5.629.977.561,09)	81,07
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	28.329.047.664,69	22.936.502.634,91	(5.392.545.029,78)	80,96

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	28.329.047.664,69	22.936.502.634,91	(5.392.545.029,78)	80,96
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.714.827.054,69	19.652.203.492,14	(2.062.623.562,55)	90,50
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	6.614.220.610,00	3.284.299.142,77	(3.329.921.467,23)	49,66
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	114.399.328,19	99.221.706,00	(15.177.622,19)	86,73
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	114.399.328,19	99.221.706,00	(15.177.622,19)	86,73
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	109.996.428,19	99.221.706,00	(10.774.722,19)	90,20
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.402.900,00	0,00	(4.402.900,00)	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	246.839.950,00	214.199.484,00	(32.640.466,00)	86,78
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	246.839.950,00	214.199.484,00	(32.640.466,00)	86,78
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	224.669.844,00	199.571.684,00	(25.098.160,00)	88,83
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	22.170.106,00	14.627.800,00	(7.542.306,00)	65,98
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	489.378.780,00	436.370.051,00	(53.008.729,00)	89,17
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	489.378.780,00	436.370.051,00	(53.008.729,00)	89,17
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	489.378.780,00	436.370.051,00	(53.008.729,00)	89,17
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepualauan Anambas	373.159.177,12	267.638.877,00	(105.520.300,12)	71,72
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	373.159.177,12	267.638.877,00	(105.520.300,12)	71,72
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	357.239.777,12	252.485.157,00	(104.754.620,12)	70,68
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	15.919.400,00	15.153.720,00	(765.680,00)	95,19
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	184.410.669,00	153.325.255,00	(31.085.414,00)	83,14
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	184.410.669,00	153.325.255,00	(31.085.414,00)	83,14
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	184.410.669,00	153.325.255,00	(31.085.414,00)	83,14
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	34.881.878.468,00	30.096.474.805,00	(4.785.403.663,00)	86,28
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	34.881.878.468,00	30.096.474.805,00	(4.785.403.663,00)	86,28
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5	BELANJA DAERAH	34.881.878.468,00	30.096.474.805,00	(4.785.403.663,00)	86,28
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	34.640.775.718,00	29.861.076.806,00	(4.779.698.912,00)	86,20
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	241.102.750,00	235.397.999,00	(5.704.751,00)	97,63
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	38.427.480.191,00	32.953.071.736,00	(5.474.408.455,00)	85,75
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	38.427.480.191,00	32.953.071.736,00	(5.474.408.455,00)	85,75
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	38.427.480.191,00	32.953.071.736,00	(5.474.408.455,00)	85,75
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	38.349.762.491,00	32.882.770.633,00	(5.466.991.858,00)	85,74
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	77.717.700,00	70.301.103,00	(7.416.597,00)	90,46
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.071.210.290,00	14.805.451.792,00	(265.758.498,00)	98,24
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15.071.210.290,00	14.805.451.792,00	(265.758.498,00)	98,24
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	15.071.210.290,00	14.805.451.792,00	(265.758.498,00)	98,24
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.059.581.359,00	14.793.891.142,00	(265.690.217,00)	98,24
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.628.931,00	11.560.650,00	(68.281,00)	99,41
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	34.233.552.898,77	30.825.231.377,04	(3.408.321.521,73)	90,04
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	34.233.552.898,77	30.825.231.377,04	(3.408.321.521,73)	90,04
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	34.233.552.898,77	30.825.231.377,04	(3.408.321.521,73)	90,04
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	33.919.033.698,77	30.669.251.377,04	(3.249.782.321,73)	90,42
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	314.519.200,00	155.980.000,00	(158.539.200,00)	49,59

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,11
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,11
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	5	BELANJA DAERAH	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,11
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,11
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	5	BELANJA DAERAH	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	(667.554.608,69)	95,47
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000		Dinas Kebudayaan	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	(667.554.608,69)	95,47
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5	BELANJA DAERAH	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	(667.554.608,69)	95,47
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.600.421.971,00	13.932.881.362,31	(667.540.608,69)	95,43
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	124.986.000,00	(14.000,00)	99,99
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	21.308.335.398,00	20.310.524.816,40	(997.810.581,60)	95,32
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	21.135.767.072,00	20.148.974.850,40	(986.792.221,60)	95,33
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	21.135.767.072,00	20.148.974.850,40	(986.792.221,60)	95,33
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.774.283.722,00	19.948.806.115,40	(825.477.606,60)	96,03
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	361.483.350,00	200.168.735,00	(161.314.615,00)	55,37
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001		UPT Perpustakaan Muhammad Sani	172.568.326,00	161.549.966,00	(11.018.360,00)	93,62
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5	BELANJA DAERAH	172.568.326,00	161.549.966,00	(11.018.360,00)	93,62
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5.1	BELANJA OPERASI	172.568.326,00	161.549.966,00	(11.018.360,00)	93,62
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	170.633.523.694,98	151.795.716.778,35	(18.837.806.916,63)	88,96
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	54.164.879.734,00	52.349.880.797,92	(1.814.998.936,08)	96,65
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	49.191.754.015,02	47.509.662.635,12	(1.682.091.379,90)	96,58
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5	BELANJA DAERAH	49.191.754.015,02	47.509.662.635,12	(1.682.091.379,90)	96,58
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.1	BELANJA OPERASI	48.992.565.575,02	47.312.392.579,12	(1.680.172.995,90)	96,57
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.2	BELANJA MODAL	199.188.440,00	197.270.056,00	(1.918.384,00)	99,04
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	183.961.787,00	183.820.287,00	(141.500,00)	99,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5	BELANJA DAERAH	183.961.787,00	183.820.287,00	(141.500,00)	99,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5.1	BELANJA OPERASI	183.961.787,00	183.820.287,00	(141.500,00)	99,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	352.718.091,00	337.298.144,00	(15.419.947,00)	95,63
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5	BELANJA DAERAH	352.718.091,00	337.298.144,00	(15.419.947,00)	95,63
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5.1	BELANJA OPERASI	340.968.091,00	325.548.144,00	(15.419.947,00)	95,48
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5.2	BELANJA MODAL	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	277.966.003,00	262.572.999,00	(15.393.004,00)	94,46
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5	BELANJA DAERAH	277.966.003,00	262.572.999,00	(15.393.004,00)	94,46
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5.1	BELANJA OPERASI	277.966.003,00	262.572.999,00	(15.393.004,00)	94,46
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	715.032.898,00	707.765.755,00	(7.267.143,00)	98,98
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	5	BELANJA DAERAH	715.032.898,00	707.765.755,00	(7.267.143,00)	98,98

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	5.1	BELANJA OPERASI	715.032.898,00	707.765.755,00	(7.267.143,00)	98,98
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	614.694.905,00	597.523.451,00	(17.171.454,00)	97,21
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5	BELANJA DAERAH	614.694.905,00	597.523.451,00	(17.171.454,00)	97,21
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5.1	BELANJA OPERASI	614.694.905,00	597.523.451,00	(17.171.454,00)	97,21
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008		UPTD Balai Benih Ikan	1.568.568.659,00	1.556.452.354,80	(12.116.304,20)	99,23
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5	BELANJA DAERAH	1.568.568.659,00	1.556.452.354,80	(12.116.304,20)	99,23
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.451.447.959,00	1.440.475.939,80	(10.972.019,20)	99,24
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5.2	BELANJA MODAL	117.120.700,00	115.976.415,00	(1.144.285,00)	99,02
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007		UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)	531.807.178,98	517.952.898,00	(13.854.280,98)	97,39
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5	BELANJA DAERAH	531.807.178,98	517.952.898,00	(13.854.280,98)	97,39
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5.1	BELANJA OPERASI	502.057.678,98	490.804.518,00	(11.253.160,98)	97,76
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5.2	BELANJA MODAL	29.749.500,00	27.148.380,00	(2.601.120,00)	91,26
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006		UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai	728.376.197,00	676.832.274,00	(51.543.923,00)	92,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5	BELANJA DAERAH	728.376.197,00	676.832.274,00	(51.543.923,00)	92,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5.1	BELANJA OPERASI	725.570.197,00	676.832.274,00	(48.737.923,00)	93,28
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.806.000,00	0,00	(2.806.000,00)	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	(2.685.972.896,00)	88,37
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	(2.685.972.896,00)	88,37
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	(2.685.972.896,00)	88,37
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	(2.685.972.896,00)	88,37
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15.925.730.686,98	11.576.100.771,50	(4.349.629.915,48)	72,69
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	14.656.023.713,00	10.515.509.884,50	(4.140.513.828,50)	71,75
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	14.656.023.713,00	10.515.509.884,50	(4.140.513.828,50)	71,75
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.639.198.713,00	10.498.684.884,50	(4.140.513.828,50)	71,72
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00	100,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002		UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	299.694.799,00	142.680.631,00	(157.014.168,00)	47,61
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	5	BELANJA DAERAH	299.694.799,00	142.680.631,00	(157.014.168,00)	47,61
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	299.694.799,00	142.680.631,00	(157.014.168,00)	47,61
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001		UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)	970.012.174,98	917.910.256,00	(52.101.918,98)	94,63
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5	BELANJA DAERAH	970.012.174,98	917.910.256,00	(52.101.918,98)	94,63
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	966.117.628,98	914.016.376,00	(52.101.252,98)	94,61
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.894.546,00	3.893.880,00	(666,00)	99,98
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	2.592.141.510,00	2.259.437.825,00	(332.703.685,00)	87,16
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.409.501.550,00	1.279.501.967,00	(129.999.583,00)	90,78
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	1.409.501.550,00	1.279.501.967,00	(129.999.583,00)	90,78
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.409.501.550,00	1.279.501.967,00	(129.999.583,00)	90,78
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002		UPTD KPHP Unit I Karimun	162.557.297,00	131.195.000,00	(31.362.297,00)	80,71
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	5	BELANJA DAERAH	162.557.297,00	131.195.000,00	(31.362.297,00)	80,71
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	5.1	BELANJA OPERASI	162.557.297,00	131.195.000,00	(31.362.297,00)	80,71
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004		UPTD KPHP Unit III Lingga	166.409.999,00	162.477.918,00	(3.932.081,00)	97,64
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	5	BELANJA DAERAH	166.409.999,00	162.477.918,00	(3.932.081,00)	97,64

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	5.1	BELANJA OPERASI	166.409.999,00	162.477.918,00	(3.932.081,00)	97,64
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang	207.155.503,00	203.457.055,00	(3.698.448,00)	98,21
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5	BELANJA DAERAH	207.155.503,00	203.457.055,00	(3.698.448,00)	98,21
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.1	BELANJA OPERASI	207.155.503,00	203.457.055,00	(3.698.448,00)	98,21
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006		UPTD KPHP Unit V Natuna	264.794.131,00	157.323.835,00	(107.470.296,00)	59,41
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	5	BELANJA DAERAH	264.794.131,00	157.323.835,00	(107.470.296,00)	59,41
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	5.1	BELANJA OPERASI	264.794.131,00	157.323.835,00	(107.470.296,00)	59,41
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas	182.509.245,00	127.220.750,00	(55.288.495,00)	69,71
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	5	BELANJA DAERAH	182.509.245,00	127.220.750,00	(55.288.495,00)	69,71
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	5.1	BELANJA OPERASI	182.509.245,00	127.220.750,00	(55.288.495,00)	69,71
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003		UPTD KPHP Unit II Batam	199.213.785,00	198.261.300,00	(952.485,00)	99,52
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	5	BELANJA DAERAH	199.213.785,00	198.261.300,00	(952.485,00)	99,52
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	5.1	BELANJA OPERASI	199.213.785,00	198.261.300,00	(952.485,00)	99,52
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	46.006.620.418,00	37.517.314.104,93	(8.489.306.313,07)	81,55
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	46.006.620.418,00	37.517.314.104,93	(8.489.306.313,07)	81,55
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5	BELANJA DAERAH	46.006.620.418,00	37.517.314.104,93	(8.489.306.313,07)	81,55
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.213.031.936,00	19.019.092.983,44	(1.193.938.952,56)	94,09
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.793.588.482,00	18.498.221.121,49	(7.295.367.360,51)	71,72
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	21.295.837.371,00	20.402.503.487,00	(893.333.884,00)	95,81
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.295.837.371,00	20.402.503.487,00	(893.333.884,00)	95,81
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	21.295.837.371,00	20.402.503.487,00	(893.333.884,00)	95,81
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.082.666.421,00	19.270.128.037,00	(812.538.384,00)	95,95
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.213.170.950,00	1.132.375.450,00	(80.795.500,00)	93,34
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.511.099.193,00	7.239.486.646,00	(271.612.547,00)	96,38
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.511.099.193,00	7.239.486.646,00	(271.612.547,00)	96,38
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	7.511.099.193,00	7.239.486.646,00	(271.612.547,00)	96,38
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.364.554.793,00	7.100.815.667,00	(263.739.126,00)	96,42
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	146.544.400,00	138.670.979,00	(7.873.421,00)	94,63
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	412.405.594.967,79	395.881.904.255,05	(16.523.690.712,74)	95,99
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	274.937.981.388,79	262.935.337.874,05	(12.002.643.514,74)	95,63
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.674.150.158,93	2.596.935.967,00	(77.214.191,93)	97,11
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5	BELANJA DAERAH	2.674.150.158,93	2.596.935.967,00	(77.214.191,93)	97,11
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.668.861.542,93	2.592.545.967,00	(76.315.575,93)	97,14
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.288.616,00	4.390.000,00	(898.616,00)	83,01
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004		Biro Kesejahteraan Rakyat	76.117.790.635,58	72.088.974.425,00	(4.028.816.210,58)	94,71
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5	BELANJA DAERAH	76.117.790.635,58	72.088.974.425,00	(4.028.816.210,58)	94,71
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.1	BELANJA OPERASI	76.056.131.911,58	72.028.923.425,00	(4.027.208.486,58)	94,70
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.2	BELANJA MODAL	61.658.724,00	60.051.000,00	(1.607.724,00)	97,39
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001		Biro Hukum	1.907.268.509,00	1.766.563.869,00	(140.704.640,00)	92,62

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5	BELANJA DAERAH	1.907.268.509,00	1.766.563.869,00	(140.704.640,00)	92,62
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.814.497.209,00	1.704.091.319,00	(110.405.890,00)	93,92
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5.2	BELANJA MODAL	92.771.300,00	62.472.550,00	(30.298.750,00)	67,34
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005		Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.696.019.757,25	1.578.967.948,00	(117.051.809,25)	93,10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5	BELANJA DAERAH	1.696.019.757,25	1.578.967.948,00	(117.051.809,25)	93,10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.691.569.257,25	1.574.583.448,00	(116.985.809,25)	93,08
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5.2	BELANJA MODAL	4.450.500,00	4.384.500,00	(66.000,00)	98,52
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008		Biro Pengadaan Barang/Jasa	1.402.420.130,00	1.357.399.816,00	(45.020.314,00)	96,79
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5	BELANJA DAERAH	1.402.420.130,00	1.357.399.816,00	(45.020.314,00)	96,79
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.372.722.384,00	1.335.416.266,00	(37.306.118,00)	97,28
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5.2	BELANJA MODAL	29.697.746,00	21.983.550,00	(7.714.196,00)	74,02
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006		Biro Umum	184.113.876.278,00	176.665.178.765,05	(7.448.697.512,95)	95,95
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5	BELANJA DAERAH	184.113.876.278,00	176.665.178.765,05	(7.448.697.512,95)	95,95
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.1	BELANJA OPERASI	177.436.020.478,00	170.414.252.621,05	(7.021.767.856,95)	96,04
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.2	BELANJA MODAL	6.677.855.800,00	6.250.926.144,00	(426.929.656,00)	93,61
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007		Biro Administrasi Pimpinan	6.098.561.124,40	6.000.053.714,00	(98.507.410,40)	98,38
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5	BELANJA DAERAH	6.098.561.124,40	6.000.053.714,00	(98.507.410,40)	98,38
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.078.118.124,40	5.979.611.120,00	(98.507.004,40)	98,38
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5.2	BELANJA MODAL	20.443.000,00	20.442.594,00	(406,00)	100,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003		Biro Organisasi	927.894.795,63	881.263.370,00	(46.631.425,63)	94,97
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5	BELANJA DAERAH	927.894.795,63	881.263.370,00	(46.631.425,63)	94,97
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5.1	BELANJA OPERASI	927.894.795,63	881.263.370,00	(46.631.425,63)	94,97
4.02			SEKRETARIAT DPRD	137.467.613.579,00	132.946.566.381,00	(4.521.047.198,00)	96,71
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000		Sekretariat DPRD	137.467.613.579,00	132.946.566.381,00	(4.521.047.198,00)	96,71
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	137.467.613.579,00	132.946.566.381,00	(4.521.047.198,00)	96,71
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.1	BELANJA OPERASI	134.197.908.089,00	129.978.583.381,00	(4.219.324.708,00)	96,86
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	(301.722.490,00)	90,77
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	969.596.669.126,04	942.943.656.831,70	(26.653.012.294,34)	97,25
5.01			PERENCANAAN	27.709.605.534,93	27.430.596.487,00	(279.009.047,93)	98,99
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	27.709.605.534,93	27.430.596.487,00	(279.009.047,93)	98,99
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	27.709.605.534,93	27.430.596.487,00	(279.009.047,93)	98,99
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	27.645.500.534,93	27.366.771.487,00	(278.729.047,93)	98,99
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.2	BELANJA MODAL	64.105.000,00	63.825.000,00	(280.000,00)	99,56
5.02			KEUANGAN	884.879.271.210,04	861.510.480.806,70	(23.368.790.403,34)	97,36
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	772.452.832.184,04	753.247.553.315,00	(19.205.278.869,04)	97,51
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	772.452.832.184,04	753.247.553.315,00	(19.205.278.869,04)	97,51
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	52.231.664.290,94	47.971.647.101,00	(4.260.017.189,94)	91,84
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.123.720.456,50	1.087.475.570,00	(36.244.886,50)	96,77
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.281.396.903,60	0,00	(2.281.396.903,60)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	716.816.050.533,00	704.188.430.644,00	(12.627.619.889,00)	98,24
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		Badan Pendapatan Daerah	100.192.336.260,94	97.094.280.481,00	(3.098.055.779,94)	96,91
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	100.192.336.260,94	97.094.280.481,00	(3.098.055.779,94)	96,91
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	98.405.658.444,94	95.895.839.981,00	(2.509.818.463,94)	97,45
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.786.677.816,00	1.198.440.500,00	(588.237.316,00)	67,08
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001		UPT PPD Batam Centre	3.232.910.743,27	2.887.305.915,75	(345.604.827,52)	89,31

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5	BELANJA DAERAH	3.232.910.743,27	2.887.305.915,75	(345.604.827,52)	89,31
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.006.894.043,27	2.753.205.915,75	(253.688.127,52)	91,56
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.2	BELANJA MODAL	226.016.700,00	134.100.000,00	(91.916.700,00)	59,33
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003		UPT PPD Bintan	1.062.746.989,23	990.790.181,00	(71.956.808,23)	93,23
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5	BELANJA DAERAH	1.062.746.989,23	990.790.181,00	(71.956.808,23)	93,23
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.062.746.989,23	990.790.181,00	(71.956.808,23)	93,23
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004		UPT PPD Karimun	997.838.243,25	845.090.497,00	(152.747.746,25)	84,69
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5	BELANJA DAERAH	997.838.243,25	845.090.497,00	(152.747.746,25)	84,69
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.1	BELANJA OPERASI	969.720.514,25	821.272.377,00	(148.448.137,25)	84,69
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.2	BELANJA MODAL	28.117.729,00	23.818.120,00	(4.299.609,00)	84,71
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005		UPT PPD Lingga	511.736.913,83	487.586.373,00	(24.150.540,83)	95,28
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5	BELANJA DAERAH	511.736.913,83	487.586.373,00	(24.150.540,83)	95,28
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.1	BELANJA OPERASI	511.736.913,83	487.586.373,00	(24.150.540,83)	95,28
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002		UPT PPD Tanjungpinang	1.951.590.732,17	1.794.076.038,00	(157.514.694,17)	91,93
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5	BELANJA DAERAH	1.951.590.732,17	1.794.076.038,00	(157.514.694,17)	91,93
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.913.328.616,17	1.760.338.039,00	(152.990.577,17)	92,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.2	BELANJA MODAL	38.262.116,00	33.737.999,00	(4.524.117,00)	88,18
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006		UPT PPD Natuna	633.537.771,03	495.808.039,00	(137.729.732,03)	78,26
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5	BELANJA DAERAH	633.537.771,03	495.808.039,00	(137.729.732,03)	78,26
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.1	BELANJA OPERASI	633.537.771,03	495.808.039,00	(137.729.732,03)	78,26
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007		UPT PPD Anambas	415.953.985,15	398.295.368,00	(17.658.617,15)	95,75
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5	BELANJA DAERAH	415.953.985,15	398.295.368,00	(17.658.617,15)	95,75
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.1	BELANJA OPERASI	415.953.985,15	398.295.368,00	(17.658.617,15)	95,75
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008		UPT PPD Batu Aji	896.905.519,09	850.311.659,00	(46.593.860,09)	94,81
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5	BELANJA DAERAH	896.905.519,09	850.311.659,00	(46.593.860,09)	94,81
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.1	BELANJA OPERASI	870.848.319,09	827.211.659,00	(43.636.660,09)	94,99
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.2	BELANJA MODAL	26.057.200,00	23.100.000,00	(2.957.200,00)	88,65
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009		UPT PPD Kijang	555.180.161,29	519.597.770,00	(35.582.391,29)	93,59
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5	BELANJA DAERAH	555.180.161,29	519.597.770,00	(35.582.391,29)	93,59
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.1	BELANJA OPERASI	528.325.461,29	499.118.270,00	(29.207.191,29)	94,47
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.2	BELANJA MODAL	26.854.700,00	20.479.500,00	(6.375.200,00)	76,26
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010		UPT PPD Tanjung Batu	382.831.253,75	370.126.014,00	(12.705.239,75)	96,68
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5	BELANJA DAERAH	382.831.253,75	370.126.014,00	(12.705.239,75)	96,68
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.1	BELANJA OPERASI	382.831.253,75	370.126.014,00	(12.705.239,75)	96,68
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002		UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	1.308.859.740,00	1.270.911.177,95	(37.948.562,05)	97,10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5	BELANJA DAERAH	1.308.859.740,00	1.270.911.177,95	(37.948.562,05)	97,10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.308.859.740,00	1.270.911.177,95	(37.948.562,05)	97,10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001		UPT Dana Bergulir	284.010.713,00	258.747.978,00	(25.262.735,00)	91,11
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5	BELANJA DAERAH	284.010.713,00	258.747.978,00	(25.262.735,00)	91,11
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.1	BELANJA OPERASI	284.010.713,00	258.747.978,00	(25.262.735,00)	91,11
5.03			KEPEGAWAIAN	19.793.963.183,00	19.316.741.138,00	(477.222.045,00)	97,59
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000		Badan Kepegawaian dan KORPRI	19.793.963.183,00	19.316.741.138,00	(477.222.045,00)	97,59
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	19.793.963.183,00	19.316.741.138,00	(477.222.045,00)	97,59
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	19.446.905.592,00	18.972.664.141,00	(474.241.451,00)	97,56
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.2	BELANJA MODAL	347.057.591,00	344.076.997,00	(2.980.594,00)	99,14

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	16.498.935.759,00	15.325.213.721,00	(1.173.722.038,00)	92,89
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.498.935.759,00	15.325.213.721,00	(1.173.722.038,00)	92,89
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	16.498.935.759,00	15.325.213.721,00	(1.173.722.038,00)	92,89
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.336.938.964,10	14.196.835.871,00	(1.140.103.093,10)	92,57
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.161.996.794,90	1.128.377.850,00	(33.618.944,90)	97,11
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	140.053.042,07	129.083.433,00	(10.969.609,07)	92,17
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	140.053.042,07	129.083.433,00	(10.969.609,07)	92,17
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	140.053.042,07	129.083.433,00	(10.969.609,07)	92,17
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	140.053.042,07	129.083.433,00	(10.969.609,07)	92,17
5.06			PENGELOLAAN PERBATASAN	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	(583.188.972,00)	91,31
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	(583.188.972,00)	91,31
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	(583.188.972,00)	91,31
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	(583.188.972,00)	91,31
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	13.861.882.473,00	13.101.772.294,00	(760.110.179,00)	94,52
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		Badan Penghubung Daerah	13.861.882.473,00	13.101.772.294,00	(760.110.179,00)	94,52
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.861.882.473,00	13.101.772.294,00	(760.110.179,00)	94,52
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.358.791.073,00	12.600.354.354,00	(758.436.719,00)	94,32
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	503.091.400,00	501.417.940,00	(1.673.460,00)	99,67
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	51.206.443.087,00	49.818.552.697,00	(1.387.890.390,00)	97,29
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	51.206.443.087,00	49.818.552.697,00	(1.387.890.390,00)	97,29
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		Inspektorat	51.206.443.087,00	49.818.552.697,00	(1.387.890.390,00)	97,29
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5	BELANJA DAERAH	51.206.443.087,00	49.818.552.697,00	(1.387.890.390,00)	97,29
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1	BELANJA OPERASI	50.281.677.187,00	48.987.589.640,00	(1.294.087.547,00)	97,43
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.2	BELANJA MODAL	924.765.900,00	830.963.057,00	(93.802.843,00)	89,86
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	(3.241.935.739,00)	92,78
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	(3.241.935.739,00)	92,78
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	(3.241.935.739,00)	92,78
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	(3.241.935.739,00)	92,78
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	43.450.243.743,00	40.295.688.337,00	(3.154.555.406,00)	92,74
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	(87.380.333,00)	93,88
			Jumlah	(22.286.164.438,01)	(3.169.898.762,08)	19.116.265.675,93	14,22

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp3.712.434.360.163,46 atau sebesar 94,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Beberapa realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai realisasi 80% dengan rincian sebagai berikut:

3.2.1.1 Rendahnya capaian realisasi Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB sebesar Rp273.480.737.600,00 atau sebesar 68,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp399.572.412.018,00, secara umum tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan insentif pembayaran Wajib Pajak setara dengan beban pajak tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasinya Undang-Undang HKPD tersebut menerapkan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar

39,74%, yang menyebabkan penurunan realisasi dibandingkan target awal. Selain itu, rendahnya capaian BBNKB dipengaruhi kondisi perekonomian yang belum stabil yang menyebabkan penurunan penjualan kendaraan baru dan rendahnya daya beli masyarakat. Disamping itu juga memberikan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik (EV) dalam rangka merangsang pasar baru.

3.2.1.2 Rendahnya capaian realisasi Pajak Alat Berat (PAB) sebesar Rp614.336.352,00 atau sebesar 14,17% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.334.952.300,00 dikarenakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terlebih dahulu harus menerbitkan regulasi turunan yang mengatur tentang tata cara pemungutan PAB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025. Sebagai tindaklanjut atas regulasi dimaksud, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1289/KPTS-28/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pemungutan PAB baru dapat dilaksanakan secara efektif sejak bulan September 2025.

3.2.1.3 Rendahnya capaian realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp13.300.000,00 atau sebesar 10,57% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp125.775.000,00 pada BLUD SMK Dinas Pendidikan dikarenakan tidak dapat dioperasionalkannya secara maksimal beberapa kamar Edotel (Educational Hotel) yang dikelola oleh SMKN 2 Batam dan SMKN 2 Tanjungpinang.

3.2.1.4 Tidak terealisasi Retribusi Pertambangan Rakyat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp84.631.165,00 dikarenakan dikarenakan belum dapat dilakukan pemungutan Retribusi Pertambangan Rakyat yang disebabkan belum ditetapkannya tarif Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA). Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menuangkan tarif IPERA ke dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah yang saat ini dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

3.2.1.5 Rendahnya capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.275.536.541,00 atau 73,40% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.100.000.000,00 dikarenakan kerugian finansial pada dua BUMD berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025. Kerugian yang dialami oleh PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp1.864.966.167,00 dan PDAM Tirta Kepri sebesar Rp2.017.095.818,00, sedangkan pada BUMD PT. Pembangunan Kepri mencatat laba kecil sebesar Rp323.079.823,00 sehingga ketiga BUMD tersebut belum dapat memberikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2025. Sementara itu PT. Energi Kepri (Perseroda) yang baru berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Hingga akhir tahun 2025, BUMD tersebut belum beroperasi secara penuh sehingga belum dapat memberikan dividen.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi belanja daerah sebesar Rp3.715.604.258.925,54 atau sebesar 94,48% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.932.501.110.900,44. Beberapa realisasi belanja daerah yang tidak mencapai realisasi 80% secara umum disebabkan antara lain:

a. Rendahnya capaian realisasi Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp834.852.991,00 atau sebesar 29,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.864.494.061,38 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tidak tercapainya target belanja dikarenakan replikasi Program Subsidi Margin 0% bagi UMKM oleh Pemerintah Kota Batam, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bintan turut berpengaruh terhadap tingkat

pemanfaatan program di tingkat Provinsi. Dengan adanya program sejenis di tingkat kabupaten/kota, UMKM memiliki lebih banyak alternatif untuk memperoleh pembiayaan dengan skema subsidi margin yang relatif sama. Dalam kondisi tersebut, pelaku UMKM cenderung memilih program yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari sisi kemudahan persyaratan, kecepatan proses, besaran pinjaman, jangka waktu, maupun kedekatan lokasi layanan. Hal ini menyebabkan sebagian UMKM yang menjadi target sasaran program provinsi beralih memanfaatkan program yang disediakan oleh pemerintah daerahnya masing-masing, sehingga permintaan terhadap subsidi margin yang bersumber dari APBD Provinsi menjadi lebih rendah dari yang telah diproyeksikan.

b. Rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.834.940.000,00 atau sebesar 64,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.856.445.000,00. Tidak tercapainya target belanja dikarenakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan verifikasi kembali terhadap sasaran penerima bantuan sosial untuk menghindari terjadinya duplikasi penerima bantuan dana dengan jenis, peruntukan dan tujuan yang sama dengan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota sebelumnya, hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian penyaluran bantuan sosial.
c. Tidak terealisasi Belanja Tidak Terduga dari yang dianggarkan sebesar Rp2.281.396.903,60 dikarenakan tidak ada peristiwa yang mengakibatkan adanya pengeluaran dari belanja tidak terduga. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.1 Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Dalam pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau TA 2025, terdapat beberapa kali pergeseran anggaran yang dilakukan melalui Perubahan Perda tentang APBD dan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dikarenakan adanya beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, adanya penyesuaian alokasi TKD, belanja yang bersifat mengikat berupa pemenuhan belanja pegawai, belanja bersifat wajib berupa Penyelesaian Pembayaran atas Kewajiban Pihak Ketiga (Tunda Bayar) untuk Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun Anggaran sebelumnya, dan kebutuhan mendesak yaitu Belanja Bantuan Keuangan dengan objek Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi.

Pergeseran dan Perubahan Anggaran Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pergeseran Pertama ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan karena adanya penyesuaian alokasi Transfer Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan Nomor KMK 29/2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD TA 2025, serta penyelesaian tunda bayar Tahap I atas pelaksanaan kegiatan pada APBD TA 2024.
b. Pergeseran Kedua ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan karena sebagai tindak lanjut penyesuaian Alokasi Pendapatan KB/LB DBH (KMK 44/2024 ttg Penyaluran KB dan LB DBH Tahun 2024, serta pelaksanaan efisiensi belanja yang dialihkan/diformulasikan kepada rekening Belanja Tidak terduga untuk keperluan penyelesaian Tunda Bayar pekerjaan TA 2024 Tahap II, dan keperluan pelaksanan dukungan Asta Cita.

c. Pergeseran Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan untuk penggunaan rekening Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan penyelesaian Tunda Bayar pekerjaan TA 2024 Tahap II, dan keperluan pelaksanan dukungan Asta Cita.
d. Pergeseran Keempat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan untuk keperluan belanja pegawai yaitu Pergeseran Belanja Pegawai Non ASN untuk gaji PPPK, serta pergeseran BTT untuk penyeselaian tunda bayar kegiatan 2024.
e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disajikan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
f. Pergeseran Pertama setelah Perubahan APBD TA 2025 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat yaitu terdapatnya kekurangan alokasi belanja pegawai pada SKPD dengan melakukan formulasi terlebih dahulu pada rekening BTT.
g. Pergeseran Kedua setelah Perubahan APBD TA 2025 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan pada anggaran BTT untuk pemenuhan kekurangan aggaran belanja pegawai pada SKPD.
h. Pergeseran Ketiga setelah Perubahan APBD TA 2025 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan dalam rangka penggunaan alokasi BTT untuk kebutuhan mendesak yaitu Belanja Bantuan Keuangan dengan objek Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi dalam rangka bantuan kepada Pemerintah Aceh, Sumatera Barat, dan Pemerintah Sumatera Utara.

3.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan *e-SAKIP* adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang ditargetkan untuk dicapai.

Apabila semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Sedangkan semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Pengukuran Kategori

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	> 100%	Sangat baik
3	75% s.d 100%	Baik
2	55% s.d 75%	Cukup
1	< 55%	Kurang

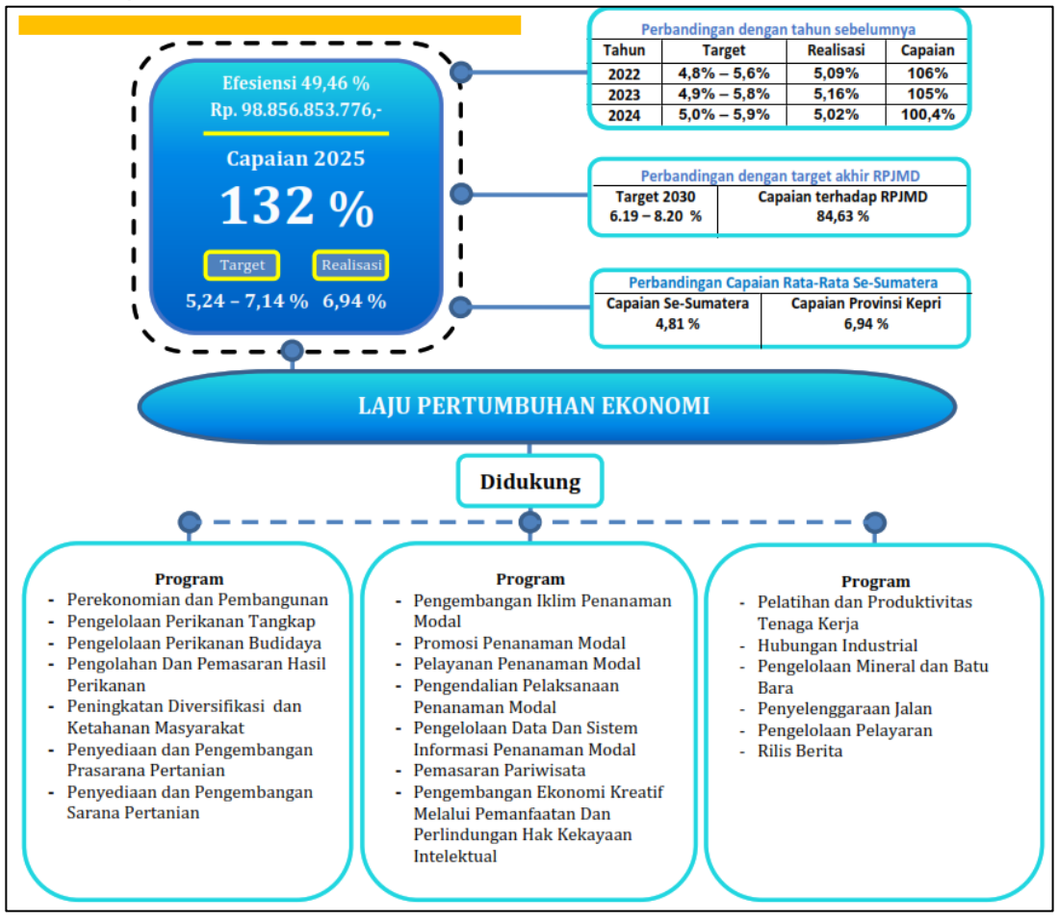
3.2.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Pemerintah Provinsi Kepulauan yang ditetapkan pada tahun 2025. Dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

3.2.3.1 Sasaran Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

3.2.3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan Ekonomi pada Triwulan IV Tahun 2025 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar 6,94% dari target sebesar 5,24 – 7,14% (penggunaaan target terendah) sehingga capaian kinerja mencapai 132%.

Perlu kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja, di mana indikator kinerja yang digunakan tetap sama namun mengalami penyesuaian pada penamaan serta target pencapaiannya. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta peningkatan akurasi dalam pengukuran kinerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada Indikator ini perjanjian kinerja murni tahun 2025 menjanjikan pencapaian indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,1 – 6,1%, kemudian perjanjian kinerja mengalami perubahan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,24 – 7,14%.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja terbaru sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat

perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Mewujudkan Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan dilihat dari indikator Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan maksimal. Realisasi indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 6,94% dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 5,24 – 7,14% (penggunaan target angka terendah) sehingga capaian kinerja sebesar 132% atau dalam kategori Sangat Baik."

Tabel 3.4 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,24 – 7,14%	6.94%	132%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang kuat dan terus membaik di triwulan IV-2025, dengan pertumbuhan didorong oleh sektor industri, ekspor, dan investasi. Pola pertumbuhan yang lebih tinggi secara y-on-y dan q-to-q menunjukkan momentum positif yang perlu dijaga melalui kebijakan yang mendukung investasi, ekspor, dan stabilitas makroekonomi. Prestasi Saat Ini:

1. Pertumbuhan tinggi dan inklusif (6,94% dengan diversifikasi sektor);
2. Posisi sebagai *growth leader* di Sumatera (7,89% vs rata-rata 4,54%);
3. Struktur ekonomi yang semakin modern dengan dominasi industri dan jasa.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat dipengaruhi Sektor PDRB menurut Lapangan Usaha dan PDRB Menurut Pengeluaran.

I. Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha

Grafik 3.5 PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau C-to-C TW IV-2025

Kategori	Share (%)	Pertumbuhan	Andil Pertumbuhan
Industri Pengolahan	41,57	7,52	3,14
Konstruksi	19,87	5,30	1,03
Pertambangan dan Penggalian	10,06	16,01	1,57
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,42	7,55	0,62
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98	3,49	0,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,68	4,11	0,12
Informasi dan Komunikasi	2,39	-2,65	-0,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	-1,46	-0,04
Transportasi dan Pergudangan	2,02	7,18	0,14
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,83	2,87	0,06
Jasa Pendidikan	1,33	5,48	0,06
Pengadaan Listrik dan Gas	1,14	10,37	0,11
Real Estate	1,09	5,71	0,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,86	2,67	0,03
Jasa lainnya	0,32	1,96	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	11,70	0,01
Jasa Perusahaan	0,00	16,70	0,00

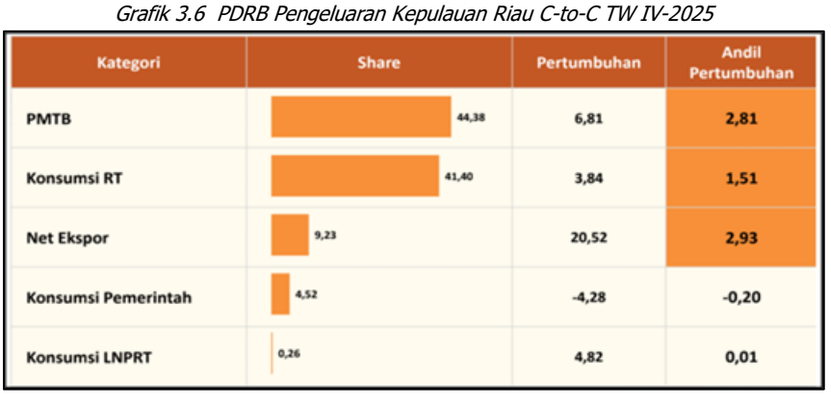
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisa dari sisi Penawaran (PDRB Menurut Lapangan Usaha)

1. Struktur Ekonomi Dominan:
   Industri Pengolahan (41,83%): *Backbone economy* dengan kontribusi terbesar. Konstruksi (20,16%): Penopang kedua, indikator aktivitas investasi. Pertambangan & Penggalian (10,29%): Sektor ekstraktif dengan nilai tambah tinggi.
2. Performa Sektor Unggulan:
   a. Sektor Primer (Pertumbuhan y-on-y): Pertambangan & Penggalian: 18,67% (tertinggi) dengan andil 1,91%; Pertanian, Kehutanan, Perikanan: -13,42% (kinerja terburuk) Analisis: Terjadi *resource shifting* dari sektor primer tradisional ke sektor ekstraktif bernilai tinggi
   b. Sektor Sekunder (Motor Pertumbuhan): Industri Pengolahan: 8,89% dengan andil 3,71% (kontributor terbesar); Konstruksi: 4,11% dengan andil 0,82%; Pengadaan Listrik & Gas: 12,99% (infrastruktur pendukung industri)
   c. Sektor Tersier (Pertumbuhan Diversifikasi): Jasa Keuangan & Asuransi: 12,16% (finansialisasi ekonomi); Jasa Perusahaan: 16,70% secara c-to-c (bisnis *support services* berkembang); Jasa Pendidikan: 12,92% q-to-q (investasi human capital).
3. Transformasi Struktural: Dominasi sektor industri meningkat (41,83% vs sebelumnya ~40%). Penurunan share sektor pertanian (sekitar 2,7% dari total); Peningkatan kontribusi jasa modern: jasa keuangan, informasi, dan Pendidikan.

II. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Menurut Pengeluaran)

Grafik 3.6 PDRB Pengeluaran Kepulauan Riau C-to-C TW IV-2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

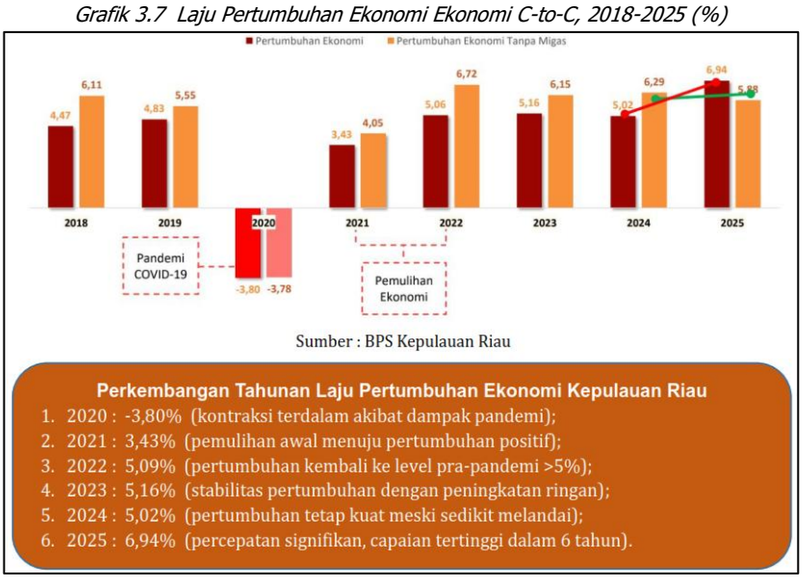
Analisa dari sisi Permintaan (PDRB Menurut Pengeluaran)

1. Komposisi Pengeluaran 2025:
   PMTB: 43,99% (investasi sebagai penggerak utama), Konsumsi Rumah Tangga: 39,82% (stabilitas permintaan domestik). Net Ekspor: 8,37% (surplus perdagangan kontributif). Konsumsi Pemerintah: 6,39% (relatif kecil).
2. Dinamika Pertumbuhan Komponen
   a. Investasi (PMTB): y-on-y: 6,24% (andil 2,58%). c-to-c: 6,81% (andil 2,81%). Implikasi: Investasi sebagai *engine of growth* yang konsisten.
   b. Ekspor Neto: Pertumbuhan ekspor y-on-y: 8,42% vs impor 6,80%. Net ekspor tumbuh 27,02% y-on-y dengan andil 3,65%. Analisis: Kepri sebagai *export-oriented economy* dengan daya saing internasional.
   c. Konsumsi: Rumah Tangga: Stabil (3,84% c-to-c). Pemerintah: Volatil (kontraksi y-on-y tapi melonjak q-to-q). LNPRT: Tumbuh solid (4,82% c-to-c)

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data realisasi, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren positif dan stabil dari tahun 2021 hingga 2025. Data terkini menegaskan bahwa perekonomian Kepulauan Riau tidak hanya pulih dari kontraksi akibat pandemi, tetapi juga mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5% dalam tiga tahun terakhir.

Grafik 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi C-to-C, 2018-2025 (%)



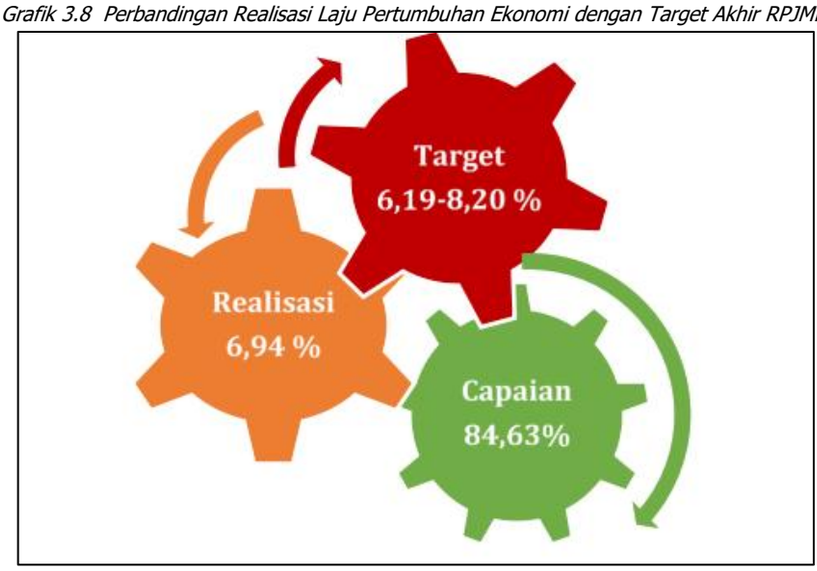
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dari kontraksi -3,80% di 2020, perekonomian Kepulauan Riau tidak hanya berhasil pulih, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan dengan stabil di kisaran 5% selama tiga tahun, sebelum akhirnya mengalami akselerasi signifikan menjadi 7,48% di 2025. Pola pertumbuhan ini mencerminkan pengelolaan ekonomi yang prudent sekaligus adaptif, dengan kemampuan untuk berakselerasi ketika kondisi memungkinkan. Pencapaian pertumbuhan 6,94% di 2025 yang merupakan peningkatan 10,74 poin persentase dari titik terendah 2020 menegaskan posisi Kepri sebagai salah satu provinsi dengan kinerja ekonomi paling dinamis di Indonesia.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja indikator Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,94% dengan target RPJMD tahun 2030 sebesar 6.19 - 8.20% (penggunaan target tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 84,63%.

Grafik 3.8 Perbandingan Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan IV-2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,54%. Pertumbuhan q-to-q triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 0,3%. Dan secara c-to-c tumbuh sebesar 4,81%. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,52%, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan *share* sebesar 7,57%.

Posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di se-Sumatera, dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera TW IV 2025 Tahun Dasar 2010

	Wilayah	PDRB (miliar rupiah)		Pertumbuhan (%)			Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
		ADHB	ADHK	q to q	y on y	c to c	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	66.351,15	40.198,42	-0,05	-1,61	2,97	4,92
2.	Sumatra Utara	317.402,20	168.392,70	0,13	4,23	4,53	23,52
3.	Sumatra Barat	89.272,71	51.849,62	0,39	1,69	3,37	6,62
4.	Riau	307.557,43	152.957,41	0,12	4,94	4,79	22,79
5.	Jambi	90.808,29	47.980,23	1,30	5,24	4,93	6,73
6.	Sumatra Selatan	183.644,58	100.912,97	-1,53	5,54	5,35	13,61
7.	Bengkulu	29.166,81	14.641,65	3,34	4,79	4,80	2,16
8.	Lampung	131.949,20	74.238,35	-3,05	5,54	5,28	9,78
9.	Kep. Bangka Belitung	31.076,54	16.466,41	4,87	4,54	4,09	2,30
10.	Kepulauan Riau	102.137,24	59.767,12	7,35	7,89	6,94	7,57
	Sumatera	1.349.366,15	727.404,89	0,36	4,54	4,81	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi Multisektoral: Pertumbuhan didorong secara bersamaan oleh Kontribusi besar dari sektor minyak dan gas (migas);
2. Realisasi APBD Tahun 2025 memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri;
3. Jumlah penumpang berangkat pada angkutan laut mengalami peningkatan 7,52% (y-on-y) dan 7,72% (c-to-c) (Sumber : Simapel – Syahbandar);
4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 23,05% (yon-y) dan 22,75% (c-to-c) (Sumber : Imigrasi);
5. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara yang datang ke Kepulauan Riau meningkat 16,56% (y- on-y) dan 12,15% (c-to-c). (sumber: Imigrasi);
6. Total Bongkar dan Muat Barang Angkutan Udara meningkat sebesar 19,39% dan 38,65% (c-to- c). (sumber: Simopel – Syahbandar);
7. Total Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut meningkat sebesar 6,42% dan 20,08% (c-to-c). (sumber: Simopel – Syahbandar);
8. Realisasi Investasi di Kepri naik 36,84% dimana Penanaman Modal Asing naik sebesar 16,62% dan Penanaman Modal Dalam Negeri naik sebesar 112,04% (c-to-c). (sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal);
9. Realisasi pengadaan semen meningkat 8,32% (y-on-y) dan 20,62% (c-to-c). (sumber: ASI);
10. Penjualan listrik tumbuh sebesar 19,36% (y-on-y) dan 20,83% (cto-c). (sumber: PLN Batam);
11. Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam tumbuh dampak dari adanya lapangan minyak yang baru diresmikan dan beroperasi pada 2025, yaitu Lapangan Forel dan Terubuk di lepas Pantai Laut Natuna (c-toc). (sumber: CNBC Indonesia).

Dalam peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Efektifitas pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi diantaranya : mengontrol laju inflasi, meningkatkan pendapatan daerah, menjaga stabilitas perekonomian daerah, membantu pemerataan distribusi pendapatan daerah, membantu meningkatkan kapasitas produksi daerah, meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan

Pelaksanaan Gelar Pasar Murah & Meeting TPID & TP2DD Prov Kepri



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Prov Kepri

2. Memperkuat iklim investasi adalah dengan menginisiasi dan mendorong terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2025. Aturan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha yang nyata baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri, sekaligus menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025


SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Sumber : DPMPTSP Prov Kepri

Penandatanganan MoU Prov Kepri Lampung,Maluku Utara, dan Jawa Tengah



Sumber : DPMPTSP Prov Kepri

3. Memperkuat kerja sama dengan daerah lain adalah melalui kolaborasi antar pemerintah provinsi untuk memperluas akses pasar, pertukaran potensi ekonomi, dan peningkatan investasi. Pada 14 Juni 2025, Pemerintah Provinsi Kepri bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara menandatangani kesepakatan kerja sama antar daerah yang mencakup *capacity building* dan pertukaran informasi strategis

4. Pelaksanaan Promosi Investasi memanfaatkan platform internasional World Expo 2025 di Osaka, Jepang sebagai salah satu strategi utama dalam promosi investasi dan pencarian investor. Kegiatan tersebut dirancang untuk memperkenalkan potensi investasi unggulan Kepri, termasuk energi terbarukan, industri hilirisasi, pariwisata, dan teknologi industri kreatif

Penandatanganan Promosi Investasi World Expo 2025



Sumber : DPMPTSP Prov Kepri

5. Menekan biaya produksi dengan Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta budidaya ikan di laut sebanyak 5.321 unit yang diberikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan kecil. Berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan yang diukur melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 104,29 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 91,49 per Desember 2025

6. Meluncurkan program JIWA, merupakan hasil kolaborasi antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Pemprov Kepri, serta pelaku industri pariwisata di Kepulauan Riau. Melalui program ini, wisatawan dari Johor cukup menunjukkan ID Card Johor untuk menikmati diskon khusus antara 10 hingga 30 % di 33 destinasi hotel, restoran, transportasi, dan layanan wisata lainnya di Kepulauan Riau.

Peluncuran Program JIWA



Sumber : DPMPTSP Prov Kepri

7. Upaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk perikanan yang dihasilkan Unit Pengolahan Ikan (UPI), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan administratif dalam penerapan Cara Pengolahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*/GMP) dan standar sanitasi

8. Menyelenggarakan event pariwisata yang berkualitas dan promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik, dan pelaksanaan pameran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan telah berhasil mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1.780.013 orang atau naik sebesar 20,97 % dibandingkan capaian tahun 2024, serta mendatangkan 3.916.176 wisatawan nusantara atau mengalami kenaikan sebesar 12 % dibandingkan tahun 2024 yang lalu yang pada akhirnya menyumbang kontribusi PDRB sebesar 5.149,98 Milyar Rupiah.

9. Pemberdayaan Pelaku Usaha Perdagangan pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau dengan tema pemasaran produk dalam negeri berorientasi ekspor dan sistem pemasaran produk secara digital.

10. Pelatihan dan Pembinaan 100 orang Pelaku IKM serta Fasilitasi Sertifikasi Produk TKDN dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau yang telah diterbitkan sebanyak 100 Sertifikat.

11. Menyusun kajian terkait Proses Bisnis Sentra Industri, Kajian Pemetaan Peluang pasar bagi Sentra industry, Kajian Kerjasama sentra industry dengan kawasan-kawasan industry, Kajian Penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM, Kajian Identifikasi standart bahan baku dan analisis alur material.

12. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian modern dan Dorongan penggunaan teknologi di pertanian untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas produksi, termasuk dukungan pada inovasi agribisnis berbasis teknologi dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang dikuti oleh 6 kelompok wanita Tani.

13. Pengembangan akses pasar domestik dan regional untuk produk pertanian lokal agar komoditas pertanian Kepri memiliki pangsa pasar lebih luas, termasuk peluang ekspor serta Kebijakan penguatan distribusi logistik dan stabilitas harga pangan, termasuk melalui pasar murah dan stabilisasi pasokan untuk mendukung sektor pertanian lokal yang dilaksanakan di 11 lokasi

Monitoring Kelancaran Transportasi Laut



Sumber : Dishub Prov Kepri

14. Mendukung kelancaran konektivitas transportasi perairan dengan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha mencapai 8 izin kapal, Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat mencapai 389 izin, Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah mencapai 25 Izin, Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan mencapai 21 Izin.

15. Formalisasi Komitmen "Link and Match" Lintas Sektor dengan Melakukan pengikatan kerja sama melalui Penandatanganan Komitmen Dukungan Program Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Provinsi Kepulauan Riau.

16. Menekan angka pengangguran dan setengah menganggur melalui peningkatan kompetensi dengan Penguatan Program Pelatihan melalui aktivitas Pemagangan Jenjang Menengah (SMA/SMK): Fokus pada sektor pariwisata dan ritel untuk menyerap lulusan sekolah vokasi. Pelaksanaan pemagangan ini bekerja sama dengan mitra strategis, antara lain: Hotel Santika, PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC) serta Department Store Ramayana.

17. Melaksanakan penetapan UMK untuk kabupaten/kota yang ada di Provinsi kepulauan Riau yang melibatkan unsur serikat pekerja, unsur pengusaha (APINDO) dan unsur akademis sehingga dalam penetapan Upah kebijakan yang diambil berdasarkan data akurat tepat waktu dan kondusif yang merupakan variable krusial dalam menjaga stabilitas daya beli pekerja dan pengendalian biaya produksi yang berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah

18. Meningkatkan produksi mineral bukan logam, mineral bukan loga jenis tertentu dan batuan sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar.

19. Mengoptimalkan layanan saluran komunikasi melalui media online, cetak, dan elektronik serta mempermudah masyarakat untuk dapat mengetahui program-program Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pembangunan Nasional dengan penyediaan informasi melalui media milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa media *online (website)* serta media sosial.

Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, sebagai antara lain:

1. Ketergantungan pada Sumber Eksternal: Beberapa barang konsumsi yang mempengaruhi inflasi, seperti bahan bakar dan bahan pokok dipenuhi dari impor antar provinsi maupun luar negeri, sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang di luar kendali daerah;
2. Ketergantungan pada sektor tertentu, seperti migas dan perikanan, yang membuat ekonomi daerah rentan terhadap guncangan eksternal;
3. Kualitas Tanah atau lahan berpasir dan kurang subur, sehingga produktivitas tanaman rendah. Hal ini membutuhkan biaya tambahan untuk pupuk dan rekayasa lahan agar bisa ditanami secara optimal;
4. Bantuan sarana dan prasarana penangkapan serta budidaya ikan di laut belum sepenuhnya menjangkau seluruh nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan usahanya. Selain keterbatasan jangkauan bantuan, masih banyak nelayan dan pembudidaya kecil yang belum memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai, sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan memperluas usaha perikanannya;
5. Permasalahan dalam penerbitan rekomendasi dan SKP di Provinsi Kepulauan Riau meliputi keterbatasan UPI yang memenuhi standar GMP dan sanitasi, terbatasnya SDM pembina, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi, keterbatasan sarana pengolahan serta proses administrasi dan perizinan yang masih memerlukan pendampingan;
6. Transportasi antar pulau masih menjadi kendala besar, sehingga distribusi hasil pertanian tidak efisien. Biaya logistik tinggi menyebabkan harga produk pertanian lokal kurang kompetitif;
7. Masih minimnya penerbangan langsung dari kota-kota potensial ke Kepulauan Riau dan mahalnya tiket transportasi juga menjadi hambatan optimalnya kunjungan wisatawan.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan mengurangi permasalahan dan kedala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya sebagai berikut:

1. Pertumbuhan yang saat ini sangat ditopang oleh belanja pemerintah perlu diwaspadai kesinambungannya. Kedepannya, pertumbuhan perlu didorong lebih kuat oleh investasi swasta dan ekspor murni untuk menjamin keberlanjutan;
2. Peningkatan Investasi di Sektor Energi: Melalui Peraturan Daerah yang telah disahkan, pemerintah daerah harus dapat menarik investasi swasta dan nasional di sektor energi. Penyiapan regulasi yang jelas dan insentif yang menarik akan membantu mendongkrak investasi, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian daerah;
3. Diversifikasi Sumber Energi: Pemerintah provinsi perlu menggali potensi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa untuk menciptakan keberlanjutan energi. Diversifikasi sumber energi akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung ketahanan energi jangka panjang;
4. Penguatan Sektor Energi Lokal: Peningkatan kapasitas dan dukungan kepada BUMD Energi Kepri dalam mengelola sumber daya alam yang ada akan memperkuat ekonomi daerah. Biro Perekonomian harus memfokuskan pengelolaan BUMD agar lebih efektif dalam memanfaatkan potensi energi lokal untuk kepentingan masyarakat, dengan telah dibentuknya PT. Energi Kepri (Perseroda) pada Tahun 2025 yang merupakan akuisisi dari Anak Perusahaan dari PT. Pembangunan Kepri. Dengan BUMD yang khusus menangani energi, nilai tambah dari sumber daya alam energi dapat lebih maksimal diserap oleh daerah berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja lokal, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar wilayah;
5. Penyusunan Strategi daerah untuk revitalisasi Pelatihan Vokasi yang fokus pada Optimalisasi Sistem Informasi Pasar kerja, Penguatan Peran DUDI dalam Proses Pendidikan Vokasi, Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebutuhan Pasar Kerja;
6. Upaya konkret untuk meningkatkan penerbitan rekomendasi dan SKP di Provinsi Kepulauan Riau melalui pelatihan dan pendampingan intensif bagi pelaku usaha dan SDM pembina terkait GMP dan sanitasi, pemanfaatan sistem online untuk pengajuan dan verifikasi dokumen, pembangunan atau perbaikan fasilitas pengolahan ikan agar memenuhi standar keamanan pangan serta koordinasi reguler antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mempercepat penerbitan sertifikat dan pengawasan UPI secara merata;
7. Pengembangan pertanian perkotaan (*urban farming*) dan hidroponik untuk mengatasi keterbatasan lahan serta diversifikasi pangan lokal dengan memanfaatkan tanaman yang sesuai kondisi tanah (misalnya kelapa, sagu);
8. Pelaksanaan promosi dengan mengikuti *event-event* berskala nasional maupun internasional untuk memperkenalkan potensi yang ada di provinsi Kepulauan Riau.
9. Mengoptimalkan promosi pariwisata di berbagai chanel media untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperbanyak atraksi wisata untuk memberikan kenyamanan wisatawan;
10. Meningkatkan kesempatan kerja melalui Peningkatan akses Pelayanan ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan pelayanan penggunaan aplikasi SIAP kerja yang dapat digunakan dalam layanan pendataran pelatihan di Lembaga pelatihan kerja BLK dan LPK Swasta, Pendaftaran pemagangan ke luar negeri, sertifikasi BNSP, Pendaftaran pencari kerja di karirhub atau portal Pemda dan Portal Swasta dan layanan ketenagakerjaan lainnya seperti *job fair*.

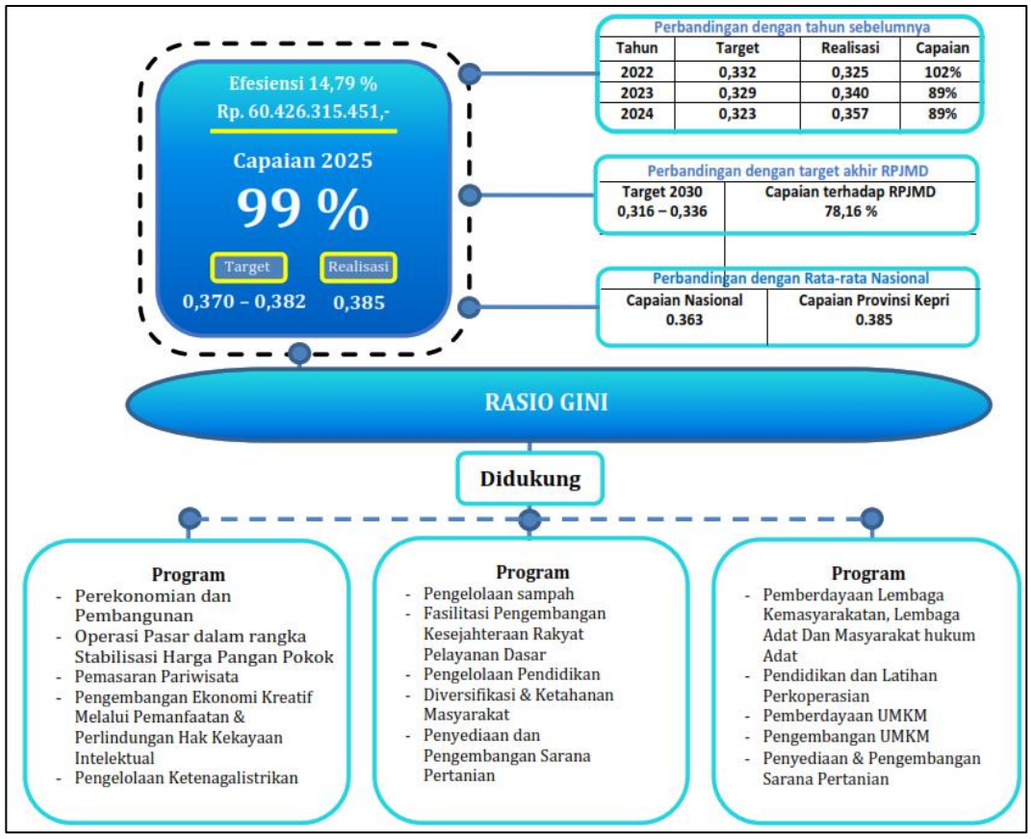
G. Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 3.10 Program dan Realisasi Anggaran yang Mendukung Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Perekonomian dan Pembangunan	351.320.920,00	337.295.059,00	96,01
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	13.496.177.809,12	12.947.287.223,12	95,93
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.887.067.836,00	2.746.081.044,80	95,12
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	127.080.680,68	122.720.139,00	96,57
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	479.411.260,73	429.088.592,00	89,5
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.347.986.248,00	1.390.236.920,00	25,99
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.267.421.214,00	836.834.500,00	66,02
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	219.614.350,00	202.641.291,00	92,27
Program Promosi Penanaman Modal	348.266.180,00	343.536.124,00	98,64
Program Pelayanan Penanaman Modal	211.876.799,00	198.918.230,00	93,88
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	51.106.895,00	48.201.398,00	94,31
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	13.707.100,00	13.517.645,00	98,62
Program Pengelolaan Pelayaran	8.207.522.273,00	4.359.571.277,00	53
Program Pemasaran Pariwisata	7.758.633.839,00	5.647.330.979,00	72,8
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.307.813.811,00	1.253.032.729,00	95,8
Program Penyelenggaraan Jalan	49.854.264.462,00	44.032.581.032,00	88,32
Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	97,4
Program Hubungan Industrial	233.668.400,00	218.422.398,00	93,48
Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara	620.047.000,00	606.354.000,00	98
Program Rilis Berita	50.000.000,00	50.000.000,00	100
Total	**98.856.583.776,00**	**81.606.099.162,92**	**82,54**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp98.856.583.776,00 terealisasi sebesar Rp81.606.099.162,92 atau 82,54%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp17.250.754.613,08 (17,45%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (132%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (82,54%) dengan efesiensi 49,46%.

3.2.3.1.2 Rasio Gini



Rasio Gini, Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan di antara penduduk suatu wilayah. Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau belum mencapai target yang ditentukan. Rasio Gini pada Tahun 2025 dengan capaian realisasi sebesar 0,385 Indeks dari target sebesar 0,370 – 0,382 Indeks (penggunaan target target tertinggi) dan capaian kinerja sebesar 99%.

Perlu kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja, di mana indikator kinerja yang digunakan tetap sama namun mengalami penyesuaian pada penamaan serta target pencapaiannya. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta peningkatan akurasi dalam pengukuran kinerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan

Pada Indikator ini perjanjian kinerja murni tahun 2025 menjanjikan pencapaian indikator Indeks Gini dengan target 0,321 Indeks , kemudian perjanjian kinerja mengalami perubahan dengan indikator Rasio Gini dengan target 0,370 – 0,382 Indeks.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja terbaru sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator rasio gini Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan maksimal. Realisasi indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 0,385 Indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 0,370 – 0,382 Indeks (Penggunaan target tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 99% atau dalam kategori “Baik”.

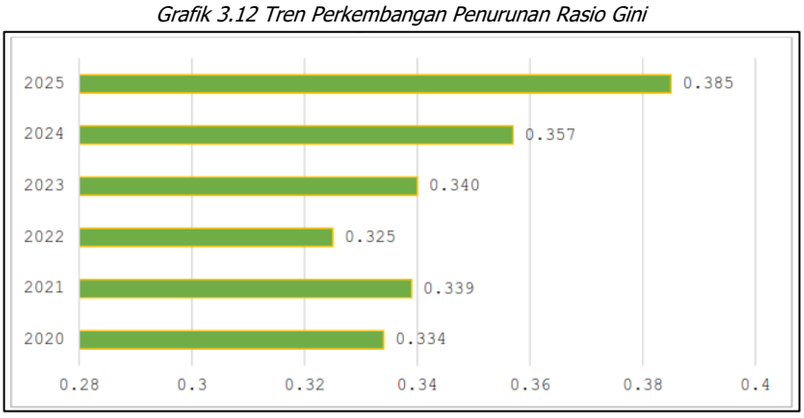
Tabel 3.11 Capaian Rasio Gini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Gini	0,370 – 0,382 Indeks	0,385 Indeks	99%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data yang tercatat, Indeks Gini Rasio sebesar 0,385 indeks termasuk dalam kategori rendah. Capaian ini mencerminkan distribusi pendapatan yang relatif merata di wilayah tersebut, di mana kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah tidak terlalu lebar. Dengan tingkat ketimpangan yang tergolong rendah, kondisi ini dapat mendukung stabilitas sosial dan menjadi landasan yang baik untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di masa mendatang.

Grafik 3.12 Tren Perkembangan Penurunan Rasio Gini



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

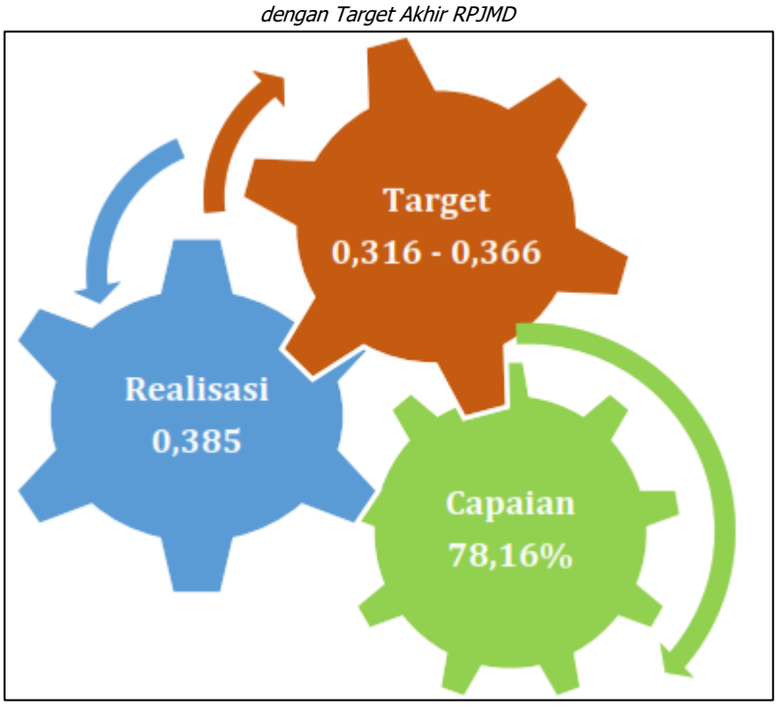
Dapat dilihat pada tabel diatas, Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan analisis data dari tahun 2020 hingga 2025, perkembangan Gini Rasio di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren peningkatan ketimpangan pendapatan yang signifikan dan perlu menjadi perhatian serius.

Pada tahun 2020, ketimpangan berada pada level yang relatif terkendali dengan nilai 0,334. Namun, dalam perjalanan enam tahun berikutnya, meskipun sempat mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2022 (0,326), ketimpangan kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2025 sebesar 0,382. Nilai ini merupakan yang tertinggi dalam periode pengamatan dan menempatkan ketimpangan pendapatan provinsi Kepri.

Kenaikan yang konsisten, terutama dalam dua tahun terakhir (2024–2025), mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan merata. Melebarnya kesenjangan ini berpotensi memengaruhi stabilitas sosial, mengurangi efektivitas pengentasan kemiskinan, dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan strategis, seperti penguatan program perlindungan sosial, pemerataan akses pendidikan dan peluang kerja, serta dukungan terhadap sektor usaha mikro dan kecil, agar manfaat pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat. Dengan kata lain, meskipun Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kemajuan dalam beberapa indikator ekonomi, tantangan keadilan distributif tetap harus menjadi prioritas. Pemulihan dan pemertaan pendapatan bukan hanya tugas jangka pendek, melainkan komitmen jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing inklusif.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Grafik 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Gini Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

C. Perbandingan antara Realiasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Tabel 3.14 Perbandingan Indeks Gini Tingkat Provinsi se-Indonesia per Maret 2025

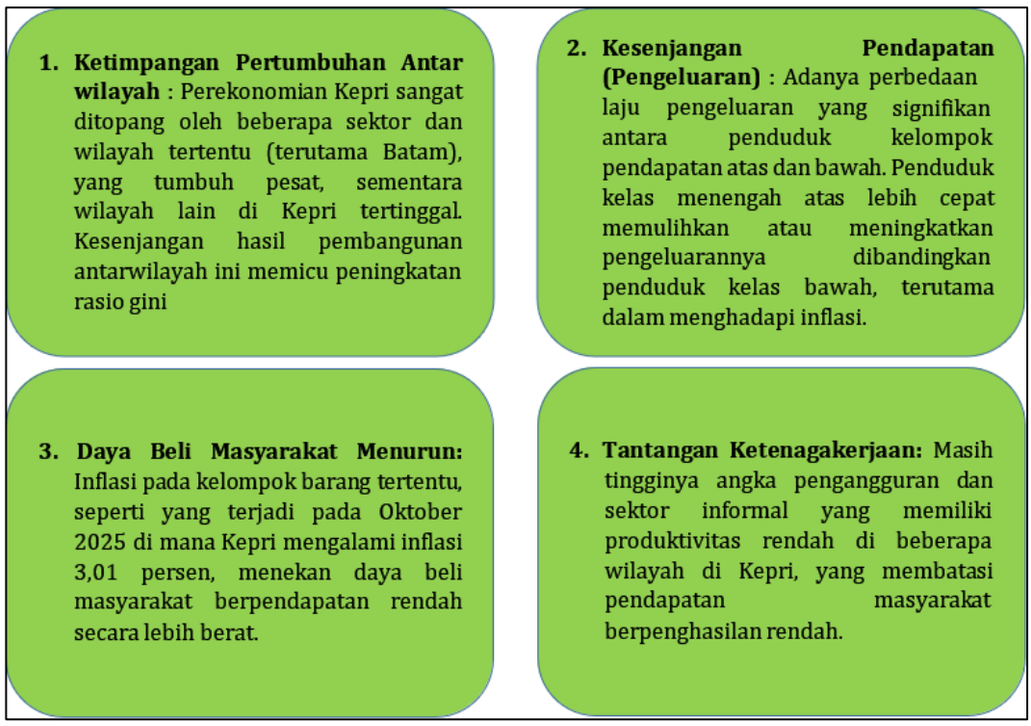
Rank	Provinsi	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah Perkotaan+Perdesaan Tahun2025
		Semester 2 (September)
1	PAPUA SELATAN	0,426
2	DKI JAKARTA	0,423
3	DI YOGYAKARTA	0,414
4	JAWA BARAT	0,397
5	PAPUA	0,397
6	KEP. RIAU	0,385
7	GORONTALO	0,383
8	PAPUA BARAT	0,383
9	NUSA TENGGARA BARAT	0,364
	Dst	
INDONESIA		0,363

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada Tahun 2025, capaian Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan capaian nasional berada dibawah capaian nasional dimana Gini Rasio Nasional Tahun 2025 sebesar 0,363. Dibandingkan provinsi se-Indonesia tahun 2025, Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,385 pada September 2025 berada pada posisi ke enam setelah Provinsi Papua jika dibandingkan Provinsi se Wilayah Sumatera, Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,385 berada pada posisi pertama dari Provinsi di Sumatera.

D. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab utama naiknya indeks Gini di Kepulauan Riau pada Maret 2025 adalah melebarnya ketimpangan pendapatan, terutama di wilayah perkotaan, akibat pertumbuhan ekonomi yang belum merata :



Adapun Upaya yang dilakukan dalam mendukung Penurunan Rasio Gini di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 12 kegiatan berkolaborasi bersama Instansi atau lembaga yang menjadi mitra kerja Disperindag seperti BI, Distributor dan Pelaku Usaha;
2. Memberikan stimulus/bantuan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan produknya dan selanjutnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual untuk produk yang dihasilkannya serta melaksanakan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif;
3. Program Penyediaan Subsidi Margin 0% bagi 463 Pengusaha UMKM yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi Pengusaha kecil yang selama ini terkendala oleh tingginya beban margin pembiayaan di lembaga keuangan;
4. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil melalui Pengembangan Bumdes, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan di wilayah perdesaan;
5. Pemberian Beasiswa dan program dukungan bagi keluarga berpenghasilan rendah dengan jumlah penerima Mahasiswa DII sebanyak 30 Orang dan Mahasiswa S1/D4 sebanyak 528 Orang serta Bantuan mengurangi beban orang tua dalam pembiayaan pendidikan;

Tabel 3.15 Bantuan Dalam Pembiayaan Pendidikan Tahun 2025

Kegiatan	Jumlah	Satuan	Kab/Kota
Bantuan Transportasi Darat Siswa SMA	135	Peserta Didik	Bintan, Natuna, Anambas
Bantuan Transportasi Laut Siswa SMA	1927	Peserta Didik	7 Kab/kota
Bantuan Transportasi Laut SMK	457	Peserta Didik	Anambas, karimun, lingga
Bantuan diklat kepelautan/buku pelaut SMK	66	Peserta Didik	Tanjungpinang
Bantuan praktek kerja lapangan peserta didik SMK	722	Peserta Didik	7 Kab/kota
Bantuan makan dan minum peserta didik SMK di natuna	151	Peserta Didik	Natuna
Bantuan Seragam SMA	16.514	Paket	Siswa Baru SMA Negeri se-Kepri
Bantuan Seragam SMK	12.500	Paket	Siswa Baru SMK Negeri se-Kepri
Bantuan Seragam SLB	298	Paket	Siswa Baru SLB Negeri se-Kepri

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

6. Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas mutu benih/bibit ternak sapi melalui teknologi Inseminasi Buatan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pengadaan Bibit sebanyak 500 ekor ayam petelor dan 8 ekor sapi;
7. Pemberian Bantuan Bibit Tanaman dan Holtikultura berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 761 Tahun 2025;

Tabel 3.16 Jenis Bantuan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

NO	JENIS BANTUAN	SATUAN	JUMLAH
1	Bantuan Bibit Benih Padi	Kilogram	1.410
2	Bantuan Pupuk Organik	Kilogram	72.100
3	Bantuan Pupuk Hayati	Sachet	235
4	Bantuan Pupuk NPK	Kilogram	18.850
5	Bantuan Pupuk UREA	Kilogram	66.400
6	Bantuan Pupuk KCL	Kilogram	2.700
7	Bantuan Insektisida Nabati	Botol	312
8	Bantuan Amistartop 94	Botol	98
9	Bantuan Furadan	Kilogram	241
10	Bantuan Benih Saprodi Jagung	Kilogram	140
11	Bantuan Bibit Saprodi Sorgum	Kilogram	15
12	Bantuan Benih Cabai Merah	Sachet	792
13	Bantuan Bibit Salak	Batang	2.746
14	Bantuan Hand Sprayer	Unit	19
15	Bantuan Mesin Potong Rumput	Unit	5
16	Bantuan Fungisida Antracol	Kilogram	25
17	Bantuan Calaris	Botol	10
18	Bantuan Hand Traktor	Unit	4
19	Bantuan Pompa Air	Unit	2
20	Bantuan Benih Kacang Panjang	Sachet	61
21	Bantuan Kendaraan/Motor Roda 3	Unit	1
22	Bantuan Bibit Cabai	Sachet	50.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

8. Penyediaan asuransi ketenagakerjaan Petani berupa Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah daerah dengan BPJS Ketenakerjaan Tanjungpinang Nomor 120.23/KDH.124/NK-03/2024 dan MOU/8/122024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan Kepada Petani di dengan jumlah Petani yang menerima premi asuransi pada Triwulan I dan II sebanyak 9200 tenaga kerja dan Triwulan III dan IV sebanyak 8.662 tenaga kerja;
9. Intervensi sosial ekonomi yang menyentuh langsung rumah tangga masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan konsumsi berupa:
    a) Pemberian Bantuan Sembako bagi 8.150 KK (Kabupaten Karimun 1.100 KK, Kab Lingga 3.700 KK dan Kota Tanjungpinang sebanyak 3.350 KK
    b) Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif Bantuan dengan nilai Rp2.000.000 sampai dengan Rp5.000.000 per orang bagi 390 KK
    c) Pemberian insentif kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
10. Penyediaan jaminan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi 31.304 nelayan kecil, sehingga aktivitas penangkapan ikan di laut dapat dilakukan dengan lebih aman dan terjamin.

E. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja kedepan

Meskipun nilai Rasio Gini sebesar 0,385 masih termasuk dalam kategori ketimpangan rendah hingga mendekati sedang, yang menandakan bahwa distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata dan tantangan kesenjangan masih perlu menjadi perhatian serius. Capaian ini juga menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus

senantiasa diiringi dengan kebijakan yang inklusif, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan penurunan Rasio Gini di tahun 2025 perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui program-program yang lebih terarah, seperti penguatan perlindungan sosial, perluasan akses kesempatan kerja, dan dukungan berkelanjutan terhadap kelompok masyarakat rentan. Dengan demikian, Provinsi Kepulauan Riau dapat terus bergerak menuju pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di masa mendatang.

Upaya-upaya kedepan dalam pencapaian kinerja penurunan rasio gini di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Menyediakan Sarana Usaha Perikanan Tangkap berupa Armada Perikanan Tangkap dan alat tangkap perikanan bagi nelayan berpenghasilan rendah;
2. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan melakukan sosialisasi/promosi mengenai pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman di sekolah sekolah, pengembangan P2L;
3. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan melakukan Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Kawasan komoditas pertanian;
4. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan menyalurkan bantuan kepada masyarat dalam rangka menekan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data masyarakat miskin yang mudah di akses sehingga program-program bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok;
6. Penguatan Ekonomi Inklusif melalui UMKM dan Ekonomi Kreatif dengan melakukan Koordinasi dengan OPD terknis terkait Pengembangan Ekonomi Inklusif melalui Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif.

F. Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

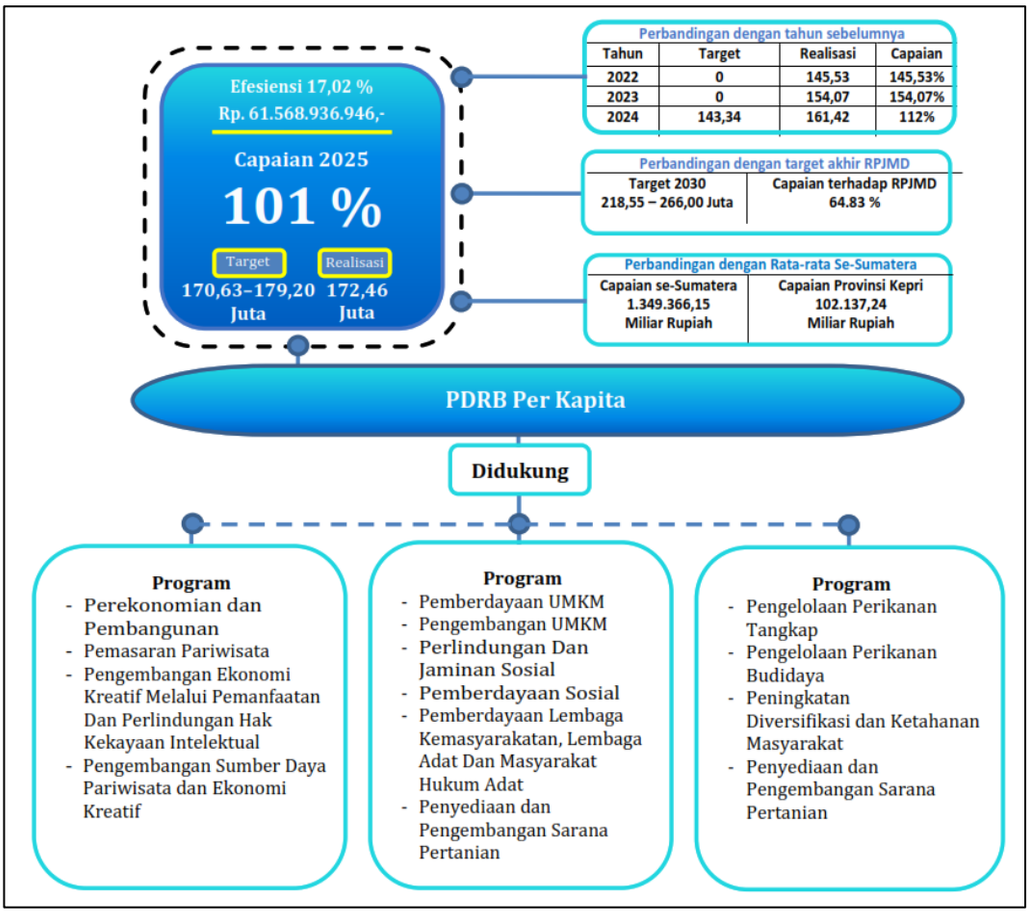
Tabel 3.17 Program dan Realisasi Anggaran yang Mendukung Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Perekonomian dan Pembangunan	351.320.920,00	337.295.059,00	96,01
Program Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	621.524.637,00	468.688.268,00	75,41
Program Pemasaran Pariwisata	7.758.633.839,00	5.647.330.979,00	72,8
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.307.813.811,00	1.253.032.729,00	95,8
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100.063.100,00	99.200.000,00	99,14
Program Pemberdayaan UMKM	17.068.663.172,00	14.573.871.921,00	85,38
Program Pengembangan UMKM	6.300.621.261,00	3.851.740.276,00	61,13
Program Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	2.998.500.000,00	2.998.500.000,00	100
Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat hukum Adat	108.979.800,00	104.658.962,00	96,04
Program Pengelolaan Pendidikan	9.562.466.600,00	9.109.637.585,00	97,77
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	599.507.530,73	544.753.221,00	90,86
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.347.986.248,00	3.798.238.455,00	71
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.267.421.214,00	1.137.026.360,00	90
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	7.032.813.319,00	6.963.267.756,00	99,01
Total	**60.426.315.451,00**	**50.887.241.571,00**	**84,21**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp60.426.315.451,00 terealisasi sebesar Rp50.887.241.571,00 atau 84,21%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran

terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp9.539.073.880,00 (15,79%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Rasio Gini (99%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (84,21%) dengan efesiensi 14,79%.

3.2.3.1.3 PDRB Per Kapita



PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya.

Nilai Pendapatan Per Kapita pada Tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau telah melebihi target yang ditentukan. PDRB Per Kapita pada Tahun 2025 dengan capaian realisasi sebesar 172.46 Juta dari target sebesar 170,63 – 179,20 Juta (menggunakan target terendah) dan capaian kinerja sebesar 101%.

Perlu kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja, dimana indikator kinerja yang digunakan tetap sama namun mengalami penyesuaian pada penamaan serta target pencapaiannya. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta peningkatan akurasi dalam pengukuran kinerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada Indikator ini perjanjian kinerja murni tahun 2025 menjanjikan pencapaian indikator PDRB per Kapita ADHK dan ADHB dengan target 87,76 juta untuk ADHK dan 143,34 juta untuk ADHB, kemudian perjanjian kinerja mengalami perubahan dengan indikator PDRB Per Kapita dengan target 88,01 – 144,17 Juta.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja terbaru sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh.

PDRB per kapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah. Meskipun PDRB per kapita suatu wilayah tinggi, tetapi bila tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk juga masih tinggi maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan mengalami makmur atau sejahtera. Sehingga, untuk memaknai data PDRB per kapita tidak terlepas dari data dasarnya. Oleh karena itu angka PDRB per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan data total PDRB. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB atas dasar harga konstan (*riil*) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.
5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan maksimal. Realisasi indikator PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 172,46 Juta dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 170,63 – 179,20 Juta sehingga capaian kinerja sebesar 101% atau dalam kategori “Sangat Baik”.

Tabel 3.18 Capaian PDRB Per Kapita

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
PDRB Per Kapita	170,63 – 179,20 Juta	172,46 Juta	101%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian Kepulauan Riau tahun 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp381,73 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp224,51 triliun. Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Jika diukur berdasarkan Perkapita, maka PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp172,46 Juta, dan atas dasar harga konstran (ADHK) sebesar Rp101,43 Juta.

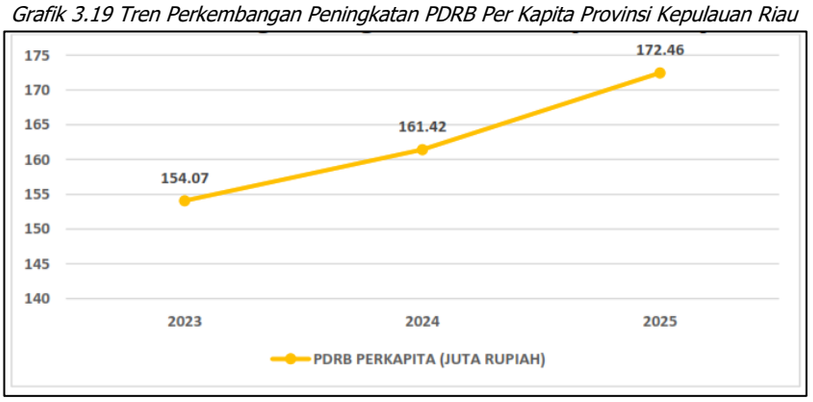
Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 7,89%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 3,71%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Net Ekspor mempunyai andil pertumbuhan sebesar 3,65% dan Komponen PMTB dengan andil sebesar 2,58%.

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2025 dibandingkan dengan triwulan III-2025 (q-to-q) tumbuh sebesar 7,35%. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh kategori Industri Pengolahan dengan andil pertumbuhan terbesar sebesar 4,33%, diikuti kategori Konstruksi dengan andil pertumbuhan sebesar 1,76%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen PK-P memberikan andil pertumbuhan terbesar yaitu 2,52%, diikuti komponen PMTB dengan andil sebesar 1,59%.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian beberapa Tahun Sebelumnya

PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya. Capaian kinerja peningkatan PDRB Per Kapita tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 11 Juta. Dimana pada tahun 2024 PDRB Per Kapita sebesar 161.42 Juta meningkat menjadi 172.46 Juta pada tahun 2025. Dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.19 Tren Perkembangan Peningkatan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau

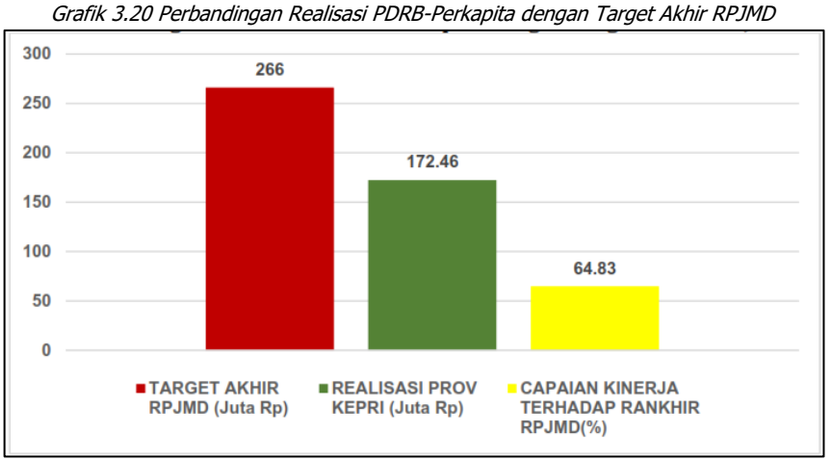


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja PDRB Per Kapita di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 172.46 Juta dengan target sebesar 218.55 - 266.00 Juta (dengan penggunaan target yang tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 64.83%. Hal ini menunjukan bahwa kedepan perlu upaya yang maksimal dalam pencapaian target RPJMD kedepan.

Grafik 3.20 Perbandingan Realisasi PDRB-Perkapita dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Pada Tahun 2025, capaian PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan capaian nasional berada dibawah capaian nasional. Dibandingkan Provinsi se-Sumatera tahun 2025, PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau sebesar 172.46 Juta berada pada posisi ke-lima, jika dibandingkan Provinsi se-Wilayah Sumatera.

Tabel 3.21 Capaian PDRB Per Kapita

	Wilayah	PDRB (miliar rupiah)		Pertumbuhan (%)			Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
		ADHB	ADHK	*q to q*	*y on y*	*c to c*	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	66.351,15	40.198,42	-0,05	-1,61	2,97	4,92
2.	Sumatra Utara	317.402,20	168.392,70	0,13	4,23	4,53	23,52
3.	Sumatra Barat	89.272,71	51.849,62	0,39	1,69	3,37	6,62
4.	Riau	307.557,43	152.957,41	0,12	4,94	4,79	22,79
5.	Jambi	90.808,29	47.980,23	1,30	5,24	4,93	6,73
6.	Sumatra Selatan	183.644,58	100.912,97	-1,53	5,54	5,35	13,61
7.	Bengkulu	29.166,81	14.641,65	3,34	4,79	4,80	2,16
8.	Lampung	131.949,20	74.238,35	-3,05	5,54	5,28	9,78
9.	Kep. Bangka Belitung	31.076,54	16.466,41	4,87	4,54	4,09	2,30
10.	Kepulauan Riau	102.137,24	59.767,12	7,35	7,89	6,94	7,57
	Sumatera	1.349.366,15	727.404,89	0,36	4,54	4,81	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut penyebab keberhasilan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat adalah sebagai berikut:

1. Sektor Industri Pengolahan yang Kuat: Sektor industri pengolahan (*manufacturing*) adalah tulang punggung utama ekonomi Kepri, berkontribusi besar terhadap pertumbuhan. Industri di Batam, terutama industri elektronik dan komoditas, tumbuh pesat.
2. Peningkatan Investasi (PMTB): Realisasi investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), terus mengalir ke Kepri, khususnya di sektor industri dan pariwisata. Investasi ini mendorong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang meningkatkan PDRB dari sisi pengeluaran.
3. Sektor Pertambangan dan Penggalian: Peningkatan aktivitas di sektor ini, termasuk migas dan galian non-migas (granit, pasir, kuarsa), berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan III-2025.
4. Kenaikan Aktivitas UMKM dan Perdagangan: Pemulihan dan peningkatan aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor perdagangan turut menjadi motor penggerak ekonomi.
5. Pertumbuhan Sektor Konstruksi: Pembangunan infrastruktur dan proyek konstruksi yang masif, terutama di kawasan industri Batam, mendukung pertumbuhan PDRB.

Dalam mendukung ketercapaian dan peningkatan PDRB per kapita, Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya, sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta budidaya ikan di laut sebanyak **5.321 unit** yang diberikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, Program tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan tingkat kesejahteraan nelayan yang diukur melalui **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** sebesar **104,29** dan **Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)** sebesar **91,49**

Penyediaan Sarpras Penangkapan Budidaya Ikan Laut



Sumber : DPKP Prov Kepri

2. Memberikan jaminan perlindungan sosial melalui **BPJS Ketenagakerjaan** kepada **31.304 nelayan kecil**

Pemberian Secara Simbolis BPJS Ketenagakerjaan Nelayan



Sumber : DPKP Prov Kepri

Kepri International Art & Culture 2025



Sumber : DPKP Prov Kepri

3. Menyelenggarakan event pariwisata yang berkualitas di kabupaten/kota, dan Melakukan promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik

4. Meluncurkan Program JIWA, merupakan hasil kolaborasi antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Pemprov Kepri, serta pelaku industri pariwisata pameran untuk menikmati diskon khusus antara 10 hingga 30 % di 33 layanan wisata.

Peluncuran Program JIWA



Sumber : Dinas Pariwisata Prov Kepri

5. Peningkatan kapasitas/ pelatihan bagi 50 (lima puluh) tenaga kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

6. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi 60 (enam puluh) pelaku ekonomi kreatif dan Sertifikasi bagi 40 (empat puluh) tenaga kerja bidang pariwisata;

7. Program peningkatan mutu dan standarisasi usaha diantaranya adalah pembuahan NIB, Sertifikasi Halal, izin edar, PIRT yang diberikan gratis kepada pelaku usaha, tercatat 250 sertifikasi halal yang dibiayai melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau dan 20 sertifikat uji mutu produk

8. Selain diberikan pendampingan usaha secara inklusif melalui Lembaga yang di bentuk bernama Inkubator Bisnis Merah Putih dengan pendampingan intensif, pelatihan, boothcamp, dan juga business matcing baik dengan buyer dalam negeri juga luar negeri dengan program Kepri – ASEAN Business Forum yang memiliki potensi transaksi senilai Rp. 4.013.010.000

9. Permodalan bagi UMKM melalui program subsidi margin 0% dengan bantuan permodalan bagi para pengusaha UMKM hingga Rp. 40.000.000,-, yang bekerjasama dengan Bank Riau Kepri, tercatat 328 nasabah baru penerima manfaat bantuan modal subsidi margin dengan nilai plafon Rp. 11.347.000.000,- bahwa keunggulan dari program ini adalah para nasabah pengusaha UMKM penerima manfaat tidak perlu membayar bunga atau hanya membayar pokok pinjaman saja hingga 2 tahun. Selain itu juga difasilitasi melalui lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan permodalan seperti perbankan dan LPDB.

10. Pendampingan usaha bagi pengusaha mikro dan kecil juga pelatihan berjenjang yang diberikan khusus pada 2 lokasi prioritas yaitu Batam dan Bintan sebagai pendorong usaha sebagai rantai pasok industri serta Peningkatkan dan market dan kemitraan dengan baik secara konvensional maupun online sebagai bentuk promosi.

11. Intervensi pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha miktro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk telibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan di wilayah pedesaan melalui Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Tabel 3.22 Data Pendirian dan Pemeringkatan BUMDes Tahun 2025

No	Kabupaten	Jml Desa	Jml Pendirian BUMDes	%	Tidak ada Bumdes	PEMERINGKATAN				TOTAL	%
						Perintis	Pemula	Berkembang	Maju		
1	BINTAN	36	36	100%	0	10	2	13	5	30	83%
2	KARIMUN	42	42	100%	0	9	21	11	1	42	100%
3	NATUNA	70	70	100%	0	43	21	6	0	70	100%
4	LINGGA	75	75	100%	0	64	6	5	0	75	100%
5	KEP. ANAMBAS	52	51	98,08%	1	41	8	1	0	50	98%
	TOTAL	**275**	**274**	**99.64%**	**1**	**167**	**58**	**36**	**6**	**267**	**97%**

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau

12. Peningkatan penyaluran bantuan Pasang Baru listrik (BPBL) kepada rumah masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 di kota batam sebanyak 222 unit. Bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat, sehingga dapat mengurangi risiko kemiskinan

13. Intervensi sosial ekonomi yang menyentuh langsung rumah tangga masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan konsumsi berupa :
    - Pemberian Bantuan Sembako bagi 8.150 KK (Kabupaten Karimun 1.100 KK, Kab. Lingga 3.700 KK dan Kota Tanjungpinang sebanyak 3.350 KK;
    - Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif Bantuan dengan nilai Rp2.000.000 sampai dengan Rp5.000.000 per orang bagi 390 KK;
    - Pemberian insentif kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ;
    - Bantuan Hibah kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan PDRB Per Kapita, sebagai antara lain:

1. Bantuan sarana prasarana penangkapan ikan dan budidaya ikan di laut belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh nelayan kecil/pembudidaya kecil yang membutuhkan sarana untuk peningkatan usaha perikanan bagi pelaku usaha perikanan, serta masih banyak Nelayan/pembudidaya kecil yang belum sepenuhnya mampu untuk mengelola keuangan sehingga masih sulit untuk mengembangkan usahanya;
2. Masih minimnya akses ke Kabupaten Natuna, Anambas, dan Lingga sebagai salah satu penyebab timpangnya perjalanan wisatawan;
3. Mahalnya tiket transportasi juga menjadi hambatan optimalnya kunjungan wisatawan;
4. Masih minimnya fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif dan masih minimnya sertifikasi dan peningkatan kapasitas bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Sebagian besar UMKM masih berada pada skala mikro–kecil sehingga produktivitas Rendah yang menyebabkan kontribusi UKM terhadap PDRB relatif kecil;
6. Masih banyak UMKM bergerak pada sektor perdagangan eceran, kuliner skala kecil dan penyediaan jasa sederhana dan belum masuk ke sektor pengolahan, industri kreatif bernilai tinggi, atau ekspor, padahal sektor-sektor tersebut berpotensi meningkatkan PDRB secara signifikan;
7. Rendahnya kualitas SDM dan Manajemen Usaha Pelaku UMKM sehingga membatasi pertumbuhan usaha dan menahan peningkatan nilai tambah;
8. Keterbatasan keberlanjutan usaha ekonomi produktif dan tantangan akurasi data sosial ekonomi;
9. Kondisi BUMDes sebagian besar masih lemah secara administrasi, pembukuan dan laporan keuangan, sebagian besar usaha dijalankan tanpa analisa kelayakan usaha, tidak mempunyai program kerja, modal BUMDes masih didominasi dari penyertaan modal desa.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan PDRB Per Kapita dan mengurangi permasalahan dan kedala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya sebagai berikut:

1. Bantuan sarana dan prasarana perikanan tetap dilanjutkan dan disalurkan secara lebih tepat sasaran untuk membantu nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil dalam menekan biaya atau ongkos produksi. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya akan terus didorong melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta pemberian bantuan, guna meningkatkan minat, daya tarik, dan potensi pengembangan subsektor perikanan budidaya;
2. Untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan mengoptimalkan Promosi pariwisata di berbagai chanel media dan memperbanyak atraksi wisata untuk memberikan kenyamanan wisatawan sehingga memperpanjang lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau yang pada akhirnya dapat menambah pengeluaran wisatawan khususnya terkait akomodasi dan makan minum;
3. Memperbanyak fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif dan meningkatkan kapasitas/ keahlian tenaga kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Fasilitasi dan pendampingan penerbitan legalitas usaha, kualitas dan sertifikasi produk UMKM agar mampu berdaya saing serta pendampingan usaha kepada pelaku UMKM dan Fasilitasi akses pembiayaan untuk UMKM dengan penyediaan Subsidi Margin bagi Pelaku UMKM;

5. Upaya penguatan pemutakhiran dan integrasi Data Sosial Ekonomi dan peningkatan kualitas program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui pendampingan usaha dan peningkatan keterampilan, serta penguatan sinergi lintas sektor agar program sosial semakin terintegrasi dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah;
6. Pengembangan kapasitas Pengurus Bumdes dan pembentukan BUMDes bagi wilayah yang belum terbentuk.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

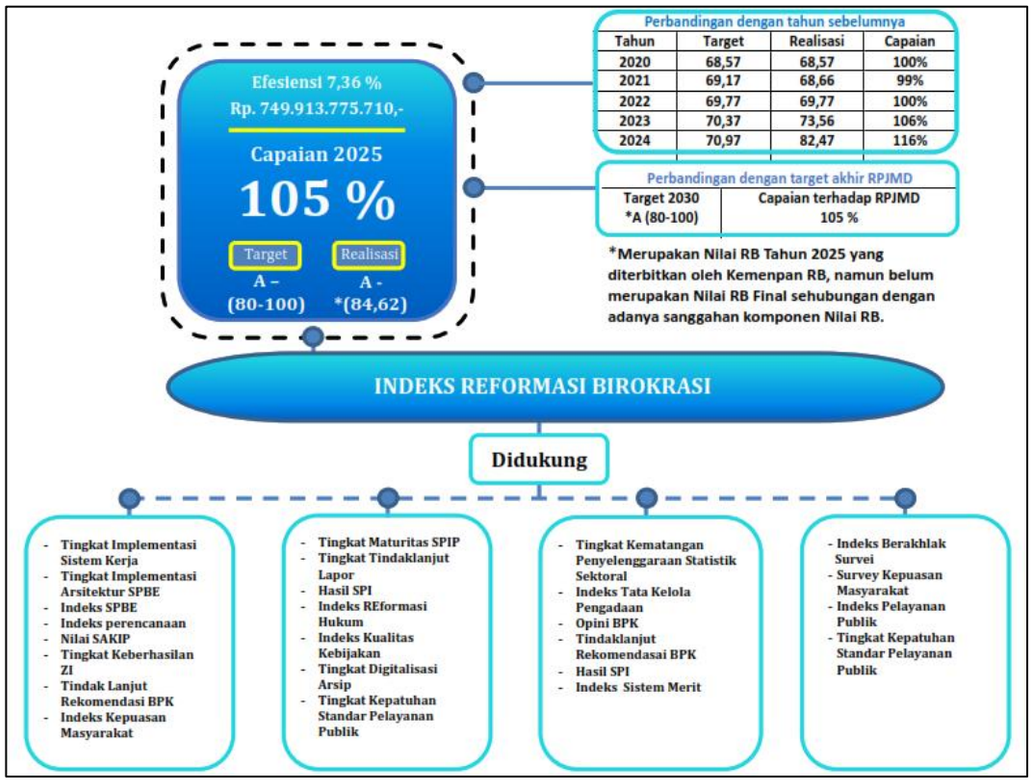
Tabel 3.23 Program dan Realisasi Anggaran yang Mendukung PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Perekonomian dan Pembangunan	351.320.920,00	337.295.059,00	96,01
Program Pemasaran Pariwisata	7.758.633.839,00	5.647.330.979,00	73
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.307.813.811,00	1.253.032.729,00	96
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	359.750.700,00	327.445.933,00	77
Program Pemberdayaan UMKM	17.068.663.172,00	14.573.871.921,00	85
Program Pengembangan UMKM	6.300.621.261,00	3.851.740.276,00	61
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.757.605.625,00	3.530.534.795,00	94
Program Pemberdayaan Sosial	600.895.841,00	596.713.086,00	99
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	108.979.800,00	104.658.962,00	96
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	13.496.177.809,00	12.947.287.223,00	96
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.887.067.836,00	2.746.081.044,00	95
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	955.998.870,00	853.590.983,00	89
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.347.986.248,00	3.798.238.455,00	71
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.267.421.214,00	1.137.026.360,00	90
Total	**61.568.936.946,00**	**51.704.847.805,00**	**83,98**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp61.568.936.946,00 terealisasi sebesar Rp51.704.847.805,00 atau 83,98%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp9.864.089.141,00 (16,02%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja PDRB Per Kapita (101%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (83,98%) dengan efesiensi 17,02%.

3.2.3.2 Sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital

3.2.3.2.1 Indeks Reformasi Birokrasi



Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat proses pembangunan nasional sampai ke daerah. Tata kelola pemerintahan berimplikasi erat pada bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 meningkat dengan capaian kinerja sebesar A- (84,62 Indeks) dari target sebesar A- (80-100 Indeks) dan terealisasi sebesar 105% (menggunakan target terendah).

Perlu kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja, di mana indikator kinerja yang digunakan tetap sama namun mengalami penyesuaian pada sasaran kinerja yang sasaran semula Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat dan Antisipatif menjadi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Berbasis Digital. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta peningkatan akurasi dalam pengukuran kinerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada Indikator ini perjanjian kinerja murni tahun 2025 menjanjikan pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 71,51 Indeks, kemudian perjanjian kinerja mengalami perubahan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan target menjadi A -.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja terbaru sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat proses pembangunan nasional sampai ke daerah. Tata kelola pemerintahan berimplikasi erat pada bentuk pelayanan langsung kepada

masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan, maka semakin baik pula pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan dapat terwujud.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital dilihat dari indikator indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar A- (84,62 Indeks) dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar A- (80- 100 Indeks) sehingga capaian kinerja sebesar 105% (menggunakan target terendah) atau dalam kategori "Sangat Baik."

Tabel 3.24 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	A- (80-100 Indeks)	A- (84,62 Indeks)	105%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berikut informasi Pencapaian Indeks Reformasi didukung dari pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi General:

Tabel 3.25 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

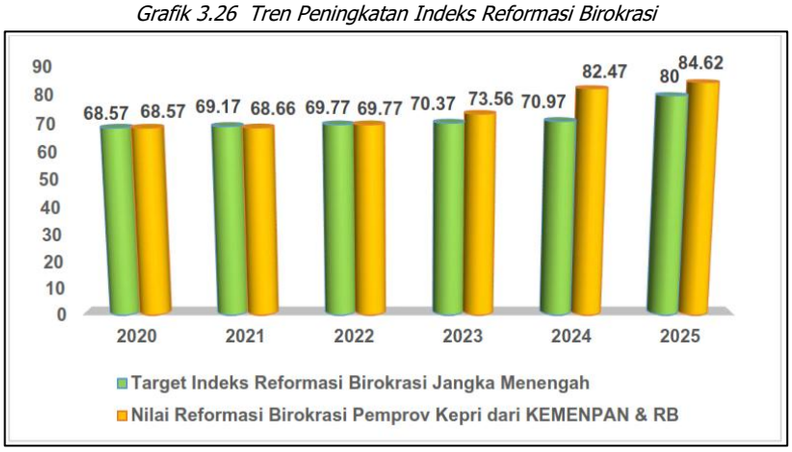
Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	5	4
Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	0
	Indeks SPBE	3,07	3,27
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan	91,30	92,28
	Nilai SAKIP	78,37	78,35
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,75	1,5
	Tingkat Maturitas SPIP	3,45	2,77
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4,00	4,00
	Hasil Survei Penilaian Integritas	74,23	74,61
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	97,00	97,10
	Indeks Kualitas Kebijakan	50,20	74,33
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Tingkat Digitalisasi Arsip	90,60	88,94
	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,8	2,61
Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Indeks Tata Kelola Pengadaan	91,40	92,70
	Opini BPK	WTP	WTP
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	89,25%	89,27%
Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	332	330,50
Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien			
Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja			
Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan fisien			
Terwujudnya percepatan tranformasi digital manajemen ASN			
Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN			
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit Dan Sistem Manajemen ASN	Indeks BerAkhlak	74,00	73,54

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Terwujudnya pelayanan publik secara prima	Survey Kepuasan Masyarakat(SKM)	87,00	87,37
	Indeks Pelayanan Publik	4,30	4,48
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	91,45	90,45

Sumber : Kementerian PAN dan RB

B. Perbandingan Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 3.26 Tren Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

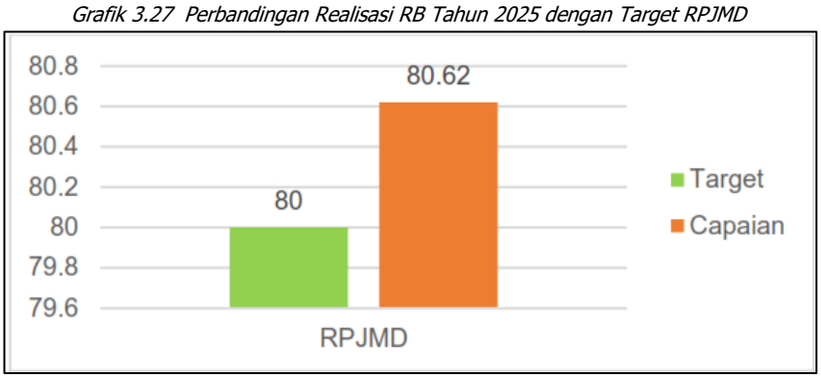
Dapat dilihat pada grafik diatas, Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai tahun 2023.

Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,15 Indeks Dimana pada tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,47 indeks meningkat menjadi 84,62 (A-) indeks pada tahun 2025.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar A- (84,62 Indeks)dengan target sebesar A- (80-100 Indeks) sehingga capaian kinerja sebesar 105% (menggunakan target terendah).

Grafik 3.27 Perbandingan Realisasi RB Tahun 2025 dengan Target RPJMD



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

D. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian indeks RB Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau didukung Tim Pelaksana Reformasi Biorkrasi yang bertugas menyusun rencana aksi dan mengkoordinir ketercapaian sasaran Reformasi Birokrasi general dan Tematik yang terbagi pada beberapa perangkat daerah penanggungjawab Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025 sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2025

mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan "*RB General*", serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan "RB Tematik". Adapun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 terdiri dari beberapa Tema:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Mendorong Hilirisasi;
4. Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan;
5. Mendukung Ketahanan Nasional;
6. Mendorong Peningkatan Akses;
7. Kualitas dan Mutu Pendidikan.

Upaya dalam mendukung ketercapaian sasaran RB General sebagai berikut:

1. Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru Dengan Model Fleksibel Bagi Pegawai ASN Dengan Baik

   Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai: Dalam rangka terimplementasinya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya dengan Bimbingan Teknis serta menyusun Peta proses bisnis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional

   Indeks SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak lainnya. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Tujuannya bukan sekadar "komputerisasi" kantor, melainkan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Grafik 3.28 Perkembangan Capaian Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di tahun 2025, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

a. Meningkatkan Keamanan siber: Melindungi data sensitif pemerintah dari ancaman siber luar;
b. Efisiensi: Mengurangi biaya langganan internet di tiap Perangkat Daerah dengan menggunakan akses komunikasi terpusat;
c. Interoperabilitas: Memudahkan aplikasi satu dinas terintegrasi dengan aplikasi dinas lainnya;

d. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE): Mempercepat birokrasi sekaligus menjamin keaslian dokumen digital melalui kerja sama dengan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BsrE);
e. Audit Keamanan Berkala: Melakukan penetration *testing* pada aplikasi-aplikasi vital untuk mencegah kebocoran data yaitu aplikasi *website* JDIH biro hukum dan juga *website* portal Kepriprov;
f. Rekrutmen Tenaga Ahli: Rekrutmen *Programmer* dilakukan dalam rangka mendukung pemerintahan berbasis elektronik.

3. Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas

Indeks Perencanaan Pembangunan: Secara umum, kualitas kinerja pencapaian, dokumen perencanaan sudah baik tetapi masih perlu terus ditingkatkan, adapun hal- hal yang mendukung capaian tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pengendalian dan Evaluasi Capaian Hasil Perencanaan Pembangunan
b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

Dalam memastikan kualitas dan keselarasan dokumen Perencanaan telah dilaksanakan antara lain:

a. Pendampingan/asistensi yang intensif kepada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan indikator kinerja dan *Cascading* kinerja;
b. Koordinasi dan Komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Pusat dalam upaya keselarasan dan keterpaduan perencanaan dengan Pusat khususnya dukungan/kontribusi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Asta Cita serta penyelarasan target indikator Makro;
c. Melibatkan secara aktif berbagai pihak/*stakeholder* dalam proses perencanaan untuk memperkaya masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Diantaranya melalui pelaksanaan konsultasi publik dan Musrenbang.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Upaya dalam mendukung ketercapaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau:

a. Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
    1) Meningkatkan kualitas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, memverifikasi rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang salah satunya mengarahkan sasaran strategis dan IKU Perangkat Daerah agar berorientasi hasil dan tepat menjadi kinerja utama kepala Perangkat Daerah;
    2) Memperkuat kesinambungan kinerja antar *Level* Jabatan melalui Perjanjian Kinerja;
    3) Memperkuat Rencana Aksi Perangkat Daerah;
    4) Memperkuat Upaya Pengukuran Rencana Aksi Perangkat Daerah dan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) Rencana Aksi Tahun 2025 sesuai format pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024.
b. Komponen Pelaporan Kinerja
    1) Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja Instansi yang menunjukan kinerja Pemerintah, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
    2) Melakukan Pembinaan dan pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah. hasil evaluasi komponen Pelaporan kinerja Perangkat Daerah sesuai evaluasi SAKIP internal oleh Inspektorat Daerah sebagai berikut: 33 Perangkat Daerah Nilai diatas 8 dan 1 Perangkat Daerah Nilai dibawah. Sehingga dapat simpulkan persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja sesuai ketentuan mencapai 97%.
c. Komponen Evaluasi Internal Penerapan SAKIP

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, upaya yang dilaksanakan Inspektorat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada aspek Evaluasi Internal adalah:

Tabel 3.29 Hasil Nilai SAKIP dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP	KATEGORI	NILAI PKO	PREDIKAT KINERJA
1	Dinas Ketahan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	86,54	A	100%	BAIK
2	Sekretariat Daerah	83,28	A	106,26	ISTIMEWA
3	Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	82,99	A	102,93	ISTIMEWA
4	Dinas Kesehatan	82,91	A	82,91	BAIK
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	81,76	A	100,08	ISTIMEWA
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81,6	A	104,2	ISTIMEWA
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	81,49	A	90,33	BAIK
8	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	80,95	A	101,19	ISTIMEWA
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	79,74	BB	87,77	BAIK
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	79,71	BB	92,74	BAIK
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	79,71	BB	89,92	BAIK
12	Sekretariat DPRD Provinsi Kep. Riau	79,37	BB	87,31	BAIK
13	Dinas Sosial	78,88	BB	90	BAIK
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	78,66	BB	91,9	BAIK
15	Badan Pendapatan Daerah	77,58	BB	92,05	BAIK
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	77,44	BB	86,64	BAIK
17	Dinas Kebudayaan	77,34	BB	89,59	BAIK
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	77,28	BB	86,11	BAIK
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	77,21	BB	93,95	BAIK
20	Dinas Pariwisata	76,58	BB	99	BAIK
21	Dinas Pendidikan	76,48	BB	97,17	BAIK
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75,81	BB	94,37	BAIK
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	75,47	BB	69,44	BUTUH PERBAIKAN
24	Dinas Energi dan Sumber Daya manusia	74,59	BB	91,11	BAIK
25	Badan pengembangan Sumber Daya Manusia	73,92	BB	90	BAIK

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

2) Pemantauan Tindak Lanjut dalam rangka memastikan saran-saran perbaikan yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi telah ditindaklanjuti dan berdampak pada perbaikan kinerja. Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui rata-rata persentase saran yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah adalah sebesar 70% dari 190 rekomendasi, 11% rekomendasi belum tuntas dan sebanyak 19% belum ditindaklanjuti.

4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas: Sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 308 Tahun 2025 sebanyak 5 Perangkat Daerah/Unit Kerja Penunjukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, terdapat 4 (empat) Unit Pelayanan Publik yang diajukan untuk mendapat Predikat WBK/WBBM yaitu, Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI. Dari Unit Pelayanan Publik yang diajukan tersebut, terdapat 2 (Unit Pelayanan Publik) yang dapat maju sampai ke tahap survey lapangan yang merupakan tahapan akhir dari proses penilaian WBK dan WBBM. Faktor -faktor keberhasilan capaian indikator, sebagai berikut:

a. Evaluasi telah dilaksanakan atas capaian tahun sebelumnya, dan menjadi dasar perbaikan pembangunan Zona Integritas pada tahun 2025;
b. Meningkatnya koordinasi antar Perangkat Daerah Pengampu seperti Biro Organisasi dan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan penilaian;
c. Unit Pelayanan Publik memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas Pembangunan Zona Integritas dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Tingkat Maturitas SPIP: Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas penilaian level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam LHE Nomor : PE.09.03/SP-11207/PW28/3/2025 bahwa level maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada pada level 2 (Berkembang). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya mampu mendefinisikan kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 0,25 poin (capaian 2024 sebesar 3.100).

Terdapat 3 (tiga) komponen penilaian yaitu : Penetapan Tujuan terdiri dari 2 (dua) unsur, Struktur dan Proses terdiri dari 5 (lima) unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur dan Komponen pencapaian tujuan SPIP yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 5 (lima) sub unsur. Berdasarkan LHe tersebut, terdapat kelemahan pada penilaian sub unsur komponen Struktur dan Proses yang hanya mencapai 2,651 serta pada sub unsur komponen Pencapaian tujuan SPIP.

Berikut disampaikan beberapa kelemahan dalam Pencapaian Maturitas SPIP Provinsi Kepulauan Riau:

a. Lemahnya koordinasi antara Perangkat Daerah yang mengampu SPIP;
b. Kurangnya pemahaman secara menyeluruh tentang SPIP pada Perangkat Daerah;
c. Kualitas dokumen perencanaan belum optimal, masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria *SMART*;
d. Implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih belum optimal;
e. Kompetensi tim penilaian mandiri SPIP belum memadai.

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan: Upaya Pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau amanat dari Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1), (2) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Berikut rekapitulasi pengaduan berdasarkan klasifikasi laporan terhadap 89 aduan yang terdisposisi:

Tabel 3.30 Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi

No	Klasifikasi Laporan berdasarkan aduan terdisposisi	Jumlah (aduan)	%
1	Aspirasi	10	12%
2	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	66	74%
3	Pengaduan Berkadar Pengawasan	13	14%

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.31 Tindaklanjut Aduan Masyarakat Aplikasi SP4N-LAPOR! Per November 2025

No	Pengelolaan Aduan Masuk	Jumlah	%
1	Belum terverifikasi	0	0%
2	Terdisposisi belum ditindaklanjuti	0	0%
3	Terdisposisi sedang diproses	13	14%
4	Terdiposisi sudah selesai	81	86%
Jumlah		**94**	

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dari seluruh aduan yang masuk dan terverifikasi pada periode tahun 2025, rata-rata laju verifikasi aduan oleh admin instansi adalah 1.4 hari. Dari seluruh aduan, 90.5% aduan diverifikasi kurang dari 3 hari dan 9.5% aduan diverifikasi lebih dari 3 hari. Sementara rata-rata laju tindak lanjut oleh admin penghubung yaitu 3.2 hari. Total 83.3% aduan ditindaklanjuti kurang dari 5 hari dan 16.7% aduan ditindaklanjuti lebih dari 5 hari.

Hasil Survei Penilaian Integritas: Survey Penilaian Integritas merupakan sebuah survey nasional dari KPK untuk mengukur tingkat integritas dan potensi korupsi di instansi publik melalui persepsi dan pengalaman pengguna layanan, pegawai, serta ahli, guna mendorong perbaikan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74,61 dan berada di atas rata-rata nasional. Jika dibandingkan dengan skor tahun 2024 (kategori Rentan), terjadi kenaikan skor sebesar 2,95 poin (Kategori "Waspada").

Tabel 3.32 Hasil Survey Penilaian Integritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Komponen	Skor
1	Internal	73,66
2	Eksternal	88,3
3	Ekspert	64,2
4	Faktor Koreksi (Pengurang Nilai)	
4.1	Pelaksanaan SPI	0,38
4.2	Fakta Koreksi	0

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Jika dilihat pada tabel tersebut, skor terendah terdapat pada komponen Eksper yaitu 64,2 dan skor tertinggi terdapat pada komponen eksternal yaitu sebesar 88,3. Pada komponen Eksper terdapat 2 bidang penilaian yaitu Kelompok Pemantau Mewakili Publik dengan capaian skor sebesar 59,33 dan Bidang Kelompok Pengamat Melekat dengan capaian skor sebesar 73,14. Hal ini menunjukkan bahwa program pencegahan korupsi pada pemerintah provinsi Kepulauan Riau masih belum terinformasikan dan berdampak pada kalangan eksper.

Faktor keberhasilan atas peningkatan capaian indikator Survei Penilaian Integritas adalah:

a. Penguatan fungsi pendampingan atas survei integritas yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada Perangkat Daerah;
b. Komiten Kepala Perangkat Daerah melakukan perbaikan sesuai hasil Rencana Aksi Peningkatan SPI;
c. Perbaikan Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Unit-unit Pelayanan Publik sehingga meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

5. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi

Indeks Kualitas Kebijakan: Indeks Kualitas Kebijakan mengukur mutu kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan bukti nyata, fokus pada dampak pembangunan strategis, melalui penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap proses perencanaan, implementasi, evaluasi, keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik. Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran, menyelesaikan masalah publik, serta meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Tabel 3.33 Perkembangan capaian Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan	Hasil Penilaian		
	2023	2024	2025
	0	10 (kurang)	74,33 (Baik)

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau

Peningkatan pencapaian ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

a. Pembentukan tim Pengukuran Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi KEPRI;
b. Penglibatan aktif Fungsional Analis Kebijakan;
c. Rapat Koordinasi Pemenuhan Instrumen IKK.

Indeks Reformasi Hukum: Keberhasilan pengukuran Indeks Reformasi Hukum menunjukan peningkatan yang sangat Baik, hal ini menunjukan penguatan komitmen terhadap tata kelola harmonisasi kebijakan, penguatan tata kelola regulasi dan memperkuat koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan serta OPD Pemrakarsa selaku pemangku kepentingan Pencapaian keberhasilan pengukuran Indeks Reformasi Hukum menunjukan peningkatan.

Tabel 3.34 Perkembangan capaian Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum	Hasil Penilaian		
	2023	2024	2025
	-	96,42	97,10

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi: Penguatan koordinasi dengan Kemenkumham untuk harmonisasi.
b. Re-regulasi dan Deregulasi: Peninjauan, penyederhanaan, dan penghapusan peraturan yang tidak perlu.
c. Peningkatan Kompetensi Perancang Peraturan: Peningkatan SDM di bidang perancangan perundang-undangan (*legal drafter*).
d. Penataan *Database* Peraturan: Pemutakhiran dan pengelolaan data peraturan yang terstruktur.

6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral

Tingkat Digitalisasi Arsip: Dilihat perkembangan hasil penilaian tingkat digitalisasi arsip mengalami penurunan pada tahun 2025, namun dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan upaya pengolahan arsip statis, mengalih mediakan arsip statis yang ada diruang penyimpanan depot arsip statis serta melakukan penginputan arsip alih media ke Aplikasi JIKN. Berikut informasi perkembangan capaian Digitalisasi arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.35 Perkembangan Capaian Tingkat Digitalisasi Arsip

Digitalisasi Arsip	Hasil Penilaian		
	2023	2024	2025
	90,4	90,5	89

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

Kendala yang dihadapi dihadapi dalam meningkatkan digitalisasi arsip Pada tahun 2023 aplikasi SIKN JIKN down, sehingga simpul tidak dapat melakukan input. Data yang masih tersimpan di versi lama (ATOM) belum dapat dimigrasikan, belum dilakukan sosialisasi kebijakan tentang penerapan srikandi, Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral: Selanjutnya dalam meningkatkan pembangunan statistik sektoral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau selaku Pembina Data melaksanakan Identifikasi Kegiatan Statistik pada Produsen Data.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 57 kegiatan statistik sektoral dengan total 111 indikator statistik yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah serta memberikan pendampingan teknis kepada Perangkat Daerah selaku Produsen Data dalam penyusunan metadata kegiatan statistik sektoral sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Metadata Statistik.

Adapun ringkasan hasil penyusunan metadata statistik yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Metadata statistik yang telah diinput : 44 metadata
b. Metadata statistik dengan status draft : 2 metadata
c. Metadata statistik dengan status submit : 1 metadata
d. Metadata statistik yang telah disetujui Pembina Data : 33 metadata
e. Metadata statistik yang memerlukan perbaikan : 4 metadata
f. Metadata statistik yang masih dalam proses pemeriksaan : 4 metadata.

Tabel 3.36 Capaian Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Hasil Penilaian		
	2023	2024	2025
	1,9	2,61	Tidak Dilaksanakan Penilaian

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

7. Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Indeks Tata Kelola Pengadaan: Dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penguatan regulasi dan kepatuhan, Menyusun dan menerapkan kebijakan pengadaan dan Memastikan seluruh proses pengadaan mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan;
b. Peningkatan kapasitas SDM, Pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku pengadaan dan Pembinaan berkelanjutan terkait etika, integritas, dan kompetensi teknis pengadaan;
c. Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, data dan dokumen pengadaan secara tertib dan tepat waktu;
d. Perencanaan pengadaan yang baik, Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang akurat, realistis, dan tepat waktu;
e. Penguatan pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi rutin atas proses dan hasil pengadaan;
f. Peningkatan transparansi dan akses info, publikasi informasi pengadaan secara terbuka dan mudah diakses dan Penyediaan kanal pengaduan yang efektif dan responsif;
g. Penerapan manajemen risiko pengadaan, Identifikasi dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak.

Tabel 3.37 Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Tata Kelola Pengadaan	Hasil Penilaian		
	2023	2024	2025
	90,11	91,35	92,70

Sumber : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan, diantaranya adalah :

a. Kualitas dan Kuantitas SDM Pengadaan, kurangnya SDM bersertifikat dan berpengalaman;
b. Perencanaan Pengadaan yang Lemah, RUP tidak disusun tepat waktu atau tidak akurat dan Spesifikasi teknis tidak berbasis kebutuhan nyata;
c. Kepatuhan terhadap Regulasi, Kurangnya pemahaman terhadap aturan terbaru pengadaan dan Proses pengadaan belum sepenuhnya sesuai SOP;

d. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Elektronik, *E-Procurement* belum dimanfaatkan secara optimal dan Integrasi sistem pengadaan dengan sistem lain masih lemah;
e. Pengendalian dan Pengawasan, tindak lanjut hasil audit/temuan masih rendah dan pengendalian risiko pengadaan belum berjalan efektif;
f. Transparansi dan Akuntabilitas, informasi pengadaan belum sepenuhnya terbuka dan potensi konflik kepentingan masih ada;
g. Budaya Organisasi, Resistensi terhadap perubahan dan digitalisasi dan pengadaan masih dipandang sebagai proses administratif.

Opini BPK: Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan sebanyak 15 kali berturut-turut menunjukan konsistensi tata kelola keuangan daerah yang patuh regulasi, didukung oleh komitmen pimpinan dan penguatan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan , dengan upaya dan inovasi yang dilakukan sebagai berikut:

a. Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah secara konsisten menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual;
b. Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan BKAD melakukan pembinaan dan pendampingan secara intensif kepada seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan;
c. 3Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKAD berperan aktif dalam mendorong penerapan SPIP secara konsisten, baik melalui penyusunan kebijakan, penguatan prosedur kerja, maupun koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk meminimalkan risiko kesalahan dan ketidakpatuhan;
d. Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah Upaya penertiban, inventarisasi, dan penilaian aset daerah dilakukan secara berkelanjutan;
e. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah secara terintegrasi dan berbasis elektronik untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, serta ketepatan waktu penyajian laporan keuangan melalui implementasi SIPD;
f. Mendorong peningkatan kompetensi ASN pengelola keuangan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan jabatan fungsional yang relevan.

8. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional, Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien, Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja, Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan efisien, Terwujudnya percepatan tranformasi digital manajemen ASN dan Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN

   Indeks Sistem Merit: Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator Indeks Sistem Merit Provinsi Kepulauan Riau yakni dengan peningkatan penataan manajemen ASN, sebagai berikut:

   a. Komitmen terhadap penerapan Manajemen Talenta dalam penyelenggaraan manajemen ASN, dengan membangun manajemen talenta berbasis digital yakni "Talenta Kepri" yang terintegrasi dengan aplikasi layanan kepegawaian, Melaksanakan talent pool dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, membangun Infrastruktur Manajemen Talenta;
   b. Mengintegrasikan aplikasi SILAT dengan MYASN dalam rangka pelayanan kepegawaian secara elektronik dapat dilakukan dengan cepat dan efisien serta Pengembangan aplikasi Sistem Manajemen Kinerja ASN berbasis aplikasi (SIMANJA) dalam rangka pemantauan kinerja ASN;
   c. Pelaksanaan Pengangkatan ASN dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai, dengan rincian CPNS sebanyak 78 Orang, PPPK sebanyak 4.231 Orang dan PPPk Paruh Waktu Sebanyak 1.449 Orang;

d. Pengembangan kompetensi ASN, berupa Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Sosiokultural diikuti sebanyak 5.443 orang, Sertifikasi Kompetensi Dan Kelembagaan diikuti sebanyak 1.669 Orang dan Pengembangan Kompetensi Teknis dikuti sebanyak 5.999 Orang;
e. Penguatan kelembagaan dan program pelatihan melalui akreditasi kelembagaan dan program pelatihan, dengan perolehan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi dengan kategori Bintang 1 (satu). Program pelatihan terakreditasi mencakup akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan kategori "C", Program Pelatihan Dasar CPNS dengan kategori "B" dan Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dengan kategori "C";
f. Penyediaan dokumen AKPK (HCDP dan IDP), pengembangan kompetensi ASN diarahkan sesuai kebutuhan nyata organisasi dan tantangan pembangunan daerah;
g. Penyediaan sistem pembelajaran terintegrasi melalui Aplikasi Ruang Belajar Aparatur Kepri (LIGAT Kepri) dan Perluasan pengembangan kompetensi melalui *Coorporate University (CorPu)* seperti *Community Of Practice (COP);*
h. Penguatan jejaring organisasi dan kelembagaan dengan melakukan kerja sama dengan instansi diluar Pemerintah Provinsi Kepri dan Perguruan Tinggi, Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengembangan kompetensi sumber daya manusia dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengembangan kompetensi melalui jalur Magang dengan tagline "Melur Berseri" (Magang Pegawai Negeri Sipil Unggul Kepri Bersinergi Menuju Satu Data Terintegrasi) dengan BPS Provinsi Kepulauan Riau.

9. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN
Indeks BerAkhlak: Upaya dalam peningkatan kepatuhan terhadap Merit Sistem dan Sistem Manajemen ASN diantaranya:
a. Menginternalisasikan *Core Value* ASN "BerAKHLAK" dalam bentuk Webinar Berakhlak. Internalisasi budaya *Core Value* ASN "BerAKHLAK" melalui webinar merupakan salah satu upaya strategis untuk menanamkan nilai-nilai dasar ASN secara efektif dan merata kepada seluruh aparatur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap makna serta implementasi nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari;
b. Peningkatan peran Agen Perubahan sebagai pelopor perubahan pada Perangkat Daerah melalui penetapan Agen Perubahaan dan penyiapan rencana tindak Agen Perubahan;
c. Untuk mengukur keberhasilan implementasi *Core Values* ASN dan *Employer Branding* "Bangga Melayani Bangsa" Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Survei Budaya Kerja BerAKHLAK dan Evaluasi Implementasi BerAKHLAK secara mandiri. Survei Budaya Kerja BerAKHLAK bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan budaya organisasi diantaranya implementasi *Core Values* BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, sedangkan Evaluasi Implementasi BerAKHLAK bertujuan untuk mengevaluasi komitmen Perangkat Daerah dalam internalisasi BerAKHLAK.

10. Terwujudnya Pelayanan Publik secara Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat: Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung ketercapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu tolok ukur kualitas pelayanan publik. Menyelenggarakan Asistensi Peningkatan Pelayanan Publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Semua Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau aktif melaksanakan Survei dan menyampaikan laporan dengan nilai rata- rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 86,92 dengan Mutu Pelayanan "B" dan Kinerja Unit Pelayanan "Baik", sebagaimana tabel terlampir:

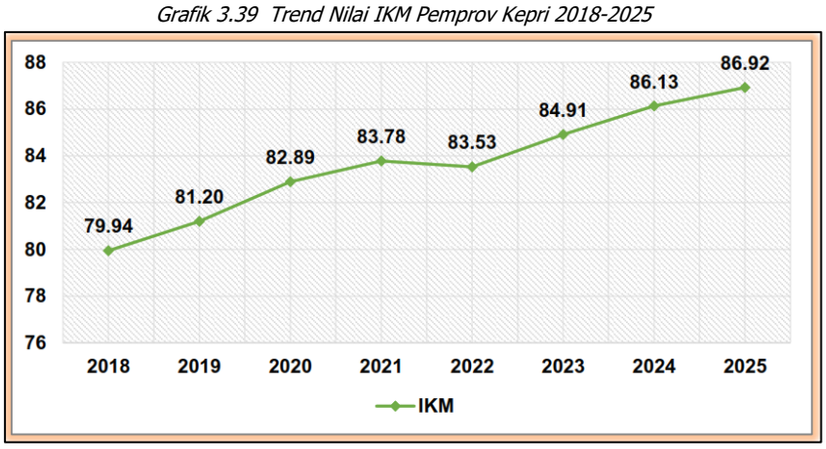
Tabel 3.38 Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No	OPD/OPP	IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan	Jumlah Responden	Periode Survei
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	84,10	B	Baik	50	Tahunan
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	86,08	B	Baik	741	Tahunan
3	Biro Hukum	83,80	B	Baik	60	Tahunan
4	Biro Perekonomian dan Pembangunan	86,71	B	Baik	145	Tahunan
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	89,09	A	Sangat Baik	163	Tahunan
6	Biro Organisasi	83,92	B	Baik	91	Tahunan
7	Biro Umum	85,21	B	Baik	152	Tahunan
8	Biro Administrasi Pimpinan	83,68	B	Baik	70	Tahunan
9	Sekretariat DPRD	79,50	B	Baik	129	Tahunan
10	Inspektorat Daerah	84,21	B	Baik	145	Tahunan
11	Dinas Pendidikan	85,90	B	Baik	200	Tahunan
12	Dinas Kesehatan	91,41	A	Sangat Baik	100	Tahunan
13	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	95,61	A	Sangat Baik	400	Semester 1
14	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	84,60	B	Baik	510	Semester 1
15	Dinas PUPR	92,22	A	Sangat Baik	10	Tahunan
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	84,98	B	Baik	80	Tahunan
17	Dinas Sosial	88,04	B	Baik	114	Tahunan
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88,80	A	Sangat Baik	50	Tahunan
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	82,67	B	Baik	222	Tahunan
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,64	B	Baik	100	Tahunan
21	Dinas Perhubungan	82,56	B	Baik	399	Tahunan
22	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	84,25	B	Baik	70	Tahunan
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	82,75	B	Baik	240	Tahunan
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	89,26	A	Sangat Baik	53	Tahunan
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	82,58	B	Baik	277	Tahunan
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86,93	B	Baik	156	Tahunan
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	90,69	A	Sangat Baik	100	Tahunan
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,95	B	Baik	380	Tahunan
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	87,23	B	Baik	375	Tahunan
30	Dinas Kebudayaan	85,58	B	Baik	333	Tahunan
31	Dinas Pariwisata	93,63	A	Sangat Baik	58	Tahunan

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

Kecenderungan (trend) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2025 di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, meskipun sedikit mengalami fluktuatif pada tahun 2022, sesuai grafik berikut:

Grafik 3.39 Trend Nilai IKM Pemprov Kepri 2018-2025



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Pelayanan Publik: Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025 disebutkan bahwa Capaian Nilai Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah 4,48 Kategori A- (Sangat Baik).

Tabel 3.40 Tren Pencapaian Nilai IPP Prov Kepri 2020-2025

Tahun	Nilai IPP	Kategori	Predikat
2020	3,93	B	Baik
2021	4,21	A-	Sangat Baik
2022	4,34	A-	Sangat Baik
2023	4,13	A-	Sangat Baik
2024	4,26	A-	Sangat Baik
2025	4,48	A-	Sangat Baik

Sumber : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau

Sebagaimana terlihat dari tren capaian nilai IPP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020 s.d. 2025 Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik Secara Prima menunjukkan terjadi peningkatan namun masih berfluktuasi dan belum mencapai predikat Pelayanan Prima. Upaya yang dilakukan dalam mendukung ketercapaian indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP):

a. Asistensi/ Sosialisasi PEKPPP Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;
b. Melaksanakan Pendampingan terhadap Unit Lokus Evaluasi PEKPPP Mandiri dalam rangka memberikan penjelasan mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri.

Tingkat Kepatuhan Standara Pelayanan: Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas maladministrasi baik dari peningkatan kompetensi pelaksana, sistem perencanaan yang berprinsip pada transparansi dan akuntabel, pengelolaan pengaduan yang baik hingga kepatuhan terhadap produk pengawasan Ombudsman. Berdasarkan hasil penilaian Opini Ombudsman Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Riau meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung ketercapaian indikator Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik adalah Mengikuti Sosialisasi penilaian, Melakukan Pendampingan saat Penilaian. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi, diantaranya adalah Secara umum pelaksanaan PEKPPP Mandiri pada tahun 2025 dapat dilaksanakan sebagaimana rencana awal. Namun demikian dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan dan kendala, yaitu:

a. Komitmen pimpinan disetiap OPD terhadap pelaksanaan PEKPPP masih bervariasi dan belum merata.
b. Pelaksanaan PEKPPP sering dianggap hanya sebagai kewajiban administratif, bukan bagian dari perbaikan kinerja.

c. Belum semua OPD memahami secara mendalam instrumen PEKPPP.
d. Ketersediaan data dan dokumen Pendukung tidak selalu mutakhir atau terdokumentasi dengan baik di setiap OPD.

E. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi RB General maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi, dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam mendukung ketercapaian Indeks Perencanaan Pembangunan: Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di Daerah dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan yang berbasis data dan riset.
2. Dalam Peningkatan Indeks SPBE, Perlu disusun Rencana Induk dan Arsitektur dan *Roadmap* SPBE.
3. Dalam penerapan Sistem Akuntabiltas, komitmen membangun *crosscutting* dan kolaborasi kinerja antar perangkat daerah agar sasaran dapat tercapai dengan maksimal dan Penerapan Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.
4. Peningkatan Indeks Reformasi Hukum, Optimalisasi SDM melalui peningkatan kompetensi dalam rangka tata kelola JDIH serta menjaga kepatuhan terhadap mekanisme penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai peraturan yang berlaku.
5. Peningkatan Indeks Kualitas kebijakan adalah melakukan evaluasi dengan tidak lanjut kongkret penglibatan aktif analis kebijakan dalam perumusan kebijakan dengan mengikuti tahapan-tahapan penyusunan kebijakan dalam pruduk hukum.
6. Peningkatan kinerja digitalisasi arsip diantaranya penyelesaian Kebijakan JIKN, melaksanakan alih media sesuai dengan target yang ditentukan, melaksanakan bimbingan teknis pemberkasan arsip pada aplikasi Srikandi, melaksanakan pameran virtual
7. Upaya dalam peningkatan Indeks Tata Kelola pengadaan, harmonisasi kebijakan internal dengan regulasi pengadaan nasional, Peningkatan jumlah SDM pengadaan bersertifikat kompetensi, Optimalisasi e-Katalog, *e-Purchasing*, dan non-tender elektronik serta Meningkatkan indikator pengendalian dan mitigasi risiko.
8. Upaya Pencapaian Merit Sistem, Pengembangan Kompetensi berbasis 70:20:10. Mengoptimalkan: 70% pembelajaran di tempat kerja (penugasan khusus, *project based learning*). 20% *coaching* dan *mentoring* oleh atasan langsung. 10% pelatihan formal (diklat, bimbingan teknis, sertifikasi) dan Pengembangan Maturitas *CorPu.*
9. Peningkatan Indeks Berakhlak, mendorong setiap agen perubahan sebagai pelopor perubahan dengan menyusun dan melaksanakan rencana tindak.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi RB Tematik Penanganan Kemiskinan dan Peningkatan Investasi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif sebagai berikut:

1. Penajaman sasaran penerima manfaat melalui penguatan pemutakhiran dan integrasi data kemiskinan. Data kemiskinan akan diperbarui secara berkala dan disinkronkan dengan data nasional dan kabupaten/kota, sehingga intervensi program dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi *exclusion error* dan *inclusion error*, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program;
2. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, khususnya melalui peningkatan kualitas bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Bantuan tidak hanya difokuskan pada aspek permodalan, tetapi juga akan disertai dengan pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, serta penguatan akses pasar,

sehingga mampu meningkatkan keberlanjutan usaha dan pendapatan masyarakat secara jangka menengah dan panjang;

3. Mengoptimalkan kegiatan promosi investasi yang terarah dan berbasis potensi unggulan daerah. Promosi dilakukan melalui penyusunan dan pemutakhiran profil peluang investasi, partisipasi dalam forum investasi, serta penyebaran informasi investasi secara digital untuk menjangkau investor domestik maupun asing;
4. Penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui peningkatan kompetensi teknis pelayanan perizinan dan pemahaman regulasi investasi yang terus berkembang;
5. Memperkuat kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha sebagai fondasi utama peningkatan investasi, melalui optimalisasi pemanfaatan sistem perizinan berusaha berbasis risiko secara konsisten, peningkatan kecepatan dan kepastian proses perizinan, serta penguatan peran pelayanan terpadu satu pintu sebagai pusat layanan investasi yang responsif dan transparan;
6. Promosi investasi akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah tinggi dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah, dengan memanfaatkan berbagai platform digital dan forum investasi strategis.

F. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 3.41 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau

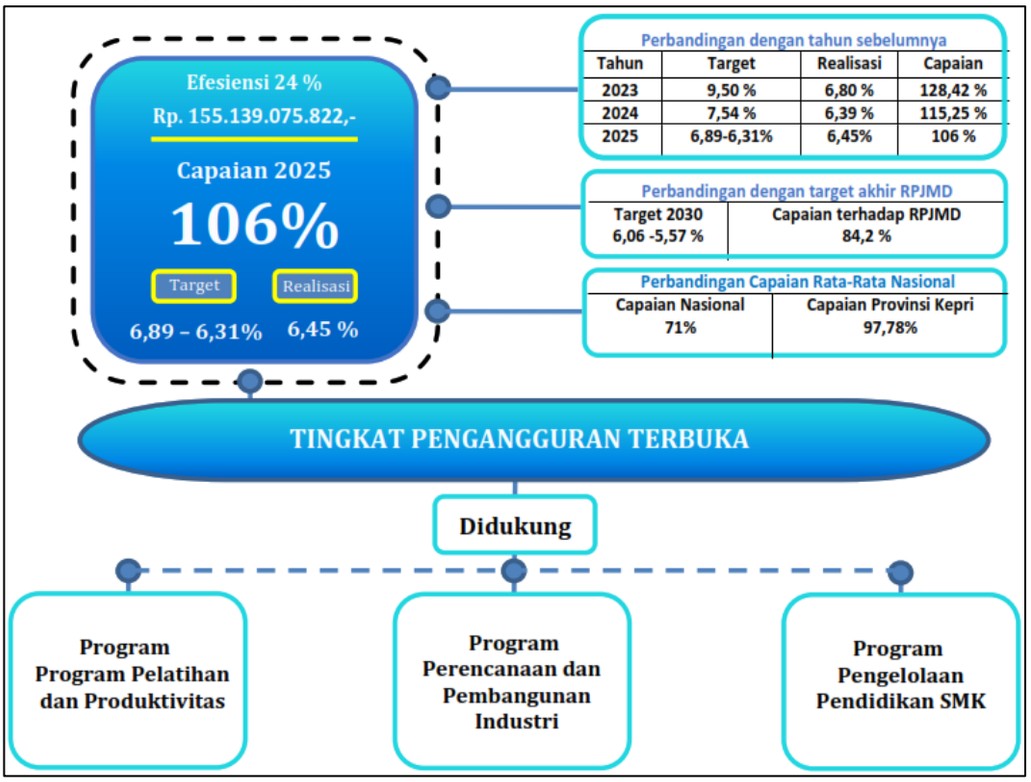
Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Penataan Organisasi	143.337.175,00	136.909.003,00	96
Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.038.635.971,00	2.547.091.975,00	83,82
Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.176.054.010,00	2.133.795.679,00	97,91
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	943.724.521,00	918.526.286,00	97,33
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.036.940.080,00	2.953.325.194,00	97
Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.273.739.100,00	1.233.785.260,00	97
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.717.991.298,00	2.666.534.250,00	98
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	506.091.009,00	470.886.286,00	92,95
Program Pengelolaan Arsip	7.583.100,00	6.948.410,00	91,6
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	153.857.132,00	153.656.000,00	99,87
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	727.026.712.074,00	711.277.901.128,00	98
Program Kepegawaian Daerah	1.703.768.849,00	1.473.413.976,00	86,48
Program Pengembangan Kompetensi Teknis	1.209.069.827,00	631.155.989,00	52
Program Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	773.198.774,00	687.725.408,00	89
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.757.605.625,00	3.530.534.795,00	93,96
Program Pemberdayaan Sosial	600.895.841,00	596.713.086,00	99,30
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	219.614.350,00	202.641.291,00	92,27
Program Promosi Penanaman Modal	348.266.180,00	343.536.124,00	98,64
Program Pelayanan Penanaman Modal	211.876.799,00	198.918.230,00	93,88
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	51.106.895,00	48.201.398,00	94,31
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	13.707.100,00	13.517.645,00	98,62
Total	**749.913.775.710,00**	**732.225.717.413,00**	**97,64**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp749.913.775.710,00 terealisasi sebesar Rp732.225.717.413,00 atau 97,64%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp17.688.058.297,00 (2,3%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa

capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (105%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (97,64%) dengan efesiensi 7,36%.

3.2.3.3 Sasaran Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Berkompetensi dan Berdaya Saing

3.2.3.3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka



Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran sering kali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau menurun. Tingkat Pengangguran pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 106% dari target sebesar 6,89 - 6,31% (menggunakan target tertinggi) dan terealisasi sebesar 6,45% .

Perlu kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja, di mana indikator kinerja yang digunakan tetap sama namun mengalami penyesuaian pada penamaan serta target pencapaiannya. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta peningkatan akurasi dalam pengukuran kinerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada Indikator ini perjanjian kinerja murni tahun 2025 menjanjikan pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 7,21, kemudian perjanjian kinerja mengalami perubahan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target menjadi 6,89 – 6,31%.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja terbaru sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

Ketenagakerjaan adalah masalah hajat hidup orang banyak yang pada akhirnya menjadi cermin kemajuan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan Komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar permasalahan ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan usaha untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi titik sentral dari

pembangunan secara keseluruhan. Selain itu juga diperlukan upaya Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan dilanjutkan dengan pengkajian yang konsisten dan berkelanjutan sehingga provinsi dapat mencapai target dalam menurunkan angka pengangguran.

Tingkat Pengangguran terbuka dikenal sebagai angka pengangguran adalah Angka yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Untuk mencapai sasaran Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran ditetapkan indikator kinerja yaitu angka pengangguran/ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 6,45% dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 6,89 – 6,31% (dengan penggunaan angka tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 106% atau dalam kategori “Sangat Baik”.

Tabel 3.42 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,89 – 6,31%	6,45%	106%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Hasil analisis indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan yaitu masuk di rentang 6,89-6,31% yang terealisasi sebesar 6,45% (penggunaan target tertinggi 6,89%) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 106%.

Angkatan kerja yang merupakan bagian dari mempengaruhi nilai Tingkat Pengangguran terbuka adalah bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 sebanyak 1.124.530, naik sebesar 3.870 orang dibanding Agustus 2024 sebesar 1.120.660 orang. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami Penurunan sebesar 0,9% poin dari 68,68% tahun 2023 menjadi 68,23 persen tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Penduduk bekerja Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan menjadi sebanyak 1.051.980 dari 1.049.000 orang tahun 2024 dan pengangguran naik sebanyak 990 orang. Meskipun Jumlah Angkatan Kerja beserta komponennya secara absolut mengalami kenaikan, namun jumlah pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau justru menunjukan kenaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2025 sebesar 68,23% mengalami penurunan 0,94% poin dibanding Agustus 2024. Penurunan TPAK mengidikasikan bahwa terjadi Penurunan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja maupun sebagai penganggur. Dapat juga dikatakan telah terjadi perpindahan penduduk dari kategori Angkatan kerja ke kategori bukan Angkatan kerja (sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan lainnya).

Tabel 3.43 Karakteristik Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Daerah Tempat tinggal Agustus 2023—Agustus 2025

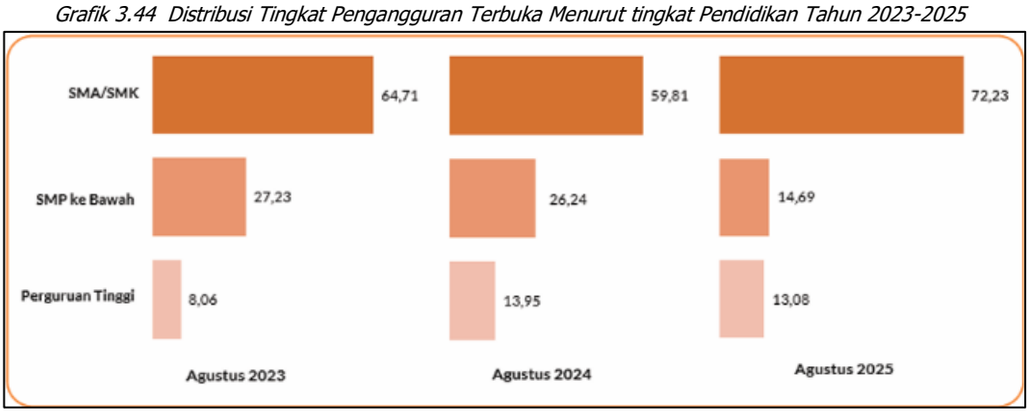
Karakteristik	Agustus 2023 (persen)	Februari 2024 (persen)	Agustus 2024 (persen)	Februari 2025 (persen)	Agustus 2025 (persen)	Perubahan Ags 24–Ags 25 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,80	6,94	6,39	6,89	6,45	0,06
TPT Menurut Jenis Kelamin						
- Laki-laki	5,95	7,17	6,02	6,40	6,40	0,38
- Perempuan	8,23	6,53	7,00	7,70	6,54	-0,46
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal						
- Perkotaan	6,77	7,06	6,74	6,99	6,70	-0,04
- Perdesaan	7,00	5,73	2,50	5,89	3,56	1,06

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Jika dilihat Berdasarkan tipe daerah/daerah tempat tinggal, TPT perkotaan Tahun 2023 sebesar 6,77 persen, TPT wilayah perkotaan Lebih rendah dibandingkan TPT di daerah Pedesaan yang sebesar 7,00. Berbeda dengan TPT perkotaan, Pada Tahun 2024 adanya perubahan TPT Menurut tempat tinggal dari tahun 2023 sebsar 0,04% poin, sampai dengan tahun 2025 TPT perkotaan menjadi 6,70 atau naik sebesar 0,04% poin dari tahun 2024 (6,74%). Ditahun 2025 di Pedesaan mengalami kenaikan angka yang cukup signifikan sebesar 1,06 persen poin, dari TPT pedesaan tahun 2024 sebesar 2,50 menjadi 3,56 pada Tahun 2025.

Pada Agustus 2025, TPT laki-laki sebesar 6,40 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,54%. Tahun 2025 TPT laki-laki mengalami Kenaikan dibandingkan TPT perempuan yaitu masing-masing sebesar 0,38 persen poin dan TPT Perempuan mengalami penurunan sebesar 0,46% poin, jika dibandingkan dengan Agustus 2024.

Grafik 3.44 Distribusi Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut tingkat Pendidikan Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pada Agustus 2023 mempunyai pola sama Sampai dengan Agustus 2025. Pada Agustus 2024, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah menengah kejuruan masih yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada tamatan pendidikan diploma, yaitu sebesar 3,69%. Dibandingkan Agustus 2024, Penurunan jumlah TPT terjadi pada kategori tamatan pendidikan kecuali SMK/SMA. Penurunan TPT terbesar pada kategori tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP/sederajat) yaitu sebesar 26,24% poin dan juga kategori Perguruan tinggi yaitu sebesar 13,08 persen mengalami kenaikan sebesar 1,03%. Tamatan Sekolah menengah Kejuruan Pada Tahun 2025 menurun secara signifikan dari 0,87 persen pada tahun 2024 menjadi 72,23% pada Agustus tahun 2025 atau naik sebesar 12,42%.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Capaian kinerja Tingkat Pengguran Terbuka tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 17,47 poin (Capaian tahun 2024 sebesar 115,25%). Hal ini disebabkan dari tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka 6,39% meningkat menjadi 6,45% pada tahun 2025. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

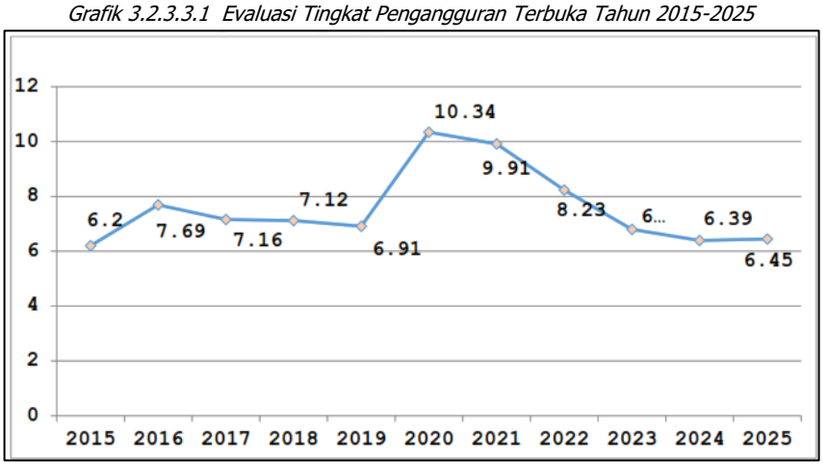
Tabel 3.45 Tren Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

INDIKATOR	TARGET						REALISASI					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Pengangguran Terbuka	10,34	10,22	10,1	9,50%	7,54%	6,31%	10,34	9,91	8,23	6,80	6,39	6,45

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2015- 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.2.3.3.1 Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dari periode tahun 2016 ke 2025, mengalami Penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar 1,3 poin persen, dari tahun 2020 ke 2022 terjadi penurunan sebesar 2,11 poin persen, dari tahun 2021 sampai 2022 TPT Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan sebesar 1,68 poin. Pada tahun 2018 tercatat TPT Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,12 persen. Dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,21. Pengaruh Covid-19 menyebabkan angka TPT dari Tahun 2020 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, seiring dengan peningkatan perekonomian sampai tahun TPT tahun 2024 sampai diangka 6.39 atau turun 1,84% poin dibandingkan tahun 2022. Tingkat pengangguran Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus Tahun 2025 kembali naik sebesar 0,06% poin dibanding TPT tahun 2024.

Adapun Evaluasi tingkat pengangguran terbuka pada setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2025 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.46 Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepri Tahun 2023-2025

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan Ags 2023–Ags 2025	Perubahan Ags 2024–Ags 2025
	persen (%)	persen (%)	persen (%)	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Karimun	6,02	5,52	6,31	0,29	0,79
Kabupaten Bintan	5,43	4,53	4,81	-0,62	0,28
Kabupaten Natuna	4,05	3,89	3,98	-0,07	0,09
Kabupaten Lingga	3,52	3,38	3,52	0,00	0,14
Kabupaten Kepulauan Anambas	2,55	2,38	2,56	0,01	0,18
Kota Batam	8,14	7,68	7,57	-0,57	-0,11
Kota Tanjungpinang	4,76	4,69	4,72	-0,04	0,03
Kepulauan Riau	**6,80**	**6,39**	**6,45**	**-0,35**	**0,06**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa TPT tertinggi pada Tahun 2025 terjadi di Kota Batam sebesar 7,68% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Anambas sebesar

2,38%. Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan komposisi per kabupaten/Kota Berbagai kebijakan pemerintah dan usaha terkait penciptaan lapangan kerja masih tetap memerlukan perhatian. Secara absolut Pada Tahun 2024 angka TPT Kota Batam menurun sebesar 0,46 persen poin dari Agustus 2023 (8,14%) menjadi 7,68%. Tahun 2025 kembali mengalami Penurunan sebesaar 0,11 persen poin dari tahun 2024 dengan TPT sebesar 7,57 poin. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah pengangguran di Kota Batam. Tingkat pengangguran terbuka paling tinggi masih didominasi Kota Batam sebesar 7,57 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 2,56%. Secara keseluruhan tergambar terjadi kenaikan TPT di kerseluruhan kabapten/kota. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka justru pada Kota Batam. TPT Kota batam pada tahun 2024 sebesar 7,68% menjadi menjadi 7,57%.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,45% dengan target sebesar 6,06 - 5,57% (penggunaan angka terendah) sehingga capaian kinerja sebesar 84,2%.

Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target akhir RPJMD (2026)	Capaian (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,45	6,06 -5,57	84,2

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 secara nasional sebesar 4,85 persen turun sebesar 0,05 persen poin dibanding Agustus 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 6,45 persen, naik sebesar 0,06 persen poin dibanding Agustus 2024. Perbandingan dengan TPT Provinsi Kepulauan Riau berada di atas TPT Nasional sebesar 1,6 poin. Perbandingan TPT Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dengan TPT Nasional dan TPT Provinsi Lain di Indonesia Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.48 TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia Tahun 2025

NO	PROVINSI	TPT	
		TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	ACEH	5,75	5,64
2	SUMATERA UTARA	5,66	5,32
3	SUMATERA BARAT	5,75	5,62
4	RIAU	3,70	4,16
5	JAMBI	4,48	4,26
6	SUMATERA SELATAN	3,86	3,69
7	BENGKULU	3,11	3,41
8	LAMPUNG	4,19	4,21
9	KEP. BANGKA BELITUNG	4,63	4,45
10	**KEP. RIAU**	**6,39**	**6,45**
Dst.	....		
38	PAPUA PEGUNUNGAN	1,32	1,68
	INDONESIA	**4,91**	**4,84**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Target nasional TPT pada tahun 2025 adalah sebesar 4,45 - 5% dengan realisasi TPT nasional sebesar 4,84%. Jika dibandingkan dengan realisasi TPT Provinsi Kepri Agustus 2025 dengan target TPT nasional maka ketercapaian kinerja sebesar 71%.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi Kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dipengaruhi yaitu:

1. Adanya 6 (enam) lapangan usaha mengalami penurunan tenaga kerja, dengan penurunan terbesar pada Konstruksi (penurunan sebanyak 6720 orang), Jasa Pendidikan (penurunan sebanyak 6010 orang), Jasa Kesehatan dan kegiatan social (pengurangan sebanyak 3940 ribu orang, *Gas e-Treatmen air*, sampah dan daur ulang (penurunan sebanyak 2370 orang) serta transportasi dan perdagangan (pengurangan sebanyak 1030 orang) dan jasa lainnya (penurunan 1020 orang).
2. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2025 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 343,180 orang (32,64 persen) dan sekolah Menengah kejuruan sebesar 189.660 (18,03 persen). Kemudian tamatan Sekolah Dasar sebanyak 193.090 orang (18,36 persen). Dalam satu tahun terakhir, Penduduk yang bekerja sebanyak 1.051.980 orang, mengalami penurunan penyerapan di penduduk bekerja berpendidikan sekolah menengah kejuruan.

Tabel 3.49 Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 – 2025

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2023		Februari 2024		Agustus 2024		Februari 2025		Agustus 2025	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan										
SD ke Bawah	218,55	21,44	205,82	20,51	186,88	17,81	187,69	18,46	193,09	18,36
Sekolah Menengah Pertama	123,04	12,07	89,43	8,91	119,16	11,36	120,95	11,90	132,99	12,64
Sekolah Menengah Atas	324,47	31,83	313,13	31,21	318,17	30,33	297,18	29,23	343,18	32,62
Sekolah Menengah Kejuruan	184,18	18,07	190,80	19,02	216,69	20,66	184,96	18,20	189,66	18,03
Perguruan Tinggi[1]	169,12	16,59	204,22	20,35	208,18	19,84	225,77	22,21	193,06	18,35
Jumlah	**1.019,36**	**100,00**	**1.003,39**	**100,00**	**1.049,09**	**100,00**	**1.016,54**	**100,00**	**1.051,98**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

3. Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, hal ini diindikasikan dari jam kerja rendah. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua kelompok yaitu pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (*full time worker*), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh dengan persentase sebesar 80,29 persen pada Agustus 2025. Sementara itu, 19,71 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran (5,01persen) dan pekerja paruh waktu (14,70 persen). Dibandingkan Agustus 2024, persentase pekerja penuh mengalami penurunan sebesar 1,98 persen poin, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.50 Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Pekerjaan Penuh/Tidak Penuh Tahun 2024-2025

No	Karakteristik	2024 (org)	2025 (org)	Perubahan 2024-2025	Persen
1	Pekerja Penuh > 35 Jam	863.130	816,55	-46,58	80,33
2	Pekerja Tidak Penuh (1-34 Jam)	185.950	199,99	-14.040	19,67

Sumber : Bursa Resmi Statistik 2025

Untuk mengatasi TPT Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya yang mendukung keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan Program pelatihan dalam rangka Mengoptimalkan kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan melalui Pemetaan Kebutuhan Pelatihan,

Perluasan Balai Latihan Kerja Melalui satuan Pelayanan, Pelaksanaan Pelatihan dengan berbagai Metode seperti Pelatihan di Balai Latihan Kerja, Pelathan di LPK Swasta dan Pelatihan Industri/pemagangan. Akselerasi Program Pemagangan Berbasis Kualifikasi Pendidikan.

2. Pemagangan Jenjang Sarjana (S1): Menjalin sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) untuk memfasilitasi lulusan perguruan tinggi masuk ke pasar kerja profesional melalui program pemagangan nasional.
3. Penguatan Program Pelatihan melalui aktivitas Pemagangan Jenjang Menengah (SMA/SMK): Fokus pada sektor pariwisata dan ritel untuk menyerap lulusan sekolah vokasi. Pelaksanaan pemagangan ini bekerja sama dengan mitra strategis, antara lain: Hotel Santika, PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC) serta Department Store Ramayana.
4. Formalisasi Komitmen "*Link and Match*" Lintas Sektor dengan Melakukan pengikatan kerja sama melalui Penandatanganan Komitmen Dukungan Program Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Provinsi Kepulauan Riau. Skala Kegiatan: Kegiatan ini melibatkan 84 pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdiri dari perwakilan sektor industri, pendidikan vokasi (SMK & Politeknik), instansi pemerintah, dan asosiasi perhotelan yang tersebar di Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Mitra Industri Strategis: Komitmen ini didukung oleh perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) dan industri besar, di antaranya: Sektor Manufaktur, Elektronik & Migas: PT. Citra Tubindo Tbk, PT. Sumitomo Wiring Systems Batam, PT. McDermott Indonesia, PT. Infineon Technologies Batam, PT. Schneider Electric, dan PT. BSSTEC. Sektor Pendidikan: Politeknik Negeri Batam (Polibatam) yang melibatkan unsur pengajar, laboran, dan mahasiswa. Sektor Perhotelan & Pariwisata: Aston Inn Gideon Batam, Aston Batam Hotel & Residence, Grand Mercure, PT. Hotel Ozon (Artotel Group), dan Harper Premier Nagoya.
5. Upaya Penempatan Pasca Pelatihan, Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja khusus di SMK serta Sinergi *Stakeholder* melalui Tim koordinasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
6. Peningkatan Pelayanan ketenagakerjaan melalui mengoptimalkan pelayanan penggunaan aplikasi SIAP kerja yang dapat digunakan dalam layanan pendataran pelatihan di Lembaga pelatihan kerja BLK dan LPK Swasta, Pendaftaran pemagangan ke luar negeri, sertifikasi BNSP, pendaftaran pencari kerja di karirhub atau portal Pemda dan Portal Swasta dan layanan ketenagakerjaan lainnya seperti *job fair*.
7. Melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan melalui program pemagangan.
8. Kolaborasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pengembangan program Pendidikan vokasi dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjustifikasi sebaran wilayah industri dan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya, yaitu:

1. Peningkatan Koordinasi melalui Penguatan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) yang melibatkan Bappeda, disnaker, Dinas Pendidikan, disperindag, Lembaga Pendidikan vokasi, Konsersium Politeknik, Kadin, Asosiasi Perusahaan dan LSP serta meningkatkan kerja sama dengan industri dan dunia usaha (DUDI)

agar pelatihan yang diberikan lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Melakukan pelatihan berbasis kompetensi yang lebih sinkron dengan perkembangan industri

2. Penyusunan Strategi daerah untuk revitalisasi Pelatihan Vokasi yang fokus pada Optimalisasi Sistem Informasi Pasar kerja, Penguatan Peran DUDI dalam Proses Pendidikan Vokasi, Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebutuhan Pasar Kerja, Meningkatkan relevansi dan aksesbilitas sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Terwujudnya kolaborasi rise inovasi dan Hilirisasi produk oleh akademisi, industri masyarakat dan Pemerintah daerah serta Monitoring dan Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Pelatihan Vokasi.
3. Pelatihan industri dalam bentuk Pemagangan dalam bentuk penempatan tenaga kerja, sehingga aktifitas pemagangan di industri masih tetap akan dilaksanakan pada tahun 2026.
4. Memperkuat dan memperluas kemitraan magang siswa pada Dunia Usaha untuk memberi ruang yang lebih fleksibel bagi peserta didik SMK melakukan magang pada dunia usaha sesuai dengan jurusan.
5. Menyesuaikan dan menyelaraskan kurikulum Pendidikan dan standar kelulusan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
6. Meningkatkan kemampuan lulusan peserta didik dengan penguasaan teknologi dan penguasaan Bahasa asing sebagai kemampuan dasar dalam memasuki pasar kerja.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

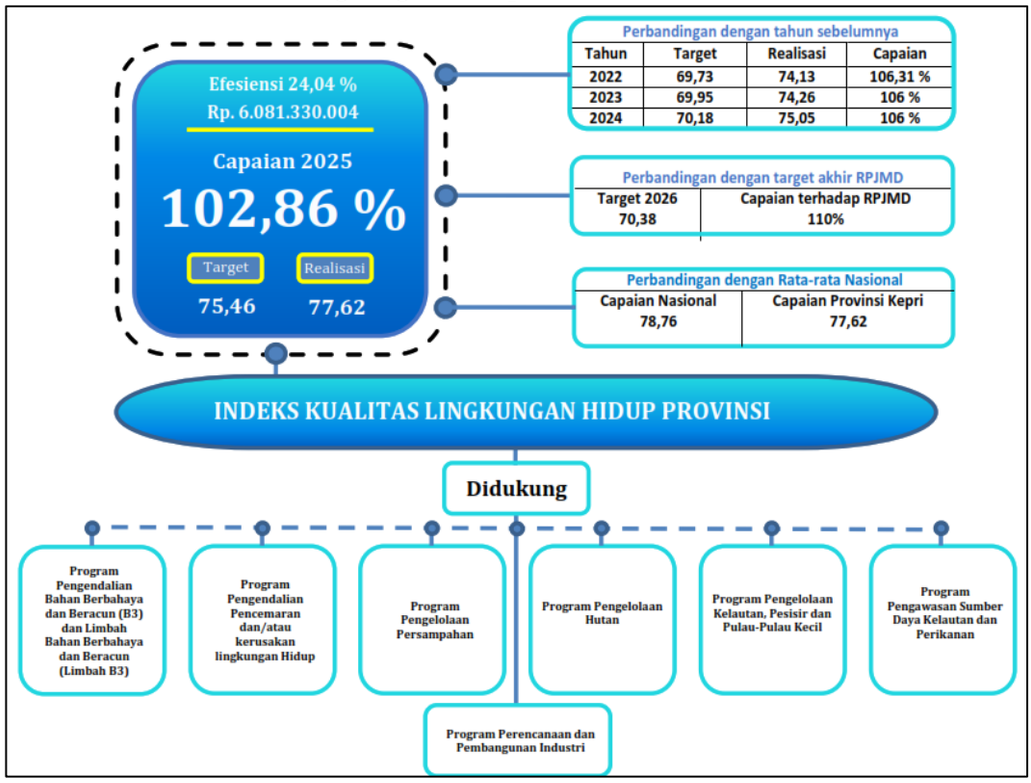
Tabel 3.51 Anggaran yang mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	97,40
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.400.000.000,00	689.397.940,00	49,24
Pengelolaan Pendidikan SMK	147.715.209.122,00	121.360.921.447,00	82,16
Total	**155.139.075.822,00**	**127.917.767.969,00**	**82,45**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp155.139.075.822,00 terealisasi sebesar Rp127.917.767.969,00 atau 82,45%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp27.221.307.853,00 (17,55%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Tingkat Pembangunan Terbuka (106%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (82,45%) dengan efesiensi 24%.

3.2.3.4 Sasaran Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

3.2.3.4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



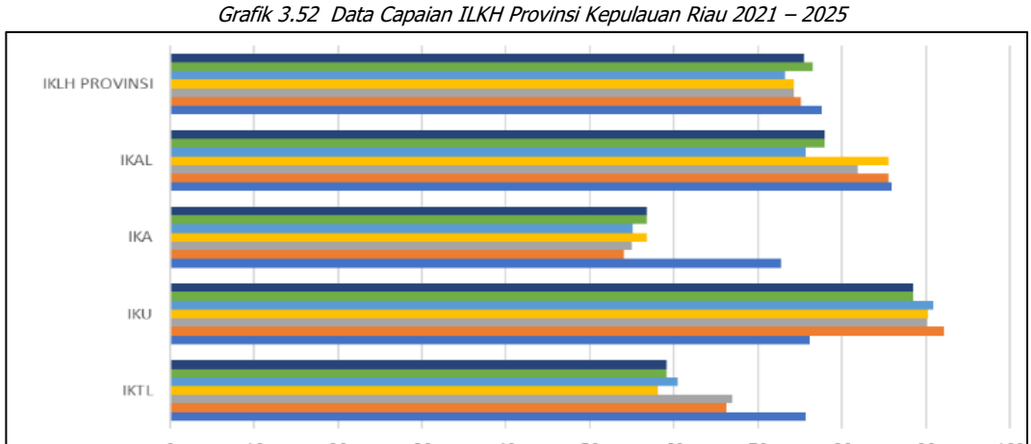
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks IKLH di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Realisasi indeks IKLH pada Tahun 2025 sudah baik sebesar 77,62 Indeks dari target sebesar 75,46 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 102,86%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup di seluruh Provinsi. IKLH Provinsi Kepulauan Riau merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter :
    - TSS
    - Total Fosfat
    - DO
    - Fecal Coli
    - pH
    - NO3
    - BOD
    - COD
2. Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung;
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Grafik 3.52 Data Capaian ILKH Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2025



	IKTL	IKU	IKA	IKAL	IKLH PROVINSI
Target	59.1	88.5	56.79	78	75.46
Target RPJMD	59.1	88.5	56.79	78	76.52
2021	60.39	90.91	55.15	75.68	73.19
2022	58	90.27	56.79	85.56	74.26
2023	66.97	90.13	54.93	81.81	74.26
2024	66.18	92.12	53.98	85.53	75.05
2025	75.75	76.2	72.72	85.91	77.62

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penurunan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dilihat dari indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 77,62 indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 75,46 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 102,86% atau dalam kategori "Sangat Baik."

Tabel 3.53 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,46 Indeks	77,62 Indeks	102%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 77,72 dengan rating Sedang; Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah atau pembukaan lahan untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air. Oleh karena itu Indeks Kualitas Air (IKA) capaiannya belum masuk kategori Baik.

Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 76,20 dengan rating Sedang; Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan di banding tahun 2024, hasil evaluasi dari 7 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi tersebut indeks respon daerah menurun jika dibanding pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti *Car Free Day* (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda tetapi pembukaan lahan untuk kawasan industry semakin banyak karena banyaknya investasi yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, target dan capaian pada IKU. Keberhasilan pemantauan udara di provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari adanya instrumen AQMS yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di letakkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota batam dan Kota Tanjungpinang. *Air Quality Monitoring System* (AQMS) adalah Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis adalah sistem untuk mengetahui tingkat pencemaran udara.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 75,75 dengan rating Sedang; pada data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 7 kab/kota yang meningkat nilai IKTL disbanding tahun 2024 yaitu 66,18. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas ruang terbuka hijau di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti di Pemukiman dan Taman Kota, baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya. Penghijauan lingkungan yang dilakukan pada lahan-lahan terbuka atau lahan kritis.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 85,91 dengan rating Baik. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 7 Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi, yang meningkat mutunya. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat (*landbase pollution*).

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 3.54 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Capaian kinerja kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar (2,57 poin) atau (3,42%). Dimana pada tahun 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,05 indeks meningkat menjadi 77,62 indeks pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa upaya Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup telah menunjukkan hasil yang sangat positif.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah telah berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, seperti:

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
2. Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah;
3. Peningkatan konservasi, rehabilitasi dan penghijauan lingkungan.

Dengan demikian, Perangkat Daerah telah berhasil mencapai target IKLH tahun 2025 dan bahkan melampauinya. Ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2026 realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 77,62 indeks dengan target sebesar 70,38 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 110%.

Tabel 3.55 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan Target akhir RPJMD

Target Akhir RPJMD	Realisasi IKLH	Capaian Kinerja
70,38 Indeks	77,62 Indeks	110%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel di atas realisasi IKLH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 melebihi target RPJMD dengan capaian kinerja 110%.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di level nasional, dapat terlihat dalam grafik berikut:

Tabel 3.56 Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2025

Indeks	Target			Realisasi			Kriteria
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
IKA	55,4	55,5	55,6	54,59	54,78	72,97	Sedang
IKU	84,4	84,5	84,6	88,67	90,13	82,63	Sedang
IKL	64,5	65,5	66,5	61,79	61,95	78,19	Sedang
IKAL	60	60,5	61	78,84	81,67	82,69	Sedang
IKLH	**69,48**	**69,74**	**70**	**72,54**	**73,53**	**78,76**	**Sedang**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.57 Perbandingan Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Indeks	Target		Realisasi			
	Nasional 2025	Daerah 2025	Nasional 2025	Kriteria	Daerah 2025	Kriteria
IKA	55,6	54,45	72,97	Sedang	72,72	Sedang
IKU	84,6	92,65	82,63	Sedang	76,2	Sedang
IKL	66,5	66,18	78,19	Sedang	75,75	Sedang
IKAL	61	85,75	82,69	Sedang	85,91	Sedang
IKLH	**70**	**75,46**	**78,76**	**Sedang**	**77,62**	**Sedang**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel tersebut diatas, bahwa IKLH Nasional tahun 2025 sebesar 78,76 poin, sedangkan capaian IKLH Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 77,62 poin, hal-hal yang menyebabkan menurunnya IKLH Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) Daerah tahun 2025 sebesar 76,20 poin, menurun 6,43 poin dibandingkan Indeks Kualitas Udara (IKU) Nasional tahun 2025 sebesar 82,63 poin. Jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udaranya sebanyak 7 kabupaten/kota dengan menggunakan metode *Passive Sampler* dan sedangkan hanya dua Kota saja yang menggunakan metode AQMS ada dua Kota yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
2. Indeks Kualitas Air (IKA) Daerah tahun 2025 sebesar 72,72 poin menurun 0,25 poin dibandingkan hasil Indeks Kualitas Air (IKA) Nasional tahun 2025 sebesar 72,97 poin. Jumlah pelaksanaan pemantauan IKA dilaksanakan oleh 7 Kabupaten Kota, yang dilaksanakan oleh Petugas PIC DLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Daerah tahun 2025 sebesar 75,75 poin menurun 2,44 poin dibandingkan hasil Indeks Kualitas Lahan (IKL) Nasional tahun 2025 sebesar 78,19 poin. Penghitungan nilai IKL dikembangkan dari penghitungan IKTL dengan mempertimbangkan dampak dari kanal dan kebakaran di lahan gambut. Hal ini adanya pengendalian dan pembatasan kerusakan Kawasan hutan di tujuh Kabupaten/Kota, pemulihan lahan yang dilakukan seluas 468,5 Ha yang terdapat di 12 lokasi.
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Daerah tahun 2025 sebesar 85,91 meningkat 3,22 poin dibandingkan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Nasional tahun 2025 sebear 82,69 poin. Pemantauan kualitas air laut dilaksanakan oleh pusat.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Tahun 2024 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sebesar 75,05 dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 70,18 dengan Rating Baik dengan Indeks Respon sebesar 5,10. Sehingga IKLH Provinsi Kepulauan Riau masuk peringkat ke 19 dari 38 Provinsi di Indonesia.

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2025 sebesar 76,2 poin, menurun 15,92 poin dibandingkan dengan hasil perhitungan tahun 2045 sebesar 92,12 poin. Jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udaranya sebanyak 7 kabupaten/kota dengan menggunakan metode *Passive Sampler* dan hanya dua Kota yang menggunakan metode AQMS ada dua Kota yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang;
2. Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2025 sebesar 72,72 poin meningkat 18,74 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2024 sebesar 53,98 poin. Jumlah pelaksanaan pemantauan IKA dilaksanakan oleh 7 Kabupaten Kota, yang dilaksanakan oleh Petugas PIC DLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.58 Pemantauan Indeks Kualitas Air

No	Kabupaten/ Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA	IKA INA	IKA INA MUTU
		Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat			
1	**Kabupaten Karimun**	1	8	0	0	7,78	44,44	0,00	0,00	52,22	72,56	Sedang
2	**Kabupaten Bintan**	82	25	0	0	53,64	11,68	0,00	0,00	65,33	82,93	Sedang
3	**Kabupaten Natuna**	14	5	0	0	51,58	13,16	0,00	0,00	64,74	81,53	Sedang
4	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	0	6	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	73,56	Sedang
5	**Kabupaten Lingga**	6	6	0	0	35,00	25,00	0,00	0,00	60,00	81,83	Sedang
6	**Kota Tanjungpinang**	7	23	0	0	16,33	38,33	0,00	0,00	54,67	73,78	Sedang
7	**Kota Batam**	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SANGAT KURANG

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2025 sebesar 75,75 poin meningkat 9,57 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2024 sebesar 66,18 poin. Hal ini adanya pengendalian dan pembatasan kerusakan Kawasan hutan di tujuh Kabupaten/Kota, pemulihan lahan yang dilakukan seluas 472,5 Ha yang terdapat di 13 lokasi seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.59 Pelaksanaan Rehabilitasi lahan Tahun 2025

No.	Lokasi	Instansi Pelaksana	Luas (Ha)
1	Kecamatan Gunung Kijang	DLHK Prov. Kepri	1,25
2	Kel. Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur	DLHK Prov. Kepri	1,25
3	Tanjung Tilli Kecamatan Bintan Timur	DLHK Prov. Kepri	10
4	Kecamatan Sagulung-Batam	DLHK Prov. Kepri	1
5	Tembeling Tanjung-Bintan	DLHK Prov. Kepri	1
6	Setokok-Batam	DLHK Prov. Kepri	3
7	HL Duriangkang Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Batam	Direktorat Pengelolaan Air Minum Badan Usaha SPAM, Fasilitas, dan Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	10
8	HL Tembesi Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam	Gapoktan Maju Bareng	180
9	HL Dangas Kelurahan Tanjung pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam	KTH Dangas Hijau Makmur	30
10	HL Sei Hulu Galang Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Batam	Kelompok Tani Hutan Barelang Jaya, Kelompok Tani Hutan Jaya Tani	200
11	HL Sei Pulai, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Bintan	Kelompok Tani RHL Bintan Tani Bertuah	15
12	HP Gunung Demit, Desa Topaya Utara, Kecamatan Toapaya, Bntan	Kelompok Tani Bayu Asih	10
13	HP Gunung Demit, Desa Topaya Utara, Kecamatan Toapaya, Bntan	Kelompok Tani Lome Hijau	10
JUMLAH			**472,5**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) tahun 2025 sebesar 85,91 poin meningkat 0,38 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2024 sebesar 85,53 poin, Pengambilan sampel untuk Indeks Kualitas Air Laut dilakukan pusat, Adapun kegiatan daerah antara lain penanaman mangrove di pesisir, pemantauan dan pengawasan Perusahaan pengelola limbah B3.

Untuk meningkatkan IKLH Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya yang mendukung keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Air
   a. Pengendalian pencemaran air limbah industri dan domestik melalui penegakan regulasi, inspeksi berkala, dan sanksi yang tegas.
   b. Pembangunan dan peningkatan kapasitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) baik komunal maupun kawasan industri.
   c. Rehabilitasi sungai, danau, dan daerah aliran sungai (DAS) melalui penanaman vegetasi penyangga dan pengerukan sedimen.
   d. Gerakan pengurangan sampah plastik dan penguatan program bank sampah untuk menekan limbah ke badan air.
   e. Pemantauan kualitas air secara rutin dan *real-time* untuk deteksi dini pencemaran.
2. Pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
   a. Penanganan dan penyelesaian kasus *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya pada wilayah perbatasan dan perairan strategis.
   b. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
   c. Penguatan dan pengembangan kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) kelautan dan perikanan yang aktif, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau sebagai mitra pengawasan partisipatif.
3. Meningkatkan Kualitas Udara
   a. Pengendalian emisi industri melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, *scrubber*, dan standar baku mutu emisi.
   b. Pembatasan kendaraan bermotor tinggi emisi, misalnya uji emisi wajib, pembatasan kendaraan tua, dan manajemen lalu lintas.
   c. Pengembangan transportasi publik massal dan transportasi rendah karbon (EV, sepeda, jalur pedestrian).
   d. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan patroli, pemantauan *hotspot*, dan pemberdayaan masyarakat.
   e. Penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang membantu penyerapan karbon dan meningkatkan kualitas udara perkotaan.
4. Meningkatkan Tutupan Lahan / Vegetasi
   a. Habilitasi hutan dan lahan kritis melalui reboisasi, penghijauan, dan penguatan kawasan lindung.
   b. Penegakan hukum terhadap perambahan hutan dan konversi lahan ilegal.
   c. Pengembangan perhutanan sosial untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan berkelanjutan.
   d. Pengendalian alih fungsi lahan melalui tata ruang yang disiplin dan pengawasan ketat.
   e. Restorasi ekosistem gambut dan mangrove yang berfungsi penting sebagai penyerap karbon.
5. Penguatan Kebijakan, Pengawasan, dan Kelembagaan

a. Integrasi kebijakan lingkungan dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD/RKPD).
b. Peningkatan kapasitas SDM lingkungan dalam pemantauan, analisis, dan penegakan hukum.

6. Melaksanakan fungsi pembinaan ke kawasan industri guna memastikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pengendalian dampak lingkungan sektor industri.
   b. Pembinaan industri hijau dan berkelanjutan.
   c. Pengaturan dan pengawasan perdagangan barang berbahaya.
   d. Sinkronisasi kebijakan lingkungan dan ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas air laut sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat diantaranya disebabkan oleh:
   a. Pembuangan sampah di laut
   b. Pembuangan Limbah oleh sektor industri
   c. Reklamasi pantai
   d. Rusaknya ekosistem laut dan terumbu karang
   e. Pembukaan lahan
2. Kendala juga dihadapi dalam mendukung Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan *influent* lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam.
3. Dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan masih terdapat keterbatasan sumber daya, baik dari sisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, maupun anggaran. Pencapaian indikator pembangunan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* masih terjadi dan sulit terdeteksi secara dini akibat keterbatasan jangkauan pengawasan. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha kelautan dan perikanan belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan perizinan, pelaporan usaha serta penerapan ketentuan teknis dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
4. Dalam upaya pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan masih terdapat keterbatasan sumber daya, baik dari sisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, maupun anggaran. Pencapaian indikator pembangunan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, perlu dilakukan beberapa kegiatan seperti penanaman pohon pinang, sebanyak 80 pohon yang berlokasi di Bandara RHF Tanjungpinang, penanaman pohon cemara udang sebanyak 20 pohon yang berlokasi di antara jembatan dan Gedung LAM tepi laut Tanjungpinang, penanaman *Cover crop* (tanaman rambat penutup tanah sebanyak 4000 *polybag* yang berlokasi di lereng seputaran mesjid raya dompak dan bibit tanaman buah sebanyak 222 bibit terdiri dari bibit mangga 100 batang dan bibit alpukat 122 batang yang berlokasi di Pulau Penyengat Tanjungpinang.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan peningkatan indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

   Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan dan tidak melakukan pencemaran terhadap air

laut dengan cara membuang sampah dilaut. Selain itu pemerintah juga harus tegas kepada oknum atau pihak perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang tidak diolah atau tidak aman bagi lingkungan, serta kepada perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi pantai agar patuh pada peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan air laut secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

2. Indeks Kualitas Air (IKA)
   Alternatif solusi yang di lakukan agar Indeks Kualitas Air (IKA) dapat di tingkatkan yaitu dengan cara:
   a. Ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan
   b. Melakukan pemantauan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak 4 kali pemantau dalam setahun.
3. Pendampingan dan pembinaan teknis bagi pelaku usaha perikanan, mencakup pengolahan air limbah sederhana menggunakan sistem filtrasi mandiri, penerapan praktik budidaya udang yang efisien dan berkelanjutan, serta pendampingan dalam pengurusan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) untuk memastikan standar produksi terpenuhi. Selanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi kepatuhan terkait perpanjangan sertifikasi HACCP, SKP dan penerapan standar teknis budidaya untuk meningkatkan kualitas produk dan keamanan pangan. Pengawasan lapangan rutin dilakukan untuk memastikan praktik usaha perikanan sesuai ketentuan, meminimalkan dampak lingkungan dan mencegah praktik yang merugikan sumber daya kelautan yang disejalankan dengan penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan pemberdayaan masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil sebagai mitra pengawasan partisipatif, sehingga deteksi dini pelanggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
4. Indeks Kualitas Udara (IKU)
   Alternatif solusi yang di lakukan untuk meningkatkan indeks kualitas udara (IKU) adalah dengan cara:
   a. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan udara secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.
   b. Melaksanakan kembali kegiatan uji emisi, karena sejak tahun 2014 uji emisi sudah tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
   Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau. Tahun 2026 dilakukan penghijauan di ruang terbuka hijau di Tembeling Kab. Bintan, pelaksanaan penghijauan lingkungan di Kab. Bintan, Kab. Karimun dan Kota Batam serta penanaman mangrove di Kab. Lingga, Kota Batam dan Kab. Bintan. Pelaksanaan pemantauan air permukaan di lokasi dam/embung Kota Tanjungpinang, Kab. Bintan dan kota Batam. Pemantauan udara di Kota Batam dan Tanjungpinang melalui AQMS dan *passive sampler* serta pengelolaan pesisir laut melalui program Dinas Kelautan dan Perikanan.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 3.60 Anggaran yang mendukung penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau

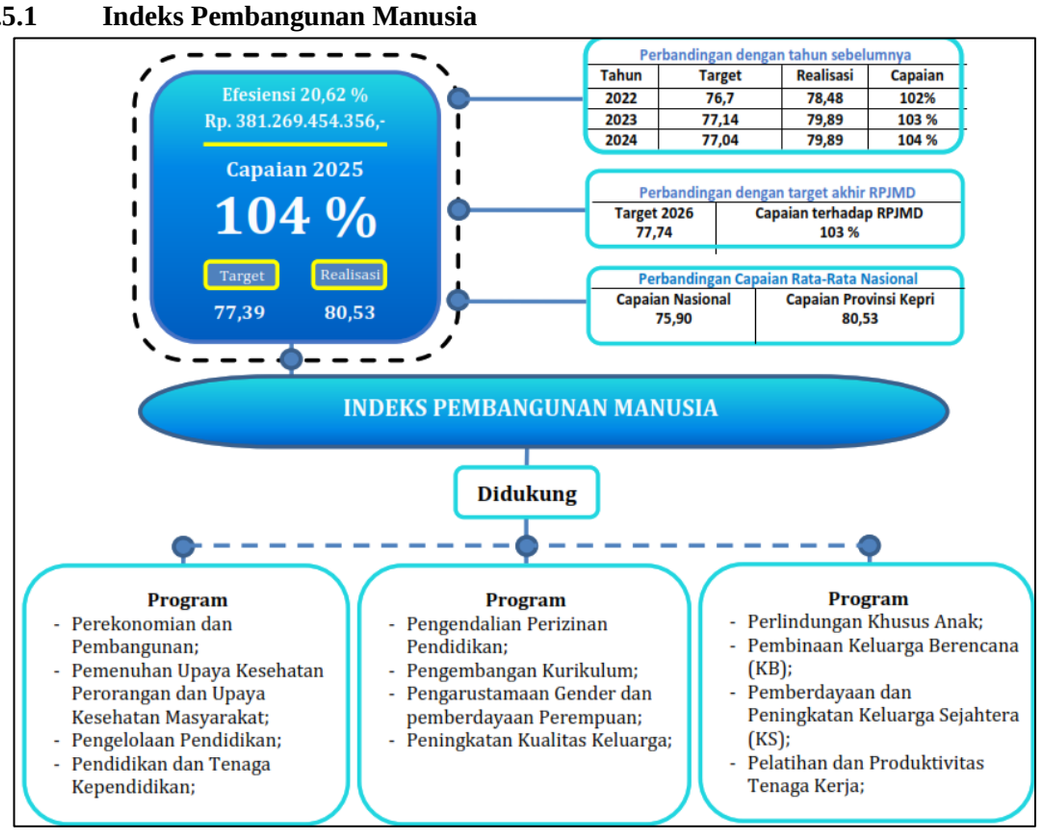
Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	376.608.737,00	148.907.020,00	39,54

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3 (dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	72.117.000,00	71.758.000,00	99,5
Program Pengelolaan Persampahan	1.197.821.048,00	1.187.931.990,00	99,17
Program Pengelolaan Hutan	2.288.386.160,00	1.966.812.325,00	85,95
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	257.192.505,00	250.764.855,00	97,5
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	689.204.554,00	669.728.925,00	97,17
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.200.000.000,00	497.668.234,00	41,47
Total	**6.081.330.004,00**	**4.793.571.349,00**	**78.82**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp6.081.330.004,00 terealisasi sebesar Rp4.793.571.349,00 atau 78,82%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp1.287.758.655,00 (21,18%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Kualitas lingkungan Hidup (102,86%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (78,82%) dengan efesiensi 24,04%.

3.2.3.5 Sasaran Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter

3.2.3.5.1 Indeks Pembangunan Manusia



Masyarakat Kepulauan Riau harus memiliki keunggulan agar mampu mengelola sumber daya pembangunan dan mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter SDM harus memperoleh pendidikan bermutu dan kualitas hidup yang sehat. Indeks Pembangunan Mansuia pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 80,53 Indeks dari target sebesar 77,39 Indeks dan terealisasi sebesar 104%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat dengan mempertimbangkan umur harapan hidup sebagai indikator kesehatan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai indikator pendidikan, serta pengeluaran per kapita sebagai indikator kesejahteraan ekonomi. Melalui pengukuran ini, IPM berfungsi sebagai tolak ukur penting dalam menilai

kemajuan pembangunan, membandingkan antarwilayah, serta menjadi dasar perumusan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia diperoleh melalu hal-hal sebagai berikut:

1. Umur Harapan Hidup

   Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
2. Rata-Rata Lama Sekolah

   Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
3. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

   UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

1. sangat tinggi: IPM ≥ 80
2. tinggi: 70 ≤ IPM < 80
3. sedang: 60 ≤ IPM < 70
4. rendah: IPM < 60

Peningkatan IPM Kepulauan Riau 2025 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata- rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter dilihat dari indeks pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 80,53 Indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 77,39 Indeks sehingga capaian kinerja sebesar 104% atau dalam kategori “Sangat Baik”.

Tabel 3.61 Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia	77,39 Indeks	80,53 Indeks	104%

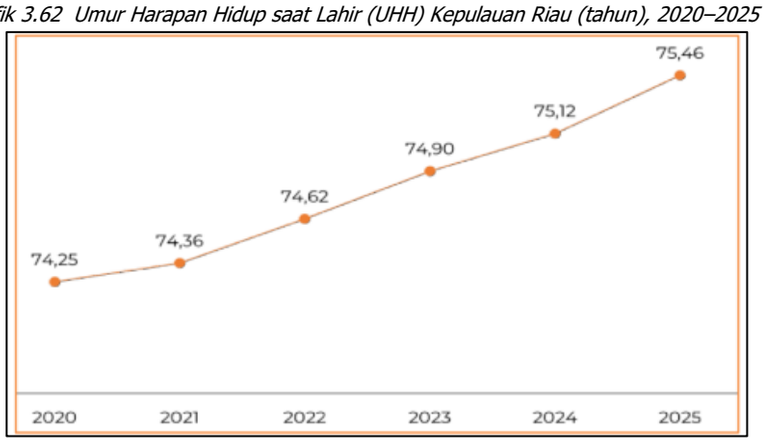
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia secara menyeluruh, yang mencerminkan kualitas hidup penduduk melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat

   Peningkatan IPM didukung oleh perbaikan dalam angka harapan hidup, yang mengindikasikan semakin baiknya akses dan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kesadaran pola hidup sehat, serta perbaikan gizi dan sanitasi. Program-program kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit telah berkontribusi pada pencapaian ini.

Grafik 3.62 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kepulauan Riau (tahun), 2020–2025



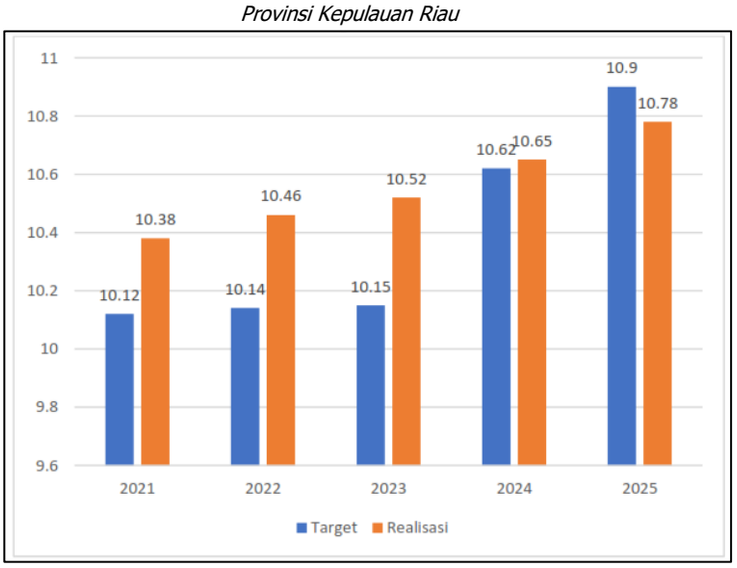
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, UHH Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 1,21 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,32 persen per tahun. Pada 2020, UHH Kepulauan Riau sebesar 74,25 tahun dan pada 2025 mencapai 75,46 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,34 tahun atau 0,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,29 persen per tahun.

2. Pengetahuan (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah)

Dimensi pengetahuan menunjukkan perkembangan positif seiring dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dan perluasan akses pendidikan. Kebijakan seperti wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas guru, serta digitalisasi pembelajaran turut mendorong capaian ini.

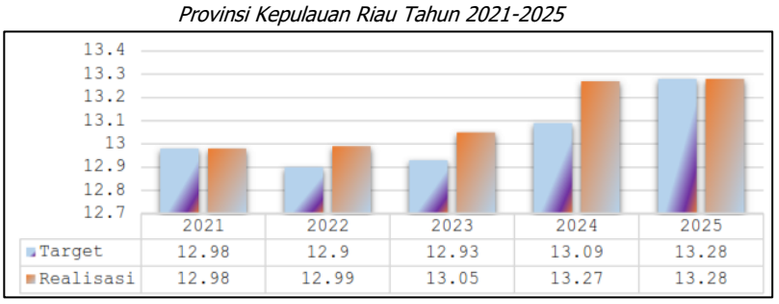
Grafik 3.63 Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,12%. Dimana pada tahun 2024 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,65 Tahun meningkat menjadi 10,78 Tahun pada tahun 2025. Realisasi Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 tidak mencapai target hal ini dikarenakan penyesuaian terhadap wajin belajar dari 9 Tahun menjadi 12 Tahun.

Grafik 3.64 Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

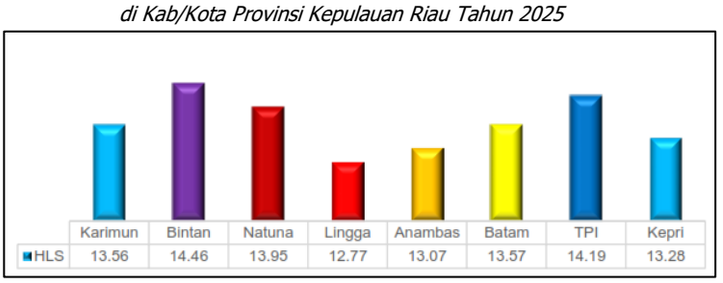


	2021	2022	2023	2024	2025
Target	12.98	12.9	12.93	13.09	13.28
Realisasi	12.98	12.99	13.05	13.27	13.28

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Capaian kinerja Harapan Lama sekolah pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,08%. Dimana pada tahun 2024 peningkatan Harapan Lama Sekolah hanya sebesar 13,27 Tahun meningkat menjadi 13,28 Tahun pada tahun 2025. Capaian Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar 13,28 Tahun dari target yang di tetapkan sebesar 13,28 Tahun.

Grafik 3.65 Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)
di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



	Karimun	Bintan	Natuna	Lingga	Anambas	Batam	TPI	Kepri
HLS	13.56	14.46	13.95	12.77	13.07	13.57	14.19	13.28

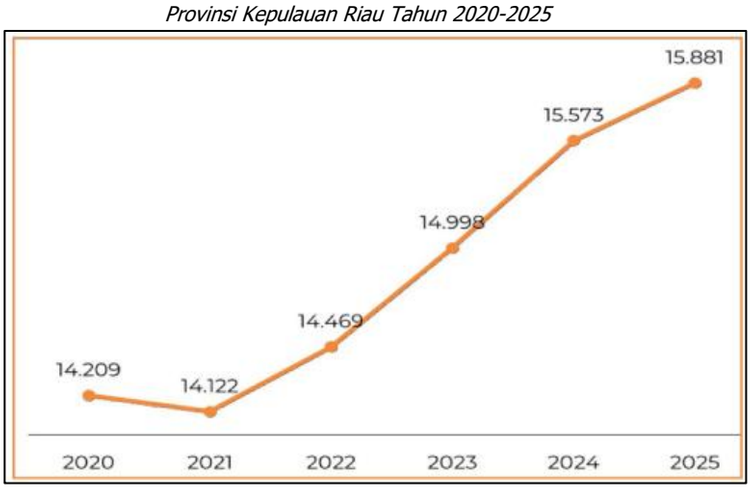
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kota Tanjungpinang merupakan penyumbang Realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) terbesar di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025, selanjutnya Kabupaten Bintan menyumbang HLS pada posisi 13,46 Tahun, disusul Kota Batam diurutan ketiga dengan realisasi HLS di tahun 2025 pada angka 13,57 Tahun serta Realisasi kinerja HLS terkecil berada di Kabupaten Lingga dengan angka 12,77 Tahun.

3. Standar Hidup Layak (Pengeluaran Riil per Kapita)

   Kenaikan pengeluaran riil per kapita mencerminkan perbaikan kesejahteraan ekonomi dan daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi, program bantuan sosial, dan penurunan tingkat kemiskinan, yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan lebih baik.

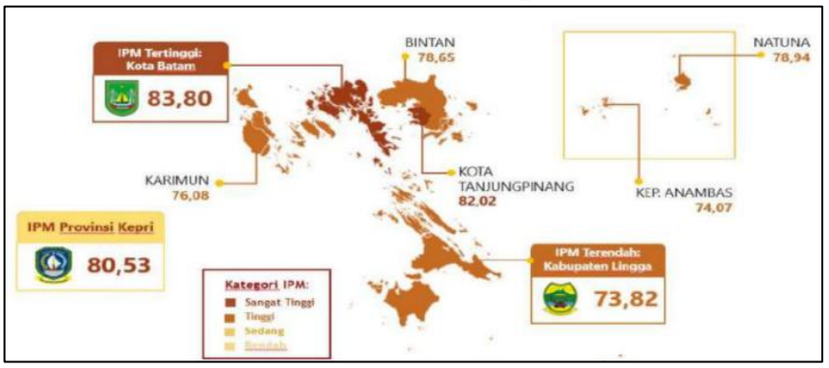
Grafik 3.66 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Kepulauan Riau mencapai 15,88 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 308 ribu rupiah atau 1,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 2,33 persen per tahun.

Pada tahun 2025, dua dari tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau mencapai status pembangunan manusia "sangat tinggi" (IPM ≥ 80), yaitu Kota Batam dengan capaian IPM 83,80 dan Kota Tanjungpinang dengan capaian IPM 82,02. Sementara lima diantaranya mencapai status pembangunan manusia "tinggi" (70 ≤ IPM < 80), yaitu Kabupaten Natuna dengan capaian IPM 78,94, Kabupaten Bintan 78,65, Kabupaten Karimun 76,08, Kabupaten Kepulauan Anambas 74,07, dan Kabupaten Lingga dengan capaian IPM 73,82. Dalam kurun waktu 2020-2025, terjadi peningkatan status pembangunan manusia dari "tinggi" ke "sangat tinggi" yang dialami Kota Tanjungpinang, yaitu sejak 2022.



Gambar 0.1 IPM Menurut Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Status Pembangunan Manusia, 2025

Secara keseluruhan, tren positif dan stabil IPM dari 2020 hingga 2025 menunjukkan bahwa pembangunan manusia berjalan dalam arah yang tepat dan terukur. Untuk mempertahankan dan mempercepat laju peningkatan ini, diperlukan strategi yang lebih terfokus pada pemerataan akses layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ketahanan ekonomi keluarga, serta peningkatan kualitas hidup kelompok rentan dan daerah tertinggal. Sinergi antar-sektor dan komitmen berkelanjutan menjadi kunci dalam mencapai target IPM yang lebih tinggi di masa mendatang.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

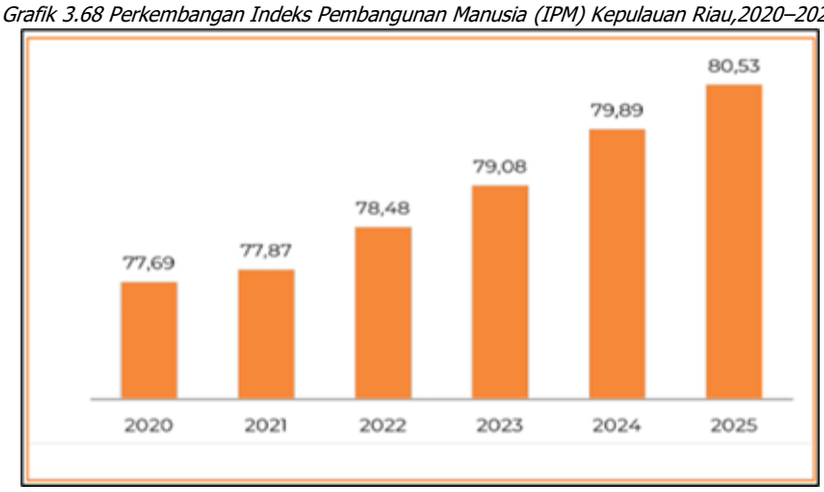
Tabel 3.67 Tren Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Dimensi 2020-2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umur Panjang dan Hidup Sehat							
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	74,25	74,36	74,62	74,90	75,12	75,46
Pengetahuan							
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,87	12,98	12,99	13,05	13,27	13,28
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	10,12	10,18	10,37	10,41	10,50	10,72
Standar Hidup Layak							
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	14.209	14.122	14.469	14.998	15.573	15.881

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Seluruh indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2025. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir meningkat secara konsisten dari 74,25 tahun pada 2020 menjadi 75,46 tahun pada 2025, mencerminkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 12,87 tahun menjadi 13,28 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan dari 10,12 tahun menjadi 10,72 tahun, yang mengindikasikan semakin membaiknya akses dan partisipasi penduduk dalam pendidikan. Selanjutnya, pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan menunjukkan kenaikan dari 14.209 ribu rupiah pada 2020 menjadi 15.881 ribu rupiah pada 2025, menandakan adanya perbaikan daya beli dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Grafik 3.68 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau,2020–2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dapat dilihat pada grafik diatas, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya, Berdasarkan data tren IPM dari tahun 2020 hingga 2025, terlihat adanya peningkatan yang konsisten dan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengalami kenaikan bertahap dari 76,46 pada tahun 2022, menjadi 79,08 pada tahun 2023, kemudian 79,89 pada tahun 2024, dan mencapai 80,53 pada tahun 2025. Perkembangan ini mencerminkan kemajuan yang berkelanjutan dan upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pada tahun 2025, IPM Kepri mencapai 80,53, meningkat 0,64 poin atau 0,80 persen dibandingkan tahun 2024. Perhitungan ini dilakukan dengan rumus:

ΔIPM=IPM 2025−IPM 2024 ΔIPM=80,53−79,89

ΔIPM=0,64

Kenaikan 0,64 poin ini menunjukkan pertumbuhan absolut IPM dalam satuan indeks. Angka ini mengkonfirmasi bahwa pembangunan manusia di Kepri terus mengalami kemajuan nyata dari tahun ke tahun. Peningkatan sebesar 0,64 poin tersebut setara dengan kenaikan 0,80 persen dibandingkan tahun 2024.

Berdasarkan data realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020 hingga 2025, dapat dilihat bahwa IPM mengalami peningkatan yang stabil dan konsisten setiap tahunnya. Tren positif ini mencerminkan kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan manusia di provinsi tersebut.

Perkembangan Tahunan:

1. 2020: 75,59;
2. 2021: 75,79 (+0,20)
3. 2022: 78,48 (+2,69)
4. 2023: 79,09 (+0,61)
5. 2024: 79,89 (+0,80)
6. 2025: 80,53 (+0,64)

Periode 2020–2022: IPM menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 2,69 poin. Hal ini mengindikasikan adanya percepatan pembangunan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat pasca-tantangan awal pandemi.

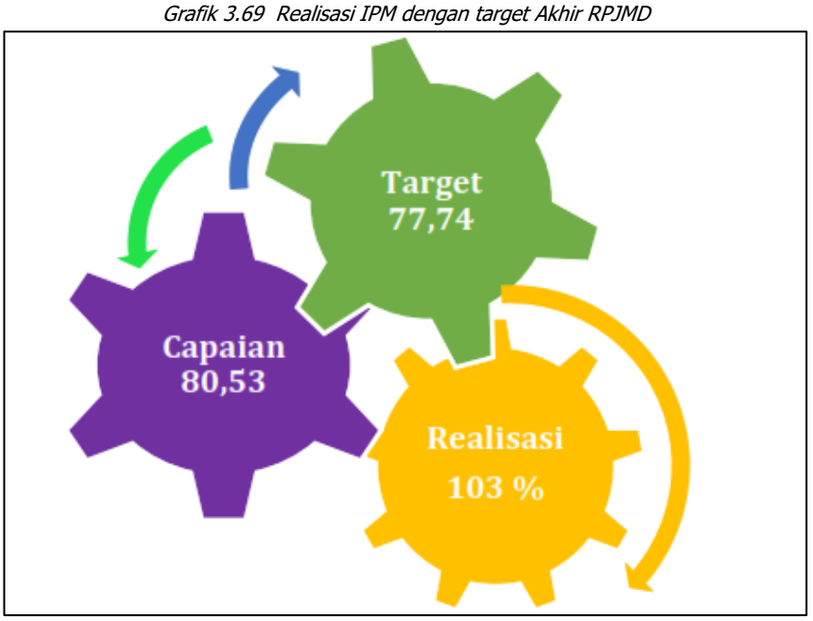
Periode 2023–2025: Peningkatan tetap terjaga meskipun dengan laju yang lebih stabil, menunjukkan bahwa upaya pembangunan manusia telah masuk dalam fase pemantapan dan konsolidasi.

Capaian Kinerja 2024–2025:Pada tahun 2025, IPM Provinsi Kepulauan Riau mencapai 80,53, meningkat sebesar 0,64 poin dari tahun 2024 yang sebesar 79,89. Persentase kenaikannya adalah 0,80%. Capaian ini sekaligus menandai level tertinggi IPM dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 80,53 indeks dengan target sebesar 77,74 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 103%.

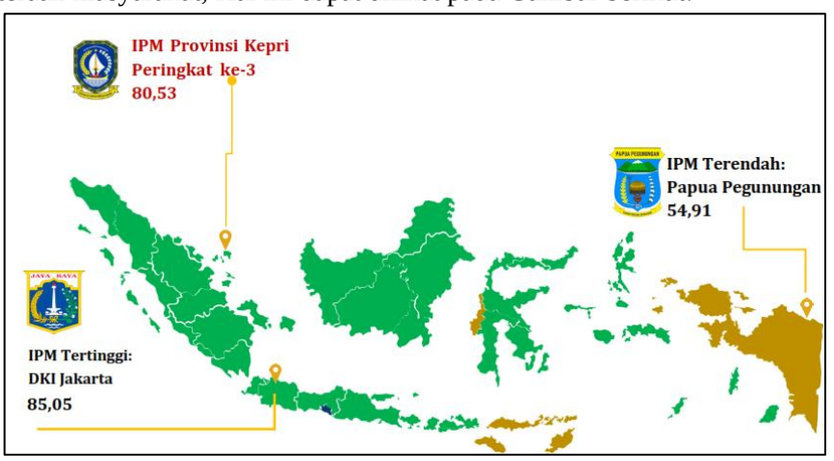
Grafik 3.69 Realisasi IPM dengan target Akhir RPJMD



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

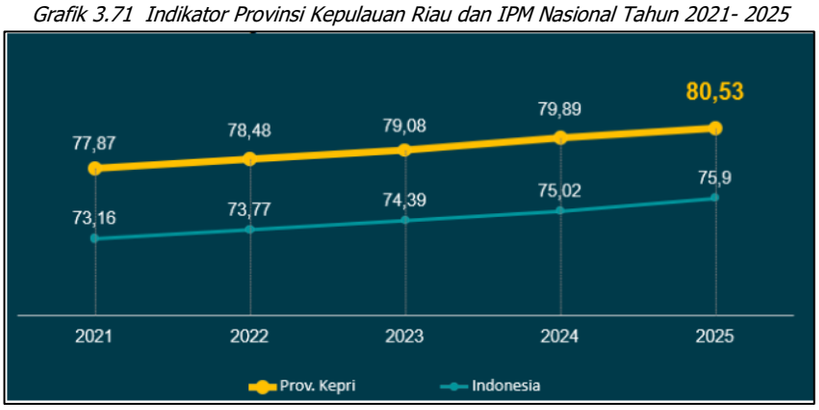
D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau sebesar 80,53 sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Nasional sebesar 75,90. Hal ini menunjukkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau diatas Indeks Pembangunan Manusia Nasional sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikategorikan memiliki Tingkat Pembangunan Manusia yang lebih baik dari rata-rata Nasional. Dampak Positifnya Provinsi Kepulauan Riau cenderung memiliki lebih banyak peluang investasi, lebih tinggi kualitas tenaga kerja, dan akses lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, ini bisa menjadi indikator bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih fokus pada Pembangunan manusia yang berdampak langsung kepada Kesejahteraan masyarakat, Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3.70 Indikator Provinsi Kepulauan Riau dan IPM Nasional Tahun 2025

Grafik 3.71 Indikator Provinsi Kepulauan Riau dan IPM Nasional Tahun 2021- 2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dibandingkan Provinsi lain di wilayah Sumatera, IPM Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi dan Peringkat ketiga se-Indonesia. Pada tahun 2025, IPM Kepri mencapai 80,53, meningkat 0,64 poin atau 0,80% dibandingkan tahun 2024. Mengalami Graduasi dari kategori Tinggi ke Sangat Tinggi.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 antara lain adalah:

1. Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, peningkatan harapan hidup dan akses layanan kesehatan, sebagai berikut : Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) jika angka tinggi menunjukkan kesehatan ibu dan bayi yang buruk dan berisiko menurunkan harapan hidup, sehingga menurunkan IPM. AKI dan AKB yang tinggi menandakan masalah serius pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, memerlukan upaya komprehensif untuk perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam rangka menurunkan AKI dan AKB upaya yang dilakukan untuk sebagai berikut:
   a. Melaksanakan desiminasi hasil pelaksanaan AMPSR di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota sebagai bahan pembelajaran agar kasus kematian serupa tidak terjadi lagi dan AMPSR dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
   b. Berkolaborasi dengan organisasi profesi seperti IBI, IDAI, dan POGI dalam melakukan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan reproduksi.
   c. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu dan anak ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan puskesmas.
   d. Melakukan *feedback* data program pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkala.

   Selain upaya tersebut terdapat beberapa upaya lainnya, seperti pencegahan Stunting, , yaitu bekerja sama dengan instansi terkait dalam program sensitif untuk menurunkan angka stunting, yang berdampak langsung pada angka Harapan Hidup dengan aktifitas yakni pendampingan bagi keluarga beresiko stunting, penguatan dan pendampingan Tim Pendampingan Keluarga (TPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

   Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu memperkuat gugus tugas KLA di seluruh wilayah Kepri untuk memastikan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dalam bentuk intervensi pendampingan gugus tugas KLA Kab/Kota, Sosialisasi/Advokasi Pencegahan kekerasan terhadap anak.

   Program Perlindungan Anak, yaitu memaksimalkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sistem layanan komprehensif, guna menjamin keamanan dan kesejahteraan generasi masa depan dalam bentuk pencegahan dan penanganan korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

2. Dari dimensi Pengetahuan, peningkatan rata-rata lama sekolah dan partisipasi pendidikan, sebagai berikut: Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Rata Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun seperti Pembangunan Unit Sekolah Baru di wilayah Kota Batam yaitu pembangunan sekolah menengah atas (SMA) dan lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk jenjang Pendidikan Khusus, juga di lakukan pembangunan/Rehabilitasi ruang kelas belajar, Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah, Pemberian Seragam Gratis, Pemberian Bantuan Biaya Personil bagi peserta didik berupa Bantuan Transportasi Darat, Bantuan Transportasi Laut, Bantuan Magang/PKL, Bantuan Makan dan minum dan juga Pembebasan biaya Pendidikan (SPP) di Satuan Pendidikan dalam rangka mengurangi beban orang tua dalam biaya pendidikan sehingga anak anak bisa tetap bersekolah. Upaya lainnya dalam mendukung ketercapaian indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun, Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya, sebagai berikut :
   a. Peningkatan kesejahteraan PTK melalui skema berbagai insentif dan perbaikan karir PTK.
   b. Penguatan pencegahan putus sekolah, melalui pendataan anak berisiko putus sekolah dan pendampingan intensif
   c. Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
   d. Perluasan pendidikan nonformal dan kesetaraan (Paket A, B, C) bagi anak putus sekolah dan usia dewasa
   e. Peningkatan layanan pendidikan inklusif, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan
   f. Kerja sama lintas sektor (pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, desa) dalam penanganan anak tidak sekolah
   g. Penyediaan sekolah terbuka dan kelas jauh, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan
   h. Pemanfaatan teknologi pembelajaran (kelas *daring*, *blended learning*) untuk fleksibilitas belajar
   i. Penguatan peran pemerintah daerah, termasuk beasiswa daerah dan kebijakan afirmatif
   j. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat, melalui kampanye kesadaran pentingnya pendidikan
   k. Penurunan angka perkawinan anak, melalui edukasi dan regulasi perlindungan anak
   l. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, agar peserta didik termotivasi menyelesaikan jenjang sekolah
   m. Penguatan sistem data pendidikan, untuk pemantauan partisipasi sekolah secara akurat dan berkelanjutan.
   n. Pengembangan dan adaptasi kurikulum berbasis industri., Program *Teaching factory*, program *link and macth*, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan Uji Sertifikasi Profesi pendidik.
   o. Peningkatan standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai pelatihan kompetensi, peningkatan jumlah guru yang bersertifikasi dan distribusi guru yang lebih merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah.
3. Standar Hidup Layak, Penguatan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja, sebagai berikut: Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, seperti Program Keluarga Berencana (KB) dengan mengatur jarak kelahiran dan mengedukasi kesehatan reproduksi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yang menjadi indikator penting dalam dimensi kesehatan IPM dengan intervensi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran

serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Membangun jejaring antar lembaga penyedia layanan untuk meningkatkan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil pembangunan manusia dalam bentuk kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, pengembangan, dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

Selain upaya diatas juga terdapat upaya lainnya seperti Pelatihan Industri Rumah Tangga, Hingga laporan terakhir, Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan pelatihan kepada peserta di kabupaten/kota sebanyak 610 peserta, guna menciptakan wirausaha baru dari kalangan perempuan.

Kemandirian Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) hadir untuk memberikan perhatian khusus dan dukungan kepada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga agar mampu mengelola usaha mandiri untuk menekan angka pengangguran di sektor rumah tangga.

Penguatan Kapasitas UMKM, melalui program "Peningkatan Kualitas Keluarga", Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan pelatihan keterampilan (seperti tata boga dan industri kreatif) yang memungkinkan perempuan memiliki penghasilan sendiri tanpa harus bergantung pada sektor formal.

Pengarusutamaan *Gender* (PUG) juga mendorong keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan guna meningkatkan yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan angka pengangguran perempuan.

Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, sebagai berikut:

1. Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, kendala dalam peningkatan harapan hidup dan akses layanan kesehatan, sebagai berikut:
    a. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di non fasilitas pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat di wilayah pulau-pulau di kabupaten/ kota yang lebih memilih untuk bersalin di rumah karena berbagai macam alasan diantaranya faktor tradisi yang turun menurun, wilayah kepulauan yang membuat jarak antara rumah dengan fasilitas pelayanan kesehatan cukup jauh dan moda transportasi yang kurang memadai, fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai dalam pelayanan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
    b. Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di sebagian fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan;
    c. Sistem rujukan maternal neonatal yang belum berjalan optimal;
    d. Pelaksanaan Audit Maternal Periatal (AMP) di kabupaten/ kota belum optimal, efektif, dan sesuai dengan yang diharapkan dalam hal jumlah atau frekuensi pertemuan dan jumlah kasus yang dikaji serta belum menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti;
    e. Masih adanya pelayanan kesehatan ibu hamil yang belum memenuhi standar dan pemeriksaan yang belum adekuat sehingga belum mampu melakukan pendeteksian risiko komplikasi pada ibu hamil. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dalam pendeteksian risiko komplikasi pada ibu hamil, saat ini dibuat kebijakan pelayanan kesehatan ibu hamil 6 kali (K6) dengan pemeriksaan oleh dokter minimal 1 (satu) kali pada trimester pertama dan 1 (satu) kali pada trimester kedua disertai dengan pemeriksaan kehamilan

menggunakan USG oleh dokter. Terdapat kesenjangan cakupan antar kabupaten/ kota dikarenakan belum meratanya dokter terlatih USG di puskesmas, dan keterbatasan akses pelayanan USG bagi ibu hamil yang berdomisili di pulau-pulau;

f. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di non fasilitas pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat di wilayah pulau-pulau di kabupaten/ kota yang lebih memilih untuk bersalin di rumah karena berbagai macam alasan diantaranya faktor tradisi yang turun menurun, wilayah kepulauan yang membuat jarak antara rumah dengan fasilitas pelayanan kesehatan cukup jauh dan moda transportasi yang kurang memadai, fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai dalam pelayanan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
g. Masih belum meratanya distribusi tenaga kesehatan spesialis seperti dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis lainnya. Dokter spesialis banyak terdistribusi di daerah perkotaan sedangkan di daerah DTPK seperti Kabupaten Kepulauan Anambas masih minim;
h. Program kesehatan reproduksi calon pengantin dan skrining layak hamil pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum berjalan optimal;
i. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam program pelayanan kesehatan ibu, anak, serta reproduksi belum optimal.

2. Dari dimensi Pengetahuan, kendala yang dihadapi dalam peningkatan rata-rata lama sekolah dan partisipasi pendidikan, sebagai berikut:
   a. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau; hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam;
   b. Pemerataan Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
   c. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.
3. Dari dimensi Standar Hidup Layak, kendala yang dihadapi dalam penguatan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja, yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang belum mencapai target akibat putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan khususnya pada kelompok perempuan kelompok rentan dan faktor ekonomi keluarga menyebabkan anak usia sekolah harus bekerja atau tidak melanjutak pendidikan ke jenjang lebih tinggi sehinga meningkatkan resiko tingginya angka kemiskinan, pernikahan dini (angka kematian ibu dan kekerasan dalam rumah tangga meningkat) serta kekerasan terhadap anak. Kemudian pendapatan masyarakat yang relatif rendah dan belum merata terutama pada kelompok rentan dan masyarakat miskin serta keterbatasan lapangan kerja yang layak dan rendahnya keterampilan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut:

1. Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melaksakanan, sebagai berikut:

a. Mengusulkan pengadaan buku KIA sebagai media KIE melalui anggaran APBD/P;
b. Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan;
c. Optimalisasi sistem rujukan penanganan kasus komplikasi pada ibu dan bayi melalui optimalisasi grup komunikasi *online* yang melibatkan fasyankes tingkat pertama, fasyankes rujukan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta penyusunan SOP sistem rujukan kesehatan ibu dan anak, termasuk di dalamnya penunjukan dokter spesialis kandungan dan anak sebagai penanggujawab wilayah yang memberikan arahan kepada tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas untuk stabilisasi pasien ibu dan bayi sebelum merujuk;
d. Melakukan kegiatan Audit Maternal Periatal (AMP) sebagai proses pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi agar tidak terulang lagi dengan kasus yang sama. Perencanaan kegiatan AMP di tingkat kabupaten/ kota harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu minimal 4 kali dalam setahun dan semua kasus dikaji. AMP tetap harus dilakasanakan meskipun tidak ada kasus kematian yang terjadi. Pelaksanaan AMP dapat diselenggarakan menggunakan dana DAK Fisik Kabupaten/ Kota dengan menu Surveilans dan Tatalaksana Kesehatan Ibu dan Bayi;
e. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Beberapa diantaranya yaitu pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelatihan integrasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan gizi buruk, pelatihan penanganan asfiksia dan BBLR, pelatihan dokter dalam pelayanan KIA termasuk penggunaan USG, pelatihan bidan dalam pelayanan KIA, dan pelatihan lainnya;
f. Peningkatan koordinasi dengan organisasi profesi (POGI, IBI, IDAI, dll) dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, salah satunya kolaborasi dengan IDAI dalam pelaksanaan *Pedistrician Social Responsibility* (PSR);
g. Pelaksanaan refreshing deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan-bidan di wilayah kerja puskesmas;
h. Penguatan peran lintas sektor dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), salah satunya kolaborasi dengan Kementerian Agama terkait upaya pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dan menginisiasi penyusunan SE Gubernur terkait pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin;
i. Mendorong kabupaten/ kota dalam pembentukan jejaring, *skrining* layak hamil, ANC, dan *stunting*;
j. Optimalisasi dan monitoring pemanfaatan JKN, DAK, Dekonsentrasi untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
k. Melakukan advokasi kepada kepala daerah untuk pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
l. Pencegahan *Stunting* dengan penguatan kerja sama dengan instansi terkait dalam program sensitif untuk menurunkan angka *stunting*, yang berdampak langsung pada angka Harapan Hidup dengan aktifitas yakni pendampingan bagi

keluarga beresiko *stunting*, penguatan dan pendampingan Tim Pendampingan Keluarga (TPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) .

m. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan memperkuat gugus tugas KLA di seluruh wilayah Kepri untuk memastikan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dalam bentuk intervensi pendampingan gugus tugas KLA Kab/Kota, Sosialisasi/Advokasi Pencegahan kekerasan terhadap anak.

n. Perlindungan Anak dengan memaksimalkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sistem layanan komprehensif, guna menjamin keamanan dan kesejahteraan generasi masa depan dalam bentuk pencegahan dan penanganan korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

2. Dari dimensi Pengetahuan, kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melaksakanan, sebagai berikut:
   a. Pemerataan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah;
   b. Melanjutkan program Pembebasan SPP, Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang;
   c. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah;
   d. Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dengan penyelenggaraan sekolah Perempuan paket C bagi Perempuan kelompok rentan yang putus sekolah serta penguatan kelembagaan organisasi wanita.
3. Dari dimensi Standar Hidup Layak, kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melaksakanan, sebagai berikut:
   a. Keluarga Berencana (KB), dengan mengatur jarak kelahiran dan mengedukasi kesehatan reproduksi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yang menjadi indikator penting dalam dimensi kesehatan IPM dengan intervensi pelaksanaan kegiatan penguatan dan pendampingan Generasi Berencana (GenRe).
   b. Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan membangun jejaring antar lembaga penyedia layanan untuk meningkatkan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil pembangunan manusia.
   c. Pelatihan Kemandirian Ekonomi dengan menyelenggarakan pelatihan peningkatan *Life skill* dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan pada bidang ekonomi.
   d. Peningkatan Koordinasi melalui Penguatan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) yang melibatkan Bappeda, disnaker, Dinas Pendidikan, disperindag, Lembaga Pendidikan vokasi, Konsersium Politeknik, Kadin, asosiasi Perusahaan dan LSP serta meningkatkan kerja sama dengan industri dan dunia usaha (DUDI) agar pelatihan yang diberikan lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Melakukan pelatihan berbasis kompetensi yang lebih sinkron dengan perkembangan industri.
   e. Penyusunan Strategi daerah untuk revitalisasi Pelatihan Vokasi yang fokus pada Optimalisasi Sistem Informasi Pasar kerja, Penguatan Peran DUDI dalam Proses Pendidikan Vokasi, Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebutuhan Pasar Kerja, Meningkatkan relevansi dan aksesbilitas sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Terwujudnya kolaborasi rise inovasi dan

Hilirisasi produk oleh akademisi, industri masyarakat dan Pemerintah daerah serta Monitoring dan Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Pelatihan Vokasi.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

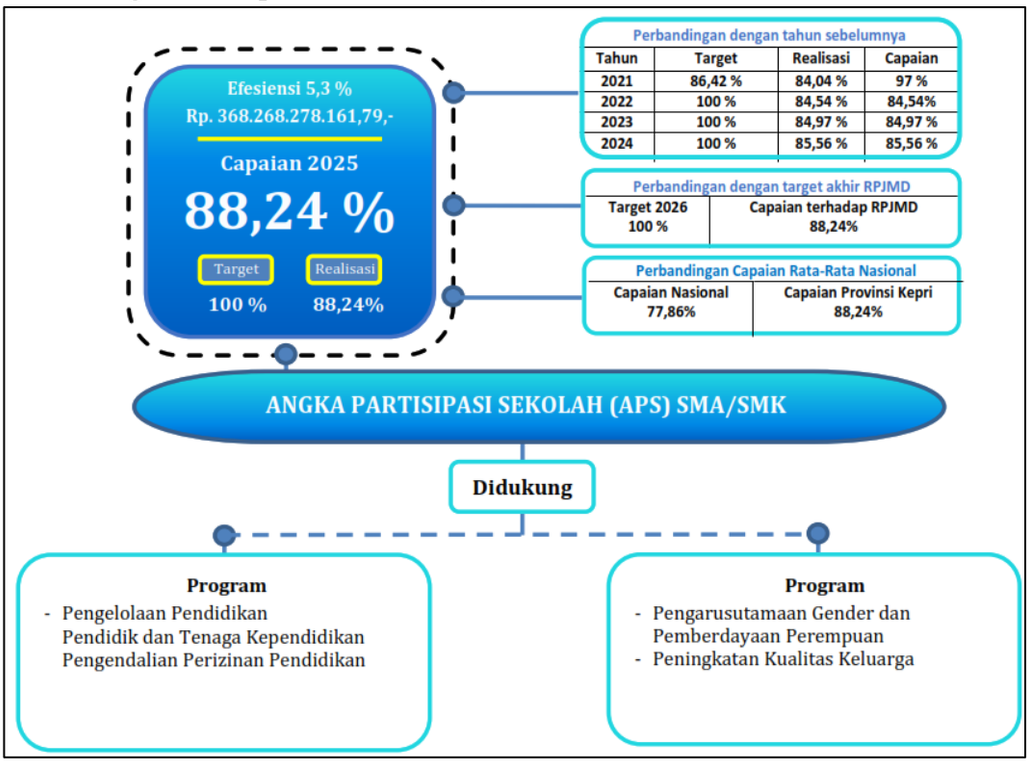
Tabel 3.72 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Perekonomian dan Pembangunan	351.320.920,00	337.295.059,00	96,01
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	360.251.470,00	337.725.150,00	93,25
Program Pengelolaan Pendidikan	365.322.687.666,00	302.664.866.696,00	82,85
Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	187.656.000,00	153.676.514,00	81,89
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000,00	26.028.317,00	61,33
Program Pengembangan Kurikulum	114.475.500,00	70.519.433,00	61,6
Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.814.930.080,00	1.774.748.851,00	97,98
Program Perlindungan Khusus Anak	1.975.970.775,00	1.695.907.832,00	85,82
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	99,98
Program Pemeberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	281.756.330,00	257.724.450,00	91,47
Program Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	97,40
Total	**381.269.454.356,00**	**317.884.934.629,00**	83,38

Dari jumlah anggaran sebesar Rp381.269.454.356,00 terealisasi sebesar Rp317.884.934.629,00 atau 83,38%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp63.384.519.727,00 (16,62%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (104%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (83,38%) dengan efesiensi 20,62%.

3.2.3.6 Sasaran Peningkatan Pemerataan Mutu dan Akses Layanan

3.2.3.6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK



Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 88,24% dari target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 88,24%.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam bidang pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang mengikuti proses pendidikan pada jenjang formal. APS digunakan untuk menilai sejauh mana akses pendidikan telah dijangkau oleh masyarakat serta mengukur efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan siswa di dunia pendidikan. Semakin tinggi nilai APS, semakin baik tingkat ketercakupan pendidikan di suatu daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Perhitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK yaitu Jumlah Siswa 16-18 / Penduduk Usia Sekolah x 100%

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, target Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%. Namun, realisasi yang tercapai adalah 88,24% dengan kategori “Baik”. Ini menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 11,76% antara target yang diharapkan dengan capaian sebenarnya. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masih ada sebagian dari populasi usia sekolah yang belum dapat berpartisipasi dalam pendidikan.

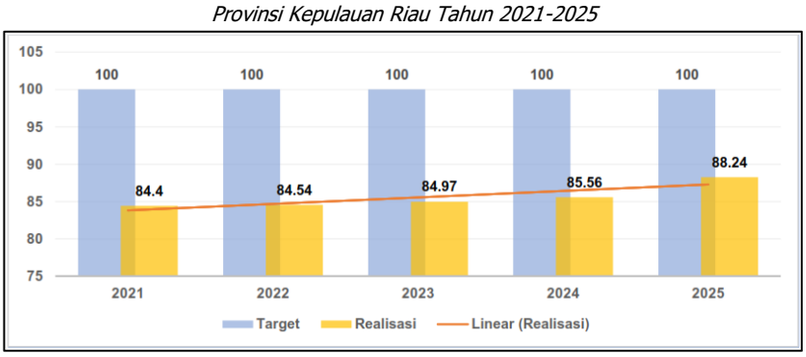
Tabel 3.73 Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100%	88,24%	88,24%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 3.74 Tren Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

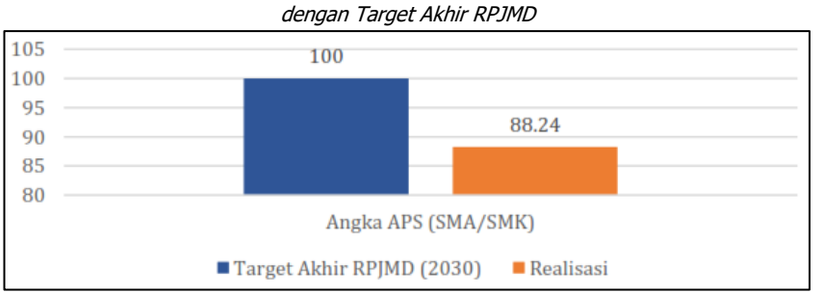


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami Peningkatan sebesar 3,13%. Dimana pada tahun 2024 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebesar 85,56% meningkat menjadi 88,24% pada tahun 2025.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Grafik 3.75 Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

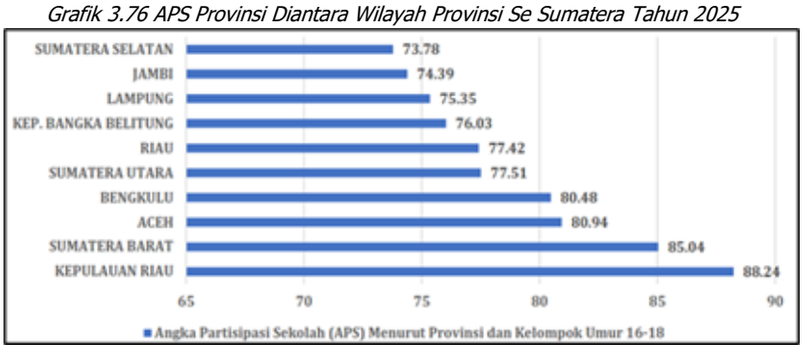
Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 88,24% dengan target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 88,24%.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah menengah atas telah memperoleh akses pendidikan, namun masih terdapat sekitar 11,76% penduduk usia 16-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan SMA/SMK. Meskipun demikian, capaian APS SMA/SMK sebesar 88,24% mencerminkan kinerja yang relatif tinggi dan menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan akses pendidikan menengah. Ke depan, capaian ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan afirmatif dan intervensi program yang lebih terarah agar target akhir RPJMD sebesar 100% dapat semakin didekati secara bertahap dan berkelanjutan.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Pada tahun 2025, Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang sangat baik dan menonjol secara regional. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi dengan APS SMA/SMK tertinggi, dapat terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.76 APS Provinsi Diantara Wilayah Provinsi Se Sumatera Tahun 2025

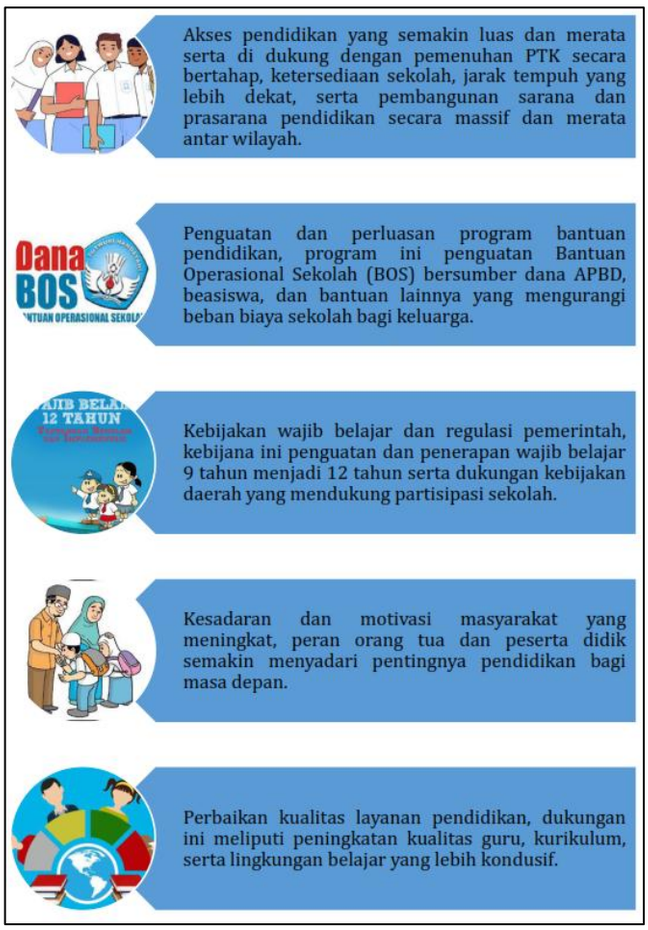


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

CapaianAngka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau dibandingan dengan target nasional pada Tahun 2025 berada diatas target nasional yaitu rata-rata nasional sebesar 77,86% dengan capaian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 88,24%. Jika dibandingkan dengan Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke-1 dengan nilai sebesar 88,24% yang disusul oleh Provinsi Sumatera Barat sebesar 85,04%. Namun untuk secara Nasional Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di tahun 2025 berada di Posisi ke-3 setelah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bali.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adanya beberapa faktor sebagai berikut:





Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sepanjang tahun 2025, antara lain:

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jenjang SMA/SMK/SLB
   Ketersediaan sekolah yang lebih dekat dan memadai mendorong meningkatnya partisipasi siswa usia SMA untuk bersekolah. Dengan kata lain, pembangunan USB SMA/SMK akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi lulusan SMP/MTs untuk melanjutkan pendidikan, terutama di wilayah yang belum

terjangkau Sekolah Menengah Atas. Selama tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah membangun 2 Unit Sekolah Baru (USB) sebagai berikut:

Tabel 3.77 Kegiatan Pembangunan Gedung

Kegiatan	Jumlah	Satuan	Kab/Kota
Pembangunan USB SMA di Rempang Galang	1	Unit	Batam
Lanjutan Pembangunan USB SLBN 2 Batam	1	Unit	Batam

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Berikut data jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jenjang SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau 5 Tahun terakhir (2021-2025)

Tabel 3.78 Jumlah Pembangunan USB Prov Kepri 2021-2025

Tahun	Jumlah Pembangunan USB			Jumlah
	SMA	SMK	SLB	
2021	0	0	0	**0**
2022	0	0	0	**0**
2023	2	1	0	**3**
2024	0	0	0	**0**
2025	1	0	1	**2**
Jumlah	**3**	**1**	**1**	**5**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Jenjang SMA/SMK/SLB

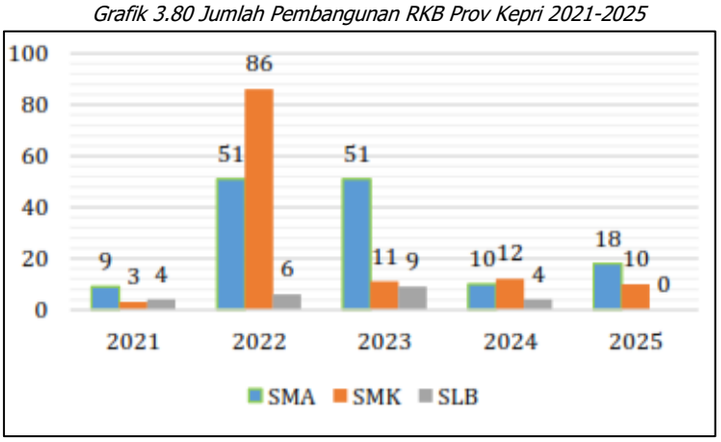
Pembangunan RKB pada jenjang SMA/SMK/SLB merupakan upaya strategis dalam menjamin keberlangsungan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berkualitas. Ketersediaan ruang kelas yang memadai mendorong akses pendidikan yang lebih luas serta mengurangi risiko penolakan siswa akibat keterbatasan ruang. Selama tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah membangun sebanyak 28 RKB sebagai berikut:

Tabel 3.79 Pembangunan RKB di Prov Kepri

Kegiatan	Jumlah	Satuan	Kab/Kota
Pembangunan RKB SMAN 25 Batam	6	Ruang	Batam
Pembangunan RKB SMAN 26 Batam	6	Ruang	Batam
Pembangunan RKB SMAN 29 Batam	4	Ruang	Batam
Pembangunan RKB SMAN 1 Bintan Utara	2	Ruang	Bintan
Pcmbangunan RKB SMKN 10 Batam	6	Ruang	Batam
Pembangunan RKB SMKN 11 Batam	4	Ruang	Batam
Jumlah	**28**	**Ruang**	

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 3.80 Jumlah Pembangunan RKB Prov Kepri 2021-2025



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



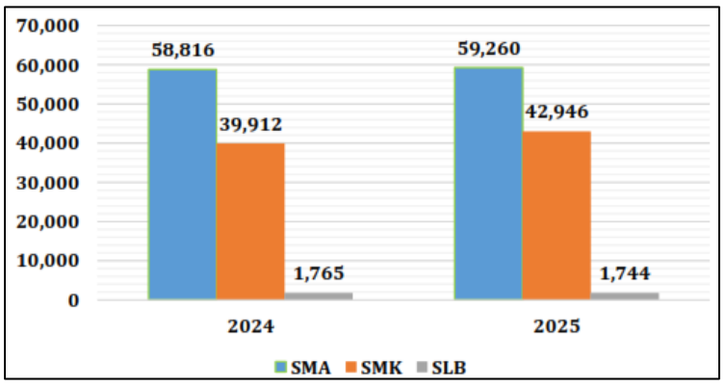
Gambar 3.2.3.6.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2025

3. Pembebasan SPP untuk SMA/SMK/SLB Negeri

   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Kebijakan Pembebasan SPP SMA/SMK/SLB Negeri melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikah (SPP) pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai solusi terhadap kesenjangan akses pendidikan, khususnya pada jenjang SMA/SMK/SLB.

   Pembebasan SPP bagi SMA/SMK/SLB Negeri merupakan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjamin akses pendidikan menengah yang adil dan berkelanjutan. Diharapkan pembebasan SPP dapat menghilangkan hambatan biaya sehingga seluruh peserta didik, termasuk dari keluarga kurang mampu, dapat mengakses pendidikan menengah. Keringanan biaya pendidikan mendorong lulusan SMP/MTs untuk melanjutkan ke SMA/SMK/SLB dan menekan angka tidak melanjutkan sekolah. Berikut adalah data jumlah Siswa Penerima SPP Gratis Jenjang SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau 2 Tahun terakhir (2024-2025).

Grafik 3.81 Jumlah Siswa Penerima SPP Gratis 2024-2025



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

4. Bantuan Seragam Gratis Bagi Peserta Didik baru SMA/SMK dan SLB

   Bantuan seragam gratis bagi peserta didik baru SMA/SMK dan SLB merupakan kebijakan afirmatif yang berorientasi pada keadilan sosial dan perluasan akses pendidikan. Ketersediaan seragam gratis dapat menghilangkan hambatan ekonomi sehingga peserta didik lebih siap dan percaya diri untuk bersekolah. Bantuan seragam juga menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga keberlanjutan pendidikan menengah. Selama tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan bantuan seragam sekolah sebanyak 29.312 Paket sebagai berikut:

Tabel 3.82 Bantuan Seragam Gratis

Kegiatan	Jumlah 2024	Jumlah 2025	Satuan	Anggaran	Keterangan
Pemberian Bantuan Seragam SMA	16.675	16.514	Paket	5.337.495.000	Siswa baru SMA Negeri se-Kepri
Pemberian Bantuan Seragam SMK	10.678	12.500	Paket	3.750.000.000	Siswa baru SMK Negeri se-Kepri
Pemberian Bantuan Seragam SLB	2.128	298	Paket	440.350.200	Siswa Baru SLB Negeri se-Kepri

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 3.83 Penyerahan Seragam Sekolah Gratis

5. Bantuan Transportasi Darat dan Laut, Bantuan Diklat, Bantuan Magang/PKL, serta Bantuan makan dan minum peserta didik

   Selama tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah melaksanakan berbagai kegiatan pemberian bantuan dalam rangka mendukung Peningkatan APS SMA/SMK, sebagai berikut:

Tabel 3.84 Jumlah Bantuan Seragam Gratis

Kegiatan	Jumlah	Satuan	Anggaran (Rp.)	Kab/Kota
Bantuan Transportasi Darat Siswa SMA	135	Peserta Didik	281.025.000,00	Bintan, Natuna, Anambas
Bantuan Transportasi Laut Siswa SMA	1.927	Peserta Didik	6.963.825.000,00	7 Kab/Kota
Bantuan Transportasi Laut SMK	457	Peserta Didik	1.100.000.000,00	Anambas, Karimun, Lingga
Bantuan diklat kepelautan/buku pelaut SMK	66	Peserta Didik	396.000.000,00	Tanjungpinang
Bantuan praktek kerja lapangan peserta didik SMK	722	Peserta Didik	400.000.000,00	7 Kab/kota
Bantuan makan dan minum peserta didik SMK di Natuna	151	Peserta Didik	300.000.000,00	Natuna

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau, dalam upaya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SMA/SMK sepanjang Tahun 2025 juga ditopang oleh peran aktif Kesetaraan *Gender*. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada perlindungan hak anak, penguatan ketahanan keluarga, serta pencegahan faktor sosial yang berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah menengah.

Melalui kegiatan pencegahan perkawinan anak, penguatan peran keluarga dalam pengasuhan, serta perlindungan terhadap anak berisiko putus sekolah, perangkat daerah ini berkontribusi langsung dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi

keberlanjutan pendidikan peserta didik. Upaya tersebut menjadi sangat strategis mengingat faktor sosial, psikologis, dan keluarga merupakan salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi sekolah pada kelompok usia 16–18 tahun.

Selain itu, program peningkatan kapasitas keluarga dan pengendalian penduduk turut berperan dalam meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan menengah sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Dengan semakin kuatnya dukungan keluarga terhadap keberlanjutan sekolah anak, risiko putus sekolah dapat ditekan secara signifikan.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebagai berikut:



Gambar 3.85 Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut:



Gambar 3.86 Alternatif solusi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 3.87 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	365.322.687.666,79	302.664.866.696,98	82,85
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	187.656.000,00	153.676.514,00	81,89
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000,00	26.028.317,00	61,33
Progran Pengembagan Kurikulum	114.475.500,00	70.519.443,00	61,60
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	98,77
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	200.000.000,00	179.662.109,00	89,83
Total	**368.268.278.161,79**	**305.381.433.566,98**	**82,92**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp368.268.278.161,79 terealisasi sebesar Rp305.381.433.566,98 atau 82,92%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp62.886.844.594,81 (17,08%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK (88,24%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (82,92%) dengan efesiensi 5,3%.

3.2.3.7 Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

3.2.3.7.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 94,20 Indeks dari target sebesar 93,57 Indeks dan terealisasi sebesar 100,67%.

Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keseimbangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG menunjukkan sejauh mana pembangunan

mampu menghadirkan kesempatan dan hasil yang setara bagi kedua gender, sehingga menjadi gambaran penting terkait keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Semakin tinggi nilai IPG, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yang menandakan terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif, adil, dan mendukung pemberdayaan gender dalam berbagai sektor kehidupan.

Untuk menghitung IPG, menggunakan dimensi yang sama dengan Pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan (Angka Harapan Hidup), dimensi pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah) dan dimensi ekonomi (Pengeluaran Per Kapita) yang dihitung terpisah untuk penduduk perempuan dan laki-laki.

Formula IPG

IPG = (IPM Perempuan / IPM Laki-laki) × 100

Penjelasan Teknis

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesetaraan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. IPG dihitung dengan membandingkan nilai **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan** terhadap **IPM Laki-laki**, kemudian dikalikan 100.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Meningkatnya kuallitas hidup Perempuan dan Anak dilihat dari Angka Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024 baru dikeluarkan oleh BPS pada Agustus 2026. Realisasi indikator Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 94,20 indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 93,57 Indeks sehingga capaian kinerja sebesar 100,67% atau dalam kategori "Sangat Baik."

Tabel 3.88 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025

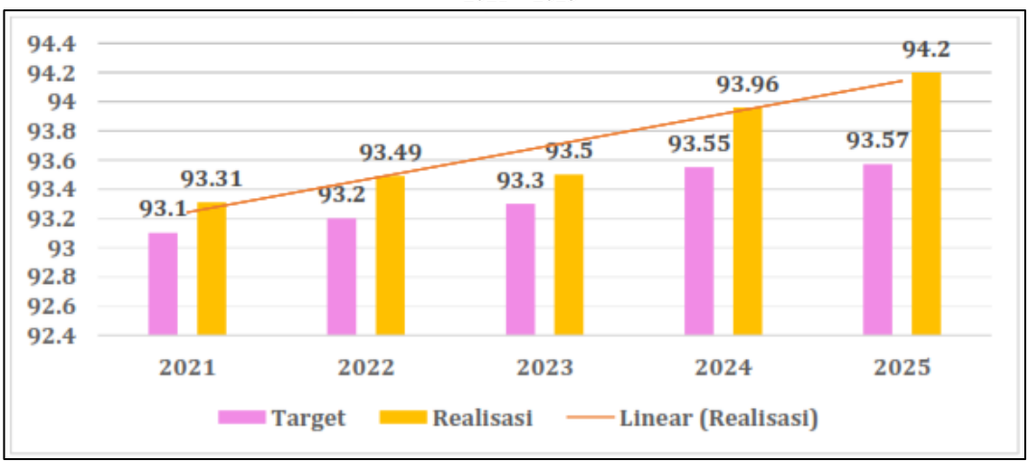
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Gender	93,57 Indeks	94,20 Indeks	100,67%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, target Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar 93,57, dengan realisasi 94,20 atau tingkat capaian kinerja 100,67%. Capaian ini menunjukkan kinerja indikator berada pada kategori melampaui target, yang mengindikasikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pengarusutamaan gender dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan *gender* di Provinsi Kepulauan Riau.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 3.89 Tren Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 – 2025



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Prov. Kepri

Tabel 3.90 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Capaian IPG				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kepulauan Riau	93,31	93,49	93,5	93,96	94,20
2	Karimun	91,25	91	91,12	91,33	91,61
3	Bintan	93,12	93,53	93,78	93,93	94,05
4	Natuna	91,67	91,95	91,86	92,07	91,82
5	Lingga	89,25	89,73	90,48	90,75	91,12
7	Kep. Anambas	90,27	90,3	91,14	91,25	91,58
8	Batam	94,43	94,51	94,75	94,95	95,72
9	Tanjungpinang	96,79	97,14	97,14	96,96	97,02

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Prov. Kepri

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan menunjukan tren positif dan bahkan capaian IPG Nasional tahun 2025. Secara data capaian, pertumbuhan IPG Kepri dipimpin oleh Kota Tanjungpinang yang secara konsisten memiliki nilai indeks tertinggi di tingkat provinsi, sementara daerah lain terus melakukan revisi perencanaan untuk mengejar ketertinggalan.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Jika dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 94,20, dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 93,60, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Dengan capaian sebesar 100%, kinerja IPG dinilai mendekati target akhir RPJMD.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Selain gambaran capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau, juga disajikan posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam capaian IPG pada tingkat nasional, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.91 Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se-Indonesia Tahun 2025

RANGKING	PROVINSI	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2025
	INDONESIA	91,85
1	DKI JAKARTA	95,56
2	SULAWESI UTARA	95,48
3	SUMATERA BARAT	95,25
4	DI YOGYAKARTA	95,10
5	BALI	95,10
6	**KEPULAUAN RIAU**	**94,20**
7	Nusa Tenggara Timur	93,77
8	Maluku	93,73
9	Sulawesi Selatan	93,53
10	Sumatera Selatan	93,22
11	Jawa Tengah	93,00
12	Sulawesi Tengah	92,89
13	Aceh	92,64
14	Banten	92,52
15	Jawa Timur	92,19
16	Bengkulu	91,65

RANGKING	PROVINSI	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2025
17	Nusa Tenggara Barat	91,54
18	Sulawesi Tenggara	91,53
19	Sumatera Utara	91,50
20	Lampung	90,93
21	Maluku Utara	90,91
22	Sulawesi Barat	90,60
23	Jawa Barat	90,39
24	Papua	90,30
25	Kep. Bangka Belitung	90,21
26	Kalimantan Selatan	89,94
27	Kalimantan Tengah	89,62
28	Jambi	89,50
29	Riau	89,32
30	Kalimantan Utara	88,77
31	Gorontalo	88,64
32	Kalimantan Barat	88,20
33	Kalimantan Timur	87,45
34	Papua Pegunungan	87,25
35	Papua Barat Daya	84,27
36	Papua Selatan	83,76
37	Papua Barat	82,26
38	Papua Tengah	81,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 94,20 indeks jauh diatas angka capaian Nasional yaitu sebesar 91,85 indeks, kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat serius dalam memperhatikan kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Serta jika di dilhat dari tabel diatas, untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan Provinsi se-Sumatera, maka Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 berada pada urutan ke-2. Berikut data lengkap dari seluruh Provinsi se-Sumatera:

Tabel 3.92 Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se-Sumatera Tahun 2025

RANGKING	PROVINSI	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2025
1	SUMATERA BARAT	95,25
2	**KEPULAUAN RIAU**	**94,20**
3	SUMATERA SELATAN	93,22
4	ACEH	92,64
5	BENGKULU	91,65
6	SUMATERA UTARA	91,50
7	LAMPUNG	90,93
8	KEP. BANGKA BELITUNG	90,21
9	JAMBI	89,50
10	RIAU	89,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Dimensi Kesehatan (Angka Harapan Hidup) antara lain:

a. Angka Harapan Hidup: Perbaikan kualitas layanan kesehatan meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) sehingga derajat Kesehatan dan umur Panjang Perempuan dan laki-laki penduduk Kepri semakin membaik.
b. Sistem Kesehatan Inklusif: Penguatan sistem kesehatan yang lebih responsif dan inklusif menjadi fokus pemerintah untuk mempertahankan tren positif IPG.

2. Penguatan Dimensi Pendidikan (HLS dan RLS) antara lain:
   a. Akses dan Fasilitas: Adanya perbaikan berkelanjutan pada sarana dan prasarana sekolah serta ketersediaan bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu untuk jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
   b. Indikator Pendidikan: Peningkatan pada Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi motor penggerak indeks pengetahuan.
3. Peningkatan Dimensi Standar Hidup Layak (Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan)
   a. Pelatihan Kemandirian Ekonomi: Menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis seperti tata boga dan menjahit bagi perempuan dalam upaya pemningkatan kualitas keluarga untuk meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan dalam ekonomi keluarga dan penyelenggaraan sekolah Perempuan paket C bagi Perempuan kelompok rentan yang putus sekolah.
   b. Penurunan Kemiskinan: Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah se Sumatera dan posisi ke-4 secara nasional, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 117,28 ribu orang (4,44 persen), berkurang 7,7 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2024 yang sebesar 124,96 ribu orang (4,78 persen).
   c. Kolaborasi *Stakeholder* dan Fokus Pembangunan Daerah: Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta (terutama di pusat industri seperti Batam), dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi serta kebijakan dalam RKPD 2026 yang lebih tajam dalam menangani isu-isu dasar pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota.

Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan dukungan pada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang memiliki peran strategis dalam mendukung capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang kini berstatus "Sangat Tinggi" di tahun 2025. Kontribusi utama berfokus pada Dimensi Pendidikan (Rata-rata lama Sekolah) dan Dimensi Standar Hidup Layak (Pengeluaran Per Kapita) melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan yang dilaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi keMasyarakatan dengan sasaran penguatan kapasitas bagi organisasi Wanita sebanyak 74 organisasi dengan Lokasi pelaksanaan di Kota Tanjungpinang.
2. Program peningkatan kualitas keluarga dengan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dan mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak dengan sasaran pelatihan dan peningkatan *lifeskill* serta bantuan alat pendukung bagi ibu-ibu rumah tangga berupa pelatihan tata boga dan menjahit sebanyak 610 peserta dengan Lokasi pelaksanaan di Kota Batam.
3. Serta kegiatan untuk mendukung penguatan dimensi Pendidikan yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yakni Sekolah Perempuan bagi kelompok rentan yang putus sekolah dengan lokasi pelaksanaan di Tanjungpinang dan Bintan yang berjumlah 35 Orang peserta remaja putus sekolah, Dimana mereka selain dapat melanjutkan Pendidikan pada paket C dan diberikan pelatihan membatik untuk meningkatkan *lifeskill.*
4. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk menumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.

5. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan berbasis gender untuk mendorong peningkatan kualitas SDM Perempuan dan produktivitas usaha.

Upaya peningkatan kinerja Indeks Pembangunan Gender melibatkan berbagai lintas sektor Selain melalui urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Tahun 2025 juga ditopang oleh peran aktif beberapa Perangkat Daerah, antara lain:

1. Pada urusan Pendidikan, upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan IPG, antara lain:
    a. Pemerataan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya.
    b. Melanjutkan program Pembebasan SPP, Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
    c. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.
2. Peran Dinas Kesehatan, upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan IPG, antara lain:
    a. Melaksanakan desiminasi hasil pelaksanaan AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons) di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bahan pembelajaran agar kasus kematian serupa tidak terjadi lagi dan AMPSR dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
    b. Berkolaborasi dengan organisasi profesi seperti IBI, IDAI, dan POGI dalam melakukan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan reproduksi.
    c. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu dan anak ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan puskesmas.
    d. Melakukan *feedback* data program pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkala.
3. Peran Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka meningkatkan IPG, antara lain:
    a. Tingginya proporsi pelaku UMKM perempuan, khususnya pada sektor perdagangan, kuliner, dan industri rumah tangga;
    b. Proporsi keterlibatan perempuan dalam kepengurusan Koperasi;
    c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perempuan sebagai penggerak ekomoni keluarga dengan berkoperasi dan berwirausaha.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai berikut:

1. Kesenjangan akses pendidikan dimana partisipasi pendidikan perempuan, terutama pada jenjang menengah dan tinggi, masih lebih rendah serta angka putus sekolah perempuan relatif lebih tinggi akibat faktor ekonomi, pernikahan dini dan beberapa permasalahan lainnya yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.;
2. Ketimpangan partisipasi dan akses ekonomi yang berdampak pada Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, perempuan banyak bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tanpa perlindungan sosial dan akses perempuan terhadap modal usaha, pelatihan, dan teknologi masih terbatas;
3. Rendahnya pendapatan ekonomi perempuan dilihat dari rendahnya angka rata-rata pengeluaran perkapita perempuan dimana hal ini dikarenakan kurangnya

perempuan untuk bekerja pada sektor formal. Hal ini dikarenakan pengeluaran perkapita adalah proksi dari pendapatan atau tingkat kesejahteraan secara ekonomi;

4. Masih banyaknya perempuan yang enggan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas khususnya dibidang ekonomi;
5. Pembinaan dan pendampingan lebih lanjut belum optimal dilakukan terhadap peserta peningkatan kapasitas baik ekonomi maupun sosial karena terkendala dengan lingkup jangkauan dinas;
6. Program kesehatan reproduksi calon pengantin dan *skrining* layak hamil pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum berjalan optimal;
7. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam program pelayanan kesehatan ibu, anak, serta reproduksi belum optimal;
8. Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di sebagian fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi;
9. Belum optimalnya peran ekonomi perempuan dalam koperasi dan UKM sebagai pengungkit IPG;
10. Kepengurusan dan posisi strategis koperasi masih didominasi laki-laki dan Perempuan sering ditempatkan pada fungsi administratif, bukan pengambil keputusan;
11. Perempuan pelaku UKM masih dominan di skala mikro dengan nilai tambah dan omzet rendah;
12. Kurangnya pemahaman pelaku UKM Perempuan tentang literasi keuangan, manajemen usaha, dan *digital marketing*;
13. Rendahnya dukungan keluarga terhadap perempuan sebagai wirausaha utama.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meninghkatkan pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan berbagai langkah strategis yang diarahkan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan program., kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya-upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor;
   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui perangkat daerah terkait akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas;
   Perbaikan kinerja akan dilakukan melalui optimalisasi pelaksaan program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, termasuk peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta penguatan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
   Upaya peningkatan kinerja juga akan difokuskan pada penguatan sistem layanan perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kapasitas lembaga layanan, penguatan mekanisme penanganan kasus, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan.
4. Penguatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
   Dalam rangka mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan daerah, akan dilakukan penguatan implementasi pengarusutamaan gender melalui peningkatan

kapasitas daerah, penguatan kelembagaan PUG, serta integrasi perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

5. Peningkatan efektivitas program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   Upaya perbaikan kinerja juga akan dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, penguatan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pengendalian penduduk.
   Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja;
6. Dalam rangka memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian indikator kinerja perangkat daerah.
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
   Peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan teknis kepada pengelola program di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan terus dilakukan guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah dan dalam mendukung sasaran kinerja kepala daerah dan/atau Nasional serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk dan keluargaberencana di Provinsi Kepulauan Riau.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

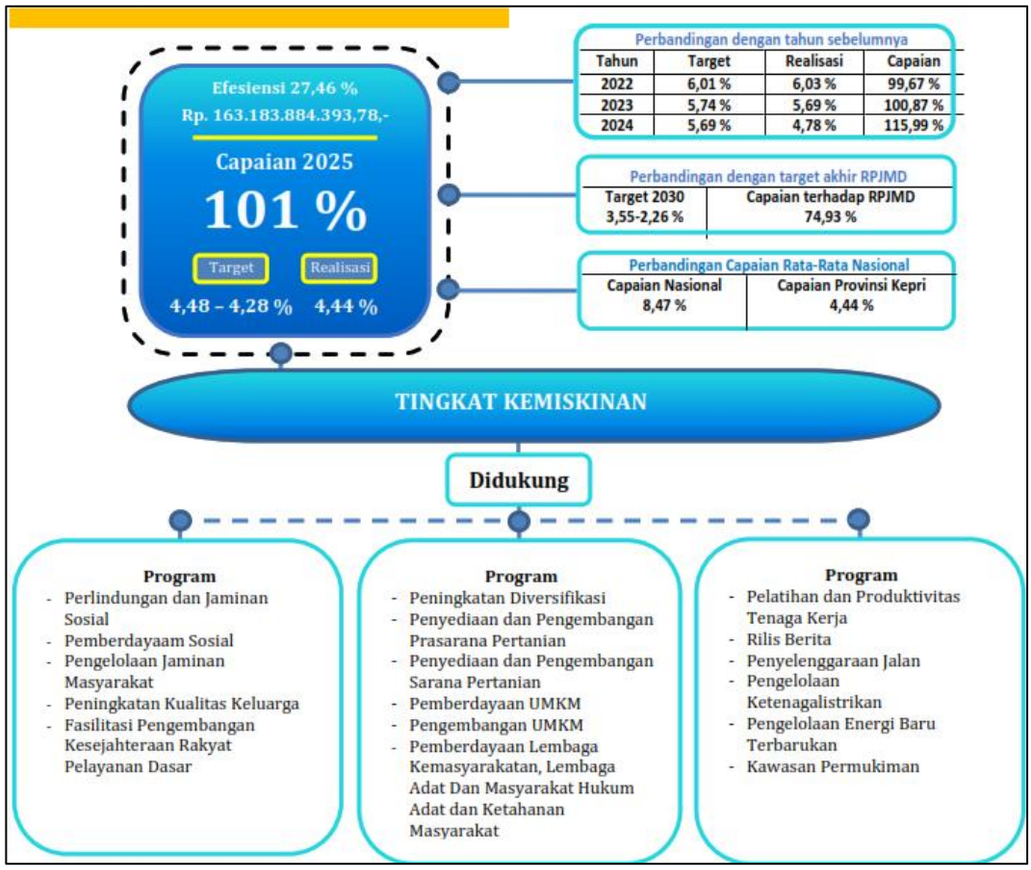
Tabel 3.93 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	98,77
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	200.000.000,00	179.662.109,00	89,83
Program Pengelolaan Pendidikan	365.322.687.666,00	302.664.866.696,00	82,85
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	187.656.000,00	153.676.514,00	81,89
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000,00	26.028.317,00	61,33
Progran Pengembagan Kurikulum	114.475.500,00	70.519.443,00	61,60
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	360.265.470,00	337.725.150,00	93,74
Program Pemberdayaan UMKM	17.068.663.172,00	14.573.871.921,00	85,38
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100.063.100,00	99.200.000,00	99,14
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.606.117.098,00	2.279.207.603,00	87,46
Total	**388.403.387.002,00**	**322.671.438.241,00**	**83,08**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp388.403.387.002,00 terealisasi sebesar Rp322.671.438.241,00 atau 83,08%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp65.731.948.761,00 (16,92%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (100,67%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (83,08%) dengan efesiensi 17,59%.

3.2.3.8 Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

3.2.3.8.1 Tingkat Kemiskinan



Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menurun. Tingkat Kemiskinan pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 4,44% (menggunakan target tertinggi) dari target sebesar 4,48 – 4,28% dan terealisasi sebesar 101%.

Perlu kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja, di mana indikator kinerja yang digunakan tetap sama namun mengalami penyesuaian pada penamaan serta target pencapaiannya. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta peningkatan akurasi dalam pengukuran kinerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada Indikator ini perjanjian kinerja murni tahun 2025 menjanjikan pencapaian indikator Angka Kemiskinan dengan target 5,63%, kemudian perjanjian kinerja mengalami perubahan dengan indikator Tingkat Kemiskinan dengan target menjadi 4,48-4,28%.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja terbaru sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Menurunnya tingkat kemiskinan dilihat dari Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 4,44% dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 4,48-4,28% (menggunakan target tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 101% atau dalam kategori “Sangat Baik”.

Tabel 3.94 Capaian PDRB Per Kapita

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Kemiskinan	4,48 – 4,28%	4,44%	101%

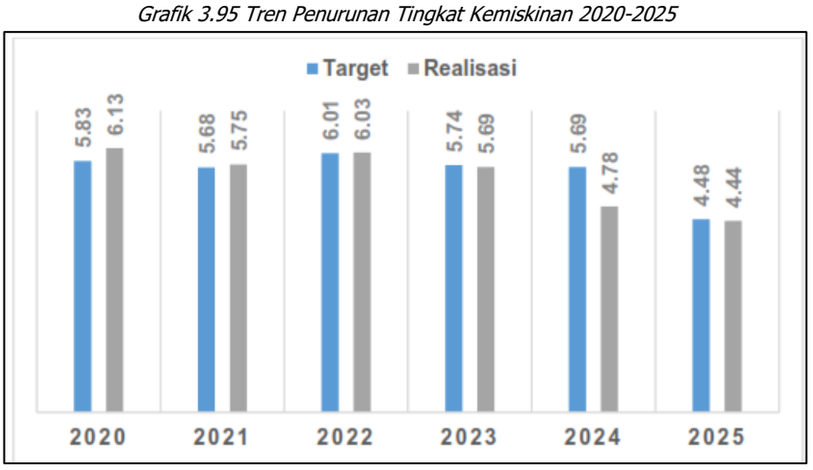
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Capaian ini mencerminkan perkembangan kondisi sosial-ekonomi yang relatif stabil dan terkendali sepanjang tahun 2025. Realisasi tingkat kemiskinan yang berada di dalam rentang target menunjukkan bahwa berbagai intervensi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan berjalan secara efektif, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin baru.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun secara konsisten dalam kurun waktu 2020-2025, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada masa pandemi. Dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.95 Tren Penurunan Tingkat Kemiskinan 2020-2025

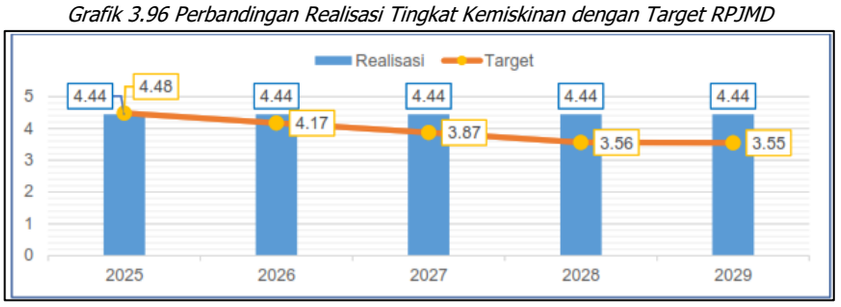


Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,44% dengan target sebesar 3,55-2,26% sehingga capaian kinerja sebesar 74,93%. (perhitungan menggunakan target tertinggi).

Grafik 3.96 Perbandingan Realisasi Tingkat Kemiskinan dengan Target RPJMD



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Pada tahun 2025, Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mencapai 4,44%, berada jauh di bawah realisasi kemiskinan nasional sebesar 8,47% serta melampaui target nasional pembangunan pada kisaran 7–8%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau sangat baik dan melampaui target nasional, mencerminkan kondisi sosial-ekonomi daerah yang relatif lebih kuat dibandingkan rata-rata nasional. Keberhasilan tersebut didukung oleh struktur ekonomi daerah yang produktif, ketersediaan lapangan kerja, serta efektivitas intervensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kedepan, kebijakan penurunan kemiskinan perlu terus diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan

pemerataan pembangunan antarwilayah. Posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam Tingkat Kemiskinan di level nasional, dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.97 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Se-Indonesia Semester I Tahun 2025

NO URUT	PROVINSI	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEMESTER 2
1	BALI	3,72
2	KALIMANTAN SELATAN	3,84
3	DKI JAKARTA	4,28
4	KEP. RIAU	4,44
5	KEP. BANGKA BELITUNG	5
…	…	…
37	PAPUA TENGAH	28,9
38	PAPUA PEGUNUNGAN	30,03
	INDONESIA	8,47

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor Utama Penyebab Penurunan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat: Ekonomi Kepri mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 5,16% pada triwulan I 2025 dan melonjak hingga 7,48% pada triwulan III 2025, menjadikannya yang tertinggi di Sumatera;
2. Penyaluran Bantuan Sosial yang Efektif: Pemberian bantuan pemerintah, termasuk bantuan non- tunai dan jaring pengaman sosial yang terintegrasi dengan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), memberikan dampak signifikan dalam menekan beban pengeluaran masyarakat miskin;
3. Peningkatan Upah Buruh: Rata-rata upah buruh di Kepri tumbuh sebesar 6,73% dalam periode Februari 2024 hingga Februari 2025, yang meningkatkan daya beli masyarakat.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperbaiki kinerja kedepan dalam mengatasi kemiskinan, sebagai berikut:

1. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, melalui peningkatan kualitas bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
2. Melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin secara berkala dan Mengintegrasikan sistem informasi antar-instansi;
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes dengan membentuk *pilot project* BUMDes di setiap kecamatan se-Kabupaten;
4. Memberdayakan masyarakat kelompok rentan melalui pelatihan vokasi, penempatan kerja, kewirausahaan tenaga kerja, serta peningkatan upah dan produktivitas;
5. Menggunakan kanal resmi portal web Kepri dan media sosial untuk menyebarkan info lowongan kerja, pelatihan BLK (Balai Latihan Kerja), dan program beasiswa secara massif dan mengoptimalkan aplikasi SP4N-LAPOR;
6. Pemasangan baru listrik (BPBL) sebanyak 460 unit yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
7. Penguatan Arah Kebijakan Pertanian dengan Penguatan Akses Permodalan Petani, Peningkatan Kualitas SDM Petani, Perlindungan Sosial dan Mitigasi Risiko;
8. Mengembangkan inovasi pemberdayaan perempuan, termasuk pelatihan kewirausahaan dan akses pasar digital;
9. Memperluas cakupan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin, Pemerataan sarana dan Prasana Pendidikan.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

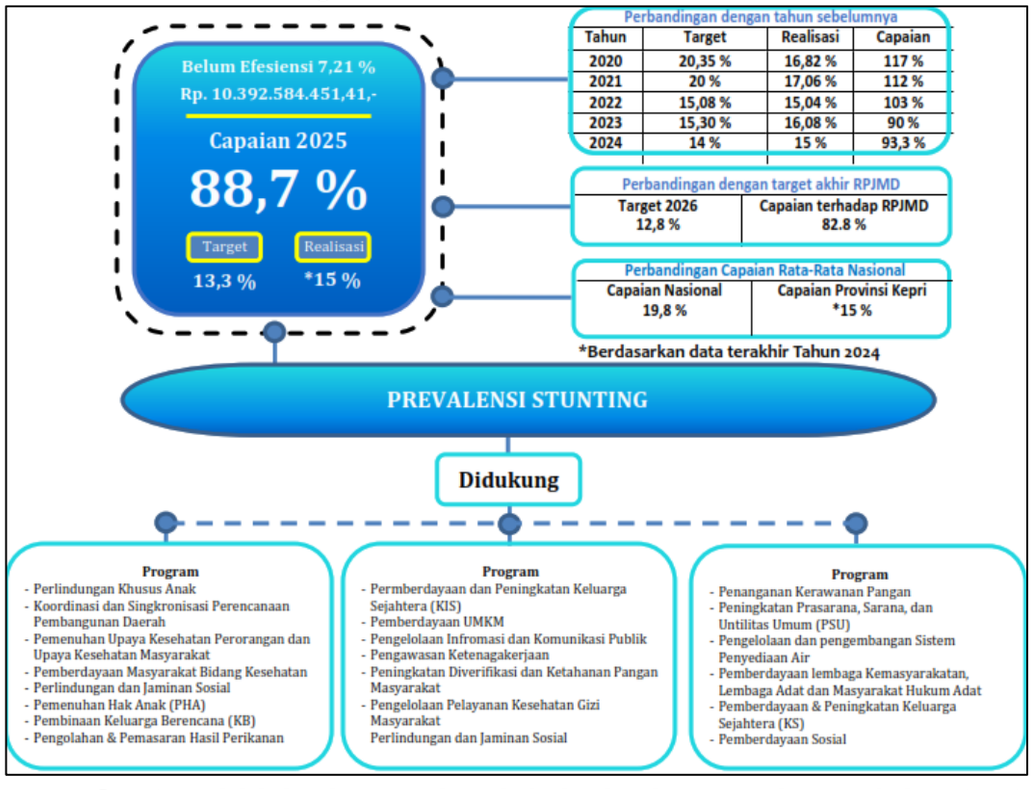
Tabel 3.98 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.757.605.625,00	3.530.534.795,00	94,00
Program Pemberdayaan Sosial	600.895.841,00	596.713.086,00	99,00
Program Pengelolaan Jaminan Masyarakat	26.251.486.888,00	25.214.265.725,00	96,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.814.930.080,00	1.774.748.851,00	98,00
Program Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	2.998.500.000,00	2.998.500.000,00	100,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	108.979.800,00	104.658.962,00	96,00
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	479.411.260,73	429.088.592,00	90,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.347.986.248,00	1.390.236.920,00	26,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.267.421.214,00	836.834.500,00	66,00
Program Pemberdayaan UMKM	17.068.663.172,00	14.573.871,92	0,08
Program Pengembangan UMKM	6.300.621.261,00	3.851.740,27	0,08
Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	97,00
Program Rilis Berita	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Program Penyelenggaraan Jalan	49.854.264.462,00	44.032.581.032,00	70,00
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	7.032.813.319,00	6.812.181.216,00	97,00
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	25.899.052.024,00	18.229.179.494,00	70,00
Program Kawasan Permukiman	8.327.386.499,05	8.113.329.014,00	97,00
Total	**163.183.884.393,78**	**119.998.726.381,19**	**73,54**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp163.183.884.393,78 terealisasi sebesar Rp119.998.726.381,19 atau 73,54%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp43.185.158.012,59 (26,46%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan (101%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (73,54%) dengan efesiensi 27,46%.

3.2.3.9 Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

3.2.3.9.1 Prevalensi Stunting



Stunting adalah keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya, di mana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan *eye contact*, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat. Realisasi Prevalensi Stunting pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 15% dari target sebesar 13,3% dan terealisasi sebesar 88,7% .

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan, yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Stunting tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan fisik, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas di masa depan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai, infeksi berulang, serta pola asuh dan sanitasi yang kurang baik. Reduksi stunting menjadi prioritas pembangunan karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi bangsa.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.99 Capaian Prevalensi Stunting

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prevalensi Stunting	13,3%	15%	88,7%

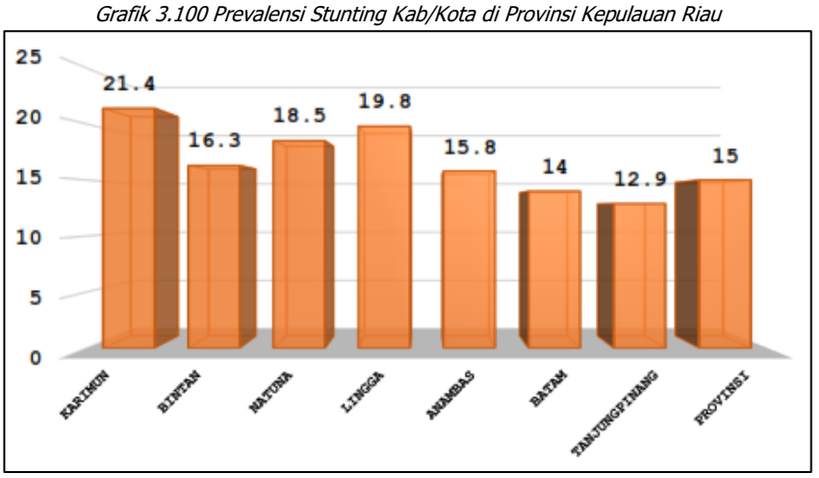
Sumber : Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan yang belum maksimal. Realisasi indikator Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 15% dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 13,3% sehingga capaian kinerja sebesar 88,7% atau dalam kategori “Baik”.

Data diatas berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024, karena tahun 2025 Pemerintah tidak melakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Kepulauan Riau sebesar 15%. Apabila dilihat Prevalensi stunting Per Kab/Kota,

kabupaten Karimun mengalami permasalahan stunting tertinggi yaitu sebesar 21,4 dan Kota Tanjungpinang menagalami kasus stunting terendah yaitu sebesar 12,9 hal ini terlihat dari grafik berikut:

Grafik 3.100 Prevalensi Stunting Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

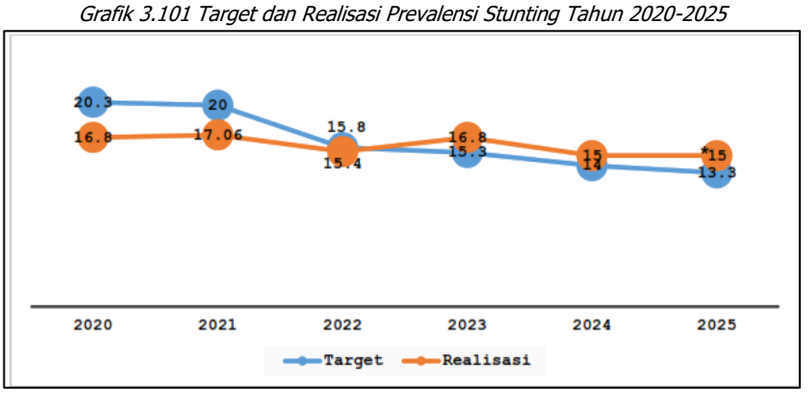


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya mengalami turun dan naik, terlihat dengan perbandingan prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2020-2024. Sebagaimana dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.101 Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2020-2025

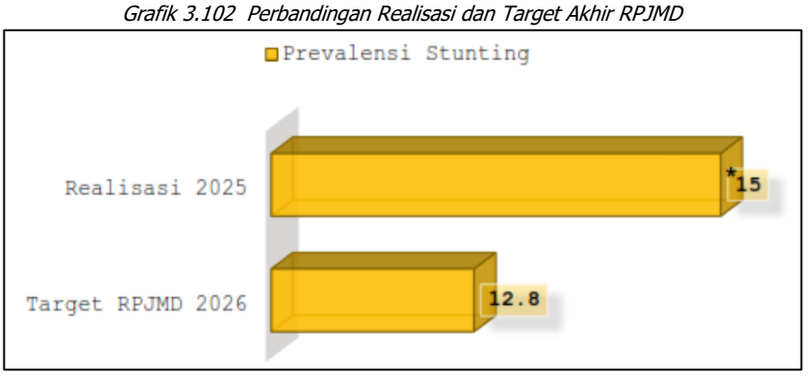


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan grafik diatas, dalam jangka lima tahun terakhir Realisasi Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan tahun 2023 dan mengalami penurunan pada pada tahun 2024 sebesara 1.8 poin, Namun dilihat dalam tiga tahun terakhir realisasi Prevalensi Stunting berada diatas target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukan kinerja yang belum maksimal dalam penurunan stunting.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Grafik 3.102 Perbandingan Realisasi dan Target Akhir RPJMD



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Target prevalensi stunting yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2024–2026 dengan target 2026 adalah sebesar 12,8, capaian prevalensi stunting tahun 2025 sebesar 15. Dengan demikian, apabila di bandingkan capaian dengan target tahun 2026

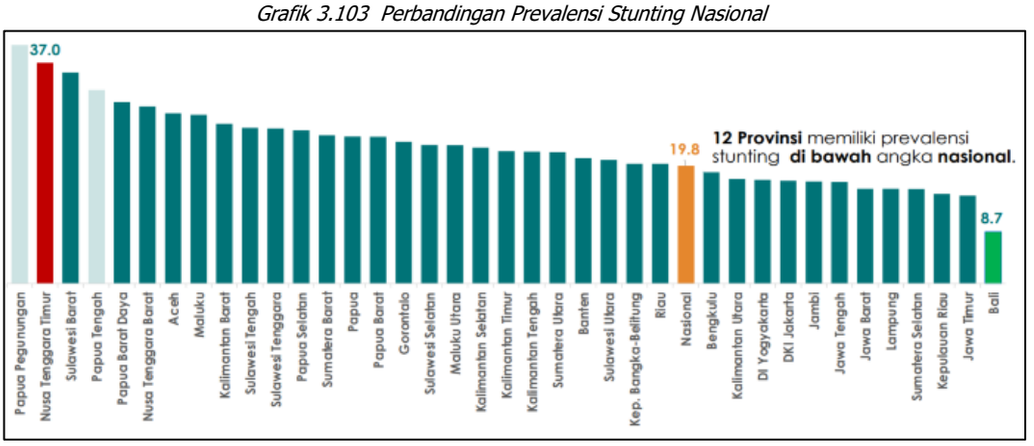
capaian kinerja mencapai 82.8%, yang menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai.

Belum tercapainya target tersebut mengindikasikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi capaian antara lain belum optimalnya cakupan dan kualitas intervensi gizi spesifik, seperti pemantauan pertumbuhan belum optimal di tandai dengan meningkatknya balita yang ditimbang tidak naik berat badannya, pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil berisiko, serta pemberian Pemberian Makan Pangan Khusus (PMPK) kepada Balita stunting.

Selain itu, intervensi gizi sensitif yang mendukung penurunan stunting, seperti akses sanitasi layak, ketersediaan air bersih, serta perubahan perilaku masyarakat terkait pola asuh dan konsumsi pangan bergizi, belum berjalan merata di seluruh wilayah. Disparitas antarwilayah dan keterbatasan sumber daya di beberapa daerah turut berkontribusi terhadap belum optimalnya capaian indikator stunting *Bottom of Form.*

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Grafik 3.103 Perbandingan Prevalensi Stunting Nasional



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada Tahun 2025, capaian prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 15%. Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 18,8% capaian Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan capaian kinerja 125,3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah berada sesuai ambang target nasional, yang mengindikasikan kinerja yang sangat baik dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan berbagai intervensi percepatan penurunan stunting, baik intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan, serta peningkatan peran lintas sektor menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian tersebut.

Meskipun capaian Provinsi Kepulauan Riau telah melampaui target nasional, upaya penurunan stunting tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah dan memastikan keberlanjutan program. Penguatan intervensi pada kelompok sasaran berisiko, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), menjadi kunci untuk menjaga tren penurunan stunting secara konsisten.

Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat komitmen dan strategi dalam mencapai target penurunan stunting yang lebih rendah pada periode selanjutnya.

Stunting disebabkan oleh banyak faktor bukan hanya faktor kesehatan saja melainkan faktor multi sektor. Beberapa penyebab stunting diantaranya adalah praktek pengasuhan yang tidak baik seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, bayi 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita tidak mendapatkan MP-ASI yang padat gizi.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis dari beberapa indikator penyebab stunting dilihat dari intervensi SPESIFIK, peningkatan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya:

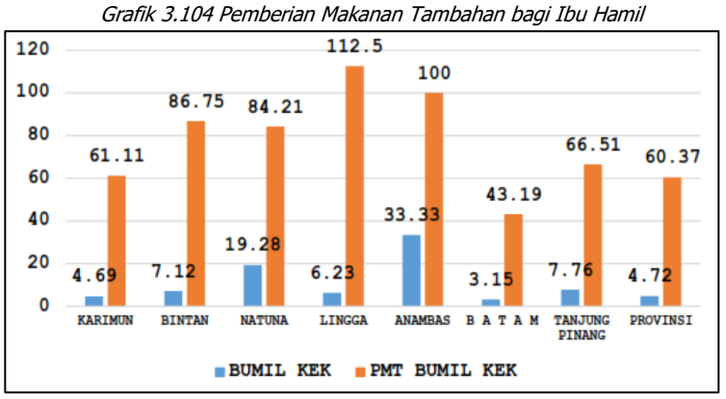
1. Praktek pengasuhan yang tidak baik seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan;
2. Bayi 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita tidak mendapatkan MP-ASI yang padat gizi;
3. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (*Ante Natal Care*);
4. Ibu hamil belum patuh dalam mengkonsumsi suplemen zat besi;
5. Menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu;
6. Kurangnya akses Ibu hamil dan balita ke makanan bergizi seperti makanan bergizi mahal, rendah.
7. Akses Air Bersih & Sanitasi: setiap keluarga miskin belum sepenuhnya memiliki akses air bersih & sanitasi, faktor ini krusial untuk mencegah infeksi penyebab stunting;
8. Kesehatan Ibu & Anak (KIA) & KB: tingkat pertumbuhan anak yang belum mencapai target, mengindikasikan kurangnya cakupan layanan KIA/KB;
9. Peningkatan Ekonomi & Kesejahteraan: Program seperti PKH membantu, namun kemiskinan tetap menjadi akar masalah, ditambah kurangnya pemahaman tentang konsumsi pangan bergizi;
10. Pendidikan & Pengetahuan Ibu: Pendidikan ibu dan pengetahuan tentang gizi seimbang, ASI eksklusif, MPASI dini, serta kebersihan lingkungan, masih menjadi tantangan utama.

Peningkatan Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau diakibatkan oleh beberapa faktor yang belum mencapai target pada tahun 2025 diantaranya:

1. Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

   PMT lokal bagi Ibu hamil bertujuan untuk mencapai kenaikan berat badan Ibu hamil sesuai dengan usia kehamilan dan memperbaiki status gizi. Sasaran kegiatan PMT lokal adalah Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan Ibu hamil risiko KEK. Pelaksanaan PMT lokal bagi Ibu hamil dimulai dengan kegiatan deteksi dini dan penemuan kasus melalui Antenatal (ANC) terpadu, tata laksana dan rujukan.

Grafik 3.104 Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data sigizikesga bulan november tahun 2025 terdapat 4,72% ibu hamil KEK di Provinsi Kepulauan Riau, prevalensi tertinggi di Kabupaten Anambas 33,3%. Target ibu hamil KEK mendapatkan PMT tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau adalah 84%, berdasarkan data di atas capaian bumil KEK dapat PMT di Provinsi Kepulauan Riau adalah 60,37% dan ada data outlier yaitu Kabupaten Lingga melebihi 100%.

Dari 7 Kabupaten/Kota terdapat belum ada yang mencapai target, beberapa penyebab tidak mencapai target adalah:

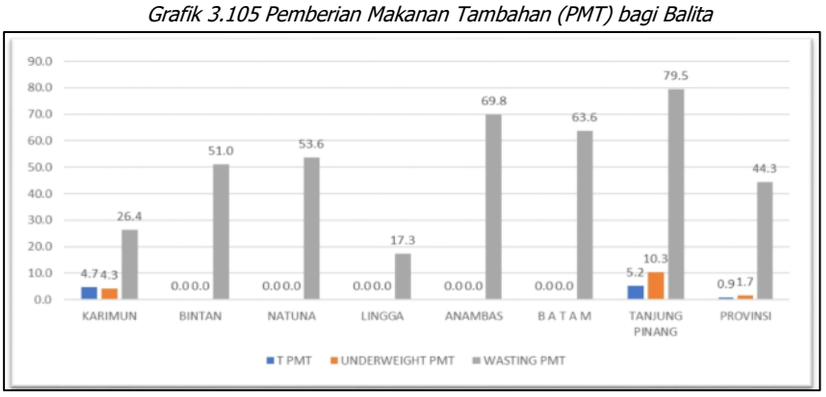
a. Bumil KEK ada yang menolak dengan alasan bosan dan tidak dapat menerima menu yang di sediakan karena masih mual;

b. Keterbatasan alat dan bahan dalam pembuatan PMT;
c. Petugas belum memahami mengenai pencatatan dan pelaporan;
d. Dana BOK untuk pengadaan PMT baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun, sedangkan kasus bumil KEK terdapat sepanjang tahun;
e. Terdapat Puskesmas yang tidak dapat memenuhi persyaratan sehingga tidak mendapatkan dana BOK;
f. Lokasi desa/kelurahan yang jauh dari Puskesmas induk dan tidak dapat di capai dengan jalan darat sehingga di daerah tersebut tidak dilakukan kegiatan PMT Bumil KEK;
g. Kekurangan SDM khususnya nutrisionis di Puskesmas;
h. *Drop Out* sasaran bumil KEK serta mobilitas yang tinggi.

2. Tatalaksana Balita dengan Masalah Gizi

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita bertujuan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi Balita melalui pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sasaran penerima makanan tambahan berbahan pangan lokal adalah Balita gizi kurang (*wasting*) baik dengan atau tanpa stunting, Balita berat badan kurang (*underweight*), dan Balita tidak naik berat badan (T) untuk mencegah Balita mengalami masalah gizi yang lebih berat

Grafik 3.105 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data di atas didapatkan balita T yang dapat PMT sebesar 0,9%, *underweight* mendapat PMT sebesar 1,7% dan wasting mendapat PMT sebesar 44,3%. Capaian ini masih jauh dari target yang ditentukan yaitu 65%. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain ketidaktepatan sasaran, yang disebabkan oleh perubahan data balita berisiko gizi serta belum sepenuhnya sinkronnya data antara posyandu, puskesmas, dan sistem pelaporan. Kondisi ini berpengaruh pada penentuan jumlah dan lokasi sasaran PMT Balita. Selain itu, kepatuhan konsumsi PMT oleh balita sasaran masih belum optimal. Beberapa balita tidak mengonsumsi PMT sesuai ketentuan, baik karena preferensi rasa, pola asuh keluarga, maupun kurangnya pemahaman orang tua tentang manfaat PMT dalam perbaikan status gizi.

Permasalahan lain adalah kendala distribusi dan ketersediaan PMT, khususnya di wilayah dengan akses geografis terbatas. Keterlambatan pengadaan dan distribusi menyebabkan waktu pemberian PMT tidak sesuai jadwal, sehingga berdampak pada efektivitas intervensi. Dari sisi pelaksanaan, masih ditemukan keterbatasan sumber daya, baik tenaga gizi maupun kader pendamping, serta belum optimalnya pemantauan dan evaluasi konsumsi PMT di tingkat lapangan. Edukasi dan pendampingan kepada keluarga sasaran juga belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar perlunya perbaikan strategi pelaksanaan PMT Balita kedepan, melalui penguatan validasi data sasaran, peningkatan kualitas pendampingan dan edukasi gizi, serta perbaikan sistem distribusi dan pemantauan agar PMT Balita dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap penurunan stunting.

Kendala lainnya yang di hadapi dalam penanganan stunting adalah : tenaga gizi terbatas, penimbangan balita masih rendah sehingga belum bisa menjangkau cakupan

seluruh sasaran balita, alat antropometri di Posyandu belum semua terstandar, masih terdapat Pengukuran BB dan TB yang dilakukan oleh kader yang belum terorientasi pemantauan pertumbuhan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Kinerja penurunan Prevalensi Stunting, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan upaya-upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting diantaranya :

1. Melakukan kegiatan GERCEP ANTING (Gerakan Cepat Pananganan Stunting) yaitu memberikan bantuan kepada keluarga Balita stunting di wilayah Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun. Tujuan dari pemberian bantuan adalah untuk meningkatkan asupan zat gizi pada Balita stunting yang dikarenakan keterbatasan ekonomi,pola asuh dan budaya. Adapun paket GERCEP ANTING yang diberikan berjumlah 400 paket yang diserahkan kepada 200 balita stunting di Kabupaten Karimun dan 200 balita stunting di Kabupaten Lingga;
2. Pengadaan Antropometri Kit dalam rangka pemantauan pertumbuhan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan alat ukur antropometri yang standar, akurat, dan memadai untuk mendukung pemantauan pertumbuhan dan penilaian status gizi bayi, balita, anak, dan ibu hamil. Lokasi pemberian bantuan ini adalah di 10 Puskesmas di Kabupaten Bintan yaitu Puskesmas Tanjung Uban, Puskesmas Tambelan, Puskesmas Mantang, Puskesmas Kelong, Puskesmas Kawal, Puskesmas Teluk Bintan, Puskesmas Teluk Sasah, Puskesmas Kijang, Puskesmas Toapaya dan Puskesmas Sri Bintan;
3. Pengadaan Hb meter bagi remaja putri yang digunakan untuk pemeriksaan kadar hemoglobin sebagai upaya deteksi dini dan penanggulangan anemia pada remaja putri. Paket HB meter ini di peruntukkan bagi remaja putri di Kota Batam dan Kabupaten Bintan dengan total 20 paket;
4. Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) stunting berupa alat SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) dan Konseling menyusui kit berjumlah 110 paket dengan lokus Kabupaten Bintan;
5. Memberikan bantuan paket pencegahan resiko stunting kepada Balita beresiko stunting dengan ekonomi yang lemah. Tujuan dari pemberian bantuan adalah untuk meningkatkan asupan zat gizi pada Balita resiko stunting (Balita T) yang dikarenakan keterbatasan ekonomi, pola asuh dan budaya. Pemberian ini akan diberikan kepada 767 balita resiko stunting selama dua siklus pemberian dimana dalam satu siklus pemberian selama 14 hari, sehingga total pemberian 28 hari.

Upaya-upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting yang dilaksanakan di Puskesmas dan Kabupaten/Kota diantaranya :

1. Pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk;
2. Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu melalui sweeping;
3. Pemberian Makanan Tambahan Pangan Lokal lepada Balita bermasalah gizi dan Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis);
4. Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan Rujukan ke Rumah Sakit serta Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan (Follow up);
5. Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah;
6. Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) berupa pemberian tablet Fe (zat besi) pada Ibu Hamil, IMD, ASI Ekslusif, MP-ASI;
7. Pemberian tablet Fe kapada Remaja putri dengan konsumsi 1 tablet perminggu sepanjang tahun;
8. Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan bekerjasama dengan KUA;
9. Integrasi program KIA – Gizi melalui Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita;
10. Sosialisasi Gerakan AKSI BERGIZI di sekolah melalui media massa dan elektronik;
11. Pemberian Suplemen Taburia pada balita stunting;
12. Pengadaan Antropometri Kit Dalam Rangka Pemantauan Pertumbuhan.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus mengupayakan agar upaya preventif dalam pencegahan stunting dikedepankan melalui :

1. Perbaikan status gizi remaja putri, calon ibu, ibu hamil dan Balita sehingga semakin dini stunting dideteksi maka penanganan akan semakin mudah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan dukungan seluruh pihak untuk keberhasilan dalam pencapaian intervensi pencegahan dan penurunan stunting diantaranya sebagai berikut:
   a. Setiap ibu hamil sebelum usia kehamilan 3 bulan harus sudah periksa ANC agar bisa mencapai standar ANC 6x;
   b. Setiap ibu hamil minum Tablet Tambah Darah (TTD/MMS – Multivitamin Ibu Hamil) setiap hari selama kehamilan;
   c. Setiap Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapatkan Makanan Tambahan Lokal selama 120 hari;
   d. Setiap ibu menyusui mendapatkan dukungan untuk bebas menyusui bayinya kapanpun;
   e. Setiap ibu menyusui yang bekerja mendapat fasilitas ruangan untuk memerah ASI di tempat kerja;
   f. Ada pengawasan terhadap bantuan produk pengganti ASI, hanya dapat diberikan atas petunjuk dokter;
   g. Setiap bayi lahir di fasilitas kesehatan;
   h. Setiap bayi harus mendapatkan ASI saja selama 6 bulan;
   i. Setiap bayi usia 6 bulan harus mulai diberi makanan padat kaya protein hewani (MP-ASI) dan ASI dilanjutkan sampai usia 2 tahun;
   j. Setiap balita harus ditimbang sebulan sekali di Posyandu;
   k. Setiap balita Berat Badan Tidak Naik (T) harus mendapat Makanan Tambahan Lokal selama 2 minggu;
   l. Setiap balita Berat Badan Kurang mendapat Makanan Tambahan Lokal selama 4 minggu;
   m. Setiap balita Gizi Kurang mendapat Makanan Tambahan Lokal selama 8 minggu;
   n. Setiap balita Gizi Buruk mendapat tata laksana;
   o. Setiap baduta mendapat imunisasi lengkap;
   p. Setiap remaja putri kelas 7 dan kelas 10 di skrining anemia;
   q. Setiap remaja putri anemia mendapat tata laksana;
   r. Setiap remaja putri minum TTD satu tablet setiap minggu;
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga berupaya melalui berbagai kegiatan yang bersifat preventif dan pemantauan pelaksanaan monitoring E-HDW, melalui peningkatan kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa serta melakukan validasi data setiap bulan melibatkan lintas program dan lintas sektor.
3. Penguatan Peran Kader (TPK & PKK) dengan melakukan peningkatan kapasitas kader lapangan untuk melakukan edukasi intensif mengenai 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Tujuannya adalah memastikan keluarga sasaran mendapatkan pendampingan secara maksmimal pada tahun 2026 serta melibatkan tokoh masyarakat sehingga lebih banyak balita yang datang ke posyandu, revitalisasi posyandu melalui orientasi kader dan peningkatan sarana prasarana posyandu sepertu pengadaan antropometri kit.
4. Upaya perbaikan utama yang akan dilakukan meliputi penajaman sasaran keluarga berisiko stunting melalui penguatan pemutakhiran dan integrasi data kesejahteraan sosial dengan data sektoral stunting, sehingga intervensi sosial dapat lebih tepat sasaran dan akuntabel.
5. Penguatan kualitas program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui peningkatan pendampingan usaha, penguatan keterampilan kewirausahaan, serta perluasan akses pasar, guna meningkatkan keberlanjutan ekonomi keluarga dan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak secara berkelanjutan.

6. Perluasan jangkauan sosialisasi hingga seluruh kabupaten/kota dan pulau-pulau kecil, peningkatan ketersediaan ikan dan produk olahan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha, penguatan pembinaan diversifikasi produk melalui pelatihan dan pendampingan teknis, dukungan berkelanjutan untuk perubahan perilaku konsumsi melalui integrasi program gizi dan edukasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program dan perbaikan strategi ke depan.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

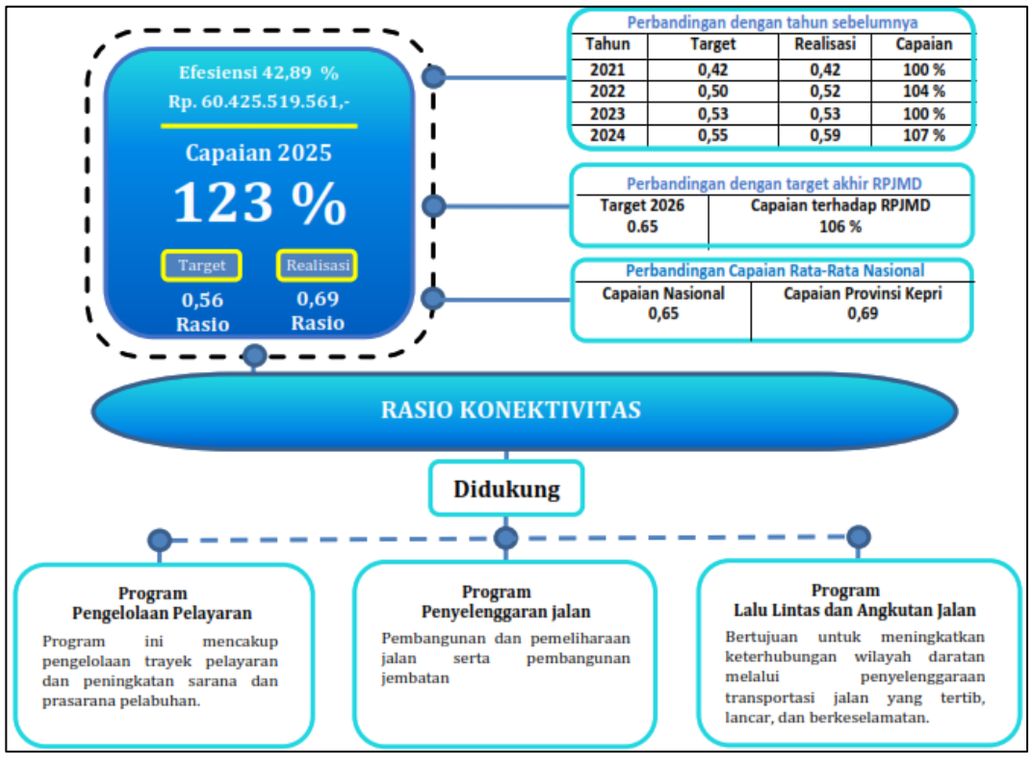
Tabel 3.106 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	557.722.000,00	555.176.670,00	99,54
Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	346.494.600,00	233.391.301,00	67,36
Program Perlindungan Khusus Anak	50.692.000,00	49.688.942,00	98,02
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	99,98
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	200.000.000,00	182.382.860,00	91,19
	81.756.330,00	75.341.590,00	92,15
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.757.605.625,00	3.530.534.795,00	93,96
Program Pemberdayaan Sosial	600.895.841,00	596.713.086,00	99,30
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	479.411.260,73	429.088.592,00	89,50
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	69.996.794,68	67.627.507,00	96,62
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	240.000.000,00	239.750.000,00	99,90
Total	**10.392.584.451,41**	**9.967.095.343,00**	**95,91**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp10.392.584.451,41 terealisasi sebesar Rp9.967.095.343,00 atau 95,91%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp425.489.108,41 (4,09%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting (88,7%) lebih rendah dari realisasi anggaran (95,91%) sehingga belum efesiensi 7,21%.

3.2.3.10 Sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau

3.2.3.10.1 Rasio Konektivitas



Rasio Konektivitas merupakan suatu komponen karakteristik suatu grafik yang mengekpresikan tingkat interaksi antar titik atau jumlah busur yang terjadi dalam suatu grafik. Dapat diartikan juga sebagai gabungan indikator kinerja angkutan darat, angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) dan angkutan laut pada provinsi. Rasio Konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Rasio Konektivitas pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 0,69 Rasio dari target sebesar 0,56 Rasio dan terealisasi sebesar 123%.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Antar pulau dengan indikator Rasio Konektivitas, Indikator Rasio Konektivitas terbagi menjadi 2 indikator yaitu Rasio Konektivitas Angkutan Darat dan Rasio Konektivitas Angkutan Laut, dalam Rasio Konektivitas Angkutan Darat terdapat dua (Angkutan Perkotaan dan AKDP) sedangkan untuk Rasio Konektivitas Angkutan Laut terdapat angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi dan angkutan laut. Berikut ini adalah data jumlah layanan trayek angkutan darat (Angkutan Perkotaan dan AKDP), Lintas angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi dan jumlah trayek angkutan laut.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau dapat dilihat dari indikator Rasio Konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 0,69 Rasio dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 0,56 Rasio, sehingga capaian kinerja sebesar 123% atau dalam kategori "Sangat Baik".

Tabel 3.107 Capaian Rasio Konektivitas

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Konektivitas	0,56 Rasio	0,69 Rasio	123%

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Rasio Konektivitas Provinsi merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan tingkat keterhubungan jaringan transportasi antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau, baik melalui moda transportasi darat maupun perairan. Indikator ini

dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah simpul dan jaringan pelayanan transportasi yang berfungsi dengan kebutuhan konektivitas wilayah, serta mencerminkan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberfungsian layanan angkutan dalam mendukung mobilitas orang dan distribusi barang antar pulau.

Trayek angkutan darat merupakan bagian dari sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, kawasan permukiman, dan simpul transportasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Penyajian data trayek angkutan darat berikut dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi eksisting jaringan pelayanan angkutan dalam mendukung capaian Rasio Konektivitas Angkutan Darat.

Tabel 3.108 Data Trayek Angkutan Darat dalam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Trayek Angkutan Darat
1	Tanjungpinang – Tanjung Uban (Kab. Bintan)
2	Tanjung Uban (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
3	Tanjungpinang – Berakit (Kab. Bintan)
4	Berakit (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
5	Tanjungpinang – Kijang (Kab. Bintan)
6	Kijang (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
Lintasan Angkutan Darat : 6 Lintasan	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) merupakan komponen penting dalam sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Riau yang berciri kepulauan dan sangat bergantung pada moda transportasi perairan. Penyelenggaraan lintasan ASDP berperan strategis dalam menghubungkan antar pulau, kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, serta simpul transportasi lainnya. Penyajian data lintasan ASDP berikut dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi eksisting jaringan pelayanan penyeberangan dalam mendukung capaian Rasio Konektivitas Angkutan Perairan.

Tabel 3.109 Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Lintas Penyeberangan
1	Tanjung Balai Karimun - Sei. Selari
2	Telaga Punggur - Sei Selari
3	Telaga Punggur - Kuala Tungkal
4	Dabo - Kuala Tungkal
5	Serasan - Sintete
6	Tambelan - Sintete
7	Tanjung Balai Karimun - Selat Beliah
8	Tanjung Uban - Tambelan
9	Dabo - Penarik
10	Midai - Penagi
11	Penagi - Subi
12	Subi - Serasan
13	Telaga Punggur - Tanjung Uban
14	Telaga Punggur - Tanjung Balai Karimun
15	Telaga Punggur - Dabo
16	Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun
17	Tanjung Pinang - Dabo
18	Tanjung Uban - Matak
19	Matak - Midai
20	Tanjung Uban - Letung
21	Tanjung Uban - Sedanau
Lintasan Angkutan penyeberangan : 21 x 50% = 10,5 Lintasan Penyeberangan	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Angkutan laut merupakan tulang punggung sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan keterpisahan antar

pulau. Penyelenggaraan lintasan angkutan laut berperan strategis dalam menghubungkan antar pulau, pusat pertumbuhan, kawasan permukiman, serta simpul transportasi laut. Penyajian data lintasan angkutan laut berikut bertujuan untuk menggambarkan kondisi eksisting jaringan pelayanan angkutan laut dalam mendukung kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang, sekaligus meningkatkan capaian Rasio Konektivitas Angkutan Laut.

Tabel 3.110 Data Lintasan Angkutan Laut Provinsi

No	Lintas	Armada
1	Tanjung Pinang - 132 - Jagoh/Dabo - 80 - P. Pekajang - 42 - Belinyu - 42 - P. Pekajang - 80 - Jagoh/Dabo - 132 - Tanjung Pinang - 205 – Tambelan - 131 - Midai - 50 - Selat Lampa - 71 - P. Laut - 35 - Seluan - 34 - Selat Lampa - 65 - Subi - 35 - Pulau Panjang - 20 - Serasan - 92 - Sintete - 95 – Tambelan - 227 - Batam - 25 - Tanjung Pinang	Trayek R-7 11 Lintasan
2	Kijang - 185 - Tambelan - 125 - Pontianak - 178 - Serasan - 52 - Subi - 65 - Selat Lampa - 71 - P. Laut - 66 - Sedanau - 56 - Midai - 112 - Tarempa - 37 - Kuala Maras - 162 - Kijang - 72 - Pelabuhan Sungai Guntung - 89 - Tembilahan - 89 - Pelabuhan Sungai Guntung - 72 - Kijang	Trayek R-8 10 Lintasan
3	Sintete - 92 - Serasan - 52 - Subi - 68 - Ranai/Penagi - 64 - P. Laut - 66 - Sedanau - 56 - Midai - 112 - Tarempa - 46 - Letung - 176 - Tanjung Pinang – 205 - Tambelan - 95 - Sintete	Trayek R-9 10 Lintasan
4	Tanjung Priok - 484 - Kota Segara/Tanjung Uban - 147 - Letung - 36 - Tarempa - 12 - Selat Lampa - 61 - Subi - 47 - Serasan - 85 - Midai - 245 - Kota Segara/Tanjung Uban - 484 - Tanjung Priok	T2 Trayek Tol Laut 6 Lintasan
Lintasan Angkutan Laut : 37 x 50%= 18,5 Lintasan Angkutan Laut		

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Dari data tersebut diatas dapat diuraikan perhitungan capaian rasio konektivitas provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.111 Perhitungan Capaian Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas
Rumus	:	Rasio konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) ● IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) ● IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) : ● Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP ● Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) : ● Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil ● Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan atau: 1) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : 1) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 2) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 3) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Tabel 3.112 Perhitungan IK1 Rasio Konektivitas Angkutan Darat Tahun 2025

(Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi)	(IK1 x bobot angkutan jalan)	Persentase Akhir IK1
IK1 = $\frac{6 \times 1}{6}$ = 100	X 30%	= 0,30 rasio

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.113 Perhitungan IK2 Rasio Konektivitas Angkutan Perairan Tahun 2025

(Jumlah lintasan angkutan perairan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada provinsi)	(I21 x bobot angkutan Perairan)	Persentase Akhir IK2
IK1 = $\frac{29 \times 1}{52}$ 0,56	X 70%	= 0,39 rasio

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Sehingga Capaian Rasio Konektivitas = (IK1 + IK2) = 0,30 + 0,39 = 0,69

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja peningkatan Rasio Konektivitas tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,10 Rasio. Dimana pada tahun 2024 Rasio Konektivitas sebesar 0,59 rasio meningkat menjadi 0,69 rasio pada tahun 2025.

Grafik 3.114 Tren Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau



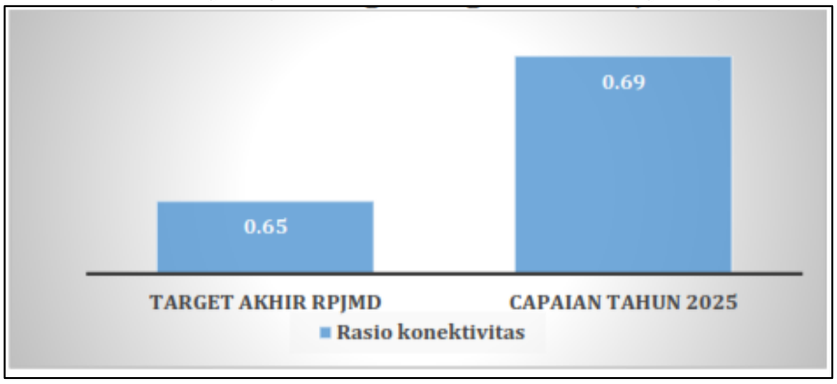
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2026 realisasi kinerja Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 0,69 Rasio dengan target sebesar 0,65 Rasio sehingga capaian kinerja sebesar 106%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya pada wilayah kepulauan, telah melebihi target perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Grafik 3.115 Perbandingan Capaian Rasio Konektivitas Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Berdasarkan perbandingan dengan capaian rata-rata nasional, Rasio Konektivitas secara nasional tercatat sebesar 0,65, sementara capaian rata-rata Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau berada pada angka 0,69. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian Provinsi Kepulauan Riau masih berada di atas rata-rata nasional. Konektivitas yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan dengan sebaran pulau yang luas dan tidak merata, sehingga membutuhkan upaya dan sumber daya yang lebih besar dalam penyediaan serta pemeliharaan infrastruktur transportasi. Capaian Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau tetap menunjukkan progres positif dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menekankan peningkatan konektivitas wilayah tertinggal, terluar, dan kepulauan.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan meliputi pengembangan dan penataan jaringan transportasi laut, darat, serta sungai, danau, dan penyeberangan (SDP) sebagai tulang punggung konektivitas wilayah kepulauan. Dinas Perhubungan secara berkelanjutan melakukan fasilitasi pembukaan dan pengoperasian trayek angkutan laut dan penyeberangan, guna menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah hinterland dan pulau-pulau terluar.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui pemeliharaan dan peningkatan fasilitas pelabuhan, dermaga, serta prasarana pendukung keselamatan angkutan darat. Upaya ini ditujukan untuk memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan, sehingga mendukung kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang antarwilayah.

Dalam aspek perencanaan dan koordinasi, Dinas Perhubungan memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga terkait, serta pemangku kepentingan transportasi lainnya. Koordinasi ini dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pengembangan jaringan transportasi daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang tersedia.

Faktor yang mendukung ketercapaian peningkatan rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 antara lain adalah:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatannya:
   a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
      Melalui kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau memastikan tersedianya sarana perlengkapan jalan sesuai standar teknis pada ruas-ruas jalan provinsi. Ketersediaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta fasilitas keselamatan lainnya berperan dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, sehingga mendukung keandalan jaringan jalan

sebagai penghubung antar pusat kegiatan wilayah. Berikut dapat disampaikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan antara lain:

1) Pemasangan marka Jalan, Pita Penggaduh di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga.
2) Pemasangan Jalur Sepeda dan Rambu Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang.

Selain dari kegiatan tersebut di atas, Dinas Perhubungan juga telah melakukan koordinasi antar stakeholder pemangku kepentingan di jalan raya, baik dengan Direktorat/Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Dinas PUPR, BPTD Kepri terkait pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui Forum Komunikasi Lalu Lintas maupun secara random terhadap suatu kegiatan yang memerlukan tindakan penanganan cepat atas kondisi jalan/lalu lintas.

b. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

2. Peningkatan Kualitas Jalan dan Pembangunan Infrastruktur Jembatan

Tabel 3.116 Peningkatan, Pemeliharaan Jalan Dan Pembangunan Jembatan

No	Paket Kegiatan	Satuan	Panjang Penanganan
1	Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun	Km	0,3454
2	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,13
3	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	Km	0,148
4	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	Km	0,075
5	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas	Km	0,225
6	Pemeliharaan berkala jalan sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, kab. Karimun (DBH Sawit provinsi Kepri Lanjutan)	Km	0,265
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,6877
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang	Km	1,004
9	Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang	Km	0,0242
10	Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga	Km	0,261
11	Pembangunan Jembatan Semala, Kabupaten Natuna	Jembatan	1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Prov. Kepri

Upaya lainnya, yang mendukung ketercapaian peningkatan rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatanya:

1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi.
2. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional.
3. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan.
4. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas.
5. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

Pembangunan serta penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional merupakan upaya strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi laut dan memperkuat sistem konektivitas wilayah kepulauan. Pelabuhan pengumpan regional berfungsi sebagai simpul penghubung antara pelabuhan lokal, pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan utama, sehingga memperlancar pergerakan orang dan barang antarwilayah di dalam provinsi.

Berikut disampaikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator sektor perhubungan "Rasio Konektivitas" .

1. Keterbatasan Infrastruktur Transportasi Secara geografis wilayah Kepulauan Riau terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah yang sebagian besar merupakan perairan, kondisi geografis ini menyebabkan terbatasnya akses darat yang dapat dijangkau, hampir seluruh wilayah menggunakan akses transportasi laut. Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah ini diperlukan infrastruktur yang memadai sebagai sarana dan prasana moda transportasi. Kebutuhan akan infrastruktur transportasi ini merupakan alasan utama pendukung tercapainya konektivitas, akan tetapi disebagian besar wilayah Kepulauan Riau masih minim ketersedian infrastruktur transportasi seperti kurangnya ketersediaan pelabuhan di pulau-pulau yang berpenghuni dan kurangnya moda transportasi yang laut yang melayani.
2. Kualitas Material dan Pelaksanaan: Penggunaan material yang berkualitas rendah dan pelaksanaan yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan jalan cepat rusak.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan indikator rasio konektivitas dan mengurangi permasalahan dan kedala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya:

1. Mengadakan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam hal keterhubungan wilayah atau konektivitas antar wilayah, agar terjadi sinkronisasi dan keselarasan yang baik dalam perencanaan bidang transportasi sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan konektivitas wilayah provinsi.
2. Memprioritaskan kegiatan yang menjadi pendukung peningkatan konektivitas provinsi yang akan direncanakan akan membangun pelabuhan pada Kabupaten Natuna yaitu Pelabuhan Selat Lampa dan Pelabuhan Matak Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalan hal Kerjasama layanan trayek transportasi dengan meminta dukungan moda transportasi dan sarana prasarana transportasi.
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalan hal pengembangan lintasan trayek yang melayani daerah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal) untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Menggunakan material berkualitas tinggi dan teknologi canggih dalam pembangunan jalan agar lebih tahan lama dan mampu menahan beban berat.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 3.117 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau

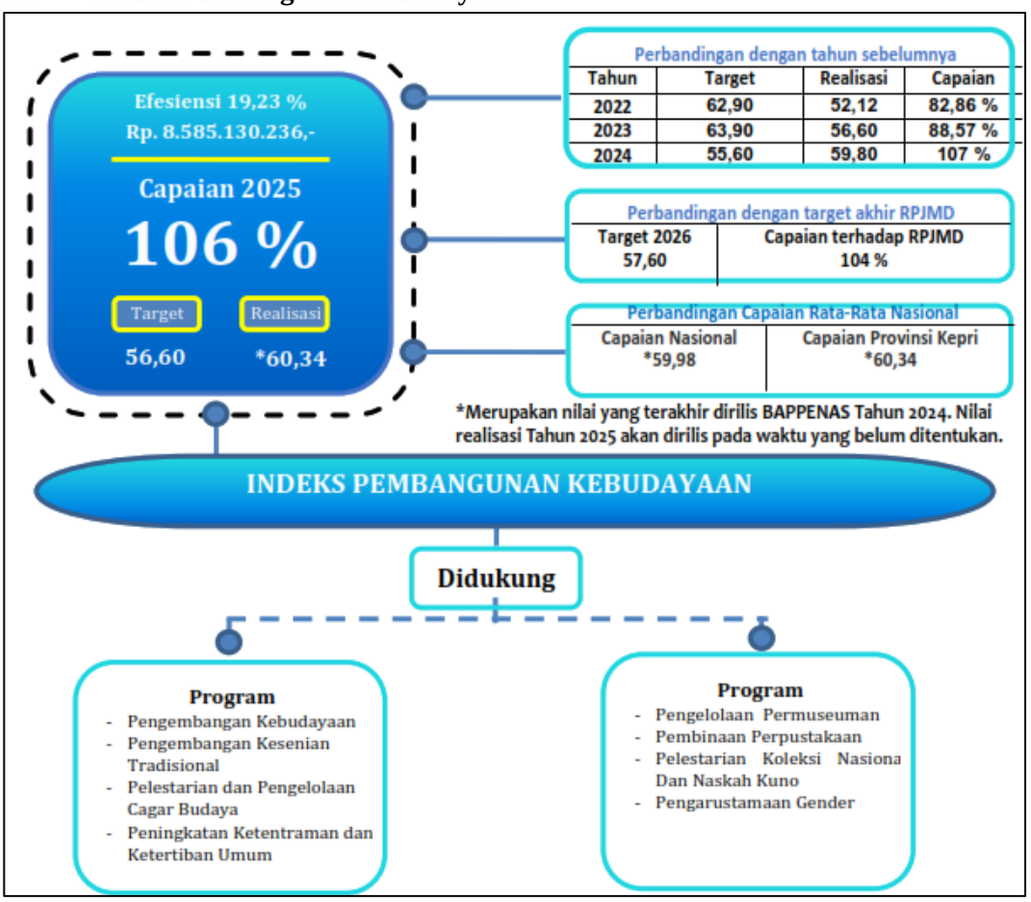
Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengelolaan Pelayaran	8.207.522.273,00	4.359.571.277,00	53
Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.363.732.826,00	14.754.134,00	62
Program Penyelenggaraan Jalan	49.854.264.462,00	44.032.581.032,00	88,32
Total	**60.425.519.561,00**	**48.406.906.443,00**	**83,65**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp60.425.519.561,00 terealisasi sebesar Rp48.406.906.443,00 atau 80,11%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp12.018,613,118,00 (16,35%). Jika

dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Rasio Konektivitas (123%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (80,11%) dengan efesiensi 42,89%.

3.2.3.11 Sasaran Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat

3.2.3.11.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan



Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Indeks Pembangunan Kebudayaan pada Tahun 2025 menggunakan Data Tahun 2024, capaian kinerja sudah baik dengan Indeks dari target sebesar 56,60 Indeks dan terealisasi sebesar 60,34 Indeks capaian kinerja sebesar 106%.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Dari ke-7 Dimensi yang termuat dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan melibatkan peran Perangkat Daerah yang berkontribusi terhadap ketercapaian pembangunan melalui beberapa variabel indikator.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024, pembangunan kebudayaan Kepulauan Riau cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan.

Metode Penghitungan indeks pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut.
2. Menghitung nilai setiap indikator.
3. Menghitung bobot setiap komponen.
4. Menghitung indeks pembangunan kebudayaan secara keseluruhan.

Adapun skala pengukuran sebagai berikut:

1. Indeks rendah (0-40): Pembangunan kebudayaan kurang.
2. Indeks sedang (41-60): Pembangunan kebudayaan cukup.

3. Indeks tinggi (61-80): Pembangunan kebudayaan baik.
4. Indeks sangat tinggi (81-100): Pembangunan kebudayaan sangat baik.

Dilihat dari 7 (tujuh) dimensi yang menggambarkan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, masing-masing dimensi turut serta mendorong kenaikan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Peningkatan pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan harmoni masyarakat dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 menggunakan data tahun 2024 sebesar 60,34 Indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 56,60 Indeks sehingga capaian kinerja sebesar 106% atau dalam kategori "Sangat Baik."

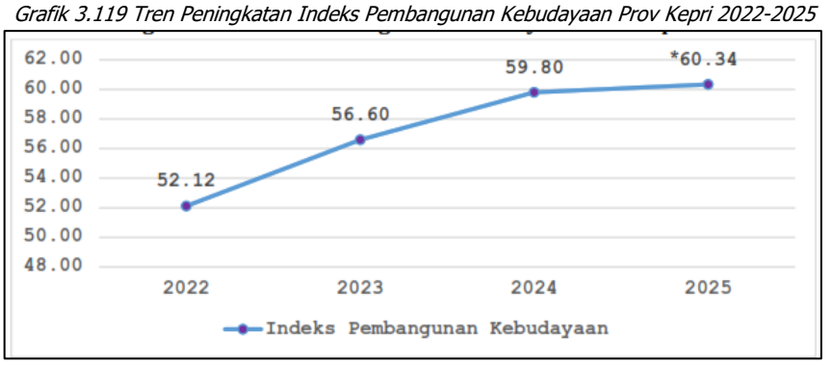
Tabel 3.118 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
IPK	56,60 Indeks	60,34 Indeks	106%

Sumber : IPK Direktorat Kebudayaan, Bapennas, BPS Nasional

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 3.119 Tren Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan Prov Kepri 2022-2025



Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Capaian kinerja peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 belum dipublish oleh BAPPENAS dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sehingga capaian realisasi yang digunakan saat ini yaitu masih menggunakan capaian realisasi tahun 2024. Dengan demikian pada pelaporan LKJIP 2025 belum dapat membandingkan realisasi kinerja IPK 2025 dengan Realisasi Kinerja IPK Tahun 2024.

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan menunjukkan tren peningkatan positif dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021–2022, realisasi indeks belum mencapai target yang ditetapkan, yang mengindikasikan perlunya penguatan program dan sinergi lintas sektor dalam pembangunan kebudayaan. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 realisasi indeks berhasil melampaui target, masing-masing sebesar 58,90 dan 60,34, menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan daerah.

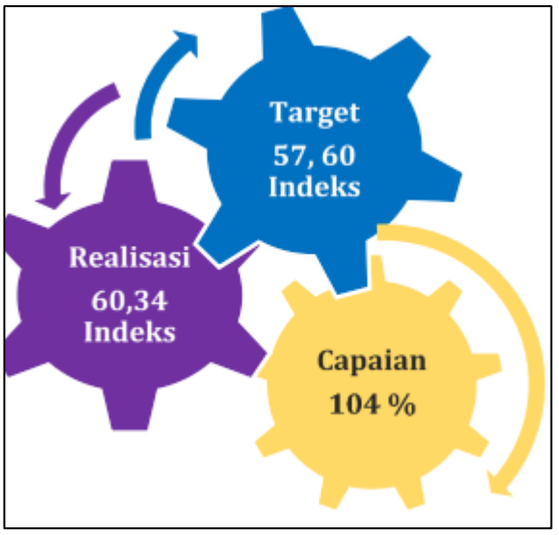
Untuk tahun 2025, target ditetapkan sebesar 61,07, sementara realisasi belum tersedia karena masih dalam proses pengukuran. Capaian positif pada dua tahun sebelumnya menjadi modal penting untuk mendorong pencapaian target tahun 2025 melalui penguatan koordinasi, keberlanjutan program, dan peningkatan kualitas data pendukung.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Ditinjau dari perspektif pencapaian target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, realisasi kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan sampai dengan tahun yang dinilai (Tahun 2024) tercatat sebesar 60,34 Indeks, lebih tinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 57,60 Indeks. Dengan demikian, capaian kinerja telah mencapai 104%, yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kebudayaan daerah telah melampaui target akhir RPJMD.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau berjalan secara efektif dan berkontribusi positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan keberlanjutan program, peningkatan sinergi lintas perangkat daerah, serta penguatan kualitas data dan monitoring evaluasi agar kinerja pembangunan kebudayaan tetap berada pada jalur yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Grafik 3.120 Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada provinsi Kepulauan Riau dengan rentang nilai 0 - 100 sebesar 59,80 sedangkan untuk indeks pembangunan tingkat nasional 57,13. Pada tahun 2024 untuk realisasi indeks Pembangunan di Kepulauan Riau lebih tinggi dari nasional.

Tabel 3.121 Perbandingan Realiasasi Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2024

Tahun	Nasional	CAPAIAN IPK KEPULAUAN RIAU Per Tahun
2018	53.74	58.83
2019	55.91	60.90
2020	54.65	59,24
2021	51.90	52,12
2022	55,13	56,60
2023	57,13	58,80
2024	59,98	60,34

Sumber : IPK Direktorat Kebudayaan, Bapennas, BPS Nasional

Dapat diinformasikan posisi ketercapaian kinerja dibandingkan target nasional dengan data sebagaimana pada tabel tersebut sesuai dengan updated rilis data pada Tahun 2024, mengingat data 2025 masih menunggu publish kementerian BAPPENAS dan BPS RI.

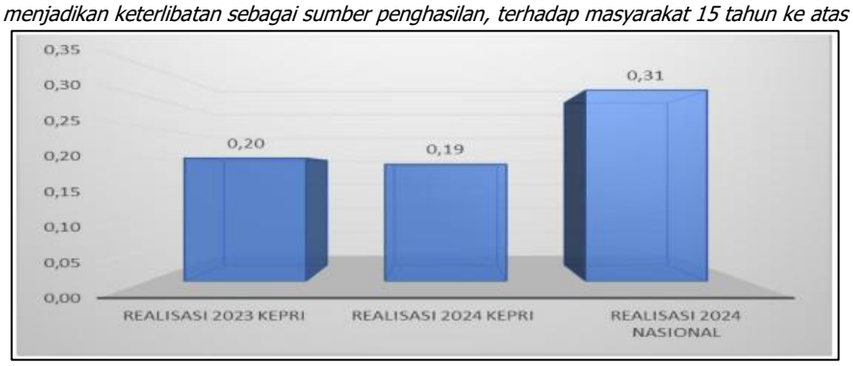
Pada Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam 5 Besar Provinsi dengan Capaian Indeks Kebudayaan Terbaik, yaitu peringkat ke-5 setelah Provinsi Bali, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Tengah.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu:

I. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ekonomi Budaya

Grafik 3.122 Persentase Penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan, terhadap masyarakat 15 tahun ke atas



Sumber : Kementerian Kebudayaan

Grafik tersebut menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan tersebut sebagai sumber penghasilan. Indikator ini digunakan untuk mengukur kontribusi aktivitas seni pertunjukan terhadap penguatan ekonomi budaya masyarakat. Pada tahun 2024, realisasi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 0,20, sementara realisasi Kepulauan Riau pada periode sebelumnya berada pada 0,19. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja, meskipun relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa program dan kegiatan di bidang pengembangan seni pertunjukan mulai memberikan dampak terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku ekonomi budaya. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi nasional sebesar 0,31, capaian Kepulauan Riau masih berada di bawah rata-rata nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa skala dan intensitas keterlibatan masyarakat dalam seni pertunjukan sebagai sumber penghasilan di tingkat daerah masih terbatas, baik dari sisi jumlah pelaku, akses pasar, maupun ekosistem pendukung.indikator ini telah memenuhi prinsip terukur dan relevan, namun capaian kinerja menunjukkan masih adanya gap kinerja terhadap *benchmark* nasional. Kondisi ini menjadi dasar bagi perlunya penguatan efektivitas program, antara lain melalui peningkatan pembinaan pelaku

Berikut adalah analisis faktor kegagalan dan keberhasilan Dimensi Ekonomi Budaya, sebagai berikut :

1. Faktor Keberhasilan Dimensi Ekonomi Budaya
    a. Kekayaan Potensi Budaya Lokal. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya Melayu yang kuat, mencakup seni pertunjukan, tradisi lisan, kerajinan, kuliner, dan warisan maritim. Potensi ini menjadi modal dasar dalam pengembangan ekonomi budaya dan memberikan peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi pada tahun 2025 dinas kebudayaan melaksanakan *event* yang berkolaborasi dengan UMKM dengan melibatkan para pelaku budaya dalam seni pertunjukan yaitu Festival Budaya Melayu;
    b. Keterkaitan dengan Sektor Pariwisata. Sejumlah kegiatan budaya telah terintegrasi dengan agenda pariwisata daerah, seperti festival budaya, event adat, dan atraksi seni tradisional yang mendukung kunjungan wisatawan. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi budaya terhadap pergerakan ekonomi lokal, khususnya di kawasan destinasi wisata;
    c. Peran Komunitas dan Pelaku Budaya. Keberadaan sanggar seni, komunitas budaya, dan pelaku usaha berbasis budaya di berbagai kabupaten/kota menjadi faktor pendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi budaya. Meskipun berskala kecil, aktivitas ini menunjukkan adanya dinamika ekonomi berbasis budaya di tingkat masyarakat;
    d. Dukungan Kebijakan Dasar Pemajuan Kebudayaan ditahun 2025 program kegiatan yang mendukung terkait dengan dimensi budaya ini adalah pemberian Hibah uang kepada pelaku pelaku budaya dan sanggar seni yang telah berbadan hukum ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menaikan nilai ekonomi budaya meskipun belum optimal di kerenakan keterbatasan anggaran.

2. Faktor Kegagalan / Hambatan Dimensi Ekonomi Budaya
    a. Belum Optimalnya Hilirisasi dan Komersialisasi Budaya. Pemanfaatan budaya masih berorientasi pada pelestarian dan seremoni, belum diarahkan secara sistematis pada pengembangan produk dan jasa budaya yang bernilai ekonomi tinggi. Akibatnya, kontribusi ekonomi budaya terhadap pendapatan masyarakat dan daerah masih terbatas;
    b. Rendahnya Kapasitas Kewirausahaan Pelaku Budaya. Sebagian besar pelaku budaya belum memiliki keterampilan manajerial, kewirausahaan, dan literasi digital yang memadai. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas produk, strategi pemasaran, serta kemampuan menjangkau pasar yang lebih luas;
    c. Keterbatasan Akses Pembiayaan dan Insentif. Pelaku ekonomi budaya masih menghadapi kendala dalam mengakses sumber pembiayaan, permodalan, serta insentif ekonomi. Skema pendanaan yang ada belum sepenuhnya ramah terhadap karakteristik usaha budaya yang bersifat kreatif dan berbasis komunitas;
    d. Lemahnya Integrasi Lintas Sektor. Sinergi antara sektor kebudayaan, pariwisata, pendidikan, koperasi dan UMKM, serta ekonomi kreatif belum berjalan optimal. Program pengembangan ekonomi budaya masih bersifat sektoral, sehingga dampaknya terhadap peningkatan indikator IPK belum signifikan;
    e. Keterbatasan Data dan Indikator Ekonomi Budaya. Pendataan aktivitas dan nilai ekonomi budaya belum terkelola secara sistematis dan terintegrasi. Akibatnya, kontribusi ekonomi budaya sulit diukur secara kuantitatif dan belum sepenuhnya tercermin dalam indikator IPK;
    f. Tantangan Geografis Wilayah Kepulauan. Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan keterbatasan akses distribusi, pemasaran, serta pembinaan pelaku budaya. Hal ini berdampak pada ketimpangan pengembangan ekonomi budaya antarwilayah.

II. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Pendidikan

Indeks Pembangunan Kebudayaan pada dimensi pendidikan merupakan indikator yang mengukur sejauh mana sistem pendidikan berperan dalam mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan. Dimensi ini menilai integrasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum, keberadaan muatan lokal, pembelajaran seni dan tradisi daerah, serta partisipasi peserta didik dalam kegiatan budaya. Pendidikan memiliki posisi strategis karena menjadi media utama dalam mentransmisikan pengetahuan, nilai, dan identitas budaya kepada generasi muda secara terstruktur dan berkelanjutan.

Beberapa faktor pendukung peningkatan indeks pada dimensi pendidikan antara lain kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan muatan lokal dan pendidikan karakter berbasis budaya, ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten di bidang seni dan budaya, serta dukungan sarana dan prasarana pembelajaran. Selain itu, kolaborasi antara sekolah dengan komunitas budaya, sanggar seni, dan tokoh adat juga memperkaya proses pembelajaran. Akses pendidikan yang merata dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya di lingkungan pendidikan turut memperkuat capaian dimensi ini.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang dapat menurunkan capaian indeks. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan kebudayaan di sekolah, minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang budaya lokal, serta kurangnya pembaruan materi ajar yang relevan dengan perkembangan zaman menjadi tantangan utama. Selain itu, pengaruh globalisasi dan dominasi budaya populer sering kali mengurangi minat generasi muda terhadap budaya lokal apabila tidak diimbangi dengan strategi pembelajaran yang inovatif.

III. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum mempunyai kontribusi

dalam pencapaian indeks pembangunan kebudayaan pada dimensi ketahanan sosial budaya. Indikator yang diintervensi oleh Satpol PP pada dimensi ketahanan social budaya adalah:

1. Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanaan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dengan target 11,83;
2. Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga, dengan target 85,27.

Program yang mendukung peningkatan pembinaan keagamaan, pelestarian budaya dan harmoni masyarakat adalah program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.

Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum digunakan untuk kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan penegakan perda/perkada. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengawalan dan pengamanan serta penanganan unjuk rasa/demo. Sedangkan penegakan perda/perkada dilakukan melalui pengawasan kepatuhan atas pelaksanaan perda dan perkada, sosialisasi sanksi perda dan perkada dan penanganan atas pelanggaran perda dan perkada.

IV. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Warisan Budaya

Berikut adalah analisis faktor kegagalan dan keberhasilan Dimensi Warisan Budaya, sebagai berikut :

1. Faktor Keberhasilan Dimensi Warisan Budaya
    a. Kekayaan Warisan Budaya Melayu dan Maritim. Provinsi Kepulauan Riau memiliki warisan budaya yang kuat dan khas, terutama budaya Melayu yang berkembang seiring sejarah maritim, perdagangan, dan kesultanan. Warisan tersebut meliputi situs sejarah, bangunan cagar budaya, tradisi lisan, adat istiadat, manuskrip, serta praktik budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil ditahun 2025 Dinas kebudayaan telah melakukan pelestarian cagar budaya dapur arang di kabupaten bintan;
    b. Keberadaan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Cagar Budaya. Terdapat sejumlah ODCB dan cagar budaya yang telah teridentifikasi di berbagai kabupaten/kota, baik berupa bangunan, struktur, situs, maupun kawasan bersejarah. Dinas Kebudayaan sendiri memiliki 10.589 koleksi yang tersimpan dan dikelola pada galeri Dinas Kebudayaan. Koleksi tersebut terdiri atas berbagai jenis benda budaya dan sejarah yang memiliki nilai penting sebagai sumber pengetahuan, identitas budaya, serta warisan sejarah daerah. Seluruh koleksi menjadi objek pengelolaan yang memerlukan upaya pelindungan, perawatan, dan konservasi secara berkelanjutan guna menjaga kondisi fisik serta nilai informasinya ditahun 2025 dinas kebudayaan telah melakukan konservasi terhadap koleksi yang ada di galeri sebanyak 302 koleksi;
    c. Peran Komunitas Adat dan Masyarakat Lokal. Masyarakat adat dan komunitas lokal di Kepulauan Riau masih mempraktikkan dan menjaga tradisi serta nilai budaya secara turun-temurun. Keterlibatan komunitas ini berperan penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya tak benda, dengan adanya program kegiatan ditahun 2025 yang mendukung terkait ketercapaian dari nilai warisan budaya yaitu pagelaran Pembukaan STQH 2025 Prov. Kepulauan Riau Tari Kolosal, Ghazal, Musik, Ghazal dan Lagu Melayu kegiatan ini adalah kegiatan *croscutting* antara dinas kebudayaan dan Biro Kesra;
    d. Komitmen Pemerintah dalam Pelestarian Budaya. Adanya program dan kegiatan pelestarian warisan budaya, seperti pendataan, penetapan cagar budaya, pemeliharaan situs, serta dokumentasi budaya takbenda, adalah penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) sebagai WBTb Indonesia dengan target 2 WBTB capaian indikator sebanyak 14 WBTB yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia dari total 247 wbtb yang sudah dalam pencatatan, Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat

pelindungan, pengakuan, dan legitimasi formal terhadap warisan budaya daerah pada tingkat nasionalmenunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya.

2. Faktor Kegagalan / Hambatan Dimensi Warisan Budaya
    a. Belum Optimalnya Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya. Sebagian warisan budaya, khususnya cagar budaya fisik, belum dikelola dan dipelihara secara optimal. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia teknis, serta sarana pendukung menyebabkan kondisi beberapa situs dan bangunan bersejarah mengalami degradasi atau kerusakan.
    b. Rendahnya Tingkat Penetapan dan Legalitas Warisan Budaya. Masih banyak objek warisan budaya yang belum ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya atau warisan budaya takbenda. Keterbatasan proses kajian, administrasi, dan koordinasi antarinstansi menyebabkan capaian penetapan belum maksimal dan berdampak pada rendahnya skor indikator IPK.
    c. Keterbatasan SDM Ahli dan Tenaga Teknis. Ketersediaan tenaga ahli pelestarian budaya, seperti arkeolog, sejarawan, konservator, dan juru pelihara, masih terbatas. Kondisi ini menghambat proses identifikasi, pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan warisan budaya secara berkelanjutan.
    d. Minimnya Pemanfaatan Warisan Budaya secara Edukatif dan Ekonomis. Warisan budaya masih cenderung diposisikan sebagai objek yang dilindungi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pendidikan, pariwisata budaya, dan ekonomi kreatif. Akibatnya, nilai tambah warisan budaya belum berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
    e. Tantangan Geografis dan Pemerataan Pelestarian. Kondisi geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan menyebabkan pelestarian warisan budaya tidak merata. Banyak warisan budaya yang berada di pulau-pulau kecil sulit dijangkau untuk pendataan, pemeliharaan, dan pengawasan, sehingga berpotensi terabaikan.

V. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ekspresi Budaya

Berikut adalah analisis faktor kegagalan dan keberhasilan Dimensi Ekspresi Budaya, sebagai berikut:

1. Faktor Keberhasilan Dimensi Ekspresi Budaya
    a. Ekspresi budaya di Provinsi Kepulauan Riau relatif masih hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya seni pertunjukan Melayu, tradisi adat, musik, tari, sastra lisan, dan ritual budaya, ditahun 2025 Dinas kebudayaan berkolaborasi dengan pelaku pelaku budaya yang ada di kepulauan Riau melaksanakan program kegiatan yang menampilkan 20 kesenian tradisional Tari Kreasi Melayu Kolosal, Musik Melayu, Ghazal, Silat, Makyong, dan Sandiwara Bangsawan dengan melibatkan Komunitas/ Sanggar Seni/Paguyuban yang ada di Tanjunpinang dan sanggar sanggar kesenian yang ada di tanjungpinang dilaksanakan di Pelataran parkir Gedung Lembaga adat melayu pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2025;
    b. Peran Komunitas dan Sanggar Seni. Keberadaan sanggar seni, komunitas budaya, dan pelaku seni yang aktif menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekspresi budaya. Kegiatan latihan, pertunjukan, dan partisipasi dalam berbagai event budaya menunjukkan adanya ekosistem ekspresi budaya di tingkat lokal di tahun 2025 Dinas Kebudayaan juga memberikan hibah berupa uang kepada sanggar sanggar yang sudah berbadan hukum sebagai bentuk dukungan kepada pelaku budaya untuk bisa lebih mengapresiasi dan berkreativitas dalam pemajuan kebudayaan;
    c. Ditahun 2025 dukungan program dari Pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan seni dan budaya, seperti festival budaya, peringatan hari besar adat, dan pagelaran seni

tradisional itu tidak hanya di dinas kebudayaan tetapi juga ada di pariwisata dan biro kesra.

2. Faktor Kegagalan / Hambatan Dimensi Ekspresi Budaya
    a. Belum Meratanya Ruang dan Akses Ekspresi Budaya. Ruang ekspresi budaya, seperti gedung kesenian, panggung terbuka, dan fasilitas pertunjukan, belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Kondisi ini membatasi frekuensi dan jangkauan kegiatan ekspresi budaya, terutama di wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil.
    b. Ketergantungan pada Kegiatan Seremonial. Ekspresi budaya masih banyak bergantung pada agenda seremonial pemerintah dan event tertentu, sehingga belum berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Akibatnya, intensitas dan keberlanjutan ekspresi budaya belum optimal dan berdampak pada fluktuasi nilai indikator IPK.
    c. Rendahnya Regenerasi Pelaku Seni. Minat dan keterlibatan generasi muda dalam ekspresi budaya tradisional masih relatif terbatas. Pengaruh budaya global dan perubahan gaya hidup menyebabkan regenerasi pelaku seni berjalan lambat, yang berpotensi melemahkan keberlanjutan ekspresi budaya.
    d. Keterbatasan Dukungan Pembiayaan dan Insentif. Pelaku seni dan komunitas budaya masih menghadapi keterbatasan dukungan pembiayaan dan insentif yang berkelanjutan. Hal ini berdampak pada kualitas produksi seni, frekuensi pertunjukan, dan profesionalisme pelaku seni.

VI. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Budaya Literasi

Berikut adalah analisis faktor kegagalan dan keberhasilan Dimensi Budaya Literasi, sebagai berikut:

1. Faktor Keberhasilan Dimensi Budaya Literasi
    a. Menghadirkan ketersediaan perpustakaan yang menarik, dimana perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku tapi juga pusat komunitas belajar. Koleksi bahan bacaan yang *up to date* dan kegiatan kreatif bisa meningkatkan daya tarik perpustakaan;
    b. Pemanfaatan Teknologi dapat memperluas jangkauan literasi dan menarik generasi muda, adanya Buku Digital, *Podcast Edukatif* dan aplikasi membaca bisa menjadi alternatif menarik;
    c. Program membiasakan membaca sejak dini, Orang tua dan guru perlu membacakan cerita kepada anak-anak sejak usia dini. Ini menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan meningkatkan kemampuan bahasa mereka;
    d. Partisipasi Komunitas dan Masyarakat, komunitas literasi menjadikan membaca dan menulis sebagai aktivitas sosial dan budaya. Interaksi sosial dalam komunitas memperkuat motivasi dan rasa memiliki terhadap literasi
    e. Pengembangan Pojok Baca di ruang publik, perpustakaan keliling dan kerjasama dengan lintas sektor pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi dan swasta;
    f. Melakukan inovasi program literasi, Festival literasi dan budaya, Lomba menulis, dan mendongeng menjadikan literasi sebagai pengalaman sosial dan budaya yang menyenangkan;
    g. Gerakan Literasi Sekolah dan Komunitas, Program seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN), lomba menulis, bedah buku, dan diskusi terbuka bisa meningkatkan semangat literasi di kalangan pelajar dan masyarakat umum;
    h. Optimalisasi teknologi digital, platform perpustakaan digital daerah, aplikasi membaca gratis dan legal serta pemanfaatan media sosial untuk kampanye literasi;
    i. Memberikan Penghargaan atas Prestasi literasi, Penghargaan bagi penulis muda, pembaca terbanyak, atau komunitas literasi yang aktif bisa menjadi motivasi tersendiri untuk terus mengembangkan budaya literasi.
2. Faktor Kegagalan / Hambatan Dimensi Ekspresi Budaya

a. Rendahnya Minat Baca, Literasi sering dipersepsikan sebagai kewajiban akademik bukan kebutuhan atau kebiasaan, sehingga partisipasi belum tumbuh secara intrinsik;
b. Masih kurangnya akses sarana literasi, Perpustakaan di banyak daerah masih minim, akses internet tidak merata, dan kurikulum pendidikan belum sepenuhnya mendukung pengembangan budaya literasi secara menyeluruh;
c. Keterbatasan kualitas dan relevansi bahan bacaan, bahwa bahan bacaan kurang kontekstual, kurang menarik dan minim muatan budaya lokal sehingga masyarakat kurang tertarik membaca;
d. Pengaruh *Gadget* dan Media Sosial, di satu sisi, *gadget* dan media sosial bisa menjadi alat pembelajaran, tapi di sisi lain juga dapat mengalihkan perhatian dari kegiatan literasi yang lebih mendalam seperti membaca buku atau menulis jurnal;
e. Lemahnya Budaya Literasi dalam Keluarga , orang tua belum menjadikan literasi sebagai kebiasaan di rumah dan kurang memberi teladan membaca. Pembiasaan literasi sejak dini tidak terbentuk secara optimal.

VII. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Kesetaraan Gender

Dalam rangka mengetahui capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Dimensi Gender, Provinsi Kepulauan Riau dengan memotret upaya-upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang beririsan dengan variabel Dimensi Gender pada indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan, dimana IPG adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keseimbangan hasil pembangunan antara laki- laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG menunjukkan sejauh mana pembangunan mampu menghadirkan kesempatan dan hasil yang setara bagi kedua gender, sehingga menjadi gambaran penting terkait keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Semakin tinggi nilai IPG, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yang menandakan terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif, adil, dan mendukung pemberdayaan gender dalam berbagai sektor kehidupan.

Faktor pendukung peningkatan indeks pada dimensi ini antara lain adanya kebijakan yang responsif gender, program pemberdayaan perempuan di sektor seni dan budaya, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan peran. Dukungan regulasi yang menjamin akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan pendanaan kegiatan budaya juga berkontribusi positif. Selain itu, keberadaan komunitas seni dan organisasi perempuan yang aktif dalam melestarikan budaya lokal dapat memperkuat keterlibatan perempuan secara signifikan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi capaian dimensi kesetaraan gender. Norma sosial dan budaya yang masih bias gender, pembagian peran tradisional yang membatasi ruang gerak perempuan, serta rendahnya representasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di bidang kebudayaan menjadi tantangan utama. Keterbatasan akses terhadap sumber daya, seperti pendanaan dan jaringan profesional, juga dapat menghambat partisipasi perempuan secara optimal.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan Kebudayaan dan mengurangi permasalahan dan kedala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Mengembangkan perencanaan strategis;
2. Mengembangkan infrastruktur budaya;
3. Meningkatkan kerjasama antar-stakeholder;
4. Mengembangkan produk dan jasa budaya yang inovatif;
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia;
6. Meningkatkan pemasaran dan promosi produk budaya;
7. Penguatan ekosistem ekonomi budaya berbasis UMKM dan ekonomi kreatif;
8. Peningkatan kapasitas pelaku budaya (wirausaha, digitalisasi, manajemen);
9. Integrasi kebijakan kebudayaan – pariwisata - ekraf;

10. Penyusunan data ekonomi budaya yang terukur dan berkelanjutan;
11. Pengembangan event budaya berorientasi ekonomi;
12. Perlu percepatan penetapan dan perlindungan warisan budaya;
13. Penguatan SDM pelestarian dan kelembagaan;
14. Integrasi warisan budaya dengan pendidikan dan pariwisata budaya;
15. Pelibatan aktif masyarakat dan generasi muda;
16. Penguatan Perencanaan Berbasis Dimensi dan Indikator IPK.
    Dinas Kebudayaan perlu memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dirancang secara langsung mendukung dimensi dan indikator IPK. Perencanaan kinerja harus berbasis pada hasil pengukuran IPK, khususnya pada dimensi yang masih memiliki nilai rendah.
    Tindak lanjut:
    a. Menyelaraskan Renstra, Renja, dan IKU Dinas Kebudayaan dengan indikator IPK;
    b. Memprioritaskan program pada dimensi IPK dengan capaian terendah (misalnya ekonomi budaya).
17. Peningkatan Kualitas Program dan Dampak Kegiatan.
    Perbaikan tidak hanya difokuskan pada kuantitas kegiatan, tetapi pada kualitas dan dampaknya terhadap masyarakat serta indikator IPK.
    Tindak lanjut:
    a. Mengubah pendekatan kegiatan dari berbasis output menjadi berbasis *outcome*;
    b. Memastikan setiap kegiatan kebudayaan memiliki indikator keberhasilan yang jelas;
    c. Melakukan evaluasi efektivitas program secara berkala.
18. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor.
    Pencapaian IPK tidak dapat dicapai hanya oleh Dinas Kebudayaan. Diperlukan kolaborasi aktif dengan OPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya.
    Tindak lanjut :
    a. Membangun koordinasi intensif dengan OPD sektor pariwisata, pendidikan, UMKM, dan ekonomi kreatif;
    b. Mengembangkan program kolaboratif lintas OPD berbasis kebudayaan;
    c. Melibatkan komunitas budaya, akademisi, dan pelaku usaha.
19. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kebudayaan.
    Kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pencapaian IPK. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur dan pelaku budaya perlu menjadi prioritas
    Tindak lanjut:
    a. Pelatihan perencanaan dan evaluasi kinerja berbasis IPK;
    b. Peningkatan kompetensi teknis pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan budaya;
    c. Penguatan peran kelembagaan kebudayaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
20. Penguatan Sistem Data, Monitoring, dan Evaluasi.
    Data yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pengukuran capaian IPK.
    Tindak lanjut:
    a. Pengembangan basis data kebudayaan terintegrasi;
    b. Pemutakhiran data warisan budaya, pelaku budaya, dan aktivitas kebudayaan;
    c. Monitoring dan evaluasi capaian IPK secara periodik.
21. Optimalisasi Pemanfaatan Kebudayaan sebagai Sumber Daya Pembangunan.
    Kebudayaan perlu diposisikan sebagai sumber daya strategis, bukan hanya objek pelestarian. Tindak lanjut :
    a. Pengembangan ekonomi budaya dan pemanfaatan warisan budaya
    b. Integrasi kebudayaan dalam pembangunan pariwisata dan pendidikan

c. Peningkatan peran kebudayaan dalam penguatan identitas dan kesejahteraan masyarakat.

22. Penguatan Komitmen Institusi, menjadikan budaya literasi sebagai nilai utama dalam visi, misi, dan kebijakan organisasi/sekolah serta menetapkan indikator kinerja literasi yang terukur;
23. Pembiasaan Literasi, melaksanakan kegiatan membaca dan menulis secara rutin, seperti membaca sebelum pembelajaran, membuat rangkuman, resensi buku, dan jurnal reflektif;
24. Pemanfaatan Teknologi dan Literasi Digital, mengoptimalkan perpustakaan digital, *e-book*, dan *platform* pembelajaran daring, serta meningkatkan kemampuan memilah informasi yang valid dan kredibel;
25. Penyediaan sarana dan lingkungan literasi, menyediakan sudut baca, bahan bacaan yang bervariasi dan relevan, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung kegiatan literasi.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

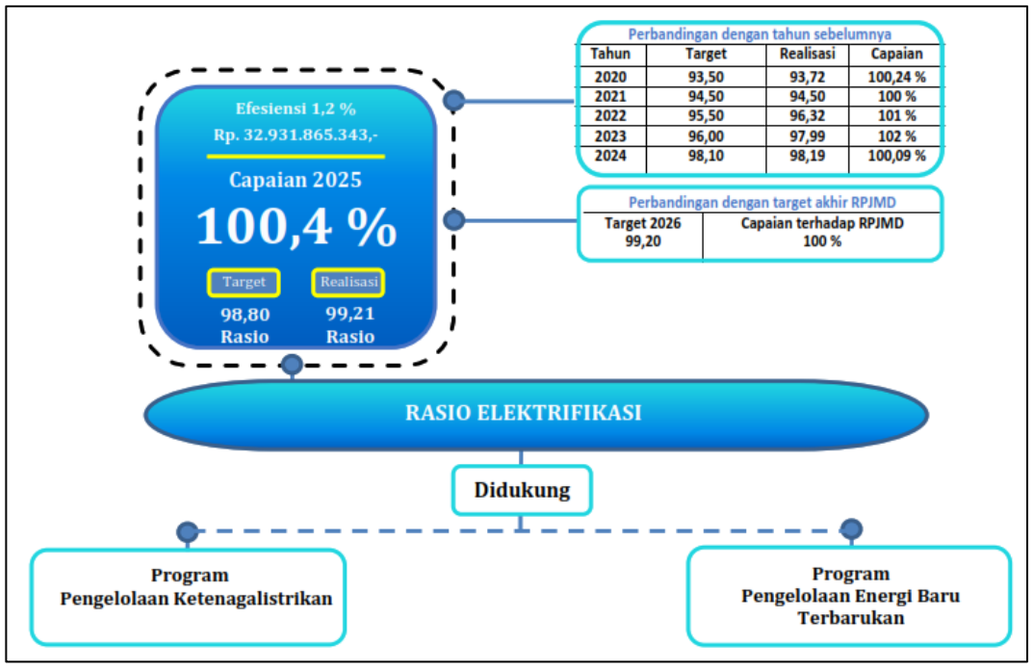
Tabel 3.123 Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengembangan Kebudayaan	1.948.428.405,00	1.932.034.295,00	99,16
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	717.890.436,00	587.479.841,00	81,83
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	198.972.165,00	196.442.806,00	98,73
Program Pengelolaan Permuseuman	190.579.784,00	184.050.784,00	96,57
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	2.524.776.894,00	2.132.456.256,00	84,46
Program Pembinaan Perpustakaan	2.177.602.637,00	1.688.357.812,00	77,53
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	40.790.000,00	36.733.175,00	90,05
Pengarustamaan Gender	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
Total	**8.585.130.236,00**	**7.449.148.714,00**	**86,77**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp8.585.130.236,00 terealisasi sebesar Rp7.449.148.714,00 atau 86,77%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp1.135.981.522,00 (13,23%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan (106%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (86,77%) dengan efesiensi 19,23%.

3.2.3.12 Sasaran Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

3.2.3.12.1 Rasio Elektrifikasi



Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non PLN dengan jumlah rumah tangga total. Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Rasio Elektrifikasi pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 99,21 Rasio dari target sebesar 98,80 Rasio dan terealisasi sebesar 100,4%

Rasio Elektrifikasi adalah indikator yang menggambarkan persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap layanan listrik dibandingkan dengan total rumah tangga di suatu wilayah. Rasio ini menjadi ukuran penting bagi pemerintah dalam menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur energi serta pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat. Semakin tinggi rasio elektrifikasi, semakin luas pula jangkauan listrik yang dinikmati masyarakat, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup, memperkuat aktivitas ekonomi, serta mendukung pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai capaian kinerja, berikut informasi capaian dan analisa terhadap indikator Rasio Elektrifikasi.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.124 Capaian Rasio Elektrifikasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Elektrifikasi	98,80 Rasio	99,21 Rasio	100,4%

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kepri

Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dapat dilihat dari indikator Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 99,21 Rasio dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 98,80 Rasio sehingga capaian kinerja sebesar 100,4% atau dalam kategori “Sangat Baik.”

Tabel 3.125 Perhitungan Rasio Elektrifikasi Tahun 2025

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga Berlistrik				Rumah Tangga Belum Berlistrik	RE(%)
				PLN	Non PLN	LTSHE	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)+(6)+(7)	(9)	(10)={(8)/(4)}*100
	Kepulauan Riau	**2.300.020**	**644.866**	**637.436**	**2.202**	**296**	**639.744**	**5.122**	**99,21%**
1	Karimun	275.383	86.095	85.312	266	-	85.578	517	99,40%
2	Natuna	84.600	26.688	25.676	-	-	25.676	1.012	96,21%

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga Berlistrik				Rumah Tangga Belum Berlistrik	RE(%)
				PLN	Non PLN	LTSHE	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)+(6)+(7)	(9)	(10)={(8)/(4)}*100
3	Lingga	101.309	31.758	30.152	47	161	30.199	1.559	95,09%
4	Batam	1.365.266	338.681	336.243	1.663	106	338.012	669	99,80%
5	Kep. Anambas	51.045	16.205	15.673	20	29	15.693	512	96,84%
6	Bintan	182.355	59.142	58.197	206	-	58.403	739	98,75%
7	Tanjungpinang	240.062	86.297	86.183	-	-	86.183	114	99,87%

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kepri

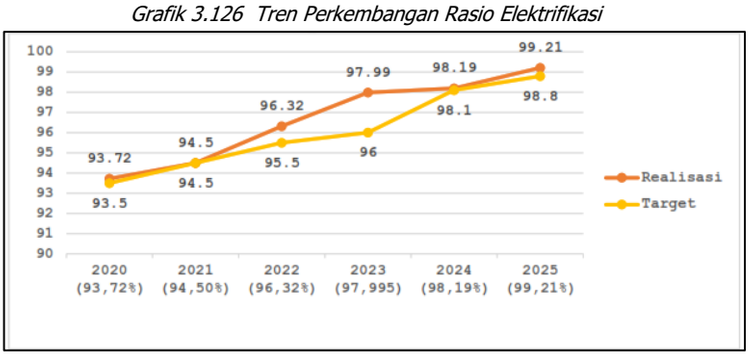
Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yaitu sebesar 99,21%. Dari total 644.866 rumah tangga, sebanyak 639.744 rumah tangga telah menikmati akses listrik, baik melalui jaringan PLN, Non-PLN, maupun LTSHE, sementara 5.122 rumah tangga masih tercatat belum berlistrik. Capaian ini menggambarkan bahwa upaya pemerataan akses energi listrik di Kepulauan Riau telah berjalan efektif, meskipun masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang perlu menjadi perhatian lanjutan.

Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mencatat rasio elektrifikasi tertinggi, masing-masing sebesar 99,80 persen dan 99,87 persen, yang mencerminkan infrastruktur kelistrikan yang relatif matang dan dominasi pasokan listrik melalui jaringan PLN. Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan juga menunjukkan capaian yang sangat baik dengan rasio di atas 98 persen, meskipun masih terdapat ratusan rumah tangga yang belum berlistrik, terutama di wilayah yang tersebar dan memiliki tantangan geografis.

Sementara itu, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki rasio elektrifikasi yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, yaitu berkisar antara 95,09 persen hingga 96,84 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah kepulauan terluar dan terpencil masih menghadapi kendala dalam penyediaan akses listrik, baik dari sisi jaringan PLN maupun pemanfaatan sumber energi alternatif seperti LTSHE. Jumlah rumah tangga belum berlistrik di wilayah-wilayah tersebut masih cukup signifikan dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 3.126 Tren Perkembangan Rasio Elektrifikasi



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kepri

Dapat dilihat pada grafik diatas, menunjukkan tren peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2020 - 2025, baik dari sisi target maupun realisasi. Secara umum, grafik memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses listrik kepada masyarakat. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi terealisasi sebesar 93,72 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan target sebesar 93,5 persen. Kondisi ini menandakan capaian awal yang relatif baik meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses listrik.

Pada tahun 2021 hingga 2023, rasio elektrifikasi terus mengalami peningkatan signifikan. Realisasi tahun 2021 mencapai 94,5 persen dan kembali sejalan dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023, realisasi rasio elektrifikasi

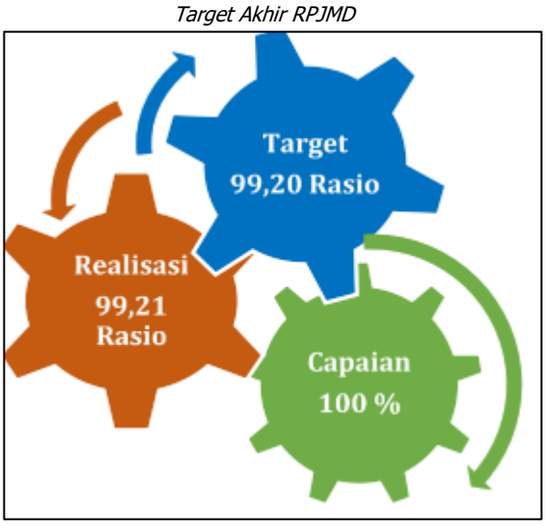
meningkat menjadi 96,32 persen dan 97,99 persen, yang keduanya melampaui target tahunan. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas program dan kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Memasuki tahun 2024 dan 2025, rasio elektrifikasi semakin mendekati kondisi elektrifikasi penuh. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 98,19 persen, sejalan dengan target yang ditetapkan, dan meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 99,21 persen, melampaui target sebesar 98,8 persen. Tren ini mengindikasikan bahwa upaya penyediaan akses listrik telah berjalan optimal dan semakin merata di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Capaian kinerja peningkatan Rasio Elektrifikasi tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1.02 Rasio. Dimana pada tahun 2024 Rasio Elektrifikasi sebesar 98,19 Rasio meningkat menjadi 99,21 Rasio pada tahun 2025.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Grafik 3.127 Perbandingan Realisasi Rasio Elektrifikasi dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kepri

D. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu:

1. Terlaksananya bantuan Penyambungan Listrik (BPBL) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bagi Rumah Miskin di wilayah Kabupaten Karimun dan Kota Batam;
2. Kegiatan pemeliharaan mesin genset yang akan di operasikan oleh PT. PLN (Persero) serta adanya kegiatan penambahan pembangunan ketenagalistrikan dari PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:
   a. Pulau Bertam Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
   b. Pulau Lingka Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
   c. Pulau Nguan Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang, Kota Batam.
3. Adanya kegiatan penambahan pembangunan kabel laut dari PT. PLN (Persero) dari Pulau Pemping ke Pulau Labun Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya melakukan upaya-upaya diatas, terdapat upaya lainnya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja, yaitu:

1. Mendorong Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan berupa bantuan CSR dalam bentuk Bantuan Penyambungan Listrik (BPBL), peran

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

2. Pemasangan genset dengan Lokasi Pemasangan di Pulau Nuja Kab. Lingga sebanyak 1 unit, di Pulau Bahan Kab. Karimun sebanyak 1 unit.

Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan rasio elektrifikasi, sebagai berikut:

1. Kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD.
2. Rumah tangga yang berada dalam satu pulau kecil juga masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cukup besar.
3. Adanya peraturan pemerintah yang meminta PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berbasis energi bersih sehingga juga membutuhkan biaya investasi yang cukup besar.

E. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi permasalahan dan kedala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Bekerja sama dengan PT. PLN (persero) untuk merelokasi mesin genset yang telah ada untuk dioperasikan di daerah yang belum berlistrik atau daerah yang belum mendapatkan layanan listrik 24 jam serta menyerahkan penggunaan dan pemeliharaan beberapa asset genset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. PLN (Persero) agar masyarakat mendapatkan layanan listrik yang lebih andal.
2. Akan mengusulkan pembangunan pembangkit EBT kepada Pemerintah Pusat dengan menggunakan sumber energi *primer local* yang tersedia sebagai sumber energi listrik di daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Akan melaksanakan bantuan pemasangan baru listrik (BPBL) sebanyak 460 unit yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

F. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 3.128 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Rasio Eletrifikasi Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	7.032.813.319,00	6.963.267.756,00	99,01
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	25.899.052.024,00	25.701.125.294,00	99,75
Total	**32.931.865.343,00**	**32.664.393.050,00**	99,18

Dari jumlah anggaran sebesar Rp32.931.865.343,00 terealisasi sebesar Rp32.664.393.050,00 atau 99,18%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp267.472.293,00 (0,8%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi (100,4%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (99,18%) dengan efesiensi 1,2%.

3.2.3.13 Sasaran Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir

3.2.3.13.1 Persentase Jalan Kondisi Mantap



Jalan kondisi mantap dapat didefinisikan sebagai jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Secara harafiah jalan didefinisikan sebagai jalur di mana masyakarat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus. Persentase Jalan Kondisi mantap di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Persentase Jalan Kondisi mantap pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 81,11% dari target sebesar 81,10% dan terealisasi sebesar 100% .

Persentase jalan kondisi mantap adalah indikator terbaru setelah dilakukannya perubahan RPJMD 2021-2026 untuk menyesuaikan dengan capaian kinerja jalan kondisi mantap hasil survey kondisi jalan yang dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan menjadi dasar untuk digunakan sebagai usulan yang dilakukan setiap tahunnya ke Kementerian PU untuk mendapatkan dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan Provinsi di Kepulauan Riau.

Tabel 3.129 Status Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Panjang Ruas (KM)
1	Kota Tanjungpinang	78,97
2	Kabupaten Bintan	106,28
3	Kabupaten Lingga	163,93
4	Kabupaten Natuna	143,33
5	Kabupaten Karimun	79,71
6	Kabupaten Kepulauan Anambas	48,54
7	Kota Batam	0
Total Ruas jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau		**620,76**

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Persentase Jalan Kondisi Mantap merupakan gabungan dari persentase jalan kondisi baik ditambah dengan jalan kondisi sedang serta formula perhitungan persentase

jalan kondisi mantap adalah Panjang jalan kondisi mantap (503,510 km) dibandingkan dengan Total Ruas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau (620,76 Km) sehingga didapatkan hasilnya 81,11%. Perhitungan kondisi jalan mantap berdasarkan pemetaan dari data dasar kondisi jalan tahun 2025 yang kegiatan surveynya dilakukan di akhir tahun 2024.

Tabel 3.130 Panjang Jalan Kondisi Mantap

Panjang jalan kondisi mantap (Baik + Sedang)	Panjang jalan provinsi keseluruhan	Persentase Capaian Kinerja (%)
503,51	620,76	81,11

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dapat dilihat dari indikator Persentase Jalan Kondisi Mantap di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Realisasi Persentase Jalan Kondisi Mantap Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 81,11% dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 81,10% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 3.131 Capaian Persentase Jalan Kondisi Mantap

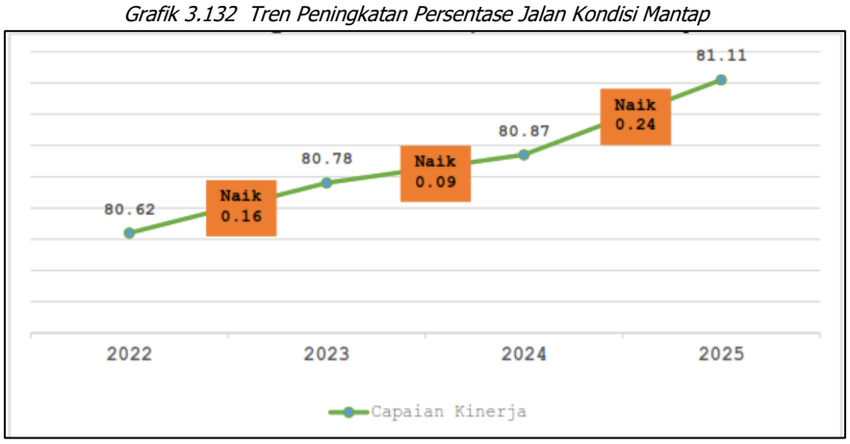
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Jalan Kondisi Mantap	81,10%	81,11%	100%

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

Capaian kinerja persentase jalan mantap tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,24%. Dimana pada tahun 2024 peningkatan persentase jalan mantap sebesar 80,87% meningkat menjadi 81,11% pada tahun 2025. Peningkatan ini disebabkan oleh konsistennya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk meningkatkan kualitas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau, Pengawasan yang juga dilakukan oleh pemerintah maupun kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya kualitas jalan sehingga masyarakat selalu melaporkan jika ada jalan yang kondisinya kurang baik agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 3.132 Tren Peningkatan Persentase Jalan Kondisi Mantap



Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

Dapat dilihat pada tabel diatas, Persentase Jalan Kondisi Mantap Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya, kondisi awal pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 terdapat peningkatan persentase dari 80,62% menjadi 81,11% dengan besaran penambahan persentase sebesar 0,49%. peningkatan persentase terkecil pada tahun 2023 dengan persentase capaian 0,09%.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Persentase Jalan Kondisi Mantap di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 81,11% dengan target sebesar 81,26% sehingga capaian kinerja sebesar 99,82%.

Tabel 3.133 Capaian Persentase Jalan Kondisi Mantap

Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian
81,26%	81,11%	99,82%

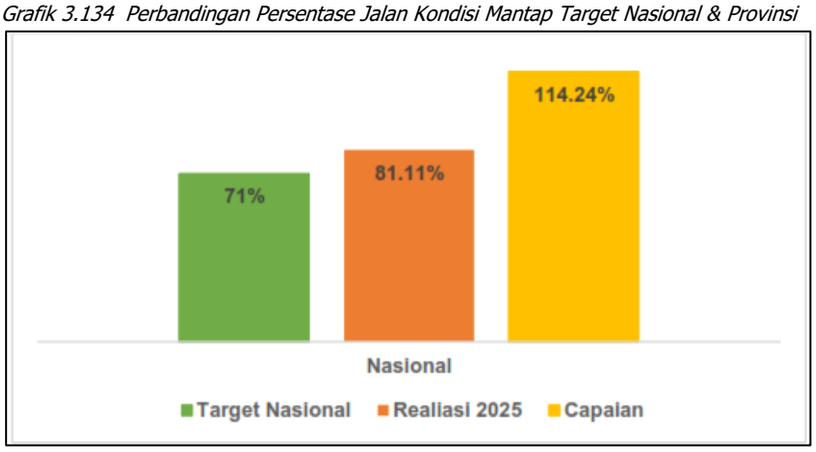
Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 – 2025 Lampiran II halaman 132, target untuk kemantapan jalan provinsi secara nasional pada tahun 2025 sebesar 71%. Realisasi kemantapan jalan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 81,11% dengan capaian realisasi sebesar 114,24%. Dengan capaian melebihi 100%, persentase jalan mantap Provinsi kepulauan Riau sudah melebihi target nasional.

Provinsi Kepulauan Riau dalam Persentase Jalan Kondisi Mantap di level nasional, dapat terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.134 Perbandingan Persentase Jalan Kondisi Mantap Target Nasional & Provinsi



Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Persentase Jalan Kondisi Mantap Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu:

1. Pendanaan yang Memadai: Anggaran yang cukup untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan adalah kunci utama. Tanpa dana yang memadai, proyek jalan tidak dapat berjalan dengan lancar.
2. Perencanaan yang Matang: Perencanaan yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk memastikan setiap tahap proyek berjalan sesuai rencana.
3. Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan yang ketat serta evaluasi berkala terhadap proyek jalan memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai standar dan waktu yang ditetapkan.
4. Sumber Daya Manusia: Tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang konstruksi jalan sangat penting untuk menjamin kualitas hasil akhir.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya melakukan upaya-upaya diatas, terdapat upaya lainnya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja, yaitu:

1. Kerjasama dan Koordinasi: Kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, kontraktor, dan masyarakat, dapat mempercepat proses penyelesaian proyek jalan.
2. Selain itu faktor Teknologi dan Inovasi: Penggunaan teknologi modern dan metode inovatif dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan.

Adapun upaya spesifik yang dilakukan dalam mendukung ketercapaian indikator Jalan dalam kondisi mantap Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.135 Paket Pekerjaan yang mendukung Persentase Jalan Kondisi Mantap Provinsi Kepulauan Riau

NO	PAKET PEKERJAAN	SATUAN	PANJANG PENANGANAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI
1	Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun	Km	0,3454	1.414.000.000,00	1.413.080.700,00	99,93
2	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,13	2.970.000.000,00	2.968.565.000,00	99,95
3	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	Km	0,148	580.000.000,00	572.383.400,00	-
4	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	Km	0,075	793.000.000,00	792.130.000,00	99,89
5	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas	Km	0,225	1.263.573.923,00	1.263.573.900,00	100,00
6	Pemeliharaan berkala jalan sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, kab. Karimun (DBH Sawit provinsi Kepri Lanjutan)	Km	0,265	1.041.000.000,00	1.020.216.400,00	98,00
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,6877	2.449.000.000,00	2.423.237.900,00	98,95
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang	Km	1,004	3.295.000.000,00	3.293.348.700,00	99,95
9	Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang	Km	0,0242	4.450.000.000,00	3.568.025.000,00	80,18
10	Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga	Km	0,261	1.520.000.000,00	1.519.999.300,00	100,00
11	Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna	Jembatan	1	12.054.000.000,00	12.053.343.500,00	99,99
Total			**3,1653**	**31.829.573.923,00**	**30.887.903.800,00**	**97,04**

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

Pemeliharaan berkala jalan sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, kab. Karimun (DBH Sawit provinsi Kepri Lanjutan)



Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas



Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan



Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang





Gambar 3.136 Pekerjaan Jalan di Provinsi Kepri Tahun 2025

Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Persentase Jalan Kondisi Mantap, sebagai berikut:

1. Anggaran Terbatas: Anggaran yang terbatas sering kali menjadi hambatan utama dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Biaya yang tinggi untuk material, tenaga kerja, dan peralatan bisa sulit terpenuhi dengan anggaran yang ada.
2. Kualitas Material dan Pelaksanaan: Penggunaan material yang berkualitas rendah dan pelaksanaan yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan jalan cepat rusak. Pembangunan jalan yang tidak sesuai spesifikasi juga bisa menyebabkan jalan cepat berlubang atau retak.
3. Pengaruh Cuaca dan Kondisi Alam: Cuaca ekstrem seperti hujan deras, banjir, dan tanah longsor dapat merusak jalan dengan cepat. Kondisi geografis yang sulit, seperti pegunungan atau daerah rawan bencana, juga menyulitkan pembangunan jalan yang mantap.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan persentase jalan mantap dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Pemeliharaan Rutin: Menganggarkan dan Melakukan pemeliharaan jalan secara rutin agar mencegah kerusakan yang lebih parah. Ini termasuk penambalan lubang, perbaikan permukaan jalan, dan penggantian lapisan aspal.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Menggunakan material berkualitas tinggi dan teknologi canggih dalam pembangunan jalan agar lebih tahan lama dan mampu menahan beban berat.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

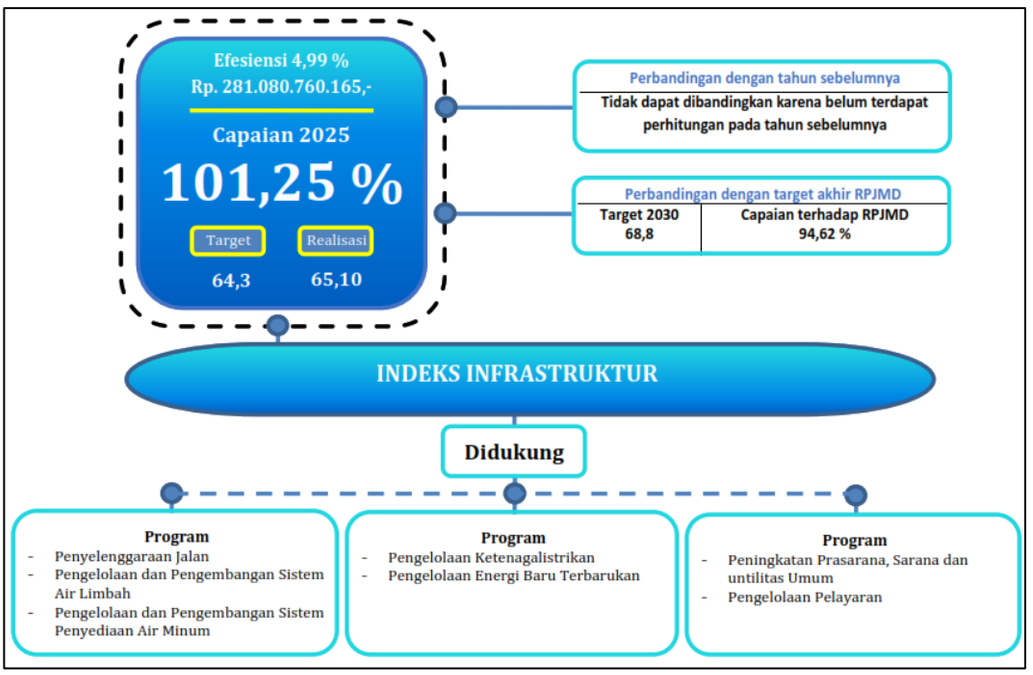
Tabel 3.137 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Persentase Jalan Kondisi Mantap Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Penyelenggaraan Jalan	49.854.264.462,00	44.032.581.032,00	88,32
Total	**49.854.264.462,00**	**44.032.581.032,00**	**88,32**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp49.854.264.462,00 terealisasi sebesar Rp44.032.581.032,00 atau 88,32%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp5.821.683.430,00 (11,68%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase Jalan Kondisi Mantap (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (88,32%) dengan efesiensi 11,68%.

3.2.3.14 Sasaran Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi, Strategi dan Memiliki Daya ungkit

3.2.3.14.1 Indeks Infrastruktur



Indeks infrastruktur adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu. Indeks ini biasanya dihitung berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi. Indeks. Indeks Infrastruktur pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 101,25% dari target sebesar 64,3 Indeks dan terealisasi sebesar 65,10 Indeks.

Indeks Infrastruktur merupakan ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan berbagai fasilitas dasar yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai komponen seperti transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, sanitasi, hingga infrastruktur sosial seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Melalui pengukuran yang sistematis, Indeks Infrastruktur memberikan gambaran objektif mengenai seberapa baik suatu wilayah mampu menyediakan layanan dasar bagi penduduknya.

Sebagai indikator penting pembangunan, Indeks Infrastruktur membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi kesenjangan antar wilayah. Wilayah dengan indeks yang tinggi umumnya memiliki jaringan transportasi yang memadai, akses listrik yang stabil, konektivitas digital yang baik, serta layanan publik yang mudah dijangkau. Sebaliknya, daerah dengan indeks rendah biasanya menghadapi keterbatasan yang berdampak pada produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

Pemanfaatan Indeks Infrastruktur sangat strategis dalam perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan memahami kondisi aktual infrastruktur, pemerintah dapat menyusun prioritas investasi yang lebih tepat sasaran, mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Selain itu, indeks ini juga menjadi alat evaluasi untuk mengukur progres pembangunan dari waktu ke waktu sehingga strategi yang diterapkan dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan daerah dan dinamika pembangunan nasional.

Adapun dasar hitungan dalam menentukan capaian indeks infrastruktur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.138 Dasar Perhitungan Indeks Infrastruktur

Indikator Tujuan/Sasaran	Bobot nilai	Target 2025	Perangkat Daerah
Air Minum (Akses Air Minum Aman)	0,3634	26,75	DPUPP
Persentase Jalan Kondisi Mantap	0,3366	81,1	DPUPP
Sanitasi (Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman)	0,4889	7,76	DPUPP
Listrik (Rasio Elektrifikasi)	0,5166	98,8	Dinas ESDM
Telekomunikasi (Kualitas Sinyal Telepon dan Sinyal Internet)	0,4987	100	DISKOMINFO
Indeks Infrastruktur (Indeks)		**64,3**	**DPUPP, Dinas ESDM, dan DISKOMINFO**

Sumber : Data Bersama diolah DPUPP, Dinas ESDM dan DISKOMINFO

Dasar perhitungan penentuan realisasi capaian indeks infrastruktur yaitu (indikator air minum aman (bobot x realisasi) + jalan mantap (bobot x realisasi) + sanitasi aman (bobot x realisasi) + rasio elektrifikasi (bobot x realisasi) + telekomunikasi (bobot x realisasi)) / 2 = Capaian Indeks Infrastruktur.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit dapat dilihat dari indikator Indeks Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Realisasi Indeks Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 65,10 indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 64,3 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 101,25% atau dalam kategori “Sangat Baik.”

Tabel 3.139 Capaian Indeks Infrastruktur

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur	64,3 Indeks	65,10 Indeks	101,25%

Sumber : Data Bersama diolah DPUPP, Dinas ESDM dan DISKOMINFO

Dalam penentuan capaian indeks infrastruktur terdiri dari 5 indikator, dengan bobot paling tinggi berada pada rasio elektrifikasi sebesar 0,5166. Terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target pada tahun 2025 hal ini dikarenakan indikator air minum aman dan sanitasi aman membutuhkan data dukung dari kabupaten/kota. Pada indikator listrik (Rasio Elektrifikasi) juga masih menggunakan data capaian pada Triwulan III, untuk capaian sampai dengan Triwulan IV masih menunggu rekon dengan Kementerian.

Tabel 3.140 Perhitungan Indeks Infrastruktur

Indikator Tujuan/Sasaran	Bobot nilai	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian Target (%)
Air Minum (Akses Air Minum Aman)	0,3634	26,75	4,07	15,21
Persentase Jalan Kondisi Mantap	0,3366	81,1	81,11	100
Sanitasi (Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman)	0,4889	7,76	0,85	11
Listrik (Rasio Elektrifikasi)	0,5166	98,8	99,21	100
Telekomunikasi (Kualitas Sinyal Telepon dan Sinyal Internet)	0,4987	100	99,77	99,77
Indeks Infrastruktur (Indeks)		**64,3**	**65,1**	**101,25**

Sumber : Data Bersama diolah DPUPP, Dinas ESDM dan DISKOMINFO

Indeks Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau merupakan indikator baru yang terbentuk berdasarkan RPJMD tahun 2025 – 2029 sehingga indeks infrastruktur belum bisa dilihat perbandingan berdasarkan realisasi pada tahun sebelumnya.

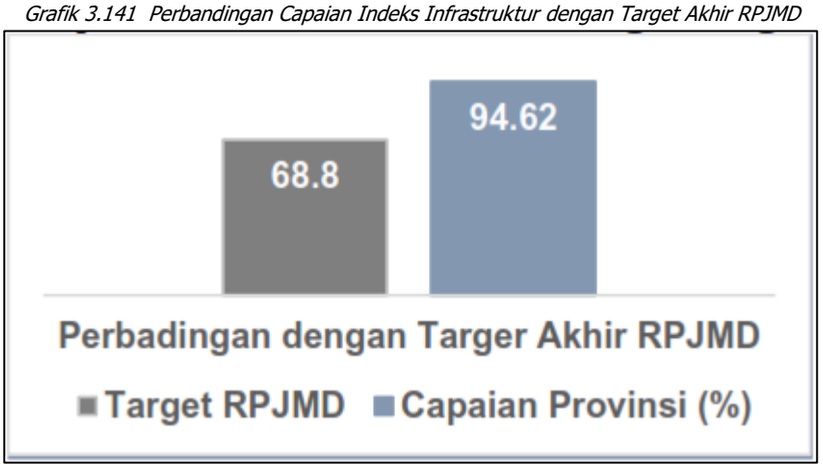
Capaian kinerja pada tahun 2025 belum bersifat final karena beberapa indikator pendukung indeks infrastruktur masih menunggu data capaian dari Kabupaten/Kota seperti indikator sanitasi aman, air minum aman, dan elektrivikasi yang belum melakukan rekon dengan Kementerian.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Tidak dapat dibandingkan karena belum terdapat perhitungan pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Grafik 3.141 Perbandingan Capaian Indeks Infrastruktur dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Data Bersama diolah DPUPP, Dinas ESDM dan DISKOMINFO

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 65,10 indeks dengan target sebesar 68,8 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 94.62%. Berdasarkan grafik diatas bahwa realisasi tahun 2025 berbanding dengan target akhir RPJMD memiliki capaian sebesar 94,62%. Capaian realisasi masih bisa bertambah mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama pada RPJMD 2025 – 2029.

D. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Indeks Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu:

1. Peningkatan dan pemerataan pembangunan, terutama terkait konektivitas antar wilayah. Jalan dan Jembatan merupakan kunci utama dalam membangun konektivitas. Pembangunan jembatan menghubungkan wilayah yang terpisah oleh rintangan alam seperti sungai atau lembah, yang secara drastis memangkas waktu tempuh. konektivitas bukan hanya jalan, namun juga kualitas dari jalan tersebut, pemeliharaan berkala jalan provinsi yang sudah ada dapat memperlancar distribusi

logistik. Pada tahun 2025 Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa pekerjaan terkait konektivitas antara lain:

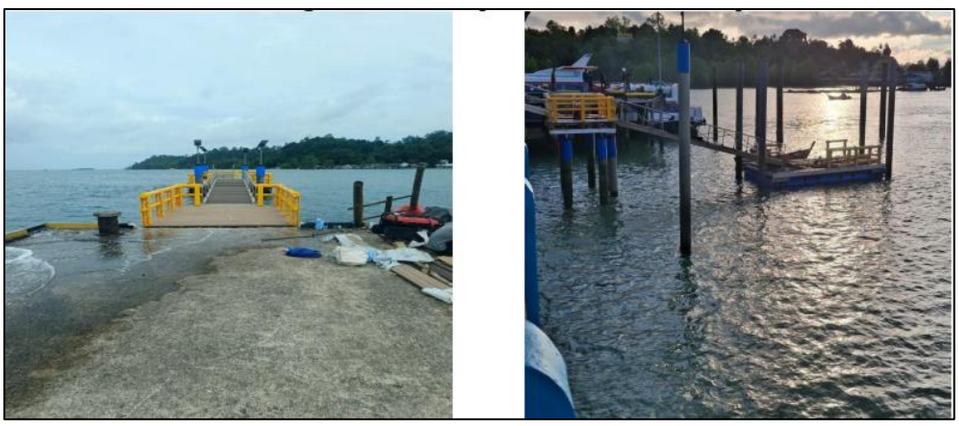
Tabel 3.142 Data Pemerataan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Paket Kegiatan	Satuan	Panjang Penanganan
1	Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun	Km	0,3454
2	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,13
3	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	Km	0,148
4	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	Km	0,075
5	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas	Km	0,225
6	Pemeliharaan berkala jalan sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, kab. Karimun (DBH Sawit provinsi Kepri Lanjutan)	Km	0,265
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,6877
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang	Km	1,004
9	Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang	Km	0,0242
10	Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga	Km	0,261
11	Pembangunan Jembatan Semala, Kabupaten Natuna	Jembatan	1

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

4. Infrastruktur trasnportasi berfungsi sebagai urat nadi, yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi, membuka isolasi wilayah, dan mempercepat distribusi barang dan mobilitas manusia. Pembangunan pelabuhan berfungsi sebagai titik simpul yang menghubungkan pusat produksi dengan konsumsi merupakan desain pengembangan wilayah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan pada tahun 2025 memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan sebagai titik simpul konektivitas. Pelabuhan yang dibangun dan dipelihara adalah:
   a. Pembangunan Pelabuhan Rakyat Kp. Beko Kasu Batam
   b. Pengadaan dan Pemasangan Ponton HDPE Pelabuhan Jagoh Kab. Lingga
   c. Rehap Pelabuhan Tanjung Buton Kab. Lingga

   Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan ini diharapkan mampu menjamin aksesibilitas logistik tetap terjaga meski di wilayah terpencil. Peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan baik melalui pembangunan dan pemeliharaan mamupu mengurangi hambatan waktu dan biaya logistik yang kemudian menstimulus pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan pelabuhan bukan hanya soal fisik dermaga, melainkan tentang membangun ekosistem yang terkoneksi.



Gambar 3.143 Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Provinsi Kepri Tahun 2025

5. Penguatan Regulasi pada sektor infrastruktur, Untuk mendukung terwujudnya air minum aman dan sanitasi aman di Kepulauan Riau, Pemerintah berkomitmen dengan cara telah dibuat Roadmap Air Minum melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2025 – 2030. Pemerintah Provinsi juga telah menyusun Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 yang menargetkan peningkatan persentase sanitasi aman di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Perkuatan infrastruktur terkait telekomunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital seperti perluasan jaringan kabel, nirkabel, satelit dan terutama penguatan jaringan 4G LTE yang merata meningkatkan aksesibilitas secara signifikan.
7. Terlaksananya program ketenagalistrikan seperti kegiatan Bantuan Penyambungan Listrik (BPBL) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bagi Rumah Miskin di wilayah Kabupaten Karimun dan Kota Batam dan kegiatan pemeliharaan mesin genset yang akan di operasikan oleh PT. PLN (Persero) serta adanya kegiatan penambahan pembangunan ketenagalistrikan dari PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 3.144 Pemasangan Bantuan Penyambungan Listrik

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya melakukan upaya-upaya diatas, terdapat upaya lainnya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja, yaitu:

1. Perbaikan prasarana, sarana, dan untilitas umum mendukung penguatan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya saing. Prasarana yang memadai, seperti jaringan jalan, jembatan, dan drainase, berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperlancar mobilitas orang dan barang, ketersediaan sarana pendukung yang layak akan mendorong kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup.
2. Penguatan koordinasi antar instansi dan pemerintah daerah terutama dalam hal standar.
3. Mendorong Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.
4. Pemasangan genset dengan Lokasi Pemasangan di Pulau Nuja Kab. Lingga sebanyak 1 unit, di Pulau Bahan Kab. Karimun sebanyak 1 unit.

Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Indeks Infrastruktur, sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran dan biaya pembangunan yang tinggi
   Tantangan membangun infrastruktur pada Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih mahal dibandingkan di daratan karena kendala logistik antar pulau. Adanya komitmen terkait air minum aman, sanitasi aman, dan pembangunan infrastruktur

ketenagalistrikan berbasis energi bersih membutuhkan pembiayaan baik dari segi APBD dan investasi lain yang cukup besar.

2. Ketimpangan akses dan kondisi geografis yang menantang
   Provinsi Kepulauan Riau memiliki ribuan pulau dengan pemukiman yang banyak berdiri di atas air atau di pesisir pantai sehingga dari segi aspek sanitasi, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh kawasan padat penduduk seperti di Batam atau Tanjungpinang secara menyeluruh. Hal ini juga didukung belum semua Kabupaten/Kota memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis
   Dari sisi kelistrikan, rumah tangga yang berada pada pulau-pulau kecil masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas. Untuk mendukung ketercapaian air minum aman, tantangan kabupaten/kota adalah memastikan air tersebut mengalir 24 jam dan kualitasnya teruji secara laboratorium. Banyak wilayah di Kepulauan Riau yang aliran airnya masih bergilir (tidak 24 jam).
4. Target yang terlalu tinggi sehingga capaian target tidak tercapai
   Penentuan target harus menyesuaikan pada kemampuan daerah, mengingat pada tahun 2025 dan 2026 Provinsi Kepulauan Riau defisit anggaran, untuk itu target yang terlalu tinggi akan merugikan masing-masing OPD pendukung dari indeks infrastruktur.

E. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan Indeks Infrastruktur dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Peningkatan integrasi jenis infrastruktur, Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau akan Bekerja sama dengan PT. PLN (persero) untuk merelokasi mesin genset yang telah ada untuk dioperasikan di daerah yang belum berlistrik atau daerah yang belum mendapatkan layanan listrik 24 jam serta menyerahkan penggunaan dan pemeliharaan beberapa asset genset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. PLN (Persero) agar masyarakat mendapatkan layanan listrik yang lebih andal. Selanjutnya akan mengusulkan pembangunan pembangkit EBT kepada Pemerintah Pusat dengan menggunakan sumber energi *primer local* yang tersedia sebagai sumber energi listrik di daerah Provinsi Kepulauan Riau dan akan melaksanakan bantuan pemasangan baru listrik (BPBL) sebanyak 460unit yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
2. Melakukan pemeliharaan jalan secara rutin agar mencegah kerusakan yang lebih parah. Ini termasuk penambalan lubang, perbaikan permukaan jalan, dan penggantian lapisan aspal pada Kabupaten/Kota berdasarkan hasil survei jalan mantap.
3. Koordinasi antar pemerintah daerah dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk peningkatan kualitas layanan seperti berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mendata dan membangun BTS (*Base Transceiver Station*) di wilayah-wilayah yang sudah terjangkau sinyal seluler namun dilakukan upaya peningkatan menjadi tersedianya sinyal internet.
4. Melakukan pendampingan pada 7 kabupaten/kota terkait percepatan pembangunan sanitasi permukiman untuk mencapai target sanitasi aman di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Melakukan pengadaan dan pemasangan pipa JDU di Jl Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjungpinang bertujuan untuk memperkuat sistem distribusi air bersih dari sumber atau pusat pengolahan ke masyakarat.

F. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

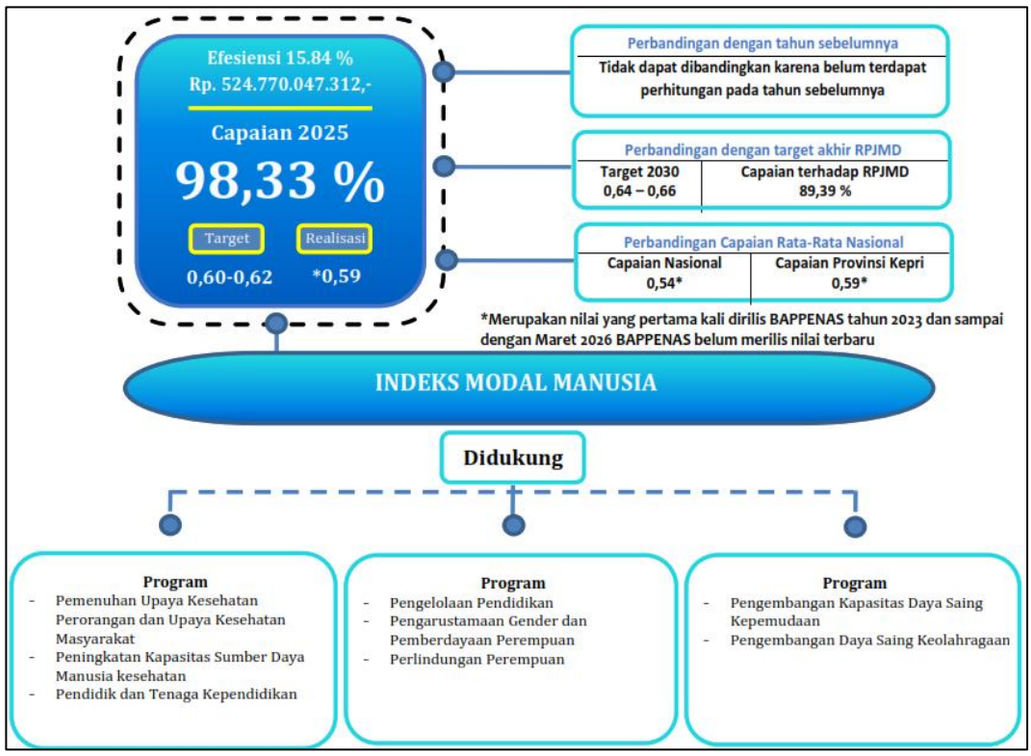
Tabel 3.145 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Penyelenggaraan Jalan	49.854.264.462,00	44.032.581.032,00	88,32
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	105.381.749,00	87.439.665,00	88,97
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minumn	1.504.353.910,00	1.490.316.311,00	99,07
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	7.032.813.319,00	6.963.267.756,00	99,01
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	25.899.052.024,00	25.701.125.294,00	99,24
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Untilitas Umum	188.526.981.428,00	187.972.550.830,00	99,7
Program Pengelolaan Pelayaran	8.157.913.273,00	4.322.596.278,00	52,99
Total	**281.080.760.165,00**	**270.569.877.166,00**	**96,26**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp281.080.760.165,00 terealisasi sebesar Rp270,569,877,166,00 atau 96,26%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp10.510.882.999,00 (3,74%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Infrastruktur (101,25%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,26%) dengan efesiensi 4,99%.

3.2.3.15 Sasaran Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul

3.2.3.15.1 Indeks Modal Manusia



Indeks Modal Manusia adalah menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Indeks Modal Manusia adalah pendekatan yang dilakukan oleh World Bank (Human Capital Index). Indeks Modal Manusia pada Tahun 2025 menggunakan data Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 0,59 Indeks dari target sebesar 0,60-0,62 Indeks (menggunakan target terendah) dan terealisasi sebesar 98,33%.

Indeks Modal Manusia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki penduduk. Indeks ini menggambarkan kemampuan suatu populasi untuk berkontribusi secara produktif dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan sosial. Semakin

tinggi nilai indeks, semakin besar potensi masyarakat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan.

Indeks Modal Manusia tidak hanya menilai tingkat pendidikan formal, tetapi juga kualitas pembelajaran, rata-rata lama sekolah, serta kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan dunia kerja. Dari sisi kesehatan, indikator ini memperhitungkan kualitas gizi, harapan hidup, serta kemampuan individu untuk menjalani aktivitas produktif sepanjang hidup. Dengan demikian, indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa siap suatu generasi dalam berkompetisi di tingkat nasional maupun global.

Pemerintah dan pemangku kepentingan sering memanfaatkan Indeks Modal Manusia sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan. Hasil pengukuran indeks ini membantu mengidentifikasi tantangan utama seperti rendahnya akses pendidikan, tingginya angka stunting, atau kualitas pelatihan kerja yang belum memadai. Dengan fokus peningkatan pada aspek-aspek tersebut, pembangunan modal manusia dapat berlangsung lebih optimal sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing daerah maupun negara.

Indeks modal manusia diukur melalui beberapa komponen utama:

1. Probabilitas bertahan hidup (survival) hingga usia 5 tahun: Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita.
2. Pendidikan: Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui *harmonized test scores*. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran *Learning-Adjusted Years of Schooling* menggunakan metrik konversi.
3. Kesehatan: Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. 2 proksi yang digunakan adalah (1) *adult survival rate* yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan (2) prevalensi stunting.

Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap.

Komponen-komponen tersebut dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Survival dihitung dari angka kematian balita (SUPAS dan LF SP).
2. Pendidikan: Akses pendidikan tetap diukur melalui harapan lama sekolah, namun untuk kualitas pendidikan, *harmonized test scores* diukur melalui proksi hasil asesmen pendidikan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran *Learning-Adjusted Years of Schooling* menggunakan metrik konversi.
3. Kesehatan dihitung dari data *adult survival rate* (SUPAS dan LF SP) yang diagregasi pada usia 15- 60 dan prevalensi stunting (SSGI dan SKI)

Konversi ketiga komponen menjadi Indeks Modal Manusia dilakukan menggunakan pendekatan yang dilakukan *World Bank*.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul dapat dilihat dari indikator Indeks Modal Manusia di Provinsi Kepulauan Riau hasil yang baik. Realisasi Indeks Modal Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dengan menggunakan data tahun 2023 sebesar 0,59 indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 0,60-0,62 indeks (menggunakan target terendah) sehingga capaian kinerja sebesar 98,33% atau dalam kategori “Baik”.

Tabel 3.146 Capaian Indeks Modal Manusia

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Modal Manusia	0,60 – 0,62 Indeks	0,59 Indeks	98,33%

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kepri

Capaian realisasi Indeks Modal Manusia menggunakan nilai tahun 2023, hal ini disebabkan belum selesainya proses penilaian oleh BAPENAS RI.

Survival dihitung dari angka kematian balita (AKB), berdasarkan laporan rutin program sampai dengan bulan November 2025 diperoleh jumlah kematian Bayi sebanyak 290 kasus dari 28.474 KH. Apabila dikonversikan menjadi Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi sebesar 10,2 per 1.000 kelahiran hidup.

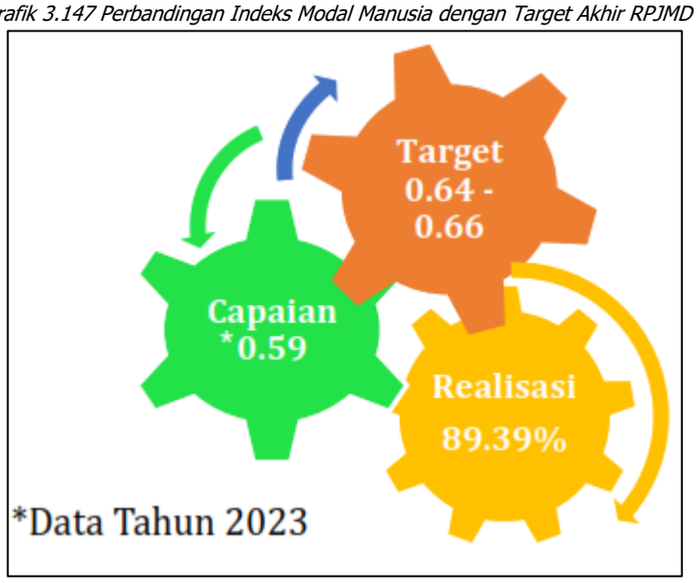
B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Tidak dapat dibandingkan karena belum terdapat perhitungan pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Modal Manusia di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0.59 indeks dengan target sebesar 0.64 – 0,66 indeks (menggunakan target tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 89,39%.

Grafik 3.147 Perbandingan Indeks Modal Manusia dengan Target Akhir RPJMD

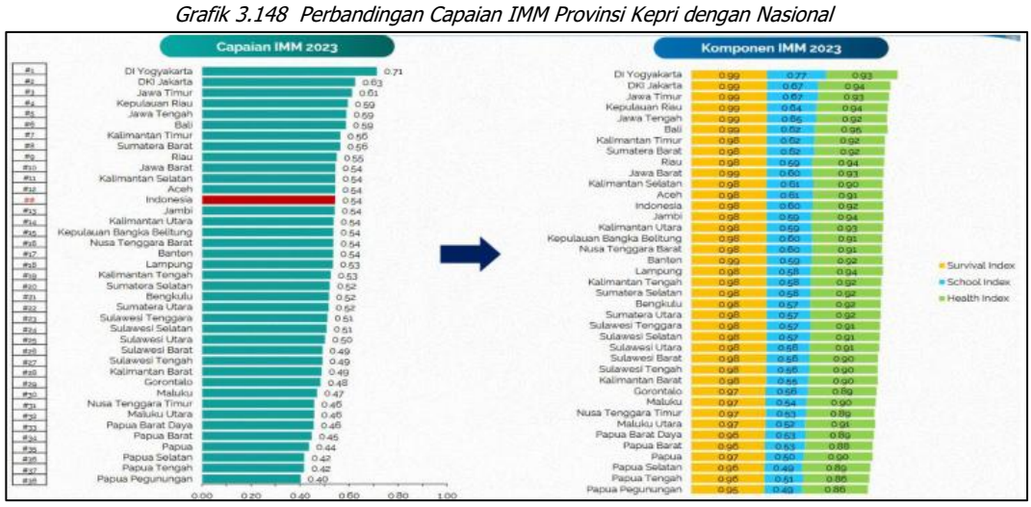


Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kepri

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Capaian Indeks Modal Manusia Provinsi Kepulauan Riau dibandingan dengan target nasional pada Tahun 2025 menggunakan data Tahun 2023 berada diatas target nasional yaitu rata-rata nasional sebesar 0,54 Indeks dengan capaian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,59 Indeks.

Grafik 3.148 Perbandingan Capaian IMM Provinsi Kepri dengan Nasional



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Indeks Modal Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu:

1. Dari Komponen Probabilitas bertahan hidup melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Melaksanakan desiminasi hasil pelaksanaan AMPSR di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota sebagai bahan pembelajaran agar kasus kematian serupa tidak terjadi lagi dan AMPSR dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
   b. Berkolaborasi dengan organisasi profesi seperti IBI, IDAI, dan POGI dalam melakukan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan reproduksi.
   c. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu dan anak ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan puskesmas.
   d. Melakukan *feedback* data program pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkala.
2. Dari Komponen Pendidikan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Perluasan akses pendidikan sejak usia dini, melalui peningkatan layanan PAUD hingga pendidikan menengah
   b. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah terpencil, pesisir, dan pulau-pulau
   c. Penguatan program wajib belajar 12 tahun, termasuk dukungan pembiayaan dan regulasi daerah
   d. Optimalisasi bantuan pendidikan (BOS, PIP/KIP, dan beasiswa daerah) agar tepat sasaran dan berkelanjutan
   e. Peningkatan kualitas dan distribusi pendidik, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan
   f. Pengembangan pendidikan nonformal dan kesetaraan, sebagai jalur alternatif bagi masyarakat
   g. Pemanfaatan teknologi pembelajaran, untuk menjangkau peserta didik di wilayah sulit akses
   h. Peningkatan peran orang tua dan masyarakat, melalui kampanye kesadaran pentingnya pendidikan jangka Panjang
   i. Penguatan kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
   j. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis seperti tata boga dan menjahit bagi perempuan dalam upaya pemningkatan kualitas keluarga untuk

meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan dalam ekonomi keluarga dan penyelenggaraan sekolah Perempuan paket C bagi Perempuan kelompok rentan yang putus sekolah.

k. Optimalisasi program Pemilihan Pemuda Pelopor mulai dari tingkat desa, daerah, hingga nasional.
l. Penajaman indikator kepeloporan agar lebih berdampak dan berkelanjutan
m. Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan inovasi sosial berbasis kebutuhan zaman.
n. Penguatan literasi digital, teknologi, dan green skills bagi pemuda.
o. Pendampingan intensif bagi calon dan penerima Pemuda Pelopor.
p. Pengembangan inkubator ide dan usaha pemuda berbasis potensi lokal.
q. Penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas pemuda.
r. Pelibatan Pemuda Pelopor dalam program pembangunan daerah
s. Promosi dan publikasi kiprah Pemuda Pelopor melalui media sosial dan *platform* digital.
t. Pemanfaatan teknologi untuk memperluas dampak gerakan kepeloporan.
u. Penguatan pembinaan atlet usia dini secara berjenjang dan berkelanjutan.
v. Pemanduan bakat yang lebih sistematis melalui sekolah dan klub olahraga.
w. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi pelatih, wasit, dan tenaga pendukung.
x. Pemberian insentif dan penghargaan berbasis prestasi.

3. Dari Komponen Kesehatan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penyediaan akses air bersih dan sanitasi.
   b. Setiap keluarga miskin harus memiliki Jaminan Sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)
   c. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana terkait layanan kesehatan dan KB
   d. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
   e. Optimalisasi pemanfaatan/Konsumsi Pangan Sayur, Buah dan Protein bersumber hewani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan
   f. Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi.
   g. Meningkatkan konsumsi Ikan melalui Program Gemarikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
   h. Bekerjasama dengan PKK Provinsi Kepulauan Riau melalui program pemberian bantuan paket Balita beresiko stunting dan *wasting* kepada Balita beresiko masalah gizi di Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang
   i. Revitalisasi dan pemeliharaan fasilitas olahraga sesuai standar.
   j. Pemerataan akses sarana latihan dan pertandingan di daerah.
   k. Penyusunan program latihan berbasis data dan periodisasi yang tepat.
   l. Penyelenggaraan kompetisi yang rutin, berjenjang, dan berkualitas.
   m. Penguatan manajemen organisasi cabang olahraga yang profesional dan transparan.
   n. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan olahraga.
   o. Optimalisasi anggaran yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
   p. Meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan Indeks Modal Manusia dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Dari Komponen Probabilitas bertahan hidup, sebagai berikut:
    a. Mengusulkan pengadaan buku KIA sebagai media KIE melalui anggaran APBD/P;
    b. Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan;
    c. Optimalisasi sistem rujukan penanganan kasus komplikasi pada ibu dan bayi melalui optimalisasi grup komunikasi online yang melibatkan fasyankes tingkat pertama, fasyankes rujukan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta penyusunan SOP sistem rujukan kesehatan ibu dan anak, termasuk di dalamnya penunjukan dokter spesialis kandungan dan anak sebagai penanggujawab wilayah yang memberikan arahan kepada tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas untuk stabilisasi pasien ibu dan bayi sebelum merujuk;
    d. Melakukan kegiatan Audit Maternal Periatal (AMP) sebagai proses pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi agar tidak terulang lagi dengan kasus yang sama. Perencanaan kegiatan AMP di tingkat kabupaten/ kota harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu minimal 4 kali dalam setahun dan semua kasus dikaji. AMP tetap harus dilakasanakan meskipun tidak ada kasus kematian yang terjadi. Pelaksanaan AMP dapat diselenggarakan menggunakan dana DAK Fisik Kabupaten/ Kota dengan menu Surveilans dan Tatalaksana Kesehatan Ibu dan Bayi;
    e. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Beberapa diantaranya yaitu pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelatihan integrasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan gizi buruk, pelatihan penanganan asfiksia dan BBLR, pelatihan dokter dalam pelayanan KIA termasuk penggunaan USG, pelatihan bidan dalam pelayanan KIA, dan pelatihan lainnya;
    f. Peningkatan koordinasi dengan organisasi profesi (POGI, IBI, IDAI, dll) dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, salah satunya kolaborasi dengan IDAI dalam pelaksanaan *Pedistrician Social Responsibility* (PSR);
    g. Pelaksanaan *refreshing* deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan - bidan di wilayah kerja puskesmas;
    h. Penguatan peran lintas sektor dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), salah satunya kolaborasi dengan Kementerian Agama terkait upaya pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dan menginisiasi penyusunan SE Gubernur terkait pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin;
    i. Mendorong kabupaten/ kota dalam pembentukan jejaring, *skrining* layak hamil, ANC, dan stunting;
    j. Optimalisasi dan monitoring pemanfaatan JKN, DAK, Dekonsentrasi untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);

k. Melakukan advokasi kepada kepala daerah untuk pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

2. Dari Komponen Pendidikan, sebagai berikut:
   a. Pemerataan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah.
   b. Melanjutkan program Pembebasan SPP, Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
   c. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.
   d. Pengarusutamaan Gender (PUG): Penyelenggaraan sekolah Perempuan paket C bagi Perempuan kelompok rentan yang putus sekolah serta penguatan kelembagaan organisasi wanita.
3. Dari Komponen Kesehatan, sebagai berikut:
   a. Setiap ibu hamil sebelum usia kehamilan 3 bulan harus sudah periksa ANC agar bisa mencapai standar ANC 6x;
   b. Setiap ibu hamil minum Tablet Tambah Darah (TTD/MMS – Multivitamin Ibu Hamil) setiap hari selama kehamilan;
   c. Setiap Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapatkan Makanan Tambahan Lokal selama 120 hari;
   d. Setiap ibu menyusui mendapatkan dukungan untuk bebas menyusui bayinya kapanpun;
   e. Setiap ibu menyusui yang bekerja mendapat fasilitas ruangan untuk memerah ASI di tempat kerja;
   f. Ada pengawasan terhadap bantuan produk pengganti ASI, hanya dapat diberikan atas petunjuk dokter;
   g. Setiap bayi lahir di fasilitas kesehatan;
   h. Setiap bayi harus mendapatkan ASI saja selama 6 bulan;
   i. Setiap bayi usia 6 bulan harus mulai diberi makanan padat kaya protein hewani (MP-ASI) dan ASI dilanjutkan sampai usia 2 tahun;
   j. Setiap balita harus ditimbang sebulan sekali di Posyandu;
   k. Setiap balita Berat Badan Tidak Naik (T) harus mendapat Makanan Tambahan Lokal selama 2 minggu;
   l. Setiap balita Berat Badan Kurang mendapat Makanan Tambahan Lokal selama 4 minggu;
   m. Setiap balita Gizi Kurang mendapat Makanan Tambahan Lokal selama 8 minggu;
   n. Setiap balita Gizi Buruk mendapat tata laksana;
   o. Setiap baduta mendapat imunisasi lengkap;
   p. Setiap remaja putri kelas 7 dan kelas 10 di skrining anemia;
   q. Setiap remaja putri anemia mendapat tata laksana;
   r. Setiap remaja putri minum TTD satu tablet setiap minggu;
   s. Setiap remaja putri melakukan cek kesehatan;

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 3.149 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Modal Manusia Provinsi Kepulauan Riau

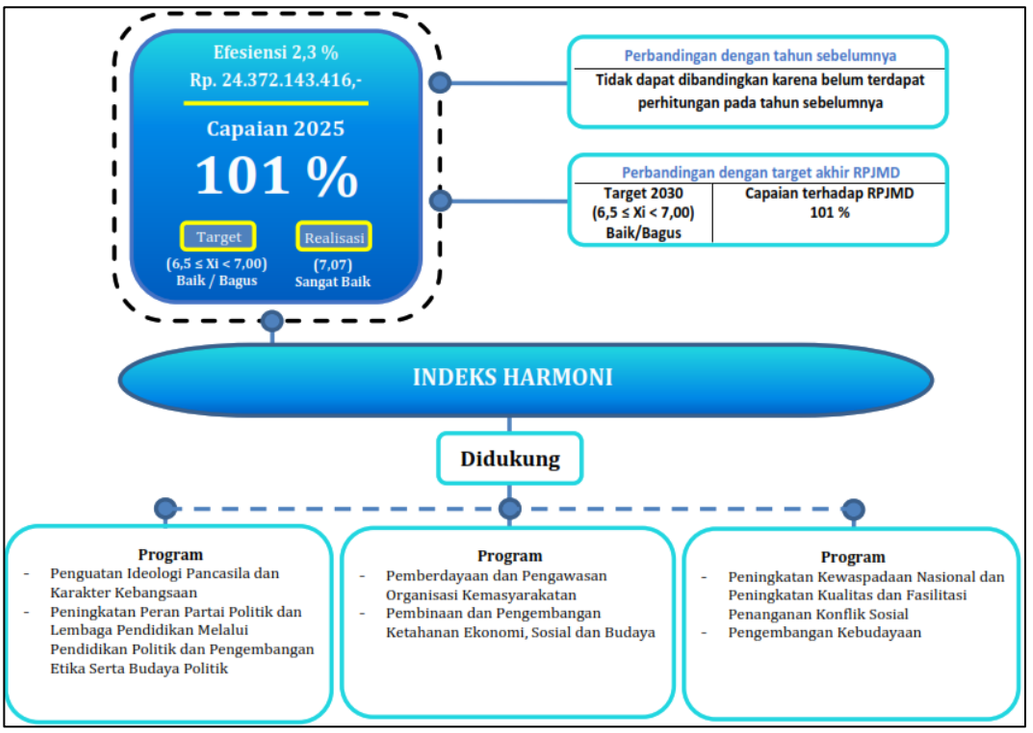
Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Anggaran (%)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44.437.498.341,00	41.258.918.621,00	92,85

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.237.113.827,00	10.219.702.669,00	99,83
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	187.656.000,00	153.676.514,00	81,89
Program Pengelolaan Pendidikan	365.322.687.666,00	302.664.866.696,00	82,85
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
Program Perlindungan Perempuan	84.395.865.464,00	60.230.280.160,00	71,37
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	838.857.400,00	564.859.622,00	67,34
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	18.564.278.699,00	17.106.633.538,00	92,15
Total	**524.770.047.312,00**	**432.890.531.565,00**	82,49

Dari jumlah anggaran sebesar Rp524.770.047.312,00 terealisasi sebesar Rp432.890.531.565,00 atau 82,49%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp91.879.515.747,00 (17,51%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Modal Manusia (98,33%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (82,49%) dengan efesiensi 15,84%.

3.2.3.16 Sasaran Meningkatkan Kehidupan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

3.2.3.16.1 Indeks Harmoni



Indeks Harmoni adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan sosial dalam suatu masyarakat melalui aspek toleransi, inklusivitas, interaksi sosial, serta rasa aman dan saling menghormati antarindividu maupun kelompok. Kementarian dalam Negeri pada Tahun 2025 hanya menilai Indeks Harmoni pada Kota Batam. Sehingga Indeks Harmoni Provinsi Kepulauan Riau menggunakan nilai Kota Batam,pada Tahun 2025 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar (7,07) Sangat Baik dari target sebesar (6,5 ≤ Xi < 7,00) Baik/Bagus (menggunakan target tertinggi) dengan capaian kinerja 101%.

Indeks Harmoni merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan sosial dalam suatu masyarakat melalui penilaian terhadap toleransi, rasa aman, interaksi sosial, dan kemampuan masyarakat mengelola perbedaan. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas hubungan antarindividu maupun antarkelompok dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai Indeks Harmoni, semakin baik

pula kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati.

Dalam penyusunannya, Indeks Harmoni biasanya didasarkan pada survei persepsi atau pengukuran langsung terhadap berbagai aspek sosial yang terkait dengan inklusivitas, solidaritas, serta potensi konflik. Indikator seperti keterbukaan terhadap keberagaman, kepercayaan antarwarga, hingga tingkat kriminalitas kerap menjadi komponen utama dalam perhitungan indeks ini. Dengan pendekatan tersebut, Indeks Harmoni tidak hanya mengukur kondisi sosial saat ini, tetapi juga mencerminkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

Pemerintah dan pemangku kepentingan sering memanfaatkan Indeks Harmoni sebagai dasar perumusan kebijakan untuk menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Melalui pemantauan indeks ini, pihak terkait dapat mengidentifikasi potensi kerawanan sosial, menentukan program mitigasi konflik, serta memperkuat upaya pembinaan kerukunan antarwarga. Dengan demikian, Indeks Harmoni menjadi instrumen penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju dapat dilihat dari indikator Indeks Harmoni di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Penilaian Indeks Harmoni Provinsi menggunakan nilai dari rata-rata dari Kabupaten/Kota yang berada di dalam suatu Provinsi, Kementarian dalam Negeri pada Tahun 2025 hanya menilai Indeks Harmoni pada Kota Batam. Sehingga Indeks Harmoni Provinsi Kepulauan Riau menggunakan nilai Kota Batam, Realisasi Indeks Harmoni Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar (7,07) Sangat Baik dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar (6,5 ≤ Xi < 7,00) Baik/Bagus (menggunakan target tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 101% atau dalam kategori "Sangat Baik."

Tabel 3.150 Capaian Indeks Harmoni

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Harmoni	(6,5 ≤ Xi < 7,00) Baik/Bagus	(7,07) Sangat Baik	101 %

Sumber : Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri 2025

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Tidak dapat dibandingkan karena belum terdapat perhitungan pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Harmoni di Provinsi Kepulauan Riau sebesar (7,07) Sangat Baik dengan target sebesar (6,5 ≤ Xi < 7,00) Baik/Bagus (menggunakan target tertinggi) dengan capaian kinerja sebesar 101%.

D. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Indeks Modal Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu:

1. Penguatan Sosialisasi Program Pemerintah: Perluasan informasi tentang program ekonomi lokal melalui media digital dan tatap muka agar semua lapisan masyarakat memahami dan terlibat;

2. Pemberdayaan UMKM Berbasis Komunitas: Meningkatkan pelatihan keterampilan kerja dan akses modal bagi pelaku UMKM serta pembinaan koperasi lokal;
3. Pemerataan Peluang Usaha: Memfasilitasi kemitraan antara industri besar dengan warga lokal agar terjadi alih keterampilan dan pembukaan lapangan kerja;
4. Penguatan Nilai Gotong Royong dan Toleransi Sosial: Mengadakan forum rutin antar warga lintas suku dan kelompok sosial untuk membangun rasa saling percaya dan empati;
5. Percepatan Pelayanan Publik yang Inklusif: Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan sosial, khususnya bagi kelompok rentan (difabel, lansia, perempuan kepala keluarga);
6. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Memperkuat peran FKUB dalam menjembatani komunikasi antar umat beragama;
7. Program Dialog Lintas Iman: Rutin mengadakan diskusi publik dan kerja sosial lintas agama untuk mempererat hubungan antar komunitas keagamaan;
8. Perbaikan Sarana Ibadah Secara Merata: Pemerataan pembangunan fasilitas ibadah yang representatif sesuai dengan kebutuhan umat beragama di tiap wilayah.
9. Edukasi Multikulturalisme: Menyusun kurikulum muatan lokal tentang keberagaman etnik dan budaya di tingkat sekolah dasar dan menengah;
10. Revitalisasi Budaya Lokal Menyelenggarakan event budaya tahunan dan mendukung sanggar seni sebagai pusat pelestarian budaya lokal.

Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Indeks Modal Manusia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu secara aktif mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memenuhi kuota kuesioner dalam penilaian Indeks Harmoni. Pemenuhan kuota kuesioner menjadi faktor krusial karena berpengaruh langsung terhadap validitas, representativitas, dan akurasi hasil pengukuran indeks tersebut. Data yang tidak terpenuhi secara optimal berpotensi menghasilkan gambaran yang kurang komprehensif mengenai kondisi harmoni sosial di masing-masing daerah, sehingga dapat melemahkan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan.

Selain itu, keterlibatan aktif kabupaten/kota dalam pemenuhan kuesioner mencerminkan komitmen bersama dalam membangun dan menjaga harmoni sosial di wilayah Kepulauan Riau. Oleh karena itu, Pemprov Kepri perlu memperkuat koordinasi, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar proses pengisian kuesioner dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan Indeks Harmoni yang lebih akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data.

E. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan Indeks Modal Manusia dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lapisan Bawah
   Peningkatan partisipasi tetap perlu dilakukan, terutama dalam rangka memperkuat sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pentingnya keterlibatan mereka dalam penilaian kebijakan publik. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi komunikasi, termasuk pemanfaatan media lokal, forum diskusi, serta pendekatan berbasis komunitas agar masyarakat lebih memahami peran mereka dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.
2. Peningkatan Dimensi Ekonomi
   Dimensi ekonomi memerlukan perhatian lebih agar dapat mencapai tingkat yang lebih baik. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap peluang usaha dan pekerjaan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dalam menciptakan inovasi ekonomi

berbasis komunitas juga dapat menjadi strategi efektif untuk memperbaiki indikator ekonomi dalam Indeks Harmoni.

3. Menjaga Isu Sensitif
   Menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama tetap menjadi prioritas utama, Provinsi Kepulauan Riau harus terus dijaga melalui dialog lintas agama, penguatan nilai-nilai kebersamaan, serta kebijakan inklusif yang memastikan semua kelompok masyarakat merasa dihormati dan dilibatkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu mendorong pendidikan multikultural, meningkatkan peran tokoh agama dalam membangun solidaritas sosial, serta mengantisipasi potensi konflik dengan mekanisme deteksi dini. Dengan demikian, stabilitas sosial dapat tetap terjaga, dan nilai toleransi yang sudah baik dapat terus diperkuat.
4. Eksplorasi Literasi Budaya Generasi Muda
   Eksplorasi Literasi Budaya Generasi Muda perlu diperkuat dengan memberikan ruang bagi dinamika dan kreativitas mereka dalam memahami, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya lokal. Pemerintah Daerah dapat mendorong program edukasi budaya di sekolah, festival seni dan budaya, serta pelibatan komunitas kreatif dalam berbagai kegiatan budaya. Selain itu, pemanfaatan media digital dan teknologi dapat menjadi strategi efektif untuk menarik minat generasi muda dalam mengeksplorasi identitas budaya mereka secara lebih interaktif dan relevan dengan perkembangan zaman.

F. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

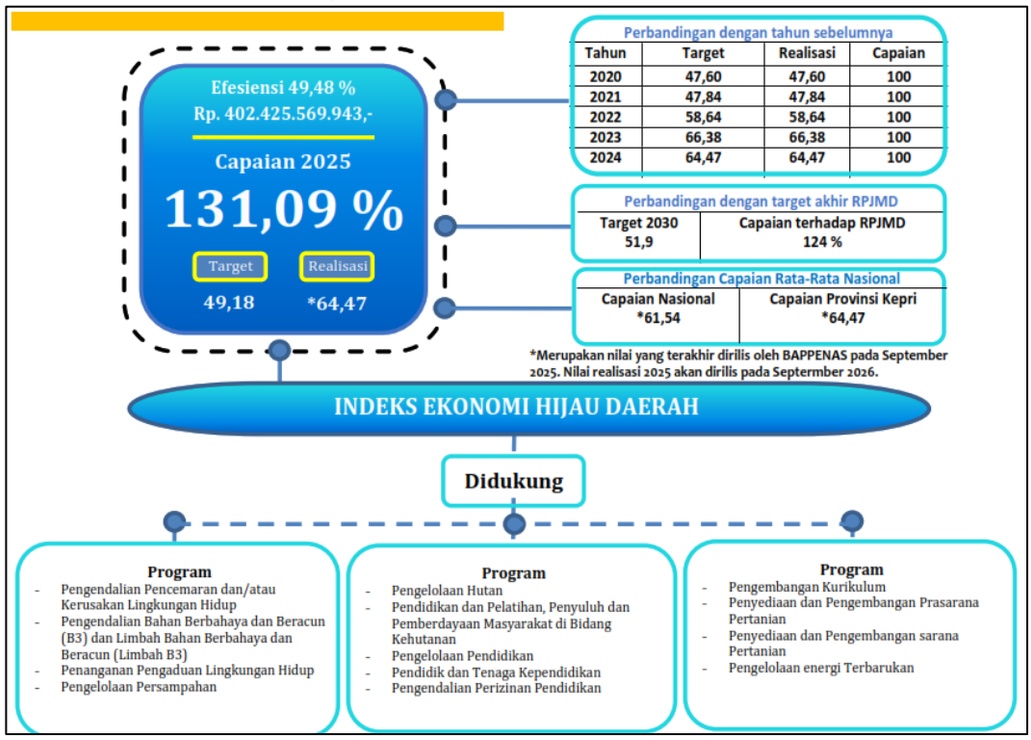
Tabel 3.151 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Harmoni Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.959.964.051,00	1.959.964.051,00	94,4
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.273.723.200,00	5.270.644.854,00	99,94
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.079.165.000,00	1.825.239.562,00	87,79
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.120.329.600,00	1.112.879.482,00	99,34
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	11.990.533.160,00	11.954.366.758,00	99,70
Program Pengembangan Kebudayaan	1.948.428.405,00	1.932.034.295,00	99,16
Total	**24.372.143.416,00**	**24.055.129.002,00**	**98.69**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp24.372.143.416,00 terealisasi sebesar Rp24.055.129.002,00 atau 98,69%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp317.014.414,00 (1,3%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Harmoni (101%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,69%) dengan efesiensi 2,3%.

3.2.3.17 Sasaran Mewujudkan Lingkungan Hidup yang estari dan Memberikan Nilai Tambah Sosial Ekonomi Masyarakat serta Ketahanan Daerah

3.2.3.17.1 Indeks Ekonomi Hijau



Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada Tahun 2025 menggunakan Data Tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 64,47 Indeks dari target sebesar 49,18 Indeks dan terealisasi sebesar 131,09%.

Indeks Ekonomi Hijau Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Indeks ini menilai berbagai aspek seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, kualitas udara dan air, serta kontribusi sektor-sektor ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kemampuan daerah dalam mengarahkan pembangunan menuju ekonomi hijau yang rendah emisi, efisien, dan berdaya saing.

Melalui Indeks Ekonomi Hijau Daerah, pemerintah dapat memantau kinerja pembangunan hijau secara lebih terukur dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Indeks ini juga menjadi acuan dalam menyusun strategi peningkatan kualitas lingkungan, mendorong investasi hijau, serta memperkuat inovasi teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, indeks ini berperan penting dalam membantu daerah bertransisi menuju ekonomi yang lebih inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar *Sustainable Development*: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah dapat dilihat dari indikator Indeks Ekonomi Hijau Daerah di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Realisasi Indeks Ekonomi Hijau Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 64,47 indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 49,18 Indeks sehingga capaian kinerja sebesar 131,09% atau dalam kategori "Sangat Baik."

Tabel 3.152 Capaian Indeks Ekonomi Hijau Daerah

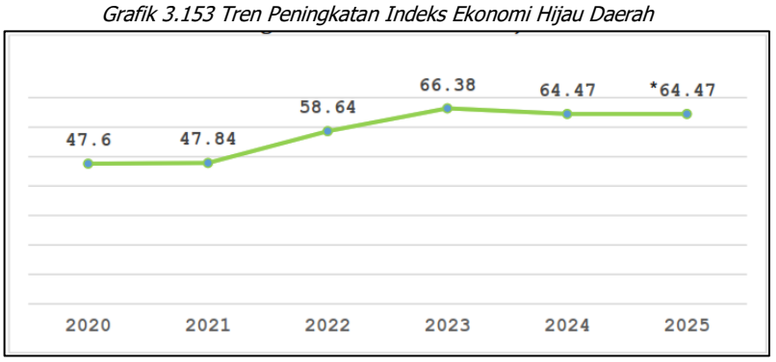
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Ekonomi Hijau Daerah	49,18 Indeks	64,47 Indeks	131,09 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Indeks Ekonomi Hijau Daerah Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.153 Tren Peningkatan Indeks Ekonomi Hijau Daerah



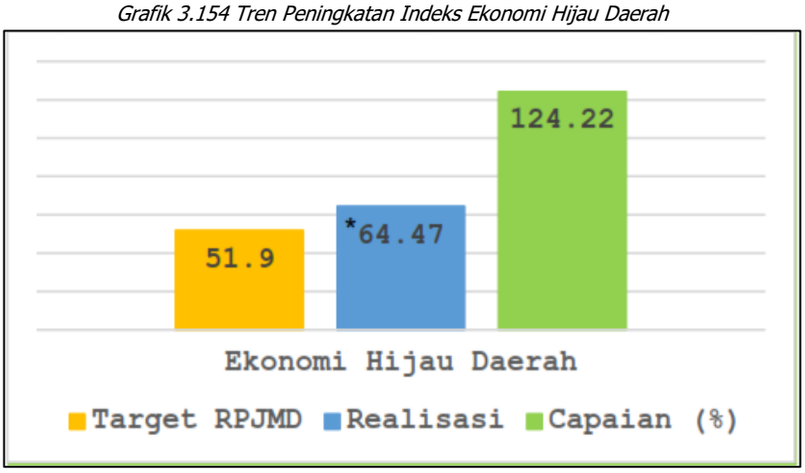
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Ekonomi Hijau Daerah menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020–2025, meskipun terjadi fluktuasi pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 47,60, kemudian mengalami kenaikan tipis pada tahun 2021 menjadi 47,84. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal periode, penerapan prinsip ekonomi hijau masih berada pada tahap awal dan peningkatannya belum terlalu progresif. Memasuki tahun 2022, Indeks Ekonomi Hijau meningkat cukup tajam menjadi 58,64, yang mengindikasikan mulai menguatnya komitmen dan implementasi kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan. Puncak capaian terjadi pada tahun 2023 dengan nilai indeks sebesar 66,38, mencerminkan keberhasilan daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan, termasuk efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengendalian dampak lingkungan, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi berkelanjutan.

Namun demikian, pada tahun 2025, nilai Indeks Ekonomi Hijau menggunakan nilai tahun 2024 dengan angka 64,47 hal ini disebabkan belum selesainya proses penilaian oleh BAPPENAS RI.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Grafik 3.154 Tren Peningkatan Indeks Ekonomi Hijau Daerah

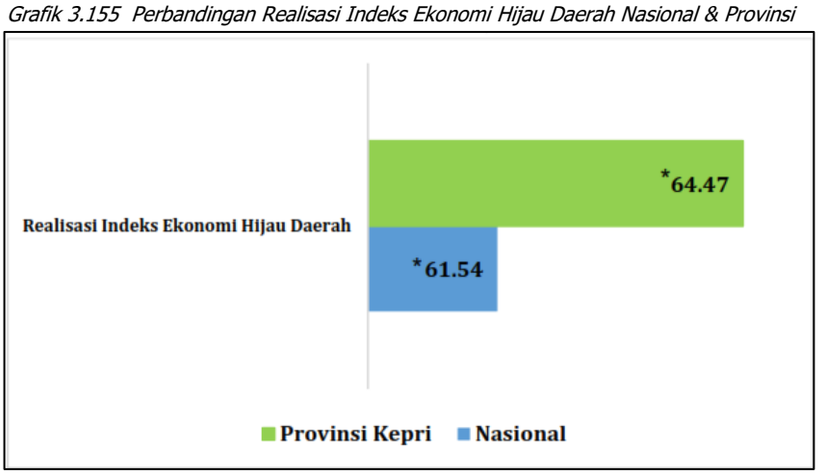


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Ekonomi Hijau Daerah di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 64,47 indeks dengan target sebesar 51,34 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 124%.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Grafik 3.155 Perbandingan Realisasi Indeks Ekonomi Hijau Daerah Nasional & Provinsi



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Indeks Ekonomi Hijau Daerah Provinisi Kepulauan Riau lebih tinggi dari pada capaian rata-rata nasional, hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Indeks Ekonomi Hijau Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, diantaranya adalah penyusunan dokumen rencana tanam tahunan, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove, pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan, sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan, pemantauan terhadap air baku, pengendalian dan penanganan pengaduan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Selain langkah-langkah dasar seperti efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan pelestarian lingkungan, peningkatan Indeks Ekonomi Hijau Daerah juga dapat didorong melalui penguatan green investment dan insentif fiskal hijau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyediakan kemudahan perizinan, pengurangan pajak, atau fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha yang menerapkan teknologi ramah lingkungan atau

menjalankan usaha berbasis ekonomi sirkular. Di sisi lain, pengembangan industri hijau perlu didukung dengan riset dan inovasi untuk menghasilkan produk yang rendah emisi serta berdaya saing tinggi. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta.

Melalui program pendidikan yang ramah lingkungan memiliki keterkaitan sangat strategis, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Melalui pendidikan, masyarakat dibekali pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mendukung perilaku ramah lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kesadaran terhadap dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Tingkat pendidikan yang baik mendorong adopsi teknologi hijau, inovasi berkelanjutan, dan praktik produksi serta konsumsi yang lebih bertanggung jawab, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Ekonomi Hijau.

Selain itu, pendidikan berperan dalam menciptakan tenaga kerja yang siap mendukung transformasi menuju ekonomi hijau, seperti di sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan industri rendah emisi. Pendidikan juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan partisipasi publik dalam perumusan serta pengawasan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas dan pemerataan pendidikan, semakin besar pula peluang suatu daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan, yang tercermin dalam nilai Indeks Ekonomi Hijau yang lebih baik.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha melalui edukasi berkelanjutan terkait praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan energi bersih, pertanian organik, dan efisiensi sumber daya. Pemerintah daerah juga dapat memperluas program penghijauan kota dan perlindungan ekosistem penting, seperti mangrove dan hutan lindung, untuk memperkuat layanan ekosistem yang menjadi dasar ekonomi hijau. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data lingkungan sangat penting untuk memastikan kebijakan tetap tepat sasaran dan dampaknya dapat diukur secara berkala, sehingga efisiensi dan keberlanjutan pembangunan hijau dapat terus ditingkatkan.

Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha tentang pentingnya praktik ekonomi hijau. Banyak kegiatan ekonomi masih bergantung pada pola produksi konvensional yang boros energi, menghasilkan limbah tinggi, dan tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Keterbatasan data lingkungan yang akurat dan terbarui juga menjadi hambatan, sehingga pemerintah daerah kesulitan memantau capaian indikator- indikator hijau secara konsisten. Selain itu, keterbatasan anggaran dan investasi hijau menyebabkan adopsi teknologi ramah lingkungan berjalan lambat dan hanya dilakukan oleh sektor-sektor tertentu.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor, baik antarorganisasi pemerintah daerah maupun antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat. Banyak regulasi yang belum terintegrasi, sehingga kebijakan lingkungan sering tumpang tindih atau kurang memberikan insentif nyata bagi pelaku usaha untuk beralih ke praktik hijau. Infrastruktur pendukung seperti pengelolaan sampah modern, transportasi rendah emisi, serta jaringan energi terbarukan juga belum merata. Di sisi lain, adanya tekanan pembangunan ekonomi jangka pendek membuat sebagian pihak menganggap ekonomi hijau sebagai tambahan biaya, bukan investasi jangka panjang, sehingga komitmen untuk beralih ke arah yang lebih berkelanjutan belum sepenuhnya kuat.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau Daerah dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan kedepanya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung praktik ekonomi hijau secara lebih tegas dan terintegrasi, termasuk pemberian insentif fiskal seperti keringanan pajak, subsidi energi terbarukan, maupun dukungan pembiayaan hijau bagi UMKM. Penyusunan peta jalan (roadmap) ekonomi hijau yang jelas

dan berbasis data juga penting agar setiap sektor industri, energi, transportasi, dan pertanian memiliki arah transisi yang terukur. Selain itu, memperbaiki kualitas data lingkungan melalui sistem monitoring berbasis teknologi dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat serta memudahkan evaluasi capaian indeks secara berkala.

Mendorong Percepatan Transisi Energi Bersih (EBT) berupa Perluasan PLTS atap untuk gedung pemerintah, sekolah, puskesmas, dan kawasan industri, Pengembangan PLTS komunal/hybrid untuk pulau kecil yang bertujuan menurunkan emisi, menekan biaya energi, memperkuat ketahanan energi pulau. Dan Implementasi Efisiensi Energi di Industri dan Bangunan melalui kegiatan sosialisasi penerapan manajemen energi di kawasan industri. Konversi lampu jalan dan fasilitas publik ke LED hemat energi. Yang bertujuan pada konsumsi energi lebih efisien, biaya operasional turun, emisi menurun.

Dalam jangka panjang, penguatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci. Program pendidikan, kampanye sadar lingkungan, serta pelatihan teknologi hijau dapat memperluas adopsi praktik berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur hijau seperti transportasi rendah emisi, fasilitas pengolahan sampah modern, dan jaringan energi terbarukan yang terjangkau. Kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas lingkungan harus diperluas agar inovasi dan investasi hijau dapat tumbuh lebih cepat. Dengan langkah-langkah tersebut, daerah dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan nilai indeks ekonomi hijau secara signifikan.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 3.156 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Harmoni Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	376.608.737,00	148.907.020,00	39,54
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	72.117.000,00	71.758.000,00	99,5
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.428.400,00	9.568.650,00	91,76
Program Pengelolaan Persampahan	1.197.821.048,00	1.187.931.990,00	99,17
Program Pengelolaan Hutan	2.288.386.160,00	1.966.812.325,00	85,95
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	303.755.350,00	292.625.500,00	96,34
Program Pengelolaan Pendidikan	365.322.687.667,00	302.664.866.697,00	82,85
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	187.656.000,00	153.676.514,00	81,89
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000,00	26.028.317,00	61,33
Progran Pengembagan Kurikulum	114.475.500,00	70.519.443,00	61,60
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.679.375.457,00	3.446.904.943,00	51,61
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	240.000.000,00	238.000.000,00	99,17
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	25.589.819.624,00	18.123.254.494,00	70,82
Total	**402.425.569.943,00**	**328.400.853.893,00**	**81.61**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp402.425.569.943,00 terealisasi sebesar Rp328.400.853.893,00 atau 81,61%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp74.024.716.050,00 (18,39%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Ekonomi Hijau Daerah (131,09%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (81,61%) dengan efesiensi 49,48%.

3.2.4 Pencapaian Pemenuhan *Mandatory Spending* dalam APBD

Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah mengamanatkan Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Mandatory Spending* adalah salah satu belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan utama untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Aturan ini juga mengakomodasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Fungsi Pendidikan paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025, Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memenuhi *Mandatory Spending* memperhatikan beberapa hal khusus yang antara lain:

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 31 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenihi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya. Untuk itu dalam rangka pemenuhan Anggaran Fungsi Pendidikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp1.110.730.832.324,21 dari total Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.932.501.110.900,44 atau dengan rasio sebesar 28,24%. Jika dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk Fungsi Pendidikan artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi ketentuan amanat ketentuan perundang-undangan. Pada periode 31 Desember 2025 Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan terealisasi sebesar Rp1.076.432.770.591,20 atau sebesar 96,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.110.730.832.324,21. Berikut Uraian Alokasi dan realisasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan:

Tabel 3.157 Alokasi dan realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**1.580.950.687,00**	**1.531.364.444,00**	**96,86**
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	169.836.439,00	154.090.034,00	90,73
	Pembentukan Paskibraka	1.411.114.248,00	1.377.274.410,00	97,60
2	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**71.593.402,00**	**25.427.400,00**	**35,52**
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	71.593.402,00	25.427.400,00	35,52
3	**Badan Pendapatan Daerah**	**1.778.926.000,00**	**1.544.512.500,00**	**86,82**
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.725.768.600,00	1.529.329.500,00	88,62
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	53.157.400,00	15.183.000,00	28,56
4	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**106.383.412,07**	**96.672.723,00**	**90,87**

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	32.515.230,00	31.433.500,00	96,67
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	46.672.452,07	44.974.498,00	96,36
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	27.195.730,00	20.264.725,00	74,51
5	**Dinas Kebudayaan**	**3.055.870.791,49**	**2.900.007.726,31**	**94,90**
	Pelindungan Cagar Budaya	137.801.567,00	136.367.760,31	98,96
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	213.890.000,00	213.750.000,00	99,93
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	298.607.520,00	297.273.686,00	99,55
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	56.581.688,66	56.475.046,00	99,81
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	244.913.500,00	243.064.333,00	99,24
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	91.017.385,00	77.946.276,00	85,64
	Penetapan Cagar Budaya	4.588.910,00	3.600.000,00	78,45
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	697.191.178,00	568.079.841,00	81,48
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	190.579.784,00	184.050.784,00	96,57
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	20.699.258,83	19.400.000,00	93,72
6	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**205.209.900,00**	**203.709.900,00**	**99,27**
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	205.209.900,00	203.709.900,00	99,27
7	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**20.303.136.099,50**	**18.476.960.125,00**	**91,01**
	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	953.441.000,00	895.001.490,00	93,87
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	2.249.250.000,00	2.134.077.567,00	94,88
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	2.210.656.000,00	2.037.089.600,00	92,15
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	70.000.000,00	67.933.000,00	97,05
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	638.857.400,00	370.499.289,00	57,99
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	100.000.000,00	94.360.333,00	94,36
	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	400.000.000,00	170.276.842,00	42,57
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	100.000.000,00	89.406.300,00	89,41
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	900.000.000,00	823.128.490,00	91,46
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	8.310.000.000,00	8.223.614.975,00	98,96
	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	4.270.931.699,50	3.471.572.239,00	81,28
8	**Dinas Kesehatan**	**730.157.200,00**	**711.016.308,00**	**97,38**
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	730.157.200,00	711.016.308,00	97,38
9	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**	**2.267.258.227,00**	**2.182.845.948,00**	**96,28**
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	96,28
10	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**2.990.000,00**	**2.980.000,00**	**99,67**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.990.000,00	2.980.000,00	99,67

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
11	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**303.755.350,00**	**292.625.500,00**	**96,34**
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	303.755.350,00	292.625.500,00	96,34
12	**Dinas Pariwisata**	**287.493.300,00**	**264.492.933,00**	**92,00**
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	91.362.000,00	83.676.963,00	91,59
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.513.300,00	21.495.000,00	91,42
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	82.674.000,00	76.251.770,00	92,23
	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	89.944.000,00	83.069.200,00	92,36
13	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**362.254.600,00**	**249.151.301,00**	**68,78**
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	336.494.600,00	223.391.301,00	66,39
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25.760.000,00	25.760.000,00	100,00
14	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**1.572.515.045,00**	**1.226.343.382,00**	**77,99**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	81.756.330,00	75.341.590,00	92,15
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000,00	182.382.860,00	91,19
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	275.032.600,00	86.489.578,00	31,45
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	200.000.000,00	179.656.109,00	89,83
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	29.636.200,00	10.879.500,00	36,71
15	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	**21.047.250,00**	**20.895.098,00**	**99,28**
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	21.047.250,00	20.895.098,00	99,28
16	**Dinas Pendidikan**	**1.001.251.763.644,57**	**974.415.970.345,89**	**97,32**
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	154.502.000,00	19.729.000,00	12,77
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	125.432.000,00	109.961.950,00	87,67
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	61.741.000,00	59.269.443,00	96,00
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	52.734.500,00	11.250.000,00	21,33
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	335.585.000,00	116.036.126,60	34,58
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	17.034.763.270,00	11.564.337.108,75	67,89
	Pembangunan Ruang Laboratorium	549.214.106,25	540.493.504,98	98,41
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	751.648.867,00	741.590.869,77	98,66
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	23.163.426,00	22.696.354,54	97,98
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.020.760.729,00	6.556.577.886,21	81,75
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.400.000.000,00	1.193.765.493,00	85,27
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3.100.000.000,00	2.662.002.340,00	85,87
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	68.519.000,00	59.811.228,00	87,29
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	199.424.300,00	126.612.400,00	63,49
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	37.740.600,00	36.993.398,00	98,02
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	291.651.750,00	94.581.191,00	32,43
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	818.863.290,01	597.290.853,00	72,94
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	96.438.000,00	64.641.609,00	67,03
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	12.749.442.000,00	11.219.318.286,00	88,00
	Pengadaan Mebel Sekolah	2.586.633.000,00	1.832.459.980,00	70,84

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	11.894.766.986,20	10.557.653.296,00	88,76
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	156.308.672,00	5.850.000,00	3,74
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	115.202.195.150,00	111.987.569.154,00	97,21
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	80.601.468.910,00	80.091.960.644,84	99,37
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	10.344.744.423,00	10.329.652.162,00	99,85
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	104.704.000,00	99.615.989,00	95,14
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	382.771.000,00	367.602.791,00	96,04
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	401.195.000,00	378.712.028,00	94,40
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	58.608.100,00	44.719.310,00	76,30
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.384.000,00	11.058.317,00	71,88
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	27.055.000,00	14.970.000,00	55,33
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	7.007.451.100,00	6.812.574.085,00	97,22
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.555.015.500,00	2.228.175.500,00	87,21
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	635.400.465.377,78	626.966.334.306,00	98,67
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.639.444.223,00	4.513.273.732,00	97,28
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	50.078.859.872,30	49.654.455.200,48	99,15
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	31.764.237.052,03	31.508.094.258,00	99,19
	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	170.632.000,00	158.541.200,00	92,91
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	41.849.540,00	34.818.886,00	83,20
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	285.655.900,00	269.103.940,00	94,21
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	91.218.000,00	89.034.905,00	97,61
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	195.585.000,00	191.865.417,72	98,10
	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.250.000.000,00	349.869.869,00	27,99
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	123.892.000,00	121.046.333,00	97,70
17	**Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan**	**2.218.392.637,00**	**1.725.090.987,00**	**77,76**
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	49.400.000,00	47377500,00	95,91
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	433.600.000,00	391.317.831,00	90,25
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	20.000.000,00	17.467.908,00	87,34
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	92.776.000,00	90.468.250,00	97,51
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	602.248.000,00	575.630.935,00	95,58
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	702.785.237,00	305.553.235,00	43,48
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	52.657.600,00	50.037.000,00	95,02
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	30.790.000,00	27.123.800,00	88,09
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	165.135.800,00	153.894.100,00	93,19
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.000.000,00	9.609.375,00	96,09
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	59.000.000,00	56.611.053,00	95,95
18	**Dinas Sosial**	**878.547.149,00**	**712.986.425,00**	**81,16**
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	288.720.491,00	282.245.811,00	97,76
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	589.826.658,00	430.740.614,00	73,03
19	**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**	**7.344.430.453,00**	**6.957.912.197,00**	**94,74**
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	1.320.563.753,00	1.090.463.615,00	82,58
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	97,40
20	**Inspektorat**	**91.370.800,00**	**73.801.929,00**	**80,77**

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	91.370.800,00	73.801.929,00	80,77
21	**Sekretariat Daerah**	**66.296.786.376,58**	**62.818.003.419,00**	**94,75**
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	17.309.428.960,58	16.498.529.352,00	95,32
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	40.797.200,00	33.828.800,00	82,92
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	48.946.560.216,00	46.285.645.267,00	94,56
	Grand Total	**1.110.730.832.324,21**	**1.076.432.770.591,20**	**96,91**

2. Alokasi Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik

Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Pemerintah Daerah diminta untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik Pemerintah sebesar Rp1.071.561.157.394,59 atau 33,32% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah sebesar Rp3.215.685.060.367,44. Pada saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat memenuhi alokasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD TA berkenaan, akan tetapi secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah pada periode 31 Desember 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merealisasikan Anggaran sebesar Rp946.125.697.988,18 atau sebesar 88,29% dari total belanja infrastruktur pelayanan publik Pemerintah yang di tetapkan dalam APBD. Berikut Uraian alokasi dan realisasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik:

Tabel 3.158 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1	**Badan Kepegawaian dan KORPRI**	**978.719.603,00**	**945.260.639,00**	**96,58**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.269.252,00	52.908.860,00	92,39
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.671.000,00	13.315.500,00	97,40
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	26.447.000,00	24.791.283,00	93,74
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	43.484.200,00	86,97
	Penyediaan Bahan/Material	34.892.900,00	34.238.900,00	98,13
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.015.600,00	8.627.678,00	86,14
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.565.000,00	22.266.000,00	87,10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415.032.768,00	411.908.700,00	99,25
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.000.000,00	103.491.640,00	94,08
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.000.000,00	87.880.000,00	99,86
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.694.602,00	96,95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.522.069,00	48.696.996,00	94,52
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.748.800,00	7.458.771,00	96,26
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.555.214,00	76.497.509,00	97,38
2	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**12.056.779.929,80**	**9.620.543.457,00**	**79,79**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	116.534.269,00	114.844.995,00	98,55
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.105.711,98	65.305.019,00	97,32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.169.088,00	22.360.260,00	92,52

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.288.000,00	19.738.200,00	97,29
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.962.668.698,00	6.898.686.175,00	76,97
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.217.452,00	63.629.860,00	99,08
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.247.800,00	85.550.986,00	98,06
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.460.956.502,00	1.108.532.739,00	75,88
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.161.504,00	593.095.503,00	99,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.903.395,00	289.482.935,00	97,50
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.002.000,00	94.771.720,00	99,76
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	268.525.509,82	264.545.065,00	98,52
3	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**8.713.624.286,50**	**8.038.254.318,95**	**92,25**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.928.693,00	49.651.017,00	95,61
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	332.051.925,00	307.564.079,00	92,63
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	241.614.344,00	207.083.410,00	85,71
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	79.454.634,00	72.417.036,00	91,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.972.064,00	67.095.923,00	94,54
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	52.855.799,00	44.171.881,00	83,57
	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	156.630.980,00	146.227.398,00	93,36
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	416.148.563,00	304.704.384,00	73,22
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.722.833,00	111.544.975,00	94,75
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	372.594.876,50	356.020.686,95	95,55
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.235.000,00	80.135.000,00	99,88
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	194.994.301,00	190.864.211,00	97,88
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	122.513.722,00	118.612.458,00	96,82
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.434.072,00	96.591.900,00	97,14
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	909.631.059,00	871.662.490,00	95,83
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.625.910,00	16.837.800,00	85,79
	Pengamanan Barang Milik Daerah	847.061.476,00	725.800.237,00	85,68
	Penilaian Barang Milik Daerah	351.649.803,00	344.621.856,00	98,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	92.750.285,00	91.939.474,00	99,13
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.363.534,00	152.732.277,00	92,36
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	195.503.800,00	189.176.785,00	96,76
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	597.740.743,00	569.927.906,00	95,35
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.509.952.552,00	1.455.806.163,00	96,41
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.403.378,00	61.666.456,00	74,83
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	608.520.145,00	560.654.976,00	92,13
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.465.145,00	158.171.000,00	99,81
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.152.157,00	59.672.566,00	99,20
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.225.719,00	152.559.434,00	98,28
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	278.489.459,00	269.677.068,00	96,84
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	36.298.458,00	27.860.552,00	76,75
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	90.069.184,00	59.905.332,00	66,51
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	165.569.673,00	116.897.588,00	70,60
4	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**1.786.127.282,00**	**1.637.105.516,00**	**91,66**
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	13.476.100,60	13.399.983,00	99,44
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.278.452,00	18.549.526,00	83,26

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.565.900,00	9.535.900,00	99,69
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	24.041.044,00	13.815.300,00	57,47
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	71.593.402,00	25.427.400,00	35,52
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.401.800,00	12.834.301,00	95,77
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.905.600,00	35.875.488,00	99,92
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	211.015.742,00	191.743.298,00	90,87
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.258.400,00	150.000.000,00	99,83
	Pengelolaan Risiko Bencana	79.037.538,00	33.492.267,00	42,38
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	54.726.049,40	54.141.126,00	98,93
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.427.680,00	18.108.542,00	88,65
	Penyediaan Bahan/Material	12.043.800,00	11.945.070,00	99,18
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.366.800,00	8.179.190,00	97,76
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.037.600,00	115.129.796,00	89,92
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.294.692,00	476.394.692,00	99,81
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.503.619,00	154.439.890,00	99,32
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	20.580.000,00	20.580.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.735.500,00	5.217.000,00	90,96
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.383.381,00	43.551.045,00	91,91
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	225.454.182,00	224.745.702,00	99,69
5	**Badan Pendapatan Daerah**	**25.663.966.227,20**	**23.615.805.591,75**	**92,02**
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50.688.800,00	44.903.100,00	88,59
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.822.764,43	67.071.930,00	90,86
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.171.500,00	5.219.000,00	72,77
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.481.600,00	9.638.502,00	83,95
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	481.773.338,00	446.166.768,00	92,61
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.784.449.694,35	4.492.317.524,00	93,89
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.873.030.050,00	1.825.499.916,00	97,46
	Pengadaan Mebel	464.860.000,00	355.969.000,00	76,58
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	64.838.900,00	62.081.760,00	95,75
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.509.249.408,00	1.322.653.889,00	87,64
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.993.262.507,00	4.753.954.687,00	95,21
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.041.746.448,00	2.804.302.540,00	92,19
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.057.814.611,91	2.051.810.443,00	99,71
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.639.751.481,00	2.446.305.080,75	92,67
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	334.607.000,00	330.632.000,00	98,81
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140.140.343,00	123.239.684,00	87,94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	757.996.545,00	443.249.699,00	58,48
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	470.718.796,00	462.589.500,00	98,27
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.652.594.608,52	1.330.011.156,00	80,48
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.867.266,50	150.462.050,00	94,12
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	94.100.565,49	87.727.363,00	93,23
6	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**618.231.592,00**	**586.331.124,00**	**94,84**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.073.468,00	48.512.679,00	94,99
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	21.098.257,00	20.496.166,00	97,15
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	20.498.752,00	19.477.177,00	95,02
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	16.896.569,00	12.573.350,00	74,41
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.880.000,00	1.234.234,00	42,86

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.221.551,00	0,00	0,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	17.233.465,00	16.299.860,00	94,58
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000,00	16.500.000,00	91,67
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.190.781,00	25.793.736,00	91,50
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.014.052,00	10.244.587,00	85,27
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.487.531,00	180.487.531,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.148.654,00	66.794.300,00	99,47
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.788.309,00	13.233.280,00	95,97
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.977.355,00	94.837.700,00	98,81
	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	25.722.848,00	17.846.524,00	69,38
7	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**3.640.077.570,00**	**3.351.657.760,00**	**92,08**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.551.088,00	65.684.972,00	98,70
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.448.884,00	55.597.567,00	91,97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.488.100,00	20.956.800,00	85,58
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.824.045,00	549.906.210,00	97,88
	Pengadaan Mebel	881.087.526,00	852.546.100,00	96,76
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	280.909.268,90	275.831.750,00	98,19
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.727.536,00	96.140.100,00	74,68
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.391.400,00	4.299.200,00	58,16
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.044.000,00	31.907.969,00	30,38
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.150.526,00	530.158.698,00	97,61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.248.560,00	164.282.601,00	89,65
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	330.480.000,00	306.000.000,00	92,59
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.736.590,00	4.420.000,00	65,61
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.382.000,00	5.328.000,00	99,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	145.731.344,00	108.688.800,00	74,58
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	308.876.702,10	279.908.993,00	90,62
8	**Badan Penghubung Daerah**	**5.711.602.503,65**	**5.382.194.049,00**	**94,23**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.048.090,00	26.595.690,00	88,51
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	89.938.130,00	83.151.116,00	92,45
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.776.960,00	23.572.323,00	81,91
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.206.320,00	41.422.866,00	98,14
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	315.749.900,00	219.938.728,00	69,66
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	296.623.456,00	262.647.881,00	88,55
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	458.092.900,65	457.000.000,00	99,76
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.744.500,00	54.744.500,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	754.324.664,00	689.910.089,00	91,46
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.777.562.009,00	1.768.692.889,00	99,50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.573.935.649,00	1.491.128.486,00	94,74
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	129.941.090,00	86,63
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.101.400,00	26.144.940,00	96,47
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.616.600,00	31.598.000,00	99,94
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.881.925,00	75.705.451,00	93,60
9	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**4.858.582.175,93**	**4.769.816.312,00**	**98,17**
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	41.298.600,00	40.593.150,00	98,29
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	164.329.600,00	162.996.620,00	99,19

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	107.477.300,00	106.637.275,00	99,22
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	286.589.931,00	268.929.277,00	93,84
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	38.280.060,00	37.272.787,00	97,37
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	114.172.500,00	112.650.533,00	98,67
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.151.831.650,00	1.128.191.709,00	97,95
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.733.200,00	79.666.550,00	98,68
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.727.400,00	56.607.800,00	98,06
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	208.564.030,00	208.370.193,00	99,91
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51.837.500,00	51.116.250,00	98,61
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.279.400,00	14.018.500,00	91,75
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	55.937.100,00	55.314.504,00	98,89
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.550.000,00	31.984.650,00	98,26
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.294.000,00	165.846.210,00	99,73
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.582.771,83	63.825.000,00	98,83
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.950.000,00	39.980.000,00	88,94
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.171.273,00	122.435.012,00	98,60
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	124.197.502,00	123.952.040,00	99,80
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	64.980.680,00	92,83
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.061.515.029,10	1.053.698.814,00	99,26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.757.900,00	94.444.866,00	98,63
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.975.822,00	317.615.230,00	97,44
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.000.000,00	189.800.000,00	97,84
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.278.711,00	10.036.953,00	97,65
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.499.596,00	15.162.600,00	97,83
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154.751.300,00	153.689.109,00	99,31
10	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**9.515.919.588,60**	**9.162.554.238,93**	**96,29**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.962.800,00	49.434.800,00	98,94
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.780.030,00	31.538.200,00	99,24
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	63.617.442,16	63.165.518,00	99,29
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6.632.649.719,00	6.515.805.416,49	98,24
	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	1.355.406.574,00	1.263.498.573,44	93,22
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.340.000,00	22.550.000,00	71,95
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.081.600,00	0,00	0,00
	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	21.309.600,00	19.012.100,00	89,22
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	8.213.000,00	7.474.900,00	91,01
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	12.160.000,00	9.175.300,00	75,45
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	25.521.300,00	25.521.300,00	100,00
	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	34.794.200,00	30.991.400,00	89,07

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	42.880.000,00	41.843.700,00	97,58
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	9.809.000,00	6.708.900,00	68,40
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.344.795,00	31.401.051,00	94,17
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.975.000,00	48.893.098,00	99,83
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.004.100,00	31.028.765,00	91,25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	617.884.548,00	610.596.308,00	98,82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.162.504,00	165.189.200,00	93,24
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.582.196,00	83.534.300,00	61,16
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.707.800,00	9.525.909,00	98,13
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.751.380,44	61.360.400,00	99,37
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	6.221.000,00	3.889.300,00	62,52
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	7.761.000,00	5.415.800,00	69,78
11	**Dinas Kebudayaan**	**4.498.433.872,53**	**4.327.323.428,31**	**96,20**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.000.000,00	12.985.890,00	99,89
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.013.600,00	8.980.760,00	59,82
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.862.208,65	72.341.649,00	86,26
	Pelindungan Cagar Budaya	137.801.567,00	136.367.760,31	98,96
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	213.890.000,00	213.750.000,00	99,93
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	298.607.520,00	297.273.686,00	99,55
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	56.581.688,66	56.475.046,00	99,81
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.340.000,00	18.132.583,00	98,87
	Penetapan Cagar Budaya	4.588.910,00	3.600.000,00	78,45
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	280.315.700,00	270.388.395,00	96,46
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	190.579.784,00	184.050.784,00	96,57
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570.398.240,22	543.327.707,00	95,25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.335.549.284,00	1.243.252.049,00	93,09
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.833.370,00	58.888.988,00	93,72
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.000.000,00	43.450.000,00	98,75
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.072.000,00	64.058.131,00	87,66
12	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**15.605.075.522,21**	**15.065.599.714,92**	**96,54**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.758.872,70	22.724.700,00	99,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.443.974,04	9.146.600,00	79,93
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	101.694.400,00	81.172.000,00	79,82
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.789.850,00	113.160.034,00	93,68
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.624.000,00	32.918.800,00	87,49
	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	57.083.886,00	55.092.632,00	96,51
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	33.395.733,00	33.395.733,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.724.040,00	143.235.480,00	96,96

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	26.722.605,46	21.794.955,00	81,56
	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	626.419.539,00	571.110.486,00	91,17
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.111.987.230,00	1.062.046.100,00	95,51
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.950.880,98	202.891.481,00	95,73
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.724.500,00	16.480.700,00	92,98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	909.778.912,00	859.994.942,00	94,53
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.001.095.008,01	2.948.923.719,00	98,26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.797.462,00	179.057.459,00	94,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.512.500,00	346.722.502,00	95,91
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.205.900,00	27.172.956,00	99,88
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.088.973.034,00	1.055.660.525,80	96,94
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	6.768.192.500,00	6.558.772.384,00	96,91
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	546.524.595,00	541.593.951,12	99,10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	151.325.300,02	149.821.015,00	99,01
	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	33.350.800,00	32.710.560,00	98,08
13	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**8.674.856.197,72**	**7.932.895.402,00**	**91,45**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52.608.449,19	40.265.400,00	76,54
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.728.400,00	254.133.062,00	90,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.122.000,00	74.370.600,00	85,36
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.619.400,00	41.151.100,00	75,34
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	2.249.250.000,00	2.134.077.567,00	94,88
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	2.210.656.000,00	2.037.089.600,00	92,15
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	103.653.600,00	103.640.000,00	99,99
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	148.276.301,10	127.793.076,00	86,19
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	900.000.000,00	823.128.490,00	91,46
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.383.500,00	65.596.965,00	97,35
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.161.800,00	31.421.880,00	89,36
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.146.950,00	218.115.491,00	87,54
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.314.403.993,16	1.178.870.468,00	89,69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	291.830.000,00	288.127.948,00	98,73
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.455.000,00	44.726.000,00	94,25
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.881.300,00	158.920.000,00	72,28
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000,00	43.045.800,00	95,66
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	318.679.504,27	268.421.955,00	84,23
14	**Dinas Kesehatan**	**291.104.224.293,73**	**281.481.022.356,18**	**96,69**
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	707.180.809,00	701.154.338,00	99,15
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.331.815,00	32.031.150,00	99,07
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	80.989.570,00	77.038.085,00	95,12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.824.000,00	22.808.000,00	95,74
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.000.000,00	17.160.000,00	95,33
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	164.361.538.026,00	165.559.880.954,93	100,73
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	19.913.140.414,00	19.434.043.211,00	97,59

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14.765.550,00	13.960.000,00	94,54
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.139.874.851,00	244.758.856,00	7,80
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	48.994.500,00	46.150.000,00	94,19
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	17.380.000,00	34,76
	Pemeliharaan Mebel	100.000.000,00	99.870.000,00	99,87
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.766.200,00	95.295.000,00	94,57
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.014.823.522,82	2.460.790.330,00	81,62
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	28.549.913.905,00	27.843.795.968,00	97,53
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	206.060.000,00	205.874.800,00	99,91
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	43.020.600,00	42.568.300,00	98,95
	Pengadaan Mebel	201.019.685,00	197.080.500,00	98,04
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9.504.537.306,92	7.121.290.843,25	74,93
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.189.378.164,00	4.069.298.886,00	97,13
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.180.075,00	8.672.600,00	94,47
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	772.869.554,00	699.812.942,00	90,55
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	36.146.157.416,00	34.552.905.884,00	95,59
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	94.921.400,00	78.529.170,00	82,73
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.910.000,00	12.633.800,00	90,83
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	21.173.250,00	18.098.000,00	85,48
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.619.000,00	11.140.910,00	95,89
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.546.120,00	217.308.008,00	95,08
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	209.473.638,00	201.147.199,00	96,03
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.940.198.108,86	7.995.942.810,00	89,44
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.840.557.166,13	5.727.094.871,00	98,06
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	567.517.320,00	549.812.534,00	96,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.560.000,00	185.172.200,00	84,34
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.350.000,00	65.399.480,00	95,68
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.938.001,00	75.351.310,00	96,68
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.057.280,00	330.091.466,00	96,50
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.736.500,00	0,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.718.356,00	141.150.768,00	90,07
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.080.582.190,00	2.308.529.182,00	74,94
15	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**	**16.271.102.857,55**	**12.090.637.425,50**	**74,31**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.223.298,00	65.889.240,00	73,03
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	411.518.825,00	411.518.824,50	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.533.000,00	91.086.374,00	87,14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	393.437.368,00	293.311.537,00	74,55
	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	290.178.000,00	290.178.000,00	100,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	511.900.000,00	511.900.000,00	100,00
	Pengadaan Mebel	69.231.270,65	12.167.820,00	17,58
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.217.833,00	21.106.761,00	12,85
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.705.218.980,00	3.702.717.280,00	99,93
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	7.488.837.348,00	3.957.749.328,00	52,85
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	410.000.000,00	352.354.649,00	85,94
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	194.530.150,00	194.153.780,00	99,81

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.185.890,00	87.329.010,00	87,17
	Penyediaan Bahan/Material	57.398.340,00	57.369.100,00	99,95
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.121.100,00	7.981.150,00	98,28
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.257.820,00	289.515.201,00	93,01
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	972.995.108,61	952.477.815,00	97,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	561.797.250,00	460.151.429,00	81,91
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.117.400,00	54.390.000,00	82,26
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.829.800,00	8.678.580,00	73,36
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.300.000,00	84.300.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.335.776,00	5.191.800,00	97,30
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.085.400,29	115.668.337,00	97,95
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	61.312.000,00	0,00	0,00
	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	76.580.900,00	61.491.410,00	80,30
16	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**6.301.443.411,95**	**5.566.305.778,00**	**88,33**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.003.899,97	42.167.258,00	98,05
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	37.498.603,00	33.134.991,00	88,36
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	850.720.162,00	834.968.386,00	98,15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.050.000,00	7.832.852,00	97,30
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.600.000,00	121.424.999,00	99,86
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	20.400.751,00	19.911.692,00	97,60
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	3.018.235.220,00	2.527.180.283,00	83,73
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.229.160,00	72.296.666,00	98,73
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.072.900,00	40.748.126,00	92,46
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.730.800,00	36.480.772,00	94,19
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.065.145.065,00	1.050.918.038,00	98,66
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.900.000,00	141.250.390,00	98,85
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.707.900,00	52.206.400,00	99,05
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.157.500,00	6.696.520,00	93,56
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.684.000,00	2.294.998,00	85,51
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.053.500,00	13.278.459,00	88,21
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	596.627.588,46	418.419.684,00	70,13
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	48.595.643,00	38.441.840,00	79,11
	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	16.212.320,26	8.062.279,00	49,73
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.818.399,26	98.591.145,00	99,77
17	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**5.786.448.244,92**	**3.545.552.494,00**	**61,27**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	893.017.900,00	740.636.300,00	82,94
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.915.900,00	24.768.900,00	99,41
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.800.000,00	120.000.000,00	97,72
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.754.600,00	19.071.842,00	96,54
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.074.300,00	1.640.000,00	79,06
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.490.000,00	24.037.238,00	98,15
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	792.931.576,54	773.793.199,00	97,59
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.520.500,00	115.730.818,00	98,48
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.906.600,00	48.854.000,00	99,89
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.250.200,00	3.063.600,00	94,26
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.167.400,00	44.992.001,00	99,61

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.155.800,00	2.724.000,00	86,32
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.322.207,00	78.979.700,00	91,49
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.602.141.261,38	1.547.260.896,00	42,95
18	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**6.572.488.590,00**	**5.372.070.811,00**	**81,74**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.000.000,00	15.984.000,00	99,90
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.033.200,00	137.046.456,00	96,49
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	72.117.000,00	71.758.000,00	99,50
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	177.000.000,00	161.984.508,00	91,52
	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	10.121.048,00	231.990,00	2,29
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	640.610.300,00	572.915.752,00	89,43
	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	66.785.700,00	65.274.540,00	97,74
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	79.648.000,00	77.650.002,00	97,49
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	212.761.498,00	202.033.517,00	94,96
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.080.000,00	18.695.000,00	97,98
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	111.814.400,00	100.605.775,00	89,98
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	334.073.000,00	279.378.657,00	83,63
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	621.432.900,00	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352.177.080,00	347.595.112,00	98,70
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	376.608.737,00	152.492.320,00	40,49
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	106.573.600,00	106.236.000,00	99,68
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.658.600,00	132.232.760,00	92,05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.935.441,00	59.530.169,00	96,12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.156.454,00	126.669.217,00	84,92
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.076.122.578,00	993.085.248,00	92,28
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.337.000,00	277.644.418,00	99,75
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.337.200,00	5.583.650,00	88,11
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.924.000,00	1.970.600,00	24,87
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.187.700.000,00	1.187.700.000,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.480.854,00	87.679.630,00	85,56
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	118.000.000,00	88.093.490,00	74,66
19	**Dinas Pariwisata**	**1.976.111.743,00**	**1.829.711.916,00**	**92,59**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.448.130,00	11.212.248,00	90,07
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	7.637.038,00	76,37
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.513.300,00	21.495.000,00	91,42
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.020.000,00	18.560.002,00	77,27
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.667.700,00	215.418.113,00	82,33
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	349.344.332,00	316.345.506,00	90,55
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.440.000,00	22.521.237,00	58,59
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.681.409,00	932.241.159,00	97,45
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.400.000,00	50.074.184,00	99,35
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.780.000,00	121.776.546,00	93,83
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.816.872,00	112.430.883,00	93,84
20	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**	**112.837.977.617,66**	**78.591.613.788,14**	**69,65**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.415.140,00	68.415.140,00	100,00

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	160.800.000,00	160.500.000,00	99,81
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	36.776.000,00	36.671.600,00	99,72
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	227.773.020,77	225.823.867,00	99,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66.137.940,00	66.137.940,00	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	231.550.180,00	192.941.113,00	83,33
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	152.208.000,00	152.045.656,00	99,89
	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	97,10
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	203.316.400,00	203.265.364,00	99,97
	Normalisasi/Restorasi Sungai	6.657.490.700,00	4.294.670.940,00	64,51
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	34.750.000,00	27.532.256,00	79,23
	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	1.673.424.700,00	1.673.424.700,00	100,00
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	372.899.000,00	372.770.138,00	99,97
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	179.439.875,00	177.987.101,00	99,19
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.185.209.900,00	449.234.339,00	37,90
	Pembangunan Jalan	8.069.693.100,00	3.692.251.981,00	45,75
	Pembangunan Jembatan	12.154.000.000,00	8.906.948.443,69	73,28
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.389.340.880,00	891.684.603,00	64,18
	Pembangunan Tanggul Sungai	68.465.900,00	68.465.900,00	100,00
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	13.938.663.235,03	7.709.447.213,67	55,31
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	86.408.400,00	82.733.143,00	95,75
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	90.559.500,00	90.555.000,00	100,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan	7.175.434.000,00	6.262.529.638,00	87,28
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	201.901.000,00	169.785.300,00	84,09
	Pemeliharaan Rutin Jalan	10.269.721.360,00	7.648.437.040,00	74,48
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	99.088.800,00	99.088.800,00	100,00
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7.672.499.682,50	4.007.101.994,21	52,23
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	726.904.635,00	392.693.285,00	54,02
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	13.709.997.262,00	10.749.462.796,37	78,41
	Penetapan RTRW Provinsi	192.248.703,00	191.762.545,00	99,75
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000,00	54.746.400,00	99,54
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000,00	69.652.500,00	99,50
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	24.427.070,00	23.611.494,00	96,66
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	1.284.702.180,00	729.708.161,00	56,80
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	13.925.800,00	13.925.800,00	100,00
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.504.353.910,00	469.566.211,20	31,21
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	153.278.750,00	140.970.000,00	91,97
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	336.560.100,00	316.417.398,00	94,02
	Penyediaan Bahan/Material	59.691.500,00	58.781.715,00	98,48
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.362.000,00	40.122.000,00	53,95
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	975.956.971,36	866.647.579,00	88,80
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.381.354.938,00	2.098.114.902,00	88,11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	432.661.602,00	424.831.958,00	98,19
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.862.700,00	48.722.588,00	88,81
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.459.016,00	51.938.729,00	95,37

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	429.244.900,00	331.995.980,00	77,34
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.390.600,00	63.254.056,00	95,28
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.695.008,00	138.669.778,00	92,02
	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	10.000.000,00	9.924.521,00	99,25
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	390.070.000,00	297.810.400,00	76,35
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.158.458.934,00	973.510.876,00	45,10
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	977.065.815,00	941.011.363,00	96,31
	Rehabilitasi Jembatan	3.507.879.740,00	3.498.774.800,00	99,74
	Rekonstruksi Jalan	8.128.239.887,00	5.491.858.049,00	67,57
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.198.033.090,00	1.197.933.090,00	99,99
21	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**1.506.649.898,00**	**1.355.548.051,00**	**89,97**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.760.300,00	31.141.300,00	84,71
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	17.882.000,00	13.874.700,00	77,59
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	102.409.350,00	101.522.824,00	99,13
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	305.000.000,00	184.830.710,00	60,60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.477.400,00	31.523.600,00	94,16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.585.000,00	4.041.801,00	88,15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.460.000,00	20.058.200,00	98,04
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.557.400,00	3.438.700,00	96,66
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	182.319.900,00	182.254.621,00	99,96
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.334.800,00	73.773.562,00	99,24
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.217.500,00	15.343.250,00	94,61
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.058.000,00	6.058.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559.334.848,00	552.279.648,00	98,74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.231.500,00	111.379.735,00	99,24
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.821.900,00	10.827.400,00	57,53
22	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**5.247.997.865,00**	**4.886.274.750,00**	**93,11**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	469.694.379,00	452.413.560,00	96,32
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	29.426.100,00	28.865.101,00	98,09
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.267.600,00	19.113.000,00	52,70
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.404.300,00	3.307.000,00	97,14
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.490.599,00	116.723.160,00	92,28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.010.000,00	59.658.060,00	99,41
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	98,77
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	140.220.000,00	138.871.200,00	99,04
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	275.032.600,00	86.489.578,00	31,45
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	200.000.000,00	179.656.109,00	89,83
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.770.000,00	14.664.000,00	99,28
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.924.900,00	39.635.099,00	99,27
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	334.495.600,00	332.798.019,00	99,49

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.567.635,00	199.288.483,00	96,01
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.145.958.580,00	1.122.537.080,00	97,96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.681.200,00	199.436.372,00	95,11
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	38.479.000,00	91,62
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.766.200,00	10.296.595,00	95,64
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.337.000,00	102.627.600,00	92,18
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.821.892,00	41.908.467,00	97,87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.199.200,00	104.420.525,00	78,39
23	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	**1.620.640.898,00**	**1.584.399.631,00**	**97,76**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.296.645,00	27.631.740,00	97,65
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.315.912,00	6.201.180,00	98,18
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.901.138,00	40.747.241,00	99,62
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.661.800,00	8.650.000,00	99,86
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.278.431,00	42.217.850,00	99,86
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	111.660.000,00	111.648.800,00	99,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.283.795,00	29.649.212,00	97,90
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	252.648.353,00	229.579.720,00	90,87
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.857.264,00	174.124.825,00	96,28
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	631.142.105,00	631.055.105,00	99,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.110.448,00	80.887.552,00	95,04
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.294.800,00	5.179.815,00	97,83
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.038.500,00	3.030.300,00	99,73
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.951.707,00	150.596.291,00	99,76
24	**Dinas Pendidikan**	**109.015.653.549,30**	**91.884.116.679,06**	**84,29**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	27.116.770,00	5.921.245,00	21,84
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	72.915.000,00	53.656.800,00	73,59
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.500.000,00	0,00	0,00
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	154.502.000,00	19.729.000,00	12,77
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	125.432.000,00	109.961.950,00	87,67
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.272.876.106,00	3.810.136.579,63	52,39
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	335.585.000,00	116.036.126,60	34,58
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	17.034.763.270,00	11.564.337.108,75	67,89
	Pembangunan Ruang Laboratorium	549.214.106,25	540.493.504,98	98,41
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	751.648.867,00	741.590.869,77	98,66
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	23.163.426,00	22.696.354,54	97,98
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.020.760.729,00	6.556.577.886,21	81,75
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.400.000.000,00	1.193.765.493,00	85,27
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3.100.000.000,00	2.662.002.340,00	85,87
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	199.424.300,00	126.612.400,00	63,49
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	602.269.850,00	599.271.806,86	99,50
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.325.962.870,00	1.082.338.838,00	81,63
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.449.000,00	24.140.278,00	94,86
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	12.749.442.000,00	11.219.318.286,00	88,00
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	33.000.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	471.668.250,00	456.881.926,00	96,87
	Pengadaan Mebel	124.887.867,00	85.692.000,00	68,62

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pengadaan Mebel Sekolah	2.586.633.000,00	1.832.459.980,00	70,84
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.006.821.779,00	597.867.230,00	59,38
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	156.308.672,00	5.850.000,00	3,74
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.315.000,00	18.277.433,00	72,20
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	58.608.100,00	44.719.310,00	76,30
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60.520.000,00	52.436.000,00	86,64
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	427.758.403,00	373.247.743,00	87,26
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.253.805,00	68.375.505,00	85,20
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.200.142.600,00	1.659.400.812,00	75,42
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.733.696.683,30	7.596.882.838,00	98,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	735.910.530,00	598.480.816,00	81,33
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309.627.000,00	267.553.380,00	86,41
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.233.700,00	56.377.058,00	93,60
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.639.444.223,00	4.513.273.732,00	97,28
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	31.764.237.052,03	31.508.094.258,00	99,19
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	421.216.850,72	334.994.133,00	79,53
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.938.300,00	38.876.516,00	81,10
	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	170.632.000,00	158.541.200,00	92,91
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	41.849.540,00	34.818.886,00	83,20
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	285.655.900,00	269.103.940,00	94,21
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	338.684.000,00	321.589.829,00	94,95
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	195.585.000,00	191.865.417,72	98,10
	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.250.000.000,00	349.869.869,00	27,99
25	**Dinas Perhubungan**	**14.554.025.107,78**	**9.164.366.589,91**	**62,97**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	50.589.000,00	48.837.794,00	96,54
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.252.579,00	66.567.764,00	82,95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	32.291.000,00	31.476.000,00	97,48
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	19.050.343,00	17.743.673,00	93,14
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	18.091.400,00	11.063.900,00	61,16
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	14.101.600,00	8.613.600,00	61,08
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	17.416.000,00	17.297.500,00	99,32
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	18.673.600,00	14.081.000,00	75,41
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	6.795.627.773,00	3.670.810.561,01	54,02
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	21.971.300,00	21.885.900,00	99,61
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.600.000,00	70.395.090,00	86,27
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.803.600,00	31.400.000,00	56,27
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.010.400,00	75.000.000,00	99,99
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	18.146.800,00	14.588.478,00	80,39
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	953.373.676,00	953.373.676,00	100,00
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	1.684.128.618,00	869.644.866,54	51,64

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	189.850.130,00	94,93
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000,00	57.442.500,00	95,74
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.000.000,00	170.039.131,00	67,48
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.135.101.831,31	1.808.643.442,00	84,71
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	413.167.000,00	351.162.503,00	84,99
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000,00	95.760.000,00	99,75
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.834.045,00	98,34
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.894.400,00	22.443.645,00	86,67
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.391.308.807,47	504.296.061,36	36,25
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.425.380,00	32.115.330,00	93,29
26	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**8.059.671.352,00**	**7.535.002.780,00**	**93,49**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	198.430.886,00	5.487.900,00	2,77
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.609.467,00	65.050.200,00	90,84
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	8.312.726,00	8.000.000,00	96,24
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	200.000.000,00	198.728.895,00	99,36
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.093.011,00	10.832.450,00	82,73
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.200.000.000,00	1.172.862.164,00	97,74
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.098.350.137,00	2.975.918.069,00	96,05
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.000.000.000,00	888.305.467,00	88,83
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.910.000,00	12.765.000,00	75,49
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.212.600,00	112.837.570,00	97,94
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	208.300.000,00	203.946.000,00	97,91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.240.284.175,00	1.209.764.815,00	97,54
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.695.000,00	151.986.700,00	98,25
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.910.000,00	196.910.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.010.400,00	263.464.900,00	97,94
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.552.950,00	58.142.650,00	84,81
27	**Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan**	**5.321.217.951,00**	**4.711.110.823,40**	**88,53**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.346.140,00	65.257.900,00	96,90
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	49.400.000,00	47.377.500,00	95,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.155.291,00	43.155.290,40	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.364.100,00	68.365.800,00	93,19
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	20.000.000,00	17.467.908,00	87,34
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	92.776.000,00	90.468.250,00	97,51
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	602.248.000,00	575.630.935,00	95,58
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	702.785.237,00	305.553.235,00	43,48
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.960.000,00	9.930.000,00	99,70
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.484.396,00	103.741.161,00	93,05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.971.600,00	21.800.700,00	94,90
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	960.184.280,00	905.250.737,00	94,28
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.144.059.432,00	2.090.432.575,00	97,50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.610.586,00	194.441.420,00	99,40
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.533.600,00	27.028.500,00	98,17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.562.100,00	44.222.200,00	47,78

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.777.189,00	100.986.712,00	95,47
28	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**205.411.203.333,70**	**173.830.514.443,82**	**84,63**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.480.653,00	74.480.653,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.200.000,00	263.384.287,00	99,32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.939.859,47	14.274.045,00	95,54
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	526.559.000,00	524.062.499,00	99,53
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	13.020.000,00	13.020.000,00	100,00
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	910.000.000,00	864.998.080,00	95,05
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	865.593.600,00	808.757.305,00	93,43
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.700.000,00	46.041.930,00	98,59
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.094.599.260,00	2.028.300.462,00	65,54
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	119.868.000,00	119.643.122,00	99,81
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	382.910.000,00	382.910.000,00	100,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	916.075.900,00	770.006.756,00	84,05
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	980.095.960,00	979.386.456,00	99,93
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.591.291,00	31.591.291,00	100,00
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	16.023.000,00	16.023.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	113.968.000,00	113.480.000,00	99,57
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	332.666.851,18	325.577.825,00	97,87
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.686.400,00	68.633.370,00	94,42
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.940.000,00	252.539.637,00	79,93
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.247.432,00	407.247.432,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.877.800,00	21.430.900,00	97,96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.175.600,00	70.256.690,00	88,74
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000,00	95.920.000,00	99,92
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	11.788.200,00	98,24
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.143.000,00	30.840.400,00	85,33
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	187.105.636.428,00	157.607.968.638,82	84,23
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	248.032.800,00	244.834.531,00	98,71
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7.417.386.499,05	7.248.330.934,00	97,72
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	894.786.000,00	394.786.000,00	44,12
29	**Dinas Sosial**	**2.586.183.160,00**	**2.488.246.687,00**	**96,21**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.814.213,79	202.049.454,00	98,65
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	42.880.976,00	40.439.276,00	94,31
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.793.014,00	75.061.179,00	96,49
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.801.280,00	32.098.980,00	84,92
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	549.382.000,00	537.328.525,00	97,81
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.672.300,00	39.170.235,00	96,31
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	329.112.915,00	316.140.000,00	96,06
	Pengadaan Mebel	8.919.522,21	8.624.370,00	96,69
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.121.170,00	74.725.200,00	94,44
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	33.187.451,00	32.756.607,00	98,70
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	318.912.496,00	306.447.702,00	96,09
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.476.492,00	51.643.547,00	86,83

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.058.098,00	44.959.498,00	95,54
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.588.360,00	79.389.430,00	92,76
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.252.239,00	414.661.351,00	98,44
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.152.346,00	173.933.454,00	92,44
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.559.226,00	14.800.851,00	95,13
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.939.743,00	34.110.300,00	97,63
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.559.318,00	9.906.728,00	85,70
30	**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**	**4.233.376.389,00**	**3.504.666.978,26**	**82,79**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.804.310,00	18.427.041,00	88,57
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.941.200,00	4.156.839,00	29,82
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.160.000,00	16.006.200,00	93,28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	548.848.000,00	347.079.481,26	63,24
	Pengadaan Mebel	87.635.000,00	87.635.000,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494.094.800,00	375.442.551,00	75,99
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.179.000,00	81.179.000,00	100,00
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	1.320.563.753,00	1.090.463.615,00	82,58
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.120.000,00	5.760.000,00	94,12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.253.994,00	111.304.521,00	97,42
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.845.600,00	28.808.622,00	96,53
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	428.554.657,00	370.805.271,00	86,52
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	661.824.374,00	628.693.023,00	94,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.573.501,00	147.776.094,00	94,38
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.520.000,00	37.335.000,00	94,47
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.431.000,00	9.718.510,00	93,17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.122.200,00	123.989.000,00	88,49
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.743.000,00	17.798.755,00	32,51
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.162.000,00	2.288.455,00	31,95
31	**Inspektorat**	**5.001.695.346,00**	**4.766.235.804,00**	**95,29**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.757.900,00	29.800.000,00	39,86
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.712.700,00	30.375.650,00	95,78
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	122.478.000,00	121.114.200,00	98,89
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.040.000,00	96.975.000,00	98,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	442.507.140,00	441.963.137,00	99,88
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.577.900,00	36.783.615,00	97,89
	Pengadaan Mebel	101.775.400,00	99.562.502,00	97,83
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.975.800,00	26.497.980,00	91,45
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	638.279.300,00	631.648.615,00	98,96
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	360.362.625,00	354.497.565,00	98,37
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.022.000,00	73.075.000,00	66,42
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	753.759.981,00	745.325.097,00	98,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.175.000,00	274.334.448,00	99,69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	519.890.000,00	514.343.326,00	98,93
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.977.000,00	99.669.120,00	99,69
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	802.086.600,00	710.650.555,00	88,60
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	46.963.545,00	93,93
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	309.745.000,00	307.347.320,00	99,23
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	53.102.200,00	51.507.200,00	97,00

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	91.370.800,00	73.801.929,00	80,77
32	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran**	**5.196.625.133,00**	**4.982.271.432,00**	**95,88**
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.884.500,00	12.572.200,00	97,58
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.774.843,00	29.727.428,00	76,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.400.500,00	13.226.600,00	98,70
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	99.429.300,00	98.772.470,00	99,34
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.914.395,00	30.136.035,00	94,43
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	676.450.700,00	570.165.290,00	84,29
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.464.000,00	7.864.518,00	83,10
	Pengadaan Mebel	241.025.000,00	241.025.000,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145.200.000,00	145.200.000,00	100,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	158.409.115,00	155.060.784,00	97,89
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.565.935,00	21.524.565,00	91,34
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.056.261,00	21.303.261,00	96,59
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	146.950.000,00	91,84
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.035.651.091,00	2.997.199.842,00	98,73
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.325.000,00	61.918.050,00	97,78
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.489.093,00	298.119.767,00	98,56
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.593.000,00	30.140.500,00	92,48
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.962.700,00	8.858.910,00	98,84
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.677.000,00	6.551.000,00	20,05
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.118.100,00	4.118.100,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.234.600,00	81.837.112,00	97,15
33	**Sekretariat Daerah**	**134.143.570.377,16**	**127.769.939.412,05**	**95,25**
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	32.341.918,00	28.730.566,00	88,83
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	26.038.600,00	3.666.600,00	14,08
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	595.011.811,00	558.869.537,00	93,93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	79.633.000,00	79.511.453,00	99,85
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	99.621.833,00	91.644.426,00	91,99
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	44.514.417,00	43.947.185,00	98,73
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	138.344.500,00	137.951.500,00	99,72
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	772.049.030,00	765.777.633,00	99,19
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.247.525.787,00	1.180.994.195,00	94,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.899.585.479,82	3.108.605.294,05	79,72
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.593.102.404,00	22.281.815.253,00	98,62
	Pengadaan Mebel	933.564.320,00	926.345.998,00	99,23
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.808.000,00	42.807.594,00	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	514.881.730,80	506.676.317,00	98,41
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	48.946.560.216,00	46.285.645.267,00	94,56
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	3.620.900,00	3.525.000,00	97,35
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	10.570.900,00	10.525.000,00	99,57
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	130.344.432,00	130.344.000,00	100,00
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	34.573.458,00	33.530.952,00	96,98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	71.925.315,00	69.710.412,00	96,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.215.449.063,63	10.158.654.020,00	99,44
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	350.415.605,00	332.464.531,00	94,88
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.286.289.896,00	6.612.352.850,00	90,75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.413.142.919,61	19.309.059.950,00	94,59

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.644.446.262,00	1.598.957.882,00	97,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.203.315.111,00	4.101.038.407,00	97,57
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.423.847.537,30	7.363.011.884,00	99,18
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.072.600,00	5.024.970,00	99,06
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.025.627.081,00	1.809.451.084,00	89,33
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	263.501.100,00	96.614.473,00	36,67
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.845.150,00	92.685.179,00	96,70
34	**Sekretariat DPRD**	**26.490.853.924,70**	**24.750.747.806,00**	**93,43**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.424.940,00	88.348.275,00	42,59
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	93.519.900,00	81.185.000,00	86,81
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	97.528.404,00	96.928.627,00	99,39
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	92.742.834,00	91.865.641,00	99,05
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	19.609.620,00	98,05
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	292.280.000,00	283.026.890,00	96,83
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.445.000,00	247.270.200,00	99,13
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	437.440.000,00	91.193.160,00	20,85
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.226.888,00	167.226.888,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.386.110.156,00	1.829.149.992,00	76,66
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.305.650.000,00	2.303.704.675,00	99,92
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360.250.000,00	60.210.000,00	16,71
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.766.168.578,89	11.684.853.139,00	99,31
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.024.333.165,00	1.747.095.491,00	86,30
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.133.972.440,00	2.117.770.862,00	99,24
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.023.064.460,00	3.016.536.222,00	99,78
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	622.350.000,00	620.997.670,00	99,78
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.442.058,81	162.799.254,00	98,40
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.905.100,00	40.976.200,00	89,26
	Grand Total	**1.071.561.157.394,59**	**946.125.697.988,18**	**88,29**

3. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Belanja daerah untuk penanganan inflasi adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang secara khusus dikerahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengendalikan dampak kenaikan harga barang dan jasa, menjaga tingkat daya beli masyarakat, serta memastikan stabilitas kelancaran rantai pasokan kebutuhan pokok, serta melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayahnya. Secara teknis, penganggaran Belanja Inflasi merujuk kepada pedoman dari Kementerian Dalam Negeri yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan juga Kementerian Keuangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026 Dan Tahun 2027, di mana pemerintah daerah diinstruksikan untuk melakukan optimalisasi APBD guna merespons gejolak Inflasi. Pada periode 31 Desember 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merealisasikan Anggaran Pengendalian Inflasi sebesar Rp17.524.038.410,43 atau sebesar 81,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.532.840.044,00. Berikut uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi:

Tabel 3.159 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**3.391.628.898,00**	**3.246.891.762,92**	**95,73**

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	626.419.539,00	571.110.486,00	91,17
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.111.987.230,00	1.062.046.100,00	95,51
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.724.500,00	16.480.700,00	92,98
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.088.973.034,00	1.055.660.525,80	96,94
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	546.524.595,00	541.593.951,12	99,10
2	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**	**7.735.140.503,00**	**7.129.609.396,50**	**92,17**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	411.518.825,00	411.518.824,50	100,00
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	96,28
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	26.124.000,00	26.124.000,00	100,00
	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	290.178.000,00	290.178.000,00	100,00
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	408.171.039,00	16.935.580,00	4,15
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.705.218.980,00	3.702.717.280,00	99,93
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	194.530.150,00	194.153.780,00	99,81
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	61.312.000,00	0,00	0,00
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	370.829.282,00	305.135.984,00	82,28
3	**Dinas Perhubungan**	**7.784.564.249,00**	**4.656.070.215,01**	**59,81**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	17.416.000,00	17.297.500,00	99,32
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	6.795.627.773,00	3.670.810.561,01	54,02
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	18.146.800,00	14.588.478,00	80,39
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	953.373.676,00	953.373.676,00	100,00
4	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**1.770.346.356,00**	**1.658.411.932,00**	**93,68**
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	621.524.637,00	555.415.764,00	89,36
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	253.672.739,00	250.427.000,00	98,72
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	895.148.980,00	852.569.168,00	95,24
5	**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**	**148.046.000,00**	**140.795.398,00**	**95,10**
	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	148.046.000,00	140.795.398,00	95,10
6	**Sekretariat Daerah**	**703.114.038,00**	**692.259.706,00**	**98,46**
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	703.114.038,00	692.259.706,00	98,46
	Grand Total	**21.532.840.044,00**	**17.524.038.410,43**	**81,38**

4. Alokasi Anggaran Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Belanja daerah Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2025 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah daerah diminta untuk menerapkan strategi dan program penghapusan kemiskinan ekstrem diantaranya sebagai berikut :

3.2.3.17.4.1 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

3.2.3.17.4.2 Peningkatan pendapatan Masyarakat.

3.2.3.17.4.3 Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Selain itu Pemerintah Provinsi diminta agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/subkegiatan.

3.2.3.17.4.4 Mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui kegiatan/subkegiatan

3.2.3.17.4.5 Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/subkegiatan

3.2.3.17.4.6 melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/subkegiatan

3.2.3.17.4.7 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri.

Pada periode 31 Desember 2025, Anggaran Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem terealisasi sebesar Rp322.080.852.567,04 atau sebesar 92,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp348.866.607.163,31. Berikut uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

Tabel 3.160 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**321.222.786,00**	**309.665.374,00**	**96,40**
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	321.222.786,00	309.665.374,00	96,40
2	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**6.946.594.119,00**	**6.743.232.616,49**	**97,07**
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6.632.649.719,00	6.515.805.416,49	98,24
	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	313.944.400,00	227.427.200,00	72,44
3	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**8.085.389.630,00**	**7.824.528.384,00**	**96,77**
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	205.209.900,00	203.709.900,00	99,27
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.111.987.230,00	1.062.046.100,00	95,51
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	6.768.192.500,00	6.558.772.384,00	96,91
4	**Dinas Kesehatan**	**27.933.201.238,00**	**26.392.540.626,00**	**94,48**
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	878.896.230,00	868.221.897,00	98,79
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.251.486.888,00	24.771.833.525,00	94,36
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	39.664.720,00	31.668.630,00	79,84
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	33.773.000,00	11.768.694,00	34,85
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	557.722.000,00	555.250.170,00	99,56
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	76.737.000,00	75.268.540,00	98,09
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	94.921.400,00	78.529.170,00	82,73
5	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**	**594.159.925,73**	**471.771.517,00**	**79,40**
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	26.124.000,00	26.124.000,00	100,00
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10.000.000,00	8.505.000,00	85,05
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	479.411.260,73	429.088.592,00	89,50
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	17.312.665,00	8.053.925,00	46,52
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	61.312.000,00	0,00	0,00
6	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**19.304.268.233,38**	**15.651.494.774,00**	**81,08**
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5.092.891.972,00	4.918.454.819,00	96,57
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	10.606.245.000,00	9.182.799.059,00	86,58

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.990.000,00	2.980.000,00	99,67
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.602.141.261,38	1.547.260.896,00	42,95
7	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**	**1.572.819.810,00**	**538.032.111,20**	**34,21**
	Pembangunan Tanggul Sungai	68.465.900,00	68.465.900,00	100,00
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.504.353.910,00	469.566.211,20	31,21
8	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**2.266.172.586,00**	**2.056.407.570,00**	**90,74**
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	336.494.600,00	223.391.301,00	66,39
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	108.979.800,00	104.658.962,00	96,04
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98.543.940,00	60.537.250,00	61,43
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.682.758.846,00	1.630.949.557,00	96,92
	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	39.395.400,00	36.870.500,00	93,59
9	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**4.193.686.403,00**	**3.501.433.246,00**	**83,49**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	191.520.850,00	73.090.700,00	38,16
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	2.798.959.438,00	2.415.752.661,00	86,31
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140.361.200,00	138.776.600,00	98,87
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	247.118.800,00	171.340.040,00	69,34
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	29.636.200,00	10.879.500,00	36,71
10	**Dinas Pendidikan**	**254.196.821.968,20**	**240.747.473.645,80**	**94,71**
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	17.034.763.270,00	11.564.337.108,75	67,89
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.020.760.729,00	6.556.577.886,21	81,75
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	11.894.766.986,20	10.557.653.296,00	88,76
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	115.202.195.150,00	111.987.569.154,00	97,21
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	80.601.468.910,00	80.091.960.644,84	99,37
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	10.344.744.423,00	10.329.652.162,00	99,85
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	7.007.451.100,00	6.812.574.085,00	97,22
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.555.015.500,00	2.228.175.500,00	87,21
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	285.655.900,00	269.103.940,00	94,21
	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.250.000.000,00	349.869.869,00	27,99
11	**Dinas Perhubungan**	**8.530.345.391,00**	**4.589.293.221,55**	**53,80**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	50.589.000,00	48.837.794,00	96,54
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	6.795.627.773,00	3.670.810.561,01	54,02
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	1.684.128.618,00	869.644.866,54	51,64
12	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**29.043.000,00**	**29.043.000,00**	**100,00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	13.020.000,00	13.020.000,00	100,00
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	16.023.000,00	16.023.000,00	100,00
13	**Dinas Sosial**	**8.869.015.373,00**	**7.358.487.899,00**	**82,97**
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.234.708.305,00	1.217.064.454,00	98,57
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.902.342.830,00	1.748.337.215,00	91,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	12.151.433,00	9.609.100,00	79,08

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	31.642.193,00	29.254.921,00	92,46
	Pelayanan Dukungan Psikososial	112.588.975,00	112.579.700,00	99,99
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	288.720.491,00	282.245.811,00	97,76
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	589.826.658,00	430.740.614,00	73,03
	Pemulasaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	24.002.119,00	23.569.168,00	98,20
	Pengasuhan	4.001.645,00	3.672.675,00	91,78
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	620.554.490,00	564.563.126,00	90,98
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	510.637.660,00	509.786.112,00	99,83
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	81.730.881,00	78.926.082,00	96,57
	Penyediaan Alat Bantu	186.366.000,00	170.436.252,00	91,45
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	318.912.496,00	306.447.702,00	96,09
	Penyediaan Makanan	131.210.287,00	124.838.260,00	95,14
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	35.351.595,00	29.460.812,00	83,34
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	26.834.796,00	25.483.412,00	94,96
	Penyediaan Permakanan	2.362.941.300,00	1.310.811.896,00	55,47
	Penyediaan Sandang	384.491.219,00	370.660.587,00	96,40
14	**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**	**6.023.866.700,00**	**5.867.448.582,00**	**97,40**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	97,40
	Grand Total	**348.866.607.163,31**	**322.080.852.567,04**	**92,32**

5. Alokasi Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa. Alokasi belanja daerah untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya dengan memperhatikan kebijakan percepatan penanggulangan stunting berdasarkan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pada periode 31 Desember 2025 Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting terealisasi sebesar Rp310.652.701.641,76 atau sebesar 96,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp321.934.434.300,10. Berikut uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting:

Tabel 3.161 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**165.856.400,00**	**153.086.490,00**	**92,30**
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	165.856.400,00	153.086.490,00	92,30
2	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**191.525.330,00**	**183.261.345,00**	**95,69**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	27.195.730,00	20.264.725,00	74,51
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	164.329.600,00	162.996.620,00	99,19
3	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	0,00	0,00	0,00
4	**Dinas Kesehatan**	**178.908.294.566,10**	**179.716.056.829,93**	**100,45**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	291.901.300,00	283.707.718,00	97,19

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	730.157.200,00	711.016.308,00	97,38
	Peningkatan Pelayanan BLUD	164.361.538.026,00	165.559.880.954,93	100,73
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.630.874.252,00	2.579.678.449,00	98,05
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	10.893.823.788,10	10.581.773.400,00	97,14
5	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**10.530.792.179,00**	**7.500.605.563,00**	**71,23**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	10.530.792.179,00	7.500.605.563,00	71,23
6	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**	**2.586.801.474,00**	**1.472.717.239,20**	**56,93**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.481.419.725,00	1.410.577.574,20	56,85
7	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**1.913.919.346,00**	**1.824.035.644,00**	**95,30**
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.791.738.646,00	1.735.608.519,00	96,87
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	122.180.700,00	88.427.125,00	72,37
8	**Dinas Pendidikan**	**122.697.175.256,00**	**115.929.216.066,63**	**94,48**
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	16.376.000,00	2.402.000,00	14,67
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	115.407.923.150,00	112.116.677.487,00	97,15
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	7.272.876.106,00	3.810.136.579,63	52,39
9	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**1.978.000.000,00**	**1.971.214.000,00**	**99,66**
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.978.000.000,00	1.971.214.000,00	99,66
10	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**539.579.000,00**	**537.082.499,00**	**99,54**
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	13.020.000,00	13.020.000,00	100,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	526.559.000,00	524.062.499,00	99,53
11	**Dinas Sosial**	**2.422.490.749,00**	**1.365.425.965,00**	**56,36**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.015.518.059,00	994.184.535,00	49,33
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	15.762.442,00	14.136.884,00	89,69
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	14.436.985,00	13.870.800,00	96,08
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	4.983.768,00	4.014.606,00	80,55
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	65.154.689,00	63.226.400,00	97,04
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	306.634.806,00	275.992.740,00	90,01
	Grand Total	**321.934.434.300,10**	**310.652.701.641,76**	**96,50**

6. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

3.2.3.17.4.7.1.1 Kegiatan pengawasan, yaitu:

1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemeriksa kinerja.
2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, meliputi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), rancangan KUA dan rancangan PPAS, serta RKA-SKPD.
3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
4) Reviu laporan keuangan.

5) Kegiatan pengawasan lainnya, meliputi *probity audit*, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, serta pemeriksaan pengelolaan keuangan desa.
6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas, meliputi: Pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum), Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK, Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Pemeriksaan *investigative*, Tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi serta Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Peningkatan kapabilitas APIP, meliputi: kapabilitas APIP level 3, maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, serta pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
c. Peningkatan Sarana dan prasarana pengawasan.
d. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya *Clean Government*, untuk menunjang kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi dan UPP Kabupaten/Kota.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan Anggaran belanja Pengawasan sebesar Rp19.052.380.414,00 atau sebesar 0,48% dari Total APBD Provinsi Kepulauan Riau yang sebesar Rp3.937.501.110.900,44 di luar belanja gaji, tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat. Hal ini tentunya tidak mengurangi capaian atas kinerja Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepuluan Riau yang pada periode 31 desember 2025 terealisasi sebesar Rp18.375.343.504,00 atau sebesar 96,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.052.380.414,00. Berikut uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang pengawasan:

Tabel 3.162 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pengawasan

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1	**Inspektorat**	**19.052.380.414,00**	**18.375.343.504,00**	**96,45**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.757.900,00	29.800.000,00	39,86
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.712.700,00	30.375.650,00	95,78
	Kerjasama Pengawasan Internal	1.087.300.000,00	1.084.827.934,00	99,77
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	122.478.000,00	121.114.200,00	98,89
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	785.910.856,00	750.731.230,00	95,52
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	541.320.500,00	534.499.584,00	98,74
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.040.000,00	96.975.000,00	98,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	442.507.140,00	441.963.137,00	99,88
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	152.379.900,00	118.406.200,00	77,70
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39.038.000,00	38.236.680,00	97,95
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.577.900,00	36.783.615,00	97,89
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	802.436.880,00	801.906.240,00	99,93
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	350.848.100,00	344.433.220,00	98,17
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	130.794.100,00	124.023.560,00	94,82
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	125.785.300,00	116.177.200,00	92,36

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.072.246.190,00	2.062.423.650,00	99,53
	Pengadaan Mebel	101.775.400,00	99.562.502,00	97,83
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	193.400.500,00	189.457.000,00	97,96
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000,00	0,00	0,00
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.121.359.200,00	1.115.379.060,00	99,47
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.475.689.000,00	1.474.324.774,00	99,91
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	859.689.000,00	791.951.636,00	92,12
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	603.121.600,00	603.109.402,00	100,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	529.686.000,00	492.560.000,00	92,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.975.800,00	26.497.980,00	91,45
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	638.279.300,00	631.648.615,00	98,96
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	360.362.625,00	354.497.565,00	98,37
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.022.000,00	73.075.000,00	66,42
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	753.759.981,00	745.325.097,00	98,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.175.000,00	274.334.448,00	99,69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	519.890.000,00	514.343.326,00	98,93
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	8.347.300,00	69,56
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.977.000,00	99.669.120,00	99,69
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	802.086.600,00	710.650.555,00	88,60
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	46.963.545,00	93,93
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.359.437.000,00	2.160.323.830,00	91,56
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	309.745.000,00	307.347.320,00	99,23
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	53.102.200,00	51.507.200,00	97,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	315.823.362,00	313.862.000,00	99,38
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	332.178.000,00	331.578.000,00	99,82
	Reviu Laporan Keuangan	145.694.000,00	145.349.200,00	99,76
	Reviu Laporan Kinerja	14.547.580,00	7.200.000,00	49,49
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	91.370.800,00	73.801.929,00	80,77
	Grand Total	**19.052.380.414,00**	**18.375.343.504,00**	**96,45**

7. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Penyelarasan program/kegiatan/subkegiatan dengan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial diantaranya terdiri dari beberapa Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi terdiri atas:

a. Pendidikan menengah,
b. Pendidikan khusus,
c. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi,
d. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi,
e. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota,
f. Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota,

g. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi,
h. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi,
i. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi,
j. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti,
k. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti,
l. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti,
m. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti dan:
n. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Pada periode 31 Desember 2025 Anggaran Bidang Standar Pelayanan Minimal terealisasi sebesar Rp108.591.012.079,20 atau sebesar 89,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp121.606.801.365,50. Berikut uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 3.163 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Standar Pelayanan Minimal

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
A	**Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan**			
1	**Dinas Kesehatan**	**73.437.720,00**	**43.437.324,00**	**59,15**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	39.664.720,00	31.668.630,00	79,84
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	33.773.000,00	11.768.694,00	34,85
B	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**	**2.586.801.474,00**	**1.472.717.239,20**	**56,93**
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.504.353.910,00	469.566.211,20	31,21
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	977.065.815,00	941.011.363,00	96,31
C	**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**			
1	**Dinas Pendidikan**	**113.706.276.978,50**	**103.058.015.136,00**	**90,64**
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	154.502.000,00	19.729.000,00	12,77
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	125.432.000,00	109.961.950,00	87,67
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	17.034.763.270,00	11.564.337.108,75	67,89
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	751.648.867,00	741.590.869,77	98,66
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.400.000.000,00	1.193.765.493,00	85,27
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3.100.000.000,00	2.662.002.340,00	85,87
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	68.519.000,00	59.811.228,00	87,29
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	199.424.300,00	126.612.400,00	63,49
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	37.740.600,00	36.993.398,00	98,02
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	291.651.750,00	94.581.191,00	32,43
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	155.175.970,00	114.930.600,00	74,06
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	96.438.000,00	64.641.609,00	67,03
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	12.749.442.000,00	11.219.318.286,00	88,00
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	11.894.766.986,20	10.557.653.296,00	88,76
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	104.704.000,00	99.615.989,00	95,14
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	382.771.000,00	367.602.791,00	96,04
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	401.195.000,00	378.712.028,00	94,40

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	58.608.100,00	44.719.310,00	76,30
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	7.007.451.100,00	6.812.574.085,00	97,22
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.555.015.500,00	2.228.175.500,00	87,21
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.639.444.223,00	4.513.273.732,00	97,28
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	50.078.859.872,30	49.654.455.200,48	99,15
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	41.849.540,00	34.818.886,00	83,20
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	285.655.900,00	269.103.940,00	94,21
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	91.218.000,00	89.034.905,00	97,61
D	**Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman**			
1	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**865.593.600,00**	**808.757.305,00**	**93,43**
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	865.593.600,00	808.757.305,00	93,43
E	**Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial**			
1	**Dinas Sosial**	**4.018.377.774,00**	**2.894.941.116,00**	**72,04**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	12.151.433,00	9.609.100,00	79,08
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	14.436.985,00	13.870.800,00	96,08
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	31.642.193,00	29.254.921,00	92,46
	Pelayanan Dukungan Psikososial	112.588.975,00	112.579.700,00	99,99
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	288.720.491,00	282.245.811,00	97,76
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	58.019.399,00	56.477.814,00	97,34
	Pemulangan ke Daerah Asal	16.706.841,00	15.522.206,00	92,91
	Pemulasaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	24.002.119,00	23.569.168,00	98,20
	Pengasuhan	4.001.645,00	3.672.675,00	91,78
	Penyediaan Alat Bantu	186.366.000,00	170.436.252,00	91,45
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	318.912.496,00	306.447.702,00	96,09
	Penyediaan Makanan	131.210.287,00	124.838.260,00	95,14
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	35.351.595,00	29.460.812,00	83,34
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	26.834.796,00	25.483.412,00	94,96
	Penyediaan Permakanan	2.362.941.300,00	1.310.811.896,00	55,47
	Penyediaan Sandang	384.491.219,00	370.660.587,00	96,40
F	**Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**			
1	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran**	**356.313.819,00**	**313.143.959,00**	**87,88**
	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	54.667.600,00	41.054.995,00	75,10
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	158.409.115,00	155.060.784,00	97,89
	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.500.000,00	0,00	0,00
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	139.737.104,00	117.028.180,00	83,75
	Grand Total	**121.606.801.365,50**	**108.591.012.079,20**	**89,30**

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- A l a m a t : Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Tanjungpinang
- Gubernur : Ansar Ahmad
- Sekretaris Daerah : Misni

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh unsur entitas akuntansi yang membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Riau terdiri:

a. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;
c. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
d. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sementara itu, penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4.1.1 Komponen Utama Kebijakan Akuntansi

Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

a. Kerangka Konseptual;
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
d. Laporan Operasional (LO);
e. Neraca;
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
g. Laporan Arus Kas (LAK);
h. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
i. Laporan Keuangan Konsolidasian;
j. Kas dan Setara Kas;
k. Piutang dan Penyisihan Piutang;
l. Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
m. Persediaan;
n. Investasi;
o. Aset Tetap;
p. Dana Cadangan;
q. Aset Lainnya;
r. Aset Konsesi Jasa;
s. Properti Investasi;

t. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan;
u. Kewajiban;
v. Pendapatan-LRA dan Belanja;
w. Pembiayaan;
x. Pendapatan-LO dan Beban;
y. Peristiwa Setelah Pelaporan.

4.1.2 Kerangka Konseptual Akuntansi

4.1.2.1 Tujuan Kerangka Konseptual

Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi adalah sebagai acuan bagi:

a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan; dan
c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan.

4.1.2.2 Ruang Lingkup

Kerangka konseptual ini membahas:

a. Tujuan kerangka konseptual;
b. Lingkungan akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen
f. laporan keuangan serta dasar hukum;
g. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
h. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

4.1.2.3 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

a. Asumsi kemandirian entitas, berari bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
b. Asumsi kesinambungan entitas adalah Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*) merupakan Laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.1.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar

laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

   1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
      Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
   2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
      Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
   3) Tepat waktu
      Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
   4) Lengkap
      Informasi akuntansi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

   Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

   1) Penyajian Jujur
      Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
   2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
      Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
   3) Netralitas
      Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

4.2 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

a. Basis akuntansi
   1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
   2. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
   3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
   4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai historis (*Historical Cost*)
   1. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
   2. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)
   1. Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
   2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Subtance Over Form*)
   Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)
   Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
f. Konsistensi (*Consistency*)
   Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
   Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)
   1. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
   2. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.2.1 Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

a. Materialitas
   Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
b. Pertimbangan biaya dan manfaat
   Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif
   Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

4.2.2 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut :
a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b. cakupan entitas pelaporan;
c. periode yang dicakup;
d. mata uang pelaporan; dan
e. satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja;
c. Transfer;
d. Surplus/defisit-LRA;
e. Penerimaan Pembiayaan;
f. Pengeluaran Pembiayaan;
g. Pembiayaan neto; dan
h. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan-LRA disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
e. Lain-lain; dan

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud diatas, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b. cakupan entitas pelaporan;
c. periode yang dicakup;
d. mata uang pelaporan; dan
e. satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan-LO;
b. Beban;
c. Surplus/Defisit dari operasi;
d. Kegiatan non operasional;
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
f. Pos Luar Biasa;
g. Surplus/Defisit-LO

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

1. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban;
b. terjadinya konsumsi aset;
c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum Provinsi Kepulauan Riau. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tidak terduga.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan-LO/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
c. kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2.5 Neraca

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a. kas dan setara kas;
b. investasi jangka pendek;
c. piutang pajak dan bukan pajak;
d. persediaan;
e. investasi jangka panjang;
f. aset tetap;
g. kewajiban jangka pendek;
h. kewajiban jangka panjang;
i. ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan diatas, disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

4.2.5 Aset

4.2.5.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
b. berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

4.2.5.2 Aset Non Lancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen terdiri dari:
a. Pembelian Surat Utang Negara;
b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;
c. Dana bergulir; dan
d. Investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen terdiri dari:
a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, lembaga keuangan, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
b. Investasi permanen lainnya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari:
a. tanah;
b. peralatan dan mesin;
c. gedung dan bangunan;
d. jalan, irigasi dan jaringan;
e. aset tetap lainnya;dan
f. konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaanya.

4.2.5.3 Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

4.2.5.4 Pengukuran Aset

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:
a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
d. Persediaan dicatat sebesar:
   1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2.6 Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, Lembaga Keuangan, Entitas Pemerintah Lain, atau Lembaga Internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang Perhitungan fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan poin ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
b. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

4. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

1. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
    2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d. Ekuitas akhir.

Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud diatas, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga dikapitalisasikan akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.

Akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran/transitoris, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran/transitoris.

3. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari, antara lain:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang Sah
e. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer;
f. Penerimaan Hibah; dan
g. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

a. Pembayaran Pegawai;
b. Pembayaran Barang/Jasa;
c. Pembayaran Bunga;
d. Pembayaran Subsidi;
e. Pembayaran Hibah;
f. Pembayaran Bantuan Sosial;
g. Pembayaran Tak Terduga.
h. Pembayaran Bagi Hasil;dan
i. Pembayaran Bantuan Keuangan.

Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

4. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain:

a. Pencairan Dana Cadangan;
b. Penjualan atas Tanah;
c. Penjualan atas Peralatan dan Mesin;
d. Penjualan atas Gedung dan Bangunan;
e. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
f. Penjualan Aset Tetap Lainnya;
g. Penjualan Aset Lainnya;
h. Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan;
i. Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain:

a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Perolehan Tanah;
c. Perolehan atas Peralatan dan Mesin;
d. Perolehan atas Gedung dan Bangunan;
e. Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
f. Perolehan Aset Tetap Lainnya;
g. Perolehan Aset Lainnya;
h. Penyertaan Modal Daerah;
i. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.

5. Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian dan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:

a. Penerimaan Pinjaman Daerah;
b. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:

a. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah;
b. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
c. Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

6. Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

4.2.8 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:

a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Rincian dan penjelasan pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, kebijakan akuntansi pemerintahan tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

4.2.8.1 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan atau tidak dilakukan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8.2 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Klasifikasi Kas dan Setara Kas

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau	√	-
		Kas di Bank Persepsi	√	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
1.1.1.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	√	-
		Kas di Bank BLUD	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
		Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	√	-
		Potongan Non Pajak Yang Belum Disetor.	√	-
		Uang Muka Pelayanan BLUD	√	-
1.1.1.05	Kas Dana BOS	Kas Tunai BOS	√	-
		Kas di Bank BOS	√	-
1.1.1.07	Kas Lainnya	Jasa Giro Yang Belum Disetor	√	-
		Potongan PFK yang Belum Disetor	√	-
		Kas di Satuan Pendidikan	√	-
1.1.1.08	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	-	√
		Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

catatan: setara kas pada BLUD mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

a. Saldo rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh BUD.

4.2.8.2.1 Pengakuan

Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Saldo kas di kas daerah dan setara kas akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain berasal dari:

a. Penyetoran kas Pendapatan Asli Daerah dari Bendahara Penerimaan;
b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
c. Penerimaan pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan Provinsi Kepulauan Riau yang sah;
d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hasil penjualan kekayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
e. Penerimaan Provinsi Kepulauan Riau lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

a. Transfer UP/GU/TU ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
b. Belanja, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga;
c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
d. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:

a. Transfer UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
c. Penerimaan jasa giro; dan
d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:

a. Belanja yang telah di-SPJ-kan.
b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, dan
c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

4.2.8.2.2 Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2.8.2.3 Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Kas dan Setara Kas adalah:

a. Rincian kas dan setara kas;
b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.2.8.3 Piutang dan Penyisihan Piutang

4.2.8.3.1 Piutang

Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Piutang

Kode Rekening	Uraian	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	√	√
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	√	-
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	√	-
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	√	-
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	√
1.1.08	Piutang Transfer antar Daerah	-	√
1.1.09	Piutang Lainnya	√	√
1.1.10	Penyisihan Piutang	√	√
1.1.11	Beban Dibayar dimuka	√	√

Piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

Pungutan

a. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
   1) Piutang Pajak Daerah;
   2) Piutang Retribusi Daerah;
   3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
b. Perikatan

   Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
   1) Pemberian Pinjaman;
   2) Penjualan;
   3) Kemitraan;
   4) Pemberian fasilitas;
   5) Transaksi Dibayar Dimuka.
c. Transfer antar Pemerintahan

   Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
   1) Piutang Dana Bagi Hasil;
   2) Piutang Dana Alokasi Umum;
   3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
   4) Piutang Transfer Lainnya;
   5) Piutang Kelebihan Transfer.
d. Tuntutan Ganti Kerugian

   Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:
   1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
   2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.
e. Beban Dibayar Dimuka

   Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat direalisasikannya pengeluaran kas namun unit kerja belum menikmati manfaat atas barang atau jasa yang dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan dilakukan penyesuaian untuk menghitung berapa manfaat barang atau jasa yang telah dikonsumsi dan berapa yang masih menjadi Beban Dibayar Dimuka.

4.2.8.3.1.1 Pengakuan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Didukung dengan naskah perjanjian/surat ketetapan yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
b. Jumlah piutang dapat diukur;
c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.

Piutang retribusi diakui pada saat dikeluarkannya surat ketetapan retribusi dan jasa layanannya telah digunakan oleh wajib retribusi.

Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Piutang yang timbul atas pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditujukan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara berupa sewa/pinjam pakai/kerja sama pemanfaatan/bangun guna serah atau bangun serah guna/kerja sama penyediaan infrastruktur diakui pada saat ditandatangani surat perjanjian kerja sama.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan *intern* manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, piutang diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4.2.8.3.1.2 Pengukuran

Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

1. Pengukuran Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam keputusan atas penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

2. Pengukuran Piutang Berdasarkan Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjamann
   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Umum Provinsi Kepulauan Riau dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
   Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
b. Penjualan
   Piutang dari penjualan dinilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
c. Kemitraan
   Piutang yang timbul dinilai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
d. Pemberian fasilitas/jasa
   Piutang yang timbul dinilai berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran Piutang Transfer

Pengukuran piutang transfer selaras dengan pengakuan pendapatan transfer, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi transfer.

4. Pengukuran Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Pengukuran piutang ganti rugi adalah sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

5. Pengukuran Berikutnya (*subsequent measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Tabel 4.3 Kualitas / Umur Piutang

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
1.	Piutang Pajak (*self assessment)*	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2.	Piutang Pajak (*official assessment)*	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3.	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1 bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4.	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

a. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

c. Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3(tiga) bulan; dan/atau
2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) ; dan/atau
2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

d. Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi:
   1) Kualitas Lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
   2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagiah Pertama tidak dilakukan pelunasan;
   3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
   4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beban Dibayar Dimuka adalah piutang yang timbul akibat pemerintah provinsi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari

pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah Provinsi.

Beban Dibayar dimuka antara lain meliputi pembayaran sewa yang belum jatuh tempo dan premi asuransi yang belum jatuh tempo.

Beban Dibayar Dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Pencatatan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan untuk menunjukkan bagian beban yang belum diterima/dinikmati untuk dicatat menjadi Beban Dibayar di Muka.

Beban Dibayar Dimuka diukur sesuai dengan nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah provinsi, namun pemerintah provinsi telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan masa/periode manfaat beban tersebut secara harian dengan jumlah hari 360 hari dalam satu tahun.

Beban Dibayar Dimuka disajikan pada Neraca dalam kelompok aset lancar.

4.2.8.3.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.

Piutang TP/TGR disajikan:

a. Kelompok jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan mendatang, disajikan sebagai Piutang TP/TGR pada Aset Lancar;
b. Kelompok jumlah yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan mendatang, disajikan sebagai TP/TGR pada Aset Lainnya.

Piutang yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL tetap dicatat sebagai aset di neraca dan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
d. Informasi lain yang dianggap perlu.

Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara *extracomptable*.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.2.8.3.2 Penyisihan Piutang

4.2.8.3.2.1 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4.2.8.3.2.2 Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang terdiri atas:
a. Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang; dan
b. Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang.

Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
a. Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; atau
b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1(satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; atau
c. Debitur mengalami musibah (*force majeure*); atau
d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
g. Debitur yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena:
    1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
    2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur (Pemerintah Daerah setempat atau lainnya); atau
i. Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.

Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit;

e. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2.8.4 Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

4.2.8.4.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Investasi Dana Bergulir

Kode Rekening	Uraian	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.05	Dana Bergulir	-	√

Tabel 4.5 Pendapatan Hasil Dana Bergulir

Kode Rekening		Uraian	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
4.1.4	7.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	-	√
4.1.4.07	7.1.4.07	Pendapatan Bunga	-	√

Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.

Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKD, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan.

4.2.8.4.1.1 Pengakuan

Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.

Dana Bergulir dapat diakui bila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
a. Merupakan bagian dari keuangan Provinsi Kepulauan Riau;
b. Dicantumkan dalam APBD sebagai pengeluaran pembiayaan pada DPA-SKPD PPKD;
c. Dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
d. Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
e. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menarik kembali dana bergulir.

Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan

Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.

Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.

Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

Besaran pendapatan yang dibayar kepada pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga atau bagi hasil yang disepakati antara penerima dana dengan pengelola dana bergulir.

4.2.8.4.1.2 Pengukuran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai yang dapat direalisasikan dapat diperoleh jika pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

4.2.8.4.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah-LO dan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA.

Pengungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

a. Dasar penilaian dana bergulir;
b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih;
c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir; dan
f. Informasi lain yang dianggap perlu.

4.2.8.4.2 Penyisihan Dana Bergulir

4.2.8.4.2.1 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4.2.8.4.2.2 Penghapusan Dana Bergulir

Penghapusan dana bergulir terdiri atas:
a. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
b. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
a. Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; atau
b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1(satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; atau
c. Debitur mengalami musibah (force majeure); atau
d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
g. Debitur yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena:
    1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
    2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang;
h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur (Pemerintah Daerah setempat atau lainnya); atau
i. Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit.
e. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.
f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2.8.5 Persediaan

Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Klasifikasi Persediaan

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	Bahan	√	-
		Suku Cadang	√	-
		Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	√	-
		Obat-obatan	√	-
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	√	-
		Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	√	-
		Natura dan Pakan	√	-
		Persediaan Penelitian	√	-
		Persediaan Dalam Proses	√	-
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	Komponen	√	-
		Pipa	√	-
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa; dan barang bekas pakai seperti komponen dan pipa bekas.

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:

a. Barang Konsumsi;
b. Amunisi;
c. Bahan untuk pemeliharaan;
d. Suku cadang;
e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
f. Pita cukai dan leges;
g. Bahan baku;
h. Barang dalam proses/setengah jadi;
i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat;
j. Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat; dan
k. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat.

Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8.5.1 Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

1. Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

2. Selisih Persediaan

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.2.8.5.2 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*).

4.2.8.5.3 Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses

produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.2.8.6 Investasi

Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Klasifikasi Investasi

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
		Deposito Jangka Panjang	-	√
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMD	-	√
		Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi Permanen Lainnya	-	√

Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

   Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

   Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

   1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

      Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

   2) Investasi Jangka Panjang Permanen

      Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4.2.8.6.1 Pengakuan Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memungkinkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

4.2.8.6.2 Pengukuran

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasi adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek:
   1) Investasi dalam bentuk surat berharga:
      a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
      b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
   2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
b. Pengukuran investasi jangka panjang:
   1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   2) Investasi non permanen:
      a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
      b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
      c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode berdasarkan kriteria tertentu, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Metode Penilaian Investasi berdasarkan kriteria tertentu

No.	Metode	Kriteria
a.	Metode biaya	Kepemilikan kurang dari 20%
b.	Metode ekuitas	Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan
		Kepemilikan lebih dari 50%
c.	Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan	Kepemilikan bersifat non permanen

a. Metode biaya
   Investasi yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas
   Investasi yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
   Investasi yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa

investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.2.8.6.3 Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8.6.4 Pelepasan Investasi

Pelepasan aset investasi pemerintah dapar berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

Perbedaaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

4.2.8.6.5 Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.

Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
g. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
h. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
i. Perubahan klasifikasi pos investasi;
j. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

4.2.8.7 Aset Tetap

4.2.8.7.1 Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.9 Klasifikasi Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.3.1	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persil	√	-
		Lapangan	√	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Dst…	√	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Dst…	√	-
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air Irigasi	√	-
		Instalasi	√	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Dst…	√	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
		Dst…	√	-

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

4.2.8.7.1.1 Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	Unit	Batasan Minimal Kapitalisasi
1.3.1	Tanah	unit	Rp 1,-
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.01	Alat Besar		
	- Alat Besar Darat	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Besar Apung	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Bantu	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.02	Alat Angkutan		

Kode Rekening	Uraian	Unit	Batasan Minimal Kapitalisasi
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Bermotor Udara	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.10	Komputer	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.11	Alat eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.16	Alat Peraga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.18	Rambu-rambu	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:		
1.3.3.01	Bangunan Gedung	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.02	Monumen	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.03	Bangunan Menara	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:		
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.02	Bangunan Air	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.03	Instalasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.04	Jaringan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	-	Rp 1,-
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	Rp 1,-
1.3.5.03	Hewan	-	Rp 1,-
1.3.5.04	Biota Perairan	-	Rp 1,-
1.3.5.05	Tanaman	-	Rp 1,-
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-	Rp 1,-
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	Rp 20.000.000,00

Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas dicatat sebagai aset *extracomptable*, tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil dari perkembangbiakan hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi dicatat sebagai aset *extracomptable*. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.

Catatan dalam *extracomptable* berfungsi sebagai media pengendali.

1. Tanah

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan.

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
    1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    2) Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

Pengakuan Peralatan dan Mesin dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan/atau bukti pembelian.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.

Perolehan Gedung dan Bangunan yang belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

Gedung dan bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Gedung dan Bangunan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (*lift*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioning*), dan komponen penunjang yang lain berupa saluran air dan telpon. *Air conditioning* dimaksudkan disini adalah berupa bangunan yang didalamnya berisi peralatan-peralatan *central air conditioning*.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.

Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
b. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir (a) dan (b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

4.2.8.7.1.2 Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pembongkaran dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
	Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan Gedung dan Bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langung termasuk perencanan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
	Biaya perolehan Gedung dan Bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Aset Tetap Lainnya tersebut siap digunakan.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

4.3 Pengukuran Aset Tetap per Jenis

a. Tanah

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Pengukuran peralatan dan mesin berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

c. Gedung dan Bangunan

Pengukuran Gedung dan Bangunan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan Bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Gedung dan Bangunan.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Pengukuran Aset Tetap Lainnya berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

4.3.1 Perolehan secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4.3.2 Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan *(impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

4.3.3 Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

4.3.4 Pengeluaran setelah Perolehan

Perolehan setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisai melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*). Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa penggantian utama merupakan pembaharuan bagian dari aset tetap atau nilai pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12 Nilai Pemeliharaan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Pemeliharaan
1	Peralatan dan Mesin	50% dari nilai perolehan
2	Gedung dan Bangunan	10% dari nilai perolehan
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10% dari nilai perolehan

4.3.5 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

4.3.6 Penyusutan

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam kondisi tertentu tanah pun dapat disusutkan apabila fisik tanah tersebut tidak ada lagi, terutama tanah yang berada disekitar aliran sungai/tepi pantai yang sudah abrasi.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tahun perolehan. Penyusutan dihitung secara bulanan meskipun baru diperoleh satu atau dua minggu atau bahkan satu hari.

Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.

Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diadakan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya serta tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Maka dalam hal ini nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya.

Penyusutan Aset Tetap dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual atau terhadap sekelompok aset sekaligus. Aset Tetap yang dapat disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
b. Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya komputer dan perangkat lunaknya);
d. Untuk kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, beberapa aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya, meskipun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung satu sama lain (misalnya peralatan bedah).

Apabila suatu aset tetap sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp.0,- namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan, maka aset tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya serta tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan.

Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3					**ASET TETAP**	
1	3	2				**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	01			Alat Besar	
1	3	2	01	01		Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02		Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03		Alat Bantu	7
1	3	2	02			Alat Angkutan	
1	3	2	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01		Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03		Alat Ukur	5
1	3	2	04			Alat Pertanian	
1	3	2	04	01		Alat Pengolahan	4
1	3	2	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01		Alat Kantor	5
1	3	2	05	02		Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01		Alat Studio	5
1	3	2	06	02		Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03		Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01		Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	01	29	Alat Kedokteran Lainnya	10
1	3	2	07	02		Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08			Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01		Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09			Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01		Senjata Api	10

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	02	02	Non Senjata Api	5
1	3	2	09	03		Senjata Sinar	10
1	3	2	09	04		Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10			Komputer	
1	3	2	10	01		Komputer Unit	4
1	3	2	10	02		Peralatan Komputer	4
1	3	2	11			Alat eksplorasi	
1	3	2	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12			Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01		Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01		Sumur	4
1	3	2	13	02		Produksi	4
1	3	2	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02		Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01		Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02		Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03		Alat SAR	4
1	3	2	15	04		Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16			Alat Peraga	
1	3	2	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	4
1	3	2	18			Rambu-rambu	
1	3	2	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	7
1	3	2	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	7
1	3	2	19			Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01		Peralatan Olahraga	4
1	3	3				**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	01			Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02			Monumen	
1	3	3	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03			Bangunan Menara	
1	3	3	03	01		Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01		Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4				**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	
1	3	4	01			Jalan dan Jembatan	

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3	4	01	01		Jalan	10
1	3	4	01	02		Jembatan	50
1	3	4	02			Bangunan Air	
1	3	4	02	01		Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07		Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03			Instalasi	
1	3	4	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02		Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06		Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	08		Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09		Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10		Instalasi Lain	20
1	3	4	04			Jaringan	
1	3	4	04	01		Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02		Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03		Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04		Jaringan Gas	30

4.3.7 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

4.3.8 Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.9 Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila suatu aset tidak dapat digunakan lagi secara permanen dikarenakan berbagai alasan namun masih memiliki masa manfaat, maka aset tersebut dapat dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain- Lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Namun apabila suatu aset tidak dapat digunakan sementara maka aset tersebut tidak dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kerugian penghentian aset tetap dibebankan pada defisit dari kegiatan non operasional.

Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.

Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.

Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal).

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai lain-lain PAD yang sah dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Dan dicatat ke dalam Surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

4.3.10 Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   1) Penambahan;
   2) Pelepasan;
   3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
   4) Mutasi aset tetap lainnya.
c. Informasi penyusutan, meliputi:
   1) Nilai penyusutan;
   2) Metode penyusutan yang digunakan;
   3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
   1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
   2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
   3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
   4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
e. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
   1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
   2) Tanggal efektif penilaian kembali;
   3) Jika ada, nama penilai independen;
   4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
   5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
f. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.3.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.14 Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
		Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	√	-
		Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

4.3.11.1Pengakuan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, direpresentasikan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sejenis dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa; dan
b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

4.3.11.2Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
a. asuransi;
b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi, yang dialokasikan dengan menggunakan metode sistematis dan rasional.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

4.3.11.3 Penyajian dan Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
d. Uang muka kerja yang diberikan;
e. Retensi.

Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan surat keputusan Gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

4.3.12 Dana Cadangan

Dana cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.15 Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dst….	-	√

Tabel 4.16 Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Kode Rekening		Uraian		Kewenangan	
LRA	LO			SKPD	SKPKD
4.1.4.05	7.1.4.05	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan….	-	√

4.3.12.1Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang didalamnya mencakup:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. Sumber dana cadangan; dan
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
f. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
g. Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4.3.12.2Pengukuran

Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal. Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.3.12.3Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.

Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bagi hasil diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.

Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain PAD yang Sah-jasa giro/bagi hasil dana cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain PAD yang Sah- jasa giro/bagi hasil dana cadangan.

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar hukum (Perda) pembentukan dana cadangan;
b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
e. Sumber dana cadangan; dan
f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.3.13 Aset Lainnya

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.17 Klasifikasi Aset Lainnya

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√
		Kerjasama Pemanfaatan	√	√
		Bangun Guna Serah	√	√
		Bangun Serah Guna	√	√
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Paten	√	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.5.4	Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain	√	√

4.3.13.1Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang
   1) Tagihan Penjualan Angsuran
      Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.
   2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
      Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
   Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
   1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa
      Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
   2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
      Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.
   3) Bangun Guna Serah – BGS(*Build, Operate, Transfer* – BOT)
      Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk Kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
      BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaukepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
   4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)
      Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
      BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan.Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disertai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan

pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau dinikmati oleh entitas; dan
2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Aset Lain-Lain

1) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses

pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

2) Kas Yang Dibatasi Penggunannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah.
3) Piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak, piutang restribusi maupun piutang lainnya.

4.3.13.2Pengukuran

4.3.13.2.1 Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

4.3.13.2.2 Tuntutan ganti rugi kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

4.3.13.2.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa
   Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
   Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)
   BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
   BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

4.3.13.2.4 Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
   1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
   2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
   3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4.3.13.2.5 Aset Lain-lain

a. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
b. Kas Yang Dibatasi Penggunannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah, diukur menurut saldo deposito ditambah dengan pendapatan bunga atas deposito tersebut.
c. Piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak, piutang restribusi maupun piutang lainnya, disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

4.3.14 Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas akan di amortisasi sebesar nilai Perolehannya pada saat Aset tersebut tidak memberi manfaat dalam Operasional entitas.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Aset Tak Berwujud berupa Kajian dihitung amortisasinya berdasarkan periode manfaat pada dokumen kajian tersebut.

4.3.14.1Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.

Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Besaran dan rincian aset lainnya;
b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
c. Informasi lainnya yang penting.

4.3.15 Aset Konsesi Jasa

4.3.15.1Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa adalah selama masa manfaat/umur aset tersebut.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra selama umur aset sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memenuhi kondisi persyaratan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset.

Suatu konstruksi aset yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan publik sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya.

Komponen aset konsesi jasa disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset tersebut, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi aset.

Reklasifikasi aset diukur menggunakan nilai tercatat aset.

4.3.15.2Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Pada saat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui aset konsesi jasa, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengakui kewajiban.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, kemudian disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari Pemerintah Kepulauan Riau kepada mitra, atau dari mitra kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan/atau hukum perjanjian yang relevan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa sebagai bentuk pertukaran, melalui skema atau skema kombinasi dari:

a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
b. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
    (i) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
    (ii) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jasa layanan publik.

4.3.16 Skema Kewajiban Keuangan

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui kewajiban.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas, jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
b. Jika ada kekurangan antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu tergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas/kuantitas/efisiensi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayarannya berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

a. pengurang nilai pengakuan kewajiban;
b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban pada Laporan Operasional.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah maka komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah maka komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada mitra ditentukan dengan estimasi/perkiraan sebesar nilai wajar.

4.3.17 Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mitra.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

Pada saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan.

Pada saat hak diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui

berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan skema pemberian hak usaha kepada mitra dalam hal pembayaran sehubungan pemakaian aset konsesi jasa dimana jasa publik tersebut dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat maka pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa yang diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

4.3.18 Membagi Perjanjian

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat kewajiban berdasarkan masing-masing skema.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat pendapatan lainnya selain dari pendapatan diatas berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

4.3.18.1Penyajian dan Pengungkapan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dengan pengungkapan yang memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemberi jasa/mitra menyampaikan laporan berupa informasi terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan. Informasi yang diberikan berupa:

a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
    (i) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
    (ii) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
    (iii) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
    (iv) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
    (v) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
    (vi) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);
    (vii) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan

d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa.

4.3.19 Properti Investasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial, baik untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Secara klasifikasi, aset tetap suatu Barang Milik Daerah (BMD) terdiri dari aset tetap berupa BMD tanah dan/atau BMD gedung dan bangunan.

Selanjutnya, agar suatu BMD yang dicatat sebagai pos aset tetap tanah dan/atau gedung dan bangunan memenuhi pengertian properti investasi, perlu dilakukan identifikasi karakteristik kondisinya. Penilaian karakteristik tersebut terutama melihat intensi atau niat penggunaan aset. Intensi ini harus ditetapkan dalam keputusan kepala daerah agar tanah dan/atau bangunan tersebut dapat dicatat sebagai properti investasi.

Contoh kondisi BMD yang dapat menjadi properti investasi antara lain:

a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
c. bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan ini adalah sebagai berikut:

a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;

c. properti yang digunakan sendiri termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
d. properti yang disewakan kepada pemerintah/lembaga lain dengan cara sewa pembiayaan;
e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar. Misalnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis;
g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempertanggung-jawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut diakui secara penuh sebagai properti investasi jika memenuhi kriteria signifikansi properti investasi yaitu:
a. luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa menempati perbandingan 3:4 (75%) luasan area dari area bagian properti digunakan sendiri (25%); atau
b. intensitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal yang tidak memenuhi properti yang digunakan sendiri dengan perbandingan 3:4 (75%) dari intensitas properti digunakan sendiri (25%).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kriteria aset properti investasi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengakui properti investasi jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

4.3.19.1Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pengakuan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi dan resiko yang terkait dengan properti investasi tersebut di masa depan berdasarkan bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah yang tersedia pada waktu pengakuan awal dan dituangkan dalam berita acara penetapan properti investasi sebagai dasar penetapan keputusan kepala daerah.

Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya.

Biaya properti investasi pada awal perolehan dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi.

Biaya atas perawatan properti investasi berupa biaya perbaikan dan pemeliharaan properti, diakui sebagai surplus atau defisit di Laporan Operasional pada saat terjadi. Biaya tersebut meliputi biaya tenaga kerja, barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, penggantian interior dinding bangunan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi.

Jumlah tercatat properti investasi yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian.

4.3.19.2Pengukuran

4.3.19.2.1 Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:

a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa, diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dimana aset diakui pada nilai mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Terhadap nilai yang setara diakui sebagai kewajiban atau liabilitas.

Premi yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.

Hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi. Hak atas properti dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti investasi yang diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter dihitung dari nilai wajar kecuali:

a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau;
b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Apabila transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempertimbangkan potensi jasa di masa yang akan datang.

Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas Akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas Akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

4.3.19.2.2 Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi.

Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Peningkatan dan penurunan nilai properti investasi akibat revaluasi, diakui dalam ekuitas.

Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa.

4.3.19.2.3 Alih Guna

Alih guna properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan:

a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalihkan penggunaan properti investasi menjadi aset tetap;
b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengembangkan properti investasi untuk dijual, mengalihkan penggunaan dari properti investasi menjadi persediaan;
c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas Akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

4.3.19.2.4 Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan.

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan aset.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

4.3.19.2.5 Penyajian

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menyewakan dan/atau menjual properti investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.3.19.2.6 Pengungkapan

Properti investasi diungkapkan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b. metode penyusutan yang digunakan;
c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
    (i) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;

(ii) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
(iii) pelepasan;
(iv) penyusutan;
(v) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
(vi) perubahan lain.

f. Pelaksanaan revaluasi atas properti investasi, harus mengungkapkan:
(i) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
(ii) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
(iii) tanggal efektif penilaian kembali;
(iv) nilai tercatat sebelum revaluasi
(v) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
(vi) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

h. Kriteria klasifikasi atas properti investasi yang digunakan sendiri dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar didukung oleh bukti pasar atau faktor lain;

j. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
(i) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
(ii) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
(iii) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

k. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

l. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

4.4 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan

4.4.1 Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi

Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud.

Standar Akuntansi Pemerintahan menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan dari SAP untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas.

Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:

a. Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;
b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf diatas, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-

sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf diatas. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB).

4.4.2 Konsistensi Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

4.4.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:

a. Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
b. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan laporan keuangan suatu entitas antarperiode untuk mengidentifikasi perubahan posisi keuangan, kinerja dan arus kasnya. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan untuk setiap periode dan dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali perubahan dalam kebijakan akuntansi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana paragraf diatas.

Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.

Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:

a. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
b. Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.

4.4.4 Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru, maka:

a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan
b. Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai paragraf diatas, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.

Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.

Penerapan retrospektif tidak praktis jika dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi yang baru. Laporan keuangan periode sebelumnya disandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing.

4.4.4.1 Pengungkapan

Bila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan perubahan kebijakan akuntansi maka perlu mengungkapkan:

a. sifat perubahan kebijakan akuntansi;
b. alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
c. nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
d. laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
e. dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

4.4.4.2 Kesalahan

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:

a. keterlambatan bukti transaksi;
b. kesalahan perhitungan matematis;
c. kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
d. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
e. kecurangan.

Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.

Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.

Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

4.4.4.3 Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan sebagaimana diatur dalam paragraf diatas, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

4.4.5 Perubahan Estimasi Akuntansi

Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:

a. Persediaan usang.
b. Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
c. Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi.
d. Pendapatan pajak;
e. Kewajiban garansi.

Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.

Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada perode perubahan.

Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.4.6 Operasi Yang Dihentikan

Operasi yang dihentikan antara lain berupa:

a. Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
b. Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.

Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.

Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain.
b. Fungsi tersebut tetap ada.
c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
d. Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.4.7 Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.18 Klasifikasi Kewajiban

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	√
2.1.02	Utang Bunga	-	√
2.1.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	√
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	√
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	√	√
2.1.06	Utang Belanja	√	√
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	-	√
2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	√
2.2.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	√
2.2.04	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	-	√

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

4.4.7.1 Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketetapan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila dalam ketetapan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4.4.7.2 Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan sebagai berikut:

a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
   - Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
   - Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
b. Utang Transfer
   Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)
   Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
d. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   - Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
   - Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
f. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)
   Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dalam 2 (dua) karakteristik sebagai berikut:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)
   Utang yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
b. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)
   - Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan,

penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.

- Utang yang dapat diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah.
- Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto atau premium harus dinilai sebesar nilai pari.
- Sekuritas utang pemerintah yang dijual dengan harga diskonto nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
- Sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.8 Perubahan Valuta Asing

a. Utang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
b. Pada setiap tanggal neraca pos utang dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan mengunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
c. Selisih penjabaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.9 Tunggakan

a. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.
b. Jumlah tunggakan atas pinjaman harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

4.4.10 Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah uang debitur, apabila kreditur mengakui bahwa tidak ada kewajiban pada debitur.

4.4.10.1 Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.

Utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban adalah:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
   1) pengurangan pinjaman;
   2) modifikasi persyaratan utang;
   3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
   4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
   5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
   6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
g. Biaya pinjaman:
   1) Perlakuan biaya pinjaman;
   2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
   3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.11 Pendapatan - LRA dan Belanja

4.4.11.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Tabel 4.19 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.1	Pendapatan Asli Daerah-LRA		
4.1.01	Pajak Daerah - LRA	√	-
4.1.02	Retribusi Daerah - LRA	√	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	-	√
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	√	-

b. Pendapatan Transfer

Tabel 4.20 Pendapatan Transfer

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.2	Pendapatan Transfer-LRA		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	-	√

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 4.21 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LRA		
4.3.01	Pendapatan Hibah-LRA	√	√
4.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	√	√

4.4.11.2Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
b. Diterima oleh SKPD
c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan Provinsi Kepulauan Riau dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk diakui sebagai pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk diakui sebagai pendapatan Provinsi Kepulauan Riau.
e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring)* atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada SKPD terkait.

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pengakuan pendapatan transfer-LRA dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan transfer yang terkait dengan kurang salur dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.

Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPD terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut. Anggaran pendapatan yang belum ditetapkan akan diusulkan pada APBD Perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan, realisasi tetap diakui sebagai pendapatan SKPD terkait sesuai klasifikasi pendapatan.

Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah pada SKPKD.

Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4.4.11.3Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4.11.4Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA;
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.12 Belanja

Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.22 Klasifikasi Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
5.1	Belanja Operasi		
5.1.01	Belanja Pegawai	√	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	√	-
5.1.03	Belanja Bunga	-	√
5.1.04	Belanja Subsidi	-	√
5.1.05	Belanja Hibah (berupa uang)	√	√
5.1.05	Belanja Hibah (berupa barang dan jasa)	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial (berupa uang)	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	√
5.2	Belanja Modal		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	√	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	√	-
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	√	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	√	-
5.3	Belanja Tidak Terduga		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	√
5.4	Belanja Transfer		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.1.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

4.4.12.1Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

4.4.12.2Pengukuran

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/ renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap-renovasi/rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.

Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja operasi/belanja pemeliharaan.

4.4.12.3Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja, antara lain:

Rincian belanja per SKPD;

a. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CALK.

Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CALK.

4.4.13 Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Tabel 4.23 Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
6.1	-	Penerimaan Pembiayaan	-	√
6.1.01	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	√
6.1.02	-	Pencairan Dana Cadangan	-	√
6.1.03	-	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	√
6.1.04	-	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	√
6.1.05	-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	√
6.1.06	-	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	√

b. Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 4.24 Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
6.2	-	Pengeluaran Pembiayaan	-	√
6.2.01	-	Pembentukan Dana Cadangan	-	√
6.2.02	-	Penyertaan Modal Daerah	-	√
6.2.03	-	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	√
6.2.04	-	Pemberian Pinjaman Daerah	-	√
6.2.05	-	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	√

4.4.13.1Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4.4.13.2Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.13.3Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan adalah:

a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal/investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

4.4.14 Pendapatan – LO dan Beban

4.4.14.1Pendapatan – LO

Pendapatan – LO diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.25 Klasifikasi Pendapatan - LO

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
7.1	Pendapatan Asli Daerah-LO		
7.1.01	Pajak Daerah-LO	√	-
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	√	-
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	-	√
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	√	-
7.2	Pendapatan Transfer-LO		
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	-	√
7.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO		
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	√	√
7.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	√	√
7.4	Surplus Non Operasional-LO		
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	√	√
7.4.02	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	√
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	√	√
7.5	Pendapatan Luar Biasa-LO		
7.5.01	Pendapatan Luar Biasa-LO	-	√

4.4.14.2Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat :

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
   1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
   2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
   1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
   2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.

a. Sistem *self assesment* artinya masyarakat sendirilah yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan.
b. Sistem *Official Assesment* artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan.

Untuk dapat mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan. Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Rekening Umum Kas Provinsi Kepulauan Riau tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapan.

b. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan Pajak Daerah-LO.

Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, pengakuan pendapatan LO sebesar yang telah menjadi hak entitas secara proposional.

Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.

Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan Retribusi diakui apabila SKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah surat ketetapan retribusi atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan surat ketetapan retribusi.

Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan secara substansial, hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memungut retribusi baru timbul dan diakui jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan diwujudkan dalam penerbitan dokumen. Pengakuan pendapatan retribusi tidak menganut prinsip pengendalian tetapi menganut prinsip layanan.

Pendapatan hasil kekayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan-LO bagian laba BUMD diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO atas aset kemitraan diakui saat diterbitkan surat tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut

dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.

Pendapatan bagi hasil dari deposito diakui berdasarkan laporan dari bank dan dilakukan penyesuaian atas pendapatan deposito yang belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan laporan dari bank tempat deposito.

Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan Provinsi Kepulauan Riau diakui saat diterbitkan surat tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Yang Tidak dipisahkan diakui ketika terbitnya surat ketetapan berita hasil lelang.

Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah alokasi DAU menurut peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer lainnya diakui sebesar hak tagih bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi.

Pendapatan transfer antar daerah diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan nilai definitif menurut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku penerima.

Pendapatan hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut dan terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Hibah barang berupa aset tetap dicatat sebagai aset tetap dan pendapatan hibah-LO.

Pendapatan Non Operasional (Surplus Non Operasional-LO) diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar).

Surplus Penjualan Aset Non lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi, terjadi apabila harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul apabila harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, fungsi akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.

Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau tidak rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dicatat sebagai pendapatan luar biasa LO.

4.4.14.3Pengukuran

Pendapatan-LO secara umum dicatat sebesar:

a. Nilai nominal pada bukti penerimaan atau surat ketetapan pajak/surat ketetapan retribusi atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
b. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud.

Pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), dicatat berdasarkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Surplus Non Operasional LO dihitung dari selisih lebih harga jual aset nonlancar dikurangi nilai buku aset non lancar tersebut.

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dihitung dari selisih lebih nilai tercatat (*carrying amount*) suatu kewajiban dikurangi harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) dari kewajiban tersebut.

4.4.14.4Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau;
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.15 Beban

Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.26 Klasifikasi Beban

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
8.1	Beban Operasi		
8.1.01	Beban Pegawai	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	√	-
8.1.03	Beban Bunga	-	√
8.1.04	Beban Subsidi	-	√
8.1.05	Beban Hibah	√	√
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	√	√
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	√	√
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortasi	√	
8.2	Beban Transfer		
8.2.01	Beban Bagi Hasil	-	√
8.2.02	Beban Bantuan Keuangan	-	√
8.3	Defisit Non Operasional-LO		
8.3.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	√	√
8.3.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	√
8.3.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	√	√
8.4	Beban Luar Biasa		
8.4.01	Beban Tidak Terduga	-	√

4.4.15.1Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Provinsi Kepulauan Riau. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar;
b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Metode pendekatan Beban
   Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin;
b. Metode pendekatan Aset
   Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga;

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan laporan operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya.

Dalam hal Badan Layanan Umum Provinsi Kepulauan Riau, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

4.4.15.2Pengukuran

Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pegawai dimaksud.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.

Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute atau (perselisihan) dikemudian hari.

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku.

Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya.

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.

Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan asset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut.

Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

4.4.15.3Koreksi dan Pengembalian

Koreksi beban yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4.4.15.4Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (*line item*).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban, antara lain:

a. rincian beban per SKPD;
b. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.16 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

4.4.16.1Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

4.4.16.1.1 Pengakuan dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

a. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
b. apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

4.4.16.1.2 Peristiwa Penyesuai setelah tanggal Pelaporan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Pemerintah Provinsi Kepulauan menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

4.4.16.1.3 Peristiwa Nonpenyesuai setelah tanggal Pelaporan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.

Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan diantaranya:

a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

4.4.17 Kesinambungan Entitas

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, kebijakan ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausal dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

4.4.17.1Pengungkapan

4.4.17.1.1 Pengungkapan Tanggal Laporan Keuangan diotorisasi untuk terbit

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

4.4.17.1.2 Pemutakhitan Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

Dalam beberapa kasus, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya.

4.4.17.1.3 Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

a. sifat peristiwa; dan
b. estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
e. Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau timbulnya kewajiban kontijensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
f. Dimulainya proses tuntunan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kepulauan Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3) Neraca;
4) Laporan Operasional (LO);
5) Laporan Arus Kas (LAK); dan
6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp3.712.434.360.163,46 atau sebesar 94,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pendapatan LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN DAERAH	**3.910.214.946.462,43**	**3.712.434.360.163,46**	**94,94**	**3.958.295.361.262,68**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.904.763.732.160,43**	**1.736.336.133.204,89**	**91,16**	**1.980.461.763.464,68**
Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
Retribusi Daerah	168.940.551.756,24	171.517.367.082,00	101,53	148.286.242.017,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40	1.904.909.335,00
Lain-lain PAD yang Sah	115.484.556.088,19	115.258.171.423,39	99,80	52.566.226.972,38
PENDAPATAN TRANSFER	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**	**1.976.533.066.207,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**	**1.300.531.591,00**
Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85	1.300.531.591,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.904.763.732.160,43	**1.736.336.133.204,89**

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.736.336.133.204,89 atau sebesar 91,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.904.763.732.160,43. Tabel berikut ini adalah rincian Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.904.763.732.160,43**	**1.736.336.133.204,89**	**91,16**	**1.980.461.763.464,68**
Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
Retribusi Daerah	168.940.551.756,24	171.517.367.082,00	101,53	148.286.242.017,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40	1.904.909.335,00
Lain-lain PAD yang Sah	115.484.556.088,19	115.258.171.423,39	99,80	52.566.226.972,38

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.617.238.624.316,00	**1.447.285.058.158,50**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan pengelolaan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Tabel berikut ini adalah rincian Pajak Daerah:

Tabel 5.3 Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Daerah	**1.617.238.624.316,00**	**1.447.285.058.158,50**	**89,49**	**1.777.704.385.140,00**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	444.109.779.594,00	405.307.682.591,00	91,26	596.081.883.938,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	399.572.412.018,00	273.480.737.600,00	68,44	522.716.638.500,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	478.452.376.124,00	489.750.163.677,00	102,36	490.605.194.542,00
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00
Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00
Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4 Rincian Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Daerah	**1.617.238.624.316,00**	**1.447.285.058.158,50**	**89,49**	**1.777.704.385.140,00**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**444.109.779.594,00**	**405.307.682.591,00**	**91,26**	**596.081.883.938,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	13.628.420.459,00	9.139.165.550,00	67,06	14.600.867.857,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	60.098.158.236,00	54.929.599.391,00	91,40	83.223.828.443,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	255.241.949.229,00	224.538.883.977,00	87,97	331.714.934.959,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	295.571.190,00	262.625.008,00	88,85	418.264.750,00
PKB-Mobil Bus-Bus	2.191.996.115,00	2.842.714.059,00	129,69	3.286.105.834,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	12.802.045.999,00	12.908.463.294,00	100,83	18.472.453.052,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	9.992.265.696,00	9.160.009.032,00	91,67	14.290.426.591,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	11.909.285.005,00	11.572.695.951,00	97,17	17.226.016.705,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	865.146.629,00	884.247.652,00	102,21	1.237.085.451,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	76.989.415.721,00	78.977.952.537,00	102,58	111.475.255.121,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	95.525.315,00	91.326.140,00	95,60	136.645.175,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**399.572.412.018,00**	**273.480.737.600,00**	**68,44**	**522.716.638.500,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.011.372.531,00	3.971.040.400,00	98,99	5.386.600.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	49.163.641.161,00	30.316.626.800,00	61,66	64.727.747.500,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	216.024.538.321,00	137.745.131.100,00	63,76	283.363.435.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	261.210.867,00	122.397.700,00	46,86	378.975.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.788.168.053,00	4.276.193.700,00	239,14	2.602.425.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.983.236.208,00	8.080.919.200,00	89,96	11.545.050.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.366.461.912,00	2.487.726.400,00	73,90	4.335.870.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.597.758.761,00	7.591.358.000,00	135,61	7.391.990.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	359.563.296,00	610.246.200,00	169,72	505.800.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	109.737.561.110,00	78.084.468.000,00	71,16	142.115.939.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	278.899.798,00	194.630.100,00	69,78	362.807.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	**478.452.376.124,00**	**489.750.163.677,00**	**102,36**	**490.605.194.542,00**
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	240.882.197.402,00	282.523.757.628,00	117,29	255.059.527.531,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	237.570.178.722,00	207.226.406.049,00	87,23	235.545.667.011,00
Pajak Air Permukaan	**33.933.643.819,00**	**33.017.182.076,00**	**97,30**	**1.192.208.723,00**
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00
Pajak Rokok	**180.651.107.585,00**	**174.288.290.965,00**	**96,48**	**167.108.459.437,00**
Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Alat Berat	**4.334.952.300,00**	**614.336.352,00**	**14,17**	**0,00**
Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	**76.184.352.876,00**	**70.826.664.897,50**	**92,97**	**0,00**
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00

Tabel 5.5 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**444.109.779.594,00**	**405.307.682.591,00**	**91,26**	**596.081.883.938,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	**13.628.420.459,00**	**9.139.165.550,00**	**67,06**	**14.600.867.857,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	13.437.883.339,00	8.990.055.846,00	66,90	14.312.861.463,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	82.625.024,00	50.305.594,00	60,88	119.311.461,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	27.179.835,00	24.523.392,00	90,23	50.812.925,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	80.732.261,00	74.280.718,00	92,01	117.882.008,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	**60.098.158.236,00**	**54.929.599.391,00**	**91,40**	**83.223.828.443,00**
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	59.844.173.820,00	54.698.375.997,00	91,40	82.841.464.510,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	92.782.458,00	72.701.028,00	78,36	141.134.300,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	161.201.958,00	158.522.366,00	98,34	241.229.633,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	**255.241.949.229,00**	**224.538.883.977,00**	**87,97**	**331.714.934.959,00**
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	254.210.987.612,00	223.355.743.744,00	87,86	330.170.949.178,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	135.811.561,00	116.059.559,00	85,46	194.320.419,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	317.808.557,00	321.503.217,00	101,16	467.427.600,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	577.341.499,00	745.577.457,00	129,14	882.237.762,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	**295.571.190,00**	**262.625.008,00**	**88,85**	**418.264.750,00**
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	148.351.442,00	138.792.073,00	93,56	205.321.325,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	128.997.805,00	106.653.823,00	82,68	177.792.925,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	2.299.486,00	3.976.206,00	172,92	3.976.500,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	15.922.457,00	13.202.906,00	82,92	31.174.000,00
PKB-Mobil Bus-Bus	**2.191.996.115,00**	**2.842.714.059,00**	**129,69**	**3.286.105.834,00**
PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.956.433.552,00	2.655.323.642,00	135,72	2.946.660.101,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	105.838.670,00	83.035.601,00	78,45	156.236.525,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	43.779.334,00	36.893.991,00	84,27	64.110.900,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	85.944.559,00	67.460.825,00	78,49	119.098.308,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	**12.802.045.999,00**	**12.908.463.294,00**	**100,83**	**18.472.453.052,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	12.456.651.903,00	12.569.799.541,00	100,91	17.951.831.556,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	45.600.043,00	28.605.679,00	62,73	65.533.725,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	107.993.098,00	106.942.188,00	99,03	164.662.917,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	191.800.955,00	203.115.886,00	105,90	290.424.854,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	**9.992.265.696,00**	**9.160.009.032,00**	**91,67**	**14.290.426.591,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	9.465.204.509,00	8.850.228.720,00	93,50	13.505.715.891,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	443.162.338,00	262.394.035,00	59,21	669.550.200,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	42.869.489,00	22.650.608,00	52,84	57.096.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	41.029.360,00	24.735.669,00	60,29	58.064.500,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	**11.909.285.005,00**	**11.572.695.951,00**	**97,17**	**17.226.016.705,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	9.169.543.426,00	9.278.893.427,00	101,19	13.309.594.755,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	2.595.174.012,00	2.162.389.321,00	83,32	3.710.846.450,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	56.618.967,00	46.421.298,00	81,99	81.607.500,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	87.948.600,00	84.991.905,00	96,64	123.968.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	**865.146.629,00**	**884.247.652,00**	**102,21**	**1.237.085.451,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	849.295.428,00	873.612.240,00	102,86	1.214.230.659,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	823.526,00	0,00	0,00	1.067.600,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	9.475.507,00	3.195.734,00	33,73	14.589.492,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	5.552.168,00	7.439.678,00	134,00	7.197.700,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	**76.989.415.721,00**	**78.977.952.537,00**	**102,58**	**111.475.255.121,00**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	76.823.119.621,00	78.818.323.271,00	102,60	111.232.415.762,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	47.875.951,00	49.285.900,00	102,95	69.785.259,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	118.420.149,00	110.343.366,00	93,18	173.054.100,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	**95.525.315,00**	**91.326.140,00**	**95,60**	**136.645.175,00**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	83.430.295,00	80.653.072,00	96,67	118.170.475,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	2.669.132,00	2.172.594,00	81,40	4.773.200,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	9.425.888,00	8.500.474,00	90,18	13.701.500,00

Pada tahun 2025 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi sebesar Rp405.307.682.591,00 atau sebesar 91,26% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp444.109.779.594,00, secara umum tidak tercapainya realisasi atas target yang ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-undang HKPD yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan insentif pembayaran Wajib Pajak setara dengan beban pajak tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasinya Undang-Undang HKPD tersebut menerapkan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 13,94%, yang menyebabkan penurunan realisasi dibandingkan target awal.

Realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp190.774.201.347,00 atau sebesar 32,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp596.081.883.938,00 dikarenakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) terkait ketentuan Opsen Pajak Daerah yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Sebelumnya, pada tahun 2024 Penerimaan PKB dicatat 100% sebagai pendapatan Pajak Daerah yang dicatat di kas daerah Provinsi terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke Kabupaten/Kota melalui mekanisme Bagi Hasil. Sedangkan pada tahun 2025 tarif dasar PKB untuk provinsi diturunkan, dan porsi untuk Kabupaten/Kota ditarik langsung sebagai Opsen yang langsung masuk ke kas Kabupaten/Kota. Sehingga secara nominal, nilai realisasi yang tercatat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi mengalami penurunan dikarenakan porsi Kabupaten/Kota tidak lagi dicatat terlebih dahulu di kas daerah provinsi.

Tabel 5.6 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**399.572.412.018,00**	**273.480.737.600,00**	**68,44**	**522.716.638.500,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	**4.011.372.531,00**	**3.971.040.400,00**	**98,99**	**5.386.600.000,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.011.372.531,00	3.971.040.400,00	98,99	5.386.600.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	**49.163.641.161,00**	**30.316.626.800,00**	**61,66**	**64.727.747.500,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	49.163.641.161,00	30.316.626.800,00	61,66	64.727.747.500,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	**216.024.538.321,00**	**137.745.131.100,00**	**63,76**	**283.363.435.000,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	216.024.538.321,00	137.745.131.100,00	63,76	283.363.435.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	**261.210.867,00**	**122.397.700,00**	**46,86**	**378.975.000,00**
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	261.210.867,00	122.397.700,00	46,86	378.975.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	**1.788.168.053,00**	**4.276.193.700,00**	**239,14**	**2.602.425.000,00**
BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.788.168.053,00	4.276.193.700,00	239,14	2.602.425.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	**8.983.236.208,00**	**8.080.919.200,00**	**89,96**	**11.545.050.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.983.236.208,00	8.080.919.200,00	89,96	11.545.050.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	**3.366.461.912,00**	**2.487.726.400,00**	**73,90**	**4.335.870.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.366.461.912,00	2.487.726.400,00	73,90	4.335.870.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	**5.597.758.761,00**	**7.591.358.000,00**	**135,61**	**7.391.990.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.597.758.761,00	7.591.358.000,00	135,61	7.391.990.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	**359.563.296,00**	**610.246.200,00**	**169,72**	**505.800.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	359.563.296,00	610.246.200,00	169,72	505.800.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	**109.737.561.110,00**	**78.084.468.000,00**	**71,16**	**142.115.939.000,00**
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	109.737.561.110,00	78.084.468.000,00	71,16	142.115.939.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	**278.899.798,00**	**194.630.100,00**	**69,78**	**362.807.000,00**
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	278.899.798,00	194.630.100,00	69,78	362.807.000,00

Pada tahun 2025 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi sebesar Rp273.480.737.600,00 atau sebesar 68,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp399.572.412.018,00, secara umum tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang HKPD yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan insentif pembayaran Wajib Pajak setara dengan beban pajak tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasinya Undang-Undang HKPD tersebut menerapkan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 39,74%, yang menyebabkan penurunan realisasi dibandingkan target awal. Selain itu, rendahnya capaian BBNKB dipengaruhi kondisi perekonomian yang belum stabil yang menyebabkan penurunan penjualan kendaraan baru dan rendahnya daya beli masyarakat. Disamping itu juga memberikan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik (EV) dalam rangka merangsang pasar baru.

Realisasi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp249.235.900.900,00 atau sebesar 47,68% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp522.716.638.500,00 dikarenakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) terkait ketentuan Opsen Pajak Daerah yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Sebelumnya, pada tahun 2024 Penerimaan BBNKB dicatat 100% sebagai pendapatan Pajak Daerah yang dicatat di kas daerah Provinsi terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke Kabupaten/Kota melalui mekanisme Bagi Hasil. Sedangkan pada tahun 2025 tarif dasar BBNKB untuk provinsi diturunkan, dan porsi untuk Kabupaten/Kota ditarik langsung sebagai Opsen yang langsung

masuk ke kas Kabupaten/Kota. Sehingga secara nominal, nilai realisasi yang tercatat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi mengalami penurunan dikarenakan porsi Kabupaten/Kota tidak lagi dicatat terlebih dahulu di kas daerah provinsi.

Tabel 5.7 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	**478.452.376.124,00**	**489.750.163.677,00**	**102,36**	**490.605.194.542,00**
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	240.882.197.402,00	282.523.757.628,00	117,29	255.059.527.531,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	237.570.178.722,00	207.226.406.049,00	87,23	235.545.667.011,00

Pada tahun 2025 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terealisasi sebesar Rp489.750.163.677,00 atau sebesar 102,36% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp478.452.376.124,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp855.030.865,00 atau sebesar 0,17% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp490.605.194.542,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika penerimaan PBBKB yang sangat sensitif terhadap fluktuasi konsumsi BBM, serta adanya normalisasi konsumsi bahan bakar industri di Kawasan Perdagangan Bebas (Batam, Bintan, Karimun). Di samping itu, transisi ke penggunaan energi alternatif dan kendaraan listrik secara bertahap juga mulai menekan volume konsumsi BBM di masyarakat.

Tabel 5.8 Rincian Pajak Air Permukaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Air Permukaan	**33.933.643.819,00**	**33.017.182.076,00**	**97,30**	**1.192.208.723,00**
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00

Pada tahun 2025 Pajak Air Permukaan terealisasi sebesar Rp33.017.182.076,00 atau sebesar 97,30% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp33.933.643.819,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp31.824.973.353,00 atau sebesar 2669,41% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.192.208.723,00. Lonjakan kenaikan yang sangat tinggi ini dipengaruhi oleh pembayaran piutang Pajak Air Permukaan oleh PT Adhya Tirta Batam kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 525K/TUN/2022 serta putusan Peninjauan Kembali (PK) terkait yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain itu, kenaikan ini juga didorong oleh hasil positif dari upaya intensifikasi pajak dan pemutakhiran data volume pengambilan air melalui Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPA) di kawasan industri Batam, Bintan, dan Karimun.

Tabel 5.9 Rincian Pajak Rokok – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Rokok	**180.651.107.585,00**	**174.288.290.965,00**	**96,48**	**167.108.459.437,00**
Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00

Pada tahun 2025 Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp174.288.290.965,00 atau sebesar 96,48% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp180.651.107.585,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp7.179.831.528,00 atau sebesar 4,30% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp167.108.459.437,00. Kenaikan ini

dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) oleh Pemerintah Pusat yang berdampak proporsional terhadap peningkatan alokasi dana bagi hasil Pajak Rokok yang diterima Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pembanding fiskal, pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh proporsi alokasi sebesar 0,007704 dengan estimasi nilai sebesar Rp175.729.790.267,00 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023.

Tabel 5.10 Rincian Pajak Alat Berat – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Alat Berat	**4.334.952.300,00**	**614.336.352,00**	**14,17**	**0,00**
Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00

Pada tahun 2025 Pajak Alat Berat (PAB) terealisasi sebesar Rp614.336.352,00 atau sebesar 14,17% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.334.952.300,00. Rendahnya capaian realisasi tersebut disebabkan oleh adanya jeda waktu administratif, dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus terlebih dahulu menerbitkan regulasi turunan mengenai tata cara pemungutan PAB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1289/KPTS-28/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pemungutan baru dapat diimplementasikan secara efektif sejak bulan September 2025. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang tidak mencatatkan realisasi, penerimaan tahun ini mengalami pertumbuhan positif mengingat PAB merupakan jenis sumber penerimaan baru yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, setelah pada tahun sebelumnya belum dapat dipungut akibat keterbatasan regulasi Nilai Jual Alat Berat (NJAB) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.

Tabel 5.11 Rincian Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)– LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	**76.184.352.876,00**	**70.826.664.897,50**	**92,97**	**0,00**
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00

Pada tahun 2025 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terealisasi sebesar Rp70.826.664.897,50 atau sebesar 92,97% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp76.184.352.876,00. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat menetapkan target maupun mencatatkan realisasi penerimaan. Hal tersebut dikarenakan Opsen MBLB merupakan jenis sumber penerimaan baru yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, yang diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin sekaligus mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di daerah.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	168.940.551.756,24	**171.517.367.082,00**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah.

Pada tahun 2025 Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp171.517.367.082,00 atau sebesar 101,53% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp168.940.551.756,24.

Adapun rincian Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.12 Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Daerah	**168.940.551.756,24**	**171.517.367.082,00**	**101,53**	**148.286.242.017,30**
Retribusi Jasa Umum	162.484.348.266,00	164.145.264.443,00	101,02	137.516.081.176,30
Retribusi Jasa Usaha	5.171.572.325,24	5.950.969.639,00	115,07	5.742.143.841,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.284.631.165,00	1.421.133.000,00	110,63	5.028.017.000,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian Retribusi Jasa Umum – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Jasa Umum	**162.484.348.266,00**	**164.145.264.443,00**	**101,02**	**137.516.081.176,30**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	**162.484.348.266,00**	**164.145.264.443,00**	**101,02**	**137.516.081.176,30**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	162.484.348.266,00	164.145.264.443,00	101,02	137.516.081.176,30

Pendapatan Retribusi Jasa Umum tahun 2025 terealisasi sebesar Rp164.145.264.443,00 atau sebesar 101,02% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp162.484.348.266,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp26.629.183.266,70 atau sebesar 19,36% selaras dengan meningkatnya target Retribusi Pelayanan Kesehatan dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini bersumber dari optimalisasi layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib yang didorong oleh peningkatan volume kunjungan pasien dan keberhasilan pengembangan berbagai layanan kesehatan. Inovasi tersebut meliputi penyediaan Layanan "*One Day Care*" untuk Anak Penderita Kanker dan Kelainan Darah, optimalisasi poli spesialis jantung dan saraf hingga

implementasi tindakan intervensi jantung perdana di Provinsi Kepulauan Riau pada Oktober 2025 menggunakan teknologi *Rotational Atherectomy* atau *Rotablator* yang secara signifikan mampu menekan angka rujukan pasien ke luar daerah.

Tabel 5.14 Rincian Retribusi Jasa Usaha– LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Jasa Usaha	**5.171.572.325,24**	**5.950.969.639,00**	**115,07**	**5.742.143.841,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**1.819.463.600,00**	**2.145.830.800,00**	**117,94**	**1.927.137.000,00**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.519.463.600,00	1.545.830.800,00	101,74	1.609.917.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000,00	475.000.000,00	158,33	317.220.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	**125.775.000,00**	**13.300.000,00**	**10,57**	**8.250.000,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	125.775.000,00	13.300.000,00	10,57	8.250.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	**700.000.000,00**	**617.849.585,00**	**88,26**	**2.510.628.596,00**
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000,00	617.849.585,00	88,26	2.510.628.596,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	**136.000.000,00**	**141.614.550,00**	**104,13**	**160.520.545,00**
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	0,00	0,00	88.735.700,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	136.000.000,00	141.614.550,00	104,13	71.784.845,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	**1.883.983.725,24**	**2.237.394.264,00**	**118,76**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.883.983.725,24	2.237.394.264,00	118,76	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	**506.350.000,00**	**794.980.440,00**	**157,00**	**1.135.607.700,00**
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	506.350.000,00	794.980.440,00	157,00	1.135.607.700,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun 2025 terealisasi sebesar Rp5.950.969.639,00 atau sebesar 115,07% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.171.572.325,24. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp208.825.798,00 atau sebesar 3,64% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.742.143.841,00 dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perluasan kerja sama pemanfaatan ruang perairan dengan pihak swasta, serta tingginya volume permintaan layanan teknis pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berikut dibawah ini penjelasan capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha:

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.145.830.800,00 atau sebesar 117,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.819.463.600,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp125.000.000,00 dari yang sebelumnya tidak dianggarkan merupakan sewa barang milik daerah berupa sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan untuk penempatan Tower Telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Tower Bersama Nomor B/000.2.3.2/768.2/BKAD-SET/2025 dan Nomor 3737TBIG-TBE-11/PMS/04/VIII/2025 tentang Sewa Menyewa Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan untuk Penempatan Tower Telekomunikasi kepada PT. Tower Bersama Tanggal 12 Agustus 2025.
b. Retribusi Pemakaian Ruangan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib terealisasi sebesar Rp187.170.800,00 atau sebesar 102,90% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp181.903.600,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diperoleh dari kontribusi utama antara lain sewa ruangan atm, sewa kantor kas, sewa ruang rapat dan auditorium serta sewa kantin.
c. Sementara itu, Retribusi Pemakaian Ruangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp1.305.680.000,00 atau sebesar 101,64% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.284.580.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diperoleh dari kontribusi utama antara lain sewa ruangan atm dan meningkatnya frekuensi sewa aula di asrama haji.
d. Retribusi Pemakaian Alat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terealisasi sebesar Rp475.000.000,00 atau sebesar 158,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp300.000.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diperoleh dari kontribusi utama yaitu penyewaan peralatan *Atomic Absorption Spectrofotometri* (AAS).

5.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib terealisasi sebesar Rp9.150.000,00 atau sebesar 158,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.775.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan disebabkan karena meningkatnya sewa kamar di rumah singgah untuk keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib. Sementara itu pada BLUD SMK Dinas Pendidikan terealisasi sebesar Rp4.150.000,00 atau sebesar 3,46% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp120.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan tidak dapat dioperasionalkannya secara maksimal beberapa kamar Edotel (*Educational Hotel*) yang dikelola oleh SMKN 2 Batam dan SMKN 2 Tanjungpinang.

5.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp617.849.585,00 atau sebesar 88,26% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp700.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan disebabkan antara lain:

a. Faktor alam akibat kondisi cuaca ekstrem di perairan Kepulauan Anambas dan Natuna menjadi tantangan utama bagi aktivitas penangkapan ikan. Berdasarkan data dari Kantor Stasiun Meteorologi Maritim Natuna, dinamika cuaca yang sangat berubah-ubah menyulitkan operasional nelayan diantaranya:

1) Tantangan musim selatan dan barat daya (Juli - November) ditandai dengan gelombang laut tinggi yang membatasi aktivitas penangkapan ikan secara signifikan.
2) Tantangan musim utara (Desember - Februari), cuaca ekstrem dengan angin kencang dan gelombang tinggi menghambat operasional nelayan secara keseluruhan.
3) Perubahan pola cuaca yang merupakan ketidakpastian cuaca yang berubah-ubah setiap bulan mengakibatkan nelayan kesulitan mengoptimalkan jadwal dan logistik penangkapan ikan.

b. Faktor persaingan usaha dan sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat telah memiliki *Freezer* dan membangun *Air Blast Freezer* (ABF) serta *Cold Storage* sendiri untuk penyimpanan ikan.
c. Menurunnya aktivitas Kapal *Purse Seine* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengakibatkan penurunan signifikan pada pendapatan dari jasa tambat labuh, penjualan air, dan layanan bengkel karena kapal-kapal *Purse Seine* yang biasanya menjadi pelanggan.

5.1.1.1.2.4 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp141.614.550,00 atau sebesar 104,13% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp136.000.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Keberhasilan dalam perawatan bibit ikan yang optimal, sehingga angka kematian ikan rendah.
b. Ketersediaan pakan dan vitamin ikan yang memadai, yang meningkatkan kualitas dan volume produksi.
c. Volume ikan siap jual melebihi estimasi awal akibat masa pembesaran yang lebih singkat, memungkinkan siklus panen dilakukan lebih awal dan lebih sering.
d. Diversifikasi jenis benih, tidak hanya terbatas pada pemeliharaan ikan kakap, yang dapat memperluas pasar dan peningkatan volume penjualan.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan tahun 2025 pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp2.237.394.264,00 atau sebesar 118,76% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.883.983.725,24. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diantaranya diperoleh dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan dalam mengembangkan/memperluas sumber pendapatan retribusi dengan menawarkan penggunaan wilayah perairan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak swasta untuk menunjang bisnisnya.

5.1.1.1.2.5 Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp794.980.440,00 atau 157,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp506.350.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan terealisasi sebesar Rp245.715.440,00 atau sebesar 187,07% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp131.350.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan dikarenakan antara lain:
   1) Tingginya permintaan pemeriksaan benih kelapa sawit dari PT. Bakti Tani Nusantara di Pulau Batam dan meningkatnya pembelian bibit tanaman buah oleh masyarakat pada UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

2) Meningkatnya pemeriksaan kesehatan hewan ternak pada pelaku usaha peternakan seperti pemeriksaan kesehatan hewan komoditi ekspor ayam pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) dan pemeriksaan sampel ternak babi pada PT. Indotirta Suaka di Pulau Bulan, Batam yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan.

b. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terealisasi sebesar Rp530.669.000,00 atau sebesar 141,51% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp375.000.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diperoleh dari meningkatnya permintaan uji mutu bahan konstruksi dari penyedia pelaksana kontruksi.

c. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp18.596.000,00 dari yang sebelumnya tidak dianggarkan merupakan layanan laboratorium dalam rangka pengujian mutu atas produk hasil perikanan yang dikelola oleh UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP).

Tabel 5.15 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Perizinan Tertentu	**1.284.631.165,00**	**1.421.133.000,00**	**110,63**	**5.028.017.000,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.800.000,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	**1.200.000.000,00**	**1.421.133.000,00**	**118,43**	**5.009.217.000,00**
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43	5.009.217.000,00
Retribusi Pertambangan Rakyat	**84.631.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat	84.631.165,00	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.421.133.000,00 atau sebesar 110,63% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.284.631.165,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp3.606.884.000,00 atau sebesar 71,74% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.028.017.000,00 yang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kebijakan restrukturisasi jenis pungutan pasca-implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Undang-Undang HKPD) yang diturunkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana ketentuan tersebut mencabut kewenangan daerah atas Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, serta adanya perubahan regulasi administratif pada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai penopang utama Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu penyebab turunnya realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 terdapat perubahan sistem pengajuan perpanjangan izin TKA oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI yang mengunci pengajuan ke satu wilayah (lokus tunggal) berkaitan erat dengan status wilayah administrasi atau kawasan khusus tempat TKA tersebut bekerja sehingga berdampak

terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi. Berikut dibawah ini penjelasan capaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.421.133.000,00 atau sebesar 118,43% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.200.000.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya perpanjangan izin TKA yang secara regulasi administratif terdaftar dan memiliki ruang lingkup operasional kerja lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pemungutan retribusinya menjadi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi.

5.1.1.1.2.6 Kemudian Retribusi Pertambangan Rakyat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2025 tidak terealisasi dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp84.631.165,00 dikarenakan belum dapat dilakukan pemungutan Retribusi Pertambangan Rakyat yang disebabkan belum ditetapkannya tarif Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA). Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menuangkan tarif IPERA ke dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah yang saat ini dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	3.100.000.000,00	**2.275.536.541,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal kepada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Pada tahun 2025 bagian laba atas penyertaan modal terealisasi sebesar Rp2.275.536.541,00 atau 73,40% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.100.000.000,00 yang berasal dari dividen PT. Bank Riau Kepri Syariah. Tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan kerugian finansial pada 2 (dua) BUMD berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025. Kerugian yang dialami oleh PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp1.864.966.167,00 dan PDAM Tirta Kepri sebesar Rp2.017.095.818,00, sedangkan pada BUMD PT. Pembangunan Kepri mencatat laba kecil sebesar Rp323.079.823,00 sehingga ketiga BUMD tersebut belum dapat memberikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2025. Sementara itu PT. Energi Kepri (Perseroda) yang baru berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Hingga akhir tahun 2025, BUMD tersebut belum beroperasi secara penuh sehingga belum dapat memberikan dividen.

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp370.627.206,00 atau sebesar 19,46% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.904.909.335,00 dikarenakan adanya kenaikan komposisi pembagian dividen atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang membukukan pertumbuhan laba bersih pada tahun buku berkenaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.16 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**3.100.000.000,00**	**2.275.536.541,00**	**73,40**	**1.904.909.335,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**3.100.000.000,00**	**2.275.536.541,00**	**73,40**	**1.904.909.335,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	**2.500.000.000,00**	**2.275.536.541,00**	91,02	**1.904.909.335,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.500.000.000,00	2.275.536.541,00	91,02	1.904.909.335,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (dividen) sebesar Rp2.275.536.541,00. Perhitungan pembagian dividen PT. Bank Riau Kepri Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alokasi Penggunaan Laba Bersih

Tabel 5.17 Alokasi Penggunaan Laba Bersih

No	Keterangan	Komposisi (%)	Nominal (Rp)
1	Dividen	67,50%	229.077.280.007,00
2	Cadangan Umum	27,50%	93.327.780.743,00
3	Dana Pembinaan Kemitraan	5%	16.968.687.408,00
Total		**100,00%**	**339.373.748.158,00**

2. Dividen perbulan tahun buku 2024 yang dibayar pada tahun 2025 untuk seluruh pemegang saham sebesar Rp19.089.773.334,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Dividen}}{\text{12 bulan}} = \frac{\text{Rp229.077.280.007,00}}{12} = \textbf{Rp19.089.773.334,00}$$

3. Jumlah modal PT. Bank Riau Kepri Syariah untuk periode bulan Januari s.d Juli 2024 berdasarkan pencatatan OJK sebesar Rp1.207.160.700.000,00.

4. Jumlah modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Januari s.d Maret 2024 berdasarkan pencatatan OJK Rp12.000.000.000,00 dengan komposisi sebesar 0,99% (pembulatan) melalui perhitungan sebagai berikut:

Jumlah modal pemegang saham x 100% / Total modal Bank	=	Rp12.000.000.000,00 / Rp 1.207.160.700.000,00	x 100%	=	**0,99407% pembulatan (0,99%)**

Perhitungan dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan komposisi saham sebesar 0,99% (pembulatan) untuk periode bulan Januari s.d Juli 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.18 Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Januari s.d Juli 2024

No	Bulan	Dividen yang diterima per bulan (Dividen perbulan seluruh pemegang saham x komposisi) = Rp19.089.773.334,00 X 0,99407%
1	Januari	189.765.545,00
2	Februari	189.765.545,00
3	Maret	189.765.545,00
4	April	189.765.545,00
5	Mei	189.765.545,00
6	Juni	189.765.545,00
7	Juli	189.765.545,00
Total		**1.328.358.815,00**

5. Jumlah modal PT. Bank Riau Kepri Syariah untuk periode bulan Agustus s.d Desember 2024 berdasarkan pencatatan OJK sebesar Rp1.209.260.700.000,00

   Perubahan Modal PT. Bank Riau Kepri Syariah dikarenakan adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham lainnya yang diakui atau dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Agustus 2024, dikarenakan adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham lain sebesar Rp2.100.000.000,00.

6. Jumlah Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Agustus s.d Desember 2024 berdasarkan pencatatan OJK Rp12.000.000.000,00 dengan komposisi sebesar 0,99234% (pembulatan 0,99%) dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah modal pemegang saham x 100% / Total modal Bank	=	Rp12.000.000.000,00 / Rp 1.209.260.700.000,00	x 100%	=	0,99234% (pembulatan 0,99%)

Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan komposisi saham sebesar 0,99% (pembulatan) untuk periode Agustus s.d Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.19 Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Agustus s.d Desember 2024

No	Bulan	Dividen yang diterima per bulan (Dividen perbulan seluruh pemegang saham x komposisi) = Rp19.089.773.334,00 X 0,99234%
1	Agustus	189.435.546,00
2	September	189.435.545,00
3	Oktober	189.435.545,00
4	November	189.435.545,00
5	Desember	189.435.545,00
Total		**947.177.726,00**

7. Total dari dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun buku 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025:

   = Total dividen (Januari s.d Juli 2024) + Total dividen (Agustus.d Desember 2024)

   = Rp1.328.358.815,00 + Rp947.177.725,00= **Rp2.275.536.541,00**

8. Perubahan persentase komposisi modal setiap pemegang saham, dipengaruhi oleh adanya penambahan penyertaan modal dari pemegang saham lain yang diakui/dicatat sebagai tambahan penyertaan modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5.1.1.1.4 Lain – lain PAD Yang Sah

Lain – lain PAD Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	115.484.556.088,19	**115.258.171.423,39**

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD dan Investasi lainnya dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah maupun Kas di Badan Layanan Umum Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan.

Pada tahun 2025 Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp115.258.171.423,39 atau 99,80% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp115.484.556.088,19. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp62.691.944.451,01 atau sebesar 119,26% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp52.566.226.972,38 dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu pendapatan bunga deposito dalam rangka manajemen kas serta pengembalian sisa penggunaan dana hibah Pilkada serentak tahun 2024 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau.

Rincian Lain – lain PAD Yang Sah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.20 Lain – lain PAD Yang Sah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Lain-lain PAD yang Sah	**115.484.556.088,19**	**115.258.171.423,39**	**99,80**	**52.566.226.972,38**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	512.084.414,00	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	957.027.354,47	0,00	1.336.203.722,00
Jasa Giro	4.500.000.000,00	3.616.972.805,65	80,38	6.290.193.867,90
Pendapatan Bunga	1.245.873.063,98	1.889.238.643,57	151,64	339.106.060,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	163.611,88	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	80.794.464,06	0,00	2.713.160.286,90
Pendapatan Denda Pajak Daerah	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	86,94	14.570.561.041,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.098.168,00	35.861.416,00	3.265,57	6.501.215,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	904.694.700,00
Pendapatan dari Pengembalian	73.423.349.811,00	76.974.438.969,96	104,84	3.951.467.681,76
Pendapatan BLUD	6.472.476.433,00	5.227.554.179,52	80,77	22.421.878.770,68
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.107.657,16	0,00	4.925.402,14
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00	26.034.225,00

Rincian Lain-lain PAD yang Sah diuraikan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 5.21 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	**0,00**	**512.084.414,00**	**0,00**	**0,00**
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	**0,00**	**69.710.000,00**	**0,00**	**0,00**
Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	69.710.000,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	**0,00**	**442.374.414,00**	**0,00**	**0,00**
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	442.374.414,00	0,00	0,00

Tabel 5.22 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	**0,00**	**957.027.354,47**	**0,00**	**1.336.203.722,00**
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	**0,00**	**957.027.354,47**	**0,00**	**1.336.203.722,00**
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	957.027.354,47	0,00	1.336.203.722,00

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD merupakan pendapatan sewa kantin pada satuan pendidikan sebesar Rp847.469.854,27 dan pelunasan piutang Pendapatan Kapal MV. Lintas Kepri pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri tahun 2020 sebesar Rp0,20 serta Pembayaran Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupa tanah dan fasilitas seluas 7.450 m^2 di Kawasan Guridam 12 Kota Tanjungpinang sebesar Rp109.557.500,00.

Tabel 5.23 Jasa Giro – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Jasa Giro	**4.500.000.000,00**	**3.616.972.805,65**	**80,38**	**6.290.193.867,90**
Jasa Giro pada Kas Daerah	**4.500.000.000,00**	**2.632.574.009,25**	**58,50**	**4.478.565.314,51**
Jasa Giro pada Kas Daerah	4.500.000.000,00	2.632.574.009,25	58,50	4.478.565.314,51
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	**0,00**	**732.404.374,11**	**0,00**	**1.617.505.366,33**
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	732.404.374,11	0,00	1.617.505.366,33
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.123.187,06**
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	194.123.187,06
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	**0,00**	**251.994.422,29**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	251.994.422,29	0,00	0,00

Pada Tahun 2024, Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP disajikan pada kode akun rincian objek 4.1.04.05.04 dengan uraian akun rincian objek Jasa Giro pada Rekening Dana BOS berikut sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun objek 4.1.04.05.06 dengan uraian akun rincian objek Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP berikut sub rincian objeknya.

Tabel 5.24 Pendapatan Bunga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Bunga	**1.245.873.063,98**	**1.889.238.643,57**	**151,64**	**339.106.060,00**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	**1.245.873.063,98**	**1.889.238.643,57**	**151,64**	**339.106.060,00**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.245.873.063,98	1.889.238.643,57	151,64	339.106.060,00

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp1.889.238.643,57 atau 151,64% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.245.873.063,98. Realisasi tersebut merupakan remunerasi dari Bank Indonesia atas Pembentukan Fasilitas TDF Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi hasil oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp40.451.450,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024 dan pendapatan yang bersumber dari Bunga Deposito atas Penempatan Uang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka manajemen kas sebesar Rp1.848.787.193,57 pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp1.018.102.269,57 dan PT. Bank KB Indonesia sebesar Rp830.684.924,00.

Tabel 5.25 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00

Tabel 5.26 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	**0,00**	**163.611,88**	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	**0,00**	**163.611,88**	**0,00**	**0,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	163.611,88	0,00	0,00

Tabel 5.27 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**0,00**	**80.794.464,06**	**0,00**	**2.713.160.286,90**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**0,00**	**80.794.464,06**	**0,00**	**2.713.160.286,90**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	80.794.464,06	0,00	2.713.160.286,90

Tabel 5.28 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda Pajak Daerah	**29.741.310.212,21**	**25.858.479.507,12**	**86,94**	**14.570.561.041,00**
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**13.955.066.122,21**	**9.948.896.000,00**	**71,29**	**14.542.181.200,00**
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	293.421.299,00	191.734.700,00	65,34	364.564.700,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	1.477.024.239,00	998.666.700,00	67,61	1.775.942.100,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	7.340.221.407,21	5.031.246.400,00	68,54	7.228.404.700,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	4.187.720.274,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	0,00	2.770.900,00	0,00	7.833.700,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	7.535.147,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	649.143.756,00	38.527.200,00	5,94	55.134.300,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	0,00	348.611.700,00	0,00	504.236.700,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	0,00	134.098.300,00	0,00	258.806.800,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	0,00	241.980.100,00	0,00	236.019.900,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	0,00	23.421.200,00	0,00	38.360.700,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	0,00	2.936.643.200,00	0,00	4.070.233.900,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	0,00	1.195.600,00	0,00	2.643.700,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**2.787.600,00**	**2.837.900,00**	**101,80**	**0,00**
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	2.787.600,00	1.506.000,00	54,02	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0,00	496.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	484.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	351.900,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	**0,00**	**91.312.431,00**	**0,00**	**27.713.748,00**
Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	0,00	91.312.431,00	0,00	27.713.748,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	**15.783.456.490,00**	**15.782.762.058,12**	**100,00**	**666.093,00**
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	15.783.456.490,00	15.782.762.058,12	100,00	666.093,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	**0,00**	**32.671.118,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	32.671.118,00	0,00	0,00

Tabel 5.29 Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**1.098.168,00**	**35.861.416,00**	**3265,57**	**6.501.215,00**
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	**0,00**	**341.518,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	**0,00**	**341.518,00**	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	**1.098.168,00**	**35.519.898,00**	**3234,47**	**6.501.215,00**
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan	1.098.168,00	35.269.505,00	3211,67	6.291.215,00
Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	250.393,00	0,00	0,00

Tabel 5.30 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**904.694.700,00**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**904.694.700,00**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	904.694.700,00

Tabel 5.31 Pendapatan dari Pengembalian

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian	**73.423.349.811,00**	**76.974.438.969,96**	**104,84**	**3.951.467.681,76**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	**0,00**	**268.279.192,00**	**0,00**	**145.420.254,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	268.279.192,00	0,00	145.420.254,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**0,00**	**253.574.420,00**	**0,00**	**257.212.278,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	202.119.438,00	0,00	148.281.798,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	36.879.430,00	0,00	97.866.080,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	6.212,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	12.874.000,00	0,00	9.399.400,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	1.670.000,00	0,00	1.665.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	25.340,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.542.168,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	2.542.168,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.000,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	646.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	**0,00**	**364.132.357,64**	**0,00**	**395.034.137,88**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku	0,00	3.710.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	3.468.500,00	0,00	998.700,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	8.002.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	235.644.700,00	0,00	370.517.937,88
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	47.590.600,00	0,00	15.339.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	71.118.557,64	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	**0,00**	**320.811.213,00**	**0,00**	**851.420.119,88**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	11.600.000,00	0,00	36.786.100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	13,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	242.571.035,74
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	39.730.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	103.600,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum	0,00	634.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	105.817.400,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	55.966.200,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	143.000.000,00	0,00	134.527.433,33

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur				
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	66.798.555,56
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	311.911.995,25
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	19.095.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	**0,00**	**73.405.485,28**	**0,00**	**404.212.131,71**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	519,33
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	226.893.886,52
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	185,28	0,00	52.866.948,86
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	64.093.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	124.450.777,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	0,00	6.478.300,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	2.834.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**0,00**	**100.712.924,00**	**0,00**	**23.545.000,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	100.712.924,00	0,00	23.545.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.360.000,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	9.360.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	**73.381.516.011,00**	**73.454.915.493,72**	**100,10**	**482.479.824,02**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	73.381.516.011,00	73.381.516.011,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	73.399.482,72	0,00	482.479.824,02
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**0,00**	**99.105,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	99.105,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**0,00**	**210.593.714,15**	**0,00**	**173.232.852,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	194.826.255,00	0,00	7.335.096,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	8.913.559,15	0,00	51.763.447,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	6.853.900,00	0,00	113.964.157,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	170.152,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	**0,00**	**23.580.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Jalan	0,00	23.580.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	**0,00**	**27.694.500,00**	**0,00**	**31.481.500,33**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	31.481.500,33
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	15.074.500,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	12.620.000,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	**0,00**	**47.696.309,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	0,00	2.608.470,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	0,00	45.087.839,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.773.750,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	23.773.750,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	**0,00**	**449.997.751,22**	**0,00**	**249.173.291,33**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	995.000,00	0,00	170.285.426,31
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	224.486.451,22	0,00	68.965.865,02
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	155.301.200,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	9.922.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	69.215.100,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	**0,00**	**692.508.800,00**	**0,00**	**264.644.630,46**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	0,00	692.508.800,00	0,00	264.644.630,46
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.280.951,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	0,00	0,00	291.280.951,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	**0,00**	**4.913.580,40**	**0,00**	**133.117.433,15**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	0,00	2.420.880,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	112.556.500,55
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	20.560.932,60
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	2.492.700,40	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.805.000,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanaman-Tanaman	0,00	0,00	0,00	20.805.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**113.766.600,00**	**0,00**	**12.500.000,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	113.766.600,00	0,00	12.500.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**0,00**	**33.344.503,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	33.344.503,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**0,00**	**40.365.600,00**	**0,00**	**143.993.760,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	0,00	40.365.600,00	0,00	143.993.760,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	**0,00**	**395.502.469,50**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	373.777.469,50	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0,00	21.725.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	**41.833.800,00**	**98.544.952,05**	**235,56**	**35.592.600,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.833.800,00	98.544.952,05	235,56	35.592.600,00

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp76.974.438.969,96 merupakan pengembalian ke Kas Daerah atas belanja dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

Tabel 5.32 Pendapatan BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan BLUD	**6.472.476.433,00**	**5.227.554.179,52**	**80,77**	**22.421.878.770,68**
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	**3.511.985.000,00**	**3.066.021.531,00**	**87,30**	**3.701.250.776,00**
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	3.511.985.000,00	3.066.021.531,00	87,30	3.701.250.776,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	**524.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.693.324.096,29**
Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	0,00	0,00	0,00	3.912.900.000,00
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat	524.400.000,00	0,00	0,00	12.780.424.096,29
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**1.808.636.982,00**	**1.965.913.295,00**	**108,70**	**1.248.815.078,00**
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.808.636.982,00	1.965.913.295,00	108,70	1.248.815.078,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**627.454.451,00**	**195.619.353,52**	**31,18**	**778.488.820,39**
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	88.843.155,00	139.586.765,52	157,12	79.055.935,69
Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	535.511.296,00	56.032.588,00	10,46	699.432.884,70

Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp5.227.554.179,52 atau 80,77% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp6.472.476.433,00. Berikut dibawah ini penjelasan capaian realisasi Pendapatan BLUD:

5.1.1.1.4.1.1 Pendapatan BLUD pada 19 (sembilan belas) BLUD SMK yang ada pada Dinas Pendidikan terealisasi sebesar Rp4.112.394.906,00 atau sebesar 72,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.670.864.500,00. Rendahnya capaian realisasi tersebut disebabkan kendala operasional masa transisi, di mana terdapat 14 (empat belas) SMKN yang baru ditetapkan statusnya sebagai BLUD pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1407 Tahun 2024 tentang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan baru dimulai secara efektif untuk implementasi penatausahaan keuangannya di awal tahun 2025.

5.1.1.1.4.1.2 Sedangkan Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib terealisasi sebesar Rp997.258.253,52 atau sebesar 124,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp801.611.933,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib menjadi salah satu rumah sakit yang mendukung program pendidikan dan pelatihan bagi siswa untuk belajar langsung dari tenaga medis profesional melalui kegiatan praktik dan magang selain itu merupakan lokasi yang ideal bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Tanjungpinang untuk melaksanakan pendidikan berbasis rumah sakit (*hospital-based education*). Peningkatan pendapatan BLUD ini juga diperoleh dari

implementasi sistem pengelolaan parkir profesional yang dikelola oleh pihak ketiga atau unit khusus parkir dengan sistem digital.

Tabel 5.33 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	**0,00**	**4.107.657,16**	**0,00**	**4.925.402,14**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	**0,00**	**4.107.657,16**	**0,00**	**4.925.402,14**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.107.657,16	0,00	4.925.402,14

Tabel 5.34 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	**100.448.400,00**	**100.448.400,00**	**100,00**	**26.034.225,00**
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	**100.448.400,00**	**100.448.400,00**	**100,00**	**26.034.225,00**
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	**100,00**	26.034.225,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.004.127.111.802,00	**1.974.299.383.024,00**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Alokasi Pendapatan Transfer ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Insentif Fiskal.

Pada Tahun 2024, Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan pada kode akun objek 4.2.01.01 dengan uraian akun objek Dana Perimbangan berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13/9845/Keuda Hal Penyeragaman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dalam Penerimaan Daerah Tanggal 15 Desember 2025 dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun objek 4.2.01.07 dengan uraian akun objek Dana Bagi Hasil (DBH) berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya.

Pendapatan Transfer pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.974.299.383.024,00 atau 98,51% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.004.127.111.802,00 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35 Pendapatan Transfer – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN TRANSFER	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**	**1.976.533.066.207,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**	**1.976.533.066.207,00**
Dana Bagi Hasil (DBH)	**322.734.238.997,00**	**297.708.095.000,00**	**92,25**	**318.182.556.980,00**
DBH Pajak	259.185.835.999,00	235.113.496.000,00	90,71	184.411.204.980,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	62.391.968.998,00	61.438.165.000,00	98,47	131.955.720.000,00
DBH Lainnya	1.156.434.000,00	1.156.434.000,00	100,00	1.815.632.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	**1.199.157.170.680,00**	**1.199.371.400.647,00**	**100,02**	**1.177.916.590.123,00**
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.027.586.951.680,00	1.027.801.318.066,00	100,02	1.177.916.590.123,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	171.570.219.000,00	171.570.082.581,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	**458.999.545.125,00**	**453.983.730.377,00**	**98,91**	**469.118.831.104,00**
DAK Fisik	92.350.324.000,00	88.988.492.951,00	96,36	157.564.483.366,00
DAK Non Fisik	366.649.221.125,00	364.995.237.426,00	99,55	311.554.347.738,00
Insentif Fiskal	**23.236.157.000,00**	**23.236.157.000,00**	**100,00**	**11.315.088.000,00**
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	11.315.088.000,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	23.236.157.000,00	23.236.157.000,00	100,00	0,00

Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer selama Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada tahun 2025, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp297.708.095.000,00 atau 92,25% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp322.734.238.997,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp20.474.461.980,00 atau sebesar 6,43% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp318.182.556.980,00 yang dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap kebijakan penetapan alokasi dan pagu definitif dari Pemerintah Pusat, yang realisasinya fluktuatif mengikuti dinamika penerimaan Pajak Pusat, selain itu pemotongan penyaluran TKD oleh Pemerintah Pusat periode Desember 2025 atas Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21, Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi yang seharusnya disalurkan sebesar 30% dari pagu alokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dengan nilai kurang lebih sebesar Rp47.502.403.600,00 hanya disalurkan sebesar 15% dari pagu alokasi atau Rp23.751.201.800,00.

Jenis-jenis Dana Bagi Hasil (DBH) antara lain:

A. DBH Pajak

DBH Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	259.185.835.999,00	235.113.496.000,00

DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal, Alokasi DBH Pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Insentif Fiskal. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menerima penyaluran kurang bayar dan lebih bayar DBH Pajak pada Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Pada tahun 2025 realisasi DBH Pajak sebesar Rp235.113.496.000,00 atau 90,71% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp259.185.835.999,00 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DBH Pajak	**259.185.835.999,00**	**235.113.496.000,00**	**90,71**	**184.411.204.980,00**
DBH PBB	40.492.623.000,00	37.347.858.500,00	92,23	24.469.915.000,00
DBH PPh Pasal 21	203.673.170.214,00	187.837.117.100,00	92,22	150.453.257.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	14.636.390.785,00	9.866.006.600,00	67,41	9.435.749.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	383.652.000,00	62.513.800,00	16,29	52.283.980,00

B. DBH Sumber Daya Alam (SDA)

DBH Sumber Daya Alam (SDA)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	62.391.968.998,00	61.438.165.000,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) adalah bagian daerah yang berasal dari Penerimaan Sumber Daya Alam Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Dan Pertambangan Panas. Alokasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menerima penyaluran kurang bayar dan lebih bayar DBH Sumber Daya Alam (SDA) pada Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Pada tahun 2025 DBH Sumber Daya Alam (SDA) terealisasi sebesar Rp61.438.165.000,00 atau 98,47% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp62.391.968.998,00. Rincian DBH Sumber Daya Alam (SDA) terdiri dari:

Tabel 5.37 DBH Sumber Daya Alam(SDA) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	**62.391.968.998,00**	**61.438.165.000,00**	**98,47**	**131.955.720.000,00**
DBH SDA Minyak Bumi	8.269.408.565,00	5.643.432.000,00	68,24	13.984.366.000,00
DBH SDA Gas Bumi	44.486.670.434,00	47.112.647.000,00	105,90	108.952.867.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.462.060.420,00	1.353.155.000,00	92,55	1.314.397.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	5.174.137.579,00	5.283.043.000,00	102,10	4.857.165.000,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	172.804.000,00	172.804.000,00	100,00	85.688.000,00
DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.055.000,00	1.055.000,00	100,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	2.825.833.000,00	1.872.029.000,00	66,25	2.761.237.000,00

C. DBH Lainnya

DBH Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.156.434.000,00	**1.156.434.000,00**

DBH Lainnya adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara tertentu untuk mendukung desentralisasi, terutama untuk mendukung fungsi spesifik. Alokasi DBH Lainnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan pengelolaannya diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Pada tahun 2025 DBH Lainnya terealisasi sebesar Rp1.156.434.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.156.434.000,00. Berikut tabel rincian DBH Lainnya:

Tabel 5.38 DBH Lainnya – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DBH Lainnya	**1.156.434.000,00**	**1.156.434.000,00**	**100,00**	**1.815.632.000,00**
DBH Sawit	1.156.434.000,00	1.156.434.000,00	100,00	1.815.632.000,00

D. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.199.157.170.680,00	**1.199.371.400.647,00**

Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Alokasi Umum pada tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan pengelolaannya diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

Pada tahun 2025 Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp1.199.371.400.647,00 atau 100,02%, dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.199.157.170.680,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp21.454.810.524,00

atau sebesar 1,82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.177.916.590.123,00 yang dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) demi mendukung pendanaan belanja pegawai formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari:

Tabel 5.39 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Alokasi Umum (DAU)	**1.199.157.170.680,00**	**1.199.371.400.647,00**	**100,02**	**1.177.916.590.123,00**
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	**1.027.586.951.680,00**	**1.027.801.318.066,00**	**100,02**	**1.177.916.590.123,00**
DAU	1.027.586.951.680,00	1.027.801.318.066,00	100,02	1.177.916.590.123,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	**171.570.219.000,00**	**171.570.082.581,00**	**100,00**	**0,00**
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	83.540.028.000,00	83.539.891.581,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	74.094.740.000,00	74.094.740.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.935.451.000,00	13.935.451.000,00	100,00	0,00

E. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	458.999.545.125,00	**453.983.730.377,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Jenis Dana Alokasi Khusus terdiri atas :

a) Dana Alokasi Khusus Fisik
b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Pada tahun 2025 Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp453.983.730.377,00 atau 98,91%, dari yang ditargetkan dalam APBD sebesar Rp458.999.545.125,00. Pada tahun 2025, realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp15.135.100.727,00 atau sebesar 3,23% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp469.118.831.104,00 yang dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap kebijakan penetapan alokasi dan pagu definitif dari Pemerintah Pusat, selain itu dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah menyebabkan pengurangan alokasi DAK Fisik untuk bagian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.40 Dana Alokasi Khusus – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Alokasi Khusus (DAK)	**458.999.545.125,00**	**453.983.730.377,00**	**98,91**	**469.118.831.104,00**
DAK Fisik	92.350.324.000,00	88.988.492.951,00	96,36	157.564.483.366,00
DAK Non Fisik	366.649.221.125,00	364.995.237.426,00	99,55	311.554.347.738,00

A. DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Pada tahun 2025 DAK Fisik terealisasi sebesar Rp88.988.492.951,00 atau 96,36%, dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp92.350.324.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DAK Fisik	**92.350.324.000,00**	**88.988.492.951,00**	**96,36**	**157.564.483.366,00**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	445.976.000,00	441.556.000,00	**99,01**	48.956.011.194,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	0,00	0,00	0,00	2.818.515.575,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	10.500.000.000,00	10.283.984.489,00	97,94	38.425.722.123,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	4.341.516.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	3.074.134.186,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	11.741.796.103,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	27.437.144.515,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	0,00	0,00	0,00	22.172.209.670,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	77.062.832.000,00	74.535.250.272,00	96,72	2.938.950.000,00
DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	3.727.702.190,00	0,00	0,00

B. DAK Non Fisik

DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Pengelolaan DAK Non Fisik diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

DAK Non Fisik terdiri dari beberapa jenis antara lain:

1) Dana BOS Reguler
2) Dana BOS Kinerja
3) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
4) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
5) Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
6) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya
7) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
8) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana-Keluarga Berencana
9) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
10) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
11) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM
12) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Kinerja pada tahun 2025 tidak ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah akan tetapi langsung disalurkan ke masing-masing Rekening Satuan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Sementara itu, penyaluran DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/MK/PK/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 Tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Daerah.

Pada tahun 2025 DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp364.995.237.426,00 atau 99,55%, dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp366.649.221.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42 DAK Non Fisik – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DAK Non Fisik	**366.649.221.125,00**	**364.995.237.426,00**	99,55	**311.554.347.738,00**
DAK Non Fisik-BOS Reguler	199.623.598.000,00	197.849.635.997,00	99,11	189.107.070.439,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.825.750.000,00	4.825.750.000,00	100,00	4.712.500.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	135.372.807.000,00	135.956.861.200,00	100,43	104.615.759.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.002.500.000,00	1.848.250.000,00	92,30	2.977.250.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.430.251.000,00	1.343.507.500,00	93,94	1.042.018.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	999.000.000,00	999.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	13.200.522.495,00	13.200.522.495,00	100,00	3.411.365.644,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	1.559.088.702,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.881.478.000,00	3.658.395.604,00	94,25	3.725.918.697,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	445.954.630,00	445.954.630,00	100,00	403.377.256,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	27.360.000,00	27.360.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.640.000.000,00	4.640.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00

1) DAK Non Fisik-BOS Reguler

DAK Non Fisik-BOS Reguler	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	199.623.598.000,00	**197.849.635.997,00**

DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-BOS Reguler adalah Dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-BOS Reguler terealisasi sebesar Rp197.849.635.997,00 atau 99,11% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp199.623.598.000,00.

2) DAK Non Fisik-BOS Kinerja

DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.825.750.000,00	**4.825.750.000,00**

DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-BOS Kinerja adalah Dana BOS yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-BOS Kinerja terealisasi sebesar Rp4.825.750.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.825.750.000,00.

3) DAK Non Fisik-TPG PNSD

DAK Non Fisik-TPG PNSD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	135.372.807.000,00	**135.956.861.200,00**

DAK Non Fisik Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-TPG PNSD merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-TPG PNSD terealisasi sebesar Rp135.956.861.200,00 atau 100,43% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp135.372.807.000,00.

4) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD

DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.002.500.000,00	**1.848.250.000,00**

DAK Non Fisik Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pemerintah dengan perjanjian kerja yang belum mendapatkan TPG PNSD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD terealisasi sebesar Rp1.848.250.000,00 atau 92,30% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.002.500.000,00.

5) DAK Non Fisik-TKG PNSD

DAK Non Fisik-TKG PNSD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.430.251.000,00	**1.343.507.500,00**

DAK Non Fisik Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-TKG PNSD merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-TKG PNSD terealisasi sebesar Rp1.343.507.500,00 atau 93,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.430.251.000,00.

6) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum

DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	999.000.000,00	**999.000.000,00**

DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum adalah dana alokasi khusus nonfisik yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan Taman Budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025, penggunaan DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum terealisasi sebagai DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah yang peruntukannya untuk meningkatkan kualitas layanan dan literasi, bukan untuk pembangunan fisik sebesar Rp999.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp999.000.000,00.

7) DAK Non Fisik-PK2UKM

DAK Non Fisik-PK2UKM	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	13.200.522.495,00	**13.200.522.495,00**

DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, dan usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-PK2UKM terealisasi sebesar Rp13.200.522.495,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp13.200.522.495,00.

8) DAK Non Fisik-BOKB-KB

DAK Non Fisik-BOKB-KB	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	3.881.478.000,00	**3.658.395.604,00**

DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana-Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-BOKB-KB adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan KB dengan peningkatan akses dan

kualitas pelayanan KB yang merata. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-BOKB-KB terealisasi sebesar Rp3.658.395.604,00 atau 94,25% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.881.478.000,00.

9) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	445.954.630,00	445.954.630,00

DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak terealisasi sebesar Rp445.954.630,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp445.954.630,00.

10) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	27.360.000,00	27.360.000,00

DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian terealisasi sebesar Rp27.360.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp27.360.000,00.

11) DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM

DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.640.000.000,00	4.640.000.000,00

DAK Nonfisik Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM adalah dana alokasi khusus nonfisik yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Sentra IKM yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM terealisasi sebesar Rp4.640.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.640.000.000,00.

12) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana

DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	200.000.000,00	200.000.000,00

DAK Nonfisik Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana adalah dana alokasi khusus nonfisik yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kedaerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana terealisasi

sebesar Rp200.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp200.000.000,00.

5.1.1.2.2.1 Insentif Fiskal - LRA

Insentif Fiskal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	23.236.157.000,00	**23.236.157.000,00**

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Pada tahun 2025 Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp23.236.157.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp23.236.157.000,00. Alokasi Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Daerah Peringkat Terbaik dalam Rangka Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

Sementara itu, realisasi penerimaan Insentif Fiskal pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.921.069.000,00 atau sebesar 105,36% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp11.315.088.000,00, dipengaruhi oleh pemutakhiran data dana insentif fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya yang didukung oleh keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan capaian penilaian kinerja daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.

Rincian Insentif Fiskal terdiri dari:

Tabel 5.43 Insentif Fiskal – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Insentif Fiskal	**23.236.157.000,00**	**23.236.157.000,00**	**100,00**	**11.315.088.000,00**
Insentif Fiskal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.315.088.000,00**
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	11.315.088.000,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	**23.236.157.000,00**	**23.236.157.000,00**	**100,00**	**0,00**
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	23.236.157.000,00	23.236.157.000,00	100,00	0,00

1. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.324.102.500,00	**1.798.843.934,57**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan hibah/sumbangan pihak ketiga dan Pendapatan Hibah dari Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pada tahun anggaran 2025 penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp1.798.843.934,57 atau 135,85% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.324.102.500,00 yang merupakan Sumbangan Hibah dari PT. Jasa Raharja kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Dana Hibah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Nomor P/21/SP/2025 dan Nomor 510/MOU/BAPENDA/2025 tanggal 11 Juni 2025, dengan nilai NPHD sebesar Rp1.294.704.000,00 dan juga berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis yang merupakan pengembalian atas penutupan rekening dana Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) yang dikembalikan ke Kas Daerah.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp498.312.343,57 atau sebesar 38,32% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.300.531.591,00, dipengaruhi oleh pengembalian atas penutupan rekening dana Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) yang tidak lagi dipungut oleh satuan pendidikan.

Tabel 5.44 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**	**1.300.531.591,00**
Pendapatan Hibah	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**	**1.300.531.591,00**
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	**1.324.102.500,00**	**1.294.704.000,00**	97,78	**1.292.700.000,00**
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78	1.292.700.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	**0,00**	**504.139.934,57**	**0,00**	**7.831.591,00**
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	504.139.934,57	0,00	7.831.591,00

5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah serta Belanja Operasional Satuan Pendidikan yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, dan Pemerintah Daerah tidak akan memperoleh pembayarannya kembali.

Tabel 5.45 Belanja Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA DAERAH	**3.932.501.110.900,44**	**3.715.604.258.925,54**	**94,48**	**4.071.747.457.825,29**
BELANJA OPERASI	**2.944.090.151.988,51**	**2.779.255.950.571,38**	**94,40**	**2.987.193.758.080,43**
Belanja Pegawai	1.468.712.653.029,50	1.448.897.643.513,04	98,65	1.309.833.869.704,00
Belanja Barang dan Jasa	1.294.788.524.618,62	1.161.921.240.159,38	89,74	1.311.138.772.714,16

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00
Belanja Subsidi	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00
Belanja Hibah	174.868.035.279,01	165.767.273.907,96	94,80	357.581.329.209,27
Belanja Bantuan Sosial	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,24	4.002.925.000,00
BELANJA MODAL	**269.313.511.475,33**	**232.159.877.710,16**	**86,20**	**307.344.075.589,86**
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.735.653.121,33	81.499.424.632,00	91,85	115.508.155.838,84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.492.416.281,00	80.799.961.394,06	85,51	129.103.961.833,55
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.989.061.381,00	46.310.371.998,10	74,71	36.791.762.576,47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.970.627.692,00	21.957.775.186,00	99,94	19.630.419.447,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.125.753.000,00	600.244.500,00	53,32	5.389.675.894,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.281.396.903,60**	**0,00**	**0,00**	**2.065.423.140,00**
Belanja Tidak Terduga	2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00
BELANJA TRANSFER	**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**	**98,24**	**775.144.201.015,00**
Belanja Bagi Hasil	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89	748.291.201.015,00
Belanja Bantuan Keuangan	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00	73,09	26.853.000.000,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.944.090.151.988,51	**2.779.255.950.571,38**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan belanja operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.779.255.950.571,38 dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp2.944.090.151.988,51 atau 94,40%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Belanja Operasi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA OPERASI	**2.944.090.151.988,51**	**2.779.255.950.571,38**	**94,40**	**2.987.193.758.080,43**
Belanja Pegawai	1.468.712.653.029,50	1.448.897.643.513,04	98,65	1.309.833.869.704,00
Belanja Barang dan Jasa	1.294.788.524.618,62	1.161.921.240.159,38	89,74	1.311.138.772.714,16
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00
Belanja Subsidi	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00
Belanja Hibah	174.868.035.279,01	165.767.273.907,96	94,80	357.581.329.209,27
Belanja Bantuan Sosial	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,24	4.002.925.000,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.468.712.653.029,50	**1.448.897.643.513,04**

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS lainnya yang diberikan kepada ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2025 Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.448.897.643.513,04 atau 98,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.468.712.653.029,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Belanja Pegawai – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pegawai	**1.468.712.653.029,50**	**1.448.897.643.513,04**	**98,65**	**1.309.833.869.704,00**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	600.193.813.071,18	586.350.321.322,04	97,69	477.549.846.508,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	804.172.071.553,69	791.519.964.438,00	98,43	608.621.438.978,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	169.973.975.468,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.638.611.361,63	29.023.911.364,00	97,93	28.329.573.243,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.636.639.187,00	1.186.363.100,00	72,49	1.321.600.258,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.000.017.856,00	3.000.017.856,00	100,00	2.808.613.442,00
Belanja Pegawai BLUD	30.071.500.000,00	37.817.065.433,00	125,76	21.228.821.807,00

Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**600.193.813.071,18**	**586.350.321.322,04**	**97,69**	**477.549.846.508,00**
Belanja Gaji Pokok ASN	**442.751.060.874,89**	**435.076.249.629,00**	**98,27**	**347.456.590.539,00**
Belanja Gaji Pokok PNS	266.419.426.814,17	262.871.998.669,00	98,67	262.185.101.679,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	176.331.634.060,72	172.204.250.960,00	97,66	85.271.488.860,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	**40.002.902.494,73**	**38.377.680.246,00**	**95,94**	**32.159.667.412,00**
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.003.522.752,87	25.549.897.312,00	98,26	25.661.636.316,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.999.379.741,86	12.827.782.934,00	91,63	6.498.031.096,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	**7.426.769.866,11**	**7.242.260.000,00**	**97,52**	**7.454.500.540,00**
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.426.769.866,11	7.242.260.000,00	97,52	7.454.500.540,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	**33.912.886.509,62**	**32.731.834.664,00**	**96,52**	**31.716.949.000,00**
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.398.497.709,41	22.361.026.000,00	95,57	23.017.341.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10.514.388.800,21	10.370.808.664,00	98,63	8.699.608.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	**7.510.863.393,99**	**7.305.948.000,00**	**97,27**	**3.119.158.575,00**
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.949.043.534,55	2.854.048.000,00	96,78	3.119.158.575,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.561.819.859,44	4.451.900.000,00	97,59	-
Belanja Tunjangan Beras ASN	**24.736.981.810,36**	**24.093.228.750,00**	**97,40**	**19.155.886.620,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Tunjangan Beras PNS	14.463.125.776,12	14.230.819.680,00	98,39	14.462.056.740,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.273.856.034,24	9.862.409.070,00	96,00	4.693.829.880,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	**706.535.280,67**	**582.098.638,00**	**82,39**	**731.608.684,00**
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	704.535.280,67	582.098.638,00	82,62	731.608.684,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	**7.986.161,71**	**6.795.021,04**	**85,08**	**5.104.961,00**
Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.059.774,75	3.391.141,00	83,53	3.792.904,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.926.386,96	3.403.880,04	86,69	1.312.057,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	**38.861.392.025,63**	**37.246.323.224,00**	**95,84**	**32.885.612.268,00**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.352.259.536,41	24.911.083.101,00	94,53	25.427.096.918,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.509.132.489,22	12.335.240.123,00	98,61	7.458.515.350,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	**957.554.960,92**	**921.986.776,00**	**96,29**	**716.293.080,00**
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	565.246.136,40	540.556.715,00	95,63	539.228.613,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	392.308.824,52	381.430.061,00	97,23	177.064.467,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	**2.823.755.425,61**	**2.765.916.374,00**	**97,95**	**2.148.474.829,00**
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.658.753.392,77	1.621.673.662,00	97,76	1.617.303.623,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.165.002.032,84	1.144.242.712,00	98,22	531.171.206,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	**495.124.266,94**	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	475.978.058,94	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	19.146.208,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.49 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**804.172.071.553,69**	**791.519.964.438,00**	**98,43**	**608.621.438.978,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	**406.065.743.134,37**	**399.289.809.644,00**	**98,33**	**383.939.228.872,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	314.106.854.381,00	307.767.304.098,00	97,98	302.169.551.682,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	91.958.888.753,37	91.522.505.546,00	99,53	81.769.677.190,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	**1.132.056.882,28**	**1.091.725.590,00**	**96,44**	**1.093.645.059,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.065.778.050,08	1.025.539.188,00	96,22	1.027.468.927,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	66.278.832,20	66.186.402,00	99,86	66.176.132,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	**36.290.686.728,98**	**35.417.223.095,00**	**97,59**	**35.683.949.932,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	35.816.651.486,96	34.971.761.906,00	97,64	35.287.140.917,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	474.035.242,02	445.461.189,00	93,97	396.809.015,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	**9.981.758.365,96**	**9.618.291.967,00**	**96,36**	**9.610.563.036,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	9.412.758.366,00	9.145.969.114,00	97,17	9.018.367.451,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	568.999.999,96	472.322.853,00	83,01	592.195.585,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	**185.423.502.111,55**	**181.686.068.322,00**	**97,98**	**178.294.052.079,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	180.823.345.622,39	177.139.703.442,00	97,96	174.137.293.232,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.600.156.489,16	4.546.364.880,00	98,83	4.156.758.847,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**165.278.324.330,55**	**164.416.845.820,00**	**99,48**	**0,00**
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	8.864.802.989,28	8.835.118.721,00	99,67	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.168.387.756,00	5.165.704.270,00	99,95	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.203.407.147,00	10.161.640.029,00	99,59	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	727.513.130,27	720.552.100,00	99,04	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	136.745.346.208,00	136.231.823.200,00	99,62	0,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.456.117.100,00	1.343.507.500,00	92,27	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.112.750.000,00	1.958.500.000,00	92,70	0,00

Pada Tahun 2024, akun objek Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN disajikan pada kode akun objek 5.1.01.03 berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun rincian objek 5.1.01.02.06 berikut sub rincian objeknya. Pengecualiannya untuk sub rincian objek Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (5.1.01.03.07.0001) dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (5.1.01.03.07.0002) dimutakhirkan menjadi kode akun rincian sub objek 5.1.02.02.01.0080 dan 5.1.02.02.01.0081.

Tabel 5.50 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.973.975.468,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.609.488.780,00**
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	13.315.589.697,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	11.354.921.446,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	9.938.977.637,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.322.822.388,00**
Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	103.322.822.388,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189.209.900,00**
Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	1.189.209.900,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.977.250.000,00**
Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.977.250.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800.000,00**
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
Belanja Honorarium	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.846.404.400,00**
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	27.457.284.400,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	389.120.000,00

Tabel 5.51 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	**29.638.611.361,63**	**29.023.911.364,00**	**97,93**	**28.329.573.243,00**
Belanja Uang Representasi DPRD	**1.420.800.000,00**	**1.420.800.000,00**	**100,00**	**1.297.950.000,00**
Belanja Uang Representasi DPRD	1.420.800.000,00	1.420.800.000,00	100,00	1.297.950.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	**174.141.000,00**	**174.141.000,00**	100,00	**163.521.000,00**
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	174.141.000,00	174.141.000,00	**100,00**	163.521.000,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	**131.949.240,00**	**131.949.240,00**	**100,00**	**131.080.200,00**
Belanja Tunjangan Beras DPRD	131.949.240,00	131.949.240,00	100,00	131.080.200,00
Belanja Uang Paket DPRD	**122.040.000,00**	**122.040.000,00**	**100,00**	**119.775.000,00**
Belanja Uang Paket DPRD	122.040.000,00	122.040.000,00	100,00	119.775.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	**2.060.160.000,00**	**2.060.160.000,00**	**100,00**	**1.882.027.500,00**
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.060.160.000,00	2.060.160.000,00	100,00	1.882.027.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	**97.875.000,00**	**97.875.000,00**	**100,00**	**80.866.500,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.875.000,00	97.875.000,00	100,00	80.866.500,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	**8.040.000.000,00**	**8.040.000.000,00**	**100,00**	**7.920.000.000,00**
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	100,00	7.920.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	**2.025.000.000,00**	**2.025.000.000,00**	**100,00**	**1.320.000.000,00**
Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	100,00	1.320.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	**17.947.161,62**	**17.847.164,00**	**99,44**	**21.514.303,00**
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.947.161,62	17.847.164,00	99,44	21.514.303,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	**8.297.298.960,00**	**8.297.298.960,00**	**100,00**	**8.123.138.740,00**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	125.583.120,00	125.583.120,00	100,00	91.618.740,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.928.960,00	2.928.960,00	100,00	2.880.000,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.786.880,00	8.786.880,00	100,00	8.640.000,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.160.000.000,00	8.160.000.000,00	100,00	8.020.000.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	**6.636.800.000,00**	**6.636.800.000,00**	**100,00**	**6.664.000.000,00**
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.636.800.000,00	6.636.800.000,00	100,00	6.664.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	**614.600.000,01**	**0,00**	**0,00**	**605.700.000,00**
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	614.600.000,01	0,00	0,00	605.700.000,00

Tabel 5.52 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**1.636.639.187,00**	**1.186.363.100,00**	**72,49**	**1.321.600.258,00**
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	**138.000.000,00**	**138.000.000,00**	**100,00**	**75.600.000,00**
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00	75.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	**3.696.000,00**	**3.696.000,00**	**100,00**	**0,00**
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.696.000,00	3.696.000,00	100,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	**131.760.000,00**	**131.760.000,00**	**100,00**	**136.080.000,00**
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	131.760.000,00	131.760.000,00	100,00	136.080.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	**3.910.680,00**	**3.910.680,00**	**100,00**	**1.738.080,00**
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00	3.910.680,00	100,00	1.738.080,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	**3.264.204,00**	**2.794.718,00**	**85,62**	**3.860.241,00**
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.264.204,00	2.794.718,00	85,62	3.860.241,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	**1.720,00**	**1.720,00**	**100,00**	**1.920,00**
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.720,00	1.720,00	100,00	1.920,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	**8.628.480,00**	**7.392.000,00**	**85,67**	**7.257.600,00**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.628.480,00	7.392.000,00	85,67	7.257.600,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	**155.520,00**	**155.520,00**	**100,00**	**155.520,00**
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	100,00	155.520,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	**466.560,00**	**466.560,00**	**100,00**	**466.560,00**
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	100,00	466.560,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	**1.346.756.023,00**	**898.185.902,00**	**66,69**	**1.096.440.337,00**
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	400.894.426,00	296.322.106,00	73,92	404.038.707,00
Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	390.075.361,00	191.053.029,00	48,98	336.719.737,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	518.978.338,00	383.604.119,00	73,92	355.681.893,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	36.807.898,00	27.206.648,00	73,92	0,00

Tabel 5.53 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**3.000.017.856,00**	**3.000.017.856,00**	**100,00**	**2.808.613.442,00**
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	**100,00**	**300.000.000,00**
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	300.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	**2.640.017.856,00**	**2.640.017.856,00**	**100,00**	**2.508.613.442,00**
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.640.017.856,00	2.640.017.856,00	100,00	2.508.613.442,00

Tabel 5.54 Belanja Pegawai BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pegawai BLUD	**30.071.500.000,00**	**37.817.065.433,00**	**125,76**	**21.228.821.807,00**
Belanja Pegawai BLUD	30.071.500.000,00	37.817.065.433,00	125,76	21.228.821.807,00

Realisasi Belanja pegawai menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.55 Realisasi Belanja Pegawai menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA PEGAWAI
A	**PELAYANAN UMUM**	
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	16.272.866.469,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.174.112.006,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23.819.298.523,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.570.064.080,00
5	Badan Pendapatan Daerah	70.191.130.509,00
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.139.971.973,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.692.655.828,00
8	Badan Penghubung Daerah	4.136.024.023,00
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.866.488.787,00
10	Biro Umum	85.974.425.022,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.922.255.246,00
12	Dinas Kebudayaan	8.184.419.188,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.979.693.270,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.635.603.158,04
15	Dinas Kesehatan	22.202.635.160,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	18.727.684.450,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.552.448.992,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.406.028.642,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.352.080.555,00
20	Dinas Pariwisata	10.235.310.166,00
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	21.329.695.335,00
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.982.142.287,00
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.394.909.840,00
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11.835.017.567,00
25	Dinas Pendidikan	626.966.334.306,00
26	Dinas Perhubungan	13.842.208.922,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.860.089.020,00
28	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	14.304.233.670,00
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.744.445.455,00
30	Dinas Sosial	9.893.796.469,00
31	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	25.019.956.534,00
32	Inspektorat	31.443.209.193,00
33	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	55.672.115.260,00
34	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	127.306.623.672,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	16.545.804.796,00
36	Sekretariat DPRD	47.721.865.140,00
	JUMLAH	**1.448.897.643.513,04**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.294.788.524.618,62	**1.161.921.240.159,38**

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran anggaran untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pada tahun 2025 Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp1.161.921.240.159,38 atau sebesar 89,74%, dari yang dianggarkan sebesar Rp1.294.788.524.618,62.

Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.56 Belanja Barang dan Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang dan Jasa	**1.294.788.524.618,62**	**1.161.921.240.159,38**	**89,74**	**1.311.138.772.714,16**
Belanja Barang	367.769.476.420,29	314.317.487.277,45	85,47	293.215.797.830,25
Belanja Jasa	488.652.796.542,19	446.336.500.472,61	91,34	518.729.152.485,59
Belanja Pemeliharaan	56.389.648.454,20	41.750.101.777,92	74,04	68.400.450.864,92
Belanja Perjalanan Dinas	96.421.983.923,55	87.845.288.867,00	91,11	125.068.460.538,50
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.999.883.800,00	28.419.098.677,00	98,00	54.371.556.702,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	106.842.994.373,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	116.987.962.046,00	113.061.921.817,84	96,64	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	139.566.773.432,39	130.190.841.269,56	93,28	144.510.359.919,90

Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.57 Rincian Belanja Barang – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang	**367.769.476.420,29**	**314.317.487.277,45**	85,47	**293.215.797.830,25**
Belanja Barang Pakai Habis	**363.035.593.254,29**	**311.125.390.664,45**	**85,70**	**293.189.475.830,25**
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.814.378.927,91	2.063.229.212,26	73,31	3.392.570.000,44
Belanja Bahan-Bahan Kimia	698.491.470,00	625.539.461,00	89,56	140.667.650,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.552.708.360,43	21.375.961.177,00	99,18	23.860.809.937,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	591.550.335,00	534.126.169,00	90,29	1.036.749.870,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	455.570.598,00	448.880.598,00	98,53	197.617.400,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	41.753.805,00	41.273.458,00	98,85	58.325.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	39.707.106,00	35.436.900,00	89,25	23.060.400,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	176.292.000,00	173.761.300,00	98,56	70.083.500,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.859.857.605,00	1.761.782.609,00	36,25	1.360.837.750,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.463.395.749,00	2.366.970.664,00	96,09	3.480.796.200,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.592.594.180,00	1.591.369.258,00	99,92	508.839.694,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	32.402.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	704.700,00	682.650,00	96,87	8.891.830,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	49.964.720,00	48.963.397,00	98,00	60.885.892,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	132.640.230,00	130.895.085,00	98,68	71.607.540,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	138.861.000,00	137.500.000,00	99,02	136.180.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.881.100.527,29	4.464.962.218,00	91,47	4.590.617.811,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.450.095.047,42	4.107.915.326,00	92,31	4.356.185.789,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.378.585.770,73	13.780.092.602,00	89,61	11.917.286.335,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	760.794.337,47	617.061.095,00	81,11	861.015.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.956.583.685,57	1.757.902.285,00	89,85	1.187.045.509,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.294.125.305,53	3.914.865.593,00	91,17	5.050.087.960,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.249.389.412,00	2.084.083.726,00	92,65	2.395.812.193,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.176.342.262,38	909.697.324,00	77,33	1.366.250.697,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	46.052.480,00	45.411.100,00	98,61	30.378.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	211.305.250,00	187.325.905,00	88,65	481.819.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.175.460.051,00	2.981.531.887,00	93,89	2.465.411.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.507.487.267,00	2.336.678.826,00	93,19	4.326.815.654,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	4.895.297.449,87	3.157.835.511,00	64,51	69.906.799,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.541.413.580,50	1.872.918.673,25	73,70	4.134.276.337,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	211.314.911.457,50	175.182.869.189,94	82,90	154.789.780.745,81
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	10.357.659.163,00	9.335.314.701,00	90,13	2.603.844.025,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	907.200,00	816.000,00	89,95	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.008.655.725,63	2.891.656.764,00	96,11	1.157.134.653,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	191.448.240,00	189.755.150,00	99,12	47.626.605,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.425.325.585,69	1.408.820.658,00	98,84	3.350.629.472,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.967.300,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.022.325.042,37	19.199.832.819,00	91,33	19.906.755.082,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.367.405.870,00	10.017.931.683,00	96,63	11.875.253.948,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30.672.000,00	24.864.000,00	81,06	20.925.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	797.557.000,00	666.417.000,00	83,56	171.006.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	88.413.600,00	56.828.000,00	64,28	95.951.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.078.657.804,00	13.874.781.259,00	92,02	14.757.583.540,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	287.500.000,00	287.105.000,00	99,86	275.250.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	715.500.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.379.649.500,00	1.227.862.525,00	89,00	1.767.779.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	507.260.196,00	488.477.125,00	96,30	1.170.716.012,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	4.400.000,00	4.398.000,00	99,95	2.400.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pakaian Penyelamatan	696.000,00	690.000,00	99,14	598.000,00
Belanja Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
Belanja Pakaian KORPRI	16.897.000,00	15.717.600,00	93,02	26.040.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	425.100.000,00	420.536.470,00	98,93	1.023.895.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	313.758.102,00	305.208.430,00	97,28	228.843.300,00
Belanja Pakaian Olahraga	1.825.108.055,00	1.538.481.630,00	84,30	1.105.052.700,00
Belanja Pakaian Paskibraka	236.407.500,00	235.447.650,00	99,59	235.420.000,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	219.375.000,00	193.925.001,00	88,40	132.340.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	**4.575.000,00**	**4.420.000,00**	**96,61**	**5.123.000,00**
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	4.575.000,00	4.420.000,00	96,61	2.028.000,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	515.000,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	**4.729.308.166,00**	**3.187.676.613,00**	**67,40**	**21.199.000,00**
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	360.000,00	88.800,00	24,67	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.929.600,00	23.176.800,00	89,38	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.057.940,00	990.990,00	48,15	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	78.925.005,00	51.154.000,00	64,81	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	24.120.000,00	21.950.000,00	91,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	7.997.200,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	11.940.000,00	11.940.000,00	100,00	3.800.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	12.199.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	17.800.000,00	17.500.000,00	98,31	5.200.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.240.080,00	13.199.999,00	99,70	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	4.432.856.341,00	2.964.199.980,00	66,87	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	50.958.000,00	50.590.469,00	99,28	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	20.988.000,00	20.851.681,00	99,35	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	2.664.000,00	2.645.405,00	99,30	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	9.472.000,00	9.388.489,00	99,12	0,00

Tabel 5.58 Rincian Belanja Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Jasa	**488.652.796.542,19**	**446.336.500.472,61**	91,34	**518.729.152.485,59**
Belanja Jasa Kantor	**337.286.197.636,39**	**310.444.272.893,34**	92,04	**376.907.284.456,71**
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.310.049.054,00	5.497.059.500,00	87,12	6.937.009.500,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.239.420.000,00	8.067.892.000,00	97,92	9.779.920.999,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.242.190.000,00	2.034.450.225,00	90,73	1.184.198.514,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	402.180.000,00	399.180.000,00	99,25	685.000.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	57.326.000,00	42.560.000,00	74,24	20.239.500,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.030.570.000,00	8.440.970.000,00	93,47	1.778.520.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	390.000.000,00	386.000.000,00	98,97	383.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	76.441.161.184,33	76.021.181.266,48	99,45	85.362.384.937,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.007.330.486,00	9.299.473.121,00	92,93	17.100.722.366,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	43.306.680,00	38.188.400,00	88,18	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.027.364.193,00	837.832.597,00	81,55	1.877.924.942,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	742.370.000,00	718.130.000,00	96,73	1.309.315.952,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	207.133.470,00	188.093.787,00	90,81	363.657.394,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	309.410.000,00	254.473.010,00	82,24	1.114.065.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	59.558.409.760,08	57.953.705.364,00	97,31	126.845.491.824,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.175.575.552,00	4.157.541.962,00	99,57	12.744.400.349,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.609.394.367,68	8.257.056.358,00	95,91	8.833.310.669,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.505.702.314,00	15.096.394.859,00	91,46	14.805.415.085,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.762.848.754,04	3.610.623.736,00	95,95	3.082.744.623,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	2.763.968.227,62	2.214.822.545,00	80,13	989.499.477,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	450.000.000,00	350.000.000,00	77,78	0,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.053.000.000,00	1.037.850.000,00	98,56	1.472.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	694.455.000,00	693.255.000,00	99,83	565.478.220,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	632.863.450,00	435.433.046,86	68,80	1.022.744.832,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.522.300,00	1.595.300,00	28,89	2.864.500,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.460.000.000,00	10.430.859.109,00	83,71	7.567.619.270,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	565.200.000,00	535.700.000,00	94,78	163.200.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	505.684.984,00	478.876.270,00	94,70	382.906.050,00
Belanja Jasa Kalibrasi	252.305.856,00	252.268.756,00	99,99	58.778.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	461.414.400,00	411.263.359,00	89,13	275.311.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	22.070.173.391,00	16.394.241.868,00	74,28	34.551.919.000,00
Belanja Jasa Operator Kapal	337.812.070,00	324.458.738,00	96,05	870.657.026,00
Belanja Tagihan Telepon	723.680.224,00	476.041.555,00	65,78	1.194.953.928,00
Belanja Tagihan Air	697.365.547,96	525.205.702,00	75,31	447.988.912,00
Belanja Tagihan Listrik	23.999.047.282,68	21.703.519.469,00	90,43	21.878.886.562,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	594.336.600,00	570.216.590,00	95,94	1.201.710.454,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.474.231.759,40	7.223.499.079,00	85,24	8.263.193.554,71
Belanja Paket/Pengiriman	922.644.444,00	900.844.244,00	97,64	688.858.372,00
Belanja Penambahan Daya	23.452.482,00	23.452.482,00	100,00	93.656.100,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	0,00	0,00	1.795.789,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.830.887.803,00	2.257.081.969,00	79,73	972.212.756,00
Belanja Pengolahan Air Limbah	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Medical Check Up	3.421.634.042,00	15.624.000,00	0,46	24.429.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.518.126.030,06	33.361.729.350,00	91,36	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	174.536.000,00	119.352.000,00	68,38	0,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	4.495.000.000,00	4.451.708.711,00	99,04	0,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	237.173.183,54	217.159.102,00	91,56	0,00
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	115.024.160,00	81.231.993,00	70,62	0,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	2.872.455.488,00	2.826.919.870,00	98,41	0,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	93.957.492,00	72.357.492,00	77,01	0,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	653.603.604,00	631.999.108,00	96,69	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	**42.956.897.643,40**	**40.903.232.169,75**	95,22	**43.336.152.424,40**
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	11.779.054.403,00	11.764.784.000,00	99,88	10.681.242.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.589.420.000,00	8.509.010.000,00	99,06	8.040.235.000,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	687.055.200,00	680.512.000,00	99,05	643.218.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.551.622.238,17	6.992.742.395,00	92,60	10.950.525.234,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	438.174.618,97	386.709.681,00	88,25	7.017.759.062,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	537.840.783,46	508.195.765,00	94,49	822.225.081,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	941.824.235,80	922.087.983,75	97,90	425.540.847,40
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	4.236.059.764,00	2.983.983.145,00	70,44	4.755.406.400,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	8.195.846.400,00	8.155.207.200,00	99,50	0,00
Belanja Sewa Tanah	**165.150.000,00**	**127.150.000,00**	76,99	**12.000.000,00**
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	120.000.000,00	115.000.000,00	95,83	0,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	45.150.000,00	12.150.000,00	26,91	12.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	**34.647.250.584,30**	**33.725.341.655,00**	97,34	**45.081.309.757,00**
Belanja Sewa Excavator	50.585.000,00	50.585.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	5.000.000,00	4.773.000,00	95,46	9.500.000,00
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.351.378.500,00	9.183.239.243,00	98,20	12.529.575.311,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	52.500.000,00	36.838.500,00	70,17	42.520.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	24.200.000,00	21.700.000,00	89,67	7.100.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.529.293.887,00	4.211.225.400,00	92,98	2.816.403.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.675.876.000,00	2.667.050.000,00	99,67	6.474.612.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	3.108.891.000,00	3.103.505.963,00	99,83	6.283.195.587,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.642.828.500,00	1.610.005.130,00	98,00	2.896.409.320,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	29.760.000,00	29.760.000,00	100,00	495.255.000,00
Belanja Sewa Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	29.948.724,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.430.000,00	14.430.000,00	100,00	14.430.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	36.500.000,00	34.126.700,00	93,50	101.200.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	13.070.007.697,30	12.720.868.619,00	97,33	13.320.692.815,00
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	54.000.000,00	37.234.100,00	68,95	56.898.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	**13.912.789.571,20**	**13.252.413.054,00**	95,25	**13.598.627.647,00**
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.101.521.650,00	2.974.757.900,00	95,91	2.153.848.333,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	150.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	130.925.200,00	129.788.400,00	99,13	8.700.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	361.500.000,00	339.200.000,00	93,83	212.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.291.042.000,00	2.280.578.000,00	99,54	1.860.844.000,00
Belanja Sewa Bangunan Parkir	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00	8.880.000,00
Belanja Sewa Taman	15.000.000,00	14.824.600,00	98,83	16.867.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	303.341.761,20	290.350.000,00	95,72	460.244.000,00
Belanja Sewa Asrama	987.406.920,00	982.629.720,00	99,52	912.353.400,00
Belanja Sewa Hotel	6.206.815.040,00	5.751.851.434,00	92,67	768.503.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	259.757.000,00	254.553.000,00	98,00	7.045.887.914,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**41.300.223.233,03**	**30.746.441.227,52**	74,45	**28.037.664.231,48**
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	5.643.728.500,00	3.579.866.789,47	63,43	2.448.704.990,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	6.770.702.800,00	5.790.511.647,00	85,52	11.313.827.514,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.317.738.839,00	1.857.924.538,62	80,16	2.955.631.795,50
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	94.682.512,00	94.682.511,60	100,00	475.252.605,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	80.000.000,00	79.493.750,00	99,37	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.763.092.320,00	1.458.704.747,00	82,74	858.708.820,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.488.040.914,00	2.334.178.624,00	66,92	1.257.359.160,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	0,00	0,00	9.768.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	1.412.433.985,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	15.254.272.786,03	11.940.993.480,17	78,28	2.703.384.829,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.718.727.378,00	1.789.356.714,66	65,82	2.931.717.622,98
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.120.863.524,00	1.119.515.081,00	52,79	1.499.215.630,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	630.432.660,00	384.921.150,00	61,06	171.659.280,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	417.941.000,00	316.292.194,00	75,68	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	**4.587.602.500,00**	**4.287.122.350,00**	93,45	**2.128.728.322,00**
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	599.999.700,00	598.384.350,00	99,73	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00	0,00	0,00	153.600.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.987.602.800,00	3.688.738.000,00	92,51	1.962.128.322,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.256.835,00**
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	0,00	0,00	0,00	19.256.835,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	100,00	**240.000.000,00**
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	140.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	**11.407.448.818,83**	**10.470.251.480,00**	91,78	**6.375.200.551,00**
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	11.321.744.458,83	10.397.816.480,00	91,84	6.149.629.551,00
Belanja Bimbingan Teknis	9.500.000,00	3.600.000,00	37,89	0,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	76.204.360,00	68.835.000,00	90,33	225.571.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	**2.314.236.555,04**	**2.305.275.643,00**	99,61	**2.985.928.261,00**
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	708.505.538,00	706.100.282,00	99,66	1.085.682.815,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	620.680.919,00	620.262.230,00	99,93	937.864.536,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	920.002.219,00	914.082.928,00	99,36	962.380.910,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	65.047.879,04	64.830.203,00	99,67	0,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Tabel 5.59 Rincian Belanja Pemeliharaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pemeliharaan	**56.389.648.454,20**	**41.750.101.777,92**	**74,04**	**68.400.450.864,92**
Belanja Pemeliharaan Tanah	**2.325.695.999,00**	**2.080.412.050,00**	**89,45**	**773.550.000,00**
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	2.325.695.999,00	2.080.412.050,00	89,45	773.550.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**14.543.959.321,00**	**12.807.801.498,00**	**88,06**	**12.596.986.085,33**
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	47.763.600,00	38.223.600,00	80,03	20.932.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	191.880.000,00	177.000.000,00	92,25	88.200.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	290.000.350,00	183.808.670,00	63,38	1.155.295.079,33
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	26.110.000,00	23.707.000,00	90,80	39.636.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	769.741.250,00	708.284.532,00	92,02	709.680.514,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.823.085.028,00	5.348.914.828,00	91,86	4.478.654.362,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	129.285.000,00	104.848.664,00	81,10	188.390.262,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.357.598.250,00	1.350.133.200,00	99,45	1.271.207.550,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	0,00	0,00	0,00	719.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	145.870.000,00	126.051.600,00	86,41	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	242.220.000,00	227.983.500,00	94,12	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	619.761.090,00	604.757.200,00	97,58	231.809.200,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	148.967.500,00	147.777.750,00	99,20	323.524.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.064.847.423,00	2.226.987.909,00	72,66	1.975.784.872,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	294.583.330,00	264.497.000,00	89,79	53.880.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	137.000.000,00	136.854.000,00	99,89	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	10.578.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	96.241.000,00	95.715.300,00	99,45	109.725.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	22.444.800,00	22.200.000,00	98,91	54.450.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.136.560.700,00	1.020.056.745,00	89,75	1.165.738.746,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	**20.274.976.137,20**	**12.189.625.013,00**	**60,12**	**48.582.810.058,59**
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.642.206.905,70	9.337.335.384,55	56,11	27.099.841.896,06
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	47.065.983,99
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	99.345.259,00	99.289.631,95	99,94	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.472.828.282,50	1.430.744.750,28	97,14	168.791.820,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.012.000.000,00	487.005.586,22	48,12	21.137.510.358,54
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	272.794.680,00	235.800.000,00	86,44	129.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	597.949.010,00	578.159.860,00	96,69	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	177.852.000,00	21.289.800,00	11,97	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**19.245.016.997,00**	**14.672.263.216,92**	**76,24**	**6.447.104.721,00**
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	11.350.573.923,00	9.042.462.663,00	79,67	4.016.214.400,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	80.000.000,00	79.690.200,00	99,61	1.836.309.990,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.540.000.000,00	369.187.200,00	14,53	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.406.123.300,00	3.406.123.300,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.311.028.774,00	1.219.120.773,44	92,99	522.480.331,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	513.446.000,00	512.167.080,48	99,75	72.100.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	43.845.000,00	43.512.000,00	99,24	0,00

Tabel 5.60 Rincian Belanja Perjalanan Dinas – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Perjalanan Dinas	**96.421.983.923,55**	**87.845.288.867,00**	**91,11**	**125.068.460.538,50**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	**95.989.497.280,57**	**87.675.272.598,00**	**91,34**	**124.695.811.106,50**
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.747.261.095,27	83.007.114.864,00	91,47	118.247.877.151,50
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.752.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.976.692.888,30	3.676.654.000,00	92,46	4.227.318.300,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	426.172.495,00	295.211.874,00	69,27	761.818.723,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	834.618.802,00	696.291.860,00	83,43	1.458.796.932,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	**432.486.642,98**	**170.016.269,00**	**39,31**	**372.649.432,00**
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	432.486.642,98	170.016.269,00	39,31	372.649.432,00

Tabel 5.61 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**28.999.883.800,00**	**28.419.098.677,00**	**98,00**	**54.371.556.702,00**
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**5.042.698.800,00**	**4.987.278.977,00**	**98,90**	**6.662.560.000,00**
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.225.348.800,00	1.177.928.977,00	96,13	775.560.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	815.850.000,00	815.850.000,00	100,00	1.399.000.000,00
Belanja Beasiswa	2.998.500.000,00	2.993.500.000,00	99,83	4.488.000.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**23.957.185.000,00**	**23.431.819.700,00**	**97,81**	**47.708.996.702,00**
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	23.957.185.000,00	23.431.819.700,00	97,81	47.692.746.702,00

Tabel 5.62 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang dan Jasa BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.842.994.373,00**
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	**0,00**	**106.842.994.373,00**
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	106.842.994.373,00

Pada Tahun 2024, Belanja Barang dan Jasa BOS disajikan pada kode akun objek 5.1.02.88 dengan uraian akun objek Belanja Barang dan Jasa BOS berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun objek 5.1.02.89 dengan uraian akun objek Belanja Barang dan Jasa BOSP berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya.

Tabel 5.63 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang dan Jasa BOSP	**116.987.962.046,00**	**113.061.921.817,84**	**96,64**	**0,00**
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	**116.987.962.046,00**	**113.061.921.817,84**	**96,64**	**0,00**
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	116.108.212.046,00	113.061.921.817,84	97,38	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	879.750.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.64 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang dan Jasa BLUD	**139.566.773.432,39**	**130.190.841.269,56**	**93,28**	**144.510.359.919,90**
Belanja Barang dan Jasa BLUD	**139.566.773.432,39**	**130.190.841.269,56**	**93,28**	**144.510.359.919,90**
Belanja Barang dan Jasa BLUD	139.566.773.432,39	130.190.841.269,56	93,28	144.510.359.919,90

Realisasi Belanja Barang dan Jasa menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.65 Realisasi Belanja Barang dan Jasa menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025– LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
A	**EKONOMI**	**125.791.009.832,29**
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.338.509.388,44
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.843.062.636,92
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	13.232.822.820,50
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.578.030.922,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.302.844.707,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.169.437.825,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	39.191.098.255,29
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	806.814.688,00
9	Dinas Perhubungan	1.946.743.687,14
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.128.188.730,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.253.456.172,00
B	**KESEHATAN**	**60.995.843.111,25**
1	Dinas Kesehatan	42.446.548.329,25
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.492.225.716,00
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	8.257.290.792,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	4.799.778.274,00
C	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**4.567.227.348,00**
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	856.852.131,00
2	Biro Hukum	1.230.262.138,00
3	Dinas Sosial	331.499.253,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	2.148.613.826,00
D	**PARIWISATA**	**7.448.534.641,00**
1	Dinas Pariwisata	7.448.534.641,00
E	**PELAYANAN UMUM**	**548.278.351.822,83**
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	2.699.797.672,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.550.646.331,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25.682.007.733,95
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.487.623.693,00
5	Badan Pendapatan Daerah	35.108.461.707,75
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	989.796.979,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.504.180.043,00
8	Badan Penghubung Daerah	8.464.330.331,00
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.629.366.133,00
10	Biro Administrasi Pimpinan	5.979.611.120,00
11	Biro Hukum	473.829.181,00
12	Biro Kesejahteraan Rakyat	27.468.767.150,00
13	Biro Organisasi	881.263.370,00
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.592.545.967,00
15	Biro Pengadaan Barang/Jasa	1.335.416.266,00
16	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.574.583.448,00
17	Biro Umum	66.190.630.811,05
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.758.328.349,00
19	Dinas Kebudayaan	2.973.440.448,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.458.566.905,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.556.688.094,00
22	Dinas Kesehatan	4.267.144.325,00
23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3.675.468.424,00

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.232.285.783,00
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.579.044.293,00
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.072.844.096,00
27	Dinas Pariwisata	2.716.850.199,00
28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8.318.399.876,00
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.137.184.986,00
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.880.958.477,00
31	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.152.058.887,00
32	Dinas Pendidikan	21.229.223.740,49
33	Dinas Perhubungan	4.079.424.736,00
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.382.665.954,00
35	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	4.351.621.390,40
36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.767.695.141,00
37	Dinas Sosial	2.453.535.749,00
38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.610.318.451,26
39	Inspektorat	17.544.380.447,00
40	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	21.680.956.927,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	121.761.735.011,93
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	5.767.954.955,00
43	Sekretariat DPRD	82.256.718.241,00
F	**PENDIDIKAN**	**234.632.060.248,19**
1	Dinas Kebudayaan	1.275.021.726,31
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.723.635.440,00
3	Dinas Pendidikan	224.064.258.629,88
4	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	1.569.144.452,00
G	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2.597.418.323,00**
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.494.929.017,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.102.489.306,00
H	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**9.638.232.055,00**
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.265.548.056,00
2	Dinas Sosial	5.322.385.859,00
3	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.298.140,00
I	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**167.972.562.777,82**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	924.323.021,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	167.048.239.756,82
	JUMLAH	**1.161.921.240.159,38**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.66 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per masing-masing OPD Tahun 2025– LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	2.699.797.672,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.550.646.331,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25.682.007.733,95
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.344.475.824,00
5	Badan Pendapatan Daerah	35.108.461.707,75
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	989.796.979,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.504.180.043,00
8	Badan Penghubung Daerah	8.464.330.331,00

NO	OPD	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.629.366.133,00
10	Biro Administrasi Pimpinan	5.979.611.120,00
11	Biro Hukum	1.704.091.319,00
12	Biro Kesejahteraan Rakyat	27.468.767.150,00
13	Biro Organisasi	881.263.370,00
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.592.545.967,00
15	Biro Pengadaan Barang/Jasa	1.335.416.266,00
16	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.574.583.448,00
17	Biro Umum	66.190.630.811,05
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.096.837.737,44
19	Dinas Kebudayaan	4.248.462.174,31
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.301.629.541,92
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.280.323.534,00
22	Dinas Kesehatan	46.713.692.654,25
23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	16.908.291.244,50
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.810.316.705,00
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.881.889.000,00
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.737.210.938,00
27	Dinas Pariwisata	10.165.384.840,00
28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	49.536.310.458,29
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.137.184.986,00
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	12.638.732.249,00
31	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.958.873.575,00
32	Dinas Pendidikan	245.293.482.370,37
33	Dinas Perhubungan	6.026.168.423,14
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.510.854.684,00
35	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	5.920.765.842,40
36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	172.815.934.897,82
37	Dinas Sosial	8.107.420.861,00
38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	9.914.072.763,26
39	Inspektorat	17.544.380.447,00
40	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	29.938.247.719,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	126.561.513.285,93
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	7.916.568.781,00
43	Sekretariat DPRD	82.256.718.241,00
	JUMLAH	**1.161.921.240.159,38**

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	**0,00**

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak terdapat penganggaran Belanja Bunga.

Tabel 5.67 Belanja Bunga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bunga	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.692.560.273,00**
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.692.560.273,00**
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.864.494.061,38	**834.852.991,00**

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi ditujukan untuk memberikan keringanan modal usaha berupa subsidi margin bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Subsidi Margin yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor 120.23/KDH.118/KB-02/2024 dan Nomor 027/MOU/2024 atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 120.2/4590/DKUKM/2024 dan Nomor 135/PKS/2024 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 000.4.7.2/607/DKUKM/2025 dan Nomor 010/PKS/2025. Teknis pelaksanaan Belanja Subdisi berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman bagi Usaha Mikro dan Industri Kecil.

Pada tahun 2025 Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp834.852.991,00 atau sebesar 29,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.864.494.061,38 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tidak tercapainya target belanja dikarenakan replikasi Program Subsidi Margin 0% bagi UMKM oleh Pemerintah Kota Batam, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bintan turut berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan program di tingkat Provinsi. Dengan adanya program sejenis di tingkat kabupaten/kota, UMKM memiliki lebih banyak alternatif untuk memperoleh pembiayaan dengan skema subsidi margin yang relatif sama. Dalam kondisi tersebut, pelaku UMKM cenderung memilih program yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari sisi kemudahan persyaratan, kecepatan proses, besaran pinjaman, jangka waktu, maupun kedekatan lokasi layanan. Hal ini menyebabkan sebagian UMKM yang menjadi target sasaran program provinsi beralih memanfaatkan program yang disediakan oleh pemerintah daerahnya masing-masing, sehingga permintaan terhadap subsidi margin yang bersumber dari APBD Provinsi menjadi lebih rendah dari yang telah diproyeksikan.

Tabel 5.68 Belanja Subsidi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Subsidi	**2.864.494.061,38**	**834.852.991,00**	**29,14**	**944.301.180,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Subsidi kepada BUMD	**2.864.494.061,38**	**834.852.991,00**	**29,14**	**944.301.180,00**
Belanja Subsidi kepada BUMD	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00

Realisasi Belanja Subsidi menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.69 Realisasi Belanja Subsidi menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA SUBSIDI
A	**EKONOMI**	**834.852.991,00**
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	834.852.991,00

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	174.868.035.279,01	**165.767.273.907,96**

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025 Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp165.767.273.907,96 atau sebesar 94,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp174.868.035.279,01. Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.70 Belanja Hibah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Hibah	**174.868.035.279,01**	**165.767.273.907,96**	**94,80**	**357.581.329.209,27**
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	**24.891.916.495,00**	**19.752.937.062,67**	**79,35**	**158.511.792.275,00**
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**100,00**	**147.213.011.075,00**
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	147.213.011.075,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	**20.891.916.495,00**	**15.752.937.062,67**	**75,40**	**11.298.781.200,00**
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	20.891.916.495,00	15.752.937.062,67	75,40	11.298.781.200,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**105.921.148.784,01**	**102.242.047.979,29**	**96,53**	**157.544.331.693,27**
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**27.549.435.800,00**	**27.146.607.739,00**	**98,54**	**23.132.519.267,00**
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.090.000.000,00	16.903.187.450,00	98,91	22.923.400.067,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.459.435.800,00	10.243.420.289,00	97,93	209.119.200,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**50.409.393.800,00**	**47.939.194.434,00**	**95,10**	**105.107.423.869,09**
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	44.809.939.300,00	42.340.019.950,00	94,49	99.743.800.012,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.599.454.500,00	5.599.174.484,00	99,99	5.363.623.857,09
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**27.012.319.184,01**	**26.206.245.806,29**	**97,02**	**29.134.388.557,18**
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.498.300.000,00	2.278.300.000,00	91,19	7.836.500.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.514.019.184,01	23.927.945.806,29	97,61	21.297.888.557,18
Belanja Hibah kepada Koperasi	**950.000.000,00**	**950.000.000,00**	**100,00**	**170.000.000,00**
Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00	170.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	**38.935.740.000,00**	**38.653.058.866,00**	**99,27**	**36.870.020.909,00**
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	**33.995.640.000,00**	**33.716.349.341,00**	**99,18**	**32.930.722.526,00**
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.995.640.000,00	33.716.349.341,00	99,18	32.930.722.526,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	**4.940.100.000,00**	**4.936.709.525,00**	**99,93**	**3.939.298.383,00**
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.940.100.000,00	4.936.709.525,00	99,93	3.939.298.383,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**5.119.230.000,00**	**5.119.230.000,00**	**100,00**	**4.655.184.332,00**
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**5.119.230.000,00**	**5.119.230.000,00**	**100,00**	**4.655.184.332,00**
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.119.230.000,00	5.119.230.000,00	100,00	4.655.184.332,00

Penerima hibah yang dijelaskan pada tabel diatas terdiri dari pemberian hibah dana BOS Tahun Anggaran 2025 senilai Rp38.653.058.866,00 pada satuan pendidikan, pemberian hibah berupa uang senilai Rp110.243.796.266,00 oleh 11 (sebelas) perangkat daerah, dan pemberian hibah berupa barang senilai Rp55.523.477.641,96 oleh 8 (delapan) perangkat daerah. Selanjutnya, rekapitulasi penerima hibah dana BOS Tahun Anggaran 2025 dan penerima hibah berupa uang ditunjukkan pada **Lampiran 2**.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Pada tahun 2025 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik terealisasi sebesar Rp5.119.230.000,00 atau sebesar 100% dari target yang

ditetapkan di APBD sebesar Rp5.119.230.000,00. Adapun Rincian Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.71 Belanja Hibah Bantuan Keuangan – LRA

NO	U R A I A N	JUMLAH
1	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPD Gerindra) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	880.830.000,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Golkar) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	774.530.000,00
3	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (DPW NasDem) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	748.905.000,00
4	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	587.725.000,00
5	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	572.410.000,00
6	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD DEMOKRAT) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	402.990.000,00
7	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	333.615.000,00
8	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	316.970.000,00
9	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	174.970.000,00
10	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD HANURA) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	174.470.000,00
11	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW PERINDO) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	151.815.000,00
	JUMLAH	**5.119.230.000,00**

Realisasi Belanja Hibah menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.72 Realisasi Belanja Hibah menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA HIBAH
A	**EKONOMI**	**19.867.530.784,96**
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.716.413.135,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	560.000.000,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.760.000.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8.816.317.649,96
6	Dinas Perhubungan	924.800.000,00
B	**KESEHATAN**	**2.274.092.020,00**
1	Dinas Kesehatan	2.274.092.020,00
C	**PELAYANAN UMUM**	**82.505.283.063,00**
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.570.930.000,00
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	44.560.156.275,00
3	Biro Umum	18.249.196.788,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.000.000,00
5	Dinas Pendidikan	45.000.000,00
D	**PENDIDIKAN**	**60.665.368.040,00**
1	Dinas Kebudayaan	1.500.000.000,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.753.324.685,00
3	Dinas Pendidikan	48.412.043.355,00
E	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**455.000.000,00**
1	Dinas Sosial	455.000.000,00
	JUMLAH	**165.767.273.907,96**

Realisasi Belanja Hibah per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.73 Realisasi Belanja Hibah per masing-masing OPD Tahun 2025 – LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA HIBAH
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.570.930.000,00
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	44.560.156.275,00
3	Biro Umum	18.249.196.788,00
4	Dinas Kebudayaan	1.500.000.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.716.413.135,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.753.324.685,00
7	Dinas Kesehatan	2.274.092.020,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	560.000.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.760.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90.000.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8.816.317.649,96
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.000.000,00
13	Dinas Pendidikan	48.457.043.355,00
14	Dinas Perhubungan	924.800.000,00
15	Dinas Sosial	455.000.000,00
	JUMLAH	**165.767.273.907,96**

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.856.445.000,00	**1.834.940.000,00**

Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pada tahun 2025 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.834.940.000,00 atau sebesar 64,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.856.445.000,00. Tidak tercapainya target belanja dikarenakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan verifikasi kembali terhadap sasaran penerima bantuan sosial untuk menghindari terjadinya duplikasi penerima bantuan dana dengan jenis, peruntukan dan tujuan yang sama dengan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota sebelumnya, hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian penyaluran bantuan sosial. Berikut dibawah ini adalah rincian tabel belanja bantuan sosial:

Tabel 5.74 Belanja Bantuan Sosial – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bantuan Sosial	**2.856.445.000,00**	**1.834.940.000,00**	**64,24**	**4.002.925.000,00**
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	**0,00**	**2.972.600.000,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	2.972.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	**2.856.445.000,00**	**1.834.940.000,00**	**64,24**	**910.325.000,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,24	776.000.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	134.325.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	**0,00**	**120.000.000,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00

Pada tahun 2025 Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial digunakan antara lain:

5.1.2.1.6.1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp321.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 184 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

5.1.2.1.6.2 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp551.500.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1088 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 184 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

5.1.2.1.6.3 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp125.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

5.1.2.1.6.4 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp335.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1116 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Bencana Kebakaran di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Tahun 2025.

5.1.2.1.6.5 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp168.240.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1125 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Bencana Puting Beliung di Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

5.1.2.1.6.6 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp334.200.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1124 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Bencana Puting Beliung di Kota Batam Tahun 2024.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.75 Realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BANTUAN SOSIAL
A	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**837.440.000,00**
	Dinas Sosial	837.440.000,00
B	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**997.500.000,00**
	Dinas Sosial	997.500.000,00
	JUMLAH	**1.834.940.000,00**

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	269.313.511.475,33	232.159.877.710,16

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pada tahun 2025 Belanja Modal yang terealisasi adalah sebesar Rp232.159.877.710,16 atau 86,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp269.313.511.475,33 yang terdiri dari:

Tabel 5.76 Belanja Modal – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA MODAL	**269.313.511.475,33**	**232.159.877.710,16**	**86,20**	**307.344.075.589,86**
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.735.653.121,33	81.499.424.632,00	91,85	115.508.155.838,84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.492.416.281,00	80.799.961.394,06	85,51	129.103.961.833,55
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.989.061.381,00	46.310.371.998,10	74,71	36.791.762.576,47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.970.627.692,00	21.957.775.186,00	99,94	19.630.419.447,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.125.753.000,00	600.244.500,00	53,32	5.389.675.894,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.000.000.000,00	992.100.000,00

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2025 Belanja Modal Tanah yang terealisasi sebesar Rp992.100.000,00 atau 99,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Berikut dibawah ini adalah rincian tabel Belanja Modal Tanah:

Tabel 5.77 Belanja Modal Tanah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Tanah	**1.000.000.000,00**	**992.100.000,00**	**99,21**	**920.100.000,00**
Belanja Modal Tanah Persil	**1.000.000.000,00**	**992.100.000,00**	**99,21**	**920.100.000,00**
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.78 Realisasi Belanja Modal Tanah menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL TANAH
A	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	992.100.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	992.100.000,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	88.735.653.121,33	81.499.424.632,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pada tahun 2025 Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp81.499.424.632,00 atau sebesar 91,85%, dari yang dianggarkan sebesar Rp88.735.653.121,33. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.79 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**88.735.653.121,33**	**81.499.424.632,00**	**91,85**	**115.508.155.838,84**
Belanja Modal Alat Besar	60.473.770,00	53.759.700,00	88,90	605.244.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	9.755.836.100,00	8.834.340.156,00	90,55	15.316.607.100,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	357.114.700,00	349.880.500,00	97,97	184.490.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	105.482.100,00	104.523.717,00	99,09	1.284.714.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.906.361.166,40	14.562.747.870,00	86,14	21.725.083.804,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.553.827.517,00	2.462.508.590,00	96,42	1.048.602.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.136.583.850,00	16.467.952.700,00	96,10	8.387.907.829,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.934.156.247,00	609.709.210,00	31,52	14.828.330.827,00
Belanja Modal Komputer	7.927.147.821,72	6.485.404.736,00	81,81	11.261.084.800,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	3.774.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.585.000.000,00	1.565.000.000,00	98,74	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	51.106.200,00	51.012.000,00	99,82	17.433.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	492.318.004,00	3.885.000,00	0,79	1.783.806.844,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	109.928.200,60	12.093.000,00	11,00	23.680.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	31.371.598.359,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	28.803.403.745,00	29.066.128.626,00	100,91	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	953.139.699,61	870.478.827,00	91,33	7.640.473.275,84

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan Mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.80 Rincian Belanja Modal Alat Besar – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Besar	**60.473.770,00**	**53.759.700,00**	**88,90**	**605.244.000,00**
Belanja Modal Alat Bantu	**60.473.770,00**	**53.759.700,00**	**88,90**	**605.244.000,00**
Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	598.500.000,00
Belanja Modal Pompa	60.473.770,00	53.759.700,00	88,90	6.744.000,00

Tabel 5.81 Rincian Belanja Modal Alat Modal Angkutan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Angkutan	**9.755.836.100,00**	**8.834.340.156,00**	**90,55**	**15.316.607.100,00**
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	**5.928.766.100,00**	**5.027.770.156,00**	**84,80**	**15.316.607.100,00**
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.615.100.000,00	1.615.100.000,00	100,00	4.192.800.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.128.875.900,00	2.982.106.756,00	95,31	9.851.257.100,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.002.443.200,00	335.614.000,00	33,48	1.159.450.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	182.347.000,00	94.949.400,00	52,07	113.100.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	**3.827.070.000,00**	**3.806.570.000,00**	**99,46**	**0,00**
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1.230.000.000,00	1.209.500.000,00	98,33	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.597.070.000,00	2.597.070.000,00	100,00	0,00

Tabel 5.82 Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	**357.114.700,00**	**349.880.500,00**	**97,97**	**184.490.000,00**
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	**347.461.300,00**	**340.728.500,00**	**98,06**	**0,00**
Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	3.570.800,00	2.553.000,00	71,50	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	343.890.500,00	338.175.500,00	98,34	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	**1.873.400,00**	**1.650.000,00**	**88,08**	**16.800.000,00**
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.873.400,00	1.650.000,00	88,08	0,00
Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	**7.780.000,00**	**7.502.000,00**	**96,43**	**167.690.000,00**
Belanja Modal Alat Ukur Universal	7.780.000,00	7.502.000,00	96,43	156.590.000,00
Belanja Modal Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00

Tabel 5.83 Rincian Belanja Modal Alat Pertanian – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Pertanian	**105.482.100,00**	**104.523.717,00**	99,09	**1.284.714.000,00**
Belanja Modal Alat Pengolahan	**105.482.100,00**	**104.523.717,00**	99,09	**1.284.714.000,00**
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	55.030.000,00
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.240.900,00	8.218.700,00	99,73	29.290.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.049.572.000,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	97.241.200,00	96.305.017,00	99,04	150.822.000,00

Tabel 5.84 Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	**16.906.361.166,40**	**14.562.747.870,00**	**86,14**	**21.725.083.804,00**
Belanja Modal Alat Kantor	**1.567.331.495,00**	**1.084.099.845,00**	**69,17**	**1.888.000.694,00**
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	440.100.090,00	319.047.345,00	72,49	598.220.695,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.127.231.405,00	765.052.500,00	67,87	1.289.779.999,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	**14.216.443.497,40**	**12.409.373.114,00**	**87,29**	**17.289.622.022,00**
Belanja Modal Mebel	5.919.174.108,00	5.110.722.878,00	86,34	14.946.007.224,00
Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	45.545.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	5.900.845.439,90	5.307.111.441,00	89,94	788.585.200,00
Belanja Modal Alat Dapur	117.350.083,00	10.864.300,00	9,26	21.285.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.232.998.966,50	1.936.075.496,00	86,70	1.477.873.998,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	46.074.900,00	44.598.999,00	96,80	10.325.600,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	**1.122.586.174,00**	**1.069.274.911,00**	**95,25**	**2.547.461.088,00**
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	100.467.444,00	97.738.760,00	97,28	167.482.059,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	198.882.009,00	167.468.900,00	84,21	54.202.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	240.091.609,00	237.835.450,00	99,06	126.693.159,00
Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	19.680.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	583.145.112,00	566.231.801,00	97,10	2.179.403.870,00

Tabel 5.85 Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	**2.553.827.517,00**	**2.462.508.590,00**	**96,42**	**1.048.602.000,00**
Belanja Modal Alat Studio	**2.510.963.446,00**	**2.423.531.150,00**	**96,52**	**842.013.000,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.624.015.996,00	1.611.712.200,00	99,24	492.338.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	581.552.450,00	506.524.550,00	87,10	349.675.000,00
Belanja Modal Peralatan Cetak	34.000.000,00	33.966.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	271.395.000,00	271.328.400,00	99,98	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	**38.206.571,00**	**34.703.940,00**	**90,83**	**42.399.000,00**
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	38.206.571,00	34.703.940,00	90,83	42.399.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.690.000,00**
Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	56.690.000,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	**4.657.500,00**	**4.273.500,00**	**91,76**	**107.500.000,00**
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	4.657.500,00	4.273.500,00	91,76	107.500.000,00

Tabel 5.86 Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	**17.136.583.850,00**	**16.467.952.700,00**	**96,10**	**8.387.907.829,00**
Belanja Modal Alat Kedokteran	**17.068.085.850,00**	**16.399.454.700,00**	**96,08**	**4.009.508.582,00**
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	13.561.863.700,00	12.919.154.700,00	95,26	1.593.398.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	3.200.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	26.094.082,00
Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	126.816.500,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	769.750.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	0,00	0,00	0,00	1.490.250.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.296.222.150,00	3.270.300.000,00	99,21	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	**68.498.000,00**	**68.498.000,00**	**100,00**	**4.378.399.247,00**
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	68.498.000,00	68.498.000,00	100,00	4.378.399.247,00

Tabel 5.87 Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Laboratorium	**1.934.156.247,00**	**609.709.210,00**	**31,52**	**14.828.330.827,00**
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	**568.586.450,00**	**497.335.500,00**	**87,47**	**1.539.107.500,00**
Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam	0,00	0,00	0,00	838.630.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	70.000.000,00	69.652.500,00	99,50	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	424.000.000,00	419.580.000,00	98,96	700.477.500,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	74.586.450,00	8.103.000,00	10,86	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	**167.850.737,00**	**105.073.710,00**	**62,60**	**0,00**
Belanja Modal Analytical Instrument	98.860.600,00	92.940.300,00	94,01	0,00
Belanja Modal Instrument Probe/Sensor	55.890.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Glassware Plastic/Utensils	9.956.537,00	9.552.660,00	95,94	0,00
Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	3.143.600,00	2.580.750,00	82,10	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	**1.190.070.050,00**	**0,00**	**0,00**	**13.202.373.327,00**
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	731.250,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	1.186.148.800,00	0,00	0,00	13.202.373.327,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	**7.649.010,00**	**7.300.000,00**	**95,44**	**86.850.000,00**
Belanja Modal System/Power Supply	7.649.010,00	7.300.000,00	95,44	86.850.000,00

Tabel 5.88 Rincian Belanja Modal Komputer – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Komputer	**7.927.147.821,72**	**6.485.404.736,00**	**81,81**	**11.261.084.800,00**
Belanja Modal Komputer Unit	**6.295.245.682,00**	**5.131.128.340,00**	**81,51**	**8.245.543.400,00**
Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	169.128.000,00
Belanja Modal Personal Computer	5.930.575.232,00	4.807.337.340,00	81,06	7.617.308.400,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	364.670.450,00	323.791.000,00	88,79	459.107.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	**1.631.902.139,72**	**1.354.276.396,00**	**82,99**	**3.015.541.400,00**
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	202.869.176,00	196.101.798,00	96,66	151.724.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.023.785.840,00	797.550.948,00	77,90	1.503.823.400,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	200.230.556,72	176.647.400,00	88,22	155.534.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	205.016.567,00	183.976.250,00	89,74	1.204.460.000,00

Tabel 5.89 Rincian Belanja Modal Alat Eksplorasi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Eksplorasi	**3.774.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.100.000,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	**3.774.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.100.000,00**
Belanja Modal Elektronik/Electric	3.774.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00

Tabel 5.90 Rincian Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	**1.585.000.000,00**	**1.565.000.000,00**	**98,74**	**0,00**
Belanja Modal Sumur	**1.585.000.000,00**	**1.565.000.000,00**	**98,74**	**0,00**
Belanja Modal Sumur Lainnya	1.585.000.000,00	1.565.000.000,00	98,74	0,00

Tabel 5.91 Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	**51.106.200,00**	**51.012.000,00**	**99,82**	**17.433.000,00**
Belanja Modal Alat Pelindung	**51.106.200,00**	**51.012.000,00**	**99,82**	**17.433.000,00**
Belanja Modal Baju Pengaman	51.106.200,00	51.012.000,00	99,82	12.675.000,00
Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	488.000,00

Tabel 5.92 Rincian Belanja Modal Rambu – rambu – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Rambu-Rambu	**492.318.004,00**	**3.885.000,00**	**0,79**	**1.783.806.844,00**
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	**492.318.004,00**	**3.885.000,00**	**0,79**	**1.783.806.844,00**
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	492.318.004,00	3.885.000,00	0,79	1.783.806.844,00

Tabel 5.93 Rincian Belanja Modal Peralatan Olahraga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan Olahraga	**109.928.200,60**	**12.093.000,00**	**11,00**	**23.680.000,00**
Belanja Modal Peralatan Olahraga	**109.928.200,60**	**12.093.000,00**	**11,00**	**23.680.000,00**
Belanja Modal Peralatan Permainan	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	104.828.200,60	6.993.000,00	6,67	23.680.000,00

Tabel 5.94 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.371.598.359,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.371.598.359,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	31.371.598.359,00

Pada Tahun 2024, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS disajikan pada kode akun objek 5.2.02.88 dengan uraian akun objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun objek 5.2.02.89 dengan uraian akun objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya.

Tabel 5.95 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOSP – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	**28.803.403.745,00**	**29.066.128.626,00**	**100,91**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	**28.803.403.745,00**	**29.066.128.626,00**	**100,91**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	28.803.403.745,00	29.066.128.626,00	100,91	0,00

Pada tahun 2025 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP terealisasi sebesar Rp29.066.128.626,00 atau sebesar 100,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.803.403.745,00. Pelampauan realisasi ini disebabkan oleh adanya penyesuaian pergeseran alokasi pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang secara ketentuan teknis dari Pemerintah Pusat dapat dilakukan oleh satuan pendidikan. Melalui mekanisme tersebut, anggaran yang semula dialokasikan pada pos Belanja Barang dan Jasa dialihkan ke pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk mengakomodasi kebutuhan riil pengadaan aset tetap di sekolah. Namun, batasan waktu penetapan Perubahan APBD (APBD-P) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah disahkan sehingga membuat pergeseran antarjenis belanja ini tidak tertampung kedalam APBD-P.

Tabel 5.96 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**953.139.699,61**	**870.478.827,00**	**91,33**	**7.640.473.275,84**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**953.139.699,61**	**870.478.827,00**	**91,33**	**7.640.473.275,84**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	953.139.699,61	870.478.827,00	91,33	7.640.473.275,84

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.97 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
A	**EKONOMI**	**2.098.076.295,00**
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	177.106.415,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	65.784.880,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	113.973.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.363.102,00
5	Dinas Perhubungan	33.666.520,00
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	981.210.929,00
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	700.971.449,00
B	**KESEHATAN**	**19.275.065.360,00**
1	Dinas Kesehatan	295.923.200,00
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	15.008.991.800,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	3.970.150.360,00
C	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**127.336.899,00**
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.721.999,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	82.614.900,00
D	**PELAYANAN UMUM**	**27.397.979.372,00**
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	344.076.997,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.320.445.701,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	998.620.070,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.941.500,00
5	Badan Pendapatan Daerah	1.401.871.119,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.128.377.850,00
7	Badan Penghubung Daerah	501.417.940,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	63.825.000,00
9	Biro Administrasi Pimpinan	20.442.594,00
10	Biro Hukum	62.472.550,00
11	Biro Kesejahteraan Rakyat	60.051.000,00
12	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.390.000,00
13	Biro Pengadaan Barang/Jasa	21.983.550,00
14	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.384.500,00
15	Biro Umum	6.250.926.144,00
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	83.534.300,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	175.038.436,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	155.980.000,00
19	Dinas Kesehatan	26.697.499,00
20	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	626.630.761,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	121.424.999,00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	44.938.001,00
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	339.838.400,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	277.315.351,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.576.000,00
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	120.397.200,00
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.030.300,00
28	Dinas Pendidikan	1.008.241.327,00
29	Dinas Perhubungan	39.392.000,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	289.835.500,00
31	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	44.222.200,00
32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.800.833.712,00

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
33	Dinas Sosial	320.889.570,00
34	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	581.157.451,00
35	Inspektorat	830.963.057,00
36	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	239.862.000,00
37	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	4.811.753.693,00
38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	287.218.100,00
39	Sekretariat DPRD	2.967.983.000,00
E	**PENDIDIKAN**	**32.186.796.156,00**
	Dinas Pendidikan	32.186.796.156,00
F	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**	**128.855.460,00**
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	128.855.460,00
G	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**202.315.090,00**
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	202.315.090,00
H	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**83.000.000,00**
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	83.000.000,00
	JUMLAH	**81.499.424.632,00**

Realisai Belanja Modal Peralatan dan Mesin per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.98 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per masing-masing OPD Tahun 2025 – LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	344.076.997,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.320.445.701,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	998.620.070,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.663.499,00
5	Badan Pendapatan Daerah	1.401.871.119,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.128.377.850,00
7	Badan Penghubung Daerah	501.417.940,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	63.825.000,00
9	Biro Administrasi Pimpinan	20.442.594,00
10	Biro Hukum	62.472.550,00
11	Biro Kesejahteraan Rakyat	60.051.000,00
12	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.390.000,00
13	Biro Pengadaan Barang/Jasa	21.983.550,00
14	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.384.500,00
15	Biro Umum	6.250.926.144,00
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	83.534.300,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	352.144.851,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	155.980.000,00
19	Dinas Kesehatan	322.620.699,00
20	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	692.415.641,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	235.397.999,00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70.301.103,00
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	468.693.860,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	360.315.351,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.576.000,00
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	322.712.290,00
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.030.300,00
28	Dinas Pendidikan	33.195.037.483,00

NO	OPD	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
29	Dinas Perhubungan	73.058.520,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.271.046.429,00
31	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	44.222.200,00
32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.800.833.712,00
33	Dinas Sosial	320.889.570,00
34	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.282.128.900,00
35	Inspektorat	830.963.057,00
36	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	15.248.853.800,00
37	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	8.781.904.053,00
38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	369.833.000,00
39	Sekretariat DPRD	2.967.983.000,00
	JUMLAH	**81.499.424.632,00**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	94.492.416.281,00	**80.799.961.394,06**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2025 Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp80.799.961.394,06 atau sebesar 85,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.492.416.281,00. Tidak tercapainya realisasi belanja dari target yang ditetapkan disebabkan tunda bayar tahun anggaran 2025. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**94.492.416.281,00**	**80.799.961.394,06**	**85,51**	**129.103.961.833,55**
Belanja Modal Bangunan Gedung	93.855.273.265,00	80.350.990.378,67	85,61	121.174.100.425,55
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	637.143.016,00	448.971.015,39	70,47	7.929.861.408,00

Dengan rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.100 Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bangunan Gedung	**93.855.273.265,00**	**80.350.990.378,67**	**85,61**	**121.174.100.425,55**
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	**93.855.273.265,00**	**80.350.990.378,67**	**85,61**	**121.174.100.425,55**
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	66.670.256.265,00	61.482.475.167,96	92,22	15.684.793.716,97
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	198.225.144,00	198.225.143,28	100,00	436.463.094,60

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	599.183.122,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	173.300.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	219.280.700,00	219.280.700,00	100,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	199.866.000,00	199.866.000,00	100,00	10.239.897.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.408.212.850,00	14.711.593.224,66	72,09	70.519.118.631,22
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	437.431.805,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	2.952.107.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	300.000.000,00	298.528.000,00	99,51	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.859.432.306,00	3.241.022.142,77	55,31	8.933.287.246,76
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.659.809,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.998.859.000,00

Tabel 5.101 Rincian Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	**637.143.016,00**	**448.971.015,39**	**70,47**	**7.929.861.408,00**
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	**637.143.016,00**	**448.971.015,39**	**70,47**	**7.929.861.408,00**
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
Belanja Modal Pagar	637.143.016,00	448.971.015,39	70,47	7.805.061.408,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.102 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025– LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
A	**EKONOMI**	**3.937.641.286,05**
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	198.225.143,28
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	498.394.000,00
3	Dinas Perhubungan	3.241.022.142,77
B	**KESEHATAN**	**50.842.855.230,00**
1	Dinas Kesehatan	17.901.215.230,00
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	32.941.640.000,00
C	**PELAYANAN UMUM**	**1.576.979.393,00**
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.900.000,00
2	Dinas Pendidikan	1.138.139.693,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	418.939.700,00
D	**PENDIDIKAN**	**21.112.326.485,01**
1	Dinas Pendidikan	21.112.326.485,01
E	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**3.330.159.000,00**
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.330.159.000,00
	JUMLAH	**80.799.961.394,06**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.103 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per masing-masing OPD Tahun 2025– LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.900.000,00
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	198.225.143,28
3	Dinas Kesehatan	17.901.215.230,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	498.394.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.330.159.000,00
6	Dinas Pendidikan	22.250.466.178,01
7	Dinas Perhubungan	3.241.022.142,77
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	418.939.700,00
9	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	32.941.640.000,00
	JUMLAH	**80.799.961.394,06**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	61.989.061.381,00	**46.310.371.998,10**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2025 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar terealisasi sebesar Rp46.310.371.998,10 atau sebesar 74,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.989.061.381,00. Tidak tercapainya realisasi belanja dari target yang ditetapkan disebabkan tunda bayar tahun anggaran 2025. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.104 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**61.989.061.381,00**	**46.310.371.998,10**	**74,71**	**36.791.762.576,47**
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	25.363.855.040,00	19.166.853.257,69	75,57	32.288.532.170,00
Belanja Modal Bangunan Air	2.738.054.230,00	1.658.836.030,00	60,58	1.149.877.370,00
Belanja Modal Instalasi	28.000.487.131,00	20.552.263.179,00	73,40	483.000.000,00
Belanja Modal Jaringan	5.886.664.980,00	4.932.419.531,41	83,79	2.870.353.036,47

Dengan rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	**25.363.855.040,00**	**19.166.853.257,69**	**75,57**	**32.288.532.170,00**
Belanja Modal Jalan	**9.901.975.300,00**	**6.934.882.414,00**	**70,04**	**32.007.864.420,00**
Belanja Modal Jalan Provinsi	9.901.975.300,00	6.934.882.414,00	70,04	31.860.375.400,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	147.489.020,00
Belanja Modal Jembatan	**15.461.879.740,00**	**12.231.970.843,69**	**79,11**	**280.667.750,00**
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	15.461.879.740,00	12.231.970.843,69	79,11	280.667.750,00

Tabel 5.106 Rincian Belanja Modal Bangunan Air – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bangunan Air	**2.738.054.230,00**	**1.658.836.030,00**	**60,58**	**1.149.877.370,00**
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	**2.738.054.230,00**	**1.658.836.030,00**	**60,58**	**1.149.877.370,00**
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	2.738.054.230,00	1.658.836.030,00	60,58	1.149.877.370,00

Tabel 5.107 Rincian Belanja Modal Instalasi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Instalasi	**28.000.487.131,00**	**20.552.263.179,00**	**73,40**	**483.000.000,00**
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	**8.590.431,00**	**8.530.350,00**	**99,30**	**0,00**
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	8.590.431,00	8.530.350,00	99,30	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	**21.128.296.700,00**	**13.687.296.700,00**	**64,78**	**483.000.000,00**
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1.164.286.300,00	1.164.286.300,00	100,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	19.964.010.400,00	12.523.010.400,00	62,73	483.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Lain	**6.863.600.000,00**	**6.856.436.129,00**	**99,90**	**0,00**
Belanja Modal Instalasi Lain	6.863.600.000,00	6.856.436.129,00	99,90	0,00

Tabel 5.108 Belanja Modal Jaringan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Jaringan	**5.886.664.980,00**	**4.932.419.531,41**	**83,79**	**2.870.353.036,47**
Belanja Modal Jaringan Air Minum	**1.357.500.000,00**	**403.254.553,20**	**29,71**	**359.957.529,37**
Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	1.357.500.000,00	403.254.553,20	29,71	359.957.529,37
Belanja Modal Jaringan Listrik	**4.529.164.980,00**	**4.529.164.978,21**	**100,00**	**2.510.395.507,10**
Belanja Modal Jaringan Distribusi	4.529.164.980,00	4.529.164.978,21	100,00	1.966.500.854,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	543.894.653,10

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.109 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
A	**EKONOMI**	**39.042.150.965,90**
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.216.461.678,21
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	20.825.689.287,69
B	**KESEHATAN**	**6.831.540.000,00**
1	Dinas Kesehatan	668.500.000,00
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.163.040.000,00
C	**PELAYANAN UMUM**	**33.426.479,00**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	24.896.129,00
2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.530.350,00
D	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**403.254.553,20**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	403.254.553,20
	JUMLAH	**46.310.371.998,10**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.110 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per masing-masing OPD Tahun 2025– LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.216.461.678,21
2	Dinas Kesehatan	668.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	21.253.839.969,89
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.530.350,00
5	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.163.040.000,00
	JUMLAH	**46.310.371.998,10**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	21.970.627.692,00	**21.957.775.186,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah pembelian barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, jurnal ilmiah, dan belanja pengadaan Aset Tetap Renovasi.

Pada tahun 2025 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp21.957.775.186,00 atau sebesar 99,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.970.627.692,00**.** Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.111 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**21.970.627.692,00**	**21.957.775.186,00**	**99,94**	**19.630.419.447,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	270.550.000,00	160.941.535,00	59,49	358.800.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	278.775.000,00	168.761.000,00	60,54	1.299.940.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	17.971.679.447,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	21.421.302.692,00	21.628.072.651,00	100,97	0,00

Dengan rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.112 Rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	**270.550.000,00**	**160.941.535,00**	**59,49**	**358.800.000,00**
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	**270.550.000,00**	**160.941.535,00**	**59,49**	**0,00**
Belanja Modal Buku Umum	270.550.000,00	160.941.535,00	59,49	0,00
Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.800.000,00**
Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	0,00	0,00	0,00	358.800.000,00

Tabel 5.113 Rincian Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	**278.775.000,00**	**168.761.000,00**	**60,54**	**1.299.940.000,00**
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	**153.775.000,00**	**43.775.000,00**	**28,47**	**1.299.940.000,00**
Belanja Modal Alat Musik	153.775.000,00	43.775.000,00	28,47	1.299.940.000,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	**125.000.000,00**	**124.986.000,00**	**99,99**	**0,00**
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	125.000.000,00	124.986.000,00	99,99	0,00

Tabel 5.114 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.971.679.447,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.971.679.447,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	17.971.679.447,00

Pada Tahun 2024, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS disajikan pada kode akun objek 5.2.05.88 dengan uraian akun objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun objek 5.2.05.89 dengan uraian akun objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya.

Tabel 5.115 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	**21.421.302.692,00**	**21.628.072.651,00**	**100,97**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	**21.421.302.692,00**	**21.628.072.651,00**	**100,97**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	21.421.302.692,00	21.628.072.651,00	100,97	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.116 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA
A	**PENDIDIKAN**	**21.952.780.186,00**
1	Dinas Kebudayaan	124.986.000,00
2	Dinas Pendidikan	21.671.847.651,00
3	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	155.946.535,00
B	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**4.995.000,00**
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.995.000,00
	JUMLAH	**21.957.775.186,00**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.125.753.000,00	**600.244.500,00**

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Pada tahun 2025 Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp600.244.500,00 atau sebesar 53,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.125.753.000,00. Tidak tercapainya realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud dari target yang ditetapkan dikarenakan tidak direalisasikannya beberapa belanja modal seperti pengadaan alat kesehatan, lampu penerangan RS, Baterai UPS, dan AC RS yang disebabkan tidak tercapainya target pendapatan BLUD untuk menghindari terjadinya bertambahnya utang belanja. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.117 Belanja Modal Aset Lainnya

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Lainnya	**1.125.753.000,00**	**600.244.500,00**	**53,32**	**5.389.675.894,00**
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	**125.753.000,00**	**120.660.500,00**	**95,95**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	**125.753.000,00**	**120.660.500,00**	**95,95**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	2.601.000,00	2.575.000,00	99,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	123.152.000,00	118.085.500,00	95,89	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	**1.000.000.000,00**	**479.584.000,00**	**47,96**	**5.389.675.894,00**
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	**1.000.000.000,00**	**479.584.000,00**	**47,96**	**5.389.675.894,00**
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000,00	479.584.000,00	47,96	5.389.675.894,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.118 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL ASET LAINNYA
	PELAYANAN UMUM	
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	88.855.500,00
2	Badan Pendapatan Daerah	31.805.000,00
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	479.584.000,00
	JUMLAH	**600.244.500,00**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.281.396.903,60	**0,00**

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada tahun 2025 Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp2.281.396.903,60 dikarenakan tidak ada peristiwa yang mengakibatkan adanya pengeluaran dari belanja tidak terduga. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	716.816.050.533,00	**704.188.430.644,00**

Belanja Transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan pengeluaran anggaran dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pada tahun 2025 Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp704.188.430.644,00 atau sebesar 98,24% dari yang dianggarkan di APBD sebesar Rp716.816.050.533,00.

Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.119 Belanja Transfer – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA TRANSFER	**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**	98,24	**775.144.201.015,00**
Belanja Bagi Hasil	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89	748.291.201.015,00
Belanja Bantuan Keuangan	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00	73,09	26.853.000.000,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	698.706.050.533,00	**690.951.951.944,00**

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyaluran dana bagi hasil kepada kabupaten/kota sebagai kompensasi bagi hasil atas pajak-pajak daerah. Belanja bagi hasil pajak daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp690.951.951.944,00 atau 98,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp698.706.050.533,00. Alokasi dan Penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 431 Tahun 2025 tentang Alokasi Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 430 Tahun 2025 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Untuk Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok dilakukan berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, yang menyebutkan bahwa Gubernur menyalurkan bagi hasil Pajak Rokok kepada kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Pajak Rokok di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Rincian Belanja Bagi Hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.120 Belanja Bagi Hasil – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bagi Hasil	**698.706.050.533,00**	**690.951.951.944,00**	**98,89**	**748.291.201.015,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**698.706.050.533,00**	**690.951.951.944,00**	**98,89**	**748.291.201.015,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	**297.113.512.718,00**	**293.134.575.850,00**	**98,66**	**330.924.905.661,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	297.113.512.718,00	293.134.575.850,00	98,66	330.924.905.661,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	**401.592.537.815,00**	**397.817.376.094,00**	**99,06**	**417.366.295.354,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	401.592.537.815,00	397.817.376.094,00	99,06	417.366.295.354,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 5.121 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kota Batam	108.774.500.374,00	205.665.619.318,00	314.440.119.692,00
2	Kota Tanjung Pinang	26.418.004.595,00	56.959.251.807,00	83.377.256.402,00
3	Kab. Bintan	21.684.975.192,00	47.943.206.739,00	69.628.181.931,00
4	Kab. Karimun	21.289.602.585,00	50.190.975.819,00	71.480.578.404,00
5	Kab. Natuna	17.546.888.639,00	38.664.221.886,00	56.211.110.525,00
6	Kab. Lingga	15.645.671.052,00	33.957.182.904,00	49.602.853.956,00
7	Kab. Anambas	15.117.049.818,00	31.094.801.216,00	46.211.851.034,00
JUMLAH		**226.476.692.255,00**	**464.475.259.689,00**	**690.951.951.944,00**

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 5.122 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Batam – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kota Batam	**108.774.500.374,00**	**205.665.619.318,00**	**314.440.119.692,00**
1	PKB	30.785.210.269,00	11.482.905.809,00	42.268.116.078,00
2	BBN-KB	32.043.918.811,00	6.001.708.027,00	38.045.626.838,00
3	P-AP	64.820.058,00	5.731.455.469,00	5.796.275.527,00
4	PBB-KB	45.880.551.236,00	138.391.212.941,00	184.271.764.177,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	44.058.337.072,00	44.058.337.072,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.123 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Tanjungpinang – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kota Kota Tanjungpinang	**26.418.004.595,00**	**56.959.251.807,00**	**83.377.256.402,00**
1	PKB	7.949.365.924,00	3.056.625.094,00	11.005.991.018,00
2	BBN-KB	6.540.224.279,00	971.135.227,00	7.511.359.506,00
3	P-AP	39.079.951,00	1.632.535.929,00	1.671.615.880,00
4	PBB-KB	11.889.334.441,00	35.862.241.627,00	47.751.576.068,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	15.436.713.930,00	15.436.713.930,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.124 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bintan – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Bintan	**21.684.975.192,00**	**47.943.206.739,00**	**69.628.181.931,00**
1	PKB	6.163.941.432,00	2.320.926.414,00	8.484.867.846,00
2	BBN-KB	5.760.027.932,00	968.757.429,00	6.728.785.361,00
3	P-AP	23.842.352,00	1.853.170.332,00	1.877.012.684,00
4	PBB-KB	9.737.163.476,00	29.370.568.304,00	39.107.731.780,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	13.429.784.260,00	13.429.784.260,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.125 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Karimun – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Karimun	**21.289.602.585,00**	**50.190.975.819,00**	**71.480.578.404,00**
1	PKB	6.152.271.199,00	2.389.908.590,00	8.542.179.789,00
2	BBN-KB	5.316.702.961,00	853.591.629,00	6.170.294.590,00
3	P-AP	17.808.053,00	1.173.538.661,00	1.191.346.714,00
4	PBB-KB	9.802.820.372,00	29.568.611.645,00	39.371.432.017,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	16.205.325.294,00	16.205.325.294,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Tabel 5.126 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Natuna – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Natuna	**17.546.888.639,00**	**38.664.221.886,00**	**56.211.110.525,00**
1	PKB	4.894.244.469,00	1.857.609.311,00	6.751.853.780,00
2	BBN-KB	4.791.027.327,00	854.699.829,00	5.645.727.156,00
3	P-AP	17.602.233,00	1.167.769.595,00	1.185.371.828,00
4	PBB-KB	7.844.014.610,00	23.660.192.979,00	31.504.207.589,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	11.123.950.172,00	11.123.950.172,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.127 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Lingga – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Lingga	**15.645.671.052,00**	**33.957.182.904,00**	**49.602.853.956,00**
1	PKB	4.842.482.384,00	1.835.322.475,00	6.677.804.859,00

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	BBN-KB	4.639.805.541,00	804.738.429,00	5.444.543.970,00
3	P-AP	15.302.578,00	1.142.180.342,00	1.157.482.920,00
4	PBB-KB	6.148.080.549,00	18.544.684.001,00	24.692.764.550,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	11.630.257.657,00	11.630.257.657,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.128 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Kepulauan Anambas	**15.117.049.818,00**	**31.094.801.216,00**	**46.211.851.034,00**
1	PKB	4.715.945.807,00	1.778.668.339,00	6.494.614.146,00
2	BBN-KB	4.619.033.355,00	811.707.429,00	5.430.740.784,00
3	P-AP	13.750.497,00	987.791.544,00	1.001.542.041,00
4	PBB-KB	5.768.320.159,00	17.399.198.614,00	23.167.518.773,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	10.117.435.290,00	10.117.435.290,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.129 Realisasi Belanja Bagi Hasil menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BAGI HASIL
A	**PELAYANAN UMUM**	**690.951.951.944,00**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	690.951.951.944,00
	JUMLAH	**690.951.951.944,00**

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	18.110.000.000,00	**13.236.478.700,00**

Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Ketentuan Belanja Bantuan Keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bantuan keuangan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp13.236.478.700,00 atau 73,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.110.000.000,00. Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2025 digunakan antara lain:

5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1280 Tahun

2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus dalam Rangka Penanganan Dampak Bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp4.027.313.100,00 atau 46,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.697.000.000,00 sesuai dengan permohonan penyaluran/pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 167 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 720 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 167 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Provinsi Kepulauan Riau.

5.1.2.4.2.3 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa terealisasi sebesar Rp7.709.165.600,00 atau 97,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.913.000.000,00 sesuai dengan permohonan penyaluran/pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 167 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 720 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 167 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut dibawah ini dijelaskan tabel rincian Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 5.130 Belanja Bantuan Keuangan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bantuan Keuangan	**18.110.000.000,00**	**13.236.478.700,00**	**73,09**	**26.853.000.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**500.000.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**500.000.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**8.697.000.000,00**	**4.027.313.100,00**	**46,31**	**14.130.500.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**8.697.000.000,00**	**4.027.313.100,00**	**46,31**	**14.130.500.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	8.697.000.000,00	4.027.313.100,00	46,31	14.130.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**7.913.000.000,00**	**7.709.165.600,00**	**97,42**	**12.222.500.000,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**7.913.000.000,00**	**7.709.165.600,00**	**97,42**	**12.222.500.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	7.913.000.000,00	7.709.165.600,00	97,42	12.222.500.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.131 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
A	**PELAYANAN UMUM**	**13.236.478.700,00**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.236.478.700,00
	JUMLAH	**13.236.478.700,00**

5.1.2.5 Surplus/Defisit

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi defisit APBD sebesar Rp(3.169.898.762,08). Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp(110.282.197.800,53) dibandingkan defisit tahun 2024 sebesar Rp(113.452.096.562,61) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132 Surplus/Defisit Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024	KENAIKAN /PENURUNAN (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PENDAPATAN DAERAH	**3.910.214.946.462,43**	**3.712.434.360.163,46**	**94,94**	**3.958.295.361.262,68**	**245.861.001.099,22**
BELANJA DAERAH	**3.932.501.110.900,44**	**3.715.604.258.925,54**	**94,48**	**4.071.747.457.825,29**	**356.143.198.899,75**
SURPLUS/DEFISIT	**(22.286.164.438,01)**	**(3.169.898.762,08)**	**14,22**	**(113.452.096.562,61)**	**(110.282.197.800,53)**

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selama Tahun Anggaran 2025 realisasi pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	27.286.164.438,01	**27.291.476.128,01**

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali. Pada tahun 2025 Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp27.291.476.128,01 atau 100,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.286.164.438,01. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan yang terdiri dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp27.208.640.128,01 atau 99,72% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp27.286.164.438,01 dan Penerimaan Kembali

Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan Dana Bergulir) sebesar Rp82.836.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	5.000.000.000,00	**5.000.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberiaan pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pada Tahun 2025 Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) yang baru didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Terhadap penyertaan modal kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0.00	**19.121.577.365,93**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode tahun berjalan. Pada tahun 2025 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sebesar Rp19.121.577.365,93, realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp8.164.587.072,08 atau sebesar 29,92% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp27.286.164.438,01 dikarenakan optimalisasi penyerapan belanja daerah yang diselaraskan dengan ketersediaan kas yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah.

Terdapat perbedaan sebesar Rp235.063.410,00 antara realisasi SiLPA dengan Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas yang tercatat sebesar Rp19.356.640.775,93. Rincian selisih tersebut terdapat pada:

5.1.4.1.1 Kas di Kas Daerah, yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang timbul atas *outstanding* penyetoran pajak di akhir tahun 2025 sebesar Rp33.872.068,00 yang telah diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui penerbitan SP2D di tahun 2025 namun pengurangan nilai rekening Kas Daerah baru diproses oleh pihak perbankan pada tanggal 1 Januari 2026;

5.1.4.1.2 Kas Lainnya yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang timbul atas pemotongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2025 sebesar Rp110.300.242,00; dan

5.1.4.1.3 Kas Lainnya berupa kewajiban atas Dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang belum disalurkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp90.891.100,00.

Sementara itu komponen pembentuk SiLPA pada Neraca tahun 2025 sebesar Rp19.121.577.365,93 terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp14.322.873.348,90 (saldo di rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.356.745.416,90, namun pada saldo tersebut terdapat saldo *outstanding* penyetoran pajak (Utang PFK) sebesar Rp33.872.068,00 yang merupakan pengurang komponen pembentuk SiLPA);

2. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp311.609.541,00 merupakan saldo kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang masih harus dipertanggung jawabkan oleh Bendahara Pengeluaran antara lain yaitu:
   Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.867.681,00;
   a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.276.500,00;
   b. Dinas Kesehatan sebesar Rp823.468,00;
   c. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp303.050.792,00;
   d. Sekretariat Daerah (Biro Hukum) sebesar Rp2.591.100,00
3. Kas di BLUD sebesar Rp2.499.584.868,03;

5.1.4.1.4 Kas Lainnya sebesar Rp520.089,00 yang merupakan jasa giro yang belum dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025.

5.1.4.1.5 Kas Dana BOSP sebesar Rp1.986.989.519,00.

Selanjutnya dari total saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp14.322.873.348,90 tersebut, terdapat saldo kas yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp7.375.469.721,96 bersifat *earmark* yang alokasi dan penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan petunjuk teknis perundang-undangan dari masing-masing sumber pendanaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.133 Rincian Saldo Kas Dana Earmark

No.	Jenis Dana Earmark	Saldo per 31 Desember 2025
	Dana Bagi Hasil (DBH)	**1.127.877.184,00**
1	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	90.744.325,00
2	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	944.307.069,00
3	DBH Sawit	92.825.790,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	**1.700.035.055,60**
1	DAU SG bidang Pendidikan	1.153.005.065,00
2	DAU SG bidang Kesehatan	457.918.607,75
3	DAU SG bidang Pekerjaan Umum	89.111.382,85
	DAK Fisik	**814.502.585,36**
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	2.619.320,20
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	582.407.006,19
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	163.119.127,68
4	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup	13.588.577,00
5	DAK Fisik-Bidang ESDM	231.490,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	558.476,18
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3,00
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	10.690.076,31
9	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	40.196.760,52
10	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	1.091.748,28
	DAK Non Fisik	**3.485.089.865,00**
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.097.577.208,00
2	DAK Non Fisik-TKG PNSD	25.866.100,00
3	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	73.310.681,00
4	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.486.686.561,00
5	DAK Non Fisik-BOKB-KB	532.993.472,00
6	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	51.450.411,00
7	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	199.588.292,00
8	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	17.617.140,00
	Insentif Fiskal	**247.965.032,00**
1	Dana Insentif Fiskal	247.965.032,00
	Jumlah	**7.375.469.721,96**

5.2 Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Awal SAL (Saldo Anggaran Lebih);
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

e. Lain-lain;
f. Saldo Akhir SAL (Saldo Anggaran Lebih).

Laporan Perubahan Saldo Akhir SAL (Saldo Anggaran Lebih) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur - unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Akhir SAL (Saldo Anggaran Lebih) dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2.1 Saldo Awal SAL (Saldo Anggaran Lebih)

Saldo Awal SAL	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	27.286.164.438,01	**231.214.715.013,24**

Pada awal tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Saldo Awal SAL sebesar Rp27.286.164.438,01, yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	27.208.640.128,01	**232.583.164.925,62**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit APBD tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. SAL dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SAL sebagaimana merupakan bagian dari ekuitas dana dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp27.208.640.128,01 atau sebesar 99,72% dari SiLPA yang dianggarkan sebesar Rp27.286.164.438,01. Selisih tidak terealisasi sebesar Rp77.524.310,00 disebabkan oleh koreksi kesalahan pembukuan dan pengembalian dana pada BLUD SMKN, dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp19.938.600,00 pada BLUD SMKN 1 Batam yang merupakan sisa kas bantuan pemerintah pusat yang sudah dikembalikan ke pemerintah pusat pada tanggal 31 Desember 2024.
b. Koreksi saldo awal kas BLUD SMKN 1 Batam sebesar Rp40.200.000,00 yang merupakan sisa kas bantuan personil siswa yang bersumber dari kegiatan Dinas Pendidikan dan diakui sebagai pendapatan BLUD SMKN 1 Batam pada tahun 2024 tetapi sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Januari 2025.
c. Koreksi saldo awal kas BLUD SMKN 1 Batam sebesar Rp631.786,00 yang merupakan sisa kas SPP pada tahun 2024 dan sudah dikembalikan ke orang tua siswa pada tanggal 16 Januari 2025.
d. Koreksi saldo awal kas BLUD SMKN 2 Batam sebesar Rp24.401.924,00 yang merupakan sisa kas dari bantuan personil siswa yang bersumber dari kegiatan Dinas Pendidikan dan diakui sebagai pendapatan BLUD SMKN 2 Batam pada tahun 2024 tetapi sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 14 Februari 2025.
e. Koreksi penambahan saldo awal kas BLUD SMKN 1 Bintan Timur sebesar Rp1.948.000,00 dan SMKN Kundur sebesar Rp5.700.000,00 pada awal tahun 2025 yang merupakan saldo TEFA tahun 2024.

Pada tahun anggaran 2025 Pendapatan dan Belanja atas 19 (sembilan belas) BLUD SMKN sudah dianggarkan pada APBD, akan tetapi terhadap sisa kas belum teranggarkan pada penerimaan pembiayaan pada komponen SiLPA BLUD.

5.2.3 Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	19.121.577.365,93	**27.286.164.438,01**

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun berjalan sebesar Rp19.121.577.365,93.

5.3 Penjelasan Pos – Pos Neraca

5.3.1 Aset

Aset	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	6.815.191.552.141,75	**7.105.534.873.977,98**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.815.191.552.141,75 terjadi penurunan sebesar Rp290.343.321.836,23 atau sebesar 4,09% dibandingkan dengan saldo Aset tahun 2024 sebesar Rp7.105.534.873.977,98 yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.134 Rincian Aset

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)		
Aset Lancar	143.020.502.083,83	386.123.239.870,43	(243.102.737.786,60)	(62,96)
Investasi Jangka Panjang	135.977.916.508,00	138.205.300.338,00	(2.227.383.830,00)	(1,61)
Aset Tetap	5.898.355.749.529,72	6.039.363.970.380,51	(141.008.220.850,79)	(2,33)
Aset Lainnya	535.191.876.315,99	541.842.363.389,04	(6.650.487.073,05)	(1,23)
Properti Investasi	102.645.507.704,21	0,00	102.645.507.704,21	0,00
Saldo Akhir Aset	**6.815.191.552.141,75**	**7.105.534.873.977,98**	**(290.343.321.836,23)**	**(4,09)**

5.3.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dapat berupa:

- Kas dan setara kas
- Investasi jangka pendek
- Piutang Pajak Daerah
- Piutang Retribusi Daerah
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah
- Piutang Lainnya dan
- Persediaan

Aset Lancar sebesar Rp143.020.502.083,83 per 31 Desember 2025 yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	14.356.745.416,90	**23.302.940.904,77**

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas bersih pemerintah daerah setelah dikurangi dengan *Outstanding Check* yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.356.745.416,90. Saldo Kas di Kas Daerah tersebut tidak termasuk saldo pada Rekening Bank pada Bank Bukopin dengan Nama Rekening DKUKM Pengembalian Dana Bergulir / Nomor Rekening 100-01-21394 yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau. Rekening Bank tersebut secara subtansi tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pembukaan rekening terjadi pada akhir tahun 2007 dikarenakan adanya himbauan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membuka rekening penampung pengembalian Dana Bergulir Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diperuntukkan bagi penerima manfaat dana bergulir yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dan pemantauan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4, bahwa Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh Satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU (Satker BLU). Dana Bergulir yang digulirkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mulai tahun 2000 sampai dengan 2007 mencapai Rp4.620.000.000,00. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2025 sebesar Rp162.010.920,90.

Dari total saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp14.356.745.416,90, terdapat *outstanding* penyetoran pajak di akhir tahun 2025 sebesar Rp33.872.068,00 yang telah diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui penerbitan SP2D di tahun 2025 namun pengurangan nilai rekening Kas Daerah baru diproses oleh pihak perbankan pada tanggal 1 Januari 2026.

Dengan demikian, berikut dijelaskan tabel Kas di Kas Daerah:

Tabel 5.135 Kas Di Kas Daerah

I	NO	NO. REKENING	BANK	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
					KREDIT	DEBET	
	1	106-01-00001	BANK RIAU KEPRI SYARIAH BATAM BEND UMUM DAERAH (PAD)	236.370.522,84	124.028.176.775,50	124.220.290.871,00	44.256.427,34
	2	103-01-00310	BANK RIAU KEPRI SYARIAH TANJUNGPINANG RKUD PROV. KEPULAUAN RIAU	7.659.102.531,42	3.222.680.709.921,51	3.221.477.914.486,32	8.861.897.966,61
	3	100-137-0240	BANK BUKOPIN PEMPROV KEPRI (PAD)	971.620.711,23	1.546.725.532,56	2.400.115.000,00	118.231.243,79
	4	100-030-8397	BANK BUKOPIN RKUD PROV KEPULAUAN RIAU	6.145.028.931,65	2.056.105.016.248,26	2.062.249.210.582,26	834.597,65
	5	100-999-9249	BANK BUKOPIN PEMPROV KEPRI	2.312.974,55	115.000,00	115.000,00	2.312.974,55
	6	109-00-9988990-9	BANK MANDIRI REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI	8.460.934,04	0,00	0,00	8.460.934,04

I	NO	NO. REKENING	BANK	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
					KREDIT	DEBET	
	7	7012752468	BANK SYARIAH INDONESIA KASDA	2.160.451,92	121.031.176.048,72	120.900.103.500,00	133.233.000,64
	8	00000174-01-001317-30-4	BANK RAKYAT INDONESIA PEMPROV KEPRI PAD	5.239.323.274,71	1.174.657.627.226,00	1.177.884.523.784,00	2.012.426.716,71
				20.264.380.332,36	**6.700.049.546.752,55**	**6.709.132.273.223,58**	**11.181.653.861,33**
	9	100-131-0247	BUKOPIN KASDA PROV KEPRI EX POKJA	28.098.857,99	4.256.923,33	190.266,17	32.165.515,15
	10	100-015-4390	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX 2007	50.660.504,84	241.300,44	241.300,44	50.660.504,84
	11	100-012-2391	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX ESSCROW	536.185.155,02	34.536.980,07	6.636.980,07	564.085.155,02
	12	100-031-0391	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX 2010	19.757.183,11	115.000,00	115.000,00	19.757.183,11
	13	100-140-9243	BANK BUKOPIN KASDA PROV KEPRI QQ DKP 5	278.290,48	205.000,00	205.000,00	278.290,48
	14	100-023-8399	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX KIOS PK	173.360,97	205.000,00	205.000,00	173.360,97
	15	103-01-00306	BANK RIAU KEPRI SYARIAH KASDA (DANA BERGULIR) PROVKEPRI	67.879.777,00	629.619,00	0,00	68.509.396,00
	16	103-01-00307	BANK RIAU KEPRI SYARIAH KASDA (PENG. POKOK DANA) PROVKEPRI	2.199.386.749,00	85.147.459,00	10.000.000,00	2.274.534.208,00
	17	103-01-00308	BANK RIAU KEPRI SYARIAH KASDA (PENG. BUNGA DANA) PROVKEPRI	163.015.594,00	4.372.778,00	2.460.430,00	164.927.942,00
				3.065.435.472,41	**129.710.059,84**	**20.053.976,68**	**3.175.091.555,57**
			JUMLAH	**23.329.815.804,77**	**6.700.179.256.812,39**	**6.709.152.327.200,26**	**14.356.745.416,90**
II	**SALDO KAS DAERAH PER 31 DESEMBER 2025**						**14.356.745.416,90**

5.1.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	311.609.541,00	**19.041.006,00**

Merupakan saldo kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp311.609.541,00 yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.867.681,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 02 Januari 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.276.500,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Februari 2026, Dinas Kesehatan sebesar Rp823.468,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp303.050.792,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2026 dan Sekretariat Daerah (Biro Hukum) sebesar Rp2.591.100,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 18 Februari 2026.

5.3.1.1.2 Kas di BLUD

Kas di BLUD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.499.584.868,03	**2.264.885.131,34**

Merupakan kas yang berada dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp665.991.783,57 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp191.249.243,48 serta 19 (sembilan belas) SMK Negeri BLUD sebesar Rp1.642.343.840,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136 Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	19.662.250,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Syariah Indonesia (9988997886)	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (103-01-01920)	69.555.727,28
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD) pada Bank Riau Kepri Syariah (1.800.180.180)	0,00
6	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.800.101.010)	576.773.806,29
TOTAL		**665.991.783,57**

Tabel 5.137 Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	1.445.939,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Syariah Indonesia (7030374937)	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1460101234)	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1460112345)	189.803.304,48
6	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Syariah Indonesia (7030374929)	0,00
TOTAL		**191.249.243,48**

Tabel 5.138 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	3.208.960,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1940100007)	288.871.568,00
Total		**292.080.528,00**

Tabel 5.139 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 2 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	65,98
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	443.639,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.060.100.040)	215.105.036,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.060.100.041)	5.416.857,00
Total		**220.965.597,98**

Tabel 5.140 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 3 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.940.100.009)	1.053,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.940.100.010)	2.291,00
5	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.940.100.011)	21.151.850,00
Total		**21.155.194,00**

Tabel 5.141 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 4 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di Bendahara Dana Revitalisasi BLUD Tunai	0,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (8.240.100.007)	62.150,00

No	Uraian	Jumlah
5	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (8.240.100.008)	70.910.630,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bank Riau Kepri Syariah (8.240.100.009)	1.558,00
7	Kas di Bendahara Dana Revitalisasi pada BNI (1974062983)	0,00
Total		**70.974.338,00**

Tabel 5.142 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 5 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	4.609.100,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.610.100.007)	55.668.721,00
Total		**60.277.821,00**

Tabel 5.143 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 6 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (186-20-01640)	50.000,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (186.43.01444)	4.815.673,00
5	Kas di Bendahara SPP Tunai	9,00
Total		**4.865.682,00**

Tabel 5.144 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 7 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	60,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	3.913.431,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.860.100.007)	12.329,00
4	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.860.100.008)	3,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.860.100.009)	3,00
Total		**3.925.826,00**

Tabel 5.145 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Tanjungpinang

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1030100090)	17.911,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1030100089)	60,00
5	Kas di BLUD pada Bank Syariah Indonesia (1030100091)	685.658.098,00
Total		**685.676.069,00**

Tabel 5.146 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 2 Tanjungpinang

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.030.100.087)	17.222,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.030.100.088)	9.418,00
5	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.030.100.082)	193.682.197,00
6	Kas di Bendahara Bantuan Pemerintah Pelajaran Mendalam pada Bank Rakyat Indonesia (354801000041308)	0,00
Total		**193.708.837,00**

Tabel 5.147 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 3 Tanjungpinang

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.030.100.100)	20.636.464,00
Total		**20.636.464,00**

Tabel 5.148 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 4 Tanjungpinang

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.030.100.101)	79.095,00
Total		**79.095,00**

Tabel 5.149 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Bintan Timur

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.350.100.017)	17.717.964,00
Total		**17.717.964,00**

Tabel 5.150 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Bintan Utara

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	430.000,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	4.276.700,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.460.100.001)	12.535.335,00
Total		17.242.035,00

Tabel 5.151 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Karimun

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	4.250.000,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1110100015)	6.916.187,00
Total		**11.166.187,00**

Tabel 5.152 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 2 Karimun

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (8270100002)	4.089.972,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (8270100001)	2.666,00
Total		**4.092.638,00**

Tabel 5.153 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri Kundur

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	3.218.300,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	321.900,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.230.300.042)	5.061.361,00
Total		**8.601.561,00**

Tabel 5.154 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri Kundur Utara

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bank Riau Kepri Syariah (1.230.100.010)	0,00
4	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.230.100.011)	1.583.018,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan pada Bank Riau Kepri Syariah (1.230.100.012)	2.911,00
Total		1.585.929,00

Tabel 5.155 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Singkep

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	2.500.000,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan pada Bank Riau Kepri Syariah (1.250.100.009)	3.512.035,00
Total		6.012.035,00

Tabel 5.156 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Bunguran Barat

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1170100021)	1.580.040,00
Total		1.580.040,00

5.3.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	201.711.431,00	**524.292.676,64**

Kas Lainnya digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, dan kas dana BOSP. Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntasi Kas, dimana apabila sampai dengan tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan dan juga berasal dari potongan pajak pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo Kas Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp201.711.431,00 terdiri dari:

5.3.1.1.6.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang timbul atas pemotongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2025 sebesar Rp110.300.242,00;

5.3.1.1.6.2 Jasa giro yang belum dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp520.089,00;

5.3.1.1.6.3 Dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang belum disalurkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp90.891.100,00. Adapun pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi kas lainnya:

Tabel 5.157 Rekapitulasi Kas lainnya Per 31 Desember 2025

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh Ps 4 (2)	PPN	JUMLAH PFK 2025	JASA GIRO	BANTUAN BIAYA PERSONIL	SALDO KAS LAINNYA 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*	*9*	*10*	*11= 8 + 9+10*
1	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Selat Gelam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.987,00	0,00	32.987,00
2	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 2 Lingga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.805,00	0,00	79.805,00
3	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 10 Batam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.441,00	0,00	311.441,00
4	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 2 Karimun	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 3 Batam	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 5 Batam	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
7	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 1 Bintan Timur	0,00	0,00	299.956,00	0,00	2.199.681,00	2.499.637,00	0,00	0,00	2.499.637,00
8	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Lingga Utara	162.000,00	0,00	912.100,00	0,00	16.816.939,00	17.891.039,00	0,00	0,00	17.891.039,00
9	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN 1 Tanjungpinang	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN 2 Tanjungpinang	60.000,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	69.920,00	0,00	0,00	69.920,00
11	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN Batam	2.910.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00
12	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN Karimun	640.000,00	0,00	888.600,00	0,00	0,00	1.528.600,00	0,00	0,00	1.528.600,00
13	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN Kundur	80.000,00	0,00	107.440,00	0,00	0,00	187.440,00	0,00	0,00	187.440,00
14	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Palmatak	115.000,00	0,00	94.500,00	0,00	5.062.326,00	5.271.826,00	0,00	0,00	5.271.826,00
15	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Tanjungpinang	337.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00
16	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 2 Tanjungpinang	3.129.500,00	0,00	450.760,00	0,00	11.722.758,00	15.303.018,00	0,00	0,00	15.303.018,00
17	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Bintan Timur	2.624.280,00	0,00	1.042.368,00	0,00	0,00	3.666.648,00	0,00	0,00	3.666.648,00
18	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Bunguran Barat	0,00	0,00	740.200,00	0,00	10.212.054,00	10.952.254,00	0,00	0,00	10.952.254,00

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh Ps 4 (2)	PPN	JUMLAH PFK 2025	JASA GIRO	BANTUAN BIAYA PERSONIL	SALDO KAS LAINNYA 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*	*9*	*10*	*11= 8 + 9+10*
19	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00	316.443,00	316.443,00	0,00	0,00	316.443,00
20	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Pulau Tiga Barat	30.000,00	0,00	244.800,00	0,00	1.444.863,00	1.719.663,00	0,00	0,00	1.719.663,00
21	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Siantan Timur	115.000,00	0,00	94.500,00	0,00	5.062.326,00	5.271.826,00	0,00	0,00	5.271.826,00
22	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Singkep	0,00	0,00	2.202.800,00	0,00	21.033.388,00	23.236.188,00	0,00	0,00	23.236.188,00
23	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Singkep Selatan	1.035.000,00	0,00	733.680,00	0,00	0,00	1.768.680,00	0,00	0,00	1.768.680,00
24	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Ungar	0,00	0,00	0,00	0,00	346.846,00	346.846,00	0,00	0,00	346.846,00
25	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 17 Batam	1.687.000,00	0,00	2.632.550,00	0,00	0,00	4.319.550,00	0,00	0,00	4.319.550,00
26	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 25 Batam	1.739.500,00	0,00	1.261.948,00	0,00	0,00	3.001.448,00	0,00	0,00	3.001.448,00
27	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 26 Batam	1.942.400,00	0,00	533.600,00	0,00	0,00	2.476.000,00	0,00	0,00	2.476.000,00
28	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 28 Batam	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
29	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 3 Kundur	870.000,00	0,00	762.485,00	0,00	2.544.732,00	4.177.217,00	0,00	0,00	4.177.217,00
30	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 8 Batam	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
31	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 1 Batam	0,00	0,00	1.014.529,00	0,00	0,00	1.014.529,00	0,00	0,00	1.014.529,00
32	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 1 SKL	615.000,00	0,00	205.920,00	0,00	0,00	820.920,00	0,00	0,00	820.920,00
33	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 2 Batam	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
34	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 7 Batam	100.000,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	215.300,00
35	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN Kundur Utara	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
36	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 2 Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3.930.000,00	3.930.013,00

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh Ps 4 (2)	PPN	JUMLAH PFK 2025	JASA GIRO	BANTUAN BIAYA PERSONIL	SALDO KAS LAINNYA 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*	*9*	*10*	*11= 8 + 9+10*
37	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) Bantuan Transportasi Laut SMKN Kundur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.089,00	0,00	15.089,00
38	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) DS SMK Negeri Kundur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,00	0,00	11.045,00
39	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 1 Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.839,00	0,00	28.839,00
40	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 2 Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,00	34.320.000,00	34.325.739,00
41	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 2 Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	3.178,00
42	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 1 Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	1.970.000,00	1.974.550,00
43	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 1 Senayang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.959,00	1.027.600,00	1.048.559,00
44	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 2 Lingga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,00	3.024.000,00	3.030.438,00
45	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 3 Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	11.421.900,00	11.421.906,00
46	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 1 Singkep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.792.000,00	16.792.000,00
47	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN Kundur Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.405.600,00	18.405.600,00
48	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	0,00	314.250,00	0,00	0,00	0,00	314.250,00	0,00	0,00	314.250,00
	JUMLAH	**18.354.680,00**	**314.250,00**	**14.868.956,00**	**0,00**	**76.762.356,00**	**110.300.242,00**	**520.089,00**	**90.891.100,00**	**201.711.431,00**

Selain itu terdapat saldo sebesar Rp6.462.033,00 yang berada pada beberapa rekening sekolah penerima Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang tidak termasuk bagian dari saldo Kas Lainnya. Saldo tersebut merupakan sisa kas atas transaksi tahun-tahun sebelumnya dan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.158 Rekapitulasi Sisa Kas yang tidak termasuk bagian dari Kas Lainnya

NO	NAMA SEKOLAH	SISA KAS
1	SMK Negeri 2 Anambas	332.218,00
2	SMK Negeri Kundur	100.000,00
3	SMK Negeri 1 Bunguran Barat	155.778,00
4	SMK Negeri 2 Bunguran Barat	139.537,00
5	SMK Negeri 2 Bunguran Timur	100.000,00
6	SMK Negeri 1 Bunguran Timur Laut	162.579,00
7	SMK Negeri 1 Senayang	182.667,00
8	SMK Negeri 2 Lingga	171.915,00
9	SMK Negeri 1 Gunung Kijang	100.000,00
10	SMK Negeri 1 Anambas	328.911,00
11	SMK Negeri 3 Anambas	334.828,00
12	SMKN 1 Bintan Utara	4.132.800,00
13	SMKN Kundur Utara	220.800,00
		6.462.033,00

5.3.1.1.7 Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.986.989.519,00	**1.699.060.482,84**

Kas Dana BOSP digunakan untuk mencatat nilai akumulasi dari total dana BOSP yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOSP yang belum dibelanjakan. Pada tahun 2024, Kas Dana BOSP disajikan pada kode akun objek 1.1.01.05 dengan uraian akun objek Kas Dana BOS berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun objek 1.1.01.10 dengan uraian akun objek Kas Dana BOSP berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan riau mencatat saldo Kas Dana BOSP sebesar Rp1.986.989.519,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.159 Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS SMAN/SMKN/SLBN Per 31 Desember 2025

NO	NSPN	NAMA SEKOLAH	SISA KAS DI SEKOLAH		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2025)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
1	11002044	SMAN 1 JEMAJA	0,00	0,00	0,00
2	11002046	SMAN 1 PALMATAK	0,00	0,00	0,00
3	11000321	SMAN 1 SIANTAN	0,00	0,00	0,00
4	11002506	SMAN 1 SIANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00
5	69859728	SMAN 1 Siantan Utara	0,00	0,00	0,00
6	11002484	SMAN 1 BINTAN PESISIR	0,00	0,00	0,00

NO	NSPN	NAMA SEKOLAH	SISA KAS DI SEKOLAH		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2025)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
7	11002255	SMAN 1 BINTAN TIMUR	118.347,00	19.321.942,00	19.440.289,00
8	11002256	SMAN 1 BINTAN UTARA	0,00	0,00	0,00
9	69854725	SMAN 1 MANTANG	0,00	0,00	0,00
10	11002258	SMAN 1 TAMBELAN	100.000,00	50.000,00	150.000,00
11	11002259	SMAN 1 TELUK BINTAN	0,00	0,00	0,00
12	11002260	SMAN 1 TELUK SEBONG	0,00	0,00	0,00
13	11002257	SMAN 1 TOAPAYA	0,00	0,00	0,00
14	69953268	SMAN 2 BINTAN PESISIR	0,00	0,00	0,00
15	69963195	SMAN 2 TELUK BINTAN	191.095,00	0,00	191.095,00
16	11002518	SMAN 1 Belat	0,00	0,00	0,00
17	11002025	SMAN 1 BURU	0,00	0,00	0,00
18	11002026	SMAN 1 DURAI	0,00	0,00	0,00
19	11000240	SMAN 1 KARIMUN	0,00	0,00	0,00
20	11000241	SMAN 1 KUNDUR	0,00	500,00	500,00
21	11000224	SMAN 1 MORO	1.880.378,00	85.458.807,00	87.339.185,00
22	11003223	SMAN 1 Sugie Besar	0,00	0,00	0,00
23	11002031	SMAN 1 Ungar	119.600,00	400,00	120.000,00
24	11000223	SMAN 2 KARIMUN	0,00	0,00	0,00
25	11000221	SMAN 2 KUNDUR	22.578.372,00	0,00	22.578.372,00
26	11002027	SMAN 3 KARIMUN	0,00	0,00	0,00
27	11002028	SMAN 3 KUNDUR	0,00	0,00	0,00
28	11002029	SMAN 4 KARIMUN	0,00	0,00	0,00
29	11002030	SMAN 4 KUNDUR	0,00	0,00	0,00
30	69989323	SMAN 5 KARIMUN	0,00	0,00	0,00
31	70048478	SMA NEGERI 1 SELAT GELAM	0,00	0,00	0,00
32	11003247	SMAN 1 Bakung Serumpun	0,00	0,00	0,00
33	11002813	SMAN 1 Katang Bidare	0,00	0,00	0,00
34	69980031	SMAN 1 KEPULAUAN POSEK	0,00	0,00	0,00
35	11002067	SMAN 1 LINGGA	340,00	127.999.662,00	128.000.002,00
36	11003246	SMAN 1 Lingga Timur	0,00	11.883,00	11.883,00
37	11002068	SMAN 1 LINGGA UTARA	128.693.500,00	0,00	128.693.500,00
38	11003243	SMAN 1 Selayar	0,00	0,00	0,00
39	11002069	SMAN 1 SENAYANG	0,00	0,00	0,00
40	11002070	SMAN 1 SINGKEP	1.920,00	0,00	1.920,00
41	11002071	SMAN 1 SINGKEP BARAT	0,00	0,00	0,00
42	69979502	SMAN 1 SINGKEP PESISIR	0,00	0,00	0,00
43	69965911	SMAN 1 SINGKEP SELATAN	0,00	0,00	0,00
44	60725467	SMAN 1 Temiang Pesisir	0,00	0,00	0,00
45	11002072	SMAN 2 SINGKEP	0,00	0,00	0,00
46	70048494	SMA NEGERI 2 BAKUNG SERUMPUN	0,00	0,00	0,00
47	11002450	SMAN 1 Batubi	0,00	0,00	0,00
48	11002042	SMAN 1 BUNGURAN BARAT	0,00	0,00	0,00
49	11002499	SMAN 1 BUNGURAN SELATAN	0,00	0,00	0,00
50	69762629	SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	0,00	0,00	0,00
51	11000322	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR	0,00	0,00	0,00
52	11002778	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	0,00	0,00	0,00
53	11002043	SMAN 1 BUNGURAN UTARA	0,00	0,00	0,00
54	11002045	SMAN 1 MIDAI	0,00	0,00	0,00
55	11002051	SMAN 1 PULAU LAUT	0,00	0,00	0,00

NO	NSPN	NAMA SEKOLAH	SISA KAS DI SEKOLAH		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2025)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
56	11002050	SMAN 1 Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	0,00
57	11002047	SMAN 1 SERASAN	0,00	0,00	0,00
58	11003053	SMAN 1 SERASAN TIMUR	0,00	28.222,00	28.222,00
59	11002048	SMAN 1 SUBI	0,00	0,00	0,00
60	11002049	SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	800.000,00	0,00	800.000,00
61	70048467	SMA NEGERI 1 SELUAN	0,00	0,00	0,00
62	11002194	SMAN 10 BATAM	0,00	7.568.000,00	7.568.000,00
63	11002195	SMAN 11 BATAM	0,00	0,00	0,00
64	11002196	SMAN 12 BATAM	6.753.241,00	282.850.384,00	289.603.625,00
65	11002455	SMAN 13 BATAM	0,00	0,00	0,00
66	11002457	SMAN 14 BATAM	4.438.635,00	117.488.200,00	121.926.835,00
67	11002458	SMAN 15 BATAM	0,00	0,00	0,00
68	60728418	SMAN 16 BATAM	17.658.868,00	152.982.967,00	170.641.835,00
69	60728419	SMAN 17 BATAM	0,00	0,00	0,00
70	69863917	SMAN 18 Batam	0,00	0,00	0,00
71	69872144	SMAN 19 BATAM	2.132.550,00	106.008.090,00	108.140.640,00
72	11000360	SMAN 1 BATAM	3.356.692,00	81.964.036,00	85.320.728,00
73	69915799	SMAN 20 BATAM	0,00	1.410.024,00	1.410.024,00
74	69915801	SMAN 21 BATAM	0,00	0,00	0,00
75	69968298	SMAN 22 BATAM	0,00	26.100,00	26.100,00
76	69980500	SMAN 23 BATAM	5.970.993,00	160.571.426,00	166.542.419,00
77	69980503	SMAN 24 BATAM	0,00	0,00	0,00
78	69990471	SMAN 25 BATAM	0,00	0,00	0,00
79	69990472	SMAN 26 BATAM	0,00	0,00	0,00
80	70012279	SMAN 27 BATAM	0,00	0,00	0,00
81	70012280	SMAN 28 BATAM	0,00	0,00	0,00
82	11000359	SMAN 2 BATAM	3.501.129,00	150.266.268,00	153.767.397,00
83	11002197	SMAN 3 BATAM	0,00	0,00	0,00
84	11002198	SMAN 4 BATAM	0,00	23.411.602,00	23.411.602,00
85	11002199	SMAN 5 BATAM	1.049.500,00	20.031.300,00	21.080.800,00
86	11002200	SMAN 6 BATAM	28.333.556,00	0,00	28.333.556,00
87	11002201	SMAN 7 BATAM	0,00	0,00	0,00
88	11002202	SMAN 8 BATAM	7.861.376,00	171.616.708,00	179.478.084,00
89	11002203	SMAN 9 BATAM	0,00	0,00	0,00
90	70048466	SMA NEGERI 29 BATAM	0,00	119,00	119,00
91	11000433	SMAN 1 TANJUNG PINANG	0,00	0,00	0,00
92	11000434	SMAN 2 TANJUNG PINANG	0,00	0,00	0,00
93	11000435	SMAN 3 TANJUNG PINANG	0,00	127.575.000,00	127.575.000,00
94	11000436	SMAN 4 TANJUNG PINANG	0,00	0,00	0,00
95	11000437	SMAN 5 TANJUNG PINANG	0,00	0,00	0,00
96	11001975	SMAN 6 TANJUNG PINANG	0,00	0,00	0,00
97	69971073	SMAN 7 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
98	11003192	SMKN 1 ANAMBAS	0,00	0,00	0,00
99	69859732	SMKN 2 ANAMBAS	0,00	0,00	0,00
100	69859733	SMKN 3 ANAMBAS	0,00	0,00	0,00
101	69973863	SMK NEGERI 4 ANAMBAS	0,00	0,00	0,00
102	11002481	SMKN 1 BINTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00
103	11002263	SMKN 1 BINTAN UTARA	38.263.491,00	0,00	38.263.491,00
104	11003305	SMKN 1 GUNUNG KIJANG	0,00	0,00	0,00
105	69854734	SMKN 1 SERI KUALA LOBAM	1.516.900,00	0,00	1.516.900,00

NO	NSPN	NAMA SEKOLAH	SISA KAS DI SEKOLAH		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2025)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
106	11002143	SMKN 1 KARIMUN	0,00	0,00	0,00
107	11002144	SMKN 1 MORO	0,00	0,00	0,00
108	69864705	SMK NEGERI 2 KARIMUN	16.349.400,00	0,00	16.349.400,00
109	69960641	SMK NEGERI KUNDUR UTARA	0,00	0,00	0,00
110	11002580	SMKN KUNDUR	403.728,00	0,00	403.728,00
111	11003241	SMKN 1 LINGGA	0,00	0,00	0,00
112	11002073	SMKN 1 SENAYANG	0,00	0,00	0,00
113	11002814	SMKN 1 SINGKEP	278.865,00	32.782.472,00	33.061.337,00
114	60725422	SMKN 2 LINGGA	4.180,00	100.000,00	104.180,00
115	11000320	SMKN 1 BUNGURAN BARAT	0,00	0,00	0,00
116	11002052	SMKN 1 BUNGURAN TIMUR	0,00	0,00	0,00
117	11003175	SMKN 2 BUNGURAN BARAT	12.978.000,00	0,00	12.978.000,00
118	69974105	SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	0,00	0,00	0,00
119	69988626	SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	0,00	10.410.000,00	10.410.000,00
120	11000382	SMKN 1 BATAM	0,00	0,00	0,00
121	11002210	SMKN 2 BATAM	0,00	0,00	0,00
122	11002570	SMKN 3 BATAM	0,00	0,00	0,00
123	11002571	SMKN 4 BATAM	0,00	0,00	0,00
124	11003006	SMKN 5 BATAM	0,00	0,00	0,00
125	11003158	SMKN 6 BATAM	0,00	0,00	0,00
126	69774885	SMKN 7 BATAM	0,00	0,00	0,00
127	70011450	SMKN 9 BATAM	0,00	0,00	0,00
128	70048098	SMK NEGERI 10 BATAM	0,00	0,00	0,00
129	70048190	SMK NEGERI 11 BATAM	0,00	0,00	0,00
130	69974383	SMK NEGERI 8 BATAM	0,00	0,00	0,00
131	11000438	SMKN 1 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
132	11000439	SMKN 2 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
133	11000426	SMKN 3 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
134	11002495	SMKN 4 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
135	69973762	SMK NEGERI 5 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
136	70009388	SLBN ANAMBAS	0,00	0,00	0,00
137	69786958	SLB NEGERI BINTAN	0,00	13.251,00	13.251,00
138	70012135	SLBN KIJANG	0,00	0,00	0,00
139	11002434	SLB NEGERI KARIMUN	0,00	0,00	0,00
140	69972050	SLB NEGERI KUNDUR	0,00	0,00	0,00
141	69972874	SLB NEGERI LINGGA	0,00	0,00	0,00
142	69983759	SLB NEGERI NATUNA	0,00	0,00	0,00
143	69786956	SLB NEGERI BATAM	1.707.222,00	278,00	1.707.500,00
144	11002369	SLBN 1 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
145	69932219	SLBN 2 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			**307.041.878,00**	**1.679.947.641,00**	**1.986.989.519,00**

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	15.748.913.159,68	**99.618.122.631,00**

Merupakan piutang yang timbul dari pajak daerah yang belum diterima di Kas Daerah sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pajak daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.748.913.159,68 yang terdiri dari piutang pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan yang tercatat dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Rincian Piutang Pajak Daerah diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.160 Rekapitulasi Saldo Akhir Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2025			Saldo Akhir 2025
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pengurangan	Diskon Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2+4-5-6+7-8-9
	TOTAL PIUTANG	**99.618.122.631,00**	**993.392.798,68**	**464.321.053,00**	**85.158.832.017,00**	**1.142.595.948.471,00**	**1.117.022.581.689,00**	**24.812.815.982,00**	**15.748.913.159,68**
I	**SKPDKB**	**4.959.226.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.959.226.094,00**
	PKB	1.007.790.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.790.974,00
	BBNKB	3.951.435.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951.435.120,00
II	**Pokok PKB dan BBN-KB**	**22.834.002.867,00**	**0,00**	**95.300.400,00**	**13.702.959.000,00**	**690.658.827.973,00**	**665.085.461.191,00**	**24.812.815.982,00**	**9.796.294.267,00**
A	**PKB**	**9.876.532.367,00**	**0,00**	**86.734.800,00**	**1.873.829.000,00**	**419.717.729.073,00**	**403.433.853.591,00**	**16.179.020.982,00**	**8.020.823.067,00**
1	BATAM	8.864.959.567,00	0,00	76.477.100,00	1.806.046.700,00	330.915.181.036,00	319.299.714.867,00	11.514.705.569,00	7.083.196.367,00
2	TANJUNGPINANG	452.166.675,00	0,00	8.863.200,00	10.901.800,00	42.997.296.945,00	40.889.694.550,00	2.107.602.395,00	432.401.675,00
4	BINTAN	120.320.600,00	0,00	67.000,00	30.066.000,00	18.906.064.351,00	17.854.471.147,00	1.051.593.204,00	90.187.600,00
3	KARIMUN	300.180.375,00	0,00	799.500,00	0,00	21.264.898.046,00	20.127.651.017,00	1.137.247.029,00	299.380.875,00
5	LINGGA	16.556.800,00	0,00	0,00	0,00	2.325.768.609,00	2.205.857.563,00	119.911.046,00	16.556.800,00
6	NATUNA	122.348.350,00	0,00	528.000,00	26.814.500,00	2.954.704.095,00	2.726.727.597,00	223.882.598,00	99.099.750,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	353.815.991,00	329.736.850,00	24.079.141,00	0,00
B	**BBNKB**	**12.957.470.500,00**	**0,00**	**8.565.600,00**	**11.829.130.000,00**	**270.941.098.900,00**	**261.651.607.600,00**	**8.633.795.000,00**	**1.775.471.200,00**
1	BATAM	12.193.882.000,00	0,00	853.600,00	11.392.560.000,00	238.156.686.600,00	231.207.112.900,00	6.321.366.900,00	1.428.675.200,00
2	TANJUNGPINANG	210.532.000,00	0,00	4.100.000,00	55.700.000,00	13.382.363.100,00	12.419.967.300,00	962.395.800,00	150.732.000,00
4	BINTAN	266.740.000,00	0,00	0,00	199.660.000,00	9.434.171.400,00	8.889.331.600,00	544.839.800,00	67.080.000,00
3	KARIMUN	36.303.700,00	0,00	92.000,00	0,00	7.752.241.400,00	7.052.619.400,00	699.622.000,00	36.211.700,00
5	LINGGA	6.791.000,00	0,00	0,00	0,00	901.711.200,00	872.300.900,00	29.410.300,00	6.791.000,00
6	NATUNA	243.221.800,00	0,00	3.520.000,00	181.210.000,00	1.102.191.100,00	1.005.798.100,00	68.903.500,00	85.981.300,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	211.734.100,00	204.477.400,00	7.256.700,00	0,00
III	**PBBKB**	**39.688.597.082,00**	**227.908.858,43**	**0,00**	**39.688.597.082,00**	**450.061.566.595,00**	**450.061.566.595,00**	**0,00**	**227.908.858,43**
	PBBKB	39.688.597.082,00	227.908.858,43	0,00	39.688.597.082,00	450.061.566.595,00	450.061.566.595,00	0,00	227.908.858,43
IV	**PAJAK ALAT BERAT**	**0,00**	**303.715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**614.336.352,00**	**614.336.352,00**	**0,00**	**303.715.000,00**
	PAJAK ALAT BERAT	0,00	303.715.000,00	0,00	0,00	614.336.352,00	614.336.352,00	0,00	303.715.000,00
V	**AIR PERMUKAAN**	**32.136.296.588,00**	**461.768.940,25**	**369.020.653,00**	**31.767.275.935,00**	**1.261.217.551,00**	**1.261.217.551,00**	**0,00**	**461.768.940,25**
1	BATAM	32.124.985.178,00	12.000.000,25	369.020.653,00	31.755.964.525,00	958.195.014,00	958.195.014,00	0,00	12.000.000,25
2	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592.825,00	18.592.825,00	0,00	0,00
3	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	111.475.420,00	111.475.420,00	0,00	0,00
4	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	51.294.744,00	51.294.744,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2025			Saldo Akhir 2025
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pengurangan	Diskon Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2+4-5-6+7-8-9
5	KARIMUN	0,00	449.768.940,00	0,00	0,00	22.661.050,00	22.661.050,00	0,00	449.768.940,00
6	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	20.802.124,00	20.802.124,00	0,00	0,00
7	LINGGA	11.311.410,00	0,00	0,00	11.311.410,00	46.828.308,00	46.828.308,00	0,00	0,00
8	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.562.846,00	28.562.846,00	0,00	0,00
9	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.220,00	2.805.220,00	0,00	0,00

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	4.490.691.222,00	**11.437.716.976,00**

Merupakan piutang yang digunakan untuk mencatat pungutan daerah otonom sebagai pembayaran daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayaran dari wajib retribusi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.490.691.222,00 terdiri dari Piutang Jasa Umum sebesar Rp4.219.992.869,00 dan Piutang Jasa Usaha sebesar Rp270.698.353,00.

Berikut rincian Piutang Retribusi Daerah dijelaskan sebagai berikut:

1) Piutang Jasa Umum

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Jasa Umum per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.219.992.869,00 terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp139.720.397,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp4.080.272.472,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.161 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI	PELUNASAN	MUTASI PIUTANG TAHUN 2025		SALDO AKHIR PIUTANG
					PENETAPAN	PELUNASAN	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5+6-7
1	BPJS KESEHATAN	23.086.000,00	0,00	23.086.000,00	18.171.862.271,00	18.171.862.271,00	0,00
2	BPJS KETENAGAKERJAAN	0,00	0,00	0,00	129.811.100,00	129.811.100,00	0,00
3	YOSHIKAWA	0,00	0,00	0,00	597.430,00	597.430,00	0,00
4	JAMKESDA BINTAN	0,00	0,00	0,00	146.967.483,00	146.967.483,00	0,00
5	JASA RAHARJA	0,00	0,00	0,00	53.316.791,00	51.657.061,00	1.659.730,00
6	BALMON	0,00	0,00	0,00	38.108.108,00	38.108.108,00	0,00
7	SEWA ATM	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
8	SEWA LAHAN	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
9	JAMKESDA PROVINSI	0,00	0,00	0,00	201.909.900,00	135.287.700,00	66.622.200,00
10	DP3KB	0,00	0,00	0,00	13.258.597,00	13.258.597,00	0,00
11	PT INHEALTH	18.353.935,00	0,00	18.353.935,00	19.407.142,00	18.819.342,00	587.800,00
12	TCM/GLOBAL FUND	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	34.945.000,00	29.425.000,00	5.520.000,00
13	PP ALILA VILLA	843.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.900,00
14	PP CONDOTEL	6.285.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285.100,00
15	HUTAMA KARYA	13.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102.500,00
16	BINTAN LAGOON	7.153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153.500,00
17	PERTAMINA	48.929.030,00	0,00	48.929.030,00	84.475.060,00	51.230.614,00	33.244.446,00
18	TASPEN	360.721,00	0,00	0,00	3.646.396,00	3.646.396,00	360.721,00
19	INDEMNITY	4.836.601,00	0,00	4.836.601,00	673.114,00	673.114,00	0,00
20	AMODA	21.670.500,00	0,00	21.670.500,00	14.637.000,00	10.296.500,00	4.340.500,00
21	KEMENKES	185.897.966,00	(39.000,00)	185.858.966,00	0,00	0,00	0,00
Total		**333.469.753,00**	**(39.000,00)**	**305.685.032,00**	**18.957.115.392,00**	**18.845.140.716,00**	**139.720.397,00**

Tabel 5.162 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI SALDO AWAL		PELUNASAN	MUTASI PIUTANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR PIUTANG
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8	10=3+4-5-6+7-8
1	JKN / BPJS KESEHATAN	7.264.242.025,00	0,00	30.000,00	7.264.212.025,00	116.438.622.133,00	116.382.812.133,00	55.810.000,00
2	JKN PARSIAL RSUD KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	0,00	315.976.209,00	285.764.209,00	30.212.000,00
3	JKN PARSIAL RSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833.000,00	13.833.000,00	0,00

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI SALDO AWAL		PELUNASAN	MUTASI PIUTANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR PIUTANG
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8	10=3+4-5-6+7-8
4	JKN PARSIAL RSUD KAB. BINTAN (KIJANG)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.747.727,00	120.747.727,00	0,00
5	JAMKESDA KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	0,00	596.572.500,00	596.572.500,00	0,00
6	JAMKESDA PROV. KEPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	836.651.300,00	529.148.300,00	307.503.000,00
7	RUJUKAN KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.000,00	3.752.000,00	0,00
8	PT. BRC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377.053,00	7.523.103,00	2.853.950,00
9	BPJS KETENAGAKERJAAN	254.466.750,00	0,00	5.800,00	254.460.950,00	3.791.950.491,00	3.410.703.616,00	381.246.875,00
10	IOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PT. INHEALTH INDONESIA	156.500.881,00	0,00	368.000,00	156.132.881,00	292.406.051,00	278.258.352,00	14.147.699,00
12	PT. LINTAS SUKAPURA MANDIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	JKD KAB. BINTAN	18.598.350,00	0,00	0,00	18.598.350,00	278.255.051,00	278.255.051,00	0,00
14	TASPEN	38.981.100,00	0,00	0,00	38.981.100,00	284.689.525,00	238.836.375,00	45.853.150,00
15	KEMENKES (TKI DEPORTASI)	16.646.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646.988,00
16	KIMIA FARMA	9.010.000,00	0,00	0,00	9.010.000,00	33.389.200,00	19.409.200,00	13.980.000,00
17	GLOBAL FUND (TB MDR)	14.245.696,00	0,00	0,00	14.245.696,00	47.101.152,00	47.101.152,00	0,00
18	PARSIAL RSUD EHD	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	107.830.350,00	107.830.350,00	0,00
19	AIRNAV	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473.500,00	7.302.900,00	9.170.600,00
20	PT. JASA RAHARJA	147.886.523,00	0,00	0,00	147.886.523,00	2.414.632.008,00	2.304.455.208,00	110.176.800,00
21	BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BAWASLU PROVINSI KEPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANK RIAU KEPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.109.050,00	21.109.050,00	0,00
24	PT. MEITECH	296.256.150,00	0,00	0,00	296.256.150,00	1.307.709.600,00	885.803.600,00	421.906.000,00
25	PT. NAYAKA ERA HUSADA	3.757.400,00	0,00	7.500,00	3.749.900,00	50.155.300,00	48.269.600,00	1.885.700,00
26	RRI TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DPRD KABUPATEN BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	45.689.064,00	45.689.064,00	0,00
28	PT. PELINDO I	7.868.250,00	0,00	12.500,00	7.855.750,00	18.952.700,00	17.766.350,00	1.186.350,00
29	PPPAPM KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	0,00	74.404.150,00	74.404.150,00	0,00
30	BIRO KLASIFIKASI INDONESIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DINAS PPKB (MOW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UNHCR	0,00	0,00	0,00	0,00	72.128.000,00	72.128.000,00	0,00
33	PT. ANGKASA PURA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.038.257,00	19.038.257,00	0,00
34	RUJUKAN RSUD BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696.250,00	15.696.250,00	0,00
35	KPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PASIEN UMUM	2.661.259.910,00	0,00	0,00	0,00	11.013.500,00	4.580.050,00	2.667.693.360,00
		10.896.320.023,00	**0,00**	**423.800,00**	**8.217.989.325,00**	**127.239.155.121,00**	**125.836.789.547,00**	**4.080.272.472,00**

2) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2025 sebesar Rp270.698.353,00. Piutang Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp123.955.500,00 dan Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan yang tercatat dan dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp106.415.392,00 serta Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp40.327.461,00.

Tabel 5.163 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Nama Wajib Retribusi	Jumlah Piutang
1	CV. AIR BUNGA	4.602.500,00
2	CV. ANAK TAMIANG	7.376.500,00
3	CV. BAHANA ROBAT	10.680.000,00
4	CV. CITRA BUMI LOSARI	450.000,00
5	CV. INDOCO	4.602.500,00
6	CV. KARYA CIPTA UTAMA	600.000,00

7	CV. MATA AIR	3.802.500,00
8	CV. MENARA ADI JAYA	450.000,00
9	CV. NICHA BINTAN	3.000.000,00
10	CV. PORMULA JAYA	2.400.000,00
11	CV. SAMUDERA JAYA PERKASA	1.000.000,00
12	CV. SINAR NUSANTARA IMPLEMENTASI	1.200.000,00
13	CV. TANJUNG PUTRI MANDIRI	3.302.500,00
14	CV. TRI BUANA CITRA PERKASA	6.772.500,00
15	PT. BENTAN SONDONG	30.950.000,00
16	PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA-PT.MINARTA DUTAHUTAMA,KSO	1.698.000,00
17	PT. MAJU BERSAMA JAYA	732.000,00
18	PT. MIRA	10.907.500,00
19	PT. NATHANS MULIA MANDIRI	1.500.000,00
20	PT. PANDJI BANGUN PERSADA	19.963.500,00
21	PT. PULAU SAMOSIR SAKTI PERKASA	4.515.500,00
22	PT. SUMBER ARTHA REKSA MULIA	150.000,00
23	PT. TIARA INDOPENTA,KSO	3.000.000,00
24	PT. YUDHA PERKASA UTAMA	300.000,00
	Total	**123.955.500,00**

Tabel 5.164 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI SALDO AWAL		PELUNASAN	MUTASI PIUTANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR PIUTANG
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8	10=3+4-5-6+7-8
1	SEWA LOKET KIMIA FARMA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2	SEWA KANTIN RODIAH	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
3	SEWA KANTIN BU RINA	2.800.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
4	SEWA LAHAN LATASHA_EOADDICTED - YOUNG LIVING LESTARI	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
5	KANTOR KAS BANK RIAU KEPRI SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00	74.949.600,00	74.949.600,00	0,00
6	ATM BANK RIAU KEPRI SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
7	SEWA LAHAN DEWE MART LT.1 RSUD RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	36.304.000,00	19.152.000,00	17.152.000,00
8	SEWA LAHAN STAND KANTIN HENI LANTAI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515.200,00	8.515.200,00	0,00
9	SEWA LAHAN KDH UNTUNG SABUT (KOPI DARI HATI) - 2025	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	68.463.392,00	0,00	68.463.392,00
		44.554.000,00	**0,00**	**0,00**	**23.754.000,00**	**236.232.192,00**	**150.616.800,00**	**106.415.392,00**

Tabel 5.165 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan

NO	NAMA WAJIB RETRIBUSI	JUMLAH PIUTANG
1	Agen Tiket (Muhammad Ali)	342.000,00
2	ANDRI	342.000,00
3	PT. Tirta Bintan Abadi	727.400,00
4	Kedai Makan Sejahtera (Rosmawati)	300.000,00
5	Nicky Chandra	5.701.811,00
6	PT. Tuah Bainaura Perkasa	11.086.600,00
7	Tomy	1.139.650,00
8	PT. Lautan Karimun Manggala	75.625,00
9	PT. Cahaya Belawa Inhil	236.200,00
10	PT. Anugrah Jala Chandra	2.187.625,00
11	Apnal Jony	54.750,00
12	PT. Berkah Bandar Nusa	4.242.000,00

NO	NAMA WAJIB RETRIBUSI	JUMLAH PIUTANG
13	PT. ASDP Indonesia Cabang Batam	13.891.800,00
	Total	**40.327.461,00**

5.3.1.1.10 Piutang Lain – lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	4.348.296.838,03	**18.180.173.021,32**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2025 sebesar Rp4.348.296.838,03 terdiri dari Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp84.864.864,84, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp2.352.074.250,00, Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp1.596.316,00, dan Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.904.218.463,19, serta Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp5.542.944,00. Berikut dibawah ini dijelaskan rincian Piutang Lain-lain PAD Yang sah antara lain:

1) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	84.864.864,84	**0,00**

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayarkan. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp84.864.864,84.

2) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.352.074.250,00	**18.157.290.883,12**

Merupakan piutang pendapatan denda pajak yang timbul dari pajak daerah yang belum diterima di Kas Daerah sampai tanggal pelaporan. Piutang pendapatan denda pajak daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.352.074.250,00 dengan saldo awal piutang sebesar Rp18.157.290.883,12.

Piutang pendapatan denda pajak daerah yang dicatat serta dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari piutang denda pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Rincian piutang pendapatan denda pajak daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.166 Rekapitulasi Saldo Akhir Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Denda Pajak Tahun 2025			Saldo Akhir 2025
			tambah	kurang		Penetapan	Pengurangan	Diskon Denda Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4-5-6+7-8-9
	TOTAL PIUTANG	**18.157.290.883,12**	**4.483.500,00**	**22.797.900,00**	**15.786.849.533,12**	**32.505.423.356,00**	**10.038.908.556,00**	**22.466.567.500,00**	**2.352.074.250,00**
I	**Denda Pokok PKB dan BBN-KB**	**2.374.821.850,00**	**4.483.500,00**	**22.797.900,00**	**4.380.500,00**	**32.413.817.900,00**	**9.947.303.100,00**	**22.466.567.500,00**	**2.352.074.250,00**
1	**DENDA PKB**	**2.350.255.650,00**	**1.645.600,00**	**22.730.500,00**	**1.592.900,00**	**32.413.817.900,00**	**9.947.303.100,00**	**22.466.567.500,00**	**2.327.525.150,00**
1	BATAM	2.142.773.885,00	243.600,00	21.617.300,00	236.100,00	24.466.974.300,00	7.931.810.900,00	16.535.170.900,00	2.121.156.585,00
2	TANJUNGPINANG	97.113.290,00	1.402.000,00	819.300,00	1.356.800,00	3.851.721.600,00	1.000.710.600,00	2.851.056.200,00	96.293.990,00
4	BINTAN	14.868.500,00	0,00	14.800,00	0,00	1.617.840.900,00	399.401.400,00	1.218.439.500,00	14.853.700,00
3	KARIMUN	70.423.750,00	0,00	279.100,00	0,00	1.963.308.100,00	518.033.300,00	1.445.274.800,00	70.144.650,00
5	LINGGA	5.088.525,00	0,00	0,00	0,00	186.043.500,00	51.177.000,00	134.866.500,00	5.088.525,00
6	NATUNA	19.987.700,00	0,00	0,00	0,00	288.164.300,00	38.424.100,00	249.740.200,00	19.987.700,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765.200,00	7.745.800,00	32.019.400,00	0,00
II	**DENDA BBNKB**	**24.566.200,00**	**2.837.900,00**	**67.400,00**	**2.787.600,00**	0,00	0,00	0,00	**24.549.100,00**
1	BATAM	22.096.300,00	50.300,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.079.200,00
2	TANJUNGPINANG	1.085.300,00	2.787.600,00	0,00	2.787.600,00	0,00	0,00	0,00	1.085.300,00
4	BINTAN	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
3	KARIMUN	675.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.200,00
5	LINGGA	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
6	NATUNA	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
8	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**DENDA PBBKB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.312.431,00**	**91.312.431,00**	**0,00**	**0,00**
	Denda PBBKB	0,00	0,00	0,00	0,00	91.312.431,00	91.312.431,00	0,00	0,00
IV	**DENDA PAJAK ALAT BERAT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Denda Pajak Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**DENDA AIR PERMUKAAN**	**15.782.469.033,12**	**0,00**	**0,00**	**15.782.469.033,12**	**293.025,00**	**293.025,00**	0,00	0,00
1	BATAM	15.782.469.033,12	0,00	0,00	15.782.469.033,12	120.072,00	120.072,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Denda Pajak Tahun 2025			Saldo Akhir 2025
			tambah	kurang		Penetapan	Pengurangan	Diskon Denda Pajak	
2	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	31.020,00	31.020,00	0,00	0,00
4	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KARIMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	47.967,00	47.967,00	0,00	0,00
6	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LINGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.454,00	22.454,00	0,00	0,00
8	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	71.512,00	71.512,00	0,00	0,00
9	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.596.316,00	1.157.138,00

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah timbul dikarenakan Wajib Retribusi Daerah tidak memenuhi kewajiban sehingga dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp1.596.316,00 yang merupakan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp667.200,00 dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp929.116,00.

4) Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang Pendapatan dari Pengembalian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.904.218.463,19	21.725.000,00

Piutang Pendapatan dari Pengembalian digunakan pemerintah untuk mencatat hak tagih atau aset atas kelebihan pembayaran pada periode sebelumnya yang wajib dikembalikan oleh pihak penerima. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian yang berasal dari hasil temuan oleh auditor pada tahun 2025 atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal yang sudah ditindaklanjuti sebesar Rp1.904.218.463,19.

Tabel 5.167 Piutang Pendapatan dari Pengembalian

No	Perangkat Daerah	Piutang Pendapatan dari Pengembalian				Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Modal	
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	1.474.040,00	0,00	0,00	0,00	1.474.040,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.200.230,00	2.150.000,00	0,00	0,00	3.350.230,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.406.442,00	3.435.000,00	0,00	0,00	9.841.442,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.752.390,00	0,00	0,00	0,00	1.752.390,00
5	Badan Pendapatan Daerah	5.078.958,00	0,00	0,00	0,00	5.078.958,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	950.200,00	0,00	0,00	950.200,00
7	Badan Penghubung Daerah	0,00	5.340.600,00	0,00	0,00	5.340.600,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.290.540,00	1.580.511,00	0,00	0,00	2.871.051,00
9	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	1.227.000,00	0,00	0,00	1.227.000,00
10	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	2.246.000,00	0,00	0,00	2.246.000,00
11	Biro Umum	4.962.978,00	7.265.078,00	0,00	0,00	12.228.056,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	3.098.600,00	0,00	0,00	3.098.600,00
13	Dinas Kebudayaan	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	159.344,00	2.486.046,00	0,00	0,00	2.645.390,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.318.218,00	137.000,00	0,00	0,00	1.455.218,00
16	Dinas Kesehatan	0,00	15.881.500,00	0,00	100.156.096,37	116.037.596,37
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3.505.370,00	8.528.861,00	0,00	0,00	12.034.231,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.011.882,00	0,00	0,00	1.011.882,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.413.012,00	3.435.800,00	0,00	0,00	4.848.812,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.247.182,00	809.800,00	0,00	0,00	7.056.982,00

No	Perangkat Daerah	Piutang Pendapatan dari Pengembalian				Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Modal	
21	Dinas Pariwisata	156.690,00	0,00	0,00	0,00	156.690,00
22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.422.000,00	127.219.077,54	7.343.423,44	239.057.757,15	376.042.258,13
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	343.708,00	4.956.750,00	0,00	0,00	5.300.458,00
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.181.452,00	1.531.411,00	0,00	11.000.116,02	14.712.979,02
25	Dinas Pendidikan	15.831.472,00	177.719.232,00	0,00	179.848.548,59	373.399.252,59
26	Dinas Perhubungan	1.089.782,00	0,00	0,00	0,00	1.089.782,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	739.944,00	6.243.100,00	0,00	3.567.000,00	10.550.044,00
28	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	3.080.374,00	0,00	0,00	0,00	3.080.374,00
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	153.000.056,36	0,00	0,00	153.000.056,36
30	Dinas Sosial	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
31	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	9.057.462,00	454.500,00	0,00	0,00	9.511.962,00
32	Inspektorat	5.687.578,00	0,00	0,00	0,00	5.687.578,00
33	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	2.286.272,00	18.528.118,00	0,00	534.259.633,72	555.074.023,72
34	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.430.921,00	0,00	0,00	0,00	1.430.921,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	2.721.108,00	0,00	0,00	0,00	2.721.108,00
36	Sekretariat DPRD	2.191.578,00	193.180.720,00	0,00	0,00	195.372.298,00
	Total	**84.029.045,00**	**744.956.842,90**	**7.343.423,44**	**1.067.889.151,85**	**1.904.218.463,19**

5) Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	5.542.944,00	**0,00**

Piutang Pendapatan BLUD digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD, piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan, piutang pendapatan BLUD dari hibah, piutang pendapatan BLUD dari hibah tidak terikat, piutang pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain, piutang pendapatan BLUD dari APBD, dan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.168 Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI SALDO AWAL		PELUNASAN	MUTASI PIUTANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR PIUTANG
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8	10=3+4-5-6+7-8
1	PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	0,00	0,00	0,00	0,00	298.220.205,00	298.220.205,00	0,00
2	PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA STAND ROTI O (LISTRIK & AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.444.041,00	43.444.041,00	0,00
3	DEWE MART (LISTRIK DAN AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838.252,00	8.838.252,00	0,00
4	ROTI RAJA (LISTRIK DAN AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542.944,00	5.542.944,00	0,00
5	KDH UNTUNG SABUT (KOPI DARI HATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542.944,00	0,00	5.542.944,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361.588.386,00**	**356.045.442,00**	**5.542.944,00**

5.3.1.1.11 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	96.250.000,00	**96.250.000,00**

Piutang lainnya adalah piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak maupun piutang retribusi. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang lainnya sebesar Rp96.250.000,00 yang merupakan piutang atas kelebihan pembayaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang timbul karena adanya reviu Inspektorat terhadap pengurangan utang.

Rincian Piutang Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.169 Rekapitulasi Piutang Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKANAN / URAIAN	KETERANGAN	JUMLAH
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PT. TIGA NAGA MAS	Peningkatan Mesjid Baiturahman Kabupaten Karimun	96.250.000,00
	TOTAL			**96.250.000,00**

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(19.701.173.291,11)	**(66.851.818.877,95)**

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp(19.701.173.291,11) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(14.837.858.955,68), Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp(2.549.604.975,13) dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp(2.313.709.360,30).

5.3.1.1.12.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(14.837.858.955,68)	**(46.281.323.152,41)**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(14.837.858.955,68) merupakan pencadangan atas potensi tidak tertagihnya piutang pajak daerah dimana Penilaian Umur Piutang Pajak dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.170 Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
1.	Piutang Pajak (*self assessment)*	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2.	Piutang Pajak (*official assessment)*	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3.	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1 bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4.	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan		1 bulan terhitung sejak	

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
		sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Besaran penyisihan piutang pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.171 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Piutang	Umur Piutang				Penyisihan Piutang
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
	TOTAL PIUTANG	**15.748.913.159,68**	**760.550.800,00**	**0,00**	**308.612.316,00**	**14.679.750.043,68**	**14.837.858.955,68**
I	**SKPDKB**	**4.959.226.094,00**	0,00	0,00	0,00	**4.959.226.094,00**	**4.959.226.094,00**
	PKB	1.007.790.974,00	0,00	0,00	0,00	1.007.790.974,00	1.007.790.974,00
	BBNKB	3.951.435.120,00	0,00	0,00	0,00	3.951.435.120,00	3.951.435.120,00
II	**Pokok PKB dan BBN-KB**	**9.796.294.267,00**	**760.550.800,00**	**0,00**	**308.612.316,00**	**8.727.131.151,00**	**8.885.240.063,00**
1	BATAM	8.511.871.567,00	728.967.400,00	0,00	281.534.766,00	7.501.369.401,00	7.645.781.621,00
2	TANJUNGPINANG	583.133.675,00	0,00	0,00	20.481.900,00	562.651.775,00	572.892.725,00
3	BINTAN	157.267.600,00	0,00	0,00	1.119.400,00	156.148.200,00	156.707.900,00
4	KARIMUN	335.592.575,00	0,00	0,00	2.841.000,00	332.751.575,00	334.172.075,00
5	LINGGA	23.347.800,00	0,00	0,00	0,00	23.347.800,00	23.347.800,00
6	NATUNA	185.081.050,00	31.583.400,00	0,00	2.635.250,00	150.862.400,00	152.337.942,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**PBBKB**	**227.908.858,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.908.858,43**	**227.908.858,43**
	PBBKB	227.908.858,43	0,00	0,00	0,00	227.908.858,43	227.908.858,43
IV	**PAJAK ALAT BERAT**	**303.715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.715.000,00**	**303.715.000,00**
	PAJAK ALAT BERAT	303.715.000,00	0,00	0,00	0,00	303.715.000,00	303.715.000,00
IV	**AIR PERMUKAAN**	**461.768.940,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461.768.940,25**	**461.768.940,25**
1	BATAM	12.000.000,25	0,00	0,00	0,00	12.000.000,25	12.000.000,25
2	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KARIMUN	449.768.940,00	0,00	0,00	0,00	449.768.940,00	449.768.940,00
6	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LINGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1.12.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(2.549.604.975,13)	**(2.464.841.332,73)**

Penyisihan Piutang Retribusi digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi sehingga nilai piutang retribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Penyisihan Piutang Retribusi periode 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.549.604.975,13) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.172 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi

NO	URAIAN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG DIRAGUKAN TERTAGIH

NO	URAIAN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG DIRAGUKAN TERTAGIH
1	Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	139.720.397,00	27.980.945,49
2	Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	4.080.272.472,00	2.441.116.565,37
3	Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	106.415.392,00	18.328.076,96
4	Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	123.955.500,00	61.977.750,00
5	Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan	40.327.461,00	201.637,31
SALDO AKHIR PENYISIHAN PIUTANG		**4.490.691.222,00**	**2.549.604.975,13**

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud tahun 2025 sebesar Rp(27.980.945,49) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.173 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	JASA RAHARJA	1.659.730,00	1.659.730,00	0,00	0,00	0,00	8.298,65
2	JAMKESDA PROVINSI	66.622.200,00	66.622.200,00	0,00	0,00	0,00	333.111,00
3	PT INHEALTH	587.800,00	587.800,00	0,00	0,00	0,00	2.939,00
4	TCM/GLOBAL FUND	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
5	PP ALILA VILLA	843.900,00	0,00	0,00	0,00	843.900,00	843.900,00
6	PP CONDOTEL	6.285.100,00	0,00	0,00	0,00	6.285.100,00	6.285.100,00
7	HUTAMA KARYA	13.102.500,00	0,00	0,00	0,00	13.102.500,00	13.102.500,00
8	BINTAN LAGOON	7.153.500,00	0,00	0,00	0,00	7.153.500,00	7.153.500,00
9	PERTAMINA	33.244.446,00	33.244.446,00	0,00	0,00	0,00	166.222,24
10	TASPEN	360.721,00	0,00	360.721,00	0,00	0,00	36.072,10
11	AMODA	4.340.500,00	4.340.500,00	0,00	0,00	0,00	21.702,50
		139.720.397,00	**111.974.676,00**	**360.721,00**	**0,00**	**27.385.000,00**	**27.980.945,49**

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib tahun 2025 sebesar Rp(2.441.116.565,37) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.174 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	JKN / BPJS KESEHATAN	55.810.000,00	55.810.000,00	0,00	0,00	0,00	279.050,00
2	JKN PARSIAL RSUD KOTA TPI	30.212.000,00	30.212.000,00	0,00	0,00	0,00	151.060,00
3	JAMKESDA PROV. KEPRI	307.503.000,00	307.503.000,00	0,00	0,00	0,00	1.537.515,00
4	PT. BRC	2.853.950,00	2.853.950,00	0,00	0,00	0,00	14.269,75
5	BPJS KETENAGAKERJAAN	381.246.875,00	381.246.875,00	0,00	0,00	0,00	1.906.234,37
6	PT. INHEALTH INDONESIA	14.147.699,00	14.147.699,00	0,00	0,00	0,00	70.738,50
7	TASPEN	45.853.150,00	45.853.150,00	0,00	0,00	0,00	229.265,75
8	KEMENKES (TKI DEPORTASI)	16.646.988,00	0,00	0,00	0,00	16.646.988,00	16.646.988,00
9	KIMIA FARMA	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
10	AIRNAV	9.170.600,00	9.170.600,00	0,00	0,00	0,00	45.853,00
11	PT. JASA RAHARJA	110.176.800,00	110.176.800,00	0,00	0,00	0,00	550.884,00
12	PT. MEITECH	421.906.000,00	421.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.109.530,00
13	PT. NAYAKA ERA HUSADA	1.885.700,00	1.885.700,00	0,00	0,00	0,00	9.428,50
14	PT. PELINDO I	1.186.350,00	1.186.350,00	0,00	0,00	0,00	5.931,75
15	PASIEN UMUM	2.667.693.360,00	6.433.450,00	142.303.965,00	231.457.184,00	2.287.498.761,00	2.417.489.916,75

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
		4.080.272.472,00	**1.402.365.574,00**	**142.303.965,00**	**231.457.184,00**	**2.304.145.749,00**	**2.441.116.565,37**

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib tahun 2025 sebesar Rp(18.328.076,96) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.175 Rekapitulasi Penyisihan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	SEWA LOKET KIMIA FARMA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2	SEWA KANTIN RODIAH	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	1.875.000,00
3	SEWA KANTIN BU RINA	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	1.025.000,00
4	SEWA LAHAN LATASHA_EOADDICTED - YOUNG LIVING LESTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KANTOR KAS BANK RIAU KEPRI SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ATM BANK RIAU KEPRI SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SEWA LAHAN DEWE MART LT.1 RSUD RAT	17.152.000,00	17.152.000,00	0,00	0,00	0,00	85.760,00
8	SEWA LAHAN STAND KANTIN HENI LANTAI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEWA LAHAN KDH UNTUNG SABUT (KOPI DARI HATI) - 2025	68.463.392,00	68.463.392,00	0,00	0,00	0,00	342.316,96
		106.415.392,00	**85.615.392,00**	**0,00**	**5.800.000,00**	**15.000.000,00**	**18.328.076,96**

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp(61.977.750,00) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.176 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	NAMA WAJIB RETRIBUSI	SALDO PIUTANG RETRIBUSI	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	CV. AIR BUNGA	4.602.500,00	0,00	0,00	4.602.500,00	0,00	2.301.250,00
2	CV. ANAK TAMIANG	7.376.500,00	0,00	0,00	7.376.500,00	0,00	3.688.250,00
3	CV. BAHANA ROBAT	10.680.000,00	0,00	0,00	10.680.000,00	0,00	5.340.000,00
4	CV. CITRA BUMI LOSARI	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	225.000,00
5	CV. INDOCO	4.602.500,00	0,00	0,00	4.602.500,00	0,00	2.301.250,00
6	CV. KARYA CIPTA UTAMA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00
7	CV. MATA AIR	3.802.500,00	0,00	0,00	3.802.500,00	0,00	1.901.250,00
8	CV. MENARA ADI JAYA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	225.000,00
9	CV. NICHA BINTAN	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00
10	CV. PORMULA JAYA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1.200.000,00
11	CV. SAMUDERA JAYA PERKASA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00
12	CV. SINAR NUSANTARA IMPLEMENTASI	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	600.000,00
13	CV. TANJUNG PUTRI MANDIRI	3.302.500,00	0,00	0,00	3.302.500,00	0,00	1.651.250,00
14	CV. TRI BUANA CITRA PERKASA	6.772.500,00	0,00	0,00	6.772.500,00	0,00	3.386.250,00
15	PT. BENTAN SONDONG	30.950.000,00	0,00	0,00	30.950.000,00	0,00	15.475.000,00
16	PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA-PT.MINARTA DUTAHUTAMA,KSO	1.698.000,00	0,00	0,00	1.698.000,00	0,00	849.000,00
17	PT. MAJU BERSAMA JAYA	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	366.000,00
18	PT. MIRA	10.907.500,00	0,00	0,00	10.907.500,00	0,00	5.453.750,00
19	PT. NATHANS MULIA MANDIRI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	750.000,00
20	PT. PANDJI BANGUN PERSADA	19.963.500,00	0,00	0,00	19.963.500,00	0,00	9.981.750,00

No	NAMA WAJIB RETRIBUSI	SALDO PIUTANG RETRIBUSI	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
21	PT. PULAU SAMOSIR SAKTI PERKASA	4.515.500,00	0,00	0,00	4.515.500,00	0,00	2.257.750,00
22	PT. SUMBER ARTHA REKSA MULIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00
23	PT. TIARA INDOPENTA,KSO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00
24	PT. YUDHA PERKASA UTAMA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00
		123.955.500,00	**0,00**	**0,00**	**123.955.500,00**	**0,00**	**61.977.750,00**

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp(201.637,31) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.177 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan

NO	NAMA WR	JUMLAH PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	Agen Tiket (Muhammad Ali)	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
2	ANDRI	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3	PT. Tirta Bintan Abadi	727.400,00	727.400,00	0,00	0,00	0,00	3.637,00
4	Kedai Makan Sejahtera (Rosmawati)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	Nicky Chandra	5.701.811,00	5.701.811,00	0,00	0,00	0,00	28.509,06
6	PT. Tuah Bainaura Perkasa	11.086.600,00	11.086.600,00	0,00	0,00	0,00	55.433,00
7	Tomy	1.139.650,00	1.139.650,00	0,00	0,00	0,00	5.698,25
8	PT. Lautan Karimun Manggala	75.625,00	75.625,00	0,00	0,00	0,00	378,13
9	PT. Cahaya Belawa Inhil	236.200,00	236.200,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
10	PT. Anugrah Jala Chandra	2.187.625,00	2.187.625,00	0,00	0,00	0,00	10.938,12
11	Apnal Jony	54.750,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	273,75
12	PT. Berkah Bandar Nusa	4.242.000,00	4.242.000,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
13	PT. ASDP Indonesia Cabang Batam	13.891.800,00	13.891.800,00	0,00	0,00	0,00	69.459,00
		40.327.461,00	**40.327.461,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.637,31**

5.3.1.1.12.2.1 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.313.709.360,30) terdiri dari Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp(2.313.343.400,00), Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp(333.600,00) dan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp(4.645,58) serta Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp(27.714,72).

1. Penyisihan Piutang Denda Pajak

Penyisihan Piutang Denda Pajak	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.313.343.400,00	**(18.105.318.343,12)**

Penyisihan Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.313.343.400,00) merupakan pencadangan atas potensi tidak tertagihnya piutang denda pajak. Besaran Penyisihan Piutang Denda Pajak pada tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.178 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Denda Pajak Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Piutang	Umur Piutang				Penyisihan Piutang
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
	TOTAL PIUTANG	**2.352.074.250,00**	0,00	0,00	**77.461.700,00**	**2.274.612.550,00**	**2.313.343.400,00**
I	**Denda Pokok PKB dan BBN-KB**	**2.352.074.250,00**	0,00	0,00	**77.461.700,00**	**2.274.612.550,00**	**2.313.343.400,00**
1	BATAM	2.143.235.785,00	0,00	0,00	74.895.800,00	2.068.339.985,00	2.105.787.885,00
2	TANJUNGPINANG	97.379.290,00	0,00	0,00	2.506.000,00	94.873.290,00	96.126.290,00
3	BINTAN	14.873.100,00	0,00	0,00	10.100,00	14.863.000,00	14.868.050,00
4	KARIMUN	70.819.850,00	0,00	0,00	19.300,00	70.800.550,00	70.810.200,00
5	LINGGA	5.265.525,00	0,00	0,00	0,00	5.265.525,00	5.265.525,00
6	NATUNA	20.500.700,00	0,00	0,00	30.500,00	20.470.200,00	20.485.450,00

No	Uraian	Saldo Piutang	Umur Piutang				Penyisihan Piutang
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**DENDA PBBKB**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Denda PBBKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**DENDA PAJAK ALAT BERAT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Denda Pajak Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**DENDA AIR PERMUKAAN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BATAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KARIMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LINGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(338.245,58)	**(336.049,69)**

Pada akhir periode 31 Desember 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp(338.245,58) terdiri dari Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp(333.600,00) dan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp(4.645,58) yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.179 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

JENIS PIUTANG DENDA	SALDO PIUTANG DENDA RETRIBUSI	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG DENDA RETRIBUSI
		0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
Piutang Denda Retribusi Pemakaian Laboratorium	667.200,00	0,00	0,00	667.200,00	0,00	333.600,00
	667.200,00	**0,00**	**0,00**	**667.200,00**	**0,00**	**333.600,00**

Tabel 5.180 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan

JENIS PIUTANG DENDA	SALDO PIUTANG DENDA RETRIBUSI	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI
		0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	929.116,00	929.116,00	0,00	0,00	0,00	4.645,58
	929.116,00	**929.116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.645,58**

3. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(27.714,72)	**0,00**

Penyisihan Piutang BLUD digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan

penghapusan piutang pendapatan BLUD sehingga nilai piutang pendapatan BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp(27.714,72) yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.181 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA STAND ROTI O (LISTRIK & AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DEWE MART (LISTRIK DAN AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ROTI RAJA (LISTRIK DAN AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KDH UNTUNG SABUT (KOPI DARI HATI)	5.542.944,00	5.542.944,00	0,00	0,00	0,00	27.714,72
		5.542.944,00	**5.542.944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.714,72**

5.3.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.984.982.256,93	**1.809.609.683,07**

Beban Dibayar Dimuka digunakan untuk mencatat manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain yang telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi pada saat pemerintah daerah mempunyai hak klaim tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dicatat dengan pendekatan beban dan Beban Sewa Dibayar Dimuka untuk mencatat sisanya.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat transaksi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp1.984.982.256,93 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.182 Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka OPD per 31 Desember 2025

No	Nama OPD	Saldo Beban Dibayar Dimuka
1	Dinas Pendidikan	79.707.638,89
2	Dinas Kesehatan	13.027.777,78
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.166.666,67
4	Dinas Sosial	59.037.500,00
5	Dinas Perhubungan	8.958.333,33
6	Dinas Pariwisata	22.666.666,67
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	586.198.030,00
8	Biro Umum	415.557.292,65
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.472.222,22
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	112.916.666,67
11	Badan Pendapatan Daerah	659.611.462,05
12	Sekretariat DPRD	4.662.000,00
Total		**1.984.982.256,93**

Adapun rincian Beban Dibayar Dimuka dijelaskan pada **Lampiran 3.**

5.3.1.1.14 Persediaan

Persediaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	116.695.901.122,37	**294.022.966.235,40**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pencatatan persediaan dengan metode Periodik dan perpetual. Dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis. Nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode, dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, perputarannya lambat, jenis persediaan yang sifatnya *continues*, dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp116.695.901.122,37 merupakan sisa persediaan di OPD yang belum digunakan berupa Barang Habis Pakai sebesar Rp37.798.475.067,58 serta persediaan barang-barang yang akan diserahkan tetapi belum diserahkan sebesar Rp78.897.426.054,79 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.183 Rekapitulasi Persediaan Barang Habis Pakai Dan Hibah Per 31 Desember 2025

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSEDIAAN HABIS PAKAI	JUMLAH PERSEDIAAN HIBAH	JUMLAH PERSEDIAAN 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3+4)*
1	Sekretariat DPRD	62.377.000,00	0,00	62.377.000,00
2	Inspektorat	13.335.984,00	0,00	13.335.984,00
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	2.618.554.090,00	0,00	2.618.554.090,00
5	Badan Kepegawaian dan Korpri	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.265.439.195,00	1.265.439.195,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.581.893,00	0,00	2.581.893,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.797.441,00	0,00	15.797.441,00
10	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	58.885,50	0,00	58.885,50
11	Badan Penghubung Daerah	4.423.400,00	0,00	4.423.400,00
12	Dinas Pendidikan	981.462,00	0,00	981.462,00
13	Dinas Kesehatan	13.388.303.602,66	71.776.286,97	13.460.079.889,63
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.057.200,00	46.815.661.691,12	46.819.718.891,12
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.554.320,00	27.304.795.958,30	27.320.350.278,30
16	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSEDIAAN HABIS PAKAI	JUMLAH PERSEDIAAN HIBAH	JUMLAH PERSEDIAAN 2025
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.073.370,00	0,00	1.073.370,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.200,00	0,00	79.200,00
20	Dinas Perhubungan	26.668.039,50	2.934.353.289,40	2.961.021.328,90
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.431.010,00	0,00	3.431.010,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	23.518.220,00	0,00	23.518.220,00
26	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	403.341.988,00	0,00	403.341.988,00
29	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00
30	Dinas Kebudayaan	1.053.400,00	0,00	1.053.400,00
31	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	506.319.783,95	505.399.634,00	1.011.719.417,95
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.433.200,00	0,00	1.433.200,00
34	Biro Hukum	422.000,00	0,00	422.000,00
35	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00
36	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00
37	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.098.822,00	0,00	4.098.822,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	981.505,00	0,00	981.505,00
39	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	172.382,00	0,00	172.382,00
40	Biro Umum	0,00	0,00	0,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	610.700,00	0,00	610.700,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	827.977.669,55	0,00	827.977.669,55
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	16.511.505.997,96	0,00	16.511.505.997,96
42	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	798.571.028,00	0,00	798.571.028,00
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	2.512.478.191,46	0,00	2.512.478.191,46
43	Dinas Pendidikan (BOS)	10.916.822,00	0,00	10.916.822,00
44	Dinas Pendidikan (BLUD)	35.686.960,00	0,00	35.686.960,00
T O T A L		**37.798.475.067,58**	**78.897.426.054,79**	**116.695.901.122,37**

Persediaan sebesar Rp116.695.901.122,37 tidak termasuk pengadaan atas Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp43.840.654.761,00 dan Belanja Pakaian sebesar Rp4.717.849.431,00. Mutasi persediaan per OPD dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.184 Mutasi Persediaan per OPD

NO	OPD	SALDO AWAL	LAPORAN REALIASI ANGGARAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	TOTAL PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
		PER-1 JANUARI 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	PER 31 DESEMBER 2025
1	***2***	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4+5)-6*	*8*	*9=7-8*
1	Sekretariat DPRD	0,00	7.025.412.557,00	0,00	1.165.200.715,00	5.860.211.842,00	5.797.834.842,00	62.377.000,00
2	Inspektorat	4.393.380,00	1.847.881.731,00	0,00	69.538.125,00	1.782.736.986,00	1.769.401.002,00	13.335.984,00
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	1.252.381.448,00	0,00	139.800.000,00	1.112.581.448,00	1.112.581.448,00	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	2.728.028.160,00	8.579.255.831,00	298.568.920,00	2.986.303.066,00	8.619.549.845,00	6.000.995.755,00	2.618.554.090,00
5	Badan Kepegawaian dan Korpri	0,00	438.149.979,00	0,00	47.880.000,00	390.269.979,00	390.269.979,00	0,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	810.074.422,00	0,00	199.800.000,00	610.274.422,00	610.274.422,00	0,00
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	41.082.158,67	4.347.415.733,00	0,00	0,00	4.388.497.891,67	4.372.700.450,67	15.797.441,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.535.800,00	984.712.911,00	0,00	56.855.000,00	929.393.711,00	926.811.818,00	2.581.893,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.224.610.070,00	386.037.545,00	118.747.600,00	0,00	1.729.395.215,00	463.956.020,00	1.265.439.195,00
10	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	388.800,00	137.569.741,00	0,00	0,00	137.958.541,00	137.899.655,50	58.885,50
11	Badan Penghubung Daerah	3.450.000,00	1.592.062.525,00	85.571.934,00	1.340.000,00	1.679.744.459,00	1.675.321.059,00	4.423.400,00
12	Dinas Pendidikan	61.280.500,00	11.928.227.922,00	719.800,00	2.733.181.100,00	9.257.047.122,00	9.256.065.660,00	981.462,00
13	Dinas Kesehatan	15.108.027.467,74	7.058.574.381,25	50.517.874.046,07	363.066.553,00	72.321.409.342,06	58.861.329.452,43	13.460.079.889,63
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	111.324.614.891,39	5.145.592.999,00	7.475.223.787,40	2.137.152.558,44	121.808.279.119,35	74.988.560.228,23	46.819.718.891,12
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	135.822.868.462,95	151.713.620.835,82	26.761.513.299,68	87.503.297.192,54	226.794.705.405,91	199.474.355.127,61	27.320.350.278,30
16	Dinas Sosial	0,00	3.100.892.151,00	0,00	408.807.050,00	2.692.085.101,00	2.692.085.101,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	2.057.939.098,00	53.036.590,00	0,00	2.110.975.688,00	2.110.975.688,00	0,00
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	465.800,00	1.503.821.071,26	0,00	414.355.864,26	1.089.931.007,00	1.088.857.637,00	1.073.370,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	115.200,00	705.694.759,00	0,00	113.744.000,00	592.065.959,00	591.986.759,00	79.200,00
20	Dinas Perhubungan	8.824.735.978,09	1.193.306.253,00	1.039.657.429,02	223.157.216,00	10.834.542.444,11	7.873.521.115,21	2.961.021.328,90

NO	OPD	SALDO AWAL	LAPORAN REALIASI ANGGARAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	TOTAL PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
		PER-1 JANUARI 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	PER 31 DESEMBER 2025
1	***2***	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4+5)-6*	*8*	*9=7-8*
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.573.500,00	1.261.029.559,00	0,00	186.545.000,00	1.077.058.059,00	1.073.627.049,00	3.431.010,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.904.551.517,00	373.634.159,00	1.067.324.700,00	2.210.860.976,00	2.210.860.976,00	0,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.586.000,00	1.012.184.992,00	166.262.565,00	284.894.104,00	896.139.453,00	895.102.453,00	1.037.000,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	1.136.528.893,00	0,00	0,00	1.136.528.893,00	1.136.528.893,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.940.000,00	265.031.301,00	0,00	0,00	266.971.301,00	243.453.081,00	23.518.220,00
26	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.351.000,00	1.437.041.394,00	10.323.000,00	61.809.000,00	1.386.906.394,00	1.385.833.894,00	1.072.500,00
27	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	947.737.730,00	27.018.954,00	145.248.000,00	829.508.684,00	829.508.684,00	0,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	95.752.000,00	2.026.817.443,12	199.339.417,00	36.465.000,00	2.285.443.860,12	1.882.101.872,12	403.341.988,00
29	Dinas Pariwisata	17.298.000,00	1.069.744.380,00	188.895.785,00	102.909.500,00	1.173.028.665,00	1.173.028.665,00	0,00
30	Dinas Kebudayaan	122.200,00	519.137.737,00	0,00	0,00	519.259.937,00	518.206.537,00	1.053.400,00
31	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	845.057.928,00	10.282.084.481,00	2.489.189.043,00	7.067.917.695,00	6.548.413.757,00	5.536.694.339,05	1.011.719.417,95
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	3.540.495.878,00	69.787.000,00	3.272.418.000,00	337.864.878,00	337.864.878,00	0,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	831.720,00	643.216.702,00	0,00	244.876.304,00	399.172.118,00	397.738.918,00	1.433.200,00
34	Biro Hukum	123.600,00	350.125.200,00	0,00	123.423.100,00	226.825.700,00	226.403.700,00	422.000,00
35	Biro Organisasi	0,00	146.185.006,00	0,00	0,00	146.185.006,00	146.185.006,00	0,00
36	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	193.211.063,00	0,00	0,00	193.211.063,00	193.211.063,00	0,00
37	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.713.600,00	329.847.076,00	0,00	96.000.000,00	238.560.676,00	234.461.854,00	4.098.822,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	0,00	376.525.930,00	0,00	84.000.000,00	292.525.930,00	291.544.425,00	981.505,00
39	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	181.100,00	370.108.913,00	0,00	0,00	370.290.013,00	370.117.631,00	172.382,00
40	Biro Umum	0,00	15.119.485.257,00	99.886.000,00	0,00	15.219.371.257,00	15.219.371.257,00	0,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	393.680,00	1.242.631.707,00	0,00	154.845.000,00	1.088.180.387,00	1.087.569.687,00	610.700,00

NO	OPD	SALDO AWAL	LAPORAN REALIASI ANGGARAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	TOTAL PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
		PER-1 JANUARI 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	PER 31 DESEMBER 2025
1	***2***	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4+5)-6*	*8*	*9=7-8*
42	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	26.067.664,00	645.856.258,00	3.389.087.409,00	0,00	4.061.011.331,00	3.233.033.661,45	827.977.669,55
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	12.861.579.699,20	0,00	77.700.827.728,00	74.050.901.429,24	16.511.505.997,96	0,00	16.511.505.997,96
43	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.714.505.568,90	4.938.684.162,00	339.962.204,00	3.296.658.965,00	3.696.492.969,90	2.897.921.941,90	798.571.028,00
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	3.147.756.523,46	0,00	11.817.993.972,00	12.453.272.304,00	2.512.478.191,46	0,00	2.512.478.191,46
44	Dinas Pendidikan (DANA BOS)	154.535.783,00	0,00	49.038.087.562,00	49.181.706.523,00	10.916.822,00	0,00	10.916.822,00
45	Dinas Pendidikan (BLUD)	0,00	0,00	2.890.365.363,23	2.854.678.403,23	35.686.960,00	0,00	35.686.960,00
TOTAL		**294.022.966.235,40**	**262.566.886.472,45**	**235.151.573.567,40**	**253.329.371.467,71**	**538.412.054.807,54**	**421.716.153.685,17**	**116.695.901.122,37**

Total Persediaan sebesar Rp116.695.901.122,37 tidak termasuk persediaan dengan kondisi rusak atau kadaluarsa yang dapat dilihat dari tabel berikut ini dengan rincian pada **Lampiran 4**.

Tabel 5.185 Rekapitulasi Persediaan Dengan Kondisi Rusak atau Kadaluarsa Per 31 Desember 2025

No	NAMA OPD	OBAT-OBATAN	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	BAHAN-BAHAN KIMIA	BAHAN CETAK (KARCIS)	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (3+4+5+6)*
1	Dinas Kesehatan	2.369.184.563,00	0,00	0,00	0,00	2.369.184.563,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau	95.039.261,29	21.982.287,90	0,00	0,00	117.021.549,19
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	25.090.794,64	0,00	0,00	0,00	25.090.794,64
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	77.966.500,00	0,00	77.966.500,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	18.776.155,00	18.776.155,00
	TOTAL	**2.489.314.618,93**	**21.982.287,90**	**77.966.500,00**	**18.776.155,00**	**2.608.039.561,83**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri atas Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat investasi non permanen lainnya dan investasi permanen dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Tahun 205 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**

Merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dasar penilaian investasi jangka panjang non permanen lainnya (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*net realizable value*) yaitu dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Penyebab tidak tertagihnya dana bergulir antara lain seleksi calon penerima dana bergulir kurang dilakukan dengan baik.

Tidak terdapat Saldo akhir *Net Realizable Value* (NRV) per 31 Desember 2025 dengan rincian perhitungan selama tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.186 Rekapitulasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2025

SKPD	Saldo Awal	Penyaluran			Pengembalian Dana Bergulir	Saldo Akhir	Penyisihan Diragukan Tertagih	Saldo Akhir NRV
		Pengguliran	APBD Tahun Berjalan	Total				
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 2+5-6	8	9 = 7+8
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.198.063.868,00	0,00	0,00	0,00	82.836.000,00	18.115.227.868,00	(18.115.227.868,00)	0,00
Dinas Kelauatan dan Perikanan	15.953.332.709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.953.332.709,52	(15.953.332.709,52)	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	382.288.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.288.894,00	(382.288.894,00)	0,00
JUMLAH	**34.533.685.471,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.836.000,00**	**34.450.849.471,52**	**(34.450.849.471,52)**	**0,00**

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	135.977.916.508,00	**138.205.300.338,00**

Merupakan investasi berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada perusahaan-perusahaan daerah sebagai berikut:

Tabel 5.187 Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	SALDO TAHUN 2025
1	**Saldo Awal Investasi pada PT. Pembangunan Kepri**	**2.530.548.220,00**
	Penambahan	
	- Laba Tahun 2025 (Un-Audited)	323.079.823,00
	- Koreksi Saldo awal Ekuitas	10.963.757,00
	Saldo Akhir Investasi pada PT. Pembangunan Kepri	**2.864.591.800,00**
2	**Saldo Awal Investasi pada Perumda Air Minum Tirta Kepri**	**88.894.091.157,00**
	Pengurangan	
	- Koreksi Saldo awal Ekuitas	
	- Rugi tahun 2025 (Un-Audited)	(2.017.095.818,00)
	Penambahan	
	- Penyertaan Modal	
	- Koreksi Laba ditahan	(3.754.047.603,00)
	Saldo Akhir Investasi pada Perumda Air Minum Tirta Kepri	**83.122.947.736,00**
3	**PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)**	**12.000.000.000,00**
4	**Saldo Awal Investasi pada PT. Pelabuhan Kepri**	**35.161.043.520,00**
	Pengurangan	
	- Koreksi Saldo Awal Ekuitas	14.964.367,00
	- Koreksi (Rugi) Tahun Lalu	
	- Rugi tahun berjalan	(1.864.966.167,00)
	- Penyetoran Pend.	
	Saldo Akhir Investasi pada PT. Pelabuhan Kepri	**33.311.041.720,00**
5	**Saldo Awal Investasi pada PT. Energi Kepri (Perseroda)**	**5.000.000.000,00**
	Penambahan	
	- Rugi Tahun Berjalan	(320.664.748,00)
	- Koreksi Saldo awal Ekuitas	**0,00**
	Saldo Akhir Investasi pada PT. Energi Kepri (Perseroda)	**4.679.335.252,00**
	SALDO AKHIR PENYERTAAN MODAL	**135.977.916.508,00**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT. Energi Kepri (Perseroda) untuk mengelola kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Selanjutnya pada tanggal 24 November 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penyertaan modal untuk modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah

Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri.

Metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah metode ekuitas pada PDAM Tirta Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar 100%, PT. Pembangunan Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar 100% dan PT. Pelabuhan Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar 99,95% serta PT. Energi Kepri (Perseroda) dengan persentase kepemilikan sebesar 100,00%.

Metode biaya digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan persentase kepemilikan sebesar 0,99%.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp135.977.916.508,00 merupakan nilai penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Kepri sebesar Rp2.864.591.800,00 (metode ekuitas) sesuai dengan nilai kekayaan bersih/ekuitas per 31 Desember 2025 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2025, PDAM Tirta Kepri sebesar Rp83.122.947.736,00 (metode ekuitas) sesuai dengan nilai kekayaan bersih/ekuitas per 31 Desember 2025 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2025, PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp33.311.041.720,00 (metode ekuitas) sesuai dengan nilai kekayaan bersih/ekuitas per 31 Desember 2025 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2025, PT. Energi Kepri (Perseroda) sebesar Rp4.679.335.252,00 (metode ekuitas) sesuai dengan nilai kekayaan bersih/ekuitas per 31 Desember 2025 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2025, dan PT. Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp12.000.000.000,00 (metode biaya) sesuai dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi keuangan PDAM Tirta Kepri masih mengalami kerugian, akan tetapi nilai kerugian menurun dibandingkan tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025. Menurunnya nilai kerugian di tahun 2025 dikarenakan adanya kenaikan pendapatan operasional sebesar Rp2.473.647.084,00 dibandingkan pendapatan operasional di tahun sebelumnya.

PT. Pelabuhan Kepri di tahun 2025 masih mengalami kerugian, hal tersebut disebabkan menurunnya pendapatan operasional sebesar Rp581.588.848,00 dan meningkatnya beban sebesar Rp143.161.820,00 dibandingkan tahun 2024 yang berdasarkan Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Kepri per 31 Desember 2025.

Adapun langkah-langkah kedepannya yang akan dilakukan untuk memperbaiki keuangan BUMD Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

5.3.1.2.2.1 Melakukan perbaikan kelembagaan BUMD.
5.3.1.2.2.2 Melakukan pembinaan dan meningkatkan pengawasan BUMD secara rutin dan berkala dalam rangka upaya peningkatkan kinerja BUMD.
5.3.1.2.2.3 Melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5.3.1.2.2.4 Melakukan diversifikasi usaha guna menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat yang masih berkaitan dengan usaha inti BUMD.
5.3.1.2.2.5 Optimalisasi Sumber Daya dan Potensi Daerah.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, berupa :

a. Tanah
b. Peralatan dan Mesin
c. Gedung dan Bangunan
d. Jalan,Irigasi dan Jaringan
e. Aset Tetap Lainnya dan

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Perolehan setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*). Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa penggantian utama merupakan pembaharuan bagian dari aset tetap atau nilai pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.88 Kapitalisasi atas biaya pemeliharaan

No.	Aset Tetap	Nilai Pemeliharaan
1	Peralatan dan Mesin	50% dari nilai perolehan
2	Gedung dan Bangunan	10% dari nilai perolehan
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10% dari nilai perolehan

Pada saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset tetap sebesar Rp5.898.355.749.529,72 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nilai aset tetap per 31 Desember 2025 termasuk Aset Tetap yang bersumber dari pengelolaan dana BOSP, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Pemerintah, dan Hibah serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan rincian perjenis sebagai berikut:

Tabel 5.189 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Tanah	1.187.619.664.254,11	1.279.193.541.736,32
Peralatan dan Mesin	2.213.822.502.843,21	2.115.169.411.496,30
Gedung dan Bangunan	2.997.282.508.161,98	2.878.738.414.770,81
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.112.540.134.981,23	4.011.564.533.138,15
Aset Tetap Lainnya	301.651.608.245,70	279.218.737.302,70
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.005.424.963,95	25.295.808.664,94
Akumulasi Penyusutan	(4.943.566.093.920,46)	(4.549.816.476.728,71)
SALDO AKHIR ASET TETAP	**5.898.355.749.529,72**	**6.039.363.970.380,51**

5.3.1.3.1 Tanah

Tanah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.187.619.664.254,11	**1.279.193.541.736,32**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan berdasarkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap yang dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya yang berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi. Komponen biaya perolehan aset tetap tanah meliputi harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan lain-lain. Biaya Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Tanah per 1 Januari 2025 sebesar Rp1.279.193.541.736,32. Mutasi aset tetap Tanah selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.190 Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025

ASET TETAP TANAH				
I	**Saldo Awal ASET TETAP TANAH, 1 Januari 2025**			**1.279.193.541.736,32**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025	992.100.000,00	
	2	Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah Antar OPD	540.274.100,00	
	3	Penerimaan Hibah Aset Tetap Tanah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	25.621.282.700,00	
		Total Penambahan		**27.153.656.800,00**
III	**Pengurangan :**			
	1	Mutasi Keluar Aset Tetap Tanah Antar OPD	540.274.100,00	
	2	Penghapusan Hibah Aset Tetap Tanah	15.541.752.478,00	
	3	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Properti Investasi	102.645.507.704,21	
		Total Pengurangan		**118.727.534.282,21**
IV	**Saldo Akhir ASET TETAP TANAH, 31 Desember 2025**			**1.187.619.664.254,11**

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Tanah pada Tahun 2025 sebesar Rp27.153.656.800,00 berasal dari:

5.3.1.3.1.1 Belanja Modal Tanah tahun 2025 sebesar Rp992.100.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

5.3.1.3.1.2 Mutasi BMD Aset Tetap Tanah dari Dinas Kesehatan berdasarkan BAST Nomor 1857/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp540.274.100,00

5.3.1.3.1.3 Penerimaan Hibah Aset Tetap Tanah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya sebesar Rp25.621.282.700,00 antara lain:

a. Hibah Aset Tetap Tanah dari Masyarakat (SMAN 1 Selat Gelam, SMAN 1 Palmatak, SMAN 2 Palmatak, SMAN 1 Pulau Posek, SMAN 27 Batam, SMKN 10 Batam, SMKN 11 Batam & USB SMAN sebesar Rp25.461.782.700,00.
b. Hibah Aset Tetap Tanah dari Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan NPHD Nomor M/B/466/92/1.3.01/2025 dan BAST Nomor B/000.2.3.2/1145.2/BKAD-SET/2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp159.500.000,00

B. Pengurangan Aset Tetap Tanah pada Tahun 2025 sebesar Rp118.727.534.282,21 berasal dari:

1. Mutasi BMD Aset Tetap Tanah ke Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud berdasarkan BAST Nomor 1857/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp540.274.100,00
2. Penghapusan Aset Tetap Tanah disebabkan Hibah sebesar Rp15.541.752.478,00 antara lain:
   a. Penghapusan Aset Tetap Tanah berdasarkan SK Penghapusan Nomor 945 Tahun 2025, Tanggal 26 Agustus 2025 Tanah Lapangan Apel/Upacara dan NPHD Nomor B/000.4.3.2/518.2/DISHUB-SET/2025 ke Pemerintah Kabupaten Lingga pada Dinas Pehubungan sebesar Rp734.720.149,00
   b. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.831.908.990,00 antara lain:
      1) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan BAST Nomor B/000.2.4/310.2/BKAD-SET/2025 dan B/166/032/III/2025 pada sebesar Rp3.442.150.000
      2) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Yayasan Hidayatullah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp6.326.000,00
      3) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Lembaga Penyiaran Publik TVRI Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp2.727.000,00
      4) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp41.500.000,00
      5) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp10.000.000,00
      6) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Pemerintah Kabupaten Lingga berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp272.760.400,00
      7) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1318 Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp2.050.000,00
      8) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1318 Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp6.800.000,00
      9) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi berdasarkan Keputusan Gubernur

Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp47.595.590,00

10) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp14.538.397,00

c. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp10.960.584.942,00 antara lain:

1) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan BAST Nomor B/032/131.3/BKAD-SET/2024 dan NPHD Nomor B/032/130.3/BKAD-SET/2024 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp4.881.984.942,00
2) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp4.166.400.000,00
3) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Pangkalan TNI Angkatan Udara Raja Haji Fisabilillah (Tanah Untuk Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1318 Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp1.912.200.000,00

3. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Properti Investasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1183 Tahun 2025 sebesar Rp102.645.507.704,21 antara lain:
   a. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp101.669.191.704,21
   b. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp976.316.000,00

C. Saldo akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.187.619.664.254,11.

Adapun rincian mutasi aset tetap tanah per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.191 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 - 5*
Dinas Pendidikan	212.245.860.504,70	0,00	25.461.782.700,00	0,00	237.707.643.204,70
Dinas Kesehatan	540.274.100,00	0,00	0,00	540.274.100,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	2.000.000.000,00	0,00	540.274.100,00	0,00	2.540.274.100,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	759.863.754.627,97	992.100.000,00	159.500.000,00	112.629.776.646,21	648.385.577.981,76
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.915.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.915.000.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,	1.753.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.500.000,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 - 5*
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana					
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.774.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.774.880.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.309.166.300,00	0,00	0,00	0,00	1.309.166.300,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	50.214.916.983,00	0,00	0,00	734.720.149,00	49.480.196.834,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.027.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.027.350.000,00
Dinas Pariwisata	2.579.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.579.000.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	198.407.288.648,65	0,00	0,00	4.822.763.387,00	193.584.525.261,65
Badan Pendapatan Daerah	8.962.550.572,00	0,00	0,00	0,00	8.962.550.572,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penghubung Daerah	29.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.600.000.000,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**1.279.193.541.736,32**	**992.100 .000,00**	**26.161.556.800,00**	**118.727.534.282,21**	**1.187.619.664.254,11**

Dari Saldo Akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 Rp1.187.619.664.254,11 terdapat Aset Tetap Tanah sebanyak 828 persil dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.192 Rekapitulasi Rincian Aset Tetap Tanah

No.	Klasifikasi	Dokumen Kepemilikan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1	Bidang Tanah	Bersertipikat an. Provinsi Kepulauan Riau	562	782.695.081.905,82
		Bersertipikat an. Pihak Lain	43	23.709.574.200,00
		Belum bersertipikat	217	379.987.494.855,29
2	Bukan Bidang Tanah	Bersertipikat an. Provinsi Kepulauan Riau	6	1.227.513.293,00
		Jumlah Total	**828**	**1.187.619.664.254,11**

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 6 (enam) persil yang bukan merupakan bidang tanah sebesar Rp1.227.513.293,00. Selanjutnya akan dilakukan koreksi dan kapitalisasi atas aset tetap tanah tersebut ke dalam aset induk. Rincian Aset Tetap Tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 5**.

D. Permasalahan Aset Tetap Tanah eks PT Antam

Pada tahun 2006 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima hibah berupa aset tanah Penarik I dengan luas ± 22,9464 Ha dari Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan BAST Nomor 13/BA/ADM-PEM/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006.

Tabel 5.193 Bidang Tanah Penarik II

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Register	Luas (Ha)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Asal Usul	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	000373	48,7169 (Nilai perolehan awal 60,2822)	2006	Penarik II Senggarang Tanjungpinang	Hibah	1 Hibah dari Bintan Tahun 2006 berdasarkan BA Nomor 13/BA/ADM-PEM/VI/2006 2 Sudah dihibahkan kepada instansi Vertikal

Pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kejaksaan Tinggi seluas ± 4 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 0313.a/KDhKepri.011/11.10 tanggal 18 November 2010 tentang Serah Terima Lahan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau untuk Pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau di Senggarang Tanjungpinang. Kemudian pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menghibahkan tanah di Penarik II kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 3 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B/032/2303/BKAD-SET/2022, Nomor B-1023/L.10/Cum.1/09/2022 tanggal 26 September 2022 senilai Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah).

Pada Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kementerian Sosial seluas ± 3 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 064.a/Kdh Kepri.030/2.11 tanggal 24 Februari 2011 tentang Serah Terima Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Sosial RI untuk Pembangunan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2012 terdapat Akta Hibah Nomor 25/2012 tanggal 22 Maret 2012 antara Gubernur Kepulauan Riau selaku pemberi hibah dan Menteri Sosial Republik Indonesia selaku penerima hibah yang menyatakan tanah yang menjadi objek serah terima berdasarkan hasil ukur atau luas tanah yang dapat disertifikatkan adalah seluas 2,5 Ha (dua koma lima hektar), lalu terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463 Tahun 2013 tentang Kehutanan di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau belum bisa dilakukan sertifikasi sehingga pada tahun 2015 dibuat Berita Acara Pembatalan Hibah terhadap sisa tanah seluas 0,5 Ha (nol koma lima hektar) berdasarkan Berita Acara Nomor 591/325.4/SET tanggal 30 April 2015 tentang Pembatalan Hibah Sisa Tanah Lahan Pembangunan Rumah Perlindungan

dan Trauma Center (RPTC) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Sosial RI.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seluas 12.476 m² (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nilai Rp449.136.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 120/1531/BPKAD/SET tanggal 2 September 2019.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kementerian Agama Republik Indonesia seluas 8.177 m² (delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan nilai Rp294.371.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 120/1532/BPKAD/SET tanggal 2 September 2019.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik I kepada Komando Resor Militer 033 / WIRA PRATAMA seluas 43.000 m² (empat puluh tiga ribu meter persegi) dengan nilai Rp1.548.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 120/528.6/BPKAD-SET/2020 tanggal 1 April 2020.

Kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik I kepada Komando Resor Militer 033 / WIRA PRATAMA seluas 8.000 m2 (delapan ribu meter persegi) dengan nilai Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B/032/2304/BKAD-SET/2022 tanggal 26 September 2022.

Selanjutnya untuk tindaklanjut terhadap wilayah penarik I dengan sisa lahan 17,8464 Ha telah dihibahkan pada Tahun 2024 kepada Komando Resor Militer 033/WIRA PRATAMA berdasarkan BAST Nomor B/032/688.3/BKAD-SET/2024 dan Nomor 01/BAST/VIII/2024.

Terhadap wilayah Penarik II dengan lahan 48,7169 Ha akan diselesaikan bersama dengan *stakeholder* terkait yang terdiri dari:

a. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;
d. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
e. Pemerintah Kota Tanjungpinang;
f. Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang
g. Pemerintah Kabupaten Bintan;
h. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;
i. PT. Aneka Tambang Tbk.

Tugas utama dari Tim tersebut diatas adalah untuk menyelesaikan permasalahan atas lahan yang dikuasai oleh pihak lain sehingga status terhadap lahan tersebut menjadi jelas.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.213.822.502.843,21	**2.115.169.411.496,30**

Peralatan dan Mesin mencakup mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, peralatan lainnya yang nilainya signifikan serta masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. Komponen Biaya Perolehan aset tetap peralatan dan mesin meliputi pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2025 sebesar Rp2.115.169.411.496,30 dengan mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.194 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN				
I	**Saldo Awal ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN, 1 Januari 2025**			**2.115.169.411.496,30**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025	81.499.424.632,00	
	2	Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD	5.472.732.567,00	
	3	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Ekstrakomptabel	650.000,00	
	4	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.896.129,00	
	5	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya	183.637.089,00	
	6	Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa	1.223.573.776,26	
	7	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin	558.187.500,00	
	8	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja (Tunda Bayar 2025)	4.550.677.506,00	
	9	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Lain-lain BLUD	272.146.000,00	
	10	Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan Dan Mesin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	46.144.156.095,65	
	11	Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	124.419.489,00	
	12	Koreksi terkait Hibah CSR	250.177.000,00	
	Total Penambahan :			**140.304.677.783,91**
III	**Pengurangan :**			
	1	Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD	5.472.732.567,00	
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa	86.053.937,00	
	3	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel	8.216.653.430,00	
	4	Reklasifikasi keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan	132.330.850,00	
	5	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain	15.158.609.321,00	
	6	Pelunasan Utang Belanja Tahun 2024	9.805.319.060,00	
	7	Penghapusan BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin	292.985.272,00	
	8	Mutasi Keluar atas Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.441.277.000,00	
	9	Koreksi terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Potensi Kelebihan Pembayaran	45.625.000,00	
	Total Pengurangan			**41.651.586.437,00**
IV	**Saldo Akhir ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN, 31 Desember 2025**			**2.213.822.502.843,21**

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp140.304.677.783,91 berasal dari:

5.3.1.3.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp81.499.424.632,00 antara lain:

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp33.195.037.483,00
b. Dinas Kesehatan sebesar Rp322.620.699,00
c. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp8.781.904.053,00
d. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp15.248.853.800,00
e. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp360.315.351,00
f. Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebesar Rp1.800.833.712,00
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.320.445.701,00
h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp369.833.000,00
i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp47.663.499,00
j. Dinas Sosial sebesar Rp320.889.570,00
k. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp1.282.128.900,00
l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp322.712.290,00
m. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp692.415.641,00
n. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp468.693.860,00
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp14.576.000,00
p. Dinas Perhubungan sebesar Rp73.058.520,00
q. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp235.397.999,00
r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp70.301.103,00
s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.030.300,00
t. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp155.980.000,00
u. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp44.222.200,00
v. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp352.144.851,00
w. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp83.534.300,00
x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.271.046.429,00
y. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar Rp4.390.000,00
z. Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp60.051.000,00
aa. Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp21.983.550,00
bb. Biro Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp4.384.500,00
cc. Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp20.442.594,00
dd. Biro Umum sebesar Rp6.250.926.144,00
ee. Biro Hukum sebesar Rp62.472.550,00
ff. Inspektorat Daerah sebesar Rp830.963.057,00
gg. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp998.620.070,00
hh. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.401.871.119,00
ii. Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri sebesar Rp344.076.997,00
jj. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp1.128.377.850,00
kk. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp63.825.000,00
ll. Sekretariat DPRD sebesar Rp2.967.983.000,00
mm. Badan Penghubung Daerah sebesar Rp501.417.940,00

5.3.1.3.2.2 Mutasi Masuk antar OPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.472.732.567,00 antara lain:

a. Mutasi BMD tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 02/BAP-ASET/X/2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Fortuner 2.7 SRZ BP 1026 A Tanggal 20 Oktober 2025 pada Inspektorat Daerah sebesar Rp563.400.000,00
b. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/PENGALIHAN ASET/SAT PP/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Innova Zenix 2.0 V HV CVT BP 1918 AA, *Handy Talky* dan *Tablet Apple* IPAD Pro 128 Gb pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp526.550.000,00
c. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 berupa Tablet PC Ipad Air 3 2019 64 GB pada Dinas Pariwisata sebesar Rp10.065.000,00
d. Pada Badan Penghubung sebesar Rp602.690.909,00 antara lain:
    1) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan BAST Nomor BAST 02/BA-ST/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2024 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Innova G A/T BP 1130 A sebesar Rp188.090.909,00
    2) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor BAST 01/BA-ST/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Zenix 2.0 G CVT BP 1445 A sebesar Rp414.600.000,00
e. Mutasi Masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Hilux Pick Up STD 4x2 BP 8105 A dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berdasarkan BAST Nomor B/000.2.4/1/B.PEMDA-SET/2025 Tanggal 14 Juli 2025 pada Biro Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp150.450.000,00
f. Mutasi Masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 04/ BA-ST/IX/2025 Tanggal 8 September 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Innova G A/T BP 1687 A pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp211.070.200,00
g. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Sosial berupa Kendaraan Roda 4 Honda/CRV 1.5 Turbo BP 1148 A berdasarkan BAST Nomor 000.2.3.2/85/DINSOS/2025 Tanggal 26 Mei 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp569.000.000,00
h. Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.106.416.458,00 antara lain:
    1) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Isuzu -NQR 71 EC BP 7035 A sebesar Rp736.450.000,00
    2) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G BC BP 7508 A sebesar Rp441.940.458,00
    3) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Isuzu -NQR 71 EC BP 7034 A sebesar Rp736.450.000,00
    4) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025

tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 KIA Pregio MT BM 1022 EP/BP 1762 A sebesar Rp191.576.000,00

i. Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sebesar Rp449.190.000,00 antara lain:
   1) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 berupa Toyota Innova - BP 1199 A Tanggal 13 Oktober 2025 sebesar Rp251.050.000,00
   2) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor B/000.2.4/10/B.PEMDA/2025 berupa Toyota New Avanza 1.3 G - BP 1310 A Tanggal 14 Juli 2025 sebesar Rp176.150.000,00
   3) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 01/BAST-BPPP/2025 berupa Tablet P.C Tanggal 26 Mei 2025 sebesar Rp21.990.000,00

j. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 02/BAST/ XII/ 2024 tanggal 27 Desember 2024 Toyota Avanza BP 1442 A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp283.900.000,00.

5.3.1.3.2.3 Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomptabel ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*Handy Talky*) untuk dimutasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp650.000,00

5.3.1.3.2.4 Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Instalasi Listrik (Pengadaan Rangka Besi Baliho/Spanduk) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp24.896.129,00

5.3.1.3.2.5 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp183.637.089,00 yang berasal dari Belanja BOSP Tahun 2026 sebesar Rp80.777.089,00 dan Pengadaan *Marching Band* SMAN 29 Batam pada Dinas pendidikan sebesar Rp102.860.000,00

5.3.1.3.2.6 Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.223.573.776,26 antara lain:

a. Kapitalisasi dari Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Partisi dan Meja Resepsionis) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp199.800.000,00
b. Kapitalisasi dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (*Camila Relaxing Chair Sofabed* Multifungsi) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.843.820,00
c. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp333.176.864,26 antara lain:
   1) Kapitalisasi dari Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Partisi dan Backdrop) sebesar Rp167.328.364,26
   2) Kapitalisasi dari Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian berupa Gerobak Sampah sebesar Rp3.263.400,00
   3) Kapitalisasi dari Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Lemari Besi/ Metal, Meja Kerja Bangku, Karpet Mushola, Meja Kerja Las, Meja Pemotongan Plat, Podium) sebesar Rp162.585.100,00
d. Kapitalisasi dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer berupa *External Hardisk* pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.940.000,00

e. Kapitalisasi dari Beban Bahan Untuk Kegiatan kantor lainnya berupa Kipas Angin kedalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib sebesar Rp49.955.994,00
f. Kapitalisasi dari Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Papan Nama Instansi) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp138.945.000,00
g. Kapitalisasi dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (sofa) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp13.764.000,00
h. Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp274.020.000,00 antara lain:
   1) Kapitalisasi dari Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Partisi) sebesar Rp206.500.000,00
   2) Kapitalisasi dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.520.000,00
i. Pada Dinas Pendidikan sebear Rp208.128.098,00 antara lain:
   1) Kapitalisasi dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Karpet dan Kursi Ruang Tunggu) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp64.407.000,00
   2) Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOSP ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp143.721.098,00

5.3.1.3.2.7 Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp558.187.500,00 antara lain:

a. Koreksi Kurang Catat atas Belanja Bahan Pendukung Tahun 2013 (Untuk diserahkan ke Pihak ketiga) berupa Mesin Kapal pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp545.600.000,00
b. Koreksi Kurang Catat atas Temuan Inspektorat Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 (SMKN 4 Tanjungpinang) sebesar Rp12.587.500,00

5.3.1.3.2.8 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp4.550.677.506,00 antara lain:

a. Utang Belanja Modal Pembuatan Tenda Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp298.853.625,00
b. Utang Belanja Modal *Personal Computer* (laptop) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah sebesar Rp83.400.001,00
c. Utang Belanja Modal *Personal Computer* Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2 Unit Laptop dan 2 Unit P.C) sebesar Rp81.600.001,00
d. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp70.815.000,00 antara lain:
   1) Utang Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Honda ADV 160 ABS) sebesar Rp39.930.000,00
   2) Utang Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Honda Vario 160 ABS) sebesar Rp30.885.000,00
e. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp157.264.800,00 antara lain:
   1) Utang Belanja Modal Personal Komputer sebesar Rp86.602.200,00
   2) Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga (*Home use*) sebesar Rp11.710.500,00
   3) Utang Belanja Modal Mebel sebesar Rp13.453.200,00
   4) Utang Belanja Modal AC sebesar Rp20.468.400,00
   5) Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp25.030.500,00
f. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp42.957.000,00 antara lain:

1) Utang Belanja Modal Personal Komputer Lainnya (Printer) sebesar Rp10.545.000,00
2) Utang Belanja Modal Personal Komputer Lainnya (PC-Laptop) sebesar Rp32.412.000,00

g. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp110.115.108,00 antara lain:
1) Utang Belanja Modal Alat Pendingin (AC Split 2PK) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp40.515.000,00
2) Utang Belanja Modal Alat Pendingin Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp69.600.108,00

h. Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp97.435.800,00 antara lain:
1) Utang Belanja Modal Pengadaan Tenda Kerucut 3x3 Meter sebesar Rp22.427.550,00
2) Utang Belanja Modal Pengadaan *Sound System* sebesar Rp20.962.350,00
3) Utang Belanja Modal Pengadaan Tenda Kerucut 5x5 Meter sebesar Rp44.888.400,00
4) Utang Belanja Modal Pengadaan Kabel Roll 100 Meter sebesar Rp9.157.500,00

i. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp33.189.000,00 antara lain:
1) Utang Belanja Modal *Personal Computer* (Laptop) Sebesar Rp17.094.000,00
2) Utang Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Kamera Digital) Sebesar Rp16.095.000,00

j. Utang Belanja Modal *Personal Computer* (Laptop) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib sebesar Rp55.611.000,00

k. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp116.422.350,00 antara lain:
1) Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya (Neraca Analitik, *Water Sample*) sub kegiatan pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi UPTD Laboratorium sebesar Rp62.160.000,00
2) Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya (*Logic Probe*) sub kegiatan pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi UPTD Laboratorium sebesar Rp54.262.350,00

l. Utang Belanja Modal *Personal Computer* (Laptop dan Komputer) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp74.250.001,00

m. Utang Belanja Modal *Personal Computer* Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.950.000,00

n. Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp552.058.630,00 antara lain:
1) Utang Belanja Modal *Personal Computer* (PC Unit) pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp136.132.000,00
2) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* (Printer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp72.840.000,00
3) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* (Printer Pusat) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp28.620.000,00
4) Utang Belanja Modal *Personal Computer* pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp91.150.000,00
5) Utang Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Rak Besi) pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sebesar Rp106.500.000,00

6) Utang Belanja Modal Personal Computer (PC Unit Tanjung Batu dan Bintan) sebesar Rp53.316.630,00
7) Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Laptop Batam) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp37.700.000,00
8) Utang Belanja Modal *Personal Computer* (Tablet PC Pusat) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp25.800.000,00

o. Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp446.480.850,00 antara lain:
1) Utang Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan APJ/LPJU di Natuna Rp315.240.000,00
2) Utang Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar pada Pekerjaan Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Tanjungpinang (Lanjutan) TA 2025 Rp131.240.850,00

p. Utang Belanja Modal Alat Pendingin pada Biro Umum sebesar Rp138.500.000,00

q. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.141.774.340,00 antara lain:
1) Utang Belanja Modal Pengadaan *Meubelair* pada SMAN 1 Seluan sebesar Rp64.757.400,00
2) Utang Belanja Modal Peralatan Jaringan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp21.040.000,00
3) Utang Belanja Modal Meja Rapat Pejabat - Meja Rapat Pejabat Sub Kegiatan Pengadaan *Meubelair* sebesar Rp29.415.000,00
4) Utang Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan *Meubelair* Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 11 Batam (NON ASTACITA) sebesar Rp159.160.000,00
5) Utang Belanja Modal Pengadaan Alat Praktik Siswa KK-Teknik Elektronika Industri SMKN 11 Batam sebesar Rp500.721.000,00
6) Utang Belanja Modal Pengadaan Alat Praktik Siswa KK-Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 11 Batam sebesar Rp501.720.000,00
7) Utang Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan *Meubelair* Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMKN 1 Lingga sebesar Rp90.001.020,00
8) Utang Belanja Modal *Meubelair* SLB Negeri 2 Batam sebesar Rp199.150.000,00
9) Utang Belanja Modal Pengadaan *Meubelair* SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp95.615.400,00
10) Utang Belanja Modal Pengadaan *Meubelair* SMAN 1 Bintan Utara sebesar Rp98.000.000,00
11) Utang Belanja Modal Personal Komputer sebesar Rp42.992.520,00
12) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sub kegiatan pengadaan peralatan mesin lainnya sebesar Rp326.215.000,00
13) Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp12.987.000,00

5.3.1.3.2.9 Reklasifikasi dari Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp272.146.000,00

5.3.1.3.2.10 Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya sebesar Rp46.144.156.095,65 antara lain:

a. Penerimaan Hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan BAST Nomor KN.01.08/C1/9364/2024 Tanggal 20 Desember 2024 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp1.310.000.000,00

b. Penerimaan Hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan BAST Nomor KN.02.07/I/2114/2022 Tanggal 22 Mei 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib sebesar Rp37.404.701.098,00
c. Penerimaan Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan BAST Nomor B.1384/ PSDKP.1/PL.450/ III/2025 Tanggal 24 Maret 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp197.377.000,00
d. Penerimaan Hibah dari Bank Bukopin cabang Batam berdasarkan BAST Nomor 001/BAST/2025 Tanggal 2 Januari 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate - L 4 X 2 A/T BP 1447 A pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp316.300.000,00
e. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.915.777.997,65 antara lain:
    1) Penerimaan Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMK dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN Non BLUD) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp423.500.000,00
    2) Penerimaan Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMAN) sebesar Rp2.111.335.199,65
    3) Penerimaan Hibah dari Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) sebesar Rp64.485.698,00
    4) Koreksi pengakuan pendapatan dan belanja yang bersumber dari program revitalisasi pendidikan dasar dan menengah dan bantuan pemerintah lainnya sebesar Rp4.316.457.100,00

5.3.1.3.2.11 Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp124.419.489,00 antara lain:

a. Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (1 Unit Printer) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri sebesar Rp13.199.999,00
b. Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp39.450.000,00 antara lain:
    1) Kapitalisasi dari Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (*Router Mikrotik/Cloude Core Series*/ CCR2116-12G-4S+) sebesar Rp17.500.000,00
    2) Kapitalisasi dari Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah (DRONE DJI / DJI MINI 4 PRO DRONE COMBO PLUS (RC 2) sebesar Rp21.950.000,00
c. Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp32.492.790,00 antara lain:
    1) Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi - Alat Kantor Lainnya (Teralis) sebesar Rp16.516.800,00
    2) Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi - Peralatan Studio Audio (*Microphone wireless* sebesar Rp990.990,00
    3) Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi - Peralatan Studio Video dan Film (*Bateray Pack Camera*, Lampu Blitz Kamera, Lensa Kamera,Tripod Camera) sebesar Rp14.985.000,00

d. Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp39.276.700,00 antara lain:
   1) Kapitalisasi dari Utang Belanja (Tunda Bayar) Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film (CCTV - *Camera Control Television System*) sebesar Rp23.276.700,00
   2) Kapitalisasi dari Utang Belanja (Tunda Bayar) Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi berupa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-Lain sebesar Rp16.000.000,00

5.3.1.3.2.12 Koreksi kurang catat hibah CSR Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp250.177.000,00 yang bersumber dari:

a. Hibah CSR dari PT PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau berupa PC Unit berdasarkan BAST Nomor 1826.BA/CSR.00.01/F1000000/2024 Tanggal 25 April 2024 pada SMKN 2 Lingga - Dinas Pendidikan sebesar Rp170.177.000,00.
b. Hibah CSR dari Universitas International Batam berdasarkan BAST Nomor 422/030/SMKN10 BTM/2025 Tanggal 25 April 2025 berupa PC sebanyak 32 Unit pada SMKN 10 Batam sebesar Rp80.000.000,00.

B. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp41.651.586.437,00 berasal dari:

1. Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD sebesar Rp5.472.732.567,00 antara lain:
   a. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAST-BPPP/2025 Tanggal 26 Mei 2025 (1 Unit Tablet PC) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp21.990.000,00
   b. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kendaraan Roda 4 Honda/CRV 1.5 Turbo BP 1148 A) berdasarkan BAST Nomor 000.2.3.2/85/DINSOS/2025 Tanggal 26 Mei 2025 pada Dinas Sosial sebesar Rp569.000.000,00
   c. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Pariwisata berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 (Tablet PC Ipad Air 3 2019 64 GB) pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.065.000,00
   d. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Innova BP 1199 A pada Biro Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp251.050.000,00
   e. Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar Rp326.600.000,00 antara lain:
      1) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor B/000.2.4/1/B.PEMDA-SET/2025 Tanggal 14 Juli 2025 berupa kendaraan Roda 4 Toyota Hilux *Pick Up* STD 4x2 - BP 8105 A Daerah sebesar Rp150.450.000,00
      2) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor B/000.2.4/10/B.PEMDA-SET/2025 Tanggal 5 Juni 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota New Avanza 1.3 G - BP 1310 A sebesar Rp176.150.000,00
   f. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp526.550.000,00 antara lain:

1) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/PENGALIHAN ASET/SAT PP/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2025 berupa kendaraan Roda 4 Toyota Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista sebesar Rp508.800.000,00
2) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/PENGALIHAN ASET/SAT PP/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2025 berupa *Handy Talky* (Harve W89) sebesar Rp650.000,00
3) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/PENGALIHAN ASET/SAT PP/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2025 berupa Apple/IPAD PRO WIFI ONLY 128 Gb sebesar Rp17.100.000,00

g. Pada Biro Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp3.767.477.567,00 antara lain:
1) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Inspektorat Daerah berdasarkan BAST Nomor 02/BAP-ASET/X/2025 (Kendaraan Roda 4 Toyota Fortuner 2.7 SRZ BP 1026 A) Tanggal 20 Oktober 2025 sebesar Rp563.400.000,00
2) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Penghubung Daerah berdasarkan BAST Nomor 02/BA-ST/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2024 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Innova G A/T BP 1130 A sebesar Rp188.090.909,00
3) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Penghubung Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BA-ST/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Zenix 2.0 G CVT BP 1445 A sebesar Rp414.600.000,00
4) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan BAST Nomor 04/BA-ST/IXI 2025 Tanggal 8 September 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Innova G A/T BP 1687 A sebesar Rp211.070.200,00
5) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Isuzu -NQR 71 EC BP 7035 A sebesar Rp736.450.000,00
6) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G BC BP 7508 A sebesar Rp441.940.458,00
7) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Isuzu -NQR 71 EC BP 7034 A sebesar Rp736.450.000,00
8) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 KIA Pregio MT BM 1022 EP/BP 1762 A sebesar Rp191.576.000,00
9) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan BAST Nomor 02/BAST/XII/ 2024 tanggal 27 Desember 2024 Toyota Avanza BP 1442 A sebesar Rp283.900.000,00

5.3.1.3.2.13 Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp86.053.937,00 antara lain:

a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp82.075.017,00
b. Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.978.920,00 antara lain:
   1) Reklasifikasi Aset Tetap peralatan dan Mesin ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp2.900.000,00
   2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp1.078.920,00

5.3.1.3.2.14 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp8.216.653.430,00 antara lain:

a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Inspektorat Daerah sebesar Rp4.600.000,00
b. Reklasifikasi Aset Tetap peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp650.000,00
c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp3.108.000,00
d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp666.000,00
e. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp33.990.000,00
f. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Biro Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp4.384.500,00
g. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp30.482.701,00
h. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.979.000,00
i. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.940.000,00
j. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp8.073.901,00
k. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp1.542.900,00
l. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp166.163.954,00 antara yang bersumber dari:
   1) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari BLUD sebesar Rp57.182.654,00
   2) Aset Ekstrakomptabel bersumber dari APBD sebesar Rp83.416.500,00
   3) Aset Ekstrakomptabel bersumber dari Hibah Kementerian Kesehatan sebesar Rp25.564.800,00
m. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp13.326.660,00
n. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp25.666.290,00
o. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.063.700,00
p. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp10.077.200,00
q. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Perhubungan sebesar Rp612.720,00

r. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Biro Umum sebesar Rp361.438.644,00

s. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp7.516.363.750,00 yang bersumber dari:
   1) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari APBD sebesar Rp1.948.634.610,00
   2) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari BOSP sebesar Rp4.001.753.322,00
   3) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari BLUD sebesar Rp421.144.240,00
   4) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMKN Non BLUD sebesar Rp330.927.380,00
   5) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pogram Revitalisasi SMAN sebesar Rp773.718.500,00
   6) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SLB sebesar Rp40.185.698,00

t. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp7.677.360,00

u. Koreksi kurang catat Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp18.846.150,00 antara lain yaitu Hibah Aset dari PT PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepri sebesar Rp4.966.150,00 berdasarkan BAST Nomor 1826.BA/CSR.00.01/F1000000/2024 Tanggal 25 April 2024 pada SMKN 2 Lingga dan Hibah Aset dari PT. Agung Automall sebesar Rp13.880.000,00 berdasarkan BAST Nomor 0173/AT-BTC/XII/2025 Tanggal 28 Mei 2025 pada SMAN 26 Batam.

5.3.1.3.2.15 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp132.330.850,00 antara lain:

a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar Rp1.090.000,00

b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp131.240.850,00

5.3.1.3.2.16 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain sebesar Rp15.158.609.321,00 antara lain:

a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain atas usulan pemusnahan pada Inspektorat Daerah sebesar Rp258.038.100,00

b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain atas usulan pemusnahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp596.776.018,00

c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya berdasarkan usulan penjualan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial sebesar Rp313.488.000,00

d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnnya Akibat usulan pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp387.747.484,00

e. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya akibat usulan pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp859.659.000,00

f. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata sebesar Rp37.053.500,00

g. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp54.620.000,00
h. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan penjualan BMD Rusak Berat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp500.000.000,00
i. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya akibat usulan pemusnahan Barang Milik Daerah pada Biro Administrasi Pimpinan Rp732.349.200,00
j. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan penghapusan Barang Milik Daerah hasil inventarisasi tidak diketemukan pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp471.934.380,00
k. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp350.443.360,00
l. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp200.991.500,00
m. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan penghapusan Kendaraan Eks Riau pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.018.936.230,00
n. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan penghapusan pada Biro Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp9.141.218.549,00
o. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan pada Kuasa Pengguna Barang Dinas Pendidikan (SMK Negeri 1 Tanjungpinang) sebesar Rp235.354.000,00

5.3.1.3.2.17 Pelunasan Utang Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.805.319.060,00 antara lain :

a. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.923.250.000,00
b. Pelunasan Utang Belanja Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp642.000.000,00
c. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp14.576.000,00
d. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp79.650.000,00
e. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp613.025.000,00
f. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp77.285.000,00
g. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp536.550.000,00
h. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp277.685.000,00
i. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp976.826.960,00

j. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp11.700.000,00
k. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp16.430.000,00
l. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp20.800.000,00
m. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp12.045.000,00
n. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp34.410.000,00
o. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp336.100.100,00
p. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp342.192.000,00
q. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp80.450.000,00
r. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp22.140.000,00
s. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp156.700.000,00
t. Pelunasan Utang Belanja Modal Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp77.799.500,00
u. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp681.690.000,00
v. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Biro Umum sebesar Rp1.113.100.000,00
w. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp758.914.500,00

5.3.1.3.2.18 Penghapusan BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp292.985.272,00 antara lain:

a. Penghapusan BMD karena Hilang/Kecurian berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp49.300.000,00
b. Penghapusan BMD karena Hilang/Kecurian berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Badan Penghubung Daerah sebesar Rp14.520.000,00
c. Penghapusan BMD karena Hilang/Kecurian berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp84.753.000,00
d. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp56.803.952,00
e. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp31.207.820,00
f. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp9.550.000,00

g. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp21.087.000,00
h. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Dinas Sosial sebesar Rp25.763.500,00

8. Mutasi Keluar atas Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.441.277.000,00 antara lain:
   a. Hibah BMD ke Koperasi Serba Usaha Nelayan Bintan berdasarkan BAST Nomor B/000.2.3.2/608.1/BKAD-SET/2025 Tanggal 4 Juli 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp197.377.000,00 yang berasal dari Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan BAST Nomor B.1384/ PSDKP.1/PL.450/ III/2025 Tanggal 24 Maret 2025
   b. Hibah BMD pada Biro Umum berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kota Batam berdasarkan BAST Nomor B/000.2.3.2/476.3/BKAD-SET/2025, Nomor 159.1/900.1.4.3/V/2025 Tanggal 19 Mei 2025 sebesar Rp2.243.900.000,00
9. Koreksi terkait Temuan BPK atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Potensi Kelebihan Pembayaran sebesar Rp45.625.000,00 antara lain:
   a. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Mebel pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.567.000,00
   b. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran Lainnya dan Alat Kedokteran Umum sebesar Rp42.058.000,00 (Rp18.550.000,00+Rp23.508.000,00) sebelum pajak, sebagai akibat dari kekurangan volume pekerjaan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud.

C. Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2025 senilai Rp2.213.822.502.843,21.

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.195 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	686.062.853.497,19	33.195.037.483,00	9.712.082.024,65	8.529.478.400,00	720.440.494.604,84
Dinas Kesehatan	58.699.827.050,60	322.620.699,00	49.950.000,00	80.863.200,00	58.991.534.549,60
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	331.051.512.639,53	8.781.904.053,00	37.510.268.092,00	508.355.954,00	376.835.328.830,53
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	116.463.863.670,00	15.248.853.800,00	1.582.146.000,00	661.898.000,00	132.632.965.470,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	30.155.324.458,00	360.315.351,00	112.910.130,00	156.700.000,00	30.471.849.939,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	6.120.651.155,00	1.800.833.712,00	0,00	976.826.960,00	6.944.657.907,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.511.884.483,00	1.320.445.701,00	81.600.001,00	1.238.776.018,00	6.675.154.167,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	9.635.095.435,00	369.833.000,00	650.000,00	864.193.000,00	9.141.385.435,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.555.034.289,00	47.663.499,00	0,00	14.679.000,00	15.588.018.788,00
Dinas Sosial	4.883.779.575,00	320.889.570,00	0,00	908.251.500,00	4.296.417.645,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.211.238.539,00	1.282.128.900,00	654.362.172,26	308.167.701,00	5.839.561.910,26

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.976.713.686,00	322.712.290,00	852.900.000,00	380.260.720,00	6.772.065.256,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	35.453.856.451,50	692.415.641,00	199.385.320,00	613.691.000,00	35.731.966.412,50
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.325.615.875,76	468.693.860,00	255.367.350,00	245.525.980,00	20.804.151.105,76
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.214.707.007,00	14.576.000,00	0,00	14.576.000,00	9.214.707.007,00
Dinas Perhubungan	46.314.050.252,51	73.058.520,00	446.480.850,00	141.403.570,00	46.692.186.052,51
Dinas Komunikasi dan Informatika	22.217.615.023,00	235.397.999,00	566.000.000,00	478.112.484,00	22.540.900.538,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.202.708.150,00	70.301.103,00	0,00	28.873.901,00	5.244.135.352,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.580.327.872,00	3.030.300,00	0,00	0,00	8.583.358.172,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.775.999.553,00	155.980.000,00	100.375.800,00	519.370.000,00	10.512.985.353,00
Dinas Kebudayaan	10.729.084.113,70	0,00	0,00	54.620.000,00	10.674.464.113,70
Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	20.403.870.992,00	44.222.200,00	33.189.000,00	0,00	20.481.282.192,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	69.887.986.380,53	352.144.851,00	742.977.000,00	416.705.969,00	70.566.402.262,53
Dinas Pariwisata	5.838.856.913,00		10.065.000,00	37.053.500,00	5.811.868.413,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.278.255.064,10	83.534.300,00	42.957.000,00	77.285.000,00	10.327.461.364,10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.870.079.126,00	1.271.046.429,00	70.815.000,00	866.334.000,00	9.345.606.555,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.358.171.355,00	4.390.000,00	0,00	327.690.000,00	4.034.871.355,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	4.270.671.869,00	60.051.000,00	0,00	506.344.380,00	3.824.378.489,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5.925.732.407,06	21.983.550,00	0,00	0,00	5.947.715.957,06
Biro Perekonomian dan Pembangunan	5.026.034.102,00	4.384.500,00	150.450.000,00	255.434.500,00	4.925.434.102,00
Biro Organisasi	2.284.625.225,00	0,00	0,00	0,00	2.284.625.225,00
Biro Administrasi Pimpinan	11.242.699.570,50	20.442.594,00	0,00	829.147.200,00	10.433.994.964,50
Biro Umum	292.634.730.416,00	6.250.926.144,00	587.690.000,00	16.627.134.760,00	282.846.211.800,00
Biro Hukum	2.182.409.807,00	62.472.550,00	0,00	0,00	2.244.882.357,00
Inspektorat Daerah	12.875.154.194,20	830.963.057,00	646.800.001,00	262.638.100,00	14.090.279.152,20
Badan Keuangan dan Aset Daerah	26.702.472.886,00	998.620.070,00	348.792.790,00	1.044.602.520,00	27.005.283.226,00
Badan Pendapatan Daerah	55.529.240.819,95	1.401.871.119,00	2.932.495.088,00	695.746.120,00	59.167.860.906,95
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	8.443.692.873,00	344.076.997,00	13.199.999,00	0,00	8.800.969.869,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.479.872.448,67	1.128.377.850,00	199.800.000,00	0,00	5.808.050.298,67
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.129.434.752,50	63.825.000,00	0,00	21.990.000,00	14.171.269.752,50
Sekretariat DPRD	86.480.456.210,00	2.967.983.000,00	298.853.625,00	2.944.337.000,00	86.802.955.835,00
Badan Penghubung Daerah	18.089.738.609,00	501.417.940,00	602.690.909,00	14.520.000,00	19.179.327.458,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.093.482.700,00	0,00	0,00	0,00	1.093.482.700,00
JUMLAH	**2.115.169.411.496,30**	**81.499.424.632,00**	**58.805.253.151,91**	**41.651.586.437,00**	**2.213.822.502.843,21**

Adapun daftar kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi BPKB dan sudah tercatat di KIB dapat dilihat di **Lampiran 6.**

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan

yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud. Masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.196 Masa Manfaat Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3					**ASET TETAP**	
1	3	2				**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	01			Alat Besar	
1	3	2	01	01		Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02		Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03		Alat Bantu	7
1	3	2	02			Alat Angkutan	
1	3	2	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01		Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03		Alat Ukur	5
1	3	2	04			Alat Pertanian	
1	3	2	04	01		Alat Pengolahan	4
1	3	2	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01		Alat Kantor	5
1	3	2	05	02		Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01		Alat Studio	5
1	3	2	06	02		Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03		Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01		Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	01	29	Alat Kedokteran Lainnya	10
1	3	2	07	02		Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08			Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01		Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09			Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01		Senjata Api	10

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	02	02	Non Senjata Api	5
1	3	2	09	03		Senjata Sinar	10
1	3	2	09	04		Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10			Komputer	
1	3	2	10	01		Komputer Unit	4
1	3	2	10	02		Peralatan Komputer	4
1	3	2	11			Alat eksplorasi	
1	3	2	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12			Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01		Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01		Sumur	4
1	3	2	13	02		Produksi	4
1	3	2	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02		Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01		Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02		Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03		Alat SAR	4
1	3	2	15	04		Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16			Alat Peraga	
1	3	2	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	4
1	3	2	18			Rambu-rambu	
1	3	2	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	7
1	3	2	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	7
1	3	2	19			Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01		Peralatan Olahraga	4

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.197 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		1.642.323.174.603,95	**151.431.365.210,45**	**40.384.206.189,39**	**24.734.570.181,72**	**1.809.404.175.822,07**
1	Dinas Pendidikan	461.751.154.738,58	69.089.660.258,93	1.284.124.346,09	215.964.766,98	531.908.974.576,62
2	Dinas Kesehatan	55.534.725.895,32	1.161.051.263,08	0,00	0,00	56.695.777.158,40
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	245.441.457.906,49	30.067.353.149,06	34.964.044.362,63	0,00	310.472.855.418,18

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	88.830.834.734,66	10.184.816.522,51	21.965.541,65	49.300.000,00	98.988.316.798,82
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	21.652.350.963,44	2.363.493.745,08	0,00	5.853.125,03	24.009.991.583,49
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.499.540.131,52	580.064.215,14	0,00	212.636.907,31	4.866.967.439,35
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.271.610.009,32	543.210.406,34	0,00	792.856.629,35	5.021.963.786,31
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	7.330.668.438,01	496.588.406,91	0,00	137.888.392,92	7.689.368.452,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.967.552.594,43	249.048.233,74	0,00	13.791.259,71	15.202.809.568,46
10	Dinas Sosial	3.617.091.856,07	255.668.124,15	0,00	481.501.511,32	3.391.258.468,90
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.561.058.794,14	307.127.749,05	211.070.200,00	44.146.586,86	4.035.110.156,33
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.649.110.846,41	272.552.473,19	149.009.523,72	354.034.055,21	5.716.638.788,11
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	29.193.435.387,48	1.444.140.768,73	0,00	0,00	30.637.576.156,21
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.364.314.233,08	702.946.297,90	0,00	230.879.821,09	17.836.380.709,89
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.414.591.641,48	399.114.264,39	0,00	47,73	8.813.705.858,14
16	Dinas Perhubungan	43.823.503.506,70	1.116.873.319,86	0,00	11.989.059,83	44.928.387.766,73
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.531.867.799,68	1.025.233.518,27	137.888.392,92	397.788.157,34	20.297.201.553,53
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.750.387.827,88	208.426.263,84	224,06	0,00	4.958.814.315,78
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.200.133.167,86	465.760.339,62	0,00	451.797,45	7.665.441.710,03
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.581.219.713,47	673.754.012,76	38.538,00	669.037.825,82	9.585.974.438,41
21	Dinas Kebudayaan	6.119.794.584,31	1.070.900.989,97	0,00	54.620.000,00	7.136.075.574,28
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	19.446.273.940,42	321.369.114,66	0,00	4.078.750,51	19.763.564.304,57
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	58.868.450.191,84	2.887.959.341,32	500.764.266,49	0,00	62.257.173.799,65
24	Dinas Pariwisata	5.353.151.397,25	223.531.907,69	9.645.639,89	0,00	5.586.328.944,83
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.044.467.873,02	431.628.758,45	0,00	0,00	8.476.096.631,47
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.683.505.841,95	600.178.683,45	0,00	859.658.745,84	7.424.025.779,56

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.009.785.618,67	119.548.815,97	20,67	326.600.000,00	3.802.734.455,31
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	3.271.438.040,43	309.718.147,20	0,00	471.934.380,00	3.109.221.807,63
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	5.520.786.063,56	214.743.562,02	0,00	11.717.812,60	5.723.811.812,98
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.749.291.721,91	135.970.635,71	150.500.076,95	251.050.000,00	4.784.712.434,57
31	Biro Organisasi	1.874.499.408,33	164.712.920,00	0,00	0,00	2.039.212.328,33
32	Biro Administrasi Pimpinan	10.329.366.133,21	359.380.107,14	19.579.999,98	805.860.400,00	9.902.465.840,33
33	Biro Umum	264.125.019.705,05	7.864.526.044,92	437.278.765,83	14.048.177.068,44	258.378.647.447,36
34	Biro Hukum	1.979.979.451,42	66.232.101,88	0,00	0,00	2.046.211.553,30
35	Inspektorat	8.927.571.109,25	1.350.058.349,27	140.850.000,06	258.526.344,14	10.159.953.114,44
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.659.504.351,19	1.634.984.783,81	0,00	3.952.902.962,55	20.341.586.172,45
37	Badan Pendapatan Daerah	43.402.919.722,86	4.354.995.245,94	2.106.416.458,00	30.470.458,80	49.833.860.968,00
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	7.570.403.282,45	437.721.680,79	44.931.873,03	0,00	8.053.056.836,27
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.048.934.769,59	727.177.789,02	7,29	0,00	2.776.112.565,90
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.040.662.351,61	841.550.958,64	7.668.917,53	10.078.750,00	12.879.803.477,78
41	Sekretariat DPRD	76.642.242.206,72	3.265.421.996,95	466.697,02	16.254.562,50	79.891.876.338,19
42	Badan Penghubung Daerah	9.298.518.505,38	2.227.521.030,90	197.962.337,58	14.520.000,00	11.709.481.873,86
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	389.998.147,51	214.648.912,20	0,00	2,39	604.647.057,32

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.997.282.508.161,98	**2.878.738.414.770,81**

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Komponen Biaya Perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:

a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
b) Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

c) Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai ”Konstruksi Dalam Pengerjaan”.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2025 sebesar Rp2.878.738.414.770,81. Mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.198 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				
I	**Saldo Awal ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN, 1 Januari 2025**			**2.878.738.414.770,81**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025	80.799.961.394,06	
	2	Mutasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD	570.041.252.566,45	
	3	Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan	4.514.778.300,85	
	4	Utang Belanja (Tunda Bayar) Tahun 2025	9.272.601.642,02	
	5	Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Pemeliharaan	114.721.789,00	
	6	Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	44.854.357.248,83	
	7	Koreksi terkait kurang catat kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	148.740.000,00	
	8	Koreksi Kurang Catat Hibah CSR	284.160.822,00	
		Total Penambahan :		**710.030.573.763,21**
III	**Pengurangan :**			
	1	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.397.035.466,76	
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	978.264.356,53	
	3	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain	50.000.000,00	
	4	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke dalam Beban Pemeliharaan	242.788.068,00	
	5	Mutasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD	570.041.252.566,45	
	6	Pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024	6.638.115.345,24	
	7	Penghapusan BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan	9.153.454.625,37	
	8	Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Dan Potensi Kelebihan Pembayaran	985.132.943,69	
	9	Koreksi Terkait Lebih Catat Pengakuan Aset tetap Gedung Dan Bangunan atas Hibah Bantuan Pemerintah	437.000,00	
		Total Pengurangan :		**591.486.480.372,04**
		-		
IV	**Saldo Akhir ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN, 31 Desember 2025**			**2.997.282.508.161,98**

Dari tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp710.030.573.763,21 berasal dari:

5.3.1.3.3.1.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp80.799.961.394,06 pada :

a. Dinas Pendidikan sebesar Rp22.250.466.178,01

b. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp32.941.640.000,00
c. Dinas Kesehatan sebesar Rp17.901.215.230,00
d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp498.394.000,00
e. Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebear Rp418.939.700,00
f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp19.900.000,00
g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp3.330.159.000,00
h. Dinas Perhubungan sebear Rp3.241.022.142,77
i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp198.225.143,28

5.3.1.3.3.1.2 Mutasi masuk Aset tetap Gedung dan Bangunan antar OPD sebesar Rp570.041.252.566,45 antara lain:

a. Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 119/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp81.935.353.456,93
b. Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan berdasarkan BAST Nomor 1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp7.166.475.976,00
c. Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 dan BAST Nomor 105/BAST/DPKP-PK/TL/2025 (Bangunan Gedung Kantor - Rehab Gedung Ex Asrama BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp485.305.980,00
d. Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 dan BAST Nomor 105/BAST/DPKP-PK/TL/2025 (Pematangan Lahan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial) pada Dinas Sosial sebesar Rp199.950.000,00
e. Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebesar Rp106.438.720.446,37 antara lain:
    1) Mutasi BMD dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan BAST Nomor B.17/BAST/PUPP.1/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 sebesar Rp8.085.242.999,68
    2) Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 Tanggal 16 September 2025 dan BAST Nomor 103/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp98.353.477.446,69
f. Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan berdasarkan BAST Nomor 1885/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 24 November 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp1.711.854.000,00
g. Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp361.260.432.554,01
h. Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 107/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001

Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp9.560.217.493,65

i. Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 104/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.282.942.659,49

5.3.1.3.3.1.3 Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan sebesar Rp4.514.778.300,85 antara lain:

a. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp1.064.979.272,00 antara lain:
   1) Kapitalisasi Beban Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp969.979.272,00
   2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Review DED BLUD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp95.000.000,00
b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Utang Belanja (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp169.636.000,00 antara lain:
   1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan *Landscape* Gedung Kantor ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Tunda bayar 2025) sebesar Rp40.794.754,51
   2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Interior dan Peningkatan Ruang Kantor ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp42.979.771,88
   3) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana Pendukung Mushola dan parkir ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp16.025.473,61
   4) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan *Landscape* Gedung Kantor ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Tunda bayar 2025) sebesar Rp28.546.517,80
   5) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Interior dan Peningkatan Ruang Kantor ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp30.075.504,50
   6) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Sarana Pendukung Mushola dan parkir ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp11.213.977,70
c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp240.155.794,00 antara lain:
   1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur (100%) - Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Kantor UPTD PPA ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp190.233.100,00
   2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Fisik ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.922.694,00
d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp49.794.000,00 antara lain:
   1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan - Jasa Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Keamanan di Taman Gurindam 12 Kota Tanjungpinang ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.900.000,00
   2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan - Jasa Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Keamanan di Taman Gurindam 12 Kota Tanjungpinang ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.894.000,00

e. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan - Jasa Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Permanen (Laboratorium Kesehatan Masyarakat) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp659.992.271,00
f. Dinas Perhubungan sebesar Rp289.711.468,58 antara lain:
   1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp89.711.976,00
   2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp87.232.902,00
   3) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh kabupaten Lingga ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp57.154.181,88
   4) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pengadan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh kabupaten Lingga ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp55.612.408,70
g. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan sebesar Rp1.438.627.362,00 antara lain:
   1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 4 Batam sebesar Rp11.821.500,00
   2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 5 Batam sebesar Rp11.879.220,00
   3) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pemasangan *Paving Block* SMKN 2 Karimun sebesar Rp7.721.160,00
   4) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Toilet dan Semenisasi SMKN 5 Batam (ASTACITA) sebesar Rp13.858.977,00
   5) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Toilet SMKN 6 Batam (ASTACITA) sebesar Rp5.658.780,00
   6) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Batu Miring SMKN 1 Karimun sebesar Rp7.721.160,00
   7) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK), Ruang Praktik Siswa (RPS) Animasi, DKV, Laboratorium Kimia Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Lanjutan Pembangunan Labor Fisika dan Pembangunan UKS SMKN 9 Batam sebesar Rp106.975.140,00
   8) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Toilet, *Drainase,* Ruang Kelas Baru, Pembangunan Mushola, Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Pemasangan *Paving Block* Lapangan SMKN 10 Batam (ASTACITA) sebesar Rp107.749.920,00
   9) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Toilet, Semenisasi, Ruang Kelas Baru (RKB), SMKN 11 Batam (ASTACITA) sebesar Rp85.355.670,00
   10) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Awning SMKN 5 Batam sebesar Rp6.953.040,00
   11) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru, Laboratorium Kimia, Laboratorium

Fisika dan Laboratorium Komputer SMKN 1 Bintan Utara sebesar Rp47.635.650,00

12) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMK Negeri 1 Lingga sebesar Rp5.938.500,00
13) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMK Negeri 2 Lingga sebesar Rp11.932.500,00
14) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Toilet SMKN 7 Batam (ASTACITA) sebesar Rp5.764.230,00
15) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Toilet SMKN 4 Tanjungpinang (ASTACITA) sebesar Rp5.997.330,00
16) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Batu Miring, Penimbunan dan Pemasangan *Paving Block* Halaman SMKN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp14.912.850,00
17) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB Negeri 2 Batam sebesar Rp87.664.793,00
18) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet SLBN Bintan Utara sebesar Rp8.881.465,00
19) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet SLBN 2 Bintan Kijang sebesar Rp17.818.796,70
20) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN Batam sebesar Rp8.370.865,00
21) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN Bintan Kijang sebesar Rp8.370.865,20
22) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN 1 Tanjungpinang sebesar Rp8.370.865,00
23) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ringan Toilet SLBN Batam sebesar Rp13.910.864,00
24) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN Natuna sebesar Rp8.370.865,10
25) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Mushola SLBN Karimun (Lanjutan) sebesar Rp15.150.390,00
26) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Semenisasi Lapangan Olahraga SMAN 1 Batam sebesar Rp14.931.720,00
27) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan USB SMA di Rempang Galang Kota Batam sebesar Rp96.681.000,00
28) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 29 Batam sebesar Rp45.093.750,00
29) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Bintan Utara sebesar Rp45.121.500,00
30) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan *Paving Block* Halaman SMAN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp14.931.720,00
31) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Mushola SMAN 17 Batam sebesar Rp14.931.720,00
32) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 25 Batam sebesar Rp45.043.800,00

33) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 26 Batam sebesar Rp45.010.500,00
34) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 5 Batam sebesar Rp45.093.750,00
35) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Mushola SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp9.755.100,00
36) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Toilet SMAN 1 Tanjungpinang sebesar Rp9.801.300,00
37) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Lapangan Olahraga SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp19.713.600,00
38) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Semenisasi Lapangan SMAN 1 Karimun sebesar Rp14.829.600,00
39) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Keramik SMAN 1 Karimun sebesar Rp14.829.600,00
40) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Keramik SMAN 5 Tanjungpinang sebesar Rp9.768.750,00
41) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Mushola SMAN 1 Ungar, Kab. Karimun sebesar Rp13.968.240,00
42) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 4 Batam sebesar Rp9.863.016,00
43) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Toilet, Semenisasi dan Pemasangan Awning SMKN 5 Batam sebesar Rp24.827.946,00
44) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan *Paving Block* SMKN 2 Karimun sebesar Rp5.928.000,00
45) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Toilet SMKN 6 Batam (ASTACITA) sebesar Rp3.957.150,00
46) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Batu Miring SMKN 1 Karimun sebesar Rp5.786.541,00
47) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK), Ruang Praktik Siswa (RPS) Animasi, DKV, Laboratorium Kimia Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Lanjutan Pembangunan Laboratorium Fisika dan Pembangunan UKS SMKN 9 Batam sebesar Rp93.323.250,00
48) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Semenisasi SMKN 11 Batam sebesar Rp7.844.370,00
49) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru, Laboratorium Kimia, Laboratorium Fisika dan Laboratorium Komputer SMKN 1 Bintan Utara sebesar Rp39.833.460,00
50) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMK Negeri 1 Lingga sebesar Rp4.484.400,00
51) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMK Negeri 2 Lingga sebesar Rp8.979.900,00
52) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Mushola dan Pemasangan *Paving Block* Lapangan SMKN 10 Batam sebesar Rp13.873.800,00

53) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Toilet SMKN 7 Batam (ASTACITA) sebesar Rp7.914.300,00
54) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Toilet SMKN 4 Tanjungpinang (ASTACITA) sebesar Rp3.999.774,00
55) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Batu Miring, Penimbunan dan Pemasangan *Paving Block* Halaman SMKN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp10.878.777,00
56) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Semenisasi Lapangan Olahraga SMAN 1 Batam sebesar Rp9.867.900,00
57) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan *Paving Block* Halaman SMAN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp9.894.540,00
58) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mushola SMAN 17 Batam sebesar Rp9.910.080,00
59) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mushola SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp7.958.700,00
60) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Toilet SMAN 1 Tanjungpinang sebesar Rp7.925.400,00
61) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Semenisasi Lapangan dan Pemasangan Keramik SMAN 1 Karimun sebesar Rp19.735.800,00
62) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Keramik SMAN 5 Tanjungpinang sebesar Rp7.858.800,00
63) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Mushola SMAN 1 Ungar, Kab. Karimun sebesar Rp9.867.900,00
64) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp6.916.210,00
65) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp4.485.132,00
66) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp4.951.510,00
67) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Keramik Cabdin Lingga Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp3.469.660,00

h. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp601.882.133,27 yang berasal dari Utang Belanja (Tunda Bayar 2025) antara lain:
1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 20 Batam sebesar Rp22.870.440,00
2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang SLBN Kundur sebesar Rp13.968.240,00
3) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Perencanaan Penataan Ruang SMAN 1 Karimun sebesar Rp90.576.000,00
4) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Olahraga SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp14.674.200,00

5) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Bintan Utara sebesar Rp27.328.200,00
6) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan *Drainase*, Toilet SMKN 10 Batam dan Toilet SMKN 11 Batam (ASTACITA) sebesar Rp11.932.563,27
7) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN 1 Tanjungpinang, Toilet SLBN Natuna, Toilet SLBN Kijang, Toilet SLBN Batam sebesar Rp39.927.377,00
8) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Toilet SLBN 2 Kijang dan Toilet SLBN Bintan Utara sebesar Rp21.924.331,00
9) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 10 Batam sebesar Rp12.920.400,00
10) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 5 Batam sebesar Rp28.504.800,00
11) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 25 Batam sebesar Rp28.504.800,00
12) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 26 Batam sebesar Rp28.504.800,00
13) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 20 Batam sebesar Rp19.807.950,00
14) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan USB SMA di Rempang Galang Kota Batam sebesar Rp35.869.650,00
15) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 11 Batam sebesar Rp47.130.600,00
16) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Ruangan SLBN Kundur sebesar Rp11.588.400,00
17) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Mushola SLBN Karimun sebesar Rp10.722.600,00
18) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 2 Batam sebesar Rp83.866.982,00
19) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 10 Batam (ASTACITA) sebesar Rp51.259.800,00

5.3.1.3.3.1.4 Penambahan dari Utang Belanja (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp9.272.601.642,02 antara lain:

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp928.221.553,00 antara lain:
   1) Utang Belanja Pembangunan *Landscape* Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tunda bayar 2025) sebesar Rp379.424.553,00
   2) Utang Belanja pembangunan Interior dan Peningkatan Ruang Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp399.747.000,00

3) Utang Belanja pembangunan Sarana Pendukung Mushola dan parkir Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp149.050.000,00

b. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Kanopi) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp195.360.000,00

c. Dinas Perhubungan sebesar Rp2.173.893.981,23 antara lain:
   1) Utang Belanja Tahun 2025 (Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam) sebesar Rp281.313.053,77
   2) Utang Belanja Tahun 2025 (Pekerjaan Pengadan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh kabupaten Lingga) sebesar Rp1.892.580.927,46

d. Utang Belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.975.126.107,79 antara lain:
   1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 20 Batam sebesar Rp349.746.000,00
   2) Pekerjaan Pembangunan Mushola SLBN Karimun (Lanjutan) sebesar Rp158.099.545,00
   3) Pekerjaan Pembangunan Batu Miring SMKN 1 Karimun sebesar Rp186.923.693,00
   4) Lanjutan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK) SMKN 9 Batam sebesar Rp70.359.826,07
   5) Pekerjaan Pembangunan *Drainase* SMKN 10 Batam sebesar Rp33.219.369,99
   6) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 11 Batam (ASTACITA) sebesar Rp1.939.553.006,00
   7) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 10 Batam sebesar Rp1.183.442.873,00
   8) Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMKN 2 Lingga sebesar Rp216.647.028,65
   9) Pekerjaan Pembangunan Mushola SMKN 10 Batam sebesar Rp190.374.881,70
   10) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 10 Batam sebesar Rp378.541.033,38
   11) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan–Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp199.314.408,00
   12) Pemasangan Keramik Cabdin Lingga Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp43.473.660,00
   13) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 29 Batam sebesar Rp325.524.124,00
   14) Pembangunan Lapangan Olahraga SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp163.325.556,00
   15) Semenisasi Lapangan SMAN 1 Karimun sebesar Rp160.008.699,00
   16) Pemasangan Keramik SMAN 1 Karimun sebesar Rp206.557.785,00
   17) Rehabilitasi Mushola SMAN 1 Ungar, Kab. Karimun sebesar Rp170.014.619,00

5. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Pemeliharaan pekerjaan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN Natuna pada Dinas Pendidikan sebesar Rp114.721.789,00

6. Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp44.854.357.248,83 antara lain:
    a. Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMK dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN Non BLUD) sebesar Rp5.584.301.775,00
    b. Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMAN) sebesar Rp27.708.534.171,83
    c. Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SLB dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) sebesar Rp690.183.302,00
    d. Koreksi kurang catat pengakuan pendapatan dan belanja yang bersumber dari program revitalisasi pendidikan dasar dan menengah dan bantuan pemerintah lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.871.338.000,00
7. Koreksi kurang catat kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan yang bersumber dari dana BLUD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan SMKN 7 Batam pada Dinas Pendidikan sebesar Rp148.740.000,00
8. Koreksi kurang catat hibah CSR Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa hibah aset Ruang Kelas Baru (RKB) dari PT. Agung Automall berdasarkan BAST Nomor 0173/AT-BTC/XII/2025 Tanggal 28 Mei 2025 pada SMAN 26 Batam sebesar Rp284.160.822,00

B. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp591.486.480.372,04 berasal dari:
    1. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.397.035.466,76 antara lain:
        a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh kabupaten Lingga) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.825.721.858,76
        b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp571.313.608,00 antara lain:
            1) Pekerjaan Pemasangan *Paving Block* SMKN 2 Karimun sebesar Rp201.259.444,00
            2) Pekerjaan Pemasangan *Paving Block* Lapangan SMKN 10 Batam sebesar Rp196.864.142,00
            3) Pembangunan *Paving Block* Halaman SMAN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp173.190.022,00
    2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (Realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam 80%) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp978.264.356,53
    3. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp50.000.000,00
    4. Reklasifikasi keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke dalam Beban Pemeliharaan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp242.788.068,00 antara lain:
        a. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke dalam Beban Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp199.314.408,00
        b. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke dalam Beban Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pendidikan cabang Dinas Lingga sebesar Rp43.473.660,00

5. Mutasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD sebesar Rp570.041.252.566,45 antara lain:
    a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp553.077.679.590,77 antara lain:
        1) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Sekretariat DPRD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp81.935.353.456,93
        2) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp361.260.432.554,01
        3) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp98.353.477.446,69
        4) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp485.305.980,00
        5) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp1.282.942.659,49
        6) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp199.950.000,00
        7) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp9.560.217.493,65
    b. Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Masjid Raya Nur Ilahi Dompak) ke Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor B/17/BAST/PUPP.1/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp8.085.242.999,68
    c. Dinas Kesehatan sebesar Rp8.878.329.976,00 antara lain:
        1) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud berdasarkan BAST Nomor 1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 sebesar Rp7.166.475.976,00
        2) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib berdasarkan BAST Nomor 1885/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 24 November 2025 sebesar Rp1.711.854.000,00
6. Pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp6.638.115.345,24 antara lain:
    a. Pelunasan Utang Pengadaaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp198.225.143,28
    b. Pelunasan Utang Pengadaaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp219.280.700,00
    c. Pelunasan Utang Pengadaaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp199.866.000,00

d. Pelunasan Utang Pengadaaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp242.638.990,00
e. Pelunasan Utang Pengadaaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.900.641.377,29
f. Pelunasan Utang Pengadaaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.877.463.134,67

7. Penghapusan BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.153.454.625,37 antara lain:
   a. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 945 Tahun 2025, Tanggal 26 Agustus 2025 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp8.519.819.025,37
   b. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Hibah ke Pemerintah Kabupaten Lingga berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp265.000.000,00
   c. Penghapusan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan karena Hibah ke Pemerintah Kabupaten Lingga berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 pada Dinas Pariwisata sebesar Rp368.635.600,00
8. Koreksi terkait temuan BPK atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal dan Potensi Kelebihan Pembayaran sebesar Rp985.132.943,69 antara lain:
   a. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal pekerjaan Bangunan Gedung Kantor (Labkesmas) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp100.156.096,37
   b. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp381.775.097,58 antara lain:
      1) Koreksi potensi kelebihan pembayaran atas Tunda Bayar Pekerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan (SMA N 29 Batam) sebesar Rp29.930.582,14
      2) Koreksi potensi kelebihan pembayaran atas Tunda Bayar Pekerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan (SMK N 10 Batam) sebesar Rp44.888.327,86
      3) Koreksi potensi kelebihan pembayaran atas Tunda Bayar Pekerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan (SMK N 11 Batam) sebesar Rp30.085.638,99
      4) Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (SMA N 25 Batam) sebesar Rp87.918.830,70
      5) Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan (SMA N 26 Batam) sebesar Rp39.187.717,49
      6) Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan USB SMA di Rempang Galang Batam) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp35.402.408,93
      7) Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Lanjutan Pembangunan USB di SLB N 2 Batam) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp17.339.591,47
      8) Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp97.022.000,0
   c. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Lanjutan) sebesar Rp492.201.633,72
   d. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp11.000.116,02

9. Koreksi lebih catat pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Berita Acara Adendum Nomor 6946/C5/KU.07.00/2025 sebesar Rp437.000,00 atas hibah bantuan pemerintah Program Revitalisasi SMA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMAN) pada SMAN 1 Singkep Dinas Pendidikan

C. Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 Rp2.997.282.508.161,98

Adapun rincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.199 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	1.153.264.923.498,53	22.250.466.178,01	54.700.558.122,38	5.073.776.908,25	1.225.142.170.890,67
Dinas Kesehatan	22.637.440.001,52	17.901.215.230,00	659.992.271,00	9.221.125.062,37	31.977.522.440,15
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	270.696.151.212,56	0,00	1.907.214.000,00	0,00	272.603.365.212,56
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	46.978.521.960,00	32.941.640.000,00	8.231.455.248,00	492.201.633,72	87.659.415.574,28
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	77.059.503.303,36	498.394.000,00	361.310.226.554,01	8.285.108.999,68	430.583.014.857,69
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	569.486.639.076,04	418.939.700,00	1.097.857.553,00	553.296.960.290,77	17.706.476.038,27
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.965.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	109.865.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	5.287.098.342,30	0,00	0,00	0,00	5.287.098.342,30
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.528.209.223,48	0,00	0,00	0,00	2.528.209.223,48
Dinas Sosial	5.116.692.359,00	0,00	199.950.000,00	0,00	5.316.642.359,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.002.648.000,00	0,00	485.305.980,00	0,00	2.487.953.980,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	624.390.200,00	3.330.159.000,00	240.155.794,00	61.000.116,02	4.133.704.877,98
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	35.183.812.314,51	0,00	0,00	0,00	35.183.812.314,51
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.267.797.894,00	0,00	0,00	0,00	3.267.797.894,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	354.092.597.345,67	3.241.022.142,77	2.463.605.449,81	14.224.446.617,95	345.572.778.320,30
Dinas Komunikasi dan Informatika	736.923.281,00	0,00	0,00	0,00	736.923.281,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	49.615.984,00	0,00	0,00	0,00	49.615.984,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	78.416.217,00	0,00	0,00	0,00	78.416.217,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56.658.605.492,23	0,00	0,00	0,00	56.658.605.492,23
Dinas Kebudayaan	60.702.799.231,30	0,00	0,00	0,00	60.702.799.231,30
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.609.362.017,00	0,00	0,00	0,00	12.609.362.017,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	49.696.957.148,94	0,00	0,00	0,00	49.696.957.148,94
Dinas Pariwisata	5.004.000.801,00	0,00	0,00	368.635.600,00	4.635.365.201,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.557.666.297,10	198.225.143,28	0,00	198.225.143,28	8.557.666.297,10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	137.400.000,00	0,00	0,00	0,00	137.400.000,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	373.623.000,00	0,00	0,00	0,00	373.623.000,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Biro Kesejahteraan Rakyat	8.188.125.164,00	0,00	106.438.720.446,37	0,00	114.626.845.610,37
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.510.453.750,00	0,00	0,00	0,00	2.510.453.750,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	2.121.021.650,00	0,00	0,00	0,00	2.121.021.650,00
Biro Umum	10.743.149.796,63	0,00	0,00	0,00	10.743.149.796,63
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.463.347.933,71	0,00	0,00	265.000.000,00	45.198.347.933,71
Badan Pendapatan Daerah	41.738.650.488,00	0,00	9.560.217.493,65	0,00	51.298.867.981,65
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	5.321.872.144,93	0,00	81.935.353.456,93	0,00	87.257.225.601,86
Badan Penghubung Daerah	19.730.034.643,00	0,00	0,00	0,00	19.730.034.643,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**2.878.738.414.770,81**	**80.799.961.394,06**	**629.230.612.369,15**	**591.486.480.372,04**	**2.997.282.508.161,98**

Untuk masa manfaat aset tetap gedung dan bangunan ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.200 Masa Manfaat Aset Tetap Gedung dan Bangunan

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	3			**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.201 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		546.490.257.919,51	**59.890.476.149,22**	**146.088.263.461,02**	**145.626.326.387,29**	**606.842.671.142,46**
1	Dinas Pendidikan	192.469.626.989,74	23.138.524.733,83	2.182.713.173,60	0,00	217.790.864.897,17
2	Dinas Kesehatan	3.860.239.631,00	305.703.204,28	0,00	2.740.972.432,86	1.424.970.402,42
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	58.634.664.573,55	5.454.633.334,36	379.460.970,00	0,00	64.468.758.877,91

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	8.448.113.110,49	1.071.082.722,80	2.361.511.462,86	0,00	11.880.707.296,15
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.269.396.295,85	8.626.033.882,92	92.764.405.535,01	450.913.156,67	104.208.922.557,11
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	143.857.580.758,56	331.672.777,29	0,00	140.412.519.517,72	3.776.734.018,13
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.942.242,00	2.197.300,00	0,00	0,00	22.139.542,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	822.006.310,00	104.007.143,00	0,00	0,00	926.013.453,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	640.995.436,00	50.698.241,00	0,00	0,00	691.693.677,00
10	Dinas Sosial	871.567.774,67	106.332.847,18	36.990.750,00	0,00	1.014.891.371,85
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	505.865.361,00	49.759.079,60	176.327.839,40	0,00	731.952.280,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	112.825.392,00	18.701.801,61	0,00	18.083.333,00	113.443.860,61
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	5.982.970.564,18	715.164.663,54	0,00	0,00	6.698.135.227,72
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	936.589.188,96	65.482.535,19	0,00	0,00	1.002.071.724,15
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	56.184.592.008,45	9.112.870.936,70	0,00	1.699.654.815,49	63.597.808.129,66
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	155.105.077,81	14.738.466,04	0,00	0,00	169.843.543,85
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.059.653,00	992.320,00	0,00	0,00	4.051.973,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.972.314,00	1.568.324,00	0,00	0,00	9.540.638,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.787.375.800,29	1.135.708.269,58	0,00	38.538,00	6.923.045.531,87
21	Dinas Kebudayaan	8.187.109.520,86	1.214.055.984,57	0,00	0,00	9.401.165.505,43
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	2.508.213.118,00	252.187.240,00	0,00	0,00	2.760.400.358,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.777.748.536,33	997.742.565,44	0,00	122.287.954,54	7.653.203.147,23
24	Dinas Pariwisata	1.260.085.165,00	97.835.748,00	0,00	86.014.973,00	1.271.905.940,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.900.754.128,09	181.331.035,79	0,00	0,00	2.082.085.163,88
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46.295.500,00	2.748.000,00	0,00	0,00	49.043.500,00
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	116.493.771,00	7.472.460,00	0,00	0,00	123.966.231,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	2.114.754.619,00	2.292.536.912,50	28.725.301.730,14	0,00	33.132.593.261,64
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	375.910.344,00	50.593.227,00	0,00	0,00	426.503.571,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	717.363.019,00	42.420.433,00	0,00	0,00	759.783.452,00
33	Biro Umum	2.772.581.994,00	214.862.995,00	0,00	0,00	2.987.444.989,00
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.367.230.453,00	971.206.629,00	0,00	95.841.666,01	23.242.595.415,99
37	Badan Pendapatan Daerah	11.695.395.295,00	1.020.268.032,40	1.584.614.399,25	0,00	14.300.277.726,65
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sekretariat DPRD	915.567.301,50	1.844.741.610,70	17.876.937.600,76	0,00	20.637.246.512,96
42	Badan Penghubung Daerah	2.164.266.673,18	394.600.692,90	0,00	0,00	2.558.867.366,08
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	4.112.540.134.981,23	**4.011.564.533.138,15**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Komponen biaya perolehan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:

a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
b) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 1 Januari 2025 sebesar Rp4.011.564.533.138,15. Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.202 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025

ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN				
I	**Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, 1 Januari 2025**			**4.011.564.533.138,15**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025	46.310.371.998,10	
	2	Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Antar OPD	275.461.302.614,68	
	3	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	3.397.035.466,76	
	4	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Aset Lain-lain BLUD	28.023.000,00	
	5	Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan	1.120.074.769,10	
	6	Penerimaan Hibah Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	51.060.013.986,52	

ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN				
	7	Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Utang Belanja (Tunda Bayar) TA 2025	14.090.979.662,96	
	8	Koreksi Terkait Kurang Catat Kapitalisasi Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.964.199.980,00	
		Total Penambahan :		**394.432.001.478,12**
III	**Pengurangan :**			
	1	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	24.896.129,00	
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Beban Pemeliharaan	4.751.115.600,00	
	3	Pelunasan Utang Belanja (Tunda Bayar) TA 2024	6.752.838.308,21	
	4	Mutasi Keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Antar OPD	275.461.302.614,68	
	5	Penghapusan BMD Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	6.227.189.226,00	
	6	Koreksi terkait Temuan BPK atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal dan Potensi Kelebihan Pembayaran	239.057.757,15	
		Total Pengurangan		**293.456.399.635,04**
IV	**Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, 31 Desember 2025**			**4.112.540.134.981,23**

Dari tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp394.432.001.478,12 berasal dari:
   1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp46.310.371.998,10
      a. Dinas Kesehatan sebesar Rp668.500.000,00
      b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp21.253.839.969,89
      c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp8.530.350,00
      d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp18.216.461.678,21
      e. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp6.163.040.000,00
   2. Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Antar OPD sebesar Rp275.461.302.614,68 antara lain:
      a. Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 119/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.007.781.000,00
      b. Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 103/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp39.950.000,00
      c. Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp272.742.842.414,68
      d. Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 107/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur

Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp401.958.200,00

e. Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 104/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.268.771.000,00

3. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.397.035.466,76 antara lain:
   a. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh kabupaten Lingga pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.825.721.858,76
   b. Dinas Pendidikan sebesar Rp571.313.608,00 antara lain:
      1) Pekerjaan Pemasangan *Paving Block* SMKN 2 Karimun sebesar Rp201.259.444,00
      2) Pekerjaan Pemasangan *Paving Block* Lapangan SMKN 10 Batam sebesar Rp196.864.142,00
      3) Pembangunan *Paving Block* Halaman SMAN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp173.190.022,00
4. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Aset Lain-lain BLUD pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp28.023.000,00
5. Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp1.120.074.769,10 antara lain:
   a. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp739.275.691,00 berasal dari:
      1) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kabupaten Karimun Kapitalisasi 2018 Jalan Propinsi Kolektor sebesar Rp49.679.000,00
      2) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pembangunan Jalan Akses Menuju Makogabwilhan Pulau Dompak (Lanjutan) Kapitalisasi 2023 Jalan Propinsi Kolektor sebesar Rp99.563.000,00
      3) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pekerjaan Bronjong disamping Dompak sebesar Rp79.493.750,00
      4) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab Karimun Kapitalisasi 2018 Jalan Propinsi Kolektor sebesar Rp99.689.100,00
      5) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pembangunan Jalan Akses Menuju Makogabwilhan Pulau Dompak (Lanjutan) Kapitalisasi 2023 Jalan Propinsi Kolektor sebesar Rp75.996.670,00
      6) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Batu 14 Pel. Tg Berlian, Kab Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri Lanjutan) Kapitalisasi Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi 2023 sebesar Rp74.652.900,00
      7) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna

Kapitalisasi 2023 Jembatan pada Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi sebesar Rp195.666.271,00

8) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sukaramai RW 5 Kel Pinang Kencana sebesar Rp14.935.000,00
9) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pekerjaan Bronjong disamping Dompak sebesar Rp49.600.000,00

b. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp380.799.078,10
1) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pengaman Sungai Paket Pembangunan Tembok Penahan Tebing/Pemecah Ombak Pantai Desa Pengadah Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp18.469.763,53
2) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pembangunan Batu Miring Sungai Parit Jepun Jl.Muharal Kebun Pinang RT 02 RW 03 Kel Gading Sari Kec Kundur Kab Karimun sebesar Rp17.610.416,40
3) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pengaman Sungai Paket Pembangunan Batu Miring Sungai Desa Ceruk Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp35.054.096,77
4) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Peningkatan Jalan Sp. Budus - Roro Penarik, Kab. Lingga sebesar Rp99.687.100,00
5) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang sebesar Rp99.789.000,00
6) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna Kapitalisasi 2023 Jembatan pada Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi sebesar Rp49.157.993,00
7) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pengaman Sungai Paket Pembangunan Batu Miring Sungai Silas, Belakang Kantor Desa Kelanga, Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp29.947.800,00
8) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pengaman Sungai Paket Pembangunan Tembok Penahan Tebing/Pemecah Ombak Pantai Desa Pengadah Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp15.895.200,00
9) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pembangunan Batu Miring Sungai Parit Jepun Jl.Muharal Kebun Pinang RT 02 RW 03 Kel Gading Sari Kec Kundur Kab Karimun sebesar Rp15.187.708,40

6. Penerimaan Hibah Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya sebesar Rp51.060.013.986,52, antara lain:
a. Penerimaan Hibah dari Kementerian ESDM berupa PLTS Atap berdasarkan BAST Nomor 01/BAST.HIBAH-PLTS ATAP/XII/2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.849.834.665,00

b. Penerimaan Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum - BPJN Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 111.b/BAST/Bb24/2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp48.284.180.693,00
c. Penerimaan Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMAN) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp925.998.628,52

7. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Utang Belanja (Tunda Bayar) TA 2025 sebesar Rp14.090.979.662,96 antara lain:
   a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp7.152.649.800,00
      1) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan PJU PLTS di Kota Tanjungpinang sebesar Rp270.396.000,00
      2) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembayaran Pengadaan PJU PLTS di Kota Batam sebesar Rp5.218.642.800,00
      3) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan PJU PLTS di Kabupaten Karimun sebesar Rp459.816.000,00
      4) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembayaran Pengadaan PJU PLTS di Kabupaten Bintan sebesar Rp1.203.795.000,00
   b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp6.747.853.862,96 antara lain:
      1) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Peningkatan Jalan Sp. Budus - Roro Penarik, Kab. Lingga sebesar Rp1.073.336.230,00
      2) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang sebesar Rp662.514.630,00
      3) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna Kapitalisasi 2023 Jembatan Pada Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi sebesar Rp3.228.307.256,31
      4) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang sebesar Rp940.926.446,80
      5) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembangunan Batu Miring Sungai Silas,Belakang Kantor Desa Kelanga,Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp174.587.968,33
      6) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Bangunan Pengaman Sungai Paket Pembangunan Tembok Penahan Tebing/Pemecah Ombak Pantai Desa Pengadah Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp209.079.131,53
      7) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembangunan Batu Miring Sungai Parit Jepun Jl.Muharal Kebun Pinang RT 02 RW 03 Kel Gading Sari Kec Kundur Kab Karimun pada sebesar Rp259.690.819,43
      8) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Paket Pembangunan Batu Miring Sungai Desa Ceruk Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp199.411.380,56
   c. Utang Belanja Modal Tahun 2025 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Arsitektur pada Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Pelabuhan Kuala Riau Tanjungpinang pada Dinas Perhubungan Rp190.476.000,00
8. Koreksi terkait kurang catat Kapitalisasi dari Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi ke Aset tetap-Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Paket Pekerjaan Penataan Taman Gurindam 12 kedalam Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jembatan

pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp2.964.199.980,00

B. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp293.456.399.635,04 berasal dari :

1. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Pengadaan Rangka Besi Baliho/Spanduk) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp24.896.129,00
2. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Beban Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.751.115.600,00 antara lain:
   a. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Beban Pemeliharaan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang. Jembatan Pada Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi sebesar Rp3.406.934.600,00
   b. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Beban Pemeliharaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang sebesar Rp1.344.181.000,00
3. Pelunasan Utang Belanja (Tunda Bayar) Tahun 2024 sebesar Rp6.752.838.308,21 antara lain:
   a. Pelunasan Utang Belanja Modal Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2024 sebesar Rp5.831.451.278,21
   b. Pelunasan Utang Belanja Modal Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan TA 2024 sebesar Rp921.387.030,00
4. Mutasi Keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Antar OPD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 Tanggal 16 September 2025 sebesar Rp275.461.302.614,68 antara lain:
   a. Mutasi BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Sekretariat DPRD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp1.007.781.000,00
   b. Mutasi BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp272.742.842.414,68
   c. Mutasi BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp39.950.000,00
   d. Mutasi BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp1.268.771.000,00
   e. Mutasi BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp401.958.200,00
5. Penghapusan BMD Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp6.227.189.226,00 antara lain:
   a. Penghapusan BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1105 Tahun 2025, Tanggal 14 Oktober 2025 sebesar Rp2.573.917.226,00
   b. Penghapusan BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 945 Tahun 2025, Tanggal 26 Agustus 2025 sebesar Rp3.653.272.000,00

6. Koreksi terkait Temuan BPK atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal dan Potensi Kelebihan Pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp239.057.757,15 antara lain:
   a. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp49.093.502,55 dan tunda bayar 2025 sebesar Rp2.300.000,00
   b. Koreksi kelebihan pembayaran atas pekerjaan Penataan Taman Gurindam 12 kedalam Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp187.664.254,60

C. Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.112.540.134.981,23

Adapun rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.203 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	14.565.741.960,00	0,00	2.766.083.236,52	0,00	17.331.825.196,52
Dinas Kesehatan	1.021.326.000,01	668.500.000,00	0,00	0,00	1.689.826.000,01
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	12.279.215.917,36	0,00	0,00	0,00	12.279.215.917,36
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.722.035.500,00	6.163.040.000,00	28.023.000,00	0,00	12.913.098.500,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.880.857.753.026,54	21.253.839.969,89	331.859.151.719,74	5.936.456.516,15	3.228.034.288.200,02
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	285.798.779.445,68	0,00	0,00	275.461.302.614,68	10.337.476.831,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	9.996.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	208.622.000,00	0,00	0,00	0,00	208.622.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	516.959.431,07	0,00	0,00	0,00	516.959.431,07
Dinas Sosial	20.185.000,00	0,00	0,00	0,00	20.185.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	600.927.000,00	0,00	0,00	0,00	600.927.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	429.594.968,00	0,00	0,00	0,00	429.594.968,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	25.196.931.434,36	0,00	0,00	0,00	25.196.931.434,36
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.880.000,00	0,00	0,00	0,00	99.880.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Dinas Perhubungan	285.969.429.494,55	0,00	3.016.197.858,76	6.227.189.226,00	282.758.438.127,31
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.453.564.535,00	0,00	0,00	0,00	7.453.564.535,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	108.334.000,00	0,00	0,00	0,00	108.334.000,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	34.007.500,00	8.530.350,00	0,00	0,00	42.537.850,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.242.622.986,00	0,00	0,00	0,00	1.242.622.986,00
Dinas Kebudayaan	866.460.646,00	0,00	0,00	0,00	866.460.646,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	790.008.400,00	0,00	0,00	0,00	790.008.400,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.453.128.807,57	0,00	0,00	0,00	9.453.128.807,57
Dinas Pariwisata	5.351.707.445,00	0,00	0,00	0,00	5.351.707.445,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	280.346.053.361,30	18.216.461.678,21	9.002.484.465,00	5.831.451.278,21	301.733.548.226,30
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.283.800,00	0,00	0,00	0,00	12.283.800,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	39.950.000,00	0,00	39.950.000,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	965.050.893,69	0,00	0,00	0,00	965.050.893,69
Biro Perekonomian dan Pembangunan	7.630.000,00	0,00	0,00	0,00	7.630.000,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	16.957.200.066,00	0,00	0,00	0,00	16.957.200.066,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	171.687.192.620,02	0,00	0,00	0,00	171.687.192.620,02
Badan Pendapatan Daerah	1.358.823.900,00	0,00	401.958.200,00	0,00	1.760.782.100,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	19.825.000,00	0,00	0,00	0,00	19.825.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	44.858.000,00	0,00	0,00	0,00	44.858.000,00
Sekretariat DPRD	556.989.000,00	0,00	1.007.781.000,00	0,00	1.564.770.000,00
Badan Penghubung Daerah	8.415.000,00	0,00	0,00	0,00	8.415.000,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**4.011.564.533.138,15**	**46.310.371.998,10**	**348.121.629.480,02**	**293.456.399.635,04**	**4.112.540.134.981,23**

Untuk masa manfaat aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.204 Masa Manfaat Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4			**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.205 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		2.343.210.675.604,35	**164.997.274.151,40**	**223.734.221.717,27**	**226.328.813.457,31**	**2.505.613.358.015,71**
1	Dinas Pendidikan	6.505.723.020,38	1.135.907.978,81	205.192.651,04	0,00	7.846.823.650,23
2	Dinas Kesehatan	447.835.151,44	33.136.300,12	0,00	0,00	480.971.451,56
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	5.241.443.466,93	329.295.843,58	0,00	0,00	5.570.739.310,51
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.658.207.099,00	341.543.345,56	0,00	0,00	1.999.750.444,56
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.624.922.011.128,03	143.809.264.131,04	220.546.476.285,09	6.224.791,67	1.989.271.526.752,49
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	226.040.454.254,84	103.422.770,67	2.053.095.320,23	220.707.408.721,92	7.489.563.623,82
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.692.168,00	333.200,00	0,00	0,00	6.025.368,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	77.110.050,00	5.746.666,00	0,00	0,00	82.856.716,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.311.933,62	51.695.943,11	0,00	0,00	112.007.876,73
10	Dinas Sosial	5.592.927,00	504.625,00	0,00	0,00	6.097.552,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	278.248.411,00	13.154.641,00	0,00	0,00	291.403.052,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	196.624.822,00	36.892.996,00	0,00	0,00	233.517.818,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	16.776.199.093,53	1.505.218.351,12	0,00	0,00	18.281.417.444,65
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	43.697.500,00	2.497.000,00	0,00	0,00	46.194.500,00
15	Dinas Pemberdayaan	1.275.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
	Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
16	Dinas Perhubungan	203.206.050.304,34	8.274.434.923,63	0,00	5.609.953.359,00	205.870.531.868,97
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.874.456.788,07	306.556.447,00	0,00	3.044.336,07	4.177.968.899,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	44.402.960,00	3.126.682,00	0,00	2,00	47.529.640,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12.687.907,00	1.016.054,92	0,00	0,00	13.703.961,92
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	235.183.220,80	120.399.586,60	0,00	0,00	355.582.807,40
21	Dinas Kebudayaan	610.434.985,51	83.648.091,14	0,00	0,00	694.083.076,65
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	321.688.427,00	34.579.479,67	3,04	0,00	356.267.909,71
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.622.421.392,46	268.979.695,04	15.579,39	15.579,39	3.891.401.087,50
24	Dinas Pariwisata	1.938.130.471,00	94.845.120,00	0,00	0,00	2.032.975.591,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	77.794.523.369,36	7.324.125.308,99	96.345.555,50	0,00	85.214.994.233,85
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.123.880,46	482.606,67	0,00	0,00	8.606.487,13
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	998.750,00	12.567.604,67	0,00	13.566.354,67
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	622.493.595,00	30.052.907,00	0,00	0,00	652.546.502,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	3.116.582,00	190.750,00	0,00	0,00	3.307.332,00
31	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Biro Umum	7.503.633.636,00	593.958.372,11	0,00	0,00	8.097.592.008,11
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	160.450.727.001,70	414.900.683,00	0,00	0,00	160.865.627.684,70
37	Badan Pendapatan Daerah	365.016.736,88	33.661.935,00	401.958.201,45	0,00	800.636.873,33
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	5.327.969,00	495.624,96		0,68	5.823.593,28
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.709.767,00	1.121.450,00	0,00	0,00	13.831.217,00
41	Sekretariat DPRD	311.476.960,00	40.239.516,66	416.403.850,28	0,00	768.120.326,94
42	Badan Penghubung Daerah	7.643.625,00	771.375,00	2.166.666,58	2.166.666,58	8.415.000,00
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	301.651.608.245,70	**279.218.737.302,70**

Aset tetap lainnya mencakup buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian, serta hewan/ternak dan tumbuhan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah. Komponen Biaya Perolehan aset tetap lainnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi. Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
b) Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN/D.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2025 sebesar Rp279.218.737.302,70. Mutasi aset tetap lainnya Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.206 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025

ASET TETAP LAINNYA				
I	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya, 1 Januari 2025			**279.218.737.302,70**
II	Penambahan :			
	1	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	21.957.775.186,00	
	2	Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya atas mutasi antar OPD	70.092.274.942,00	
	3	Koreksi Kurang Catat Atas Aset Tetap Renovasi	1.167.094.500,00	
	4	Kapitalisasi Bahan Bangunan dan Konstruksi kedalam Aset Tetap Lainnya	58.340.000,00	
	5	Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Utang Belanja (Tunda Bayar 2025)	102.860.000,00	
	6	Hibah Aset Tetap Lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	60.000.000,00	
		Total Penambahan :		**93.438.344.628,00**
III	Pengurangan :			
	1	Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya antar OPD	70.092.274.942,00	
	2	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain	685.786.654,00	
	3	Pelunasan Utang Belanja Tahun Anggaran 2024	43.775.000,00	
	4	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	183.637.089,00	
		Total Pengurangan		**71.005.473.685,00**

ASET TETAP LAINNYA				
IV	Saldo Akhir ASET TETAP LAINNYA, 31 Desember 2025			301.651.608.245,70

Dari tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp93.438.344.628,00 berasal dari:
   1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp21.957.775.186,00 antara lain:
      a. Dinas Pendidikan sebesar Rp21.671.847.651,00
      b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp4.995.000,00
      c. Dinas Kebudayaan sebesar Rp124.986.000,00
      d. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp155.946.535,00
   2. Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya antar OPD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp70.092.274.942,00
   3. Koreksi Kurang Catat atas Aset Tetap Renovasi (Rumah Kemasan dan Pasar Ikan di Moro Tahun 2014) yang dibangun diatas lahan Pemerintah Kabupaten Karimun pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.167.094.500,00
   4. Kapitalisasi Bahan Bangunan dan Konstruksi kedalam Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp58.340.000,00
   5. Penambahan yang berasal dari Utang Belanja (Tunda Bayar Tahun 2025) pengadaan aset tetap lainnya berupa alat *Marching Band* SMA Negeri di Batam sebesar Rp102.860.000,00
   6. Penerimaan Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMAN) sebesar Rp60.000.000,00

B. Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp71.005.473.685,00 berasal dari:
   1. Mutasi BMD Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi) ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp70.092.274.942,00
   2. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain sebesar Rp685.786.654,00 diantaranya:
      a. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp666.151.654,00 antara lain:
         1) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah karena Rusak Berat pada SMKN 1 TPI sebesar Rp303.885.560,00
         2) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah karena Rusak Berat pada SMKN 2 BTM sebesar Rp56.828.000,00
         3) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah karena Rusak Berat pada SMAN 6 TPI sebesar Rp305.438.094,00

b. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah karena Rusak Berat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp19.635.000,00

3. Pelunasan Utang Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp43.775.000,00

4. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp183.637.089,00 antara lain:

   a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana BOSP sebesar Rp80.777.089,00

   b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian berupa *Marching Band* pada Dinas Pendidikan sebesar Rp102.860.000,00

C. Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 senilai Rp301.651.608.245,70

Tabel 5.207 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (2 + 3 + 4 - 5)*
Dinas Pendidikan	150.262.001.373,79	21.671.847.651,00	162.860.000,00	893.563.743,00	171.203.145.281,79
Dinas Kesehatan	1.123.552.174,10	0,00	0,00	0,00	1.123.552.174,10
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	640.455.426,00	0,00	0,00	0,00	640.455.426,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	181.700.600,00	0,00	0,00	0,00	181.700.600,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.457.907.399,99	0,00	70.092.274.942,00	0,00	76.550.182.341,99
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	70.822.930.854,30	0,00	0,00	70.092.274.942,00	730.655.912,30
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	247.771.000,00	0,00	0,00	0,00	247.771.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	983.027.000,00	0,00	0,00	0,00	983.027.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	863.728.100,00	4.995.000,00	0,00	19.635.000,00	849.088.100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	943.123.575,00	0,00	0,00	0,00	943.123.575,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78.580.852,00	0,00	0,00	0,00	78.580.852,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	359.961.364,00	0,00	0,00	0,00	359.961.364,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	69.529.600,00	0,00	58.340.000,00	0,00	127.869.600,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	650.659.380,00	0,00	0,00	0,00	650.659.380,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	187.710.000,00	0,00	0,00	0,00	187.710.000,00
Dinas Kebudayaan	1.639.204.620,00	124.986.000,00	0,00	0,00	1.764.190.620,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.006.128.274,52	155.946.535,00	0,00	0,00	25.162.074.809,52
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.554.386.800,00	0,00	1.167.094.500,00	0,00	2.721.481.300,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (2 + 3 + 4 - 5)*
Dinas Pariwisata	5.380.164.000,00	0,00	0,00	0,00	5.380.164.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.870.000,00	0,00	0,00	0,00	12.870.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	710.772.860,00	0,00	0,00	0,00	710.772.860,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	106.480.000,00	0,00	0,00	0,00	106.480.000,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	45.380.000,00	0,00	0,00	0,00	45.380.000,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	7.498.933.579,00	0,00	0,00	0,00	7.498.933.579,00
Biro Hukum	248.491.270,00	0,00	0,00	0,00	248.491.270,00
Inspektorat Daerah	236.708.000,00	0,00	0,00	0,00	236.708.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	256.584.900,00	0,00	0,00	0,00	256.584.900,00
Badan Pendapatan Daerah	75.639.000,00	0,00	0,00	0,00	75.639.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	71.697.600,00	0,00	0,00	0,00	71.697.600,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
Sekretariat DPRD	1.473.896.900,00	0,00	0,00	0,00	1.473.896.900,00
Badan Penghubung Daerah	982.660.800,00	0,00	0,00	0,00	982.660.800,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**279.218.737.302,70**	**21.957.775.186,00**	**71.480.569.442,00**	**71.005.473.685,00**	**301.651.608.245,70**

Masa manfaat aset tetap lainnya ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.208 Masa Manfaat Aset Tetap Lainnya

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	**3**	**5**			**Aset Tetap Lainnya**	
1	3	5	7	1	Aset tetap dalam renovasi	50

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.209 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		17.792.368.600,90	**1.960.782.022,25**	**15.250.034.618,80**	**13.297.296.301,73**	**21.705.888.940,22**
1	Dinas Pendidikan	175.435.004,00	23.230.720,00	0,00	0,00	198.665.724,00
2	Dinas Kesehatan	213.474.913,08	22.471.043,48	0,00	0,00	235.945.956,56
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	21.338.541,95	3.012.500,04	0,00	0,00	24.351.041,99
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	1.400.362.897,00	13.287.896.637,00	0,00	14.688.259.534,00

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.963.451.016,00	14.464.918,00	1.414.827.815,00	13.287.896.637,00	104.847.112,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	157.750.615,97	19.515.540,00	0,00	0,00	177.266.155,97
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	76.161.501,08	15.249.402,08	0,00	9.399.657,08	82.011.246,08
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	67.578.344,28	6.625.027,28	0,00	5,47	74.203.366,09
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.679.086,33	1.195.165,33	0,00	0,00	7.874.251,66
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	30.855.370,64	4.044.437,60	0,00	1,87	34.899.806,37
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	27.905.625,00	2.767.500,00	0,00	0,00	30.673.125,00
21	Dinas Kebudayaan	14.777.583,67	2.074.423,99	0,00	0,00	16.852.007,66
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	2.619.225.945,00	294.241.045,49	294.241.042,68	0,00	3.207.708.033,17
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	232.571.491,35	53.353.630,00	250.902.457,54	0,00	536.827.578,89
24	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.846.982,50	11.632.758,00	0,00	0,00	16.479.740,50
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Biro Umum	1.283.147.562,00	79.144.173,92	0,00	0,00	1.362.291.735,92
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat	17.622.673,97	2.243.320,08	0,00	0,00	19.865.994,05
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14.223.146,34	1.177.088,00	0,00	0,00	15.400.234,34
37	Badan Pendapatan Daerah	22.817.765,00	1.512.780,00	0,00	0,00	24.330.545,00
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	10.354.290,67	1.323.951,96	0,00	0,31	11.678.242,32
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Badan Penghubung Daerah	832.151.142,07	1.139.700,00	2.166.666,58	0,00	835.457.508,65
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	29.005.424.963,95	**25.295.808.664,94**

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan tersebut pada umumnya merupakan pembangunan fisik yang jangka waktu pelaksanaanya melebihi satu tahun anggaran yang diikat dengan kontrak tahun jamak.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 1 Januari 2025 sebesar Rp25.295.808.664,94 dengan mutasi aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.210 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025

ASET TETAP KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
I	**Saldo Awal ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN, 1 Januari 2025**			**25.295.808.664,94**
II	**Penambahan :**			
	1	Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan	2.731.351.942,48	
	2	Mutasi Tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan antar OPD	975.142.000,00	
	3	Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	978.264.356,53	
		Total Penambahan :		**4.684.758.299,01**
III	**Pengurangan :**			
	1	Mutasi Kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan antar OPD	975.142.000,00	
		Total Pengurangan :		**975.142.000,00**
IV	**Saldo Akhir ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN, 31 Desember 2025**			**29.005.424.963,95**

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.684.758.299,01 berasal dari:
   1. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp2.731.351.942,48 antara lain:
      a. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Perencanaan Kantor BPSK Kota Batam Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp33.816.094,00
      b. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp1.404.004.583,00 diantaranya:
         1) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan *Review* Desain Pembangunan Jembatan Batam - Bintan sebesar Rp155.652.081,00
         2) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan *Flyover* Simpang Kota Piring sebesar Rp284.687.000,00
         3) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum (SPAM) Kolong Enam Kijang sebesar Rp340.929.951,00

4) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Kolong Enam Kijang sebesar Rp338.654.451,00
5) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Kp. Cenot dan Kado Desa Mepar Kecamatan Lingga sebesar Rp94.641.900,00
6) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Pengendalian Banjir di Kawasan Surau Zamzatul Qithamir Kp. Wacopek Kel. Gunung Lengkuas, Bintan pada sebesar Rp94.641.900,00
7) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Lorong Fajar Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Lingga sebesar Rp94.797.300,00

c. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan (Tunda Bayar tahun 2025) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp1.202.955.265,48 antara lain:
1. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Tunda Bayar tahun 2025) *Review* Desain Pembangunan Jembatan Batam - Bintan sebesar Rp334.255.743,00
2. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Tunda Bayar tahun 2025) DED Pembangunan *Flyover* Simpang Kota Piring sebesar Rp664.269.800,00
3. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Tunda Bayar tahun 2025) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Pintu Air Dusun 4 Desa Sebesi Kec. Kundur sebesar Rp18.881.366,40
4. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Tunda Bayar tahun 2025) Peningkatan Jalan Dusun 2 Parit gantung Desa Sei ungar Kec. kundur Kabupaten Karimun sebesar Rp99.670.400,00
5. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Tunda Bayar tahun 2025) Drainase Desa Pangke Barat Ke. Merah Barat Kabupaten karimun sebesar Rp85.877.956,08

d. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Tunda Bayar tahun 2025) Pekerjaan Penataan Ruang SMAN 1 Karimun pada Dinas Pendidikan sebesar Rp90.576.000,00

2. Mutasi BMD Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan SK Gubernur Kepulauan Riau No.1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp975.142.000,00
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (Realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam 80%) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp978.264.356,53

B. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp975.142.000,00 berasal dari Mutasi BMD Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

C. Saldo akhir Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.005.424.963,95.

Adapun rincian mutasi aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.211 Rincian Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	797.248.726,00	0,00	90.576.000,00	0,00	887.824.726,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	923.202.500,00	0,00	0,00	0,00	923.202.500,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	34.870.000,00	0,00	0,00	0,00	34.870.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	13.644.767.774,04	0,00	3.582.101.848,48	0,00	17.226.869.622,52
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	975.142.000,00	0,00	0,00	975.142.000,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	29.977.200,00	0,00	0,00	0,00	29.977.200,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	184.467.000,00	0,00	0,00	0,00	184.467.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	4.344.088.844,90	0,00	978.264.356,53	0,00	5.322.353.201,43
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan	4.250.805.800,00	0,00	0,00	0,00	4.250.805.800,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	99.413.820,00	0,00	0,00	0,00	99.413.820,00
Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.825.000,00	0,00	0,00	0,00	11.825.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	33.816.094,00	0,00	33.816.094,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**25.295.808.664,94**	**0,00**	**4.684.758.299,01**	**975.142.000,00**	**29.005.424.963,95**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(4.943.566.093.920,46)	**(4.549.816.476.728,71)**

Akumulasi penyusutan adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
b) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
c) Masa manfaat aset tetap ditetapkan.
d) Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap dilakukan setiap bulan dimulai pada bulan perolehan aset tetap bersangkutan.
e) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method),* dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
f) Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
g) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.212 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		4.549.816.476.728,71	**378.279.897.533,32**	**425.456.725.986,48**	**409.987.006.328,05**	**4.943.566.093.920,46**
1	Dinas Pendidikan	660.901.939.752,70	93.387.323.691,57	3.672.030.170,73	215.964.766,98	757.745.328.848,02
2	Dinas Kesehatan	60.056.275.590,84	1.522.361.810,96	0,00	2.740.972.432,86	58.837.664.968,94
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	309.317.565.946,97	35.851.282.327,00	35.343.505.332,63	0,00	380.512.353.606,60
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	98.958.493.486,10	11.600.455.090,91	2.383.477.004,51	49.300.000,00	112.893.125.581,52
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.649.843.758.387,32	156.199.154.656,04	326.598.778.457,10	462.991.073,37	2.132.178.700.427,09
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	386.361.026.160,92	1.029.624.681,10	3.467.923.135,23	374.620.461.783,95	16.238.112.193,30
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.297.244.419,32	545.740.906,34	0,00	792.856.629,35	5.050.128.696,31
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	8.229.784.798,01	606.342.215,91	0,00	137.888.392,92	8.698.238.621,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.668.859.964,05	351.442.417,85	0,00	13.791.259,71	16.006.511.122,19
10	Dinas Sosial	4.652.003.173,71	382.021.136,33	36.990.750,00	481.501.511,32	4.589.513.548,72
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.345.172.566,14	370.041.469,65	387.398.039,40	44.146.586,86	5.058.465.488,33
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6.034.722.561,49	343.396.672,88	149.009.523,72	381.517.045,29	6.145.611.712,80
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	51.952.605.045,19	3.664.523.783,39	0,00	0,00	55.617.128.828,58
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.344.600.922,04	770.925.833,09	0,00	230.879.821,09	18.884.646.934,04
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.415.866.641,48	399.189.264,39	0,00	47,73	8.815.055.858,14
16	Dinas Perhubungan	303.281.724.163,77	18.510.804.207,47	0,00	7.321.597.239,79	314.470.931.131,45
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.561.429.665,56	1.346.528.431,31	137.888.392,92	400.832.493,41	24.645.013.996,38
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.804.529.527,21	213.740.431,17	224,06	2,00	5.018.270.180,44
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.251.648.759,50	472.389.156,14	0,00	451.799,32	7.723.586.116,32
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15.631.684.359,56	1.932.629.368,94	38.538,00	669.076.363,82	16.895.275.902,68
21	Dinas Kebudayaan	14.932.116.674,35	2.370.679.489,67	0,00	54.620.000,00	17.248.176.164,02
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	24.895.401.430,42	902.376.879,82	294.241.045,72	4.078.750,51	26.087.940.605,45

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	69.501.191.611,98	4.208.035.231,80	751.682.303,42	122.303.533,93	74.338.605.613,27
24	Dinas Pariwisata	8.551.367.033,25	416.212.775,69	9.645.639,89	86.014.973,00	8.891.210.475,83
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	87.739.745.370,47	7.937.085.103,23	96.345.555,50	0,00	95.773.176.029,20
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.742.772.204,91	615.042.048,12	0,00	859.658.745,84	7.498.155.507,19
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.126.279.389,67	127.021.275,97	20,67	326.600.000,00	3.926.700.686,31
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	5.386.192.659,43	2.603.253.809,70	28.737.869.334,81	471.934.380,00	36.255.381.423,94
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	6.519.190.002,56	295.389.696,02	0,00	11.717.812,60	6.802.861.885,98
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.752.408.303,91	136.161.385,71	150.500.076,95	251.050.000,00	4.788.019.766,57
31	Biro Organisasi	1.874.499.408,33	164.712.920,00	0,00	0,00	2.039.212.328,33
32	Biro Administrasi Pimpinan	11.046.729.152,21	401.800.540,14	19.579.999,98	805.860.400,00	10.662.249.292,33
33	Biro Umum	275.684.382.897,05	8.752.491.585,95	437.278.765,83	14.048.177.068,44	270.825.976.180,39
34	Biro Hukum	1.979.979.451,42	66.232.101,88	0,00	0,00	2.046.211.553,30
35	Inspektorat Daerah	8.945.193.783,22	1.352.301.669,35	140.850.000,06	258.526.344,14	10.179.819.108,49
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	205.491.684.952,23	3.022.269.183,81	0,00	4.048.744.628,56	204.465.209.507,48
37	Badan Pendapatan Daerah	55.486.149.519,74	5.410.437.993,34	4.092.989.058,70	30.470.458,80	64.959.106.112,98
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	7.586.085.542,12	439.541.257,71	44.931.873,03	0,99	8.070.558.671,87
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.048.934.769,59	727.177.789,02	7,29	0,00	2.776.112.565,90
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.053.372.118,61	842.672.408,64	7.668.917,53	10.078.750,00	12.893.634.694,78
41	Sekretariat DPRD	77.869.286.468,22	5.150.403.124,31	18.293.808.148,06	16.254.562,50	101.297.243.178,09
42	Badan Penghubung Daerah	12.302.579.945,63	2.624.032.798,80	202.295.670,74	16.686.666,58	15.112.221.748,59
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	389.998.147,51	214.648.912,20	0,00	2,39	604.647.057,32

5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	535.191.876.315,99	**541.842.363.389,04**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan Pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset lainnya per 31 Desember 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp535.191.876.315,99 yang terdiri dari:

Tagihan Jangka Panjang/ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain, merupakan suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah, sedangkan Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian yang terjadi berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp992.008.950,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.213 Rincian Daftar Tuntutan Kerugian Daerah

No	Jenis Kerugian	SKTJM/SKP					Uraian	Nilai Terhutang	Pengembalian s.d. 31 Des 2025	Saldo
		Nomor	Tanggal Penerbitan	Nilai TP/TGR Berdasarkan SKTJM/SKP	Jangka Waktu Penyelesaian TP/TGR (bulan)	Jaminan				
1	TGR Non Bendahara	*tidak ada SKTJM*				-	Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) DPRD Prov. Kepri Tahun Anggaran 2006	450.168.000,00	82.000.000,00	368.168.000,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	SKTJM atas Nama Ipan	01 November 2010	706.668.199,00	24 bulan	Sertifikat Tanah Nomor 797 Tahun 1984	Pengembalian Bendahara Pengeluaran	706.668.199,00	101.075.249,00	605.592.950,00
3	TGR Non Bendahara	004/SKTJM/RUGDA-BPK/2017	16 August 2017	28.500.000,00	24 bulan	Surat Pengoperasian Penguasaan Tanah (Alas Hak)	Pengembalian Belanja	28.500.000,00	18.752.000,00	9.748.000,00
4	TGR Non Bendahara	005/SKTJM/RUGDA-BPK/2017	04 September 2017	12.000.000,00	24 bulan	BPKB Kendaraan Roda Dua	Pengembalian Belanja	12.000.000,00	3.500.000,00	8.500.000,00
Jumlah								**1.197.336.199,00**	**205.327.249,00**	**992.008.950,00**

Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun "Beban Amortisasi" terhadap akun "Akumulasi Amortisasi". Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.055.483.107,06 dengan uraian sebagai berikut:

- Nilai Perolehan	26.469.264.427,06
- Amortisasi	(2.413.781.320,00)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	**24.055.483.107,06**

Amortisasi per Jenis Aset Tidak Berwujud dijelaskan lebih rinci pada **Lampiran 7.** Tabel rekapitulasi per jenis Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.214 Rekapitulasi per Jenis Aset Tidak Berwujud

No.	Jenis Aset Tidak Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan 1 Jan 2025	Amortisasi/Penyusutan		Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan 31 Desember 2025	Nilai Buku
				Semester 1	Semester 2		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 4+5+6*	*8 = 3-7*
1	Lisensi dan Frenchise	123.841.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.841.649,00
2	Software	23.358.457.438,06	2.413.781.320,00	0,00	0,00	2.413.781.320,00	20.944.676.118,06
3	Software Lainnya	493.627.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.627.430,00
4	Kajian	2.493.337.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.337.910,00
	JUMLAH	**26.469.264.427,06**	**2.413.781.320,00**	**0,00**	**0,00**	**2.413.781.320,00**	**24.055.483.107,06**

Mutasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.215 Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025

ASET TAK BERWUJUD				
I	**Saldo Awal ASET TAK BERWUJUD, 1 Januari 2025**			**26.348.603.927,06**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2025	120.660.500,00	
		Total Penambahan :		**120.660.500,00**
IV	**Saldo Akhir ASET TAK BERWUJUD, 31 Desember 2025**			**26.469.264.427,06**

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp120.660.500,00 berasal dari Realisasi belanja Modal Aset Tidak Berwujud berasal dari:
   a) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp88.855.500,00
   b) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp31.805.000,00

B. Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025 senilai Rp26.469.264.427,06

Adapun rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per OPD dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.216 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	11.932.014.480,00	0,00	0,00	0,00	11.932.014.480,00
Dinas Kesehatan	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	5.819.275.000,06	0,00	0,00	0,00	5.819.275.000,06
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.462.280.900,00	0,00	0,00	0,00	1.462.280.900,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.452.437.910,00	0,00	0,00	0,00	2.452.437.910,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00	27.900.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	34.650.000,00	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.101.451,00	0,00	0,00	0,00	15.101.451,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	590.700.000,00	0,00	0,00	0,00	590.700.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.000.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	63.998.500,00	0,00	0,00	0,00	63.998.500,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00
Dinas Kebudayaan	35.167.000,00	0,00	0,00	0,00	35.167.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	795.624.420,00	0,00	0,00	0,00	795.624.420,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	494.166.000,00	0,00	0,00	0,00	494.166.000,00
Dinas Pariwisata	28.160.000,00	0,00	0,00	0,00	28.160.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	401.788.200,00	0,00	0,00	0,00	401.788.200,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	248.831.000,00	0,00	0,00	0,00	248.831.000,00
Biro Hukum	49.324.000,00	0,00	0,00	0,00	49.324.000,00
Inspektorat Daerah	350.945.000,00	0,00	0,00	0,00	350.945.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	386.585.000,00	88.855.500,00	0,00	0,00	475.440.500,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Badan Pendapatan Daerah	113.141.649,00	31.805.000,00	0,00	0,00	144.946.649,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	62.352.711,00	0,00	0,00	0,00	62.352.711,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	369.782.476,00	0,00	0,00	0,00	369.782.476,00
Badan Penghubung Daerah	140.028.230,00	0,00	0,00	0,00	140.028.230,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**26.348.603.927,06**	**120.660.500,00**	**0,00**	**0,00**	**26.469.264.427,06**

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp356.329.356.721,02, terdiri atas:

1. Usulan Penghapusan Aset Tetap akan Dihibahkan/Rusak Berat

   Usulan penghapusan Aset Tetap termasuk Aset Tetap yang direncanakan untuk dihibahkan/dihapuskan sebesar Rp275.903.850.022,38 dengan akumulasi penyusutan atas aset tetap yang direncanakan untuk dihibahkan/dihapuskan sebesar Rp(44.396.614.613,55).

Tabel 5.217 Mutasi Aset Lain-lain atas Aset yang akan dihibahkan/rusak berat

ASET LAIN-LAIN - ASET YANG AKAN DIHIBAHKAN/RUSAK BERAT				
I	**Saldo Awal ASET LAIN LAIN, 1 Januari 2025**			**276.356.139.582,38**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Aset Lain-lain 2025	479.584.000,00	
	2	Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	16.893.521.441,00	
	3	Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
	4	Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Lainnya	685.786.654,00	
	5	Mutasi Masuk Aset Lain-lain karena Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD	118.851.487.006,39	
		Total Penambahan :		**136.960.379.101,39**
III	**Pengurangan :**			
	1	Penghapusan Aset Lain-lain karena dihibahkan	4.965.589.550,00	
	2	Penghapusan Aset Lain-lain karena dimusnahkan	3.661.625.211,00	
	3	Penghapusan Aset Lain-lain karena sebab lain	1.537.700.730,00	
	4	Penghapusan Aset Lain-lain karena penjualan	7.916.682.164,00	
	5	Mutasi keluar Aset Lain-lain karena Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD	118.851.487.006,39	
	6	Reklasifikasi Keluar Aset Lain-Lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	272.146.000,00	
	7	Reklasifikasi Keluar Aset Lain-Lain ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.023.000,00	

	8	Reklasifikasi Keluar Aset Lain-Lain ke Belanja Pemeliharaan	179.415.000,00	
		Total Pengurangan :		**137.412.668.661,39**
		-		
IV	**SALDO AKHIR ASET LAIN-LAIN - ASET YANG AKAN DIHIBAHKAN/RUSAK BERAT, 31 Desember 2025**			**275.903.850.022,38**

Berdasarkan tabel mutasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp136.960.379.101,39 antara lain:

1. Realisasi Belanja Modal Aset Lainya BLUD 2025 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp479.584.000,00

2. Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.893.521.441,00 antara lain :

5.3.1.4.1 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya akibat usulan pemusnahan pada Inspektorat Daerah berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.4/017.1/BKAD-SET/2025, Tanggal 3 Januari 2025 sebesar Rp258.038.100,00.

5.3.1.4.2 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan pemusnahan BMD pada Dinas Perbedayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.3.2/208.2/BKAD-SET/2025, Tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp350.443.360,00

5.3.1.4.3 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp387.747.484,00 antara lain:

1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan pemusnahan BMD berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.3.2/504.1/BKAD-SET/2025, Tanggal 4 Juni 2025 sebesar Rp58.728.091,00

2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan pemusnahan BMD berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.3.2/504.2/BKAD-SET/2025, Tanggal 4 Juni 2025 sebesar Rp93.578.920,00

3) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penjualan BMD berdasarkan Permohonan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/582/BKAD-SET/2024, Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp235.440.473,00.

5.3.1.4.4 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Pemusnahan BMD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.4/1049.3/BKAD-SET/2025, Tanggal 31 Oktober 2025 sebesar Rp596.776.018,00.

5.3.1.4.5 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Pemusnahan BMD pada Biro Administrasi Pimpinan berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.4/1049.2/BKAD-SET/2025, Tanggal 31 Oktober 2025 sebesar Rp732.349.200,00.

5.3.1.4.6 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penjualan BMD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Permohonan Penjualan Barang Milik Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/582/BKAD-SET/2024, Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp859.659.000,00.

5.3.1.4.7 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penjualan BMD pada Biro Umum berdasarkan Permohonan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/582/BKAD-SET/2024, Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp9.141.218.549,00.

5.3.1.4.8 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penjualan BMD pada Dinas Sosial berdasarkan Permohonan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/582/BKAD-SET/2024, Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp313.488.000,00

5.3.1.4.9 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penjualan BMD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Permohonan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/582/BKAD-SET/2024, Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp200.991.500,00.

5.3.1.4.10 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penghapusan BMD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang) berdasarkan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.4/637.2/BKAD-SET/2025, Tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp1.018.936.230,00.

5.3.1.4.11 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penjualan BMD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Permohonan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/582/BKAD-SET/2024, Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp500.000.000,00.

5.3.1.4.12 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Pemusnahan BMD pada Dinas Kebudayaan berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.3.2/1017.2/DISBUD-SET/2025, Tanggal 17 Oktober 2025 sebesar Rp54.620.000,00.

5.3.1.4.13 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain yang merupakan Hibah BMD pada Biro Umum berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kota Batam Nomor B/000.2.3.2/476.3/BKAD-SET/ 2025, Nomor 159.1/900.1.4.3 /V/2025 Tanggal 19 Mei 2025 sebesar Rp2.243.900.000,00.

5.3.1.4.14 Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan pada Dinas Pendidikan (Kuasa Pengguna Barang Dinas Pendidikan pada SMK Negeri 1 Tanjungpinang) berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah B/000.2.4/911.1/BKAD-SET/2025, Tanggal 15 September 2025 sebesar Rp235.354.000,00

3. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya yang merupakan usulan pemusnahan BMD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.4/721.4/BKAD-SET/2025, Tanggal 30 Juli 2025 sebesar Rp50.000.000,00.

4. Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp685.786.654,00 antara lain:

a. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp666.151.654,00 antara lain :
   1) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain yang merupakan usulan pemusnahan BMD berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032/781.3/BKAD-SET/2024, Tanggal 2 September 2024 sebesar Rp56.828.000,00.
   2) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain yang merupakan usulan pemusnahan BMD pada Dinas Pendidikan (SMKN 1 Tanjungpinang) berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah B/000.2.4/911.1/BKAD-SET/2025, Tanggal 15 September 2025 sebesar Rp303.885.560,00.
   3) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain yang merupakan usulan pemusnahan BMD berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.4/945.1/BKAD-SET/2025, Tanggal 24 September 2025 sebesar Rp305.438.094,00.

b. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain yang merupakan usulan pemusnahan BMD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.3.2/208.2/BKAD-SET/2025, Tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp19.635.000,00.

5. Mutasi Masuk Aset Lain-lain karena Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD sebesar Rp118.851.487.006,39 antara lain :

   a. Mutasi Masuk Aset Lain-lain karena Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Nomor 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp117.720.396.627,79.

   b. Mutasi Masuk Aset Lain-lain karena Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Nomor 105/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp843.941.770,00.

   c. Mutasi Masuk Aset Lain-lain karena Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD pada Dinas Pendidikan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Nomor 104/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp287.148.608,60.

B. Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp137.412.668.661,39 berasal dari:

1. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp4.965.589.550,00 merupakan Penghapusan Aset Lain-lain karena dihibahkan, antara lain:

   a. Penghapusan BMD pada Biro Umum sebesar Rp2.852.409.000,00, antara lain:

      1) Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 682 Tahun 2025, Tanggal 4 Juni 2025 sebesar Rp2.243.900.000,00

      2) Penghapusan BMD berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor B/000.2.3.2/1125.2/BKAD-SET/2025 dan 181/1.1.02/6/BA/2025 Tanggal 04 Desember 2025 sebesar Rp608.509.000,00

b. Penghapusan BMD pada Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1318 Tahun 2025, Tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp2.113.180.550,00

2. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp3.661.625.211,00 merupakan penghapusan aset lain-lain karena dimusnahkan, antara lain :

   a. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 602/KPTS-27/I/2025, Tanggal 20 Januari 2025 pada Inspektorat Daerah sebesar Rp273.538.100,00.

   b. Penghapusan BMD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp420.078.360,00 antara lain:

      1) Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 880/KPTS-27/III/2025, Tanggal 24 Maret 2025 sebesar Rp370.078.360,00.

      2) Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1311/KPTS-27/VIII/2025, Tanggal 6 Agustus 2025 sebesar Rp50.000.000,00.

   c. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1213/KPTS-27/VII/2025, Tanggal 9 Juli 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp159.251.011,00.

   d. Penghapusan BMD pada Dinas Pendidikan sebesar Rp901.505.654,00 antara lain:

      1) Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1295/KPTS-27/VIII/2025, Tanggal 1 Agustus 2025 pada Dinas Pendidikan (SMKN 2 Batam) sebesar Rp56.828.000,00.

      2) Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1493/KPTS-27/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 pada Dinas Pendidikan (SMKN 1 Tanjungpinang) sebesar Rp539.239.560,00.

      3) Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1552/KPTS-27/X/2025, Tanggal 17 Oktober 2025 pada Dinas Pendidikan (SMAN 6 Tanjungpinang) sebesar Rp305.438.094,00

   e. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1322/KPTS-27/VIII/2025, Tanggal 8 Agustus 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp71.089.000,00.

   f. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1725/KPTS-27/XII/2025, Tanggal 12 Desember 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.049.193.886,00.

   g. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1725/KPTS-27/XII/2025, Tanggal 12 Desember 2025 pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp54.620.000,00.

   h. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1237/KPTS-27/XI/2025, Tanggal 24 November 2025 pada Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp732.349.200,00.

3. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp1.537.700.730,00 merupakan Penghapusan Aset Lain-lain karena sebab lain, antara lain:

   a. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1372/KPTS-27/VIII/2025, Tanggal 25 Agustus 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp467.342.500,00.

b. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp26.750.000,00.
c. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 812 Tahun 2025, Tanggal 25 Agustus 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang) sebesar Rp1.018.936.230,00.
d. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp24.672.000,00.

4. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp7.916.682.164,00 merupakan penghapusan aset lain-lain karena penjualan, antara lain:
   a. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp235.440.473,00.
   b. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp715.310.000,00.
   c. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Biro Umum sebesar Rp5.087.032.091,00.
   d. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp859.659.000,00.
   e. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp330.010.000,00.
   f. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp344.893.600,00.
   g. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Dinas Sosial sebesar Rp313.488.000,00.
   h. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp30.849.000,00.

5. Penghapusan BMD sebesar Rp118.851.487.006,39 merupakan Penghapusan BMD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dikarenakan penyerahan atau pengalihan status penggunaan BMD berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Nomor 104/BAST/DPKP-PK/TL/2025, Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp287.148.608,60, Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Nomor 105/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp843.941.770,00 dan Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Nomor 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025, Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp117.720.396.627,79.

6. Reklasifikasi Keluar Aset Lain-Lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp272.146.000,00

7. Reklasifikasi Keluar Aset Lain-Lain ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp28.023.000,00

8. Reklasifikasi Keluar Aset Lain-Lain ke Belanja Pemeliharaan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp179.415.000,00

C. Saldo akhir aset lain-lain yang akan dihibahkan/rusak berat sebesar Rp275.903.850.022,38.

Tabel 5.218 Rincian Mutasi Aset Lain-lain – Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dinas Pendidikan	58.707.781.620,89	1.188.654.262,60	901.505.654,00	58.994.930.229,49
Dinas Kesehatan	6.364.786.737,50	0,00	0,00	6.364.786.737,50
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	17.561.084.497,00	0,00	0,00	17.561.084.497,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	24.607.800.719,00	479.584.000,00	849.149.600,00	24.238.235.119,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	15.258.157.993,00	117.720.396.627,79	0,00	132.978.554.620,79
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	118.851.487.006,39	0,00	118.851.487.006,39	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	456.717.868,00	596.776.018,00	1.049.193.886,00	4.300.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	47.625.000,00	0,00	0,00	47.625.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	240.461.796,00	0,00	0,00	240.461.796,00
Dinas Sosial	0,00	313.488.000,00	313.488.000,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.865.794.702,00	843.941.770,00	0,00	2.709.736.472,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	420.078.360,00	420.078.360,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.224.178.000,00	0,00	0,00	2.224.178.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31.207.820,00	200.991.500,00	30.849.000,00	201.350.320,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	6.445.226.750,00	0,00	2.443.190.550,00	4.002.036.200,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.944.000,00	387.747.484,00	394.691.484,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.701.225.241,00	500.000.000,00	0,00	3.201.225.241,00
Dinas Kebudayaan	0,00	54.620.000,00	54.620.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.442.800,00	0,00	0,00	49.442.800,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	6.712.612.472,70	0,00	467.342.500,00	6.245.269.972,70
Dinas Pariwisata	1.767.715.600,20	0,00	0,00	1.767.715.600,20
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.554.838.500,00	0,00	0,00	4.554.838.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80.557.200,00	859.659.000,00	859.659.000,00	80.557.200,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	270.755.520,00	0,00	0,00	270.755.520,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.126.149.799,70	0,00	0,00	1.126.149.799,70
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	725.124.200,00	732.349.200,00	732.349.200,00	725.124.200,00
Biro Umum	2.979.218.919,00	11.385.118.549,00	7.939.441.091,00	6.424.896.377,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	25.500.000,00	258.038.100,00	273.538.100,00	10.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Badan Keuangan dan Aset Daerah	764.060.000,00	1.018.936.230,00	1.760.996.230,00	22.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	49.123.000,00	0,00	0,00	49.123.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.761.058.820,00	0,00	0,00	1.761.058.820,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	113.263.000,00	0,00	71.089.000,00	42.174.000,00
Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**276.356.139.582,38**	**136.960.379.101,39**	**137.412.668.661,39**	**275.903.850.022,38**

Sedangkan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain untuk Aset yang akan dihibahkan/rusak berat pada tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.219 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dinas Pendidikan	93.648.822,00	215.964.766,98	215.964.766,98	93.648.822,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	17.561.084.497,00	0,00	0,00	17.561.084.497,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	14.044.474.579,00	0,00	344.893.600,00	13.699.580.979,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	495.090.406,00	0,00	0,00	495.090.406,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	170.105.644,00	0,00	170.105.644,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	596.776.002,00	596.776.002,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84.963.184,00	0,00	0,00	84.963.184,00
Dinas Sosial	0,00	313.488.000,00	313.488.000,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.755.663.537,00	170.105.644,00	0,00	1.925.769.181,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	377.926.349,81	377.926.349,81	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	200.991.500,00	30.849.000,00	170.142.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	598.560.029,00	0,00	545.730.515,00	52.829.514,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.577.218,00	387.747.484,00	392.324.702,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	302.579.978,00	500.000.000,00	0,00	802.579.978,00
Dinas Kebudayaan	0,00	54.620.000,00	54.620.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	112.941.104,65	0,00	0,00	112.941.104,65
Dinas Pariwisata	189.620.887,20	0,00	0,00	189.620.887,20
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	859.658.745,84	859.658.745,84	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	270.755.520,00	0,00	0,00	270.755.520,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.100.817.845,70	0,00	0,00	1.100.817.845,70
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	528.458.032,00	721.107.400,00	721.107.400,00	528.458.032,00
Biro Umum	1.394.010.259,00	11.385.118.549,00	7.330.932.091,00	5.448.196.717,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	257.484.794,67	257.484.794,67	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	669.955.000,00	1.018.936.200,00	1.666.891.200,00	22.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	48.871.000,00	0,00	0,00	48.871.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.761.058.820,00	0,00	0,00	1.761.058.820,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Sekretariat DPRD	93.054.626,00	0,00	71.089.000,00	21.965.626,00
Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**41.286.530.988,55**	**17.059.925.436,30**	**13.949.841.811,30**	**44.396.614.613,55**

2. Piutang kontribusi hasil penjualan logam timah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sejak Tahun 2012 belum diterima sebesar Rp74.743.000,00;
3. Piutang yang tidak disetujui Klaimnya kepada Askes/Jamsostek pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp658.871.262,89, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.220 Piutang Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
1	ASKES	37.015.108,00
2	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	5.049.750,00
3	Jamsostek	592.803.199,00
4	Jamkesmas	24.003.205,89
	JUMLAH	**658.871.262,89**

4. Pada periode 31 Desember 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo aset lainnya – aset lain-lain sebesar Rp183.029.975,50 yang berasal dari hasil temuan oleh auditor atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang belum ditindaklanjuti sampai dengan periode berakhir selanjutnya akan menjadi aset Tuntutan Ganti Kerugian Daerah apabila sudah ditetapkan oleh Majelis TGR.

Tabel 5.221 Rekapitulasi hasil temuan auditor yang menambah Aset Lainnya - Aset lain-lain

No	SKPD	Saldo Awal tahun 2024	Penambahan Aset Lain-lain tahun 2025		Saldo Akhir
		Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Aset Lainnya - Aset Lain-lain
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (3+4+5)*
1	Dinas Pendidikan	95.738.378,00	38.759.244,00	0,00	134.497.622,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	13.494.600,00	0,00	13.494.600,00
3	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	9.362.514,00	9.362.514,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	719.650,00	0,00	719.650,00
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	2.368.800,00	0,00	2.368.800,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	15.691.880,00	0,00	15.691.880,00
7	Biro Umum	0,00	3.128.640,00	0,00	3.128.640,00
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.766.269,50	0,00	3.766.269,50
	JUMLAH	**95.738.378,00**	**77.929.083,50**	**9.362.514,00**	**183.029.975,50**

5. Selain itu terdapat reklasifikasi aset persediaan barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang sudah tidak dalam penguasaan OPD terkait, namun belum didukung dengan administrasi BAST sebesar Rp79.508.862.460,25 antara lain pada Dinas Pendidikan sebesar Rp51.443.186.125,60, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp25.226.395.058,56 dan juga Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebesar Rp2.839.281.276,09. Persediaan tersebut berasal dari persediaan Tahun 2020 ke bawah, dan hal tersebut sudah diungkapkan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 82.B/LHP/XVIII.TJP/05/2021, dikarenakan adanya permasalahan atas penatausahaan persediaan yaitu penyerahan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga belum didukung dengan naskah perjanjian hibah daerah. Persediaan tersebut sudah tidak memenuhi definisi sebagai persediaan karena sudah tidak dalam penguasaan OPD terkait dan telah diusulkan oleh pengguna barang pada OPD terkait kepada pengelola

barang untuk dihapuskan dengan melengkapi administrasi serah terima barang sebelum penghapusan dilakukan, dengan rincian surat usulan sebagai berikut:

a. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan nomor B/032/233/PUPP.1/2024 tanggal 22 April 2024.
b. Surat Kepala Dinas Pendidikan nomor 032.1/350/2024 tanggal 22 April 2024.
c. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor B/032/52/DPKP/2024 tanggal 22 April 2024.

Atas dasar usulan penghapusan tersebut persediaan direklasifikasi ke Aset Lain-Lain.

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah, disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada sub rincian objek Uang Jaminan Reklamasi dengan akun lawan Utang Jangka Panjang Lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 sebesar Rp198.211.642.151,46 yang merupakan saldo atas jaminan pascatambang dan jaminan reklamasi yang sudah atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang akan digunakan Gubernur untuk menunjuk pihak ketiga jika nantinya perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan komitmennya. Rincian Kas Yang Dibatasi Penggunaannya dijelaskan lebih lanjut dalam Utang Jangka Panjang Lainnya.

Mutasi Aset Lainnya– Kas yang dibatasi pengggunannya dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.222 Mutasi Aset Lainnya - Kas yang Dibatasi Penggunaannya

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2025					
Saldo Awal Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 1 Januari 2025					**196.353.186.257,62**
	Penambahan :				
	1	**Penempatan dan Penambahan Bunga Deposito dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi**		626.020.566,62	
		Kabupaten Bintan	57.260.078,49		
		Kota Tanjungpinang	276.750,00		
		Kabupaten Lingga	103.502.497,44		
		Kota Batam	25.260.127,00		
		Kabupaten Karimun	438.507.423,63		
		Kabupaten Natuna	1.213.690,06		
	2	**Penempatan dan Penambahan Bunga Deposito, dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang**		6.563.954.523,02	
		Kabupaten Bintan	1.161.825.579,53		
		Kota Tanjungpinang	28.292.828,00		
		Kabupaten Lingga	197.595.758,67		
		Kota Batam	19.686.084,00		
		Kabupaten Karimun	5.156.554.272,82		
		Kabupaten Natuna	0,00		
	Total Penambahan :				**7.189.975.089,64**
	Pengurangan :				

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2025					
	1	**Pencairan dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi**		1.222.324.026,61	
		Kabupaten Karimun	1.222.324.026,61		
	2	**Pencairan dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang**		4.109.195.169,19	
		Kabupaten Bintan	63.747,00		
		Kabupaten Karimun	4.109.131.422,19		
	Total Pengurangan :				**5.331.519.195,80**
Saldo Akhir Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 31 Desember 2025					**198.211.642.151,46**

Tabel 5.223 Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
1	Dinas Pendidikan	0,00	11.932.014.480,000	(1.935.966.000,00)	58.994.930.229,489	(93.648.822,00)	0,00	51.577.683.747,600	120.475.013.635,09
2	Dinas Kesehatan	0,00	66.000.000,000	0,00	6.364.786.737,500	0,00	0,00	13.494.600,00	6.444.281.337,50
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	5.819.275.000,060	(48.000.000,00)	17.561.084.497,000	(17.561.084.497,00)	0,00	0,00	5.771.275.000,06
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	0,00	1.462.280.900,000	0,00	24.238.235.119,000	(13.699.580.979,00)	0,00	658.871.262,890	12.659.806.302,89
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	2.452.437.910,000	0,00	132.978.554.620,790	(495.090.406,00)	0,00	25.226.395.058,560	160.162.297.183,35
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.643.790,090	2.848.643.790,09
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.000.000,000	0,00	4.300.000,000	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	47.625.000,000	0,00	0,00	719.650,00	48.344.650,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	240.461.796,000	(84.963.184,00)	0,00	0,00	155.498.612,00
10	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	9.500.000,000	0,00	2.709.736.472,000	(1.925.769.181,00)	0,00	0,00	793.467.291,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.748.000,000	27.900.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.648.000,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	34.650.000,000	0,00	2.224.178.000,000	0,00	0,00	2.368.800,00	2.261.196.800,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	44.000.000,000	0,00	201.350.320,000	(170.142.500,00)	0,00	0,00	75.207.820,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	15.101.451,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.101.451,00

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
16	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	4.002.036.200,000	(52.829.514,00)	0,00	0,00	3.949.206.686,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	590.700.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.700.000,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	259.000.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	63.998.500,000	(14.998.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	43.000.000,000	0,00	3.201.225.241,000	(802.579.978,00)	0,00	0,00	2.441.645.263,00
21	Dinas Kebudayaan	0,00	35.167.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.167.000,00
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	795.624.420,000	(244.999.820,00)	49.442.800,000	0,00	0,00	0,00	600.067.400,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	494.166.000,000	0,00	6.245.269.972,700	(112.941.104,65)	0,00	15.691.880,00	6.642.186.748,05
24	Dinas Pariwisata	0,00	28.160.000,000	0,00	1.767.715.600,200	(189.620.887,20)	0,00	0,00	1.606.254.713,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	39.400.000,000	0,00	4.554.838.500,000	0,00	0,00	74.743.000,000	4.668.981.500,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	2.750.000,000	0,00	80.557.200,000	0,00	0,00	0,00	83.307.200,00
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	270.755.520,000	(270.755.520,00)	0,00	0,00	0,00
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	8.700.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	401.788.200,000	0,00	1.126.149.799,700	(1.100.817.845,70)	0,00	0,00	427.120.154,00
31	Biro Organisasi	8.500.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	725.124.200,000	(528.458.032,00)	0,00	0,00	196.666.168,00
33	Biro Umum	0,00	248.831.000,000	0,00	6.424.896.377,000	(5.448.196.717,00)	0,00	3.128.640,00	1.228.659.300,00
34	Biro Hukum	0,00	49.324.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.324.000,00
35	Inspektorat Daerah	0,00	350.945.000,000	0,00	10.000.000,000	0,00	0,00	0,00	360.945.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	973.760.950,000	475.440.500,000	0,00	22.000.000,000	(22.000.000,00)	198.211.642.151,460	3.766.269,50	199.664.609.870,96
37	Badan Pendapatan Daerah	0,00	144.946.649,000	0,00	49.123.000,000	(48.871.000,00)	0,00	0,00	145.198.649,00
38	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	62.352.711,000	0,00	1.761.058.820,000	(1.761.058.820,00)	0,00	0,00	62.352.711,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	6.240.000,000	(6.240.000,00)	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sekretariat DPRD	0,00	369.782.476,000	(169.817.000,00)	42.174.000,000	(21.965.626,00)	0,00	0,00	220.173.850,00
42	Badan Penghubung Daerah	0,00	140.028.230,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.028.230,00
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	992.008.950,00	26.469.264.427,06	(2.413.781.320,00)	275.903.850.022,38	(44.396.614.613,55)	198.211.642.151,46	80.425.506.698,64	535.191.876.315,99

5.3.1.5 Properti Investasi

Properti Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	102.645.507.704,21	**0,00**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

5.3.1.5.1 digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

5.3.1.5.2 dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan akuntansi yang mengatur tentang properti investasi sebagai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 17 (PSAP 17) diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan aset Properti Investasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1183 Tahun 2025 tentang Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Properti Investasi dengan nilai perolehan per 31 Desember 2025 sebesar Rp102.645.507.704,21 yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.224 Rekapitulasi Aset Properti Investasi Per 31 Desember 2025

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NIBAR	LUAS (m2)	ALAMAT	JENIS HAK	TANGGAL HAK	NOMOR HAK	NAMA PEMEGANG HAK	NILAI PEROLEHAN (Rp)	TANGGAL PEROLEHAN	STATUS PENGGUNAAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12012126000000010000200613101010 40010000006	18.144,00	Tanah Perkantoran /Dompak persil P4	Hak Pakai	29 September 2022	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	145.152.000,00	26 Desember 2006	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
2	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12012126000000010000200613101010 40010000007	20.000,00	Tanah Perkantoran /Dompak persil P7	Hak Pakai	23 September 2022	32.05.04.05.4.00071	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	140.000.000,00	26 Desember 2006	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
3	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12012126000000010000200613101010 40010000053	13.710,00	Tanah Perkantoran /Dompak persil P 9	Hak Pakai	23 September 2022	32.05.04.05.4.00071	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	311.997.000,00	26 Desember 2006	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12012126000000010000200613101010 40010000054	13.920,00	Tanah Perkantoran /Dompak persil P 8	Hak Pakai	23 September 2022	32.05.04.05.4.00071	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	97.440.000,00	26 Desember 2006	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12012126000000010000200713101010 40010000087	36.886,00	Tanah Perkantoran /Dompak persil P149	Hak Pakai	29 September 2022	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	181.727.000,00	27 Desember 2007	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
6	1.3.1.01.02.01.003	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	12012126000000010000200613101020 10030000002	14.280,00	Jl. Dompak Sebrang	Hak Pakai	19 Desember 2019	32.05.04.05.4.00039	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	100.000.000,00	31 Desember 2006	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
7	1.3.1.01.03.07.002	Tanah Untuk Jalan Propinsi	12012100030000000000002020131010 3070020000001	38.310,33	Tanjung Pinang Kota	HPL	20 Desember 2024	NIB. 32.05.000004031.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	101.669.191.704,21	31 Desember 2020	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Jumlah		**155.250,33**						**102.645.507.704,21**		

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	409.238.846.679,17	**651.254.610.738,43**

Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar Rp409.238.846.679,17 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp211.027.204.527,71 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp198.211.642.151,46.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dipenuhi/diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp211.027.204.527,71 terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp144.172.310,00, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.270.103.058,34, Utang Belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.438.973.655,37.

Kewajiban Jangka Pendek selain Utang PFK dan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp209.612.929.159,37 terdiri dari:

5.3.2.1.1.1.1 Utang Belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp60.698.875.497,00; dan
2. Utang Belanja selain Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp144.475.080.007,00 yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.301.534.175,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp108.971.540.321,58, Utang Belanja Hibah sebesar Rp5.218.176.234,73, dan Utang Belanja Modal sebesar Rp27.983.829.275,69.

5.3.2.1.1.1.2 Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.438.973.655,37.

Utang Belanja selain Bagi Hasil Pajak Daerah dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan total sebesar Rp148.914.053.662,37 (Rp144.475.080.007,00 + Rp4.438.973.655,37) merupakan utang yang timbul dari kegiatan belanja Perangkat Daerah yang hingga akhir tahun 2025 belum dapat dibayarkan karena keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Atas Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp209.612.929.159,37 tersebut, terdapat sisa kewajiban tahun 2024 sebesar Rp20.912.069.342,11 yang belum terselesaikan dan penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp188.700.859.817,26, dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 terdiri dari sisa kewajiban tahun 2024 sebesar Rp17.445.619.145,61 dan penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp187.728.336.358,39.

5.3.2.1.1.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.438.973.655,37 terdiri dari sisa kewajiban tahun 2024 sebesar Rp3.466.450.196,50 dan Utang tahun 2025 sebesar Rp972.523.458,87 yang berasal dari penyesuaian saldo awal atas utang tahun sebelumnya sebesar Rp1.054.320.894,87 dikurangi realisasi pelunasan sebesar Rp81.797.436,00.

Rincian sisa kewajiban tahun 2024 dan penambahan utang 2025 atas Kewajiban Jangka Pendek pada Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya ditunjukkan **pada Lampiran 9**.

Penjelasan lebih rinci kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	144.172.310,00	**14.391.867,00**

Utang perhitungan fihak ketiga (PFK) merupakan utang yang timbul atas potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir tahun. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp144.172.310,00. Selanjutnya dari total saldo utang tersebut, terdapat *outstanding* penyetoran pajak di akhir tahun 2025 sebesar Rp33.872.068,00 yang telah diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui penerbitan SP2D di tahun 2025 namun pengurangan nilai rekening Kas Daerah baru diproses oleh pihak perbankan pada tanggal 1 Januari 2026. Rincian Utang PFK dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.225 Rekapitulasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh Ps 4 (2)	PPN	JUMLAH PFK 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*
1	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 2 Karimun	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 3 Batam	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 5 Batam	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 1 Bintan Timur	0,00	0,00	299.956,00	0,00	2.199.681,00	2.499.637,00
5	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Lingga Utara	162.000,00	0,00	912.100,00	0,00	16.816.939,00	17.891.039,00
6	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN 1 Tanjungpinang	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN 2 Tanjungpinang	60.000,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	69.920,00
8	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN Batam	2.910.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00
9	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN Karimun	640.000,00	0,00	888.600,00	0,00	0,00	1.528.600,00
10	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN Kundur	80.000,00	0,00	107.440,00	0,00	0,00	187.440,00
11	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Palmatak	115.000,00	0,00	94.500,00	0,00	5.062.326,00	5.271.826,00
12	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Tanjungpinang	337.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	352.500,00
13	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 2 Tanjungpinang	3.129.500,00	0,00	450.760,00	0,00	11.722.758,00	15.303.018,00
14	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Bintan Timur	2.624.280,00	0,00	1.042.368,00	0,00	0,00	3.666.648,00
15	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Bunguran Barat	0,00	0,00	740.200,00	0,00	10.212.054,00	10.952.254,00
16	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00	316.443,00	316.443,00
17	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Pulau Tiga Barat	30.000,00	0,00	244.800,00	0,00	1.444.863,00	1.719.663,00

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh Ps 4 (2)	PPN	JUMLAH PFK 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*
18	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Siantan Timur	115.000,00	0,00	94.500,00	0,00	5.062.326,00	5.271.826,00
19	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Singkep	0,00	0,00	2.202.800,00	0,00	21.033.388,00	23.236.188,00
20	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Singkep Selatan	1.035.000,00	0,00	733.680,00	0,00	0,00	1.768.680,00
21	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Ungar	0,00	0,00	0,00	0,00	346.846,00	346.846,00
22	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 17 Batam	1.687.000,00	0,00	2.632.550,00	0,00	0,00	4.319.550,00
23	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 25 Batam	1.739.500,00	0,00	1.261.948,00	0,00	0,00	3.001.448,00
24	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 26 Batam	1.942.400,00	0,00	533.600,00	0,00	0,00	2.476.000,00
25	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 28 Batam	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 3 Kundur	870.000,00	0,00	762.485,00	0,00	2.544.732,00	4.177.217,00
27	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 8 Batam	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 1 Batam	0,00	0,00	1.014.529,00	0,00	0,00	1.014.529,00
29	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 1 SKL	615.000,00	0,00	205.920,00	0,00	0,00	820.920,00
30	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 2 Batam	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
31	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 7 Batam	100.000,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	215.300,00
32	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN Kundur Utara	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
33	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	0,00	314.250,00	0,00	0,00	0,00	314.250,00
34	Badan Pendapatan Daerah	0,00	314.864,00	0,00	0,00	2.309.009,00	2.623.873,00
35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	3.494.400,00	0,00	19.219.200,00	22.713.600,00
36	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	188.262,00	591.681,00	779.943,00
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	540.870,00	0,00	0,00	3.966.380,00	4.507.250,00
38	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	389.712,00	0,00	0,00	2.857.690,00	3.247.402,00
	JUMLAH	**18.354.680,00**	**1.559.696,00**	**18.363.356,00**	**188.262,00**	**105.706.316,00**	**144.172.310,00**

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.270.103.058,34	**0,00**

Pendapatan Diterima Dimuka digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat transaksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.270.103.058,34 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.126 Rekapitulasi Pendapatan Diterima Dimuka OPD per 31 Desember 2025

No	Jenis Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah
1	**Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III**	**900.368.250,00**
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	900.368.250,00
2	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja**	**121.360.441,67**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	121.360.441,67
3	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi**	**116.666.666,67**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	116.666.666,67
4	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**	**131.707.700,00**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	37.510.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	27.600.000,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	66.597.700,00
	Total	**1.270.103.058,34**

Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka dijelaskan pada **Lampiran 8.**

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	205.173.955.504,00	**451.420.582.417,31**

Utang Belanja digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Utang belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 yang terdiri dari Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp60.698.875.497,00 yang dicatat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 258 Tahun 2026 tentang Besaran Tunda Salur dan Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Sedangkan Utang pihak ketiga terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.301.534.175,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp108.971.540.321,58, Utang Belanja Hibah sebesar Rp5.218.176.234,73, dan Utang Belanja Modal sebesar Rp27.983.829.275,69.

Utang Belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 terdiri dari sisa kewajiban tahun 2024 yang belum terselesaikan sebesar Rp17.445.619.145,61 dan penambahan Utang Belanja di tahun 2025 sebesar Rp187.728.336.358,39. Penyebab belum terselesaikan kewajiban di tahun 2024 dikarenakan beberapa kendala administratif antara lain:

5.3.2.1.3.1.1 Pada Dinas Pendidikan, masih terdapat penyedia yang belum mengajukan permohonan pembayaran dikarenakan ketidaksesuaian nilai hasil reviu dengan yang

ditagihkan oleh pihak ketiga, dan masih ada nilai kewajiban yang masih dalam tahap proses reviu Inspektorat/APIP.

5.3.2.1.3.1.2 Pembayaran kewajiban pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud khususnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum dapat dibayarkan disebabkan belum dapat dianggarkan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2025 dikarenakan ketersediaan kas yang belum memadai.

5.3.2.1.3.1.3 Belum terselesaikannya kewajiban pada Dinas Perumahan dan Permukiman disebabkan oleh keberadaan pihak ketiga yang tidak dapat ditelusuri sehingga belum ada pengajuan permohonan pembayaran.

5.3.2.1.3.1.4 Kewajiban pada Sekretariat DPRD merupakan utang belanja kepada PT. Telkom yang terbentuk sejak tahun 2017 dan belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Meskipun upaya konfirmasi aktif telah dilaksanakan secara berkala melalui penyampaian surat resmi maupun kunjungan langsung, pihak PT. Telkom belum memberikan tanggapan ataupun penjelasan formal baik secara tertulis maupun lisan terkait penyelesaian hak tagih dimaksud.

Dari total saldo penambahan Utang Belanja di tahun 2025 sebesar Rp187.728.336.358,39, terdapat saldo utang pada akun Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp90.891.100,00 yang merupakan kewajiban atas dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik pada beberapa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bersumber dari subkegiatan pada Dinas Pendidikan yang belum disalurkan per 31 Desember 2025 kepada penerima bantuan oleh sekolah. Adapun pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Berikut ini adalah tabel rincian Utang Belanja:

Tabel 5.227 Rekapitulasi Utang Belanja per 31 Desember 2025

JENIS UTANG BELANJA	JUMLAH
Utang Belanja Pegawai	2.301.534.175,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	108.971.540.321,58
Utang Belanja Hibah	5.218.176.234,73
Utang Belanja Modal	27.983.829.275,69
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	60.698.875.497,00
SALDO AKHIR UTANG BELANJA	**205.173.955.504,00**

Berikut ini adalah tabel mutasi utang belanja per 31 Desember 2025:

Tabel 5.228 Mutasi Utang Belanja Per 31 Desember 2025

MUTASI UTANG BELANJA						
Saldo Awal Utang Belanja, 1 Januari 2025						**451.420.582.417,31**
	Penambahan Utang Belanja Tahun 2025 :					
	1	**Penetapan Utang Belanja Pegawai**			**943.177.607,00**	
	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	943.177.607,00		
	-	-	-			
	2	**Penetapan Utang Belanja Barang dan Jasa**			**91.600.102.704,76**	
		-	Dinas Pendidikan	1.860.327.380,27		
		-	Dinas Kesehatan	1.600.223.747,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	3.580.733.349,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	13.350.665.083,00		
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	7.528.529.224,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	15.894.691.410,20		
		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.860.203.593,09		
		-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	283.240.123,00		
		-	Dinas Sosial	120.080.000,00		
		-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	265.082.229,00		
		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	350.786.590,00		
		-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.584.492.001,00		
		-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.893.500,00		
		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.000.000,00		
		-	Dinas Perhubungan	1.127.524.769,20		
		-	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.119.212.130,00		
		-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.121.027.548,00		
		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.189.581.001,00		
		-	Dinas Kebudayaan	120.208.560,00		
		-	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	171.318.954,00		
		-	Dinas Kelautan dan Perikanan	129.562.340,00		
		-	Dinas Pariwisata	1.831.753.784,00		
		-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	427.425.540,00		
		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	186.000.000,00		
		-	Biro Umum	1.531.291.686,00		
		-	Sekretariat DPRD	938.185.392,00		
		-	Badan Pendapatan Daerah	545.013.558,00		
		-	Badan Penghubung Daerah	519.709.213,00		
		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	257.340.000,00		
	3	**Penetapan Utang Belanja Hibah**			**5.374.500.325,33**	
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.128.621.397,33		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	273.178.928,00		
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.972.700.000,00		
	4	**Penetapan Utang Belanja Modal**			**28.017.118.810,98**	
		-	Dinas Pendidikan	8.219.760.447,79		

MUTASI UTANG BELANJA						
		-	Dinas Kesehatan	49.950.000,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	250.971.000,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.822.103.863,96		
		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	928.221.553,00		
		-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	110.115.108,00		
		-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	157.264.800,00		
		-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	116.422.350,00		
		-	Dinas Perhubungan	2.810.850.831,23		
		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	97.435.800,00		
		-	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	33.189.000,00		
		-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.195.606.800,00		
		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	70.815.000,00		
		-	Biro Umum	138.500.000,00		
		-	Sekretariat DPRD	298.853.625,00		
		-	Badan Pendapatan Daerah	552.058.630,00		
		-	Inspektorat	83.400.001,00		
		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81.600.001,00		
	5	**Koreksi Kurang Catat Pengakuan Utang Belanja Pegawai**			**1.358.356.568,00**	
		-	Dinas Pendidikan	1.358.356.568,00		
	6	**Koreksi Kurang Catat Pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa**			**91.817.100,00**	
		-	Dinas Pendidikan	90.891.100,00		
		-	Dinas Kesehatan	926.000,00		
	7	**Penambahan Utang Belanja Bagi Hasil**			**60.698.875.497,00**	
		-	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	60.698.875.497,00		
	Total Penambahan :					**188.083.948.613,07**
	Pengurangan Utang Tahun 2025 :					
	1	**Pengurangan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 karena Pelunasan :**			**188.239.845,00**	
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	25.091.881,00		
	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	42.374,00		
	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	162.944.705,00		
	-	-	Dinas Kebudayaan	160.504,00		
	-	-	Badan Penghubung	381,00		
	-	-	-			
	2	**Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 karena Pelunasan :**			**170.070.535.150,96**	
		-	Dinas Pendidikan	5.794.977.764,52		
		-	Dinas Kesehatan	1.038.082.979,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	975.754.394,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	13.210.721.980,00		

MUTASI UTANG BELANJA						
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	328.826.489,00		
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	9.143.953.637,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8.593.553.311,60		
		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	96.068.230.333,50		
		-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.689.684.459,00		
		-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.790.000,00		
		-	Dinas Sosial	663.061.666,00		
		-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	184.395.000,00		
		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.043.241.000,00		
		-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	7.372.648.847,50		
		-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.433.873.000,00		
		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	311.192.000,00		
		-	Dinas Perhubungan	90.754.034,00		
		-	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.206.924.700,00		
		-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.077.250.396,00		
		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	219.051.000,00		
		-	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	224.403.290,40		
		-	Dinas Kelautan dan Perikanan	283.714.320,00		
		-	Dinas Pariwisata	1.067.794.500,00		
		-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.667.472.068,44		
		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	302.150.000,00		
		-	Biro Administrasi Pimpinan	143.835.000,00		
		-	Biro Hukum	234.707.100,00		
		-	Sekretariat DPRD	4.636.668.554,00		
		-	Badan Pendapatan Daerah	4.637.437.354,00		
		-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	178.900.000,00		
		-	Badan Penghubung Daerah	501.324.908,00		
		-	Inspektorat	325.245.265,00		
		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	388.915.800,00		
	3	**Pengurangan Utang Belanja Hibah Tahun 2025 karena Pelunasan :**			**13.811.458.307,29**	
		-	Dinas Kesehatan	975.821.560,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.811.908.747,29		
		-	Dinas Perhubungan	924.800.000,00		
		-	Dinas Kelautan dan Perikanan	119.028.000,00		
		-	Biro Umum	4.487.200.000,00		
		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.492.700.000,00		
	4	**Pengurangan Utang Belanja Modal Tahun 2025 karena Pelunasan :**			**23.428.037.713,45**	
		-	Dinas Pendidikan	4.868.142.634,67		
		-	Dinas Kesehatan	320.438.490,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	342.192.000,00		
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	536.550.000,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.277.953.030,00		

MUTASI UTANG BELANJA						
		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.196.107.660,00		
		-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	336.100.100,00		
		-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.700.000,00		
		-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	277.685.000,00		
		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.140.000,00		
		-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	613.025.000,00		
		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.576.000,00		
		-	Dinas Perhubungan	1.900.641.377,29		
		-	Dinas Komunikasi dan Informatika	79.650.000,00		
		-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.800.000,00		
		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16.430.000,00		
		-	Dinas Kelautan dan Perikanan	80.450.000,00		
		-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.106.961.421,49		
		-	Biro Administrasi Pimpinan	12.045.000,00		
		-	Biro Kesejahteraan Rakyat	34.410.000,00		
		-	Biro Umum	1.113.100.000,00		
		-	Sekretariat DPRD	2.923.250.000,00		
		-	Badan Pendapatan Daerah	681.690.000,00		
		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	642.000.000,00		
	5	**Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa Karena Koreksi :**			**94.383.615,09**	
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	900.000,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum	64.124.260,00		
		-	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	29.359.355,09		
	6	**Pengurangan Utang Belanja Hibah Karena Koreksi :**			**156.324.090,60**	
		-	Dinas Pekerjaan Umum	156.324.090,60		
	7	**Pengurangan Utang Belanja Modal Karena Koreksi :**			**104.904.548,99**	
		-	Dinas Pendidikan	104.904.548,99		
	8	**Pengurangan Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 karena Pelunasan :**			**226.476.692.255,00**	
		-	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	226.476.692.255,00		
	Total Pengurangan					**434.330.575.526,38**
Saldo Akhir Utang Belanja, 31 Desember 2025						**205.173.955.504,00**

Berikut rincian utang belanja pada beberapa OPD:

Tabel 5.229 Utang Belanja Pegawai

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA PEGAWAI
1	*2*	*3*
1	Dinas Pendidikan	1.358.356.568,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	943.177.607,00

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA PEGAWAI
1	*2*	*3*
	JUMLAH	**2.301.534.175,00**

Tabel 5.230 Utang Belanja Barang dan Jasa

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA
1	*2*	*3*
1	Dinas Pendidikan	1.971.929.080,27
2	Dinas Kesehatan	1.601.149.747,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	3.580.733.349,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	29.343.296.881,00
5	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	7.808.260.424,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	15.830.567.150,20
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.371.929.371,91
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	283.240.123,00
9	Dinas Sosial	120.080.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	265.082.229,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	350.786.590,00
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.584.492.001,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.893.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.000.000,00
15	Dinas Perhubungan	1.127.524.769,20
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.119.212.130,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.121.027.548,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.189.581.001,00
19	Dinas Kebudayaan	120.208.560,00
20	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	171.318.954,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	129.562.340,00
22	Dinas Pariwisata	1.831.753.784,00
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	427.425.540,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	186.000.000,00
25	Biro Umum	1.531.291.686,00
26	Sekretariat DPRD	1.477.130.792,00
27	Badan Pendapatan Daerah	545.013.558,00
28	Badan Penghubung Daerah	519.709.213,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	257.340.000,00
	JUMLAH	**108.971.540.321,58**

Tabel 5.231 Utang Belanja Hibah

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA HIBAH
1	*2*	*3*
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.972.297.306,73

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA HIBAH
1	*2*	*3*
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	273.178.928,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.972.700.000,00
	JUMLAH	**5.218.176.234,73**

Tabel 5.232 Utang Belanja Modal

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA MODAL
1	*2*	*3*
1	Dinas Pendidikan	8.150.178.100,00
2	Dinas Kesehatan	49.950.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	250.971.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.822.103.863,96
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	964.514.365,50
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	110.115.108,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	157.264.800,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	116.422.350,00
9	Dinas Perhubungan	2.810.850.831,23
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	97.435.800,00
11	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	33.189.000,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.195.606.800,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	70.815.000,00
14	Biro Umum	138.500.000,00
15	Sekretariat DPRD	298.853.625,00
16	Badan Pendapatan Daerah	552.058.630,00
17	Inspektorat	83.400.001,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81.600.001,00
	JUMLAH	**27.983.829.275,69**

Utang Belanja Rumah Sakit sebagaimana tabel-tabel di atas dirinci sebagai berikut:

1. Total Utang Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp34.118.178.837,00, terdiri dari:
   5.3.2.1.3.1.4.1 Utang Belanja dari alokasi sumber dana BLUD sebesar Rp30.286.474.488,00 yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp943.177.607,00; dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp29.343.296.881,00.

5.3.2.1.3.1.4.2 Utang Belanja dari alokasi sumber dana APBD sebesar Rp3.831.704.349,00 yang terdiri dari Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.580.733.349,00 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp250.971.000,00.

5.3.2.1.3.1.5 Total Utang Belanja Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp7.808.260.424,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa dari alokasi sumber dana BLUD.

Tabel 5.233 Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

NO	KAB/KOTA	PKB	BBN-KB	AIR PERMUKAAN	PBB-KB	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kota Batam	2.476.652.998,00	1.551.243.580,00	3.626.269.490,00	23.646.070.247,00	31.300.236.315,00
2	Kota Tanjung Pinang	519.164.274,00	251.330.380,00	(448.702.649,00)	6.127.564.509,00	6.449.356.514,00
3	Kab. Bintan	395.732.700,00	249.301.928,00	(633.292.717,00)	5.018.371.517,00	5.030.113.428,00
4	Kab. Karimun	486.838.561,00	220.510.478,00	16.512.207,00	5.052.209.987,00	5.776.071.233,00
5	Kab. Natuna	356.608.449,00	225.437.528,00	18.556.191,00	4.042.674.194,00	4.643.276.362,00
6	Kab. Lingga	346.976.854,00	208.297.178,00	48.711.809,00	3.168.618.088,00	3.772.603.929,00
7	Kab. Kep. Anambas	352.187.531,00	210.039.429,00	192.094.835,00	2.972.895.921,00	3.727.217.716,00
	TOTAL	**4.934.161.367,00**	**2.916.160.501,00**	**2.820.149.166,00**	**50.028.404.463,00**	**60.698.875.497,00**

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	4.438.973.655,37	**3.466.450.196,50**

Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp4.438.973.655,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.234 Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2025

NO	JENIS UTANG JANGKA PENDEK	JUMLAH
1	*2*	*3*
1	Utang Lebih Bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	2.674.623.655,37
2	Utang Kurang salur atas BOS Dikmen 2017	1.764.350.000,00
	Total Utang Jangka Pendek Lainnya	**4.438.973.655,37**

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

2. Saldo Utang Lebih Bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.674.623.655,37 merupakan sisa kewajiban jangka pendek yang bersumber dari ketidaksesuaian nilai penetapan PKB dan BBN-KB pada tahun 2013 dengan nilai saldo awal utang sebesar Rp10.816.152.163,13. Sisa saldo utang sampai dengan saat ini merupakan hasil dari realisasi penyelesaian hak Wajib Pajak secara bertahap dimulai sejak tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 321/SK/BP2RD/IV/2021 tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.235 Rekapitulasi Utang Lebih Bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Per 31 Desember 2025

Tahun	Saldo Awal	Penyesuaian Saldo Awal	Pelunasan	Saldo Akhir
2013	10.816.152.163,13	0,00	0,00	10.816.152.163,13
2021	10.816.152.163,13	0,00	2.359.661.339,63	8.456.490.823,50
2022	8.456.490.823,50	0,00	1.741.910.548,00	6.714.580.275,50
2023	6.714.580.275,50	0,00	372.428.197,50	6.342.152.078,00
2024	6.342.152.078,00	0,00	4.640.051.881,50	1.702.100.196,50
2025	1.702.100.196,50	1.054.320.894,87	81.797.436,00	2.674.623.655,37

3. Saldo Utang kurang salur Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah (Dikmen) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.764.350.000,00. Saldo ini berasal dari kurang salur Dana Bos Jenjang SMA dan SMK Triwulan IV tahun 2016 dengan nilai saldo awal sebesar Rp3.658.900.000,00. Atas kewajiban tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengupayakan pengajuan pencairan dana Cadangan (*buffer*) kepada Tim BOS Pusat pada tahun 2017 untuk pembayaran kurang salur tersebut. Namun, dikarenakan keterbatasan alokasi dana Cadangan Pusat sehingga kurang salur BOS Dikmen tersebut hanya dapat direalisasikan pembayarannya ke sekolah sebesar Rp1.894.550.000,00 melalui SP2D Nomor 182/SP2D/4.04.06.02/2017 tanggal 8 Maret 2017. Dengan demikian, saldo utang atas kurang catat BOS Dikmen menjadi sebesar Rp1.764.350.000,00 (Rp3.658.900.000-Rp1.894.550.000,00). Sejak tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat lagi realisasi pembayaran maupun alokasi anggaran tambahan dari Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan sisa kurang salur ini. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait penghapusan Utang Kurang Salur BOS Dikmen tersebut sebesar Rp1.764.350.000,00.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya ditunjukkan pada **Lampiran 9.**

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

5.3.2.2.1 Utang Kepada Pemerintah Pusat

Utang Kepada Pemerintah Pusat	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	198.211.642.151,46	**196.353.186.257,62**

Utang Kepada Pemerintah Pusat adalah Utang Jangka Panjang atas jaminan pascatambang dan jaminan reklamasi yang merupakan jaminan yang digunakan Gubernur untuk menunjuk pihak ketiga jika nantinya perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan komitmennya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 169C huruf c terdapat peralihan kewenangan atas dana jaminan reklamasi dan pascatambang dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Pemerintah Pusat.

Nilai Kewajiban Jangka Panjang untuk Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2025 sebesar Rp198.211.642.151,46 terdiri atas jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.236 Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pascatambang

KABUPATEN/KOTA	REKLAMASI	PASCATAMBANG	TOTAL
KABUPATEN BINTAN	2.624.410.605,94	61.604.742.928,18	64.229.153.534,12
KOTA TANJUNGPINANG	309.326.052,00	4.349.382.686,00	4.658.708.738,00
KABUPATEN LINGGA	5.972.150.907,17	9.648.828.025,80	15.620.978.932,97
KABUPATEN KARIMUN	29.814.896.705,42	78.024.114.411,23	107.839.011.116,65
KOTA BATAM	2.253.678.010,00	1.548.334.148,00	3.802.012.158,00
KABUPATEN NATUNA	2.027.496.097,72	34.281.574,00	2.061.777.671,72
JUMLAH	**43.001.958.378,25**	**155.209.683.773,21**	**198.211.642.151,46**

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.237 Rincian Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pascatambang

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2025			
Saldo Awal Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 1 Januari 2025			**196.353.186.257,62**
Penambahan :			
1 Penempatan dan Penambahan Bunga Deposito dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi		626.020.566,62	
Kabupaten Bintan	57.260.078,49		
Kota Tanjungpinang	276.750,00		
Kabupaten Lingga	103.502.497,44		
Kota Batam	25.260.127,00		
Kabupaten Karimun	438.507.423,63		
Kabupaten Natuna	1.213.690,06		
2 Penempatan dan Penambahan Bunga Deposito, dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang		6.563.954.523,02	
Kabupaten Bintan	1.161.825.579,53		
Kota Tanjungpinang	28.292.828,00		
Kabupaten Lingga	197.595.758,67		
Kota Batam	19.686.084,00		
Kabupaten Karimun	5.156.554.272,82		
Kabupaten Natuna	0,00		
Total Penambahan :			**7.189.975.089,64**
Pengurangan :			
1 Pencairan dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi		1.222.324.026,61	
Kabupaten Karimun	1.222.324.026,61		
2 Pencairan dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang		4.109.195.169,19	
Kabupaten Bintan	63.747,00		
Kabupaten Karimun	4.109.131.422,19		
Total Pengurangan :			**5.331.519.195,80**
Saldo Akhir Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 31 Desember 2025			**198.211.642.151,46**

Nilai Kewajiban Jangka Panjang untuk Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp198.211.642.151,46 tersebut merupakan nilai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang ditempatkan atas nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Jaminan Reklamasi dan Pascatambang disajikan sebagai akun Kewajiban Jangka Panjang - Utang Kepada Pemerintah Pusat dikarenakan tidak ada akun yang relevan dapat mengakomodir penyajian jaminan tersebut dalam bagan akun standar aplikasi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut ini tabel nilai penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Atas Nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 5.238 Dana Jaminan Reklamasi & Pascatambang Atas Nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
KABUPATEN BINTAN							
1	PT. BINA RIAU JAYA				7.000.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINA RIAU JAYA	BNI
					5.568.842.847,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINA RIAU JAYA	BNI
					3.588.895.711,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINA RIAU JAYA	BNI
2	PT. BINTAN INTI SUKSES				599.364.471,46	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN INTI SUKSES	BTN
3	PT. BINTAN KARISMA PRATAMA				870.197.396,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN KARISMA PRATAMA	BRI
4	PT. BINTAN NUSA MULTI	67.008.938,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN NUSA MULTI	BNI	3.226.625.878,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN NUSA MULTI	BNI
5	PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	1.122.200.707,10	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI	6.000.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI
					1.086.348.322,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI
					7.383.551.981,72	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI
6	PT. BUKIT PANGLONG				278.042.813,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT PANGLONG	BPR BINTAN
7	PT. GUNUNG BINTAN ABADI				6.098.737.418,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. GUNUNG BINTAN ABADI	BPR BINTAN
8	PT. GUNUNG MARIO LAGALIGO	319.545.601,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GUNUNG MARIO LAGALIGO	BNI	1.292.509.743,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GUNUNG MARIO LAGALIGO	BNI
9	PT. LOBINDO NUSA PERSADA				3.160.321.432,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. LOBINDO NUSA PERSADA	BANK MANDIRI
10	PT. SHANINDO INDAH				33.623.715,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. SHANINDO INDAH	BPR BINTAN
11	PT. SINDO MANDIRI				841.350.708,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. SINDO MANDIRI	BPR BINTAN
12	PT. TRI PANORAMA SETIA				4.523.991.411,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. TRI PANORAMA SETIA	BNI
13	PT. TRI PANORAMA SETIA	1.115.655.359,84	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. TRI PANORAMA SETIA	BANK MANDIRI			

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
14	PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR				4.568.420.006,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR	BPR BINTAN
15	PT. WAHANA KARYA SUKSESINDO UTAMA				5.483.919.075,00	GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU QQ PT. WAHANA KARYA SUKSESINDO UTAMA	BRI
TOTAL BINTAN		**2.624.410.605,94**			**61.604.742.928,18**		
							KOTA TANJUNGPINANG
1	PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG					DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA QQ PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG	
						DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA QQ PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG	
2	PT. KERETA KENCANA BANGUN PERKASA	309.326.052,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. KERETA KENCANA	BPR BESTARI	3.994.200.784,00	GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU QQ PT. KERETA KENCANA BANGUN PERKASA	BPR BESTARI
3	PT. SYAHNUR				355.181.902,00	KA. DPMPTSP PROV. KEPRI PT. SYAHNUR (SYAHJONI)	BPR BESTARI
TOTAL TANJUNGPINANG		**309.326.052,00**			**4.349.382.686,00**		
							KABUPATEN LINGGA
1	PT. ALAM PURNAMA PANJANG	583.116.514,92	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ALAM PURNAMA PANJANG	BANK MANDIRI	664.117.520,62	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ALAM PURNAMA PANJANG	BANK MANDIRI
2	PT. BINTAN BATAM PRATAMA				827.515.088,00	KEPALA DPMPTSP PROVINSI KEPRI QQ PT BINTAN BATAM PRATAMA	BNI
3	PT. BUKIT ALAM INDO	446.542.068,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT ALAM INDO	BRI	441.984.440,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT ALAM INDO	BRI
4	PT. CITRA SEMARAK SEJATI	86.148.796,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SEMARAK SEJATI	BNI	742.588.493,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SEMARAK SEJATI	BNI
5	PT. DABO BANGUN SUKSES	613.749.480,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DABO BANGUN SUKSES	BTN	722.655.993,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DABO BANGUN SUKSES	BTN

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
6	PT. DABO BINA SUKSES	830.020.430,23	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DABO BINA SUKSES	BANK MANDIRI			
7	PT. DEVA PANJANG JAYA	739.491.234,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DEVA PANJANG JAYA	BTN	477.301.354,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DEVA PANJANG JAYA	BTN
8	PT. ENERGI SINGKEP BERTUAH	683.733.184,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI SINGKEP BERTUAH	BNI	530.591.095,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI SINGKEP BERTUAH	BNI
9	PT. GROWA INDONESIA	247.675.431,52	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI	728.542.053,41	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI
		178.189.989,65	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI	6.883.747,69	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI
		235.914.215,63	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI			
10	PT. INDO INTER INTRACO	244.066.856,22	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDO INTER INTRACO	BANK MANDIRI	122.033.428,08	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDO INTER INTRACO	BANK MANDIRI
					1.144.475.616,00	KA. DPMPTSP PROVINSI KEPRI QQ PT. INDO INTER INTRACO	BRI
11	PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	393.601.902,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI	1.295.879.119,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI
12	PT. MITRA PERSADA RESOURCES	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MITRA PERSADA RESOURCES	BTN	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MITRA PERSADA RESOURCES	BTN
					0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MITRA PERSADA RESOURCES	BTN
13	PT. SINGKEP TUAH PERSADA	566.342.976,00	KA. DPMPTSP PROVINSI KEPRI QQ PT. SINGKEP TUAH PERSADA	BRI	480.315.263,00	KA. DPMPTSP PROVINSI KEPRI QQ PT. SINGKEP TUAH PERSADA	BRI
14	PT. SIRTU ALAM PERSADA				1.463.944.815,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. SIRTU ALAM PERSADA	BNI
15	PT. TRI TUNAS UTAMA	123.557.829,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. TRI TUNAS UTAMA	BNI			
TOTAL LINGGA		**5.972.150.907,17**			**9.648.828.025,80**		
							KOTA BATAM
1	PT. BARELANG INTERNASIONAL EKSPASINDO	116.614.872,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI	27.469.592,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
		270.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI	134.380.707,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI
		290.186.427,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI			
2	PT. BINTANG ARTHA MAKMUR	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI
		97.617.282,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI	207.135.208,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI
3	PT. BUMI SEMESTA UTAMA	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI
		152.432.421,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI	305.495.152,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI
4	PT. CIPTA REZEKI KITA BERSAMA	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. CIPTA REZEKI KITA BERSAMA	BANK MANDIRI			
5	PT. RIAU MULIA JAYA	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI
		65.415.100,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI	150.593.885,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI
6	PT. RIAU PRATAMA		KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU PRATAMA	BANK MANDIRI			
7	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	403.469.336,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	136.629.802,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
8	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	407.942.572,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	136.629.802,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
TOTAL BATAM		**2.253.678.010,00**		-	**1.548.334.148,00**		
KABUPATEN KARIMUN							
1	CV. BALI JAYA KARIMUN	80.917.046,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ CV. BALI JAYA KARIMUN	BNI	104.405.312,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ CV. BALI JAYA KARIMUN	BNI
2	PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	109.804.391,00		BNI	500.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	BNI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
			KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ANEKA ALAM ANUGERAH		282.389.069,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	BNI
3	PT. ASA TATA MARDIVKA	771.546.220,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI	57.649.285,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI
		57.649.285,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI	356.980.428,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI
4	PT. ATMA BERSATU SUKSES	235.423.114,00	KEPALA DPMPTSP PROV KEPRI QQ DIR PT ATMA BERSATU SUKSES	BNI	136.597.365,00	KEPALA DPMPTSP PROV KEPRI QQ DIR PT ATMA BERSATU SUKSES	BNI
		197.428.627,00	KEPALA DPMPTSP PROV KEPRI QQ DIR PT ATMA BERSATU SUKSES	BNI			
5	PT. BERKAH MAJU BERSAMA	429.881.663,58	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI	61.411.666,20	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI
		11.613.691,97	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI	462.458.303,48	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI
6	PT. BUKIT ALAM PERSADA		GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT ALAM PERSADA	BNI	10.263.240.431,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT ALAM PERSADA	BNI
7	PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI	3.193.546.469,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI	BNI	784.013.128,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI	BNI
8	PT. BUKIT LINTANG KARIMUN	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT LINTANG KARIMUN	BANK MANDIRI	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT LINTANG KARIMUN	BANK MANDIRI
9	PT. BUKIT MERAH INDAH	6.090.135.156,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT BUKIT MERAH INDAH	BNI	4.806.861.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT BUKIT MERAH INDAH	BNI
10	PT. CIPTA MORO MANDIRI	31.260.133,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT CIPTA MORO MANDIRI	BNI			
11	PT. CITRA SINDO	388.211.320,00	GUB. KEPRI CQ KA. PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SINDO	BNI	464.350.000,00	GUB. KEPRI CQ KA. PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SINDO	BNI
12	PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR				383.356.245,82	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR	BANK MANDIRI
					373.772.054,73	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR	BANK MANDIRI
13	PT. EUNINDO USAHA MANDIRI BLOK A	188.657.752,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI	68.346.050,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI CABANG TANJUNG BALAI KARIMUN

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
	PT. EUNINDO USAHA MANDIRI BLOK C				244.780.620,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI
	PT. EUNINDO USAHA MANDIRI BLOK D	207.329.223,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI		DIRJEN MINERBA QQ PT. EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI
14	PT. INDONESIA BISA SUKSES	378.804.764,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT INDONESIA BISA SUKSES	BNI	124.198.255,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT INDONESIA BISA SUKSES	BNI
15	PT. JENI PRIMA SUKSES	1.469.669.061,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. JENI PRIMA SUKSES	BNI	690.060.033,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. JENI PRIMA SUKSES	BNI
16	PT. KARIMUN GRANIT	4.037.384.500,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI	19.048.163.085,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI
		645.517.715,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI			
		314.032.800,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI			
17	PT. KARIMUN MINING	211.288.799,26	KA. DINAS ESDM QQ PT. KARIMUN MINING	BANK MANDIRI		-	-
18	PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	4.444.811.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	BNI	970.297.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	BNI
19	PT. MIRASINDO PERDANA	0,00	GUB. KEPRI CQ KA. BPMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BNI	0,00	GUB. KEPRI CQ KA. BPMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BNI
					0,00	GUB. KEPRI CQ KA. BPMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BNI
					0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BANK MANDIRI
					3.256.095.591,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BRI Cab. Tg. Balai Karimun
20	PT. PERINTIS MORO ADITYA	1.562.609.315,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. PERINTIS MORO ADITYA	BNI	0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. PERINTIS MORO ADITYA	BNI
21	PT. RIAU ALAM ANUGERAH INDONESIA	0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI	13.675.861.389,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI
		0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI			

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
		0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI			
		0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI			
22	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	420.211.644,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	136.629.802,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
23	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	426.346.006,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	136.629.802,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
24	PT. SINDO MANDIRI	34.339.084,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT SINDO MANDIRI	BNI		-	-
25	PT. SUNGAI UNGAR ABADI	220.962.985,61	KA. DINAS ESDM QQ PT. SUNGAI UNGAR ABADI	BANK MANDIRI	2.311.427,00	KA. DINAS ESDM QQ PT. SUNGAI UNGAR ABADI	BANK MANDIRI
26	PT. SYABAS RIAU SAKTI	60.345.395,00	GUBERNUR KEPUALAUAN RIAU QQ SYABAS RIAU SAKTI	BNI		-	-
27	PT. TANJUNG MELAYU MAKMUR	12.220.595,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT TANJUNG MELAYU MAKMUR	BNI		-	-
28	PT. WIRA PENTA KENCANA	0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT WIRA PENTA KENCANA	BNI	10.025.509.314,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT WIRA PENTA KENCANA	BRI
29	PT. PACIFIC GRANITAMA	3.582.948.950,00	DIRJEN MINERBA QQ. PACIFIC GRANITAMA	BNI	947.534.000,00	DIRJEN MINERBA QQ. PACIFIC GRANITAMA	BNI
					7.748.927.974,00	DIRJEN MINERBA QQ. PACIFIC GRANITAMA	BNI
					1.911.285.781,00	DIRJEN MINERBA QQ. PACIFIC GRANITAMA	BNI
TOTAL KARIMUN		**29.814.896.705,42**			**78.024.114.411,23**		
KABUPATEN NATUNA							
1	PT. MULTI MINERAL INDONESIA	774.478.743,00	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ PT. MULTI MINERAL INDONESIA	BRI			
2	PT. ZAMRUD EKUATOR RESOURCES	761.250.412,00	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ PT. ZAMRUD EKUATOR RESOURCES	BANK MANDIRI			
3	PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	246.308.690,00	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI	34.281.574,00	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
4	CV. NUSANTARA PASIR NATUNA	245.458.252,72	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ CV. NUSANTARA PASIR NATUNA	BANK MANDIRI		-	-
TOTAL NATUNA		**2.027.496.097,72**			**34.281.574,00**		
GRAND TOTAL		**43.001.958.378,25**			**155.209.683.773,21**		

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	6.405.952.705.462,58	**6.454.280.263.239,55**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp6.405.952.705.462,58.

- Ekuitas Awal	6.454.280.263.239,55
- Surplus / (Defisit) - LO	(72.434.959.518,69)
- Koreksi Nilai Persediaan	18.786.477,00
- Lain-lain	24.088.615.264,72
Ekuitas Akhir	6.405.952.705.462,58

5.4 Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional (LO)

5.4.1 Pendapatan–LO

Pendapatan - LO	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	3.821.021.620.282,91	**4.115.268.949.417,46**

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp3.821.021.620.282,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.239 Pendapatan–LO

Jenis Pendapatan – LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	1.625.803.703.863,68	1.994.646.518.322,80
Pendapatan Transfer - LO	1.971.160.493.024,00	1.949.654.986.207,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	224.057.423.395,23	170.967.444.887,66
JUMLAH	**3.821.021.620.282,91**	**4.115.268.949.417,46**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	1.625.803.703.863,68	**1.994.646.518.322,80**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO, dan Lain-lain PAD yang Sah – LO, rincian Pendapatan Asli Daerah - LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.240 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Jenis Pendapatan Asli Daerah - LO	Saldo 2025	Saldo 2024
	(Rp)	(Rp)
Pajak Daerah - LO	1.362.886.776.941,50	1.787.142.204.747,00
Retribusi Daerah - LO	163.297.061.511,33	155.726.470.273,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	2.275.536.541,00	1.904.909.335,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	97.344.328.869,85	49.872.933.967,50
JUMLAH	**1.625.803.703.863,68**	**1.994.646.518.322,80**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp368.842.814.459,12 atau sebesar 18,49% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.994.646.518.322,80 yang dipengaruhi beberapa hal berikut ini:

5.4.1.1.1.1.1 Penurunan realisasi pada Pajak Daerah - LO dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) terkait ketentuan Opsen Pajak Daerah yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Sebelumnya, pada tahun 2024 Penerimaan PKB dan BBNKB dicatat 100% sebagai pendapatan Pajak Daerah yang dicatat di kas daerah Provinsi terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke Kabupaten/Kota melalui mekanisme Bagi Hasil. Sedangkan pada tahun 2025 tarif dasar PKB dan BBNKB untuk provinsi diturunkan, dan porsi untuk Kabupaten/Kota ditarik langsung sebagai Opsen yang langsung masuk ke kas Kabupaten/Kota.

5.4.1.1.1.1.2 Sedangkan kenaikan realisasi Retribusi Daerah – LO dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perluasan kerja sama pemanfaatan ruang perairan dengan pihak swasta, serta tingginya volume permintaan layanan teknis pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

5.4.1.1.1.1.3 Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO juga mengalami peningkatan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan komposisi pembagian dividen atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang membukukan pertumbuhan laba bersih pada tahun buku berkenaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024.

5.4.1.1.1.1.4 Disamping itu juga peningkatan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah - LO dibandingkan tahun sebelumnya didorong oleh pengembalian sisa penggunaan dana hibah Pilkada serentak tahun 2024 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.241 Rincian Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) LRA dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**1.736.336.133.204,89**	**1.625.803.703.863,68**	**(110.532.429.341,21)**
Pajak Daerah-LO	**1.447.285.058.158,50**	**1.362.886.776.941,50**	**(84.398.281.217,00)**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	405.307.682.591,00	403.538.708.091,00	(1.768.974.500,00)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	273.480.737.600,00	262.307.303.900,00	(11.173.433.700,00)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	489.750.163.677,00	450.061.566.595,00	(39.688.597.082,00)
Pajak Air Permukaan-LO	33.017.182.076,00	1.249.906.141,00	(31.767.275.935,00)
Pajak Rokok–LO	174.288.290.965,00	174.288.290.965,00	0,00
Pajak Alat Berat-LO	614.336.352,00	614.336.352,00	0,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	70.826.664.897,50	70.826.664.897,50	0,00
Retribusi Daerah-LO	**171.517.367.082,00**	**163.297.061.511,33**	**(8.220.305.570,67)**
Retribusi Jasa Umum-LO	164.145.264.443,00	157.135.930.336,00	(7.009.334.107,00)
Retribusi Jasa Usaha-LO	5.950.969.639,00	5.640.366.425,33	(310.603.213,67)
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	1.421.133.000,00	520.764.750,00	(900.368.250,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	**2.275.536.541,00**	**2.275.536.541,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	2.275.536.541,00	2.275.536.541,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	**115.258.171.423,39**	**97.344.328.869,85**	**(17.913.842.553,54)**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	512.084.414,00	512.084.414,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	957.027.354,47	765.854.412,60	(191.172.941,87)
Jasa Giro-LO	3.616.972.805,65	3.616.972.805,65	0,00
Pendapatan Bunga-LO	1.889.238.643,57	1.889.238.643,57	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	163.611,88	163.611,88	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	80.794.464,06	175.021.842,90	94.227.378,84
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	25.858.479.507,12	10.071.577.274,00	(15.786.902.233,12)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	35.861.416,00	36.300.594,00	439.178,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	76.974.438.969,96	74.939.462.090,57	(2.034.976.879,39)
Pendapatan dari BLUD-LO	5.227.554.179,52	5.233.097.123,52	5.542.944,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	4.107.657,16	4.107.657,16	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	100.448.400,00	100.448.400,00	0,00

Penjelasan selisih Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.242 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2025	LAPORAN OPERASIONAL
Pajak Daerah-LO	**1.447.285.058.158,50**	**(85.158.832.017,00)**	**(1.141.835.397.671,00)**	**1.142.595.948.471,00**	**1.362.886.776.941,50**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	**405.307.682.591,00**	**(1.873.829.000,00)**	**(419.612.874.573,00)**	**419.717.729.073,00**	**403.538.708.091,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	9.139.165.550,00	(1.873.829.000,00)	(419.612.874.573,00)	419.717.729.073,00	7.370.191.050,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	54.929.599.391,00	0,00	0,00	0,00	54.929.599.391,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	224.538.883.977,00	0,00	0,00	0,00	224.538.883.977,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	262.625.008,00	0,00	0,00	0,00	262.625.008,00
PKB-Mobil Bus-Bus-LO	2.842.714.059,00	0,00	0,00	0,00	2.842.714.059,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	12.908.463.294,00	0,00	0,00	0,00	12.908.463.294,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	9.160.009.032,00	0,00	0,00	0,00	9.160.009.032,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	11.572.695.951,00	0,00	0,00	0,00	11.572.695.951,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	884.247.652,00	0,00	0,00	0,00	884.247.652,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua–LO	78.977.952.537,00	0,00	0,00	0,00	78.977.952.537,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga–LO	91.326.140,00	0,00	0,00	0,00	91.326.140,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	**273.480.737.600,00**	**(11.829.130.000,00)**	**(270.285.402.600,00)**	**270.941.098.900,00**	**262.307.303.900,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO	3.971.040.400,00	0,00	0,00	0,00	3.971.040.400,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	30.316.626.800,00	0,00	0,00	0,00	30.316.626.800,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	137.745.131.100,00	(11.829.130.000,00)	(270.285.402.600,00)	270.941.098.900,00	126.571.697.400,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	122.397.700,00	0,00	0,00	0,00	122.397.700,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus–LO	4.276.193.700,00	0,00	0,00	0,00	4.276.193.700,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	8.080.919.200,00	0,00	0,00	0,00	8.080.919.200,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	2.487.726.400,00	0,00	0,00	0,00	2.487.726.400,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	7.591.358.000,00	0,00	0,00	0,00	7.591.358.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	610.246.200,00	0,00	0,00	0,00	610.246.200,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	78.084.468.000,00	0,00	0,00	0,00	78.084.468.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	194.630.100,00	0,00	0,00	0,00	194.630.100,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	**489.750.163.677,00**	**(39.688.597.082,00)**	**(450.061.566.595,00)**	**450.061.566.595,00**	**450.061.566.595,00**

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2025	LAPORAN OPERASIONAL
PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	282.523.757.628,00	(39.688.597.082,00)	(450.061.566.595,00)	450.061.566.595,00	242.835.160.546,00
PBBKB Bahan Bakar Solar–LO	207.226.406.049,00	0,00	0,00	0,00	207.226.406.049,00
Pajak Air Permukaan-LO	**33.017.182.076,00**	**(31.767.275.935,00)**	**(1.261.217.551,00)**	**1.261.217.551,00**	**1.249.906.141,00**
Pajak Air Permukaan-LO	33.017.182.076,00	(31.767.275.935,00)	(1.261.217.551,00)	1.261.217.551,00	1.249.906.141,00
Pajak Rokok–LO	**174.288.290.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.288.290.965,00**
Pajak Rokok-LO	174.288.290.965,00	0,00	0,00	0,00	174.288.290.965,00
Pajak Alat Berat-LO	**614.336.352,00**	**0,00**	**(614.336.352,00)**	**614.336.352,00**	**614.336.352,00**
Pajak Alat Berat-LO	614.336.352,00	0,00	(614.336.352,00)	614.336.352,00	614.336.352,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	**70.826.664.897,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.826.664.897,50**
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	70.826.664.897,50	0,00	0,00	0,00	70.826.664.897,50

Tabel 5.243 Penjelasan Selisih Retribusi Daerah-LRA dengan Retribusi Daerah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN PIUTANG	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	KOREKSI LEBIH CATAT RETRIBUSI DAERAH-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Retribusi Daerah-LO	**171.517.367.082,00**	**(144.871.964.763,00)**	**(8.547.428.357,00)**	**146.472.830.166,00**	**(1.148.742.616,67)**	**(125.000.000,00)**	**163.297.061.511,33**
Retribusi Jasa Umum-LO	**164.145.264.443,00**	**(144.681.930.263,00)**	**(8.523.674.357,00)**	**146.196.270.513,00**	**0,00**	**0,00**	**157.135.930.336,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	**164.145.264.443,00**	**(144.681.930.263,00)**	**(8.523.674.357,00)**	**146.196.270.513,00**	**0,00**	**0,00**	**157.135.930.336,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	164.145.264.443,00	(144.681.930.263,00)	(8.523.674.357,00)	146.196.270.513,00	0,00	0,00	157.135.930.336,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	**5.950.969.639,00**	**(190.034.500,00)**	**(23.754.000,00)**	**276.559.653,00**	**(248.374.366,67)**	**(125.000.000,00)**	**5.640.366.425,33**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	**2.145.830.800,00**	**(150.616.800,00)**	**(23.754.000,00)**	**236.232.192,00**	**(248.374.366,67)**	**(125.000.000,00)**	**1.834.317.825,33**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(116.666.666,67)	0,00	8.333.333,33
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	1.545.830.800,00	(150.616.800,00)	(23.754.000,00)	236.232.192,00	(131.707.700,00)	0,00	1.475.984.492,00
Retribusi Pemakaian Alat-LO	475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(125.000.000,00)	350.000.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	**13.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300.000,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	**617.849.585,00**	**0,00**	**0,00**	**40.327.461,00**	**0,00**	**0,00**	**658.177.046,00**
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	617.849.585,00	0,00	0,00	40.327.461,00	0,00	0,00	658.177.046,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	**141.614.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.614.550,00**

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN PIUTANG	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	KOREKSI LEBIH CATAT RETRIBUSI DAERAH-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	141.614.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.614.550,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	**2.237.394.264,00**	**(39.417.700,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197.976.564,00**
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	2.237.394.264,00	(39.417.700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.976.564,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	**794.980.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794.980.440,00**
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	794.980.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.980.440,00
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	**1.421.133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(900.368.250,00)**	**0,00**	**520.764.750,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	**1.421.133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(900.368.250,00)**	0,00	**520.764.750,00**
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	1.421.133.000,00	0,00	0,00	0,00	(900.368.250,00)	0,00	520.764.750,00
Retribusi Pertambangan Rakyat-LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.244 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
1	*2*	*3*	*4*
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**2.275.536.541,00**	**2.275.536.541,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**2.275.536.541,00**	**2.275.536.541,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	**2.275.536.541,00**	**2.275.536.541,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.275.536.541,00	2.275.536.541,00	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	0,00	**0,00**

Tabel 5.245 Penjelasan Selisih Lain-lain PAD Yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG	KOREKSI KURANG CATAT DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	KOREKSI LEBIH CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	KOREKSI KURANG CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	KOREKSI LEBIH CATAT PENDAPATAN-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Lain-lain PAD yang Sah-LO	**115.258.171.423,39**	**6.472.060,00**	**94.227.378,84**	**21.137.600,00**	**(2.823.200,00)**	**(2.013.251.879,39)**	**(15.827.431.571,32)**	**(1.000.000,00)**	**(191.172.941,67)**	**97.344.328.869,85**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	**512.084.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512.084.414,00**
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	69.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.710.000,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO	442.374.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.374.414,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	**957.027.354,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(0,20)**	**0,00**	**(191.172.941,67)**	**765.854.412,60**
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	957.027.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,20)	0,00	(191.172.941,67)	765.854.412,60
Jasa Giro-LO	**3.616.972.805,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.616.972.805,65**
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.632.574.009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.574.009,25
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	732.404.374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.404.374,11
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.994.422,29
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP-LO	251.994.422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga-LO	**1.889.238.643,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889.238.643,57**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	1.889.238.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.238.643,57
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(1.000.000,00)**	**0,00**	**0,00**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	**163.611,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.611,88**
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	163.611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.611,88
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	**80.794.464,06**	**0,00**	**94.227.378,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.021.842,90**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	80.794.464,06	0,00	94.227.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.021.842,90
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	**25.858.479.507,12**	**0,00**	**0,00**	**21.137.600,00**	**(2.823.200,00)**	**0,00**	**(15.805.216.633,12)**	**0,00**	**0,00**	**10.071.577.274,00**

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG	KOREKSI KURANG CATAT DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	KOREKSI LEBIH CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	KOREKSI KURANG CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	KOREKSI LEBIH CATAT PENDAPATAN-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	9.948.896.000,00	0,00	0,00	21.137.600,00	(52.700,00)	0,00	(22.730.500,00)	0,00	0,00	9.947.250.400,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	2.837.900,00	0,00	0,00	0,00	(2.770.500,00)	0,00	(17.100,00)	0,00	0,00	50.300,00
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	91.312.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.312.431,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	15.782.762.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.782.469.033,12)	0,00	0,00	293.025,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	32.671.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.671.118,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	**35.861.416,00**	**929.116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(489.938,00)**	**0,00**	**0,00**	**36.300.594,00**
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	341.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.518,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	35.519.898,00	929.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(489.938,00)	0,00	0,00	35.959.076,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	**76.974.438.969,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.013.251.879,39)**	**(21.725.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**74.939.462.090,57**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	268.279.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(222.862.551,00)	0,00	0,00	0,00	45.416.641,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	253.574.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.394.607,00)	0,00	0,00	0,00	170.179.813,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	364.132.357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	(277.793.900,00)	0,00	0,00	0,00	86.338.457,64
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	320.811.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.817.400,00)	0,00	0,00	0,00	214.993.813,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	73.405.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.405.300,00)	0,00	0,00	0,00	185,28

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG	KOREKSI KURANG CATAT DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	KOREKSI LEBIH CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	KOREKSI KURANG CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	KOREKSI LEBIH CATAT PENDAPATAN-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	100.712.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.712.924,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO	73.454.915.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	(66.533.791,67)	0,00	0,00	0,00	73.388.381.702,05
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	99.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.105,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	210.593.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.853.900,00	0,00	0,00	0,00	203.739.814,15
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-LO	23.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	27.694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.620.000,00)	0,00	0,00	0,00	15.074.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-LO	47.696.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.264.729,72)	0,00	0,00	0,00	2.431.579,28
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	449.997.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	(423.704.200,00)	0,00	0,00	0,00	26.293.551,22
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	692.508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(692.508.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG	KOREKSI KURANG CATAT DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	KOREKSI LEBIH CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	KOREKSI KURANG CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	KOREKSI LEBIH CATAT PENDAPATAN-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-LO	4.913.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.492.700,00)	0,00	0,00	0,00	2.420.880,40
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-LO	113.766.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.766.600,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LO	33.344.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.344.503,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO	40.365.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.365.600,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	395.502.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.725.000,00)	0,00	0,00	373.777.469,50
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO	98.544.952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.544.952,05
Pendapatan dari BLUD-LO	**5.227.554.179,52**	**5.542.944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.233.097.123,52**
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	3.066.021.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.021.531,00
Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	1.965.913.295,00	5.542.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.456.239,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG	KOREKSI KURANG CATAT DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	KOREKSI LEBIH CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	KOREKSI KURANG CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	KOREKSI LEBIH CATAT PENDAPATAN-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	195.619.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.619.353,52
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	**4.107.657,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.107.657,16**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	4.107.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107.657,16
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	**100.448.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.448.400,00**
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	100.448.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.448.400,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pendapatan-LO untuk kode akun rincian objek 7.1.04.05.04 dengan uraian rincian objek Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO seharusnya dicatat pada kode akun objek 7.1.04.05.06 dengan uraian akun rincian objek Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP-LO, namun akun tersebut belum dimutakhirkan ke dalam aplikasi SIPD-RI.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	1.971.160.493.024,00	**1.949.654.986.207,00**

Pendapatan Transfer-LO atau Dana Perimbangan adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI mengenai Rincian APBN yang terdiri dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun) dan disalurkan per periode sesuai dengan ketentuan penyaluran.

Pada Tahun 2024, Dana Perimbangan-LO disajikan pada kode akun objek 7.2.01.01 dengan uraian akun objek Dana Perimbangan-LO berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13/9845/Keuda Hal Penyeragaman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dalam Penerimaan Daerah Tanggal 15 Desember 2025 dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi beberapa kode akun objek yaitu 7.2.01.07 dengan uraian akun Dana Bagi Hasil (DBH)-LO, 7.2.01.08 dengan uraian akun Dana Alokasi Umum (DAU)-LO, dan 7.2.01.09 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO, berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya.

Tabel 5.346 Pendapatan Transfer – LO

Jenis Pendapatan – LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**1.971.160.493.024,00**	**1.949.654.986.207,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	**1.971.160.493.024,00**	**1.949.654.986.207,00**
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	**294.569.205.000,00**	**291.304.476.980,00**
DBH Pajak-LO	233.419.548.000,00	160.138.628.980,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	59.993.223.000,00	129.350.216.000,00
DBH Lainnya-LO	1.156.434.000,00	1.815.632.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	**1.199.371.400.647,00**	**1.177.916.590.123,00**
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	1.027.801.318.066,00	1.177.916.590.123,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	171.570.082.581,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	**453.983.730.377,00**	**469.118.831.104,00**
DAK Fisik-LO	88.988.492.951,00	157.564.483.366,00
DAK Non Fisik-LO	364.995.237.426,00	311.554.347.738,00
Insentif Fiskal-LO	**23.236.157.000,00**	**11.315.088.000,00**
Insentif Fiskal-LO	0,00	11.315.088.000,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	23.236.157.000,00	0,00

Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.971.160.493.024,00. Realisasi ini mengalami

kenaikan sebesar Rp21.505.506.817,00 atau sebesar 1,10% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.949.654.986.207,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.2.1.1.1 Peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) - LO dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp22.961.292.000,00 yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2025 dan adanya penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-35/PK/PK.2/2025 tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah tahun anggaran 2025.

5.4.1.2.1.1.2 Sedangkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) - LO mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) demi mendukung pendanaan belanja pegawai formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

5.4.1.2.1.1.3 Pada tahun 2025 Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap kebijakan penetapan alokasi dan pagu definitif dari Pemerintah Pusat, selain itu dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah menyebabkan pengurangan alokasi DAK Fisik untuk bagian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

5.4.1.2.1.1.4 Sementara itu, realisasi penerimaan Insentif Fiskal-LO pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh pemutakhiran data dana insentif fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya yang didukung oleh keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan capaian penilaian kinerja daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Pendapatan Transfer dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.447 Rincian Selisih Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO

URAIAN	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	PENDAPATAN TRANSFER - LO	SELISIH
PENDAPATAN TRANSFER	**1.974.299.383.024,00**	**1.971.160.493.024,00**	**3.138.890.000,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.974.299.383.024,00**	**1.971.160.493.024,00**	**3.138.890.000,00**
Dana Bagi Hasil (DBH)	**297.708.095.000,00**	**294.569.205.000,00**	**3.138.890.000,00**
DBH Pajak	235.113.496.000,00	233.419.548.000,00	1.693.948.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	61.438.165.000,00	59.993.223.000,00	1.444.942.000,00
DBH Lainnya	1.156.434.000,00	1.156.434.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	**1.199.371.400.647,00**	**1.199.371.400.647,00**	**0,00**
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.027.801.318.066,00	1.027.801.318.066,00	0,00

URAIAN	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	PENDAPATAN TRANSFER - LO	SELISIH
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	171.570.082.581,00	171.570.082.581,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	**453.983.730.377,00**	**453.983.730.377,00**	**0,00**
DAK Fisik	88.988.492.951,00	88.988.492.951,00	0,00
DAK Non Fisik	364.995.237.426,00	364.995.237.426,00	0,00
Insentif Fiskal	**23.236.157.000,00**	**23.236.157.000,00**	**0,00**
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	23.236.157.000,00	23.236.157.000,00	0,00

Penjelasan selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.248 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO

URAIAN	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	PENYALURAN KURANG BAYAR TDF 2024	PENDAPATAN TRANSFER - LO
PENDAPATAN TRANSFER	**1.974.299.383.024,00**	**(3.138.890.000,00)**	**1.971.160.493.024,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.974.299.383.024,00**	**(3.138.890.000,00)**	**1.971.160.493.024,00**
Dana Bagi Hasil (DBH)	**297.708.095.000,00**	**(3.138.890.000,00)**	**294.569.205.000,00**
DBH Pajak	235.113.496.000,00	(1.693.948.000,00)	233.419.548.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	61.438.165.000,00	(1.444.942.000,00)	59.993.223.000,00
DBH Lainnya	1.156.434.000,00	0,00	1.156.434.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	**1.199.371.400.647,00**	**0,00**	**1.199.371.400.647,00**
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.027.801.318.066,00	0,00	1.027.801.318.066,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	171.570.082.581,00	0,00	171.570.082.581,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	**453.983.730.377,00**	**0,00**	**453.983.730.377,00**
DAK Fisik	88.988.492.951,00	0,00	88.988.492.951,00
DAK Non Fisik	364.995.237.426,00	0,00	364.995.237.426,00
Insentif Fiskal	**23.236.157.000,00**	**0,00**	**23.236.157.000,00**
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	23.236.157.000,00	0,00	23.236.157.000,00

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	224.057.423.395,23	**170.967.444.887,66**

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LO dan Pendapatan Transfer - LO (dana perimbangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO yang merupakan Pendapatan Hibah - LO dengan realisasi Tahun 2025 sebesar Rp224.057.423.395,23. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp53.089.978.507,57 atau sebesar 31,05% dibandingkan dengan realisasi tahun

2024 sebesar Rp170.967.444.887,66 dipengaruhi oleh penerimaan atas Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Penerimaan Hibah berupa Aset Tetap yang diterima dari Kementerian (Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum - BPJN Kepulauan Riau, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Bank Bukopin dan Masyarakat serta Hibah yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 5.249 Pendapatan Hibah – LO

NO	OPD	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	Pendapatan Hibah dari Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis-LO	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=3+4+5+6+7+8*
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300.000,00	376.941.277,16	693.241.277,16
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	118.747.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.747.600,00
3	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.294.704.000,00	0,00	0,00	1.294.704.000,00
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.849.834.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.834.665,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	197.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.377.000,00
6	Dinas Kesehatan	50.517.874.046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.517.874.046,07
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	48.284.180.693,00	159.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.443.680.693,00
8	Dinas Pendidikan	56.041.180.290,00	0,00	25.461.782.700,00	384.337.822,00	0,00	0,00	81.887.300.812,00
9	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.310.000.000,00	339.962.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.962.204,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	37.404.701.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.404.701.098,00
	JUMLAH	**195.723.895.392,07**	**499.462.204,00**	**25.461.782.700,00**	**1.679.041.822,00**	**316.300.000,00**	**376.941.277,16**	**224.057.423.395,23**

Apabila dibandingkan antara Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.250 Rincian Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**1.798.843.934,57**	**224.057.423.395,23**	**(222.258.579.460,66)**
Pendapatan Hibah-LO	**1.798.843.934,57**	**224.057.423.395,23**	**(222.258.579.460,66)**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	**0,00**	**195.723.895.392,07**	**(195.723.895.392,07)**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	195.723.895.392,07	(195.723.895.392,07)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	**0,00**	**499.462.204,00**	**(499.462.204,00)**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	499.462.204,00	(499.462.204,00)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	**0,00**	**25.461.782.700,00**	**(25.461.782.700,00)**
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	25.461.782.700,00	(25.461.782.700,00)

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	**1.294.704.000,00**	**1.995.341.822,00**	**(700.637.822,00)**
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.294.704.000,00	1.679.041.822,00	(384.337.822,00)
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	316.300.000,00	(316.300.000,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	**504.139.934,57**	**376.941.277,16**	**127.198.657,41**
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	504.139.934,57	376.941.277,16	127.198.657,41

Penjelasan selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.251 Penjelasan selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP TANAH	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP LAINYA	PENERIMAAN HIBAH BARANG PERSEDIAAN	PENERIMAAN HIBAH BANPER	KOREKSI KURANG CATAT HIBAH CSR	REKLASIFIKASI DARI PENDAPATAN BLUD	KOREKSI LEBIH CATAT PENGAKUAN ASET TETAP DARI HIBAH BANPER	PENERIMAAN DARI SISA DANA SPP TAHUN 2024	LAPORAN OPERASIONAL
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**1.798.843.934,57**	**41.827.698.995,65**	**25.621.282.700,00**	**33.983.019.248,83**	**51.060.013.986,52**	**60.000.000,00**	**50.976.583.850,07**	**555.827.000,00**	**384.337.822,00**	**17.917.451.515,00**	**(437.000,00)**	**(127.198.657,41)**	**224.057.423.395,23**
Pendapatan Hibah-LO	**1.798.843.934,57**	**41.827.698.995,65**	**25.621.282.700,00**	**33.983.019.248,83**	**51.060.013.986,52**	**60.000.000,00**	**50.976.583.850,07**	**555.827.000,00**	**384.337.822,00**	**17.917.451.515,00**	**(437.000,00)**	**(127.198.657,41)**	**224.057.423.395,23**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	**0,00**	**41.511.398.995,65**	**0,00**	**33.983.019.248,83**	**51.060.013.986,52**	**60.000.000,00**	**50.636.621.646,07**	**555.827.000,00**	**0,00**	**17.917.451.515,00**	**(437.000,00)**	**0,00**	**195.723.895.392,07**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	41.511.398.995,65	0,00	33.983.019.248,83	51.060.013.986,52	60.000.000,00	50.636.621.646,07	555.827.000,00	0,00	17.917.451.515,00	(437.000,00)	0,00	195.723.895.392,07
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	**0,00**	**0,00**	**159.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.962.204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.462.204,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	0,00	159.500.000,00	0,00	0,00	0,00	339.962.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.462.204,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	**0,00**	**0,00**	**25.461.782.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.461.782.700,00**
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	25.461.782.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.461.782.700,00
Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	**1.294.704.000,00**	**316.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.337.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.995.341.822,00**
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.294.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.337.822,00	0,00	0,00	0,00	1.679.041.822,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi	0,00	316.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300.000,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP TANAH	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP LAINYA	PENERIMAAN HIBAH BARANG PERSEDIAAN	PENERIMAAN HIBAH BANPER	KOREKSI KURANG CATAT HIBAH CSR	REKLASIFIKASI DARI PENDAPATAN BLUD	KOREKSI LEBIH CATAT PENGAKUAN ASET TETAP DARI HIBAH BANPER	PENERIMAAN DARI SISA DANA SPP TAHUN 2024	LAPORAN OPERASIONAL
Swasta Dalam Negeri-LO													
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	**504.139.934,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(127.198.657,41)**	**376.941.277,16**
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	504.139.934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(127.198.657,41)	376.941.277,16

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp224.057.423.395,23 tidak termasuk penerimaan hibah aset tetap yang bersumber dari *Program Corporate Social Responsibility (CSR)* dari PT. Ecogreen Oleochemicals kepada SMK Negeri 6 Batam berdasarkan Surat Hibah Nomor 031/EOB/HR-GA-RD/V-2025 Tanggal 21 Mei 2025 dan Surat Hibah Nomor 039/EOB/HR-GA-RT/VI-2025 Tanggal 30 Juni 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.252 Daftar Barang SMK Negeri 6 Batam yang bersumber dari CSR

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan	Total Keseluruhan
1.3.2.01.01.010.005	Forklift Electric 3 Ton	Krisbow FB30	2012	1	95.000.000,00	95.000.000,00
1.3.2.01.01.010.005	Forklift Diesel 4 Ton	Caterpillar DP40KD	2003	1	115.000.000,00	115.000.000,00
Total						**210.000.000,00**

Namun dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Surat Hibah tersebut diatas tidak disertai dengan pencantuman nilai barang yang memadai oleh pihak pemberi hibah sehingga pihak sekolah selaku penerima hibah belum dapat mencatat ke dalam Aset Tetap.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menerima Bantuan Sarana Digitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk 67 (enam puluh tujuh) sekolah, namun sampai dengan tanggal pelaporan, aset berupa sarana digitalisasi tersebut belum dapat dicatat sebagai Aset Tetap pada sekolah penerima bantuan dikarenakan belum terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kemendikdasmen kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.253 Daftar Barang yang bersumber dari Bantuan Sarana Digitalisasi

No	Jenjang	Status Sekolah	Nama Sekolah	Kabupaten /Kota	Nama Barang	Jumlah	Nama Barang	Jumlah
1	SLB	Negeri	SLB NEGERI NATUNA	Kabupaten Natuna	TV Digital	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
2	SLB	Negeri	SLBN 1 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	Smart Board plat plannel digital 75 inchi	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
3	SLB	Negeri	SLB NEGERI ANAMBAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Interactive Flat Panel (IFP) Berserta Kelengkapan	1 Set	Letop Merek zyrex	1
4	SLB	Negeri	SLBN 2 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	Interactive Flat Panel (IFP) beserta perlengkapannya	1 Set	Letop Merek zyrex	1
5	SLB	Negeri	SLB NEGERI LINGGA	Kabupaten Lingga	Interaktif Flat Panel	1 Set	Letop Merek zyrex	1
6	SLB	Negeri	SLB NEGERI KIJANG	Kabupaten Bintan	Smartboard Interactive Flat Panel Hisense Beserta Kelengkapannya	1 Set	Letop Merek zyrex	1
7	SLB	Negeri	SLB NEGERI KARIMUN	Kabupaten Karimun	Hinsense IFP 75 inc Smart TV	1 Set	Letop Merek zyrex	1
8	SMA	Negeri	SMAN 1 BINTAN UTARA	Kabupaten Bintan	HISENSE IFP 75 Inchi75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 57.5 kgs	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
9	SMA	Negeri	SMAN 1 BINTAN PESISIR	Kabupaten Bintan	Hisense IFP & Bracket	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
10	SMA	Negeri	SMAN 1 SIANTAN TIMUR	Kabupaten Kepulauan Anambas	Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
11	SMA	Negeri	SMAN 1 BUNGURAN UTARA	Kabupaten Natuna	Alat Digital PID Hisense	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
12	SMA	Negeri	SMAN 23 BATAM	Kota Batam	IFP	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
13	SMA	Negeri	SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	Kabupaten Natuna	Hisense IFP 75 inc	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
14	SMA	Negeri	SMAN 1 KARIMUN	Kabupaten Karimun	interactive flat panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
15	SMA	Negeri	SMAN 1 TOAPAYA	Kabupaten Bintan	INTERACTIVE FLAT PANEL (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
16	SMA	Negeri	SMAN 1 SENAYANG	Kabupaten Lingga	HISENSE IFP 75 INCI	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
17	SMA	Negeri	SMAN 1 SIANTAN	Kabupaten Kepulauan Anambas	Smartboard berupa Interactive flat panel (75wm61fe)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
18	SMA	Negeri	SMA NEGERI 1 SELAT GELAM	Kabupaten Karimun	HISENSE IFP 75 inch	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1

No	Jenjang	Status Sekolah	Nama Sekolah	Kabupaten /Kota	Nama Barang	Jumlah	Nama Barang	Jumlah
19	SMA	Negeri	SMAN 1 BUNGURAN BARAT	Kabupaten Natuna	Layar IFT (Tipe : Hisense IFP 75 inci)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
20	SMA	Negeri	SMAN 25 BATAM	Kota Batam	Smartboard Berupa Interactive Flat Panel (IFP) Merek HISENSE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
21	SMA	Negeri	SMAN 2 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	INTERAKTIVE FLAT PANEL (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
22	SMA	Negeri	SMAN 4 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	SMART TV HISENSE IFP 75WM61FE 1.850 x 240mm, 59,7 kg	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
23	SMA	Negeri	SMAN 24 BATAM	Kota Batam	TV IFP HISENSE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
24	SMA	Negeri	SMAN 29 BATAM	Kota Batam	HISENSE IFP 75 INCH 75WM61FE	1 Set		
25	SMA	Negeri	SMAN 27 BATAM	Kota Batam	Head unit IFP Merk Hisense Tipe 75WM61FE	1 Set		
26	SMA	Negeri	SMAN 5 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	Head unit IFP merk Hisense tipe 75WM61FE	1 Set		1
27	SMA	Negeri	SMAN 1 PULAU TIGA	Kabupaten Natuna	SMART BOARD INTERACTIVE FLAT PANEL	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
28	SMA	Negeri	SMAN 4 KARIMUN	Kabupaten Karimun	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
29	SMA	Negeri	SMAN 1 SUBI	Kabupaten Natuna	Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
30	SMA	Negeri	SMAN 2 TELUK BINTAN	Kabupaten Bintan	smart tv hisense merah putih	1 Set		1
31	SMA	Negeri	SMAN 4 KARIMUN	Kabupaten Karimun	HISENSE IFP	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
32	SMA	Negeri	SMAN 2 BINTAN PESISIR	Kabupaten Bintan	IFP 75 inci HISENSE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
33	SMA	Negeri	SMAN 1 TEMIANG PESISIR	Kabupaten Lingga	Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
34	SMA	Negeri	SMAN 1 KEPULAUAN POSEK	Kabupaten Lingga	Papan Interaktif/TV	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
35	SMA	Negeri	SMAN 1 JEMAJA	Kabupaten Kepulauan Anambas	Head Unit IFP Merk Hisence Type 75WM61FE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
36	SMA	Negeri	SMAN 1 LINGGA TIMUR	Kabupaten Lingga	INTERACTIVE FLAT PANEL (IFP) MERK HISENSE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
37	SMA	Negeri	SMAN 1 LINGGA UTARA	Kabupaten Lingga	HISENSE IFP 75 Inch 75 WM61FE 1.850 x 1.165 x 240 mm, 59 kgs	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
38	SMA	Negeri	SMAN 2 PALMATAK	Kabupaten Kepulauan Anambas	Smartboard / Interactive flat panel / papan interaktif digital	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
39	SMA	Negeri	SMAN 1 BAKUNG SERUMPUN	Kabupaten Lingga	Hisense IFP 75 inch	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
40	SMA	Negeri	SMAN 1 SERASAN	Kabupaten Natuna	Smartboard Head unit IFP Merk Hisensi Tipe 75WM61FE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
41	SMA	Negeri	SMAN 3 KUNDUR	Kabupaten Karimun	Head unit IFP	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
42	SMA	Negeri	SMAN 3 KARIMUN	Kabupaten Karimun	Hisense Smartboard Interactive Flat Panel	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
43	SMK	Negeri	SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	SMARTBOARD BERUPA INTERACTIVE FLAT PANEL	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
44	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 SENAYANG	Kabupaten Lingga	IFP	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
45	SMK	Negeri	SMK NEGERI 2 ANAMBAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	INTERACTIVE FLAT PANEL	1 Set	LAPTOP MEREK ZYREX	1
46	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 SERI KUALA LOBAM	Kabupaten Bintan	Papan Interaktif Digital/ Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
47	SMK	Negeri	SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	Kabupaten Natuna	HISENSE IFP 75 inchi	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
48	SMK	Negeri	SMK NEGERI 2 KARIMUN	Kabupaten Karimun	INTERACTIVE FLAT PANEL (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
49	SMK	Negeri	SMK NEGERI 7 BATAM	Kota Batam	Papan Interaktif Digital/Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
50	SMK	Negeri	SMK NEGERI 4 BATAM	Kota Batam	Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
51	SMK	Negeri	SMK NEGERI 5 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	Papan Interaktif Digital/ Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1

No	Jenjang	Status Sekolah	Nama Sekolah	Kabupaten /Kota	Nama Barang	Jumlah	Nama Barang	Jumlah
52	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	Kabupaten Natuna	SMART TV	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
53	SMK	Negeri	SMK NEGERI 4 ANAMBAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Papan Interaktif Digital (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
54	SMK	Negeri	SMKN 5 BATAM	Kota Batam	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm,	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
55	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 GUNUNG KIJANG	Kabupaten Bintan	IFP / Interactive Flat Panel	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
56	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	Kabupaten Natuna	HISENSE IFP 75 INCHI 75WW61FE 1.850X1.165X240MM,59,7KGS	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
57	SMK	Negeri	SMK NEGERI 2 LINGGA	Kabupaten Lingga	IPF	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
58	SMK	Negeri	SMK NEGERI KUNDUR	Kabupaten Karimun	Interactive Flat Panel (IFP) HISENSE IPF 75 Inch 75WM61FE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
59	SMK	Negeri	SMK NEGERI 6 BATAM	Kota Batam	Smartboard	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
60	SMK	Negeri	SMK NEGERI 3 ANAMBAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Hisense IFP 75 inch 75WM61FE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
61	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	Kabupaten Natuna	Papan Interaktif Digital/ Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
62	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA	Kabupaten Bintan	SMARTBOARD	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
63	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 SINGKEP	Kabupaten Lingga	SMARTBOARD	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
64	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 SERI KUALA LOBAM	Kabupaten Bintan		1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
65	SMK	Negeri	SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	HI2510170011297	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
66	SMK	Negeri	SMK NEGERI KUNDUR UTARA	Kabupaten Karimun	Papan Interaktif Digital	1 Set		
67	SMK	Negeri	SMKN 1 BINTAN TIMUR	Kabupaten Bintan	Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1

5.4.2 Beban - LO

Beban - LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	3.875.181.517.994,60	**4.377.962.746.624,97**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, atau timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, dan/atau saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat beban pada Tahun 2025 sebesar Rp3.875.181.517.994,60 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	2.958.491.006.575,28	**3.162.864.178.041,49**

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial dan Beban Penyisihan Piutang dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp2.958.491.006.575,28 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.254 Beban Operasi – LO

JENIS BEBAN OPERASI	SALDO 2025	SALDO 2024
	(Rp)	(Rp)
Beban Pegawai	1.450.879.240.714,54	1.309.490.093.784,00
Beban Barang dan Jasa	1.321.670.657.789,70	1.466.829.936.561,96
Beban Bunga	0,00	3.078.651.404,00
Beban Subsidi	834.852.991,00	944.301.180,00
Beban Hibah	182.120.444.655,37	353.850.454.704,03
Beban Bantuan Sosial	1.834.940.000,00	4.002.925.000,00
Beban Penyisihan Piutang	1.150.870.424,67	24.667.815.407,50
JUMLAH	**2.958.491.006.575,28**	**3.162.864.178.041,49**

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Pegawai sebesar Rp1.450.879.240.714,54 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.255 Rincian Beban Pegawai

URAIAN	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Pegawai	**1.450.879.240.714,54**
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	**587.555.308.100,04**
Beban Gaji Pokok ASN	435.076.249.629,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	38.307.564.288,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.239.740.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.722.099.664,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.305.208.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	24.049.849.170,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	581.938.134,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.794.640,04
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	38.577.961.425,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	921.986.776,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.765.916.374,00
Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	**791.353.397.254,50**
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	399.184.136.323,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.091.725.590,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.414.209.626,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.618.291.967,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	181.628.187.927,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	164.416.845.820,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**0,00**
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00
Beban Honorarium	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	**29.023.911.364,00**
Beban Uang Representasi DPRD	1.420.800.000,00

URAIAN	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	174.141.000,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	131.949.240,00
Beban Uang Paket DPRD	122.040.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.060.160.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.875.000,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.040.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.847.164,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.297.298.960,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.636.800.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**1.186.363.100,00**
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	138.000.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.696.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	131.760.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.794.718,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.720,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.392.000,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	898.185.902,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**3.000.017.856,00**
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2.640.017.856,00
Beban Pegawai BLUD	**38.760.243.040,00**
Beban Pegawai BLUD	38.760.243.040,00

Dengan rincian beban pegawai menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.256 Beban Pegawai per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2025	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	628.270.100.158,00	561.322.860.402,00
2	Dinas Kesehatan	22.202.635.160,00	20.407.161.637,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	128.223.278.477,00	98.479.478.307,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	55.669.828.988,00	52.835.898.137,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	21.327.273.335,00	19.497.505.591,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.744.445.455,00	8.309.645.864,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	16.542.364.038,00	13.563.164.083,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.568.311.690,00	5.887.518.189,00
9	Dinas Sosial	9.893.796.469,00	9.472.156.927,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.345.833.373,00	26.532.474.269,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.981.798.579,00	9.568.473.404,00
12	Dinas Perhubungan	13.841.119.140,00	12.601.582.139,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.552.448.992,00	9.162.363.624,00

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2025	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2024
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.241.670.925,00	8.254.822.216,00
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11.835.017.567,00	10.524.937.248,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.634.284.940,04	8.516.853.904,00
17	Dinas Kebudayaan	8.184.258.684,00	7.616.837.601,00
18	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	14.301.153.296,00	12.293.524.767,00
19	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	25.010.899.072,00	24.670.214.454,00
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.392.728.388,00	9.256.442.477,00
21	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	18.724.136.706,00	17.570.415.602,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.978.239.646,00	25.204.302.736,00
23	Dinas Pariwisata	10.235.153.476,00	10.165.197.472,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.922.255.246,00	9.315.912.680,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.859.349.076,00	10.549.430.245,00
26	Biro Umum	85.966.333.404,00	74.113.808.923,00
27	Sekretariat DPRD	47.719.673.562,00	42.436.691.669,00
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.865.198.247,00	20.579.642.677,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23.809.125.811,50	22.645.636.563,00
30	Badan Pendapatan Daerah	70.186.051.551,00	75.976.186.869,00
31	Badan Kepegawaian dan KORPRI	16.271.392.429,00	15.555.269.915,00
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.692.655.828,00	10.808.777.703,00
33	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.139.971.973,00	5.343.403.111,00
34	Badan Penghubung Daerah	4.136.023.642,00	3.647.428.517,00
35	Inspektorat	31.437.521.615,00	28.399.622.618,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.172.911.776,00	8.404.451.244,00
JUMLAH		**1.450.879.240.714,54**	**1.309.490.093.784,00**

Apabila dibandingkan antara Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.257 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BEBAN PEGAWAI - LO	SELISIH
Beban Pegawai	**1.448.897.643.513,04**	**1.450.879.240.714,54**	**(1.981.597.201,50)**
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	**586.350.321.322,04**	**587.555.308.100,04**	**(1.204.986.778,00)**
Beban Gaji Pokok ASN	435.076.249.629,00	435.076.249.629,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	38.377.680.246,00	38.307.564.288,00	70.115.958,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.242.260.000,00	7.239.740.000,00	2.520.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.731.834.664,00	32.722.099.664,00	9.735.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.305.948.000,00	7.305.208.000,00	740.000,00

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BEBAN PEGAWAI - LO	SELISIH
Beban Tunjangan Beras ASN	24.093.228.750,00	24.049.849.170,00	43.379.580,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	582.098.638,00	581.938.134,00	160.504,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.795.021,04	6.794.640,04	381,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	37.246.323.224,00	38.577.961.425,00	(1.331.638.201,00)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	921.986.776,00	921.986.776,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.765.916.374,00	2.765.916.374,00	0,00
Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	**791.519.964.438,00**	**791.353.397.254,50**	**166.567.183,50**
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	399.289.809.644,00	399.184.136.323,50	105.673.320,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.091.725.590,00	1.091.725.590,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.417.223.095,00	35.414.209.626,50	3.013.468,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.618.291.967,00	9.618.291.967,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	181.686.068.322,00	181.628.187.927,50	57.880.394,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	164.416.845.820,00	164.416.845.820,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	**29.023.911.364,00**	**29.023.911.364,00**	**0,00**
Beban Uang Representasi DPRD	1.420.800.000,00	1.420.800.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	174.141.000,00	174.141.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	131.949.240,00	131.949.240,00	0,00
Beban Uang Paket DPRD	122.040.000,00	122.040.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.060.160.000,00	2.060.160.000,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.875.000,00	97.875.000,00	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	0,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.847.164,00	17.847.164,00	0,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.297.298.960,00	8.297.298.960,00	0,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.636.800.000,00	6.636.800.000,00	0,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**1.186.363.100,00**	**1.186.363.100,00**	**0,00**
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	131.760.000,00	131.760.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00	3.910.680,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.794.718,00	2.794.718,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.720,00	1.720,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.392.000,00	7.392.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	898.185.902,00	898.185.902,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**3.000.017.856,00**	**3.000.017.856,00**	**0,00**
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2.640.017.856,00	2.640.017.856,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	**37.817.065.433,00**	**38.760.243.040,00**	**(943.177.607,00)**

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BEBAN PEGAWAI - LO	SELISIH
Beban Pegawai BLUD	37.817.065.433,00	38.760.243.040,00	(943.177.607,00)

Penjelasan selisih Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.558 Penjelasan Selisih Perbedaan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN	KOREKSI KURANG CATAT UTANG 2025	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Pegawai	**1.448.897.643.513,04**	**(188.239.845,00)**	**(131.697.128,50)**	**1.358.356.568,00**	**943.177.607,00**	**1.450.879.240.714,54**
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	**586.350.321.322,04**	**(26.879.252,00)**	**(126.490.538,00)**	**1.358.356.568,00**	**0,00**	**587.555.308.100,04**
Beban Gaji Pokok ASN	435.076.249.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.076.249.629,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	38.377.680.246,00	0,00	(70.115.958,00)	0,00	0,00	38.307.564.288,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.242.260.000,00	0,00	(2.520.000,00)	0,00	0,00	7.239.740.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.731.834.664,00	0,00	(9.735.000,00)	0,00	0,00	32.722.099.664,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.305.948.000,00	0,00	(740.000,00)	0,00	0,00	7.305.208.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	24.093.228.750,00	0,00	(43.379.580,00)	0,00	0,00	24.049.849.170,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	582.098.638,00	(160.504,00)	0,00	0,00	0,00	581.938.134,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.795.021,04	(381,00)	0,00	0,00	0,00	6.794.640,04
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	37.246.323.224,00	(26.718.367,00)	0,00	1.358.356.568,00	0,00	38.577.961.425,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	921.986.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.986.776,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.765.916.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.916.374,00
Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	**791.519.964.438,00**	**(161.360.593,00)**	**(5.206.590,50)**	0,00	**0,00**	**791.353.397.254,50**
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	399.289.809.644,00	(102.934.201,00)	(2.739.119,50)	0,00	0,00	399.184.136.323,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.091.725.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.725.590,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.417.223.095,00	(2.787.095,00)	(226.373,50)	0,00	0,00	35.414.209.626,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.618.291.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618.291.967,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	181.686.068.322,00	(55.639.297,00)	(2.241.097,50)	0,00	0,00	181.628.187.927,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	164.416.845.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.416.845.820,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN	KOREKSI KURANG CATAT UTANG 2025	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	**29.023.911.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.023.911.364,00**
Beban Uang Representasi DPRD	1.420.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.800.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	174.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.141.000,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	131.949.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.949.240,00
Beban Uang Paket DPRD	122.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.040.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.060.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.160.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.875.000,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.040.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.847.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.847.164,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.297.298.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297.298.960,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.636.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636.800.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**1.186.363.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186.363.100,00**
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	131.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.760.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910.680,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.794.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.718,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392.000,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.520,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.560,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	898.185.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.185.902,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**3.000.017.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.017.856,00**

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN	KOREKSI KURANG CATAT UTANG 2025	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2.640.017.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.017.856,00
Beban Pegawai BLUD	**37.817.065.433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943.177.607,00**	**38.760.243.040,00**
Beban Pegawai BLUD	37.817.065.433,00	0,00	0,00	0,00	943.177.607,00	38.760.243.040,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Pegawai - LRA dengan Beban Pegawai - LO sebagai berikut:

a. Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp943.177.607,00
b. Pengurangan Beban Pegawai yang merupakan Pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp188.239.845,00 terdiri dari:
    1. Badan Penghubung Daerah sebesar Rp381,00
    2. Dinas Kebudayaan sebesar Rp160.504,00
    3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp42.374,00
    4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp162.944.705,00
    5. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp25.091.881,00
c. Koreksi terkait kurang catat pengakuan utang belanja pegawai pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.358.356.568,00.
d. Koreksi terkait temuan BPK kelebihan atas pembayaran belanja pegawai pada beberapa OPD sebesar Rp131.697.128,50 antara lain:
    1. Badan Kepegawaian dan KORPRI sebesar Rp1.474.040,00
    2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.200.230,00
    3. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp10.172.711,50
    4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.752.390,00
    5. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp5.078.958,00
    6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp1.290.540,00
    7. Biro Umum sebesar Rp8.091.618,00
    8. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.453.624,00
    9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.318.218,00
    10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp3.505.370,00
    11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.413.012,00
    12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp6.247.182,00
    13. Dinas Pariwisata sebesar Rp156.690,00
    14. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp2.422.000,00
    15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp343.708,00
    16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.181.452,00
    17. Dinas Pendidikan sebesar Rp54.590.716,00
    18. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.089.782,00
    19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp739.944,00
    20. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp3.080.374,00
    21. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp9.057.462,00
    22. Inspektorat sebesar Rp5.687.578,00
    23. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp2.286.272,00
    24. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp1.430.921,00
    25. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp3.440.758,00
    26. Sekretariat DPRD sebesar Rp2.191.578,00

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.321.670.657.789,70 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.659 Rincian Beban Barang dan Jasa– LO

URAIAN BEBAN BARANG DAN JASA - LO	NILAI
Beban Barang dan Jasa	**1.321.670.657.789,70**

URAIAN BEBAN BARANG DAN JASA - LO	NILAI
Beban Barang	472.436.194.231,17
Beban Jasa	437.520.817.204,03
Beban Pemeliharaan	49.703.116.160,08
Beban Perjalanan Dinas	86.488.124.033,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.225.898.677,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00
Beban Barang dan Jasa BOSP	118.720.230.654,84
Beban Barang dan Jasa BLUD	131.576.276.829,58

i. Beban Barang

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dengan realisasi sebesar Rp472.436.194.231,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.260 Rincian Beban Barang – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Barang	**472.436.194.231,17**
Beban Barang Pakai Habis	468.300.376.877,17
Beban Barang Tak Habis Pakai	4.420.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.131.397.354,00

Dengan rincian Beban Barang menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.261 Beban Barang per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN BARANG TAHUN 2025	BEBAN BARANG TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	11.828.507.996,00	31.237.986.026,00
2	Dinas Kesehatan	59.628.787.443,43	61.377.059.585,89
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	3.399.197.615,45	843.104.651,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	3.164.082.941,90	3.573.640.804,80
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	76.749.941.098,23	39.022.644.682,72
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	199.514.406.127,61	108.163.795.265,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.003.623.252,00	1.843.566.850,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.328.381.978,00	2.210.841.485,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	501.591.870,00	1.170.643.090,00
10	Dinas Sosial	3.391.871.601,00	8.100.441.560,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.679.682.538,00	512.224.641,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.310.442.967,00	4.677.392.800,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.360.378.945,00	2.092.528.600,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	297.043.876,00	670.060.690,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.953.404.044,00	2.927.479.600,00

NO	SKPD	BEBAN BARANG TAHUN 2025	BEBAN BARANG TAHUN 2024
16	Dinas Kebudayaan	829.866.717,00	1.676.193.545,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	1.334.811.178,00	1.070.156.350,44
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.001.064.348,00	3.300.724.113,00
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	5.587.371.339,05	9.538.441.937,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.190.573.709,00	1.378.582.091,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.238.710.203,00	1.766.996.854,00
22	Dinas Perhubungan	7.954.105.946,21	2.315.690.266,08
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.042.381.872,12	2.766.565.592,00
24	Dinas Pariwisata	1.853.235.095,00	920.707.400,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	385.331.878,00	6.527.434.460,81
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.442.966.053,00	1.263.406.040,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	151.854.655,50	243.103.782,00
28	Inspektorat	3.354.629.412,00	3.165.816.061,50
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.797.503.348,00	3.279.601.267,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.151.363.606,67	9.919.890.732,67
31	Badan Pendapatan Daerah	6.929.293.515,00	9.251.139.118,00
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	691.109.779,00	814.479.167,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	995.364.922,00	1.288.219.766,00
34	Sekretariat DPRD	19.953.964.110,00	24.625.967.412,00
35	Badan Penghubung Daerah	2.858.598.359,00	3.634.186.867,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	514.625.731,00	655.129.088,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	2.552.241.488,00	5.010.398.300,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	308.894.425,00	310.393.200,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	302.551.354,00	479.061.346,00
40	Biro Organisasi	192.475.006,00	312.116.967,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	1.281.425.687,00	2.868.759.475,00
42	Biro Umum	23.107.285.401,00	30.088.912.731,00
43	Biro Hukum	321.250.800,00	570.174.650,00
JUMLAH BEBAN BARANG		**472.436.194.231,17**	**397.465.658.910,91**

Apabila dibandingkan antara Belanja Barang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Barang dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.262 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang-LRA dan Beban Barang-LO

URAIAN	BELANJA BARANG - LRA	BEBAN BARANG - LO	SELISIH
Beban Barang	**314.317.487.277,45**	**472.436.194.231,17**	**(158.118.706.953,72)**
Beban Barang Pakai Habis	311.125.390.664,45	468.300.376.877,17	(157.174.986.212,72)
Beban Barang Tak Habis Pakai	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.187.676.613,00	4.131.397.354,00	(943.720.741,00)

Penjelasan selisih Belanja Barang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.263 Penjelasan Selisih Perbedaan Belanja Barang-LRA dan Beban Barang-LO

URAIAN	Belanja Barang - LRA	Utang Tahun 2025	Pembebanan Persediaan Awal	Hibah Pemerintah Pusat /Daerah	Reklasifikasi Tambah dari Beban/Aset Tetap	Aset Ekstrakomtabel	Pelunasan Utang Tahun 2024	Persediaan Akhir 2025	Kapitalisasi ke Aset Tetap	Reklasifikasi Kurang ke Beban/Aset Tetap	Koreksi Kelebihan Pembayaran	Beban Barang - LO
Beban Barang	**314.317.487.277,45**	**37.477.908.260,09**	**277.859.094.229,74**	**50.976.583.850,07**	**8.418.698.532,02**	**2.643.308.140,00**	**(116.259.918.966,50)**	**(97.752.049.536,40)**	**(4.173.916.153,26)**	**(956.372.432,00)**	**(114.628.970,04)**	**472.436.194.231,17**
Beban Barang Pakai Habis	311.125.390.664,45	36.092.936.190,09	277.859.094.229,74	50.976.583.850,07	8.418.698.532,02	0,00	(116.247.978.966,50)	(97.752.049.536,40)	(1.101.296.684,26)	(956.372.432,00)	(114.628.970,04)	468.300.376.877,17
Beban Barang Tak Habis Pakai	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.187.676.613,00	1.384.972.070,00	0,00	0,00	0,00	2.643.308.140,00	(11.940.000,00)	0,00	(3.072.619.469,00)	0,00	0,00	4.131.397.354,00

ii. Beban Jasa

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Jasa dengan realisasi sebesar Rp437.520.817.204,03 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.264 Rincian Beban Jasa – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Jasa	**437.520.817.204,03**
Beban Jasa Kantor	314.913.860.652,48
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	40.850.882.733,07
Beban Sewa Tanah	127.150.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	33.836.052.110,67
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	12.762.847.895,37
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	19.448.190.139,44
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.793.506.550,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	75.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.408.051.480,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.305.275.643,00

Dengan rincian Beban Jasa menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.265 Beban Jasa per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN JASA TAHUN 2025	BEBAN JASA TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	98.790.127.198,49	99.926.241.238,92
2	Dinas Kesehatan	36.172.054.368,22	40.771.960.701,79
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	13.171.008.229,00	26.638.000.765,33
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	7.033.663.469,00	8.787.880.121,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	16.317.120.546,65	16.838.172.059,60
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	13.432.919.677,00	4.262.608.365,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.825.301.448,00	9.760.894.778,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	4.139.423.362,00	8.022.859.006,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.380.210.337,33	2.281.984.318,00
10	Dinas Sosial	2.272.470.116,33	3.214.960.874,45
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.749.415.673,00	4.531.937.705,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.569.494.423,00	18.682.166.200,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.158.919.144,00	5.380.003.055,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.906.245.615,00	2.131.468.777,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.844.287.238,00	7.082.460.985,00
16	Dinas Kebudayaan	3.075.301.133,00	4.466.910.845,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	3.883.046.032,00	5.483.232.232,71

NO	SKPD	BEBAN JASA TAHUN 2025	BEBAN JASA TAHUN 2024
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.292.714.157,00	4.830.921.835,11
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	4.355.153.397,00	3.676.129.319,50
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.371.945.241,00	2.856.705.146,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.614.874.779,00	2.161.284.107,00
22	Dinas Perhubungan	3.402.074.182,56	5.441.804.454,51
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.401.707.022,00	15.838.321.257,00
24	Dinas Pariwisata	8.250.571.278,00	14.702.590.474,33
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.806.824.991,00	2.815.255.680,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.435.733.479,00	6.947.819.670,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	472.576.197,67	376.416.458,33
28	Inspektorat	3.685.555.711,00	3.802.260.744,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.115.668.592,22	4.834.355.770,12
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14.779.291.839,11	16.077.523.429,56
31	Badan Pendapatan Daerah	17.628.022.387,69	22.831.854.569,79
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	1.475.224.540,00	1.248.484.856,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.817.684.245,00	1.561.392.136,00
34	Sekretariat DPRD	35.213.467.535,83	49.593.376.963,84
35	Badan Penghubung Daerah	4.272.308.590,00	6.161.673.826,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.228.315.802,00	1.456.104.785,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	10.565.691.593,00	14.134.948.748,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	788.066.312,00	1.397.926.256,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	650.730.857,00	1.312.088.083,00
40	Biro Organisasi	368.126.625,00	659.769.861,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	3.614.620.739,00	6.045.393.222,00
42	Biro Umum	35.508.526.921,93	48.264.783.908,93
43	Biro Hukum	684.332.179,00	1.544.470.639,00
	JUMLAH BEBAN JASA	**437.520.817.204,03**	**508.837.398.227,82**

Apabila dibandingkan antara Belanja Jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Jasa dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.766 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Jasa-LRA dan Beban Jasa-LO

URAIAN	BELANJA JASA - LRA	BEBAN JASA - LO	SELISIH
Beban Jasa	**446.336.500.472,61**	**437.520.817.204,03**	**8.815.683.268,58**

URAIAN	BELANJA JASA - LRA	BEBAN JASA - LO	SELISIH
Beban Jasa Kantor	310.444.272.893,34	314.913.860.652,48	(4.469.587.759,14)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	40.903.232.169,75	40.850.882.733,07	52.349.436,68
Beban Sewa Tanah	127.150.000,00	127.150.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	33.725.341.655,00	33.836.052.110,67	(110.710.455,67)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	13.252.413.054,00	12.762.847.895,37	489.565.158,63
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	30.746.441.227,52	19.448.190.139,44	11.298.251.088,08
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.287.122.350,00	3.793.506.550,00	493.615.800,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.470.251.480,00	9.408.051.480,00	1.062.200.000,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.305.275.643,00	2.305.275.643,00	0,00

Penjelasan selisih Belanja Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Jasa pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.867 Penjelasan Selisih Perbedaan Belanja Jasa-LRA dan Beban Jasa-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	KOREKSI KURANG CATAT UTANG	PEMBEBANAN BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2024	REKLASIFIKASI ANTAR BEBAN	KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2025	KAPITALISASI BEBAN KE ASET TETAP	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Jasa	446.336.500.472,61	20.997.959.801,31	926.000,00	1.753.866.905,29	781.660.000,00	(30.261.000,00)	(21.374.130.656,62)	(1.984.982.256,93)	(8.271.205.012,43)	(689.517.049,20)	437.520.817.204,03
Beban Jasa Kantor	310.444.272.893,34	10.356.832.370,00	0,00	0,00	68.500.000,00	0,00	(5.955.744.610,86)	0,00	0,00	0,00	314.913.860.652,48
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	40.903.232.169,75	420.247.200,00	926.000,00	356.394.728,36	0,00	(30.261.000,00)	(267.107.277,00)	(532.549.088,04)	0,00	0,00	40.850.882.733,07
Beban Sewa Tanah	127.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.150.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	33.725.341.655,00	179.249.720,00	0,00	18.526.666,67	713.160.000,00	0,00	(778.543.431,00)	(21.682.500,00)	0,00	0,00	33.836.052.110,67
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	13.252.413.054,00	363.400.000,00	0,00	1.378.945.510,26	0,00	0,00	(801.160.000,00)	(1.430.750.668,89)	0,00	0,00	12.762.847.895,37
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	30.746.441.227,52	9.162.510.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.500.039.537,76)	0,00	(8.271.205.012,43)	(689.517.049,20)	19.448.190.139,44
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.287.122.350,00	128.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(622.335.800,00)	0,00	0,00	0,00	3.793.506.550,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.470.251.480,00	387.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.449.200.000,00)	0,00	0,00	0,00	9.408.051.480,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.305.275.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.275.643,00

iii. Beban Pemeliharaan

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Pemeliharaan dengan realisasi sebesar Rp49.703.116.160,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.268 Rincian Beban Pemeliharaan – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Pemeliharaan	**49.703.116.160,08**
Beban Pemeliharaan Tanah	2.308.892.050,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.850.504.675,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.412.626.792,41
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.131.092.642,67

Dengan rincian Beban Pemeliharaan menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.969 Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2025	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	1.652.079.799,00	739.863.944,00
2	Dinas Kesehatan	268.658.304,00	511.491.074,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.662.323.090,00	76.951.020,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	323.410.000,00	1.596.160.300,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	28.871.731.664,12	12.648.999.421,00
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	255.112.105,00	1.139.097.900,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	154.459.303,00	82.656.500,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	590.125.043,00	179.418.185,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	124.837.151,00	199.803.792,36
10	Dinas Sosial	136.778.085,00	282.613.055,40
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	413.754.033,00	46.885.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	114.778.312,00	197.810.500,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	98.568.914,00	107.284.300,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	124.500.750,00	124.800.250,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	94.557.648,00	70.765.000,00
16	Dinas Kebudayaan	186.819.583,31	95.530.350,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	85.135.600,00	198.496.089,27
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	135.009.220,00	583.344.868,91
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	192.661.737,00	258.857.012,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	244.399.277,00	363.983.000,00

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2025	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2024
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	62.261.271,00	149.999.721,00
22	Dinas Perhubungan	663.933.768,85	22.928.303.202,54
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	323.302.051,80	1.091.310.640,00
24	Dinas Pariwisata	33.432.002,00	87.304.000,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	258.510.740,00	2.205.311.654,44
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	87.137.000,00	94.630.800,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.234.234,00	0,00
28	Inspektorat	583.028.297,00	701.540.880,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	349.580.580,00	505.240.450,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	643.694.828,95	1.012.487.580,81
31	Badan Pendapatan Daerah	2.978.072.628,00	3.369.295.295,20
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	43.301.800,00	101.381.149,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	390.132.713,00	200.907.253,00
34	Sekretariat DPRD	1.570.813.272,00	3.037.982.597,00
35	Badan Penghubung Daerah	656.212.796,00	1.071.900.887,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	134.525.098,00	79.006.500,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	97.471.820,00	101.900.000,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	44.863.460,00	80.238.881,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	37.638.100,00	56.355.000,00
40	Biro Organisasi	44.204.700,00	76.079.000,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	30.808.000,00	72.789.800,00
42	Biro Umum	4.861.903.981,05	8.716.515.608,83
43	Biro Hukum	77.353.400,00	41.810.000,00
	Jumlah Beban Pemeliharaan	**49.703.116.160,08**	**65.287.102.461,76**

Apabila dibandingkan antara Belanja Pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Pemeliharaan dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.270 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pemeliharaan -LRA dan Beban Pemeliharaan-LO

URAIAN	BELANJA PEMELIHARAAN - LRA	BEBAN PEMELIHARAAN - LO	SELISIH
Beban Pemeliharaan	**41.750.101.777,92**	**49.703.116.160,08**	**(7.953.014.382,16)**
Beban Pemeliharaan Tanah	2.080.412.050,00	2.308.892.050,00	(228.480.000,00)

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.807.801.498,00	10.850.504.675,00	1.957.296.823,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.189.625.013,00	17.412.626.792,41	(5.223.001.779,41)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.672.263.216,92	19.131.092.642,67	(4.458.829.425,75)

Penjelasan selisih Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.271 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pemeliharaan -LRA dan Beban Pemeliharaan-LO

URAIAN	BELANJA PEMELIHARAAN - LRA	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN	KAPITALISASI KE ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	KOREKSI CATAT NILAI UTANG	KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	REKLASIFIKASI MASUK ANTAR BEBAN	REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP	BEBAN PEMELIHARAAN - LO
Beban Pemeliharaan	**41.750.101.777,92**	**(704.254.145,82)**	**(114.721.789,00)**	**(8.768.123.331,84)**	**(172.751.835,19)**	**(8.877.002,35)**	**12.245.040.336,36**	**171.052.632,00**	**5.305.649.518,00**	**49.703.116.160,08**
Beban Pemeliharaan Tanah	2.080.412.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.480.000,00	0,00	0,00	2.308.892.050,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.807.801.498,00	0,00	0,00	(2.543.202.023,00)	0,00	0,00	467.427.232,00	117.387.968,00	1.090.000,00	10.850.504.675,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.189.625.013,00	(704.254.145,82)	(114.721.789,00)	(1.550.981.235,40)	(74.099.454,41)	0,00	7.191.190.672,04	53.664.664,00	422.203.068,00	17.412.626.792,41
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.672.263.216,92	0,00	0,00	(4.673.940.073,44)	(98.652.380,78)	(8.877.002,35)	4.357.942.432,32	0,00	4.882.356.450,00	19.131.092.642,67

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Pemeliharaan terdiri dari :
    1. Penambahan Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp12.245.040.336,36 terdiri dari:
        a) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp47.603.558,00
        b) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp123.056.686,00
        c) Biro Umum sebesar Rp657.302.686,00
        d) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp185.718.540,00
        e) Dinas Kesehatan sebesar Rp30.489.200,00
        f) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp40.576.050,00
        g) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.850.000,00
        h) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp53.893.500,00
        i) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp8.956.029.273,91
        j) Dinas Pendidikan sebesar Rp742.170.643,00
        k) Dinas Perhubungan sebesar Rp547.560.285,45
        l) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp19.200.000,00
        m) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp188.582.229,00
        n) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp191.645.940,00
        o) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp98.771.443,00
        p) Sekretariat DPRD sebesar Rp336.590.302,00
    2. Reklasifikasi antar Beban sebesar Rp171.052.632,00 terdiri dari:
        a) Reklasifikasi Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ke Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang pada Dinas Perhubungan sebesar Rp117.387.968,00
        b) Reklasifikasi Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp53.664.664,00
    3. Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp5.305.649.518,00 terdiri dari:
        a) Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud Lainnya ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp179.415.000,00
        b) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp132.330.850,00 antara lain:
            1) Reklasifikasi Peralatan Personal Computer ke Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar Rp1.090.000,00
            2) Reklasifikasi Rambu Tidak Bersuar ke Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp131.240.850,00
        c) Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan sebesar Rp242.788.068,00
        d) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.751.115.600,00 antara lain:
            1) Reklasifikasi Jalan Provinsi ke Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi sebesar Rp3.406.934.600,00

2) Reklasifikasi Jalan Provinsi ke Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain sebesar Rp1.344.181.000,00

b. Pengurangan Beban Pemeliharaan terdiri dari:
   1. Pelunasan Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp8.768.123.331,84 antara lain:
      a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp31.790.000,00
      b) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp548.214.838,00
      c) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp49.050.000,00
      d) Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp36.990.000,00
      e) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.408.719.873,44
      f) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp137.600.000,00
      g) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp23.025.000,00
      h) Dinas Kesehatan sebesar Rp24.145.000,00
      i) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp71.815.000,00
      j) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp35.000.000,00
      k) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp38.323.400,00
      l) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp184.073.000,00
      m) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.600.467.935,00
      n) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp39.241.000,00
      o) Dinas Pendidikan sebesar Rp200.525.000,00
      p) Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp43.155.290,40
      q) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp631.463.000,00
      r) Inspektorat sebesar Rp242.507.140,00
      s) Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp50.000.000,00
      t) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp100.887.395,00
      u) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.259.985.460,00
   2. Reklasifikasi ke Persediaan yang merupakan reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp704.254.145,82
   3. Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung ke dalam Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp114.721.789,00
   4. Koreksi terkait kelebihan pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp8.877.002,35
   5. Koreksi terkait potensi kelebihan pembayaran atas utang belanja pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp172.751.835,19

iv. Beban Perjalanan Dinas

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp86.488.124.033,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.272 Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Perjalanan Dinas	**86.488.124.033,00**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.318.107.764,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	170.016.269,00

Dengan rincian Beban Perjalanan Dinas menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.273 Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2025	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	2.969.491.880,00	7.341.016.979,00
2	Dinas Kesehatan	2.673.748.482,00	4.342.109.248,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	37.320.578,00	92.932.758,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	193.547.701,00	589.942.422,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.983.016.999,00	5.370.449.824,00
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	1.586.435.021,00	2.654.332.171,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.372.490.435,00	2.765.099.257,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	453.135.482,00	1.180.479.003,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	386.527.274,00	1.071.060.282,00
10	Dinas Sosial	1.328.240.226,00	2.940.406.358,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	848.151.515,00	868.041.308,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	687.426.551,00	1.534.779.462,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.233.646.250,00	1.348.489.472,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	609.505.114,00	1.296.374.370,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.491.815.888,00	1.584.811.005,00
16	Dinas Kebudayaan	273.812.101,00	1.481.429.050,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	522.292.596,00	647.925.815,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.280.080.269,00	2.002.371.511,00
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.765.934.254,00	1.886.980.765,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.423.027.561,00	1.590.327.624,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	865.275.983,00	2.242.469.505,00
22	Dinas Perhubungan	748.473.678,00	1.480.271.525,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.254.952.399,00	2.228.669.986,00
24	Dinas Pariwisata	797.928.749,00	1.329.027.077,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.403.025.000,00	2.602.261.098,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.391.916.958,00	2.353.359.427,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	364.928.473,00	881.198.157,00
28	Inspektorat	9.591.579.158,00	8.166.344.342,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.364.755.324,00	3.392.886.881,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.122.541.788,00	7.462.761.872,50
31	Badan Pendapatan Daerah	2.773.082.734,00	4.639.253.308,00

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2025	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2024
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	476.961.554,00	974.600.145,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	921.347.963,00	1.430.097.995,00
35	Sekretariat DPRD	21.566.858.562,00	25.597.007.522,00
36	Badan Penghubung Daerah	689.280.891,00	1.059.228.394,00
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	716.178.054,00	1.892.439.951,00
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	2.312.384.039,00	2.958.612.726,00
39	Biro Pengadaan Barang/Jasa	192.610.564,00	354.256.731,00
40	Biro Perekonomian dan Pembangunan	588.662.415,00	1.201.169.535,00
41	Biro Organisasi	276.457.039,00	591.554.063,00
42	Biro Administrasi Pimpinan	907.477.674,00	2.739.658.348,00
43	Biro Umum	4.655.649.417,00	6.925.324.166,00
44	Biro Hukum	386.149.440,00	816.946.807,00
	JUMLAH BEBAN PERJALANAN DINAS	**86.488.124.033,00**	**125.908.758.245,50**

Apabila dibandingkan antara Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.274 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas -LRA dan Beban Perjalanan Dinas -LO

URAIAN	BELANJA PERJALANAN DINAS - LRA	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	SELISIH
Beban Perjalanan Dinas	**87.845.288.867,00**	**86.488.124.033,00**	**1.357.164.834,00**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.675.272.598,00	86.318.107.764,00	1.357.164.834,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	170.016.269,00	170.016.269,00	0,00

Penjelasan selisih Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.275 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dan Beban Perjalanan Dinas-LO

URAIAN	BELANJA PERJALANAN DINAS - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO
Beban Perjalanan Dinas	**87.845.288.867,00**	**(1.055.124.858,00)**	**(302.039.976,00)**	**86.488.124.033,00**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.675.272.598,00	(1.055.124.858,00)	(302.039.976,00)	86.318.107.764,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	170.016.269,00	0,00	0,00	170.016.269,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Perjalanan Dinas - LRA dengan Beban Perjalanan Dinas - LO adalah sebagai berikut:

a. Pengurangan Beban Perjalanan Dinas yang merupakan Pelunasan Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp1.055.124.858,00 terdiri dari:
   1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp20.025.800,00

2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp411.827.700,00
3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp12.323.200,00
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp177.037.556,00
5. Dinas Pendidikan sebesar Rp285.017.310,00
6. Dinas Perhubungan sebesar Rp28.573.676,00
7. Dinas Sosial sebesar Rp120.319.616,00

b. Koreksi terkait temuan BPK kelebihan atas pembayaran belanja perjalanan dinas pada beberapa OPD sebesar Rp302.039.976,00 antara lain:
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp2.150.000,00
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.435.000,00
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp950.200,00
4. Badan Penghubung Daerah sebesar Rp5.340.600,00
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp1.580.511,00
6. Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp1.227.000,00
7. Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp2.246.000,00
8. Biro Umum sebesar Rp7.265.078,00
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp3.098.600,00
10. Dinas Kebudayaan sebesar Rp1.940.000,00
11. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.486.046,00
12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp137.000,00
13. Dinas Kesehatan sebesar Rp15.881.500,00
14. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp8.528.861,00
15. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.011.882,00
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp3.435.800,00
17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp809.800,00
18. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp9.714.500,00
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp4.956.750,00
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.531.411,00
21. Dinas Pendidikan sebesar Rp17.909.829,00
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp6.243.100,00
23. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.925.288,00
24. Dinas Sosial sebesar Rp600.000,00
25. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp454.500,00
26. Sekretariat DPRD sebesar Rp193.180.720,00

v. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp25.225.898.677,00 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.276 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**25.225.898.677,00**
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.985.778.977,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.240.119.700,00

Dengan rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.277 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD

NO	SKPD	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO TAHUN 2025	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	9.458.697.360,00	22.138.861.702,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	4.500.000,00
3	Dinas Sosial	433.000.000,00	1.299.000.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	30.000.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22.000.000,00	0,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	866.930.217,00	247.560.000,00
7	Dinas Kebudayaan	0,00	96.775.000,00
8	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	42.396.100,00	10.500.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.003.400.000,00	4.008.000.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	25.750.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91.950.000,00	184.100.000,00
12	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	11.400.000,00
14	Dinas Pariwisata	11.475.000,00	0,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
16	Badan Pendapatan Daerah	332.850.000,00	0,00
17	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60.000.000,00	0,00
19	Biro Kesejahteraan Rakyat	11.903.200.000,00	28.304.360.000,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	1.226.450.000,00
	Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**25.225.898.677,00**	**57.587.256.702,00**

Apabila dibandingkan antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.278 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat -LRA dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LO

URAIAN	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LRA	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO	SELISIH
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**28.419.098.677,00**	**25.225.898.677,00**	**3.193.200.000,00**
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.987.278.977,00	4.985.778.977,00	1.500.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.431.819.700,00	20.240.119.700,00	3.191.700.000,00

Penjelasan selisih Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.279 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat -LRA dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LO

URAIAN	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**28.419.098.677,00**	**(3.193.200.000,00)**	**25.225.898.677,00**
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.987.278.977,00	(1.500.000,00)	4.985.778.977,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.431.819.700,00	(3.191.700.000,00)	20.240.119.700,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO sebesar Rp3.193.200.000,00 adalah Pelunasan Utang Tahun 2024 pada beberapa OPD sebagai berikut:

1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.187.700.000,00
2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.004.000.000,00
3) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.500.000,00

vi. Beban Barang dan Jasa BOSP

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dan Jasa BOSP dengan realisasi sebesar Rp118.720.230.654,84 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.280 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS – LO

URAIAN	BEBAN BARANG DAN JASA BOSP - LRA
Beban Barang dan Jasa BOSP	**118.720.230.654,84**

URAIAN	BEBAN BARANG DAN JASA BOSP - LRA
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	**118.720.230.654,84**
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	118.720.230.654,84

Beban Barang dan Jasa BOSP terdiri Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOSP SMA/SMK/SLB Negeri dan juga Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi antara lain:

1. Bantuan revitalisasi sekolah dan bantuan afirmasi Pendidikan menengah yang diterima oleh SMA/SLB Negeri; dan
2. Bantuan revitalisasi sekolah dan bantuan SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam yang diterima oleh SMK Negeri (SMK Non BLUD).

Apabila dibandingkan antara Belanja Barang dan Jasa BOSP dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Barang dan Jasa BOSP dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.281 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BOSP-LRA dan Beban Barang dan Jasa BOSP-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA BOSP - LRA	BEBAN BARANG DAN JASA BOSP - LRA	SELISIH
Beban Barang dan Jasa BOSP	**113.061.921.817,84**	**118.720.230.654,84**	**(5.658.308.837,00)**
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	**113.061.921.817,84**	**118.720.230.654,84**	**(5.658.308.837,00)**
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	113.061.921.817,84	118.720.230.654,84	(5.658.308.837,00)

Penjelasan selisih Belanja Barang dan Jasa BOSP pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang dan Jasa BOSP pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.282 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BOSP-LRA dan Beban Barang dan Jasa BOSP-LO

Uraian	Belanja Barang dan Jasa BOSP - LRA	Pembebanan Persediaan	Hibah Pemerintah Pusat	Aset Ekstrakomtabel yang bersumber dari Pengadaan BOS/Bantuan Pemerintah Pusat	Persediaan Akhir 2025	Kapitalisasi ke Aset Tetap	Koreksi Kelebihan Pembayaran	Beban Barang dan Jasa BOSP - LO
Beban Barang dan Jasa BOSP	**113.061.921.817,84**	**173.322.260,00**	**555.827.000,00**	**5.146.584.900,00**	**(10.916.822,00)**	**(143.721.098,00)**	**(62.787.403,00)**	**118.720.230.654,84**
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	**113.061.921.817,84**	**173.322.260,00**	**555.827.000,00**	**5.146.584.900,00**	**(10.916.822,00)**	**(143.721.098,00)**	**(62.787.403,00)**	**118.720.230.654,84**
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	113.061.921.817,84	173.322.260,00	555.827.000,00	5.146.584.900,00	(10.916.822,00)	(143.721.098,00)	(62.787.403,00)	118.720.230.654,84

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Barang dan Jasa BOSP - LRA dengan Beban Barang dan Jasa BOSP - LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Barang dan Jasa BOSP terdiri dari :
   1. Penambahan dari Pembebanan Persediaan sebesar Rp173.322.260,00 terdiri dari:
      a) Pembebanan persediaan awal tahun 2025 yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp154.535.783,00.
      b) Pembebanan persediaan BOS tahun 2024 yang berasal dari Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2024 pada SMKN 1 Tanjungpinang sebesar Rp18.786.477,00.
   2. Penambahan dari Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp555.827.000,00 yang bersumber dari bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupa bantuan revitalisasi sekolah dan bantuan afirmasi Pendidikan menengah yang diterima oleh SMA/SLB Negeri sebesar Rp356.400.000,00 dan bantuan revitalisasi sekolah dan bantuan SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam yang diterima oleh SMK Negeri (SMK Non BLUD) sebesar Rp199.427.000,00.
   3. Penambahan Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp5.146.584.900,00 terdiri dari:
      a) Aset Ekstrakomptabel atas pengadaan aset tetap yang bersumber dari dana BOSP yang diterima oleh SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp4.001.753.322,00.
      b) Aset Ekstrakomptabel atas pengadaan aset tetap yang bersumber dari bantuan revitalisasi sekolah yang diterima oleh SMK Negeri Non BLUD sebesar Rp330.927.380,00.
      c) Aset Ekstrakomptabel atas pengadaan aset tetap yang bersumber dari bantuan revitalisasi sekolah yang diterima oleh SMA Negeri sebesar Rp773.718.500,00.
      d) Aset Ekstrakomptabel atas pengadaan aset tetap yang bersumber dari bantuan revitalisasi sekolah yang diterima oleh SLB Negeri sebesar Rp40.185.698,00.

b. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BOSP terdiri dari :
   1. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BOSP yang masih menjadi persediaan akhir 2025 sebesar Rp10.916.822,00, merupakan persediaan akhir alat tulis kantor sebesar Rp5.526.942,00, persediaan akhir perabot kantor sebesar Rp1.955.880,00, dan persediaan akhir alat listrik sebesar Rp3.434.000,00 berdasarkan *stock opname* per 31 Desember 2025 yang bersumber dari dana BOSP pada SMA/SMK Negeri.
   2. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BOSP karena kapitalisasi ke aset tetap merupakan kapitalisasi atas belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana BOSP ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp143.721.098,00.
   3. Koreksi terkait Temuan BPK atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp62.787.403,00 pada beberapa sekolah yang ada di Dinas Pendidikan antara lain:
      a) SMAN 2 Tanjungpinang sebesar Rp50.954.500,00
      b) SMAN 1 Batam sebesar Rp9.600.000,00
      c) SMKN 1 Tanjungpinang sebesar Rp2.232.903,00

vii. Beban Barang dan Jasa BLUD

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp131.576.276.829,58 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.283 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

URAIAN	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO
Beban Barang dan Jasa BLUD	**131.576.276.829,58**
Beban Barang dan Jasa BLUD	**131.576.276.829,58**

URAIAN	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO
Beban Barang dan Jasa BLUD	131.576.276.829,58

Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari penerimaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud serta Beban Barang dan Jasa pada SMK BLUD yang bersumber dari penerimaan BLUD SMK selain itu terdapat penerimaan yang bersumber dari bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meliputi bantuan revitalisasi sekolah, bantuan afirmasi Pendidikan menengah, bantuan sertifikasi, bantuan peningkatan mutu, bantuan SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam, serta bantuan dari PT Tenaris Hydril Batam.

Tabel 5.284 Beban Barang dan Jasa BLUD per SKPD

NO	SKPD	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD 2025	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD 2024
1	Dinas Pendidikan	6.520.111.172,63	17.898.788.806,90
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	18.300.365.392,00	21.106.503.474,99
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	106.755.800.264,95	113.303.599.988,20
	Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD	**131.576.276.829,58**	**152.308.892.270,09**

Apabila dibandingkan antara Belanja Barang dan Jasa BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Barang dan Jasa BLUD dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.285 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA dan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD - LRA	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO	SELISIH
Beban Barang dan Jasa BLUD	**130.190.841.269,56**	**131.576.276.829,58**	**(1.385.435.560,02)**
Beban Barang dan Jasa BLUD	**130.190.841.269,56**	**131.576.276.829,58**	**(1.385.435.560,02)**
Beban Barang dan Jasa BLUD	130.190.841.269,56	131.576.276.829,58	(1.385.435.560,02)

Penjelasan selisih Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang dan Jasa BLUD pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.286 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BLUD -LRA dan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	KAPITALISASI BEBAN KE ASET TETAP	KOREKSI KURANG CATAT KAPITALISASI BEBAN KE ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	PERSEDIAAN AKHIR 2025	KOREKSI LEBIH CATAT UTANG TAHUN 2025	KOREKSI LEBIH CATAT BELANJA BERSUMBER DARI BANTUAN PEMERINTAH	PENGGUNAAN/ PEMBEBANAN PERSEDIAAN AWAL	ASET EKSTRAKOMPTABEL	PEMBEBANAN BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO
Beban Barang dan Jasa BLUD	**130.190.841.269,56**	**(19.355.371.259,00)**	**(144.955.994,00)**	**(148.740.000,00)**	**(19.059.671.149,42)**	**(900.000,00)**	**2.729.656.415,00**	**16.009.336.222,66**	**421.144.240,00**	**55.742.777,78**	**20.879.194.307,00**	**131.576.276.829,58**
Beban Barang dan Jasa BLUD	**130.190.841.269,56**	**(19.355.371.259,00)**	**(144.955.994,00)**	**(148.740.000,00)**	**(19.059.671.149,42)**	**(900.000,00)**	**2.729.656.415,00**	**16.009.336.222,66**	**421.144.240,00**	**55.742.777,78**	**20.879.194.307,00**	**131.576.276.829,58**
Beban Barang dan Jasa BLUD	130.190.841.269,56	(19.355.371.259,00)	(144.955.994,00)	(148.740.000,00)	(19.059.671.149,42)	(900.000,00)	2.729.656.415,00	16.009.336.222,66	421.144.240,00	55.742.777,78	20.879.194.307,00	131.576.276.829,58

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA dengan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari :
   1. Penggunaan/Pembebanan Persediaan Awal sebesar Rp16.009.336.222,66 dengan rincian pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp12.861.579.699,20 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp3.147.756.523,46
   2. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada SMK BLUD sebesar Rp421.144.240,00
   3. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 sebesar Rp20.879.194.307,00 dengan rincian pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp13.350.665.083,00 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp7.528.529.224,00
   4. Pembebanan Beban Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp55.742.777,78
   5. Koreksi terkait lebih catat pengakuan Belanja Barang dan Jasa BLUD SMK yang bersumber dari Bantuan Pemerintah sebesar Rp2.729.656.415,00 pada Dinas Pendidikan

b. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari :
   1. Pelunasan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp19.355.371.259,00, dengan rincian pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp13.210.721.980,00 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp6.144.649.279,00
   2. Kapitalisasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Aset Tetap sebesar Rp144.955.994,00 antara lain:
      a) Kapitalisasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Aset Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp95.000.000,00
      b) Kapitalisasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Aset Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp49.955.994,00
   3. Persediaaan Akhir Tahun 2025 sebesar Rp19.059.671.149,42 dengan rincian Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp16.511.505.997,96 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp2.512.478.191,46 serta SMK BLUD sebesar Rp35.686.960,00
   4. Koreksi terkait lebih catat pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp900.000,00
   5. Koreksi terkait kurang catat kapitalisasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan SMKN 7 Batam pada Dinas Pendidikan sebesar Rp148.740.000,00

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak terdapat saldo Beban Bunga sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.287 Beban Bunga Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN BUNGA TAHUN 2025	BEBAN BUNGA TAHUN 2024
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.078.651.404,00
	Jumlah Beban Bunga	**0,00**	**3.078.651.404,00**

5.4.2.1.4 Beban Subsidi

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Subsidi sebesar Rp834.852.991,00 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.288 Rincian Beban Subsidi

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Subsidi	**834.852.991,00**
Beban Subsidi kepada BUMD	**834.852.991,00**
Beban Subsidi kepada BUMD	834.852.991,00

Pada tahun 2025 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Subsidi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Subsidi pada Laporan Operasional (LO) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.289 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Subsidi-LRA dan Beban Subsidi-LO

URAIAN	BELANJA SUBSIDI - LRA	BEBAN SUBSIDI - LO	SELISIH
Beban Subsidi	**834.852.991,00**	**834.852.991,00**	**0,00**
Beban Subsidi kepada BUMD	**834.852.991,00**	**834.852.991,00**	**0,00**
Beban Subsidi kepada BUMD	834.852.991,00	834.852.991,00	0,00

Dengan rincian Beban Subsidi menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.290 Beban Subsidi per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN SUBSIDI TAHUN 2025	BEBAN SUBSIDI TAHUN 2024
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	834.852.991,00	944.301.180,00
	Jumlah Beban Hibah	**834.852.991,00**	**944.301.180,00**

5.4.2.1.5 Beban Hibah

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Hibah sebesar Rp182.120.444.655,37 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.291 Rincian Beban Hibah – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Hibah	**182.120.444.655,37**
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	**18.917.435.429,00**
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.917.435.429,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**24.607.233.400,37**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	24.607.233.400,37
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**94.626.109.960,00**
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	26.662.171.939,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	47.339.739.934,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.667.872.087,00
Beban Hibah kepada Koperasi	950.000.000,00

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.326.000,00
Beban Hibah Dana BOS	**38.653.058.866,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.716.349.341,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.936.709.525,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**5.119.230.000,00**
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.119.230.000,00
Beban Hibah kepada Usaha Mikro	**197.377.000,00**
Beban Hibah Barang kepada Usaha Mikro	197.377.000,00

Dengan rincian Beban Hibah menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.292 Beban Hibah per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN HIBAH TAHUN 2025	BEBAN HIBAH TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	48.457.043.355,00	40.498.534.166,09
2	Dinas Kesehatan	1.298.270.460,00	1.675.821.560,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	11.155.461.642,00	0,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.050.930.000,00	159.928.792.986,00
5	Dinas Sosial	455.000.000,00	565.000.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	560.000.000,00	700.000.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.760.000.000,00	2.270.000.000,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.753.324.685,00	17.849.922.178,00
9	Dinas Kebudayaan	1.500.000.000,00	1.462.750.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	200.000.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90.000.000,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.000.000,00	175.000.000,00
13	Dinas Perhubungan	15.481.728.400,37	924.800.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.067.941.063,00	10.661.700.891,94
15	Dinas Pariwisata	368.635.600,00	0,00
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.111.447.387,00	0,00
17	Biro Kesejahteraan Rakyat	44.560.156.275,00	101.136.180.322,00
18	Biro Umum	14.370.505.788,00	15.801.952.600,00
	Jumlah Beban Hibah	**182.120.444.655,37**	**353.850.454.704,03**

Apabila dibandingkan antara Belanja Hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Hibah dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.293 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO

URAIAN	BELANJA HIBAH - LRA	BEBAN HIBAH - LO	SELISIH
Beban Hibah	**165.767.273.907,96**	**182.120.444.655,37**	**(16.353.170.747,41)**
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	**19.752.937.062,67**	**18.917.435.429,00**	**835.501.633,67**
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	15.752.937.062,67	14.917.435.429,00	835.501.633,67

URAIAN	BELANJA HIBAH - LRA	BEBAN HIBAH - LO	SELISIH
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**0,00**	**24.607.233.400,37**	**(24.607.233.400,37)**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	24.607.233.400,37	(24.607.233.400,37)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**102.242.047.979,29**	**94.626.109.960,00**	**7.615.938.019,29**
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.146.607.739,00	26.662.171.939,00	484.435.800,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	47.939.194.434,00	47.339.739.934,00	599.454.500,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.206.245.806,29	19.667.872.087,00	6.538.373.719,29
Beban Hibah kepada Koperasi	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	6.326.000,00	(6.326.000,00)
Beban Hibah Dana BOS	**38.653.058.866,00**	**38.653.058.866,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.716.349.341,00	33.716.349.341,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.936.709.525,00	4.936.709.525,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**5.119.230.000,00**	**5.119.230.000,00**	**0,00**
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.119.230.000,00	5.119.230.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Usaha Mikro	**0,00**	**197.377.000,00**	**(197.377.000,00)**
Beban Hibah Barang kepada Usaha Mikro	0,00	197.377.000,00	(197.377.000,00)

Penjelasan selisih Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Hibah pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.294 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO

URAIAN	BELANJA HIBAH - LRA	PELUNASAN UTANG 2024	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	PENGHAPUSAN ASET TETAP TANAH	PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENGHAPUSAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PENGHAPUSAN ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PENGHAPUSAN ASET LAINNYA	BEBAN HIBAH - LO
Beban Hibah	**165.767.273.907,96**	**(13.811.458.307,29)**	**(6.938.153.600,00)**	**5.374.500.325,33**	**15.541.752.478,00**	**197.377.000,00**	**12.806.726.625,37**	**2.573.917.226,00**	**608.509.000,00**	**182.120.444.655,37**
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	**19.752.937.062,67**	**(5.916.015.360,00)**	**(6.938.153.600,00)**	**5.101.321.397,33**	**6.917.345.929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.917.435.429,00**
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	15.752.937.062,67	(5.916.015.360,00)	(6.938.153.600,00)	5.101.321.397,33	6.917.345.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.917.435.429,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.618.080.549,00**	**0,00**	**12.806.726.625,37**	**2.573.917.226,00**	**608.509.000,00**	**24.607.233.400,37**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618.080.549,00	0,00	12.806.726.625,37	2.573.917.226,00	608.509.000,00	24.607.233.400,37
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**102.242.047.979,29**	**(7.895.442.947,29)**	**0,00**	**273.178.928,00**	**6.326.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.626.109.960,00**
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.146.607.739,00	(484.435.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.662.171.939,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	47.939.194.434,00	(599.454.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.339.739.934,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.206.245.806,29	(6.811.552.647,29)	0,00	273.178.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.667.872.087,00
Beban Hibah kepada Koperasi	950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326.000,00
Beban Hibah Dana BOS	**38.653.058.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.653.058.866,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.716.349.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.716.349.341,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.936.709.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.709.525,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**5.119.230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.119.230.000,00**

URAIAN	BELANJA HIBAH - LRA	PELUNASAN UTANG 2024	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	PENGHAPUSAN ASET TETAP TANAH	PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENGHAPUSAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PENGHAPUSAN ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PENGHAPUSAN ASET LAINNYA	BEBAN HIBAH - LO
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.119.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119.230.000,00
Beban Hibah kepada Usaha Mikro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.377.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.377.000,00**
Beban Hibah Barang kepada Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.377.000,00	0,00	0,00	0,00	197.377.000,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Hibah terdiri dari:
   1. Penambahan Utang Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp5.374.500.325,33 pada beberapa OPD sebagai berikut:
      a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.972.700.000,00
      b) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp273.178.928,00
      c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.128.621.397,33
   2. Penambahan Beban Hibah atas Penghapusan Aset Tetap Tanah sebesar Rp15.541.752.478,00 antara lain:
      a) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.846.447.387,00
      b) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp10.960.584.942,00
      c) Dinas Perhubungan sebesar Rp734.720.149,00
   3. Penambahan Beban Hibah atas Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp197.377.000,00
   4. Penambahan Beban Hibah atas Penghapusan Aset Tetap Gdung dan Bangunan sebesar Rp12.806.726.625,37 antara lain:
      a) Dinas Perhubungan sebesar Rp12.173.091.025,37
      b) Dinas Pariwisata sebesar Rp368.635.600,00
      c) Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp265.000.000,00
   5. Penambahan Beban Hibah atas Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.573.917.226,00
   6. Penambahan Bebah Hibah atas Penghapusan karena Aset Rusak Berat/Usang pada Biro Umum sebesar Rp608.509.000,00
b. Pengurangan Beban Hibah terdiri dari:
   1. Pelunasan Utang Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp13.811.458.307,29 pada beberapa OPD sebagai berikut:
      a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp2.492.700.000,00
      b) Biro Umum sebesar Rp4.487.200.000,00
      c) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp119.028.000,00
      d) Dinas Kesehatan sebesar Rp975.821.560,00
      e) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.811.908.747,29
      f) Dinas Perhubungan sebesar Rp924.800.000,00
   2. Reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp6.938.153.600,00

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Bantuan Sosial sebesar Rp1.834.940.000,00 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.295 Uraian Beban Bantuan Sosial – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bantuan Sosial	**1.834.940.000,00**
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	**1.834.940.000,00**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.834.940.000,00

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00

Dengan rincian Beban Bantuan Sosial menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.296 Beban Bantuan Sosial per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2025	BEBAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	0,00	2.972.600.000,00
2	Dinas Sosial	1.834.940.000,00	1.030.325.000,00
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	**1.834.940.000,00**	**4.002.925.000,00**

Pada tahun 2025 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional (LO).

Tabel 5.297 incian Selisih Perbedaan Belanja Bantuan Sosial-LRA dan Beban Bantuan Sosial-LO

URAIAN	BELANJA BANTUAN SOSIAL - LRA	BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO	SELISIH
Beban Bantuan Sosial	**1.834.940.000,00**	**1.834.940.000,00**	**0,00**
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	0,00	**0,00**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	**1.834.940.000,00**	**1.834.940.000,00**	**0,00**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.834.940.000,00	1.834.940.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	**0,00**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00

5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp1.150.870.424,67 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.298 Beban Penyisihan Piutang per SKPD

NO	SKPD	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2025	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2024
1	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	77.481.172,22	444.921.130,65

NO	SKPD	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2025	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2024
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	594.141,88	1.715.523,77
3	Badan Pendapatan Daerah	1.023.066.627,68	24.217.027.664,89
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	49.522.200,00	3.951.550,00
5	Dinas Perhubungan	206.282,89	199.538,19
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	**1.150.870.424,67**	**24.667.815.407,50**

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap sebesar Rp378.279.897.533,32 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.299 Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2025	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	93.387.323.691,57	88.078.263.073,16
2	Dinas Kesehatan	1.522.361.810,96	1.670.421.242,83
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	35.851.282.327,00	37.634.379.099,73
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	11.600.455.090,91	11.846.894.409,60
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	156.199.154.656,04	156.727.594.573,86
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	1.029.624.681,10	15.426.170.125,58
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	545.740.906,34	1.021.447.478,73
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	606.342.215,91	622.040.634,73
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	351.442.417,85	597.749.416,96
10	Dinas Sosial	382.021.136,33	439.752.850,40
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	370.041.469,65	208.956.389,60
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.346.528.431,31	1.588.044.235,89
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	213.740.431,17	251.569.572,61
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	472.389.156,14	681.456.755,35
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.932.629.368,94	2.102.453.162,33
16	Dinas Kebudayaan	2.370.679.489,67	1.989.303.518,63
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	902.376.879,82	629.933.690,22
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	343.396.672,88	306.832.871,05
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3.664.523.783,39	3.688.558.580,62
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	770.925.833,09	729.445.777,04
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	399.189.264,39	433.220.796,21
22	Dinas Perhubungan	18.510.804.207,47	23.025.113.828,45
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.208.035.231,80	4.283.126.710,67
24	Dinas Pariwisata	416.212.775,69	509.665.773,80
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.937.085.103,23	7.532.529.534,96
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	615.042.048,12	568.958.380,26
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	214.648.912,20	214.648.912,23
28	Inspektorat	1.352.301.669,35	1.205.636.961,75

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2025	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2024
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	842.672.408,64	1.073.081.482,77
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.022.269.183,81	3.142.288.867,28
31	Badan Pendapatan Daerah	5.410.437.993,34	5.588.364.431,54
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	439.541.257,71	477.005.689,45
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	727.177.789,02	708.234.408,10
34	Sekretariat DPRD	5.150.403.124,31	3.492.531.282,71
35	Badan Penghubung Daerah	2.624.032.798,80	2.364.611.045,76
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	127.021.275,97	125.251.480,67
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	2.603.253.809,70	487.734.516,45
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	295.389.696,02	417.678.489,06
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	136.161.385,71	198.904.484,71
40	Biro Organisasi	164.712.920,00	126.946.819,33
41	Biro Administrasi Pimpinan	401.800.540,14	486.710.877,61
42	Biro Umum	8.752.491.585,95	8.859.650.065,37
43	Biro Hukum	66.232.101,88	47.187.407,42
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**378.279.897.533,32**	**391.610.349.705,48**

5.4.2.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya, yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Transfer sebesar Rp538.410.613.886,00, realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp285.077.604.992,00 atau sebesar 34,62% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp823.488.218.878,00. Rincian Beban Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.2.3.1 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil merupakan kewajiban pengeluaran kas dari suatu entitas pelaporan pemerintah kepada entitas pelaporan lain atau pemerintah daerah lain, yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beban bagi hasil diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Bagi Hasil sebesar Rp525.174.135.186,00 dengan rincian:

Tabel 5.300 Beban Bagi Hasil – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bagi Hasil	**525.174.135.186,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**525.174.135.186,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	**224.799.671.232,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	224.799.671.232,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	**300.374.463.954,00**

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	**300.374.463.954,00**

Apabila dibandingkan antara Belanja Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bagi Hasil pada Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.301 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bagi Hasil-LRA dan Beban Bagi Hasil-LO

URAIAN	BELANJA BAGI HASIL - LRA	BEBAN BAGI HASIL - LO	SELISIH
Beban Bagi Hasil	**690.951.951.944,00**	**525.174.135.186,00**	**165.777.816.758,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**690.951.951.944,00**	**525.174.135.186,00**	**165.777.816.758,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	**293.134.575.850,00**	**224.799.671.232,00**	**68.334.904.618,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	293.134.575.850,00	224.799.671.232,00	68.334.904.618,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	**397.817.376.094,00**	**300.374.463.954,00**	**97.442.912.140,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	397.817.376.094,00	300.374.463.954,00	97.442.912.140,00

Penjelasan selisih Belanja Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Bagi Hasil pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.302 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bagi Hasil -LRA dan Beban Bagi Hasil -LO

URAIAN	BELANJA BAGI HASIL - LRA	PENETAPAN UTANG 2025	PELUNASAN UTANG 2024	BEBAN BAGI HASIL - LO
Beban Bagi Hasil	**690.951.951.944,00**	**60.698.875.497,00**	**(226.476.692.255,00)**	**525.174.135.186,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**690.951.951.944,00**	**60.698.875.497,00**	**(226.476.692.255,00)**	**525.174.135.186,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	**293.134.575.850,00**	**22.949.282.668,00**	**(91.284.187.286,00)**	**224.799.671.232,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	293.134.575.850,00	22.949.282.668,00	(91.284.187.286,00)	224.799.671.232,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	**397.817.376.094,00**	**37.749.592.829,00**	**(135.192.504.969,00)**	**300.374.463.954,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	397.817.376.094,00	37.749.592.829,00	(135.192.504.969,00)	300.374.463.954,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Bagi Hasil - LRA dengan Beban Bagi Hasil-LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Bagi Hasil berasal dari Penetapan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2025 antara lain:
   1. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp31.300.236.315,00
   2. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp6.449.356.514,00
   3. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp5.030.113.428,00
   4. Pemerintah Kabupeten Karimun sebesar Rp5.776.071.233,00
   5. Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp4.643.276.362,00
   6. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp3.772.603.929,00
   7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.727.217.716,00
b. Pengurangan Beban Bagi Hasil berasal dari pelunasan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2024 antara lain:

1. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp108.774.500.374,00
2. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp26.418.004.595,00
3. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp21.684.975.192,00
4. Pemerintah Kabupeten Karimun sebesar Rp21.289.602.585,00
5. Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp17.546.888.639,00
6. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp15.645.671.052,00
7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp15.117.049.818,00

5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan diberikan kepada pemerintah kab/kota dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi/atau penerima bantuan keuangan. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp13.236.478.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.303 Beban Bantuan Keuangan – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bantuan Keuangan	**13.236.478.700,00**
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	**1.500.000.000,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	**1.500.000.000,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	1.500.000.000,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**4.027.313.100,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**4.027.313.100,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	4.027.313.100,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	**7.709.165.600,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	**7.709.165.600,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	7.709.165.600,00

Pada tahun 2025 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional (LO).

Tabel 5.304 Selisih Perbedaan Belanja Bantuan Keuangan - LRA dan Beban Bantuan Keuangan – LO

URAIAN	BELANJA BANTUAN KEUANGAN - LRA	BEBAN BANTUAN KEUANGAN - LO	SELISIH
Beban Bantuan Keuangan	**13.236.478.700,00**	**13.236.478.700,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**4.027.313.100,00**	**4.027.313.100,00**	**0,00**

URAIAN	BELANJA BANTUAN KEUANGAN - LRA	BEBAN BANTUAN KEUANGAN - LO	SELISIH
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**4.027.313.100,00**	**4.027.313.100,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	4.027.313.100,00	4.027.313.100,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	**7.709.165.600,00**	**7.709.165.600,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	**7.709.165.600,00**	**7.709.165.600,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	7.709.165.600,00	7.709.165.600,00	0,00

5.4.2.5 Defisit Kegiatan Non Operasional

Defisit Kegiatan Non Operasional	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	(18.275.061.807,00)	**(39.000.172.538,89)**

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(18.275.061.807,00). Saldo tersebut merupakan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO yang digunakan untuk mengakui aset non lancar yang dieliminasi dari neraca sebagai akibat penjualan, pertukaran, hibah, pemusnahan, kehilangan, pencurian, atau sebab lain yang mengakibatkan aset tidak lagi dikuasai dan/atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomi maupun manfaat sosial bagi pemerintah daerah.

5.4.2.5.1 Beban Luar Biasa

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak terdapat saldo Beban Luar Biasa sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.305 Beban Luar Biasa Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN LUAR BIASA TAHUN 2025	BEBAN LUAR BIASA TAHUN 2024
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.065.423.140,00
	Jumlah Beban Luar Biasa	**0,00**	**2.065.423.140,00**

5.4.2.6 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	0,00	**(2.065.423.140,00)**

Surplus/Defisit Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos Luar Biasa - LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul akibat ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali. Pada Tahun 2025 tidak terdapat saldo Pendapatan Luar Biasa dan Defisit Pos Luar Biasa.

5.4.3 Surplus/Defisit - LO

Defisit- LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	(72.434.959.518,69)	**(303.759.392.886,40)**

Surplus/Defisit - LO digunakan untuk mencatat jumlah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo defisit - LO sebesar Rp(72.434.959.518,69)

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	3.200.402.889.189,89	**3.604.366.696.276,70**

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 sebesar Rp3.200.402.889.189,89 yang terdiri dari:

Tabel 5.306 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	1.447.285.058.158,50	1.777.704.385.140,00
Penerimaan Retribusi Daerah	7.171.631.839,00	10.634.618.841,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.275.536.541,00	1.904.909.335,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	109.396.440.389,82	30.108.755.601,70
Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.632.475.378.327,00	1.782.713.495.768,00
Penerimaan Hibah	1.798.843.934,57	1.300.531.591,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**3.200.402.889.189,89**	**3.604.366.696.276,70**

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	3.024.572.875.128,98	**3.454.951.185.226,53**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2025 sebesar Rp3.024.572.875.128,98 terdiri dari:

Tabel 5.307 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	1.271.931.959.380,04	1.288.605.047.897,00
Pembayaran Barang dan Jasa	918.668.477.071,98	1.059.785.418.421,26
Pembayaran Bunga	0,00	3.692.560.273,00
Pembayaran Subsidi	834.852.991,00	944.301.180,00
Pembayaran Hibah	127.114.215.041,96	320.711.308.300,27
Pembayaran Bantuan Sosial	1.834.940.000,00	4.002.925.000,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	2.065.423.140,00
Pembayaran Bagi Hasil	690.951.951.944,00	748.291.201.015,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	13.236.478.700,00	26.853.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**3.024.572.875.128,98**	**3.454.951.185.226,53**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp175.830.014.060,91. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	175.830.014.060,91	**149.415.511.050,17**

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	512.084.414,00	**0,00**

Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2025 Sebesar Rp512.084.414,00 merupakan penerimaan kas dari penjualan aset tetap berupa hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.308 Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	69.710.000,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lain-lain	442.374.414,00	0,00

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Jumlah Arus Masuk Kas	**512.084.414,00**	**0,00**

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	185.115.613.606,16	**244.970.648.614,02**

Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi selama tahun 2025 sebesar Rp185.115.613.606,16 merupakan pengeluaran uang untuk memperoleh aset tetap berupa: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa aset tidak berwujud), dan aset lainnya serta penyertaan modal pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.309 Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	992.100.000,00	920.100.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	51.562.817.179,00	76.496.084.204,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	80.799.961.394,06	129.103.961.833,55
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.310.371.998,10	36.791.762.576,47
Perolehan Aset Tetap Lainnya	329.702.535,00	1.658.740.000,00
Perolehan Aset Lainnya	120.660.500,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**185.115.613.606,16**	**244.970.648.614,02**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah Rp(184.603.529.192,16). Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(184.603.529.192,16)	**(244.970.648.614,02)**

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas pendanaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)

	82.836.000,00	**100.883.708,00**

Arus Masuk Kas dari aktivitas pendanaan selama tahun 2025 sebesar Rp82.836.000,00 merupakan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dana bergulir, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.310 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	82.836.000,00	100.883.708,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**82.836.000,00**	**100.883.708,00**

5.5.3.2 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas pendanaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	**91.945.787.633,00**

Arus Keluar Kas dari aktivitas pendanaan selama Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.311 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	0,00	91.945.787.633,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**0,00**	**91.945.787.633,00**

Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp82.836.000,00. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2025 dan 2024 adalah:

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas pendanaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	82.836.000,00	**(91.844.903.925,00)**

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah.

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	216.693.614.064,38	**212.531.012.053,25**

Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris selama tahun 2025 sebesar Rp216.693.614.064,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.312 Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	216.670.872.859,00	212.522.600.526,00
UYHD Tahun 2024	19.041.006,00	3.738.300,00
Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya Tahun 2024	236.913,06	2.941.227,25
Pengembalian Kas dari Bendahara Penerimaan	0,00	1.732.000,00
Pengembalian Dana SPP dari Kas BLUD	3.463.286,32	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**216.693.614.064,38**	**212.531.012.053,25**

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	216.949.130.421,00	**212.541.878.445,06**

Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris selama tahun 2025 sebesar Rp216.949.130.421,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.313 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitor		
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	216.637.000.791,00	212.522.600.526,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jasa Giro Kas Lainnya	520.089,00	236.913,06
UYHD Tahun 2025	311.609.541,00	19.041.006,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**216.949.130.421,00**	**212.541.878.445,06**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah Rp(255.516.356,62) Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(255.516.356,62)	**(10.866.391,81)**

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan kas bersih sebesar Rp(8.946.195.487,87) yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp175.830.014.060,91, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(184.603.529.192,16), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp82.836.000,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp(255.516.356,62). Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

Kenaikan/ (Penurunan) Kas Bersih	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(8.946.195.487,87)	**(187.410.907.880,66)**

Penurunan Kas Bersih sebesar Rp178.464.712.392,79 atau sebesar 95,23% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp187.410.907.880,66 dipengaruhi oleh pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman daerah kepada PT. SMI pada tahun sebelumnya serta optimalisasi penyerapan belanja daerah yang diselaraskan dengan ketersediaan kas yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah.

5.5.6 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.356.745.416,90 didapat dari perhitungan saldo awal sebesar Rp23.302.940.904,77 ditambah penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp(8.946.195.487,87).

Total Saldo Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.356.640.775,93 dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Akhir Kas di BUD	14.356.745.416,90
- Kas di Bendahara Pengeluaran	311.609.541,00
- Kas di BLUD	2.499.584.868,03
- Kas Lainnya	201.711.431,00
- Kas Dana BOSP	1.986.989.519,00
Saldo Akhir Kas	**19.356.640.775,93**

Perbandingan Saldo Akhir Kas 2025 dan 2024 adalah:

Saldo Akhir Kas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	19.356.640.775,93	**27.810.220.201,59**

5.6 Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	6.454.280.263.239,55	**6.764.055.547.180,37**

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat ekuitas awal sebesar Rp6.454.280.263.239,55 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2024. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2024	7.105.534.873.977,98

- Jumlah Kewajiban Tahun 2024	651.254.610.738,43
Saldo Awal Ekuitas 2025	**6.454.280.263.239,55**

5.6.2 Surplus/Defisit– LO

Defisit LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(72.434.959.518,69)	**(303.759.392.886,40)**

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp(72.434.959.518,69).

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Pada tahun 2025 Koreksi kesalahan nilai persediaan tercatat sebesar Rp136.050.877,00 dan lain-lain sebesar Rp23.971.350.864,72 yang dijelaskan sebagai berikut:

4. Koreksi Nilai Persediaan

   Koreksi nilai persediaan pada tahun 2025 sebesar Rp136.050.877,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.314 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Dinas Pendidikan	18.786.477,00	Merupakan koreksi tambah persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp5.218.413,00, persediaan Kertas dan Cover sebesar Rp304.014,00, persediaan Bahan Komputer sebesar Rp6.985.230,00, persediaan Perabot Kantor sebesar Rp428.120,00 dan persediaan Alat Listrik sebesar Rp5.850.700,00 yang bersumber dari Dana BOS dan merupakan temuan pemeriksaan BPK tahun 2024 pada SMK Negeri 1 Tanjungpinang.
Dinas Kelautan dan Perikanan	117.264.400,00	Merupakan koreksi tambah persediaan dari hasil pembibitan ikan berupa bibit ternak/bibit ikan kerapu macan ukuran 4 - 5cm sebanyak 9.358 ekor dengan harga satuan Rp6.000,00 serta persediaan indukan ikan kerapu putih aktif sebanyak 11 ekor dengan harga satuan Rp100.000,00, persediaan calon induk kakap putih sebanyak 74 ekor dengan harga satuan Rp100.000,00, persediaan indukan kakap putih hampir afkir sebanyak 35 ekor dengan harga satuan Rp100.000,00, persediaan bibit ternak/bibit ikan kerapu putih ukuran 6 - 7cm sebanyak 364 ekor dengan harga satuan Rp3.600,00, persediaan bibit ternak/bibit ikan kerapu putih ukuran 8 - 9cm sebanyak 1.100 ekor dengan harga satuan Rp4.800,00, dan persediaan bibit ternak/bibit ikan kerapu putih ukuran 10 - 12cm sebanyak 5.508 ekor dengan harga satuan Rp6.000,00
Total	**136.050.877,00**	

5. Lain-lain sebesar Rp23.971.350.864,72 dapat dijelaskan sebagai berikut:

   5.6.3.1.1.1.1.1 Koreksi Kas di BLUD

   Koreksi kas di BLUD pada tahun 2025 sebesar Rp(77.524.310,00) dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.315 Rincian Koreksi Kas di BLUD

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Dinas Pendidikan	7.648.000,00	Koreksi Tambah :

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
		Merupakan koreksi tambah saldo awal Kas di BLUD karena perubahan status sekolah menjadi BLUD pada SMK Negeri Kundur sebesar Rp5.700.000,00 dan SMK Negeri 1 Bintan Timur sebesar Rp1.948.000,00.
	(85.172.310,00)	Koreksi Kurang : Merupakan koreksi kurang saldo awal Kas di BLUD karena terdapat pengembalian kas BLUD yang merupakan kas SPP yang sejak tahun 2024 tidak dipungut lagi ke wali murid pada SMK Negeri 2 Batam sebesar Rp24.401.924,00 dan SMK Negeri 1 Batam sebesar Rp631.786,00 selain itu terdapat pengembalian ke kas negara atas bantuan pemerintah pusat pada SMK Negeri 1 Batam sebesar Rp40.200.000,00 dan pengembalian bantuan personil untuk siswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan ke kas daerah sebesar Rp19.938.600,00 pada SMK Negeri 1 Batam.
Total	**(77.524.310,00)**	

5.6.3.1.1.1.1.2 Koreksi Kas Lainnya

Koreksi Kas Lainnya tahun 2025 sebesar Rp(194.475.239,17) merupakan koreksi kurang atas sisa kas SPP yang sejak tahun 2024 tidak dipungut lagi pada Kas Lainnya SMA/SMK/SLB Negeri di Provinsi Kepulauan Riau yang setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan atas saldo Kas Lainnya, sisa kas tersebut telah dilakukan pengembalian ke orang tua siswa.

5.6.3.1.1.1.1.3 Koreksi Piutang Pajak Daerah

Koreksi Piutang Pajak Daerah sebesar Rp529.071.745,68 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.316 Rincian Koreksi Piutang Pajak Daerah

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Pendapatan Daerah	993.392.798,68	Koreksi Tambah : Merupakan koreksi tambah saldo awal Piutang Pendapatan Pajak Daerah dari hasil pemeriksaan BPK dengan tujuan tertentu tahun 2024 atas pendapatan daerah berupa Piutang Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp227.908.858,43, Piutang Alat Berat sebesar Rp303.715.000,00, dan Piutang Air Permukaan sebesar Rp461.768.940,25.
	(464.321.053,00)	Koreksi Kurang : Merupakan koreksi kurang saldo awal Piutang Pendapatan Pajak Daerah atas kompensasi lebih bayar pelunasan Piutang Air Permukaan sebesar Rp369.020.653,00 dan koreksi kurang Piutang Pendapatan Pajak PKB dan BBNKB sebesar Rp95.300.400,00 karena adanya program pemutihan dan diskon pajak atas pembayaran pajak yang jatuh tempo di bawah tahun 2025.
Total	**529.071.745,68**	

5.6.3.1.1.1.1.4 Koreksi Piutang Retribusi Daerah

Koreksi Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp(462.800,00) merupakan koreksi kurang Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan atas pembebanan biaya administrasi dalam pembayaran piutang oleh rekanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp(423.800,00) dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp(39.000,00).

5.6.3.1.1.1.1.5 Koreksi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Koreksi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp(18.314.400,00) dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.317 Rincian Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Pendapatan Daerah	4.483.500,00	Koreksi Tambah : Merupakan koreksi tambah saldo awal Piutang Pendapatan Denda PKB sebesar Rp1.645.600,00 dan Piutang Pendapatan

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
		Denda BBNKB sebesar Rp2.837.900,00 atas penambahan bunga denda Koreksi Kurang : Merupakan koreksi kurang saldo awal Piutang Pendapatan Denda PKB sebesar Rp(22.730.500,00) dan Piutang Pendapatan Denda BBNKB sebesar Rp(67.400,00) atas program pemutihan dan diskon denda pajak atas pembayaran pajak yang jatuh tempo di bawah tahun 2025.
Total	**(18.314.400,00)**	

5.6.3.1.1.1.1.6 Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp48.301.516.011,51 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.318 Rincian Koreksi Penyisihan Piutang

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Pendapatan Daerah	48.258.505.767,53	Merupakan koreksi tambah atas pengurangan Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp48.258.505.767,53 karena pelunasan.
Dinas Perhubungan	199.538,19	Merupakan koreksi tambah atas pengurangan Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi – Pelayanan Kepelabuhanan tahun 2024 sebesar Rp199.538,19 karena pelunasan.
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	41.282.085,63	Merupakan koreksi tambah atas pengurangan Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi – Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2024 sebesar Rp41.282.085,63 karena pelunasan.
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.528.620,16	Merupakan koreksi tambah atas pengurangan Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi – Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2024 sebesar Rp1.528.620,16 karena pelunasan.
Total	**48.301.516.011,51**	

5.6.3.1.1.1.1.7 Koreksi Dana Bergulir

Koreksi Dana Bergulir sebesar Rp82.836.000,00 merupakan koreksi tambah atas pelunasan Dana Bergulir pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

5.6.3.1.1.1.1.8 Koreksi Penyertaan Modal

Koreksi Penyertaan Modal sebesar Rp(7.227.383.830,00) dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.319 Rincian Koreksi Penyertaan Modal

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Keuangan dan Aset Daerah	334.043.580,00	Koreksi Tambah : Merupakan penambahan nilai Investasi Permanen Provinsi Kepulauan Riau atas laba (*unaudited*) yang diperolah dari penyertaan modal pada BUMD PT. Pembangunan Kepri sebesar Rp334.043.580,00
	(7.561.427.410,00)	Koreksi Kurang : Merupakan penurunan nilai Investasi Permanen Provinsi Kepulauan Riau atas rugi (*unaudited*) yang diperolah dari penyertaan modal pada BUMD PT. Energi Kepri sebesar Rp(320.664.748,00), rugi (*unaudited*) dan koreksi saldo laba ditahan yang diperolah dari penyertaan modal pada BUMD PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp(1.469.619.241,00), dan rugi (*unaudited*) dan koreksi saldo laba ditahan yang diperolah dari penyertaan modal pada BUMD PDAM Tirta Kepri sebesar Rp(5.771.143.421,00).

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Total	**(7.227.383.830,00)**	

5.6.3.1.1.1.1.9 Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp703.221.350,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.320 Rincian Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Dinas Pendidikan	157.621.350,00	Koreksi Tambah : Merupakan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Peralatan Personal Komputer sebesar Rp12.587.500,00 berdasarkan temuan kurang catat nilai aset oleh Inspektorat pada SMK Negeri 4 Tanjungpinang, dan Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Personal Komputer sebesar Rp114.850.000,00, Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Peralatan Personal Komputer sebesar Rp12.100.000,00 dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp23.050.000,00, karena kurang catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari bantuan hibah PT PLN (Persero) tahun 2024 berdasarkan BAST Nomor 1826.BA/ CSR.00.01/F1000000/2024 yanggal 25 April 2024 pada SMK Negeri 2 Lingga. Koreksi Kurang : Merupakan pengurangan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari bantuan Hibah PT. PLN (Persero) ke Aset Ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sebesar Rp(4.966.150,00).
Dinas Kelautan dan Perikanan	545.600.000,00	Merupakan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus sebesar Rp545.600.000,00 karena kurang catat aset yang pengadaannya melalui belanja barang dan jasa tahun 2013.
Total	**703.221.350,00**	

5.6.3.1.1.1.1.10 Koreksi Aset Tetap Lainnya

Koreksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.167.094.500,00 merupakan koreksi tambah Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi yang pengadaannya melalui belanja barang dan jasa tahun 2014 berupa renovasi Rumah Kemasan dan Pasar Ikan Moro pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

5.6.3.1.1.1.1.11 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp(32.359.539.450,73) merupakan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap atas penyesuaian saldo awal, koreksi akumulasi penyusutan aset tetap atas mutasi masuk dan mutasi keluar aset tetap antar SKPD, dan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap atas pendapatan hibah barang dari pemerintah pusat/daerah/dan instansi lainnya.

5.6.3.1.1.1.1.12 Koreksi Aset Lainnya

Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp(1.380.000,00) merupakan koreksi kurang Aset Lainnya atas temuan kelebihan pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) pada Sekretariat DPRD.

5.6.3.1.1.1.1.13 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Rusak Berat/Lainnya

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Rusak Berat/Lainnya sebesar Rp13.779.736.167,30 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.321 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Rusak Berat/Lainnya

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	596.776.002,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1372/KPTS-27/VIII/2025.

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.666.891.200,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1292 Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2025 dan SK Penghapusan Nomor 1027 Tahun 2025 tanggal 23 September 2025.
Sekretariat Daerah	8.052.039.491,00	Merupakan koreksi tambah atas Hibah dan penghapusan Aset Lainnya SK Nomor 1237/KPTS-27/XI/2025 tanggal 28 November 2025.
Dinas Kebudayaan	54.620.000,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1725/KPTS-27/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025.
Dinas Komunikasi dan Informatika	392.324.702,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1213/KPTS-27/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 dan SK Nomor 1027 Tahun 2025 tanggal 23 September 2025.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.849.000,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1027 Tahun 2025 tanggal 23 Sepetember 2025.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	377.926.349,81	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 880/KPTS-27/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan SK Nomor 1311 /KPTS-27/ VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025.
Dinas Pendidikan	215.964.766,98	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1493/KPTS-27/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 pada SMK Negeri 1 Tanjungpinang.
Dinas Perhubungan	545.730.515,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 299/03.04/2025-01 tanggal 10 September 2025 dan SK Penghapusan Nomor 1027 Tahun 2025 tanggal 23 Sepetember 2025 dan SK Nomor 1318 Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	859.658.745,84	Merupakan koreksi tambah atas penjualan dan penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1027 Tahun 2025 tanggal 23 Sepetember 2025.
Dinas Sosial	313.488.000,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1027 tahun 2025 tanggal 23 September 2025.
Inspektorat	257.484.794,67	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 602/KPTS-27/I/2025 tanggal 20 Januari 2025.
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	344.893.600,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1027 tahun 2025, Tanggal 23 Sepetember 2025.
Sekretariat DPRD	71.089.000,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1322/KPTS-27/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025.
Total	**13.779.736.167,30**	

5.6.3.1.1.1.1.14 Koreksi Utang Belanja

Koreksi Utang Belanja sebesar Rp64.666.079,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.322 Rincian Koreksi Utang Belanja

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Dinas Pendidikan	34.224.079,00	Merupakan koreksi kurang atas penghapusan Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN berdasarkan Konfirmasi Status Pembayaran Iuran JKK dan JKM PTK Non ASN pada Dinas Pendidikan.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.442.000,00	Merupakan koreksi kurang atas penghapusan Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 217/SPTJM/PERKIM/2026.
Total	**64.666.079,00**	

5.6.3.1.1.1.1.15 Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya

Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp(972.523.458,87) dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.323 Rincian Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Pendapatan Daerah	81.797.436,00	Koreksi Tambah : Merupakan koreksi kurang saldo awal Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp81.797.436,00 karena pelunasan utang/kompensasi pajak tahun 2025.
	(1.054.320.894,87)	Koreksi Kurang : Merupakan koreksi kurang Utang Jangka Pendek Lainnya atas saldo awal Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp(1.054.320.894,87) karena kesalahan perhitungan ganda pelunasan utang tahun sebelumnya.
Total	**(972.523.458,87)**	

5.6.3.1.1.1.1.16 Koreksi Pendapatan Retribusi-LO

Koreksi Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp125.000.000,00 merupakan koreksi kurang Pendapatan Retribusi-Pemakaian Alat-LO atas kekurangan setoran pendapatan tahun 2024 yang berasal dari penyewaan alat *Atomic Absorption Spectrofotometri* oleh PT. Mutuagung Lestari, Tbk.

5.6.3.1.1.1.1.17 Koreksi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Koreksi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp69.812.500,00 merupakan koreksi kurang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO-Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD atas pendapatan kantin SMA/SMK/SLB Negeri tahun 2024 yang disetorkan di tahun 2025.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	6.405.952.705.462,58	**6.454.280.263.239,55**

Ekuitas Akhir sebesar Rp6.405.952.705.462,58 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025	6.815.191.552.141,75
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025	409.238.846.679,17
Saldo Akhir Ekuitas 2025	**6.405.952.705.462,58**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Terpilih Periode 2025-2030

Pada tanggal 20 Februari 2025 Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Terpilih Periode 2025-2030 resmi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 15/P Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Pengambilan sumpah jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih yaitu pasangan Ansar Ahmad, SE., MM dan Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersamaan dengan pelantikan kepala daerah terpilih lainnya di seluruh Indonesia.

Mandat yang diberikan oleh masyarakat Kepulauan Riau bukan sekadar kemenangan elektoral, melainkan 'Warkah Amanah' untuk membawa Bumi Segantang Lada melompat lebih tinggi. Dengan Visi “Mewujudkan Kepulauan Riau yang Maju, Makmur, dan Merata”, Kepemimpinan periode 2025-2030 hadir dengan satu tekad bulat: menuntaskan pembangunan yang inklusif dan transformatif dari ujung Natuna hingga ke jantung Batam." Mengingat Kepulauan Riau terdiri dari 96% lautan dan ribuan pulau, Kita tidak lagi melihat lautan sebagai pemisah, melainkan sebagai 'jembatan' yang menyatukan. Di bawah kepemimpinan periode 2025-2030, paradigma pembangunan yang dilakukan adalah Sentris Kepulauan, di mana setiap pulau adalah titik pertumbuhan, dan setiap selat adalah jalur kemakmuran."tentunya Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau harus memiliki resonansi yang kuat tentang konektivitas dan ekonomi biru.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berisi visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan mengacu pada RPJPD, RTRW, RPJMN dan dokumen lainnya. Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak H. Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Bapak Nyanyang Harris Pratamura, S.E., M.Si yang secara resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dengan Visi “Mewujudkan Kepulauan Riau yang Maju, Makmur, dan Merata” Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu Tahun 2025-2029, Tahun 2030-2034, Tahun 2035-2039, dan Tahun 2040-2045. Oleh karena itu, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045, yang selaras dengan periode RPJMN Tahun 2025-2029.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

6.1 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah.

6.2 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah.

6.3 Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter.

6.4 Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan.

6.5 Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 di dalam perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 tentunya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah, dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 juga akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota, sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB VII

PENUTUP

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimulai dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tentunya harus dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rujukan utama Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Melalui proses penyusunan dan penyajian konsolidasi dari laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi, proses penyesuaian dan harmonisasi dilakukan dengan merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar terwujud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memadai sesuai ketentuan.

Akhir kata, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	JENIS PIUTANG	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)
1	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	99.618.122.631,00	1.143.589.341.269,68	(1.227.458.550.741,00)	15.748.913.159,68
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	Piutang Retribusi Daerah	333.469.753,00	18.957.076.392,00	(19.150.825.748,00)	139.720.397,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	Piutang Retribusi Daerah	10.940.874.023,00	127.475.387.313,00	(134.229.573.472,00)	4.186.687.864,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Piutang Retribusi Daerah	123.955.500,00	0,00	0,00	123.955.500,00
5	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Daerah	39.417.700,00	40.327.461,00	(39.417.700,00)	40.327.461,00
6	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)	0,00	84.864.864,84	0,00	84.864.864,84
7	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan Denda Pajak)	18.157.290.883,12	32.509.906.856,00	(48.315.123.489,12)	2.352.074.250,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah)	667.200,00	0,00	0,00	667.200,00
9	Dinas Perhubungan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah)	489.938,00	439.178,00	0,00	929.116,00
10	Dinas Pendidikan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan dari Pengembalian)	21.725.000,00	1.882.493.463,19	0,00	1.904.218.463,19

No.	SKPD	JENIS PIUTANG	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)
11	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	5.542.944,00	0,00	5.542.944,00
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Piutang Lainnya	96.250.000,00	0,00	0,00	96.250.000,00
Jumlah			**129.332.262.628,12**	**1.324.545.379.741,71**	**(1.429.193.491.150,12)**	**24.684.151.219,71**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

TAHUN ANGGARAN 2025

No.	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	15.748.913.159,68	14.837.858.955,68	911.054.204,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi	4.490.691.222,00	2.549.604.975,13	1.941.086.246,87
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
	- Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak	4.348.296.838,03	2.313.343.400,00	2.034.953.438,03
	- Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi	96.250.000,00	338.245,58	95.911.754,42
	- Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	27.714,72	(27.714,72)
	Saldo Akhir Penyisihan Piutang	**24.684.151.219,71**	**19.701.173.291,11**	**4.982.977.928,60**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.115.227.868,00	(18.115.227.868,00)	0,00
2	Dinas Kelauatan dan Perikanan	15.953.332.709,52	(15.953.332.709,52)	0,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	382.288.894,00	(382.288.894,00)	0,00
	SALDO AKHIR DANA BERGULIR	**34.450.849.471,52**	**(34.450.849.471,52)**	**0,00**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR PEYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang Disertakan Sampai dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 =9-12
1		Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2021	Penyertaan Modal, Pinjaman, Hibah, Sumber Modal Lainnya	25.000.000.000,00	13.999.000.000,00	0,00	13.999.000.000,00	11.001.000.000,00	323.079.823,00	0,00	13.999.000.000,00
2		Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2020	Penyertaan Modal, Pinjaman, Hibah, Sumber Modal Lainnya	900.000.000.000,00	121.303.871.063,00	0,00	121.303.871.063,00	778.696.128.937,00	(2.017.095.818,00)	0,00	121.303.871.063,00
3		Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Kepri	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2021	Penyertaan Modal, Pinjaman, Hibah, Sumber Modal Lainnya	190.000.000.000,00	48.303.490.000,00	0,00	48.303.490.000,00	141.696.510.000,00	(1.864.966.167,00)	0,00	48.303.490.000,00
4		Bank Riau Kepri	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2011	Penyertaan Modal	100.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	12.000.000.000,00	88.000.000.000,00	2.275.536.541,00	0,00	12.000.000.000,00
5		PT. Energi Kepri (Perseroda)	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2024	Penyertaan Modal	20.000.000.000,00	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	(320.664.748,00)	0,00	5.000.000.000,00
	JUMLAH				**1.215.000.000.000,00**	**200.606.361.063,00**	**0,00**	**200.606.361.063,00**	**1.034.393.638.937,00**	**-1.604.110.369,00**	**0,00**	**200.606.361.063,00**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Sado Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 + 5)
1	**TANAH**	**1.279.193.541.736,32**	**27.153.656.800,00**	**(118.727.534.282,21)**	**1.187.619.664.254,11**
	terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	212.245.860.504,70	25.461.782.700,00	-	237.707.643.204,70
	Dinas Kesehatan	540.274.100,00	-	(540.274.100,00)	-
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	2.000.000.000,00	540.274.100,00	-	2.540.274.100,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	759.863.754.627,97	1.151.600.000,00	(112.629.776.646,21)	648.385.577.981,76
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.915.000.000,00	-	-	6.915.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.753.500.000,00	-	-	1.753.500.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.774.880.000,00	-	-	2.774.880.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.309.166.300,00	-	-	1.309.166.300,00
	Dinas Perhubungan	50.214.916.983,00	-	(734.720.149,00)	49.480.196.834,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.027.350.000,00	-	-	2.027.350.000,00
	Dinas Pariwisata	2.579.000.000,00	-	-	2.579.000.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	198.407.288.648,65	-	(4.822.763.387,00)	193.584.525.261,65
	Badan Pendapatan Daerah	8.962.550.572,00	-	-	8.962.550.572,00
	Badan Penghubung Daerah	29.600.000.000,00	-	-	29.600.000.000,00
2	**PERALATAN DAN MESIN**	**2.115.169.411.496,30**	**140.304.677.783,91**	**(41.651.586.437,00)**	**2.213.822.502.843,21**
	Terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	686.062.853.497,19	42.907.119.507,65	(8.529.478.400,00)	720.440.494.604,84
	Dinas Kesehatan	58.699.827.050,60	372.570.699,00	(80.863.200,00)	58.991.534.549,60
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	331.051.512.639,53	46.292.172.145,00	(508.355.954,00)	376.835.328.830,53
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	116.463.863.670,00	16.830.999.800,00	(661.898.000,00)	132.632.965.470,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	30.155.324.458,00	473.225.481,00	(156.700.000,00)	30.471.849.939,00
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	6.120.651.155,00	1.800.833.712,00	(976.826.960,00)	6.944.657.907,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.511.884.483,00	1.402.045.702,00	(1.238.776.018,00)	6.675.154.167,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	9.635.095.435,00	370.483.000,00	(864.193.000,00)	9.141.385.435,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.555.034.289,00	47.663.499,00	(14.679.000,00)	15.588.018.788,00
	Dinas Sosial	4.883.779.575,00	320.889.570,00	(908.251.500,00)	4.296.417.645,00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.211.238.539,00	1.936.491.072,26	(308.167.701,00)	5.839.561.910,26
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.976.713.686,00	1.175.612.290,00	(380.260.720,00)	6.772.065.256,00
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	35.453.856.451,50	891.800.961,00	(613.691.000,00)	35.731.966.412,50
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.325.615.875,76	724.061.210,00	(245.525.980,00)	20.804.151.105,76
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.214.707.007,00	14.576.000,00	(14.576.000,00)	9.214.707.007,00
	Dinas Perhubungan	46.314.050.252,51	519.539.370,00	(141.403.570,00)	46.692.186.052,51
	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.217.615.023,00	801.397.999,00	(478.112.484,00)	22.540.900.538,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.202.708.150,00	70.301.103,00	(28.873.901,00)	5.244.135.352,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.580.327.872,00	3.030.300,00	-	8.583.358.172,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.775.999.553,00	256.355.800,00	(519.370.000,00)	10.512.985.353,00
	Dinas Kebudayaan	10.729.084.113,70	-	(54.620.000,00)	10.674.464.113,70
	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	20.403.870.992,00	77.411.200,00	-	20.481.282.192,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	69.887.986.380,53	1.095.121.851,00	(416.705.969,00)	70.566.402.262,53
	Dinas Pariwisata	5.838.856.913,00	10.065.000,00	(37.053.500,00)	5.811.868.413,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.278.255.064,10	126.491.300,00	(77.285.000,00)	10.327.461.364,10
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.870.079.126,00	1.341.861.429,00	(866.334.000,00)	9.345.606.555,00
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.358.171.355,00	4.390.000,00	(327.690.000,00)	4.034.871.355,00
	Biro Kesejahteraan Rakyat	4.270.671.869,00	60.051.000,00	(506.344.380,00)	3.824.378.489,00
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5.925.732.407,06	21.983.550,00	-	5.947.715.957,06
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	5.026.034.102,00	154.834.500,00	(255.434.500,00)	4.925.434.102,00
	Biro Organisasi	2.284.625.225,00	-	-	2.284.625.225,00
	Biro Administrasi Pimpinan	11.242.699.570,50	20.442.594,00	(829.147.200,00)	10.433.994.964,50
	Biro Umum	292.634.730.416,00	6.838.616.144,00	(16.627.134.760,00)	282.846.211.800,00
	Biro Hukum	2.182.409.807,00	62.472.550,00	-	2.244.882.357,00
	Inspektorat Daerah	12.875.154.194,20	1.477.763.058,00	(262.638.100,00)	14.090.279.152,20
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	26.702.472.886,00	1.347.412.860,00	(1.044.602.520,00)	27.005.283.226,00
	Badan Pendapatan Daerah	55.529.240.819,95	4.334.366.207,00	(695.746.120,00)	59.167.860.906,95
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	8.443.692.873,00	357.276.996,00	-	8.800.969.869,00

No.	Uraian	Sado Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 + 5)
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.479.872.448,67	1.328.177.850,00	-	5.808.050.298,67
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.129.434.752,50	63.825.000,00	(21.990.000,00)	14.171.269.752,50
	Sekretariat DPRD	86.480.456.210,00	3.266.836.625,00	(2.944.337.000,00)	86.802.955.835,00
	Badan Penghubung Daerah	18.089.738.609,00	1.104.108.849,00	(14.520.000,00)	19.179.327.458,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.093.482.700,00	-	-	1.093.482.700,00
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**2.878.738.414.770,81**	**710.030.573.763,21**	**(591.486.480.372,04)**	**2.997.282.508.161,98**
	Terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	1.153.264.923.498,53	76.951.024.300,39	(5.073.776.908,25)	1.225.142.170.890,67
	Dinas Kesehatan	22.637.440.001,52	18.561.207.501,00	(9.221.125.062,37)	31.977.522.440,15
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	270.696.151.212,56	1.907.214.000,00	-	272.603.365.212,56
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	46.978.521.960,00	41.173.095.248,00	(492.201.633,72)	87.659.415.574,28
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	77.059.503.303,36	361.808.620.554,01	(8.285.108.999,68)	430.583.014.857,69
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	569.486.639.076,04	1.516.797.253,00	(553.296.960.290,77)	17.706.476.038,27
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.965.000,00	19.900.000,00	-	109.865.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	5.287.098.342,30	-	-	5.287.098.342,30
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.528.209.223,48	-	-	2.528.209.223,48
	Dinas Sosial	5.116.692.359,00	199.950.000,00	-	5.316.642.359,00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.002.648.000,00	485.305.980,00	-	2.487.953.980,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	624.390.200,00	3.570.314.794,00	(61.000.116,02)	4.133.704.877,98
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	35.183.812.314,51	-	-	35.183.812.314,51
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.267.797.894,00	-	-	3.267.797.894,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
	Dinas Perhubungan	354.092.597.345,67	5.704.627.592,58	(14.224.446.617,95)	345.572.778.320,30
	Dinas Komunikasi dan Informatika	736.923.281,00	-	-	736.923.281,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	49.615.984,00	-	-	49.615.984,00
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	78.416.217,00	-	-	78.416.217,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56.658.605.492,23	-	-	56.658.605.492,23
	Dinas Kebudayaan	60.702.799.231,30	-	-	60.702.799.231,30
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.609.362.017,00	-	-	12.609.362.017,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.696.957.148,94	-	-	49.696.957.148,94
	Dinas Pariwisata	5.004.000.801,00	-	(368.635.600,00)	4.635.365.201,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.557.666.297,10	198.225.143,28	(198.225.143,28)	8.557.666.297,10
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	137.400.000,00	-	-	137.400.000,00
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	373.623.000,00	-	-	373.623.000,00
	Biro Kesejahteraan Rakyat	8.188.125.164,00	106.438.720.446,37	-	114.626.845.610,37
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.510.453.750,00	-	-	2.510.453.750,00
	Biro Administrasi Pimpinan	2.121.021.650,00	-	-	2.121.021.650,00
	Biro Umum	10.743.149.796,63	-	-	10.743.149.796,63
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.463.347.933,71	-	(265.000.000,00)	45.198.347.933,71
	Badan Pendapatan Daerah	41.738.650.488,00	9.560.217.493,65	-	51.298.867.981,65
	Sekretariat DPRD	5.321.872.144,93	81.935.353.456,93	-	87.257.225.601,86
	Badan Penghubung Daerah	19.730.034.643,00	-	-	19.730.034.643,00
4	**JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN**	**4.011.564.533.138,15**	**394.432.001.478,12**	**(293.456.399.635,04)**	**4.112.540.134.981,23**
	terdiri dari				
	Dinas Pendidikan	14.565.741.960,00	2.766.083.236,52	-	17.331.825.196,52
	Dinas Kesehatan	1.021.326.000,01	668.500.000,00	-	1.689.826.000,01
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	12.279.215.917,36	-	-	12.279.215.917,36
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.722.035.500,00	6.191.063.000,00	-	12.913.098.500,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.880.857.753.026,54	353.112.991.689,63	(5.936.456.516,15)	3.228.034.288.200,02
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	285.798.779.445,68	-	(275.461.302.614,68)	10.337.476.831,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.996.000,00	-	-	9.996.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	208.622.000,00	-	-	208.622.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	516.959.431,07	-	-	516.959.431,07
	Dinas Sosial	20.185.000,00	-	-	20.185.000,00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	600.927.000,00	-	-	600.927.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	429.594.968,00	-	-	429.594.968,00
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	25.196.931.434,36	-	-	25.196.931.434,36
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.880.000,00	-	-	99.880.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
	Dinas Perhubungan	285.969.429.494,55	3.016.197.858,76	(6.227.189.226,00)	282.758.438.127,31
	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.453.564.535,00	-	-	7.453.564.535,00

No.	Uraian	Sado Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 + 5)
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	108.334.000,00	-	-	108.334.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	34.007.500,00	8.530.350,00	-	42.537.850,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.242.622.986,00	-	-	1.242.622.986,00
	Dinas Kebudayaan	866.460.646,00	-	-	866.460.646,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	790.008.400,00	-	-	790.008.400,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.453.128.807,57	-	-	9.453.128.807,57
	Dinas Pariwisata	5.351.707.445,00	-	-	5.351.707.445,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	280.346.053.361,30	27.218.946.143,21	(5.831.451.278,21)	301.733.548.226,30
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.283.800,00	-	-	12.283.800,00
	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	39.950.000,00	-	39.950.000,00
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	965.050.893,69	-	-	965.050.893,69
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	7.630.000,00	-	-	7.630.000,00
	Biro Umum	16.957.200.066,00	-	-	16.957.200.066,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	171.687.192.620,02	-	-	171.687.192.620,02
	Badan Pendapatan Daerah	1.358.823.900,00	401.958.200,00	-	1.760.782.100,00
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	19.825.000,00	-	-	19.825.000,00
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	44.858.000,00	-	-	44.858.000,00
	Sekretariat DPRD	556.989.000,00	1.007.781.000,00	-	1.564.770.000,00
	Badan Penghubung Daerah	8.415.000,00	-	-	8.415.000,00
5	**ASET TETAP LAINNYA**	**279.218.737.302,70**	**93.438.344.628,00**	**(71.005.473.685,00)**	**301.651.608.245,70**
	terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	150.262.001.373,79	21.834.707.651,00	(893.563.743,00)	171.203.145.281,79
	Dinas Kesehatan	1.123.552.174,10	-	-	1.123.552.174,10
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	640.455.426,00	-	-	640.455.426,00
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	181.700.600,00	-	-	181.700.600,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.457.907.399,99	70.092.274.942,00	-	76.550.182.341,99
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	70.822.930.854,30	-	(70.092.274.942,00)	730.655.912,30
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	247.771.000,00	-	-	247.771.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
	Dinas Sosial	983.027.000,00	-	-	983.027.000,00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	-
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	863.728.100,00	4.995.000,00	(19.635.000,00)	849.088.100,00
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	943.123.575,00	-	-	943.123.575,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78.580.852,00	-	-	78.580.852,00
	Dinas Perhubungan	359.961.364,00	-	-	359.961.364,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	69.529.600,00	58.340.000,00	-	127.869.600,00
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	650.659.380,00	-	-	650.659.380,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	187.710.000,00	-	-	187.710.000,00
	Dinas Kebudayaan	1.639.204.620,00	124.986.000,00	-	1.764.190.620,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.006.128.274,52	155.946.535,00	-	25.162.074.809,52
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.554.386.800,00	1.167.094.500,00	-	2.721.481.300,00
	Dinas Pariwisata	5.380.164.000,00	-	-	5.380.164.000,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.870.000,00	-	-	12.870.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	710.772.860,00	-	-	710.772.860,00
	Biro Kesejahteraan Rakyat	106.480.000,00	-	-	106.480.000,00
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12.100.000,00	-	-	12.100.000,00
	Biro Organisasi	45.380.000,00	-	-	45.380.000,00
	Biro Umum	7.498.933.579,00	-	-	7.498.933.579,00
	Biro Hukum	248.491.270,00	-	-	248.491.270,00
	Inspektorat Daerah	236.708.000,00	-	-	236.708.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	256.584.900,00	-	-	256.584.900,00
	Badan Pendapatan Daerah	75.639.000,00	-	-	75.639.000,00
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	71.697.600,00	-	-	71.697.600,00
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.500.000,00	-	-	24.500.000,00
	Sekretariat DPRD	1.473.896.900,00	-	-	1.473.896.900,00
	Badan Penghubung Daerah	982.660.800,00	-	-	982.660.800,00
6	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**25.295.808.664,94**	**4.684.758.299,01**	**(975.142.000,00)**	**29.005.424.963,95**
	terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	797.248.726,00	90.576.000,00	-	887.824.726,00
	Dinas Kesehatan	-	-	-	-
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	923.202.500,00	-	-	923.202.500,00
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	34.870.000,00	-	-	34.870.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	13.644.767.774,04	3.582.101.848,48	-	17.226.869.622,52
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	975.142.000,00	-	(975.142.000,00)	-
	Dinas Sosial	29.977.200,00	-	-	29.977.200,00
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	184.467.000,00	-	-	184.467.000,00
	Dinas Perhubungan	4.344.088.844,90	978.264.356,53	-	5.322.353.201,43

No.	Uraian	Sado Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 + 5)
	Dinas Kebudayaan	4.250.805.800,00	-	-	4.250.805.800,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	99.413.820,00	-	-	99.413.820,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.825.000,00	-	-	11.825.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	33.816.094,00	-	33.816.094,00
7	**AKUMULASI PENYUSUTAN**	**(4.549.816.476.728,71)**	**(803.736.623.519,80)**	**409.987.006.328,05**	**(4.943.566.093.920,46)**
	terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	(660.901.939.752,70)	(97.059.353.862,30)	215.964.766,98	(757.745.328.848,02)
	Dinas Kesehatan	(60.056.275.590,84)	(1.522.361.810,96)	2.740.972.432,86	(58.837.664.968,94)
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	(309.317.565.946,97)	(71.194.787.659,63)	-	(380.512.353.606,60)
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	(98.958.493.486,10)	(13.983.932.095,42)	49.300.000,00	(112.893.125.581,52)
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	(1.649.843.758.387,32)	(482.797.933.113,14)	462.991.073,37	(2.132.178.700.427,09)
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(386.361.026.160,92)	(4.497.547.816,33)	374.620.461.783,95	(16.238.112.193,30)
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5.297.244.419,32)	(545.740.906,34)	792.856.629,35	(5.050.128.696,31)
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	(8.229.784.798,01)	(606.342.215,91)	137.888.392,92	(8.698.238.621,00)
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(15.668.859.964,05)	(351.442.417,85)	13.791.259,71	(16.006.511.122,19)
	Dinas Sosial	(4.652.003.173,71)	(419.011.886,33)	481.501.511,32	(4.589.513.548,72)
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(4.345.172.566,14)	(757.439.509,05)	44.146.586,86	(5.058.465.488,33)
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	(6.034.722.561,49)	(492.406.196,60)	381.517.045,29	(6.145.611.712,80)
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	(51.952.605.045,19)	(3.664.523.783,39)	-	(55.617.128.828,58)
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(18.344.600.922,04)	(770.925.833,09)	230.879.821,09	(18.884.646.934,04)
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(8.415.866.641,48)	(399.189.264,39)	47,73	(8.815.055.858,14)
	Dinas Perhubungan	(303.281.724.163,77)	(18.510.804.207,47)	7.321.597.239,79	(314.470.931.131,45)
	Dinas Komunikasi dan Informatika	(23.561.429.665,56)	(1.484.416.824,23)	400.832.493,41	(24.645.013.996,38)
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(4.804.529.527,21)	(213.740.655,23)	2,00	(5.018.270.180,44)
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(7.251.648.759,50)	(472.389.156,14)	451.799,32	(7.723.586.116,32)
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(15.631.684.359,56)	(1.932.667.906,94)	669.076.363,82	(16.895.275.902,68)
	Dinas Kebudayaan	(14.932.116.674,35)	(2.370.679.489,67)	54.620.000,00	(17.248.176.164,02)
	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	(24.895.401.430,42)	(1.196.617.925,54)	4.078.750,51	(26.087.940.605,45)
	Dinas Kelautan dan Perikanan	(69.501.191.611,98)	(4.959.717.535,22)	122.303.533,93	(74.338.605.613,27)
	Dinas Pariwisata	(8.551.367.033,25)	(425.858.415,58)	86.014.973,00	(8.891.210.475,83)
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(87.739.745.370,47)	(8.033.430.658,73)	-	(95.773.176.029,20)
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(7.742.772.204,91)	(615.042.048,12)	859.658.745,84	(7.498.155.507,19)
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(4.126.279.389,67)	(127.021.296,64)	326.600.000,00	(3.926.700.686,31)
	Biro Kesejahteraan Rakyat	(5.386.192.659,43)	(31.341.123.144,51)	471.934.380,00	(36.255.381.423,94)
	Biro Pengadaan Barang/Jasa	(6.519.190.002,56)	(295.389.696,02)	11.717.812,60	(6.802.861.885,98)
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	(4.752.408.303,91)	(286.661.462,66)	251.050.000,00	(4.788.019.766,57)
	Biro Organisasi dan Korpri	(1.874.499.408,33)	(164.712.920,00)	-	(2.039.212.328,33)
	Biro Administrasi Pimpinan	(11.046.729.152,21)	(421.380.540,12)	805.860.400,00	(10.662.249.292,33)
	Biro Umum	(275.684.382.897,05)	(9.189.770.351,78)	14.048.177.068,44	(270.825.976.180,39)
	Biro Hukum	(1.979.979.451,42)	(66.232.101,88)	-	(2.046.211.553,30)
	Inspektorat	(8.945.193.783,22)	(1.493.151.669,41)	258.526.344,14	(10.179.819.108,49)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(205.491.684.952,23)	(3.022.269.183,81)	4.048.744.628,56	(204.465.209.507,48)
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	(55.486.149.519,74)	(9.503.427.052,04)	30.470.458,80	(64.959.106.112,98)
	Badan Kepegawaian dan Korpri	(7.586.085.542,12)	(484.473.130,74)	0,99	(8.070.558.671,87)
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.048.934.769,59)	(727.177.796,31)	-	(2.776.112.565,90)
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(12.053.372.118,61)	(850.341.326,17)	10.078.750,00	(12.893.634.694,78)
	Sekretariat DPRD	(77.869.286.468,22)	(23.444.211.272,37)	16.254.562,50	(101.297.243.178,09)
	Badan Penghubung Daerah	(12.302.579.945,63)	(2.826.328.469,54)	16.686.666,58	(15.112.221.748,59)
	Badan Pengelola Perbatasan	(389.998.147,51)	(214.648.912,20)	2,39	(604.647.057,32)
JUMLAH		**6.039.363.970.380,51**	**566.307.389.232,45**	**(707.315.610.083,24)**	**5.898.355.749.529,72**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	1.279.193.541.736,32	27.153.656.800,00	118.727.534.282,21	1.187.619.664.254,11
2	Peralatan dan Mesin	2.115.169.411.496,30	140.304.677.783,91	41.651.586.437,00	2.213.822.502.843,21
3	Gedung dan Bangunan	2.878.738.414.770,81	710.030.573.763,21	591.486.480.372,04	2.997.282.508.161,98
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.011.564.533.138,15	394.432.001.478,12	293.456.399.635,04	4.112.540.134.981,23
5	Aset Tetap Lainnya	279.218.737.302,70	93.438.344.628,00	71.005.473.685,00	301.651.608.245,70
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.295.808.664,94	4.684.758.299,01	975.142.000,00	29.005.424.963,95
7	Akumulasi Penyusutan	(4.549.816.476.728,71)	(803.736.623.519,80)	(409.987.006.328,05)	(4.943.566.093.920,46)
JUMLAH		**6.039.363.970.380,51**	**566.307.389.232,45**	**707.315.610.083,24**	**5.898.355.749.529,72**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2025

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI /PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan	797.248.726,00		90.576.000,00								887.824.726,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	923.202.500,00										923.202.500,00
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	34.870.000,00										34.870.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	13.644.767.774,04	-	295.916.800,00	3.286.185.048,48	-	-	-	-	-	-	17.226.869.622,52
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	975.142.000,00						295.916.800,00	679.225.200,00			-
6	Dinas Sosial	29.977.200,00										29.977.200,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	184.467.000,00										184.467.000,00
8	Dinas Perhubungan	4.344.088.844,90		978.264.356,53								5.322.353.201,43
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-										-
10	Dinas Kebudayaan	4.250.805.800,00										4.250.805.800,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	99.413.820,00										99.413.820,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.825.000,00										11.825.000,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		-	33.816.094,00								33.816.094,00
JUMLAH		**25.295.808.664,94**	**-**	**1.398.573.250,53**	**3.286.185.048,48**	**-**	**-**	**295.916.800,00**	**679.225.200,00**	**-**	**-**	**29.005.424.963,95**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**	**993.008.950,00**	**-**	**1.000.000,00**	**992.008.950,00**
	terdiri dari :				
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.748.000,00	-	1.000.000,00	9.748.000,00
	Biro Organisasi dan Korpri	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	973.760.950,00	-	-	973.760.950,00
2	**ASET TIDAK BERWUJUD**	**26.348.603.927,06**	**120.660.500,00**	**-**	**26.469.264.427,06**
	Terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	11.932.014.480,00	-	-	11.932.014.480,00
	Dinas Kesehatan	66.000.000,00	-	-	66.000.000,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	5.819.275.000,06	-	-	5.819.275.000,06
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.462.280.900,00	-	-	1.462.280.900,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.452.437.910,00	-	-	2.452.437.910,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	27.900.000,00	-	-	27.900.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	34.650.000,00	-	-	34.650.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	44.000.000,00	-	-	44.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.101.451,00	-	-	15.101.451,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	590.700.000,00	-	-	590.700.000,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.000.000,00	-	-	259.000.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	63.998.500,00	-	-	63.998.500,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43.000.000,00	-	-	43.000.000,00
	Dinas Kebudayaan	35.167.000,00	-	-	35.167.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	795.624.420,00	-	-	795.624.420,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	494.166.000,00	-	-	494.166.000,00
	Dinas Pariwisata	28.160.000,00	-	-	28.160.000,00
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	39.400.000,00	-	-	39.400.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.700.000,00	-	-	8.700.000,00
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	401.788.200,00	-	-	401.788.200,00
	Biro Umum	248.831.000,00	-	-	248.831.000,00
	Biro Hukum	49.324.000,00	-	-	49.324.000,00
	Inspektorat Daerah	350.945.000,00	-	-	350.945.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	386.585.000,00	88.855.500,00	-	475.440.500,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	Badan Pendapatan Daerah	113.141.649,00	31.805.000,00	-	144.946.649,00
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	62.352.711,00	-	-	62.352.711,00
	Sekretariat DPRD	369.782.476,00	-	-	369.782.476,00
	Badan Penghubung Daerah	140.028.230,00	-	-	140.028.230,00
3	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**	**(2.413.781.320,00)**	**-**	**-**	**(2.413.781.320,00)**
	Terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	(1.935.966.000,00)	-		(1.935.966.000,00)
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	(48.000.000,00)	-		(48.000.000,00)
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(14.998.500,00)	-		(14.998.500,00)
	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	(244.999.820,00)	-		(244.999.820,00)
	Sekretariat DPRD	(169.817.000,00)	-		(169.817.000,00)
4	**Aset Lain-lain – Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD**	**276.356.139.582,38**	**136.960.379.101,39**	**137.412.668.661,39**	**275.903.850.022,38**
	Terdiri dari :	-			-
	Dinas Pendidikan	58.707.781.620,89	1.188.654.262,60	901.505.654,00	58.994.930.229,49
	Dinas Kesehatan	6.364.786.737,50	-	-	6.364.786.737,50
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	17.561.084.497,00	-	-	17.561.084.497,00
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	24.607.800.719,00	479.584.000,00	849.149.600,00	24.238.235.119,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	15.258.157.993,00	117.720.396.627,79	-	132.978.554.620,79
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	118.851.487.006,39	-	118.851.487.006,39	-
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	456.717.868,00	596.776.018,00	1.049.193.886,00	4.300.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	47.625.000,00	-	-	47.625.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	240.461.796,00	-	-	240.461.796,00
	Dinas Sosial	-	313.488.000,00	313.488.000,00	-
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.865.794.702,00	843.941.770,00	-	2.709.736.472,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	420.078.360,00	420.078.360,00	-
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.224.178.000,00	-	-	2.224.178.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31.207.820,00	200.991.500,00	30.849.000,00	201.350.320,00
	Dinas Perhubungan	6.445.226.750,00	-	2.443.190.550,00	4.002.036.200,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.944.000,00	387.747.484,00	394.691.484,00	-
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.701.225.241,00	500.000.000,00	-	3.201.225.241,00
	Dinas Kebudayaan	-	54.620.000,00	54.620.000,00	-
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.442.800,00	-	-	49.442.800,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.712.612.472,70	-	467.342.500,00	6.245.269.972,70
	Dinas Pariwisata	1.767.715.600,20	-	-	1.767.715.600,20
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.554.838.500,00	-	-	4.554.838.500,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80.557.200,00	859.659.000,00	859.659.000,00	80.557.200,00
	Biro Kesejahteraan Rakyat	270.755.520,00	-	-	270.755.520,00
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.126.149.799,70	-	-	1.126.149.799,70
	Biro Administrasi Pimpinan	725.124.200,00	732.349.200,00	732.349.200,00	725.124.200,00
	Biro Umum	2.979.218.919,00	11.385.118.549,00	7.939.441.091,00	6.424.896.377,00
	Inspektorat Daerah	25.500.000,00	258.038.100,00	273.538.100,00	10.000.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	764.060.000,00	1.018.936.230,00	1.760.996.230,00	22.000.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	49.123.000,00	-	-	49.123.000,00
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.761.058.820,00	-	-	1.761.058.820,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.240.000,00	-	-	6.240.000,00
	Sekretariat DPRD	113.263.000,00	-	71.089.000,00	42.174.000,00
5	**AAkumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD**	**(41.286.530.988,55)**	**(16.627.995.902,34)**	**(13.517.912.277,34)**	**(44.396.614.613,55)**
	Terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	(93.648.822,00)	215.964.766,98	215.964.766,98	(93.648.822,00)
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	(17.561.084.497,00)	-	-	(17.561.084.497,00)
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	(14.044.474.579,00)	-	(344.893.600,00)	(13.699.580.979,00)
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	(495.090.406,00)	-	-	(495.090.406,00)
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	(170.105.644,00)	-	(170.105.644,00)	-
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	(596.776.002,00)	(596.776.002,00)	-
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(84.963.184,00)	-	-	(84.963.184,00)
	Dinas Sosial	-	(313.488.000,00)	(313.488.000,00)	-
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	(1.755.663.537,00)	(170.105.644,00)	-	(1.925.769.181,00)
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	(377.926.349,81)	(377.926.349,81)	-
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	(200.991.500,00)	(30.849.000,00)	(170.142.500,00)
	Dinas Perhubungan	(598.560.029,00)	-	(545.730.515,00)	(52.829.514,00)
	Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.577.218,00)	(387.747.484,00)	(392.324.702,00)	-
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(302.579.978,00)	(500.000.000,00)	-	(802.579.978,00)
	Dinas Kebudayaan	-	(54.620.000,00)	(54.620.000,00)	-
	Dinas Kelautan dan Perikanan	(112.941.104,65)	-	-	(112.941.104,65)
	Dinas Pariwisata	(189.620.887,20)	-	-	(189.620.887,20)
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	(859.658.745,84)	(859.658.745,84)	-
	Biro Kesejahteraan Rakyat	(270.755.520,00)	-	-	(270.755.520,00)
	Biro Perekonomian dan Pembangunan	(1.100.817.845,70)	-	-	(1.100.817.845,70)
	Biro Administrasi Pimpinan	(528.458.032,00)	(721.107.400,00)	(721.107.400,00)	(528.458.032,00)
	Biro Umum	(1.394.010.259,00)	(11.385.118.549,00)	(7.330.932.091,00)	(5.448.196.717,00)
	Inspektorat Daerah	-	(257.484.794,67)	(257.484.794,67)	-
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(669.955.000,00)	(1.018.936.200,00)	(1.666.891.200,00)	(22.000.000,00)
	Badan Pendapatan Daerah	(48.871.000,00)	-	-	(48.871.000,00)
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	(1.761.058.820,00)	-	-	(1.761.058.820,00)
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(6.240.000,00)	-	-	(6.240.000,00)
	Sekretariat DPRD	(93.054.626,00)	-	(71.089.000,00)	(21.965.626,00)
					-
6	**Aset Lainnya - Kas yang Dibatasi Penggunaannya**	**196.353.186.257,62**	**7.189.975.089,64**	**5.331.519.195,80**	**198.211.642.151,46**
	Terdiri dari :	-			-
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	196.353.186.257,62	7.189.975.089,64	5.331.519.195,80	198.211.642.151,46
7	**ASET LAIN-LAINNYA**	**85.491.736.980,53**	**183.029.975,50**	**5.249.260.257,39**	**80.425.506.698,64**
	Terdiri dari :				
	Dinas Pendidikan	51.787.557.293,60	134.497.622,00	344.371.168,00	51.577.683.747,60
	Dinas Kesehatan	31.875.700,00	13.494.600,00	31.875.700,00	13.494.600,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	10.675.000,00	-	10.675.000,00	-
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	658.871.262,89	-	-	658.871.262,89
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	26.317.611.170,23	-	1.091.216.111,67	25.226.395.058,56
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	3.071.537.104,09	9.362.514,00	232.255.828,00	2.848.643.790,09

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.807.400,00		10.807.400,00	-
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	-	719.650,00		719.650,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.133.000,00	-	1.133.000,00	-
	Dinas Sosial	2.740.700,00	-	2.740.700,00	-
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.561.000,00	-	1.561.000,00	-
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	740.000,00	-	740.000,00	-
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	55.520.329,72	2.368.800,00	55.520.329,72	2.368.800,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	503.000,00	-	503.000,00	-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.178.083,00	-	3.178.083,00	-
	Dinas Perhubungan	66.960.000,00	-	66.960.000,00	-
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.480.000,00	-	1.480.000,00	-
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	346.500,00	-	346.500,00	-
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.162.900,00	-	3.162.900,00	-
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.577.900,00	-	14.577.900,00	-
	Dinas Kebudayaan	2.068.600,00	-	2.068.600,00	-
	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	2.936.300,00	-	2.936.300,00	-
	Dinas Kelautan dan Perikanan	72.245.334,00	15.691.880,00	72.245.334,00	15.691.880,00
	Dinas Pariwisata	2.269.500,00	-	2.269.500,00	-
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	84.890.758,00	-	10.147.758,00	74.743.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	740.000,00	-	740.000,00	-
	Biro Kesejahteraan Rakyat	3.435.500,00	-	3.435.500,00	-
	Biro Organisasi	4.358.585,00	-	4.358.585,00	-
	Biro Administrasi Pimpinan	1.480.000,00	-	1.480.000,00	-
	Biro Umum	-	3.128.640,00	-	3.128.640,00
	Biro Hukum	769.500,00	-	769.500,00	-
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.138.890.000,00	3.766.269,50	3.138.890.000,00	3.766.269,50
	Badan Pendapatan Daerah	2.797.648,00	-	2.797.648,00	-
	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	370.000,00	-	370.000,00	-
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.577.420,00	-	2.577.420,00	-
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.735.678,00	-	6.735.678,00	-
	Sekretariat DPRD	90.861.645,00	-	90.861.645,00	-
	Badan Penghubung Daerah	7.161.800,00	-	7.161.800,00	-
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	26.310.369,00	-	26.310.369,00	-
		-			-
JUMLAH		**541.842.363.389,04**	**127.826.048.764,19**	**134.476.535.837,24**	**535.191.876.315,99**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								-
2			NIHIL					
3								
Jumlah								

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	14.391.867,00	144.172.310,00	14.391.867,00	144.172.310,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	1.270.103.058,34	0,00	1.270.103.058,34
3	Utang Belanja	451.420.582.417,31	187.728.336.358,39	433.974.963.271,70	205.173.955.504,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.466.450.196,50	1.054.320.894,87	81.797.436,00	4.438.973.655,37
	JUMLAH	**454.901.424.480,81**	**190.196.932.621,60**	**434.071.152.574,70**	**211.027.204.527,71**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

PER 31 DESEMBER 2025

No.	Uraian	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Kepada Pemerintah Pusat	196.353.186.257,62	7.189.975.089,64	5.331.519.195,80	198.211.642.151,46
JUMLAH		**196.353.186.257,62**	**7.189.975.089,64**	**5.331.519.195,80**	**198.211.642.151,46**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2025
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD	DASAR HUKUM
			ANGGARAN**)	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH			-	-	-		-	

NIHIL

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

LAMPIRAN XX.1

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5+6+7)	9	10	11 = (9 + 10)	12	13	14	15	16	17	18	19 = (17 x 18)
1	**Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri**	APBD		3.352.588.210,00	14.111.840.782,00	0,00	17.464.428.992,00	5.167.251.343,00	9.432.585.848,00	14.599.837.191,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(11.135.408.200,00)	2.864.591.800,00	100%	2.864.591.800,00
2	**Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri**	APBD		19.137.371.408,00	69.969.960.287,00	296.710.450,00	89.404.042.145,00	1.005.120.738,00	5.275.973.672,00	6.281.094.410,00	121.303.871.063,00	0,00	0,00	0,00	(38.180.923.327,00)	83.122.947.736,00	100%	83.122.947.736,00
3	**Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan**	APBD		16.795.260.615,00	18.382.529.074,00	1.326.831.000,00	36.504.620.689,00	14.111.504,00	500.000.000,00	514.111.504,00	48.328.490.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.017.448.280,00)	33.311.041.720,00	100%	33.311.041.720,00
4	**PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Svariah**	APBD		30.012.611.711.432,00	362.307.675.337,00	725.226.572.585,00	31.100.145.959.354,00	27.713.424.769.041,00	0,00	27.713.424.769.041,00	1.209.260.700.000,00	2.084.940.000,00	0,00	(22.731.754.048,00)	2.198.107.304.361,00	3.386.721.190.313,00	0,99%	12.000.000.000,00
5	**PT. Energi Kepri (PERSERODA)**	APBD		4.787.699.024,00	0,00	0,00	4.787.699.024,00	108.363.772,00	0,00	108.363.772,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(320.664.748,00)	4.679.335.252,00	100%	4.679.335.252,00
TOTAL				**30.056.684.630.689,00**	**464.772.005.480,00**	**726.850.114.035,00**	**31.248.306.750.204,00**	**27.719.719.616.398,00**	**15.208.559.520,00**	**27.734.928.175.918,00**	**1.397.893.061.063,00**	**2.084.940.000,00**	**0,00**	**(22.731.754.048,00)**	**2.133.452.859.806,00**	**3.510.699.106.821,00**		**135.977.916.508,00**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/ RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

LAMPIRAN XX.2

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri	APBD		(60.524.320,00)	839.933.173,00	(900.457.493,00)	1.223.537.316,00	0,00	323.079.823,00
2.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri	APBD		36.784.833.837,00	38.891.237.737,00	(2.106.403.900,00)	163.771.346,00	74.463.264,00	(2.017.095.818,00)
3.	Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Kepri	APBD		2.376.831.665,00	4.574.720.391,00	(2.197.888.726,00)	432.079.158,00	99.156.599,00	(1.864.966.167,00)
4.	PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (PERSERODA)	APBD		2.497.350.219.412,00	983.292.429.129,00	1.514.057.790.283,00	118.041.949.591,00	1.262.586.359.462,00	369.513.380.412,00
5.	PT. Energi Kepri (PERSERODA)	APBD		0,00	0,00	0,00	1.722.395,00	322.387.143,00	(320.664.748,00)
TOTAL				**2.536.451.360.594,00**	**1.027.598.320.430,00**	**1.508.853.040.164,00**	**119.863.059.806,00**	**1.263.082.366.468,00**	**365.633.733.502,00**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto.

ANSAR AHMAD